



RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014



BUKU I: TEMA, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO

DAFTAR ISI



DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 TUJUAN..... | 1 |
| 1.2 SISTEMATIKA | 2 |
| BAB 2 KONDISI UMUM..... | 5 |
| 2.1 TINJAUAN PARUH WAKTU RPJMN 2010-2014 | 5 |
| 2.2 PEREKONOMIAN NASIONAL..... | 9 |
| 2.3 STABILITAS POLITIK | 24 |
| 2.4 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA | 28 |
| 2.5 KESEJAHTERAAN RAKYAT | 31 |
| 2.6 PENANGGULANGAN KEMISKINAN | 37 |
| 2.7 LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA..... | 42 |
| 2.8 DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK..... | 47 |
| 2.9 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT..... | 51 |
| 2.10 MASTERPLAN PERCEPATAN PERLU-ASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) | 54 |
| 2.11 MASALAH DAN TANTANGAN | 57 |
| 2.12 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) | 82 |
| 2.13 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI)..... | 82 |
| BAB 3 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014..... | 83 |
| 3.1 GAMBARAN UMUM..... | 83 |
| 3.2 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2014 | 95 |
| BAB 4 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL | 101 |
| 4.1 ARAHAN PEMBANGUNAN..... | 101 |
| 4.2 TEMA PEMBANGUNAN | 102 |
| 4.3 ISU STRATEGIS..... | 104 |
| 4.4 ARAHAN PRESIDEN | 104 |
| 4.5 TINJAUAN PARUH WAKTU RPJMN 2010-2014..... | 108 |
| BAB 5 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL..... | 115 |
| 5.2 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI) | 141 |
| 5.3 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI)..... | 141 |
| 5.4 ARAH PEMBANGUNAN BIDANG, PENGARUSUTAMAAN, DAN LINTAS BIDANG | 145 |
| 5.5 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN..... | 146 |
| BAB 6 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN..... | 149 |
| 6.1 KEUANGAN NEGARA DAN ARAH KEBIJAKAN FISKAL | 149 |
| 6.2 KEBIJAKAN TRANSFER KE DAERAH | 149 |
| BAB 7 PENUTUP..... | 173 |

| | | |
|-----|--------------------------|-----|
| 7.1 | KAJIDAH PELAKSANAAN..... | 173 |
| 7.2 | TINDAK LANJUT | 175 |

LAMPIRAN I MATRIKS PRIORITAS NASIONAL

LAMPIRAN II DAFTAR KEBUTUHAN PRIORITAS KEMENTERIAN/ LEMBAGA

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|-----|
| TABEL 2.1 | PENCAPAIAN SASARAN UTAMA RPJMN 2010-2014 | 5 |
| TABEL 2.2 | PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN..... | 10 |
| TABEL 2.3 | PEMBANGUNAN ENERGI..... | 13 |
| TABEL 2.4 | PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR..... | 14 |
| TABEL 2.5 | PEMBANGUNAN IKLIM INVESTASI IKLIM USAHA..... | 19 |
| TABEL 2.6 | PEMBANGUNAN HUKUM..... | 25 |
| TABEL 2.7 | PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN..... | 27 |
| TABEL 2.8 | REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA | 29 |
| TABEL 2.9 | PEMBANGUNAN PENDIDIKAN..... | 31 |
| TABEL 2.10 | PEMBANGUNAN KESEHATAN | 34 |
| TABEL 2.11 | PENANGGULANGAN KEMISKINAN..... | 38 |
| TABEL 2.12 | TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PKH TAHUN 2007-2013 | 39 |
| TABEL 2.13 | LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA | 44 |
| TABEL 2.14 | PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASKA KONFLIK..... | 47 |
| TABEL 2.15 | PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT LAINNYA..... | 51 |
| TABEL 2.16 | KEGIATAN MP3EI YANG DIRENCANAKAN <i>GROUND BREAKING</i> (GB) TAHUN 2013..... | 56 |
| TABEL 2.17 | PERAN DAN PERTUMBUHAN EKSPOR INTRA KAWASAN ASEAN | 67 |
| TABEL 2.18 | STATUS KEMAJUAN PENYEMPURNAAN REGULASI UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN MP3EI..... | 82 |
| TABEL 3.1 | PERKEMBANGAN DAN SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2013 – 2014..... | 99 |
| TABEL 3.2 | PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2013 – 2014 (USD MILIAR)..... | 100 |
| TABEL 5.1 | SASARAN PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA..... | 116 |
| TABEL 6.1 | BIDANG DAK TAHUN 2014 | 155 |

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB 1

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah. Pembangunan tahun 2014 berada pada tahap jangka menengah yang kedua yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 dengan visi INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN.

Sebagai penjabaran terakhir dari RPJMN 2010-2014, RKP 2014 memiliki arti yang penting dalam menuntaskan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan Kabinet Indonesia Bersatu yang Kedua. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP Tahun 2014 disusun berdasarkan arahan visioner Presiden di berbagai kesempatan, perubahan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, serta program-program pembangunan yang pencapaian sarannya membutuhkan kerja keras. Sesuai dengan berbagai arahan tersebut dirumuskan tema pembangunan tahun 2014 yang penjabarannya dituangkan dalam berbagai prakarsa untuk menjawab isu strategis pembangunan nasional.

Selanjutnya, kebijakan pembangunan yang digariskan dalam RKP 2014 dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu pertama, yang diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran prioritas pembangunan nasional, kedua untuk memperkuat pembangunan di berbagai bidang pembangunan, serta ketiga untuk memperkokoh kesatuan wilayah pembangunan seluruh Indonesia.

1.1 TUJUAN

RKP Tahun 2014 disusun agar menjadi pedoman bagi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2014, di mana kebijakan APBN ditetapkan secara bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di samping itu, RKP Tahun 2014 juga disusun agar menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat/Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2 SISTEMATIKA

RKP 2014 terdiri atas 3 (tiga) buku yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan masing-masing memuat hal-hal sebagai berikut:

- Buku I memuat Tema Pembangunan Tahun 2014 dan Prioritas Nasional yang terdiri dari 11 (sebelas) Prioritas Nasional dan 3 (tiga) Prioritas Nasional Lainnya dari RPJMN 2010-2014 serta Isu Strategis menuju terwujudnya Visi, Misi dari Presiden-Wakil Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.
- Buku II memuat rencana pembangunan di semua bidang-bidang pembangunan nasional sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN 2005—2025 dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2014 yang tercantum dalam Buku I.
- Buku III memuat rencana pembangunan kewilayahan dalam rangka mewujudkan sasaran RKP 2014 yang tercantum dalam Buku I.

Dalam rangka menjabarkan Tema Pembangunan ke dalam rencana aksi berupa program dan kegiatan yang menjadi Prioritas Nasional tahun 2014, Buku I ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB 1 PENDAHULUAN**
1.1 Pengantar
1.2 Tujuan
1.3 Sistematika
- BAB 2 KONDISI UMUM**
2.1 Tinjauan Paruh Waktu RPJMN 2010-2014 dan Perkiraan Tahun 2013
2.1 Masalah dan Tantangan
- BAB 3 KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014**
3.1 Gambaran Umum
3.2 Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2014
- BAB 4 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL**
4.1 Arah Pembangunan
4.2 Tema Pembangunan
4.3 Isu Strategis
- BAB 5 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL**
5.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2014
5.2 Arah Pembangunan Bidang, Pengarusutamaan, dan Lintas Bidang
5.3 Arah Pembangunan Kewilayahan
- BAB 6 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**
6.1 Keuangan Negara
6.2 Kebijakan Fiskal
6.3 Kebijakan Transfer Ke Daerah
- BAB 7 PENUTUP**
7.1 Kaidah Pelaksanaan
7.2 Tindak Lanjut

Bagian terakhir dari Buku I RKP 2014 memuat Rencana Aksi untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan untuk masing-masing prioritas nasional.

BAB 2

KONDISI UMUM



BAB 2 KONDISI UMUM

2.1 TINJAUAN PARUH WAKTU RPJMN 2010-2014

Visi Indonesia 2014 yang digariskan dalam RPJMN 2010-2014 adalah “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan” yang dijabarkan ke dalam 5 (lima) agenda pembangunan yaitu: (1) Pembangunan ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat; (2) Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan; (3) Penegakan Pilar Demokrasi; (4) Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; dan (5) Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan. Sedangkan sasaran utama RPJMN 2010-2014 dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: (1) Sasaran Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan; (2) Sasaran Perkuatan Demokrasi; dan (3) Sasaran Penegakan Hukum.

Pencapaian sasaran pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat ditunjukkan oleh indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan kemiskinan. Sedangkan sasaran pembangunan politik ditunjukkan oleh perkuatan demokrasi ditunjukkan oleh Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), serta sasaran penegakan hukum ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK). Hasil tinjauan paruh waktu RPJMN ditunjukkan dalam Tabel 2.1.

TABEL 2.1
PENCAPAIAN SASARAN UTAMA RPJMN 2010-2013

| No | Sasaran Utama | 2010 | | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|--|----------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|------------|
| | | Target RPJMN | Realisasi | Target RPJMN | Realisasi | Target RPJMN | Realisasi | Target RPJMN | APBN 2013 |
| Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan | | | | | | | | | |
| 1 | Pertumbuhan Ekonomi (%) | 5,5- 5,6 | 6,2 | 6,0 - 6,3 | 6,5 | 6,4 - 6,9 | 6,2 | 6,7 - 7,4 | 6,8 |
| 2 | Inflasi (%) | 4 - 6 | 7,0 | 4,0 - 6,0 | 3,8 | 4,0 - 6,0 | 4,3 | 3,5 - 5,5 | 4,9 |
| 3 | Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | 7,6 | 7,1 | 7,3 - 7,4 | 6,6 | 6,7 - 7,0 | 6,1 (Agt) | 6,0 - 6,6 | 5,8 - 6,1 |
| 4 | Tingkat Kemiskinan (%) | 12,0 - 13,5 | 13,3 | 11,5 - 12,5 | 12,5 | 10,5 - 11,5 | 11,7 (Sept) | 9,5 - 10,5 | 9,5 - 10,5 |
| Perkuatan Demokrasi | | | | | | | | | |
| 5 | Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) | n.a. | 63,2 | n.a. | 70,0 | n.a. | - | n.a. | - |
| Penegakan Hukum | | | | | | | | | |
| 6 | Indeks Persepsi Korupsi (IPK) | n.a. | 2,8 (0-10) | n.a. | 3,0 (0-10) | n.a. | 32 (0-100) | n.a. | - |

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang berat dengan adanya ketidakpastian penyelesaian krisis keuangan Eropa, masih lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat, serta gejolak harga

komoditi dunia terutama minyak mentah dunia. Namun demikian, ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga yang tercermin dari pertumbuhan yang tinggi serta stabilitas ekonomi yang terjaga. Pada tahun 2013, ketidakpastian kondisi ekonomi dunia diperkirakan masih berlanjut namun dengan tekanan yang lebih ringan. Namun demikian kondisi perekonomian dalam negeri menghadapi tantangan yang lebih berat dimana tekanan terhadap inflasi dan fiskal meningkat.

Momentum pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tetap terjaga. Perekonomian Indonesia dapat tumbuh sebesar 6,2 persen pada tahun 2010, 6,5 persen pada tahun 2011, dan 6,2 persen pada tahun 2012. Secara rata-rata, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,3 persen selama tiga tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2010 – 2014. Pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut terutama ditopang oleh ketahanan ekonomi domestik yang digambarkan oleh peningkatan investasi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2013, perekonomian Indonesia diupayakan untuk dapat tetap tumbuh diatas 6 persen dengan ketahanan domestik yang terjaga di tengah risiko eksternal yang masih berlanjut dan meningkatnya tantangan internal.

2.1.2.1 Stabilitas Ekonomi

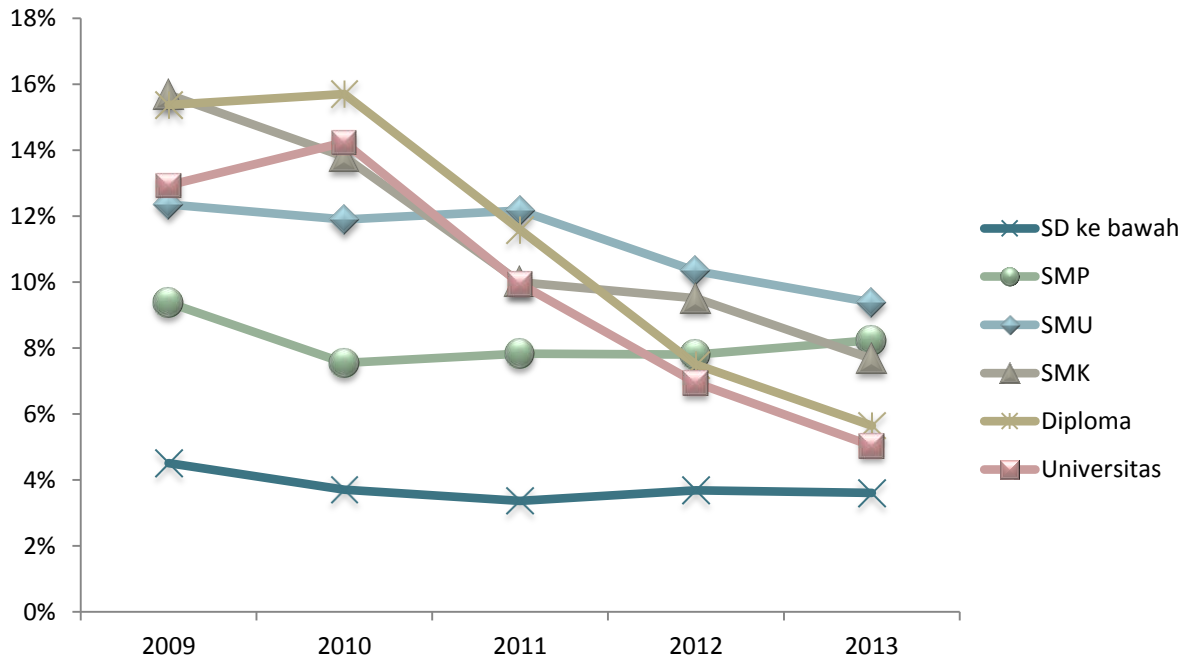
Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 masih terjaga ditengah tekanan ekonomi dunia. Pada tahun 2010, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS menguat, namun kembali melemah hingga tahun 2012. Meskipun demikian, gejolak nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS masih terkendali dengan rata-rata bulanan selama periode tahun 2010 sampai tahun 2012 sebesar Rp9.252 per dolar AS, atau menguat 2,2 persen dibandingkan rata-rata bulanan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS pada awal tahun 2010. Cadangan devisa Indonesia meningkat dari USD96,2 miliar pada tahun 2010, menjadi USD110,1 miliar pada tahun 2011, dan mencapai USD112,8 miliar pada tahun 2012. Laju inflasi periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terkendali di bawah dua digit. Laju inflasi mencapai 7,0 persen pada tahun 2010 yang didorong oleh peningkatan harga komoditi beras dunia serta kenaikan tarif listrik. Pada tahun 2011 dan tahun 2012, laju inflasi dapat terkendali di bawah 5,0 persen. Pada tahun 2013 ditengah meningkatnya tantangan internal dari sisi fiskal dan inflasi stabilitas ekonomi nasional diupayakan tetap terjaga.

2.1.2.2 Pengangguran

Pasar tenaga kerja mengalami kemajuan yang berarti, dari tahun ke tahun, dan angka pengangguran dapat diturunkan ke tingkat 5,9 persen pada Februari 2013. Perkembangan ini membawa perubahan yang positif oleh meningkatnya 3 indikator penting dalam pasar tenaga kerja. Pertama, meningkatnya rasio kesempatan kerja terhadap angkatan kerja, baik pekerja usia muda dan pekerja di perkotaan dan perdesaan secara merata. Kedua, meningkatnya struktur pekerja di sektor formal dan menurunnya tenaga kerja sektor informal. Ketiga, perkembangan upah dan produktivitas yang membaik. Indikator lainnya yang membaik adalah menurunnya

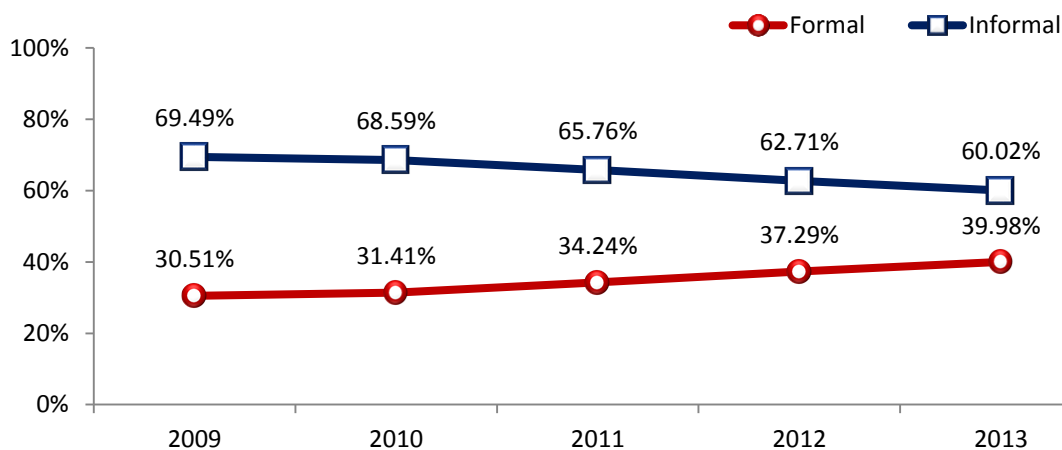
tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun tingkat pendidikan, khususnya pendidikan SMA ke atas, sehingga jumlah penganggur di semua tingkatan pendidikan menurun, kecuali SMP.

GAMBAR 2.1
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA MENURUT PENDIDIKAN



Struktur lapangan kerja formal dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan yang berarti antara tahun 2010-2013. Pekerja formal meningkat dari 31,4 persen menjadi 40,0 persen. Sebaliknya pekerja informal menurun dari 68,6 persen menjadi 60,0 persen. Peningkatan tersebut, diikuti dengan perubahan struktur pekerja non-pertanian dari 61,8 persen tahun 2011 menjadi 65,0 persen tahun 2013. Struktur pekerja di sektor industri mengalami perubahan meskipun relatif kecil, dari 12,3 persen meningkat menjadi 13,0 persen. Struktur pekerja di sektor jasa meningkat dari 42,5 persen tahun 2002 menjadi 52,0 persen tahun 2013.

GAMBAR 2.2
STRUKTUR PEKERJA FORMAL DAN INFORMAL

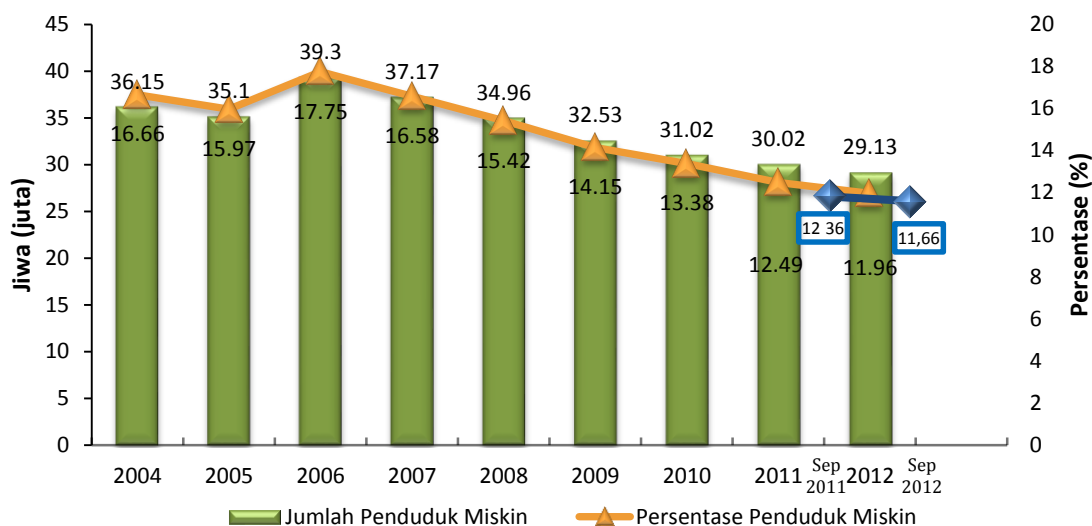


Perkembangan yang membaik ini diikuti pula oleh meningkatnya upah nominal pekerja dari tahun ke tahun. Upah pekerja di sektor industri, seperti industri tekstil dan makanan/minuman sudah di atas upah minimum. Pada tahun 2012, upah rata-rata pekerja di industri tekstil sebesar Rp1,285 juta dan upah minimum provinsi rata-rata sekitar Rp1,119 juta. Namun demikian, dengan kenaikan upah minimum yang relatif besar di beberapa provinsi pada tahun 2013, dikhawatirkan akan membawa dampak terhadap kinerja pasar tenaga kerja. Dengan demikian, tantangan yang akan dihadapi adalah menjaga peluang momentum pertumbuhan ekonomi, untuk dimanfaatkan dalam menciptakan kesempatan kerja, menjaga mereka yang sudah bekerja agar tetap memperoleh pekerjaan, sehingga angka pengangguran dapat terus diturunkan.

2.1.2.3 Kemiskinan

Tingkat kemiskinan nasional telah berhasil diturunkan menjadi 12,0 persen pada bulan Maret 2012 dan menjadi 11,7 persen pada September 2012 dibandingkan 12,5 persen pada bulan Maret 2011. Namun demikian, penurunan tingkat kemiskinan tersebut mengalami pelambatan dalam tiga tahun terakhir. Selama tiga tahun terakhir, penurunan kemiskinan tidak lebih dari 1 juta penduduk miskin terangkat dari kategori miskin setiap tahunnya. Salah satu faktor penentu adalah rentannya penduduk miskin terhadap kondisi ekonomi baik nasional maupun ekonomi global. Selain itu, berbagai program penanggulangan kemiskinan pemerintah yang telah dilaksanakan dalam bentuk empat kelompok program (klaster) ternyata masih belum mampu mempercepat laju penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan. Penanggulangan kemiskinan akan diperkuat melalui strategi pengembangan penghidupan yang berkelanjutan bagi penduduk miskin, selain juga meningkatkan koordinasi pelaksanaan program tersebut yang banyak bersifat lintas sektor.

GAMBAR 2.3
TINGKAT KEMISKINAN INDONESIA TAHUN 2004-2012



Sumber: BPS, berbagai tahun (diolah),
Catatan: angka dari Maret ke Maret kecuali disebutkan lain

2.1.2.4 Demokrasi dan Hukum

Perkuatan pilar demokrasi juga menunjukkan perbaikan dengan meningkatnya IDI dari 63,17 pada tahun 2010 menjadi 70,00 pada tahun 2011. Untuk mencapai target RPJMN yakni rerata IDI sebesar 70, dibutuhkan kerja keras semua komponen bangsa. Sedangkan pencapaian penegakan hukum, IPK telah meningkat dari 2,8 (skala 0-10) pada tahun 2010 menjadi 32 (skala 0-100) pada tahun 2012. Walau demikian sasaran RPJMN sebesar 5,0 (skala 0-10) diperkirakan sulit tercapai.

Selanjutnya hasil tinjauan paruh waktu RPJMN 2010-2014 akan diuraikan menurut prioritas nasional yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian sesuai dengan konfigurasi Kabinet Indonesia Bersatu yang Kedua, yaitu: (1) Perekonomian Nasional; (2) Politik, Hukum, dan Keamanan; dan (3) Kesejahteraan Rakyat.

2.2 Perekonomian Nasional

Kinerja perekonomian nasional di luar pertumbuhan dan stabilitas ekonomi makro yang diuraikan pada bagian berikut ini mencakup capaian prioritas nasional ketahanan pangan, energi, infrastruktur, iklim usaha dan investasi, kreativitas dan inovasi teknologi serta kegiatan prioritas lainnya di bidang perekonomian.

2.2.1 Ketahanan Pangan

Kinerja ketahanan pangan di Indonesia pada tahun 2012 menunjukkan adanya peningkatan produksi pada beberapa komoditas pangan utama, namun demikian belum dapat mewujudkan ketahanan pangan yang mantap. Dari tahun 2010 hingga 2012, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh dengan rata-rata 3,3 persen per tahun, atau masih di bawah target RPJMN 2010-2014 yang besarnya 3,7-3,9 persen per tahun. Uraian

lebih rinci, capaian pembangunan ketahanan pangan ditunjukkan dalam Tabel 2.2.

TABEL 2.2
PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN

| SASARAN | INDIKATOR (%) | BASELINE | REALISASI | | |
|---------------------------------------|--|----------|-----------|---------|---------|
| | | (2009) | 2010 | 2011 | 2012 |
| Pertumbuhan Pertanian | PDB Pertanian | 4,0 | 3,0 | 3,4 | 4,0 |
| Peningkatan Produksi Pangan Utama | Padi | 6,8 | 3,2 | - 1,1 | 5,0 |
| | Jagung | 8,0 | 4,0 | - 3,7 | 9,8 |
| | Kedelai | 25,6 | - 6,9 | - 6,2 | 0,0 |
| | Gula | - 2,9 | 7,0 | - 17,3 | 16,75 |
| | Daging Sapi | 16,2 | 6,7 | 11,2 | 4,2 |
| | Perikanan | 10,8 | 18,8 | 6,2 | 11,8 |
| Kesejahteraan Petani Sawah Beririgasi | Nilai Tukar Petani | 101,2 | 102,8 | 105,8 | 105,9 |
| | Luas Layanan Jaringan Irigasi yang Direhabilitasi (ha) | 623.909 | 293.044 | 284.137 | 589,443 |

Sumber BPS, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementrian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan 2012

Dari sisi penyediaan pangan, produksi padi yang merupakan bahan pangan utama di Indonesia, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 5,0 persen, yaitu dari 65,8 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2011 menjadi 69,1 juta ton GKG pada tahun 2012 (BPS Angka Sementara, 2012). Hal ini mendorong tercapainya surplus beras nasional pada tahun 2012 sebesar 5,7 juta ton. Rata-rata pertumbuhan produksi padi per tahun selama periode 2010-2012 adalah sebesar 2,4 persen, masih di bawah target untuk mencapai surplus beras 10 juta ton sebesar 3,6 persen per tahun. Untuk tahun 2013, produksi padi ditargetkan mengalami meningkat sebesar 6,3 persen dibandingkan tahun 2012.

Seperti halnya komoditas padi, pada tahun 2012 komoditas jagung juga mengalami peningkatan produksi, yaitu sebesar 9,8 persen, dari 17,6 juta ton di tahun 2011 menjadi 19,4 juta ton di tahun 2012 (BPS Angka Sementara, 2012). Dengan demikian, rata-rata pertumbuhan produksi jagung selama periode 2010-2012 adalah sebesar 3,4 persen per tahun, masih lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMN 2010-2014 sebesar 10,0 persen per tahun. Pertumbuhan produksi jagung di tahun 2013 ditargetkan mencapai 8,3 persen.

Komoditas kedelai pada tahun 2012 juga mengalami peningkatan produksi, yaitu dari 851,3 ribu ton di tahun 2011 menjadi 851,7 ribu ton di tahun 2012, atau mengalami peningkatan sebesar 0,04 persen (BPS Angka Sementara, 2012). Rata-rata pertumbuhan produksi kedelai selama periode 2010-2012 adalah sebesar -4,3 persen per tahun, lebih rendah dibandingkan target RPJMN 2010-2014 sebesar 20,0 persen. Untuk tahun 2013, produksi kedelai ditargetkan dapat mengalami pertumbuhan sebesar 18,4 persen.

Peningkatan produksi juga dialami oleh komoditas gula. Pada tahun 2012, produksi gula mengalami peningkatan sebesar 15,9 persen

dibanding tahun 2011 (Dirjen Perkebunan, Kementan, 2013). Selama periode 2010-2012 produksi gula mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 0,3 persen, masih di bawah target pertumbuhan produksi yang tertuang di dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 12,6 persen. Pada tahun 2013, pertumbuhan produksi gula ditargetkan mampu mencapai 9,2 persen.

Sama halnya dengan komoditas utama pertanian lainnya, komoditas daging juga menunjukkan peningkatan produksi di tahun 2012, yaitu sebesar 11,0 persen, dari 0,47 juta ton di tahun 2011 menjadi 0,52 juta ton di tahun 2012 (Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, 2013). Pertumbuhan produksi daging per tahun selama periode 2010-2012 yaitu sebesar 8,1 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMN 2010-2014 sebesar 7,3 persen. Untuk tahun 2013, pertumbuhan produksi daging ditargetkan naik sebesar 9,5 persen.

Pada tahun 2012 produksi perikanan mengalami peningkatan sebesar 11,8 persen, dari 13,6 juta ton di tahun 2011 menjadi 15,3 juta ton di tahun 2012, yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,8 ton dan perikanan budidaya sebesar 9,5 juta ton. Peningkatan produksi ikan tersebut didominasi oleh perikanan budidaya, khususnya rumput laut, nila, bandeng, udang, lele, mas, dan patin. Sementara itu produksi perikanan tangkap juga menunjukkan peningkatan sebesar 1,8 persen. Pada tahun 2013, diperkirakan produksi perikanan akan meningkat menjadi 18,5 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,5 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 13,0 juta ton.

Pembangunan sarana dan prasarana pertanian diantaranya irigasi serta penyediaan pupuk dan benih bersubsidi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian swasembada berkelanjutan. Pada tahun 2012, telah dilaksanakan peningkatan jaringan irigasi seluas 94,8 ribu ha dan rehabilitasi seluas 589,4 ribu ha antara lain Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Lhok Guci di Kab. Aceh Barat-Prov. NAD, Pembangunan/Peningkatan Daerah Irigasi Way Bumi Agung di Kab. Lampung Utara-Prov. Lampung, Pembangunan Bendung Slinga di Kab. Purbalingga-Prov. Jateng, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Batang Alai di Kab. Hulu Sungai Tengah-Prov. Kalsel. Pada tahun 2013 upaya ini dilanjutkan dengan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas 77,74 ribu ha dan rehabilitasi seluas 238,14 ribu ha, antara lain Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Lhok Guci di Kab. Aceh Barat-Prov. NAD (lanjutan), Pembangunan Bendung D.I. Belutu di Kab. Deli Serdang-Prov. Sumut, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Air Lakitan di Kab. Musirawas-Prov. Sumsel, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Leuwigoong di Kab. Garut-Prov. Jabar, Peningkatan Jaringan irigasi Peterongan di Kab. Jombang-Prov. Jatim, Pembangunan D.I. Bajo di Kab. Luwu-Prov. Sulsel (lanjutan), Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Way Apu, P. Buru, di Kab. Buru-Prov. Maluku (lanjutan).

Disamping itu, dalam rangka peningkatan ketersediaan air melalui pembangunan waduk dan embung yang telah diselesaikan pada tahun 2012 adalah pembangunan Waduk Rajui di Provinsi NAD dengan kapasitas 2,6 juta m³, serta 175 embung yang tersebar di

seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, direncanakan satu waduk akan selesai terbangun yaitu Waduk Marangkayu di Kab. Kutai Kartanegara-Prov. Kaltim. Selain itu, Pemerintah akan melaksanakan pembangunan 252 embung, serta melanjutkan pembangunan beberapa waduk, antara lain Waduk Pandanduri, Waduk Jatigede, dan Waduk Karian.

Dukungan lain adalah penyediaan pupuk dan benih bersubsidi. Penyaluran pupuk bersubsidi pada tahun 2012 sebanyak 8,9 juta ton atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 yang sebesar 8,3 juta ton (Dirjen PSP, Kementan, 2013). Pada tahun 2013, penyaluran pupuk bersubsidi ditargetkan sebesar 7,3 juta ton. Sementara itu, penyaluran bantuan benih unggul/subsidi benih pada tahun 2012 untuk padi adalah sebesar 103,4 ribu ton, untuk jagung 4,3 ribu ton, dan untuk kedelai adalah sebesar 13,5 ribu ton. Jumlah penyaluran bantuan benih unggul/subsidi benih padi, jagung dan kedelai pada tahun 2012 adalah sebesar 121,2 ribu ton. Jumlah penyaluran bantuan benih unggul/subsidi benih untuk seluruh komoditas tersebut lebih kecil apabila dibandingkan dengan tahun 2011. Untuk tahun 2013, ditargetkan penyaluran bantuan benih unggul/subsidi benih padi, jagung dan kedelai adalah sebesar 127,5 ribu ton.

Nilai Tukar Petani (NTP) pada bulan Desember 2012 adalah sebesar 105,9, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada level 105,8; sementara itu Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2012 mencapai 105,4.

2.2.2 Energi

Dalam rangka memenuhi kebutuhan energi dan mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kapasitas energi, pemanfaatan energi alternatif terutama panas bumi, dan melakukan konversi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG). Pencapaian pemenuhan kebutuhan energi disajikan dalam Tabel 2.3.

Peningkatan kapasitas energi utamanya adalah produksi minyak bumi dan kapasitas pembangkit listrik termasuk rasio elektrifikasi. Produksi minyak bumi menurun dari 945 ribu barel perhari pada tahun 2010 menjadi 877 ribu barel perhari pada tahun 2012. Untuk tahun 2013, produksi minyak bumi diperkirakan mencapai 900 ribu barel per hari. Produksi gas bumi juga mengalami tren menurun. Pada tahun 2010, produksi gas bumi dapat mencapai 1.582 ribu barel setara minyak per hari, turun menjadi 1.508 dan 1.464 ribu barel setara minyak per hari pada tahun 2011 dan 2012. Pada 2013 diperkirakan produksi gas bumi akan kembali menurun menjadi sebesar 1.360 ribu barel setara minyak per hari. Dengan kecenderungan ini, maka target RPJMN diperkirakan tidak akan tercapai.

Di sektor ketenagalistrikan, selama kurun waktu 2010 – 2012 terdapat penambahan kapasitas pembangkit listrik rata-rata 4.035 MW per tahun. Pada tahun 2012, kapasitas pembangkit listrik telah mencapai 44.064 MW atau meningkat sekitar 10,5 Persen bila dibandingkan dengan kapasitas pembangkit listrik tahun 2011 sebesar 39.885 MW. Demikian halnya juga dengan rasio elektrifikasi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Rasio elektrifikasi pada

tahun 2010 mencapai 67,2 persen, meningkat menjadi 73,0 persen pada tahun 2011 dan 76,6 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013, kapasitas pembangkit listrik diperkirakan bertambah sebesar 4.097 MW atau menjadi 48.161 MW dan rasio elektrifikasi diperkirakan dapat mencapai 79,3 persen.

TABEL 2.3
PEMBANGUNAN ENERGI

| No | Indikator | Satuan | Baseline (2009) | Realisasi | | |
|----|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------|--------|--------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Produksi Minyak Bumi | Ribu Barel/Hari | 949 | 945 | 902 | 877 |
| 2 | Kapasitas Pembangkit | Tambahan (MW) | | 2.024 | 5.902 | 4.179 |
| | | Terpasang (Kumulatif MW) | 31.959 | 33.983 | 39.885 | 44.064 |
| 3 | Rasio Elektrifikasi | Persen | 65,79 | 67,15 | 72,95 | 76,56 |
| 4 | Kapasitas PLTP | Terpasang (Kumulatif MW) | 1.179 | 1.189 | 1.226 | 1.341 |
| 5 | Pembangunan Jaringan Gas Kota | Kota/Sambungan | 2/ | 6/ | 9/ | 13/ |
| | | Rumah (Kumulatif) | 6.210 | 19.376 | 45.576 | 56.168 |
| 6 | Pembangunan SPBG | Unit (Kumulatif) | n.a | FEED | 4 | 8 |

Keterangan : FEED = *Front End Engineering Design*

Pada tahun 2010, kapasitas terpasang pembangkit listrik yang bersumber dari panas bumi (PLTP) adalah sebesar 1.189 MW dan dapat ditingkatkan menjadi 1.226 MW pada tahun 2011 dan 1.341 MW pada tahun 2012. Pada tahun 2013, diperkirakan kapasitas terpasang menjadi 1.346 MW. Dengan lambatnya perkembangan peningkatan kapasitas PLTP terpasang saat ini, diperkirakan target RPJMN untuk tahun 2014 akan sulit dicapai.

Pembangunan jaringan gas kota ke rumah tangga juga berjalan dengan cukup baik. Sejak tahun 2009 hingga tahun 2012, pemerintah telah membangun jaringan gas untuk rumah tangga sebanyak 56.000 sambungan di 13 kota yaitu Palembang 3.311 sambungan rumah (SR), Surabaya 2.900 SR, Sidoarjo 8.647 SR, Depok 4.000 SR, Tarakan 3.666 SR, Bekasi 4.628 SR, Bontang 3.960 SR, Sengkang 4.172 SR, Rusun Jabodetabek 5.234 SR, Prabumulih 4.650 SR, Jambi 4.000 SR, Bogor 4.000 SR dan Cirebon 4.000 SR. Pada tahun 2013, direncanakan akan dibangun jaringan gas kota di Ogan Ilir, Subang, Blora, dan Sorong untuk 16.000 SR.

Untuk sektor transportasi, konversi penggunaan BBM ke BBG memerlukan upaya kerja keras yang lebih giat lagi. Saat ini, jumlah SPBG yang dibangun pemerintah baru mencapai 8 unit dari 21 unit yang direncanakan, yaitu di Palembang 4 unit (tahun 2011), Surabaya 2 unit, Gresik 1 unit, dan Sidoarjo 1 unit (tahun 2012). Sementara SPBG yang sudah beroperasi baru di Palembang. Pada tahun 2013, direncanakan akan dibangun 7 SPBG di Balikpapan 2 unit, Samarinda 2 unit, dan 3 unit di Jabodetabek.

2.2.3 Infrastruktur

Program pembangunan infrastruktur yang mencakup sektor transportasi, perumahan dan permukiman, informasi dan telekomunikasi, pengairan dan irigasi. Secara umum pembangunan infrastruktur diperkirakan dapat mencapai sasaran RPJMN 2010-2014, lihat Tabel 2.4.

TABEL 2.4
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

| No | Indikator | Status Awal (2009) | Realisasi ^(k) | | |
|----|---|-----------------------|--------------------------|-------------------|------------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Kemantapan Jalan Nasional (%) | 87,3 | 87,0 ¹⁾ | 87,7 | 90,5 |
| 2 | Panjang Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km) | 2.443 | 2.530 | 3.292 | 10.830 |
| 3 | Panjang jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda (km) | 135 | 81 | 216 | 319 |
| 4 | Jumlah Bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi | 170 | 65 | 150 | 275 |
| 5 | Jumlah fasilitas pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan yang dibangun dan ditingkatkan. | 60 | 157 | 205 | 607 |
| 6 | Pangsa angkutan laut armada pelayaran nasional (%): | | | | |
| | a. Domestik (D) | 90,2 | 98,1 | 98,8 | 98,8 |
| | b. Ekspor-Impor (E-I) | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,9 |
| 7 | Jumlah Rusunawa Terbangun (<i>Twin Block</i>) | 106 | 89 | 159 | 435 |
| 8 | Desa yang dilayani akses telekomunikasi | 24.051 (72,5%) | 27.670 (83,4%) | 30.413 (91,6%) | 31.392 (94,6%) |
| 9 | Ibukota Kab/Kota yang terhubung secara broadband | 311 (63%) | 311 (63%) | 328 (66%) | 343 (69%) |
| 10 | Diselesaikannya pembangunan Kanal Banjir Timur paket 22 s/d 29 | Konstruksi | Paket 22-29 | Paket 22-29 | Paket 30-31 ²⁾ |
| 11 | Jalan tol yang dibangun pemerintah dan swasta (Km) | 85 | 135 | 188 | 296 |

Keterangan:

1) Terdapat penambahan panjang jalan nasional dari 34.628,83 Km menjadi 38.569,82 Km

2) Pekerjaan tambahan untuk penyelesaian konstruksi Kanal Banjir Timur Jakarta

[k] Kumulatif

2.2.3.1 Transportasi

Pada sektor jalan, pencapaian kinerja ditunjukkan dengan meningkatnya kemantapan jalan nasional dari 87 persen pada tahun 2010 menjadi 90,5 persen pada tahun 2012. Sementara panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran meningkat dari 2.530 km pada tahun 2010 menjadi 10.830 km pada tahun 2012. Pada tahun 2012, preservasi jalan mencapai sepanjang 36.267,00 km dan preservasi jembatan sepanjang 289.909,00 meter. Peningkatan kapasitas jalan (pelebaran) sepanjang 4.632,00 km dan peningkatan jumlah jembatan yang dibangun sepanjang 9.746,00 meter. Jumlah *flyover/underpass* yang dibangun sepanjang 6.890,00 meter. Sementara perkiraan pencapaian tahun 2013 antara lain preservasi jalan sepanjang 35.071,00 km dan preservasi jembatan sepanjang 247.692,00 meter; peningkatan kapasitas jalan (pelebaran) sepanjang 4.277,6 km dan peningkatan jumlah jembatan yang

dibangun sepanjang 7.164,00 meter. Jumlah *flyover/underpass* yang dibangun sepanjang 3.510,00 meter.

Pembangunan infrastruktur perkeretaapian pada tahun 2012 meliputi pembangunan jalur KA baru termasuk jalur ganda sepanjang 103,08 km sehingga dari tahun 2010 hingga 2012 secara kumulatif telah dibangun 319 km terutama lintas utara dan selatan Pulau Jawa. Di samping itu juga telah diselesaikan: peningkatan kondisi dan pengaktifan kembali jalur kereta api sepanjang 79,35 km; pengadaan rel kereta api sepanjang 550 Km'sp; peningkatan jumlah sarana KA sebanyak 20 paket; serta peningkatan persinyalan untuk keselamatan kereta api sejumlah 68 paket. Pada tahun 2013 pembangunan meliputi: pembangunan jalur KA baru termasuk jalur ganda sepanjang 383,37 km terutama lintas utara dan selatan Pulau Jawa; peningkatan kondisi dan pengaktifan kembali jalur kereta api sepanjang 22,81 km; pengadaan rel kereta api sepanjang 192 Km'sp; peningkatan jumlah sarana KA sebanyak 18 paket; serta peningkatan persinyalan untuk keselamatan kereta api sejumlah 64 paket.

Rehabilitasi bandar udara (bandara) secara kumulatif dari tahun 2010 hingga 2012 telah mencapai 275 bandara, termasuk bandara strategis, yaitu Bandara Kuala Namu-Medan Baru, dan Bandara Samarinda Baru. Sementara untuk daerah perbatasan dan rawan bencana telah dibangun sebanyak 14 bandara. Penyelenggaraan prasarana keamanan penerbangan sebanyak 104 dan prasarana navigasi penerbangan 222 paket. Tahun 2013 akan dilaksanakan pengembangan dan rehabilitasi bandara di daerah perbatasan dan rawan bencana sebanyak 41 bandara; dan peningkatan keselamatan melalui pengadaan 16 paket dan prasarana navigasi sebanyak 187 paket.

Pada sektor transportasi laut pada tahun 2012, jumlah pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan yang fasilitasnya dibangun dan ditingkatkan mencapai 245 sehingga dari tahun 2010 hingga 2012 secara kumulatif mencapai 607 pelabuhan. Pelabuhan strategis yang telah dibangun dan dikembangkan antara lain Pelabuhan Belawan, Dumai, Tanjung Priok, Batang, Kendal, Probolinggo, Sape, Kariangau, Pantoloan, Bitung, Ternate dan Arar-Sorong. Di samping itu untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dilakukan peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebanyak 89 menara suar, 250 rambu suar dan 85 pelampung suar. Pada tahun 2013 dilaksanakan peningkatan dan rehabilitasi pelabuhan strategis mencakup Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, dan Bitung; serta peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran sebanyak 24 menara suar, 53 rambu suar dan 43 pelampung suar. Dengan ketersediaan infrastruktur perhubungan laut di atas, kinerja usaha angkutan laut ditunjukkan dengan besarnya pangsa angkutan laut yang diperoleh armada pelayaran nasional yaitu 98,8 persen untuk angkutan domestik, namun untuk angkutan ekspor-impur baru mencapai 9,9 persen.

Untuk mendukung program penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegrasi (*national connectivity*) telah dilaksanakan pembangunan Terminal Tipe A (antar propinsi) dan terminal antar lintas batas negara yang tersebar di 31 lokasi. Di samping itu, telah dilaksanakan pembangunan 15 unit dermaga

penyeberangan baru, 38 unit dermaga penyeberangan lanjutan dan 11 unit dermaga penyeberangan yang telah selesai pembangunannya yang tersebar di 12 lokasi. Sedangkan pada tahun 2013, pelaksanaan pembangunan Terminal Tipe A dan terminal antar lintas batas negara tersebar di 24 lokasi diperkirakan dapat dicapai. Disamping itu dapat dilaksanakan pembangunan dermaga darat di sejumlah 61 lokasi berupa dermaga sungai, danau, dan penyeberangan.

2.2.3.2 Perumahan dan Permukiman

Dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar serta untuk mendukung pencapaian target *Millenium Development Goals (MDGs)*, pada tahun 2010 sampai 2012 Pemerintah telah membangun 435 *Twin Block (TB)* rumah susun sederhana sewa (rusunawa), fasilitasi pembangunan rumah swadaya sebanyak 32.512 unit, peningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 285.738 unit, dan penyaluran Fasilitasi Likuiditas Perumahan dan Permukiman untuk 280.555 unit. Selanjutnya pada tahun 2013 diperkirakan dapat dicapai pembangunan 182 TB rusunawa, fasilitasi peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 196.748 unit, dan penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 94 Ha. Dengan demikian untuk mencapai sasaran RPJMN 2010-2014 pembangunan *twin block* rusunawa memerlukan kerja keras.

2.2.3.3 Komunikasi dan Informatika

Kinerja pembangunan komunikasi dan informatika tahun 2010-2012 ditunjukkan antara lain oleh jumlah desa yang telah dilayani akses telekomunikasi dan jumlah ibukota kabupaten/kota yang terhubung secara *broadband*. Pencapaian hingga tahun 2012 adalah telah beroperasinya akses telekomunikasi (Desa Berdering) di 31.392 desa atau 94,6 persen dari target 33.184 desa dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 6.694 desa ibukota kecamatan melebihi dari target 5.748 desa sebagai bagian dari program *Universal Service Obligation (USO)*. Di samping itu telah tersedia layanan *broadband* di 29 provinsi (88 persen) dan 343 ibukota kabupaten/kota (69 persen). Pada tahun 2013 akan dilaksanakan: (1) pembangunan jaringan telekomunikasi serat optik yang menghubungkan Sulawesi-Maluku-Papua sehingga penyediaan layanan *broadband* diharapkan dapat menjangkau 83 persen ibukota kabupaten/kota oleh PT Telkom; (2) pembangunan Palapa Ring yang didanai oleh Pemerintah melalui *Information and Communication Technology (ICT) Fund* dapat dimulai; (3) penyelesaian penyediaan jasa akses telekomunikasi sehingga target 33.184 desa (Desa Berdering) terpenuhi.

2.2.3.4 Pengairan dan Irigasi

Dalam rangka penyediaan infrastruktur dasar sumber daya air bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pencapaian target MDGs, pada tahun 2012 telah dicapai peningkatan kapasitas air baku sebesar 14,94 m³/detik, diantaranya di Air Baku Regional Bregas (Brebes-Tegal-Selawi)-Jawa Tengah, Air baku Lamongan-Jawa Timur, Telagawaja-Bali, Teluk Lerong Samarinda-Kalimantan Timur dan Maron Pacitan - Jawa Timur. Pada tahun 2013, diperkirakan pembangunan sarana/prasarana air baku akan dapat meningkatkan kapasitas sebesar 9,73 m³/detik, serta melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan kapasitas prasarana air baku sebesar 7,76 m³/detik antara lain Air Baku Galang Batang di Kab. Bintan-Prov. Kepri, Air Baku Kota Lahat-Prov. Sumsel, Intake dan

Pipa Transmisi Air Baku (SPAM) di Kota Bandung-Prov. Jabar, Air Baku Sungai Semalagi di Kota Singkawang-Prov. Kalbar, Air Sungai Saluki Gumbasa Spam Regional Pasigala-Prov. Sulteng, Air Baku Malillin Mengkendek di Kab. Tana Toraja-Prov. Sulsel, Air Baku Telagawaja di Kab. Karangasem-Prov. Bali, Air Baku di P. Timor Bagian Barat, Air Baku Dusun Wai Mital, P. Haruku, Kab. Maluku Tengah-Prov. Maluku.

Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional Ketahanan Pangan, sektor infrastruktur memberikan kontribusi melalui penyediaan infrastruktur keirigasian dimana pada tahun 2012 telah dilakukan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi masing-masing seluas 94,8 ribu ha dan 589,4 ribu ha dengan lokasi antara lain pembangunan jaringan irigasi D.I. Lhok Guci di Kab. Aceh Barat-Prov. NAD, D.I. Way Bumi Agung di Kab. Lampung Utara-Prov. Lampung, D.I. Batang Alai di Kab. Hulu Sungai Tengah-Prov. Kalsel; pembangunan Bendung Slinga di Kab. Purbalingga-Prov. Jateng. Sementara itu Pemerintah pada tahun 2013 juga melaksanakan pembangunan/peningkatan serta rehabilitasi jaringan irigasi masing-masing seluas 77,74 ribu ha dan 238,4 ribu ha, dengan lokasi antara lain lanjutan pembangunan jaringan irigasi D.I. Lhok Guci di Kab. Aceh Barat-Prov. NAD, D.I. Bajo di Kab. Luwu-Prov. Sulsel, D.I. Way Apu, P. Buru, di Kab. Buru-Prov. Maluku; pembangunan bendung D.I. Belutu di Kab. Deli Serdang-Prov. Sumut; pembangunan jaringan irigasi D.I. Air Lakitan di Kab. Musirawas-Prov. Sumsel, D.I. Leuwigoong di Kab. Garut-Prov. Jabar, Peterongan di Kab. Jombang-Prov. Jatim. Selain itu dalam rangka peningkatan ketersediaan air, Pemerintah telah menyelesaikan pembangunan Waduk Rajui di Provinsi NAD dengan kapasitas 2,6 juta m³. Selain itu juga dilakukan pembangunan 175 embung yang tersebar di seluruh Indonesia. Waduk Marangkayu di Kab. Kutai Kartanegara-Prov. Kaltim juga diperkirakan tuntas terbangun pada tahun 2013 selain pembangunan 252 embung dan beberapa waduk, antara lain Waduk Pandanduri, Waduk Jatigede, dan Waduk Karian.

Dalam rangka pengurangan dampak akibat banjir, pada tahun 2012 telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengendali banjir sepanjang 605,97 km antara lain normalisasi dan pengerukan secara multiyears sungai Pesanggrahan, Angke dan Sunter di Wilayah Sungai (WS) Ciliwung-Cisadane; serta pembangunan Bendung Gerak/ Bojonegoro Barrage di WS Bengawan Solo. Disamping itu, juga dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali lahar/sedimen sebanyak 95 buah pada daerah-daerah rawan bencana. Pada tahun 2013 kegiatan yang akan dilakukan antara lain: (i) lanjutan pembangunan Bendung Gerak Sembayat dan Jabung Ring Dike sebagai bagian dari instrumen pengendali banjir di Bengawan Solo Hilir, (ii) pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang 447,29 km dan pembangunan dan rehabilitasi pengaman pantai sepanjang 73,15 km, dan (iii) pembangunan dan rehabilitasi pengendali lahar/sedimen gunung berapi sejumlah total 71 buah.

2.2.3.5 Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS), telah berhasil dibangun jalan tol yang secara kumulatif pada tahun 2012 mencapai 296 km. Pelaksanaan KPS yang lain adalah: (i) telah beroperasi untuk 1 proyek air minum yaitu sistem penyediaan air minum Kabupaten Tangerang; (ii) telah konstruksi untuk 3 proyek jalan Tol Nusa Dua - Bandara Ngurah Rai-Benoa, Solo-Ngawi, Ngawi-Kerosono; (iii) telah selesai proses transaksi untuk 1 proyek listrik yaitu PLTU Jawa Tengah; (iv) dalam proses transaksi untuk 17 proyek yaitu 3 proyek air minum di Sumatera, Jawa dan Sulawesi, 2 proyek kelistrikan di Sumatera, 8 proyek jalan tol di Sumatera dan Jawa, 2 proyek persampahan di Jawa, dan 2 proyek transportasi di Bali dan Kalimantan; (v) persiapan proses transaksi untuk 13 proyek yaitu 5 proyek air minum di Jawa, Sulawesi dan Bali, 1 proyek kelistrikan di Sulawesi, 4 proyek transportasi di Jawa dan Sulawesi, 3 proyek persampahan Sumatera dan Jawa.

2.2.4 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Hasil tinjauan paruh waktu RPJMN 2010-2014 untuk pembangunan iklim investasi dan usaha disajikan pada Tabel 2.5. Pada umumnya semua indikator diperkirakan dapat mencapai sasaran RPJMN. Namun ada 3 (indikator) indikator utama yang perlu didorong pencapaiannya pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014, yaitu: (1) jumlah perusahaan pengguna perijinan ekspor/ impor *online* melalui INATRADE; (2) persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan dan jumlah lokasi KEK yang ditetapkan; serta (3) tersusunnya peraturan tentang kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (kontrak dan *outsourcing*), serta pengupahan.

TABEL 2.5
PEMBANGUNAN IKLIM INVESTASI IKLIM USAHA

| No | Indikator | Status Awal (2009) | Realisasi | | |
|----|---|-----------------------|-------------------------|---|---|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1 | Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah (Prov/Kab/Kota) | 360 | 394 | 420 | 444 |
| 2 | Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan SPIPISE | - | 33 Prov dan 40 kab/kota | 33 Prov dan 50 kab/kota | 33 Prov dan 50 kab/kota |
| 3 | Jumlah pasar percontohan dan pusat distribusi (unit) | 10 | 12 dan - | 15 dan 1 | 20 dan 1 |
| 4 | Jumlah perusahaan pengguna perijinan ekspor/ impor <i>online</i> melalui INATRADE | NA | 1.536 | 2.064 | 2.618 |
| 5 | Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan | - | - | - | 80% 2 lokasi |
| 6 | Jumlah lokasi KEK yang ditetapkan Tersusunnya peraturan tentang kompensasi & penetapan PHK, hubungan kerja (kontrak dan <i>outsourcing</i>), serta pengupahan. | Masuk dalam Prolegnas | Naskah Akademis | Penundaan revisi dan dikeluarkan dari Prolegnas | Permenakertr ans No. 13 tahun 2012, dan No.19 Tahun 2012. |
| 7 | Jumlah lembaga kerjasama bipartit di perusahaan dalam rangka pencapaian kesepakatan hubungan kerja | 380 | 13.246 | 13.912 | 14.339 |

Dalam kondisi ekonomi dunia yang mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2012 masih dalam tingkat yang cukup tinggi, dengan didukung oleh investasi dalam bentuk PMTB (pembentukan modal tetap domestik bruto) yang tumbuh 9,8 persen, sementara pada tahun 2011 hanya 8,8 persen. Stabilitas dan daya tahan perekonomian Indonesia di tengah gejolak krisis ekonomi internasional, serta kemampuan dalam menarik dan meningkatkan investasi telah dinilai positif dan diapresiasi oleh berbagai lembaga pemeringkat internasional seperti *Fitch Rating*, *Moodys Investor Rating*, *Standard and Poor*, dan *Japan Credit Rating* yang menempatkan Indonesia pada peringkat *investment grade* (layak investasi) dengan *positive outlook* sepanjang tahun 2012. Perekonomian dunia pada tahun 2013 diperkirakan akan sedikit lebih dibanding tahun 2012 dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 3,3 persen (*World Bank*, April 2013) sehingga target investasi dalam bentuk PMTB diharapkan tumbuh sebesar 6,9 persen.

Salah satu hambatan dalam iklim investasi adalah peraturan ketenagakerjaan yang sampai saat ini belum dapat disempurnakan, terutama pasal-pasal dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terkait dengan kompensasi dan penetapan pemutusan hubungan kerja (PHK), hubungan kerja (perjanjian kerja waktu tertentu dan *outsourcing*), dan pengupahan. Dengan masih terkendalanya revisi UU Nomor 13/2003, maka tantangan terbesar adalah mengupayakan pengurangan gejolak

dalam pasar kerja dengan mengedepankan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha dalam penentuan upah, syarat kerja, dan hubungan kerja. Dengan demikian, penguatan kelembagaan hubungan industrial menjadi upaya strategis ke depan, dengan mendorong terwujudnya perundingan kolektif (*collective bargaining*) melalui perundingan yang mengadopsi prinsip-prinsip tata cara perundingan dengan itikad baik (*code of good faith*).

2.2.5 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Pembangunan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi telah berada pada jalur yang diperkirakan dapat mencapai target RPJMN. Dalam hal pembangunan kebudayaan telah dicapai berbagai kemajuan yang ditandai antara lain dengan semakin meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pembangunan karakter dan jati diri bangsa, upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebhinekaan budaya, karya seni dan ilmu serta apresiasinya. Pembangunan yang telah diselesaikan antara lain: (1) pengelolaan terpadu cagar budaya: Kawasan Candi Borobudur, Kawasan Prambanan dan Kawasan Situs Manusia Purba Sangiran; (2) revitalisasi 6 museum, yaitu Museum Subak Bali, Museum Asmat Jakarta, Museum Batik Pekalongan, Museum Bekon Blewut NTT, Museum Satria Mandala Jakarta dan Museum Asimbojo Bima NTB; (3) peningkatan layanan jasa perpustakaan dan informasi di 33 perpustakaan provinsi, 350 perpustakaan kabupaten/kota, 2.233 perpustakaan desa, dan penyediaan 184 mobil perpustakaan keliling, (4) fasilitasi penyediaan sarana seni budaya di 25 provinsi dan 399 kabupaten/kota; (5) pelaksanaan 13 penelitian bidang kebudayaan dan 148 penelitian bidang arkeologi; (6) fasilitasi penyelenggaraan 33 pertunjukan, pameran, festival, *workshop* dan lomba, 11 *event* festival film di dalam dan luar negeri, sensor film 42.200 judul film/video/iklan; (7) fasilitasi peningkatan kreativitas dan kapasitas di bidang iptek dan imtaq bagi 3.180 orang dan di bidang seni, budaya, dan industri kreatif bagi 3.180 orang.

Untuk meningkatkan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi nasional, pada tahun 2012 telah dilaksanakan 39 paket riset dasar dan 130 paket riset terapan. Sedangkan untuk mendorong inovasi teknologi telah dilaksanakan 50 paket difusi iptek dan 119 paket riset sistem produksi. Di samping itu juga dilaksanakan 12 paket riset untuk kesehatan dan obat-obatan. Pada tahun 2013 paket-paket riset yang sama tetap dilaksanakan dengan jumlah yang sama juga. Di samping itu, pada tahun 2013 juga dilaksanakan revitalisasi sarana laboratorium dan pendidikan pasca sarjana bagi para peneliti.

2.2.6 Bidang Perekonomian Lainnya

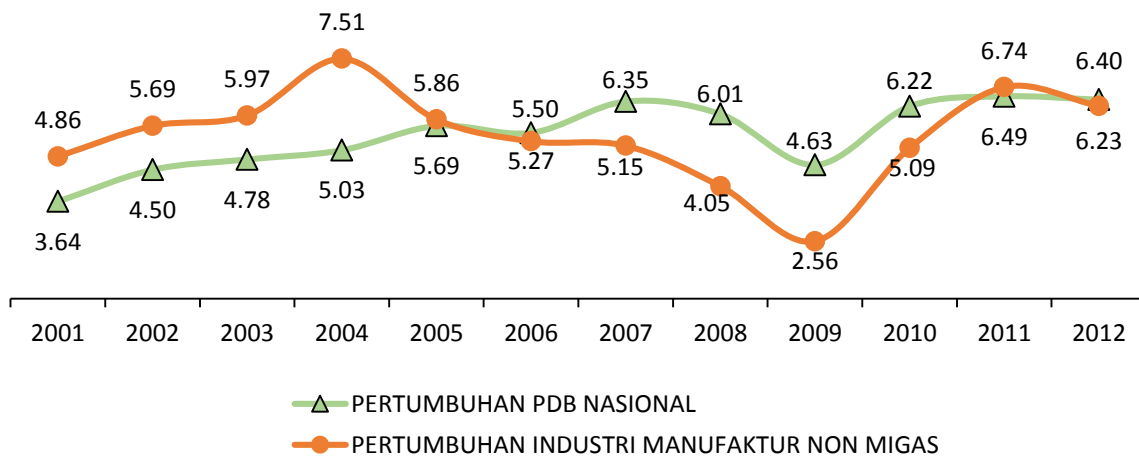
Tinjauan paruh waktu RPJMN untuk kegiatan prioritas lainnya di bidang perekonomian mencakup industri pengolahan, kerjasama ekonomi internasional khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), tenaga kerja Indonesia, serta koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Secara garis besar dapat dikatakan bahwa dibutuhkan kerja keras untuk dapat mencapai sasaran RPJMN. Secara lebih rinci capaian di bidang ini diuraikan sebagai berikut.

2.2.6.1 Industri Pengolahan Non-Migas

Industri pengolahan tahun 2010, 2011, dan 2012 tumbuh memenuhi sasaran RPJMN 2010-2014. Namun demikian, karena industri migas pada periode yang sama mencatat pertumbuhan negatif, dan diperkirakan tidak berubah di tahun-tahun mendatang, maka untuk mencapai target tahun 2014 diperlukan kerja keras khususnya pada industri nonmigas yang dituntut tumbuh jauh lebih tinggi dari target.

Industri non migas mengalami pertumbuhan yang bervariasi, kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang lebih rendah dari pertumbuhan PDB, namun sejak tahun 2009 selalu meningkat dan pada tahun 2011 dan 2012 dapat melampaui pertumbuhan PDB. Pada tahun 2012 pertumbuhan industri non-migas utamanya ditopang oleh subsektor pupuk kimia yang tumbuh 10,3 persen, subsektor semen yang tumbuh 7,9 persen, dan subsektor makanan, minuman dan tembakau yang tumbuh 7,7 persen. Pelemahan pasar ekspor membuat subsektor kertas dan barang cetakan serta subsektor barang kayu dan hasil hutan tumbuh negatif pada tahun 2012, yaitu sebesar -5,3 persen dan -2,9 persen. Sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja seperti industri makanan, minuman, dan tembakau; industri tekstil dan produk tekstil; serta industri alat angkut sejak tahun 2010 tumbuh positif. Pertumbuhan industri non-migas di tahun 2013 berpeluang memanfaatkan perkembangan positif di Amerika Serikat, China, Afrika, dan Amerika Selatan.

GAMBAR 2.4
PERTUMBUHAN PDB DAN INDUSTRI NON-MIGAS (DALAM %)




2.2.6.2 Masyarakat Ekonomi ASEAN

Implementasi integrasi ekonomi ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015 mengacu kepada *ASEAN Economic Community Blueprint* (cetak-biru MEA) dengan 4 (empat) pilar utamanya, yaitu: (1) ASEAN sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang didukung dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas; (2) ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi tinggi yang didukung dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan

infrastruktur, perpajakan, dan *e-commerce*; (3) ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata yang didukung dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa integrasi ASEAN untuk Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam; (4) ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global yang didukung dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Untuk mengukur, memantau, dan mengkomunikasikan kepada publik kemajuan yang dicapai oleh negara-negara ASEAN dalam mengimplementasikan komitmen untuk mewujudkan MEA 2015, digunakan *scorecard* MEA. Pada RPJMN 2010-2014, target pencapaian komitmen Indonesia dalam MEA 2015 adalah pemenuhan *scorecard* MEA sebesar 90 persen di setiap tahunnya. Hasil tinjauan paruh waktu RPJMN 2010-2014 mencatat pencapaian *scorecard* MEA oleh Indonesia pada tahun 2010, 2011, dan 2012 masing-masing sebesar 70,0 persen, 74,2 persen, dan 82,0 persen. Untuk itu, pada tahun 2014 Indonesia perlu kerja keras untuk mencapai target sebesar 90 persen. *Scorecard* ini dilaporkan setiap tahunnya oleh Sekjen ASEAN kepada para Menteri dan Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN yang dimonitor dalam 4 (empat) tahapan yaitu tahun 2008-2009; 2010-11; 2012-13; dan 2014-15. Adapun progress penerapan *Scorecard MEA* Indonesia untuk Tahap 1 dan Tahap II disajikan pada Gambar 2.5.

GAMBAR 2.5
PENCAPAIAN AEC SCORECARD ASEAN TAHAP I DAN TAHAP II
(IMPLEMENTATION RATE)



| Pilar | Tahap I | Tahap II | Total |
|---|---------|----------|-------|
| Pilar I: <i>Single Market and Production Base (%)</i> | 93,8 | 49,1 | 65,9 |
| Pilar II: <i>Competitive Economic Region (%)</i> | 68,7 | 67,4 | 67,9 |
| Pilar III: <i>Equitable Economic Development (%)</i> | 100 | 55,5 | 66,7 |
| Pilar IV: <i>Integration into the Global Economy (%)</i> | 100 | 77,8 | 85,7 |

2.2.6.3 Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pelayanan dan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI) baik saat masih berada di dalam negeri maupun setelah di luar negeri tetap ditingkatkan. Pada tahun 2012 sebanyak 494.609 orang TKI telah ditempatkan di berbagai negara sahabat. Sejalan dengan itu, pelayanan terhadap mereka juga diperbaiki antara lain dengan mempercepat proses penyelesaian pengaduan di *crisis center*, menghilangkan diskriminasi saat kepulangan dengan menghilangkan ketentuan yang mengharuskan TKI pulang melewati Terminal 4 Selapanjang di Bandara Soekarno-Hatta, meningkatkan akses TKI kepada kredit murah untuk membiayai keberangkatan, serta memberi bantuan dan pendampingan hukum kepada TKI yang bermasalah hukum di luar negeri.

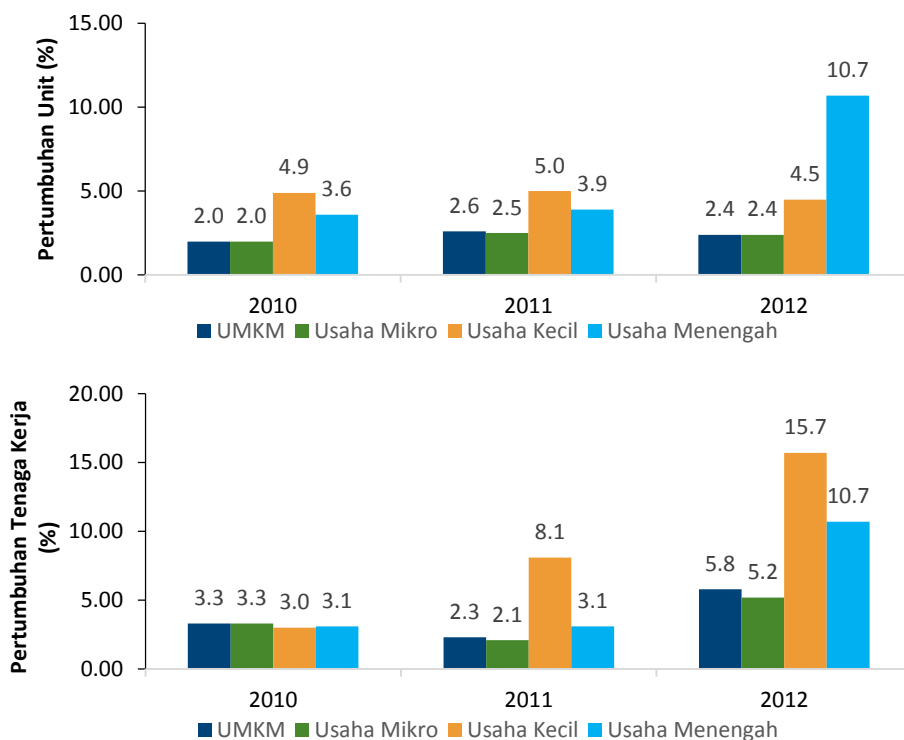
Untuk meningkatkan perlindungan bagi TKI, pada tahun 2012 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2012. Selanjutnya, pada awal Januari 2013 Pemerintah telah mengeluarkan tiga peraturan pemerintah (PP) turunan dari UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ketiga PP tersebut adalah PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, PP Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah, dan PP Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan. Peraturan perundangan tersebut diharapkan mampu memberi kepastian hukum dan sekaligus memperjelas peran pemerintah dalam proses penempatan dan perlindungan TKI. Pada tahun 2013 diperkirakan UU Nomor 39 Tahun 2004 telah selesai direvisi, sehingga pada tahun 2014 diharapkan peraturan turunannya dapat diselesaikan.

2.2.6.4 Koperasi dan UMKM

Pemantapan perekonomian nasional melalui pengembangan koperasi dan UMKM telah berkontribusi pada peningkatan pelaku ekonomi di kelompok akar rumput sehingga lebih merata dan berkeadilan. Di bidang koperasi kemajuan yang dicapai ditunjukkan oleh peningkatan jumlah koperasi sebesar 3,3 persen sehingga secara akumulatif menjadi 194.295 unit pada tahun 2012. Jumlah anggota koperasi juga meningkat sebesar 9,8 persen yaitu dari 28,1 juta orang pada tahun 2011 menjadi 30,8 juta orang pada tahun 2012. Perbaikan kinerja koperasi juga ditunjukkan dari peningkatan proporsi koperasi aktif dari 71,0 persen pada tahun 2011 menjadi 71,7 persen pada tahun 2012. Proporsi koperasi aktif yang menjalankan rapat anggota tahunan (RAT) sebagai bentuk akuntabilitas koperasi juga meningkat dari 43,4 persen pada tahun 2011 menjadi 47,4 persen pada tahun 2012. Perkembangan positif pada tahun 2012 juga ditunjukkan dari pertumbuhan volume usaha menjadi Rp119,2 triliun (25,4 persen) dan peningkatan selisih hasil usaha (SHU) menjadi Rp6,7 triliun (5,1 persen). Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi juga meningkat 13,9 persen sehingga jumlah tenaga kerja di koperasi sampai November 2012 tercatat sebanyak 429.678 orang.

Sementara itu perkembangan UMKM ditunjukkan oleh peningkatan jumlah UMKM sebesar 2,4 persen sehingga mencapai 56,5 juta unit usaha pada tahun 2012 dan jumlah tenaga kerja UMKM juga meningkat sebesar 5,8 persen menjadi sekitar 107,7 juta orang. Peningkatan jumlah unit usaha dan tenaga kerja terbesar tercatat pada kelompok usaha menengah, yaitu masing-masing 10,7 persen dan 14,7 persen. Sementara itu, pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja usaha kecil juga terus meningkat. Pengembangan kinerja usaha mikro masih membutuhkan kerja keras, hal ini penting karena pertumbuhan unit usaha dan tenaga kerja yang rendah. Padahal usaha mikro masih dominan yaitu 98,8 persen unit usaha dengan menampung 92,8 persen tenaga kerja.

GAMBAR 2.6
PERTUMBUHAN UNIT USAHA DAN TENAGA KERJA UMKM



2.3 Stabilitas Politik

Stabilitas politik dicapai melalui pembangunan politik, hukum dan keamanan serta pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola. Pembangunan politik, hukum dan keamanan mencakup kontribusi Indonesia dalam perdamaian dunia, pembangunan hukum dan hak azasi manusia, serta pembangunan pertahanan dan keamanan. Uraian rinci masing-masing prioritas ini sebagai berikut ini.

2.3.1 Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan

2.3.1.1 Perdamaian Dunia

Di tengah kondisi dan tantangan global dan kawasan yang dipenuhi ketidakpastian dan semakin kompleks, diplomasi dan politik luar negeri Indonesia pada tahun 2012 secara konsisten dan gigih memperjuangkan perdamaian dan kemakmuran, melalui sikap dan berbagai prakarsa yang disampaikan dalam fora internasional. Pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa (SMU PBB) ke 67 September 2012 Indonesia mengemukakan pentingnya mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB untuk mewujudkan suatu dewan yang merefleksikan realitas abad 21 yang strategis dan memberikan keamanan untuk semua sehingga perdamaian menyeluruh dapat terwujud di dunia. Pada tahun 2012, Indonesia berpartisipasi dalam 7 misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (UNPKO) dengan mengirimkan 1,992 personel dan telah menempatkan Indonesia dalam posisi ke-15 negara penyumbang pasukan pada misi-misi PBB. Dalam upaya

resolusi konflik Suriah, Indonesia telah mengirimkan enam personel misi pemantau PBB. Mengenai Palestina, prakarsa Indonesia bersama 63 negara lain telah berhasil memberikan status Negara Peninjau Non-Anggota PBB (*non-member observer state*) kepada Palestina. Sementara itu, terkait persoalan Laut China Selatan, Indonesia telah melakukan upaya *shuttle diplomacy* untuk mengkonsolidasikan posisi ASEAN serta mendorong pelaksanaan *Guidelines for the Implementation of Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea (DoC)*, termasuk di dalamnya suatu *regional code of conduct (COC)*. Pada tahun 2013, Indonesia akan lebih aktif menindaklanjuti capaian di atas dengan berbagai langkah.

2.3.1.2 Hukum dan Hak Asasi Manusia

Secara garis besar capaian di bidang hukum disajikan dalam Tabel 2.6 yang mencakup indikator penanganan perkara di tingkat MA; jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum; jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama; jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Militer; jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN); penanganan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya (di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di daerah); dan Penanganan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi Tipikor (KPK). Secara umum dapat disimpulkan bahwa target RPJMN dari pembangunan hukum diperkirakan dapat dicapai.

TABEL 2.6
PEMBANGUNAN HUKUM

| No | Indikator | Status Awal (2009) | Realisasi | | |
|----|--|--------------------|--|--|---|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Penanganan Perkara (di tingkat MA) | n.a | 13.891 pkr | Perkara yang ditangani = 21,414 pkr Perkara yang putus = 13,719 pkr Sisa tahun 2011 = 7.695 pkr | Perkara yang ditangani = 21.107 pkr (sisa 2011= 7.695 pkr dan perkara masuk = 13.412 pkr). Perkara yang putus= 10.991 pkr. |
| 2 | Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Umum | n.a | <u>Tingkat Pertama:</u> Perkara yang ditangani = 2.742.169 pkr Putus = 2.703.265 pkr <u>Tingkat Banding :</u> Perkara yg ditangani =13.488 pkr Putus = 10.795 pkr | <u>Tingkat Pertama :</u> Perkara yang ditangani = 4.854.111 pkr Putus = 4.808.881pkr <u>Tingkat Banding :</u> Perkara yg ditangani = 13.577pkr Putus =10.911pkr | <u>Tingkat Pertama:</u> Perkara yang ditangani = 3.666.439 pkr Putus = 3.375.559 pkr. <u>Tingkat Banding:</u> Perkara ditangani= 11.403 perkara. Putus= 9.379 perkara. |

| No | Indikator | Status Awal (2009) | Realisasi | | |
|----|---|--|---|--|---|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3 | Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Agama | n.a | <u>Tingkat Pertama :</u> Perkara yang ditangani = 377.382 pkr Putus= 314.407 pkr <u>Tingkat Banding :</u> Perkara yg ditangani = 935 pkr Putus = 751 pkr | <u>Tingkat Pertama :</u> Perkara yang ditangani = 426.208 pkr Putus = 353.933 pkr <u>Tingkat Banding :</u> Perkara yg ditangani = 2.391 pkr Putus =2.189 pkr | <u>Tingkat Pertama:</u> Perkara yang ditangani = 2012: 476.961 pkr. Putus= 361.116 pkr Perkara dicabut= 21.179 pkr. <u>Tingkat Banding:</u> Perkara ditangani= 2.533 pkr. Putus= 2.252 pkr Dicabut = 20 pkr <u>Perkara linayat:</u> Perkara ditangani= 165 pkr. Putus = 114 pkr. |
| 4 | Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Militer | n.a | <u>Tingkat Pertama :</u> Perkara yang ditangani= 16.520 pkr Putus= 6988 pkr <u>Tingkat Banding :</u> Perkara yg ditangani: 460 pkr Putus : 374 pkr | <u>Tingkat Pertama :</u> Perkara yang ditangani= 3.429 pkr Putus= 3.000 pkr <u>Tingkat Banding :</u> Perkara yg ditangani= 397 pkr Putus = 368 pkr | <u>Tingkat Pertama:</u> Perkara ditangani= 3.251 pkr. Putus= 2.673 pkr. <u>Tingkat Banding:</u> Perkara yang ditangani = 315 pkr. Putus= 269 pkr. |
| 5 | Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yg sederhana, dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) | n.a | <u>Tingkat Pertama:</u> Perkara yang ditangani= 1.768 pkr Putus= 1.107 pkr <u>Tingkat Banding :</u> Perkara yg ditangani = 935 pkr Putus = 751 pkr | <u>Tingkat Pertama :</u> Perkara yang ditangani= 1.870 pkr Putus= 1.428 pkr <u>Tingkat Banding :</u> Perkara yg ditangani= 1008 pkr Putus = 832 pkr | <u>Tingkat Pertama:</u> Perkara ditangani= 1.975 pkr. Putus = 1.433 pkr. <u>Tingkat Banding:</u> Perkara ditangani = 892 pkr. Putus= 753 pkr. |
| 6 | Penanganan penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya (di Kejaksaan Agung dan Kejaksaan di daerah) | n.a | <u>Tahap Penyidikan =</u> 2.463 perkara (148 pkr di Kejagung, 2.315 pkr di Kejaksaan Daerah) <u>Tahap penuntutan =</u> 1.754 pkr (48 pkr di Kejagung, 1.706 pkr) | <u>Tahap penyidikan =</u> 1.481 (111 pkr di Kejagung, 1.370 pkr di Kejaksaan Daerah) <u>Tahap penuntutan =</u> 1.197 pkr (105 pkr di Kejagung, 1.092 pkr di Kejaksaan daerah) | <u>Tahap Penyidikan =</u> 1.401 pkr (85 perkara di Kejagung, 1.316 pkr di Kejaksaan Daerah)* s/d Juni 2012 <u>Tahap Penuntutan =</u> 1.511 pkr (76 pkr di Kejagung, 1.435 di Kejaksaan Daerah) |
| 7 | Penanganan Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Eksekusi Tipikor (KPK) | Penyelidikan = 67 kasus Penyidikan = 37 pkr Penuntutan = 32 pkr Eksekusi = 39 pkr | Penyelidikan = 54 kasus Penyidikan = 62 pkr Penuntutan = 55 pkr Eksekusi = 38 pkr | Penyelidikan = 78 kasus Penyidikan = 66 pkr Penuntutan = 45 pkr Eksekusi = 33 pkr | Penyelidikan = 77 kasus Penyidikan = 72 pkr Penuntutan = 63 pkr Eksekusi = 32 pkr |

2.3.1.3 Pertahanan dan Keamanan

Hasil tinjauan RPJMN menunjukkan bahwa dalam hal penanggulangan terorisme diperlukan kerja keras untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan guna menangkal setiap tindakan yang dapat mengganggu keamanan. Upaya peningkatan penggunaan alutsista TNI produksi dalam negeri sudah sesuai dengan rencana. Demikian juga halnya dengan almatsus POLRI. Untuk pencapaian MEF masih diperlukan kerja keras guna mencapai target yang telah ditetapkan. Uraian lebih rinci adalah sebagai berikut.

Pada tahun 2011 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Industri Pertahanan. Dengan adanya payung hukum ini, maka kinerja Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dapat meningkat. Beberapa kerja sama antara produsen alutsista TNI dari luar negeri dengan industri dalam negeri juga dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan produksi industri pertahanan nasional. Alutsista produksi dalam negeri yang berhasil dikembangkan dan menjadi bagian alutsista TNI diantaranya adalah senjata dan amunisi perorangan, Panser Angkut Personel Sedang (APS), Panser Angkut Personel Ringan (APR), alat komunikasi (alkom) berbagai jenis, perlengkapan perorangan dan kelompok, Kapal Patroli Cepat, Kapal Cepat Rudal (KCR), *Landing Platform Dock* (LPD), *Landing Craft Unit* (LCU), *Landing Craft Vehicle Personel* (LCVP), radar, pesawat transportasi, dan pesawat patroli maritim. Pada tahun 2013 diharapkan peran industri pertahanan dalam menyediakan alutsista TNI dan alat utama Polri semakin meningkat. Komitmen pemerintah untuk mematuhi UU 16 tahun 2011, diharapkan dapat mengurangi impor alutsista yang dapat diproduksi dalam negeri.

TABEL 2.7
PEMBANGUNAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN

| No | Indikator | Status Awal (2009) | Realisasi | | |
|----|--|--------------------|-----------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Penanggulangan Terorisme (jumlah teroris tertangkap *) | 501**) | 148 | 93 | 89 |
| 2 | Penggunaan alutsista TNI produksi Industri Dalam Negeri (%) | n.a | 12,7 | 13,6 | 15,9 |
| 3 | Penggunaan almatsus POLRI produksi Industri Dalam Negeri (%) | n.a | 10,3 | 12,5 | 14,3 |
| 4 | Pencapaian MEF | n.a | 24,2 | 29,6 | 35 |

Keterangan :*) Sumber BNPT, **) Angka 2000-2009

Pembenahan kinerja penyelidikan dan penyidikan tindak pidana merupakan bagian dari pembinaan internal polri yang direalisasikan melalui program reformasi birokrasi di tubuh Polri yang saat ini berada dalam tahap RB Polri Gelombang II. Penguatan fungsi Reserse secara simultan terus dilakukan dengan meningkatkan kompetensi penyidik; transparansi pelayanan masyarakat sebagai salah satu program *quick wins* bidang Reserse; dan Penyusunan SOP (*standard*

operating procedure) mengenai: pedoman SP2HP, Sistem Informasi Penyidikan, Sistem Pelayanan Masyarakat di Bareskrim Polri, dan Pedoman Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dari 360.249 kasus kriminalitas yang terjadi pada tahun 2011, telah diselesaikan sebanyak 192.950 kasus dengan *clearance rate* sebesar 53,6 persen. Sementara itu pada tahun 2012, dari 293.787 kasus kriminalitas yang terjadi telah diselesaikan sebanyak 155.789 kasus dengan *clearance rate* sebesar 53,0 persen. Dari kedua tahun tersebut menunjukkan terjadi penurunan yang relatif kecil yaitu 0,5 persen. Dengan kinerja penyidikan dan penyelidikan yang semakin meningkat, diharapkan pada tahun 2013 *clearance rate* dapat mendekati target RPJM 2010–2014, yaitu sebesar 55 persen.

2.4 Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola

Reformasi birokrasi dan tatakelola telah berhasil meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dari 2,8 (skala 1-10) pada tahun 2010 menjadi 3,0 (skala 1-10) pada tahun 2011 dan 32 (skala 1 – 100) pada tahun 2012. Dengan pola kemajuan seperti itu target RPJMN pada tahun 2014 nilai IPK mencapai 5 (skala 1-10) diperkirakan sulit dicapai. Demikian juga halnya dengan target Opini WTP atas Laporan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar 60 persen, nampaknya sulit dicapai. Sedang untuk indikator kualitas pelayanan publik, target Indeks Integritas Pelayanan Publik sebesar 8,0 diperlukan kerja keras, sedang untuk target Peringkat Kemudahan Berusaha sebesar 75 sangat sulit dicapai. Untuk indikator Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, target Indeks Efektifitas Pemerintahan sebesar 0,5 nampaknya sulit dicapai, dan 60 persen Kabupaten/Kota memperoleh predikat akuntabel memerlukan kerja keras. Sementara itu untuk indikator-indikator lainnya, seperti Opini WTP untuk instansi pusat, Skor Integritas Pelayanan Publik untuk instansi pusat, dan predikat akuntabel untuk K/L dan Pemerintah Provinsi diperkirakan dapat dicapai. Rincian dari indikator reformasi birokrasi dan tata kelola dapat dilihat pada Tabel 2.8.

TABEL 2.8
REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

| No | Indikator | Status Awal (2009) | Realisasi | | |
|----|---|--------------------|-----------|------|------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Indeks Persepsi Korupsi (IPK) | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 32 ¹⁾ |
| 2 | % K/L dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan K/L (Pusat) | 41 | 56 | 63 | 77 |
| 3 | % Pemda dengan Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemda (Daerah) | 2,7 | 3 | 9 | 16 |
| 4 | Skor Integritas Pelayanan Publik (Pusat) | 6,6 | 6,2 | 7,1 | 6,9 |
| 5 | Skor Integritas Pelayanan Publik (Daerah) | 6,5 | 5,3 | 6,0 | 6,3 |
| 6 | Peringkat Kemudahan Berusaha | 129 | 115 | 126 | 129 |
| 7 | Indeks Efektifitas Pemerintahan | -0,3 | -0,2 | -0,2 | n.a |
| 8 | % K/L yang Akuntabel | 47,4 | 63,3 | 82,9 | 95,1 |
| 9 | % Provinsi yang Akuntabel | 3,8 | 31,0 | 63,3 | 75,8 |
| 10 | % Kab/Kota yang Akuntabel | 5,1 | 8,8 | 12,8 | 24,4 |

Keterangan: ¹⁾ Pada 2012 ada perubahan metodologi dan skala menjadi (0-100)

Sebagai salah satu prioritas nasional dalam RPJMN 2010-2014, hasil pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sampai dengan akhir tahun 2012, sebanyak 59 K/L telah melaksanakan Reformasi Birokrasi sesuai dengan kebijakan nasional, 36 K/L diantaranya telah menerapkan tunjangan kinerja dan 23 K/L masih dalam proses. Pada awal tahun 2013 sebanyak 9 K/L telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya, untuk instansi pemerintah daerah, pelaksanaan Reformasi Birokrasi mulai dilaksanakan di 33 pemerintah provinsi, 33 pemerintah kota, dan 33 pemerintah kabupaten. Sejalan itu pula, telah dibentuk sebuah tim yang bertugas untuk menyiapkan bahan-bahan pertimbangan dan menyusun program restrukturisasi organisasi pemerintah pusat. Target pada tahun 2013, sebanyak 40 K/L telah menata organisasinya sehingga tepat fungsi dan tepat ukuran. Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diwujudkan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) di 70 lembaga pemerintah non kementerian, 15 pemerintah provinsi, dan 136 kabupaten/kota.
2. Dalam rangka upaya penataan daerah, telah ditetapkan Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) dan kebijakan moratorium pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB). Namun demikian masih banyak usulan pembentukan daerah baru inisiasi DPR-RI yang lolos pada tahun 2012 dengan ditetapkannya 12 DOB. Dalam hal penyerapan anggaran, sampai dengan tahun 2012, yaitu 99 persen dari daerah yang telah optimal 100 persen

menyerap Dana Alokasi Khusus (DAK) dan, selain itu terdapat 95 persen yang telah memanfaatkan DAK sesuai dengan Juklak/Juknis. Pada tahun 2013 ini ditargetkan 85 persen daerah telah mampu menyerap seluruh DAK yang diperoleh. Disamping itu, jumlah daerah yang berhasil menerbitkan LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan guna mencapai status WTP juga meningkat yaitu pada tahun 2012 sebanyak 17 provinsi atau 50 persen daerah dan pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 75 persen daerah.

3. Dalam rangka penyempurnaan manajemen kepegawaian negara, pemerintah bersama DPR sedang membahas RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pada tahun 2013, ditargetkan telah ditetapkan menjadi UU, yang diikuti dengan penetapan peraturan pelaksanaannya. Selanjutnya, dalam rangka penataan PNS baik jumlah, komposisi dan kompetensinya, pada tahun 2012 pemerintah telah melakukan Diklat Analisis Kepegawaian dengan peserta lebih dari 4.125 peserta dari K/L dan pemda. Secara bertahap, telah dilakukan berbagai penyempurnaan seperti sistem rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS), penataan distribusi, peningkatan kompetensi, pemantapan *assesment center* dan perbaikan sistem promosi dan mutasi. Percontohan sistem promosi secara terbuka, mulai diterapkan beberapa kementerian / lembaga.
4. Dalam rangka percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat maupun daerah, sesuai mandat RPJMN 2010-2014, sampai dengan tahun 2011 Kemendagri telah mengkoordinasikan pengkajian 12.000 Peraturan Daerah. Selanjutnya, hingga September 2012, langkah itu dilanjutkan dengan mengkaji 2.250 Perda. Pada tahun 2013, ditargetkan dilakukan kajian terhadap 2500 perda.
5. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, telah diterbitkan PP No. 90 Tahun 2012 sebagai pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Di samping itu sebanyak 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) telah mulai diimplementasikan. Sedangkan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, telah dibentuk 444 unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah, dan Pada tahun 2013, diharapkan kualitas penyelenggaraan PTSP makin meningkat dan UU Pelayanan Publik telah mulai dilaksanakan.

Penataan administrasi penduduk dilaksanakan melalui Sistem Administrasi Kependudukan (SAK), antara lain dengan: (a) penerbitan NIK bagi setiap penduduk di 497 Kabupaten/Kota; (b) penerapan e-KTP dengan target 172 juta jiwa dalam RPJMN 2010-2014, yang secara kumulatif harus diselesaikan pada tahun 2012. Sampai dengan tahun 2012, telah dilakukan perekaman sidik jari sebanyak 174.287.368 jiwa wajib KTP, 116.672.732 diantaranya telah dilakukan personalisasian/pencetakan dan 106.378.988 diantaranya telah didistribusikan kepada penduduk. Sedangkan penyediaan blangko e-KTP yang sudah dilengkapi dengan chip telah mencapai 157.488.878 keping.

2.5 Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan kesejahteraan rakyat mencakup pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan paska konflik, serta pembangunan kesejahteraan rakyat lainnya. Capaian dalam bidang pembangunan ini akan diuraikan pada bagian berikut.

2.5.1 Pendidikan

Pembangunan pendidikan nasional telah berada dalam jalur yang tepat. Hasil tinjauan paruh waktu RPJMN untuk pendidikan menunjukkan bahwa target yang ditetapkan dalam RPJMN diperkirakan dapat dicapai. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang pada tahun 2009 sebesar 7,7 tahun, meningkat menjadi 7,9 tahun pada tahun 2012. Selain itu, proporsi buta aksara penduduk berusia 15 tahun keatas yang diwakili oleh penduduk usia 15-59 tahun juga mengalami penurunan signifikan, dari 5,3 persen pada tahun 2009 menjadi 5,0 persen pada tahun 2010, dan terus menurun menjadi 4,4 persen pada tahun 2011. Angka tersebut diperkirakan akan terus turun dan mencapai 4,3 persen pada tahun 2013.

TABEL 2.9
PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

| No | Indikator | Status Awal (2009) | Capaian | | |
|----|---|--------------------|---------|------|--------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 ¹⁾ |
| 1 | Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun) | 7,7 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 2 | Angka buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas (%) | 5,3 | 4,8 | 4,4 | 4,8 |
| 3 | APM SD/SDLB/MI/Paket A (%) | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,7 |
| 4 | APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B (%) | 74,5 | 75,6 | 77,7 | 75,4 |
| 5 | APK SMA/SMK/MA/Paket C (%) | 69,6 | 70,5 | 76,5 | 79,0 |
| 6 | APK PT Usia 19-23 tahun (%) | 21,6 | 21,6 | 27,1 | 27,4 |

Keterangan: 1) Data sementara sesuai target 2012

Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut sejalan dengan meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2009, APM SD/MI/ sederajat dan APM SMP/MTs/ sederajat masing-masing sebesar 95,2 persen dan 74,5 persen, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 95,4 persen dan 75,6 persen, serta pada tahun 2011 terus meningkat menjadi 95,6 persen dan 77,7 persen. Pada tahun 2013, diharapkan kedua angka tersebut masing-masing dapat mencapai 95,8 persen dan 80,1 persen. Demikian pula partisipasi pendidikan jenjang pendidikan menengah terus membaik. Hal ini terlihat pada APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2009 sebesar 69,6 persen, meningkat menjadi 70,5 persen pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 76,5 persen. Diperkirakan pada tahun 2013 angka partisipasi kasar jenjang pendidikan menengah menjadi 82,0 persen sesuai dengan target 2013 yang

ditetapkan RPJMN 2010-2014. Sementara itu, APK jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2011 telah mencapai 27,1 persen, dan pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 28,7 persen.

Berbagai upaya Pemerintah yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap pendidikan, antara lain adalah penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS dimaksudkan untuk mengurangi beban siswa untuk membiayai operasional pembelajaran di sekolah. Biaya satuan BOS untuk jenjang SD/MI/ sederajat sejak tahun 2012 ditingkatkan menjadi Rp580 ribu/siswa/tahun, dari sebelumnya Rp397 ribu/siswa/tahun (kabupaten) atau Rp400 ribu/siswa/tahun (kota) pada tahun 2011. Demikian pula untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat, sejak tahun 2012 biaya satuan BOS meningkat menjadi Rp710 ribu/siswa/tahun, dari sebelumnya Rp570 ribu/siswa/tahun (di kabupaten) dan Rp575 ribu/siswa/tahun (di kota) pada tahun 2011. Untuk mendukung pelaksanaan Pendidikan Menengah Universal (PMU) dalam rangka peningkatan partisipasi pendidikan jenjang pendidikan menengah, pada tahun 2013 telah disediakan BOS untuk seluruh siswa di jenjang SMA/SMK/MA sebesar Rp1.010 ribu/siswa/tahun. Cakupan penerima BOS pada tahun 2013 di semua jenjang diperkirakan mencapai 52,3 juta siswa.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga ditandai oleh penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi, yang tercermin pada angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia sekolah. APS penduduk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) pada kuantil termiskin meningkat dari sebesar 72,2 persen pada tahun 2009 menjadi 77,9 persen pada tahun 2011. Peningkatan APS terjadi pada seluruh kelompok umur di kuantil termiskin, sehingga selisih persentase APS antara penduduk paling miskin dan paling kaya pada kelompok umur 13-15 dalam waktu 2009-2011 menurun dari 22,8 persen menjadi 17,1 persen dan pada kelompok umur 16-18 tahun menurun dari 41,6 persen menjadi 36,4 persen. Capaian ini antara lain didukung oleh program-program pengentasan kemiskinan termasuk penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2012, dari hampir 8 juta BSM yang disediakan di semua jenjang, 95 persennya tersalurkan kepada penerima. Untuk meningkatkan efektivitas BSM, distribusi jumlah penerima di daerah tertinggal, terpencil, kawasan nelayan, dan daerah sentra pengirim tenaga kerja ke luar negeri (TKI) ditingkatkan.

Kualitas layanan pembelajaran juga telah berhasil ditingkatkan, antara lain dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk merehabilitasi ruang kelas rusak berat/rusak sedang. Dari tahun 2011 dan 2012 Pemerintah telah merehabilitasi 91.093 ruang kelas rusak berat di jenjang SD/MI dan 23.464 ruang kelas rusak berat di jenjang SMP/MTs. Sisa ruang rusak berat yang belum direhabilitasi sebanyak 52.739 ruang kelas SD/MI dan 14.547 ruang kelas SMP/MTs rencananya akan diselesaikan pada tahun 2013 dan 2014.

Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan juga senantiasa ditingkatkan. Sampai dengan tahun 2012 proporsi guru yang memiliki kualifikasi minimal S1/D4 meningkat menjadi sebesar 62,3 persen, dari proporsi sebelumnya pada tahun 2011 sebesar 58,0 persen. Peningkatan juga terjadi pada proporsi guru yang telah tersertifikasi, yaitu menjadi sebesar 59,3 persen dari jumlah guru yang masuk kriteria untuk disertifikasi, atau 42,6 persen dari total jumlah guru di tahun 2012. Pada tahun 2013 diperkirakan terus meningkat menjadi 66,0 persen.

Peningkatan kinerja pendidikan telah didukung oleh meningkatnya anggaran pendidikan sesuai dengan amanat UUD 1945, yaitu minimal sebesar 20 persen dari APBN. Pada tahun 2013, anggaran pendidikan mencapai 20,0 persen dari APBN, yaitu sebesar Rp336,85 triliun. Anggaran pendidikan dialokasikan melalui belanja Pemerintah Pusat di 19 Kementerian/Lembaga sebesar Rp117,78 triliun, melalui Dana Transfer Daerah sebesar Rp214,07 triliun, serta melalui Pengeluaran Pembiayaan dalam bentuk Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp5,0 triliun.

2.5.2 Kesehatan

Status kesehatan masyarakat terus menunjukkan bahwa ada 3 (tiga) indikator yang kinerjanya diperkirakan dapat memenuhi target RPJMN yaitu: persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak; persentase balita yang ditimbang berat badannya, serta penurunan jumlah kasus TB per 100 ribu penduduk. Indikator lainnya telah juga menunjukkan perbaikan yang cukup baik, namun diperkirakan masih membutuhkan kerja keras untuk memenuhi target RPJMN, hasil tinjauan paruh waktu RPJMN untuk pembangunan kesehatan ditunjukkan pada Tabel 2.10.

TABEL 2.10
PEMBANGUNAN KESEHATAN

| No | Indikator | Status Awal (2009) | Capaian | | |
|----|---|--------------------|-------------------|------|--------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Umur harapan hidup (tahun) | 70,7 | 70,9 | 71,1 | 71,1 |
| 2 | Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup | 228 | n.a | n.a | n.a |
| 3 | Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih | 74,9 | 79,8 | 81,3 | 83,1 ¹⁾ |
| 4 | Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup | 34 | 34 | 34 | 32 ¹⁾ |
| 5 | Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi campak | 67 | 77,7 | 87,3 | 34,8 |
| 6 | Prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita (%) | 18,4 | 17,9 | n.a | n.a |
| 7 | Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) | 63,9 | 67,9 | 71,4 | 69,6 |
| 8 | <i>Total Fertility Rate</i> (TFR): Angka Kelahiran Total (per perempuan usia reproduksi) | 2,6 | 2,4 ²⁾ | n.a | 2,6 ¹⁾ |
| 9 | Persentase jangkauan akses sumber air bersih | 47,7 | 44,2 | 55,0 | n.a |
| 10 | Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk | 326 | 224 | 289 | 281 ³⁾ |

Keterangan: ¹⁾ Hasil Sementara SDKI 2012;

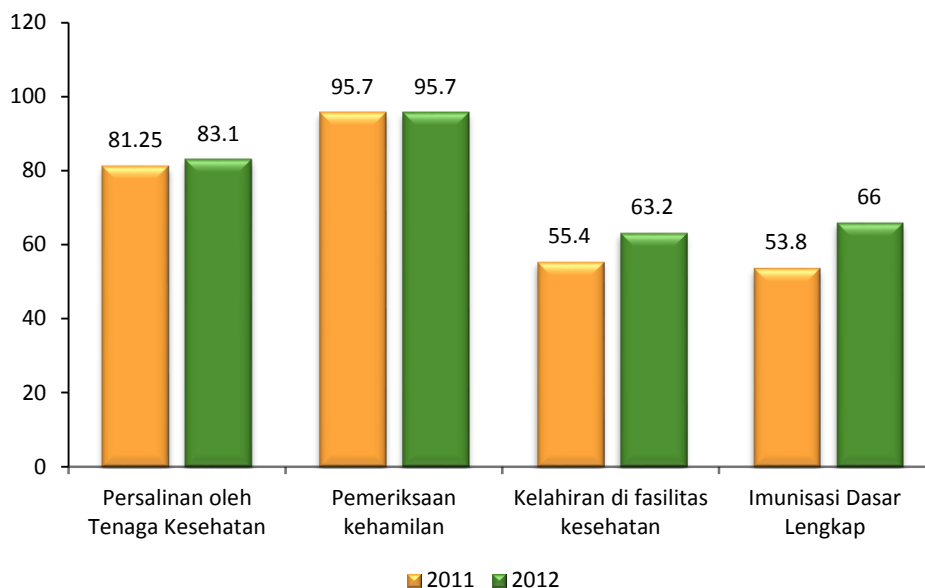
²⁾ Sensus Penduduk 2010;

³⁾ Data sampai dengan Maret 2012

Keberhasilan lainnya yang dicapai sampai dengan tahun 2012 adalah:

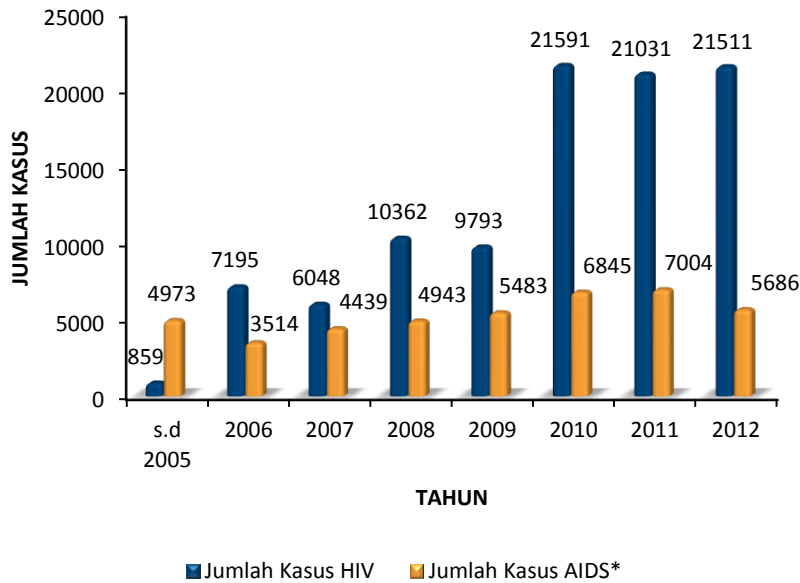
1. Membaiknya pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bersalin, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) dari 81,3 persen (2011) menjadi 83,1 persen (2012) dan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4) masing-masing dari 95,7 persen dan 88,3 persen (2011) menjadi sebesar 95,7 persen dan 90,2 persen (2012).

GAMBAR 2.7
STATUS INDIKATOR *PROXY* KESEHATAN IBU DAN ANAK



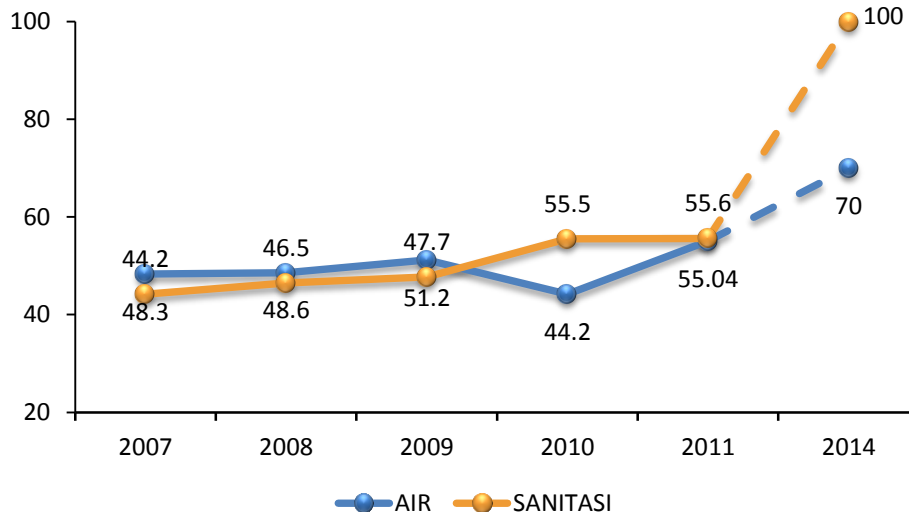
2. Program KB merupakan upaya pengendalian jumlah penduduk melalui pengetahuan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur (PUS) usia 15-49 tahun dalam merencanakan kehidupan untuk membentuk keluarga kecil yang berkualitas. Pencapaian tahun 2012 jumlah PUS yang menjadi peserta KB Aktif menjadi sebanyak 35,9 juta akseptor. Hal ini melebihi dari target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 28,2 juta akseptor. Sementara itu, capaian jumlah peserta KB Baru pada tahun 2012 sebanyak 9,4 juta akseptor. Hal ini juga melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 7,3 juta akseptor. Perkiraan pencapaian tahun 2013 berdasarkan sasaran target yang telah ditetapkan adalah jumlah peserta KB Aktif diperkirakan menjadi sebanyak 29,0 juta akseptor, dan jumlah peserta KB Baru diperkirakan sebanyak 7,5 juta akseptor.
3. Membaiknya kesehatan dan gizi anak antara lain ditandai dengan meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap dari 53,8 persen (2010) menjadi 66,0 persen (2012), meningkatnya balita ditimbang berat badannya (D/S) dari 67,9 persen (2010) menjadi 71,4 persen (2011), dan menurunnya prevalensi kekurangan gizi menjadi sebesar 17,9 persen.
4. Membaiknya upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular yang ditunjukkan oleh meningkatnya kasus baru TB paru (BTA positif) yang disembuhkan dari 86,2 persen (2011) menjadi 84,4 persen (2012), menurunnya angka penemuan kasus malaria *annual parasite index* (API) per 1.000 penduduk dari 1,8 (2011) menjadi 1,7 per 1.000 penduduk (2012), dan meningkatnya orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV dari 548.256 orang (2011) menjadi 884.905 orang (2012), dan yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS dari 57,5 persen (2010) menjadi sebesar 79,5 persen (2012).

GAMBAR 2.8
JUMLAH KASUS HIV DAN AIDS



- Meningkatnya upaya penyehatan lingkungan yang ditunjukkan dengan meningkatnya akses terhadap air minum layak dari sebesar 44,2 persen (2010) menjadi 55,0 persen (2011) dan akses terhadap sanitasi layak dari 55,5 persen (2010) menjadi sebesar 55,6 persen (2011).

GAMBAR 2.9
AKSES PENDUDUK TERHADAP AIR MINUM DAN SANITASI (%)



- Meningkatnya jumlah, kualitas, dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya tenaga dokter menjadi 32.492 orang, perawat 220.575 orang, bidan 124.164 orang, puskesmas

9.510 unit, puskesmas perawatan 3.152 unit, puskesmas non perawatan 6.358 unit, RS pemerintah 888 unit dan tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif sebanyak 4.354 orang yang ditempatkan pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK).

7. Meningkatnya jaminan pembiayaan kesehatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dari 9.321 (2011) menjadi 9.510 puskesmas (2012) dan meningkatnya penduduk yang memiliki jaminan kesehatan dari 63,1 persen (2011) menjadi 64,6 persen (2012).
8. Meningkatnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri, antara lain ditunjukkan dengan meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin dari 87,0 persen (2011) menjadi 92,9 persen (2012), sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi *Good Manufacturing Practices* (GMP) terkini dari 60,1 persen (2011) menjadi 67,8 persen (2012), cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan berkisar masing-masing 27 persen dan 16 persen dari sarana yang ada, dan produk obat dan makanan yang disampel dan diuji menjadi 80.240 sampel.

2.6 Penanggulangan Kemiskinan

Program-program penanggulangan kemiskinan sudah berjalan dengan baik meski kerja keras masih diperlukan untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan, lihat Tabel 2.11.

TABEL 2.11
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

| No | Indikator | Status Awal (2009) | Capaian | | |
|----|--|-----------------------|------------|------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH | 726.376 | 772.830 | 1.052.000 | 1.516.000 |
| 2 | Jumlah RTS penerima Raskin (15 kg per RTS selama 16 bulan) | 18.497.302 | 17.488.007 | 17.488.007 | 17.488.007 |
| 3 | PNPM Inti (Kecamatan) | 4.334 | 4.791 | 4.978 | 5.020 |
| 4 | Jumlah koperasi dan UMKM yang dapat mengakses kredit/ pembiayaan bank melalui linkage | n.a | n.a | 500 | 500 |
| 5 | Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan | 48,00 | 59,07 | 63,10 | 64,58 |

Pemberian bantuan tunai bersyarat dilanjutkan kepada lebih dari 1,5 juta rumah tangga sangat miskin (RTSM). Pemberian raskin 15 kg per rumah tangga sasaran (RTS) selama 16 bulan juga terus dilakukan kepada lebih dari 1,2 juta RTS. Pada tahun 2012, penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan telah mencapai 64,6 persen. Program penurunan kemiskinan melalui PNPM Inti juga terus ditingkatkan tiap tahunnya dengan jumlah kecamatan yang terjangkau meliputi 5.020 kecamatan. Pemberian fasilitas akses kredit/pembiayaan bank melalui linkage kepada koperasi dan UMKM jumlahnya juga terus meningkat dan berada pada jalur yang tepat. Pada tahun 2011 dan 2012, koperasi dan UMKM yang diberi fasilitas akses kredit/pembiayaan bank melalui *linkage* adalah masing-masing sebanyak 500 unit.

Hasil pelaksanaan 4 (empat) klaster program penanggulangan kemiskinan selama tahun 2012 dan target pencapaian tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Klaster 1 yaitu program bantuan sosial yang ditujukan untuk mengurangi beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak-hak dasarnya.
 - a) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2007 mencakup 387.928 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang tersebar di 7 provinsi, 48 Kabupaten dan 337 Kecamatan. Perluasan pelaksanaan hingga tahun 2012 telah mampu mencakup sasaran hingga 1.492.473 RTSM dengan sebaran di 33 provinsi, 166 Kabupaten, dan 1.787 Kecamatan. Target penambahan cakupan sasaran tahun 2013 adalah 884.000 RTSM dengan total target menjadi 2.400.000 RTSM. Pada tahun 2014, PKH diperluas

mencakup hingga 3.200.000 RTSM dengan peningkatan besaran bantuan menjadi rata-rata Rp.1.800.000/RTSM/tahun dan penambahan lokasi baru.

TABEL 2.12
TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PKH TAHUN 2007-2013

| Tahun | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013* |
|-----------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|
| Sasaran (RTSM) | Target | 500.000 | 642.000 | 720.000 | 816.000 | 1.116.000 | 1.516.000 | 2.400.000 |
| | Realisasi | 387.947 | 620.848 | 726.376 | 774.293 | 1.052.201 | 1.492.473 | NA |
| Lokasi | Provinsi | 7 | 13 | 13 | 20 | 25 | 33 | 33 |
| | Kabupaten | 48 | 70 | 70 | 88 | 118 | 166 | 497** |
| | Kecamatan | 337 | 637 | 781 | 946 | 1.387 | 1.787 | 2.667** |

Sumber : Kemensos, 2012,

Catatan : *) target dalam RKP 2013

**) perhitungan sementara

- b) Pelaksanaan Jamkesmas telah berhasil mendorong peningkatan cakupan jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan. Jamkesmas telah mampu meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, terutama untuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan. Sampai dengan tahun 2012, cakupan asuransi kesehatan telah mencapai sekitar 64,6 persen. Cakupan tersebut akan terus ditingkatkan dengan perkiraan pencapaian pada tahun 2013 menjadi sekitar 75,4 persen.
- c) Terkait pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM), pada tahun 2012 dari hampir 8 juta BSM yang disediakan di semua jenjang sekolah sebanyak 95 persen tersalurkan ke penerima. Pada tahun 2013 akan disediakan bagi 8,8 juta BSM di semua jenjang pendidikan.
- d) Pencapaian jumlah Peserta KB Baru yang berasal dari keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera 1/KS-1) pada tahun 2012 sebesar 4,3 juta akseptor, melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2012, yaitu sebesar 3,9 juta akseptor. Sedangkan untuk tahun 2013 sasaran target yang ditetapkan diperkirakan sebesar 4,0 juta peserta KB Baru yang berasal dari keluarga miskin. Sementara itu, pencapaian jumlah peserta KB Aktif yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) pada tahun 2012 sebesar 14,6 juta akseptor. Hal ini juga melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2012, yaitu sebesar 12,5 juta peserta. Pada tahun 2013 sasaran target yang ditetapkan diperkirakan sebesar 12,8 juta peserta KB Aktif yang berasal dari keluarga miskin.
- e) Dalam kerangka pengurangan ketimpangan kepemilikan tanah telah dilakukan reformasi agraria melalui kegiatan redistribusi tanah. Pada tahun 2012 telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 129.963 bidang. Target tahun

2013 untuk kegiatan redistribusi tanah adalah sebanyak 175.500 bidang.

2. Klaster 2 yaitu program-program pemberdayaan masyarakat yang dikoordinasikan dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

PNPM Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) pada tahun 2012 telah dilaksanakan di 5.070 kecamatan. Target pencapaian pada tahun 2013 untuk PNPM-MP adalah di 5.100 kecamatan sebagai antisipasi terhadap penambahan kecamatan baru sebagai akibat pemekaran.

Terkait dengan PNPM Kelautan dan Perikanan (PNPM-KP), pada tahun 2012 untuk lokasi di luar lokasi Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), telah dilaksanakan kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) perikanan budidaya sebanyak 3.000 kelompok dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) sebanyak 3.422 kelompok di 9 provinsi meliputi 40 kabupaten/kota. Tahun 2013, diperkirakan akan disalurkan bantuan untuk kegiatan PUMP perikanan tangkap untuk 1.000 kelompok; PUMP perikanan budidaya untuk 3.700 kelompok; PUMP pengolahan dan pemasaran untuk 500 kelompok; dan PUGAR untuk 1.400 kelompok.

Pada tahun 2012 kegiatan Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dapat terlaksana bagi 6.050 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau lebih dari target sasaran sebanyak 6.000 Gapoktan. Hal ini dikarenakan adanya tambahan anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan dari 50 Gapoktan. Pada tahun 2013 diharapkan dapat terlaksana sebanyak 3.500 Gapoktan.

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau dikenal dengan PISEW pada tahun 2012 mampu membangun infrastruktur sosial-ekonomi di 237 desa atau 28,1 persen lebih dari target RPJMN 2010-2014 sebanyak 185 kawasan. Total capaian pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi pada tahun 2010 hingga 2012 adalah sebanyak 711 desa. Perkiraan capaian program ini pada tahun 2013 adalah 79 kecamatan.

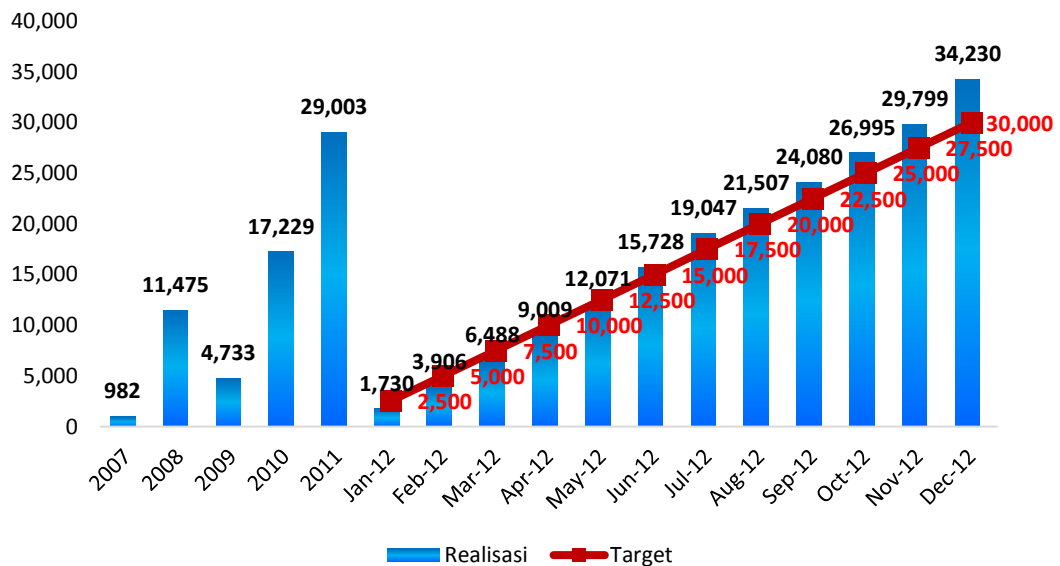
Untuk Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP), pada tahun 2010 hingga 2012 telah dilaksanakan di 15.362 desa, melebihi yang telah ditargetkan RPJMN 2010-2014 yaitu sebanyak 8.803 desa. Adapun perkiraan realisasi PIIP pada tahun 2013 adalah 6.640 desa.

Hasil capaian untuk kegiatan PNPM-DTK atau P2DTK (Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus) sampai dengan tahun 2012 adalah tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang terbagi menjadi BLM Kecamatan dan BLM Kabupaten untuk membiayai 8.651 sub proyek/kegiatan yang terdiri dari 2.123 sub proyek (24,5 persen) di Bidang Pendidikan, 1.608 sub proyek (18,6 persen) Bidang Kesehatan, 4.015 sub proyek (46,4 persen) di Bidang Infrastruktur dan 905 sub proyek (10,5 persen) Bidang Kepemudaan.

3. Klaster 3 yaitu program-program untuk memfasilitasi koperasi dan UMKM untuk mengakses permodalan, serta meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan. Hasil pelaksanaan pada tahun 2012 yaitu penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp34,2 triliun untuk lebih dari 1,9 juta debitur, dengan rata-rata kredit/pembiayaan sebesar Rp17,5 juta. Volume penyaluran KUR tersebut telah melampaui target tahun 2012 sebesar Rp30 triliun. Tingkat *non-performing loan* (NPL) KUR pada tahun 2012 cukup rendah yaitu 3,6 persen. Sebagian besar KUR disalurkan ke sektor perdagangan (37,5 persen), sektor pertanian dan perikanan (17,1 persen), dan sektor perdagangan terintegrasi dengan sektor hulu (14,2 persen). Perkembangan penyaluran KUR disajikan pada Gambar 2.10.

GAMBAR 2.10
PENCAPAIAN TARGET PENYALURAN KUR (RP MILIAR)



Sumber: Kemenko Perekonomian, 2012

Hasil pelaksanaan kegiatan di Klaster 3 lainnya pada tahun 2012 mencakup: (1) pendampingan bagi 27.520 calon debitur KUR dan sosialisasi KUR di 33 provinsi; (2) penyediaan 425 penyuluh perkoperasian bagi masyarakat dan diklat perkoperasian bagi 600 orang; (3) pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan bagi 2.100 orang; (4) peningkatan kapasitas 360 KSP/KJKS dan 360 orang pengelola KSP/KJKS; (5) fasilitasi transformasi 100 LKM menjadi KSP/KJKS; (6) fasilitasi bagi 500 koperasi untuk membangun kerja sama pembiayaan melalui linkage; (7) fasilitasi pembentukan lembaga penjaminan kredit daerah; (8) peningkatan kapasitas 150 konsultan keuangan mitra bank (KKMB) untuk memberikan layanan bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil, serta fasilitasi 50 koperasi untuk memanfaatkan layanan KKMB; dan (9) revitalisasi tiga unit pasar tradisional yang dikelola koperasi di daerah tertinggal/perbatasan.

4. Klaster 4 yaitu program-program pro rakyat yang ditujukan untuk meningkatkan dan memperluas cakupan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan. Hasil pelaksanaan program selama tahun 2012, antara lain:
 - a) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan pada tahun 2012 telah dilaksanakan pada 400 Pelabuhan Pelelangan Ikan (PPI). Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi bantuan langsung pada individu nelayan, kelompok nelayan, dan sarana prasarana PPI itu sendiri. Beberapa target kegiatan untuk individu nelayan di tahun 2012 yang telah dicapai mencakup pemberian sertipikasi hak atas tanah nelayan sebanyak 13.741 sertipikat. Untuk bantuan pada kelompok nelayan telah diberikan bantuan kapal penangkap ikan, bantuan langsung melalui PUMP perikanan tangkap untuk 3.700 kelompok, budidaya untuk 600 kelompok dan pengolahan untuk 1500 kelompok.
 - b) Pada pelaksanaan pembangunan Rumah Sangat Murah dari target RPJMN Tahun 2010-2014 sebanyak 50.000 unit, pada tahun 2012 telah terbangun rumah swadaya sebanyak 18.159 unit atau total 32.512 unit untuk capaian tahun 2010 hingga 2012. Perkiraan realisasi pembangunan perumahan swadaya pada tahun 2013 adalah sebanyak 20.000 unit sehingga sasaran RPJMN 2010-2014 telah terlampaui lebih dari 2.000 unit.

2.7 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Hasil tinjauan paruh waktu RPJMN menunjukkan bahwa pembangunan prioritas nasional lingkungan hidup dan pengelolaan bencana secara umum memberi keyakinan sasaran RPJMN dapat tercapai, lihat Tabel 2.13. Secara lebih rinci, capaian hingga tahun 2013 dan perkiraan tahun 2013 diuraikan sebagai berikut.

Pada bidang **Perubahan Iklim**, hingga tahun 2012 telah dikembangkan upaya mitigasi dalam wujud penyusunan Rencana Aksi Nasional/Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN/RAD-GRK), dan upaya adaptasi perubahan iklim dalam wujud Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API). RAN/RAD-GRK disusun sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020 dengan upaya sendiri, yang kemudian akan dikembangkan menjadi 41 persen apabila ditambah bantuan internasional. RAN-GRK ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011, yang berisikan rencana aksi yang mencakup berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Di samping itu, di tingkat daerah (provinsi) telah diluncurkan pula RAD-GRK pada bulan Desember 2012, dengan status telah disahkan 29 RAD-GRK dalam bentuk Peraturan Gubernur. Pada tahun 2013 ditargetkan untuk dapat memfinalkan *baseline* emisi dan upaya pelaksanaan

penurunan emisi di tingkat nasional/daerah, serta dilakukan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan RAN/RAD-GRK.

Dalam upaya adaptasi perubahan iklim, pada tahun 2012 telah disusun rancangan RAN-API, yang berisikan rencana aksi adaptasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Bidang Ketahanan Ekonomi (Sub-bidang Ketahanan Pangan dan Sub-bidang Kemandirian Energi), Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan (Sub-bidang Kesehatan, Sub-Bidang Pemukiman, dan Sub-bidang Infrastruktur), Bidang Ketahanan Ekosistem, Bidang Ketahanan Wilayah Khusus (Sub-bidang Perkotaan, dan Sub-Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil), dan Bidang Pendukung. Diharapkan, rancangan RAN-API tersebut dapat difinalisasi pada kuartal pertama tahun 2013, dan dilanjutkan dengan implementasi di masing-masing sektor terkait.

Selanjutnya, berbagai upaya mitigasi perubahan iklim juga dilakukan di sektor kehutanan melalui kegiatan inti seperti pengurangan laju deforestasi serta rehabilitasi hutan dan lahan. Laju deforestasi pada tahun 2009-2011 mengalami penurunan dibandingkan dengan periode 2006-2009, yaitu dari rata-rata 0,83 juta hektar per tahun menjadi 0,45 juta hektar per tahun. Dengan potensi karbon 1 hektar setara 725 ton CO₂e, maka pengurangan deforestasi ini diperkirakan telah menurunkan emisi sekitar 489 juta ton CO₂e, setara dengan 72,8 persen dari target sebesar 87,6 persen dari total 767 juta ton CO₂e pada tahun 2020 atau sekitar 672 juta ton CO₂e.

Upaya mitigasi lainnya adalah melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang tidak saja mengendalikan kerusakan lingkungan tetapi juga mendukung penurunan emisi. Dalam hal rehabilitasi hutan dan lahan kritis pencapaian hingga tahun 2012 secara kumulatif telah mencapai 1.251.883 hektar. Upaya ini diperkuat dengan pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat melalui penetapan areal kerja pengelolaan hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa serta pembangunan hutan rakyat kemitraan. Dalam periode 2010-2012 telah dicapai sebesar 1.537.005 hektar penetapan HKm dan hutan desa, sementara hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku industri pertukangan sebesar 158.421 hektar. Kegiatan rehabilitasi ini diperkuat dengan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS terpadu (RPDAST) sebagai acuan berbagai pihak dalam memelihara serta meningkatkan daya dukung dan fungsi DAS. Hingga tahun 2012 telah disusun 95 unit RPDAST dari target pada tahun 2014 sebanyak 108 unit.

TABEL 2.13
LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA

| No | Indikator | Satuan | Status Awal (2009) | Capaian | | |
|----|---|----------------|---------------------------------|---------|------------------------|-----------|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Fasilitasi rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS Prioritas | ha | 703.045 | 229.217 | 742.364 | 1.251.883 |
| 2 | Fasilitasi penetapan areal kerja pengelolaan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa | ha | 78.242 | 528.507 | 1.036.678 | 1.537.005 |
| 3 | Fasilitasi pembangunan hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku industri pertukangan | ha | n.a | 51.506 | 102.067 | 158.421 |
| 4 | Penurunan jumlah hotspot di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi berkurang 20% per tahun dari rerata 2005-2009 | Persentase (%) | 58.890 titik (rerata 2005-2009) | 83,4 | 51,7 | 45,1 |
| 5 | Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (DAS) | Unit | n.a | 22 | 58 | 95 |
| 6 | Jumlah industri pertambangan, energi dan migas, agroindustri dan manufaktur yang dipantau dan diawasi (industri) | Industri | 627 | 705 | 996 | 1.312 |
| 7 | Persentase capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional (maksimal 100 persen) | Persentase (%) | 59,8 | 61,1 | 60,3 (angka sementara) | n.a |
| 8 | Kesinambungan sistem analisa data di bidang gempa bumi dan tsunami | Persentase (%) | 75 | 90 | 100 | 100 |
| 9 | Persentase tingkat kemampuan pelayanan data dan informasi meteorologi publik dan cuaca ekstrim | Persentase (%) | 45 | 50 | 66,7 | 78,8 |
| 10 | % pengguna informasi perubahan iklim dan kualitas udara (%) | Persentase (%) | 75 | 39 | 68 | 80 |
| 11 | Terlaksananya pemenuhan kebutuhan logistik dan peralatan kebencanaan (Prov/Kota) | Lokasi | 5 | 16 | 265 | 160 |
| 12 | Terbentuknya satuan reaksi cepat/SRC-PB (Lokasi) | Lokasi | 7 | 2 | 2 | 2 |
| 13 | Terlaksananya koordinasi dan penanganan tanggap darurat di pusat dan daerah | lokasi | - | 58 | 40 | 137 |

Upaya rehabilitasi dan konservasi sumberdaya alam juga dilakukan pada ekosistem wilayah pesisir dan laut. Sampai dengan tahun 2012, total luasan kawasan konservasi perairan adalah sebesar 15,8 jta ha. Dari total luasan tersebut, kawasan konservasi perairan yang dikelola secara efektif adalah seluas 3,2 juta. Selain itu, telah dilaksanakan pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi. Pada tahun 2013 luasan kawasan konservasi perairan yang terkelola diperkirakan semakin meningkat menjadi 3,6 juta ha.

Upaya **pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan** dilakukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Untuk itu pada

tahun 2012 telah dilaksanakan berbagai upaya, antara lain: (i) pemantauan dan pengawasan penataan terhadap 1317 perusahaan, melalui mekanisme Program Peningkatan Kinerja Perusahaan (PROPER), (ii) pengelolaan sampah serta pemantauan tingkat pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui pelaksanaan program Adipura, dimana sebanyak 125 kota meraih penghargaan dari 350 kota yang dipantau, dan sebanyak 14 Kota mengikuti program upaya pengurangan volume sampah skala kota (iii) pemantauan kualitas lingkungan (air, udara, tanah, kebisingan, deposisi asam, POP's, biologi) sebanyak 828 unit; (iv) evaluasi kualitas udara di 45 kota; (v) pengelolaan keanekaragaman hayati dan pengendalian kerusakan lingkungan melalui pengembangan Taman Kehati di 9 Kab/kota dan Program Menuju Indonesia Hijau di 200 Kabupaten; dan (vi) penyusunan kebijakan, peraturan dan pedoman serta rencana aksi pengelolaan danau prioritas, situ dan waduk (3 dokumen).

Selanjutnya dalam rangka pengendalian kebakaran hutan telah dilakukan berbagai upaya untuk mencapai target penurunan jumlah *hotspot* di Pulau Kalimantan, Sumatera dan Sulawesi -20 persen per tahun dari rerata periode tahun 2005-2009. Data menunjukkan bahwa sampai dengan 31 Desember 2012 jumlah penurunan *hotspot* sebesar 45,1 persen dari rerata *hotspot* tahun 2005-2009.

Upaya pengendalian kerusakan hutan juga dilaksanakan melalui pengukuhan kawasan hutan yang memperjelas batas kawasan hutan, baik antar fungsi kawasan hutan maupun antara kawasan hutan dengan non hutan (areal penggunaan lain/APL). Pada akhir tahun 2012 telah dicapai penyelesaian tata batas sepanjang 25.851 km dan diperkirakan 43.000 km di tahun 2013 dari target 63.000 km di akhir masa RPJMN 2010-2014. Pengukuhan kawasan hutan diperkuat dengan penetapan kelembagaan yang beroperasi untuk mengelola kawasan hutan melalui pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH bertujuan meningkatkan fungsi sosial, ekonomi dan lingkungan dari kawasan hutan. Pembentukan dan operasionalisasi KPH hingga saat ini telah mencapai 60 unit, diperkirakan tahun 2013 bertambah menjadi 90 unit dan akan terus ditingkatkan untuk mencapai target 120 unit pada tahun 2014.

Untuk operasionalisasi KPH dilakukan peningkatan sumber daya manusia, baik dari jumlah maupun kapasitas, melalui penyelenggaraan pendidikan menengah kejuruan kehutanan dan sertifikasi penyuluh kehutanan. Hingga tahun 2012 telah dicapai 1.195 siswa yang mengikuti pendidikan dan perkiraan tahun 2013 bertambah sebanyak 288 siswa. Sementara itu dalam hal penyuluhan pada tahun 2012 telah diterbitkan sertifikasi penyuluh bagi 565 orang dan diperkirakan menjadi 1.065 orang pada tahun 2013.

Selanjutnya, dalam rangka pengendalian kerusakan sumberdaya kelautan telah dilakukan pengawasan kegiatan perikanan yang merusak (*destructive fishing*) dan pengawasan pencemaran perairan. Pada tahun 2012 upaya pengawasan sumberdaya kelautan difokuskan di empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP 711 (Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan), WPP 712 (Laut Jawa), WPP 713 (Selat Makasar, Teluk Bone, Laut Flores,

dan Laut Bali), dan WPP 715 (Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Laut Berau). Selain itu dilakukan penguatan fungsi kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) pada 786 kelompok di 33 provinsi.

Hingga tahun 2012, sistem **peringatan dini** iklim dan cuaca telah mencapai hasil meningkatnya peringatan dini cuaca ekstrim mencapai 3 jam sebelum kejadian cuaca ekstrim melalui sistem *Meteorological Early Warning System* (MEWS), meningkatnya kecepatan peringatan dini tsunami mencapai lima menit setelah kejadian gempa melalui sistem *Tsunami Early Warning System* (TEWS), dan meningkatnya kecepatan peringatan dini iklim melalui *Climate Early Warning System* (CEWS). Adapun pengembangan instalasi yang mendukung untuk sistem MEWS, TEWS dan CEWS hingga tahun 2012 ini antara lain meliputi: (i) MEWS: pembangunan radar cuaca di 27 unit, *Automatic Weather Observation System* (AWOS) di 16 lokasi, *Display C-Pub* di 19 lokasi, dan *Automatic Weather Station* (AWS) di 182 lokasi; (ii) TEWS: instalasi *seismic broadband* di 163 lokasi, *accelerograph* di 247 lokasi, sirine di 33 lokasi dan *seismic borehole* di 2 lokasi; (iii) CEWS: pembangunan Stasiun Meteorologi Pertanian Khusus (SMPK) di 21 lokasi, *Automatic Agroclimate and Weather Station* (AAWS) di 79 lokasi, *Automatic Rain Gauge* (ARG) di 51 lokasi, penyelenggaraan Sekolah Lapangan Iklim (SLI) di 30 lokasi dan *Global Atmospheric Watch* (GAW) di 2 lokasi. Berdasarkan capaian tersebut, diharapkan capaian pada tahun 2013 dapat meningkat, sehingga peringatan dini cuaca ekstrim dapat disampaikan lebih dari 3 jam sebelum kejadian cuaca ekstrim melalui sistem MEWS, peringatan dini tsunami disampaikan kurang dari lima menit setelah kejadian gempa melalui sistem TEWS, dan peringatan dini iklim dapat lebih akurat melalui CEWS.

Pada tahun 2012, pencapaian kegiatan yang terkait **penanggulangan bencana**, antara lain: (i) pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan penanggulangan bencana di 33 Provinsi dan 160 Kabupaten/Kota; (ii) kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di 33 provinsi, penyusunan rencana kontingensi di 12 lokasi (mengenai bencana banjir, gempa bumi dan tsunami, kegagalan teknologi dan letusan gunung api), fasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di 33 kabupaten/kota; peningkatan kapasitas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) melalui pemantapan teknis, gladi penanggulangan bencana dan gelar kesiapsiagaan SRC-PB di 2 lokasi wilayah barat dan timur; (iii) dukungan penanganan darurat pada 137 kejadian bencana, yang terdiri dari bencana banjir sebanyak 69 kejadian, angin puting beliung 26 kejadian, banjir dan longsor 21 kejadian, dan kekeringan 21 kejadian; dan (iv) pengembangan desa pesisir tahan bencana di 40 desa meliputi 16 kabupaten/kota. Sementara perkiraan pencapaian tahun 2013 antara lain adalah: (i) peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, melalui pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan penanggulangan bencana di 200 kab/kota di 33 Provinsi; (ii) dukungan dan fasilitasi penyusunan rencana kontinjensi di 10 lokasi; (iii) pelaksanaan tanggap darurat yang efektif dan efisien di 150

lokasi/kejadian pasca bencana; dan (iv) pengembangan desa pesisir tahan bencana di 66 desa meliputi 22 kabupaten/kota.

Terkait dengan pelaksanaan Direktif Presiden RI dalam rangkaantisipasi ancaman gempa bumi dan tsunami, pada tahun 2013 ditargetkan akan dilakukan pembangunan shelter sebanyak 139 unit beserta sarana prasarana pendukungnya, pengembangan sirene sistem peringatan dini sebanyak 1.300 unit di 51 kab/kota serta pengembangan 1.080 desa tangguh yang tersebar di 51 kabupaten/kota di sepanjang pesisir pantai barat Pulau Sumatera dan pesisir pantai selatan Pulau Jawa.

2.8 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik

Tinjauan paruh waktu RPJMN 2010-2014 tentang pembangunan untuk daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik disajikan pada Tabel 2.14. Uraian rinci dari capaian tersebut disajikan pada bagian berikut ini.

TABEL 2.14
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASKA KONFLIK

| NO | Indikator | Status Awal (2009) | Capaian | | |
|----|---|-----------------------|---------|------|------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 6,2 |
| 2 | Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal | 20,2 | 21,2 | 19,5 | 18,3 |
| 3 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal | 65,8 | 66,3 | 66,6 | 67,5 |
| 4 | Jumlah kabupaten daerah tertinggal | 199 | 183 | - | 142* |

Keterangan : *) Target tahun 2014 = 133 (sasaran RPJMN 2010-2014: pengentasan setidaknya 50 Kabupaten)

Untuk mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terluar dan pascakonflik, sampai dengan 2012, pemerintah telah melakukan pembangunan sarana dan prasarana, pendayagunaan pulau-pulau kecil, peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal, dan perbatasan. Capaian kebijakan tersebut sampai dengan tahun 2012 antara lain : (1) terbangunnya permukiman transmigrasi untuk 7.000 KK; (2) terbangunnya jalan sepanjang 365 km dan jembatan sepanjang 699,80 meter di wilayah perbatasan, wilayah terluar dan terdepan; (3) tersedianya pembangunan 12 dermaga penyeberangan dan beberapa unit dermaga lain; (4) pengadaan 139 rute angkutan udara perintis; (5) tersedianya jasa akses layanan komunikasi dan informatika 30.441 Desa Berdering atau 92 persen dari target dan 6.694 desa Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) atau 116,5 persen dari target; (6) teridentifikasi dan terpetakannya potensi 39 pulau-pulau kecil, termasuk pulau kecil terluar; (7) terfasilitasinya penyediaan infrastruktur pulau-pulau kecil terluar (20 pulau) dan

(8) pengembangan kawasan perdesaan di daerah tertinggal secara holistik berbasis pengembangan komoditas unggulan daerah yang berlokasi di 64 kabupaten tertinggal.

Untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik sampai dengan 2012, pemerintah telah meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dengan membangun 24 unit Rumah Sakit Bergerak dan 86 unit Puskesmas Rawat Inap. Di bidang pendidikan telah disalurkan tunjangan khusus untuk 53.954 guru jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerah terpencil serta 3.790 orang guru madrasah di daerah terpencil.

Perkiraan capaian pelaksanaan pembangunan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik pada tahun 2013 antara lain : (1) terbangunnya permukiman transmigrasi untuk 4.610 KK; (2) pengadaan 132 rute angkutan udara perintis; (3) tersedianya jasa akses layanan komunikasi dan informatika 33.184 desa berdering; (4) teridentifikasi dan terpetakannya potensi 60 pulau-pulau kecil, termasuk pulau kecil terluar; (5) terfasilitasinya penyediaan infrastruktur pulau-pulau kecil terluar (60 pulau).

Perkiraan pencapaian output tahun 2013 untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, antara lain : peningkatan pelayanan kesehatan dasar dengan membangun 24 unit Rumah Sakit Bergerak dan 91 unit Puskesmas Rawat Inap. Di bidang pendidikan telah disalurkan tunjangan khusus untuk 56.287 guru jenjang pendidikan dasar dan menengah di daerah terpencil serta 3.500 orang guru madrasah di daerah terpencil.

Sedangkan untuk upaya penegasan dan pengamanan batas wilayah negara (BWN) serta pengembangan kawasan perbatasan (KP) pada tahun 2012 telah dilakukan dengan penyediaan infrastruktur dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat telah dikordinasikan dengan dilaksanakannya pembukaan akses beberapa ruas jalan menuju lokpri di 15 kabupaten perbatasan Kalimantan, NTT, dan Papua melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk pengamanan batas wilayah dalam konteks perbatasan laut, dilakukan pengamanan sumberdaya kelautan dengan meningkatkan pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Bagian Barat dan Bagian Timur yang bebas IUU (*Illegal, Unreported, Unregulated*) Fishing, capaian telah dilaksanakan pengawasan mencapai 6 WPP di Bagian Barat dan 12 untuk WPP di Bagian Timur. Dalam konteks perbatasan darat, telah dilakukan pembangunan sarana dan prasarana perbatasan sebanyak 206 pos keamanan dari target tahun 2014 sebanyak 224 pos (total kebutuhan minimal sebanyak 396 pos pertahanan). Sedangkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan telah dilaksanakan penggelaran satuan TNI di pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan RI – Malaysia, RI – Filipina, RI – Timor Leste, dan RI – Papua Nugini. Selain itu, telah dilaksanakan pula operasi bakti TNI secara terpilih di wilayah perbatasan melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Dalam rangka menyelesaikan masalah perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung, Pemerintah telah memperkuat diplomasi perbatasan melalui perundingan terkait dengan

pembuatan perjanjian bilateral dan trilateral antara RI-Malaysia, Filipina, Singapura, Timor Leste, Vietnam, dan Palau telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan. Pemerintah secara berkesinambungan melaksanakan kebijakan *Border Diplomacy*. Kemajuan signifikan tersebut ditandai dengan telah dilakukannya sebanyak 119 perundingan dari total 60 target perundingan (12 perundingan setiap tahun) yang terdapat dalam RPJMN 2010-2014.

Untuk penyelesaian pemetaan wilayah perbatasan RI dengan Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, dan Filipina, disertai dengan upaya percepatan penyelesaian delimitasi batas pada segmen-segmen batas yang belum disepakati, telah dicapai hasil-hasil pembangunan antara lain: (1) tersusunnya peta batas wilayah negara di darat, yaitu Peta *Joint Mapping* RI-PNG skala 1 : 50.000 sebanyak 27 nomor lembar peta (NLP) atau 100 persen dari 27 NLP yang direncanakan; (2) Peta *Joint Mapping* RI-Malaysia skala 1 : 50.000 sebanyak 45 NLP atau 100 persen dari 45 NLP yang direncanakan; (3) tersusunnya peta batas wilayah negara di laut, yaitu Peta Zona Ekonomi Eksklusif skala 1 : 1.000.000 (telah selesai 100 persen), Peta Garis Pangkal skala 1 : 200.000 (telah selesai 100 persen), Peta NKRI skala 1 : 5.000.000 sebanyak 1 NLP, Peta pulau-pulau sebanyak 94 pulau atau 82,5 persen dari 114 pulau-pulau terluar yang direncanakan; (4) terkelolanya basis data dan sistem informasi batas wilayah negara dan daerah. Capaian pembangunan lainnya adalah tersedianya data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) sebanyak 184 SP.

2.8.1 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat.

Semenjak ditetapkan pada tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) menjadi tonggak pendorong akselerasi dan sinkronisasi program pembangunan di segala bidang di kedua provinsi paling timur Indonesia tersebut. Dengan terbentuknya Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), maka upaya percepatan pembangunan diharapkan dapat dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan kuat.

Pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (P4B) memiliki 3 strategi utama, yaitu : (1) program yang bersifat cepat terwujud dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (*quick wins*); (2) program menyeluruh dalam bentuk (*new deals plus*); (3) program pembangunan berbasis kawasan yang sinergis dengan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) khususnya koridor Maluku dan Papua.

Selama satu tahun pelaksanaan percepatan pada tahun 2012, berbagai pencapaian yang dihasilkan melalui lima fokus pembangunan, berupa:

1. Pengembangan ekonomi melalui: (a) tersedianya 1759 ekor sapi di kawasan peternakan terpadu di Bomberai; (b) pembinaan Industri pengolahan sagu rakyat untuk 15 kelompok (150 orang);
2. Peningkatan pelayanan pendidikan melalui: (a) pelayanan pendidikan gratis melalui BOS SD bagi 556.682 siswa, BOS SMP bagi 144.688 siswa, Rintisan BOS SMA bagi 72.163 siswa, dan

Rintisan BOS SMK bagi 37.633 siswa (b) 14 unit SD-SMP satu atap berpola asrama; (c) sertifikasi guru TK dan SD dengan kuota sebanyak 2322 orang, Strata Satu (S-1/D-4) sebanyak 152 orang; (d) beasiswa bagi 769 mahasiswa Papua dan Papua Barat di 32 PTN;

3. Pelayanan kesehatan melalui: (a) pelayanan kesehatan gratis melalui Jamkesmas dan Jampersal di Puskesmas dan jaringannya serta kelas 3 RS di 40 Kabupaten/Kota untuk pelayanan dasar, dan 17 kabupaten/kota untuk pelayanan kesehatan rujukan; (b) pelayanan Kesehatan Bergerak (*Mobile Clinic*) di 23 kabupaten/kota; (c) pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMTAS) di 4 kabupaten/kota; (d) pengadaan tenaga kesehatan meliputi 48 Dokter Spesialis di 19 kabupaten, 197 PTT dokter di 34 Kab, 19 dokter gigi di 14 Kab, 89 Bidan PTT di 12 Kab, 47 orang tenaga kesehatan penugasan khusus di 4 Kab; (e) peningkatan 1 RS Pendidikan (RSS Dok II Jayapura); (f) pembangunan Puskesmas di 13 kabupaten; (g) pemberantasan dan pengendalian penyakit menular;
4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dasar melalui: (a) penanganan 4 ruas jalan prioritas menembus pegunungan tengah + 4 ruas jalan tambahan; (b) penanganan 2 ruas jalan prioritas + 2 ruas jalan tambahan di Papua Barat; (c) pembangunan 12 unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan 1 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
5. Pemihakan terhadap putra/putri asli Papua melalui: (a) PTN diterima sebanyak 769 siswa di 32 PTN seluruh Indonesia; (b) pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian, diterima 10 orang; (c) STIS, diterima 16 orang siswa melalui jalur PMDK dan diberikan matrikulasi; (d) STPN, diterima 15 orang; (e) Akademi TNI dan Akademi Kepolisian, diterima 16 orang siswa; (f) Anggota TNI, diterima 66 orang; (g) Anggota POLRI, diterima 757 orang; (h) pemihakan kepada pengusaha asli Papua melalui Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Khusus Papua dan Papua Barat.

Dalam menjaga konsistensi upaya percepatan pembangunan untuk terus berjalan, langkah terobosan yang terus dilakukan pada tahun 2013 menitikberatkan pada: (1) pembangunan jalan strategis sepanjang 3.488 km di 81 ruas jalan, yaitu Pegunungan Tengah Papua sepanjang 3.000 km dan wilayah terisolir Papua Barat sepanjang 1.500 km; (2) pembangunan sekolah berpola asrama di 7 kabupaten (Jayapura, Merauke, Wamena, Biak, Nabire, Manokwari, Sorong); (3) pembangunan RSUD di 15 kabupaten, yaitu 12 kabupaten di Papua dan 3 kabupaten di Papua Barat; (4) pembangunan pasar tradisional sebanyak 1.400 unit yang terdistribusi merata di 933 kampung di Provinsi Papua dan 467 kampung di Provinsi Papua Barat; dan (5) pendidikan S1 bagi 1.800 siswa asli Papua di Perguruan Tinggi Negeri terakreditasi sebanyak 1.800 siswa.

Semangat percepatan yakni keberpihakan dan pemihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP), diwujudkan melalui sinkronisasi program dan anggaran Kementerian/Lembaga untuk upaya percepatan. Salah satu keberpihakan nyata adalah keberadaan kerangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai bagian dari

Prioritas Nasional 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik.

2.9 Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pembangunan lainnya di bidang kesejahteraan rakyat meliputi pembangunan: (a) kehidupan beragama; (b) pariwisata, (c) pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan; serta (d) pemuda dan olah raga. Hasil tinjauan paruh waktu pelaksanaan pembangunan ini disajikan pada Tabel 2.15.

TABEL 2.15
PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN RAKYAT LAINNYA

| No | Indikator | Status Awal (2009) | Capaian | | |
|----|---|--------------------|---------------|---------|----------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1 | Pelaksanaan Ibadah Haji serta Pengawasan Haji yang tertib dan lancar (jemaah) | - | 221.000 | 221.000 | 211.000 |
| 2 | Pelayanan kesehatan kepada jemaah haji (jemaah) | - | 221.000 | 221.000 | 211.000 |
| 3 | Jumlah wisatawan mancanegara (juta orang) | 6,3 | 7,0 | 7,7 | 8,4 |
| 4 | Jumlah pergerakan wisatawan Nusantara (juta perjalanan) | 229,7 | 234,4 | 236,8 | 245,0 |
| 5 | Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG ¹⁾ | - | 8 | 12 | - |
| 6 | Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG ²⁾ | - | 7 K/L ujicoba | 11 K/L | 28 K/L 10 prov |

Keterangan: 1) PUG=Pengarus-Utamaan Gender;
2) ARG = Anggaran Responsif Gender

2.9.1 Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama di kalangan masyarakat belum sepenuhnya tercermin dalam sikap dan perilaku. Perkembangan kehidupan beragama dalam beberapa hal terlihat adanya kemajuan dengan semakin banyaknya momen-momen, perayaan, maupun ritual keagamaan yang tidak hanya dinikmati oleh pemeluk agama yang bersangkutan namun juga melibatkan seluruh komponen masyarakat sebagai bentuk kohesi sosial. Walaupun seringkali masih dijumpai adanya gesekan horizontal di kalangan masyarakat, hal ini dapat mempengaruhi terwujudnya masyarakat yang aman dan damai. Selanjutnya prioritas pembangunan agama lainnya adalah peningkatan kualitas penyelenggaraan haji. Optimalisasi dana setoran awal telah digunakan untuk subsidi beberapa komponen haji seperti pemondokan dan katering. Sehingga pada tahun 2012, telah direalisasikan 98 persen pemondokan jemaah haji berada dalam radius kurang dari 2.500 m.

2.9.2 Pariwisata

Pada tahun 2012, kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) mencapai sebesar 8,0 juta orang atau meningkat 5,0 persen dibanding tahun 2011. Jumlah penerimaan devisa diperkirakan sebesar USD9,12 miliar atau meningkat 6,7 persen dari penerimaan devisa tahun 2011 yang sebesar USD8,55 miliar. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2012 mencapai 245 juta perjalanan, dengan pengeluaran wisnus sebesar

Rp171,5 triliun. Sementara itu, daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global juga mengalami peningkatan. Berdasarkan *The Travel and Tourism Competitiveness Report 2011* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum (WEF)*, peringkat daya saing pariwisata Indonesia pada tahun 2011 meningkat menjadi posisi 74 dari 139 negara, dari peringkat 81 dari 133 negara pada tahun 2009.

2.9.3 Pengarusutamaan Gender, Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Pencapaian kebijakan terkait pengarusutamaan gender, serta perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dapat dilihat dari berbagai aspek.

Pencapaian terkait dengan penerapan pengarusutamaan gender ditunjukkan dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dari tahun ke tahun. IPG secara nasional meningkat dari sebesar 68,7 pada tahun 2005 menjadi sebesar 72,77 pada tahun 2011 (KPP&PA-BPS, 2012) serta IDG meningkat dari sebesar 63,90 menjadi sebesar 67,80 pada tahun 2011 (KPP&PA-BPS, 2012).

Di bidang pendidikan, upaya untuk mempercepat penerapan pengarusutamaan gender (PUG) melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) pada tahun 2012 dilakukan dengan mengintegrasikan persepektif gender dalam pendidikan agama serta menyusun Panduan Umum Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Keagamaan. Sementara di bidang kesehatan, telah ditetapkan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Napza.

Di bidang politik dan pengambilan keputusan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara PP dan PA tentang Pedoman PPRG di Kementerian PAN dan RB; Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada Kemenko Polhukam; serta Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum.

Di samping itu, pada tahun 2012 pencapaian percepatan PUG melalui PPRG di tingkat nasional dan daerah antara lain ditandai dengan: (1) 28 kementerian/lembaga di tingkat nasional telah melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); (2) 20 Pemerintah Daerah Provinsi telah melaksanakan PPRG dengan dukungan dana dekonsentrasi.

Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban perdagangan orang, sebanyak 19 K/L telah difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (Kemenko Kesra, Kemendagri, Kemenlu, Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemenakertans, Kemenpora, Kemenkominfo, Kemenpar dan Ekonomi Kreatif, POLRI, BNP2TKI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenhukham, Kemenag, Kemenhub, BIN, dan BKKBN).

Upaya pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dilakukan dengan menyediakan: (1) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 27 provinsi dan 197 kabupaten/kota; (2) 456 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres yang tersebar di seluruh Indonesia; (3) 22 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah dan Vertikal dan 42 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri; dan (4) 33 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan 1 Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW); (5) Telepon Sahabat Anak (TESA) di 14 Kab/Kota.

Upaya perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan sampai tahun 2012 telah mencatat beberapa kemajuan. Terkait akta kelahiran anak, cakupan anak balita dan anak yang memiliki akta kelahiran masing-masing telah mencapai 59 persen dan 63,7 persen (Susenas 2011). Selain itu, sudah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif, yang diedarkan kepada seluruh hakim dan Pengadilan Negeri dalam rangka mempermudah pengurusan akta kelahiran bagi anak yang usianya sudah lebih dari satu tahun.

Upaya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencatat kemajuan yang progresif dengan disyehkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebagai tindak lanjutnya, telah disusun pula Modul Terpadu Dalam Rangka Perlindungan dan Penanganan ABH Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait. Selanjutnya, telah disusun dan atau disahkan beberapa perundang-undangan lainnya yang bertujuan untuk melindungi anak, antara lain: (1) Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengasuhan, Perwalian dan pengangkatan Anak sebagai penyempurnaan dari PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; dan (2) PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif, sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 116 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. PP tersebut diantaranya berisi larangan untuk menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun dan ibu hamil.

Perkiraan pencapaian pada tahun 2013 antara lain telah direncanakan kegiatan: (1) penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di bidang pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan serta kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan; (2) terfasilitasinya K/L dan 20 Pemda provinsi dalam peningkatan kapasitas bagi pengelola data gender; (3) terfasilitasinya 34 K/L dalam penerapan PPRG; (4) terlaksananya peningkatan kapasitas bagi 4 K/L Tim Penggerak PPRG di tingkat nasional dan 33 provinsi; (5) terfasilitasinya K/L dan pemda dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan korban perdagangan orang; (6) penyusunan *grand design* pencatatan sipil dan *roadmap* 2013-2014 oleh Kemendagri, dimana target semua anak 0-4 tahun memiliki akta kelahiran akan dicapai tahun 2014, semua anak usia 0-17 tahun memiliki akta kelahiran akan dicapai tahun 2017, dan semua penduduk Indonesia memiliki akta kelahiran akan dicapai tahun

2020; (7) evaluasi pelaksanaan kesepakatan 8 menteri tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran; (8) revisi UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 32 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pengurusan akta untuk anak yang lebih dari satu tahun harus ke pengadilan negeri, akan dihapuskan; (9) penyusunan 2 Perpres sebagai amanat dari UU SPPA, yaitu tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Hak Anak Sebagai Korban Dan Saksi; serta (10) pelaksanaan Survey Prevalensi KtA, sebagai dasar untuk penyusunan strategi pencegahan anak dari KtA dan penanganan anak korban KtA.

2.9.4 Pemuda dan Olahraga.

Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun tahun 2011 dan 2012 telah menunjukkan kemajuan ditandai dengan meningkatnya partisipasi pemuda dalam berbagai bidang pembangunan dan meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Indonesia menjadi juara umum pada kejuaraan SEA Games 2011, dan perolehan medali pada kejuaraan Olympiade tahun 2012 di London yaitu 1 perak dan 1 perunggu. Pada tahun 2013 upaya pembangunan karakter (*character building*) pemuda dan peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda terus ditingkatkan melalui kegiatan, antara lain: (1) peningkatan kapasitas, kreativitas dan kualitas pemuda; (2) pengembangan kepeloporan, kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda; dan (3) pengembangan pendidikan kepramukaan. Sementara itu, upaya peningkatan budaya dan prestasi olahraga terus dilakukan melalui kegiatan, antara lain: (1) fasilitasi pelatihan bagi olahragawan andalan nasional; (2) fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga; dan (3) fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan.

2.10 Masterplan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang diluncurkan oleh Presiden pada 27 Mei 2011, merupakan perwujudan transformasi ekonomi nasional dengan orientasi yang berbasis pada pertumbuhan ekonomi yang kuat, inklusif, berkualitas dan berkelanjutan. Pelaksanaan MP3EI diharapkan mampu menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan wilayah di seluruh wilayah tanah air.

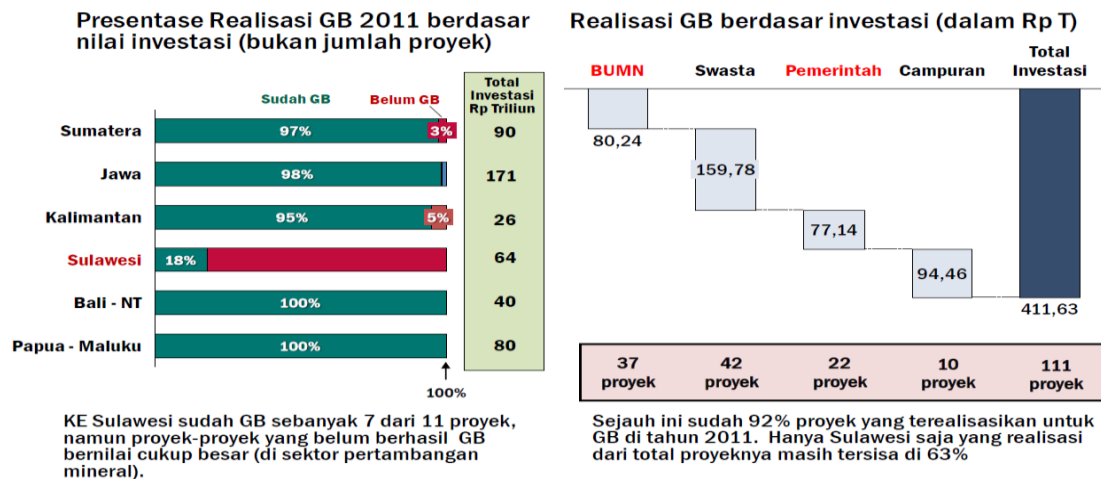
Tujuan dari MP3EI adalah untuk mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang meliputi: sektor industri manufaktur, pertambangan, pertanian, kelautan, pariwisata, telekomunikasi, energi dan pengembangan kawasan strategis nasional. Dalam kurun waktu 15 tahun ke depan, akan dikembangkan klaster-klaster industri, baik untuk meningkatkan keterkaitan antara industri hulu dan hilir, maupun antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah penyangganya. Industri unggulan di berbagai wilayah dibangun untuk memperkuat struktur perekonomian domestik. Dalam kaitan itu ditawarkan insentif yang tepat kepada

dunia usaha, dan dengan memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha di daerah-daerah.

Memasuki tahun ketiga sejak diluncurkannya MP3EI pada 27 Mei 2011, telah dicapai kemajuan pelaksanaan MP3EI sebagai berikut:

Pada tahun 2011, telah dilaksanakan *groundbreaking* sebanyak 111 proyek investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan total nilai investasi Rp411,63 triliun yang akan dibiayai oleh Pemerintah senilai Rp77,14 triliun (22 proyek), BUMN senilai Rp80,24 triliun (37 proyek), swasta senilai Rp159,78 triliun (42 proyek) dan melalui Kerjasama Pemerintah Swasta/KPS senilai Rp94,46 triliun (10 proyek). Selengkapnya rekapitulasi kegiatan MP3EI yang telah di *groundbreaking* hingga Desember 2011 terdapat dalam Gambar 2.11.

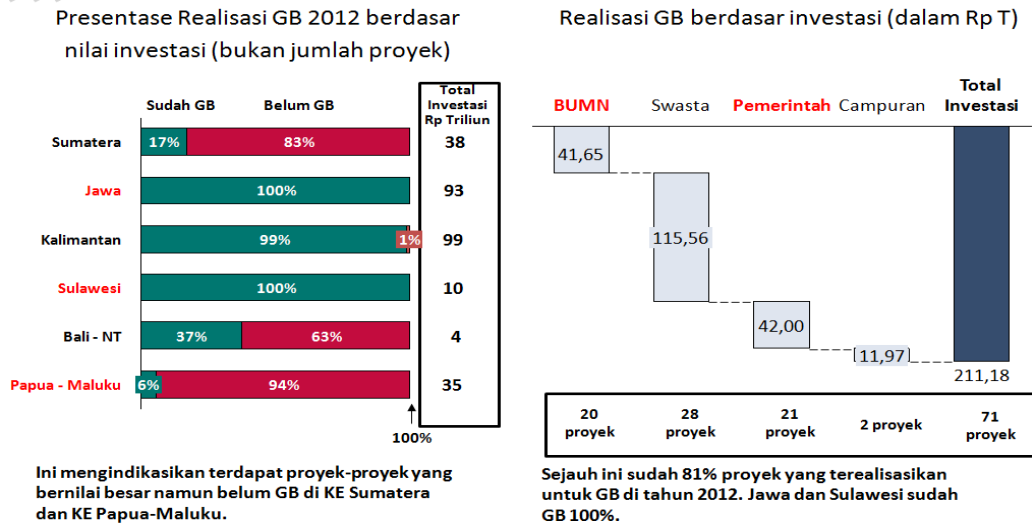
GAMBAR 2.11
KEGIATAN MP3EI YANG TELAH *GROUND*BREAKING (GB) TAHUN 2011



Sumber: KP3EI, 2013

Pada tahun 2012, telah dilakukan *groundbreaking* terhadap 71 proyek yang terdiri dari investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan nilai total Rp211,18 triliun, yang dibiayai oleh Pemerintah Rp42 triliun (21 proyek), BUMN Rp41,65 triliun (20 proyek), Swasta Rp115,56 triliun (28 proyek), campuran Rp11,97 triliun (2 proyek). Selengkapnya rekapitulasi kegiatan MP3EI yang telah di *groundbreaking* hingga Desember 2012 terdapat dalam Gambar 2.12.

GAMBAR 2.12
KEGIATAN MP3EI YANG *GROUND*BREAKING (GB) TAHUN 2012



Sumber: KP3EI, 2013

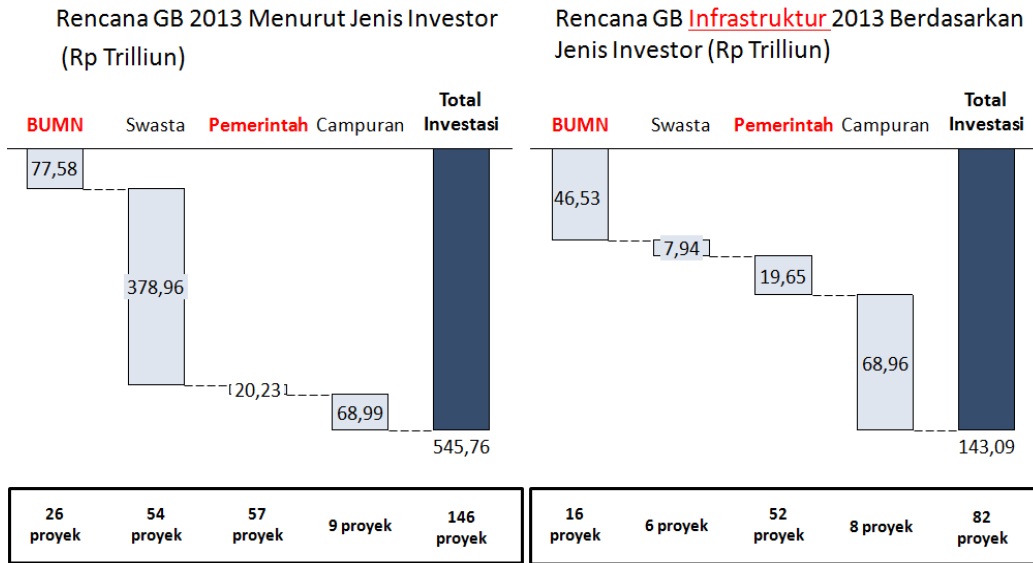
Sedangkan pada tahun 2013, telah direncanakan akan dilakukan *groundbreaking* terhadap 146 proyek yang terdiri dari investasi sektor riil dan pembangunan infrastruktur dengan nilai total Rp545,76 triliun, yang akan dibiayai oleh Pemerintah Rp20,23 triliun (57 proyek), BUMN Rp77,58 triliun (26 proyek), Swasta Rp378,96 triliun (54 proyek), campuran Rp68,99 triliun (9 proyek). Selengkapnya rekapitulasi kegiatan MP3EI yang direncanakan akan digroundreaking tahun 2013 dapat dilihat pada Tabel 2.16 dan Gambar 2.13.

TABEL 2.16
KEGIATAN MP3EI YANG DIRENCANAKAN *GROUND*BREAKING (GB) TAHUN 2013

| Koridor Ekonomi | Jumlah Proyek | | Nilai Investasi | | Total | |
|------------------|---------------|-------------|----------------------------|--------------------------|--------|------------------------------|
| | Infrastruktur | Sektor Riil | Infrastruktur (Rp. Milyar) | Sektor Riil (Rp. Milyar) | Proyek | Nilai Investasi (Rp. Milyar) |
| Sumatera | 32 | 7 | 25.814,94 | 36.719,00 | 39 | 62.533,94 |
| Jawa | 13 | 31 | 74.840,00 | 40.934,00 | 44 | 115.774,00 |
| Kalimantan | 9 | 11 | 14.628,00 | 94.250,65 | 20 | 108.878,65 |
| Sulawesi | 9 | 7 | 7.880,00 | 2.858,00 | 16 | 10.738,00 |
| Bali-NT | 5 | 4 | 16.838,00 | 26.435,00 | 9 | 43.273,00 |
| Papua-Kep.Maluku | 14 | 4 | 3.085,00 | 201.480,00 | 18 | 204.565,00 |

Sumber: KP3EI, 2013

GAMBAR 2.13
RENCANA KEGIATAN MP3EI YANG AKAN DI *GROUND*BREAKING TAHUN 2013



Sumber: KP3EI, 2013

2.11 MASALAH DAN TANTANGAN

2.11.1 Pemantapan Perekonomian Nasional

2.11.1.1 Ketahanan Pangan

Peningkatan produksi komoditas pertanian masih di bawah target RPJMN 2010-2014, bahkan produksi kedelai menurun selama tiga tahun terakhir. Rendahnya peningkatan produksi ini disebabkan oleh produktivitas yang rendah dan luas areal tanam yang belum memadai. Di samping itu juga terjadi konversi lahan sementara perluasan areal baru mengalami kesulitan ditambah lagi banyaknya jaringan irigasi yang rusak serta perubahan iklim turut memperburuk kinerja produksi pangan. Di sisi lain, terjadi peningkatan kebutuhan pangan yang cukup tinggi akibat peningkatan jumlah penduduk serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Masalah dan tantangan yang dihadapi terkait produktivitas antara lain: (i) terbatasnya pelaksanaan SLPTT dan SRI sebagai pendukung peningkatan produktivitas pangan; (ii) terbatasnya kemampuan petani merealisasikan kredit ketahanan pangan, sehingga kemampuan petani mengadakan input produksi terbatas; (iii) difusi benih unggul hasil penelitian dan pengembangan masih terbatas; serta (iv) belum optimalnya pelaksanaan penyaluran bantuan pupuk dan benih unggul dari pemerintah. Sedangkan permasalahan dan tantangan untuk perluasan areal tanam, utamanya adalah: (i) terbatasnya lahan pertanian dan pada saat yang sama terjadi konversi lahan pertanian; (ii) banyaknya lahan terlantar yang belum dioptimalisasi; (iii) terbatasnya pelaksanaan ekstensifikasi karena masalah penyediaan lahan; serta (iv) banyaknya infrastruktur yang rusak sehingga menurunkan indeks pertanaman. Di samping itu, perubahan iklim mengakibatkan

banjir dan kekeringan sering terjadi serta serangan hama dan penyakit tanaman makin marak.

Permasalahan utama yang dihadapi untuk produksi kedelai adalah penurunan luas panen serta rendahnya produktivitas yang secara lebih rinci dijabarkan sebagai berikut: (i) harga kedelai di tingkat petani yang kurang memberikan insentif bagi petani; (ii) petani dengan mudah mengalihkan tanaman ke komoditi lain yang lebih menguntungkan; (iii) belum optimalnya pemanfaatan teknologi budidaya dan kurangnya pendampingan dan penyuluhan sehingga produktivitasnya masih rendah; (iv) ketidaksesuaian penyediaan benih varietas unggul kedelai bersertifikat dengan jumlah kebutuhan dan jadwal tanam; serta (v) rendahnya upaya peningkatan perluasan areal.

Permasalahan dan kendala dalam upaya mencapai target pembangunan perikanan adalah: (i) belum memadainya dukungan pembangunan/rehabilitasi infrastruktur perikanan; (ii) masih tingginya biaya input produksi (pakan, benih, BBM); (iii) masih terbatasnya aksesibilitas nelayan/pembudidaya ikan pada sumber pendanaan; (iv) masih belum memadainya pemasaran hasil perikanan budidaya dan adanya persaingan harga dengan komoditas perikanan impor; (v) lemahnya kelembagaan dan pengelolaan terhadap sarana dan prasarana yang telah dibangun di berbagai daerah seperti pelabuhan perikanan (PP), Balai Benih Ikan (BBI), dan sarana pengawas; (vi) kurang optimalnya dukungan lintas sektor dalam rangka pengembangan kawasan sentra produksi; (vii) masih kurangnya upaya diseminasi dan penerapan teknologi di masyarakat, khususnya terkait dengan pemanfaatan teknologi kapal > 30 GT; serta (viii) perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi kegiatan usaha perikanan.

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam aksesibilitas dan distribusi pangan khususnya komoditi impor adalah tidak sempurnanya tata kelola yang baik dalam penyediaannya melalui importasi. Dalam hal revitalisasi industri gula permasalahan yang dihadapi adalah kemampuan investasi pelaku yang rendah. Sedangkan diversifikasi pangan dan peningkatan kualitas konsumsi masyarakat menghadapi permasalahan tingginya ketergantungan terhadap beras.

Sementara itu, permasalahan dan tantangan yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan petani meliputi: (i) Nilai Tukar Petani dan Nelayan (NTP/NTN) masih dibawah sasaran yang ingin dicapai, walaupun kecenderungannya menunjukkan peningkatan, (ii) jumlah penduduk miskin di perdesaan yang bekerja di sektor pertanian cukup besar, (iii) akses terhadap modal/sumber pembiayaan masih terbatas, (iv) harga hasil pertanian pada saat panen raya sering jatuh; (v) belum adanya ketentuan tentang penggunaan dana pemerintah untuk premi asuransi; serta (vi) meningkatnya biaya usaha tani dan biaya hidup petani.

2.11.1.2 Infrastruktur

2.11.1.2.1 Transportasi

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan transportasi adalah: (a) masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas layanan jaringan transportasi massal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah perkotaan; (b) pengembangan sistem, pola, dan teknologi transportasi masih mengalami hambatan geografis, sehingga kebutuhan terhadap aksesibilitas pelayanan transportasi bagi masyarakat di perdesaan, perbatasan, wilayah terpencil, pulau-pulau terluar dan terdepan belum terpenuhi; (c) kompetensi dan jumlah SDM dan kinerja kelembagaan transportasi belum memenuhi tuntutan tata kelola standar pelayanan minimal; (d) sistem transportasi nasional belum siap dalam menghadapi tuntutan kompetisi global yang semakin tinggi; serta (e) koordinasi antara sektoral dan daerah belum berjalan secara optimal dalam mensinergikan pola transportasi yang terpadu.

2.11.1.2.2 Perumahan dan Permukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman masih menghadapi tantangan terutama meningkatkan proporsi rumah tangga yang menempati hunian yang layak dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar permukiman yang memadai. Di bidang perumahan, tantangan yang dihadapi adalah memastikan pencapaian tujuan 7 (d) *Millennium Development Goals* (MDGs) dapat berjalan pada arah yang sejalan dengan upaya menurunkan proporsi rumah tangga di perkotaan yang menempati hunian tidak layak dari 20,8 persen (1993) menjadi 6,0 persen (2020). Di bidang pembangunan air minum dan sanitasi, tantangan yang dihadapi adalah menuntaskan pencapaian target MDGs untuk meningkatkan cakupan pelayanan air minum yang layak dari 42,8 persen (2011) menjadi 65,8 persen (2015) dan) untuk sanitasi dari 55,6 persen (2011) menjadi 62,4 persen (2015). Berbagai tantangan tersebut memerlukan kerjasama yang kuat di antara pemerintah, pemerintah daerah, dan utamanya masyarakat dalam mewujudkan target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

2.11.1.2.3 Komunikasi dan Informatika

Permasalahan sektor komunikasi dan informatika di antaranya adalah (1) masih rendahnya pengetahuan dan kemampuan masyarakat di bidang TIK (e-literasi); (2) masih rendahnya e-leadership, kesadaran, dan keterbukaan instansi pemerintah untuk saling berbagi data/informasi sehingga menyulitkan penguatan sistem *back office* pemerintah yang terpadu termasuk pertukaran dan validasi data; dan (3) masih rentannya dunia maya nasional terhadap kejahatan dan penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi.

2.11.1.2.4 Pengairan dan Irigasi

Dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dan percepatan peningkatan kapasitas tampung multipurpose per-kapita serta kapasitas penyediaan air baku bagi masyarakat, sektor sumber daya air dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan yang terkait dengan: (i) pola distribusi ketersediaan air yang kurang didukung oleh jumlah sarana dan prasarana penampung air yang memadai; (ii) kapasitas

tampung per kapita Indonesia tahun 2012 baru mencapai 52 m³/kapita (jauh dari ideal: 1.975 m³/kapita); (iii) pembangunan waduk besar sering terkendala masalah ketahanan dan sosial; (iv) lebih dari separuh 242 waduk besar eksisting di Indonesia dalam kondisi *medium-high risk*; (v) akses rumah tangga terhadap air minum yang layak tahun 2011 baru mencapai 42,8 persen (jauh dari target target MDGs tahun 2015: 68,9 persen); dan (vi) 74,0 persen kebutuhan air minum rumah tangga di Indonesia dipenuhi dari air tanah yang berpotensi menimbulkan penurunan muka air tanah, intrusi air laut, sampai peningkatan potensi banjir.

Permasalahan dan tantangan infrastruktur sumber daya air lainnya terkait penanggulangan banjir dan revitalisasi sungai-danau di pusat pertumbuhan MP3EI adalah: (i) perubahan iklim yang semakin meningkatkan resiko banjir dan kekeringan, termasuk terjadinya curah hujan ekstrem di beberapa daerah di Indonesia; (ii) alih fungsi lahan yang memicu degradasi daerah tangkapan air di hilir; (iii) kondisi Sungai Besar dan Sungai Perkotaan yang semakin kritis dan terjadinya kerusakan infrastruktur pengendali banjir; (iv) meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang menyebabkan semakin meningkatnya kebutuhan air; (v) pencemaran air yang tidak terkontrol yang menyebabkan semakin menurunnya kualitas air; (vi) pengambilan air secara ilegal; dan (vii) pemanfaatan daerah sempadan sungai yang tidak sesuai dengan aturan.

Dalam rangka memberikan dukungan terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional, pembangunan sektor irigasi akan dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan yang terkait dengan: (i) menurunnya kehandalan jaringan irigasi akibat masih kurangnya kapasitas pembiayaan terutama pada kewenangan Pemerintah Daerah; (ii) 52 persen daerah irigasi pada tahun 2010 dalam kondisi rusak dimana lebih dari 2/3 terjadi pada daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah; (iii) DAK Irigasi dan implementasinya belum cukup efektif menyelesaikan permasalahan pengelolaan irigasi di daerah; (iv) tekanan alih fungsi lahan irigasi produktif semakin meningkat terutama di Pulau Jawa yang berkontribusi terhadap 52 persen produksi beras nasional; dan (v) masih ada potensi pengembangan irigasi dan pemanfaatan lahan rawa pasang surut sebagai lahan pertanian pangan namun masih perlu ditinjau kembali ketersediaan lahan dan petaninya.

2.11.1.2.5 Kerjasama Pemerintah dan Swasta

Permasalahan dan tantangan terkait dengan penyediaan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS) adalah sebagai berikut: (i) masih belum optimalnya pemanfaatan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur melalui skema KPS sehingga masih mengandalkan skema pembiayaan melalui APBN/APBD baik untuk penyiapan proyek maupun untuk pembiayaan proyek infrastruktur; (ii) masih rendah-nya kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam pembangunan infrastruktur mengakibatkan rendahnya komitmen Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam melaksanakan KPS; (iii) masih kompleks-nya regulasi dalam

pengadaan dan penyediaan infrastruktur; (iv) masih lambatnya pengadaan tanah untuk penyediaan infrastruktur, dimana aturan pengadaan lahan yang masih baru dan masih memerlukan proses transisi dari aturan lama.

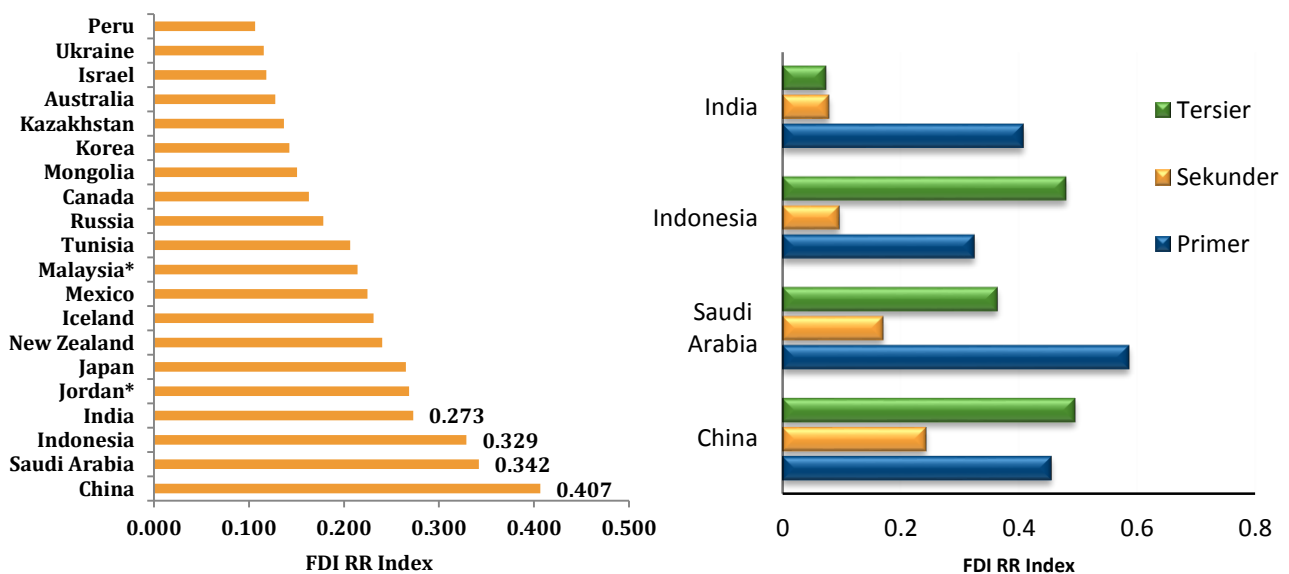
2.11.1.3 Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Permasalahan yang masih akan menghambat investasi ke depan terutama disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.

1. Prosedur dan waktu untuk memulai usaha yang masih cukup panjang. Saat ini peringkat Indonesia untuk kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business/EoDB*) 2013 dari *International Finance Corporation* (IFC) yang terdiri dari 10 indikator dari memulai usaha sampai dengan penutupan usaha berada pada peringkat ke 128 dari 185 negara yang disurvei. Khusus untuk proses memulai usaha berada pada urutan ke 166 dan tercatat lamanya waktu untuk memperoleh perijinan adalah 47 hari dengan 9 prosedur;
2. Masih belum optimalnya penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan penggunaan perijinan secara online/elektronik. Penyelenggaraan PTSP sampai dengan tahun 2012 masih belum seragam dan belum dapat sepenuhnya melayani perijinan usaha dan penanaman modal pada satu tempat. Selain itu juga belum semua daerah membangun dan memfungsikan PTSP secara optimal. Bahkan untuk memenuhi sasaran survei EoDB yang dilakukan oleh IFC secara rutin setiap tahun dengan sasaran responden khusus di Jakarta, pada kenyataannya penyelenggaraan PTSP di Jakarta belum optimal;
3. Indonesia berada pada ranking ke-3 dengan indeks hambatan regulasi FDI (*FDI Regulatory Restrictiveness Index*) terbesar, setelah China dan Saudi Arabia. Hambatan regulasi dan pelayanan investasi yang dirasakan oleh investor asing antara lain mencakup: pembatasan modal asing, prosedur perijinan, pembatasan pekerja asing, serta pembatasan operasional;

GAMBAR 2.14

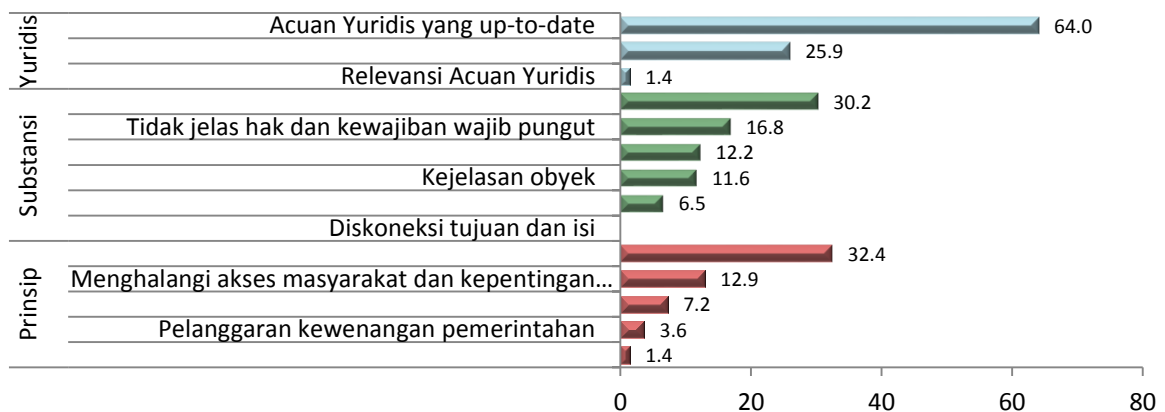
FDI REGULATORY RESTRICTIVENESS INDEX BERDASARKAN NEGARA DAN SEKTOR



Sumber: OECD (2012)

- Masih banyaknya peraturan daerah yang distortif sehingga menyebabkan biaya transaksi tinggi. Peraturan daerah merupakan instrumen kebijakan pemerintah yang dapat digunakan untuk mendorong berkembangnya sektor swasta atau, sebaliknya, dapat memberatkan dunia usaha. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh KPPOD (2012), beberapa permasalahan terbanyak adalah dari aspek yuridis yang tidak up-to-date; tidak adanya kejelasan prosedur, waktu, dan biaya; serta banyaknya perda yang memberikan dampak ekonomi negatif;

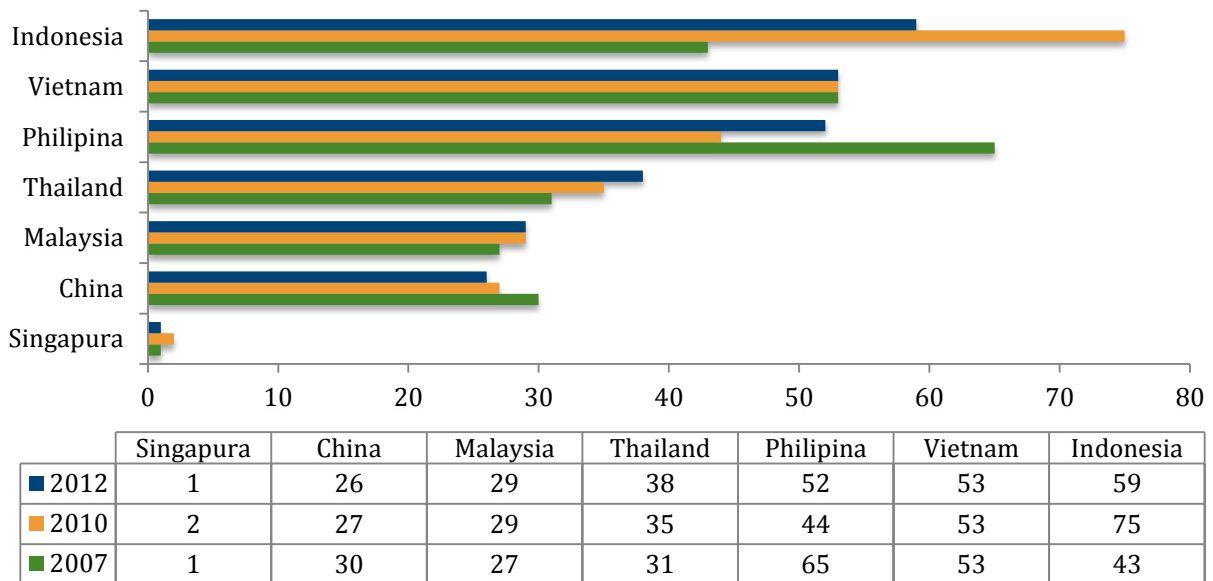
GAMBAR 2.15
PROPORSI REGULASI DAERAH YANG BERMASALAH



- Belum siapnya fasilitas pendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Penentuan dan implementasi KEK masih belum sepenuhnya optimal terutama karena terkendala Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang belum semua daerah siap dengan RUTRnya, kesepakatan pemberian insentif fiskal mengingat beberapa kebijakan insentif fiskal sudah diterbitkan yang sebenarnya juga dapat diimplementasikan di KEK, dan fasilitas infrastruktur. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur secara umum sudah menjadi masalah ketiga utama selain korupsi dan inefisiensi birokrasi pemerintah menurut hasil survei *World Economic Forum 2012-2013* dan dikeluhkan investor. Keterbatasan infrastruktur akan menghambat pengembangan investasi dan usaha di daerah khususnya di luar pulau Jawa. Sehingga pengembangan investasi dan usaha di KEK dan koridor-koridor MP3EI di luar Jawa sangat tergantung dari ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai;
- Masih perlunya peningkatan kinerja Sistem Logistik Nasional. Berdasarkan hasil survei Indeks Kinerja Logistik (*Logistic Performance Index*), Indonesia sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan dari peringkat 75 di tahun 2010 menjadi peringkat 59 di tahun 2012 dari 155 negara yang

disurvei. Walaupun demikian, posisi Indonesia masih berada di bawah lima negara anggota ASEAN, yakni Singapura (2), Malaysia (29), Thailand (35), Filipina (44), dan Vietnam (53). Penyebab utamanya adalah komponen infrastruktur dan kepabeanaan yang rankingnya terlihat lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya;

GAMBAR 2.16
RANKING INDEKS KINERJA LOGISTIK NEGARA ASEAN



Sumber: *Logistic Performance Index*, Bank Dunia, 2012

7. Efisiensi pasar tenaga kerja menurun yang membuat iklim investasi dan iklim usaha kurang kondusif, termasuk penyelesaian *dispute* dan *collective bargaining*. Salah satu hambatan dalam iklim investasi adalah peraturan ketenagakerjaan yang sampai saat ini belum dapat disempurnakan, terutama terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang kompensasi dan penetapan pemutusan hubungan kerja (PHK), hubungan kerja (perjanjian kerja waktu tertentu dan *outsourcing*), dan pengupahan. Dalam perkembangannya, kebijakan yang diambil selama 2010–2012 belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Pada tahun 2010 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyusun rancangan amandemen UU No. 13/2003, tetapi karena masih adanya perbedaan pandangan antara pengusaha dan serikat pekerja, maka pada tahun 2011 DPR menanggukuhkan pembahasan amandemen UU ini dengan mengeluarkannya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2011. Untuk mengatasi hal ini, beberapa upaya yang dilakukan Kemenakertrans adalah mengeluarkan Permen Nakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kehidupan

Layak dan Permen Nakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Dengan masih terkendalanya revisi UU No. 13/2003 tersebut, maka tantangan terbesar adalah mengupayakan pengurangan gejolak dalam pasar kerja dengan mengedepankan perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha dalam penentuan upah, syarat kerja, dan hubungan kerja. Dengan demikian, penguatan kelembagaan hubungan industrial menjadi upaya strategis ke depan, dengan mendorong terwujudnya *collective bargaining* melalui perundingan yang mengadopsi prinsip-prinsip *code of good faith*.

2.11.1.4 Energi

Terkait dengan rendahnya produksi minyak bumi, masalah dan tantangan yang dihadapi adalah sumur minyak bumi yang saat ini berproduksi, sebagian besar (62 persen) berasal dari lapangan minyak tua (*mature*), dimana tingkat produksinya terus mengalami penurunan (*natural depletion*) sekitar 10-12 persen. Di samping itu, juga terjadi kehilangan potensi produksi terutama terjadi akibat keterlambatan produksi lapangan minyak baru serta akibat penghentian produksi yang direncanakan maupun tidak direncanakan (*unplanned shut-down*).

Dari sisi regulasi, masalah dan tantangan yang dihadapi adalah merumuskan revisi Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi yang sejalan dengan beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi dan dinamika pengembangan industri minyak dan gas bumi saat ini dan ke depan agar lebih baik lagi.

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan energi alternatif, terutama panas bumi adalah tumpang tindih lahan dan kebijakan harga. Sebagian besar potensi panas bumi berada di kawasan hutan lindung/konservasi dan proses Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pengembangan panas bumi memerlukan waktu yang lama. Dengan demikian, pelaksanaan eksplorasi menjadi terlambat dan berdampak pada rendahnya pemanfaatan panas bumi untuk pembangkit listrik. Di samping itu, untuk mengurangi resiko investasi panas bumi, pemerintah telah menyediakan *geothermal fund*. Namun dari sisi pemanfaatannya belum optimal. Demikian halnya dengan kebijakan feed-in tariff panas bumi masih perlu kepastian dalam pelaksanaannya.

Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan adalah (i) merevisi Undang-undang tentang Panas Bumi antara lain mengakomodasi panas bumi tidak termasuk kegiatan 'pertambangan' terkait dengan UU 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan UU 41/1999 tentang Kehutanan; (ii) pemberian jaminan kelayakan usaha untuk PT PLN (Persero) agar dapat membeli listrik yang bersumber dari panas bumi; (iii) pemanfaatan geothermal fund untuk eksplorasi panas bumi; dan (iv) penerapan kebijakan *feed-in tariff* panas bumi.

Pembangunan jaringan gas kota dan SPBG menghadapi masalah dan tantangan dalam hal serah-terima aset kepada pengelola,

jaminan kepastian alokasi pasokan gas, dan kebijakan harga. Upaya tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mempercepat proses serah terima aset kepada pengelola, fasilitasi percepatan perjanjian jual beli gas, dan pemberian insentif guna meningkatkan minat investasi badan usaha dalam pembangunan SPBG mengingat harga BBG yang saat ini masih relatif rendah (*affordable*).

Meskipun telah dilakukan upaya peningkatan produksi dan olahan minyak bumi dan gas, namun pencapaian produksi dan olahan minyak bumi dan gas masih rendah, a.l karena sebagian besar lapangan migas merupakan lapangan tua dan terbatasnya kapasitas kilang BBM dan kilang LPG;

2.11.1.5 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi, meliputi: (1) pengaruh negatif dari interaksi antar-bangsa seperti perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa, mudarnya sikap toleransi, kekeluargaan dan kegotong-royongan; (2) rendahnya kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya serta belum optimalnya pengelolaan museum dan perpustakaan sebagai sarana edukasi, informasi, rekreasi, dan pengembangan kebudayaan; (3) terbatasnya prasarana dan sarana kebudayaan; dan (4) terbatasnya kapasitas sumber daya kebudayaan.

Di samping itu, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi nasional telah diperkuat melalui berbagai insentif, namun kemampuan melakukan inovasi teknologi masih terbatas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

2.11.1.6 Bidang Perekonomian Lainnya

Industri Non-Migas

Tantangan utama yang dihadapi industri non-migas adalah tuntutan untuk tumbuh lebih tinggi dari sasaran RPJMN untuk dapat mengimbangi pertumbuhan industri migas yang masih diperkirakan negatif. Permasalahan utama dalam menjawab tantangan tersebut adalah:

Biaya menjalankan usaha termasuk masih tinggi karena pada umumnya infrastruktur pendukung produksi dan distribusi seperti jalan dan pelabuhan, serta kesediaan energi listrik belum memadai terutama di luar Pulau Jawa.

Produktivitas industri yang masih rendah sebagai akibat dari lemahnya penguasaan teknologi di industri dalam negeri serta keterampilan tenaga kerja yang masih terbatas.

Industri kecil dan menengah (IKM) belum terkait dalam struktur usaha berskala besar, di samping itu IKM masih terkendala akses ke sumber pembiayaan dan akses pemasaran.

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)

Konsekuensi dari pelaksanaan MEA 2015 bagi Indonesia adalah tingkat persaingan yang semakin terbuka dan tajam dalam pemasaran barang dan jasa, yang bermula dengan penerapan *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) pada tahun 1992 yang

implementasinya dilakukan secara bertahap sejak 1 Januari 1993 sampai dengan tahun 2002. AFTA ditujukan untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya.

Dalam menghadapi MEA 2015, Indonesia masih mengalami beberapa permasalahan, antara lain adalah:

1. Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan terhadap MEA 2015 di berbagai *stakeholders*, baik Pemerintah Pusat, Daerah, pengusaha, akademisi, maupun masyarakat. Hasil survei terhadap 399 responden menunjukkan bahwa mayoritas (96 persen) responden mengetahui dan memahami ASEAN, namun hanya 42 persen yang mengetahui tentang Masyarakat ASEAN. Salah satu penyebabnya adalah kurang optimalnya sosialisasi tentang MEA baik di pusat maupun daerah.
2. Masih perlunya upaya untuk meningkatkan kesiapan Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 secara terstruktur dan komprehensif. Belum siapnya Indonesia menghadapi MEA 2015 salah satunya ditandai oleh masih banyaknya Pemda yang belum menyiapkan kerangka regulasi, kebijakan ataupun program untuk meningkatkan daya saing daerahnya dalam menghadapi AEC. Sementara itu, koordinasi antara pusat dan daerah maupun koordinasi antara pemerintah dan swasta masih belum terlaksana secara optimal. Kurangnya tingkat kesiapan Indonesia disebabkan oleh daya saing daerah di Indonesia sebagian besar masih rendah, sehingga belum siap untuk menghadapi persaingan global. Oleh sebab itu, langkah-langkah strategis dan koordinatif merupakan hal penting untuk dilaksanakan lebih lanjut.

Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam menghadapi MEA 2015 adalah meningkatnya persaingan perdagangan antar negara-negara ASEAN. Saat ini, intra perdagangan kawasan ASEAN meningkat sangat tajam sejak diberlakukannya AFTA. Indonesia hanya memberikan kontribusi sebesar 14,6 persen terhadap ekspor intra kawasan ASEAN (2011), lebih rendah dari kontribusi Singapura, Malaysia dan Thailand. Namun dilain pihak, pertumbuhan ekspor Indonesia ke kawasan ASEAN terlihat pada angka yang cukup tinggi, menunjukkan masih besarnya peluang Indonesia ke depan untuk meningkatkan pangsa ekspornya di kawasan ASEAN.

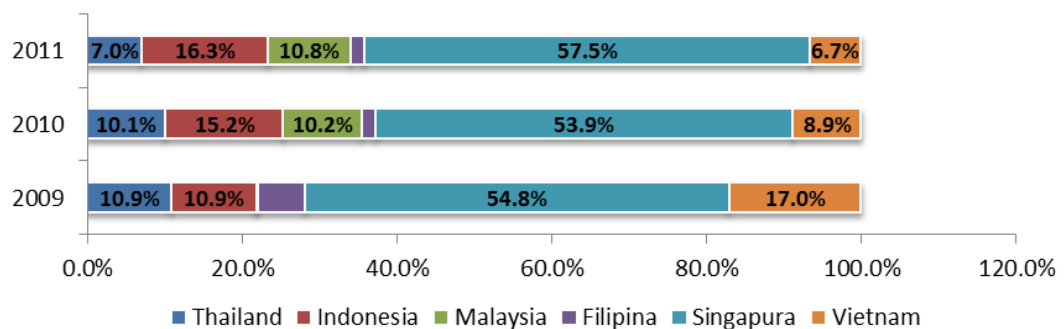
TABEL 2.17
PERAN DAN PERTUMBUHAN EKSPOR INTRA KAWASAN ASEAN

| Negara Pengekspor | Peran Thd Ekspor ASEAN (%) | | | Pertumbuhan (%) | | |
|-------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2009 | 2010 | 2011 |
| ASEAN | 100,0 | 100,0 | 100,0 | -20,5 | 32,5 | 12,4 |
| Singapore | 42,1 | 41,5 | 44,2 | -24,7 | 30,6 | 19,6 |
| Malaysia | 20,9 | 19,7 | 19,4 | -20,7 | 24,9 | 11,0 |
| Thailand | 16,8 | 17,3 | 18,8 | -18,1 | 36,5 | 22,5 |
| Indonesia | 12,7 | 13,0 | 14,6 | -9,4 | 35,4 | 26,2 |
| Philippines | 3,0 | 4,5 | 3,0 | -17,6 | 97,5 | -25,2 |
| Viet Nam | 4,5 | 4,0 | N.A | -15,2 | 18,3 | N.A |

Sumber: *TradeMap* (diolah Bappenas)

Di sisi investasi langsung yang masuk (FDI *inflow*) ke kawasan ASEAN, Indonesia menjadi salah satu negara ASEAN kedua yang diminati oleh investor, setelah Singapura. Dari total investasi langsung yang masuk ke kawasan ASEAN pada tahun 2011, 16,3 persen ditujukan ke Indonesia; dimana proporsi ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Tantangan ke depan adalah mempertahankan dan meningkatkan daya tarik investasi

GAMBAR 2.17
FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) DI NEGARA-NEGARA ASEAN



Sumber: *World Development Indicators* (2012)

Tantangan lain yang dihadapi oleh Indonesia adalah menghadapi persaingan dengan negara sesama anggota ASEAN di negara mitra ASEAN, seperti India dan Cina. Hal ini terlihat dari perdagangan Indonesia dengan Cina pada tahun 2012 mengalami defisit sebesar USD-7.824,7 dengan kontribusi nonmigas yang defisit sebesar USD-8.100,0. Defisit neraca perdagangan ini terjadi semenjak memasuki kesepakatan ASEAN-China *Free Trade Agreement*. Dari sisi sumber daya manusia tantangan terbesar bagi Indonesia adalah kemampuan bersaing sumber daya manusia Indonesia yang masih harus ditingkatkan baik secara formal maupun informal, di samping masih rendahnya tenaga kerja bersertifikat di Indonesia. Untuk itu, Indonesia perlu

meningkatkan kualitas tenaga kerjanya sehingga dapat digunakan baik di dalam negeri maupun intra-ASEAN untuk mencegah serbuan tenaga kerja terampil dari luar.

Tenaga Kerja Indonesia

Kendala yang dihadapi antara lain adalah: (1) pelayanan masih terkendala pada persoalan keterbatasan sumber daya internal, persoalan jangkauan terhadap pekerja domestik dan sistem hukum dan budaya di negara setempat; (2) belum seluruh daerah memberikan pelayanan dalam proses perekrutan sesuai standar pelayanan minimal (SPM); dan (3) kasus di beberapa negara, terdapat kesulitan untuk mendapatkan akses kekonsuleran. Kendala tersebut menimbulkan tantangan ke depan, yaitu memperluas jangkauan informasi kerja luar negeri di wilayah-wilayah kantong TKI, mendekatkan pelayanan calon TKI ke masyarakat di daerah sekaligus menyerahkan proses rekrutmen kepada pemerintah daerah, dan menyederhanakan prosedur keberangkatan bagi calon TKI.

Koperasi dan UMKM

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan koperasi dan UMKM yaitu daya saing koperasi dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang rendah. Saat ini, koperasi belum berperan secara optimal dalam meningkatkan efisiensi usaha dan posisi tawar UMKM yang menjadi anggotanya. Hal tersebut tercermin dari skema bisnis yang masih terbatas, posisi tawar koperasi produksi yang masih rendah, kapasitas SDM yang rendah, serta kerja sama usaha yang masih terbatas.

Sementara itu daya saing UMKM yang rendah ditunjukkan oleh produktivitas UMKM (Rp86,1 juta/unit) yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas usaha besar (Rp678,8 miliar/unit). Pada tahun 2012 kesenjangan juga tampak pada sektor manufaktur, dimana produktivitas industri skala mikro, kecil dan menengah (Rp153,1 miliar/unit) yang lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas industri skala besar (Rp553,6 miliar/unit). Kontribusi UMKM terhadap nilai ekspor non migas masih berfluktuasi antara 14-18 persen pada periode 2005-2011, meskipun terdapat peningkatan dalam satu tahun terakhir.

Tantangan yang dihadapi dalam peningkatan daya saing koperasi dan UMKM yaitu perlunya keterpaduan program dan kegiatan mulai dari hulu sampai hilir. Khusus terkait dengan koperasi, program dan kegiatan perlu diarahkan untuk menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang mandiri, dan mampu memfasilitasi usaha anggotanya, serta berkontribusi dalam pengurangan angka kemiskinan, pembangunan ekonomi lokal dan penguatan pasar domestik. Akselerasi peningkatan kapasitas UMKM juga perlu dilakukan untuk meningkatkan kemampuannya dalam memanfaatkan peluang usaha yang diciptakan dari pertumbuhan ekonomi, perdagangan yang semakin terbuka, dan peningkatan investasi. Kedua upaya tersebut sangat penting bagi koperasi dan UMKM terutama dalam menghadapi persaingan

usaha yang semakin tinggi, termasuk terkait rencana penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

2.11.2 Peningkatan Stabilitas Politik

2.11.2.1 Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Perdamaian Dunia

Di tahun 2014, dalam upaya reformasi PBB, Indonesia masih akan menghadapi sikap sebagian anggota DK PBB yang resisten terhadap reformasi, khususnya terkait *enlargement* (distribusi keanggotaan yang lebih adil secara geografis) dan *veto power*. Tantangan pengiriman misi pemeliharaan perdamaian meliputi meningkatnya ketegangan di berbagai wilayah yang menuntut penambahan penggelaran UNPKO, serta efektifitas PKO yang memerlukan dukungan sumber daya yang memadai sesuai mandat yang diberikan, serta mekanisme yang memungkinkan pengiriman personel dilakukan secara cepat dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu. Meningkatnya sifat PKO yang multidimensi juga menantang Indonesia untuk mengembangkan pakar sipil (*civilian expert*) yang dapat berpartisipasi dalam berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB dan program peacebuilding. Tantangan Indonesia dalam isu Laut China Selatan tidak lepas dari adanya anggapan bahwa kawasan ini masih dihadapkan pada suatu era persaingan yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas, serta adanya dasar klaim yang sama kuat dari masing-masing pihak yang berkepentingan.

Hukum dan Hak Asasi Manusia

Tantangan utama dari pencegahan dan pemberantasan korupsi pada tahun 2014 adalah mencapai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 5,0 mengingat dari tahun ke tahun peningkatan IPK Indonesia tidak terlalu signifikan. Penyelamatan dan pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi belum sepadan dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Permasalahannya adalah koordinasi antara pihak penegak hukum dengan kementerian/lembaga dalam penanganan pelacakan aset, pembekuan aset sampai dengan penyitaan aset hasil tindak pidana korupsi masih perlu ditingkatkan dan disempurnakan.

Tantangan yang akan dihadapi dalam proses pembaruan peradilan yang berlangsung antara lain adalah upaya untuk mengubah pola pikir dan meningkatkan kualitas kinerja (*mind-set* dan *performance*) dari aparat peradilan di seluruh Indonesia, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan lembaga peradilan. Mahkamah Agung memiliki tantangan cukup besar untuk terus membenahi kualitas tata laksana dengan tujuan akhir kualitas putusan lembaga peradilan. Terkait dengan akses masyarakat untuk memperoleh keadilan, dengan telah ditetapkannya Undang-undang Bantuan Hukum yang memberikan kewenangan Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara bantuan hukum maka penyaluran dana bantuan

hukum kepada masyarakat miskin yang sedang berhadapan dengan masalah hukum akan dilakukan oleh kementerian ini. Tantangan dalam pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) utamanya adalah upaya pemahaman yang menyeluruh kepada aparat penegak hukum dalam penanganan perkara dan pemahaman pula kepada masyarakat tentang keadilan restoratif yang intinya bertujuan mengedepankan upaya pembinaan daripada melakukan pemidanaan kepada anak yang mengalami permasalahan dengan hukum. Sedang di bidang penegakan hak azasi manusia (HAM), tantangan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM yang ditetapkan dengan Perpres Nomor 23 Tahun 2011 adalah komitmen dari semua pihak baik itu di tingkat nasional maupun daerah.

Pertahanan dan Keamanan

Potensi pengaruh radikal dan ancaman terorisme belum menurun, sementara itu tersangka terorisme yang tertangkap berusia muda antara 10-30 tahun (58 persen) dan di atas 30 tahun (42 persen) (2012) yang berarti ada kecenderungan bergerak ke arah yang lebih muda. Penggunaan hasil industri pertahanan nasional oleh TNI dan Polri terus meningkat baik dari jumlah produk maupun variasinya. Namun demikian, masih terdapat permasalahan untuk mengembangkan produk-produk prototipe hasil penelitian dan pengembangan (litbang) industri dan institusi litbang dalam negeri menjadi produk yang bisa digunakan oleh pengguna di TNI dan Polri. Untuk mengembangkan produk yang masih prototipe menjadi produk dengan skala produksi industri dibutuhkan investasi dan modal kerja yang cukup besar. Besarnya dana pengembangan prototipe tersebut, akan menjadi permasalahan dan tantangan yang cukup berat jika dihadapkan pada kemampuan keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan komitmen semua pihak apabila industri pertahanan dalam negeri benar-benar diharapkan menjadi tulang punggung kemandirian alutsista TNI dan alut Polri.

2.11.2.2 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Dalam rangka pencapaian terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, tantangan yang dihadapi semakin berat dan kompleks, antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan reformasi birokrasi masih menghadapi persepsi yang keliru bahwa reformasi birokrasi identik dengan kenaikan remunerasi, komitmen pimpinan belum sepenuhnya mendukung reformasi birokrasi pada instansinya, dan dampak reformasi birokrasi belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat khususnya pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik. Tantangan ke depan, adalah peningkatan kapasitas implementasi reformasi birokrasi secara nasional untuk mempercepat perluasan reformasi birokrasi di daerah, dan peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi. Pada aspek kelembagaan, masih dihindangi masalah dengan postur birokrasi instansi

pusat dan daerah, yang belum mencerminkan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta terdapat kecenderungan untuk membentuk lembaga atau unit kerja baru, tanpa disertai dengan audit organisasi. Tantangan ke depan, diperlukan audit organisasi dan ditindaklanjuti dengan penajaman fungsi dan struktur organisasi birokrasi pemerintah pusat dan daerah, sehingga terwujud postur birokrasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran.

Permasalahan dan tantangan dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik adalah masih terkait dengan komitmen pimpinan lembaga yang masih menganggap keterbukaan informasi sebagai beban tambahan, bukan modalitas untuk mewujudkan badan pemerintah yang kredibel dan akuntabel. Hal lain adalah terkait dengan kesiapan badan publik dalam melaksanakan UU KIP dimaksud seperti kesiapan sumber daya termasuk paradigma dan kapasitas, penyediaan isi informasi (*content*), dan anggaran. Gerakan bersama untuk melaksanakan keterbukaan informasi masih akan terbentur pada pola pendekatan dan intensitas pelaksanaan kampanye/sosialisasi yang terbatas dan masih kurang menggemakan sampai ke daerah.

2. Masih terdapat berbagai masalah dalam penataan otonomi daerah. Permasalahan yang menyangkut pembentukan daerah otonom baru, adalah masih banyaknya usulan pemekaran daerah atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), walaupun pemerintah telah menyatakan moratorium DOB. Sedangkan penggunaan Dana Perimbangan belum efektif dan efisien antara lain karena penyerapan DAK yang belum optimal dan pelaksanaan DAK yang belum sesuai dengan petunjuk teknis (Juknis). Penyebabnya antara lain: keterlambatan penetapan Juknis dan sosialisasinya, rigiditas Juknis yang menghambat pelaksanaan DAK, siklus perencanaan dan penganggaran yang berjalan paralel di pusat dan daerah sehingga informasi atas alokasi DAK yang diperoleh daerah mendekati masa penetapan APBD (PMK mengenai DAK ditetapkan setelah UU APBN ditetapkan), permasalahan dalam SDM aparatur Pemda (pergantian pejabat pengelola DAK akibat mutasi yang cukup cepat di daerah ataupun kekhawatiran akan pelanggaran regulasi sehingga pelaksanaan DAK cenderung sangat berhati-hati), maupun proses administrasi (seperti masalah tender pekerjaan kontrak ataupun keterbatasan kapasitas pihak ketiga). Terkait pengelolaan keuangan daerah terdapat permasalahan berupa adanya perubahan kebijakan tentang mekanisme hibah dan bansos. Sebelumnya provinsi menganggarkan barang-barang yang akan dihibahkan pada jenis belanja modal, tetapi sekarang dialihkan menjadi jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari APBD. Hal ini mengakibatkan peningkatan pada komponen belanja modal di daerah menjadi lebih sulit. Selain itu, dibutuhkan kebijakan yang mumpuni dalam

meningkatkan kualitas belanja pemerintah daerah agar difokuskan pada penyediaan pelayanan publik mengingat saat ini sebagian besar masih digunakan untuk biaya operasional birokrasi. Permasalahan lainnya adalah tata kelola anggaran yang masih rendah, diindikasikan oleh rendahnya persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

3. Pada aspek SDM Aparatur, masih menghadapi permasalahan dalam rangka mewujudkan manajemen kepegawaian berbasis sistem merit. Beberapa permasalahan tersebut, meliputi: komposisi PNS yang belum ideal untuk melakukan tugasnya agar lebih efektif, efisien dan profesional dalam melayani masyarakat, hal ini diantaranya berkaitan dengan komposisi jabatan, tingkat pendidikan maupun distribusi antar wilayah; tingkat disiplin dan kinerja pegawai masih rendah; belum diterapkannya sistem remunerasi yang berbasis kinerja; belum sepenuhnya diterapkan sistem karier berdasarkan kinerja; penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) belum sepenuhnya berdasarkan pada kompetensi yang diperlukan. Selain itu, pendidikan dan pelatihan (diklat) belum sepenuhnya dapat meningkatkan kinerja. Tantangan ke depan, adalah melakukan penyempurnaan manajemen kepegawaian untuk mendukung terwujudnya SDM Aparatur yang kompeten, profesional, berintegritas, dan mendukung pencapaian kinerja birokrasi secara optimal.
4. Berkaitan dengan regulasi pusat dan daerah, masih ditemukannya Perda yang bermasalah yang membutuhkan pengkajian dan tindak lanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pembentukan regulasi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dalam pelaksanaannya banyak daerah yang belum menyampaikan respon atas klarifikasi Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penyempurnaan berbagai Perda yang bermasalah.
5. Permasalahan pada sinergi pusat dan daerah yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator pelayanan publik belum optimal dalam pelaksanaannya karena keterbatasan sumber daya dan regulasi, termasuk dalam hal dukungan pembiayaan. Penerapan SPM perlu terintegrasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, salah satunya melalui pengakomodasian SPM dalam RKPD dan APBD. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu komitmen kepala daerah dan koordinasi dengan K/L sektor terkait yang perlu didorong baik dalam penerapan, monitoring, maupun evaluasi SPM. Dalam hal penerapan, beberapa bidang SPM belum memiliki Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) sehingga K/L harus segera didorong untuk menerbitkan NSPK bidang SPM terkait. Dalam manajemen pelayanan publik, masih juga menghadapi permasalahan antara lain: tingkat kualitas

pelayanan belum dapat memenuhi keinginan masyarakat akan pelayanan yang cepat, mudah, murah, dan transparan, belum meratanya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, masih lemahnya SDM pelayanan publik baik dari segi kapasitas dan sikap perilaku dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan ke depan, adalah menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut dan memastikan implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dapat dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh instansi penyelenggara pelayanan publik.

2.11.3 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

2.11.3.1 Pendidikan

Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dan harus diupayakan pemecahannya untuk mencapai target pembangunan pendidikan 2014 antara lain adalah: (i) masih belum meratanya akses pendidikan, terutama dimulai pada jenjang SMP, yang ditunjukkan dengan masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah; (2) masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, yang ditandai oleh pengetahuan dan keterampilan lulusan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/dunia usaha dan rendahnya kemampuan bersaing bangsa; (3) masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan jumlah guru yang telah tersertifikasi, serta belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada masih rendahnya rasio guru:murid pada jenjang SD/MI; dan (4) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa yang ditandai antara lain oleh masih munculnya gejala perilaku kekerasan di kalangan anak-anak usia sekolah, melemahnya nilai-nilai moral, dan memudarnya ikatan sosial.

Tantangan dalam peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, antara lain: (i) meningkatkan pemerataan akses pendidikan di semua jenjang, termasuk akses terhadap pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (ii) meningkatkan tingkat keberaksaraan; (iii) meningkatkan kesiapan anak bersekolah; (iv) meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan *soft-skills* lulusan; (v) melaksanakan kurikulum baru tahun 2013; (vi) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan pembangunan; (vii) meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas penelitiannya untuk mendukung kebutuhan pembangunan; dan (viii) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Tantangan pada aspek ketenagaan serta sarana dan prasarana pendidikan, adalah: (i) meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru; (ii) meningkatkan pemerataan distribusi guru; (iii) mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; (iv) meningkatkan ketersediaan bahan ajar yang murah dan berkualitas; (v) meningkatkan ketersediaan prasarana peningkatan mutu seperti laboratorium

dan perpustakaan; serta (vi) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.

Sedangkan tantangan dalam mewujudkan manajemen, tatakelola, serta pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, antara lain: (i) meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan; (ii) memantapkan proses pelembagaan otonomi perguruan tinggi; (iii) meningkatkan kemitraan publik dan swasta dalam sektor pendidikan; dan (iv) memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

2.11.3.2 Kesehatan

Beberapa permasalahan ke depan yang memerlukan perhatian di bidang kesehatan, antara lain: (i) masih tingginya disparitas akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang mencakup fasilitas, tenaga, jaminan pelayanan kesehatan; (ii) upaya preventif dan promotif belum dilaksanakan secara optimal yang mencakup kualitas pemeriksaan antenatal care (ANC), cakupan imunisasi, dan promosi kesehatan di masyarakat; (iii) belum terpenuhinya tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dalam penanganan kesehatan ibu dan anak; (iv) belum optimalnya dukungan lintas sektor dalam penanganan masalah gizi; (v) belum optimalnya upaya preventif terpadu dalam pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; (vi) belum optimalnya ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan dasar; (vii) adanya *Free Trade Market*, AEC serta pemekaran wilayah menyebabkan meningkatnya peredaran volume dan jenis obat dan makanan; (viii) belum optimalnya pengawasan obat dan makanan; dan (ix) belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk sistem rujukan dalam mendukung pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, meliputi kesiapan fasilitas pelayanan, ketersediaan tenaga, serta ketersediaan obat dan vaksin. Sedangkan permasalahan dan tantangan di bidang KB adalah masih terdapat tingginya tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB, yaitu sebesar 20 persen. Disamping itu, capaian jumlah peserta KB tersebut lebih banyak akseptor yang menggunakan metode jangka pendek, yaitu sebesar 47,3 persen, sedangkan akseptor menggunakan metode jangka panjang masih rendah yaitu sebesar 10,6 persen (*any method*) dan 18,3 persen (*modern method*) (SDKI 2012). Hal ini menyebabkan resiko terhadap tingginya tingkat DO ber-KB. Disisi lain, kontribusi peserta KB Baru untuk lestari menjadi peserta KB Aktif juga rendah, yaitu berbanding 10:1. Beberapa permasalahan tersebut antara lain dikarenakan pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-KIE program KB belum optimal terjangkau secara merata. Disamping itu juga, sasaran target calon akseptor kurang terfokus pada pasangan usia muda dan paritas rendah/pasangan yang memiliki jumlah 2 anak. Berdasarkan hal tersebut, tantangan ke

depan adalah masih kurang meratanya akses dan kualitas pelayanan KB dan pelaksanaan Advokasi-KIE program KB.

2.11.3.3 Penanggulangan Kemiskinan

Permasalahan dalam pelaksanaan program-program di klaster 1 di masing-masing program/kegiatan antara lain :

- 1) PKH menghadapi kendala dan permasalahan selama enam tahun pelaksanaannya, yaitu (i) cakupan dan manfaat PKH masih terbatas sehingga dampak program terhadap pengurangan kemiskinan dan kesenjangan kurang signifikan meskipun peningkatan terhadap indikator perilaku kesehatan bagi para ibu dan anak-anak peserta PKH cukup signifikan; (ii) tataran pelaksanaan yaitu fungsi pendampingan masih terkendala oleh rasio jumlah personil dan kapasitas kemampuan. Efektivitas kinerja pendamping sangat dipengaruhi kondisi geografis dan mekanisme pengembangan kapasitas; (iii) peningkatan pencapaian dampak PKH sangat membutuhkan keterkaitan (*linkage*) dengan program penanggulangan kemiskinan dan inisiatif program daerah lainnya. Namun komplementaritas ini belum terintegrasi dengan baik padahal peningkatan sumberdaya tidak hanya diperlukan pada anak peserta PKH saja namun juga pada sumberdaya rumah tangga atau keluarga secara keseluruhan;
- 2) Program Jaminan Kesehatan bagi masyarakat masih ditemukan kendala pendataan peserta di lapangan;
- 3) Permasalahan yang masih dihadapi dalam penyaluran Bantuan Siswa Miskin (BSM) antara lain ketidaktepatan penetapan penerima sasaran penerima dan waktu penyaluran yang menjadi salah satu penyebab kurang efektifnya manfaat BSM. Oleh karena itu, tantangan ke depan dalam penyediaan BSM bagi siswa miskin adalah (i) meningkatkan akurasi penetapan sasaran penerima menggunakan basis data terpadu; (ii) menjamin penyaluran BSM tepat pada waktunya; (iii) meninjau kembali penerapan BSM di sekolah dan madrasah agar terjadi kesamaan pelaksanaan;
- 4) Untuk program Keluarga Berencana (KB), rendahnya pemakaian kontrasepsi (CPR) oleh keluarga miskin dikarenakan oleh pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-KIE program KB belum merata jangkauannya. Disamping itu, sasaran belum ditujukan/difokuskan kepada pasangan muda dan paritas rendah atau pasangan memiliki 2 anak;
- 5) Terkait pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah, permasalahan yang dihadapi adalah semakin berkurangnya jumlah sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA). Hal ini disebabkan oleh faktor kelangkaan tanah TORA yang telah didistribusikan sejak tahun 1961. Secara umum tanah yang ditetapkan sebagai TORA adalah tanah negara bekas tanah terlantar, tanah negara yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, dan sumber lainnya. Dari berbagai jenis sumber TORA tersebut, relatif hanya tanah terlantar dan kawasan hutan yang telah dilepaskan yang masih cukup tersedia. Namun demikian

tantangan yang perlu diantisipasi, yaitu: (i) untuk tanah terlantar, pihak yang teridentifikasi menelantarkan tanah dapat melakukan upaya hukum dan teknis untuk menghindari pencabutan hak atas tanahnya; sedangkan (ii) konversi kawasan hutan menjadi non hutan memerlukan persetujuan DPR sehingga membutuhkan argumen yang kuat dan memerlukan waktu yang lama.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program di Klaster 2 di masing-masing kegiatan antara lain:

- 1) Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui PNPM-MP di tahun 2014 antara lain masih relatif rendahnya komitmen daerah dalam pengalokasian Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk mendukung Program PNPM-MP; belum optimalnya kualitas pendampingan oleh fasilitator; dan koordinasi lintas SKPD yang masih lemah;
- 2) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan PUAP masih menemui kendala adanya keterlambatan dalam penyampaian bantuan PUAP kepada penerima manfaat dikarenakan lokasi penerima yang cukup jauh (terpencil) dan ketidaksiapan penerima manfaat terutama dalam memenuhi persyaratan antara lain dalam penyediaan rekening bank sebagai media penyaluran bantuan.
- 3) Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program di klaster 3 pada tahun 2014 yaitu belum optimalnya upaya untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil agar usahanya dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini membutuhkan adanya peningkatan sinergi dan keterpaduan berbagai upaya untuk memfasilitasi usaha mikro dan kecil dalam mengatasi keterbatasan: (1) akses kepada sumberdaya produktif dan pasar; (2) kapasitas teknis, manajemen dan kewirausahaan; (3) penetapan orang.

2.11.3.4 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Masalah dan tantangan yang diperkirakan masih dihadapi dalam penanggulangan perubahan iklim, antara lain adalah: (i) kurang lengkapnya ketersediaan data dan informasi sebagai basis penghitungan status tingkat emisi GRK; (ii) rendahnya kesiapan institusi dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam menyusun dan melaksanakan rencana aksi penurunan emisi Gas Rumah Kaca; (iii) masih luasnya lahan sangat kritis di kawasan hutan yang perlu direhabilitasi; (iv) belum dipatuhinya RPDAST; (v) belum adanya lembaga yang mengelola hasil rehabilitasi; dan (vi) masih rendahnya keterlibatan masyarakat yang bertempat tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan dalam menjaga keberlanjutan fungsi kawasan hutan.

Dari aspek pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, masalah dan tantangan pokok yang dihadapi adalah: (i) masih terjadinya pencemaran lingkungan; (ii) masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola serta masih rendahnya kesadaran masyarakat; (iii) kurangnya jumlah

dan kompetensi sumber daya manusia untuk mengoperasikan KPH serta penyuluh kehutanan; (iv) masih tingginya luas kawasan hutan produksi yang belum dibebani hak/izin (*open access*) sehingga rentan terhadap perambahan dan penebangan liar; (v) penyelesaian tata batas kawasan hutan perlu ditindaklanjuti dengan penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan; dan (vi) perlunya antisipasi dan koordinasi dalam pengendalian kebakaran.

Masalah dan tantangan pokok dalam sistem peringatan dini adalah untuk tetap terkelolanya Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS), Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS), serta Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS), sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat segera disampaikan kepada masyarakat secepatnya. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pengelola sistem peringatan dini juga akan menjadi tantangan pada tahun 2014.

Berbagai permasalahan dan tantangan dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang masih akan dihadapi, meliputi: (i) ketersediaan infrastruktur kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini serta kapasitas antisipatif yang kurang memadai dalam menghadapi berbagai ancaman bencana; (ii) kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana yang belum memadai dan keterbatasan sumberdaya penanggulangan bencana di daerah; (iii) belum optimalnya sosialisasi dan penyebarluasan informasi pengurangan resiko bencana kepada pemerintah daerah dan masyarakat; (iv) dari sisi perencanaan dan pendanaan, terdapat permasalahan dalam pengalokasian dan penganggaran program/kegiatan penanggulangan bencana karena belum terintegrasi dalam RPJMD dan kaitannya dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana penanggulangan bencana belum menjadi salah satu urusan wajib daerah; (v) masih rendahnya komitmen dan kemampuan pendanaan pemerintah daerah untuk penanggulangan bencana sehingga ketergantungan pendanaan dari BNPB sangat besar, terutama dalam penyediaan logistik dan peralatan penanggulangan bencana; dan (vi) belum optimalnya koordinasi antar pemerintah, pemerintah daerah, maupun pihak-pihak terkait dalam penanganan darurat bencana, termasuk sinergitas program/kegiatan antar kementerian dan lembaga.

2.11.3.5 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik

Permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal, terluar dan pascakonflik antara lain :

1. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal di daerah tertinggal. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah;
2. Kurangnya dukungan infrastruktur jalan, transportasi, energi dan telekomunikasi di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan. Dukungan infrastruktur bertujuan untuk

membuka keterisolasian daerah, utamanya pembangunan infrastruktur jalan paralel di kawasan perbatasan Kalimantan, penyediaan Kapal Perintis di pulau-pulau yang masih terisolir;

3. Program-program penanggulangan kemiskinan harus dikembangkan dan disempurnakan untuk menjawab permasalahan utama yang sesuai dengan karakteristik daerah tertinggal dan perbatasan;
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal dan perbatasan. Hal tersebut tercermin dari terbatasnya jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan dan umumnya belum terdistribusi secara merata di desa-desa terpencil dan terisolir. Masalah lainnya adalah masih terbatasnya sarana pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, termasuk rumah dinas bagi tenaga pendidikan dan kesehatan, serta minimnya akses pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan khususnya di kecamatan terluar perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar (PPKT).

Permasalahan dan tantangan pokok dalam pengelolaan batas wilayah negara antara lain :

1. Belum terselesaikannya beberapa segmen batas wilayah dalam rangka penegasan batas wilayah negara memerlukan koordinasi antar tim perundingan batas. Terkait dengan pelaksanaan perundingan perbatasan dengan negara tetangga yang berbatasan langsung, tantangan yang dihadapi adalah masih adanya perbedaan pandangan dan kepentingan dalam penggunaan dasar penetapan perbatasan antara Indonesia dengan negara-negara yang berbatasan, serta diantara tim perundingan batas masih memiliki data dan persepsi yang berbeda;
2. Selain itu, masih terbatasnya jumlah NLP (Nomor Lembar Peta) Pemetaan Kecamatan dan Pulau Terluar dan perlunya peningkatan IRM (*Investigation, Refixiation, dan Maintenance*) patok batas wilayah negara guna mempertegas batas wilayah yang telah ada.
3. Selain itu, belum memadainya pos pengamanan perbatasan guna mendukung perkuatan pemeliharaan batas wilayah negara, mulai dari permasalahan jarak antar pos yang relatif jauh, hingga fasilitas penunjang dalam pengamanan perbatasan baik darat maupun laut, sehingga masih banyak pelanggaran (kegiatan ilegal) lintas batas negara. Oleh karenanya, perlu peningkatan kualitas pelayanan kepabeanan, karantina, keimigrasian, dan keamanan atau *custom, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) (Pos lintas batas terpadu satu atap) di kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar untuk mengurangi kegiatan ilegal lintas batas antar negara;

Tantangan dalam realisasi pelaksanaan Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat antara lain: (1) masih belum tepat sarannya antara program dan

kegiatan Kementerian dan Lembaga dengan kebutuhan serta kondisi sosial budaya masyarakat Papua; (2) masih banyaknya program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan output yang diharapkan; (3) keterbatasan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia aparatur di daerah pada bidang perencanaan, pengelolaan keuangan, serta bidang teknis lainnya; (4) kondisi keamanan dan ketertiban yang belum kondusif; (6) tingginya biaya kemahalan yang mengakibatkan standar harga yang berbeda dengan daerah lain; dan (5) kondisi sosial budaya dan adat istiadat yang berbeda sehingga menuntut pola penanganan yang spesifik.

2.11.3.6 Bidang Kesejahteraan Rakyat Lainnya

Kehidupan Beragama.

Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan beragama pada tahun 2014 adalah upaya peningkatan kerukunan beragama dan peningkatan kualitas penyelenggaraan haji yang ditandai dengan pelaksanaan haji yang tertib dan lancar. Beberapa permasalahan dari dua fokus prioritas di tahun 2014 tersebut antara lain kehidupan harmoni masyarakat belum sepenuhnya terwujud, yang disebabkan antara lain: (1) peraturan perundangan yang ada belum secara komprehensif mengakomodasi perkembangan dimasyarakat; (2) beberapa peraturan perundangan yang ada belum dapat di fahami sepenuhnya sehingga tidak dapat dijalankan dengan baik; dan (3) pengelolaan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kearifan lokal sebagai sistem perekat sosial belum maksimal. Dalam penyelenggaraan haji, beberapa permasalahan yang dihadapi adalah (1) masih belum efisiensinya pelayanan haji baik di dalam maupun di luar negeri; (2) masih panjangnya *waiting list* berbanding dengan kuota yang tersedia; (3) Masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan penyelenggara haji khusus (PIHK); (4) masih kurangnya transparansi pengelolaan dana haji; dan (5) masih adanya 34 kabupaten/kota yang belum memiliki sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) yang *online* dan 161 kabupaten/kota yang belum *upgrade* sistem biometrik.

Adapun tantangan yang dihadapi pembangunan bidang agama ke depan adalah : (1) menyempurnakan peraturan perundang-undangan; (2) sosialisasi peraturan perundang-undangan; (3) menyediakan sarana prasarana FKUB; (4) meningkatkan pemberdayaan FKUB; (5) meningkatkan transparansi pengelolaan dan pemanfaatan dana haji; (6) meningkatkan akurasi perhitungan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH); (7) penyederhanaan prosedur pendaftaran; (8) meningkatkan kualitas pemondokan dan *upgrade* transportasi; (9) meningkatkan pengawasan penyelenggaraan haji oleh masyarakat dan swasta; (10) mengintegrasikan sistem informasi haji; dan (11) terbentuknya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Pariwisata.

Permasalahan pokok yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan antara lain: (i) destinasi pariwisata belum sepenuhnya siap bersaing di pasar global; (ii) belum efektifnya pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata; (iii) terbatasnya daya saing sumber daya pariwisata; dan (iv) belum optimalnya sinergi antarpemangku kepentingan di pusat maupun di daerah dalam mendukung pembangunan kepariwisataan. Dengan demikian tantangan pembangunan kepariwisataan pada tahun 2013 adalah: (i) meningkatkan daya saing destinasi pariwisata; (ii) meningkatkan promosi dan pemasaran berbasis teknologi informasi dan teknologi; (iii) meningkatkan kemitraan pemerintah, swasta dan masyarakat (*public private partnership*) dan kerja sama lintas bidang dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis masyarakat; dan (iv) meningkatkan profesionalisme dan kemampuan SDM di bidang pariwisata dalam menghadapi persaingan global dan liberalisasi tenaga kerja sehingga mampu meningkatkan pelayanan prima kepada wisatawan dan meningkatkan kualitas hasil penelitian.

Pengarusutamaan Gender Serta Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

Pencapaian tahun 2013 di bidang pengarusutamaan gender serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, masih dihadapkan pada permasalahan, antara lain: (1) masih terdapat kesenjangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan di berbagai bidang, baik terhadap perempuan, maupun laki-laki; yang dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek utama: akses, partisipasi dalam proses pembangunan/pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, maupun manfaat pembangunan, (2) program kesetaraan gender dan/atau pemberdayaan perempuan selama ini hanya meliputi sosialisasi/advokasi untuk perempuan belaka, tidak menyentuh pada substansi inti kegiatan/program pembangunan, dan tidak menyentuh persoalan laki-laki yang juga tertinggal di beberapa bidang pembangunan; (3) masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, yang ditandai dengan maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; (4) belum tersedianya data terkait kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup nasional yang akurat, mutakhir dan berkelanjutan; (5) rendahnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak. Hal ini ditandai dengan masih adanya nilai-nilai lokal yang melanggengkan praktik kekerasan terhadap anak. Selain itu, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan karena masih menganggap bahwa kasus tersebut adalah aib; (6) data tentang KtA belum optimal, masih bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan; dan (7) munculnya berbagai tindak kekerasan baru, seperti pornografi dan perdagangan anak melalui media *online*.

Tantangan yang akan dihadapi pada tahun 2014, antara lain: (1) peningkatan pemahaman para pemangku kepentingan terkait

tentang pentingnya pembangunan yang responsif gender; (2) peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan koordinasi pelaksanaannya, termasuk meningkatkan kapasitas SDM dalam rangka percepatan PUG melalui penerapan PPRG; (3) peningkatan kapasitas lembaga perlindungan perempuan dan anak terkait implementasi dari berbagai perundangan-undangan dan kebijakan yang telah disusun atau disahkan. Hal ini tercermin dari kapasitas sumber daya manusia pelaksana layanan dan sarana prasarana yang tersedia; (4) peningkatan koordinasi antarkementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan; (5) optimalisasi peran masyarakat dalam melakukan pencegahan dan penanganan bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan perlakuan salah lainnya.

Pemuda dan Olahraga.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun 2014, antara lain: (1) rendahnya kualitas pemuda yang ditandai oleh angka partisipasi pemuda dalam pendidikan; data Susenas 2011 menunjukkan sekitar 1,4 persen pemuda tidak/belum pernah sekolah, 17,5 persen masih/sedang sekolah, dan 81,2 persen sudah tidak sekolah lagi; berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan: 7,5 persen tidak memiliki ijazah dan belum tamat SD, 22,8 persen lulus SD, 31,9 persen lulus SMP, 31,3 persen lulus SMA dan hanya 6,5 persen lulus perguruan tinggi; (2) masih tingginya penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA) lainnya, HIV dan AIDS; berdasarkan data BNN dan Bareskrim Polri pada 2011 tercatat 18.823 pemuda terlibat tindak pidana narkoba. (3) masih tingginya tingkat pengangguran pemuda; berdasarkan data Sakernas Agustus 2011 menunjukkan TPT pemuda sebesar 8,4 persen; (4) rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; (5) terbatasnya sarana dan prasarana olahraga; (6) belum optimalnya upaya pembibitan atlet unggulan; berdasarkan data Statistik Keolahragaan Kemenpora 2010, jumlah atlet PPLP sebanyak 1.710 siswa; (7) terbatasnya tenaga dan pembina keolahragaan yang berkualitas; berdasarkan data Statistik Keolahragaan Kemenpora 2010, jumlah pelatih PPLP sebanyak 378 pelatih; (8) rendahnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; (9) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; dan (10) belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan nasional.

Dengan demikian, tantangan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan ke depan, antara lain: (a) peningkatan pelayanan kepemudaan dalam hal penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kepeloporan pemuda; (b) peningkatan pembinaan dan pengembangan olahraga.

2.12 Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Pemerintah akan terus melakukan sejumlah perbaikan iklim investasi dan iklim usaha, antara lain melalui *debottlenecking* regulasi (deregulasi) terhadap peraturan yang dinilai menjadi penghambat bagi pelaksanaan investasi. Sejak MP3EI diluncurkan, Pemerintah telah selesai melakukan revisi terhadap 35 regulasi dan saat ini sedang menyelesaikan 8 regulasi lainnya. Upaya-upaya *debottlenecking* di atas tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari pemerintah daerah terutama untuk melakukan upaya *debottlenecking* guna memperbaiki iklim investasi dan iklim usaha di daerah masing-masing. Hal ini juga terkait untuk memastikan penetapan peraturan-peraturan daerah yang dapat mendukung terciptanya iklim investasi dan kepastian berusaha.

TABEL 2.18
STATUS KEMAJUAN PENYEMPURNAAN REGULASI UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN MP3EI

| No | Jenis Regulasi | Telah Diperbaiki | Sedang Diperbaiki | Akan Diperbaiki |
|--------------|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1. | Undang-Undang (UU) | 1 | 2 | 0 |
| 2. | Peraturan Pemerintah (PP) | 8 | 4 | 0 |
| 3. | Peraturan Presiden (Perpres) | 16 | 0 | 0 |
| 4. | Keputusan Presiden (Keppres) | 1 | 0 | 1 |
| 5. | Instruksi Presiden (Inpres) | 1 | 0 | 0 |
| 6. | Peraturan Menteri/Kepala | 8 | 0 | 1 |
| Total | | 35 | 6 | 2 |

Sumber: KP3EI, 2012

2.13 Masterplan Percepatan Dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)

Dengan melihat berbagai kondisi kemiskinan yang ada saat ini dan berbagai faktor yang akan memengaruhi kondisi kemiskinan di masa depan, upaya percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan akan menghadapi beberapa tantangan, diantaranya:

- 1) rendahnya kualitas sumberdaya manusia anak dan kelompok usia muda miskin;
- 2) belum adanya sistem perlindungan sosial yang komprehensif;
- 3) adanya kelompok yang mengalami ketertinggalan sosial (*social exclusion*);
- 4) kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok sosial yang tinggi;
- 5) perubahan iklim dan degradasi daya dukung lingkungan;
- 6) ketidaksetaraan gender dan perbedaan kedalaman kemiskinan dan kerentanan antara perempuan dan laki-laki, serta antarkelompok umur.

BAB 3

KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014



BAB 3

KERANGKA EKONOMI MAKRO 2014

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 merupakan rencana kerja pemerintah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN tahun 2010 – 2014 dan disusun pada pertengahan periode pelaksanaan RPJM tahun 2010 - 2014. Oleh karena itu, kerangka ekonomi makro tahun 2014 berisi gambaran perkembangan ekonomi makro selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, perkiraan ekonomi makro tahun 2013, serta sasaran-sasaran pokok yang akan dicapai pada tahun 2014. Sasaran pokok tahun 2014 mengacu pada sasaran yang tercantum pada RPJMN tahun 2010 - 2014 dan sasaran tersebut diupayakan tercapai melalui berbagai kegiatan dan kebijakan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

3.1 GAMBARAN UMUM

3.1.1 Kondisi Ekonomi Makro Tahun 2010 Sampai Dengan Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Kondisi perekonomian Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang berat dengan adanya ketidakpastian penyelesaian krisis keuangan Eropa, masih lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat, serta kuatnya gejolak harga komoditi dunia terutama minyak mentah dunia. Namun demikian, ketahanan ekonomi Indonesia masih terjaga yang tercermin dari perekonomian Indonesia yang masih tumbuh tinggi serta stabilitas ekonomi yang terjaga. Pada tahun 2013, ketidakpastian kondisi ekonomi dunia diperkirakan masih berlanjut namun dengan tekanan yang lebih ringan sehingga kondisi ekonomi makro Indonesia diperkirakan akan lebih baik atau paling tidak sama dibandingkan tahun sebelumnya.

Momentum pertumbuhan ekonomi dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 tetap terpelihara. Perekonomian Indonesia dapat tumbuh sebesar 6,2 persen pada tahun 2010, 6,5 persen pada tahun 2011, dan 6,2 persen pada tahun 2012. Secara rata-rata, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,3 persen selama tiga tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2010 – 2014. Pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut terutama ditopang oleh ketahanan ekonomi domestik yang digambarkan oleh peningkatan investasi dan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2013, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6,2 persen dengan lebih mendorong ketahanan domestik yang lebih baik ditengah resiko eksternal yang masih berlanjut.

Stabilitas ekonomi Indonesia pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 masih terkendali meskipun mendapat tekanan ekonomi dunia. Pada tahun 2010 hingga tahun 2011, rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS bergerak menguat dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Sepanjang tahun 2010 rata-rata nilai tukar Rupiah berkisar pada Rp9.087 per Dollar AS atau mengalami apresiasi sebesar 12,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Apresiasi rupiah berlanjut hingga tahun 2011

dengan rata-rata berkisar pada Rp8.772 per Dollar AS, atau terapresiasi sebesar 3,5 persen dibanding tahun 2010. Namun penguatan nilai tukar tidak berlanjut pada tahun 2012. Rata-rata nilai tukar pada tahun 2012 berkisar pada Rp 9.386 per Dollar AS, atau terdepresiasi sebesar 7,0 persen dibandingkan tahun 2011. Cadangan devisa Indonesia meningkat dari USD96,2 miliar pada tahun 2010, menjadi USD110,1 miliar pada tahun 2011, dan mencapai USD112,8 miliar pada tahun 2012. Laju inflasi periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terkendali di bawah dua digit. Laju inflasi pada tahun 2010 meningkat menjadi 7,0 persen didorong oleh peningkatan harga bahan pangan dunia dan peningkatan harga energi di pasar internasional yang mendorong kenaikan harga komoditas sejenis di pasar domestik dan kenaikan tarif listrik. Pada tahun 2011 dan tahun 2012, laju inflasi dapat terkendali di bawah 5,0 persen, yaitu sebesar 3,8 persen pada tahun 2011 dan sebesar 4,3 persen tahun pada tahun 2012. Pada tahun 2013 dengan masih adanya beberapa risiko eksternal seperti berlanjutnya krisis keuangan Eropa, pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang lambat, dan gejolak harga komoditi dunia, pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan akan lebih berat dan tingkat inflasi juga mengalami tekanan yg lebih besar. Namun demikian, pemerintah tetap terus berupaya keras untuk mencapai target tingkat kemiskinan sebesar 9,50-10,50%.

Momentum pertumbuhan dan terjaganya stabilitas ekonomi mendorong peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi. Hal ini dicerminkan oleh menurunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Jumlah penduduk miskin menurun dari 31,02 juta orang (13,33 persen) pada bulan Maret 2010, menjadi 30,02 juta orang (12,49 persen) pada bulan Maret 2011, dan mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen) pada bulan September 2012. Dengan demikian, sampai dengan tahun 2012, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 3,94 juta orang dibandingkan tahun 2009. Jumlah pengangguran terbuka mengalami penurunan dari 9,0 juta orang (7,9 persen) pada tahun 2009 menjadi 7,2 juta orang (6,1 persen) pada tahun 2012 atau berkurang sebesar 1,8 juta orang dalam periode tahun 2010 sampai dengan 2012. Diawal 2013 tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 5,9 persen (7,2 juta). Pada tahun 2013, kualitas pertumbuhan diupayakan lebih baik dari tahun sebelumnya.

3.1.2 Ekonomi Dunia

Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi perekonomian dunia diliputi ketidakpastian. Krisis keuangan Eropa yang masih berlanjut dengan tidak adanya kepastian penyelesaian utang, pemulihan ekonomi AS yang masih lambat, serta mulai menurunnya kemampuan negara-negara Asia untuk menjadi penopang perekonomian dunia, meningkatkan resiko ekonomi dunia. Ketidakpastian kondisi ekonomi dunia yang berdampak pada pelemahan perdagangan dunia mendorong penurunan harga komoditi dunia. Namun demikian, permasalahan ketegangan politik terutama di kawasan Timur Tengah menyebabkan tetap tingginya harga komoditi energi pada tahun 2011 dan sedikit menurun pada tahun 2012.

Pada tahun 2010, kondisi perekonomian dunia sedikit pulih setelah terimbas dampak krisis subprime mortgage di tahun 2008. Kebijakan menyelamatkan perusahaan melalui pemberian bailout yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa memberi ekspektasi positif terhadap perekonomian dunia. Perekonomian dunia pulih dari masa resesi dengan tumbuh sebesar 5,2 persen pada tahun 2010 terutama didorong oleh pemulihan ekonomi negara-negara maju yang tumbuh sebesar 3,0 persen. Perekonomian Amerika Serikat dan Kawasan Eropa dapat tumbuh masing-masing sebesar 2,4 persen dan 2,0 persen dari perekonomian yang sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 3,1 persen dan 4,4 persen di tahun 2009.

Kondisi perekonomian dunia kembali tertekan pada tahun 2011 hingga tahun 2012 dengan permasalahan fiskal di kawasan Eropa dan beberapa negara maju yang memberi resiko yang lebih besar dalam perekonomian. Bantuan likuiditas kepada perusahaan-perusahaan yang terkena krisis subprime mortgage telah membebani fiskal negara-negara tersebut. Amerika Serikat dan Eropa, terutama Yunani, dihadapkan pada defisit fiskal yang melebar. Defisit fiskal yang lebar yang disertai hutang pemerintah per PDB yang besar, membatasi ruang gerak pemerintah Yunani dalam upaya mengatasi resesi ekonomi. Keterkaitan sistem keuangan yang erat terutama pada kawasan Eropa mendorong krisis fiskal Yunani melebar ke negara-negara lain di Kawasan Eropa menjadi krisis keuangan Eropa. Dalam tekanan yang berat, perekonomian dunia pada tahun 2011 tumbuh melambat sebesar 4,0 persen dengan ekonomi Amerika Serikat dan kawasan Eropa tumbuh melambat sebesar 1,8 persen dan 1,4 persen. Paska bencana Tsunami Maret 2011, perekonomian Jepang berkontraksi sebesar 0,6 persen, sedangkan kelompok negara berkembang masih dapat tumbuh tinggi sebesar 6,4 persen pada tahun 2011. Cina dan India tumbuh masing-masing sebesar 9,3 persen dan 7,7 persen.

Pada tahun 2012, pertumbuhan perekonomian dunia masih mengalami perlambatan yang terutama disebabkan oleh: (i) lambatnya proses pemulihan ekonomi AS; (ii) berlanjutnya krisis keuangan Eropa yang melebar ke negara-negara lainnya di kawasan Eropa; dan (iii) melemahnya perdagangan dunia yang berpengaruh terhadap perekonomian negara-negara Asia sebagai penopang perekonomian dunia. Perekonomian AS berada dalam proses pemulihan yang lambat namun masih sesuai dengan harapan. Membaiknya daya beli masyarakat yang mendorong peningkatan konsumsi masyarakat, serta mulai pulihnya sektor perumahan, mendorong perekonomian AS menjadi tumbuh sebesar 2,2 persen pada tahun 2012.

Defisit fiskal yang masih lebar, utang negara-negara utama krisis yang masih tinggi, ketidakpastian penyelesaian krisis yang meningkat, serta tekanan sosial yang tetap tinggi mendorong ketidakpercayaan terhadap perekonomian Eropa. Pada tahun 2012, perekonomian kawasan Eropa mengalami kontraksi sebesar 0,6 persen, dengan Jerman dan Perancis sebagai negara-negara utama penopang kawasan Eropa tumbuh melambat masing-masing sebesar

0,9 persen dan 0,0 persen dari pertumbuhan di tahun sebelumnya yang tumbuh masing-masing sebesar 3,1 persen dan 1,7 persen.

Perlambatan ekonomi dunia yang terus berlanjut terutama pada kelompok negara maju mempengaruhi ekonomi negara-negara kawasan Asia melalui penurunan transaksi perdagangan. Rendahnya konsumsi masyarakat, serta menurunnya transaksi perdagangan Jepang ke Cina karena konflik perbatasan, ke Amerika Serikat, dan ke Eropa, mengakibatkan perekonomian Jepang hanya dapat tumbuh 2,0 persen pada tahun 2012. Negara penopang utama perekonomian Asia yaitu Cina dan India juga tumbuh melambat dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 7,8 persen dan 4,0 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2103, perekonomian Cina diperkirakan akan membaik sebagai penggerak utama perekonomian dunia.

Harga komoditi dunia tetap tinggi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, walaupun komoditi non-energi cenderung menurun yang didorong oleh penurunan permintaan negara-negara maju. Perubahan iklim global yang tidak menentu serta ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong harga komoditi terutama komoditi energi tetap tinggi pada tahun 2011. Indeks harga komoditi non-energi yang meningkat sejak pertengahan tahun 2010 menurun pada akhir tahun 2011. Memasuki tahun 2012, ketidakpastian ekonomi global mendorong spekulasi di pasar komoditi dunia sehingga indeks harga komoditi meningkat sampai dengan bulan April 2012. Pada bulan April 2013, indeks harga komoditi menurun namun tetap tinggi yang mencapai 178,3 untuk komoditi energi dan 175,7 untuk komoditi non-energi, atau turun masing-masing 3,7 persen dan 6,0 persen dibandingkan bulan Desember 2012.

Keterbatasan suplai minyak mentah yang disebabkan ketegangan politik Timur Tengah dan Iran mendorong harga minyak mentah tetap tinggi hingga awal tahun 2012. Harga rata-rata minyak mentah (Brent, Dubai, dan WTI) per bulan mencapai USD110,9 per barel pada tahun 2011 dan USD95,1 per barel pada tahun 2012. Harga minyak mentah diperkirakan masih tetap tinggi pada tahun 2013 dengan harga minyak Brent dan WTI masing-masing diperkirakan mencapai USD105,9 per barel dan USD93,2 per barel.

Laju inflasi pada beberapa negara dunia menurun seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama komoditi non-energi. Pada tahun 2010, laju inflasi mencapai 1,5 persen pada negara-negara maju dan 6,0 persen pada negara berkembang. Harga komoditi dunia yang meningkat, mendorong peningkatan laju inflasi pada tahun 2011. Laju inflasi mencapai 2,7 persen di kelompok negara maju dan 7,2 persen di kelompok negara berkembang pada tahun 2011. Seiring dengan penurunan harga komoditi dunia terutama non-energi, laju inflasi pada tahun 2012 mengalami penurunan baik pada kelompok negara berkembang maupun pada kelompok negara maju. Laju inflasi Cina menurun dari 2,6 persen pada tahun 2012 menjadi 2,1 persen (y-o-y) pada bulan Maret 2013. Demikian pula laju inflasi kawasan Eropa menurun dari 2,5 persen pada tahun 2012 menjadi 1,7 persen (y-o-y) pada bulan Maret 2013.

Sedangkan Jepang mengalami deflasi sebesar 0,9 persen pada tahun 2012.

Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan global mengalami penurunan pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 yang disebabkan oleh perlambatan dunia serta ketidakpastian penyelesaian krisis Eropa. Indeks perdagangan saham baik di Asia, Amerika Serikat, maupun Eropa mengalami penurunan. Namun demikian, upaya-upaya mengatasi krisis seperti pemberian bailout memberi ekspektasi positif terhadap penyelesaian krisis Eropa sehingga mendorong meningkatnya beberapa indeks saham dunia. Pada akhir tahun 2012, indeks Nikkei Tokyo, Hangseng Hongkong, STI Singapura, dan Malaysia masing-masing mencapai 10.395; 22.657; 3.167; dan 1.689. Ekspektasi positif terhadap perekonomian Amerika Serikat kembali memberi dorongan peningkatan pada beberapa indeks saham dunia. Pada akhir bulan April 2013, indeks New York DJIA, Nikkei Tokyo, Hangseng Hongkong, STI Singapura masing-masing naik sebesar 13,2 persen; 33,3 persen; 0,4 persen; 6,3 persen dibandingkan akhir tahun 2012.

Secara keseluruhan tahun 2012, pertumbuhan ekonomi dunia melambat menjadi 3,2 persen. Pada tahun 2013, perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan ekonomi Cina yang membaik. Dengan demikian, perekonomian dunia pada tahun 2013 diperkirakan tumbuh sebesar 3,3 persen.

3.1.3 Moneter, Perbankan dan Pasar Modal

Inflasi di Indonesia sepanjang tahun 2012 tetap terkendali pada level yang rendah dan berada pada kisaran sasaran inflasi sebesar 4,5 persen \pm 1 persen. Terkendalnya inflasi tersebut sebagai hasil dari sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektoral dan didukung oleh meningkatnya koordinasi kebijakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Inflasi tahun 2012 mencapai 4,3 persen (y-o-y) terutama didorong oleh inflasi inti yang stabil, inflasi volatile food yang terkendali dan inflasi administered prices yang rendah, meskipun inflasi tersebut masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2011 yang besarnya 3,8 persen (y-o-y). Selain itu, terjaganya inflasi juga didukung oleh koordinasi yang semakin intensif antara Bank Indonesia dan pemerintah melalui forum TPI (Tim Pengendalian Inflasi) dan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), terutama pada upaya peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga pangan strategis.

Inflasi sampai dengan bulan Maret 2013 cenderung tinggi, namun masih tetap terkendali. Inflasi bulan Maret 2013 mencapai 0,6 persen (m-t-m) atau 5,9 persen (y-o-y) antara lain akibat tingginya curah hujan yang menimbulkan gangguan distribusi dan produksi. Pasokan yang terganggu mendorong inflasi bahan pangan (*volatile food*) meningkat cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Pada bulan April 2013 Indonesia mengalami deflasi secara bulanan (m-t-m), yakni sebesar 0,1 persen. Sedangkan inflasi secara tahunan pada bulan April 2013 menurun menjadi 5,6 persen (y-o-y). Inflasi

administered prices tercatat mulai menunjukkan peningkatan pada bulan Januari 2013 sejalan dengan dampak kebijakan kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) rata-rata sebesar 4,3 persen per triwulan. Inflasi kelompok *administered prices* pada bulan April 2013 tercatat sebesar 0,1 persen (m-t-m) atau 2,7 persen (y-o-y).

Nilai tukar Rupiah pada tahun 2012 mengalami depresiasi dengan volatilitas yang cukup rendah. Rupiah secara *point-to-point* melemah 8,0 persen (y-o-y) pada akhir tahun 2012 ke level Rp9.793 per Dollar AS. Tekanan depresiasi terutama terjadi pada triwulan II dan III tahun 2012 terkait dengan memburuknya kondisi perekonomian global, khususnya di kawasan Eropa, yang berdampak pada penurunan arus masuk portofolio asing ke Indonesia. Dari sisi domestik, tekanan Rupiah berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan impor (termasuk kebutuhan valas untuk impor BBM) di tengah perlambatan kinerja ekspor. Nilai tukar Rupiah kembali bergerak stabil pada triwulan IV tahun 2012 seiring dengan peningkatan arus masuk modal asing yang cukup besar, baik dalam bentuk arus masuk modal portofolio maupun investasi langsung.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN-4 yang lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, fluktuasi indeks nilai tukar keempat negara tersebut cenderung stabil dari periode September 2010 sampai dengan September 2011. Sementara itu, mulai terjadi depresiasi pada periode September 2011 sampai dengan Desember 2011. Selanjutnya, sejak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, nilai tukar Malaysia, Singapura dan Thailand kembali mengalami apresiasi.

Berbeda dengan ketiga negara tersebut, nilai tukar Rupiah secara perlahan terus mengalami depresiasi hingga bulan Maret 2013, namun dengan volatilitas yang relatif stabil. Nilai tukar Rupiah pada bulan Maret 2013 melemah sebesar 0,7persen (m-t-m) ke level Rp9.735 per Dollar AS dari Rp9.669 per Dollar AS pada bulan sebelumnya. Nilai tukar Rupiah pada bulan April 2013 sedikit menguat menjadi Rp9.734 per Dollar AS. Dalam rangka menjaga kestabilan nilai tukar, Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamental perekonomian.

Pada tahun 2012, masih berlanjutnya krisis ekonomi dan keuangan di Eropa, gejolak di Amerika Serikat serta berbagai tekanan yang terjadi di pasar keuangan, membuat sektor keuangan domestik tak lepas dari gejolak dan tekanan ekonomi. Namun, kondisi ketahanan sektor keuangan secara umum relatif cukup baik. Beberapa indikator di sektor pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya yang menunjukkan kondisi yang cukup terkendali ini, adalah sebagai berikut.

Meskipun kondisi pasar modal Indonesia meningkat pada awal tahun 2012, yaitu dari level IHSG 3.942 pada akhir bulan Januari 2012, dan terus meningkat secara bertahap sampai mencapai level 4.181 pada akhir bulan April 2012, tekanan akibat krisis utang Eropa kemudian membawa IHSG sempat turun ke level 3.833 pada akhir bulan Mei 2012. Tekanan terhadap IHSG tersebut didorong oleh kepanikan sebagian investor asing dan dalam negeri. IHSG kemudian kembali

menunjukkan peningkatan menjadi 3.956 pada akhir bulan Juni 2012 secara bertahap ke level 4.350 pada akhir bulan Oktober 2012, sedikit menurun pada akhir bulan November, dan mencapai 4.317 pada akhir Desember 2012 atau menguat 12,9 persen selama tahun 2012. Peningkatan indeks saham ini terus berlanjut pada tahun 2013, dan mencapai 5.061 pada awal bulan Mei 2013.

Di sektor perbankan, meskipun dampak krisis Eropa dan gejolak politik dan ekonomi di Amerika Serikat, kinerja sektor perbankan masih terjaga dengan baik. Indikator rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio* - CAR) pada akhir 2012 menunjukkan angka 17,4 persen, meningkat dibandingkan tahun 2011 (16,1 persen) dan 2010 (17,0 persen). Indikator lain seperti rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan* - NPL), tercatat menurun (membaik) menjadi 1,9 persen pada akhir 2012, dibanding 2011 (2,2 persen) dan 2010 (2,6 persen), terkait dengan kebijakan *Loan to Value* dan *Down Payment* perbankan. Dari segi aset, total aset bank-bank umum pada tahun 2012 tercatat tumbuh sebesar 16,7 persen, sedikit menurun dibanding tahun 2011 (21,4 persen).

Penyaluran kredit perbankan juga mengalami pertumbuhan. Kinerja penyaluran kredit hingga Desember 2012 mencapai Rp2.707,9 triliun atau tumbuh sebesar 23,1 persen (y-o-y) sedikit menurun dibanding tahun 2011 (24,6 persen). Diturunkannya BI rate pada bulan Februari 2012 menjadi 5,75 persen, telah sedikit mendorong penurunan suku bunga kredit. Tingkat suku bunga kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing menurun dari 12,2 persen, 12,0 persen dan 14,2 persen pada akhir 2011 menjadi 11,5 persen, 11,3 persen dan 13,6 persen pada akhir 2012. Menurunnya suku bunga kredit tersebut juga terkait dengan kebijakan yang mewajibkan bank mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit, yang bertujuan untuk mendorong efisiensi perbankan.

Membaiknya kegiatan perekonomian, khususnya di bidang produksi dan perdagangan telah mendorong peningkatan penyaluran kredit, baik kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI) dan kredit konsumsi (KK). Pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi pada tahun 2012 masing-masing mencapai 23,2 persen, 27,6 persen, dan 20,0 persen (y-o-y). Pada tahun 2011, komposisi pertumbuhan KMK, KI dan KK masing-masing adalah 21,4 persen, 33,2 persen dan 24,2 persen (y-o-y).

Peningkatan pertumbuhan kredit juga terjadi pada kredit yang berskala Mikro, Kecil dan Menengah (kredit MKM). Pada tahun 2012, kredit MKM yang disalurkan tercatat sebesar Rp1.350,6 triliun atau meningkat sebesar 17,3 persen dibanding tahun sebelumnya, agak menurun dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011.

Di sisi penghimpunan dana, pertumbuhan simpanan masyarakat terus meningkat ditengah tingkat suku bunga deposito yang berfluktuasi. Sampai dengan akhir tahun 2012 simpanan masyarakat mencapai Rp3.225,2 triliun atau meningkat sebesar 15,8 persen (y-o-y). Dengan perkembangan tersebut, dimana pertumbuhan kredit sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan simpanan, maka rasio antara kredit yang disalurkan dengan simpanan pada akhir tahun 2012 meningkat menjadi

83,6 persen atau lebih tinggi dari akhir 2011 (78,8 persen) dan akhir 2010 (75,2 persen).

Kinerja perbankan syariah juga terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 pembiayaan syariah mampu tumbuh sebesar 25,9 persen (y-o-y) atau meningkat dari Rp112,8 triliun pada 2011 menjadi Rp 142,1 triliun pada 2012. Sedangkan penghimpunan dana masyarakat melalui perbankan syariah mencapai Rp133,2 triliun atau meningkat sebesar 26,2 persen (y-o-y). Kinerja perbankan syariah juga cukup baik bila dilihat dari potensi pembiayaan macet yang tercermin dari rasio pembiayaan berkinerja buruk (Non Performing Financing-NPF) yang membaik dan berada pada level 2,3 persen pada akhir 2012, dibanding 2011 (2,5 persen) dan 2010 (3,0 persen).

Disamping sektor pasar modal dan perbankan, perkembangan positif juga ditunjukkan oleh kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Kepercayaan masyarakat terhadap IKNB terus meningkat, ditunjukkan oleh meningkatnya aset IKNB seperti asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Meskipun terjadi krisis utang Eropa, aset perusahaan multifinance pada tahun 2012 tumbuh sebesar 17,3 persen (y-o-y), sedikit menurun dibanding tahun 2011 (26,5 persen). Hal serupa juga terjadi pada nilai aset perusahaan asuransi yang sedikit mengalami penurunan sebesar 18,2 persen dibandingkan tahun 2011 (18,9 persen). Sementara itu, sektor dana pensiun mengalami peningkatan nilai aset bersih yang tumbuh sebesar 11,9 persen (y-o-y), naik dibandingkan tahun 2011 yang tumbuh sebesar 8,6 persen. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hingga Desember 2012, tidak hanya ketiga sektor di atas yang mengalami peningkatan aset, tetapi juga sektor IKNB lainnya, seperti modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

3.1.4 Neraca Pembayaran

Pada periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kondisi Neraca Pembayaran Indonesia masih terjaga namun dalam tekanan yang berat. Gejolak ekonomi dunia terutama perlambatan ekonomi negara-negara maju melemahkan neraca perdagangan Indonesia. Dengan ekspor barang yang menurun sedangkan impor barang yang tetap tinggi, neraca transaksi berjalan mengalami defisit pada tahun 2012. Namun demikian, likuiditas di pasar dunia yang cukup besar serta masih tingginya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia mendorong masuknya arus modal ke Indonesia dan menguatkan neraca transaksi modal dan finansial.

Pada tahun 2010, surplus neraca pembayaran Indonesia masih terjaga dengan penurunan surplus neraca transaksi berjalan dan peningkatan surplus neraca modal dan finansial. Total penerimaan ekspor barang mencapai USD158,1 miliar, naik 32,1 persen. Kenaikan tersebut didorong oleh ekspor migas dan nonmigas yang meningkat masing-masing sebesar 39,0 persen dan 30,7 persen. Sedangkan, pengeluaran impor mencapai USD127,4 miliar, naik 43,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meningkatnya pengeluaran impor barang disebabkan oleh impor migas dan nonmigas yang naik masing-masing sebesar 66,8 persen dan 38,9 persen. Dengan defisit jasa-jasa (termasuk pendapatan dan transfer berjalan) sebesar

USD25,5 miliar, surplus neraca transaksi berjalan tahun 2010 mencapai USD5,1 miliar. Neraca modal dan finansial mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan tahun 2009. Pada tahun 2010, investasi langsung asing (neto) mencapai USD11,1 miliar, investasi portofolio USD13,2 miliar, dan investasi lainnya mencapai USD2,3 miliar. Dalam keseluruhan tahun 2010, neraca transaksi modal dan finansial mengalami surplus sebesar USD26,6 miliar. Cadangan devisa pada akhir tahun 2010 mencapai USD96,2 miliar, cukup untuk memenuhi kebutuhan 7,2 bulan impor.

Pada tahun 2011, neraca pembayaran Indonesia menghadapi tekanan yang lebih berat dibandingkan tahun 2010. Surplus neraca transaksi berjalan semakin menurun menjadi USD1,7 miliar terutama disebabkan oleh pertumbuhan pengeluaran impor migas yang lebih tinggi dari pertumbuhan penerimaan ekspor migas. Pada tahun 2011, ekspor migas mencapai USD38,1 miliar, naik 32,8 persen dari tahun 2010, sedangkan impor migas mencapai USD38,7 miliar, naik 52,3 persen dari tahun 2010. Surplus neraca transaksi modal dan finansial menurun menjadi sebesar USD13,6 miliar pada tahun 2011. Penurunan surplus transaksi modal dan finansial tersebut terutama didorong oleh menurunnya arus modal masuk portofolio dan meningkatnya arus modal keluar investasi lainnya. Dengan perkembangan tersebut, cadangan devisa mencapai USD110,1 miliar atau cukup untuk 6,5 bulan impor.

Pada tahun 2012, perkembangan perekonomian dunia yang kurang baik memberi tekanan yang lebih berat pada neraca pembayaran Indonesia. Pada tahun 2012, penerimaan ekspor barang menurun menjadi USD188,1 miliar dengan ekspor migas dan ekspor nonmigas yang menurun masing-masing sebesar 6,6 persen dan 6,2 persen dibandingkan tahun 2011. Pengeluaran impor barang meningkat menjadi USD179,7 miliar dengan impor migas dan impor nonmigas masing-masing sebesar USD40,7 miliar dan USD139,0 miliar. Dengan defisit jasa-jasa yang tetap tinggi, neraca transaksi berjalan pada tahun 2012 mengalami defisit sebesar USD24,2 miliar. Pada tahun 2012, surplus neraca transaksi modal dan finansial meningkat mencapai USD24,9 miliar dengan kenaikan pada investasi langsung asing, investasi portofolio, dan investasi lainnya. Investasi langsung asing mencapai USD14,4 miliar, didukung oleh tingginya arus modal masuk di Indonesia yang mencapai USD19,9 miliar. Investasi portofolio mencapai USD9,2 miliar terutama didorong oleh masuknya investasi portofolio ke sektor publik sebesar USD4,4 miliar pada triwulan IV tahun 2012. Sedangkan investasi lainnya mencapai USD1,2 miliar dengan tingginya penyerapan hutang swasta sejak awal tahun dan penyerapan hutang publik pada akhir tahun 2012. Dengan perkembangan tersebut, pada tahun 2012, cadangan devisa mencapai USD112,8 miliar atau cukup untuk kebutuhan 6,1 bulan impor.

Pada tahun 2013, perekonomian dunia diperkirakan membaik didukung oleh pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang bertahap, upaya penyelesaian krisis Eropa yang terarah, serta kemampuan ekonomi Cina yang membaik. Penerimaan ekspor diperkirakan mencapai USD195,9 miliar dengan ekspor non migas yang

diperkirakan tumbuh sebesar 4,2 persen. Sedangkan impor diperkirakan mencapai USD185,3 miliar dengan impor non migas diperkirakan tumbuh sebesar 3,1 persen. Dengan defisit jasa-jasa yang meliputi pendapatan dan transfer, neraca transaksi berjalan diperkirakan mengalami defisit sebesar USD24,5 miliar atau turun sebesar 1,3 persen.

Daya tarik investasi ke negara-negara berkembang termasuk Indonesia diperkirakan tetap tinggi. Pada tahun 2013, investasi langsung asing (neto), investasi portfolio (neto), serta investasi lainnya masing-masing diperkirakan surplus sebesar USD14,7 miliar, USD9,6 miliar, dan USD 1,3 miliar, dengan cadangan devisa mencapai USD113,9 miliar, atau cukup untuk membiayai 6,1 bulan impor.

3.1.5 Keuangan Negara

Kebijakan fiskal dalam RPJMN 2010-2014 diarahkan untuk menjaga ketahanan fiskal yang berkelanjutan (*fiscal sustainability*) melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja negara serta pengelolaan pembiayaan secara berhati-hati.

Berdasarkan hasil tinjauan paruh waktu pelaksanaan RPJMN 2010-2014, realisasi pendapatan negara dan hibah sepanjang tahun 2010-2012 meningkat rata-rata sebesar 15,8 persen atau naik dari Rp995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp1.335,7 triliun pada tahun 2012. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang meningkat sebesar 16,4 persen atau naik dari Rp723,3 triliun menjadi Rp980,1 triliun yang menyumbang sebesar 73,6 persen dari total penerimaan dalam negeri. Meningkatnya penerimaan perpajakan tersebut didorong oleh berbagai kebijakan dan langkah-langkah penting yang telah dilakukan, antara lain: (a) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya seperti penerapan sistem informasi perpajakan (SIDJP), perbaikan proses bisnis pelayanan perpajakan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia perpajakan; (b) peningkatan perbaikan penggalan potensi perpajakan; serta (c) peningkatan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai.

Di sisi belanja negara, realisasi belanja negara sepanjang 2010-2012 meningkat rata-rata sebesar 19,2 persen atau meningkat dari Rp1.042,1 triliun (16,2 persen PDB) menjadi Rp1.481,7 triliun (18,0 persen PDB). Peningkatan belanja Negara tersebut mencerminkan upaya pemerintah dalam memberikan stimulasi terhadap perekonomian dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal.

Dengan tingkat pendapatan negara dan belanja negara sebagaimana tersebut di atas, defisit anggaran sepanjang tahun 2010-2012 tetap terjaga di bawah 3,0 persen PDB sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Posisi utang pemerintah pada tahun 2012 sebesar 24,0 persen atau lebih rendah dari tahun 2011 yang mencapai sebesar 24,4 persen.

Pada tahun 2013, arah kebijakan fiskal ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menjaga

kesinambungan fiskal, yaitu: (a) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan hidup; (b) meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan; (c) menjaga defisit anggaran pada batas aman (di bawah 3 persen terhadap PDB); dan (d) menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali.

Dengan arah kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara pada APBN tahun 2013 direncanakan mencapai Rp1.529,7 triliun atau meningkat 14,5 persen dibandingkan realisasi APBN tahun 2012. Peningkatan pendapatan negara tersebut utamanya didorong oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.193,0 triliun atau meningkat sebesar 21,7 persen dibandingkan realisasi APBN 2012. Untuk memberikan dorongan pada perekonomian, belanja negara direncanakan sebesar Rp1.683,0 triliun atau meningkat sebesar 13,6 persen dibanding realisasi tahun 2012. Alokasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.154,4 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp528,6 triliun. Sementara itu, alokasi belanja untuk subsidi diperkirakan sebesar Rp317,2 triliun atau turun sebesar 8,4 persen dibandingkan realisasi subsidi tahun 2012. Dari alokasi belanja subsidi tersebut 61,1 persen dialokasikan untuk subsidi BBM, LPG, dan BBN yang diperkirakan sebesar Rp193,8 triliun.

Dengan perkembangan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, ketahanan fiskal diperkirakan tetap terjaga. Pada tahun 2013, defisit anggaran diperkirakan Rp153,3 triliun (1,65 persen PDB). Defisit ini akan dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri sebesar Rp172,8 triliun, sedangkan pembiayaan luar negeri (neto) sebesar negatif Rp19,5 triliun. Ketahanan fiskal yang terjaga tercermin dari posisi utang pemerintah yang diperkirakan terus menurun menjadi 23,1 persen PDB pada akhir tahun 2013.

3.1.6 Pertumbuhan Ekonomi

Stabilitas ekonomi yang didukung oleh daya beli masyarakat mendorong terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012. Perekonomian Indonesia rata-rata tumbuh sebesar 6,3 persen dalam periode tiga tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2010 – 2014 dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2010, tahun 2011, dan tahun 2012 berturut-turut sebesar 6,2 persen, 6,5 persen, dan 6,2 persen.

Dari sisi pengeluaran, dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama didukung oleh peningkatan investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi berupa Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh rata-rata sebesar 9,0 persen terutama didukung oleh investasi alat angkutan luar negeri serta mesin dan perlengkapan luar negeri. Daya beli masyarakat yang dapat terjaga mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh rata-rata sebesar 4,9 persen dan pengeluaran pemerintah tumbuh rata-rata sebesar 1,6 persen. Peningkatan pengeluaran rumah tangga terutama didorong oleh pengeluaran rumah tangga bukan makanan. Sedangkan pengeluaran pemerintah terutama didorong oleh komponen pengeluaran penerimaan barang dan jasa.

Perlambatan ekonomi dunia memberi tekanan menurun pada transaksi perdagangan luar negeri Indonesia. Ekspor barang dan jasa Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,0 persen pada tahun 2012, meskipun dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, ekspor barang dan jasa dapat tumbuh rata-rata sebesar 10,3 persen. Sejalan dengan peningkatan investasi, impor barang dan jasa tumbuh rata-rata sebesar 12,4 persen.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terutama didukung oleh sektor tersier yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi serta perdagangan, hotel, dan restoran dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 11,4 persen dan 8,7 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat tinggi didorong oleh pertumbuhan pada sub sektor komunikasi, sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran terutama didukung oleh peningkatan pada sub sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor tersier lainnya yaitu listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen; 7,0 persen; 6,6 persen; dan 6,0 persen dalam periode tiga tahun pertama RPJMN Tahun 2010 - 2014. Sektor sekunder yaitu industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen dan 2,3 persen. Pertumbuhan pada sektor industri pengolahan terutama didorong oleh sub sektor industri nonmigas alat angkutan, mesin, dan peralatannya; serta logam dasar besi dan baja. Sektor primer yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tumbuh rata-rata sebesar 3,5 persen dalam periode yang sama, terutama didukung oleh sub sektor perikanan.

Pada triwulan I tahun 2013, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 1,4 persen (q-t-q) atau 6,0 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, sektor pengangkutan dan komunikasi; konstruksi; serta keuangan, real estat dan jasa perusahaan tumbuh tinggi masing-masing sebesar 10,0 persen; 7,2 persen; dan 8,4 persen. Sedangkan sektor pertanian dan industri pengolahan masing-masing tumbuh sebesar 3,7 persen dan 5,8 persen.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama didorong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) serta konsumsi rumah tangga yang masing-masing tumbuh sebesar 5,9 persen dan 5,2 persen. Adapun pengeluaran pemerintah, ekspor barang dan jasa, serta impor barang dan jasa masing-masing tumbuh sebesar 0,4 persen, 3,4 persen, dan menurun sebesar 0,4 persen.

Krisis keuangan Eropa yang masih belum dapat diselesaikan serta pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang masih lambat terutama dengan adanya permasalahan fiskal yang cukup berat diperkirakan masih membayangi kondisi ekonomi dunia tahun 2013. Meskipun demikian, ekonomi dunia pada tahun 2013 diperkirakan lebih baik dari kondisi perekonomian tahun 2012 terutama didorong oleh pulihnya perekonomian Cina. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga disertai upaya penguatan ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai 6,2 persen pada tahun 2013.

Namun demikian, terdapat resiko pertumbuhan ekonomi ini ke arah yang lebih rendah.

Dengan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen pada tahun 2013, dari sisi pengeluaran, investasi dan konsumsi masyarakat didorong sebagai penggerak perekonomian dengan perkiraan pertumbuhan masing-masing sebesar 6,9 persen dan 4,9 persen. Konsumsi pemerintah diupayakan dapat tumbuh sebesar 3,4 persen melalui efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Ekspor barang dan jasa diupayakan dapat tumbuh kembali sebesar 6,6 persen dalam menghadapi perlambatan ekonomi dunia. Dari sisi lapangan usaha, seiring dengan perbaikan iklim investasi dan usaha, pertumbuhan ekonomi terutama didukung oleh sektor industri pengolahan yang diperkirakan tumbuh 6,1 persen. Sektor pertanian tumbuh 3,7 persen; sektor pertambangan dan penggalian tumbuh 1,6 persen; serta sektor tersier yaitu listrik, gas dan air bersih; bangunan; perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan, jasa usaha; serta jasa-jasa meningkat masing-masing 6,4 persen; 7,3 persen; 7,7 persen; 10,5 persen; 6,1 persen; dan 6,0 persen.

3.1.7 Pengangguran dan Kemiskinan

Momentum pertumbuhan ekonomi yang terjaga pada tahun 2012 telah menciptakan lapangan kerja yang cukup besar dan sekaligus menurunkan pengangguran terbuka. Pada tahun 2013, jumlah pengangguran terbuka menurun menjadi 7,2 juta orang (5,9 persen) dan jumlah penduduk miskin menurun menjadi 28,6 juta orang (11,7 persen). Pada tahun 2013, kualitas pembangunan diupayakan meningkat dengan sasaran target kemiskinan menurun menjadi sebesar 9,5-10,5 persen dan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 5,8-6,1 persen.

3.2 KERANGKA EKONOMI MAKRO TAHUN 2014

3.2.1 Lingkungan Eksternal dan Internal Tahun 2014

Pada tahun 2014, perekonomian dunia diperkirakan akan tumbuh lebih baik dibanding tahun 2013, dengan asumsi perekonomian Eropa yang mulai membaik dan ekonomi AS yang telah berangsur pulih. Namun demikian masih terdapat risiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Risiko tersebut diantaranya adalah: (i) krisis utang Eropa terus berlanjut dan pemulihan ekonomi AS berlangsung lambat; (ii) perekonomian negara-negara kawasan Asia yang mulai melemah, serta (iii) meningkatnya perubahan iklim global.

Dalam situasi ini, berbagai hambatan di dalam negeri yang belum terselesaikan serta kemungkinan cuaca ekstrem di dalam negeri akan dihadapi dengan berbagai langkah yang tepat, antara lain: (i) penguatan ekonomi domestik melalui investasi agar daya beli meningkat (ii) meningkatkan efektivitas belanja negara, baik dari arah belanja negara tersebut maupun dari penyerapannya, terutama yang terkait dengan prioritas belanja negara infrastruktur, serta (iii) peningkatan efektivitas penerimaan negara dengan sekaligus pengurangan defisit anggaran. Dengan langkah-langkah ini, secara keseluruhan momentum pembangunan yang sudah dicapai pada

tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dapat dipertahankan pada tahun 2013, dan dapat ditingkatkan pada tahun 2014.

3.2.2 Tantangan Pokok

Dengan kemajuan yang dicapai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dan masalah yang diperkirakan masih dihadapi hingga tahun 2013, tantangan pokok yang dihadapi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut.

1. **MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL.** Dorongan akan diberikan pada peningkatan investasi, industri pengolahan nonmigas, daya saing ekspor, peningkatan efektivitas penerimaan negara, penguatan penyerapan belanja negara, serta pemantapan ketahanan pangan dan energi.
2. **MENJAGA STABILITAS EKONOMI.** Perhatian akan diberikan pada langkah-langkah yang terpadu untuk menjaga stabilitas harga di dalam negeri dan nilai tukar, yang dihadapkan pada tingginya resiko harga komoditi baik migas maupun non-migas, serta pengendalian arus modal yang dapat membahayakan perekonomian.
3. **MEMPERCEPAT PENGURANGAN PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN.** Langkah-langkah akan dipusatkan pada upaya-upaya yang mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih besar serta menjangkau masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan program-program pemberdayaan yang tepat.

3.2.3 Arah Kebijakan Ekonomi Makro

Kebijakan ekonomi makro pada tahun 2014 diarahkan sejalan dengan tema pembangunan nasional RKP 2014 yaitu “Memantapkan Perekonomian Nasional Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”. Pelaksanaan kebijakan ekonomi makro didasarkan pada prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam Bab 2 Buku I RKP tahun 2014.

3.2.4 Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2014

Dengan arah kebijakan ekonomi makro di atas serta dengan memperhatikan lingkungan eksternal dan internal, pertumbuhan ekonomi tahun 2014 ditargetkan untuk tumbuh sebesar 6,6 persen. Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan stabilitas ekonomi yang terjaga tersebut, pengangguran terbuka akan menurun menjadi berkisar antara 5,6-5,9 persen dari angkatan kerja dan jumlah penduduk miskin menjadi berkisar antara 9,0-10,0 persen pada tahun 2014.

3.2.5 Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 didorong dengan upaya meningkatkan investasi, meningkatkan ekspor nonmigas, serta memberi dorongan fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara dengan mempertajam dan meningkatkan kualitas belanja negara. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil, semakin ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Pada tahun 2014, perekonomian ditargetkan tumbuh sekitar 6,6 persen, lebih tinggi dari sasaran pertumbuhan tahun 2013 yang besarnya 6,2 persen.

Dari sisi pengeluaran, investasi berupa pembentukan modal tetap bruto serta ekspor barang dan jasa didorong agar tumbuh masing-masing sekitar 9,3 persen dan 6,9 persen. Dengan meningkatnya investasi, impor barang dan jasa diperkirakan tumbuh sekitar 6,4 persen. Dalam

keseluruhan tahun 2014, dengan terjaganya stabilitas ekonomi konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sekitar 5,3 persen, sedangkan konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh sekitar 5,0 persen.

Dari sisi lapangan usaha, sektor pertanian diperkirakan tumbuh sekitar 3,7 persen, sektor industri pengolahan diperkirakan tumbuh sekitar 6,7 persen dan sektor pertambangan dan penggalian diperkirakan tumbuh sekitar 1,7 persen. Sektor tersier yang meliputi listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan telekomunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta jasa-jasa diperkirakan tumbuh berturut-turut sebesar 6,2 persen; 7,3 persen; 8,3 persen; 10,7 persen; 6,2 persen; serta 7,1 persen.

Secara keseluruhan, dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 6,6 persen pada tahun 2014 membutuhkan investasi sebesar Rp3.559,0 triliun. Pembiayaan investasi diperkirakan sekitar 16,0 persen berasal dari pemerintah dan 84,0 persen berasal dari masyarakat termasuk swasta.

3.2.6 Moneter

Kebijakan moneter terus diarahkan untuk menjaga likuiditas perekonomian agar sesuai dengan kebutuhan riil perekonomian. Efektivitas kebijakan moneter akan terus ditingkatkan guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Rupiah. Dengan nilai tukar Rupiah yang stabil serta pasokan kebutuhan pokok masyarakat yang terjaga, laju inflasi pada tahun 2014 diperkirakan sebesar 3,5-5,5 persen. Ke depan, kebijakan moneter akan diarahkan untuk mengelola permintaan domestik agar sejalan dengan upaya untuk menjaga keseimbangan eksternal. Kebijakan tersebut terdiri dari lima pilar yaitu; Pertama, kebijakan suku bunga akan ditempuh secara konsisten dengan perkiraan inflasi ke depan agar tetap terjaga dalam kisaran target yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan Rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan dan mendukung terjaganya keseimbangan internal maupun eksternal. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mengelola ekspektasi inflasi. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro, khususnya dalam memperkuat struktur perekonomian, memperluas sumber pembiayaan ekonomi, penguatan respons sisi penawaran, serta pemantapan Protokol Manajemen Krisis (PMK).

3.2.7 Neraca Pembayaran

Penerimaan ekspor tahun 2014 diperkirakan meningkat sekitar 7,0 persen, didorong oleh peningkatan ekspor non-migas yang naik sekitar 8,1 persen. Sementara itu, impor diperkirakan meningkat sekitar 5,0 persen, didorong oleh peningkatan impor non-migas yang naik sekitar 5,5 persen. Dengan defisit sektor jasa-jasa yang diperkirakan masih tetap tinggi, neraca transaksi berjalan pada tahun 2014 diperkirakan defisit sebesar USD24,1 miliar.

Sementara itu surplus neraca modal dan finansial diperkirakan sebesar USD26,4 miliar didorong oleh meningkatnya investasi langsung asing (neto) sebesar USD15,1 miliar dan investasi portfolio (neto) sebesar USD9,9 miliar, sedangkan investasi lainnya (neto) diperkirakan surplus sebesar USD1,4 miliar.

3.2.8 Keuangan Negara

Secara keseluruhan, surplus neraca pembayaran pada tahun 2014 diperkirakan mencapai USD2,3 miliar sehingga cadangan devisa diperkirakan mencapai USD116,2 miliar atau cukup untuk membiayai sekitar 6,0 bulan impor termasuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Pada tahun 2014, kebijakan fiskal disusun dengan mempertimbangkan perekonomian domestik dan global serta tantangan ke depan yang diperkirakan akan dihadapi perekonomian dalam negeri. Dengan pertimbangan tersebut, arah kebijakan fiskal 2014 adalah sebagai berikut: (a) menyediakan stimulasi fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal; (b) memperkuat kapasitas dan memperlebar ruang fiskal; (c) meningkatkan kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah; serta (d) memantapkan pengelolaan pembiayaan anggaran.

Dengan arah dan pokok kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara pada tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp1.756,6 triliun, yang didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.368,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp381,8 triliun. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.879,0 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.273,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp605,1 triliun.

Dengan perkiraan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, ketahanan fiskal yang mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian diperkirakan tetap terjaga. Pada tahun 2014, defisit APBN diperkirakan mencapai sekitar 1,2 persen PDB (angka sementara), yang akan ditutup oleh pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Ketahanan fiskal yang terjaga juga tercermin dari stok utang pemerintah yang diperkirakan menurun menjadi 22,2 persen PDB pada tahun 2014.

3.2.9 Pengangguran dan Kemiskinan

Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, stabilitas ekonomi yang terjaga, serta berbagai kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk miskin dan pengangguran terbuka menurun. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin diperkirakan turun menjadi sekitar 9,0-10,0 persen dan pengangguran terbuka diperkirakan turun menjadi berkisar antara 5,6-5,9 persen dari angkatan kerja.

Gambaran ekonomi makro dan neraca pembayaran tahun 2013 dan tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 3.1. dan Tabel 3.2.

TABEL 3.1
PERKEMBANGAN DAN SASARAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2013 – 2014

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 Perkiraan | 2014 Sasaran |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|------------------|
| PERTUMBUHAN EKONOMI (persen) | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,4 – 6,9 |
| <u>Sisi Pengeluaran</u> | | | | | |
| Konsumsi Masyarakat | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 4,9 | 5,2 – 5,6 |
| Konsumsi Pemerintah | 0,3 | 3,2 | 1,2 | 3,4 | 4,8 – 5,4 |
| PMTB | 8,5 | 8,8 | 9,8 | 6,9 | 8,8 – 10,2 |
| Ekspor Barang dan Jasa | 15,3 | 13,6 | 2,0 | 6,6 | 6,8 – 7,1 |
| Impor Barang dan Jasa | 17,3 | 13,3 | 6,6 | 6,1 | 6,1 – 6,9 |
| <u>Sisi Produksi</u> | | | | | |
| Pertanian | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 3,7 | 3,5 – 3,8 |
| Pertambangan dan Penggalian | 3,9 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,5 – 1,8 |
| Industri Pengolahan | 4,7 | 6,1 | 5,7 | 6,1 | 6,4 – 6,9 |
| Listrik, Gas, dan Air Bersih | 5,3 | 4,8 | 6,4 | 6,4 | 5,8 – 6,3 |
| Konstruksi | 7,0 | 6,6 | 7,5 | 7,3 | 6,8 – 7,4 |
| Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 8,7 | 9,2 | 8,1 | 7,7 | 8,1 – 8,5 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 13,4 | 10,7 | 10,0 | 10,5 | 10,0 – 10,8 |
| Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha | 5,7 | 6,8 | 7,1 | 6,1 | 6,0 – 6,2 |
| Jasa-jasa | 6,0 | 6,7 | 5,2 | 6,0 | 6,6 – 7,3 |
| LAJU INFLASI (persen) | 7,0 | 3,8 | 4,3 | 5,6** | 3,5-5,5 |
| PENGANGGURAN TERBUKA (persen) | 7,1 | 6,6 | 6,1 | 5,8-6,1 | 5,6-5,9 |
| PENDUDUK MISKIN (persen)* | 13,33 | 12,49 | 11,96 | 9,5-10,5 | 9,0-10,0 |

Keterangan: *) realisasi posisi Maret

**) belum memperhitungkan dampak penyesuaian harga BBM

TABEL 3.2
PERKEMBANGAN DAN PROYEKSI NERACA PEMBAYARAN TAHUN 2013 - 2014
(USD MILIAR)

| | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 Proyeksi | 2014 Proyeksi |
|-------------------------------|--------|--------|--------|------------------|------------------|
| Transaksi Berjalan | 5,1 | 1,7 | -24,2 | -24,5 | -24,1 |
| Ekspor | 158,1 | 200,8 | 188,1 | 195,9 | 209,7 |
| Migas | 28,7 | 38,1 | 35,6 | 37,0 | 37,9 |
| Non-migas | 129,4 | 162,7 | 152,6 | 158,9 | 171,8 |
| Impor | -127,4 | -166,0 | -179,7 | -185,3 | -194,6 |
| Migas | -25,4 | -38,7 | -40,7 | -41,9 | -43,3 |
| Non-migas | -102,0 | -127,3 | -139,0 | -143,4 | -151,3 |
| Jasa-jasa*) | -25,5 | -33,1 | -32,6 | -35,1 | -39,2 |
| Transaksi Modal dan Finansial | 26,6 | 13,6 | 24,9 | 25,6 | 26,4 |
| Transaksi Modal | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Transaksi Finansial | 26,6 | 13,5 | 24,9 | 25,6 | 26,4 |
| Investasi Langsung (neto) | 11,1 | 11,5 | 14,4 | 14,7 | 15,1 |
| Investasi Portfolio | 13,2 | 3,8 | 9,2 | 9,6 | 9,9 |
| Investasi Lainnya (neto) | 2,3 | -1,8 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
| Total | 31,8 | 15,3 | 0,7 | 1,2 | 2,3 |
| Selisih Perhitungan | -1,5 | -3,4 | -0,6 | 0,0 | 0,0 |
| Neraca Keseluruhan | 30,3 | 11,9 | 0,2 | 1,2 | 2,3 |
| Cadangan Devisa | 96,2 | 110,1 | 112,8 | 113,9 | 116,2 |

*) Termasuk pendapatan (neto) dan transfer

BAB 4

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL



BAB 4 TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL

4.1 ARAHAN PEMBANGUNAN

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan Pancasila. Pencapaian tujuan ini dilaksanakan secara bertahap dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan.

Visi Indonesia tahun 2025 yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 adalah INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. Selanjutnya dalam Kabinet Indonesia Bersatu yang Kedua pembangunan dilaksanakan dengan visi “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Penjabaran visi ini ke dalam untaian program dan rencana aksi dituangkan dalam RPJMN 2010-2014 dengan 5 (lima) agenda yaitu:

1. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
2. Perbaikan tata kelola pemerintahan;
3. Penagakan pilar demokrasi;
4. Penagakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan
5. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Pelaksanaan agenda pembangunan tersebut diarahkan untuk mencapai Sasaran Utama Pembangunan Nasional 2010-2014, dan khusus untuk tahun 2014 adalah:

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,9 persen, pengangguran terbuka ditargetkan menurun menjadi 5,6-5,9 persen, dan tingkat kemiskinan menjadi 9,0-10,0 persen.
2. Dalam rangka pembangunan demokrasi, Indeks Demokrasi Indonesia mencapai kisaran 68 – 70.
3. Dalam rangka pembangunan hukum, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mencapai 4,0.

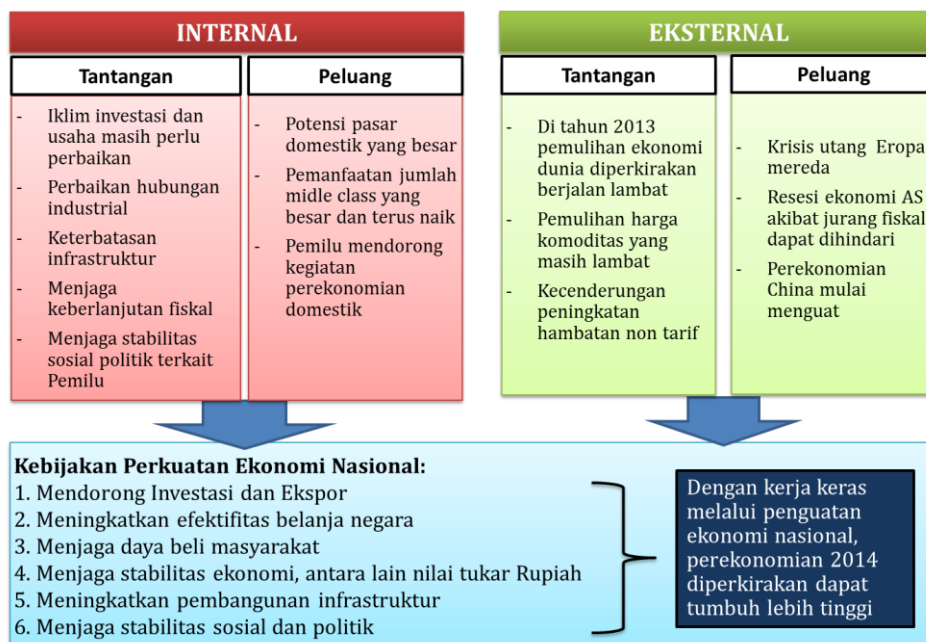
Menanggapi perubahan lingkungan strategis baik eksternal maupun internal, telah ditetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011–2025 yang memuat langkah-langkah terobosan dalam mempercepat tercapainya visi pembangunan di atas. Dalam MP3EI, perekonomian didorong dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang tersebar di seluruh Indonesia dalam rangkaian koridor ekonomi. Sesuai dengan agenda ke lima RPJMN 2010-2014, pertumbuhan ekonomi perlu diimbangi dengan upaya yang sepadan agar terwujud pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Untuk itu, telah ditetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengentasan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2011–2025.

RKP Tahun 2014, sebagai penjabaran tahun terakhir RPJMN 2010-2014, disusun dengan memperhatikan pencapaian sasaran pembangunan dari semua prioritas nasional dalam RPJMN tersebut. Di samping itu, RKP 2014 juga memuat berbagai prakarsa yang tertuang baik dalam MP3EI maupun MP3KI. Di samping itu, RKP 2014 juga menjabarkan berbagai Arahan Presiden sebagai jawaban terhadap tuntutan pembangunan akibat perubahan lingkungan strategis.

4.2 TEMA PEMBANGUNAN

Kondisi lingkungan strategis pembangunan tahun 2014, baik internal maupun eksternal menuntut perlunya perkuatan ekonomi nasional, lihat Gambar 4.1. Kebijakan perkuatan ekonomi nasional mencakup upaya untuk: (1) mendorong investasi dan ekspor; (2) meningkatkan efektivitas belanja negara; (3) menjaga daya beli masyarakat; (4) menjaga stabilitas ekonomi, antara lain nilai tukar rupiah; (5) meningkatkan pembangunan infrastruktur; dan (6) menjaga stabilitas sosial politik. Dengan kerja keras, pelaksanaan kebijakan ini diperkirakan dapat mendorong perekonomian nasional tumbuh 7 persen pada tahun 2014.

GAMBAR 4.1
PERKUATAN EKONOMI NASIONAL



Sebagai satu kesatuan dengan pembangunan tahun-tahun sebelumnya, RKP 2014 disusun dengan memperhatikan pencapaian sasaran-sasaran RPJMN 2010-2014. Informasi tentang sasaran yang sudah diperkirakan tercapai, sasaran yang membutuhkan kerja keras, dan sasaran yang sangat sulit dicapai diperlukan untuk menentukan program-program yang perlu mendapat perhatian

lebih. Dengan demikian, *gap* antara sasaran RPJMN dengan perkiraan realisasi hingga tahun 2013 dapat digenapi.

Dengan memperhatikan kebutuhan akan perkuatan ekonomi dan penggenapan capaian sasaran pembangunan pada tahun 2014, serta memperhatikan agenda pembangunan RPJMN 2010-2014, maka ditetapkan tema RKP 2014 sebagai berikut:

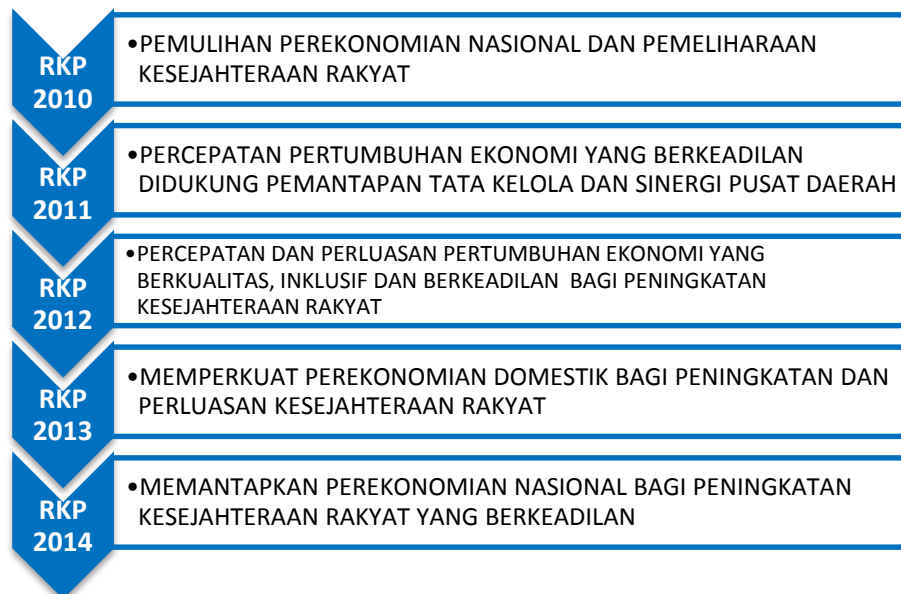
MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN

Unsur-unsur yang terkandung dalam tema tersebut adalah:

1. **Pemantapan Perekonomian Nasional**, dengan:
 - a. Mengupayakan tercapainya pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan yang diiringi oleh: tingkat inflasi yang terjaga; nilai tukar yang stabil dan kompetitif; neraca pembayaran yang seimbang; serta fiskal yang berkelanjutan.
 - b. Meningkatkan daya saing ekonomi agar mampu memanfaatkan kesempatan dalam pertumbuhan ekonomi global.
 - c. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif yaitu intervensi pemerintah yang tepat memihak (afirmatif) kepada kelompok yang terpinggirkan, untuk memastikan semua kelompok masyarakat memiliki kapasitas yang memadai dan akses yang sama terhadap kesempatan ekonomi yang muncul.
2. **Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan** dengan:
 - a. Membangun sumber daya manusia (SDM) Indonesia;
 - b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi pengangguran;
 - c. Mitigasi bencana.
3. **Pemeliharaan Stabilitas Sosial dan Politik** dengan:
 - a. Menjaga agar konflik sosial tidak terulang kembali;
 - b. Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi;
 - c. Memantapkan penegakan hukum, pertahanan, dan pelaksanaan Pemilu 2014.

Dengan demikian, rangkaian tema pembangunan tahunan dari RPJMN 2010-2014 dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR 4.2
RANGKAIAN TEMA PEMBANGUNAN TAHUNAN SELAMA RPJMN 2010-2014



4.3 ISU STRATEGIS

Isu strategis dalam RKP 2014 dimaksudkan untuk lebih memfokuskan upaya pemerintah untuk hal-hal yang signifikan, berdampak luas, dan yang berfungsi sebagai penguangkit sehingga penanganannya dapat tuntas. Isu strategis di bagi menjadi dua bagian yaitu: (1) Arahan Presiden; dan (2) Hasil Tinjauan Paruh Waktu RPJMN 2010-2014.

4.4 ARAHAN PRESIDEN

Di berbagai kesempatan yang merupakan respon terhadap permasalahan yang muncul. Arahan yang dimaksud dapat berupa hal-hal yang sudah disampaikan pada tahun anggaran 2012 tetapi diperkirakan belum selesai tahun 2013, dan juga dapat berupa arahan baru. Arahan tersebut selanjutnya dikelompokkan atas tiga bagian yaitu arahan dalam rangka: (1) pemantapan perekonomian nasional; (2) peningkatan kesejahteraan rakyat; dan (3) pemeliharaan stabilitas sosial politik.

4.4.1 Pemantapan Perekonomian Nasional:

1. **Pencapaian surplus beras 10 juta ton** dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula, yang akan dicapai melalui: (a) percepatan pencetakan sawah yang didukung dengan kesiapan Survey, Identifikasi dan Desain (SID); (b) peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, tersier dan di tingkat usaha tani; (c) penerapan pola usaha tani yang disesuaikan dengan budaya lokal; (d) peningkatan kesesuaian lokasi sawah dan perbaikan jaringan irigasi; (e) optimalisasi fungsi litbang dan penyuluhan dalam pelaksanaan SLPTT; (f) mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan dengan menambah tenaga penyuluh; (g) perluasan areal tanam kedelai di lahan baru oleh masyarakat dan swasta nasional (termasuk BUMN); (h) penetapan Peraturan Presiden

tentang peningkatan peran Perum Bulog untuk stabilisasi harga dan pasokan kedelai; (i) penetapan peraturan Menteri Perdagangan tentang niaga kedelai; (j) penyaluran pupuk bersubsidi “secara tertutup”, dengan menggunakan instrumen Rencana Definitif Kebutuhan kelompok (RDKK); (k) peningkatan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) serta petugas PPNS; (l) identifikasi potensi lahan yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan perluasan areal tebu di beberapa wilayah pengembangan; (m) penetapan lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan areal tebu; (n) penyusunan alternatif pola pendanaan bagi BUMN melalui bantuan keringanan pembiayaan restrukturisasi permesinan; (o) percepatan penerapan UU No. 41/2009 tentang perlindungan lahan pangan berkelanjutan dan peraturan turunannya; (p) penyelesaian Perda RTRW Daerah dan penetapan LP2B yang merupakan bagian dari RTRW; dan (q) penyelesaian draft Peraturan Presiden tentang pengendalian alih fungsi lahan sawah.

2. **Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri** dengan melaksanakan: (a) peningkatan kapasitas jalan tol melalui pengembangan sumber pendanaan baru, revisi PP No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol untuk memberikan peluang bagi pemerintah menugaskan BUMN/konsorsium untuk membangun jalan tol serta mendorong keterlibatan pemerintah daerah (pembebasan lahan dan sebagian konstruksi); (b) pembentukan unit khusus pengadaan lahan untuk kepentingan publik; (c) peningkatan dan pembangunan Jalan non tol pada lintas-lintas utama; (d) peningkatan dan pengaktifan alokasi DAK prasarana Jalan; (e) mendorong terobosan baru sumber pembiayaan dari pusat untuk membiayai jalan provinsi/kabupaten; (f) penanganan dan intervensi pemerintah pada ruas-ruas jalan strategis Daerah (Inpres Penanganan Jalan Strategis Daerah); (g) peningkatan kinerja pelayanan transportasi perkereta apian melalui percepatan pembebasan lahan dan pemindahan utilitas serta percepatan pembangunan jalur ganda KA lintas selatan yang dimulai dari 2 arah yaitu dari arah Surabaya - Madiun dan arah Solo - Madiun; (h) peningkatan dan Pembangunan pelabuhan utama serta Pelabuhan Penyeberangan; (i) peningkatan dan pembangunan Bandar Udara termasuk bandara strategis, bandara di daerah perbatasan dan bandara di daerah rawan bencana; (j) pembangunan infrastruktur broadband oleh Pemerintah (ICT Fund) di 13 persen ibukota kab/kota; seerta (k) mendorong penyediaan infrastruktur melalui kerjasama pemerintah swasta dengan memperkuat koordinasi untuk pemilihan trase, percepatan pembebasan lahan dan percepatan proses lelang dan konstruksi.
3. **Perkuatan Kelembagaan Hubungan Industrial** melalui: (a) peningkatan kualitas *collective bargaining* dengan meningkatkan kemampuan bernegosiasi dengan itikad baik bagi pekerja dan pemberi kerja (bipartit); (b) peningkatan kapasitas mediator dalam penanganan perselisihan hubungan industrial; (c)

perbaikan mekanisme *dispute resolution*; (d) peningkatan kepatuhan perusahaan terkait standar ketenagakerjaan utama dengan membangun sistem pelaporan, monitoring dan deteksi dini kepatuhan perusahaan; (e) sosialisasi kebijakan pengupahan; dan (f) penyiapan dan sosialisasi program ketenagakerjaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

4. **Diversifikasi Pemanfaatan Energi (Konversi Energi/Gas)** melalui: (a) pembangunan SPBG dilakukan pada SPBU yang sudah ada yang secara teknis memungkinkan dan dekat konsumen; (b) pembangunan SPBG dengan proses kemitraan dimana Badan Usaha tertentu diwajibkan membangun SPBG dengan alokasi gas dari Pemerintah; serta (c) membuka peluang untuk swasta.
5. **Peningkatan Kemampuan IPTEK** dalam Rangka Mendukung Percepatan dan Perluasan Ekonomi Nasional yangbutamanya untuk: (a) penelitian tenaga listrik dan mekatronika untuk mendukung *Low Cost Green Car*; (b) pengembangan aplikasi teknologi isotop dan biologi molekuler untuk bibit unggul padi; serta (c) pengembangan teknologi penerbangan dengan prototype N-219.
6. **Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat** melalui: (a) pemantapan program Kementerian Perindustrian terkait pengembangan industri sagu di kab/kota; (b) inisiasi program pemberdayaan pasar tradisional yang melibatkan OAP; (d) koordinasi keberlanjutan pembangunan sekolah berasrama yang menjangkau daerah pegunungan tengah; (e) strategi pembangunan jalan strategis papua sepanjang 3.488 km (80 ruas jalan) untuk membuka keterisolasian; (f) peningkatan status kelas RS dan jumlah mobile clinic; (g) serta konsolidasi antara Pemda dengan kemenhan, TNI, Polri, maupun Kemendiknas untuk pemberian kuota bagi siswa berprestasi.

4.4.2 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat:

1. **Penyiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan** melalui: (a) peningkatan fasilitas tempat tidur kelas III Rumah sakit dan RS Pratama; (b) penyediaan Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan penduduk miskin; (c) pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar (puskesmas, pustu, pusling, dan rumah dinas nakes); (d) peningkatan tenaga kesehatan (PTT); serta (e) peningkatan dukungan manajemen pelaksanaan SJSN bidang kesehatan (tarif, sistem rujukan, sistem informasi, transformasi, sosialisasi litbang).
2. **Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi** melalui: (a) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan utk menurunkan AKI dan AKB (Peningkatan kapasitas dan kualitas Puskesmas dan Rumah Sakit; Jampersal di Fasyankes, dukungan BOK untuk Puskesmas serta peningkatan pelayanan persalinan); (b) peningkatan upaya promotif-preventif melalui optimalisasi peran promosi kesehatan dan pemberdayaan di masyarakat, peningkatan peran posyandu dan desa siaga serta peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap; serta (c)

perbaikan manajemen pelayanan kesehatan melalui pengembangan sistem terpadu registrasi vital, akreditasi dan jejaring rujukan di seluruh institusi kesehatan serta pengembangan sistem pelayanan kesehatan Ibu dan Anak memenuhi kriteria *continuum of care*.

3. **Peningkatan akses air minum dan sanitasi layak** melalui: (a) peningkatan pengawasan sarana air minum; (b) mendorong Pemerintah Daerah untuk menyediakan akses air minum di perkotaan; (c) pembangunan sarana Teknologi Tepat Guna Air Minum di DTPK (Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan); (d) merehabilitasi sarana air bersih bukan jaringan perpipaan; (e) akselerasi STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) di desa/ kelurahan; (f) peningkatan akses air minum dan sanitasi di Sekolah; (g) penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat di desa; (h) peningkatan kapasitas Sanitarian di Puskesmas; serta (i) penguatan kerjasama lintas sektor dalam penyediaan akses air bersih dan sanitasi yang berkualitas, a.l. dengan pemanfaatan PNPM Mandiri Perdesaan & Perkotaan.
4. **Perluasan Program Keluarga Harapan** dengan: (a) perluasan dan peningkatan kepesertaan PKH; serta (b) penambahan satuan biaya per RTSM.
5. **Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan** (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) melalui: (a) menjaga stabilitas harga bahan pokok; (b) perbaikan implementasi Program Raskin; (c) pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan; (d) sinergi Program Pembangunan Untuk Penanganan Lokasi Prioritas MP3KI/Kantong Kemiskinan; (e) pandu Gerbang Kampung; (f) integrasi usaha mikro di 6 sentra produksi di 6 koridor ekonomi; (g) pengembangan dan penguatan kewirausahaan wirausaha baru/usaha mikro; (h) penyediaan dukungan pembiayaan wirausaha pemula; serta (i) pengembangan sistem clearing house.
6. **Kesiapan infrastruktur dan kelembagaan penanganan bencana-mitigasi bencana** melalui: (a) pembangunan shelter bencana alam (tempat evakuasi sementara); (b) pembangunan sirine peringatan dini gempa; (c) pembangunan Desa Tangguh; (d) peningkatan koordinasi oleh BNPB dengan kementerian/lembaga terkait; (e) pengendalian banjir di DKI Jakarta, pengamanan pantai dan pengendali lahar; (f) pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS Prioritas; (g) percepatan proses alih status kawasan; dan (h) penyelesaian RTRW Provinsi.

4.4.3 Pemeliharaan Stabilitas Sosial Politik:

1. **Percepatan Pembangunan *Minimum Essential Force*** Didukung Dengan Pemberdayaan Industri Pertahanan dengan: (a) peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri; serta (b) pelaksanaan Keppres Nomor 35 Tahun 2011 tentang Percepatan Pemenuhan Kekuatan Pokok Minimal Alutsista TNI 2010-2014.

2. **Pemantapan Keamanan Dalam Negeri Dan Pemberantasan Terorisme** melalui: (a) pemenuhan rasio ideal Polisi terhadap masyarakat 1:575; (b) peningkatan kecepatan penanganan flash point; (c) Peningkatan ketersediaan peralatan pengendali massa; (d) pemolisian Masyarakat (*Community Policing*); (e) penguatan Satgas pencegahan dan penindakan terorisme; (f) penggalangan intelijen; dan (g) pemberdayaan masyarakat melalui program kontra radikal terorisme komprehensif dan terpadu.
3. **Penyelenggaraan Pemilu 2014** dengan melaksanakan: (a) dukungan tahapan Pemilu 2014 termasuk pemutahiran data pemilih, dan pengawasannya; (b) pendidikan politik/pemilih termasuk orang miskin pemuda, perempuan dan penyandang cacat; (c) advokasi, pengembangan kapasitas dan pendampingan calon anggota DPRD perempuan; (d) fasilitasi penyandang cacat; (e) peningkatan pengawasan Pemilu yang partisipatif; serta (f) pengamanan Pemilu.

4.5 Tinjauan Paruh Waktu RPJMN 2010-2014

Tinjauan pelaksanaan RPJMN 2010-2014 dilakukan dengan mengidentifikasi kegiatan/program pembangunan yang bila dibandingkan dengan sasaran RPJMN capaiannya diperkirakan: (1) dapat mencapai sasaran; (2) dapat mencapai sasaran namun butuh kerja keras; dan (3) sulit untuk mencapai sasaran, lihat Gambar 4.3. Tinjauan dilakukan hanya pada kegiatan-kegiatan yang signifikan mempengaruhi pencapaian sasaran RPJMN, berdampak luas, dan/atau merupakan pengungkit (leverage) bagi pencapaian sasaran RPJMN.

Berdasarkan hasil tinjauan tersebut, maka isu strategis untuk masing-masing prioritas nasional diidentifikasi, yaitu kegiatan-kegiatan yang dianggap perlu mendapat perhatian khusus agar sasaran RPJMN dapat dicapai pada tahun 2014.

GAMBAR 4.3
TINJAUAN PARUH WAKTU RPJMN



Isu strategis yang diperoleh dari kedua sumber ini disusun sesuai dengan Prioritas Nasional dari RPJMN 2010-2014, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

PN 1 : Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola.

- 1) Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang dicapai melalui: (a) penanganan kasus-kasus korupsi skala besar; (b) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum; (c) peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha; (d) peningkatan kesadaran hukum masyarakat; (e) peningkatan manajemen Barang Milik Negara; (f) akuntabilitas pengelolaan keuangan Daerah; dan (g) peningkatan kapasitas aparat pengawas internal pemerintah dan pengelola keuangan.
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui: (a) akselerasi Implementasi UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; (b) peningkatan kualitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan harmonisasi PTSP Kemendagri dan PTSP Penanaman Modal; (c) penerapan bertahap SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah; dan (c) penuntasan e-KTP.
- 3) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi melalui: (a) peningkatan kualitas birokrasi; (b) peningkatan kualitas SDM aparatur melalui implementasi UU ASN dan penerapan rekrutmen PNS yang transparan dan berbasis komputer (*Computer Assisted Test*); (c) peningkatan kualitas otonomi daerah melalui pengendalian pemekaran daerah, peningkatan kualitas belanja daerah dan penyempurnaan Pemilukada; dan (d) pembatalan Perda-Perda yang diindikasikan bermasalah.

PN 2 : Pendidikan

- 1) Peningkatan akses pendidikan dasar dan pendidikan menengah dari keluarga miskin, melalui kecukupan penyediaan beasiswa siswa dari keluarga miskin untuk jenjang SD /MI dan SMP/MTs.
- 2) Penuntasan rehabilitasi ruang kelas (RK) rusak; (a) rehabilitasi RK Rusak Berat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA; (b) rehabilitasi RK Rusak Sedang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA.
- 3) Pelaksanaan kurikulum baru tahun 2013 dilakukan secara bertahap melalui penyiapan dokumen Kurikulum 2013, penulisan buku pegangan guru dan buku pegangan siswa, sosialisasi, penggandaan buku bagi guru dan siswa, pelatihan guru serta monitoring dan evaluasi.
- 4) Pelaksanaan pendidikan menengah universal melalui: (a) penyediaan BOS SMA/SMK dan MA; (b) Pengadaan USB SMA/SMK dan MA; (c) pengadaan RKB SMA/SMK dan MA; (d) pengadaan Laboratorium SMA dan MA; (e) pengadaan Ruang Praktek Siswa SMK; dan (f) pembangunan Perpustakaan SMA/SMK dan MA.

PN 3 : Kesehatan

- 1) Penurunan dan pencegahan penyakit (HIV AIDS dan Malaria) melalui: (a) peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat tentang HIV dan AIDS; (b) peningkatan persentase ODHA yang mendapatkan ART; (c) memasukkan modul pengetahuan HIV dan AIDS dalam kurikulum sekolah menengah pertama, atas, dan perguruan tinggi; (d) pembentukan Malaria Center di provinsi endemis malaria; (e) pengembangan AIDS, TB dan Malaria Centre (Malaria Centre terintegrasi dengan AIDS & TB); (f) pendistribusian kelambu berinsektisida secara massal didaerah endemis tinggi dan daerah fokus; (g) peningkatan jumlah kader/ Juru Malaria Desa; (h) penemuan aktif dan pengobatan melalui MBS (*mass blood survey*); (i) pemberdayaan masyarakat dalam pembentukan Pos Malaria Desa (Posmaldes), Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan PHBS; dan (j) perkuatan Forum Nasional Gebrak Malaria dalam rangka Eliminasi Malaria yang melibatkan peran lintas sektor dan daerah.
- 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KB yang merata dengan: (a) pembinaan Akseptor dan Peningkatan Advokasi-KIE melalui kampanye “2 ANAK CUKUP ” dan “4 TERLALU” (terlalu muda, tua, sering dan banyak); (b) pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 10 provinsi penyangga utama dan perhatian 2 provinsi, Papua dan Papua Barat; (c) penguatan pelayanan KB melalui antara lain mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB dan menjamin ketersediaan alat, obat kontrasepsi (alokon) di setiap fasyankes; (d) harmonisasi Program dan Penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan; (e) penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB di Kab/Kota; (f) pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB; (g) peningkatan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (h) peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik; dan (i) pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (genre).

PN 5 : Ketahanan Pangan

- 1) Kesejahteraan petani/nelayan melalui: (a) peningkatan penyaluran subsidi benih agar tepat sasaran dan tepat waktu; (b) peningkatan penyaluran PUAP agar tepat sasaran; (c) mempermudah akses petani terhadap KKPE; serta (d) penyediaan jaminan/asuransi terhadap risiko kredit.
- 2) Peningkatan produksi perikanan melalui: (a) pelatihan nelayan untuk mengoperasikan kapal; (b) peningkatan koordinasi penerbitan izin antara KKP dan Kemenhub agar kapal segera dapat beroperasi; dan (c) mendorong kemitraan untuk meningkatkan akses permodalan.

PN 6 : Infrastruktur

- 1) Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan melalui: (a) percepatan penyelesaian Perda RTRW Daerah, rencana rinci Tata Ruang dan peraturan pelaksanaannya, serta meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; (b) pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan terutama di Daerah Aliran Sungai; (c) percepatan pembangunan dan rehabilitasi tampungan air/waduk multi-guna; (d) peningkatan upaya konservasi Daerah Aliran Sungai dan revitalisasi waduk, situ dan embung yang ada; (e) peningkatan dan pengefektifan alokasi DAK prasarana Irigasi; dan (f) penanganan dan intervensi pemerintah pada Jaringan Irigasi Strategis Daerah (Inpres Penanganan DI Strategis) untuk mendukung pemenuhan Target Surplus Beras Min 10 Juta Ton.
- 2) Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan penetapan regulasi yang mewajibkan penggunaan sistem online untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara eksportir/importir dengan petugas/pejabat pemerintah.
- 3) Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi melalui: (a) percepatan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (b) percepatan penyelesaian RTRW Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bersangkutan; dan (c) percepatan penyelesaian regulasi yang menyangkut fasilitas fiskal dan non fiskal.

PN 7 : Iklim Investasi dan Iklim Usaha

- 1) Penurunan Biaya Logistik Nasional dengan penetapan regulasi yang mewajibkan pengguna sistem *online* untuk mengurangi frekuensi tatap muka antara eksportir/importir dengan petugas / pejabat pemerintah; dan peningkatan kemudahan berusaha melalui: (a) perbaikan berbagai layanan dan regulasi dalam rangka menaikkan ranking Indonesia dalam *Ease of Doing Business*; (b) peningkatan kemudahan layanan perizinan investasi dan usaha dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta (c) pembenahan regulasi di tingkat pusat dan daerah untuk memberikan kepastian berusaha dan meningkatkan transparansi prosedur.
- 2) Pengembangan fasilitas pendukung KEK yang telah ditetapkan dan penetapan KEK baru melalui: (a) percepatan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (b) percepatan RTRW Kabupaten/Kota dan Provinsi yang bersangkutan; dan c) percepatan penyelesaian regulasi yang menyangkut fasilitas fiskal dan non fiskal.

PN 8 : Energi

- 1) Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi dengan: (a) melakukan inventori sumur-sumur tua di KKKS (termasuk PT Pertamina EP); (b) pemberian pengelolaan kepada BUMD dan Koperasi untuk mengaktifkan dan memproduksi sumur-sumur tua; (c) melakukan *workover* dan *appraisal well* secara

efektif dan efisien; (d) percepatan produksi lapangan yang sudah mendapatkan persetujuan POD I; (e) pemboran delineasi atas struktur lapangan yang ditemukan; (f) melakukan *secondary recovery* melalui injeksi sumur dan kegiatan EOR; (g) percepatan pembangunan *central processing unit*, pipa *onshore*, pipa *offshore* dan *muring tower, floating storage offloading*; (h) penggunaan tenaga kerja lokal untuk mempermudah perijinan di tingkat daerah dan penambahan tenaga ahli untuk percepatan produksi; (i) mempermudah perizinan tumpang tindih lahan (kehutanan dan perkebunan), bea masuk pabean, pajak PPN eksplorasi, PBB, Perda dan sosial masyarakat.

- 2) Peningkatan Rasio Elektrifikasi dan Peningkatan Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik Panas Bumi melalui: (a) peningkatan efektifitas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) listrik pedesaan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, terutama untuk penyiapan pembangunan infrastruktur listrik; (b) peningkatan kegiatan survei pendahuluan lapangan panas bumi baru; (c) penambahan data survei geofisika oleh Badan Geologi pada daerah panas bumi yang dianggap perlu ditambah data; (d) fasilitasi negosiasi PPA antara PLN dengan IPP (Badan Usaha) dan sosialisasi standar PPA oleh PLN kepada pengembang panas bumi; (e) penambahan data melalui bantuan teknis dan pendanaan '*Geothermal Fund*'; (f) percepatan proses persetujuan Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian ESDM dan Kementerian Kehutanan; (g) finalisasi Rancangan Undang-Undang tentang Panas Bumi dan peraturan perundangan turunannya; (h) percepatan proses dan fasilitasi lelang WKP lapangan panas bumi; (i) penetapan kebijakan harga listrik yang berasal dari pembangkit listrik panas bumi sesuai dengan mekanisme *Feed in Tariff* (harga listrik panas bumi per wilayah ditetapkan oleh Pemerintah dikaitkan dengan komitmen COD); dan (j) pemberlakuan '*Feed-in Tariff*' terhadap harga listrik atau menyempurnakan peraturan mengenai harga listrik yang bersumber dari panas bumi.

PN 9 : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

- 1) Pengendalian perubahan iklim melalui: (a) pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK); (b) pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK); dan (c) penerbitan Inpres baru sebagai tindak lanjut Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
- 2) Peningkatan kualitas lingkungan melalui: (a) peningkatan kualitas air; (b) peningkatan kualitas udara di perkotaan; (c) peningkatan ketaatan industri dalam pengendalian pencemaran air dan udara; dan (d) peningkatan tutupan hutan dan lahan.

PN 10 : Daerah tertinggal, Terdepan, Terluar dan Paska Konflik

- 1) Pembangunan Daerah Tertinggal melalui: (a) peningkatan jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan; (b) peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan; (c) peningkatan akses

terhadap pusat pelayanan dasar khususnya di daerah terpencil dan terisolir; (d) pengembangan perekonomian lokal yang fokus pada sektor unggulan; (e) pengembangan program pengentasan kemiskinan yang terfokus dan terintegrasi yang sesuai dengan permasalahan utama dan karakteristik ketertinggalan masing-masing daerah; (f) peningkatan konektivitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi di daerah tertinggal khususnya di wilayah timur melalui pelayanan keperintisan laut; dan (g) penuntasan penanganan Warga Baru NTT

- 2) Penguatan Diplomasi dan Pembangunan Infrastruktur, hankam, serta fasilitas *Custom, Immigration, Quarantine, Security* (CIQS) kawasan perbatasan melalui: (a) peningkatan koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan sarpras hankam melalui keanggotaan BNPP; (b) peningkatan dukungan untuk sarpras hankam; (d) peningkatan koordinasi dan sinergi antar aparat keamanan perbatasan; (e) pengembangan model partisipasi masyarakat; (f) peningkatan jumlah sarana dan prasarana pengawasan perbatasan; (g) membangun koordinasi dan sinergi antar pelaku pembangunan pos lintas batas; (h) membangun pos gabungan bersama (POSGABMA) RI dan Malaysia (tindak lanjut kesepakatan RI-Malaysia); (i) pembenahan kelembagan dan struktur pertanggungjawaban dalam perundingan penetapan batas wilayah negara; (j) peningkatan kegiatan pra-investigasi dan peningkatan serta *upgrading* patok/tugu batas negara; dan (k) penguatan koordinasi anggota BNPP dan badan pengelola perbatasan daerah dalam rangka penyiapan data dukung diplomasi.

PN Lainnya: Bidang Polhukam

- 1) Pembinaan Masyarakat melalui: (a) pemenuhan sarana untuk mengurangi over kapasitas; (b) pelaksanaan pengawasan dengan melibatkan pihak luar masyarakat; dan (c) penegakan kode etik petugas masyarakat.

PN Lainnya Bidang Perekonomian

- 1) Akselerasi Industrialisasi Dengan Sasaran Pertumbuhan Industri Non-Migas, melalui: (a) peningkatan jaminan pasokan gas dan listrik untuk kebutuhan industri dalam negeri, baik sebagai bahan baku maupun energi; (b) mendorong penyediaan infrastruktur pusat-pusat pertumbuhan industri; (c) optimalisasi pasar dalam negeri, baik melalui pengadaan pemerintah maupun BUMN/BUMD; (d) peningkatan upaya pengendalian impor melalui kebijakan *non-tariff barrier*; (e) penyelesaian masalah hubungan industrial; dan (f) penurunan *Terminal Handling Charge* (THC) untuk ekspor.
- 2) Peningkatan Pemahaman dan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 melalui: (a) penguatan kapasitas Sektor Swasta dan Masyarakat; (b) peningkatan pemahaman aparat pemerintah Indonesia di pusat

dan daerah terhadap MEA 2015; serta (c) peningkatan kualitas pemenuhan komitmen Cetak Biru MEA 2015.

PN Lainnya Bidang Kesejahteraan Rakyat

- 1) Peningkatan Kerukunan Beragama melalui: (a) pelaksanaan Inpres No. 2 Tahun 2013 Tentang Gangguan Keamanan Dalam Negeri; dan (b) pemberdayaan FKUB di provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- 2) Peningkatan Budaya dan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional melalui: (a) pembinaan atlet andalan nasional secara berkelanjutan (Perpres No.22 Tahun 2010 Tentang Program Indonesia Emas/ Prima); dan (b) fasilitasi keikutsertaan pada kejuaraan multi event regional dan internasional.
- 3) Peningkatan citra dan daya saing pariwisata nasional melalui: (a) promosi di media cetak maupun elektronik serta di dalam negeri maupun di luar negeri; (2) pengembangan destinasi serta peningkatan infrastruktur pendukung kawasan strategis pariwisata nasional.

BAB 5

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL



BAB 5

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

5.1. PRIORITAS NASIONAL

5.1.1 Prioritas 1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

SASARAN :

1. Meningkatnya implementasi tata kelola pemerintahan pada seluruh instansi pemerintah melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku dengan indikator antara lain:
 - a. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) mencapai 50;
 - b. Opini WTP atas Laporan Keuangan mencapai 100 persen untuk KL, 80 persen untuk Provinsi, dan 40 persen untuk Kabupaten/Kota;
 - c. Instansi yang telah melaksanakan reformasi birokrasi mencapai 100 persen untuk K/L dan Provinsi, dan 50 persen untuk Kabupaten/Kota;
 - d. Instansi pemerintah yang akuntabel mencapai 100 persen untuk K/L, 90 persen untuk provinsi dan 50 persen untuk Kabupaten/Kota.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan indikator:
 - a. Integritas Pelayanan Publik, mencapai 8,0 untuk unit pelayanan instansi pusat dan 8,0 untuk instansi daerah
 - b. Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah telah mencapai 100 persen.
3. Meningkatnya efektivitas pelaksanaan otonomi daerah yang antara lain didukung peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dan penerapan SPM, dengan indikator antara lain:
 - a. Diterapkannya 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, 9 SPM di UPD I dan 6 SPM di UPD II;
 - b. Daerah yang menerapkan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis (Juklak/Juknis) mencapai 90 persen;
 - c. Daerah yang telah optimal (100 persen) menyerap DAK mencapai 90 persen;
 - d. Daerah provinsi, yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung mencapai 60 persen;
 - e. Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah mencapai 30 persen;
 - f. Jumlah APBD yang disahkan tepat waktu mencapai 90 persen;
 - g. Daerah Provinsi, yang ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian Status WTP mencapai 100 persen;

- h. Penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu mencapai 90 persen.

TABEL 5.1
SASARAN PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA

| No | SASARAN/INDIKATOR | Capaian 2012 | Perkiraan 2013 | Target 2014 |
|----|---|--------------|----------------|-------------|
| a. | Indeks Persepsi Korupsi (Skala 1-100) | 32 | 40 | 50 |
| b. | Opini WTP atas Laporan Keuangan (%) | | | |
| | 1. Kementerian/Lembaga | 77 | 100 | 100 |
| | 2. Provinsi | 36 | 60 | 80 |
| | 3. Kabupaten/Kota | 18 | 40 | 40 |
| c. | Integritas Pelayanan Publik (Pusat) | 6,9 | 7,5 | 8,0 |
| d. | Integritas Pelayanan Publik (Daerah) | 6,3 | 7,0 | 8,0 |
| e. | Jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Daerah (Persentase dari 444 PTSP) | 84 | 100 | 100 |
| f. | Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (%) | | | |
| | 1. Kementerian/Lembaga | 89 | 100 | 100 |
| | 2. Provinsi | 100 | 100 | 100 |
| | 3. Kabupaten/Kota | 20 | 40 | 50 |
| g. | Instansi Pemerintah yg Akuntabel (%) | | | |
| | 1. Kementerian/Lembaga | 95,1 | 97 | 100 |
| | 2. Provinsi | 75,8 | 85 | 90 |
| | 3. Kabupaten/Kota | 24,4 | 50 | 50 |
| h. | Penerapan SPM di Daerah | - | 15 | 15 |
| i. | Daerah yang menerapkan DAK sesuai Juklak/Juknis (%) | - | 85 | 90 |
| j. | Daerah yang telah optimal (100%) menyerap DAK (%) | 40,2 | 85 | 90 |
| k. | Jumlah APBD yang disahkan tepat waktu (%) | - | 85 | 90 |
| l. | Daerah Provinsi yang ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status WTP (%) | 30,3 | 75 | 100 |
| m. | Pelaksanaan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Provinsi) yang disahkan secara tepat waktu (%) | 78,8 | 80 | 100 |

ARAH KEBIJAKAN :

- 1) Penataan kelembagaan birokrasi pemerintah melalui penataan struktur organisasi instansi pemerintah (K/L/Pemda) agar tepat fungsi dan tepat ukuran, perluasan reformasi birokrasi nasional dan peningkatan kualitas pelaksanaannya, perbaikan tata laksana (*business process*), pengembangan manajemen SDM aparatur berbasis merit, penerapan sistem pengendalian internal pemerintah secara berkualitas dengan didukung kapasitas aparat pengawasan

intern pemerintah (APIP), dan penerapan manajemen kinerja pada semua lini penyelenggaraan pemerintahan, serta percepatan implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik sebagai upaya pengembangan *open government*;

- 2) Penataan otonomi daerah melalui penataan Daerah Otonom Baru (DOB), pembinaan dan fasilitasi pengelolaan dana perimbangan; peningkatan kualitas pengelolaan anggaran daerah, penataan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan, dan penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; serta percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan;
- 3) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penetapan dan penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; penyempurnaan manajemen pelayanan, penerapan SPM dalam perencanaan dan penganggaran di daerah serta monitoring dan evaluasi penerapan SPM di daerah, peningkatan pelayanan bagi kemudahan berusaha dan berinvestasi, evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan manajemen pengaduan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik.
- 4) Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum melalui peningkatan kinerja penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, kemandirian dan kredibilitas penegak hukum sehingga kepercayaan masyarakat makin meningkat.

5.1.2 Prioritas 2: Pendidikan

SASARAN :

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang diuraikan di atas, sasaran pembangunan pendidikan yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat yang ditandai dengan:
(i) meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun keatas menjadi 8,25 tahun; (ii) menurunnya angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas menjadi 4,2 persen; (iii) meningkatnya APM SD/SDLB/MI/Paket A dan APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B masing-masing menjadi 96,0 persen dan 81,9 persen; (iv) meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C dan APK PT (usia 19-23 tahun) masing-masing menjadi 85,0 persen dan 30,0 persen; serta (v) meningkatnya APS penduduk usia 7-12 tahun dan APS penduduk usia 13-15 tahun masing-masing menjadi di atas 99 persen dan di atas 95 persen. Peningkatan taraf pendidikan tersebut harus diikuti dengan meningkatnya efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan dan menurunnya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

- 2) Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang ditandai dengan: (i) meningkatnya APK pendidikan anak usia dini (PAUD); (ii) meningkatnya tingkat keberkerjaan lulusan pendidikan kejuruan; (iii) meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B pada jenjang SD/SDLB/MI menjadi sebesar 75,0 persen; SMP/SMPLB/MTs menjadi sebesar 85,0 persen; SMA/SMALB/MA menjadi sebesar 35,8 persen; dan SMK menjadi sebesar 28,0 persen; (iv) meningkatnya proporsi program studi PT yang terakreditasi minimal B menjadi sebesar 77,0 persen dan jumlah PT masuk 500 terbaik versi lembaga pemeringkatan independen internasional menjadi 8 PT; serta (v) tercapainya Standar Pendidikan Nasional (SPN) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.
- 3) Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang ditandai dengan: (i) meningkatnya persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 menjadi 88,0 persen di jenjang SD/MI/SDLB, 98,0 persen di jenjang SMP/SMPLB/MTs, dan 98,0 persen di jenjang SMA/SMK/MA/SMLB; (ii) meningkatnya persentase guru yang bersertifikat pendidik menjadi 80,0 persen di jenjang SD/MI/SDLB, 90,0 persen di jenjang SMP/MTs/SMPLB, dan 90,0 persen di jenjang SMA/SMK/MA/SMLB; serta (iii) meningkatnya proporsi dosen program sarjana/diploma/profesi berkualifikasi S2 menjadi sebesar 85,0 persen dan proporsi dosen program pascasarjana berkualifikasi S3 menjadi 90,0 persen. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan tersebut harus diikuti dengan semakin membaiknya pemerataan distribusi guru antarsatuan pendidikan dan antarwilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal, serta meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan.
- 4) Meningkatnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan yang ditandai dengan: (i) terselenggaranya pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan dasar untuk mencapai standar nasional pendidikan; dan (ii) meningkatnya proporsi peserta didik yang mendapatkan beasiswa bagi keluarga miskin untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.

ARAH KEBIJAKAN:

Dengan memperhatikan permasalahan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2014, maka arah kebijakan pembangunan pendidikan diprioritaskan pada upaya:

- 1) Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata melalui: (a) penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan; (b) pemantapan/rasionalisasi implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (c) peningkatan daya tampung SMP/MTs/ sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan;

(d) penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata-rata lama penyelesaian pendidikan di berbagai jenjang untuk mendukung peningkatan efisiensi internal pendidikan; (e) penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (f) peningkatan mutu proses pembelajaran; (g) peningkatan pendidikan inklusif untuk anak-anak cerdas dan berkebutuhan khusus; (h) peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/ sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/ sederajat, dan (i) pengembangan pendidikan karakter bangsa; serta (j) penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan iklim sekolah yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, sportif, kerja sama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (*soft skills*), serta jiwa kewirausahaan.

- 2) Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal, melalui: (a) peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan nonformal; (b) rehabilitasi ruang kelas rusak berat, serta pembangunan RKB dan USB bagi SMA/SMK/MA/ sederajat; (c) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; (d) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan; (e) harmonisasi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan untuk membangun sinergi dalam rangka merespons kebutuhan pasar yang dinamis; (f) peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri dalam rangka memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan serta penyelarasan pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja; (g) peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan (h) peningkatan ketersediaan guru SMK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal.
- 3) Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, melalui: (a) peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah program studi sejalan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan masyarakat serta daerah; (b) penguatan otonomi perguruan tinggi dan manajemen pendidikan tinggi dalam rangka membangun universitas riset (*research university*) menuju terwujudnya universitas kelas dunia (*world class university*); (c) penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pembangunan; (d) peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan tinggi, seperti perpustakaan dan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan program studi; (e) pengembangan dan pelaksanaan *roadmap*

penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mendukung terwujudnya perguruan tinggi sebagai lembaga pengembangan dan penelitian iptek; (f) peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (g) penguatan kualitas dosen melalui peningkatan intensitas penelitian dan *academic recharging*; (h) penguatan sistem insentif bagi dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal-jurnal ilmiah internasional dan mendapatkan paten; (i) penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan dan penelitian iptek; (j) peningkatan pendidikan kewirausahaan, termasuk *technopreneur* bagi dosen dan mahasiswa dengan menjalin kerja sama antara institusi pendidikan dan dunia usaha; dan (k) pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu.

- 4) Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan, melalui: (a) peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi kompetensi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (b) penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah, dalam menjalankan paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan; (c) peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*); (d) pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul; (e) revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*; (f) peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) untuk mencetak guru yang berkualitas, dengan menyelenggarakan *pre-service* dan *in-service training* yang bermutu; (g) peningkatan pengawasan pendirian LPTK dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru; (h) peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan (i) penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- 5) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal, melalui: (a) penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan nonformal; (b) peningkatan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; (c) peningkatan pengetahuan dan pendidikan pengasuhan (*parenting education*) bagi orang tua dan *homeschooling* serta pendidikan sepanjang hayat; dan (d) peningkatan keberaksaraan penduduk yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca.
- 6) Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, melalui peningkatan kemampuan guru dalam pengajaran, kapasitas penyelenggara pendidikan, pemberian bantuan dan fasilitasi

penyelenggaraan pendidikan, serta pemantapan pelaksanaan Kurikulum Baru 2013 dan pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional (SNP).

- 7) Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, dengan meningkatkan: (a) percepatan penyusunan peraturan perundangan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (b) penataan pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundangan; dan (c) pengembangan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal termasuk pendidikan agama, pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik dalam rangka mendukung pendidikan berwawasan pembangunan berkelanjutan.
- 8) Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan melalui: (a) pemantapan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; (b) pengelolaan pendanaan di tingkat pusat dan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel serta didukung sistem pendanaan yang andal; (c) peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam bentuk komite sekolah; (d) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam bentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; (e) peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, termasuk manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (f) konsolidasi sistem informasi dan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan untuk dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan.
- 9) Penguatan tata kelola pendidikan melalui: (a) penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi kompetensi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional; (b) penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin tercapainya pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau; (c) peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan didukung oleh ketersediaan buku-buku mata pelajaran yang berkualitas dan murah, untuk memenuhi standar pelayanan minimal termasuk di daerah pemekaran baru; (d) peningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan termasuk penyediaan internet berkonten

pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

- 10) Peningkatan pendidikan karakter melalui: (a) sosialisasi, edukasi dan internalisasi pentingnya bangsa yang berkepribadian unggul dan berkarakter; (b) internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran pada pendidikan formal, nonformal, informal dalam keluarga dan di tempat bekerja; (c) intervensi regulasi, pelatihan dan pemberdayaan, serta pembiasaan (habitulasi) bagi semua kepentingan; (d) pembudayaan berperilaku dan berkarakter yang dikuatkan dengan penanaman nilai-nilai luhur kehidupan agar menjadi budaya; (e) membangun kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan; dan (f) peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta bahasa perhubungan luas antarbangsa.
- 11) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antartingkat sosial ekonomi dengan meningkatkan: (a) pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin; (b) pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal (*underserved*); (c) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal; (d) pemihakan kebijakan pendidikan yang responsif gender di seluruh jenjang pendidikan; (e) pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah, gender, dan antartingkat sosial ekonomi; dan (f) peningkatan advokasi dan *capacity building* bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal.

5.1.3 Prioritas 3: Kesehatan

SASARAN :

- 1) Meningkatnya status kesehatan masyarakat, ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 72,0 tahun;
 - b. Menurunnya angka kematian ibu (AKI) melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup;
 - c. Menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; dan
 - d. Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita menjadi <15,0 persen.
- 2) Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, ditandai dengan:
 - a. Meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapat bantuan operasional (BOK) sebanyak 9.536 puskesmas;
 - b. Meningkatnya jumlah poskesdes sebanyak 58.500 poskesdes;
 - c. Meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi 90 persen;
 - d. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bayi sebesar 90 persen;
 - e. Meningkatnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih sebesar 90 persen;

- f. Meningkatnya ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sebesar 95 persen; dan
 - g. Meningkatnya persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 90 persen.
- 3) Menurunnya angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) menjadi sebesar 2,4 per perempuan usia reproduktif, meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) sebesar 60,1 persen dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) sebesar 6,5 persen, ditandai dengan:
- a. meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,8 juta akseptor dan pemakaian MKJP sebesar 27,5 persen;
 - b. terlayannya peserta KB baru yang memberikan kontribusi terhadap peserta KB Aktif sebanyak 7,6 juta akseptor pemakaian Non-MKJP sebesar 13,6 persen; dan
 - c. menurunnya DO dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek.
- 4) Meningkatnya status gizi masyarakat, ditandai dengan:
- a. Meningkatnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan sebesar 100 persen;
 - b. Meningkatnya persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) sebesar 85 persen;
 - c. Meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di provinsi dan kabupaten/kota sebesar 100 persen.
- 5) Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular dan meningkatnya kesehatan lingkungan, ditandai dengan:
- a. Meningkatnya penanggulangan faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra sebesar 80 persen;
 - b. Meningkatnya jumlah provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE, dan penanganan kasus) sebesar 100 persen;
 - c. Meningkatnya jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan *testing* HIV terhadap 700.000 orang;
 - d. Meningkatnya penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS sebesar 95 persen;
 - e. Meningkatnya persentase ODHA yang mendapatkan ART sebesar 50 persen;
 - f. Meningkatnya penanganan kasus baru TB (BTA Positif) yang disembuhkan sebesar 88 persen;
 - g. Meningkatnya angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk sebesar 1 per 1.000 penduduk;
 - h. Meningkatnya penemuan dan penanganan kasus zoonosis sebesar 90 persen;
 - i. Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) sebanyak 20.000 desa;
 - j. Meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas sebesar 67 persen;

- k. Meningkatnya persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat sebesar 100 persen; dan
 - l. Meningkatnya penduduk yang menggunakan jamban sehat sebesar 75 persen.
- 6) Terlaksananya Sistem Jaminan Kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan, ditandai dengan:
- a. Meningkatnya jumlah penduduk yang mendapat subsidi Bantuan Iuran Jaminan kesehatan sebanyak 86,4 juta penduduk miskin dan tidak mampu;
 - b. Meningkatnya persentase RS kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pelayanan *obstetrik neonatal* emergensi komprehensif (PONED) menjadi 100 persen;
 - c. Meningkatnya penguatan rumah sakit rujukan regional di 12 provinsi;
 - d. Meningkatnya ketersediaan alat kesehatan (PONEK) di 33 rumah sakit provinsi;
 - e. Meningkatnya puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk menjadi 96 persen;
 - f. Meningkatnya persentase puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan *obstetrik neonatal* emergensi dasar (PONED) menjadi 100 persen;
 - g. Meningkatnya tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK sebanyak 7.020 orang;
 - h. Meningkatnya residen senior yang didayagunakan dan diberi insentif sebanyak 4.850 orang;
 - i. Meningkatnya kemampuan SDM kesehatan di fasilitas kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan sebanyak 9.500 orang; dan
- 7) Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan, ditandai dengan:
- a. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan (dihitung dari 6.500 sarana) sebesar 42 persen;
 - b. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan (dihitung dari 143.500 sarana) sebesar 22 persen;
 - c. Meningkatnya jumlah parameter uji obat dan makanan untuk setiap sampel (dihitung dari sekitar 97.000 Sampel) sebanyak 10 parameter;
 - d. Persentase sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi GMP yang terkini (total jumlah sarana 202 unit) sebesar 85 persen; dan
 - e. Persentase sarana produksi makanan MD yang memenuhi standar GMP yang terkini (dihitung dari 1.000 sarana yang diperiksa) sebesar 65 persen.

ARAH KEBIJAKAN:

Pembangunan kesehatan diprioritaskan pada:

- 1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB, antara lain melalui: (i) peningkatan puskesmas yang mampu PONEK; (ii) peningkatan rumah sakit yang mampu PONEK; (iii) peningkatan jaminan pelayanan persalinan (Jampersal); dan (iv) peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap;
- 2) Upaya terobosan untuk memperkuat pencapaian target pelayanan KB melalui: (i) penguatan *demand side* dan *supply side* secara seimbang antara lain mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaan alokon di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes/ puskesmas/klinik kb), penggerakan lini lapangan dan pemberdayaan institusi masyarakat perdesaan/ perkotaan; (ii) intensifikasi peningkatan kesertaan ber-KB di 10 provinsi penyangga utama dan perhatian terhadap 7 provinsi wilayah timur; dan (iii) harmonisasi Program dan Penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan;
- 3) Upaya terobosan pelayanan KB yang berkualitas dan merata juga didukung oleh: (i) peningkatan Advokasi-KIE difokuskan pada sasaran kelompok khusus, PUS keluarga miskin, wilayah sulit dan kumuh; (ii) pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB dan meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (iii) peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas; (iv) pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (*genre*); dan (v) penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB di Kab/Kota;
- 4) Peningkatan perbaikan gizi, antara lain melalui: (i) peningkatan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin; (ii) pemberian makanan tambahan dan mikronutrient bagi ibu hamil, bayi dan balita; dan (iii) peningkatan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
- 5) Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan, antara lain melalui: (i) penanggulangan faktor resiko penyakit; (ii) Peningkatan pencegahan penyakit tidak menular; (iii) peningkatan layanan konseling, *testing*, dan pengetahuan tentang HIV/AIDS; (iv) peningkatan pemberian obat ARV bagi ODHA; (v) pengendalian penyakit TB, malaria, dan kasus zoonosis; dan (vi) peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM);
- 6) Pelaksanaan jaminan kesehatan dalam rangka SJSN Kesehatan, antara lain melalui: (i) penyediaan Subsidi Bantuan Iuran bagi penduduk miskin dan tidak mampu; (ii) peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan mencakup tempat tidur kelas III RS, pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, peningkatan jumlah puskesmas mampu PONEK dan RS mampu PONEK; (iii) peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan melalui program PTT, insentif bagi tenaga kesehatan di DTPK, dan residen senior; dan (iv) pengembangan manajemen, sistem monitoring dan rujukan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan SJSN bidang kesehatan;

- 7) Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan antara lain melalui: (i) penyusunan standar, regulasi dan pedoman pengawasan obat dan makanan; (ii) peningkatan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang memenuhi standar GMP/GDP; (iii) peningkatan pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia oleh 31 BB/BPOM; (iv) penguatan kapasitas laboratorium Badan POM; (v) peningkatan investigasi awal dan penyidikan kasus di bidang obat dan makanan; dan (vi) peningkatan pengawasan pada produk garam dan tepung terigu yang wajib difortifikasi; dan
- 8) Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan, antara lain melalui: peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan untuk mendukung pencapaian target MDGs; (ii) penguatan peraturan perundangan pembangunan kesehatan; (iii) peningkatan kualitas penyediaan data dan informasi kesehatan berbasis elektronik (*e-health*); (iv) peningkatan penguasaan dan penerapan iptek kesehatan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan bahan baku obat; dan (v) pelaksanaan riset kesehatan dasar.

5.1.4 Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan

SASARAN :

Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2014 pada kisaran 8-10 persen dari jumlah penduduk.

ARAH KEBIJAKAN:

1. Mempercepat sasaran pengurangan kemiskinan melalui
 - a) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan;
 - b) Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pemberian akses modal yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah;
 - c) Perbaikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui sinergitas pelaksanaan program-program tersebut terutama di kantong-kantong kemiskinan yang telah ditentukan sebagai *Quick Wins* 2014 MP3KI
2. Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial yang telah ada sehingga semua penduduk miskin dan rentan dapat berpartisipasi penuh dan menerima manfaatnya;
3. Mengoptimalkan sistem pembangunan partisipatif yang dirancang untuk menjamin partisipasi aktif penduduk miskin dan rentan dalam pengambilan keputusan di berbagai tahapan proses pembangunan.

4. Memperkuat kegiatan usaha masyarakat miskin, termasuk membangun keterkaitan dengan MP3EI.

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut upaya penanggulangan kemiskinan difokuskan pada 6 (lima) hal, yaitu:

1. Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif;
2. Penyempurnaan dan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri;
3. Penguatan Usaha Mikro dan Kecil;
4. Peningkatan dan Perluasan Program-Program Pro-Rakyat;
5. Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan; dan
6. Kebijakan yang sangat relevan dengan penurunan kemiskinan kebijakan perekonomian nasional yang bersifat lintas kementerian dan bertujuan “*Menjaga kestabilan produksi dan ketersediaan stok bahan pangan dasar*”.

5.1.5 Prioritas 5: Ketahanan Pangan

SASARAN :

Berdasar hasil evaluasi kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan serta hasil identifikasi permasalahan dan tantangan yang dihadapi dan juga direktif presiden, maka dirumuskan empat sasaran strategis di dalam pembangunan ketahanan pangan yang akan datang, yaitu:

- 1) Peningkatan produksi padi sebesar 6,3 persen atau produksi padi menjadi sebesar 72,1 juta ton GKG pada tahun 2014.
- 2) Pertumbuhan produksi bahan pangan lainnya, yaitu: (i) jagung dengan target pertumbuhan produksi sebesar 10,0 persen; (ii) kedelai dengan target pertumbuhan produksi sebesar 20,0 persen; (iii) tebu dengan target pertumbuhan produksi sebesar 12,6 persen; dan (iv) daging sapi dengan target pertumbuhan produksi sebesar 7,3.
- 3) Sasaran peningkatan produksi perikanan yaitu: (i) peningkatan produksi perikanan menjadi 22,4 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,5 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,9 juta ton; dan (ii) peningkatan konsumsi ikan menjadi 38,7 kg perkapita per tahun.
- 4) Peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan yang diukur melalui indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di atas 105.
- 5) Terlaksanakannya rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi pada areal seluas 2.634 ribu ha.

ARAH KEBIJAKAN:

Guna mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, maka arah kebijakan prioritas ketahanan pangan di tahun 2014 yaitu:

- 1) **Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan tebu.** Terkait dengan upaya pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung dan kedelai maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah:
 - a) Percepatan pencetakan sawah yang didukung dengan kesiapan Survey, Identifikasi dan Desain (SID);
 - b) Peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer, sekunder, tersier dan di tingkat usaha tani;
 - c) Penerapan pola usaha tani yang disesuaikan dengan budaya lokal;
 - d) Meningkatkan kehandalan layanan jaringan irigasi melalui sinergi infrastruktur irigasi dengan kebutuhan ekstensifikasi lahan pertanian;
 - e) Meningkatkan kesesuaian lokasi sawah dan perbaikan jaringan irigasi (rehabilitasi jaringan tersier dilaksanakan pada lokasi yang kondisi saluran primer dan sekundernya masih baik atau sudah direhabilitasi);
 - f) Mengoptimalkan fungsi penelitian dan pengembangan dan juga penyuluhan dalam pelaksanaan SLPTT;
 - g) Mendorong Pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan dengan menambah tenaga penyuluh;
 - h) Mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi “secara tertutup”, dengan menggunakan instrumen Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK);
 - i) Peningkatan peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) serta petugas PPNS;
 - j) Percepatan penerapan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan peraturan turunannya;
 - k) Penyelesaian Peraturan Daerah mengenai RTRW daerah dan penetapan LP2B yang merupakan bagian dari RTRW;
 - l) Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah;
 - m) Perluasan areal tanam kedelai di lahan baru oleh masyarakat dan swasta nasional (termasuk BUMN);
 - n) Peningkatan Peran Perum Bulog untuk Stabilisasi Harga dan Pasokan Kedelai;
 - o) Perluasan areal tanaman tebu rakyat dan peningkatan produktivitas tebu melalui bongkar ratoon

- 2) **Peningkatan produksi perikanan.** Arah kebijakan terkait dengan upaya peningkatan produksi perikanan adalah:
 - a) Peningkatan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana perikanan, terutama pelabuhan, kapal dan alat penangkapan ikan, tambak, dan unit perbenihan;
 - b) Peningkatan penyediaan input produksi (induk, benih, pakan, BBM) dan akses ke permodalan;
 - c) Peningkatan mutu produk perikanan;
 - d) Pengembangan sistem logistik perikanan;
 - e) Peningkatan kapasitas nelayan/pembudidaya melalui pendampingan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - f) Peningkatan akses nelayan/pembudidaya terhadap teknologi

dan informasi terkait cuaca, wilayah penangkapan ikan, dan pasar.

- 3) **Peningkatan kesejahteraan petani/nelayan.** Guna meningkatkan kesejahteraan petani/nelayan maka arah kebijakan yang akan dilaksanakan adalah:
- a) Peningkatan penyaluran subsidi pupuk dan benih yang lebih tepat sasaran dan tepat waktu;
 - b) Peningkatan penyaluran Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan (PUAP) agar tepat sasaran;
 - c) Pelaksanaan PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan dan Klaster IV;
 - d) Perlindungan harga komoditas pertanian di tingkat petani
 - e) Penyediaan sumber-sumber permodalan bagi petani disertai peningkatan akses petani terhadap sumber permodalan seperti KKPE;
 - f) Peningkatan realisasi penggunaan KKPE.

5.1.6 Prioritas 6: Infrastruktur

SASARAN : Sasaran utama pembangunan infrastruktur tahun 2014 adalah:

| No | Indikator | Sasaran Kumulatif Hingga 2014 |
|----|---|-------------------------------|
| 1 | Kemantapan Jalan Nasional (%) | 90,0 |
| 2 | Panjang Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km) | 19.370 |
| 3 | Panjang jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda (km) | 954 |
| 4 | Jumlah Bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi | 205 |
| 5 | Jalan tol yang dibangun pemerintah dan swasta (Km) | 1.296 |
| 6 | Pangsa angkutan laut armada pelayaran nasional (%): | 100,0 |
| | a. Domestik (D) | 10,0 |
| | b. Ekspor-Import (E-I) | |
| 7 | Jumlah Rusunawa Terbangun (<i>Twin Block</i>) | 650 |
| 8 | Desa yang dilayani akses telekomunikasi | 33.184 desa |
| 9 | Ibukota Kab/Kota yang terhubung secara <i>broadband</i> | 437 (88%) |
| 10 | Jumlah fasilitas pelabuhan utama, pengumpul dan pengumpan yang dibangun dan ditingkatkan. | 300 |
| 11 | Diselesaikannya pembangunan Kanal Banjir Timur paket 22 s/d 29 | Selesai |

ARAH KEBIJAKAN: Arah kebijakan pembangunan Infrastruktur tahun 2014 diprioritaskan pada:

- a. membangun konektivitas nasional (*national connectivity*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan menghubungkan daerah tertinggal/terpencil dengan pusat pertumbuhan;

- b. percepatan pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air bersih;
- c. penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi) untuk menunjang peningkatan kesejahteraan; dan
- d. pembangunan infrastruktur dalam rangka pengurangan resiko bencana (banjir dan genangan) di pusat-pusat pertumbuhan.

5.1.7 Prioritas 7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha

SASARAN :

Sasaran utama adalah meningkatnya investasi berupa PMTB pada tahun 2014 sebesar 8,8 – 10,2 persen;

Yang didukung dengan pencapaian sasaran lain sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemudahan berusaha di seluruh Indonesia melalui: (a) penurunan jumlah prosedur dan waktu untuk memulai usaha menjadi 6 prosedur dan 40 hari; dan (b) 70 persen daerah mengurangi biaya untuk berusaha.
2. Meningkatnya jumlah PTSP yang terhubung dengan SPIPISE.
3. Menurunkan rasio biaya logistik terhadap PDB (dibandingkan tahun 2010) sebesar 1-2 persen pada tahun 2014, di mana sasaran ini akan mencakup, antara lain:
 - a. Menurunnya *dwelling time* di Pelabuhan Tanjung Priok menjadi 3 hari;
 - b. Menurunnya tarif jasa kepelabuhanan;
 - c. Terbangunnya sarana distribusi untuk dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok sebanyak 26 unit pasar percontohan dan 3 unit Pusat Distribusi Regional; dan
 - d. Meningkatnya volume kontainer yang melalui *Dry-Port*.
4. Menciptakan kesempatan kerja baru dan mempertahankan pekerja yang sudah bekerja agar angka pengangguran terbuka dapat diturunkan di sekitar 5,6-5,9 persen.
5. Menetapkan besaran iuran dan manfaat program SJSN ketenagakerjaan, tersedianya identitas kepesertaan program, dan tersedianya model pemungutan iuran pekerja.

ARAH KEBIJAKAN:

1. Penyederhanaan, percepatan, dan transparansi prosedur investasi dan berusaha, serta kepastian biaya.
2. Peningkatan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi terkait investasi dan usaha untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi dan ketidakpastian usaha.
3. Percepatan pengembangan dan pelaksanaan fungsi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di koridor ekonomi yang telah ditetapkan dalam MP3EI.
4. Penyederhanaan regulasi KPS.
5. Pelaksanaan rencana aksi dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional, yang difokuskan pada upaya untuk mengurangi biaya logistik, menurunkan *dwelling time* di Tanjung Priok, serta optimalisasi pemanfaatan *Dry-Port*.
6. Pengembangan dan peningkatan pemanfaatan perijinan dan fasilitas *online* untuk kegiatan ekspor dan impor serta perijinan investasi dan usaha.

7. Pengembangan pasar tenaga kerja yang dapat mempengaruhi terbentuknya sistem dan mekanisme hubungan industrial yang kondusif untuk menjaga ketenangan bekerja dan berusaha.
8. Menerapkan kebijakan pengupahan ke arah suatu sistem yang dapat menerima fleksibilitas dalam rangka memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja.
9. Menetapkan besaran iuran dan manfaat program SJSN Ketenagakerjaan dalam rangka mencegah terjadinya kekurangan dana di masa depan serta menyiapkan sistem dan operasional kepesertaan.
10. Menetapkan mekanisme pendaftaran dan pengumpulan iuran program SJSN Ketenagakerjaan serta membangun kerjasama antarinstansi pusat dan daerah untuk mengembangkan dan menetapkan strategi pendaftaran yang efektif dan efisien.

5.1.8 Prioritas 8: Energi

SASARAN :

Sasaran prioritas pembangunan nasional bidang energi pada tahun 2014 adalah:

1. produksi minyak bumi sebesar 930-960 ribu barrel per hari;
2. produksi gas bumi sebesar 1.360-1.390 ribu barrel setara minyak per hari;
3. produksi batubara sebesar 309 juta ton;
4. tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 MW, baik oleh pemerintah maupun oleh badan usaha; dan
5. meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 80 persen.

ARAH KEBIJAKAN:

Arah kebijakan pembangunan energi tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi melalui:
 - a. percepatan pengembangan produksi lapangan migas;
 - b. penerapan teknologi *Oil Enhanced Recovery*;
 - c. pembangunan kilang BBM dan petrokimia;
 - d. diversifikasi energi terutama pemanfaatan panas bumi dan gas bumi;
 - e. peningkatan rasio elektrifikasi;
 - f. konservasi energi.
2. Peningkatan pengelolaan sumberdaya mineral dan pertambangan melalui:
 - a. peningkatan nilai tambah;
 - b. pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan;
 - c. penyelesaian rekonsiliasi IUP dan renegotiasi kontrak kerja dan PKP2B.

5.1.9 Prioritas 9: Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

SASARAN :

Sasaran prioritas pembangunan nasional bidang lingkungan hidup dan pengelolaan bencana pada tahun 2014 adalah:

1. Penanganan Perubahan Iklim: penyelesaian target kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sebesar 271.362 ha; pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa seluas 500 ribu ha; menurunnya emisi gas rumah kaca sesuai dengan target per sektor dan per wilayah; meningkatnya ketahanan terhadap perubahan iklim.

2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan: penyelesaian tata batas kawasan hutan sepanjang 13 ribu km; operasionalisasi 30 unit KPH; sertifikasi 500 orang penyuluh kehutanan; penurunan *hotspot* sebesar 67,2 persen dari rerata periode 2005-2009; dan menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan pelibatan aktif pelaku pembangunan, swasta dan masyarakat.
3. Peningkatan Sistem Peringatan Dini: meningkatnya kualitas pelayanan dan jangkauan informasi dini meteorologi, klimatologi, dan geofisika hingga tingkat kabupaten.
4. Penanggulangan Bencana: Meningkatnya kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah dan penyediaan infrastruktur kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko dampak akibat bencana.

ARAH KEBIJAKAN:

Pada tahun 2014, kerangka kebijakan pembangunan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana diarahkan kepada:

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penanganan perubahan iklim, melalui Peningkatan Pengelolaan Kawasan Hutan, Perkuatan Pengelolaan keanekaragaman hayati, dan penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Penguatan kapasitas mitigasi bencana melalui penguatan sistem informasi dini cuaca dan iklim, peningkatan infrastruktur kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana dengan dukungan peralatan dan logistik kebencanaan yang memadai; dan
3. Penegakan hukum/regulasi dan tata kelola lingkungan hidup.

5.1.10 Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik

SASARAN :

Sasaran Pembangunan Daerah Tertinggal akan difokuskan pencapaiannya terhadap tiga sasaran, terutama yaitu:

1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,1 persen pada tahun 2014.
2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata sebesar 14,2 persen pada tahun 2014.
3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2014 menjadi 72,2.

Sasaran Pembangunan Kawasan Perbatasan akan difokuskan pada penguatan diplomasi dan pertahanan keamanan, pengembangan infrastruktur konektifitas, dan Pelayanan CIQS satu atap, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan batas negara wilayah darat dan laut di kecamatan Lokpri dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT);
2. Penguatan diplomasi penegasan batas wilayah negara dan pemetaan batas wilayah;
3. Pembangunan Infrastruktur konektifitas kawasan perbatasan, khususnya akses jalan/jembatan, akses telekomunikasi dan informatika dengan didukung oleh pemberdayaan masyarakat dan peningkatan pelayanan dasar;

4. Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan di kawasan perbatasan;
5. Pembangunan Sarana dan prasarana pelayanan satu atap lintas batas antar negara (CIQS: *Custom, Immigration, Quarantine and Security*)

Sasaran Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2014 yang bersifat cepat terwujud dan dirasakan dampaknya bagi masyarakat, terutama adalah:

1. Berkembangnya ekonomi rakyat khususnya masyarakat asli Papua;
2. Berkembangnya pelayanan pendidikan di kampung-kampung terisolir;
3. Terbukanya keterisolasian di wilayah pegunungan tengah dan wilayah terisolir lainnya;
4. Berkembangnya pelayanan kesehatan yang menjangkau masyarakat di kampung-kampung terisolir;
5. Meningkatnya jumlah putra/putri asli Papua untuk dapat menempuh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) seluruh Indonesia.

ARAH KEBIJAKAN:

Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar, serta Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Papua Barat memerlukan dukungan secara konsisten dan komitmen yang tinggi dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kebijakan tidak terbatas hanya kerangka penganggaran, namun yang tidak kalah pentingnya juga adalah kerangka kerangka regulasi sebagai acuan penyiapan pembangunan yang lebih sistemik.

Arah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah “Pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan lokal di daerah tertinggal dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, antara daerah tertinggal dengan daerah tertinggal, dan antara daerah tertinggal dengan daerah maju” yang dijabarkan ke dalam upaya-upaya sebagai berikut:

1. Pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal untuk mengoptimalkan potensi unggulan melalui pendekatan klaster;
2. Penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal, terdepan dan terluar;
3. Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal, terdepan dan terluar serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan;
4. Pengembangan sistem keberlanjutan pengadaan logistik (stok pangan) di kecamatan terluar perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar (lokasi Prioritas) yang terisolasi;
5. Pengembangan potensi laut dan potensi darat dengan dukungan infrastruktur ekonomi dan pemerintahan di kecamatan lokasi prioritas dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT);
6. Penyediaan bangunan sekolah yang memadai beserta kelengkapan sarana belajar mengajar, penyediaan tenaga pengajar berkualitas beserta insentifnya (termasuk rumah dinas, tunjangan khusus) di daerah tertinggal, kecamatan terluar perbatasan, dan PPKT, serta pembangunan

sekolah satu atap berasrama di kecamatan-kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (Lokasi Prioritas);

7. Penyediaan tenaga kesehatan berkualitas beserta insentifnya (termasuk rumah dinas, tunjangan khusus), pembangunan puskesmas rawat inap di daerah tertinggal, kecamatan terluar perbatasan, dan PPKT;
8. Penyediaan energi alternatif di daerah tertinggal, kecamatan terluar perbatasan, dan PPKT, serta distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga menjangkau di kecamatan-kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas).

Untuk mewujudkan perbatasan sebagai halaman depan negara yang memiliki fungsi dan nilai strategis terhadap kedaulatan negara, pertahanan, keamanan, maka pengelolaan batas wilayah negara dan pengembangan kawasan perbatasan diarahkan beberapa upaya-upaya strategis sebagai berikut:

1. Penguatan data dukung diplomasi penyelesaian batas wilayah negara dan penguatan peran tim diplomasi terutama terhadap tingkat strategis dan tingkat kebijakan, serta penyelesaian pemetaan wilayah batas negara baik darat maupun laut;
2. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan paralel atau sabuk perbatasan yang sekaligus sebagai jalur inspeksi pengamanan perbatasan, penyediaan jaringan telekomunikasi, perumahan terpadu untuk aparat dan masyarakat;
3. Penyediaan alat komunikasi pertahanan dan keamanan, penambahan petugas dan pos pengamanan di lokasi strategis, optimalisasi penggunaan kapal patroli dan penyediaan logistik bagi aparat dan masyarakat setempat;
4. Peningkatan kualitas Pos Lintas Batas tradisional dan internasional, pembangunan pusat pelayanan satu atap dan pembangunan kawasan terpadu perbatasan;
5. Penegasan dan Pembangunan Batas Wilayah Negara di Kecamatan Lokpri dan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
6. Peningkatan Kualitas Pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana pengamanan Batas Wilayah Negara di Kecamatan Lokpri dan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Untuk mewujudkan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat dilakukan dengan upaya-upaya strategis yang bersifat akseleratif dan cepat terwujud (*quick wins*), sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri sagu di 9 kabupaten/kota di Provinsi Papua dan 4 kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat.
2. Menyediakan pasar tradisional (pasar mama-mama) di 1.400 kampung.
3. Membangun sekolah berpola asrama di 7 kabupaten.
4. Membangun RSUD di 15 Kabupaten dan mengembangkan *mobile clinics* untuk menjangkau pelayanan di kampung-kampung terisolir.
5. Menyediakan beasiswa pendidikan S1 bagi siswa/siswi asli Papua di PTN ternama seluruh Indonesia.

Selain melalui dukungan program-program di atas, Percepatan Pembangunan Provinsi Papua, juga didukung program-program yang terkait dengan agenda pelaksanaan Masterplan Percepatan Perluasan

5.1.11 Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

SASARAN :

1. Meningkatnya kualitas perlindungan, pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya/situs dan Kawasan Kepurbakalaan secara terpadu;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelayanan museum, termasuk museum daerah;
3. Meningkatnya kualitas layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai;
4. Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca;
5. Meningkatnya apresiasi, kreativitas dan produktivitas, para pelaku seni;
6. Penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan dan bidang arkeologi dalam mendukung kebijakan pembangunan kebudayaan;
7. Meningkatnya fasilitasi even seni dan film nasional;
8. Meningkatnya kualitas layanan lembaga sensor film;
9. Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa;
10. Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif.

ARAH KEBIJAKAN:

Arah kebijakan pembangunan Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi, meliputi: (1) penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya; (2) peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya; (3) peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya; (4) pengembangan sumber daya kebudayaan; dan (5) penguatan sistem inovasi nasional melalui penguatan kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan iptek nasional serta upaya inovasi dibidang-bidang teknologi yang strategis.

5.1.12 Prioritas Lainnya di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

SASARAN :

1. Meningkatnya kualitas demokrasi Indonesia, yang diwujudkan melalui upaya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas lembaga demokrasi, dan peningkatan iklim politik kondusif bagi berkembangnya kualitas kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat
2. Meningkatnya kemampuan memantau, mendeteksi secara dini ancaman bahaya serangan terorisme, dan meningkatnya efektivitas proses pemberdayaan masyarakat dalam mencegah tindakan terorisme.
3. Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kemandirian pertahanan. Pencapaian sasaran ini secara optimal akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI dan alat utama Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya.
4. Meningkatnya peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan menciptakan perdamaian dunia.

5. Meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan upaya peningkatan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM di Indonesia di berbagai bidang.

ARAH KEBIJAKAN:

1. Memberikan dukungan pelaksanaan tahapan Pemilu 2014, dan pengawasannya termasuk pemutakhiran data pemilih.
2. Melaksanakan pendidikan politik dan pemilih, serta pendidikan pengawasan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
3. Memfasilitasi pengembangan kapasitas, dan pendampingan bagi calon perempuan anggota parlemen
4. Melaksanakan pengamanan Pemilu 2014.
5. Menyempurnakan tata kelola koordinasi pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan terorisme, serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme.

5.1.13 Prioritas Lainnya Di Bidang Perekonomian

5.1.13.1.1 Industri Pengolahan

SASARAN :

Pada tahun 2014 industri pengolahan ditargetkan tumbuh 6,4 – 6,9 persen yang didukung oleh pertumbuhan industri nonmigas berkisar antara 6,5-8,5 persen.

ARAH KEBIJAKAN:

Kebijakan permbangunan industri pada tahun 2014 diarahkan untuk mendukung akselerasi industrialisasi melalui penumbuhan industri pengolah hasil tambang, penumbuhan industri pengolah hasil pertanian, penumbuhan industri padat karya dan penyedia kebutuhan domestik, serta pembinaan industri kecil dan menengah agar sehat, kuat mandiri, serta semakin terkait dengan industri besar. Selanjutnya arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang memuat berbagai upaya untuk:

1. Meningkatkan koordinasi dalam rangka dukungan pembangunan infrastruktur produksi dan jaringan distribusi;
2. Meningkatkan kepastian regulasi dan pelayanan birokrasi yang lebih efektif;
3. Meningkatkan ketersediaan bahan baku;
4. Meningkatkan ketersediaan energi;
5. Meningkatkan akses pada sumber pembiayaan;
6. Meningkatkan ketersediaan Sumberdaya Manusia yang handal;
7. Meningkatkan kemampuan teknologi baik produk maupun proses produksi;
8. Meningkatkan akses ke pasar domestik dan ekspor.

5.1.13.2 Kerjasama Ekonomi Internasional

SASARAN :

Sasaran yang diharapkan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

| No. | Keluaran Strategis | 2013 | Rencana 2014 |
|-----|---|------|--------------|
| 1. | Pelaksanaan sosialisasi mengenai arti dan peningkatan pemanfaatan MEA 2015 | 5 | 10 |
| 2. | Penyusunan peraturan dan pedoman pelaksanaan cetak biru MEA 2015 | - | 2 |
| 3. | Penyusunan <i>policy action</i> dalam rangka pemetaan kesiapan Indonesia pada MEA 2015 | - | 1 |
| 4. | Persentase hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi dan pembiayaan regional yang ditindaklanjuti (%) | 75 | 85 |
| 5. | Pembentukan AEC center, sebagai pusat layanan informasi dan bantuan untuk pemanfaatan MAE | - | 1 |
| 6. | Pencapaian <i>scorecard</i> Indonesia dalam pelaksanaan cetak biru MEA 2015 (%) | 90 | 90 |

ARAH KEBIJAKAN:

1. Peningkatan pemahaman Sektor Swasta dan Masyarakat tentang keberadaan dan manfaat MEA 2015.
2. Peningkatan Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi MEA 2015, yang antara lain mencakup: kesiapan standar produk Indonesia, sertifikasi pekerja Indonesia, dan kesiapan industri.
3. Pelaksanaan dan Pemenuhan Komitmen Cetak Biru MEA 2015.

5.1.13.3 Tenaga Kerja Indonesia

SASARAN :

Dengan telah disempurnakannya peraturan tentang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja ke luar negeri, diharapkan jumlah TKI yang bermasalah dapat ditekan.

1. Menetapkan standar pelayanan minimal di pos pelayanan TKI
2. Meningkatnya kualitas pelayanan TKI satu atap tingkat kecamatan di 438 kabupaten/kota
3. Tersedianya bantuan hukum dan pendamping bagi TKI yang mengalami masalah hukum secara proporsional
4. Terfasilitasinya pendaftaran calon TKI sesuai nomor induk kependudukan (NIK)

ARAH KEBIJAKAN:

1. Menyusun peraturan pelaksanaan atau peraturan turunan dari undang-undang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri yang telah disempurnakan
2. Meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri secara merata untuk memastikan calon TKI memperoleh pelayanan yang baik;
3. Memperluas jangkauan informasi pasar tenaga kerja luar negeri bagi calon TKI yang akan bekerja hingga tingkat kelurahan;
4. Melaksanakan rekrutmen calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri menggunakan sistem “online” yang telah terintegrasi dengan NIK (SIM-TKI).

5.1.13.4 Koperasi dan UMKM

SASARAN

1. Meningkatnya daya saing UMKM yang ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya (i) produktivitas UMKM sebesar 5,0 persen; (ii) penyerapan tenaga kerja sebesar 2,0 persen; (iii) sumbangan UMKM pada pembentukan PDB sebesar 6,0 persen; (iv) nilai ekspor produk UMKM sebesar 15,0 persen; dan (v) nilai investasi UMKM sebesar 25,0 persen.
2. Meningkatnya kapasitas dan daya saing koperasi yang ditunjukkan antara lain oleh meningkatnya (i) proporsi jumlah koperasi aktif menjadi 80,0 persen dari total koperasi; (ii) proporsi jumlah koperasi yang melaksanakan rapat anggota tahunan menjadi 55,0 persen dari koperasi aktif; dan (iii) volume usaha koperasi sebesar 20,0 persen.

ARAH KEBIJAKAN

1. Penguatan badan hukum dan pengawasan koperasi;
2. Peningkatan kapasitas usaha bagi koperasi di sektor-sektor produktif;
3. Penguatan akses keuangan bagi UMKM dan penguatan KSP/KJKS;
4. Peningkatan akses dan jaringan/kemitraan usaha dan pemasaran bagi KUMKM;
5. Peningkatan jangkauan diklat KUMKM; dan
6. Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

5.1.14 Prioritas Lainnya di Bidang Kesejahteraan Rakyat

5.1.14.1.2 Kepariwisata

SASARAN :

1. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 9,0 juta orang dan jumlah pergerakan wisatawan nusantara menjadi 250 juta perjalanan;
2. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8,4 juta orang;
3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB menjadi sebesar 4,2 persen;
4. Meningkatnya nilai investasi terhadap nilai investasi nasional menjadi 4,6 persen;
5. Meningkatnya perolehan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman menjadi USD10,4 miliar;
6. Meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara menjadi sebesar Rp.175,0 triliun;
7. Meningkatnya kontribusi PDB ekonomi kreatif terhadap PDB sebesar 7,4 persen;
8. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja di bidang ekonomi kreatif sebesar 8,4 persen;
9. Meningkatnya kontribusi unit usaha di bidang ekonomi kreatif terhadap unit usaha nasional sebesar 7,3 persen;
10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan perguruan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja sebesar 1.443 orang;
11. Meningkatnya profesionalisme tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang di sertifikasi sebesar 9.000 orang.

ARAH KEBIJAKAN:

1. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap dalam 5 tahun;
2. Promosi 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif;
3. Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata;
4. Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan *hospitality management* yang kompetitif di kawasan Asia;
5. Peningkatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif industri berbasis kreativitas;
6. Peningkatan penghargaan atau apresiasi terhadap produk-produk berbasis kreativitas;
7. Peningkatan pemasaran dan promosi efektif dan terpadu untuk produk-produk kreatif unggulan;
8. Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana bagi pengembangan ekonomi kreatif; dan
9. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM.

5.1.14.2 Pemuda dan Olahraga

SASARAN:

Sasaran pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun 2014, antara lain:

1. meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup;
2. meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan;
3. terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan pemasyarakatan kepramukaan;
4. meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda;
5. meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda;
6. meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi kelayakan;
7. meningkatnya fasilitasi pembinaan olahraga prestasi atlet andalan dan keikutsertaan pada kejuaraan *multi event* internasional Asian Games.

ARAH KEBIJAKAN:

Adapun arah kebijakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan pada tahun 2014, yaitu:

1. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan; dan
2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional.

5.1.14.3 Kehidupan Beragama

SASARAN:

Sasaran utama pembangunan bidang agama adalah meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama; meningkatnya kualitas penyelenggaraan haji; meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

ARAH KEBIJAKAN:

Arah kebijakan pembangunan bidang agama adalah:

1. peningkatan kualitas kehidupan beragama;
2. peningkatan kerukunan umat beragama;
3. peningkatan kualitas penyelenggaraan haji, yang transparan, akuntabel, dan profesional;
4. peningkatan kualitas penyelenggaraan haji; dan
5. peningkatan tatakelola pembangunan bidang agama.

5.1.14.4 Pengarusutamaan Gender serta Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

SASARAN:

Sasaran pembangunan serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan tahun 2014 adalah:

1. tersusunnya kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan;
2. terlaksananya fasilitasi penerapan PUG di bidang pendidikan, kesehatan, politik dan pengambilan keputusan, penerapan kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta kebijakan perlindungan korban perdagangan orang;
3. meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan melalui penyusunan dan harmonisasi perundang-undangan dan kebijakan serta penyediaan data dan informasi yang berkualitas.

ARAH KEBIJAKAN:

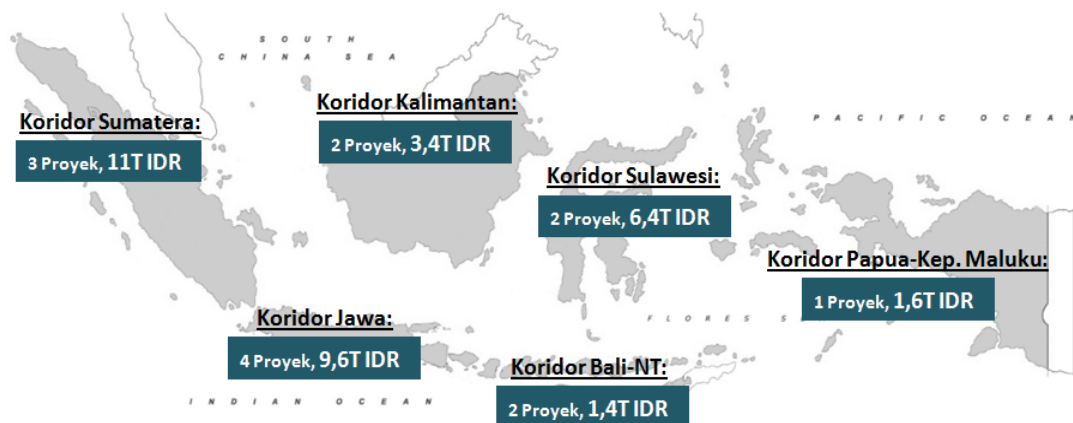
Berdasarkan sasaran yang akan dicapai, maka kebijakan PUG dan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan diarahkan kepada:

1. penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga, serta sistem manajemen data dan informasi gender;
2. peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.

5.2 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA (MP3EI)

Untuk tahun 2014, terdapat 15 proyek prioritas/strategis terpilih dengan total nilai investasi sebesar Rp36,2 triliun yang direncanakan akan di *groundbreaking*. Pemilihan proyek prioritas ini didasarkan pada kebutuhan mendesak atas infrastruktur dari pengembangan pusat-pusat industri hilir yang telah siap investasinya. Untuk lebih jelasnya rencana *groundbreaking* proyek prioritas terpilih di 6 koridor ekonomi tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar 5.1.

GAMBAR 5.1
PROYEK PRIORITAS YANG AKAN *GROUND*BREAKING (GB) TAHUN 2014



- Proyek Palapa Ring (pembangunan *broadband fiber optik* di koridor Papua-Kep. Maluku, Sumatera dan Bali-NT) merupakan proyek skala nasional yang masuk ke dalam proyek prioritas dengan total nilai investasi sebesar Rp 2,8T IDR.
- Proyek di Indonesia bagian Timur sangat tergantung pada pendanaan APBN dan BUMN, sementara proyek di Indonesia bagian Barat berpotensi untuk didanai dengan skema KPS.

Sumber: KP3EI, 2012

5.3 MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN INDONESIA (MP3KI)

Strategi penanggulangan kemiskinan perlu diperkuat melalui strategi pengembangan kehidupan yang berkelanjutan bagi penduduk miskin; disamping dukungan strategi perbaikan pelayanan dasar dan perlindungan sosial. Untuk itu, dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dan terpadu serta berbagai program terobosan agar dapat mempercepat pengurangan kemiskinan di semua wilayah. Dalam konteks inilah perlunya penyusunan suatu dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif berupa **Master Plan Percepatan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI)**.

MP3KI disusun sebagai salah satu upaya untuk mencapai **Visi Nasional Indonesia 2025** yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yaitu menjadi **“Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur”** dengan misi yang akan dicapai untuk **“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, bebas dari kemiskinan absolut, dan memiliki kapabilitas yang tinggi dan berkelanjutan”**

Misi ini mempunyai tiga unsur pokok yang saling berkaitan:

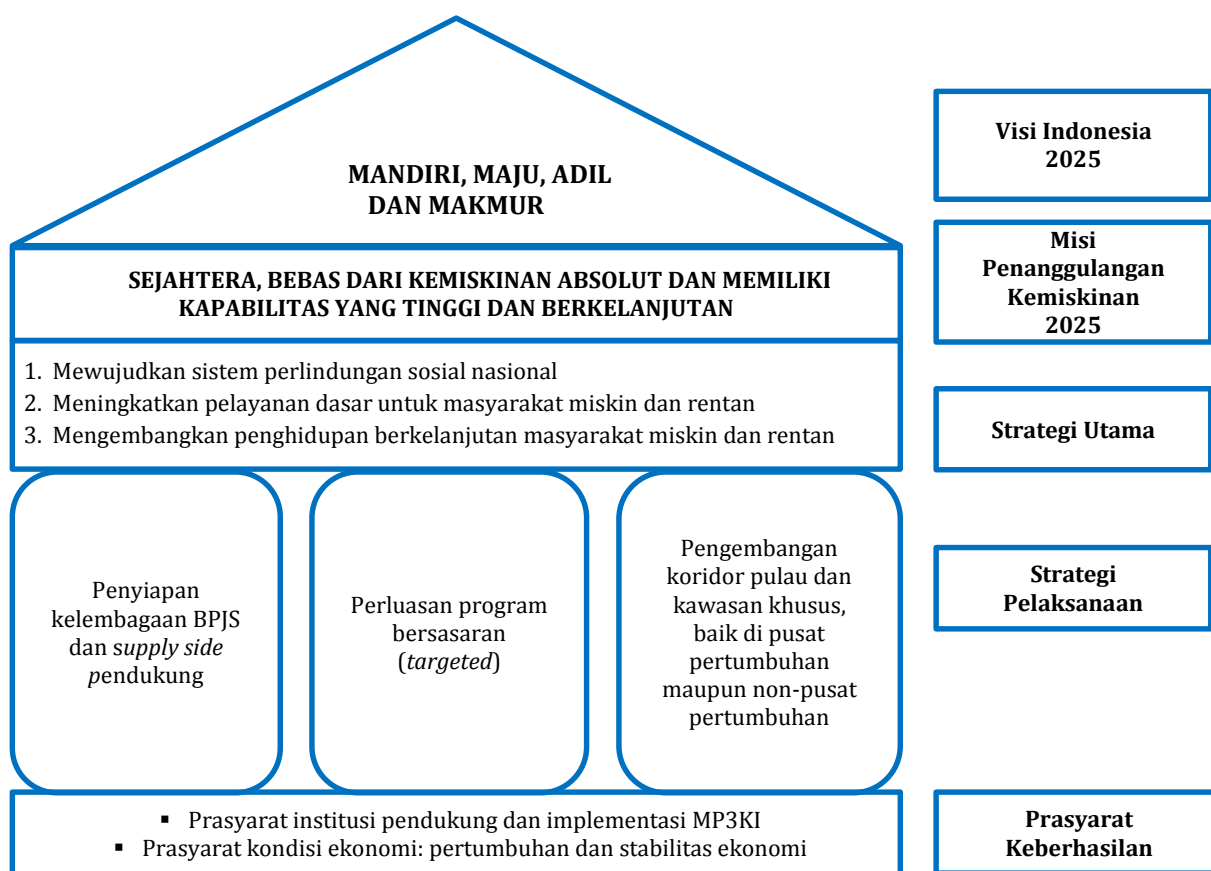
1. **Masyarakat sejahtera**, dimaknai sebagai masyarakat yang tercukupi kebutuhan/hak dasarnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
2. **Bebas dari kemiskinan absolut**, merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan yang paling mendasar untuk kelangsungan hidup; dan
3. **Kapabilitas yang tinggi dan berkelanjutan**, adalah kemampuan dan kekuatan untuk mengembangkan diri, melakukan usaha, dan mencapai cita-cita sesuai dengan potensi yang dimiliki secara individu maupun kelompok.

Melalui MP3KI, semua upaya penanggulangan kemiskinan diarahkan untuk mempercepat laju penurunan angka kemiskinan dan memperluas jangkauan penurunan tingkat kemiskinan di semua daerah dan di semua kelompok masyarakat. Program MP3KI akan melanjutkan dan menyempurnakan berbagai program dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan dan dianggap cukup berhasil. Untuk mendukung percepatan dan perluasan pengurangan kemiskinan, dilakukan penataan ulang dan transformasi program dan kebijakan, serta menambahkan upaya-upaya terobosan dalam bentuk program yang lebih terpadu dan penataan kelembagaan yang lebih menunjang efektivitasnya. Dengan demikian, upaya penanggulangan kemiskinan tidak lagi hanya bertumpu pada pemberian bantuan langsung bersasaran, namun juga dilakukan melalui upaya perlindungan aset penghidupan dan peningkatan kapabilitas kelompok miskin agar mereka mampu secara mandiri mengembangkan penghidupannya sehingga dapat keluar dari kemiskinan.

Dalam mencapai misi penanggulangan kemiskinan pada tahun 2025, MP3KI bertumpu pada sinergi dari tiga strategi utama, yaitu:

1. Mewujudkan **sistem perlindungan sosial nasional** yang menyeluruh, terintegrasi, dan mampu melindungi masyarakat dari kerentanan dan guncangan;
2. Meningkatkan **pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan** sehingga dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di masa mendatang;
3. Mengembangkan **penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*) masyarakat miskin dan rentan** melalui berbagai kebijakan dan dukungan di tingkat lokal dan regional dengan memperhatikan aspek lingkungan.

**GAMBAR 5.2
KERANGKA DISAIN MP3KI**

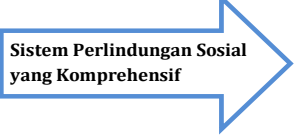
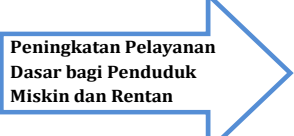
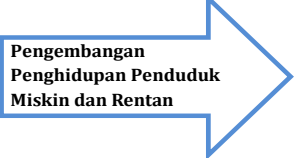


Strategi dasar MP3KI tersebut akan dilaksanakan melalui:

1. Penyiapan kelembagaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan sarana pelayanan (*supply side*) pendukung perlindungan sosial
2. Perluasan jangkauan program-program bersasaran (*targetted*) untuk penduduk miskin dan rentan;
3. Pengembangan penghidupan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan koridor pulau dan kawasan khusus, baik di pusat pertumbuhan maupun non-pusat pertumbuhan.

Transformasi penanggulangan kemiskinan dilakukan secara bertahap dimana berbagai pendekatan penanggulangan kemiskinan yang telah cukup berhasil akan dilanjutkan dan terus disempurnakan, seperti terlihat di dalam Gambar 5.3, yaitu: (i) memperkuat dan meningkatkan cakupan program-program yang termasuk dalam kelompok bantuan dan perlindungan sosial menuju sistem jaminan sosial yang komprehensif, (ii) mengarahkan program-program yang termasuk dalam kelompok pro-rakyat dan program-program pemenuhan hak-hak dan kebutuhan dasar menjadi upaya afirmatif, dan (iii) meningkatkan koordinasi dan sinergisitas pelaksanaan program-program yang termasuk kelompok pemberdayaan masyarakat dan penyaluran kredit usaha kecil dan mikro.

GAMBAR 5.3
TRANSFORMASI STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

| | 2013-2014 | 2015-2020 | 2021-2025 | Sasaran |
|-------------------------------------|---|---|--|---|
| STRATEGI (KELOMPOK PROGRAM/KLASTER) | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelompok Bantuan dan Perlindungan Sosial |  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistem Jaminan Sosial (<i>Social Security System</i>); bidang kesehatan dan ketenagakerjaan ▪ Sistem Bantuan Sosial (<i>Social Assistance</i>); | Semua penduduk Penduduk miskin, rentan & berkebutuhan khusus |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelompok Pro-Rakyat |  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jaminan layanan dasar; pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan ▪ Tersedianya Infrastruktur dasar secara terpadu | 40% penduduk termiskin |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kelompok Pemberdayaan Masyarakat ▪ Kelompok Kredit Usaha Mikro dan Kecil |  | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Meningkatnya kapabilitas dan produktivitas ▪ Melembaganya pembangunan partisipatif | 40% penduduk termiskin usia produktif |
| | Tahapan | Rekonsolidasi | Transformasi dan Ekspansi | Keberlanjutan |

Dalam upaya transformasi tersebut, tahun 2013 merupakan tahapan awal rekonsolidasi untuk melanjutkan program yang sedang berjalan dan melakukan langkah-langkah persiapan menuju transformasi strategi penanggulangan kemiskinan termasuk melakukan optimalisasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara terpadu (*quick wins*) di beberapa daerah. Lokasi-lokasi *quick wins* dipilih per koridor dengan kriteria jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan di kecamatan sebagai wilayah intervensi. Penggalan dan penemuan akar persoalan kemiskinan dilakukan di lokasi-lokasi tersebut yang menghasilkan identifikasi penanganan kongkret yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak untuk melengkapi berbagai bantuan penanggulangan kemiskinan yang saat ini telah diterima.

Permasalahan umum yang telah diidentifikasi di lokasi *quick wins* tersebut antara lain adalah (i) rendahnya kualitas sumber daya manusia, (ii) infrastruktur dasar tidak memadai seperti infrastruktur jalan, air minum, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan, (iii) kurangnya diversifikasi usaha masyarakat miskin dan hanya terpaku pada satu mata pencaharian yang sangat tergantung pada musim, (iv) perumahan yang tidak layak huni, dan (v) kurangnya pemahaman tentang hidup sehat.

Tindak lanjut berikutnya adalah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian/Lembaga dalam memformulasikan kegiatan yang tepat dalam menangani permasalahan yang spesifik lokasi tersebut termasuk realokasi anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2013 yang diarahkan kepada lokasi tersebut; selain memperkuat pelaksanaan program kemiskinan yang telah dilakukan selama ini di lokasi yang sama.

Tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaan MP3KI adalah terutama masalah koordinasi antar stakeholders.

5.4 ARAH PEMBANGUNAN BIDANG, PENGARUSUTAMAAN, DAN LINTAS BIDANG

Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama;
2. Bidang Ekonomi;
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
4. Bidang Sarana dan Prasarana;
5. Bidang Politik;
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan;
7. Bidang Hukum dan Aparatur;
8. Bidang Wilayah dan Tataruang;
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Arah dan kebijakan masing-masing bidang pembangunan tersebut diuraikan dalam Buku II.

Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RKP 2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat.

Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RKP 2014 terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (i) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan melaksanakan prinsip-prinsip pengarusutamaan ini, upaya-upaya mengatasi masalah dan tantangan pembangunan akan semakin efektif dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat.

RKP 2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi

pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang meliputi (i) penanggulangan kemiskinan ; (ii) perubahan iklim global; (iii) pembangunan kelautan berdimensi kepulauan, dan (iv) perlindungan anak. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antar bidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks.

5.5 ARAH PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

Arah pengembangan wilayah tahun 2014 didasarkan pada arahan RPJMN 2010 – 2014 berdasarkan 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Arah pembangunan wilayah dirumuskan dengan mempertimbangkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, kinerja dan capaian pembangunan wilayah, dinamika lingkungan strategis baik di tingkat nasional maupun internasional, dan target jangka menengah yang harus dicapai pada tahun 2014.

Secara umum RPJMN 2010-2014 memberikan arahan pengembangan wilayah nasional pada 2010-2014 yang bertumpu pada lima strategi utama, yakni:

1. Mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.
2. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik;
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah;
4. Pemihakan bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana;
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Kinerja perekonomian wilayah secara umum menunjukkan kemajuan yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB secara riil di hampir semua wilayah. Beberapa provinsi di luar wilayah Jawa-Bali pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan di atas rata-rata nasional. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, tingkat kemiskinan dan pengangguran juga menunjukkan kecenderungan menurun di hampir semua wilayah. Namun demikian, kesenjangan pembangunan wilayah relatif masih tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut wilayah pada tahun 2012 yang masih didominasi oleh Provinsi di Jawa-Bali dengan sumbangan sebesar 58,9 persen, diikuti wilayah Sumatera dengan sumbangan sebesar 23,8 persen, dan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua secara bersama-sama dengan sumbangan sekitar 17,3 persen. Ketimpangan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) antarwilayah yang masih tinggi mengindikasikan senjangnya tingkat produktivitas antarwilayah.

Kesenjangan pembangunan antarwilayah juga tampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, diantaranya ditunjukkan oleh kesenjangan capaian tingkat kemiskinan, serta umur harapan hidup (UHH), dan rata-rata lama sekolah yang merupakan komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Di samping itu capaian pembangunan infrastruktur wilayah juga masih timpang, padahal ketersediaan dan kualitas prasarana merupakan salah satu kunci peningkatan daya saing dan produktivitas kegiatan ekonomi secara merata. Kondisi ini digambarkan oleh timpangnya tingkat kepadatan jalan, tingkat kemantapan jaringan jalan wilayah, dan rasio elektrifikasi antarwilayah.

Di sisi lain pelambatan pertumbuhan ekonomi dunia memberi pengaruh pada kinerja pembangunan daerah, khususnya daerah-daerah penghasil komoditas ekspor unggulan nasional melalui transmisi pelemahan permintaan komoditas di pasar-pasar utama. Masih belum kuatnya indikasi pemulihan perekonomian Zona Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, serta melambatnya pertumbuhan ekonomi China menekankan pentingnya penguatan perekonomian domestik untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang akan dimulai pada tahun 2015 menyediakan berbagai peluang dan tantangan dengan meningkatnya arus barang dan tenaga kerja antar negara ASEAN. Kesemuanya itu menuntut dilakukannya peningkatan daya saing dan daya tarik perekonomian nasional di semua wilayah yang disertai dengan terjaganya integrasi perekonomian nasional yang bercirikan wilayah kepulauan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pengembangan Wilayah Sumatera diarahkan untuk memperkuat perannya sebagai pusat produksi dan industri pengolahan hasil pertanian, lumbung pangan dan lumbung energi nasional, serta pusat perdagangan dan pariwisata. Kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilakukan diantaranya adalah pembangunan Kawasan Industri Sei Mangke, percepatan penyelesaian Bandara Kuala Namu, pembangunan jaringan jalan wilayah, pengembangan bandara dan pelabuhan pendukung penguatan konektivitas wilayah, pembangunan prasarana irigasi dan pencetakan sawah untuk mendukung prioritas ketahanan pangan, percepatan penanggulangan kemiskinan khususnya di lokasi-lokasi *Quick Wins*, dan percepatan pencapaian sasaran MDGs.

Pengembangan Wilayah Jawa-Bali diarahkan untuk mempertahankan perannya sebagai lumbung pangan nasional dan pusat industri pengolahan, memperkuat interaksi perdagangan antarwilayah, dan meningkatkan mutu sektor jasa dan pariwisata bertaraf internasional. Tingginya intensitas kegiatan ekonomi di Wilayah Jawa-Bali perlu diimbangi dengan upaya-upaya untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Beberapa kegiatan strategis yang akan dilakukan diantaranya perbaikan jaringan irigasi dan pembangunan waduk, pembangunan jalur ganda rel kereta api Lintas Utara Jawa, perbaikan jaringan jalan wilayah, pembangunan pelabuhan dan pembangunan bandar udara, serta pembangunan prasarana air bersih dan sanitasi.

Pengembangan Wilayah Kalimantan diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Di samping itu pengembangan Wilayah Kalimantan juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertambangan dan mempertahankan fungsinya sebagai lumbung energi nasional dengan memerhatikan keseimbangan ekosistem wilayah. Kegiatan-kegiatan

strategis yang akan dilakukan diantaranya adalah pembangunan jaringan jalan dan jembatan Trans Kalimantan, pembangunan pembangkit listrik, pembangunan pelabuhan dan bandara, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan infrastruktur daerah perbatasan, dan konservasi daerah aliran sungai serta rehabilitasi hutan.

Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan untuk meningkatkan perannya sebagai lumbung pangan nasional, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan, perkebunan dan perikanan, meningkatkan pengembangan bioenergi, dan meningkatkan peran kewilayahannya sebagai hub perdagangan di Kawasan Indonesia Timur, sebagai pusat jasa dan destinasi wisata bertaraf internasional. Kegiatan-kegiatan strategis yang dilakukan diantaranya adalah pengembangan fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Merah Bitung, pembangunan bandara di pulau-pulau terluar (Miangas dan Siau) dan daerah tertinggal (Tojo Una-Una, Morowali, Buol, Toli-Toli), pembangunan pelabuhan, pembangunan jaringan jalan, pembangunan jaringan rel kereta api Manado-Bitung dan Makassar-Pare Pare, pembangunan irigasi, waduk dan pencetakan sawah, serta pengembangan destinasi wisata Wakatobi.

Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta meningkatkan perannya sebagai destinasi pariwisata alam dan budaya. Kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilakukan diantaranya adalah pembangunan pusat perbenihan jagung, pembangunan bendungan/waduk/embung, pengadaan sarana alat dan mesin pertanian, pembangunan pelabuhan, dan pembangunan jaringan jalan wilayah.

Pengembangan Wilayah Maluku diarahkan untuk meningkatkan perannya sebagai lumbung pangan perikanan nasional, meningkatkan nilai tambah hasil perikanan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perkebunan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah peternakan, mengembangkan sektor pariwisata, dan memperkuat keterkaitan antarpulau. Kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilakukan diantaranya adalah pengembangan kawasan perikanan budidaya, pembangunan prasarana dan sarana perikanan tangkap, pembangunan pelabuhan dan dermaga, percepatan penyelesaian jaringan jalan Trans Maluku, penyelesaian bandara di daerah-daerah tertinggal dan terluar, dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah tertinggal.

Pengembangan Wilayah Papua diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perikanan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah hasil perkebunan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah peternakan, meningkatkan produktivitas dan nilai tambah tanaman pangan, dan meningkatkan keterkaitan ekonomi antarwilayah. Kegiatan-kegiatan strategis yang akan dilakukan diantaranya adalah pembangunan prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan, pembangunan bandara di daerah-daerah tertinggal dan terisolir, pembangunan jaringan jalan dan jembatan, pembangunan pelabuhan, pembangunan pelabuhan perikanan, pembangunan jaringan irigasi, dan pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan tenaga surya.

BAB 6

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN



BAB 6 PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

6.1 Keuangan Negara dan Arah Kebijakan Fiskal

Pada tahun 2014, kebijakan fiskal disusun dengan mempertimbangkan perekonomian domestik dan global serta tantangan ke depan yang diperkirakan akan dihadapi perekonomian dalam negeri. Dengan pertimbangan tersebut, arah kebijakan fiskal 2014 adalah sebagai berikut: (a) menyediakan stimulus fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal; (b) memperkuat kapasitas dan memperlebar ruang fiskal; (c) meningkatkan kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah; serta (d) memantapkan pengelolaan pembiayaan anggaran.

Dengan arah dan pokok kebijakan fiskal tersebut, pendapatan negara pada tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp1.756,6 triliun, yang didukung oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp1.368,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp381,8 triliun. Sementara itu, belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.879,0 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.273,9 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp605,1 triliun.

Dengan perkiraan pendapatan negara dan belanja negara tersebut, ketahanan fiskal yang mampu memberikan dorongan terhadap perekonomian diperkirakan tetap terjaga. Pada tahun 2014, defisit APBN diperkirakan mencapai sekitar 1,2 persen PDB, yang akan ditutup oleh pembiayaan dalam negeri dan luar negeri. Ketahanan fiskal yang terjaga juga tercermin dari stok utang pemerintah yang diperkirakan menurun menjadi 22,2 persen PDB pada tahun 2014.

6.2 Kebijakan Transfer ke Daerah

Pembiayaan pembangunan melalui dana transfer ke daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendanaan pembangunan nasional dan bersumber dari APBN. Dana transfer ke daerah merupakan wujud dukungan pemerintah pusat terhadap kegiatan pembangunan di daerah dan ditujukan untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Alokasi Dana Transfer ke daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan dan urusan yang diserahkan kepada daerah. Dana transfer ke daerah terdiri atas: (a) Dana Perimbangan; dan (b) Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian.

Kebijakan pengalokasian Dana Transfer ke Daerah pada tahun 2014 diarahkan untuk mendukung kesinambungan pembangunan di daerah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan program/kegiatan, baik yang merupakan prioritas nasional maupun prioritas daerah. Dana Transfer ke Daerah juga ditujukan untuk membantu pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam konteks penyediaan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, ke depannya kebijakan Dana Transfer ke Daerah juga akan dirancang untuk dapat mendorong peningkatan *local taxing power* sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, terutama dengan adanya devolusi Pajak Bumi dan Bangunan untuk

Perkotaan dan Perdesaan (PBB) sesuai dengan UU No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan dari dana transfer ke daerah ini adalah untuk:

1. Meningkatkan kapasitas fiskal daerah serta mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah dan antardaerah;
2. Menyelaraskan besaran kebutuhan pendanaan di daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah seiring dengan pelaksanaan SPM dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah;
4. Meningkatkan daya saing daerah;
5. Mendukung kesinambungan fiskal nasional dalam kerangka kebijakan ekonomi makro;
6. Meningkatkan kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah;
7. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
8. Meningkatkan sinergi dan sinkronisasi antara rencana pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan
9. Meningkatkan perhatian terhadap percepatan pembangunan di daerah tertinggal, terluar, terdepan, dan pasca konflik.

Agar tujuan pembangunan di daerah terwujud, maka pengelolaan Dana Transfer senantiasa didorong untuk memenuhi pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik yakni tepat sasaran, tepat waktu, efisien, adil, transparan, akuntabel, serta memiliki kinerja terukur.

6.2.1 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai kewenangannya, mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pusat dan Daerah, dan mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antardaerah.

Dana Perimbangan terdiri atas (1) Dana Alokasi Umum (DAU), (2) Dana Alokasi Khusus (DAK), dan (3) Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiga komponen Dana Perimbangan tersebut merupakan suatu kesatuan yang utuh sebagai pendanaan pelaksanaan desentralisasi yang alokasinya saling mengisi dan melengkapi. Penentuan daerah penerima dan besaran alokasi dana ke setiap daerah dilakukan dengan menggunakan formula dan kriteria penghitungan tertentu sebagaimana yang diamanahkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Formula yang digunakan diharapkan tidak menjadi disinsentif bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan dan kinerja pembangunan daerah, termasuk mengoptimalkan penerimaan di luar Dana Transfer. Penyempurnaan dilakukan terhadap mekanisme pemanfaatan dan distribusi Dana Perimbangan dengan harapan daerah dapat meningkatkan kinerja fungsi pemerintahan, khususnya dalam penyediaan pelayanan

publik. Oleh sebab itu, pemanfaatan Dana Perimbangan harus dirancang sedemikian rupa agar mendorong pemenuhan kebutuhan masyarakat, terutama terhadap pelayanan dasar sesuai SPM.

Jumlah Dana Perimbangan secara total mengalami peningkatan untuk mengakomodasi peningkatan kebutuhan daerah dan mendukung pemerintah daerah agar dapat menjalankan kewenangannya dengan baik. Peningkatan alokasi Dana Perimbangan harus disertai dengan peningkatan kualitas pengelolaannya melalui peningkatan koordinasi di antara para pemangku kepentingan, peningkatan akurasi data yang digunakan, dan pemenuhan atas unsur tata kelola yang baik. Salah satu unsur terpenting dalam penyempurnaan kebijakan tata kelola Dana Perimbangan adalah transparansi dari tahap perencanaan dan pengalokasian oleh pemerintah pusat, hingga tahap pelaksanaan di daerah.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Bagi Hasil. Sesuai dengan UU No.33 tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) dan merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan masing-masing daerah serta besarnya memperhitungkan potensi daerah penghasil (*by origin*) dan mempertimbangkan pemerataan antar daerah. Dana ini bersumber dari pajak (penghasilan pasal 21 dan pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan pajak bumi dan bangunan, serta cukai hasil tembakau) dan sumber daya alam (kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, gas dan panas bumi). DBH dialokasikan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal dalam kapasitas fiskal (*vertical fiscal imbalance*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal kemampuan keuangan (kapasitas fiskal).

Arah kebijakan DBH pada tahun 2014 adalah:

1. Menyempurnakan proses penghitungan dan penetapan alokasi DBH secara lebih transparan dan akuntabel melalui mekanisme rekonsiliasi data antara Pemerintah Pusat dengan daerah penghasil. Langkah ini sejalan dengan RPJMN 2010-2014 yang menekankan pada pelaksanaan tata kelola keuangan yang tepat waktu, tepat sasaran, efisien, dan akuntabel;
2. Menyempurnakan sistem penganggaran dan pelaksanaan atas PNB yang dibagikan ke daerah;
3. Menyempurnakan sistem penyaluran DBH lebih tepat waktu dan tepat jumlah.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Formulasi penghitungan dan mekanisme pengalokasian DAU diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Jumlah alokasi DAU sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri *netto* yang ditetapkan dalam APBN dengan memperhitungkan faktor pengurang.

Penentuan besar dana yang mencakup 'kebutuhan fiskal daerah' dalam rangka melaksanakan fungsi dasar layanan umum harus mengacu pada tujuan desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata di daerah. Berdasarkan RPJMN 2010-2014, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya efektivitas dan akuntabilitas DAU sebagai instrumen untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah, dalam rangka menjamin terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan daerah yang efektif serta pelayanan publik yang lebih merata di daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Arah kebijakan DAU pada tahun 2014 adalah:

1. Melanjutkan formula DAU berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dengan tetap memperhatikan asas pemerataan dan keadilan dalam pembangunan yang berkualitas;
2. Meningkatkan akurasi data dasar perhitungan DAU yang bersumber dari lembaga/instansi yang berwenang. Salah satunya melalui koordinasi antar instansi terkait;
3. Mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan akuntabilitas dalam melaksanakan kegiatan yang sumber pendanaannya berasal dari DAU;
4. Menggunakan prinsip *non hold harmless*;
5. Meningkatkan keterkaitan dengan Dana Perimbangan lainnya (DBH dan DAK) yang saling mengisi dan melengkapi sesuai dengan tujuannya masing-masing dalam mendanai pelaksanaan desentralisasi.

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatkan efektivitas DAK sebagai instrumen pendanaan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan daerah untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional.

Alokasi DAK ke daerah ditentukan berdasarkan tiga kriteria sebagai berikut: a) Kriteria Umum, dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah ; b) Kriteria Khusus, yang dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan

karakteristik daerah; c) Kriteria Teknis, disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK, yang dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait.

Pada tahun 2014, Pemerintah akan lebih memperhatikan pengalokasian DAK kepada daerah-daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik melalui sinergi dengan dana-dana pusat (kementerian dan lembaga), sambil melanjutkan kegiatan pengalihan dana-dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan (Dekon/TP) yang telah menjadi urusan daerah ke DAK.

Arah kebijakan DAK tahun 2014 secara umum adalah:

1. Aspek Perencanaan

- a. Mendukung pencapaian prioritas nasional dalam RKP 2014 dan program-program prioritas nasional yang bersifat lintas sektor/kewilayahan;
- b. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam membiayai pelayanan publik untuk mendorong pencapaian standar pelayanan minimal (SPM), melalui penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat, serta meningkatkan efektivitas belanja daerah;
- c. Memantapkan perencanaan DAK dengan mendorong pendekatan berbasis hasil (*output/outcome*) sesuai dengan RPJMN. Perencanaan juga diarahkan agar sesuai kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*) dan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*);
- d. Meningkatkan koordinasi penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) sehingga lebih tepat sasaran dan penetapan Juknis dilakukan tepat waktu;
- e. Meningkatkan akurasi data-data teknis dan menajamkan indikator kinerja sebagai basis kebijakan kementerian dan lembaga dalam rangka meningkatkan fokus kegiatan serta menghindari duplikasi kegiatan antar Bidang DAK;
- f. Memperkuat peran pemerintah daerah dalam perencanaan DAK;
- g. Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan DAK antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, serta dalam Pemerintah Daerah sendiri sehingga terwujud sinkronisasi dan sinergitas;
- h. Penetapan lokasi memperhatikan daerah tertinggal sesuai dengan bidang DAK yang dibutuhkan oleh daerah tertinggal tersebut;

2. Aspek Penganggaran

- a. Meningkatkan kesesuaian alokasi dengan kebutuhan daerah, serta sesuai dengan siklus dan mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan DAK melalui koordinasi perencanaan dan pengelolaan DAK di berbagai tingkatan pemerintahan (mulai dari Musrenbangda);

- c. Mendorong kementerian teknis untuk mengalihkan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah secara bertahap menjadi DAK.

3. Aspek Pelaksanaan

- a. Meningkatkan koordinasi pengelolaan DAK secara utuh dan terpadu di pusat dan daerah sehingga terwujud sinkronisasi kegiatan DAK dengan kegiatan lain yang didanai APBN dan APBD (sumber-sumber pendanaan lainnya);
- b. Mendukung upaya percepatan pelaksanaan kegiatan di daerah dalam rangka mewujudkan *output* dan *outcome* yang diharapkan, serta meningkatkan penyerapan DAK di daerah. Salah satunya melalui langkah percepatan distribusi dan sosialisasi Juknis di daerah.
- c. Meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan DAK sehingga efektif dan efisien.

4. Aspek Pemantauan dan Evaluasi

- a. Mendorong kementerian teknis untuk mengalihkan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan Daerah secara bertahap menjadi DAK (sesuai pasal 108 UU No.33 Tahun 2004);
- b. Menerapkan kebijakan *disinsentive* kepada daerah yang tidak melaporkan pelaksanaan kegiatan DAK di daerahnya, menggunakan kinerja pelaporan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengalokasian DAK;
- c. Meningkatkan koordinasi dan kualitas pemantauan dan evaluasi, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Kebijakan bidang DAK tahun 2014 ditentukan berdasarkan pada: (i) dukungan terhadap pencapaian prioritas nasional dalam RPJMN dan RKP 2014; (ii) arah kebijakan DAK dalam RPJMN 2010-2014 yang fokus pada outcome oriented dan (iii) mendukung percepatan pembangunan daerah; dan (iv) mendukung pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (SPM).

Pada tahun 2014, bidang DAK tetap berjumlah 19 bidang, yaitu: (1) Prasarana Pemerintahan Daerah; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Keluarga Berencana; (5) Infrastruktur Air Minum; (6) Infrastruktur Sanitasi; (7) Infrastruktur Irigasi; (8) Infrastruktur Jalan; (9) Keselamatan Transportasi Darat; (10) Perumahan dan Kawasan Permukiman; (11) Transportasi Perdesaan; (12) Energi Perdesaan; (13) Pertanian; (14) Kelautan dan Perikanan; (15) Kehutanan; (16) Lingkungan Hidup; (17) Sarana Perdagangan; (18) Sarana Prasarana Daerah Tertinggal; serta (19) Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan.

TABEL 6.1
BIDANG DAK TAHUN 2014

| Prioritas Nasional | Bidang DAK tahun 2014 |
|--|---|
| Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola | 1. Prasarana Pemerintahan Daerah |
| Pendidikan | 2. Pendidikan |
| Kesehatan | 3. Kesehatan |
| Infrastruktur | 4. Keluarga Berencana |
| | 5. Infrastruktur Air Minum |
| | 6. Infrastruktur Sanitasi |
| | 7. Infrastruktur Irigasi |
| | 8. Infrastruktur Jalan |
| | 9. Keselamatan Transportasi Darat |
| | 10. Perumahan dan Kawasan Permukiman |
| | 11. Transportasi Perdesaan |
| | 12. Energi Perdesaan |
| Energi | 13. Pertanian |
| Ketahanan Pangan | 14. Kelautan dan Perikanan |
| Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana | 15. Kehutanan |
| | 16. Lingkungan Hidup |
| Iklm Investasi dan Iklm Usaha | 17. Sarana Perdagangan |
| Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik | 18. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal |
| | 19. Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan |

Arah kebijakan, lingkup kegiatan dan sasaran per-bidang DAK TA 2014 (sasaran per-bidang DAK dapat berubah sesuai pagu definitif) adalah sebagai berikut:

1. DAK PRASARANA PEMERINTAHAN DAERAH

Arah kebijakan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah adalah meningkatkan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di daerah pemekaran, daerah induk, daerah yang terkena dampak pemekaran, serta daerah lainnya yang prasarana pemerintahannya belum layak dan memadai. DAK Prasarana Pemerintahan Daerah diharapkan dapat membantu penyelenggaraan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam hal penyediaan prasarana pemerintahan. Prasarana tersebut selain untuk meningkatkan kredibilitas pemerintah daerah, diharapkan juga mendukung sasaran dan indikator keberhasilan reformasi birokrasi dan tata kelola, yang merupakan Prioritas Nasional, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (integritas pelayanan publik di daerah). Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan kegiatan, pemerintah daerah melalui SKPD terkait harus menyatakan komitmennya untuk menyediakan biaya operasional dan pemeliharaan dari lingkup kegiatan yang ada, sesuai dengan umur ekonomis bangunan.

Lingkup kegiatan : (i) Pembangunan/perluasan gedung kantor Gubernur/Bupati/Walikota; (ii) Pembangunan/ perluasan gedung kantor

Setda Provinsi/Kab/Kota (iii) Pembangunan/perluasan gedung kantor DPRD Provinsi/Kab/Kota dan Sekretariat DPRD Provinsi/Kab/Kota; (iv) Pembangunan/perluasan gedung kantor Inspektorat Daerah Provinsi/Kab/Kota; (v) Pembangunan/perluasan gedung kantor Bappeda Provinsi/Kab/Kota; (vi) Pembangunan/perluasan gedung kantor Dinas Daerah Provinsi/Kab/Kota; (vii) Pembangunan/perluasan gedung kantor Lembaga Teknis Daerah Provinsi/Kab/Kota; (viii) Pembangunan/perluasan gedung kantor Kecamatan di Kab/Kota, dan (ix) Pembangunan/perluasan gedung kantor di Provinsi yang pembentukan perangkat dan kelembagaannya diatur dalam peraturan perUndang-Undangan.

Sasaran : Meningkatkan ketersediaan prasarana pemerintahan daerah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

2. DAK PENDIDIKAN

Arah kebijakan DAK Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut: (i) Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2014 dialokasikan untuk mendukung penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun yang bermutu dan merata, serta mendukung pelaksanaan program Pendidikan Menengah Universal; (ii) Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan TA 2014 diprioritaskan untuk pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya bagi sekolah yang kekurangan ruang kelas, rehabilitasi ruang kelas rusak beserta perabotnya, pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya, pembangunan ruang belajar lainnya, penyediaan buku teks pelajaran/perpustakaan/referensi, dan penyediaan sarana penunjang mutu pendidikan yang cukup, layak, dan merata; dan (iii) Sasaran program DAK Bidang Pendidikan TA 2014 meliputi SD/SDLB, SMP/SMPLB dan SMA/SMK baik negeri maupun swasta, yang secara bertahap diarahkan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Lingkup kegiatan DAK Bidang Pendidikan Jenjang SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/ SMLB/ SMK adalah: (i) Rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar yang rusak beserta perabotnya (khusus untuk Provinsi Papua, Papua Barat, dan di daerah terpencil/perbatasan, dapat digunakan untuk membangun rumah/asrama guru, apabila rehabilitasi ruang kelas/ruang belajar telah selesai; (ii) Pembangunan ruang kelas baru beserta perabotnya (termasuk satinas sekolah); (iii) Pembangunan ruang belajar lainnya beserta perabotnya; (iv) Pembangunan ruang perpustakaan beserta perabotnya; (v) Pembangunan laboratorium; (vi) Pengadaan buku teks/buku referensi; (vii) Pengadaan peralatan laboratorium; (viii) Pengadaan peralatan pendidikan; dan (ix) Pengadaan

sarana/prasarana peningkatan mutu pendidikan (termasuk olahraga dan kesenian).

Sasaran: Sasaran umum DAK bidang pendidikan tahun 2014 adalah untuk meningkatkan layanan dan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta secara bertahap mengarah kepada pemenuhan standar pelayanan minimum. Sedangkan secara khusus adalah sebagai berikut: (i) Untuk SD/SDLB adalah sebagai berikut: (a) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/SDLB dari 95,7% menjadi 96,0%; (b) Persentase Berkurangnya jumlah kabupaten dengan capaian persentase APM SD/SDLB $\leq 94\%$; (c) Meningkatnya persentase SD/SDLB yang memiliki perpustakaan dari 75% menjadi 85%; (d) Meningkatnya persentase ruang kelas SD/SDLB dalam kondisi baik dari 97% menjadi 100%; (e) Ketersediaan buku teks sesuai dengan kebutuhan; (ii) Untuk SMP/SMPLB adalah sebagai berikut: (a) Meningkatnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/SMPLB dari 81% menjadi 81,9%; (b) Berkurangnya jumlah daerah dengan persentase capaian APK SMP/SMPLB $\leq 90\%$; (c) Seluruh ruang kelas SMP/SMPLB dalam kondisi baik; (d) Meningkatnya persentase SMP/SMPLB yang memiliki perpustakaan dari 60% menjadi 70%; dan (e) Ketersediaan buku teks sesuai dengan kebutuhan; dan (iii) Untuk SMA/SMK adalah sebagai berikut: (a) Menaikkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan menengah dari menjadi 82% menjadi 85%; (b) Memperkecil disparitas pendidikan antar kabupaten/kota; (c) Berkurangnya jumlah daerah dengan persentase capaian APK SMA/SMK $\leq 70\%$; (c) Seluruh ruang belajar SMA/SMK dalam kondisi baik; dan (d) Ketersediaan buku teks sesuai dengan kebutuhan.

3. DAK KESEHATAN

Arah kebijakan DAK Bidang Kesehatan adalah meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian dalam rangka akselerasi pencapaian MDG yang difokuskan untuk menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan anak, penanggulangan masalah gizi serta pengendalian penyakit (menular dan tidak menular) dan penyehatan lingkungan terutama bagi penduduk miskin dan penduduk di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) melalui peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes), Puskesmas dan jaringannya, RS Provinsi/Kabupaten/Kota serta penyediaan dan pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin, yang berkhasiat, aman dan bermutu untuk mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan Tahun 2014.

Lingkup kegiatan : (i) Subbidang Pelayanan Kesehatan Dasar: Pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi Poskesdes, Puskesmas dan jaringannya, meliputi: (a) Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas di DTPK ;(b) Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di wilayah terpencil/sangat terpencil di DTPK dan peningkatan Puskesmas menjadi mampu PONEB ; (c) Pembangunan sarana Instalasi Pengolahan Limbah; (d) Rehabilitasi karena rusak berat atau

rehabilitasi total Puskesmas/Puskesmas; (e) Perawatan, termasuk rumah dinas dokter dan paramedis; (f) Penyediaan alat kesehatan; (g) Penyediaan Puskesmas Keliling (Pusling Roda 4 dan Pusling Perairan); (h) Pembangunan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) (ii) Subbidang Pelayanan Kesehatan Rujukan: Pemenuhan/pengadaan sarana, prasarana dan peralatan Rumah Sakit Provinsi/Kabupaten/Kota, meliputi: (a) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan Tempat Tidur Kelas III ; (b) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan IGD RS; (c) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan ICU RS; (d) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan PONEK RS; (e) Pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan IPL RS; (f) Pemenuhan sarana prasarana UTD di RS/BDRS; (g) Pemenuhan Peralatan Kalibrasi di RS (iii) Subbidang Pelayanan Kefarmasian, meliputi: (a) Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan untuk fasilitas pelayanan kesehatan dasar untuk Kabupaten/Kota yang mengacu pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN); (b) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota; (c) Pembangunan baru/rehabilitasi dan/atau penyediaan sarana pendukung Instalasi Farmasi Provinsi.

Sasaran : (i) Jumlah Poskesdes yang beroperasi sebanyak 58.500 Poskesdes; (ii) Persentase Puskesmas rawat inap yang mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) sebesar 100 persen; (iii) Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas Perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk sebanyak menjadi 96 puskesmas; (iv) Persentase RS Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Konprehensif (PONEK) sebesar 100 persen; dan (v) Persentase ketersediaan obat dan vaksin sebesar 100 persen.

4. DAK KELUARGA BERENCANA

Arah kebijakan DAK Bidang Keluarga Berencana diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB yang merata, yang dilakukan melalui (i) peningkatan daya jangkau dan kualitas penyuluhan, penggerakan, pembinaan program KB lini lapangan; (ii) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan KB; (iii) peningkatan sarana pelayanan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Program KB; (iv) peningkatan sarana pembinaan tumbuh kembang anak; dan (v) peningkatan pelaporan dan pengolahan data dan informasi berbasis teknologi informasi.

Lingkup kegiatan : (i) Penyediaan sarana kerja dan mobilitas serta sarana pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi bagi tenaga lini lapangan; (ii) Pemenuhan sarana pelayanan KB di klinik KB (statis) dan sarana dan prasarana pelayanan KB keliling dan pembangunan gudang alat/obat kontrasepsi; (iii) Penyediaan sarana dan prasarana penerangan KB keliling, pengadaan *public address* dan KIE kit; (iv) Penyediaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit; dan (v) Pembangunan/Renovasi Balai Penyuluhan KB tingkat Kecamatan; (vi) Penyediaan kendaraan pendistribusian alokon/pengangkut akseptor

Sasaran : (i) Tersedianya 80 kendaraan bermotor roda dua; (ii) Tersedianya 49 Mobil Unit Pelayanan KB Keliling; (iii) Tersedianya 15 Mobil Unit Penerangan KB; (iv) Tersedianya kendaraan untuk pendistribusian alokon dari Kab/kota ke Puskesmas/Klinik atau Kendaraan pengangkut akseptor menuju tempat pelayanan KB; (v) Tersedianya IUD Kit, *implant kit*, dan 2.000 unit *obgyn bed* bagi klinik KB; (vi) Tersedianya 16.000 set BKB Kit bagi kelompok BKB di tingkat desa/kelurahan; (vii) Tersedianya *public address* bagi PPLKB/Ka. UPT; (viii) Tersedianya 15.000 set KIE Kit bagi PKB/PLKB; (ix) Terbangunnya 65 gudang alat dan obat kontrasepsi di kab/kota; (x) Terlaksananya pembangunan Balai Penyuluhan KB di tingkat kecamatan sebanyak 2.000 unit; (xi) Tersedianya 2.000 set Sarana Kerja bagi PKB/PLKB dan PPLKB/Ka.UPT; dan (xii) Tersedianya 4.988 *personal computer* di kecamatan.

5. DAK INFRASTRUKTUR AIR MINUM

Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Air Minum adalah: (i) Meningkatkan cakupan pelayanan air minum layak dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyediaan air minum di kawasan perkotaan, perdesaan, termasuk daerah tertinggal; (ii) Mendukung kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; dan (iii) Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang Penanggulangan Kemiskinan.

Lingkup kegiatan : (i) Perluasan dan peningkatan jaringan distribusi sampai dengan retikulasi termasuk sambungan rumah (SR) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang belum terlayani air minum, dengan sasaran adalah Kabupaten/Kota yang memiliki *idle capacity* yang memadai untuk dibangun SR perpipaan; (ii) Pemasangan Sistem Meter Komunal (master meter) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) khususnya yang bermukim di kawasan kumuh perkotaan dengan sasaran adalah Kabupaten/Kota yang memiliki *idle capacity* yang memadai untuk dibangun Sistem Meter Komunal termasuk SR perpipaan; dan (iii) Pembangunan SPAM Perdesaan dengan sasaran adalah desa-desa dengan sumber air baku yang relatif mudah. Ketiga jenis kegiatan adalah kewenangan daerah sesuai PP 38 Tahun 2007 dan ditujukan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimum (SPM) pelayanan air minum dalam rangka pemenuhan target MDGs 2015, RPJMN 2010-2014, dan Direktif Presiden Klaster IV. Kegiatan pemasangan jaringan distribusi sampai dengan retikulasi termasuk SR perpipaan dan Sistem Meter Komunal merupakan kegiatan yang akan berkontribusi terhadap pencapaian target RPJMN 2010-2014 yaitu pencapaian akses air minum perpipaan layak sebesar 32 persen pada akhir tahun 2014. Sementara kegiatan peningkatan pelayanan air minum di daerah rawan air, dan/atau terpencil, dan/atau tertinggal merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target

RPJMN 2010-2014 yaitu pencapaian akses air minum perpipaan sebesar 38 persen pada akhir Tahun 2014.

Sasaran : (i) Meningkatkan akses pelayanan air minum perpipaan melalui pembangunan SPAM sederhana di 2.641 desa; (ii) penambahan jaringan retikulasi berikut SR sebanyak 300.000 unit; dan (iii) penyediaan SR berbasis master meter sebanyak 500 MM.

6. DAK INFRASTRUKTUR SANITASI

Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi adalah: (i) Percepatan pemenuhan pelayanan akses aman sanitasi melalui penyediaan prasarana sarana yang mencakup pengelolaan air limbah dan persampahan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penyediaan sanitasi; (ii) Mendukung kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; dan (iii) Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 3 di Bidang Kesehatan dan Prioritas Nasional 4 di Bidang Penanggulangan Kemiskinan.

Lingkup Kegiatan : (i) Sub-bidang air limbah: pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana air limbah skala lingkungan/kawasan atau skala kota; dan (ii) Sub-bidang persampahan: pembangunan dan pengembangan fasilitas pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan sampah kota.

Sasaran : Meningkatkan pelayanan sanitasi melalui pembangunan sarana pengolah air limbah dan persampahan bagi 500.000 jiwa penduduk.

7. DAK INFRASTRUKTUR IRIGASI

Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Irigasi adalah: (i) Mengembalikan fungsi dan meningkatkan kinerja layanan jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mendukung sasaran Prioritas Nasional di Bidang Ketahanan Pangan yaitu Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Surplus Beras 10 Juta Ton Pada Tahun 2014; (ii) Penanganan Jaringan Irigasi melalui alokasi DAK diarahkan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Provinsi/Kabupaten/Kota; dan (iii) Mendukung kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

Lingkup kegiatan : Dalam rangka mendukung kebijakan Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Surplus Beras 10 Juta Ton, pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi TA 2014 difokuskan kepada REHABILITASI jaringan irigasi/rawa kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dalam kondisi rusak. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Irigasi TA 2014 untuk kegiatan perbaikan jaringan irigasi/rawa existing yang dalam kondisi rusak. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Bidang Irigasi tidak dapat digunakan untuk membiayai Operasi dan Pemeliharaan (OP). Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penerima DAK Bidang Irigasi TA 2014 bertanggung jawab dalam pelaksanaan OP Irigasi dalam kewenangannya sehingga harus dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing.

Sasaran : perbaikan dan peningkatan kinerja layanan irigasi pada ± 490 ribu ha daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

8. DAK INFRASTRUKTUR JALAN

Arah kebijakan DAK Bidang Infrastruktur Jalan adalah: (i) Mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelayanan prasarana jalan Provinsi, Kabupaten dan Kota yang menghubungkan *outlet* pelabuhan dan bandara dalam memperlancar distribusi penumpang, barang jasa, serta hasil produksi yang mendukung sektor pertanian, industri, dan pariwisata sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional; (ii) Menunjang aksesibilitas dan keterhubungan wilayah (*domestic connectivity*) dalam mendukung pengembangan koridor ekonomi wilayah/kawasan (MP3EI); (iii) Penanganan Jalan dan Jembatan melalui alokasi DAK diarahkan untuk pemeliharaan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, dan Jalan Kota dan pembangunan Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan Kota secara selektif; (iv) Mendukung kebijakan keberpihakan (*affirmative policy*) untuk pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan; dan (v) Mendukung pemenuhan Sasaran Prioritas RPJMN 2010-2014 khususnya Prioritas Nasional 6 di Bidang Infrastruktur.

Lingkup kegiatan : (i) Jalan: pemeliharaan berkala, rehabilitasi, peningkatan struktur dan pembangunan Jalan Provinsi/Kabupaten/Kota; (ii) Jembatan: pemeliharaan, rehabilitasi, penggantian dan pembangunan di Jalan Provinsi/ Kabupaten/ Kota; (iii) Jalan Provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan Ibukota Provinsi dengan Ibukota Kabupaten/Kota, atau antar Ibukota Kabupaten/Kota, dan Jalan Strategis; (iv) Jalan Kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer selain Jalan Nasional dan Jalan Provinsi yang menghubungkan Ibukota antar Kabupaten dengan Ibukota Kecamatan, antar Ibukota Kecamatan, Ibukota Kabupaten dengan Pusat Kegiatan Lokal, antar Pusat Kegiatan Lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam Wilayah Kabupaten, dan Jalan Strategis Kabupaten; dan (v) Jalan Kota merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota.

Sasaran : (i) Penambahan kondisi mantap Jalan Provinsi sepanjang ± 2.468 km sehingga Jalan Provinsi dengan kondisi mantap meningkat dari 54 persen menjadi 62,5 persen; dan (ii) Penambahan kondisi mantap Jalan Kabupaten/Kota sepanjang ± 21.313 km

sehingga Jalan Kabupaten/Kota dengan kondisi mantap meningkat dari 54,5 persen menjadi 60,5 persen.

9. DAK KESELAMATAN TRANSPORTASI DARAT

Arah kebijakan DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat adalah meningkatkan kualitas pelayanan, terutama keselamatan bagi pengguna transportasi jalan di Provinsi, Kabupaten/Kota guna menurunkan tingkat fatalitas (jumlah korban meninggal) akibat kecelakaan lalu lintas secara bertahap sebesar 20 persen pada akhir tahun 2014 dan menurunkan jumlah korban luka-luka sebesar 50 persen hingga akhir tahun 2014.

Lingkup kegiatan : Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan transportasi darat.

Sasaran : menekan laju angka kematian akibat kecelakaan lalu lintas sebesar 5 persen per tahun dan penurunan tingkat fatalitas (korban meninggal per 10.000 kendaraan).

10. DAK PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Arah kebijakan DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah meningkatkan penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman dalam rangka menstimulan pembangunan perumahan dan permukiman bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten/Kota.

Lingkup kegiatan : (i) Prasarana dan sarana air minum; (ii) Sarana air limbah komunal; (iii) Tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST); (iv) Jaringan distribusi listrik; dan (v) Penerangan jalan umum.

Sasaran : Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mendukung penyediaan hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah sejumlah 116.950 unit rumah.

11. DAK TRANSPORTASI PERDESAAN

Arah kebijakan DAK Bidang Transportasi Perdesaan adalah: (i) Meningkatkan pelayanan mobilitas penduduk dan sumberdaya lainnya yang dapat mendukung terjadinya pertumbuhan ekonomi daerah, dan diharapkan dapat menghilangkan keterisolasian dan memberi stimulan ke arah perkembangan di semua bidang kehidupan sosial dan ekonomi; (ii) Pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan pada wilayah pusat-pusat pertumbuhan kawasan yang memiliki sektor basis potensial seperti KSCT, KAPET, KSPN dan KPI yang meliputi sektor pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan perdagangan; (iii) Untuk keberlanjutan atas pemanfaatan kegiatan, pemerintah daerah melalui dinas terkait harus menyatakan

komitmennya untuk membiayai operasional dan pemeliharaan dari lingkup kegiatan yang ada, sesuai masa umur ekonomis.

Lingkup kegiatan : (i) Jalan Poros Wilayah: Pembangunan dan peningkatan jalan poros atau jalan antar wilayah yang menghubungkan pusat produksi dengan sentra pemasaran di pusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT, KSPN dan KPI; dan (ii) Angkutan Wilayah: Pengadaan sarana angkutan penumpang dan barang yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, seperti mini bus, *pick up*, *dump truck*, kapal kayu/kapal mesin tempel/*fiberglass* dan bus potong.

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas masyarakat di daerah terhadap pelayanan konektivitas wilayah dari sentra-sentra produksi menuju outlet-outlet pemasaran di tingkat lokal, nasional, internasional, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat-pusat pertumbuhan seperti wilayah KSCT, KSPN dan KPI.

12. DAK ENERGI PERDESAAN

Arah kebijakan DAK Bidang Energi Perdesaan adalah diversifikasi energi. Secara khusus, DAK energi perdesaan akan memanfaatkan sumber energi terbarukan setempat untuk meningkatkan akses masyarakat perdesaan terhadap energi modern.

Lingkup kegiatan: (i) Pembangunan PLTMH; (ii) Pembangunan PLTS terpusat dan/atau PLTS tersebar; (iii) Pembangunan instalasi biogas skala rumah tangga; (iv) Pemeliharaan/rehabilitasi PLTS dan PLTMH yang rusak; dan (v) Perluasan/peningkatan pelayanan tenaga listrik dari PLTMH *off-grid*.

Sasaran: (i) Terwujudnya pembangkit listrik dari mikrohidro sebesar 11,94 MW; (ii) Terwujudnya pembangkit listrik dari tenaga surya sebesar 24,78 MWp; dan (iii) Terwujudnya biogas dengan kapasitas sebesar 17.000 m³.

13. DAK PERTANIAN

Arah kebijakan DAK Bidang Pertanian adalah diarahkan untuk mendukung pencapaian target surplus beras 10 juta ton tahun 2014, dan peningkatan produksi komoditas pertanian strategis lainnya, dengan melakukan refocusing kegiatan DAK Bidang Pertanian 2014 pada pembangunan/perbaikan prasarana dan sarana dasar pertanian di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Lingkup kegiatan : Ruang lingkup kegiatan DAK Bidang Pertanian Provinsi (i) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi UPTD Perbenihan dan sarana pendukungnya; (ii) Pembangunan/ Rehabilitasi/Renovasi UPTD Proteksi Tanaman dan sarana pendukungnya; dan (iii) Pembangunan /Rehabilitasi/ Renovasi UPTD Perbibitan dan Laboratorium Kesehatan Hewan dan sarana pendukungnya. Ruang lingkup kegiatan bidang Pertanian Kabupaten/Kota meliputi: (i) Pengembangan Prasarana dan Sarana Air Mendukung Tanaman Pangan; (a) Irigasi Air Tanah; (b) Irigasi Air Permukaan; (c) Embung;

(d) Dam Parit; (ii) Pengembangan Prasarana dan Sarana Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani dan Jalan Produksi); (iii) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Penyediaan Sarana Penyuluhan Pertanian; (iv) Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan/atau sarana pendukungnya; (v) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Renovasi Balai Perbenihan dan Perbibitan serta Sarana Pendukungnya; dan (vi) Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat Penampungan Susu dan Rumah Potong Unggas serta Sarana Pendukungnya.

Sasaran: Sasaran DAK Bidang pertanian di Provinsi yaitu pembangunan/rehabilitasi/renovasi sarana dan prasarana perbenihan, proteksi tanaman dan perbibitan serta laboratorium kesehatan hewan. Sasaran DAK Bidang Pertanian di Kabupaten/Kota yaitu Pengembangan prasarana dan sarana air dan lahan, Pembangunan/rehabilitasi/renovasi balai penyuluhan pertanian di kecamatan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat, pembangunan/rehabilitasi/renovasi sarana prasarana perbenihan dan perbibitan serta pembangunan/rehabilitasi/renovasi tempat penampungan susu dan rumah potong unggas.

14. DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Arah kebijakan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan adalah meningkatkan sarana dan prasarana produksi, pengolahan, mutu, pemasaran, pengawasan, penyuluhan, data statistik dalam rangka mendukung industrialisasi kelautan dan perikanan dan minapolitan, serta penyediaan sarana prasarana terkait dengan pengembangan kelautan dan perikanan di pulau-pulau kecil.

Lingkup kegiatan : DAK KP PROVINSI: Penyediaan kapal perikanan > 30 GT; DAK KP KAB/KOTA:(i) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap; (ii) Pengembangan sarana dan prasarana perikanan budidaya; (iii) Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan; (iv) Pengembangan sarana dan prasarana dasar di pesisir dan pulau-pulau kecil; (v) Pengembangan sarana dan prasarana pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan; (vi) Pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan perikanan; dan (vii) Pengembangan sarana penyediaan data statistik kelautan dan perikanan.

Sasaran :(i) Berkembangnya kegiatan industrialisasi KP dan kawasan Minapolitan; (ii) Tertata dan berfungsinya saluran irigasi tambak tersier di kab/kota secara optimal; (iii) Meningkatnya fasilitas dan beroperasinya balai benih ikan lokal dan balai benih udang lokal, serta meningkatnya kemampuan unit pembenihan rakyat (UPR) dalam menghasilkan benih ikan bermutu sesuai standar SNI; (iv) Berkembang dan berfungsinya PPI yang telah dibangun; (v) Tersedianya armada dan alat penangkapan ikan yang diijinkan dan ramah lingkungan; (vi) Beroperasinya pasar ikan tradisional/depo pemasaran, serta meningkatnya penggunaan sarana pengangkutan ikan dalam rangka pelaksanaan *cold chain system*; (vii) Meningkatnya prasarana pos pengawasan, serta sarana

pengawasan untuk Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas); (viii) Meningkatnya sarana dan prasarana dasar perikanan di pulau-pulau kecil serta Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD); (ix) Tersedia dan beroperasinya pos dan sarana penyuluhan perikanan; dan (x) Tersedia dan beroperasinya sarana pengolahan data dan statistik perikanan di kabupaten/kota.

15. DAK KEHUTANAN

Arah kebijakan DAK Bidang Kehutanan adalah: (i) Peningkatan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP); (ii) Peningkatan Daya Dukung DAS; (iii) Perlindungan Hutan dan Kawasan Esensial; (iv) Pemberdayaan masyarakat.

Lingkup kegiatan : (i) Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi; (ii) Rehabilitasi Hutan dan Lahan; (iii) Pemeliharaan dan pengamanan tanaman hasil rehabilitasi tahun sebelumnya (T-2) dan T-1); (iv) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana pengamanan hutan; dan (v) Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan.

Sasaran : (i) Kabupaten/Kota yang telah membentuk kelembagaan KPH; (ii) Terbangun dan beroperasinya KPHL dan KPHP di seluruh Kabupaten yang mendapatkan alokasi DAK Kehutanan; (iii) Terehabilitasinya lahan kritis di dalam kawasan hutan seluas 120.000 Ha, khususnya: (a) Wilayah KPH yang sudah memiliki kelembagaan dan terdegradasi; (b) Kawasan hutan lindung yang terdegradasi; (c) Kawasan hutan produksi yang tidak dibebani hak; (d) Hutan kota; (e) Hutan mangrove yang rusak dan hutan pantai; (iv) Terlindunginya kawasan ekosistem esensial dari kerusakan; (v) Terwujudnya kegiatan pendampingan pembangunan kehutanan di kabupaten penerima DAK bidang Kehutanan.

16. DAK LINGKUNGAN HIDUP

Arah Kebijakan DAK Bidang Lingkungan Hidup adalah: (i) Mendorong pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Lingkungan Hidup daerah; (ii) Mendorong penguatan kapasitas kelembagaan/institusi pengelola lingkungan hidup di daerah, dengan prioritas meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan hidup yang difokuskan pada kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan; (iii) Menunjang percepatan penanganan masalah lingkungan hidup di daerah; dan (iv) Mendukung kegiatan yang terkait dengan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Lingkup kegiatan : (i) Pengadaan peralatan laboratorium permanen untuk uji kualitas air, udara emisi sumber bergerak, udara emisi sumber tidak bergerak, udara ambient, dan tanah; (ii) Pengadaan peralatan *portable* untuk uji kualitas air, udara emisi, dan tanah; (iii) Pengadaan kendaraan operasional roda empat untuk pemantauan dan pengawasan lingkungan; (iv) Pengadaan sarana dan prasarana pengolahan air limbah untuk: (a). IPAL UKM; (b). IPAL Komunal; (c).

IPAL Puskesmas; (d). Pengolah sampah dengan prinsip 3R; (v) Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dengan prinsip 3 R (*reuse, recycle, recovery*) di tempat penampungan sampah sementara, fasilitas umum, dan fasilitas sosial, serta sekolah-sekolah; (vi) Pembuatan Taman Kehati/Taman Hijau/Ruang Terbuka Hijau; (vii) Pengadaan unit pengolah limbah organik menjadi biogas; (viii) Pembuatan Sumur resapan; (ix) Pembuatan lubang resapan biopori; (x) Pembuatan embung (kolam tampungan air); (xi) Penanaman pohon di sekitar mata air, sempadan sungai, dan danau; (xii) Pengadaan pengolah gulma (tanaman pengganggu) dan pembuatan media tanam (bitumen); dan (xiii) Pengadaan penangkap endapan (*sediment trap*) vegetatif; dan (xiv) Pengadaan pencegah longsor ramah lingkungan.

Sasaran: (i) Tersedianya data kualitas lingkungan hidup sebagai bagian dari kegiatan pemantauan lingkungan hidup; (ii) Makin kuatnya peran lembaga/institusi lingkungan hidup daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan ketersediaan sarana dan prasarana fisik lingkungan hidup; (iii) Mendukung penurunan beban pencemaran lingkungan, penurunan polusi 50 persen, serta mendukung penurunan emisi GRK; (iv) Berkembangnya teknologi tepat guna untuk pengelolaan lingkungan hidup; dan (v) Meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan dalam pengelolaan lingkungan hidup (Adiwiyata, 3R, dll).

17. DAK SARANA PERDAGANGAN

Arah Kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Perdagangan adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana perdagangan untuk meningkatkan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka mendukung Sistem Logistik Nasional pengamanan perdagangan dalam negeri, dan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Hal tersebut dicapai dengan: (i) Memantapkan ketersediaan dan kondisi sarana distribusi untuk mendukung kelancaran dan ketersediaan barang (khususnya bahan pokok) sehingga daya beli dan kesejahteraan masyarakat dapat terjaga, terutama di daerah yang memiliki potensi dan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara reguler, serta daerah dengan kondisi sarana distribusi yang tidak memadai secara kuantitas dan kualitas; (ii) Meningkatkan kuantitas dan kualitas peralatan, sarana dan fasilitas penunjang kegiatan tertib ukur sebagai upaya perlindungan konsumen, terutama di daerah yang memiliki potensi alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang cukup besar yang belum dapat ditangani serta daerah dengan kondisi peralatan, sarana dan fasilitas kemetrolagian yang minim; dan (iii) Memperluas sarana penyimpanan komoditas bagi petani dan pengusaha kecil dan menengah sebagai upaya mendapatkan harga terbaik dan menciptakan alternatif sumber pembiayaan untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama di daerah sentra komoditas yang termasuk dalam Sistem Resi Gudang (SRG).

Lingkup kegiatan : (i) Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi perdagangan (pasar); (ii) Pembangunan dan peningkatan

sarana metrologi legal, melalui: (a) penyediaan sarana metrologi legal yang meliputi pembangunan gedung Laboratorium Metrologi Legal dan pengadaan peralatan pelayanan tera/tera ulang (meliputi peralatan standar kerja, unit berjalan tera/tera ulang roda empat, unit fungsional pengawasan roda empat dan unit mobilitas roda dua), serta (b) pengembangan UPTD metrologi legal provinsi dan peremajaan peralatan standar acuan untuk mendukung ketertelusuran di tingkat Provinsi; dan (iii) Pembangunan gudang komoditas pertanian dan pengadaan fasilitas penunjang (termasuk: alat pengering, sarana transportasi, dan sarana komunikasi) dalam kerangka Sistem Resi Gudang.

Sasaran : (i) Pembangunan dan pengembangan Sarana Distribusi perdagangan (pasar tradisional): 350 unit pasar tradisional; (ii) Pembangunan dan peningkatan sarana metrologi legal yakni 15 UPTD Metrologi Legal kab/kota untuk pelayanan tera dan tera ulang serta 10 UPTD Metrologi Legal Provinsi untuk pengelolaan ketertelusuran standar; dan (iii) Pembangunan 20 unit gudang, serta penyediaan fasilitas, peralatan dan sarana penunjangnya dalam kerangka SRG.

18. DAK SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL

Arah kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal adalah mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014, yaitu “meningkatkan pengembangan perekonomian daerah dan kualitas sumber daya manusia yang didukung oleh kelembagaan dan ketersediaan infrastruktur perekonomian dan pelayanan dasar sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju.”

Lingkup Kegiatan : (i) Penyediaan sarana transportasi umum darat dan air untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal; (ii) Pembangunan/rehabilitasi dermaga/tambatan perahu; (iii) Pembangunan jalan/ peningkatan kondisi permukaan jalan non status strategis, yang menghubungkan antar desa serta menghubungkan sentra produksi dengan pusat pelayanan distribusi dan membuka keterisolasian wilayah, yang bukan merupakan status jalan Kabupaten dan Provinsi; dan (iv) Pembangunan/rehabilitasi jembatan desa.

Sasaran : Sasaran lokasi daerah tertinggal yang memperoleh DAK SPDT tahun 2014 diorientasikan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal menjadi non tertinggal, sehingga sasaran lokasi yang memperoleh DAK SPDT tahun 2014 yaitu 183 kabupaten tertinggal. Sasaran output DAK SPDT tahun 2014 adalah: penyediaan sarana transportasi darat 2.286 unit, sarana transportasi air 406 unit, pembangunan dan rehabilitasi jalan desa di 1.007 desa, tambatan perahu di 173 desa, dan pembangunan jembatan desa di 330 desa.

19. DAK SARANA DAN PRASARANA KAWASAN PERBATASAN

Arah kebijakan DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan adalah mendukung kebijakan pembangunan kawasan perbatasan yang diamanatkan dalam RKP 2014 yaitu untuk mengatasi keterisolasian wilayah yang dapat menghambat upaya pengamanan batas wilayah, pelayanan sosial dasar, serta pengembangan kegiatan ekonomi lokal secara berkelanjutan di kecamatan-kecamatan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Keputusan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan.

Lingkup kegiatan : (i) Pembangunan/peningkatan kondisi permukaan jalan non-status dan/atau jembatan yang menghubungkan kecamatan perbatasan prioritas dengan pusat kegiatan di sekitarnya; (ii) Pembangunan dan rehabilitasi dermaga kecil atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga kecil atau tambatan perahu di wilayah pesisir yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan; (iii) Penyediaan moda transportasi perairan/kepulauan untuk meningkatkan arus orang, barang dan jasa; (iv) Penyediaan asrama sekolah (SLTP, SLTA) dan rumah dinas guru yang dibangun di kecamatan perbatasan yang tidak ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sasaran: Sasaran lokasi kawasan perbatasan yang memperoleh DAK SPKP tahun 2014 yang diprioritaskan untuk mengatasi keterisolasian wilayah dan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung aktivitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat kawasan perbatasan di 33 Kabupaten yang terdiri dari 104 kecamatan Lokpri sebagai lanjutan pelaksanaan kegiatan Tahun 2013. Tahun 2014 diusulkan untuk memperluas jangkauan kegiatan yaitu penambahan jumlah jarak (km) jalan non status/jembatan termasuk peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan desa/kecamatan dengan pusat kegiatan, serta penambahan komponen penyediaan asrama sekolah, rumah dinas guru.

6.2.2 Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus diberikan kepada empat provinsi, yakni Provinsi Papua, provinsi Papua Barat, provinsi Aceh dan provinsi D.I.Yogyakarta. Pengalokasian Dana Otsus berlandaskan beberapa regulasi, yakni UU No.35 Tahun 2008 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi undang - undang, UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan D.I.Yogyakarta.

Arah Kebijakan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus.

Salah satu pendanaan dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, provinsi Papua Barat, dan Provinsi Aceh

adalah Dana Otonomi Khusus. Dana Otonomi Khusus setara dengan 2 persen dari total DAU nasional, yang tujuan penggunaannya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Besar alokasi Dana Otsus Papua setara 2 (dua) persen dari total jumlah DAU Nasional. Untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dialokasikan pula Dana tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dana Otsus Aceh diberlakukan selama 20 tahun sejak tahun anggaran 2008, yakni setara 2 (dua) persen pagu DAU nasional untuk tahun pertama hingga tahun kelima belas dan 1 (satu) persen pagu DAU nasional untuk tahun keenam belas hingga kedua puluh. Dasar pemanfaatan Dana Otsus Aceh harus memperhatikan keseimbangan kemajuan pembangunan antarkabupaten/kota.

Dalam konteks otonomi khusus baik Provinsi Papua, Papua Barat ataupun Provinsi Aceh, masih mendapatkan tambahan pembagian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dari sektor Migas.

Dana Keistimewaan Provinsi D.I Yogyakarta merupakan dana yang disediakan dan dialokasikan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan urusan keistimewaan D.I Yogyakarta, berdasarkan pengajuan oleh Pemerintah daerah D.I Yogyakarta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kewenangan keistimewaan adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki D.I Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam UU tentang pemerintahan daerah. Pengaturan keistimewaan D.I Yogyakarta dilaksanakan berdasarkan asas pengakuan atas hak asal-usul, kerakyatan, demokrasi, ke-bhinneka-tunggal-ika-an, efektivitas pemerintahan, kepentingan nasional dan pendayagunaan kearifan lokal. Kewenangan dalam urusan keistimewaan yang dimaksud meliputi: (1) Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) Kelembagaan Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan, dan (5) Tata ruang.

Arah kebijakan dari Dana Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh, dan Dana Keistimewaan Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2014 adalah:

1. Meningkatkan kualitas rencana penggunaan dana Otonomi Khusus Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh, dan Dana Keistimewaan Provinsi D.I Yogyakarta;
2. Meningkatkan pengawasan atas penggunaan dana-dana tersebut, melalui monitoring, evaluasi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Melaksanakan evaluasi secara menyeluruh terhadap pemanfaatan Dana tersebut;

4. Mendorong pelaporan atas pelaksanaan kegiatan oleh Pemerintah Daerah
5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus provinsi Papua dan Papua Barat untuk mendanai pendidikan dan kesehatan;
6. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas Dana Otsus provinsi Aceh untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, penanggulangan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial dan kesehatan, sesuai dengan Pasal 183 UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
7. Mewujudkan ketepatan penggunaan Dana Keistimewaan D.I Yogyakarta dalam rangka mendukung efektivitas penyelenggaraan Keistimewaan D.I.Yogyakarta.

6.2.3 Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian merupakan komponen dana transfer ke daerah yang bertujuan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat, penguatan desentralisasi fiskal, membantu mendukung percepatan pembangunan di daerah, dan mendukung pencapaian atas target pembangunan nasional. Dana penyesuaian diberikan kepada daerah yang layak dengan memenuhi kriteria-kriteria teknis tertentu. Dana Penyesuaian TA 2014 terdiri dari:

a. Tunjangan Profesi Guru (TPG)

Tunjangan ini diberikan kepada Guru yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penghargaan atas profesionalitasnya, sesuai dengan kewenangannya.

b. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD diberikan kepada guru yang belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan dari guru PNSD.

c. Dana Insentif Daerah (DID)

DID untuk tahun 2014 yang dialokasikan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk melaksanakan fungsi kependidikan dengan mempertimbangkan kriteria daerah yang berprestasi yang telah memenuhi kriteria utama, kriteria kinerja, dan batas minimal kelulusan.

d. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

P2D2 bertujuan untuk meningkatkan monitoring, pelaporan, penguatan mekanisme verifikasi output DAK di bidang infrastruktur, serta penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaksana DAK di daerah. Manfaat yang ingin diperoleh dalam P2D2 adalah terlaksananya peningkatan akuntabilitas dan pelaporan DAK Bidang infrastruktur meliputi pelaporan keuangan dan teknis, serta

tersusunnya mekanisme monitoring dan verifikasi output yang efektif dan efisien.

Dana P2D2 itu sendiri merupakan bentuk penghargaan (insentif) kepada daerah percontohan atas keberhasilannya dalam melaksanakan kegiatan infrastruktur yang didanai melalui DAK dengan hasil (*output*) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (*eligible*). Adapun jumlah alokasi insentif yang akan diberikan adalah sebesar maksimal 10 persen (sepuluh persen) dari *eligible output* yang ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi output yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adapun kriteria *eligible output* adalah sebagai berikut:

1. Realisasi pembangunan fisik proyek pada Sertifikat Penyelesaian Konstruksi sesuai dengan desain teknis dan spesifikasi teknis dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan DAK Bidang Infrastruktur yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
2. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 (berserta perubahannya);
3. Pelaksanaan pembangunan fisik proyek sesuai dengan Petunjuk Teknis terkait Pengamanan Lingkungan dan Sosial (*Environment and Social Safeguards*) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum;
4. Tercantum pada daftar subproyek yang disampaikan oleh pemerintah daerah percontohan kepada BPKP untuk kemudian diverifikasi;
5. Nilai subproyek tidak melebihi \$400.000 atau nilai yang setara;
6. Dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang telah menyampaikan *Commitment Letter*.

e. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Sesuai dengan PP No.38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, penyelenggaraan pendidikan dasar merupakan urusan daerah. Oleh sebab itu, pada tahun 2014 dana BOS akan tetap dialokasikan sebagai dana penyesuaian. Dana BOS dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dasar sebagai urusan daerah melalui penyaluran BOS ke RKUD Provinsi, untuk selanjutnya diteruskan ke sekolah dengan mekanisme hibah.

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar, dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pemberian dana BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan beban biaya bagi siswa yang lain sehingga memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun. Dana BOS merupakan stimulus bagi daerah dan bukan pengganti (substitusi) dari kewajiban daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan. Sehubungan dengan itu pemberian dana BOS akan diikuti dengan

perkuatan monitoring dan evaluasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan sekaligus memastikan bahwa daerah tidak mengurangi alokasi anggaran untuk penyelenggaraan BOS Daerah (BOSDA). BOS akan dikelola oleh Tim Pusat, Tim Provinsi, dan Tim Kabupaten/Kota yang berkoordinasi secara teratur untuk menjamin agar pelaksanaan BOS mulai dari perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, pelaporan, monitoring dan evaluasi berjalan lancar dan dapat meminimalkan permasalahan.

f. Dana Darurat

Sesuai dengan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Darurat merupakan salah satu mekanisme pendanaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hal tersebut, PP Nomor 44 tahun 2012 tentang Dana Darurat mengamanatkan bahwa Dana Darurat adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional dan/atau peristiwa yang luar biasa. Pengelolaan Dana Darurat diatur dalam PMK Nomor 81/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Darurat. Dana darurat dialokasikan oleh Pemerintah kepada daerah yang mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa dan tidak dapat ditanggulangi dengan APBD, hanya digunakan untuk keperluan mendesak dan merupakan pendapatan daerah pada bagian Lain- Lain Pendapatan. Kondisi yang dapat digolongkan sebagai Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa tersebut ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Batas waktu rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana juga ditetapkan oleh Presiden. Dana darurat digunakan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada tahap pascabencana yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Permintaan atas Dana Darurat dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah yang mengalami Bencana Nasional dan/atau Peristiwa Luar Biasa, selama masih dalam tahap pascabencana.

Arah kebijakan Dana Darurat tahun 2014 adalah:

1. Melaksanakan pengelolaan Dana Darurat secara tertib taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek keadilan dan kepatutan;
2. Meningkatkan sinkronisasi dengan kegiatan yang telah didanai dari sumber lainnya dalam APBD untuk menghindari tumpang-tindih pendanaan;
3. Mendorong perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan berlaku.

BAB 7

PENUTUP



BAB 7 PENUTUP

7.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Pelaksanaan kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing lembaga serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKP Tahun 2014 merupakan acuan bagi Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, dan Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKP 2014 sebagai berikut:

1. Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Pemerintah Daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program RKP Tahun 2014 dengan sebaik-baiknya;
2. RKP Tahun 2014 menjadi acuan dan pedoman bagi Lembaga Negara, Kementerian, dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen dalam menyusun kebijakan publik, baik yang berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2014. Dalam proses penyusunan RKP 2014 telah diidentifikasi berbagai kegiatan prioritas yang belum mendapatkan pendanaan dari Pagu Indikatif 2014. Oleh karena itu terlampir disampaikan Daftar Kebutuhan Prioritas Kementerian/Lembaga yang dapat dipergunakan sebagai rujukan jika terdapat ruang fiskal yang baru dalam penyusunan Pagu Anggaran dan Alokasi Anggaran 2014.
3. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga), setelah menerima pagu sementara Tahun 2014, perlu menyesuaikan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL) menjadi Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/lembaga (RKA-KL) sebagai berikut:

- a. Uraian penggunaan APBN Tahun Anggaran 2014, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), atau Peraturan Menteri/Kepala Lembaga;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBN Tahun Anggaran 2014, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah pusat, tugas dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau sudah menjadi kewenangan daerah;
 - d. Pemerintah wajib menyampaikan rancangan APBN Tahun Anggaran 2014 dari masing-masing lembaga negara, departemen, dan lembaga pemerintah non-departemen, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah pusat, yang dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi, maupun yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan.
4. Bagi Pemerintah Daerah (provinsi/kabupaten/kota), RKP Tahun 2014 menjadi acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan publik, baik berupa kerangka regulasi maupun kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing instansi daerah perlu menyempurnakan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2014 sebagai berikut:
- a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota;
 - b. Uraian rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2014, yang merupakan kegiatan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/daerah, yang berupa kerangka investasi pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
 - c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir (b) di atas, perlu menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah daerah, tugas dekonsentrasi yang diterima

- pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten/kota dari pemerintah pusat;
- d. Pemerintah daerah wajib menyampaikan rancangan APBD Tahun Anggaran 2014 dari masing-masing instansi daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan daerah;
5. Pemerintah Pusat, di bawah koordinasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dengan mendapatkan masukan dari seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, merumuskan matriks rencana tindak pada setiap bidang pembangunan (matriks rencana tindak menjadi lampiran dari setiap bidang pembangunan) menjadi dokumen RKP Tahun 2014;
 6. Pelaksanaan rencana tindak yang tertuang dalam RKP ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (i) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (ii) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (iii) pengarusutamaan gender;
 7. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, masyarakat luas dan dunia usaha dapat berperanserta dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peranserta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperanserta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.

7.2 TINDAK LANJUT

Pada akhir tahun anggaran 2014, setiap instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan, kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBN/APBD dan peraturan-peraturan lainnya.

Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Departemen dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Presiden/Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



LAMPIRAN 1 Matriks Buku I RKP Tahun 2014

| | |
|---------------------------|--|
| PRIORITAS 1 | REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA |
| Tema Prioritas | Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada yang berwibawa, dan transparan. Peningkatan kualitas pelayanan yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan di daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik |
| Penanggungjawab | Wakil Presiden |
| Bekerjasama dengan | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; Menteri Sekretaris Negara; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Perindustrian; Menteri Koperasi dan UKM; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Keuangan; Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Dalam Negeri; Menteri Riset dan Teknologi; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Sekretaris Kabinet |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|---|---|--|---|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I. | STRUKTUR Konsolidasi dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga yang menangani aparatur yaitu Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada 2010; Restrukturisasi lembaga pemerintah lainnya, terutama bidang penguatan keberdayaan UMKM, pengelolaan, pemanfaatan sumber daya kelautan, restrukturisasi BUMN, hingga pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambatlambatnya 2014: | | | | | |
| I.1 | Pengembangan kebijakan koordinasi dan evaluasi program kelembagaan | Terlaksananya penyusunan kebijakan dan penataan kelembagaan instansi pemerintah | Persentase K/L (LNS dan instansi pemerintah yang menerapkan PPK-BLU) yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya Jumlah instansi pemerintah (K/L/LNS) yang telah dievaluasi/diaudit dan telah sesuai jenis dan sifat organisasi, fungsi, analisis dan beban kerja, serta tidak <i>overlapping</i> Jumlah naskah akademis RUU tentang organisasi/kelembagaan pemerintah | 100% 18 Kementerian, 17 LPNK, 5 LNS 1 RUU | 3,1 | Kemen PAN dan RB |
| I.2. | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Polhukam | Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang | Persentase K/L (Kementerian Negara, LPNK, Sekretariat Lembaga Negara) bidang polhukam yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya | 100% | 1,7 | Kemen PAN dan RB |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|---|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | polhukhankam | Persentase penyelesaian usulan penataan K/L (Kementerian Negara, LPNK, Sekretariat Lembaga Negara) bidang polhukkam yang ditindaklanjuti | 100% | | |
| | | | Jumlah K/L bidang polhukkam yang telah melakukan pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional | 2 K/L | | |
| I.3. | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian I | Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah lainnya, bidang perekonomian I | Persentase K/L (Kementerian Negara, LPNK) bidang Perekonomian I yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya | 100% | 2,0 | Kemen PAN dan RB |
| | | | Persentase Perwakilan RI yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya | 100% | | |
| | | | Jumlah K/L bidang perekonomian I yang telah melakukan pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional | 2 K/L | | |
| I.4. | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Perekonomian II | Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah bidang perekonomian II | Persentase K/L (Kementerian Negara, LPNK) bidang Perekonomian II yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya | 100% | 1,0 | Kemen PAN dan RB |
| | | | Jumlah K/L bidang perekonomian II yang telah melakukan pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional | 2 K/L | | |
| I.5. | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Evaluasi Kelembagaan Kesra | Terlaksananya penataan kelembagaan instansi pemerintah bidang kesra | Persentase K/L (Kementerian Negara, LPNK) bidang kesejahteraan rakyat yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya | 100% | 1,4 | Kemen PAN dan RB |
| | | | Jumlah K/L bidang kesejahteraan rakyat yang telah melakukan pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional | 2 K/L | | |
| | | | Persentase Pemda yang telah tertata organisasi dan tata kerjanya | 100% | | |
| I.6. | Pelaksanaan perumusan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi | Meningkatnya koordinasi penyusunan kebijakan PAN dan RB, serta koordinasi reformasi birokrasi nasional | Persentase K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi sesuai kebijakan RB Nasional | 100% | 9,0 | Kemen PAN dan RB |
| | | | Tingkat kualitas pelaksanaan RB yg terukur sesuai dg kebijakan RB Nasional | 95% | | |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|--|--|--|---|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Pelaksanaan tugas Tim Quality Assurance | 1 Laporan | | |
| | | | Pelaksanaan tugas Tim Independen | 1 laporan | | |
| | | | Sistem Data dan Informasi Capaian Kinerja Bidang PAN dan RB (Indeks PANRB) | 1 Sistem dan Baseline Indeks PANRB | | |
| I.7. | Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat | Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kebijakan PAN dan RB di pusat | Jumlah K/L yang mengikuti Workshop/Pendampingan/ Coaching Clinic Forum | 76 K/L | 3,0 | Kemen PAN dan RB |
| | | | Persentase K/L yang mengikuti FORTEKPAN | 76 K/L | | |
| I.8. | Koordinasi pelaksanaan kebijakan pendayagunaan aparatur dan reformasi birokrasi daerah | Meningkatnya koordinasi pelaksanaan kebijakan PAN dan RB di daerah | Persentase Pemda yang melaksanakan RB sesuai dengan kebijakan RB Nasional | 100% Prov, 50% Kab/Kota | 4,5 | Kemen PAN dan RB |
| | | | Persentase pemerintah daerah yang mengikuti Workshop/Pendampingan/ Coaching Clinic Forum | 30% Pemda | | |
| I.9. | Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi pusat | Meningkatnya efektivitas monitoring dan evaluasi kebijakan PAN dan RB di pusat | Persentase K/L yang dievaluasi pelaksanaan RB | 100% | 3,0 | Kemen PAN dan RB |
| | | | Jumlah peserta workshop penerapan PMPRB di pusat | 100 orang | | |
| | | | Jumlah assessor PMPRB K/L | 100 orang | | |
| | | | Persentase K/L yang memiliki nilai PMPRB baik | 40% | | |
| I.10. | Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Daerah | Meningkatnya efektivitas monitoring dan evaluasi kebijakan PAN dan RB di daerah | Persentase Pemda Pilot Project yang dievaluasi | 11 Prov. 11 Kab, 11 Kota | 4,5 | Kemen PAN dan RB |
| | | | Persentase Pemda Non Pilot Project yang dievaluasi (dari Pemda yang mengajukan usulan) | 11 Prov. 11 Kab, 11 Kota | | |
| | | | Jumlah assessor Pemda yang mengikuti peningkatan kapasitas PMPRB | 100 orang Prov/ 100 orang Kab/ 100 orang Kota | | |
| I.11. | Pembinaan dan Koordinasi Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP | Terpenuhinya peraturan perundang-undangan serta efektifitas dan kemitakhiran hukum laut, perjanjian, perijinan, organisasi dan tata laksana sesuai kebutuhan nasional dan global, serta pelayanan bantuan hukum yang akuntabel | Jumlah peraturan perundang-undangan bidang teknis KP dan lintas sektor yang diterbitkan (produk) | 56 | 15,0 | KKP |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|--|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| II. OTONOMI DAERAH | | | | | | |
| Penataan Otonomi Daerah melalui: 1) Penghentian/pembatasan pemekaran wilayah; 2) Peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana perimbangan daerah; dan 3) Penyempurnaan pelaksanaan pemilihan kepala daerah | | | | | | |
| II.1. | Penataan Daerah Otonom dan Otonomi Khusus dan DPOD | Terevaluasinya perkembangan daerah otonom baru | Persentase daerah otonom baru (<3tahun) yang dievaluasi | 100% | 2,5 | Kementerian Dalam Negeri |
| | | Terlaksananya seluruh mekanisme pengusulan pemekaran dan penggabungan daerah sesuai dengan PP No 78 tahun 2007, dalam rangka penghentian / pembatasan pemekaran wilayah/pembentukan daerah otonom baru | Persentase evaluasi setiap usulan pemekaran, penggabungan, dan penghapusan daerah sesuai dengan PP No 78 Tahun 2007. | 100% | | |
| | | | Jumlah daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan usulan pemerintah | 0 (nol) | | |
| II.2. | Pembinaan dan Fasilitasi Dana Perimbangan | Peningkatan efektifitas pemanfaatan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan (juklak) | Persentase daerah yang menerapkan DAK sesuai Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis (Juklak/Juknis) | 100% | 2,5 | Kementerian Dalam Negeri |
| | | Optimalisasi penyerapan DAK oleh daerah | Persentase daerah yang telah optimal (100%) menyerap DAK | 90% | | |
| | | Tersusunnya kebijakan/ regulasi di bidang fasilitasi dana perimbangan yang dapat diterapkan di daerah | Jumlah kebijakan/regulasi/pedoman di bidang dana perimbangan dan dana transfer lainnya | 1 Permendagri | | |
| II.3. | Pembinaan Anggaran Daerah | Peningkatan kualitas belanja daerah dalam APBD | Persentase daerah provinsi yang belanja langsungnya lebih besar dari belanja tidak langsung | 60% | 3,8 | Kementerian Dalam Negeri |
| | | | Persentase belanja modal terhadap total belanja daerah | 30% | | |
| | | Penetapan APBD secara tepat waktu | Persentase jumlah APBD yang disahkan tepat waktu. | 90% | | |
| II.4. | Pembinaan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan daerah | Provinsi dan kabupaten/ kota memiliki Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berstatus Wajar Tanpa | Persentase daerah Provinsi, yang ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian Status WTP | 100% | 3,8 | Kementerian Dalam Negeri |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|---|---|---|--|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | Pengecualian (WTP). Penetapan dan penyampaian Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu | Persentase penetapan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (provinsi) yang disahkan secara tepat waktu. | 90% | | |
| II.5. | Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan pengelolaan transfer ke Daerah | Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Transfer Terciptanya Tata Kelola yang Tertib Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Transparan, adil, proporsional, Kredibel, Akuntabel, dan Profesional dalam Pelaksanaan Transfer ke Daerah | 1. Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana transfer ke daerah 2. Ketepatan waktu penyelesaian dokumen pelaksanaan penyaluran dana transfer ke daerah 3. Indeks kepuasan pengguna layanan | - | - | Kemenkeu |
| II.6. | Perumusan kebijakan bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang PDRD | 1. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Mewujudkan Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mendukung Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah | 1. Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Indeks kepuasan pengguna layanan 3. Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan 4. Rata-rata persentase realisasi janji layanan unggulan 5. Persentase evaluasi Perda PDRD sesuai rencana | - | - | Kemenkeu |
| III. SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | |
| Penyempurnaan pengelolaan PNS yang meliputi rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, dan mutasi PNS secara terpusat selambat-lambatnya 2011 | | | | | | |
| III.1. | Pengembangan kebijakan perencanaan dan pengadaan SDM aparatur | Tersusunnya kebijakan perencanaan dan pengadaan SDM Aparatur secara tepat dan akurat | Persentase K/L dan Pemda yang mengirimkan data usulan formasi PNS secara tepat dan akurat Jumlah peraturan pelaksanaan kebijakan tentang perencanaan dan pengadaan SDM Aparatur Persentase instansi pemerintah yang mendapatkan alokasi formasi CPNS dari pelamar umum dan telah menerapkan | 75% K/L, 75% Prov, 35 % Kab/Kota 2 RPP, 1 PerMenPANRB 100% K/L dan 100% Provinsi | 3,0 | Kemen PAN dan RB |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|--|---|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | kebijakan pengadaan dengan sistem <i>computer assisted test</i> (CAT) untuk seleksi CPNS | | | |
| | | | Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan sistem rekrutmen CPNS terbuka | 100% | | |
| III.2. | Pengembangan kebijakan pemantapan pengembangan SDM aparatur | Tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian (SDM Aparatur Negara | Jumlah kebijakan pelaksanaan tentang UU aparatur sipil negara | 5 peraturan pelaksanaan UU ASN | 2,5 | Kemen PAN dan RB |
| | | | Jumlah instansi yang disosialisasi kebijakan tentang Pengisian (Rotasi/Promosi) dalam jabatan secara terbuka (Revisi PP No.100/2000 jo PP No.13/2002) | 15 instansi | | |
| | | | Jumlah K/L dan Pemda yang telah melaksanakan promosi jabatan secara terbuka untuk Pejabat Eselon I dan II K/L dan Pemda | 20 K/L, 10 Prov, 20 Kab/Kota | | |
| | | | Persentase instansi pemerintah yang memiliki standar kinerja individu | 36 K/L, 33 Prov, 33 Kab | | |
| III.3. | Pengembangan kebijakan kesejahteraan SDM aparatur | Tersusunnya kebijakan tentang kesejahteraan SDM aparatur | Jumlah kebijakan tentang kesejahteraan SDM Aparatur | 8 PP | 3,0 | Kemen PAN dan RB |
| | | | Persentase instansi pemerintah yang telah menerapkan kebijakan tunjangan berdasarkan pada kinerja | 100% | | |
| | | | Persentase instansi pemerintah yang telah melakukan evaluasi jabatan | 17 K/L, 33 Prov, 33 Kab, 33 Kot | | |
| IV. | REGULASI | | | | | |
| | Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan, di antaranya penyelesaian kajian 12.000 peraturan daerah selambat-lambatnya 2011 | | | | | |
| IV.1. | Kegiatan fasilitasi perancangan peraturan daerah | Meningkatkan pemerintahan daerah (provinsi, kab/kota) yang di petakan dan dipublikasikan peraturan daerahnya dalam sistem informasi peraturan | Persentase (%) Pemerintahan Daerah Provinsi, Kab/Kota yang Dipetakan dan Dipublikasikan Peraturan Daerahnya Dalam Sistem Informasi Peraturan Daerah yang Akurat dan Up To Date Sesuai Dengan Rencana dan Permohonan Fasilitasi | 100 % | 0,9 | Kemenkumham |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|---|---|--|---|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | daerah yang akurat dan <i>up to date</i> . | Persentase pemerintahan daerah di wilayah I yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. | 100 % | | |
| | | | Persentase pemerintahan daerah di wilayah II yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. | 100 % | | |
| | | | Persentase pemerintahan daerah di wilayah III yang memperoleh fasilitasi perancangan peraturan daerah. | 100 % | | |
| IV.2. | Penataan Produk Hukum dan Pelayanan Bantuan Hukum Departemen | Percepatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan. | Jumlah perda yang dikaji | 2.500 Perda | 1,1 | Kemendagri |
| <u>V.</u> | SINERGLANTARA PUSAT DAN DAERAH Penetapan dan penerapan sistem Indikator Kinerja Utama Pelayanan Publik yang selaras antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah | | | | | |
| V.1. | Pengembangan kebijakan dan evaluasi program pelayanan publik | Meningkatnya kualitas implementasi UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan peraturan pelaksanaannya | Persentase instansi pemerintah yang telah mengimplementasi UU ttg Pelayanan Publik | 100% | 2,5 | Kemen PAN dan RB |
| | | | Jumlah K/L /Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki jabatan fungsional pelayanan publik | 76 K/L, 33 Provinsi, 33 Kabupaten 33 Kota | | |
| V.2. | Peningkatan Koordinasi dan Evaluasi Pelayanan Publik di Bidang Perekonomian | Terlaksananya peningkatan kualitas kelembagaan OSS/PTSP untuk mendukung pelayanan perizinan | Persentase pemda yang menerapkan OSS (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) | 100% Pemda | 2,8 | Kemen PAN dan RB |
| | | | Jumlah Pemda yang melaksanakan PTSP secara menyeluruh dan efektif dalam pelayanan publik | 33 kab 33 kota (lanjutan) | | |
| | | | Persentase PTSP yang menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan | 100% | | |
| V.3. | Pengembangan Sistem dan Standardisasi Pelayanan Publik | Terlaksananya kompetisi antar | Jumlah unit pelayanan yang dinilai kinerja pelayanannya berdasarkan instrumen penilaian monitoring, evaluasi dan | 76 K/L, 33 Prov, dan 491 Kab/Kota, serta | 9,0 | Kemen PAN |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|--|--|--|--|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | unit pelayanan publik/antar instansi dan Pemerintah Daerah | <p>pemeringkatan pelayanan publik</p> <p>Persentase unit pelayanan publik yang berkategori baik atau lebih (kategori B keatas) sesuai penilaian</p> <p>Jumlah K/L dan Pemda sebagai (<i>pilot project/Focus Leverage Sector</i> untuk Peningkatan Daya Saing) dalam peningkatan kualitas pelayanan melalui penerapan standar pelayanan</p> <p>Jumlah unit pelayanan instansi pemerintah yang menerapkan standar pelayanan public</p> | <p>2045 unit pelayanan</p> <p>60%</p> <p>6 K/L , 33 Kab, 33 Kota (lainnya)</p> <p>235 Unit Pelayanan</p> | | dan RB |
| V.4. | Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup I | Meningkatnya Implementasi Urusan Pemerintahan Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah. | <p>Penerapan indikator utama pelayanan di daerah Lingkup Urusan Pemerintahan Daerah I</p> <p>Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya</p> <p>Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya</p> | <p>9 Bidang SPM</p> <p>9 Bidang SPM</p> <p>9 Bidang SPM</p> | 7,65 | Kemendagri |
| V.5. | Penataan Urusan Pemerintahan Daerah Lingkup II | Meningkatnya Implementasi urusan pemerintahan daerah II dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. | <p>Penerapan indikator utama pelayanan di daerah Lingkup Urusan Pemerintahan Daerah II</p> <p>Jumlah bidang SPM yang dimonitor penerapannya</p> <p>Jumlah bidang SPM yang dievaluasi penerapannya</p> | <p>6 Bidang SPM</p> <p>6 Bidang SPM</p> <p>6 Bidang SPM</p> | 6,8 | Kemendagri |
| VI. | <u>PENEGAKAN HUKUM</u> | | | | | |
| | Peningkatan integrasi dan integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga dan aparat hukum | | | | | |
| VI.1. | Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Kewilayahan | Meningkatnya clearance rate tindak pidana di tingkat masyarakat. | Intensifikasi clearance rate rata rata seluruh tindak pidana | - | - | POLRI |
| VI.2. | Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan barang Rampasan Negara. | Terkelolanya benda sitaan negara dan barang rampasan perkara | <p>Persentase (%) Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Diregistrasi/Diidentifikasi Secara Tepat Waktu dan sesuai standar</p> <p>Persentase (%) Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Diamankan dan Dipelihara Sesuai standar</p> | <p>80%</p> <p>80%</p> | 0.8 | Kemenkumham |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|---|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Persentase (%) Mutasi dan Penghapusan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara yang Tepat Waktu dan Akuntabel | 80% | | |
| VI.3. | Pembinaan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Keamanan dan Ketertiban. | Penyelenggaraan kegiatan di bidang keamanan dan kertertiban | Persentase (%) Rutan dan Lapas yang Memenuhi Standar Hunian dan Keamanan | 20% | 1,0 | Kemenkumham |
| | | | Persentase (%) Menurunnya Pelanggaran Ham, Kasus Penyebaran Napza, Kejahatan Terorganisir dan Pelanggaran Kode Etik Petugas Pemasarakatan di UPT Pas | 3% | | |
| | | | Persentase (%) Pengaduan Masyarakat Maupun Tahanan dan Warga Binaan Pemasarakatan yang Ditindaklanjuti Secara Cepat dan Tepat | 60% | | |
| | | | Persentase (%) Tindak Lanjut Pelanggaran Ham, Kasus Penyebaran Napza, Kejahatan Terorganisir dan Pelanggaran Kode Etik Petugas Pemasarakatan di UPT PAS | 70% | | |
| VI.4. | Pembinaan Penyelenggaran Kegiatan di Bidang Pelayanan Tahanan dan Pembinaan Narapidana. | Terlaksananya pembinaan terhadap tahanan dan narapidana yang tepat dan akuntabel. | Persentase (%) Tahanan dan Narapidana yang Teregistrasi dan Terklasifikasi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel | 72% | 1,1 | Kemenkumham |
| | | | Persentase (%) Tahanan yang Memperoleh Pelayanan dan Bantuan Hukum Secara Tepat Waktu dan Akuntabel | 70% | | |
| | | | Persentase (%) Narapidana yang Memperoleh Program Reintegrasi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel | 70 % | | |
| | | | Persentase (%) Narapidana yang Terserap di Kegiatan Kerja Sesuai Program Kegiatan Kerja | 70 % | | |
| | | | Persentase (%) Narapidana yang Memperoleh Pembinaan Kepribadian Sesuai dengan Program pembinaan kepribadian | 80 % | | |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------|---|---|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| VI.5 | Pembinaan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak. | Penyelenggaraan kegiatan Bimbingan Kemasyarakatan dan Anak yang berkualitas. | Persentase (%) Anak Didik Pemasarakatan dan Klien Pemasarakatan yang Teregistrasi dan terklasifikasi Secara Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase (%) Anak Didik Pemasarakatan yang Memperoleh Pendidikan dan Reintegrasi Sesuai dengan program pendidikan dan reintegrasi Persentase (%) Anak Didik Pemasarakatan yang Memperoleh Pendampingan dan Pembimbingan Secara Tepat Waktu dan Akuntabel Persentase (%) Klien Pemasarakatan yang Memperoleh Pembimbingan dan Pengawasan Sesuai dengan program pembimbingan dan pengawasan Persentase (%) Anak Didik Pemasarakatan dan Klien Pemasarakatan yang Mendapatkan Litmas Secara Tepat Waktu dan Akuntabel | 72% 70% 70% 70 % 80 % | 1,2 | Kemenkumham |
| VI.6. | Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen. | Peningkatan kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja. | Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat kepemimpinan dan manajemen pada unit kerja | 96% | 1,0 | Kemenkumham |
| VI.7. | Kegiatan penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis | Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM | Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang teknis pada unit kerjanya | 96 % | 3,1 | Kemenkumham |
| VI.8. | Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional HAM. | Peningkatan kualitas SDM hukum dan HAM | Persentase peningkatan kinerja lulusan diklat di bidang fungsional dan HAM pada unit kerjanya | 95% | 1,0 | Kemenkumham |
| VI.9.. | Kegiatan Pendidikan Kedinasan. | Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemsarakatan. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian | Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis pemsarakatan. Persentase lulusan yang menguasai ilmu dan keahlian teknis keimigrasian. | 95% 95% | 20,5 | Kemenkumham |
| VI.10. | Kegiatan pengawasan Inspektorat khusus. | Terlaksananya mekanisme pebgaduan masyarakat yang | Persentase unit kerja wilayah VI yang berhasil mencapai standar pelayanan prima dan target kinerja yang ditetapkan | 50 % | 1,4 | Kemenkumham |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------|--|---|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | responsif terhadap kinerja aparat Kemenkumham | | | | |
| | | | Persentase unit kerja wilayah VI yang menyelenggarakan akuntabilitas keuangan sesuai standar untuk mendapatkan opini BPK yang WTP | 90 % | | |
| | | | Persentase unit kerja wilayah VI yang menyelenggarakan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai ketentuan | 60 % | | |
| | | | Jumlah unit kerja wilayah VI yang mendapat nilai akuntabilitas kinerja minimal B | 2 | | |
| | | | Persentase pengaduan dan kasus yang dituntaskan secara tepat waktu pada unit kerja wilayah I-VI | 100% | | |
| VI.11. | Kegiatan Pengelolaan dan Pembinaan Kepegawaian Kemenkumham. | Peningkatan kualitas SDM Kemenkumham | Persentase (%) Unit Kerja yang Memiliki Kaderisasi Berkesinambungan dan Pegawai yang Memperoleh Pengembangan Karir | 100 % unit kerja | 0,0 | Kemenkumham |
| | | | Persentase (%) Unit Kerja yang Memiliki Alokasi Sdm Profesional Sesuai Kebutuhan dan Persentase (%) Pegawai yang Memperoleh Promosi Secara Tepat Waktu | 100 % unit kerja | | |
| VI.12. | Seleksi Hakim, Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di MA, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim | Memperoleh calon hakim agung kompeten untuk diajukan ke DPR, serta pemberian apresiasi terhadap kinerja para hakim, serta hakim yang kompeten untuk bertugas dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha Negara | Jumlah kegiatan penyusunan metode dan tatacara rekrutmen CHA dan hakim adhoc yang terlaksana | 3 kegiatan | 7,1 | Komisi Yudisial |
| | | | Jumlah kegiatan seleksi calon hakim agung | 1 kegiatan | | |
| | | | Jumlah kegiatan seleksi calon hakim adhoc | 1 kegiatan | | |
| | | | Jumlah rekomendasi kelulusan peserta pendidikan hakim | 1 rekomendasi | | |
| | | | Jumlah hakim yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas hakim | 100 hakim | | |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------|---|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah peserta penjurangan bakal calon potensial untuk mendaftar SCHA, calon hakim adhoc dan hakim | 200 peserta | | |
| | | | Jumlah rekomendasi advokasi hakim yang dihasilkan | 10 rekomendasi | | |
| VI.13. | Pelayanan Pengawasan Perilaku Hakim dan peningkatan kompetensi hakim | Penyelesaian laporan pengaduan hakim yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim serta meningkatnya kemampuan profesionalisme hakim | Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga registrasi | 440 laporan | 20,5 | Komisi Yudisial |
| | | | Jumlah kegiatan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran KE/PPH | 225 berita acara | | |
| | | | Jumlah laporan pemantauan persidangan di badan peradilan yang menarik perhatian publik | 50 laporan | | |
| | | | Jumlah pelanggaran KE/PPH yang diproses sampai tingkat MKH | 10 sidang | | |
| | | | Jumlah laporan masyarakat yang ditangani dan diselesaikan hingga tuntas | 120 laporan | | |
| VI.14. | Penyelenggaraan investigasi hakim, calon hakim, calon hakim agung, dan calon hakim adhoc | Terselenggaranya proses investigasi hakim, calon hakim, calon hakim agung, dan calon hakim adhoc | Jumlah laporan investigasi hakim di pengadilan tingkat pertama/ tingkat banding/ Mahkamah Agung | 216 laporan | 3,24 | Komisi Yudisial |
| | | | Jumlah laporan pendalaman dan penelusuran perilaku hakim | 35 laporan | | |
| | | | Jumlah laporan rekam jejak calon hakim agung dan calon hakim ad hoc yang diseleksi | 90 laporan | | |
| VI.15. | Pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku aparat Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya | Meningkatnya kualitas kinerja hakim dan aparat peradilan dan kepercayaan publik kepada lembaga peradilan | Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan kinerja serta perilaku hakim dan aparat peradilan. | 100 laporan | 3,5 | MA-RI |
| VI.16. | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan | Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan | Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan manajemen dan kepemimpinan | 13 | 11,2 | Kejaksaan Agung |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------------|--|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | manajemen dan kepemimpinan | | | | |
| VI.17. | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional | Terselenggaranya proses pendidikan dan pelatihan teknis fungsional | Jumlah angkatan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional | 39 | 65,7 | |
| VII. | DATA KEPENDUDUKAN ¹⁾ Penetapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dengan aplikasi pertama pada Kartu Tanda Penduduk selambat-lambatnya pada 2011 | | | | | |

Keterangan:

¹⁾ Kegiatan pada substansi inti ini sudah selesai pada tahun 2012.

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2014

| | |
|---------------------------|---|
| PRIORITAS 2 | PROGRAM AKSI BIDANG PENDIDIKAN |
| Tema Prioritas | Peningkatan akses pendidikan yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: 1) menciptakan lapangan kerja atau kewirausahaan dan 2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. |
| Penanggung Jawab | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
| Bekerjasama dengan | Menteri Agama |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | AKSES PENDIDIKAN DASAR-MENENGAH Peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan dasar dari 95% di 2009 menjadi 96% di 2014 dan APM pendidikan setingkat SMP dari 73% menjadi 76% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan setingkat SMA dari 69% menjadi 85%; Pemantapan/rasionalisasi implementasi BOS, penurunan harga buku standar di tingkat sekolah dasar dan menengah sebesar 30-50% selambat-lambatnya 2012 dan penyediaan sambungan internet ber- <i>content</i> pendidikan ke sekolah tingkat menengah selambat-lambatnya 2012 dan terus diperluas ke tingkat sekolah dasar | | | | | |
| I.1 | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD | Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD, Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten | APM SD/SDLB/Paket A | 85,96% | 2.997,9 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Jumlah siswa SD/SDLB sasaran BOS | 26.875.203 | | |
| | | | Persentase SD yang memiliki fasilitas internet | 30,00% | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|---|--|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Persentase SD menerapkan e-Pembelajaran | 40,00% | | |
| 1.2 | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP | Tercapainya Keluasan dan pemerataan Akses SMP, Bermutu dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten | APM SMP/SMPLB/Paket B | 65,51% | 2.928,3 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Jumlah siswa SMP/SMPLB sasaran BOS | 10.783.634 | | |
| | | | Persentase SMP memiliki fasilitas internet | 75,00% | | |
| | | | Persentase SMP menerapkan e-Pembelajaran | 45,00% | | |
| 1.3 | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA | Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten | APK SMA nasional | 36,15% | 5.343,7 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Peserta didik SMA mendapat BOMM/Rintisan BOS SMA | 4.384.026 | | |
| 1.4 | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten | APK SMKNasional | 38,07% | 6.011,6 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Jumlah peserta didik SMK penerima Rintisan Bantuan Operasional (BOS) SMK | 4.303.201 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|---|---|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1.5 | Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah | Meningkatnya akses dan mutu pendidikan, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta tersalurkannya subsidi di RA/BA dan madrasah | APM MI | 10,04% | 12.786,8 | Kementerian Agama |
| | | | APM MTs | 16,38% | | |
| | | | APK MA | 8,65% | | |
| | | | Siswa MI/Ula penerima BOS (Siswa) | 3.593.000 | | |
| | | | Siswa MTs/Wustha penerima BOS (Siswa) | 3.353.000 | | |
| 1.6 | Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Keagamaan Islam | Meningkatnya akses dan mutu pendidikan, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta tersalurkannya subsidi untuk pendidikan keagamaan Islam | Jumlah Siswa Siswa Ula penerima BOS | * | - | Kementerian Agama |
| | | | Jumlah Siswa Siswa Wustha Penerima BOS | * | | |
| 1.7 | Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan | Tersedianya Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah | Persentase mata pelajaran SD yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 78 jilid mapel) | ** | 115,6 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Persentase mata pelajaran SMP yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 47 jilid mapel) | ** | | |
| | | | Persentase mata pelajaran SMA yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 93 | ** | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|---|--|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | jilid mapel) | | | |
| | | | Persentase mata pelajaran SMK yang buku teksnya telah dibeli hak ciptanya (total 493 jilid mapel) | ** | | |
| | | | Dokumen hak cipta buku | ** | | |
| | | | Jumlah dokumen bahan kebijakan teknis kurikulum, pembelajaran dan perbukuan | 83 | | |
| | | | Jumlah model perbukuan | 205 | | |
| II | AKSES PENDIDIKAN TINGGI | | | | | |
| | Peningkatan APK pendidikan tinggi dari 18% di 2009 menjadi 25% di 2014 | | | | | |
| II.1 | Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa | Tercapainya layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa | APK PT usia 19-23 thn | 26,70% | 4.537,0 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| II.2 | Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam | Meningkatnya APK PTA | APK PTA | 3,30% | 3.130,0 | Kementerian Agama |
| III | METODOLOGI | | | | | |
| | Penerapan metodologi pendidikan yang tidak lagi berupa pengajaran demi kelulusan ujian (<i>teaching to the test</i>), namun pendidikan menyeluruh yang memperhatikan kemampuan sosial, watak, budipekerti, kecintaan terhadap budaya-bahasa Indonesia melalui: Penyesuaian system Ujian Akhir Nasional pada 2011; dan penyempurnaan kurikulum sekolah dasar-menengah sebelum tahun 2011 yang diterapkan di 25% sekolah pada 2012 dan 100% pada 2014 | | | | | |
| III.1 | Penyediaan Informasi Hasil Penilaian Pendidikan | Tersedianya Informasi Penilaian Kualitas PAUD, DIKDAS, DIKMEN, dan Pendidikan Orang Dewasa | Jumlah model penilaian satuan pendidikan | ** | 60,6 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Jumlah model penilaian | ** | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|--|---|--|------------------------------|---|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | kesulitan belajar | | | |
| | | | Jumlah model penilaian kelas | ** | | |
| | | | Jumlah laporan/profil/peta berdasar hasil un/uasbn/survai/penelitian/layanan serta publikasinya, di bidang penilaian pendidikan | ** | | |
| | | | Jumlah soal/kaset penilaian akademik untuk peserta didik dan PTK | 25.000 soal; 37.000 kaset | | |
| | | | Jumlah soal penilaian non akademik untuk peserta didik dan PTK | 2.700 | | |
| | | | Jumlah analisis hasil penilaian pendidikan dan survey tingkat nasional dan internasional | 9 | | |
| III.2 | Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan | Tersedianya Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah | Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah pada pendidikan dasar | ** | *) sudah termasuk dalam pagu kegiatan prioritas I.7 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa | ** | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|---|---|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | pada tingkat nasional, daerah dan sekolah pada pendidikan menengah | | | |
| IV | PENGELOLAAN Pemberdayaan peran Kepala Sekolah sebagai <i>manager</i> sistem pendidikan yang unggul, revitalisasi peran Pengawas Sekolah sebagai entitas <i>quality assurance</i> , mendorong aktivasi peran Komite Sekolah untuk menjamin keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran, dan Dewan Pendidikan di tingkatKabupaten | | | | | |
| IV.1 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pendidikan Dasar | Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikdas | Persentase dewan pendidikan kab/kota yang terbina | 78,00% | 380,8 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| IV.2 | Peningkatan Layanan Tenaga Kependidikan | Meningkatnya layanan Tenaga Kependidikan | Persentase kepala SD/SDLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi | 35,00% | 141,5 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Persentase kepala SMP/SMPLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi | 35,00% | | |
| | | | Persentase kepala SMA/SMLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi | 65,00% | | |
| | | | Persentase kepala SMK yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi | 75,00% | | |
| | | | Persentase pengawas TK/SD yg sudah mengikuti | 50,00% | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------|---|---|---|-------------------------|---|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | peningkatan kompetensi | | | |
| | | | Persentase pengawas SMP/SMPLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi | 50,00% | | |
| | | | Persentase pengawas SMA/SMLB yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi | 50,00% | | |
| | | | Persentase pengawas SMK yg sudah mengikuti peningkatan kompetensi | 50,00% | | |
| V | KURIKULUM Penataan ulang kurikulum sekolah yang dibagi menjadi kurikulum tingkat nasional, daerah, dan sekolah sehingga dapat mendorong penciptaan hasil didik yang mampu menjawab kebutuhan SDM untuk mendukung pertumbuhan nasional dan daerah dengan memasukkan pendidikan kewirausahaan (diantaranya dengan mengembangkan model <i>link and match</i>) | | | | | |
| V.1 | Penyempurnaan Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Perbukuan | Tersedianya Kurikulum, Sistem Pembelajaran dan Buku Ajar yang Bermutu dan Murah | Jumlah model kurikulum SD/MI | 1 | *) sudah termasuk dalam pagu kegiatan prioritas I.7 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Jumlah model kurikulum SMP/MTs | 1 | | |
| | | | Jumlah model kurikulum SMA/MA yang dihasilkan | 1 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|---|--|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah model kurikulum SMK/MAK yang dihasilkan | 1 | | |
| | | | Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah pada pendidikan dasar | ** | | |
| | | | Jumlah standar kompetensi pendidikan kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa pada tingkat nasional, daerah dan sekolah pada pendidikan menengah | ** | | |
| VI | KUALITAS Peningkatan kualitas guru, pengelolaan dan layanan sekolah, melalui: 1) program remediasi kemampuan mengajar guru; 2) penerapan system evaluasi kinerja profesional tenaga pengajar; 3) sertifikasi ISO 9001:2008 di 100% PTN, 50% PTS, 100% SMK sebelum 2014; 4) membuka luas kerjasama PTN dengan lembaga pendidikan internasional; 5) mendorong 11 PT masuk Top 500 THES pada 2014; 6) memastikan perbandingan guru:murid di setiap SD & MI sebesar 1:32 dan di setiap SMP & MTs 1:40; dan 7) memastikan tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi Pendidikan Agama dan Keagamaan paling lambat tahun 2013 | | | | | |
| VI.1 | Peningkatan Layanan Pendidik untuk Jenjang PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikti | Terwujudnya Layanan Pendidik untuk semua Jenjang | Persentase guru PAUD mengikuti peningkatan profesionalisme berkelanjutan (PPB) | 55,00% | 769,7 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Persentase guru SD/SDLB mengikuti PPB | 55,00% | | |
| | | | Persentase guru SMP/SMPLB mengikuti PPB | 55,00% | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|---|--|--|-------------------------|--|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Persentase guru SMA/SMALB mengikuti PPB | 55,00% | | |
| | | | Persentase guru SMK mengikuti PPB | 78,00% | | |
| | | | Jumlah program dan model pengembangan pendidik yang dihasilkan setiap tahun sesuai bidangnya | 12 | | |
| VI.2 | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten | Persentase SMK bersertifikat ISO 9001:2000/ 9001:2008 | 70,00% | *) sudah termasuk dalam pagu kegiatan prioritas I.4 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| VI.3 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Menguatnya tata kelola dan sistem pengendalian manajemen di Ditjen Dikti | Persentase PT bersertifikat ISO 9001:2008 | ** | 14.481,9 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| VI.4 | Penyediaan Layanan Kelembagaan dan Kerja Sama | Tersedianya dan Keluasan Akses PT yang Bermutu dan Berdaya saing Internasional | Jumlah kerjasama kelembagaan dalam dan luar negeri | 50 | 678,5 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| VI.5 | Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa | Tercapainya layanan pembelajaran dan kompetensi mahasiswa | Jumlah perguruan tinggi masuk top 500 dunia | ** | *) sudah termasuk dalam pagu kegiatan prioritas II.1 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| VI.6 | Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar | Meningkatnya kesejahteraan dan ketersediaan, pendidik dan Tenaga kependidikan jenjang pendidikan | Persentase SD yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM | 25,00% | 5.381,1 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|---|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Persentase SMP yang memiliki rasio guru terhadap siswa sesuai SPM | 30,00% | | |
| VI.7 | Penyediaan dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tendik yang kompeten untuk jenjang pendidikan menengah | Meningkatnya kesejahteraan dan ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan jenjang pendidikan menengah | Guru SMA/SMK/SMLB berkualifikasi S-1/D-4 | 93,00 % | 2.230,3 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | | Tersedianya jenis penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SMLB/Tutor kesetaraan Paket C | 75,38 % | | |
| VI.8 | Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi Pendidikan Agama Islam | Meningkatnya Akses, Mutu Pendidikan, Kesejahteraan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, dan Subsidi di Pendidikan Tinggi Islam | Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan (paket) | 34 | 428,2 | Kementerian Agama |
| | | | Percepatan implementasi Standar Nasional Pendidikan Agama dan Keagamaan (paket) | 1 | | |

Catatan:

- * Untuktahun 2014, sasaran dan alokasi BOS untuk siswa Ula danWustha sudah digabungkan dengan MI dan MTs di dalam indikator “Siswa MI/Ula penerima BOS (Siswa)” dan “Siswa MTs/Wustha penerima BOS (Siswa)”
- ** Indikator sudah tidak dipergunakan lagi oleh K/L

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2014

| | |
|---------------------------|---|
| PRIORITAS 3 | PROGRAM AKSI BIDANG KESEHATAN |
| Tema Prioritas | Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 70,7 tahun pada tahun 2009 menjadi 72,0 tahun pada tahun 2014, dan pencapaian keseluruhan sasaran <i>Millennium Development Goals</i> (MDGs) tahun 2015. |
| Penanggung Jawab | Menteri Kesehatan |
| Bekerjasama dengan | Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|--|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I. KESEHATAN MASYARAKAT | | | | | | |
| Pelaksanaan upaya kesehatan preventif terpadu yang meliputi: penurunan tingkat kematian ibu saat melahirkan dari 228 (2007) menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup (2014); penurunan tingkat kematian bayi dari 34 (2007) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup (2014); pemberian imunisasi dasar kepada 90% bayi pada tahun 2014 penyediaan akses sumber air bersih yang menjangkau 67% penduduk dan akses terhadap sanitasi dasar berkualitas yang menjangkau 75% penduduk sebelum tahun 2014 | | | | | | |
| i.1 | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan reproduksi | 1. Persentase (%) ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (Cakupan PN) | 90 | 124,0 | Kementerian Kesehatan |
| | | | 2. Persentase (%) ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (Cakupan K4) | 95 | | |
| | | | 3. Persentase (%) fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan KB sesuai standar | 100 | | |
| i.2 | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak | Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan anak | 1. Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) | 90 | 124,2 | Kementerian Kesehatan |
| | | | 2. Cakupan pelayanan kesehatan bayi | 90 | | |
| | | | 3. Cakupan pelayanan kesehatan anak balita | 85 | | |
| | | | 4. Cakupan SD/MI melaksanakan penjarangan siswa kelas 1 | 95 | | |
| i.3 | Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina, dan Kesehatan Matra | Meningkatnya pembinaan di bidang surveilans, imunisasi, karantina, dan kesehatan matra | 1. Persentase (%) bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap | 90 | 317,5 | Kementerian Kesehatan |
| | | | 2. Persentase desa yang mencapai UCI | 100 | | |
| | | | 3. Persentase faktor risiko potensial PHEIC yang | 100 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|--|---|--|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | terdeteksi di pintu negara | | | |
| | | | 4. Persentase penanggulangan KLB < 24 jam | 100 | | |
| | | | 5. Persentase terlaksananya penanggulangan faktor risiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra | 80 | | |
| | | | 6. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapatkan imunisasi campak | 93 | | |
| I.4 | Pembinaan Gizi Masyarakat | Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat | 1. Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan 2. Persentase (%) balita ditimbang berat badannya (D/S) | 100 85 | 288,0 | Kementerian Kesehatan |
| I.5 | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas | Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal | 9.536 | 1.228,6 | Kementerian Kesehatan |
| I.6 | Pembinaan Administrasi Kepegawaian | Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian | 1. Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur (PNS dan PTT) 2. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan di DBK 3. Jumlah residen yang didayagunakan dan diberi insentif | 90 7.020 4.850 | 91,4 | Kementerian Kesehatan |
| I.7 | Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan | Terselenggaranya pendidikan tinggi dan peningkatan mutu SDM kesehatan | Jumlah SDM kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan | 9.500 | 506,6 | Kementerian Kesehatan |
| I.8 | Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan | Terselenggaranya pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan | Jumlah tenaga kesehatan yang mengikuti internship | 4.000 | 143 | Kementerian Kesehatan |
| I.9 | Penyehatan Lingkungan | Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas lingkungan | 1. Persentase (%) penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas 2. Persentase (%) kualitas air minum yang memenuhi syarat 3. Persentase (%) penduduk yang menggunakan jamban sehat 4. Jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) | 67 100 75 20.000 | 310,3 | Kementerian Kesehatan |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|---|---|---|--|------------------------------------|----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I.10 | Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan | Meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan dan promosi kesehatan kepada masyarakat | 1. Persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) 2. Persentase desa siaga aktif 3. Jumlah pos kesehatan desa yang beroperasi | 70 70 58.500 | 199,8 | Kementerian Kesehatan |
| I.11 | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Peningkatan pelayanan air minum untuk daerah perkotaan dan pedesaan | Jumlah kawasan dan desa yang terfasilitasi pembangunan air minum | 396 kawasan MBR, 229 IKK, 1.622 desa, 177 kawasan khusus, 5 kawasan regional | 5.296,2 | Kementerian Pekerjaan Umum |
| I.12 | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi Dan Persampahan | Peningkatan pelayanan infrastruktur air limbah, persampahan dan drainase | Jumlah kawasan dan kab/kota yang terfasilitasi pembangunan sanitasi (air limbah dan drainase) dan persampahan | 706 kawasan 59 kab/kota, 70 kab/kota, 40 kawasan | 2.939,9 | Kementerian Pekerjaan Umum |
| II. SARANA KESEHATAN | | | | | | |
| Ketersediaan dan peningkatan kualitas layanan rumah sakit berakreditasi internasional di minimal 5 kota besar di Indonesia dengan target 3 kota pada tahun 2012 dan 5 kota pada tahun 2014 | | | | | | |
| II.1 | Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat | 1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia 2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergeni Komprehensif (PONEK) 3. Persentase RS pemerintah menyelenggarakan pelayanan rujukan bagi orang dengan HIV dan AIDS (ODHA) 4. Jumlah kab/kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) 5. Jumlah tempat tidur kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan | 4 100 100 24 4.145 | 1.758,8 | Kementerian Kesehatan |
| II.2 | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat | 1. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk | 96 | 1.040,5 | Kementerian Kesehatan |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|--|---|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | 2. Persentase puskesmas yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED) | 100 | | |
| III.3 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Jumlah unit pelaksana teknis (UPT) vertikal yang ditingkatkan sarana dan prasarananya | 45 | 9.579,6 | Kementerian Kesehatan |
| III. OBAT | | | | | | |
| Pemberlakuan Daftar Obat Esensial Nasional sebagai dasar pengadaan obat di seluruh Indonesia | | | | | | |
| III.1 | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar | Persentase (%) ketersediaan obat dan vaksin | 100 | 1.243,0 | Kementerian Kesehatan |
| III.2 | Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM | Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia | 1. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan (dihitung dari 6.500 sarana) | 42 | 616,2 | Badan POM |
| | | | 2. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan (persentase) (dihitung dari 143.500 sarana) | 22 | | |
| | | | 3. Jumlah parameter uji obat dan makanan untuk setiap sampel (dihitung dari sekitar 97.000 Sampel) | 10 | | |
| IV. ASURANSI KESEHATAN NASIONAL | | | | | | |
| Penerapan Asuransi Kesehatan Nasional untuk seluruh keluarga miskin dan diperluas secara bertahap untuk keluarga Indonesia lainnya antara tahun 2012-2014 | | | | | | |
| IV.1 | Pelayanan Jaminan Kesehatan | Meningkatnya penduduk yang mendapatkan jaminan kesehatan | Jumlah penduduk tidak mampu yang mendapat subsidi bantuan iuran jaminan kesehatan | 86,4 juta | 16.070,0 | BPJS |
| IV.2 | Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan | Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan | 80,1 | 117,7 | Kementerian Kesehatan |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|---|--|---|--|------------------------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| IV.2 | Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan, dan Gaji | Meningkatnya kualitas pengelolaan/manajemen pembayaran gaji PNS dan PTT tepat jumlah, waktu, dan sasaran | Persentase pengelolaan pembayaran gaji PNS, CPNS, dan PTT tepat jumlah, waktu dan sasaran | 100 | 2.503,6 | Kementerian Kesehatan |
| V. KELUARGA BERENCANA | | | | | | |
| Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan KB melalui 23.500 klinik pemerintah dan swasta selama 2010-2014 | | | | | | |
| V.1 | Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah | Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan KB melalui 23.500 klinik KB (20.203 klinik KB pemerintah) | 1. Jumlah peserta KB baru (PB) Jumlah Peserta KB aktif (PA) 2. Jumlah peserta KB baru/PB bagi seluruh PUS di 7 provinsi wilayah khusus (Aceh, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Malut), dan untuk pelayanan Baksos dan lain-lain yang mendapatkan jaminan ketersediaan kontrasepsi 3. Jumlah kilink KB pemerintah dan swasta yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB | 7,63 juta 28,96 juta 5 juta akseptor 15.200 klinik KB | 627,6 | BKKBN |
| V.2 | Peningkatan Advokasi, dan KIE Program Kependudukan dan KB | Meningkatnya komitmen stakeholder terhadap program kependudukan dan KB | Persentase PUS, WUS dan remaja keluarga yang mengetahui informasi KKB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang | 95 persen | 119,6 | BKKBN |
| V.3 | Peningkatan Pembinaan Lini Lapangan | Meningkatnya peran serta LSM, swasta, dan masyarakat dalam penyelenggaraan program KKB | Jumlah tenaga PKB/PLKB yang kompetensinya meningkat tentang program KKB | 2.650 orang | 5,0 | BKKBN |
| V.4 | Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi | Terlaksananya pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB provinsi | 1. Pembinaan kesertaan ber-KB di Provinsi a. Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapat dukungan penggerakkan pelayanan KB b. Persentase klinik KB (pemerintah dan swasta) yang memberikan pelayanan KB sesuai dengan SOP (informed consent) untuk pelayanan KB baru MKJP | 33 provinsi 23.500 klinik KB 85% | 1.199,4 | BKKBN Provinsi |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|---------------------------------------|---------|--|--|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | c. Persentase komplikasi berat yang dilayani | 0,11 | | |
| | | | d. Persentase kegagalan KB yang dilayani | 0,03 | | |
| | | | e. Jumlah model manajemen pelayanan KB dan kesehatan reproduksi melalui penguatan pelayanan muyen kecamatan dan penyediaan sarana prasarana KB, serta kerjasama dengan mitra pusat studi kependudukan/PSK perguruan tinggi | 8 prov model (2.932 kec.; 4.925 klinik KB; 6 univ) | | |
| | | | 2. Jumlah pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di provinsi | 33 (P2KS di 497 kab/kota) | | |
| | | | a. Jumlah peserta KB yang berasal dari anggota kelompok BKB yang mendapatkan penggerakan rintisan BKB dan penguatan kelembagaan BKB | BKB rintisan 4.125 kelp dan paripurna/ terpadu paud 1.205 kelp | | |
| | | | 3. Jumlah pembinaan advokasi dan KIE program kependudukan dan KB di provinsi | 33 provinsi | | |
| | | | 4. Pembinaan Kelembagaan dan Ketenagaan di Provinsi | | | |
| | | | a. Jumlah kab/kota yang telah disosialisasikan dalam pembentukan BKKBD | 185 | | |
| | | | b. Persentase kab/kota yang melaksanakan mekanisme operasional lini lapangan | 45 | | |
| | | | c. Persentase TOGA, TOMA, TODA yang terlatih | 75 | | |
| | | | d. Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti latihan dasar umum (LDU) | 1.342 | | |
| | | | e. Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan refreshing | 9.126 | | |
| | | | f. Jumlah tenaga lini lapangan program KB yang mengikuti pelatihan teknis | 2.157 | | |
| | | | g. Jumlah pelatihan medis teknis bagi bidan | 12.960 | | |
| | | | h. Jumlah pelatihan medis tehnis bagi dokter | 3.715 | | |
| | | | i. Jumlah PPLKB, PLKB/PKB dan IMP yang mendapatkan dukungan operasional (New Inisiative 2012) | 745.491 orang dlm 6 bulan | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|--|--|---|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | j. Jumlah Penyelenggaraan mekanisme operasional program KKB, yaitu: Rakor di tingkat kecamatan, desa, staf meeting, mini lokakarya, serta pertemuan Koordinasi IMP dengan kader (New Inisiative 2012) | 6 kali/tahun | | |
| VI. PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR | | | | | | |
| Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular pada 2014, yang ditandai dengan : Menurunnya prevalensi <i>Tuberculosis</i> dari 235 menjadi 224 per 100.000 penduduk; Menurunnya kasus malaria (<i>Annual Parasite Index-API</i>) dari 2 menjadi 1 per 1.000 penduduk; Terkendalnya prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen) hingga menjadi < 0,5. | | | | | | |
| VI.1 | Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung | 1. Jumlah kasus TB per100.000 penduduk 2. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang ditemukan 3. Persentase kasus baru TB Paru (BTA positif) yang disembuhkan 4. Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk 5. Persentase ODHA mendapatkan <i>Anti Retroviral Treatment</i> (ART) | 226 90 88 300 50 | 124,6 | Kementerian Kesehatan |
| | | | 6. Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV 7. Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS | 700.000 95 | | |
| VI.2 | Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang | Meningkatnya pencegahan dan penanggulangan penyakit bersumber binatang | 1. Angka kesakitan penderita DBD per 100.000 penduduk 2. Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk 3. Persentase kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuai standar | 51 1 90 | 109,2 | Kementerian Kesehatan |
| VI.3 | Pengendalian Penyakit Tidak Menular | Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular | 1. Persentase (%) provinsi yang memiliki perda tentang kawasan tanpa rokok (KTR) 2. Persentase (%) provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE dan penanganan kasus) | 100 100 | 104,4 | Kementerian Kesehatan |

Matriks Buku I RKP Tahun 2014

| | |
|---------------------------|--|
| PRIORITAS 4 | PROGRAM AKSI BIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN |
| Tema Prioritas | Meningkatkan kualitas program-program penanggulangan kemiskinan dan memperluas program pro-rakyat untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termajinakan demi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat dalam rangka mencapai target sasaran pada tahun 2014 menjadi 8,0-10,0 persen |
| Penanggung Jawab | Wakil Presiden |
| Bekerjasama dengan | Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Menteri Sosial; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Menteri Kesehatan; Kepala BKKBN; Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Agama; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertanian; Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Menteri Negara Koperasi dan UKM; Menteri Perumahan Rakyat; Menteri Energi dan SDM; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Keuangan; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|---|---|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I. BANTUAN SOSIAL TERPADU: | | | | | | |
| <i>Integrasi program perlindungan sosial berbasis keluarga yang mencakup program baik yang bersifat insidental atau kepada kelompok marginal, program keluarga harapan, bantuan pangan, jaminan sosial bidang kesehatan, beasiswa bagi anak keluarga berpendapatan rendah, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan Parenting Education mulai 2010 dan diperluas menjadi program nasional mulai 2011-2012</i> | | | | | | |
| I.1. | Bantuan Tunai Bersyarat | Terlaksananya pemberian Bantuan Tunai Bersyarat bagi RTSM (PKH) | Jumlah RTSM yang mendapatkan Bantuan Tunai Bersyarat PKH (RTSM) | 3.200.000 | 5.543,9 | Kementerian Sosial |
| I.2. | Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Anak | Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak telantar, anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal yang membutuhkan perlindungan khusus | Jumlah anak dan balita telantar, anak jalanan, anak cacat, anak berhadapan dengan hukum, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) | 150.070 | 276,7 | Kementerian Sosial |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|--|---|-------------------|------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I.3. | Pelayanan Sosial Lanjut Usia | Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi lanjut usia | Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) | 58.152 | 149,6 | Kementerian Sosial |
| I.4. | Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan | Terlaksananya pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat | Jumlah penyandang cacat yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) | 49.749 | 260,7 | Kementerian Sosial |
| I.5. | Penyediaan subsidi beras untuk masyarakat miskin (RASKIN) | Penyediaan beras untuk seluruh Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun | Jumlah RTS penerima Raskin (20 kg per RTS selama 12 bulan) | 15.530.897 | 23.124,5 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Perum Bulog |
| I.6. | Pengelolaan Pertanahan Provinsi | Terlaksananya redistribusi tanah | Jumlah bidang tanah yang didistribusi (Bidang) | 142.750 | 129,8 | BPN |
| I.7. | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD | Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SD, Bermutu, dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten | Jumlah siswa SD/SDLB penerima bantuan siswa miskin | 8.062.561 | 3.628,2 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| I.8. | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP | Tercapainya Keluasan dan Kemerataan Akses SMP, Bermutu, dan Berkesetaraan Jender di Semua Kabupaten | Jumlah siswa SMP/SMPLB penerima bantuan siswa miskin | 2.893.187 | 2.169,9 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| I.9. | Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA | Tercapainya Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan SMA Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten | Jumlah siswa SMA penerima bantuan siswa miskin | 1.696.975 | 1.696,9 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| I.10. | Penyediaan dan Peningkatan | Tercapainya Perluasan dan Pemerataan | Jumlah siswa SMK penerima bantuan | | | Kementerian |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|--|--|---|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Pendidikan SMK | Akses Pendidikan SMK Bermutu, Berkesetaraan Jender, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat, di Semua Kabupaten | siswa miskin | | | Pendidikan dan Kebudayaan |
| I.11. | Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa | Tersedianya Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa | Jumlah mahasiswa miskin penerima Bidik Misi | 139.640 | 2.038,7 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| I.12. | Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah | Meningkatnya akses dan mutu pendidikan, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, serta tersalurkannya subsidi di RA/BA dan madrasah | Siswa Miskin MI Penerima Bantuan (Siswa) | 1.436.228 | 646,3 | Kementerian Agama |
| | | | Siswa Miskin MTs Penerima Bantuan (Siswa) | 950.291 | 712,7 | |
| | | | Siswa Miskin MA Penerima Bantuan (Siswa) | 392.729 | 392,7 | |
| I.13. | Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan dan Subsidi Pendidikan Tinggi Islam | Meningkatnya akses, kualitas, kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dan tersalurkannya subsidi Pendidikan Tinggi Islam | Mahasiswa miskin penerima bantuan (Orang) | 64.000 | 76,8 | Kementerian Agama |
| I.14. | Pembinaan, Pengembangan Pembiayaan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan | Terumuskannya kebijakan pembiayaan dan jaminan kesehatan | Persentase penduduk (termasuk seluruh penduduk miskin) yang memiliki jaminan kesehatan | 80,1 | Dialokasikan di PN 3 | Kementerian Kesehatan |
| I.15. | Peningkatan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Jalur Pemerintah | Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan KB melalui 23.500 klinik KB (20.203 klinik KB pemerintah) | 1. Jumlah peserta KB baru dari keluarga miskin (keluarga prasejahtera/KPS dan keluarga sejahtera 1/KS-1) yang mendapatkan jaminan ketersediaan kontrasepsi (juta) | 4,05 | 592,6 | BKKBN |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|---|--|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | 2. Jumlah peserta KB aktif dari keluarga miskin (KPS dan KS1) yang mendapatkan jaminan ketersediaan alat kontrasepsi gratis (juta) | 13,10 | | |
| I.16. | Peningkatan Kesertaan KB Galciltas (tertinggal, terampil, dan perbatasan), Wilayah Khusus, dan Sasaran Khusus | Meningkatnya pembinaan dan kesertaan KB di daerah Galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus | Jumlah perjanjian kerjasama dengan mitra kerja dalam rangka pembinaan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus yang dapat dilaksanakan | 6 | 0,8 | BKKBN |
| I.17. | Pemberdayaan Ekonomi Keluarga | Meningkatnya komitmen <i>stakeholder</i> terhadap program pemberdayaan ekonomi keluarga | Persentase PUS KPS dan KS I anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB | 75,3 (dari 1.925.000) | 6,5 | BKKBN |
| | | | Jumlah PUS KPS dan KS-I anggota kelompok UPPKS yang menjadi peserta KB | 110.000 | | |
| I.18. | Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB Provinsi | Terlaksananya pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB provinsi | Persentase PUS anggota kelompok UPPKS yang ber-KB | 90% | 84,0 | BKKBN Provinsi |
| | | | Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di wilayah khusus di 18 provinsi | 6 kali | | |
| | | | Jumlah frekuensi pelayanan KB <i>mobile</i> di wilayah galciltas | 12 | | |
| I.19. | Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak | Meningkatnya perlindungan pekerja perempuan dan terhapusnya pekerja anak | Jumlah pekerja anak yang ditarik dari tempat kerja/BPTA | 15.000 | 94,5 | Kemenakertrans |
| | | | Persentase pekerja anak yang ditarik yang dikembalikan ke dunia pendidikan dan/atau memperoleh keterampilan | 100 | | |

II. PNPB MANDIRI:

Penambahan anggaran PNPB Mandiri dari Rp 10,3 triliun pada 2009 menjadi Rp 12,1 triliun pada 2010, pemenuhan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Rp 3 milyar per kecamatan untuk minimal 30% kecamatan termiskin di perdesaan, dan integrasi secara selektif PNPB Pendukung

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|--|--|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| II.1. | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara | Pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan & pengangguran di kelurahan/ kecamatan (PNPM Perkotaan) | Keswadayaan Masyarakat - PNPM Reguler (kelurahan) | 11.066 | 1.998,0 | Kemen PU |
| | | | Keswadayaan Masyarakat - Quick Wins MP3KI | 10 kota | 30,0 | |
| | | | Keswadayaan Masyarakat - Perkuatan kecamatan kantong-kantong kemiskinan (perluasan lokasi Quick Wins MP3KI) | 27 kec | 10,0 | |
| II.2. | Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM-MP) | Pelayanan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran di kecamatan dan desa (PNPM-Perdesaan) sesuai standar | Cakupan Penerapan PNPM Inti - PNPM Reguler | 5.260 kecamatan | 9.298,5 | Kemendagri |
| | | | Cakupan Penerapan PNPM Inti - Uji Coba Penghidupan Berkelanjutan (MP3KI) | 3 Kecamatan di 3 Kabupaten | 450,0 | |
| | | | Cakupan Penerapan PNPM Inti - Sinergi Program pembangunan untuk penanganan lokasi prioritas MP3KI (<i>Quick Wins</i> MP3KI) | 149 Kecamatan | | |
| | | | Cakupan Penerapan PNPM Inti - Perkuatan kecamatan kantong-kantong kemiskinan (perluasan lokasi <i>Quick Wins</i> MP3KI). | 246 Kecamatan | 779,0 | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Cakupan Penerapan PNPM MP Penguatan Perbatasan | 85 kec | 85,0 | |
| | | | Cakupan Penerapan PNPM MP Penguatan Integrasi SPP-SPPN | 85 kab | 240,0 | |
| | | | Cakupan Penerapan PNPM MP Penguatan PNPM Mandiri Respek Pertanian | 43 kec | 41,1 | |
| II.3. | Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat | Pelayanan pengembangan pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat sesuai standar | Cakupan penerapan PNPM-MP Generasi | 500 kec | 616,7 | |
| II.4. | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman | Terbangunnya kecamatan yang didukung oleh infrastruktur ekonomi dan sosial wilayah serta Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) | Infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi & sosial (RISE) Jumlah kecamatan yang dilayani oleh infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi | 237 kec | 534,9 | Kemen PU |
| | | Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur & pemberdayaan masyarakat desa (RIS PNPM+PPIP) | Infrastruktur Perdesaan (PNPM-PPIP & RIS) Jumlah desa yang mendapatkan bantuan fasilitasi dari RIS atau PPIP | 1.000 | 307,9 | |
| II.5. | Fasilitasi Pengembangan Wilayah Terpadu | Terwujudnya optimalisasi pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau kecil dan kawasan strategis dan cepat tumbuh melalui peningkatan kapasitas Pemda dalam pelaksanaan PNPM-PISEW/RISE | Terfasilitasinya Pemda Provinsi dan Kabupaten dalam pelaksanaan PNPM-PISEW /RISE | 9 prov, 34 kab | 33,9 | Kemendagri |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------|--|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| II.6. | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi & Persampahan | 567 kawasan (SANIMAS) | Infrastruktur air limbah | 706 kawasan | 865,0 | Kemen PU |
| II.7. | Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang) | Meningkatnya akses petani/peternak pada skim kredit program bersubsidi, sistem bagi hasil, komersial, bantuan langsung dan penumbuhan kelembagaan keuangan mikro untuk mendukung peningkatan produksi pertanian. | Pembinaan PUAP (Laporan) | 16 | 418,2 | Kementan |
| | | | Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (GAPOKTAN) | 3.500 | | |
| | | | Dukungan Manajemen | 12 | | |
| II.8. | Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata | Meningkatnya pengembangan desa wisata | Jumlah desa wisata | 837 | 95,0 | Kemparekraf |
| II.9. | Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja | Tersedianya peluang kerja produktif di berbagai bidang usaha produktif | Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara (orang) | 100.000 | 323,4 | Kemenakertrans |
| | | | Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengurangan pengangguran sementara | 400 | | |
| II.10. | Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil | Terbangunnya kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan minapolitan dengan usaha yang <i>bankable</i> serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap | Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi non PKN | 1.000 | 100,0 | KKP |
| II.11. | Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan | Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri | Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi non PKN | 3.650 | 237,3 | KKP |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|---|--|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| II.12. | Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan | Meningkatnya nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Jumlah tenaga kerja pengolah dan pemasar yang meningkat kompetensinya dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi non PKN | 1.500 tenaga kerja 300 poklhasar | 15,0 | KKP |
| II.13. | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha | Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian usaha skala mikro, beroperasinya sarana usaha mikro dan pencapaian produksi garam di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil | Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) dan jumlah produksi garam yang dihasilkan di lokasi non PKN | 2.100 kelompok dan 2,1 juta ton | 36,0 | KKP |
| III. KREDIT USAHA RAKYAT: | | | | | | |
| <i>Pelaksanaan penyempurnaan mekanisme penyaluran KUR mulai 2010 dan perluasan cakupan KUR mulai 2011</i> | | | | | | |
| III.1. | Dukungan Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) | Tersedianya anggaran penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) | Persentase tersedianya anggaran penjaminan KUR | 100 | 2.000,0 | Kemenkeu |
| III.2. | Koordinasi Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) | Meningkatnya koordinasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) | Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan KUR yang terimplementasikan | 75 | 1,5 | Menko Perekonomian |
| III.3. | Pengembangan keanggotaan koperasi melalui peningkatan kerjasama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi (GEMASKOP) | Menyebarkan dan meningkatkan pemahaman masyarakat umum mengenai koperasi dan praktek berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi | (1) Jumlah pelaksanaan sosialisasi program Gemaskop kepada tokoh masyarakat/kelompok strategis, kelompok ekonomi produktif, dan gerakan koperasi | 4 Event/ Provinsi | 3,3 | Kemen KUKM |
| | | | (2) Jumlah petugas lapangan koperasi yang direkrut, dilatih, dan melaksanakan tugas penyuluhan perkoperasian bagi masyarakat | 690 Orang | 22,8 | Kemen KUKM |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------|---|---|--|------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| III.4. | Pengembangan dan pematapan program pendanaan bagi koperasi dan UMKM | Meningkatnya kapasitas pembiayaan KSP/KJKS bagi UMKM | (1) Jumlah lembaga keuangan bukan bank yang ditingkatkan kapasitas dan jangkauan layanannya untuk menyediakan pembiayaan usaha | 100 KSP/KJKS | 0,8 | Kemen KUKM |
| | | | (2) Fasilitas pendayagunaan skim pendanaan bagi usaha mikro dan kecil | 1 Skim | 0,5 | Kemen KUKM |
| III.5. | Pengembangan, pengendalian dan pengawasan KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM | Meningkatnya kualitas kelembagaan KSP/USP-Koperasi, KJKS/UJKS-Koperasi dan LKM | Jumlah LKM yang terdaftar dan berbadan hukum koperasi | 100 LKM | 0,5 | Kemen KUKM |
| III.6. | Peningkatan dan perluasan akses permodalan bagi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah | Meningkatnya kapasitas dan jangkauan penyediaan modal/pembiayaan bagi koperasi dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah | (1) Jumlah koperasidan UMKM yang dapat mengakses kredit/pembiayaan bank melalui <i>linkage</i> | 500 UMKM | 0,4 | Kemen KUKM |
| | | | (2) Jumlah koperasi perkotaan dan perdesaan yang menerima bantuan dana | 1.100 Koperasi | 55,0 | Kemen KUKM |
| | | | (3) Jumlah KKMB yang ditingkatkan kapasitasnya | 150 KKMB | 0,4 | Kemen KUKM |
| | | | (4) Jumlah koperasi dan UMK yang memanfaatkan jasa pendampingan | 50 Koperasi | 0,4 | Kemen KUKM |
| | | | (5) Jumlah wirausaha pemula yang mendapatkan <i>start up capital</i> | 1.651 Wirausaha Pemula | 41,3 | Kemen KUKM |
| III.7. | Pengembangan asuransi, jasa keuangan dan perpajakan bagi koperasi dan UMKM | Meningkatnya kapasitas koperasi dan UMKM dalam pemanfaatan asuransi dan jasa keuangan, serta administrasi perpajakan | Jumlah lembaga keuangan mikro (bank, LKBB, dan LKM) yang memberikan kredit/pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM | 100 LKM | 0,6 | Kemen KUKM |
| III.8. | Pengembangan pembiayaan, penjaminan kredit dan pengembangan | Meningkatnya kapasitas penjaminan kredit dan pengembangan sektor strategis bagi | (1) Jumlah Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD | 2 Provinsi | 0,3 | Kemen KUKM |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|--|---|---|--------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | sektor strategis bagi koperasi dan UMKM | koperasi dan UMKM | (2) Jumlah Provinsi yang difasilitasi untuk proses pembentukan PPKD untuk mengembangkan <i>co-guarantee</i> dengan Lembaga Penjaminan Kredit Nasional | 2 Provinsi, 2 PPKD | 0,3 | Kemen KUKM |
| III.9. | Pengembangan sarana usaha pemasaran KUMKM | Berkembangnya sarana usaha pemasaran KUMKM | Jumlah dukungan revitalisasi sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi | 25 Unit | 25,0 | Kemen KUKM |
| III.10. | Pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan | Meningkatnya motivasi dan budaya berwirausaha serta berkembangnya kewirausahaan | (1) Jumlah peserta pemasyarakatan kewirausahaan | 3.000 Orang | 3,3 | Kemen KUKM |
| | | | (2) Jumlah peserta diklat kewirausahaan | - | 0,0 | Kemen KUKM |
| III.11. | Revitalisasi sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian | Tersusunnya sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian | Jumlah peserta peningkatan pemahaman perkoperasian | 1.200 Orang | 2,0 | Kemen KUKM |
| III.12. | Peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP | Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM pengelola LKM/KSP/USP | Diklat pengelola LKM | 250 Orang | 0,8 | Kemen KUKM |
| III.13. | Perluasan KUR | Meningkatnya penyaluran KUR | (1) Jumlah provinsi yang mendapat sosialisasi program KUR | 33 Provinsi | 3,0 | Kemen KUKM |
| | | | (2) Jumlah KUMKM yang didampingi untuk mengakses KUR | 27.520 UMKM | 14,3 | Kemen KUKM |
| III.14. | Peningkatan produktivitas dan mutu KUMKM | Meningkatnya produktivitas dan mutu KUMKM | Jumlah KUMKM yang memahami dan menerapkan inovasi dan teknologi tepat guna | 350 KUMKM | 2,6 | Kemen KUKM |
| III.15. | Revitalisasi dan pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan KUMKM | Tersedianya sistem dan lembaga penyelenggaraan diklat KUMKM yang berkualitas | Jumlah SDM koperasi dan UMKM yang mengikuti diklat | 21.500 orang | 140,5 | Kemen KUKM |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|---|--|-------------------|------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| IV. TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN: | | | | | | |
| <i>Revitalisasi Komite Nasional Penanggulangan Kemiskinan (KNPK) di bawah koordinasi Wakil Presiden, penggunaan unified database untuk penetapan sasaran program mulai 2009-2010, dan penerapan sistem monitoring dan evaluasi yang akurat sebagai dasar keputusan dan alokasi anggaran</i> | | | | | | |
| IV.1. | Koordinasi kebijakan pengarusutamaan kebijakan dan anggaran penanggulangan kemiskinan | Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang pengarusutamaan kebijakan dan anggaran | Tersusunnya draf rekomendasi kebijakan tentang: 1. rekomendasi kebijakan tentang integrasi program pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupten/kota (implementasi Peta Jalan PNPM Mandiri) 2. rekomendasi kebijakan Kemenkokesra untuk pemanfaatan data terpadu dan sistem informasi di bidang kesejahteraan rakyat (IKRAR) untuk pengelolaan pembangunan daerah | 2 | 1,7 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| IV.2. | Sekretariat koordinasi kebijakan penguatan kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan | Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan kelembagaan TKPK | Tersusunnya peningkatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan | 1 | 1,4 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| IV.3. | Koordinasi penguatan masyarakat dan kawasan | Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang penguatan masyarakat dan kawasan | Tersusunnya draf rekomendasi kebijakan tentang: 1. Penyiapan kapasitas pengelolaan PNPM Mandiri di tingkat kabupaten dan kota | 3 | 1,6 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|--|---|---|-------------------|------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 2. Model pengelolaan PNPM Pusaka 3. Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat di daerah | | | |
| IV.4. | Koordinasi kebijakan kelembagaan dan kemitraan | Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang kelembagaan dan kemitraan | <p>Tersusunnya draf rekomendasi kebijakan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan Penguatan Kapasitas Kelembagaan TKPKD 2. Kebijakan Model Kerjasama Kemitraan Daerah dengan Dunia Usaha 3. Kebijakan penanggulangan kemiskinan untuk pulau terluar, terpencil dan perbatasan | 3 | 11,0 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| IV.5. | Koordinasi kebijakan keuangan mikro dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) | Meningkatnya jumlah koordinasi, sinkronisasi, kajian serta pemantauan dan evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di bidang Keuangan Mikro dan Pemanfaatan TTG | <p>Tersusunnya draft rekomendasi kebijakan tentang:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Perluasan program pembiayaan kredit mikro untuk pengembangan usaha kelompok masyarakat PNPM Mandiri 2. Kebijakan Menkokesra tentang penguatan kelembagaan kelompok masyarakat binaan PNPM Mandiri. 3. Rekomendasi kebijakan tentang akses produk teknologi tepat | 3 | 1,5 | Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | guna bagi kelompok masyarakat PNPB Mandiri | | | |
| V. KLASSTER 4 PROGRAM-PROGRAM PRO-RAKYAT | | | | | | |
| V.1. | Penyusunan Kebijakan dan Program Serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan | Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Listrik dan Meningkatnya Rasio Elektrifikasi | Program listrik murah dan hemat | 16.000 Pelanggan | 200,0 | Kemen ESDM |
| V.2. | Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya/Rumah Sangat Murah | - | Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya (unit) | - | - | Kemen Perumahan Rakyat |
| | | | Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya (unit) | 180.000 | 1.938,6 | |
| | | | Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan PSU perumahan swadaya (unit) | - | - | |
| | | | Jumlah unit lahan dan bangunan rumah yang terfasilitasi pra-sertifikasi dan pendampingan pasca sertifikasi | 22.000 | 6.600,0 | |
| V.3. | Bantuan Pembiayaan Perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) | Meningkatnya keterjangkauan masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak | Jumlah KPR Rumah Murah yang mendapat bantuan pembiayaan perumahan dengan dukungan FLPP | 273.445 | 16.406,7 | Kemen Perumahan Rakyat |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| V.4. | Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil | Terbangunnya kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan minapolitan dengan usaha yang <i>bankable</i> serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap | Jumlah kelompok nelayan (KUB) penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi PKN | 1.000 | 100,0 | KKP |
| V.5. | Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan | Terpenuhinya kebutuhan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri | Jumlah pemberdayaan kelompok pembudidaya melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi PKN | 350 | 22,7 | KKP |
| V.6. | Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan | Meningkatnya nilai investasi bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan | Jumlah tenaga kerja pengolah dan pemasar yang meningkat kompetensinya dalam rangka Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) di lokasi PKN | 3.500 tenaga kerja, 700 poklhasar | 35,0 | KKP |
| V.7. | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha | Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian usaha skala mikro, beroperasinya sarana usaha mikro dan pencapaian produksi garam di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil | Jumlah kelompok yang menerima pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR) dan jumlah produksi garam yang dihasilkan di lokasi PKN | 1.400 kelompok dan 1,2 juta ton | 24,0 | KKP |
| | | | Jumlah sarana usaha mikro yang beroperasi di kawasan pesisir dan pulau- | 190 unit (0 unit SPDN) | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | pulau kecil | | | |
| V.8. | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, Pengembangan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | 275 kawasan MBR, 149 IKK, 1.610 desa, 139 kawasan khusus, 3 kawasan regional (PAMSIMAS) | SPAM di kawasan MBR | 396 kawasan | 4.496,4 | Kemen. PU |
| | | | SPAM di Ibu Kota Kecamatan (IKK) | 229 IKK | | |
| | | | SPAM perdesaan | 1.622 desa | | |
| | | | SPAM kawasan khusus | 177 kawasan | | |
| | | | SPAM regional | 5 kawasan | | |

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2014

| | |
|---------------------------|---|
| PRIORITAS 5 | PROGRAM AKSI DI BIDANG PANGAN |
| Tema Prioritas | Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan dan sumberdaya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,9% per tahun dan Indeks Nilai Tukar Petani sebesar lebih dari 105 pada 2014. |
| Penanggungjawab | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
| Bekerjasama Dengan | Menteri Pertanian; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Perindustrian; Menteri Keuangan; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Menteri Kesehatan; Menteri Negara Lingkungan Hidup; Kepala Badan Penerapan & Pengkajian Teknologi; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|----|---|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 1. | Koordinasi Kebijakan Pangan | Meningkatnya Koordinasi Urusan Ketahanan Pangan | Presentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan bidang ketahanan pangan yang diimplementasikan | 80% | 2,6 | Menko Perekonomian |
| 2. | Koordinasi Bidang Perkebunan dan hortikultura | Meningkatnya koordinasi Kebijakan Perkebunan dan Hortikultura | Presentase rekomendasi kebijakan Perkebunan dan Hortikultura yang diimplementasikan | 85% | 2,1 | Menko Perekonomian |
| 3. | Koordinasi Bidang Pengembangan Urusan Kelautan Perikanan dan Peternakan | Meningkatnya koordinasi Kebijakan Kelautan, Perikanan dan Peternakan | Presentase rekomendasi kebijakan bidang Pengembangan urusan perikanan dan peternakan yang diimplementasikan | 80% | 2,1 | Menko Perekonomian |
| 4. | Penyediaan dan pengembangan statistik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan | Meningkatnya kualitas data dan statistik dasar pertanian | Persentase penyediaan data dan informasi populasi rumah tangga pertanian, komoditi usaha pertanian, petani gurem, serta distribusi penguasaan lahan pertanian melalui pelaksanaan rangkaian kegiatan sensus pertanian 2013 | 100 | 1.186,5 | BPS |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|--|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| I. LAHAN, PENGEMBANGAN KAWASAN DAN TATA RUANG PERTANIAN: | | | | | | |
| <i>Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar</i> | | | | | | |
| a. Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian | | | | | | |
| I.a.1. | Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat | Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat | Jumlah paket rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang pertanahan dalam rangka mendukung pelaksanaan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan | 1 Paket | 5,2 | BPN |
| I.a.2. | Penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil | Tersedianya 200 lokasi yang memiliki rencana tata ruang LP3K meliputi Dokumen ICM, peta potensi, rencana strategis WP3K, rencana zonasi nasional/lintas wilayah/propinsi/kab/kota, dan rencana zonasi rinci kawasan; serta lokasi yang memiliki dokumen pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang meliputi akreditasi, HP3, sempadan pantai dan evaluasi implementasi ICM/penataan ruang LP3K | Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di wilayah nasional, lintas wilayah, provinsi/Kabupaten/Kota yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. | 15 | 35,0 | KKP |
| b. Pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar | | | | | | |
| I.b.1. | Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian | Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, luasan areal pertanian baru dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian | Pengembangan optimasi lahan (Ha) | 260.000 | 1.634,6 | Kementan |
| | | | Pendampingan cetak sawah (Paket) | 40.000 | | |
| | | | Perluasan sawah (ha) | 40.000 | | |
| | | | Jumlah (Ha) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) | 250.000 | | |
| | | | Jumlah perluasan areal hortikultura/perkebunan/peternakan | 15.000 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|--|---|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Pengembangan areal pertanian dan peternakan di Papua dan Papua Barat ,Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) | - | | |
| | | | Jumlah bidang tanah petani yang di pra-sertifikasi | 1.300 | | |
| | | | Dukungan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Bulan) | 12 | | |
| | c. Penertiban, serta optimasi penggunaan lahan terlantar | | | | | |
| | | | | | | |
| II. INFRASTRUKTUR | | | | | | |
| <i>Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya.</i> | | | | | | |
| a. Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya. | | | | | | |
| II.a.1. | Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian | Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, luasan areal pertanian baru dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian | Pengembangan Jalan Pertanian (Km) | - | - | Kementan |
| II.a.2. | Pengembangan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan | Meningkatnya pembangunan dan pencapaian standar pelayanan prima di pelabuhan perikanan dengan fasilitas penunjang produksi, pengolahan, pemasaran dan kesyahbandaran yang sesuai standar. | Jumlah pelabuhan perikanan yang dibina, termasuk pembangunan di lingkur luar dan daerah perbatasan yang potensial (unit) | 816 | 605,0 | KKP |
| | | | Jumlah penyiapan pembangunan pelabuhan perikanan sesuai dengan rencana induk (lokasi) | 25 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|--|---|--|--|------------------------------|--------------------|
| | | | Jumlah pelabuhan perikanan yang optimal melakukan kegiatan Wilayah Kerja Operasional Pelabuhan Perikanan (WKOPP), K3, Operasional Pelabuhan Perikanan (lokasi) | 20 | | |
| | | | Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan UPT Daerah untuk mendukung minapolitan termasuk lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi) | 5 | | |
| | | | Jumlah pengembangan, peningkatan operasional, dan kualitas layanan pelabuhan perikanan UPT pusat, termasuk di Lingkaran Luar dan daerah perbatasan yang potensial (Lokasi) | 22 | | |
| II.a.3. | Pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan pengawakan kapal perikanan | Terwujudnya kecukupan kapal perikanan Indonesia (yang laik laut, laik tangkap dan laik simpan), alat tangkap ikan (sesuai SNI) dan pengawakan yang memenuhi standar di setiap WPP | Jumlah kapal penangkap ikan yang memenuhi standar laik laut, laik tangkap, dan laik simpan (unit) | 650 | 268,3 | KKP |
| | | | Pengadaan kapal perikanan >30 GT (kapal) | 100 (130 kapal lainnya dipenuhi melalui DAK) | | |
| | | | Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (unit) | 1552 | | |
| | | | Jumlah awak kapal perikanan yang meningkat kemampuannya dan tersertifikasi (orang) | 210 | | |
| b. Pembangunan dan pemeliharaan pengairan yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi | | | | | | |
| II.b.1. | Pengelolaan Air Irigasi Untuk | Meningkatnya ketersediaan air irigasi | Pengembangan jaringan irigasi (Ha) | 500.000 | 738,6 | Kementan |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|---|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | Pertanian | dalam mendukung produksi pertanian | Pengembangan sarana dan prasarana air irigasi untuk pertanian (Unit) | 50 | | |
| | | | Konservasi air dan antisipasi anomali iklim (Paket) | 400 | | |
| | | | Jumlah (unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. | 280 | | |
| | | | Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. | 500 | | |
| | | | Water Resources and Irrigation Sector Management Program (WISMP) (Paket) | 1 | | |
| | | | Dukungan pengelolaan air irigasi untuk pertanian (bulan) | 12 | | |
| II.b.2. | Pengembangan sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan | Tersedianya lahan kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana sesuai kebutuhan | Luas lahan budidaya yang difasilitasi sesuai target produksi disertai data potensi yang akurat (hektar) | 1.316.666 | 255,0 | KKP |
| | | | Jumlah kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai (kawasan) | 460 | | |
| | | | - payau | 123 | | |
| | | | - kawasan tawar | 202 | | |
| | | | - kawasan laut | 135 | | |
| | | | Jumlah pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya (kabupaten/kota) | 70 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|---|---|--|--|------------------------------|--------------------|
| II.b.3. | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Terjaganya kualitas dan cakupan layanan pada daerah irigasi dan daerah rawa | Luas layanan jaringan irigasi yang ditingkatkan | 44.064 ha | 1.856,9 | Kemen. PU |
| | | | Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi | 129.777 ha | 835,1 | |
| | | | Luas jaringan irigasi yang dioperasikan dan dipelihara | 2.349.943 ha | 1.044,1 | |
| | | | Luas jaringan rawa yang dioperasikan dan dipelihara | 1.191.007 ha | 256,2 | |
| | | | Jumlah sumur air tanah yang direhabilitasi | 608 sumur air tanah | 103,0 | |
| | | | Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara | 2.174 sumur air tanah | 61,8 | |
| | | | Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi | 105.313 ha | 470,6 | |
| | | | Luas layanan jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan dipelihara | 72.250ha | 21,0 | |
| II.b.4. | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Meningkatnya ketersediaan dan terjaganya kelestarian air | Jumlah waduk dan embung/situ yang dibangun | 21 waduk dalam pelaksanaan, 2 waduk diantaranya selesai dibangun | 2.619,7 | Kemen. PU |
| | | | Jumlah waduk yang direhabilitasi | 13 waduk | 82,9 | |
| | | | Jumlah waduk/embung/situ yang dioperasikan/dipelihara | 1.305 buah | 128,4 | |
| | | | Jumlah kawasan sumber air yang di konservasi | 24 kawasan | 163,3 | |
| | | Meningkat dan terjaganya ketersediaan air serta terkendalinya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo | Jumlah waduk yang dibangun di DAS Bengawan Solo | 1 waduk bendo (ponorogo); 1 waduk | 689,5 | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|--|--|---|---|------------------------------|--------------------|
| | | | | gondang (karanganyar); 1 waduk gongseng (bojonegoro); 1 waduk tukul (pacitan); 1 waduk pidekso (wonogiri) | | |
| | | | Prasarana sumber daya air di DAS Bengawan Solo yang direhabilitasi | Tertanganinya sedimen waduk Wonogiri, rehabilitasi 3 waduk (Cengklik, Banjar Anyar, Kedung Uling) | 8,0 | |
| | | | Terlaksananya konservasi di DAS Bengawan Solo | DAS Kali Asih, DAS Kali Pacal' Kali Kening | 6,0 | |
| III. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN: | | | | | | |
| Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi. | | | | | | |
| III.1. | Penelitian dan Pengembangan Peternakan | Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Swasembada Daging Sapi (PSDS)-2014 | Jumlah galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi (Galur) | 13 | 114,3 | Kementan |
| | | | Jumlah inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner (teknologi) | 30 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------|--|---|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Jumlah bibit/benih sumber ternak dan TPT (ekor/batang) | 6230/18.000 | | |
| | | | Jml rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan veteriner (rekomendasi) | 4 | | |
| | | | Dukungan penelitian dan pengembangan peternakan (Bulan) | 12 | | |
| III.2. | Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan | Tersedianya varietas unggul baru, benih sumber dan peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung pencapaian swasembada padi dan jagung berkelanjutan, swasembada kedelai, serta peningkatan produktivitas tanaman pangan lainnya | Jumlah varietas unggul baru tanaman pangan (varietas) | 14 | 130,2 | Kementan |
| | | | Jumlah inovasi teknologi budidaya, panen dan pasca panen (teknologi) | 13 | | |
| | | | Jumlah produksi benih sumber padi serealisa serta kacang dan umbidengan SSM ISO 9001-2008 (ton) | 70 | | |
| | | | Dukungan penelitian dan pengembangan tanaman (Bulan) | 12 | | |
| III.3. | Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura | Meningkatnya inovasi teknologi Hortikultura untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk Hortikultura yang berkelanjutan | Jumlah benih sumber buah tropika, jeruk dan buah sub tropika (batang) | 18.700 | 89,1 | Kementan |
| | | | Jumlah benih sumberanggrek dan tanaman hias lainnya (planlet) | 4.000 | | |
| | | | Jumlah benih sumber batang bawah dan batang atas jeruk hasil SE | 300.000 | | |
| | | | Jumlah benih sumber kentang | 26.000 | | |
| | | | Jumlah benih sumberbawang merah | 35.000 | | |
| | | | Jumlah benih sumber krisan (stek) | 250.000 | | |
| III.4. | Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan | Meningkatnya inovasi teknologi tanaman perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tanaman perkebunan | Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan (varietas) | 10 | 113,4 | Kementan |
| | | | Jumlah inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (teknologi) | 21 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------|---|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Jumlah benih sumber tanaman perkebunan (ton) | 360 | | |
| | | | Jumlah bibit tebu melalui teknologi SE (Budset G2) | 2.500.000 | | |
| | | | Dukungan penelitian dan pengembangan peternakan (Bulan) | 12 | | |
| III.5. | Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian | Meningkatnya inovasi hasil bioteknologi dan pengelolaan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian | Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian (Galur) | 42 | 53,9 | Kementan |
| | | | Jumlah inovasi teknologi berbasis bioteknologi (teknologi) | 4 | | |
| | | | Dukungan kegiatan penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumberdaya genetik pertanian (Bulan) | 12 | | |
| III.6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati.(Prioritas Nasional dan Bidang) | Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif | Layanan sertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (bulan) | 12 | 456,7 | Kementan |
| | | | Dukungan manajemen UPT lingkup Badan Karantina (Bulan) | 12 | | |
| III.7. | Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian | Meningkatnya inovasi teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian mendukung ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor | Jumlah inovasi teknologi penanganan segar dan pengolahan hasil pertanian (Teknologi) | 17 | 28,1 | Kementan |
| | | | Dukungan penelitian dan pengembangan bioteknologi pasca panen pertanian (bulan) | 12 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|---|---|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| III.8. | Pengawasan dan penerapan teknologi terapan adaptif perikanan budidaya | Meningkatnya pengawasan dan pendampingan teknologi dalam rangka pengembangan kawasan perikanan budidaya | Jumlah diseminasi teknologi dalam rangka pengembangan kawasan minapolitan | 71 | 13,0 | KKP |
| | | | Teknologi inovatif budidaya hasil perekayasaan (paket) | 14 | | |
| III.9. | Penelitian dan pengembangan IPTEK perikanan budidaya | Usulan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), rekomendasi, inovasi teknologi dan produk biologi yang meningkatkan efisiensi produksi, ragam, kualitas dan keamanan komoditas unggulan. | Jumlah rekomendasi dan bahan kebijakan untuk pengembangan perikanan budidaya | 4 | 134,7 | KKP |
| | | | Jumlah paket inovasi teknologi yang dihasilkan/direkomendasikan/diusulkan HKI/penghargaan, serta data dan informasi untuk peningkatan produksi dan produktivitas perikanan budidaya | 13 | | |
| | | | Jumlah model penerapan iptek perikanan budidaya | 7 | | |
| III.10. | Penelitian dan Pengembangan IPTEK Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan | Usulan HKI, rekomendasi, paket teknologi serta inovasi teknologi dan bioteknologi yang meningkatkan efisiensi pengolahan secara optimal, ragam, nilai tambah, kualitas dan keamanan produk unggulan/ prospektif | Jumlah rekomendasi iptek pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan | 1 | 40,1 | KKP |
| | | | Jumlah model penerapan iptek pengolahan produk kelautan dan perikanan | 3 | | |
| | | | Jumlah paket inovasi teknologi, usulan HKI/penghargaan pengolahan produk dan bioteknologi kelautan dan perikanan | 4 | | |
| III.11. | Litbang Benih Unggul Berbasis Biologi Molekuler | Benih unggul berbasis biologi molekuler | Jumlah varietas Benih unggul | 2 | 2,0 | LIPI |
| III.12. | Penelitian bioteknologi peternakan modern | Terbangunnya fasilitas litbang bioteknologi peternakan modern | jumlah Paket pengembangan program biotek peternakan | 4 | 7,0 | LIPI |
| | | | Pembangunan Sarana Penelitian | 1 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|--|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| III.13. | Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi | Benih unggul dan paket aplikasi isotop dan radiasi | Jumlah varietas hasil pengembangan aplikasi teknologi isotop dan radiasi | 7 | 60,8 | BATAN |
| | | | Jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi | 1 | | |
| IV. INVESTASI, PEMBIAYAAN DAN SUBSIDI | | | | | | |
| <i>Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau</i> | | | | | | |
| a. Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk -yste oleh pelaku usaha dan pemerintah | | | | | | |
| IV.a.1 | Pengelolaan Produksi Budidaya Serealia | Mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan (SL) dan Dem Area | Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Padi (Ha) | 4.625.000 | 1.272,6 | Kementan |
| | | | Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Jagung (Ha) | 260.000 | | |
| | | | Pembinaan dan pengawasan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi (Laporan) | 1.231 | | |
| IV.a.2 | Pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi | Mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan (SL) dan Dem Area | Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Komoditas Kedelai (Ha) | 77.500 | 740.7 | Kementan |
| | | | Perluasan areal tanaman kedelai (Ha) | 340.000 | | |
| | | | Pembinaan dan pengawasan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi (laporan) | 136 | | |
| | | | | | | |
| IV.a.3 | Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan | Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi | Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (BPSBTPH) | 32 | 202,6 | Kementan |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------|---|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat | (Balai) | | | |
| | | | Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat (BBI) (Balai) | 38 | | |
| | | | Pemberdayaan Penangkaran Benih (unit) | 362 | | |
| | | | Pengembangan, pembinaan dan pengawalan pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan (Prov) | 33 | | |
| IV.a.4 | Penanganan pasca panen tanaman pangan | Mengamankan kehilangan hasil produksi pada saat pascapanen (susut) | Jumlah kelompok tani yang mendapatkan Bantuan Sarana Pasca Panen tanaman pangan (unit) | 836 | 175,9 | Kementan |
| | | | Pembinaan dan pengawalan kegiatan penanganan pasca panen tanaman pangan (Laporan) | 352 | | |
| IV.a.5 | Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan | Meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanen buah | Pengembangan Kawasan tanaman buah (Ha) | 6.172 | 101,6 | Kementan |
| | | | Registrasi kebun tanaman buah (kebun) | 870 | | |
| | | | Fasilitasi pengelolaan pasca panen tanaman buah (unit) | 55.921 | | |
| IV.a.6 | Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tan. Obat Berkelanjutan | Meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan lahan usaha dan penanganan pascapanen sayuran dan tanaman obat | Pengembangan Kawasan Tanaman sayuran (Ha) | 5.450 | 78,0 | Kementan |
| | | | Registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat (LU) | 1.200 | | |
| | | | Fasilitasi pengelolaan pasca panen tanaman sayuran dan tanaman obat (unit) | 550 | | |
| | | | Pengembangan Kawasan Tanaman obat (Ha) | 750 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|--|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| IV.a.7 | Pengembangan sistem perbenihan hortikultura | Berkembangnya sistem perbenihan hortikultura dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura | Penguatan kelembagaan perbenihan hortikultura (lembaga) | 199 | 79,6 | Kementan |
| | | | Ketersediaan benih tanaman sayuran bermutu (Kg) | 862.319 | | |
| | | | Ketersediaan benih tanaman Florikultura (Benih) | 9.132.452 | | |
| | | | Ketersediaan benih tanaman obat (Kg) | 37.128 | | |
| | | | Ketersediaan benih tanaman Tanaman Buah (Batang) | 1.246.799 | | |
| IV.a.8 | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim | Meningkatnya luas areal tanaman semusim | Pengembangan tanaman tebu (Bongkar ratoon dan perluasan areal) (Ha) | 79.000 | 906,5 | Kementan |
| | | | Pengembangan Tanaman Kapas (Ha) | 1.050 | | |
| | | | Pengembangan Tanaman Nilam (Ha) | 50 | | |
| | | | Pengembangan tanaman semusim lainnya (Ha) | - | | |
| | | | Pemberdayaan pekebun tanaman semusim (Orang) Dukungan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah (Bulan) | - 12 | | |
| IV.a.9 | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar | Meningkatnyaluas areal tanaman rempah penyegar | Pengembangan Tanaman Kopi (Ha) | 3.500 | 139,1 | Kementan |
| | | | Pengembangan Tanaman Teh (Ha) | 575 | | |
| | | | Pengembangan Tanaman Kakao (Ha) | 7.700 | | |
| | | | Pengembangan Tanaman Lada (Ha) | 282 | | |
| | | | Pengembangan Tanaman Cengkeh (Ha) | 850 | | |
| Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan Tanaman rempah dan Penyegar (Orang) | 1.000 | | | | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|--|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Pengembangan Tanaman Pala | 3.265 | | |
| | | | Pengembangan kebun benih Tanaman Rempah dan Penyegar (Ha) | 100 | | |
| | | | Dukungan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah (Bulan) | 12 | | |
| IV.a.10 | Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal | Tercapainya peningkatan produksi dan populasi ternak | Pengembangan kawasan dan budidaya sapi potong (Kelompok) | 320 | 400,3 | Kementan |
| | | | Pengembangan budidaya sapi perah (Kelompok) | 36 | | |
| | | | Pengembangan kawasan dan budidaya kerbau (kelompok) | 55 | | |
| | | | Penguatan kelembagaan pelayanan IB (Unit) | 300 | | |
| | | | Peningkatan kapasitas petugas IB, PKB, ATR (Orang) | 1.100 | | |
| | | | optimalisasi Inseminasi Buatan (Dosis) | 1.931.900 | | |
| | | | Optimalisasi Intensifikasi Kawin Alam (ekor) | 3.000 | | |
| | | | Pengembangan ternak kambing/domba (kelompok) | 48 | | |
| | | | Pengembangan budidaya unggas lokal (kelompok) | 120 | | |
| | | | Pengembangan budidaya babi (kelompok) | 34 | | |
| | | | Pengembangan budidaya puyuh (kelompok) | 20 | | |
| | | | Pengembangan budidaya kelinci (kelompok) | 37 | | |
| | | | Pengembangan Indukan sapi di Papua dan | 1.200 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|--|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Papua Barat (ekor) | | | |
| | | | Pengembangan Sapi potong pada kegiatan UPPO (Kelompok) | 200 | | |
| | | | Dukungan peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Bulan) | 12 | | |
| IV.a.11 | Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal | Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal | Pengembangan Bahan Pakan Ternak (Kelompok) | 10 | 203,0 | Kementan |
| | | | Pengembangan integrasi tanaman - ruminansia (kelompok) | 200 | | |
| | | | Pengembangan padang penggembalaan (kelompok) | 3 | | |
| | | | Pengembangan unit pengolahan pakan (kelompok) | 195 | | |
| | | | Pengawasan mutu dan pengujian mutu pakan ternak (Sampel) | 5.000 | | |
| | | | Dukungan pakan dalam pengembangan kawasan sapi potong dan sapi perah (kelompok) | 200 | | |
| | | | Penguatan sumber bibit hijauan pakan ternak di UPT/UPTD (unit) | 33 | | |
| | | | Penanaman dan pengembangan tanaman pakan ternak berkualitas (stek) | 2.000.000 | | |
| | | | Dukungan peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal (Bulan) | 34 | | |
| | | | Pengembangan lumbung pakan ruminansia (kelompok) | 20 | | |
| | | | Optimalisasi sumber bibit/benih (HPT) di kelompok (kelompok) | 50 | | |
| IV.a.12 | Pengembangan pengolahan | Meingkatnya usaha pengolahan hasil | Jumlah unit usaha pengolahan hasil | 204 | 238,4 | Kementan |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|--|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | hasil pertanian | pertanian yang berkelanjutan | tanaman pangan (unit) | | | |
| | | | Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura (unit) | 74 | | |
| | | | Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (unit) | 110 | | |
| | | | Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan (unit) | 173 | | |
| | | | Dukungan kegiatan pengembangan pengolahan hasil pertanian (Bulan) | 12 | | |
| IV.a.13 | Pengembangan mutu dan standarisasi pertanian | Meningkatnya mutu hasil pertanian | Jumlah rancangan SNI produk pertanian (dokumen) | 27 | 64,0 | Kementan |
| | | | Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu (unit) | 150 | | |
| | | | Jumlah laboratorium pengujian dan lembaga penilaian kesesuaian (unit/lab) | 43 | | |
| | | | Jumlah kerjasama standar mutu dan harmonisasi standar mutu (kerjasama) | 6 | | |
| | | | Jumlah pengujian dan sertifikasi alsintan (unit/lembaga) | 225 | | |
| | | | Jumlah pengawasan jaminan mutu (unit) | 30 | | |
| | | | Dukungan kegiatan pengembangan mutu dan standarisasi (Bulan) | 12 | | |
| IV.a.14 | Pengembangan pemasaran internasional | Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian | Jumlah partisipasi dalam perundingan internasional bidang pertanian untuk memperjuangkan pemasaran komoditi pertanian Indonesia (laporan) | 27 | 32,4 | Kementan |
| | | | Jumlah hasil analisa data ekspor dan impor komoditi pertanian serta data perdagangan lainnya yang diperlukan (laporan) | 13 | | |
| | | | Jumlah bahan posisi Delri sebagai bahan | 36 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|--|---|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | perundingan dalam negosiasi kerjasama pemasaran forum bilateral, regional dan multilateral komoditi pertanian (laporan) | | | |
| | | | Jumlah Akselerasi Ekspor Komoditi Pertanian (unit) | 40 | | |
| | | | Dukungan kegiatan pengembangan pemasaran internasional (Bulan) | 12 | | |
| IV.a.15 | Pengembangan penanganan pasca panen komoditas perkebunan | Meningkatnya mutu produk perkebunan | Pembinaan usaha perkebunan berkelanjutan (Kabupaten) | 242 | 37,6 | Kementan |
| | | | Penanganan gangguan usaha dan konflik perkebunan (Kabupaten) | 173 | | |
| | | | Penilaian Usaha perkebunan (Kabupaten) | 185 | | |
| | | | Penerapan standar perkebunan besar/rakyat berkelanjutan (Kabupaten) | 126 | | |
| | | | Bantuan peralatan penanganan pasca panen tanaman perkebunan (Paket) | 210 | | |
| | | | Dukungan pengembangan penanganan pasca panen komoditas perkebunan (Bulan) | 12 | | |
| IV.a.16 | Pemantapan sistem penyuluhan pertanian | Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah | Kelembagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi (Unit) | 1.417 | 682,3 | Kementan |
| | | Meningkatnya jumlah kelembagaan petani | Kelembagaan petani yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit) | 6.500 | | |
| | | Meningkatnya kualitas program dan materi penyuluh pertanian | Materi Penyuluhan Yang dihasilkan (judul) | 2.988 | | |
| | | Meningkatnya kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian | Pengawasan dan pendampingan penyuluh di lokasi SL-PTT (WKPP) | 13.800 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|---|---|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Dukungan pemantapan sistem penyuluhan pertanian (Bulan) | 12 | | |
| IV.a.17 | Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati | Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif | Layanan sertifikasi karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (bulan) | 12 | 456,7 | Kementan |
| | | | Dukungan manajemen UPT lingkup Badan Karantina (Bulan) | 12 | | |
| IV.a.18 | Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metoda Karantina Pertanian | Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektifitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran | Jumlah laboratorium karantina yang diakreditasi terhadap jumlah fasilitas yang diberikan | 2 | 58,6 | Kementan |
| | | | Rekomendasi teknik dan metode tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati (Dok) | 3 | | |
| | | | Diseminasi teknik dan metod karantina dan pengawasan keamanan hayati(keg) | 6 | | |
| | | | Jumlah sampel lab. Yang diperiksa sesuai ruang ingkup pengujian (sampel) | 6.000 | | |
| IV.a.19 | Pengembangan sistem usaha pembudidayaan ikan | Meningkatnya penyediaan modal kerja guna berkembangnya usaha perikanan budidaya yang mandiri | Jumlah kelompok usaha perikanan budidaya yang memenuhi standar kelembagaan (kelompok) | 2.400 | 30,0 | KKP |
| | | | Jumlah tenaga kerja perikanan budidaya (orang) | 6.843.353 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|---|---|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| IV.a.20 | Pengembangan sistem produksi pembudidayaan ikan | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan pakan dengan pakan yang teregistrasi, unit usaha budidaya yang tersertifikasi dan tersedianya data statistic perikanan budidaya yang akurat dan mutakhir | Jumlah unit pembudidayaan ikan yang bersertifikat dan memenuhi standar (unit) | 8.000 | 85,0 | KKP |
| IV.a.21 | Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil | Terbangunnya kawasan potensi perikanan tangkap yang menjadi kawasan Minapolitan dengan usaha yang bankable serta realisasi investasi usaha perikanan tangkap. | Jumlah kawasan minapolitan potensi perikanan tangkap yang memiliki Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang Mandiri (lokasi) | 43 | 58,0 | KKP |
| | | | Jumlah pengembangan kelembagaan kelompok usaha bersama (KUB) yang mandiri | 1.800 | | |
| IV.a.21 | Fasilitasi pengembangan industri pengolahan hasil perikanan | Meningkatnya produk olahan hasil perikanan dengan kemasan dan mutu terjamin | Jumlah sarana prasarana pengolahan hasil perikanan yang dibina dan dikembangkan (lokasi) | 143 (30 baru, 113 lanjutan) | 129,6 | KKP |
| | | | Lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil, dan menengah (lokasi) | 42 (5 baru, 37 lanjutan) | | |
| | | | Ragam produk olahan bernilai tambah di lokasi yang dibina | 60 (14 baru, 46 lanjutan) | | |
| | | | Unit pengolahan ikan yang bersertifikat kelayakan pengolahan (SKP) | 1.995 | | |
| IV.a.22 | Pelayanan Usaha Perikanan Tangkap yang efisien, tertib, dan berkelanjutan | Meningkatnya pelayanan prima dan ketertiban usaha perikanan tangkap sesuai ketersediaan SDI di setiap WPP secara akuntabel dan tepat waktu | Jumlah dokumen usaha perikanan tangkap yang tertibkan | 10.000 | 23,2 | KKP |
| | | | Jumlah pelaku usaha perikanan tangkap yang memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku (orang/badan hukum) | 3.500 | | |
| | | | Jumlah kapal dan jenis alat tangkap yang | 6.900 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|---|--|---|-----------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | diperbolehkan menangkap di seluruh WPP | | | |
| IV.a.23 | Fasilitasi pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan | Meningkatnya jumlah nilai investasi (PMA dan PMDN) bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan jumlah unit pengolahan ikan yang memenuhi standar ketenagakerjaan | Jumlah pelaku usaha bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang melakukan kemitraan usaha. | 1.240 pelaku usaha | 29,7 | KKP |
| IV.a.24 | Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan | Meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan dari US\$ 3,6 miliar pada tahun 2012 menjadi US\$ 5,5 miliar pada tahun 2015 | Jumlah peningkatan negara tujuan ekspor dan jumlah eksportir hasil perikanan berskala UKM yang dibina dalam rangka pengembangan ekspor perikanan | 3 Negara, 30 UKM | 17,8 | KKP |
| | | | Persentase nilai impor hasil perikanan sesuai standar mutu yang dikendalikan dalam rangka memenuhi kebutuhan pasat dan industri terhadap nilai ekspor | < 20% terhadap nilai ekspor | | |
| IV.a.25 | Penyuluhan kelautan dan perikanan | Meningkatnya kawasan potensi perikanan yang memiliki kelompok pelaku utama yang mandiri dalam mengembangkan usaha perikanan | Jumlah kelompok pelaku utama/usaha yang disuluh | 51.270 | 74,1 | KKP |
| | | | Jumlah pelaku perikanan yang melakukan penyuluhan KP (orang) | 12.000 | | |
| IV.a.26 | Pelatihan kelautan dan perikanan | Terselenggaranya pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi lulusan sesuai kebutuhan | Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai kebutuhan | 17.200 | 105,0 | KKP |
| IV.a.27 | Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar | Tumbuh dan kuatnya struktur industri kimia dasar | Jumlah Dokumen Pengembangan Aplikasi Teknologi Isotop dan Radiasi | 10 | 36,6 | Kemenperin |
| | | | Tumbuh dan berkembangnya klaster industri berbasis migas | 1 | | |
| | | | Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi | 6 | | |
| | | | Terbangunnya pabrik pupuk organik | 10 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|--|---|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Terfasilitasinya revitalisasi industri pupuk | 3 | | |
| IV.a.28 | Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau | Pada Akhir Tahun 2014, Utilisasi Kapasitas Produksi Pulih Mencapai 87,5 Persen (%) Sebagaimana Sebelum Krisis | Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) | 5 | 34,6 | Kemenperin |
| | | | Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya | 4 | | |
| IV.a.29 | Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan | Meningkatnya luas areal tanaman Tahunan | Pengembangan Tanaman Karet (Ha) | 9.600 | 144,7 | Kementan |
| | | | Perluasan tanaman karet di daerah perbatasan tertinggal (Ha) | - | | |
| | | | Pengembangan Tanaman Kelapa (Ha) | 11.600 | | |
| | | | Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit (Ha) | - | | |
| | | | Pengembangan Tanaman Jambu Mete (Ha) | 2.000 | | |
| | | | Pemberdayaan kelembagaan dan Pekebun tanaman tahunan (Orang) | 5.960 | | |
| | | | Revitalisasi Perkebunan : Kelapa sawit (Laporan) | 60 | | |
| | | | Pengembangan Tanaman Sunan Kemiri (Ha) | - | | |
| | | | Pengembangan kebun benih tanaman tahunan (Ha) | 180 | | |
| | | | Pengembangan tanaman sagu di papua dan papua Barat (Ha) | 800 | | |
| | | | Dukungan peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman tahunan (bulan) | 12 | | |
| IV.a.30 | Pengembangan usaha dan investasi | Meningkatnya usaha, kemitraan, kewirausahaan dan investasi di sektor pertanian | Jumlah unit usaha binaan kemitraan dan kewirausahaan di sektor pertanian (laporan) | 163 | 39,1 | Kementan |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|--|---|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | Jumlah fasilitasi investasi di sektor pertanian (laporan) | 32 | | |
| | | | Jumlah pameran, promosi, eksibisi dan perlombaan dalam negeri maupun luar negeri (kegiatan) | 150 | | |
| | | | Dukungan kegiatan pengembangan usaha dan investasi (Bulan) | 12 | | |
| IV.a.31 | Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI | Terkendalinya serangan OPT dan DPI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat | Sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLPHT) (orang) | 2.500 | 174,4 | Kementan |
| | | | Sekolah lapang iklim/SLI (orang) | 192 | | |
| | | | Operasional laboratorium pengamatan hama penyakit/laboratorium agen hayati (unit) | 95 | | |
| | | | Operasional brigade proteksi tanaman/BPT (unit) | 84 | | |
| | | | Pembinaan dan pengawasan kegiatan perlindungan tanaman pangan (laporan) | 1.886 | | |
| IV.a.32 | Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal | Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah, domba, kambing, ayam buras, itik) yang bersertifikat melalui: | Pembibitan ternak sapi potong, sapi perah dan kerbau (kelompok) | 128 | 383,8 | Kementan |
| | | Penguatan kelembagaan perbibitan yang menerapkan good breeding practices | Pembibitan kambing/domba, babi, ayam lokal, itik lokal (kelompok) | 105 | | |
| | | Peningkatan penerapan standar mutu benih dan bibit ternak | Peningkatan produksi embrio ternak (embrio) | 700 | | |
| | | Peningkatan penerapan teknologi perbibitan | Peningkatan produksi dan kualitas semen beku (dosis) | 5.000.000 | | |
| | | Pengembangan usaha dan investasi perbibitan | Peningkatan kualitas bibit unggul (ekor) | 439.000 | | |
| | | | Penguatan sapi/kerbau betina bunting | 250 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|---|---|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | (kelompok) | | | |
| | | | Dukungan kegiatan peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumberdaya lokal (Bulan) | 12 | | |
| IV.a.33 | Pengembangan pemasaran domestik | Meningkatnya pemasaran hasil pertanian di tingkat domestik | Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani (unit) | 120 | 90,3 | Kementan |
| | | | Jumlah komoditi dalam pemantauan dan stabilisasi harga komoditas pertanian utama (komoditi) | 36 | | |
| | | | Jumlah kerjasama dan jaringan pasar (laporan) | 73 | | |
| | | | Jumlah unit pelayanan informasi pasar komoditi pertanian (lokasi) | 600 | | |
| | | | Dukungan kegiatan pengembangan pemasaran domestik (Bulan) | 12 | | |
| IV.a.34 | Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian | Meningkatnya sistem penyediaan dan pengawasan alat dan mesin pertanian beserta kelembagaannya | Pengembangan/bantuan alat dan mesin pertanian (Unit) | 6.890 | 201,9 | Kementan |
| | | | Jumlah (paket) UPJA Mandiri | 20 | | |
| | | | Jumlah operasional pengembangan, pengawasan dan kelembagaan alsintan (UPJA) (Paket) | 32 | | |
| | | | Dukungan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (Bulan) | 12 | | |
| b. | Penyediaan pembiayaan yang terjangkau | | | | | |
| IV.b.1 | Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan belanja subsidi dan belanja lain-lain | Tersusunnya laporan keuangan BSBL yang transparan dan akuntabel | Laporan Keuangan belanja subsidi lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu | 100% | 1,81 | Kemenkeu |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|--|--|---|-------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | (BSBL) | | | | | |
| IV.b.2 | Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (ABPP) | Terlaksananya kebijakan penganggaran yang transparan dan akuntabel | Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang tepat waktu dan efisien | 100% | 6,63 | Kemenkeu |
| c. | Sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu , tepat jumlah, dan terjangkau. | | | | | |
| IV.c.1 | Penyaluran subsidi benih tanaman pangan | Tersalurnya benih tanaman pangan bersubsidi | Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton) | 137,2 | 1.564,8 | Kementan |
| IV.c.2 | Penyaluran pupuk bersubsidi | Tersalurnya Pupuk Bersubsidi | Jumlah penyaluran pupuk bersubsidi (juta ton) | 8,1 | 18.048,9 | Kemenkeu |
| IV.c.3 | Pengembangan sistem perbenihan ikan | Terpenuhinya kebutuhan benih untuk produksi dan pasar dengan mutu terjamin dan data akurat. | Jumlah produksi induk unggul (juta induk) | 13 | 85,0 | KKP |
| | | | Jumlah unit perbenihan yang bersertifikat (unit) | 225 | | |
| | | | Jumlah benih dengan mutu terjamin (miliar benih) | 61 | | |
| | | | Jumlah bibit Rumput Laut (ton) | 750.000 | | |
| IV.c.4 | Penyediaan Subsidi Beras untuk Masyarakat Miskin (RASKIN) | Penyediaan beras untuk seluruh rumah tangga sasaran (RTS) dengan jumlah yang memadai dalam satu tahun. | Jumlah RTS penerima RASKIN (dengan 15 kg per RTS selama 12 bulan) | - | Dialokasikan di PN 4 | Kementerian Sosial/ Perum BULOG |
| V . PANGAN DAN GIZI | | | | | | |
| <i>Peningkatan Kualitas Gizi dan Keaneekaragaman Pangan Melalui Pola Pangan Harapan</i> | | | | | | |
| V.1 | Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan | Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan | Fasilitasi peralatan kesmavet, kios daging, tempat pengumpulan susu (unit) | 45 | 169,5 | Kementan |
| | | | Pengujian mutu produk peternakan (sampel) | 17.000 | | |
| | | | Fasilitasi Rumah Potong Hewan | 42 | | |
| | | | Dukungan kegiatan penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan | 12 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|--|---|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | non pangan (bulan) | | | |
| V.2 | Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan. | Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan | Jumlah Desa yang diberdayakan/Demapan (Desa) | 1.328 | 101,5 | Kementan |
| | | | Jumlah penanganan daerah/lokasi Rawan Pangan | 455 | | |
| | | | Jumlah hasil penyusunan FSVA | 1 | | |
| | | | Laporan kajian ketersediaan pangan, rawan pangan akses pangan (laporan) | 1 | | |
| | | | Laporan kegiatan dan pembinaan (laporan) | 34 | | |
| V.3 | Pengembangan penganeekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar | Meningkatnya pemantapan penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan | Pendampingan percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan (P2KP) (desa) | 6.500 | 176,2 | Kementan |
| | | | Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP | 34 | | |
| | | | Jumlah hasil promosi P2KP | 64 | | |
| | | | Situasi konsumsi pangan segar (laporan) | 34 | | |
| | | | Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar (laopran) | 34 | | |
| | | | Hasil percontohan fortifikasi (laporan) | 1 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|--|---|--|-------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| V.4 | Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan. | Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan | Jumlah gabungan kelompok tani yang diberdayakan (Gapoktan) | 396 | 524,2 | Kementan |
| | | | Jumlah lumbungan pangan yang diebrdayakan (unit) | 353 | | |
| | | | Laporan kondisi harga pangan pokok (laporan) | 34 | | |
| | | | Laporan pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga, dan cadangan pangan (laporan) | 1 | | |
| | | | Laporan pengembangan, pengumpulan data, distribusi, harga, dan cadangan pangan | 1 | | |
| V.5 | Pengembangan dan Pembinaan Perkarantinaan Ikan | Meningkatnya persentase media pembawa hama penyakit ikan impor, ekspor dan antar area yang bebas hama penyakit ikan karantina dengan laboratorium karantina yang sesuai standar | Jumlah standar operasional prosedur (SOP) yang diimplementasikan pada UPT BKIPM | 88 SOP | 13,0 | KKP |
| | | | Jumlah instalasi yang sesuai standar dan laboratorium karantina ikan yang terakreditasi | 5 IKI 10 Lab | | |
| V.6 | Pengembangan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan | Meningkatnya jumlah laboratorium sertifikasi yang terakreditasi dan UPI yang tersertifikasi | Jumlah Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan hasil perikanan yang bersertifikat HACCP | 520 UPI 1.115 sertifikat | 16,4 | KKP |
| | | | Jumlah lokasi yang termonitor residu dan bahan berbahaya serta laboratorium dan jenis uji yang terakreditasi | 20 lokasi, 5 Lab, 6 jenis uji | | |
| V.7 | Fasilitasi penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan | Meningkatnya rata-rata konsumsi ikan per kapita nasional dari 32,70 kg/kap pada tahun 2012 menjadi 40 kg/kap pada tahun 2015 | Lokasi pembinaan pasar hasil perikanan dalam negeri (pasar) | 6.874 | 69,6 | KKP |
| | | | Lokasi pengembangan dan pembinaan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan dalam negeri (lokasi) | 126 (20 baru, 106 lanjutan) | | |
| | | | Lokasi pengembangan dan pembinaan promosi dan kerjasama pemasaran hasil | 33 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|--|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | perikanan dalam negeri (Provinsi) | | | |
| V.8 | Pembinaan Gizi Masyarakat | Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat | Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan | 100 | 228 | Kemenkes |
| | | | Persentase balita ditimbang berat badannya (jD/S) | 85 | | |
| V.9 | Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis | Penguatan kelembagaan kesehatan hewan | Pengendalian dan penanggulangan rabies, AI, Brucellosis, antrax hog cholera, Jembrana, gangguan reproduksi, pasiter dan kesiagaan wabah penyakit hewan menular (dosis) | 5.000.000 | 179,9 | |
| | | Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik | Penguatan Puskesmas dan kelambagaan kesehatan hewan (Unit) | 245 | | |
| | | Terjaminnya mutu obat hewan | Pengujian dan sertifikasi obat hewan di BBPMSOH (unit) | 1 | | |
| | | | Peningkatan produksi vaksin, obat hewan dan bahan biologik (dosis) | 8.377.775 | | |
| | | | Penguatan, pengujian dan penyidikan penyakit hewan strategis dan menular (sampel) | 130.000 | | |
| VI. ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM | | | | | | |
| <i>Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim</i> | | | | | | |
| VI.1 | Pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan | Terpenuhinya kebutuhan lahan budidaya yang sehat dan menghasilkan produk perikanan budidaya yang aman dikonsumsi | Jumlah laboratorium uji yang memenuhi standar teknis (Lab. Kualitas Air; Lab HPI; dan Lab. Residu) | 45 | 47,0 | KKP |
| | | | Jumlah sentra produksi budidaya yang terkendali dan terehabilitasi perairannya (sentra budidaya) | 76 | | |
| | Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian | Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi | Jumlah informasi/peta potensi sumberdaya lahan (peta) | 13 | 104,7 | Kementan |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|---|---|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| | | pengelolaan sumberdaya lahan pertanian | Jumlah inovasi teknologi pengelolaan tanah, pupuk, iklim, dan air, lahan sawah lingkungan pertanian serta adaptasi dan mitigasi perubahn iklim (teknologi/formula/testkit) | 19 | | |
| | | | Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan dan perubahan iklim global/rekomendasi | 6 | | |
| | | | Dukungan penelitian dan pengembangan sumebrdaya lahan pertanian (bulan) | 12 | | |
| VI.3 | Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian | Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, luasan areal pertanian baru dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian | Jumlah (Ha) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) | 250.000 | 524,85 | Kementan |
| VI.4 | Pengelolaan Sumber Daya Ikan (SDI) | Meningkatnya Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terjamin ketersediaan sumber daya ikan dengan data dan pengelolaan pemanfaatan yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu. | Jumlah ekosistem Perairan Umum Daratan (PUD) yang teridentifikasi sumber daya ikannya (provinsi) | 8 | 65,4 | KKP |
| | | | Jumlah perairan laut teritorial dan kepulauan yang teridentifikasi sumber daya ikannya (WPP) | 11 | | |
| | | | Jumlah perairan ZEEI yang teridentifikasi sumber daya ikannya | 6 | | |

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2014

| | |
|---------------------------|---|
| PRIORITAS 6 | PROGRAM AKSI DI BIDANG INFRASTRUKTUR |
| Tema Prioritas | Pembangunan infrastruktur nasional yang memiliki daya dukung dan daya gerak terhadap pertumbuhan ekonomi dan sosial yang berkeadilan dan mengutamakan kepentingan masyarakat umum di seluruh bagian negara kepulauan Republik Indonesia dengan mendorong partisipasi masyarakat |
| Penanggungjawab | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
| Bekerjasama Dengan | Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Dalam Negeri; Menteri Kehutanan; Menteri Pertanian; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Perumahan Rakyat; Kepala Badan Pertanahan Nasional; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------|---|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | TANAH DAN TATA RUANG | | | | | |
| | Konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tata ruang secara terpadu | | | | | |
| I.1 | Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 1 | Keserasian dan keselarasan program pembangunan dengan RTRW | Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya | 15 provinsi | 71,65 | Kemen PU |
| I.2 | Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah 2 | Keserasian dan keselarasan program pembangunan dengan RTRW | Jumlah rencana tata ruang yang telah disinkronkan program pembangunannya | 17 provinsi | 84,45 | Kemen PU |
| I.3 | Pengelolaan Pertanahan Provinsi | Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal | Neraca Penatagunaan Tanah di daerah | 100 kab/kota | 7,30 | BPN |
| I.4 | Pengelolaan Pertanahan Provinsi | Terlaksananya pengaturan dan penataan penguasaan dan pemilikan tanah, serta pemanfaatan dan penggunaan tanah secara optimal. | Inventarisasi P4T | 182.300 bidang | 59,7 | BPN |
| I.5 | Pengembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Pertanahan dan Hubungan Masyarakat | Terlaksananya pengembangan peraturan perundang-undangan bidang pertanahan dan Hubungan Masyarakat | Tersusunnya peraturan perundang-undangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum | 1 paket | 5,24 | BPN |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|---|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I.6 | Pemetaan Rupabumi dan Toponim | Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar rupabumi dan meningkatnya jumlah cakupan peta rupabumi Indonesia | Peta Rupabumi Indonesia skala besar | 200 | 54,7 | BIG |
| | | | Peta Rupabumi Indonesia skala kecil & menengah. | 176 | 107,3 | |
| | | | Peta Rupabumi Indonesia seamless & kartografi. | 509 | 9,5 | |
| | | | Dokumen Gasetir. | 10 | 2,3 | |
| | | | Dokumen Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Pemetaan Dasar Rupabumi. | 5 | 2,0 | |
| | | | Peta Rupabumi Indonesia yang dimutakhirkan. | 60 | 13,8 | |
| I.7. | Pemetaan Kelautan dan Lingkungan Pantai | Tersusunnya kebijakan pemetaan dasar kelautan dan kedirgantaraan serta meningkatnya cakupan peta dasar kelautan dan kedirgantaraan | Peta Lingkungan Pantai. | 54 | 14,8 | BIG |
| | | | Peta Kelautan. | 4 | 1,7 | |
| | | | Peta Lingkungan Pantai dan kelautan yang dimutakhirkan | 20 | 3,9 | |
| I.8 | Pengelolaan dan Penyebarluasan Informasi Geospasial | Terselenggaranya kegiatan Pengelolaan dan Penyebarluasan IG | Dokumen Pembangunan IDSN. | 1 | 73,5 | BIG |
| I.9 | Penyelenggaraan Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial | Terselenggaranya kegiatan Standardisasi dan Kelembagaan IG | NSPK dan dokumen standar terkait penyelenggaraan informasi geospasial. | 12 | 3,0 | BIG |
| | | | Dokumen Pengembangan Simpul Jaringan IG | 330 | 3,4 | |
| I.10 | Pemetaan Tata Ruang dan Atlas | Tersedianya data dan informasi atlas sumber daya, kajian pengembangan wilayah, dan pemetaan tata ruang | Skenario Pengembangan Wilayah 34 Provinsi Berbasis Rencana Tata Ruang Melalui Pemanfaatan Prmodelan Dinamika Spasial untuk Mendukung Penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019; Pembangunan Berdimensi Spasial | 34 | 19,0 | BIG |
| II | JALAN Penyelesaian pembangunan Lintas Sumatera, Jawa , Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTB, NTT, dan Papua sepanjang 19.370 km | | | | | |
| II.1 | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Terjaganya kualitas jalan dan jembatan | Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) | 32.229,0 | 3.849,1 | Kemen PU |
| | | | Jumlah jembatan yang dipreservasi (M) | 329.694,0 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|--|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan nasional dan jembatan | Jumlah jalan bebas hambatan yang dibangun (Km) | 17,6 | 1.339,8 1657,2 | |
| | | | Jumlah jalan yang ditingkatkan strukturnya/ pelebaran (Km) | 3285,3 | 13.837,7 | |
| | | | Jumlah jalan yang dibangun (Km) | 147,6 | 1.108,7 | |
| | | | Jumlah jembatan yang dibangun (M) | 5.935,0 | 1.929,3 | |
| | | | Jumlah flyover/underpass yang dibangun (M) | 3.780,0 | 1.362,3 | |
| | | | Jumlah jalan/jembatan di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yang dibangun (Km) | 195,8 | 1.117,8 | |
| II2 | Pengaturan, Pengusahaan, Pengawasan jalan tol | Terlaksananya pengaturan, pengusahaan dan pengawasan penyelenggaraan jalan tol | Jumlah jalan tol yang terbangun oleh swasta (Km) | 100% | 85 | Kemen PU |
| III | PERHUBUNGAN Pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar-moda dan antar-pulau yang terintegarsi sesuai dengan Sistem Transportasi Nasional dan Cetak Biru Transportasi Multimoda dan penurunan tingkat kecelakaan transportasi sehingga pada 2014 lebih kecil dari 50 % keadaan saat ini | | | | | |
| III.1 | Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan | Terbangunnya Simpul Transportasi Jalan | Jumlah pembangunan terminal transportasi jalan | 22 Lokasi | 820,01 | Kemenhub |
| | | Peningkatan Prasarana/Sarana Angkutan Jalan | Jumlah Rehabilitasi Fasilitas Keselamatan LLAJ | 32 | | |
| III.2 | Pembangunan Sarana & Prasarana Transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP | Terbangunnya Prasarana Transportasi Sungai Danau & Penyeberangan | Jumlah prasarana dermaga penyeberangan | 60 dermaga | 1.912,7 | Kemenhub |
| III.3 | Pembangunan dan pengelolaan prasarana dan fasilitas pendukung kereta api | 954,43 km jalur KA baru/ jalur ganda, termasuk pembangunan MRT dan Monorail | Panjang km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda | 116,45 km | 9.563,7 | Kemenhub |
| | | Paket peningkatan pelistrikan (diantaranya elektrifikasi sepanjang 289 km) | Jumlah paket pekerjaan peningkatan pelistrikan (listrik aliran atas/ sub stasiun) | 18 Paket | | |
| III.4 | Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian | Tersedianya unit Sarana KA (Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Tram, Railbus) | Jumlah unit pengadaan lokomotif, KRDI, KRL, Tram, Railbus, termasuk kereta ekonomi yang dibangun termasuk sarana KA yang dimodifikasi | 41 unit | 280,8 | Kemenhub |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|---|--|--------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | Paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana dan keselamatan perkeretaapian | Jumlah paket pengadaan peralatan/fasilitas sarana perkeretaapian | 6 | | |
| III.5 | Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Terbangunnya Bandara baru | Jumlah Bandar udara baru yang dibangun | 20 | 5.333,2 | Kemenhub |
| | | Paket bandara yang dikembangkan dan direhabilitasi | Jumlah bandar udara yang dikembangkan, direhabilitasi | 120 | | |
| | | Paket bandara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana | Jumlah Bandar udara yang dikembangkan di daerah perbatasan dan rawan bencana | 42 | | |
| III.6 | Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Keamanan Penerbangan | Paket/unit/set/kg/liter peralatan keamanan penerbangan | Jumlah fasilitas keamanan yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket; unit; set; kg; liter) | 16; 337; 0; 2.500; 5.000 | 251,2 | Kemenhub |
| III.7 | Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Prasarana Navigasi Penerbangan | Paket/unit/set peralatan navigasi | Jumlah fasilitas navigasi yang dibangun dan yang direhabilitasi (paket; unit; set) | 409; 80; 17 | 405,1 | Kemenhub |
| III.8 | Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Kenavigasian | Terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri menara suar; rambu suar; pelampung suar) | Unit (terbangunnya sarana bantu navigasi pelayaran terdiri dari menara suar, rambu suar, pelampung suar) | 23; 53; 43 | 1.128,6 | Kemenhub |
| | | Terpasangnya VTS di Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan ALKI lainnya | Paket VTS di selat Sunda, Lombok, Selat Malaka, ALKI lainnya | 6 | | |
| | | Tersedianya kapal inspeksi navigasi | Kapal inspeksi navigasi (unit) | 5 | | |
| III.9 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Pelabuhan dan Pengerukan | Tersedianya alur pelayaran yang aman untuk kapal melalui pengerukan sedimen | Jumlah volume pengerukan sedimen pada alur pelayaran dan/atau kolam pelabuhan (Juta m3) | 13,5 | 4.770,23 | Kemenhub |
| | | Terbangunnya/Meningkatnya kapasitas lokasi prasarana dan fasilitas pelabuhan utama, pengumpul, pengumpan (non strategis) | Jumlah lokasi pelabuhan perintis dan non perintis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhab (lokasi) | 22 | | |
| | | Terwujudnya Tatanan Pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan Nasional, Rencana Induk Pelabuhan, serta Peraturan Perundangan Pelaksanaan | Tersusunnya Master Plan pelabuhan (lokasi) | 25 | | |
| | | Optimalnya fungsi sarana dan fasilitas 25 pelabuhan strategis: Lhokseumawe, Belawan, Teluk Bayur, Dumai, Pekan Baru, Palembang, Panjang, Batam, | Jumlah lokasi pelabuhan strategis yang dibangun/ditingkatkan/direhab (lokasi) | 4 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|--|--|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | Tanjung Pinang, Tanjung Priuk, Tanjung Mas, Tanjung Perak, Cigading, Benoa, Kupang, Pontianak, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Bitung, Makassar, Sorong, Ambon, Biak dan Jayapura. | | | | |
| IV | PERUMAHAN RAKYAT Pembangunan 685.000 Rumah Sederhana Sehat Bersubsidi, 180 Rusunami dan 650 twin block berikut fasilitas pendukung kawasan permukiman yang dapat menampung 836.000 keluarga yang kurang mampu pada 2012 | | | | | |
| IV.1 | Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa | 380 twin blok | Jumlah rusunawa terbangun | 100 | 919,0 | Kementerian Perumahan Rakyat |
| IV.2 | Fasilitasi Pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Permukiman | 700.000 unit | Jumlah fasilitasi dan stimulasi prasarana, sarana, dan utilitas kawasan perumahan dan permukiman | 38.179 | 182,8 | Kementerian Perumahan Rakyat |
| IV.3 | Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya | 50.000 unit | Jumlah fasilitasi dan stimulasi pembangunan baru perumahan swadaya | - | - | Kementerian Perumahan Rakyat |
| IV.4 | Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya | 50.000 unit | Jumlah fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya | 180.000 | 1.938,6 | Kementerian Perumahan Rakyat |
| IV.5 | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Penyelenggaraan dalam Pengembangan Permukiman | 270 Twin Blok | Jumlah satuan unit hunian rumah susun yang terbangun dan infrastruktur pendukungnya | 25 Twin Blok | 1.400,0 | Kemen PU |
| V | PENGENDALIAN BANJIR Penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian banjir, diantaranya Banjir Kanal Timur Jakarta sebelum 2012 dan penanganannya secara terpadu Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo sebelum 2013 | | | | | |
| V.1 | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Terlindunginya kawasan dari bahaya banjir dan terlindunginya kawasan pantai dari abrasi pantai serta terkendalinya lahar gunung berapi/sedimen | Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun | 131,9 km | 2.510,8 | Kemen PU |
| | | | Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang direhabilitasi | 43,4 km | 372,9 | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|---|---|---|---|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dioperasikan dan dipelihara | 2.134,9 km | 294,4 | |
| | | | Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang direhabilitasi | 3 buah | 222,6 | |
| | | | Jumlah sarana/prasarana pengendali lahar/sedimen yang dioperasikan dan dipelihara | 119 buah | 23,8 | |
| | | Terkendalnya bahaya banjir di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo | Terbangunnya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo | Jabung Ring Dike | 73,0 | |
| | | | | 1 Bendung Gerak Sembayat | 76,4 | |
| | | | | Flood Forecasting Warning System (FFWS) Bengawan Solo | 199,4 | |
| | | | Terehabilitasinya prasarana pengendali banjir di DAS Bengawan Solo | Perbaikan Sungai Bengawan Solo Hulu (Jurug-Sragen) | 23,0 | |
| V. 2 | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Meningkatnya layanan prasarana air baku dan terjaganya layanan air baku | Kapasitas air baku yang ditingkatkan | 6,16 m3/det | 1.028,8 | Kemen PU |
| VI | TELEKOMUNIKASI | | | | | |
| | Penuntasan pembangunan jaringan serat optik di Indonesia bagian timur sebelum 2013 dan maksimalisasi tersedianya akses komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat | | | | | |
| VI.1 | Perencanaan dan Rekayasa Alokasi Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit | Tertatanya sumber daya spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sesuai dengan ITU | Prosentase penataan pita frekuensi radio dan pemanfaatan slot orbit satelit | 95% | 26,7 | Kemenkomin fo |
| | | | Prosentase utilitas pemanfaatan spektrum frekuensi radio | 100% | | |
| VI.2 | Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan | Terselenggaranya layanan perijinan spektrum | Prosentase pelayanan perijinan diproses tepat waktu | 75% | 30,8 | Kemenkomin |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|---|---|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit | frekuensi radio dan orbit satelit serta sertifikasi operator radio secara profesional dan memiliki integritas | Jumlah operator radio yang besertifikat | 5050 | | fo |
| VI.3 | Pengembangan Penyelenggaraan Telekomunikasi | Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan telekomunikasi | Prosentase terpenuhinya regulasi dan kebijakan di era konvergensi | 100% | 27,1 | Kemenkomin fo |
| | | | Prosentase pelayanan perijinan penyelenggaraan telekomunikasi yang tepat waktu | 75% | | |
| VI.4 | Pembinaan dan Pengembangan Penyelenggaraan Penyiaran | Kebijakan, regulasi, perijinan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan penyiaran | Prosentase pencapaian terhadap pembaharuan kebijakan regulasi dan kelembagaan akibat adanya digitalisasi dan perkembangan industri | 90% | 23,6 | Kemenkomin fo |
| | | | Prosentase penyelesaian permohonan perizinan penyiaran yang tepat waktu | 95% | | |
| VI.5 | Pembinaan dan Pengembangan Layanan Khusus Informatika | Kebijakan, regulasi, perijinan, sarana dan prasarana untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan khusus informatika | Prosentase kebijakan dan regulasi dibidang telekomunikasi khusus, layanan khusus penyiaran dan kewajiban universal | 100% | 28,0 | Kemenkomin fo |
| | | | Prosentase pencapaian terhadap layanan telekomunikasi khusus pemerintah, penyiaran publik dan pelayanan kewajiban universal | 100% | | |
| | | | Prosentase tingkat penetrasi layanan TV Digital terhadap populasi | 35% | | |
| VI.6 | Pelaksanaan Pengamanan Jaringan Internet | Keamanan terhadap jaringan internet nasional | Prosentase keamanan jaringan internet nasional khususnya pada penyelenggara jasa internet, internet exchange, lembaga pemerintahan dan infrastruktur kritis | 65% | 20,0 | Kemenkomin fo |
| | | | Prosentase pencapaian terhadap kemampuan data center dalam mengelola integritas, kerahasiaan dan keamanan data hasil pemantauan, pendeteksian dini, logfile serta penyelenggara yang mengirimkan rekaman transaksi dan dukungan terhadap penegakan hukum | 65% | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|---|---|--|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| VI.7 | Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika | Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non komersial | Prosentase pembangunan international internet exchange (4 ibukota provinsi) | 100% | 438,7 | Kemenkomin fo |
| | | | Prosentase penyediaan Nusantara Internet Exchange | 100% | | |
| | | | Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan backbone nasional serat optik | 100% | | |
| | | | Prosentase ibukota kab/kota yang mempunyai layanan broadband | 100% | | |
| VI.8 | Pembinaan dan Pengembangan E-Government | Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan <i>e-government</i> nasional untuk mendorong peningkatan nilai <i>e-government</i> nasional menjadi 3,4 dan tingkat e-literasi menjadi 50% | Jumlah K/L/Pemda yang terintegrasi melalui Government Service Bus | 12 instansi | 19,3 | Kemenkomin fo |
| | | | Nilai rata-rata e-Government nasional | 3,4 | | |
| VI.9 | Pembinaan dan Pengembangan Sistem Keamanan Informasi Elektronik | Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan sistem keamanan informasi elektronik | Jumlah penyelenggara layanan publik yang mengikuti penerapan standar kemandirian informasi | 60 institusi/ lembaga | 21,1 | Kemenkomin fo |
| | | | Prosentase penyelesaian tindak lanjut kasus pelanggaran keamanan informasi | 100% | | |
| VII | TRANSPORTASI PERKOTAAN Perbaiki sistem dan jaringan transportasi di 4 kota besar (Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan) sesuai dengan Cetak Biru Transportasi Perkotaan, termasuk penyelesaian pembangunan angkutan kereta listrik di Jakarta (MRT dan Monorail) selambat-lambatnya 2014. | | | | | |
| VII.1 | Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan | Tersusunnya 100% rencana dan program sistem transportasi dan evaluasi pelaksanaan program | Jumlah rencana Induk Angkutan Perkotaan, Rencana Induk Sistem Informasi Lalu Lintas Perkotaan, Laporan evaluasi, Terselenggarannya ATCS, Jumlah Fasilitas Kese-lamatan Transportasi Perkotaan. | 1 Paket | 116,04 | Kemenhub |
| | | Terselenggaranya Transportasi Perkotaan | Jumlah Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), Kota Percontohan, Kawasan Percontohan. | 1 paket | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------------|-------------------------------------|---------|-----------|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| VIII | PUBLIC SERVICE OBLIGATION | | | | | |
| VIII.1 | PSO PT. KAI | - | - | - | - | Kemenkeu |
| VIII.2 | PSO PT. PELNI | - | - | - | - | Kemenkeu |
| VIII.3 | PSO PT. POSINDO | - | - | - | - | Kemenkeu |
| VIII.4 | LKBN ANTARA | - | - | - | - | Kemenkeu |

Ket : * alokasi untuk satu kegiatan

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2014

| | |
|---------------------------|---|
| PRIORITAS 7 | PROGRAM AKSI DI BIDANG IKLIM INVESTASI DAN IKLIM USAHA |
| Tema Prioritas | Peningkatan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) |
| Penanggungjawab | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
| Bekerjasama Dengan | Menteri Keuangan; Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional; Menteri Perdagangan; Menteri Perindustrian; Menteri Perhubungan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Komunikasi dan Informatika; Menteri Dalam Negeri; Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|--|---|--|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I. | KEPASTIAN HUKUM: Reformasi regulasi secara bertahap di tingkat nasional dan daerah sehingga terjadi harmonisasi peraturan perundang-undangan yang tidak menimbulkan ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam implementasinya | | | | | |
| I.1 | Perancangan Peraturan Perundang- Undangan | Peningkatan kualitas RUU dan perat perundang-undangan di bawah UU di DPR serta tenaga fungsional Perancang PerUUan. | Persentase (%) Rancangan Undang-Undang yang Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat dan Perkembangan Global yang Disusun Secara Tepat Waktu Persentase (%) Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Dibawah UU yang Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat dan Perkembangan Global yang Disusun Secara Tepat Waktu Persentase (%) Pembahasan Rancangan Undang-Undang Inisiatif Kemenkumham di DPR Secara Tepat Waktu Persentase (%) Tenaga Fungsional Perancang Peraturan Perundang- Undangan yang Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Meningkatkan Kompetensinya | 90% 90% 90% 90% | 9,1 | Kemenhukham |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|---|---|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Persentase (%) Kelengkapan Dokumentasi dan Pustaka Bidang Peraturan Perundang-Undangan Secara Akurat dan Up To Date | 90% | | |
| | | | Persentase (%) Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor | 90% | | |
| | | | Persentase (%) Perancangan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang yang Mendorong Pemberantasan Korupsi | 90% | | |
| I.2 | Kegiatan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan | Meningkatkan keharmonisan rancangan peraturan perundang-undangan tingkat pusat bidang politik, hukum, keamanan, keuangan, perbankan, industri, perdagangan, sumber daya alam, riset, teknologi, kesejahteraan rakyat yang harmonis. | Persentase (%) Penyelesaian Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Ditingkat Pusat Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang Diharmonisasikan | 90% | 5,0 | Kemenhukham |
| | | | Persentase (%) Penyelesaian Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Ditingkat Pusat Bidang Keuangan dan Perbankan yang Diharmonisasikan | 90% | | |
| | | | Persentase (%) Penyelesaian permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Ditingkat Pusat Bidang Industri dan Perdagangan yang Diharmonisasikan | 90% | | |
| | | | Persentase (%) Penyelesaian permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Ditingkat Pusat Bidang Sumber Daya Alam, Riset dan Teknologi yang Diharmonisasikan | 90% | | |
| | | | Persentase (%) Penyelesaian permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Ditingkat Pusat Bidang Kesejahteraan Rakyat yang Diharmonisasikan | 90% | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|--|--|--|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Presentase (%) Pembenahan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pertanahan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang Diharmonisasikan | 90% | | |
| I.3. | Peningkatan Deregulasi Kebijakan Penanaman Modal | Merealisasikan kegiatan kajian analisis kebijakan dan kegiatan sosialisasi kebijakan yang berorientasi pada peningkatan daya saing | Jumlah rumusan rekomendasi penyederhanaan prosedur penanaman | 1 rekomendasi | 13,0 | BKPM |
| | | | Jumlah rumusan penyempurnaan dan pengembangan kebijakan PM | 1 rumusan | | |
| | | | Jumlah kegiatan dan peserta sosialisasi kebijakan penanaman modal | 40 kegiatan | | |
| | | | Jumlah Persyaratan izin usaha yang diterbitkan oleh BKPM | 12 persyaratan | | |
| I.4. | Pengelolaan Pertanahan Provinsi | Terwujudnya pengembangan infrastruktur pertanahan secara nasional, regional dan sektoral, yang diperlukan di seluruh Indonesia | Cakupan Peta Pertanahan | 2.800.000 ha | 28,3 | BPN |
| I.5. | Pengelolaan Pertanahan Provinsi | Terlaksananya percepatan legalisasi aset pertanahan, ketertiban administrasi pertanahan dan kelengkapan informasi legalitas aset tanah | Jumlah bidang tanah yang dilegalisasi | 865.316 bidang | 378,4 | BPN |
| I.6. | Pengelolaan Pertanahan Provinsi | Berkurangnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta mencegah timbulnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan | Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan | 7.125 laporan | 37,0 | BPN |
| I.7. | Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan | Tersedianya data dan informasi pertanahan yang terintegrasi secara nasional (Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional/ SIMTANAS) | Peningkatan akses layanan pertanahan melalui LARASITA | 430 kab/kota | 40,3 | BPN |
| II. PENYEDERHANAAN PROSEDUR: | | | | | | |
| Penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di beberapa kota yang dimulai di Batam, pembatalan perda bermasalah dan pengurangan biaya untuk memulai usaha seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) | | | | | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA | |
|-------|---|---|--|---|------------------------------------|-----------------------|-----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| II.1. | Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) | Meningkatnya kualitas pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik/ Online (SPIPISE) | Peningkatan jumlah aplikasi perijinan dan non perijinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Propinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE | Pengembangan master data perijinan | 20,8 | BKPM | |
| | | | Jumlah peningkatan perangkat daerah PTSP yg terhubung dalam SPIPISE | 50 Kab/Kota | | | |
| | | | Jumlah pengembangan sistem pendukung SPIPISE | Pengembangan 1 paket GIS, data center dan DRC | | | |
| | | | Jumlah propinsi dan Kab/Kota yang mengikuti sosialisasi & pelatihan | 60 Kab/Kota | | | |
| II.2. | Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah | Mempercepat proses perijinan di daerah | Jumlah daerah yang membentuk PTSP | 530 prov/kab/kota | 5,1 | KEMENDAGRI | |
| | | | Jumlah PTSP daerah yang dapat menerapkan SPIPISE | - | | | - |
| | | | Pembatalan Perda bermasalah (dilaksanakan oleh Biro Hukum) | - | | | - |
| | | | Jumlah daerah yang mampu menerapkan pengurangan biaya untuk bisnis/berusaha | 371 prov/kab/kota | | | 1,6 |
| II.3. | Fasilitasi Percepatan Investasi Kerjasama Pemerintah Swasta | Informasi Potensi Investasi dan Fasilitasi Proyek Strategis Nasional di Bidang Infrastruktur | Jumlah rekomendasi kebijakan perencanaan investasi di bidang infrastruktur | 1 paket kebijakan perencanaan investasi (5 rekomendasi) | 15,0 | BKPM | |
| | | | Jumlah fasilitasi persiapan transaksi proyek KPS infrastruktur | Fasilitasi 10 proyek | | | |
| | | | Jumlah proyek KPS infrastruktur yang akan | 3 proyek | | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|--|---|--|----------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | ditawarkan | | | |
| | | | Jumlah kegiatan pemasaran proyek KPS infrastruktur | 7 kegiatan pemasaran | | |
| II.4. | Koordinasi Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (PEPI) | Meningkatnya koordinasi kebijakan peningkatan ekspor dan peningkatan investasi | Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Peningkatan Ekspor dan Investasi yang terimplementasikan | 85 persen | 3,2 | Kemenko Perekonomian |
| | | | Persentase rekomendasi kebijakan di bidang industri dan perdagangan yang di implementasikan | 85 persen | | |
| II.5. | Koordinasi Kebijakan Pengembangan Iklim Investasi | Meningkatnya koordinasi kebijakan Pengembangan iklim investasi | Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan di Bidang Pengembangan iklim investasi yang terimplementasikan | 85 persen | 1,2 | Kemenko Perekonomian |
| III. LOGISTIK NASIONAL: | | | | | | |
| Pengembangan dan penetapan Sistem Logistik Nasional yang menjamin kelancaran arus barang dan mengurangi biaya transaksi/ekonomi biaya tinggi | | | | | | |
| III.1 | Peningkatan Kelancaran Distribusi Bahan Pokok | Terlaksananya kebijakan dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kelancaran distribusi dan stabilisasi harga bahan pokok | Jumlah rumusan kebijakan dan standar, norma, kriteria dan prosedur di bidang distribusi bahan pokok dan barang strategis | 4 jenis | 70,7 | Kemendag |
| | | | Rata-rata koefisien variasi harga bahan pokok utama | 5-9 % | | |
| | | | Rasio variasi harga komoditi tertentu di dalam dan di luar negeri yang semakin kecil | <1 | | |
| | | | Rasio variasi harga provinsi dibandingkan variasi harga nasional yang semakin kecil | 1.5-2.5 | | |
| | | | Jumlah Perizinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis yang dilayani secara <i>online</i> | 8 | | |
| | | | Waktu penyelesaian perizinan dan non perizinan dibidang distribusi bahan pokok dan barang strategis | 2 hari | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|--|--|--|---|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| III.2 | Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan | Terbangunnya sarana distribusi dalam rangka kelancaran distribusi barang pokok | Pengembangan Pasar Percontohan (unit) | 26 | 315,0 | Kemendag |
| | | | Pengembangan Pusat Distribusi (unit) | 3 | | |
| | | | Jumlah Gudang Non SRG | 2 | | |
| III.3. | Koordinasi Kebijakan Sistem Logistik dan Fasilitasi Perdagangan | Terkoordinasinya pelaksanaan kebijakan penataan dan pengembangan sistem logistik dan fasilitasi perdagangan | Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Penataan Dan Pengembangan Sistem Logistik yang ditindaklanjuti | 80 persen | 3,2 | Kemenko Perekonomian |
| III.4. | Pengelolaan dan Penyelenggaraan kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut | Terselenggaranya National Single Window | Terselenggaranya NSW (lokasi) | 4 (Makassar, Banjarmasin, Pekanbaru, Pontianak) | 480,1 | Kemenuh |
| IV. SISTEM INFORMASI: | | | | | | |
| Beroperasinya secara penuh <i>National Single Window</i> (NSW) untuk impor (sebelum Januari 2010) dan ekspor. Percepatan realisasi proses penyelesaian bea cukai di luar pelabuhan dengan implementasi tahap pertama <i>Custom Advanced Trade System</i> (CATS) di dry port Cikarang | | | | | | |
| IV.1 | Pengelolaan Fasilitasi Ekspor dan Impor | Tersedianya kebijakan, Koordinasi, Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi di bidang fasilitasi ekspor dan impor | Jumlah penerbitan kebijakan fasilitasi ekspor dan impor; | 2 peraturan | 25,0 | Kemendag |
| | | | Jumlah pengembangan sistem elektronik bidang fasilitasi pelayanan publik; | 2 Keg | | |
| | | | Jumlah pengguna perijinan ekspor/impor online yang dilayani melalui INATRADE | 4.500 perusahaan | | |
| | | | Jumlah bimbingan teknis bidang fasilitasi perdagangan; | 5 keg | | |
| | | | Jumlah koordinasi bidang fasilitasi perdagangan; | 30 keg | | |
| | | | Jumlah partisipasi sidang - sidang fasilitasi perdagangan di dalam dan luar negeri; | 10 keg | | |
| | | | Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan monitoring fasilitasi perdagangan | 5 lap | | |
| | | | Jumlah Penerbitan SKA dengan sistem otomasi | 900.000 SKA | | |
| IV.2 | Perumusan Kebijakan dan Pengembangan | Terciptanya administrator kepabeanan dan cukai yang dapat memberikan | Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI yang sesuai dengan proses bisnis DJBC | 100% | - | Kemenkeu |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|--|---|--|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Teknologi Informasi Kepabeanaan dan Cukai | fasilitasi terbaik berbasis teknologi informasi kepada industri, perdagangan, dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan dan Terwujudnya tingkat pelayanan yang efisien kepada pemangku kepentingan berkaitan dengan layanan berbasis teknologi informasi | Persentase downtime sistem informasi | 1% | | |
| | | | Rata-rata persentase penyelesaian pengembangan aplikasi sesuai rencana | 70% | | |
| IV.3. | Koordinasi Pengembangan dan Penerapan sistem NSW dan integrasi ke dalam sistem ASW | Meningkatnya koordinasi di bidang pengembangan dan penerapan Sistem Nasional Single Window dan integrasi ke dalam sistem ASW | Persentase kementerian/lembaga yang terintegrasi dalam perencanaan dan pengembangan sistem NSW | 90 persen | 3,5 | Kemenko Perekonomian |
| V. KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK): | | | | | | |
| Pengembangan KEK di 5 lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2012 | | | | | | |
| V.1. | Dukungan Sektor Perdagangan Terhadap Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | Meningkatnya peranan sektor perdagangan di kawasan ekonomi khusus | Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyusunan PP tentang Kawasan Ekonomi Khusus | 1 laporan | 1,0 | Kemendag |
| | | | Jumlah peraturan terkait dengan KEK | 1 peraturan | | |
| V.2. | Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) | Terbentuknya KEK di 5 lokasi | Hasil Koordinasi masalah strategis di bidang pengembangan KEK | 1 buku laporan | 1,76 | BKPM |
| | | | Jumlah promosi penanaman modal di KEK | 5 kegiatan (2 Negara dan 3 Daerah) | | |
| | | | Jumlah investor yang berminat masuk KEK | 2 Negara | | |
| V.3. | Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah I | Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan industri di daerah | Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Sumatera dan Kalimantan | 5 | 10,7 | Kemenperin |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|---|--|---|-------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Sumatera dan Kalimantan | Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri | 42 | 9,8 | |
| V.4. | Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah II | Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan industri di daerah | Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Jawa dan Bali | 5 | 4,3 | Kemenperin |
| | | Terbangunnya pusat-pusat pertumbuhan industri di Jawa dan Bali | Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Jawa dan Bali | 53 | 11,7 | |
| V.5. | Pengembangan Fasilitas Industri Wilayah III | Terwujudnya sinergi dan koordinasi dalam rangka percepatan pembangunan industri di daerah | Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua | 3 | 8,0 | Kemenperin |
| | | | Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua | 39 | 11,1 | |
| V.6. | Perumusan kebijakan di bidang PPN, PBB, BPHTB, KUP, PPSP, dan Bea Materai | Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan | Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan I | 100% | - | Kemenkeu |
| V.7. | Perumusan kebijakan di bidang PPh dan perjanjian kerjasama perpajakan internasional | Peningkatan efektifitas pembuatan peraturan | Persentase penyelesaian usulan pembuatan dan penyempurnaan PP dan PMK di bidang Peraturan Perpajakan II | 100% | - | Kemenkeu |
| V.8. | Perumusan kebijakan dan pengembangan teknologi informasi kepabeanaan dan cukai | Terciptanya administrator kepabeanaan dan cukai yang dapat memberikan fasilitas terbaik berbasis teknologi informasi kepada industry, perdagangan dan masyarakat serta optimalisasi penerimaan | Persentase pengembangan infrastruktur TIK (hardware dan software) DJBC | 100% | - | Kemenkeu |
| | | | Persentase downtime system informasi | 100% | | |
| V.9. | Perumusan Kebijakan dan Bimbingan Teknis Fasilitas Kepabeanaan | Terciptanya administrator di bidang fasilitas kepabeanaan yang dapat memberikan dukungan industry, perdagangan dan masyarakat serta | Persentase realisasi dari janji layanan fasilitas kepabeanaan | 90% | - | Kemenkeu |
| | | | Persentase penyelesaian rancangan peraturan di bidang fasilitas kepabeanaan | 100% | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|---|---|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | optimalisasi pendapatan | Persentase realisasi kegiatan sosialisasi | 90% | | |
| V.10. | Koordinasi Pengembangan Urusan Penataan Ruang Dan Pembangunan Daerah Tertinggal | Meningkatnya koordinasi urusan penataan ruang dan pembangunan daerah tertinggal | Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan Urusan Penataan Ruang dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang terimplementasikan | 90 persen | 4,6 | Kemenko Perekonomian |
| V.11. | Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia | Meningkatnya Koordinasi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia | Persentase rekomendasi kesepakatan proyek proyek investasi dan infrastruktur yang akan digroundbreaking | 80 persen | 20,9 | Kemenko Perekonomian |
| V.12. | Koordinasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus/KEK | Meningkatnya koordinasi kebijakan KEK | Persentase peraturan pelaksana UU KEK yang terselesaikan | 95 persen | 10,7 | Kemenko Perekonomian |
| | | | Jumlah Lokasi KEK yang ditetapkan (kumulatif) | 4 lokasi | | |
| VI. KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN: | | | | | | |
| Sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka penciptaan lapangan kerja | | | | | | |
| VI.1 | Pengelolaan Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial | Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja | Jumlah lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan yang terbentuk | 674 LKS Bipartit | 67,3 | Kemenakertrans |
| | | | Jumlah perwakilan pekerja, SP/SB dan pengusaha yang mendapat pendidikan teknik bernegosiasi HI | 7.550 orang | | |
| | | | Jumlah LKS Tripartit Kab/Kota yang terbentuk | 53 LKS Tripartit | | |
| | | | Jumlah SDM yang telah mengikuti pelatihan hubungan industrial | 2.750 orang | | |
| | | | Jumlah peningkatan kapasitas anggota LKS Bipartit dan LKS Tripartit | 1.250 orang | | |
| | | | Verifikasi keanggotaan SP/SB di Propinsi dan Kab/Kota | 33 propinsi dan 424 kab/kota | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|--|---|-----------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| VI.2 | Pengelolaan Penerapan Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja | Perusahaan yang menerapkan pengupahan berdasarkan perundingan dan/atau penerapan struktur dan skala upah | 250 perusahaan | 52,5 | Kemenakertrans |
| | | | Jumlah pekerja, pengusaha, aparatur daerah, akademisi dan LSM yang mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pengupahan | 8.250 orang | | |
| | | | Jumlah pekerja yang mendapat sosialisasi tentang PP pengupahan | 1.500 orang | | |
| | | | Jumlah SDM yang mengikuti Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan | 1.500 orang | | |
| VI.3 | Konsolidasi Peningkatan Intensitas Pencegahan dan Penyelesaian Hubungan Industrial | Tercapainya kesepakatan dalam hubungan kerja | Rasio penyelesaian perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan HI terhadap jumlah kasus dalam bentuk perjanjian bersama | 85% | 70,2 | Kemenakertrans |
| | | | Jumlah mediator yang meningkat kapasitasnya untuk penanganan perselisihan | 900 orang | | |
| | | | Panduan penyelesaian perselisihan HI | 1 panduan | | |
| | | | Jumlah SDM yang mengikuti pendidikan dan pelatihan calon mediator hubungan industrial | 100 orang | | |
| VI.4 | Penyempurnaan Peraturan Ketenagakerjaan | Terbangunnya kebijakan ketenagakerjaan pusat dengan kebijakan/peraturan daerah secara sinergis | Terbangunnya keselarasan kebijakan pengupahan (KHL dan penetapan upah) | Sosialisasi dan konsolidasi | 10,0 | Kemenakertrans |
| VI.5 | Peningkatan Penerapan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) | Diterapkannya manajemen dan standar K3 | Jumlah Perusahaan yang menerapkan standar manajemen K3 | naik 10% | 160,8 | Kemenakertrans |
| | | | Persentase pengawas yang ditingkatkan kapasitasnya | 100% | | |
| | | | Sosialisasi SJSN | 33 Propinsi | | |
| | | | Sistem Pelaporan Monitoring dan Deteksi Dini Kepatuhan Perusahaan | 1 sistem | | |

MATRIKS RKP TAHUN 2014

| | |
|---------------------------|---|
| PRIORITAS 8 | PROGRAM AKSI DI BIDANG ENERGI |
| TEMA PRIORITAS | <i>Pencapaian ketahanan energi nasional yang menjamin kelangsungan pertumbuhan nasional melalui restrukturisasi kelembagaan dan optimasi pemanfaatan energi alternatif seluas-luasnya</i> |
| PENANGGUNGJAWAB | Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral |
| BEKERJASAMA DENGAN | Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara; Menteri Negara Riset dan Teknologi; Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Kepala Badan Pertanahan Nasional |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|--|---|--|-----------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I. KEBIJAKAN: | | | | | | |
| Penetapan kebijakan energi yang memastikan penanganan energi nasional yang terintegrasi sesuai dengan Rencana Induk Energi Nasional | | | | | | |
| I.1. | Pembinaan Administrasi Hukum dan Kehumasan KESDM | Terwujudnya kepastian hukum sektor ESDM dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan citra sektor ESDM | Jumlah peraturan perundang-undangan | 1 | 0,6 | KESDM |
| I.2. | Penyiapan Kebijakan dan Peningkatan Kerja Sama Bilateral dan Multilateral Dalam Rangka Optimasi Penerimaan Negara dan Peningkatan Investasi Kegiatan Usaha Migas Serta Pemberdayaan Kapasitas Nasional | Pengembangan program, peningkatan penerimaan negara, investasi, kerjasama dan kapasitas nasional bidang migas | Jumlah Realisasi Investasi Subsektor Migas (Juta US\$) | 19.188 | 11,35 | KESDM |
| I.3. | Pengelolaan Pertanahan Propinsi | Terwujudnya pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan akses terhadap sumber ekonomi | Inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar | 466 SP | 7,5 | BPN |
| I.4. | Riset dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi | Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda dan teknologi dalam mendukung upaya mitigasi bencana geologi | Meningkatnya pemanfaatan hasil pengembangan metoda | 2 Paket dan 15 Lokasi | 38,54 | KESDM |
| I.5. | Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian, penyelidikan, dan pemetaan bidang lingkungan geologi dan air tanah | Jumlah daerah sulit air yang memperoleh sarana air bersih bersumber dari air tanah | 100 Daerah sulit air | 115 | KESDM |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|--|---|---|---|------------------------------|--------------------|
| | | | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian, Penyelidikan | 60 | 99,36 | |
| I.6. | Penyelidikan dan Pelayanan Sumber Daya Geologi | Meningkatnya pemanfaatan wilayah keprospekan sumber daya geologi | Jumlah usulan wilayah kerja pertambangan (WKP dan WP) dan status wilayah keprospekan sumber daya geologi serta peningkatan optimasi keekonomian wilayah keprospekan sumber daya geologi | 42 WKP dan 74 WP Lokasi | 1,67 | KESDM |
| I.7. | Survei dan Pelayanan Geologi | Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi | Meningkatnya pemanfaatan hasil survei penelitian, penyelidikan dan pelayanan geologi | 750 lembar | 361,4 | KESDM |
| I.8. | Mitigasi dan Pelayanan Kebencanaan Geologi | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan penyelidikan | 45 peta dan 220 lokasi | 190,6 | KESDM |
| II. KAPASITAS ENERGI | | | | | | |
| Pemenuhan kapasitas pembangkit listrik sebesar rata-rata 3000 MW pertahun mulai 2010 dengan rasio elektrifikasi yang mencakup 62% pada 2010 dan 80% pada 2014; dan produksi minyak bumi sebesar lebih dari 1,2 juta barel perhari mulai 2014 | | | | | | |
| II.1 | Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi | Meningkatnya Pengelolaan, Pengusahaan dan Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dan CBM | Jumlah laporan potensi cadangan minyak dan gas bumi dan CBM | 1 | - | KESDM |
| | | | Jumlah sumber daya minyak dan gas bumi dan CBM | 183,98 BOE | - | |
| | | | Jumlah kontrak kerja sama minyak dan gas bumi dan CBM yang ditawarkan dan ditandatangani | 40 KKKS Migas dan 10 KKS GMB | - | |
| | | | Jumlah produksi migas dan CBM | minyak bumi:900-930 MBOPD;gas:1360 -1390MBOEPD; CBM:113.2MBOE PD) | 7,9 | |
| | | | Jumlah investasi sub sektor minyak dan gas bumi dan CBM | 637 Juta US\$ dan 180 Juta US\$ | - | |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|---|---|---|------------------------------|--------------------|
| | | | Jumlah kegiatan eksplorasi dalam upaya mencari cadangan migas baru | Seismik 2D:13812km,seismik3D 5231km,pemboran 80 sumur | 11,44 | |
| | | | Jumlah pelaksanaan survei umum di wilayah terbuka | Lepas pantai Tual maluku sepanjang 3750 km | 53,02 | |
| | | | Jumlah kegiatan penyiapan, promosi dan penawaran wilayah kerja baru migas | 12 | 23,28 | |
| II.2. | Dukungan Manajemen dan Teknis Ditjen Migas | Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan dukungan teknis bagi Ditjen Migas secara optimal | Jumlah Draft Kontrak Kerjasama Migas Konvensional dan Non Konvensional yang disusun | 20 kontrak migas dan 10 kontrak CBM | 4,6 | KESDM |
| II.3. | Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan | Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya rasio elektrifikasi | Jumlah Kapasitas pembangkit (MW) | 164 | 737,5 | KESDM |
| | | | Panjang Jaringan Transmisi (kmr) | 4.881 | 1.660,7 | |
| | | | Jumlah Kapasitas Gardu Induk (MVA) | 1.020 | 556,6 | |
| | | | Panjang Jaringan Distribusi (kms) | 6.011,22 | 1.597,5 | |
| | | | Jumlah Kapasitas Gardu Distribusi (MVA) | 136,72 | 318,7 | |
| | | | Jumlah Pelanggan Program Listrik Murah dan Hemat | 71.429 | 150 | |
| II.4. | Pembinaan dan Pengusahaan Batubara | Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pertambangan batubara secara optimal | Jumlah pengawasan produksi terhadap PKP2B | 45 | 12,32 | KESDM |
| | | Terciptanya kegiatan pertambangan minerba yang | Jumlah kegiatan usaha pertambangan | 64 | 2,1 | |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|--|--|--|-------------------|------------------------------|----------------------|
| | | memenuhi kaidah <i>good mining practice</i> | minerba (Laporan) | | | |
| II.5. | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi | Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi | Jumlah kegiatan penelitian dan pengembangan | 36 | 136,9 | KESDM |
| III. ENERGI ALTERNATIF | | | | | | |
| Peningkatan pemanfaatan energi terbarukan termasuk energi alternatif geothermal sehingga mencapai 2.000 MW pada 2012 dan 5.000 MW pada 2014 dan dimulainya produksi coal bed methane untuk membangkitkan listrik pada 2011 disertai pemanfaatan potensi tenaga surya, microhydro, bio-energy, dan nuklir secara bertahap | | | | | | |
| III.1. | Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Bioenergi | Terwujudnya penyediaan, pengolahan, dan pengelolaan bioenergi | Jumlah pembinaan keteknikan dan lingkungan bioenergi | 16 | 14,13 | KESDM / DAK |
| | | | Jumlah Infrastruktur Energi Melalui Pemanfaatan Bioenergi | 7985 | 103,9 | |
| III.2. | Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan | Terwujudnya penyediaan, pengelolaan dan Pemanfaatan Aneka Energi | Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan | - | - | KESDM / DAK |
| | | | Jumlah Infrastruktur Energi Pemanfaatan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan | 154 | 781,2 | |
| III.3. | Pembinaan, Pengawasan, dan Pengusahaan Panas Bumi | Terwujudnya pembinaan, pengawasan dan pengusahaan panas bumi | Laporan percepatan pengembangan panas bumi | 7 | 3,5 | KESDM |
| III.4. | Diseminasi Hasil Litbang Iptek Nuklir | Paket sosialisasi PLTN & diseminasi IPTEK Nuklir | Jumlah media sosialisasi PLTN | 3 | 15,1 | BATAN |
| III.5. | Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pengembangan Bahan Bakar Nabati | Meningkatnya koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati | Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan pengembangan bahan bakar nabati yang diimplementasikan | 75% | 1,0 | Kemenko Perekonomian |
| III.6. | Koordinasi Pengembangan Desa Mandiri Energi | Meningkatnya koordinasi pengembangan desa mandiri energi | Persentase rekomendasi hasil koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan Desa Mandiri Energi yang ditindaklanjuti | 75% | 1,0 | |
| III.7. | Koordinasi Kebijakan Minyak dan Gas Bumi | Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan minyak dan gas bumi | Persentase rekomendasi hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Minyak dan | 75% | 1,6 | |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|---|---|--|--|------------------------------|--------------------|
| | | | Gas Bumi | | | |
| IV. HASIL IKUTAN DAN TURUNAN MINYAK BUMI / GAS: | | | | | | |
| Revitalisasi industri pengolah hasil ikutan/turunan minyak bumi dan gas sebagai bahan baku industri tekstil, pupuk dan industri hilir lainnya | | | | | | |
| IV.1 | Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar | Tumbuh dan berkembangnya industri kimia dasar | Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) | 10 | 2,6 | Kemenperin |
| | | | Tumbuh dan berkembangnya klaster industri berbasis migas | 1 | 5,0 | |
| | | | Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi | 6 | 8,6 | |
| | | Revitalisasi Industri Kimia Dasar | Terbangunnya pabrik pupuk organik | 10 | 17,5 | |
| | | | Terfasilitasinya revitalisasi industri pupuk | 3 | 2,9 | |
| V. KONVERSI MENUJU PENGGUNAAN GAS: | | | | | | |
| Perluasan program konversi minyak tanah ke gas sehingga mencakup 42 juta Kepala Keluarga pada 2010; penggunaan gas alam sebagai bahan bakar angkutan umum perkotaan di Palembang, Surabaya, dan Denpasar | | | | | | |
| V.1. | Pembinaan dan Penyelenggaraan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi | Terpenuhinya jaringan gas kota | Penambahan jaringan gas kota (kota) | 4 | 283,6 | KESDM |
| | | Terpenuhinya sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa | Sambungan rumah yang teraliri gas bumi melalui pipa | 16.000 SR | | |
| | | Meningkatnya Kapasitas, Keandalan dan Efisiensi Infrastruktur Sistem Penyediaan Bahan Bakar dan Bahan Baku Industri | Pembangunan Kilang Mini Plant LPG | 1 unit kilang miniplant (40%) | 40,0 | |
| | | Peningkatan Kapasitas, Keandalan dan Efisiensi Infrastruktur Sistem Penyediaan Bahan Bakar dan Bahan Baku Industri | Pembangunan Kilang BBM dan Petrokimia | 1 Lokasi (BED) | 199 | |
| | | | Penggunaan Gas Alam sebagai bahan bakar untuk transportasi (Pembangunan Infrastruktur Gas bumi untuk transportasi) | 2 SPBG online & 4 Mobine Refuelling Unit | 197,3 | |
| Penggunaan Gas Alam Sebagai Bahan | Pengadaan lahan | 220 | | | | |

| No. | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|--|--|--|------------------------------|--------------------|
| | | | Bakar Angkutan Umum di Perkotaan (Pembangunan Mini LNG Plant dan L-CNG Station Untuk Kendaraan Bermotor (Tahap I)) | untuk : 1 unit Mini LNG Plant dan 8 unit LCNG | | |
| | | | Penggunaan Gas Alam Sebagai Bahan Bakar Angkutan Umum di Perkotaan (Pembangunan SPBG CNG dan Infrastruktur Pipa di Semarang) | 4 unit SPBG (1 mother station+ 3 daughter station) | 133 | |
| V.2. | Pembinaan Lindungan Lingkungan, Keselamatan Operasi dan Usaha Penunjang Bidang Migas | Pembinaan dan Pengawasan Kehandalan Infrastruktur, K3, Keselamatan Operasi, dan Lingkungan, Serta Usaha Penunjang dan Teknis Serta Standardisasi | Persentase (%) Pengurangan Volume Limbah Pada Sumbernya | 75 | 16,2 | KESDM |
| V.3. | Pengaturan, Penetapan dan Pelaksanaan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM | Pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM | Jumlah laporan pengawasan badan usaha niaga umum dan niaga terbatas pemegang ijin usaha penyediaan dan pendistribusian BBM non subsidi | 9 | 145,5 | KESDM |
| | | Pengaturan Penyediaan dan Pendistribusian BBM | Jumlah Pengelolaan Sistem Informasi Direktorat BBM | 1 | 17,8 | |
| V.4. | Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat | Meningkatnya Penggunaan Gas Sebagai Bahan Bakar Angkutan Umum | Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah | 1 | 50,0 | Kemenperin |

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2014

| | |
|---------------------------|--|
| PRIORITAS 9 | PROGRAM AKSI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PENGELOLAAN BENCANA |
| Tema Prioritas | <i>Konservasi dan pemanfaatan lingkungan hidup mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang keberlanjutan, disertai penguasaan dan pengelolaan risiko bencana untuk mengantisipasi perubahan iklim</i> |
| Penanggungjawab | Menteri Negara Lingkungan Hidup |
| Bekerjasama Dengan | Menteri Kehutanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT; Kepala LIPI; Kepala BMKG; Kepala Badan Informasi Geospasial; KEPALA BNPB |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|---|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | PERUBAHAN IKLIM: Peningkatan keberdayaan pengelolaan lahan gambut, peningkatan hasil rehabilitasi seluas 500,000 ha per tahun, dan penekanan laju deforestasi secara sungguh-sungguh diantaranya melalui kerjasama lintas kementerian terkait serta optimalisasi dan efisiensi sumber pendanaan seperti dana Iuran Hak Pemanfaatan Hutan (IHPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi | | | | | |
| I.1 | Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, dan Reklamasi Hutan di DAS Prioritas | Berkurangnya lahan kritis melalui rehabilitasi dan reklamasi hutan | Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan pada DAS prioritas seluas 500.000 ha. | 40.000 Ha | 23,0 | Kemenhut |
| | | | Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis, hutan mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS prioritas seluas 1.994.000 ha. | 230.000 Ha | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|---|---|--|------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Terjaminnya hutan kota seluas 6000 ha. | 1.362 Ha | | |
| 1.2 | Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat | Terjaganya kelestarian fungsi dan terkendalinya kerusakan ekosistem perairan darat untuk mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim | Jumlah kebijakan, peraturan dan pedoman serta rencana aksi pengelolaan danau prioritas, situ, dan waduk yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah | 3 kebijakan/ ketentuan | 19,2 | KLH |
| | | | Jumlah kesatuan luas hidrologi gambut yang terdata | 5 lokasi/ luas | | |
| | | | Jumlah rekomendasi penetapan kelas air sungai prioritas yang terkoordinasi lintas K/L dan daerah | 13 sungai | | |
| | | | Jumlah danau prioritas yang menerapkan gerakan penyelamatan danau | 2 danau | | |
| | | | Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan <i>Integrated Citarum Water Resources Management</i> (ICWRMP-ADB) | 1 laporan | | |
| | | | Jumlah lokasi atau luas ekosistem perairan darat rusak yang terinventarisir yang termutakhir | 30 lokasi | | |
| 1.3 | Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan DAS | Terseleenggaranya pengelolaan DAS secara terpadu pada DAS prioritas | Terjaminnya rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS prioritas | 3 DAS | 14,0 | Kemehut |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|--|---|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Terjaminnya base line data pengelolaan DAS di 108 DAS | 36 DAS | | |
| | | | Tersedianya data dan peta lahan kritis di 36 BPDAS | 36 BPDAS | | |
| 1.4 | Pengembangan Perhutanan Sosial | Meningkatnya pengelolaan hutan melalui pemberdayaan masyarakat | Terjaminnya hutan kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Desa seluas 2,5 juta ha | 500.000 Ha | 16,0 | Kemenhut |
| | | | Terjaminnya izin usaha pengelolaan HKm sebanyak 500 lembaga | 100 Klpk | | |
| | | | Terjaminnya kemitraan usaha HKm sebanyak 50 unit | 10 Unit | | |
| | | | Terjaminnya dukungan ketahanan pangan di 32 provinsi | 5 Prov | | |
| | | | Terjaminnya hutan rakyat Kemitraan seluas 250.000 Ha | 50.000 Ha | | |
| | | | Terjaminnya sentra HHBK Unggulan terbentuk dan beroperasi di 30 lokasi | 6 lokasi | | |
| 1.5 | Perencanaan, Penyelenggaraan RHL, Pengembangan Kelembagaan | Berkurangnya lahan kritis dan peningkatan pendapatan masyarakat | Tanaman rehabilitasi hutan dan lahan kritis termasuk hutan mangrove, pantai, gambut dan rawa pada DAS prioritas seluas 2,5 juta Ha | 271.362 Ha | 1.886,5 | Kemenhut |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|--|---|--|------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | dan Evaluasi DAS | | | | | |
| | | | Terbangunnya hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa seluas 2,5 juta Ha | 500.000 Ha | | |
| | | | Sentra HHBK unggulan terbentuk dan beroperasi di 30 lokasi | 6 Lokasi | | |
| | | | Terbangunnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan kayu industri pertukangan seluas 250.000 Ha | 50.000 Ha | | |
| | | | Rencana pengelolaan DAS terpadu pada 108 unit DAS Prioritas | 3 DAS | | |
| | | | Terbangunnya Kebun Bibit Rakyat 48.000 unit | 4.000 unit | | |
| | | | Terbangunnya persemaian permanen 100 unit | - | | |
| 1.6 | Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan | Terjaganya kelestarian keanekaragaman hayati dan terkendalinya kerusakan lahan untuk mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim | Jumlah peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait | 2 kebijakan/ ketentuan | 14,0 | KLH |
| | | | Jumlah rekomendasi keamanan hayati/genetik | 10 rekomendasi | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|---|---|--|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah kabupaten peserta Program Menuju Indonesia Hijau (MIH) | 202 kabupaten | | |
| 1.7 | Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kajian Kebijakan Wilayah dan Sektor | Terselenggaranya penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | Jumlah kebijakan, peraturan, kajian dan pedoman tentang daya dukung daya tampung, RPPLH, KLHS dan penerapan ekoregion | 11 kebijakan/ dokumen | 10,8 | KLH |
| | | | Jumlah provinsi/kabupaten/ kota yang difasilitasi dalam implementasi daya dukung daya tampung, KLHS, penerapan ekoregion dan RPPLH | 33 provinsi/ kabupaten/ kota | | |
| 1.8 | Mitigasi dan Pelestarian Fungsi Atmosfir | Terselenggaranya upaya mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer dalam rangka mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim | Jumlah kebijakan, pedoman, dan perangkat mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer | 2 kebijakan/ ketentuan | 7,0 | KLH |
| | | | Jumlah lokasi bimbingan teknis untuk melakukan mitigasi dan pelestarian fungsi atmosfer | 10 provinsi | | |
| 1.9 | Adaptasi Perubahan Iklim | Terselenggaranya upaya adaptasi terhadap perubahan iklim | Jumlah kebijakan bidang perlindungan atmosfer dan pengendalian dampak perubahan iklim | 1 kebijakan/ ketentuan | 7,0 | KLH |
| | | | Jumlah provinsi peserta pembinaan teknis kajian kerentanan dan adaptasi perubahan iklim | 5 provinsi | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|---|---|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah sektor peserta pembinaan | 5 sektor | | |
| I.10 | Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis | Terkelolanya kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan; bertambahnya kawasan konservasi perairan serta terkelolanya jenis biota perairan yang terancam punah, langka, endemik dan dilindungi | Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan | 4,5 juta ha | 85,0 | KKP |
| | | | Bertambahnya luas kawasan konservasi perairan | 500 ribu ha | | |
| | | | Jumlah jenis yang dikonservasi dan dimanfaatkan secara berkelanjutan | 15 jenis | | |
| | | | Persentase penguatan kelembagaan konservasi | 5% | | |
| I.11 | Adaptasi Perubahan Iklim | Tersusunnya kebijakan peningkatan dukungan litbang untuk penurunan emisi CO2 dan adaptasi perubahan iklim | Jumlah konsorsium | 1 | 0,5 | KRT |
| I.12 | Penelitian Geoteknologi | Dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim | Jumlah buku /dokumen ilmiah kontribusi Indonesia untuk perubahan iklim | 1 | 1,8 | LIPI |
| II | PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN: Pengendalian Kerusakan Lingkungan: Penurunan beban pencemaran lingkungan melalui pengawasan ketaatan pengendalian pencemaran air limbah dan emisi di 680 kegiatan industri dan jasa pada 2010 dan terus berlanjut; penurunan jumlah hotspot kebakaran hutan sebesar 20% per tahun dan penurunan tingkat polusi keseluruhan sebesar 50% pada 2014; penghentian kerusakan lingkungan di 11 Daerah Aliran Sungai yang rawan bencana mulai 2010 dan seterusnya | | | | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|--|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| II.1 | Pengendalian Pencemaran Manufaktur, Prasarana dan Jasa | Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan dan terkendalinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manufaktur, prasarana, dan jasa | Jumlah industri/kegiatan manufaktur, prasarana dan jasa yang diawasi, dipantau, dibina dan diberikan insentif/disinsentif | 257 industri/ kabupaten/ kota | 19,1 | KLH |
| | | | Jumlah rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut | 18 dokumen | | |
| | | | Jumlah kebijakan, peraturan dan pedoman pengendalian pencemaran kegiatan manufaktur, prasarana, dan jasa | 9 kebijakan/ ketentuan | | |
| II.2 | Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Bergerak | Terlaksananya penurunan beban pencemaran udara dari sumber bergerak | Jumlah kebijakan, pedoman, peraturan dan kajian tentang pengendalian pencemaran udara sumber bergerak | 9 kebijakan/ ketentuan | 17,7 | KLH |
| | | | Jumlah kota yang dipantau kualitas udaranya dan diinformasikan | 45 kota | | |
| II.3 | Pengendalian Pencemaran Pertambangan, Energi dan Migas | Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan dan terkendalinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pertambangan, energi, dan migas | Jumlah industri yang diawasi dan dipantau untuk pengendalian pencemaran air dan udara untuk kegiatan pertambangan, energi, dan migas | 250 industri | 16,0 | KLH |
| | | | Jumlah rekomendasi dan verifikasi teknis izin pembuangan air limbah ke laut dan ijin reinjeksi | 100 rekomendasi | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|--|--|--|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | kegiatan pertambangan, energi, dan migas | | | |
| | | | Jumlah kebijakan, peraturan, kajian dan pedoman pengendalian pencemaran kegiatan pertambangan, energi, dan migas | 3 kebijakan/ ketentuan | | |
| II.4 | Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun | Terselenggaranya kegiatan pengelolaan B3 dalam rangka menurunkan potensi dan beban pencemaran | Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka verifikasi pengelolaan B3 | 5 peraturan/ dokumen | 12,4 | KLH |
| | | | Jumlah Dokumen Registrasi dan Notifikasi B3 | 300 surat | | |
| | | | Jumlah provinsi peserta bimbingan teknis verifikasi pengelolaan B3 | 18 provinsi | | |
| II.5 | Peningkatan Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 | Terselenggaranya pengelolaan administrasi limbah B3 dalam rangka menurunkan potensi dan beban pencemaran | Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka verifikasi pengelolaan limbah B3 | 6 peraturan/ dokumen | 11,9 | KLH |
| | | | Jumlah verifikasi permohonan ijin, rekomendasi pengelolaan limbah B3 dan notifikasi ekspor limbah B3 serta rekomendasi impor limbah non B3 | 1000 ijin/ rekomendasi/ surat notifikasi | | |
| | | | Jumlah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang Mendapat Bimbingan Teknis verifikasi perizinan pengelolaan limbah B3 | 18 provinsi/ kabupaten/ kota | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|---|--|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| II.6 | Pengelolaan Limbah B3 dan Pemulihan Kontaminasi Limbah B3 | Terselenggaranya pengelolaan limbah B3 dan pemulihan kontaminasi limbah B3 dalam rangka menurunkan beban dan potensi pencemaran | Jumlah kebijakan, pedoman, dan aturan dalam rangka pengelolaan limbah B3 dan pemulihan kontaminasi limbah B3 | 4 peraturan/ pedoman | 15,1 | KLH |
| | | | Jumlah limbah B3 yang dikelola dari kegiatan industry manufaktur, PEM, agroindustry dan jasa prasarana yang dipantau/diawasi | 10 juta ton | | |
| | | | Jumlah lokasi lahan terkontaminasi yang dipulihkan | 20 lokasi | | |
| II.7 | Pengendalian Pencemaran Agroindustry dan Usaha Skala Kecil | Terlaksananya penurunan beban pencemaran lingkungan dan terkendalinya kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan agroindustry dan usaha skala kecil | Jumlah agroindustry dan USK yang diawasi dan dipantau untuk pengendalian pencemaran air dan udara | 200 industri | 14,3 | KLH |
| | | | Jumlah peraturan, kajian dan pedoman tentang pengendalian dan pemanfaatan limbah agroindustry dan usaha skala kecil | 2 kebijakan/ ketentuan | | |
| | | | Jumlah lokasi pembinaan pengendalian pencemaran kegiatan agroindustry dan usaha kecil | 77 lokasi/ kabupaten/ kota | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|--|---|---------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| II.8 | Pengaduan dan Penaatan Hukum Administrasi Lingkungan | Terselenggaranya penanganan pengaduan dan penataan hukum administrasi lingkungan | Jumlah verifikasi pengaduan masyarakat yang diduga melakukan pencemaran atau kerusakan LH | 120 pengaduan | 8,0 | KLH |
| | | | Jumlah subyek yang terkena sanksi administratif dan harus dipantau/diawasi | 70 orang/ organisasi | | |
| | | | Jumlah kebijakan, pedoman dan aturan tentang penataan hukum administrasi lingkungan | 0 dokumen | | |
| II.9 | Penyelesaian Sengketa Lingkungan | Terselenggaranya penyelesaian sengketa lingkungan | Jumlah verifikasi sengketa lingkungan | 75 sengketa | 9,7 | KLH |
| | | | Jumlah kebijakan, pedoman dan aturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan | 2 kebijakan/ ketentuan | | |
| | | | Jumlah pendaftaran gugatan dan putusan perkara perdata serta TUN yang diputus PN/ PT/ PTUN/ PTTUN/ MA | 8 perkara | | |
| | | | Jumlah penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan | 10 sengketa | | |
| | | | Jumlah hakim/litigator yang meningkat kapasitasnya | 450 orang | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|-------------------------------------|---|--|------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah fasilitator, negosiator dan mediator yang meningkat kapasitasnya | 450 orang | | |
| | | | Jumlah fasilitasi pembentukan LPJPSLH daerah | 5 daerah | | |
| II.10 | Penegakan Hukum Pidana Lingkungan | Terselenggaranya penegakan hukum pidana lingkungan | Jumlah pengumpulan bahan keterangan (PULBAKET) kasus | 65 kasus | 12,0 | KLH |
| | | | Jumlah penyidikan kasus pidana dan eksaminasi putusan pengadilan | 34 berkas | | |
| | | | Jumlah fasilitasi penanganan kasus pidana lingkungan | 20 kasus | | |
| | | | Jumlah kapasitas aparat penegak hokum | 300 orang | | |
| | | | Pengembangan dan koordinasi penegakan hukum pidana LH daerah | 5 provinsi | | |
| II.11 | Pengembangan Ekonomi Lingkungan | Terselenggaranya penerapan instrumen ekonomi bagi upaya penataan dan pengelolaan lingkungan hidup | Jumlah rumusan kebijakan dan pedoman tentang instrumen ekonomi, insentif, pendanaan lingkungan, PDRB hijau, dan valuasi ekonomi SDA dan LH | 6 kebijakan/ ketentuan | 8,2 | KLH |
| | | | Jumlah UMKM yang diberikan insentif ekonomi | 10 UMKM | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|--|---|--|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah provinsi/kabupaten/kota yang mendapatkan bimbingan teknis pengembangan instrumen ekonomi dan perhitungan PDRB Hijau | 16 provinsi/kabupaten/kota | | |
| II.12 | Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah | Terselenggaranya pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah | Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Pengendalian Pencemaran Lingkungan | 32 Provinsi | 120,0 | KLH |
| | Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Pengendalian Kerusakan Lingkungan | | 32 Provinsi | | | |
| | Jumlah Provinsi yang Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup | | 32 Provinsi | | | |
| II.13 | Penelitian Oseanografi | Terlaksananya Pengelolaan Pusat Informasi dan Penelitian Terumbu Karang serta Mitigasi Resiko Kerusakan Lingkungan Kelautan | jumlah jaringan informasi terumbu karang yang dikelola | 1 | 4,5 | LIPI |
| II.14 | Pengukuhan Kawasan Hutan | Terwujudnya kepastian kawasan hutan dan terlaksananya penatagunaan kawasan hutan | Terjaminnya tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000 km, terdiri dari batas luar dan batas fungsi kawasan hutan | 13.000 km | 10,2 | Kemenhut |
| | | | Penunjukan kawasan hutan provinsi selesai (100%) | - | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|--|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Penetapan kawasan hutan yang telah selesai tata batas temu gelang sebanyak 75% per tahun | 75% | | |
| | | | Rekomendasi tentang perubahan fungsi kawasan hutan terselesaikan sebanyak 75% per tahun | 75% | | |
| | | | Surat Keputusan tentang pelepasan kawasan hutan secara parsial terselesaikan sebanyak 75% per tahun | 75% | | |
| II.15 | Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) | Terwujudnya kepastian wilayah kelola KPH dan penyiapan areal pemanfaatan hutan | Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHL dan KPHP di seluruh Indonesia | 28 Prov | 7,9 | Kemenhut |
| | | | Beroperasinya 120 KPH (20% dari KPH yang ditetapkan) | 20% | | |
| | | | Keputusan Menteri Kehutanan tentang Penetapan Wilayah KPHK di seluruh Indonesia | 100% | | |
| | | | Peraturan perundangan tentang penyelenggaraan KPH sebanyak 4 judul | 1 Judul | | |
| | | | Peta areal kerja dan peta pencadangan izin pemanfaatan hutan selesai 80% | 80% | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|---|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| II.16 | Penyiapan Pemantapan Kawasan Hutan | Terwujudnya kepastian kawasan hutan dalam mendukung pemantapan kawasan hutan | Tata batas kawasan hutan sepanjang 63.000 km | 13.000 km | 473,4 | Kemenhut |
| | | | Neraca Sumberdaya Hutan di 17 BPKH | 17 BPKH | | |
| | | | Tersedianya Sarpras dan tata hutan KPH | 30 unit | | |
| | | | Enumerasi dan re-enumerasi TSP/PSP | 599 plot | | |
| II.17 | Pengendalian kebakaran hutan | Meningkatkan sistem pencegahan pemadaman, penanggulangan, dampak kebakaran hutan dan lahan | Terjaminnya hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 | 67,20% | 49,0 | Kemenhut |
| | | | Terjaminnya kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 | 50% | | |
| | | | Peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 30 DAOPS (10 Provinsi) | 6 DAOPS | | |
| II.18 | Pengembangan dan Pengelolaan Taman Nasional | Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan TN, kelestarian kawasan dan dukungan dari seluruh pemangku | Hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 | 67,20% | 52,0 | Kemenhut |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|---|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | kepentingan | | | | |
| | | | Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 | 50% | | |
| II.19 | Pengembangan Pengelolaan Konservasi Sumberdaya Alam | Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelolaan kawasan konservasi dan ekosistem esnsial, kelestarian kawasan dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan | Hotspot di pulau Kalimantan, pulau Sumatera, dan pulau Sulawesi berkurang 20% setiap tahun dari rerata 2005-2009 | 67,20% | 53,0 | Kemenuhut |
| | | | Luas kawasan hutan yang terbakar ditekan hingga 50% dalam 5 tahun dibanding kondisi rerata 2005-2009 | 50% | | |
| II.20 | Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan | Terselenggaranya pengembangan SDM Kehutanan | Pemetaan dan pengembangan aparatur kehutanan (Kemenuhut dan Daerah) selesai di 33 provinsi | 16 Prov | 9,9 | Kemenuhut |
| | | | Pemetaan dan perencanaan pengembangan SDM Non Aparatur selesai di 33 provinsi | 16 Prov | | |
| | | | Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang | 500 orang | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|---|--|---------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| II.21 | Peningkatan Penyuluhan Kehutanan | Meningkatnya kesadaran dan partisipasi pelaku utama dan pelaku usaha serta peran penyuluh dalam pembangunan kehutanan | Terbentuknya 500 kelompok usaha produktif kehutanan | 100 kelompok | 48,7 | Kemenhut |
| | | | Tercukupinya sarana prasarana dan alat bantu penyuluhan kehutanan sebanyak 60 unit percontohan pemberdayaan masyarakat dan 1.300 unit kendaraan operasional penyuluh kehutanan | 30 unit 700 unit | | |
| | | | Tercukupinya tenaga penyuluh kehutanan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan melalui pendayagunaan 3.000 orang penyuluh kehutanan swadaya masyarakat dan/atau penyuluh kehutanan swasta | 1.500 orang | | |
| II.22 | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya | Meningkatnya kualitas dan kapasitas aparatur Kemenhut serta SDM Kehutanan lainnya | Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 15.000 orang peserta | 3.000 orang | 147,5 | Kemenhut |
| | | | Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 1.440 siswa | 288 siswa | | |
| | | | Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 325 orang lulusan | 65 siswa | | |
| | | | Sertifikasi ISO 9001: 2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sejumlah 5 unit | 1 unit | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| II.23 | Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Perikanan | Meningkatnya Kapal Perikanan yang Laik Operasi Penangkapan Ikan dan usaha pengolahan, pemasaran hasil perikanan dan budidaya ikan yang sesuai dengan ketentuan | Persentase kapal perikanan yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah bagian barat | 90% | 26,0 | KKP |
| | | | Persentase kapal perikanan yang laik operasi penangkapan ikan di wilayah bagian timur | 90% | | |
| | | | Jumlah kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas) yang berperan aktif dalam kegiatan pengawasan | 800 | | |
| II.24 | Peningkatan Operasional Pengawasan Sumber Daya Kelautan | Meningkatnya cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-RI yang bebas kegiatan ilegal dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya | Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan dan pemanfaatan ekosistem dan kawasan konservasi perairan <i>ilegal</i> dan/atau yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (WPP 711, 712, 713, dan 715) | 32% | 16,0 | KKP |
| | | | Persentase cakupan wilayah pesisir dan lautan pada WPP-NRI yang terawasi dari kegiatan pencemaran perairan yang merusak sumber daya ikan dan/atau lingkungannya (WPP 711, 712, 713, dan 715) | 28% | | |
| III | SISTEM PERINGATAN DINI: Penjaminan berjalannya fungsi Sistem Peringatan Dini Tsunami (TEWS) dan Sistem Peringatan Dini Cuaca (MEWS) yang dimulai pada 2010, serta Sistem Peringatan Dini Iklim (CEWS) pada 2013 | | | | | |
| III.1 | Pengelolaan Meteorologi Publik | Meningkatnya layanan informasi | Jumlah propinsi yang memperoleh informasi prakiraan cuaca skala kabupaten setiap hari | 33 Propinsi | 284,8 | BMKG |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | BMKG | Meteorologi Publik | melalui media elektronik dan cetak | | | |
| | | Meningkatnya layanan informasi cuaca ekstrim | Jumlah Provinsi yang memperoleh pelayanan peringatan dini cuaca ekstrim skala kabupaten | 33 Provinsi | | |
| | | Meningkatnya kemampuan pelayanan informasi meteorologi melalui Strengthening BMKG | Jumlah Provinsi yang mampu melayani informasi meteorologi melalui Strengthening BMKG | 33 Provinsi | | |
| III.2 | Pengelolaan Gempa Bumi dan Tsunami BMKG | Meningkatkan layanan informasi gempa bumi | Waktu yang diperlukan untuk menentukan parameter gempa bumi | 4 menit | 96,7 | BMKG |
| | | Meningkatkan layanan peringatan dini tsunami | Waktu yang diperlukan untuk menyiapkan peringatan dini tsunami | 5 menit | | |
| III.3 | Pengelolaan Iklim Agroklimat dan Iklim Maritim BMKG | Meningkatkan layanan informasi rutin dan peringatan dini iklim, agroklimat dan iklim maritim | Prosentase kemajuan pembangunan sistem informasi peringatan dini iklim ekstrim | 100% | 75,5 | BMKG |
| | | | Jumlah ragam peta tematik iklim yang tersedia | 5 peta | | |
| | | | Jumlah Provinsi yang mendapatkan rehabilitasi/Penggantian Peralatan Pengamatan Iklim | 33 provinsi | | |
| | | Meningkatkan layanan jasa iklim, | Jumlah pedoman/ panduan teknis/ TTP operasional yang dipublikasikan untuk | 6 dok | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|--|---|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | agroklimat, dan iklim maritim | pembinaan teknis | | | |
| | | | Jumlah laporan workshop/ seminar/ SLI/ penyuluhan teknis operasional yang diselenggarakan | 5 Laporan | | |
| III.4 | Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kualitas Udara BMKG | Meningkatnya layanan informasi dini kualitas udara (AQMS) | Jumlah UPT BMKG yang mendiseminasikan informasi dini kualitas udara (AQMS) | 6 UPT | 37,3 | BMKG |
| | | Meningkatnya layanan informasi perubahan iklim | Jumlah ragam/jenis informasi perubahan iklim | 6 jenis | | |
| | | | Prosentase pembangunan sistem informasi perubahan iklim yang dibangun di satu lokasi (jakarta) | 100% | | |
| | | Meningkatnya layanan informasi kualitas udara | Jumlah ragam/jenis informasi kualitas udara | 5 jenis | | |
| | | | Prosentase kemajuan pembangunan sistem informasi kualitas udara/GAW yang dibangun di 2 Lokasi (palu dan papua) | 100% | | |
| IV | PENANGGULANGAN BENCANA: | | | | | |
| | Peningkatan kemampuan penanggulangan bencana melalui: 1) penguatan kapasitas aparatur pemerintah dan masyarakat dalam usaha mitigasi risiko serta penanganan bencana dan bahaya kebakaran hutan di 33 propinsi, dan 2) pembentukan tim gerak cepat (unit khusus penanganan bencana) dengan dukungan peralatan dan alat transportasi yang memadai dengan basis di dua | | | | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|--|--|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | lokasi strategis (Jakarta dan Malang) yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia | | | | | |
| IV.1 | Pendayagunaan Pesisir dan Lautan | Meningkatnya ketahanan kawasan pesisir dan terfasilitasinya produk kelautan | Jumlah luasan kawasan di wilayah pesisir rusak yang direhabilitasi | 120 ha | 55,0 | KKP |
| | | | Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim | 30 kawasan | | |
| | | | Jumlah ragam produk kelautan yang terfasilitasi pengembangannya | 3 produk | | |
| IV.2 | Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kewilayahan, Dinamika dan Sumber Daya Laut dan Pesisir | Terlaksananya litbang iptek yang menghasilkan rekomendasi pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumberdaya laut (selain ikan) dan pesisir | Jumlah rekomendasi pengelolaan dan/atau model pemanfaatan sumber daya laut dan pesisir | 3 | 29,8 | KKP |
| | | | Jumlah model penerapan iptek sumberdaya laut dan pesisir | 2 | | |
| | | | Jumlah Kawasan Pesisir dan WPP yang terpetakan sumberdaya, karakteristik dan dinamikanya | 7 SDLP, 2 WPP | | |
| IV.3 | Pendayagunaan Teknologi Mitigasi Bencana | Kebijakan pendayagunaan teknologi | Jumlah rekomendasi kebijakan | | 1,0 | KRT |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | mitigasi bencana | | | | |
| IV.4 | Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global | Terlaksananya pengkajian dan penerapan teknologi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim | Prototipe teknologi penyerapan karbon dengan mikroalgae | 1 | 0,92 | BPPT |
| IV.5 | Penelitian Oseanografi Terumbu Karang dan Kebencanaan | Panduan dan sosialisasi kesiapsiagaan masyarakat pesisir | Jumlah laboratorium dan peralatan kelautan di wilayah timur | 4 | 26,6 | LIPI |
| IV.6 | Pengembangan Konservasi Tumbuhan Indonesia – Kebun Raya Baru | Konservasi ex-situ dalam bentuk kebun raya daerah | Pengembangan Kebun Raya Daerah (paket) | 3 | 7,0 | LIPI |
| IV.7 | Pemetaan dan Integrasi Tematik | Terselenggaranya kegiatan Pemetaan & Integrasi Tematik | Peta Tematik dan Integrasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup, kebencanaan dan perubahan iklim, serta tematik strategis | 493 | 22,3 | BIG |
| | | | Jumlah basisdata spasial nasional terpadu peta pemberian ijin investasi sektoral (Kehutanan, Pertambangan, Perkebunan, dan investasi lainnya) | 1 | 7,0 | |
| IV.8 | Penyusunan Atlas Sumberdaya, Kajian Pengembangan Wilayah dan | Tersedianya data dan informasi atlas sumber daya, kajian pengembangan wilayah, dan pemetaan tata ruang | Dokumen pembinaan pemetaan tata ruang, atlas dan dinamika sumber daya. | 20 | 5,8 | BIG |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|---|--|-------------------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Pemetaan Tata Ruang | | | | | |
| | | | Atlas, pemetaan sosial, dan dinamika sumberdaya. | 19 | 2,9 | |
| IV.9 | Pembangunan Data Dan Informasi Geodesi Dan Geodinamika. | Tersusunnya rancangan rumusan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang pembangunan data dan informasi geodesi dan geodinamika. | Jaring Kontrol Geodesi dan Geodinamika yang dibangun | 208 | 5,5 | BIG |
| | | | Jaring Kontrol Geodesi dan geodinamika yang dirawat | 249 | 14,0 | |
| IV.11 | Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana Direktorat Logistik | Pemenuhan kebutuhan logistik kebencanaan | Jumlah Kegiatan Pengadaan Logistik | 33 Provinsi/ 100 Kab/ Kota | 40,0 | BNPB |
| | | Pendistribusian logistik kebencanaan pada daerah bencana | Jumlah Kegiatan Distribusi Logistik | | | |
| IV.12 | Penyiapan peralatan dan logistik dikawasan rawan bencana Direktorat Peralatan | Pemenuhan kebutuhan peralatan kebencanaan | Jumlah Kegiatan Pengadaan Peralatan | 33 provinsi/100 kab/kota | 85,0 | BNPB |
| | | Pendistribusian peralatan kebencanaan pada daerah bencana | Jumlah Kegiatan Distribusi Peralatan | | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|---|--|---|-------------------|------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| IV.13 | Kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana | Terlaksananya pendampingan dalam penyusunan rencana kontinjensi dan kedaruratan | Jumlah Rencana Kontijensi PB | 5 | 24,5 | BNPB |
| | | Terlaksananya kesiapsiagaan dengan pembentukan satuan reaksi cepat penanggulangan bencana (SRC-PB) | Jumlah Kegiatan Pengembangan SRC-PB | 7 kegiatan | | |
| | | Terlaksananya kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana | Jumlah Kegiatan Fasilitas Kesiapsiagaan | 5 | | |
| | | Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pendukung shelter/tempat evakuasi sementara. | Jumlah jalur, tangga evakuasi | 39 lokasi | 87,8 | BNPB |
| IV.14 | Tanggap darurat di daerah terkena bencana | Meningkatnya kapasitas kelembagaan dalam penanganan tanggap darurat | Jumlah Kegiatan Koordinasi Penanganan Darurat | 41 lokasi | 59,0 | BNPB |
| | | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dasar kedaruratan dipusat dan daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Tanggap Darurat | | | |
| | | Terlaksananya koordinasi dan pelaksanaan penanganan tanggap darurat dipusat dan daerah | Jumlah Laporan Monev | | | |
| IV.15 | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Penataan Bangunan dan | Meningkatnya implementasi produk pengaturan, pelayanan pembinaan dan pengawasan, kualitas hasil | Jumlah shelter/tempat evakuasi sementara | 39 unit | 487,5 | Kementerian PU |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp. Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|--|---|---|-------------------|------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Lingkungan, Pengelolaan Gedung dan Rumah Negara | pembangunan dan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan | | | | |
| IV.16 | Pencegahan dan Pengurangan risiko bencana | Penguatan rantai peringatan dini (Lanjutan Direktif Presiden) | Jumlah sirene utama peringatan dini tsunami | 480 unit | 57,9 | BNPB |
| IV.17 | Pemberdayaan Masyarakat dalam kesiapan menghadapi bencana | Penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana | Jumlah desa tangguh bencana | 78 desa | 118,95 | BNPB |
| IV.18 | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Percepatan pengurangan genangan akibat banjir di Wilayah DKI Jakarta dengan mengembalikan fungsi sarana dan prasarana pengendali banjir di pasca kejadian banjir pertengahan Januari 2013 | Sudetan Sungai Ciliwung untuk pengendalian Banjir Jakarta | 0,2 km | 370,5 | Kementerian PU |
| | | | Normalisasi Sungai Ciliwung untuk pengendalian Banjir Jakarta | 1,75 km | | |
| IV.19 | Koordinasi kebijakan bidang infrastruktur sumber daya air | Tersusunnya rekomendasi hasil koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan percepatan pembangunan terpadu pesisir Ibu Kota Negara Indonesia | Presentase rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti | 80% | 6,0 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2014

| | |
|---------------------|--|
| PRIORITAS 10 | DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN, TERLUAR, DAN PASCA-KONFLIK |
| Tema Prioritas | <i>Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik</i> |
| Penanggungjawab | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan |
| Bekerjasama Dengan | Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal; Menteri Pendidikan Nasional; Menteri Kesehatan; Menteri Pekerjaan Umum; Menteri Perhubungan; Menteri Negara Komunikasi dan Informatika; Menteri Pertahanan; Menteri Kelautan dan Perikanan; Menteri Luar Negeri; Menteri Sosial; Menteri Dalam Negeri; Menteri Pertahanan; Kepala Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional; Badan Nasional Pengelola Perbatasan |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|---|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I. ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | | | | | | |
| I | PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | | | | | |
| I.1 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Koperasi Daerah Tertinggal | Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Di Daerah Tertinggal | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi di Daerah Tertinggal | 3 | 2,25 | KPDT |
| | | | Jumlah Kabupaten Daerah Tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan peningkatan kemudahan akses UMKM terhadap modal usaha | 15 | 13,98 | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|---|--|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I.2 | Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Komoditas Unggulan | Meningkatnya produksi dan nilai tambah komoditi unggulan di daerah tertinggal | 1. Jumlah daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam pengembangan produk unggulan 2. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan 3. Jumlah Naskah Kebijakan Pengembangan Komoditas Unggulan | 52 3 13 | 76,97 2,25 0,95 | KPDT |
| I.3 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Perdesaan di Daerah Tertinggal | Meningkatnya kemampuan daerah tertinggal dalam pengembangan desa terpadu | 1. Jumlah pengembangan Kebijakan perdesaan terpadu 2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dibidang pembangunan dan pengembangan kawasan perdesaan terpadu 3. Jumlah daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam pengembangan perdesaan terpadu | 1 3 39 | 0,95 2,25 40,00 | KPDT |
| I.4 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Kesehatan Daerah Tertinggal | Meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan Infrastruktur Kesehatan | 1. Jumlah pengembangan kebijakan infrastruktur sosial bidang kesehatan dan pemukiman di daerah tertinggal 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka peningkatan infrastruktur sosial bidang kesehatan dan pemukiman daerah 3. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan infrastruktur sosial bidang kesehatan dan pemukiman | 1 3 31 | 0,95 2,25 24,00 | KPDT |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|--|--|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I.5 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal | Meningkatnya Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Di Bidang Kesehatan Dasar Daerah Tertinggal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Di Bidang Kesehatan Dasar, Lanjutan Daerah Tertinggal 2. Jumlah daerah tertinggal yang terlibat pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pengembangan sumber daya kesehatan 3. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam pengembangan sumber daya kesehatan 4. Jumlah kajian dan rumusan serta rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dalam rangka pengembangan sumber daya kesehatan di daerah tertinggal 5. Jumlah daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan di bidang pemenuhan kecukupan nutrisi | 118 | 0,95 | KPDT |
| I.6 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal | Meningkatnya persentase kabupaten daerah tertinggal yang memiliki kemampuan pengelolaan pembangunan infrastruktur pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengembangan kebijakan infrastruktur sosial bidang pendidikan di daerah tertinggal 2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan infrastruktur sosial bidang pendidikan daerah tertinggal 3. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan infrastruktur sosial bidang pendidikan | 1 3 54 | 0,95 2,25 28,00 | KPDT |
| I.7 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pendidikan Dan Ketrampilan Di Daerah Tertinggal | Terwujudnya pengembangan kebijakan Pendidikan dan Ketrampilan diseluruh kabupaten daerah tertinggal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah pengembangan Kebijakan Pendidikan dan ketrampilan di daerah tertinggal 2. Jumlah koordinasi dalam rangka mendukung kegiatan peningkatan angka melek huruf 3. Jumlah Kabupaten yang mendapatkan bantuan alat penunjang pendidikan dan ketrampilan | 1 3 25 | 0,95 2,00 35,00 | KPDT |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|---|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I.8 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal | Terwujudnya Peningkatan Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal | 1. Jumlah pengembangan Kebijakan di bidang Pendidikan Luar Sekolah Daerah Tertinggal 2. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah di Daerah Tertinggal 3. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang memperoleh bantuan stimulan pengembangan pendidikan luar sekolah di daerah tertinggal | 1 3 15 | 0,95 1,89 14,50 | KPDT |
| I.9 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal | Meningkatnya Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal Meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan Infrastruktur energi | 1. Jumlah pengembangan kebijakan infrastruktur energi di daerah tertinggal 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka peningkatan infrastruktur energi daerah tertinggal 3. Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan infrastruktur energi | 1 3 35 | 0,95 2,25 80,00 | KPDT |
| I.10 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal | Meningkatnya Persentase (%) Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memiliki Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal | 1. Jumlah pengembangan kebijakan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka peningkatan infrastruktur telekomunikasi daerah tertinggal 3. Jumlah Kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan infrastruktur telekomunikasi | 1 3 43 | 0,95 2,25 41,87 | KPDT |
| I.11 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal | Meningkatnya kemampuan pemerintahan daerah tertinggal dalam pengelolaan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Daerah Tertinggal | 1. Jumlah pengembangan kebijakan infrastruktur transportasi di daerah tertinggal 2. Jumlah pelaksanaan kegiatan koordinasi dalam rangka peningkatan infrastruktur transportasi daerah tertinggal 3. Jumlah Kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan infrastruktur transportasi e kabupaten tertinggal yang memiliki database bidang infrastruktur transportasi | 1 3 77 | 0,95 2,25 71,07 | KPDT |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|---|---|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I.12 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pendanaan Dan Kemitraan Usaha Daerah Tertinggal | Terwujudnya Peningkatan Ketersediaan Sumber Pendanaan dan Pengembangan Kemitraan Usaha Di Daerah Tertinggal | 1. Jumlah pengembangan kebijakan di bidang pendanaan dan kemitraan usaha 2. Jumlah pelaksanaan koordinasi pengembangan pendanaan dan kemitraan usaha di Daerah Tertinggal 3. Jumlah Daerah Tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan dalam pengembangan kemitraan usaha | 1 2 12 | 0,95 2,25 24,6 | KPDT |
| I.13 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Lembaga Perekonomian Daerah Tertinggal | Terwujudnya peningkatan Kapasitas Lembaga Perekonomian Daerah Tertinggal | 1. Jumlah pengembangan kebijakan di bidang lembaga perekonomian di Daerah Tertinggal 2. Jumlah daerah tertinggal yang terlibat pelaksanaan koordinasi Penguatan Lembaga Perekonomian Di Daerah Tertinggal 3. Jumlah Kabupaten di Daerah Tertinggal yang Memperoleh bantuan stimulan dalam pengembangan kebijakan Lembaga Perekonomian Di Daerah Tertinggal | 1 25 25 | 0,95 2,25 12,20 | KPDT |
| I.14 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Sosial Masyarakat Daerah Tertinggal | Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sosial Masyarakat Daerah Tertinggal | 1. Jumlah pengembangan kebijakan penguatan kelembagaan sosial masyarakat di daerah tertinggal 2. Jumlah pelaksanaan koordinasi dalam rangka penguatan kelembagaan sosial masyarakat di Daerah Tertinggal 3. Daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulant penguatan kapasitas kelembagaan sosial masyarakat di daerah tertinggal | 1 3 35 | 0,95 2,25 15,86 | KPDT |
| I.15 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga Sosial dan Budaya di Daerah Tertinggal | Terwujudnya Peningkatan Kemitraan Antar Lembaga Pemerintahan Kabupaten Daerah Tertinggal | 1. Jumlah pengembangan kebijakan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya di Daerah Tertinggal. 2. Jumlah pelaksanaan koordinasi di bidang Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya di Daerah Tertinggal. 3. Jumlah Kabupaten Tertinggal yang mendapat bantuan stimulan Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Sosial dan Budaya di Daerah Tertinggal. | 1 3 30 | 0,95 2,25 11,95 | KPDT |
| I.16 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Pusat Pertumbuhan Daerah Tertinggal | Terwujudnya Peningkatan Pengembangan Pusat Pertumbuhan Di Daerah Tertinggal | 1. Jumlah pengembangan kebijakan pusat pertumbuhan di daerah tertinggal 2. Jumlah pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan pusat pertumbuhan | 1 3 | 0,95 2,25 | KPDT |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|--|--|--|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | Terfasilitasinya Pembiayaan Untuk Pengembangan Ekonomi | 3. Jumlah Kabupaten tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan untuk keberlanjutan kegiatan EDFF dan LEDP | 13 | 17,50 | |
| I.17 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pulau Terluar dan Pulau Terpencil di Daerah Tertinggal | meningkatnya kemampuan daerah tertinggal dalam penanganan pulau terluar dan Pulau Terpencil | 1. Jumlah pengembangan kebijakan pengelolaan Pulau terluar dan Pulau Terpencil di Daerah Tertinggal 2. Jumlah pelaksanaan koordinasi kebijakan pembangunan dan pengembangan pulau terluar dan terpencil 3. Jumlah kabupaten tertinggal yang memiliki pulau terluar yang mendapat bantuan stimulan 4. Jumlah kapal feeder perintis di Kabupaten tertinggal yang memiliki pulau terluar dan terpencil | 1 3 34 16 | 0,95 2,25 17,61 20,00 | KPDT |
| I.18 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi Dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal , Terdepan, Terluar, Dan Pasca Konflik. | Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Sistem, Organisasi, dan SDM Pemerintahan Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance | 1. Jumlah pengembangan kebijakan penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal 2. Jumlah Kabupaten yang mendapat pelatihan penguatan kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal | 1 11 | 0,95 16,14 | KPDT |
| II | PROGRAM PENDIDIKAN DASAR | | | | | |
| II.1 | Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang Pendidikan Dasar | Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Dasar yang Bermutu dan merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota | Jumlah guru jenjang pendidikan dasar yang menerima tunjangan khusus | 53.038 | 1.463,8 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| III | PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH | | | | | |
| III.1 | Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten untuk Jenjang | Tersedianya Guru Jenjang Pendidikan Menengah yang Bermutu dan merata antar Provinsi, Kabupaten dan Kota | Jumlah guru jenjang pendidikan menengah yang menerima tunjangan khusus | 6.469 | 192,9 | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|---|--|---|--------------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Pendidikan Menengah | | | | | |
| IV | PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM | | | | | |
| IV.1 | Peningkatan Akses, Mutu, Kesejahteraan, dan Subsidi RA/BA dan Madrasah | Meningkatnya akses, mutu, dan kesejahteraan, serta tersalurkannya subsidi RA/BA dan Madrasah | Tunjangan Khusus Guru non PNS (Orang) | 3.500 | 56,7 | Kementerian Agama |
| V | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI DARAT | | | | | |
| V.1 | Subsidi Operasional Keperintisan Angkutan Jalan | Pelayanan Keperintisan Angkutan Jalan | Jumlah trayek yang mendapatkan subsidi operasional keperintisan | 195 | 80,77 | Kemenuh |
| V.2 | Pembangunan Sarana dan Prasaarana transportasi SDP dan pengelolaan prasarana lalulintas SDP | Pelayanan keperintisan angkutan sungai danau dan penyebrangan | Terselenggaranya Subsidi Angkutan Penyeberangan Perintis | 161 lintas | 289,40 | Kemenuh |
| VI | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI LAUT | | | | | |
| VI.1 | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut | Tersedianya kapal perintis dan penumpang angkutan laut | Pembangunan kapal perintis dan penumpang (unit) | 10 | 362,95 | Kemenuh |
| | | Tersedianya keperintisan angkutan laut | Jumlah trayek subsidi angkutan laut perintis | 76 | 508,80 | |
| VII | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI UDARA | | | | | |
| VII.1 | Pelayanan Angkutan Udara Perintis | Meningkatnya pelayanan perintis angkutan udara | Jumlah rute perintis yang terlayani dan angkutan BBM Perintis | 145 rute dan 6.000 liter | 298,80 | Kemenuh |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------------|---|--|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| VIII | PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN | | | | | |
| VIII.1 | Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | Meningkatnya pelayanan medic spesialistik kepada masyarakat | Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS bergerak di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) | 24 | 1.758,8 | Kemenkes |
| | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Meningkatnya Pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat | Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk | 96 | 1.040,5 | Kemenkes |
| IX | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | |
| IX.1 | Pembinaan Administrasi Kepegawaian | Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian | Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan di DBK | 7.020 | 91,4 | Kemenkes |
| X | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | | | | | |
| X.1 | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Terpenuhinya kebutuhan dasar, aksesibilitas, dan pelayanan sosial dasar bagi warga KAT | Tersedianya permukiman dan infrastruktur (Unit) | 2.071 | 93,3 | Kemensos |
| | | | Pemberian jaminan hidup (KK) | 4.767 | | |
| XI | PROGRAM PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN | | | | | |
| XI.1 | Pengembangan pemasaran domestik (Prioritas Bidang) | Meningkatnya pemasaran hasil pertanian di pasar domestik | Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani (unit) | 120 | 37,1 | Kementan |
| | | | Jumlah komoditi dalam pemantauan dan stabilisasi harga komoditas pertanian utama (komoditi) | 36 | 3,88 | |
| | | | Jumlah kerjasama dan jaringan pasar (laporan) | 73 | 5,71 | |
| | | | Jumlah unit pelayanan informasi pasarkomoditi pertanian (lokasi) | 600 | 17,3 | |
| XII | PROGRAM PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM | | | | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------------|--|---|--|--|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| XII.1 | Pemberdayaan Usaha koperasi dan UMKM di Bidang Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha | Meningkatnya jumlah koperasi dalam pengembangan energi dan tersusunnya konsep pemberian insentif bidang ketenagalistrikan dan aneka usaha | Jumlah koperasi yang mendapat dukungan pengembangan usaha melalui pemanfaatan energi baru terbarukan | 9 | 15,0 | Kemen KUKM |
| XIII | PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | |
| XIII.1 | Fasilitasi Penempatan Transmigrasi | Terfasilitasinya penempatan transmigran | Jumlah kawasan yang difasilitasi penempatan transmigrasinya di daerah tertinggal/perbatasan | 26 Kawasan untuk 1.825 Kepala Keluarga | 29,02 | Kemenakertrans |
| XIII.2 | Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi | Terbangunnya permukiman transmigrasi dan infrastruktur di kawasan transmigrasi | Jumlah kawasan yang dibangun sarana dan prasarananya di daerah tertinggal/perbatasan | 31 Kawasan/1.521 unit dan 145,18 km | 485,00 | |
| XIII.3 | Penyediaan Tanah Transmigrasi | Tersedianya Lahan untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Jumlah kawasan yang disediakan lahannya di daerah tertinggal/perbatasan | 16 Kawasan (53.720 Ha) | 36,42 | |
| XIV | PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI | | | | | |
| XIV.1 | Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi | Berkembangnya sarana dan prasarana di permukiman transmigrasi dan kawasan transmigrasi | Jumlah kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarananya di daerah tertinggal/perbatasan | 29 Kimtrans/ 9 Kawasan | 208,48 | Kemenakertrans |
| XIV.2 | Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi | Meningkatnya produktivitas lahan dan penerapan teknologi tepat guna, berkembangnya jejaring pemasaran, kelembagaan ekonomi yang fungsional dan tumbuhnya wira usaha mandiri | Jumlah kawasan yang difasilitasi pengembangan usaha ekonominya di daerah tertinggal/ perbatasan | 97 kimtrans / 9 kawasan | 115,18 | Kemenakertrans |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------------|--|---|--|---------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| XV | PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA KERJA DAN PRODUKTIVITAS | | | | | |
| XV.1 | Pelatihan Berbasis Kompetensi dan Pelatihan Berbasis Masyarakat | Meingkatnya produktivitas tenaga kerja | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi | 15.750 | Alokasi PN 13 | Kemenakertrans |
| XVI | PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | | | | | |
| XVI.1 | Pengembangan dan penyediaan perluasan kesempatan kerja (Padat karya infrastruktur dan produktif) | Peluang kerja produktif di berbagai bidang usaha produktif | Jumlah Kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengangguran sementara | 296 Paket di 135 Kabupaten/Kota | Alokasi di PN 4 | Kemenakertrans |
| XVII | PROGRAM PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA | | | | | |
| XVII.1 | Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pemerataan Pembangunan Sarana dan Prasarana Informatika | Layanan akses informasi dan komunikasi di wilayah non-komersial | Prosentase desa yang dilayani akses telekomunikasi atau sejumlah 33.184 desa (dari total 72,800 desa di Indonesia) | 100% | 183,75 | Kemenkominfo |
| | | | Prosentase kecamatan yang dilayani akses internet | 100% | 163,57 | |
| | | | Prosentase penyelenggaraan MPLIK | 100% | 266,49 | |
| | | | Prosentase pembangunan dan penyelenggaraan PLIK sentra produktif (1.235 PLIK) | 100% | 90,70 | |
| | | | Prosentase upgrading desa dering menjadi desa pintar | 100% | 66,26 | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|--|--|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Prosentase pembangunan dan penyelenggaraan telinfo tuntas (286 BTS) | 100% | 81,09 | |
| | | | Prosentase pembangunan dan penyelenggaraan wifi kabupaten (745 hotspot) | 100% | 69,08 | |
| | | | Prosentase pembangunan dan penyelenggaraan radio komunitas pada desa informasi (500 radio komunitas sampai dengan 2014) | 70 % | 442,4 | |
| II. ISU STRATEGIS: PENGUATAN DIPLOMASI DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR, HANKAM, SERTA FASILITAS CUSTOM, IMMIGRATION, QUARANTINE, SECURITY (CIQS) KAWASAN PERBATASAN | | | | | | |
| I | PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | | | | | |
| I.1 | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi, Dan Fasilitasi Daerah Tertinggal Di Kawasan Perbatasan | Meningkatnya kemampuan daerah tertinggal dalam pengembangan Kawasan Perbatasan | 1. Jumlah pengembangan kebijakan di bidang kawasan perbatasan di Daerah Tertinggal 2. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengembangan kawasan perbatasan di daerah tertinggal 3. Jumlah daerah tertinggal di wilayah perbatasan yang memperoleh bantuan stimulan sesuai Rencana Aksi | 1 3 15 | 0,95 2,25 41,00 | KPDT |
| II | PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH | | | | | |
| II.1 | Fasilitasi pengembangan wilayah terpadu | Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan hasil pembangunan kawasan perbatasan dan | Jumlah pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil (Target Kumulatif) | 5 pedoman | 2,25 | Kemendagri |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|---|--|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | pulau-pulau kecil | Jumlah wilayah dan pulau-pulau kecil, yang mengimplementasikan pedoman/kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil (Target Kumulatif) | 5 Provinsi | | |
| III | PROGRAM SURVEI DAN PEMETAAN NASIONAL | | | | | |
| III.1 | Pemetaan Batas Wilayah | Tersusunnya kebijakan pemetaan batas wilayah dan meningkatnya cakupan peta batas wilayah | Jumlah NLP Peta batas wilayah negara (joint Mapping) kori-dor perbatasan darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50.000 | 15 | 0,90 | BIG |
| | | | Jumlah (Border Sign Post) BSP RI-RDTL | 70 | 0,95 | |
| | | | Jumlah perapatan dan pemasangan pilar batas CBDRF RI-Malaysia, RI-PNG, RI-RDTL | 120 | 4,85 | |
| | | | Jumlah peta pulau terluar | 10 | 1,80 | |
| | | | Jumlah dokumen perundingan teknis batas negara | 2 | 3,50 | |
| | | | Jumlah dokumen adjudikasi batas antar provinsi | 1 | 0,60 | |
| | | | Jumlah dokumen adjudikasi batas antar kabupaten/kota | 1 | 0,90 | |
| | | | Jumlah dokumen adjudikasi batas antar Kecamatan/Kelurahan | 1 | 1,30 | |
| | | | Jumlah pemasangan pilar batas antar kecamatan dalam kab/kota | 80 | 1,30 | |
| | | | Jumlah NLP Peta Wilayah Administrasi Provinsi skala 1:100 K atau 1:250 K | 11 | 0,45 | |
| | | | Jumlah NLP Peta Wilayah Administrasi kabupaten skala 1:50 K atau 1:100 K | 60 | 0,70 | |
| | | | Jumlah NLP Peta Wilayah Administrasi kota skala 1:25 K atau 1:50 K | 27 | 0,51 | |
| | | | Jumlah dokumen kajian pemetaan batas wilayah | 2 | 2,80 | |
| | | | Jumlah dokumen pemutakhiran & integrasi data batas wilayah | 1 | 3,40 | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------------|---|--|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| IV | PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN NASIONAL | | | | | |
| IV.1 | Pengelolaan Pertanahan Provinsi | Data hasil inventarisasi Wilayah pesisir, Pulau-Pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu (WP3WT) | Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) | 154 SP | 14,20 | BPN |
| IV.2 | Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) (di pusat) | Data hasil inventarisasi Wilayah pesisir, Pulau-Pulau kecil, perbatasan, dan wilayah tertentu (WP3WT) | Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) | 1 Paket | 6,0 | |
| V | PROGRAM OPTIMALISASI DIPLOMASI TERKAIT DENGAN PENGELOLAAN HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL | | | | | |
| V.1 | Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Perjanjian Politik, Keamanan Kewilayahan dan Kelautan | Terselenggaranya penguatan diplomasi melalui optimalisasi perjanjian politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan | Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut. | 12 | 11,792 | Kemenlu |
| VI | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR KEMENTERIAN PERTAHANAN | | | | | |
| VI.1. | Pembangunan sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan | Meningkatnya sarana dan prasarana pertahanan di wilayah perbatasan | Persentase kecukupan jumlah sarana dan prasarana kebijakan pertahanan di wilayah perbatasan | 26 Pos | 56,15 | Kemenhan |
| VII. | PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF | | | | | |
| VII.1. | Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan | Terselenggaranya operasi wilayah pertahanan | Persentase kualitas dan kuantitas pembinaan wilayah pertahanan | 46% | 10,00 | Mabes TNI |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------------|---|--|---|---|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| VIII | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL | | | | | |
| VIII.1 | Pendayagunaan pulau-pulau kecil | Meningkatnya nilai guna pulau-pulau kecil | Jumlah pulau kecil yang dipetakan potensinya, termasuk pulau-pulau kecil terluar | 30 pulau | 75,00 | KKP |
| | | | Jumlah pulau kecil yang terfasilitasinya penyediaan infrastruktur, termasuk pulau-pulau kecil terluar | 30 pulau | | |
| IX | PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| IX.1 | Peningkatan operasional dan pemeliharaan kapal pengawas | Meningkatnya cakupan wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI) yang terawasi dari illegal fishing | Persentase cakupan wilayah pengelolaan perikanan (WPP-NRI) bagian barat yang terawasi dari illegal fishing (WPP 711) | 90 hari operasi kapal (16%) | 141,0 | KKP |
| | | | Persentase cakupan wilayah pengelolaan perikanan (WPP-NRI) bagian timur yang terawasi dari illegal fishing (WPP 716,718) | 90 hari operasi kapal (13%) | | |
| IX.2 | Peningkatan Operasional Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan | Terpantaunya kegiatan pemanfaatan SDKP pada WPP-NRI secara terintegrasi dan terpenuhinya infrastruktur pengawasan secara akuntabel dan tepat waktu | Jumlah pemenuhan sistem pemantauan SDKP yang terintegrasi dan akuntabel : <ul style="list-style-type: none"> • Kapal pengawas (unit) • Speedboat pengawas (unit) • Radar pantai (unit) • Transmitter VMS offline (unit) • Kantor pengawas (unit) • Dermaga (unit) • Pos pengawas (unit) • Mess ABK (unit) • Gudang Barang Bukti (unit) • Detention Center (unit) • Kapal Tangkapan yang Direkondisi (unit) | <p style="text-align: right;">1</p> <p style="text-align: right;">3</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">5</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">7</p> <p style="text-align: right;">3</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> <p style="text-align: right;">0</p> | 288,0 | |
| | | | Persentase pemanfaatan sumber daya kelautan yang dapat | 50% | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|--|--|--|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | dipantau 4 WPP (WPP 711, 712, 713, 715) | | | |
| X | PROGRAM Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum | | | | | |
| X.1 | Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan | Meningkatnya kemampuan pengelolaan pos lintas Batas (PLB) Internasional dan nasional | Jumlah Pos Lintas Batas Tradisional dan Internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai | - paket | 26,3 | Kemendagri |
| | | Terfasilitasinya penguatan kelembagaan wilayah perbatasan antar negara | Prosentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara. | 100% | | |
| | | Meningkatnya sarpras perbatasan antar negara dan pulau-pulau | Jumlah Kab/kota di wilayah perbatasan antar Negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara | 15 | | |
| | | Meningkatnya kerjasama perbatasan antar negara (Sosek Malindo, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG) | Jumlah provinsi yang termasuk ke dalam perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG) | 6 | | |
| XI | PROGRAM PENGELOLAAN BATAS WILAYAH NEGARA DAN KAWASAN PERBATASAN | | | | | |
| XI.1 | Pengelolaan Batas Wilayah Darat | Terfasilitasinya penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Negara Wilayah Darat | Terbangunnya tanda batas wilayah darat (tugu, BSP, Gapura) dan terbangunnya sarana prasarana batas wilayah darat | 1 Unit | 3,35 | BNPP |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|---|---|--|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| XI.2 | Pengelolaan Batas Wilayah Laut dan Udara | Terfasilitasinya penegasan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan Batas Negara Wilayah Laut dan Udara | Tersedianya Sarana dan Prasarana Prioritas Dukungan Hankam dan Penegakan Hukum (Gakum) Batas Wil. Laut dan udara. | 12 unit alat komunikasi dan 1 Unit Speedboat | 6,20 | BNPP |
| XI.3 | Pengelolaan Lintas Batas Negara | Terfasilitasinya pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, dan pengamanan Lintas Batas Negara | Terbangunnya Sarana Prasarana Pos Lintas Batas Negara (PLBN) | 2 PLBN | 3,00 | BNPP |
| XI.4 | Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat | Terfasilitasinya penyusunan kebijakan, Dokumen Monev Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat. | Terlaksananya Fasilitasi/Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Darat | 7 laporan | 4,20 | BNPP |
| XI.5 | Penataan Ruang Kawasan Perbatasan | Terfasilitasinya penyusunan kebijakan, Dokumen Monev Penataan Ruang Kawasan Perbatasan. | Tersusunnya Dokumen/rekomendasi Masukan Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Perbatasan | 5 dokumen rekomendasi | 8,15 | BNPP |
| XI.6 | Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut | Terfasilitasinya penyusunan kebijakan, Dokumen Monev Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut. | Terlaksananya Fasilitasi/ Monitoring/ Evaluasi Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Laut | 4 Unit Gudang Logistik | 7,50 | BNPP |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|---|--|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| XI.7 | Pengelolaan Infrastruktur Fisik Kawasan Perbatasan | Terfasilitasinya pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Infrastruktur Fisik kawasan Perbatasan | Terlaksananya Fasilitasi pembangunan Infrastruktur Fisik di Kawasan Perbatasan | 1 laporan dan 2 ruas jalan/jembatan | 3,55 | BNPP |
| XI.8 | Pengelolaan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Kawasan Perbatasan | Terfasilitasinya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Kesra kawasan Perbatasan | Terlaksananya fasilitasi perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan infrastruktur ekonomi dan kesra kawasan perbatasan | 3 laporan dan 2 unit | 6,65 | BNPP |
| XI.9 | Pengelolaan Infrastruktur Pemerintahan Kawasan Perbatasan | Terfasilitasinya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Infrastruktur Pemerintahan kawasan Perbatasan | Terlaksananya fasilitasi/identifikasi/monitoring/evaluasi Pengelolaan infrastruktur pemerintahan Kawasan Perbatasan | 4 laporan | 5,589 | BNPP |
| III. PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN PROVINSI PAPUA DAN PAPUA BARAT | | | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN | | | | | | |
| I.1 | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Tersedianya infrastruktur jalan raya dan jalan raya dan jalan produksi yang menghubungkan transportasi dari daerah produsen menuju daerah konsumen maupun sebaliknya. | Penanganan pembangunan jalan, pelebaran jalan, peningkatan struktur jalan, pembangunan jembatan, pemeliharaan berkala dan rutin jalan dan jembatan serta rekonstruksi jalan dan Jembatan | Pemeliharaan Rutin Jalan (2.379,5 km) | 115,48 | Kemen PU |
| | | | | Pemeliharaan Rutin Jembatan | 8,55 | Kemen PU |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|-------------------------------------|---------|-----------|--|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | (17.094,4 m) | | |
| | | | | Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jalan (56,7 km) | 157,07 | Kemen PU |
| | | | | Pemeliharaan Berkala/Rehabilitasi Jembatan (470 m) | 25,95 | Kemen PU |
| | | | | Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan (259,1 km) | 1.440,75 | Kemen PU |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|--|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | Penggantian Jembatan (742,4 km) | 138,35 | Kemen PU |
| | | | | Pembangunan Jalan Baru (39,5 km) | 185,75 | Kemen PU |
| | | | | Pembangunan Jembatan Baru (463,9 m) | 136,05 | Kemen PU |
| | | | | Pelebaran Jalan (143,6 km) | 823,11 | Kemen PU |
| II | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | | | | | |
| II.1 | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Pembangunan irigasi dan percetakan sawah | Peningkatan Saluran Sekunder dan Primer (Ha) | 1.700 | 9,9 | Kemen PU |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|---|---|---|-------------------|-----------------------------|---------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Pembangunan Saluran Sekunder dan Primer (Ha) | 3.017 | 19,5 | Kemen PU |
| | | | Pembangunan <i>intake</i> dan <i>sandtrap</i> (Ha) | 2.000 | 8,85 | Kemen PU |
| II.2 | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Peningkatan Ketersediaan dan Keterjangkauan Air Bersih | Pembangunan penyediaan Air Baku (m3/detik) | 0,96 | 33,4 | Kemen PU |
| | | | Peningkatan Sarana Tampungan Air Baku (m3/detik) | 0,06 | 5,277 | Kemen PU |
| | | | Pembangunan Saranan Tampungan Air Baku (m3/detik) | 0,06 | 3,511 | Kemen PU |
| | | | Pemboran Sumur Eksplorasi (m3/detik) | 0,01 | 3,2 | Kemen PU |
| III | PEMBERDAYAAN KOPERASI, UMKM, DAN IKM | | | | | |
| III.1 | Pemberdayaan Usaha KUKM di Bidang Kehutanan dan Perkebunan | Meningkatnya jumlah dan kualitas sarana produksi KUKM dan tersusunnya konsep pemberian insentif bidang kehutanan dan perkebunan | Jumlah koperasi di bidang produksi pala di Papua dan Papua Barat yang diperkuat | 5 Koperasi | 5,0 | Kemen KUKM |
| III.2 | Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah | Tumbuh dan Berkembangnya Wira Usaha Baru IKM Kerajinan Sandang, Teknologi | <i>Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster</i> | 10 | Alokasi di PN | Kemen Perindustrian |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|--|---|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Wilayah III | Informasi, Perbengkelan, cokelat/kakao | | | 13 | |
| | | Meningkatnya Wira Usaha baru melalui Dekonsentrasi | <i>Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP</i> | 17 | | |
| | | | <i>Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan</i> | 10 | | |
| | | | <i>Jumlah Unit Usaha IKM</i> | 482 | | |
| | | | <i>Jumlah UPT yang difasilitasi</i> | 11 | | |
| | | | <i>Jumlah Daerah Dekonsentrasi</i> | 12 | | |
| III.4 | Pengembangan Fasilitasi Industri Wilayah III | Meningkatnya nilai tambah komoditi industri unggulan di Papua dan Papua Barat | <i>003 Terfasilitasinya kawasan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua</i> | 3 | Alokasi di PN13 | |
| | | | <i>001 Terselenggaranya forum koordinasi dengan stakeholder dalam rangka pengembangan industri di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua</i> | 2 | | |
| | | Terfasilitasinya pusat pertumbuhan industri di Papua dan Papua Barat | <i>004 Terfasilitasinya pengembangan Kompetensi Inti Industri Daerah (KIID) di wilayah Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku dan Papua</i> | 39 | | |
| III.3 | Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi | Terselenggaranya Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi | Jumlah kantor Pusat dan UPT yang ditingkatkan sarana dan prasarananya | 60 | | Kemen Kes |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|--|---|---|-------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah lulusan tenaga kesehatan dari lembaga pendidikan pemerintah | 17.000 | 647,5 | Kemen Kes |
| IV | PROGRAM PROFESIONALISME PRAJURIT INTEGRATIF | | | | | |
| IV.1 | Pendidikan Pertama Dikma Perwira TNI (Werving) | Terlaksananya kegiatan Pendidikan Pertama (Dikma) | Persentase kecukupan materi peserta Pendidikan Pertama (%) | 77 | 139,64 | Mabes TNI |
| V | PROGRAM PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA POLRI | | | | | |
| V.1 | Pengendalian Pegawai Polri | Menyelenggarakan pendidikan pembentukan personel Polri | Masyarakat yang menjadi anggota Polri (orang) | 2.350 | 36,9 | Polri |
| VI | PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN | | | | | |
| VI.1 | Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus | Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Pemantapan Otonomi Khusus | Jumlah Rapat Koordinasi Otonomi Khusus | 12 | 9,59 | Kemenko polhukam |
| | | | Persentase rekomendasi rapat koordinasi Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti (%) | 75 | | |
| | | | Persentase laporan pemantauan dan evaluasi (%) | 75 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------|---|--|--|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah pemantauan dan evaluasi | 4 | | |
| | | | Jumlah rapat koordinasi Desk Papua | 12 | | |
| | | | Persentase rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Papua yang ditindaklanjuti (%) | 75 | | |
| | | | Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Papua | 4 | | |
| VII | PROGRAM PENEMPATAN DAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA | | | | | |
| VII.1 | Pengembangan dan penyediaan perluasan kesempatan kerja (Padat Karya Infrastruktur) | Peluang kerja produktif di berbagai bidang usaha produktif | Jumlah kabupaten/kota yang menyelenggarakan program pengangguran sementara | 51 paket di 17 kabupaten/kota | Alokasi di PN 4 | Kemenakertrans |
| VIII | PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN | | | | | |
| VIII.1 | Penyusunan kebijakan dan program serta evaluasi pelaksanaan kebijakan ketenagalistrikan | Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik dan meningkatnya hasil elektrifikasi | 1. Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Kalibumi di Provinsi Papua (MW) 2. Kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro Kalibumi di Provinsi Papua Barat (MW) | 1,3 1,3 | Alokasi di PN 8 | Kemen ESDM |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (Rp.Milyar) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------------|---|---|--|---|-----------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | 1. Jaringan distribusi di Provinsi Papua (KMS) 2. Jaringan distribusi di Provinsi Papua Barat (KMS) | 197,15 154 | Alokasi di PN 8 | |
| | | | 1. Gardu distribusi di Provinsi Papua (MVA) 2. Gardu distribusi di Provinsi Papua Barat (MVA) | 5,57 3,63 | | |
| | | | 1. Jumlah Pelanggan Program Listrik Murah dan Hemat di Provinsi Papua (RTS) 2. Jumlah Pelanggan Program Listrik Murah dan Hemat di Provinsi Papua Barat (RTS) | 6598 6598 | | |
| IX | PROGRAM PENELITIAN, MITIGASI DAN PELAYANAN GEOLOGI | | | | | |
| IX.1 | Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian, Penyelidikan, dan Pemetaan Bidang Lingkungan Geologi dan Air Tanah | 1. Sumur Pemboran Air Tanah di Provinsi Papua (titik sumur pemboran) 2. Sumur Pemboran Air Tanah di Provinsi Papua (titik sumur pemboran) | 5 2 | Alokasi di PN 8 | Kemen ESDM |
| X | PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI | | | | | |
| X.1 | Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan | Terpenuhinya kebutuhan tenaga listrik melalui sumber energi terbarukan | 1. Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Provinsi Papua (Unit) 2. Jumlah Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro di Provinsi Papua (Unit) | 18 PLTS dan 1 PLTMH 3 PLTS dan 1 PLTMH | Alokasi PN 8 | Kemen ESDM |

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2014

| | |
|---------------------|--|
| PRIORITAS 11 | PROGRAM AKSI BIDANGKEBUDAYAAN, KREATIVITAS DAN INOVASI TEKNOLOGI |
| Tema Prioritas | <i>Pengembangan dan perlindungan kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya, untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa yang disertai pengembangan inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang dilandasi oleh keunggulan Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan.</i> |
| Penanggung Jawab | Menteri Pendidikan dan Kebudayaan |
| Bekerjasama dengan | Menteri Negara Riset dan Teknologi |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 | INSTANSI PELAKSANA |
|--|---|--|--|-------------------|-----------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. PERAWATAN: | | | | | | |
| Penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan Cagar Budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh Indonesia sebelum Oktober 2011 | | | | | | |
| I.1 | Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman | Meningkatnya cagar budaya yang teregistrasi dan dilestarikan | Jumlah cagar budaya yang direvitalisasi | 15 | 225,0 | Kemendikbud |
| | | | Jumlah cagar budaya yang ditetapkan secara nasional | 15 | | |
| | | Meningkatnya museum yang didokumentasi dan direvitalisasi | Jumlah museum yang direvitalisasi | 31 | | |
| | | | Jumlah museum dibangun | 6 | | |
| I.2 | Peningkatan Layanan Jasa Perpustakaan dan Informasi | Meningkatnya kegiatan layanan jasa perpustakaan dan informasi yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai | Jumlah perpustakaan provinsi yang memiliki perangkat perpustakaan digital (<i>e-library</i>) | 33 | 41,50 | Perpusnas RI |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 | INSTANSI PELAKSANA |
|--|---|---|---|-------------------|-----------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah Kab/Kota menjadi jejaring dan memiliki perangkat perpustakaan digital (<i>e-library</i>) | 50 | | |
| I.3 | Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Gemar Membaca | Meningkatnya upaya pengembangan perpustakaan dan budaya gemar membaca | Jumlah perpustakaan keliling (mobil, dan kapal) | 33 | 207,60 | Perpusnas RI |
| | | | Jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan: | 2.583 | | |
| II. PENCIPTAAN: | | | | | | |
| Pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan Penelitian, Penciptaan dan Inovasi dan memudahkan akses dan penggunaannya oleh masyarakat luas | | | | | | |
| II.1 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Arkeologi | Meningkatnya hasil penelitian bidang Arkeologi | Jumlah penelitian bidang arkeologi | 114 | 78,20 | Kemendikbud |
| II.2 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Kebudayaan | Meningkatnya hasil penelitian bidang Kebudayaan | Jumlah penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan | 12 | 25,70 | Kemendikbud |
| III. KEBIJAKAN : | | | | | | |
| Peningkatan perhatian dan kesertaan Pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya | | | | | | |
| III.1 | Peningkatan Sensor Film | Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan lembaga sensor film | Jumlah film/video/iklan yang lulus sensor | 46.000 | 45,40 | Kemendikbud |
| III.2 | Pembinaan Kesenian dan Perfilman | Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya seni dan film | Jumlah Taman Budaya yang direvitalisasi | 8 | 224,00 | Kemendikbud |
| | | | Jumlah karya seni yang direvitalisasi | 3 | | |
| | | | Jumlah even seni dan perfilman yang diapresiasi masyarakat | 16 | | |
| IV. INOVASI TEKNOLOGI : | | | | | | |
| Peningkatan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif yang mencakup pengelolaan sumber daya maritim menuju ketahanan energi, pangan, dan antisipasi perubahan iklim; dan pengembangan penguasaan teknologi dan kreativitas pemuda. | | | | | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|--|--|--|---------------------|-----------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| IV.1 | Peningkatan Kapasitas Pemuda | Meningkatnya kapasitas pemuda kader di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta iman dan taqwa | Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang iptek dan imtaq | 5.000 | 17,00 | Kemenpora |
| IV.2 | Pengembangan Kreativitas dan Kualitas Pemuda | Meningkatnya kreativitas pemuda kader di bidang seni, budaya, dan industri kreatif | Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas di bidang seni, budaya, dan industri kreatif | 4.000 | 20,00 | Kemenpora |
| IV.3 | Insentif Riset SINAS | Meningkatnya kualitas output dan penyelenggaraan riset insentif SINAS dalam rangka pengembangan kemampuan inovasi iptek nasional | Jumlah paket insentif riset SINAS | 250 | 86,6 | Kemenristek |
| IV.4 | Peningkatan kapasitas SDM Iptek (beasiswa) | Meningkatnya kapasitas dan kompetensi peneliti iptek | Jumlah mahasiswa S2 dan S3 | S2:31 dan S3: 80 | 151,4 | Kemenristek |
| IV.5. | Pengembangan Jaringan Penyedia dengan Pengguna Iptek | Terbangun dan terkelolanya sarana penelitian di Puspiptek serpong dalam kerangka Revitalisasi Iptek | Revitalisasi sarana bangunan laboratorium penelitian Iptek, Serpong | 1 | 10,0 | Kemenristek |
| | | Paket pengelolaan kawasan Puspiptek | Jumlah model jaringan penyedia dengan pengguna Iptek berbasis STP di Puspiptek Serpong | 1 | 3,6 | Kemenristek |
| IV.6 | Peninngkatan dan Pembangunan Laboratoria BPT Terpadu | Terbangunnya laboratorium teknologi terpadu | Jumlah pengadaan fasilitas laboratoria BPPT | 1 | 15,0 | BPPT |
| IV.7 | Pengembangan Teknologi Penerbangan | Pengembangan Pesawat Commuter (Untuk Penerbangan Perintis) Rancangan Dalam Negeri | Prototipe Uji Statis | 2 | 310,0 | LAPAN |
| | | | Prototipe Uji Terbang | 2 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITYAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 | INSTANSI PELAKSANA |
|---|--|---|--|-------------------|-----------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| V. EKONOMI KREATIF : | | | | | | |
| Pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada pengembangan ruang kreatif yang menjadi simpul bagi para pemangku kepentingan | | | | | | |
| V.1 | Pengembangan Seni Pertunjukan dan Musik | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitasi Seni Pertunjukan dan Musik | Jumlah pelaku kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan kreasi dibidang seni dan musik | 1.650 | 86,0 | Kemparekraf |
| V.2 | Pengembangan Industri Perfilman | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitasi Industri Perfilman | Jumlah pelaku kreatif mengalami peningkatan kemampuan produksi film berkualitas | 910 | 55,0 | Kemparekraf |
| V.3 | Peningkatan Ekonomi Kreatif Berbasis Media | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Fasilitasi Ekonomi Kreatif Berbasis Media | Jumlah pelaku kreatif yang mengalami peningkatan kemampuan produksi kreatif berbasis media | 550 | 25,4 | Kemparekraf |
| V.4 | Pengembangan Kerjasama dan Fasilitas | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Pengembangan Kreativitas | Jumlah wirausaha kreatif (lokasi) | 14 | 19,5 | Kemparekraf |

MATRIKS BUKU I RKP 2014

| | |
|---------------------------|---|
| PRIORITAS LAINNYA | BIDANG PEREKONOMIAN |
| Tema Prioritas | - |
| Penanggung Jawab | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian |
| Bekerjasama dengan | Kemenperin, Kemenakertrans, Kem KUKM, KemESDM, KemenPU, Kemkominfo, BNP2TKI, Kemensos, Kemenlu |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|---|--|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I | PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN Akselerasi industrialisasi melalui penumbuhan industri pengolah hasil tambang, penumbuhan industri pengolah hasil pertanian, penumbuhan industri padat karya dan penyedia kebutuhan dalam negeri dan pengembangan IKM yang kuat, sehat dan mandiri | | | | | |
| I.1 | Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Tekstil dan Aneka | Berkembangnya klaster industri tekstil dan alas kaki | Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Tekstil dan Aneka | 2 | 3,6 | Kemenperin |
| | | Revitalisasi Industri Tekstil dan Aneka | Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) | 17 | 1,8 | |
| | | | Tersedianya SDM industri yang terlatih | 650 | 4,6 | |
| | | | Tersalurkannya bantuan restrukturisasi permesinan industri TPT dan alas kaki | 110 | 102,6 | |
| I.2 | Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Hilir | Tumbuh dan Berkembangnya Industri Kimia Hilir | Tumbuh dan Berkembangnya Klaster Industri Kimia Hilir | 3 | 7,0 | Kemenperin |
| | | Revitalisasi Industri Kimia Hilir | Tersedianya SDM Industri yang Terlatih | 200 | 1,0 | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|---|--|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) | 14 | 2,7 | |
| I.3 | Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kimia Dasar | Tumbuh dan berkembangnya industri kimia dasar | Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) | 10 | 2,6 | Kemenperin |
| | | | Tumbuh dan berkembangnya kluster industri berbasis migas | 1 | 5,0 | |
| | | | Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi | 6 | 8,6 | |
| | | Tumbuh dan berkembangnya industri kimia dasar | Terbangunnya pabrik pupuk organik | 10 | 17,5 | |
| | | | Terfasilitasinya revitalisasi industri pupuk | 3 | 2,9 | |
| | | | | | | |
| I.4 | Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Material Dasar Logam | Tumbuhnya dan Berkembangnya Industri Material Dasar Logam | Tumbuh dan Berkembangnya Kluster Industri Material Dasar Logam | 1 | 4,7 | Kemenperin |
| | | | Partisipasi dalam peningkatan kerjasama, promosi dan investasi Industri Material Dasar Logam | 100% | 2,4 | |
| | | | Terselesaikan Proses Pengambilalihan Proyek Asahan | - | 0,5 | |
| | | | Berkembangnya PT. Inalum Pasca 2013 | 80 | 2,8 | |
| | | Revitalisasi Industri Material Dasar Logam | Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Industri Material Dasar Logam | 5 | 2,9 | |
| | | | Tersedianya SDM Industri Material Dasar Logam yang | 20 | 0,8 | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----|---|---|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | terlatih | | | |
| 1.5 | Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan | Mengembangkan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri | Pengembangan Klaster Industri Berbasis Pertanian, Oleochemical di kawasan industri | 6 | 3,0 | Kemenperin |
| | | | Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) | 12 | 9,0 | |
| | | | Pengembangan Klaster dan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan lainnya | 4 | 13,9 | |
| 1.6 | Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Minuman dan Tembakau | Pada akhir tahun 2014 utilisasi kapasitas produksi mencapai 87,5% | Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) | 5 | 0,9 | Kemenperin |
| | | | Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Minuman dan Tembakau Lainnya | 4 | 33,7 | |
| 1.7 | Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan | Terlaksananya Revitalisasi Industri Gula Nasional melalui Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pabrik Gula | Pabrik Gula (PG) yang diberi bantuan | 25 | 109,4 | Kemenperin |
| | | | Tersusunnya Standar Nasional Indonesia (SNI) | 8 | 10,1 | |
| | | | Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya | 4 | 12,3 | |
| 1.8 | Penumbuhan Industri Alat Transportasi Darat | Berkembangnya Industri Alat Transportasi Darat | Terlaksananya Koordinasi Pengembangan | 9 | 3,0 | Kemenperin |
| | | | Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri | 3 | 2,5 | |
| | | | Meningkatnya Kompetensi SDM Industri | 240 | 2,8 | |
| | | | Meningkatnya Kemampuan Teknologi | 2 | 2,0 | |
| | | | Terlaksananya Promosi dan Kerjasama | 3 | 0,7 | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|--|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Tersedianya peralatan produksi kendaraan angkutan umum murah | 1 | 50,0 | |
| I.9 | Penumbuhan Industri Maritim dan Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan | Berkembangnya Industri Maritim, Kedirgantaraan dan Alat Pertahanan | Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri | 5 | 1,9 | Kemenperin |
| | | | Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri | 2 | 1,8 | |
| | | | Meningkatnya Kompetensi SDM Industri | 120 | 2,7 | |
| | | | Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri | 1 | 0,5 | |
| | | | Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri | 4 | 1,9 | |
| I.10 | Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika | Berkembangnya Industri Elektronika dan Telematika | Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri Elektronika dan T elematika | 9 | 4,3 | Kemenperin |
| | | | Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri Elektronika dan T elematika | 45 | 2,6 | |
| | | | Meningkatnya Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika | 360 | 0,8 | |
| | | | Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri Elektronika dan Telematika | 2 | 0,8 | |
| | | | Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri | 8 | 0,8 | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Elektronika dan Telematika | | | |
| I.11 | Penumbuhan Industri Permesinan dan Alat Mesin Pertanian | Peningkatan Kemampuan Industri Penghasil Barang Modal Dalam Negeri | Terlaksananya Koordinasi Pengembangan Industri | 2 | 2,5 | Kemenperin |
| | | | Terlaksananya Standarisasi Bidang Industri | 15 | 3,5 | |
| | | | Meningkatnya Kompetensi SDM Industri | 320 | 2,8 | |
| | | | Meningkatnya Kemampuan Teknologi Industri | 5 | 32,1 | |
| | | | Terlaksananya Promosi dan Kerjasama Industri | 5 | 1,4 | |
| I.12 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Tekstil | Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Tekstil | Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri | 8 | 11,3 | Kemenperin |
| | | | Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha | 2 | 0,5 | |
| | | | Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha | 750 | 3,4 | |
| | | | Meningkatnya kemampuan LPK | 6 | 0,8 | |
| I.13 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Kulit, Karet dan Plastik | Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang kulit, karet dan plastik | Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri | 11 | 14,7 | Kemenperin |
| | | | Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha | 10 | 0,3 | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|--|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha | 500 | 3,2 | |
| | | | Meningkatnya kemampuan LPK | 20 | 0,3 | |
| I.14 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Industri Agro | Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam industri agro | Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri | 10 | 14,3 | Kemenperin |
| | | | Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha | 6 | 1,3 | |
| | | | Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha | 14000 | 13,6 | |
| | | | Meningkatnya kemampuan LPK | 2 | 2,0 | |
| I.15 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pulp dan Kertas | Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang teknologi pulp dan kertas | Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri | 2 | 12,2 | Kemenperin |
| | | | Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha | 20 | 0,3 | |
| | | | Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha | 150 | 3,1 | |
| | | | Meningkatnya kemampuan LPK | 12 | 0,3 | |
| I.16 | Penelitian dan Pengembangan Teknologi Hasil Perkebunan | Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi dalam bidang Hasil Perkebunan | Terwujudnya hasil litbang yang siap diterapkan oleh industri untuk meningkatkan daya saing industri | 2 | 8,7 | Kemenperin |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|---|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Terwujudnya kerjasama litbang antar lembaga litbang, PT dan Dunia Usaha | 2 | 0,4 | |
| | | | Terwujudnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha | 140 | 1,2 | |
| | | | Meningkatnya kemampuan LPK | 11 | 1,5 | |
| I.17 | Pengembangan Kerjasama Industri Internasional Wilayah I dan Multilateral | Meningkatnya akses pasar, akses terhadap sumber investasi dan teknologi kerja sama internasional di wilayah Amerika, Eropa dan Timur Tengah serta Fora Multilateral | Jumlah promosi produk dan jasa industri | 2 | 8,8 | Kemenperin |
| | | Terbantunya kepentingan industri Nasional untuk mengakses sumber daya industri (5M) secara efisien melalui kerja sama internasional | Jumlah kerja sama teknik | 2 | | |
| | | Meningkatnya minat investasi industri dari luar negeri ke dalam negeri | Jumlah promosi investasi industri | 3 | | |
| I.18 | Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I | Berkembangnya Ikm Melalui Pendekatan Klaster | Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster | 15 | 11,4 | Kemenperin |
| | | Berkembangnya Ikm Melalui Pendekatan Ovop | Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP | 32 | 12,1 | |
| | | Tumbuh Dan Berkembangnya | Jumlah Unit Usaha IKM | 1000 | 14,0 | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|---|---|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | Unit Usaha Ikm | | | | |
| | | Tersusunnya Program Revitalisasi Dan Penumbuhan Ikm Wilayah I | Jumlah Daerah Dekonsentrasi | 14 | 41,4 | |
| I.19 | Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II | Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster | Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster | 12 | 9,0 | Kemenperin |
| | | Berkembangnya IKM melalui pendekatan OVOP | Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP | 15 | 15,0 | |
| | | Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan | Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan | 25 | 10,3 | |
| | | Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT | Jumlah UPT yang difasilitasi | 1 | 1,0 | |
| | | Tersusunnya program revitalisasi dan penumbuhan IKM Wilayah II | Jumlah Daerah Dekonsentrasi | 8 | 37,1 | |
| I.20 | Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah III | Berkembangnya IKM melalui pendekatan Klaster | Jumlah Lokasi yang dibina melalui pendekatan Klaster | 10 | 2,9 | Kemenperin |
| | | Berkembangnya IKM melalui | Jumlah Sentra yang dibina melalui pendekatan OVOP | 17 | 9,2 | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------|--|---|---|-------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | pendekatan OVOP | | | | |
| | | Terfasilitasinya IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan | Jumlah IKM yang mengikuti restrukturisasi mesin peralatan | 10 | 1,4 | |
| | | Tumbuh dan berkembangnya unit usaha IKM | Jumlah Unit Usaha IKM | 482 | 14,0 | |
| | | Meningkatnya fasilitas sarana layanan UPT | Jumlah UPT yang difasilitasi | 11 | 6,9 | |
| II | PENINGKATAN DIPLOMASI EKONOMI INTERNASIONAL | | | | | |
| | Peningkatan pencapaian komitmen Indonesia dalam ASEAN Economic Community 2015, Penguatan peran dan kinerja diplomasi Indonesia di bidang ekonomi | | | | | |
| II.1 | Peningkatan Peran dan Kemampuan Diplomasi Perdagangan Internasional | Meningkatnya peran dan kemampuan Indonesia di bidang diplomasi perdagangan internasional guna pembukaan, peningkatan dan pengamanan akses pasar | Hasil-hasil perundingan Perdagangan Internasional | 25 | 47,5 | Kementerian Perdagangan |
| | | | Partisipasi aktif pada perundingan Perdagangan Internasional | 35 | | |
| | | | Jumlah posisi runding yang disusun | 35 | | |
| | | | Jumlah penyelenggaraan sidang internasional di Dalam Negeri | 10 | | |
| | | | Jumlah sosialisasi hasil kerjasama perdagangan internasional | 5 | | |
| | | | Jumlah publikasi kerjasama perdagangan internasional yang diterbitkan | 5 | | |
| | | | Pembentukan Pusat Sosialisasi AEC (AEC Center) | 1 paket | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|---|---|---|-------------------|---------------------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| II.2 | Peningkatan Kerjasama dan Perundingan ASEAN | Meningkatnya kesiapan Indonesia dalam menghadapi <i>Asean Economic Community</i> 2015 | Pemenuhan ASEAN <i>Economy Community Scorecard</i> | 90 % | 11,0 | Kementerian Perdagangan |
| | | | Hasil perundingan kerjasama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, serta antar dan sub regional (termasuk <i>guidance of principal/summary of discussion/ deklarasi</i>) | 80 | | |
| | | | Partisipasi aktif dalam perundingan kerjasama ASEAN, ASEAN Mitra Dialog serta antar dan sub regional | 80 | | |
| | | | Jumlah posisi runding yang disusun | 80 | | |
| | | | Jumlah penanganan isu-isu perdagangan ASEAN | 3 | | |
| | | | Jumlah kesepakatan kerjasama perdagangan ASEAN, ASEAN Mitra Dialog, serta antar dan sub regional yang diratifikasi | 0 | | |
| II.3 | Koordinasi Pengembangan Kerjasama Ekonomi Regional dan Sub Regional | Meningkatnya implementasi kesepakatan kerjasama ekonomi regional dan sub regional | Persentase rekomendasi kesepakatan kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional yang terimplementasi | 85 | 2,9 | Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
| | | | Kualitas koordinasi perencanaan kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional | baik | | |
| | | | Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kerjasama ekonomi Regional dan Subregional yang ditindaklanjuti | 85 | | |
| | | | Persentase pemahaman peserta atas materi sosialisasi kerjasama ekonomi Regional dan Sub Regional | 85 | | |
| II.4 | Kerjasama ASEAN Bidang Ekonomi | Meningkatnya peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan komunitas ASEAN di bidang Ekonomi | Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan | 80 % | 6,8 | Kemenlu |
| | | | Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN | 75 % | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|--|--|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | 2015 | | | |
| | | | Persentase rekomendasi/kontribusi yang diterima sebagai posisi Indonesia | 75 % | | |
| II.5 | Kerjasama Regional di bidang penanaman modal | Meningkatnya strategi dan teknik yang berdaya saing untuk memperoleh manfaat yang optimal dari perundingan-perundingan kerjasama regional dalam rangka memberikan jaminan dan perlindungan di bidang penanaman modal | Jumlah laporan tentang partisipasi aktif BPKM dalam fora perundingan kerjasama regional | 33 laporan | 6,6 | BKPM |
| | | | Jumlah laporan bahan posisi perundingan dalam rangka kerjasama regional | 33 laporan | | |
| | | | Jumlah peserta sosialisasi hasil-hasil perundingan kerjasama regional | 225 peserta | | |
| | | | Sosialisasi ASEAN Economic Community (AEC) | 2 daerah | | |
| III | PELAYANAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA Penanganan seluruh pengaduan dalam waktu 2 x 24 jam, Pembentukan pos pelayanan TKI di kecamatan di daerah-daerah kantong TKI | | | | | |
| III.1 | Pembinaan dan Pengembangan E-Government** | Kebijakan, regulasi, bimbingan teknis, dan evaluasi pengembangan e-government untuk mendorong peningkatan nilai e-government nasional menjadi 3,4, pencapaian tingkat e-literasi menjadi 50% | Jumlah K/L/Pemda yang terintegrasi melalui Gov. Services Bus | 12 instansi | 19,3 | Kemenkominfo |
| III.2 | Pengelolaan Informasi Kependudukan | Tersedianya pelayanan dokumen kependudukan yang cepat, mudah, murah dan aman bagi TKI | Jumlah K/L yang dapat mengakses database kependudukan berbasis NIK Nasional dan/atau digunakan sebagai dasar penerbitan dokumen informasi untuk pelayanan publik | 15 K/L | 9,1 | Kemendagri |
| III.3 | Pelayanan Dokumen Perjalanan Visa dan | Terselenggaranya akses pelayanan paspor yang mudah | Persentase (%) pengendalian pemberian persetujuan visa kunjungan, visa kunjungan saat kedatangan, visa | 90% | 432,9 | Kemenkumham |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------|--|---|--|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Fasilitas Keimigrasian | dan tidak duplikasi | tinggal terbatas dan visa untuk negara tertentu yang memenuhi standar dengan data akurat | | | |
| | | | Persentase (%) pengendalian pemberian Surat Perjalanan Khusus TKI yang memiliki standar dengan data akurat | 90% | | |
| | | | Jumlah rumusan kebijakan teknis di bidang dokumen perjalanan, visa, izin masuk, izin bertolak dan fasilitas keimigrasian yang responsif, implementatif dan akuntabel | 8 rumusan | | |
| III.4 | Peningkatan Kerjasama dan Verifikasi Pelayanan Dokumen | Meningkatnya kualitas pelayanan penempatan calon TKI | Jumlah calon TKI yang mendapat layanan dokumen sesuai standar | 600 ribu TKI | 5,0 | BNP2TKI |
| III.5 | Penyiapan pemberangkatan | Meningkatnya pemahaman hak dan kewajiban TKI | Persentase jumlah calon TKI yang ditempatkan sesuai dengan job order | 100% TKI | 21,4 | BNP2TKI |
| | | | Jumlah Calon TKI yang Terlayani KTKLN sesuai dengan NIK | 600 ribu TKI | | |
| | | | Jumlah TKI yang memahami standar perlindungan dan prinsip-prinsip HAM. | 600 ribu TKI | | |
| III.6 | Peningkatan Mediasi dan Advokasi | Terlaksananya Pelayanan Advokasi dan Perlindungan Hukum TKI | Persentase calon TKI dan TKI yang mendapat advokasi | 90% teradvokasi | 4,0 | BNP2TKI |
| | | | Persentase pekerja migran purna bermasalah yang | 100% pekerja migran | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------|--|--|---|--|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | direhabilitasi | bermasalah ditangani | | |
| III.7 | Peningkatan Pengamanan dan Pengawasan TKI | Pencegahan keberangkatan TKI non prosedural | Presentase TKI yang memiliki dokumen resmi bekerja ke luar negeri | 90% | 4,0 | BNP2TKI |
| III.8 | Peningkatan Pemberdayaan TKI Purna | Kesadaran pengelolaan remitansi untuk kegiatan produktif | Jumlah calon TKI /purna yang mendapat edukasi pengelolaan remitansi | 4.500 TKI | 14,0 | BNP2TKI |
| III.9 | Penyelesaian Masalah Pengaduan Melalui Call Center TKI | Terlayannya penyelesaian masalah pengaduan melalui call center TKI | Terlayannya penyelesaian masalah pengaduan melalui call center TKI | 100% pengaduan terproses terlayani | 5,0 | BNP2TKI |
| III.10 | Koordinasi Kebijakan Peningkatan Kesempatan Kerja Perempuan dan Ekonomi Keluarga | Terlayannya pemulangan TKI bermasalah/TKIB yang dideportasi secara sehat dan bermartabat | Jumlah usulan rekomendasi kebijakan penanganan dan pemulangan TKIB/PMIBS, kesempatan kerja perempuan dan ekonomi keluarga | 2 dokumen | 3,2 | Menko Kesra |
| III.11 | Perlindungan Bagi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran | Terlayannya korban tindak kekerasan dan pemulangan Pekerja Migran/Pekerja Migran Bermasalah yang dideportasi sampai di Provinsi asal | Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah yang Terpulihkan Kondisi Psikologisnya | 747 | 26,2 | Kemensos |
| | | | Jumlah Pekerja Migran Yang Di Pulangkan Ke Provinsi Asal | 4.694 | | |
| | | | Jumlah Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran yang Mendapatkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif | 489 | | |
| III.12 | Peningkatan Pelayanan Pengaduan | Meningkatnya pelayanan pengaduan | Kemudahan penyampaian pengaduan | 1 hotline service 24 jam (bebas pulsa) | 13,0 | BNP2TKI |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------|--|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah pengaduan yang diproses | '100% pengaduan terproses | | |
| | | | Kualitas pelayanan hotline service | '100% TKI yang diproses melalui hotline service dalam waktu 2x24 jam | | |
| III.13 | Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI) | Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Penyusunan Skim Asuransi dan Remitansi untuk TKI | Persentase Rekomendasi Kebijakan Koordinasi Asuransi dan Remitansi untuk TKI Diimplementasikan | 75% | 0,9 | Menko Perekonomian |
| III.14 | Pembinaan Penempatan dan Perlindungan TKI Luar Negeri | Tersedianya regulasi yang melindungi TKI | Jumlah atase ketenagakerjaan yang memberi perlindungan TKI | 13 atase | 72,0 | Kemenakertrans |
| | | | Amandemen UU 39/2004 | Sosialisasi | | |
| | | | Persentase peraturan turunan amandemen UU | 100% peraturan turunan tersusun | | |
| | | | Persentase calon pekerja migran yang terlayani dan tercatat pada dinas tenaga kerja propinsi dan kab/ kota | 100% calon pekerja migran terlayani | | |
| | | | Perizinan kelembagaan dan evaluasi kinerja kelembagaan | 50 lokasi | | |
| | | | Kerjasama bilateral, serta regional dan multilateral meliputi inisiasi, negoisasi dan perjanjian kerjasama | 17 MOU | | |
| III.15 | Peningkatan Perlindungan dan Pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri | Tersedianya bantuan hukum bagi kepentingan TKI | Persentase Penurunan Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri | 50% | 96.4 | Kemenlu |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|---|--|--|--|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Presentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri | 60% | | |
| | | | Repatriasi WNI di Luar Negeri | 4000 | | |
| | | | Presentase peningkatan data entry WNI dan kasus WNI/BHI di luar negeri pada database Dit. PWNI dan BHI | 100% | | |
| | | | Presentase kenaikan jumlah masukan bagi perumusan kebijakan di bidang perlindungan WNI | 100% | | |
| IV. PENGEMBANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL, MIKRO DAN MENENGAH (UMKM) | | | | | | |
| Penataan peraturan perundang-undangan, peningkatan iklim usaha yang kondusif, pengembangan produk dan pemasaran, peningkatan daya saing SDM, penguatan kelembagaan dan revitalisasi koperasi, serta peningkatan akses ke pembiayaan yang mendukung peningkatan daya saing koperasi dan UMKM. | | | | | | |
| IV.1 | Penataan Peraturan Perundang-undangan di bidang Koperasi dan UMKM | Tersedianya peraturan perundangan yang mendukung iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan koperasi dan UMKM | (1) Jumlah Rancangan Undang-undang tentang Perkoperasian | - | - | Kemen KUKM |
| | | | (2) Jumlah Rancangan Peraturan Pelaksanaan UU tentang Koperasi | 4 RPP | 4,0 | |
| IV.2 | Pengembangan Sarana Usaha Koperasi dan UMKM | Berkembangnya sarana usaha pemasaran KUMKM | Jumlah dukungan sarana usaha pemasaran revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi | 40 unit pasar tradisional yang dikelola koperasi | 40,0 | Kemen KUKM |
| IV.3 | Pengembangan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT)-KUMKM | Berkembangnya pusat layanan usaha terpadu (PLUT)-KUMKM | Jumlah pusat layanan usaha terpadu (PLUT) KUMKM | 15 unit PLUT-KUMKM | 75,0 | Kemen KUKM |
| IV.4 | Pengembangan dan Perluasan Pasar Ekspor | Berkembangnya pasar ekspor Koperasi dan UMKM | Konsep sistem informasi konsolidasi kargo UMKM ekspor, dan jumlah ujicoba di pelabuhan laut utama | Ujicoba di 2 pelabuhan | 2,0 | Kemen KUKM |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|------|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Koperasi dan UKM | | | | | |
| IV.5 | Pengembangan Data dan Informasi Koperasi dan UMKM | Tersedianya data dan informasi KUMKM sebagai landasan peraturan dan kebijakan | Peningkatan ketersediaan data dan informasi KUMKM | - | 0,0 | Kemen KUKM |
| IV.6 | Pengembangan Kemitraan Koperasi dan UMKM | Berkembangnya kemitraan koperasi dan UMKM | Jumlah koperasi dan UMKM yang difasilitasi menjadi mitra investasi | 200 KUMKM | 6,0 | Kemen KUKM |
| IV.7 | Peningkatan Produktivitas dan Mutu KUMKM | Meningkatnya produktivitas dan mutu KUMKM | Jumlah KUKM yang mendapatkan sosialisasi dan menerapkan standarisasi ISO/SNI/HACCP, HKI dan kehalalan produk | 1.000 KUKM | 8,5 | Kemen KUKM |
| IV.8 | Peningkatan Kualitas Ketatalaksanaan Koperasi dan UMKM | Meningkatnya kinerja kelembagaan di bidang pengendalian dan akuntabilitas koperasi berkoperasi yang benar sesuai prinsip dan jati diri koperasi | Jumlah koperasi yang direvitalisasi | 300 Koperasi | 8,0 | Kemen KUKM |

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2014

| | |
|---------------------------|--|
| PRIORITAS LAINNYA | PROGRAM AKSI BIDANG BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN |
| Tema Prioritas | - |
| Penanggungjawab | Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan |
| Bekerjasama dengan | - |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------|--|---|---|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | ISU STRATEGIS : PENYIAPAN PEMILU 2014 | | | | | |
| I | PROGRAM Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik | | | | | |
| 1.1 | Penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi, penyelesaian sengketa dan penyuluhan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu | Terselenggaranya penyiapan penyusunan rancangan peraturan KPU, advokasi hukum, dan penyuluhannya. | Tingkat ketepatan penyiapan analisis di bidang administrasi hukum, dalam kepengurusan parpol, perseorangan peserta Pemilu, dan dana kampanye peserta Pemilu | 80% | 16.012,2 *) | KPU |
| | | | Tingkat ketepatan penyusunan peraturan KPU/regulasi penyelenggaraan Pemilu 2014 | 80% | | |
| | | | Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan tata cara dan pelaksanaan advokasi dan penyelesaian sengketa | 85% | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------------|--|--|--|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | hukum | | | |
| | | | Tingkat ketepatan penyiapan penyusunan dokumentasi dan informasi hukum peraturan perundangan dan pelaksanaan penyuluhan hukum | 85% | | |
| II | PROGRAM PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU | | | | | |
| II.1 | Dukungan pengawasan penyelenggaraan Pemilu | Terlaksananya dukungan pengawasan penyelenggaraan Pemilu | Persentase (%) pelaksanaan koordinasi hubungan antar lembaga dan pelayanan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum | 100% | 487.2 | Bawaslu |
| | | | Persentase (%) pelaksanaan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu | 100% | | |
| | | | Persentase (%) pelaksanaan sosialisasi pengawasan penyelenggaraan Pemilu | 100% | | |
| | | | Persentase (%) pelaksanaan penyusunan pedoman dan juknis pengawasan Pemilu | 100% | | |
| | | | Persentase (%) pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan pengawasan Pemilu, bantuan hukum, dan penyelesaian sengketa hukum | 100% | | |
| | | | Persentase (%) pelaksanaan penanganan dan tindak lanjut pelanggaran Pemilu | 100% | | |
| | | | Persentase (%) pelaksanaan fasilitasi dewan kehormatan penyelenggaraan Pemilu | 100% | | |
| III | PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN | | | | | |
| III.1 | Koordinasi pengelolaan Pemilu | Terselenggaranya koordinasi kebijakan pengelolaan Pemilu | Jumlah rapat koordinasi perbaikan kualitas Pemilu | 12 | 4,55 | KEMENKOPOLHUKAM |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------------|---|---|--|-----------------------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Persentase rekomendasi rapat koordinasi perbaikan kualitas pemilu yang ditindaklanjuti | 75% | | |
| | | | Jumlah pemantauan dan evaluasi | 4 | | |
| | | | Jumlah rapat koordinasi desk Pemilu | 12 | | |
| | | | Persentase rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti | 90% | | |
| | | | Jumlah pemantauan perkembangan Pemilu | 4 | | |
| | | | Laporan rapat koordinasi nasional penyiapan DPT Pemilu 014 | 1 | | |
| | | | Jumlah rakor fasilitasi pemilu bagi penyandang disabilitas | 12 | | |
| | | | Laporan monitoring dan evaluasi fasilitasi pemilu bagi penyandang disabilitas | 4 | | |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA POLRI | | | | | |
| IV.1 | Pengembangan Peralatan Polri | Meningkatnya kualitas pengamanan di daerah sampai dengan tingkat polsek | % penambahan ketersediaan Alut Harkamtibmas, lidik sidik, strakam, dan penanggulangan keamanan berkadar tinggi | 50% | 2.880,2 | POLRI |
| V | PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL | | | | | |
| V.1 | Penyusunan Perencanaan dan Pelaksanaan Pendidikan Tingkat Nasional di Bidang Operasi Pendidikan | Meningkatnya kualitas penyusunan rencana pendidikan tingkat nasional di bidang operasi pendidikan | Jumlah peserta pendidikan | 30% | 28,2 | LEMHANNAS |
| V.2 | Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pemantapan Nilai-Nilai | Meningkatnya kualitas perumusan kebijakan secara konseptual, pengembangan konsep-konsep, | Jumlah peserta pelatihan, penjadwalan, dan jenis kegiatan, serta dokumentasi riset | 2 laporan pelatihan & 500 peserta | 14,2 | LEMHANNAS |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|---|---|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | Kebangsaan | dan penyelenggaraan kegiatan di bidang pemantapan nilai-nilai Kebangsaan | | | | |
| V.3 | Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Politik | Meningkatnya kualitas penyusunan rencana pengkajian egeraen di bidang politik | Jumlah dokumen kajian di bidang politik | 4 naskah | 1,6 | LEMHANNAS |
| V.4 | Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Ekonomi | Meningkatnya kualitas penyusunan rencana pengkajian egeraen di bidang ekonomi | Jumlah dokumen kajian di bidang ekonomi | 5 naskah | 2,5 | LEMHANNAS |
| V.5 | Penyusunan Rencana dan Pelaksanaan Pengkajian Strategik di Bidang Pertahanan Keamanan | Meningkatnya kualitas penyusunan rencana pengkajian egeraen di bidang pertahanan keamanan | Jumlah dokumen kajian di bidang pertahanan dan keamanan | 15 naskah | 1,8 | LEMHANNAS |
| ISU STRATEGIS : PERCEPATAN PEMBANGUNAN MINIMUM ESSENSIAL FORCE | | | | | | |
| VI PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA/ NON-ALUTSISTA/ SARPRAS INTEGRATIF | | | | | | |
| VI.1 | Pengadaan Alutsista Strategis Integratif | Percepatan peningkatan kemampuan Alutsista Integratif. | Persentase Pencapaian MEF Integratif | 24% | 99,5 | KEMHAN /MABES TNI |
| VII PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA DAN NON ALUTSISTA/ SARANA DAN PRASARANA MATRA DARAT | | | | | | |
| VII.1 | Pengadaan Alutsista Strategis Matra Darat | Percepatan Modernisasi Alutsista Matra Darat | Persentase Pencapaian MEF Matra Darat | 22% | 3.043,4 | KEMHAN /TNI AD |
| VIII PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA (ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN) DAN NON ALUTSISTA SERTA PENGEMBANGAN FASILITAS DAN SARANA PRASARANA MATRA LAUT | | | | | | |
| VIII.1 | Pengadaan Alutsista Strategis Matra Laut | Percepatan pengadaan Alut-sista Strategis Matra Laut | Persentase Pencapaian MEF Matra Laut | 21% | 1.734,1 | KEMHAN /TNI AL |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------------|---|--|---|----------------------|--|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| IX | PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA DAN NON ALUTSISTA SERTA PENGEMBANGAN FASILITAS DAN SARPRAS MATRA UDARA | | | | | |
| IX.1 | Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara | Percepatan peningkatan alutsista strategis matra udara | Persentase Pencapaian MEF Matra Udara | 28% | 3.216,1 | KEMHAN /TNI AU |
| | PRIORITAS NASIONAL | | | | | |
| | PELAKSANAAN KOORDINASI TERHADAP MEKANISME PROSEDUR PENANGANAN TERORISME | | | | | |
| XI | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA INTELIJEN NEGARA | | | | | |
| XI.1 | Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Administrasi Operasi Intelijen | Terselenggaranya dukungan administrasi operasi intelijen | Jumlah anggaran yang tersedia | 30% | 350,0 | BADAN INTELIJEN NEGARA |
| XII | PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN | | | | | |
| XII.1 | Pembinaan forum kemitraan Polisi dan Masyarakat | Meningkatny jumlah forum kemitraan Polisi dan msyarakat | Jumlah Forum Kemitraan Polmas | 60.000 | 18,4 | POLRI |
| XIII | PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA | | | | | |
| XIII.1 | Penindakan Tindak Pidana Terorisme | Meningkatnya penyelesaian penanganan perkara Terorisme | Jumlah Perkara dan Clearance Rate Tindak Pidana Terorisme tk Nasional | 100% | 91,1 | POLRI |
| | PELAKSANAAN PROGRAM DERADIKALISASI UNTUK MENANGKAL TERORISME | | | | | |
| XIV | PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF | | | | | |
| XIV.1 | Operasi intelijen Strategis | Dapat ditangkalnya ATHG pertahanan egara. | Prosentase kualitas dan kuantitas data intelijen dan pengamanan yang dibutuhkan | 46% | 37,3 | KEMHAN /MABES TNI |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------------|--|---|--|----------------------------|--|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| XV | PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA DARAT | | | | | |
| XV.1 | Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat | Kesiapan kekuatan dan kemampuan matra darat | % Peningkatan Pengamanan Personel, Material dan Dokumen serta Efektifitas dan Efisiensi Deteksi Dini | 44% | 168,4 | KEMHAN / TNI AD |
| XVI | PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN, DAN PENANGGALANGAN KEAMANAN NEGARA | | | | | |
| XVI.1 | Kegiatan Operasi Intelijen Dalam Negeri | Meningkatnya pelaksanaan penyelidikan beraspek dalam negeri | Rasio personil daerah terhadap jumlah kabupaten/kota | 33% | 354,0 | BADAN INTELIJEN NEGARA |
| | PEMBERDAYAAN INDUSTRI STRATEGIS BIDANG PERTAHANAN | | | | | |
| XVIII | PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN | | | | | |
| XVIII.1 | Produksi Alutsista Industri dalam negeri | Meningkatnya produksi Alutsista industri dalam negeri | Jumlah dan jenis Alutsista TNI yang dipenuhi oleh industri dalam negeri | 25% | 1.372,0 | KEMHAN |
| XX | PROGRAM PENGEMBANGAN PERSANDIAN NASIONAL | | | | | |
| XX.1 | Pengkajian dan pengembangan peralatan sandi | Tersedianya kajian pengembangan peralatan sandi | Jumlah prototipe peralatan sandi | 3 | 4,5 | LSN |
| XXI | PROGRAM PEMBINAAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | | | | | |
| XXI.1 | Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan | Terlaksananya penyusunan kebijakan, dukungan dan fasilitasi pengembangan nilai-nilai kebangsaan | Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan | 1 Modul Bingkai Kebangsaan | 37,1 | Kemendagri |
| | | | Jumlah forum dialog dan sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah | 25 kali | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------------|--|---|---|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| XXII | PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN | | | | | |
| XXII.2 | Kegiatan Koordinasi Wawasan Kebangsaan | Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Wawasan Kebangsaan | Jumlah Rakor Wawasan Kebangsaan | 12 kali | 1,13 | KemenkoPolhukam |
| | | | Persentase rekomendasi rapat koordinasi wawasan kebangsaan yang ditindaklanjuti | 75% | | |
| | | | Persentase laporan pemantauan dan evaluasi wawasan kebangsaan yang aknutabel dan tepat waktu | 75% | | |
| | | | Jumlah pemantauan dan evaluasi | 4 kali | | |
| | | | Jumlah rakor integrasi dan sinkronisasi pendidikan kebangsaan | 12 | | |
| | | | Laporan rakornas integrasi dan sinkronisasi pendidikan kebangsaan | 1 | | |
| | | | Peraturan Presiden Grand Design Wawasan Kebangsaan | 1 | | |
| XXII.3 | Koordinasi penanganan daerah rawan konflik dan kontijensi | Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penanganan Konflik dan Kontijensi | Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Konflik dan kontijensi | 12 | 14,85 | KemenkoPolhukam |
| | | | Persentase rekomendasi rapat koordinasi penanganan masalah konflik dan kontijensi yang ditindaklanjuti | 75% | | |
| | | | Persentase laporan pemantauan dan evaluasi penanganan masalah konflik yang aknutabel dan tepat waktu san masalah kontijensi | 75% | | |
| | | | Jumlah pemantauan dan evaluasi | 4 | | |
| | | | Jumlah rapat koordinasi Desk Aceh | 12 | | |
| | | | Persentases rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Aceh yang ditindaklanjuti | 75% | | |
| | | | Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Provinsi Aceh | 4 | | |
| | | | Jumlah Rapat Koordinasi Desk Sulteng | 12 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------------|--|--|---|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan sosial politik di Sulteng | 4 | | |
| | | | Jumlah rapat koordinasi Desk illegal migrant | 12 | | |
| | | | Jumlah laporan tim terpadu tingkat pusat penanganan gangguan keamanan dalam negeri | 12 | | |
| | | | Jumlah dokumen peta konflik 2014 | 1 | | |
| | | | Laporan kemajuan rencana aksi penanganan gangguan keamanan dalam negeri | 4 | | |
| XXII.4 | Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa (terorisme) | Terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan terorisme | Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa (Terorisme) | 12 | 2,22 | KemenkoPolhukam |
| | | | Persentase rekomendasi rapat koordinasi urusan kejahatan transnasional dan terorisme yang ditindaklanjuti | 80% | | |
| | | | Persentase laporan pemantauan dan evaluasi urusan kejahatan transnasional dan terorisme yang akuntabel | 80% | | |
| | | | Jumlah pemantauan dan evaluasi | 4 | | |
| | | | Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Terorisme Bersama dengan BNPT | 12 | | |
| | | | Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan terorisme termasuk modus operandi | 4 | | |
| | | | Persentase rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti | 85% | | |
| XXII.5 | Kegiatan Koordinasi Kekuatan, Kemampuan Kerjasama Pertahanan Negara | Terselenggaranya Koordinasi Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara | Jumlah Rapat Koordinasi Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara | 12 | 1,10 | KemenkoPolhukam |
| | | | Persentase rekomendasi rapat koordinasi strategi politik luar negeri | 85% | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------------|---|--|---|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Persentase laporan pemantauan dan evaluasi strategi politik luar negeri | 85% | | |
| | | | Jumlah pemantauan dan evaluasi | 8 | | |
| XXII.6 | Koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan | Terselenggaranya koordinasi kebijakan wilayah negara dan tata ruang pertahanan | Jumlah Rapat Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan | 12 | 3,00 | KemenkoPolhukam |
| | | | Jumlah koordinasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau | 12 | | |
| | | | Persentase rekomendasi rapat koordinasi ruang pertahanan dan wiltas yang ditindaklanjuti | 85% | | |
| | | | Persentase laporan pemantauan dan evaluasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau yang akurat dan tepat waktu | 85% | | |
| | | | Jumlah pemantauan dan evaluasi | 8 | | |
| | | | Jumlah rapat koordinasi Desk Wiltas dan PPKT | 12 | | |
| | | | Persentase rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Wiltas dan PPKT yang ditindaklanjuti | 90% | | |
| | | | Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di wiltas dan PPKT | 4 | | |
| XXIII | PROGRAM PENANGGULANGAN TERORISME | | | | | |
| XXIII.1 | Penanggulangan Terorisme Bidang Pencegahan | Terlaksananya penanggulangan terorisme bidang pencegahan | Jumlah Pengoperasian Satgas Pencegahan dan kontra propaganda dalam Penanggulangan Terorisme | 13 | 136,0 | BNPT |
| | | | Jumlah Fasilitas Pelatihan Penanggulangan Terorisme di Bidang Pencegahan | 4 | | |
| | | | Jumlah Laporan Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Terorisme di Bidang Pencegahan dan Perlindungan | 7 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------------|---|---|--|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Radikal Terorisme, dan Pelaksanaan Re-Edukasi, Re-Sosialisasi dan Rehabilitasi | 38 | | |
| | | | Jumlah Sosialisasi dan Kajian di Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi | 10 | | |
| XXIII.2 | Penanggulangan Terorisme Bidang Penindakan | Terlaksananya penanggulangan terorisme bidang penindakan | Jumlah Pelaksanaan Penggalangan Intelijen, Pengoperasian Satgas Penindakan dan Penyiapan Kesiapsiagaan Nasional Dalam Penanggulangan Terorisme | 86 | 105,3 | BNPT |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kemampuan Organisasi Dalam Penanggulangan Terorisme | 3 | | |
| | | | Jumlah Pengembangan Sistem Operasi Dalam Penanggulangan Terorisme | 5 | | |
| | | | Prosentase Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Korban, Saksi, dan Aparat Penegak Hukum Terkait Ancaman Terorisme | 100 | | |
| XXIV | PROGRAM PENINGKATAN PERAN DAN DIPLOMASI INDONESIA DI BIDANG MULTILATERAL | | | | | |
| XXIV.1 | Kerjasama Multilateral terkait Isu Keamanan Internasional, Senjata Pemusnah Massal dan Senjata Konvensional, Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara dan Terorisme | Terlaksananya partisipasi Indonesia dalam forum kerja sama multilateral | Jumlah inisiatif Indonesia untuk mendorong Reformasi Dewan Keamanan PBB | 4 | 9,1 | Kemenlu |
| | | | Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme | 80% | | |
| | | | Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme | 80% | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|---|---|--|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme pada tingkat nasional | 13 | | |
| XXIV.2 | Koordinasi hubungan multilateral | Terselenggaranya koordinasi kebijakan hubungan multilateral | Jumlah rapat koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral | 12 | 1,63 | KemenkoPolhukam |
| | | | % rekomendasi rapat koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral yang ditindaklanjuti | 80% | | |
| | | | % laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas hubungan multilateral yang akuntabel dan tepat waktu | 80% | | |
| | | | Jumlah pemantauan dan evaluasi | 4 | | |
| | | | Jumlah rapat koordinasi diplomasi perbatasan | 12 | | |
| | | | Jumlah pemantauan dan evaluasi diplomasi perbatasan | 4 | | |
| | | | Jumlah rapat koordinasi perlindungan WNI di luar negeri | 12 | | |
| | | | Jumlah pemantauan dan evaluasi perlindungan WNI di luar negeri | 4 | | |
| XXV | PENINGKATAN KEMAMPUAN IPTEK UNTUK PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL | | | | | |
| XXV.1 | Peningkatan dukungan teknologi bagi pemberdayaan industri strategis bidang pertahanan | Kebijakan dukungan teknologi untuk revitalisasi industri pertahanan | Jumlah rekomendasi kebijakan | 1 | 1,0 | KRT |
| | | | Jumlah riset bersama | 2 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------------|---|--|---|----------------------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| XXVI | PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI | | | | | |
| XXVI.1 | Pengkajian dan Penerapan Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan | Pengembangan Prototipe Sistem PUNA tipe jangkauan jarak menengah dengan telemetry, Control and Command (TCC). | Perancangan Sistem dan Wahana, testing PUNA | 1 | 9,3 | BPPT |
| XXVII | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAM | | | | | |
| XXVII.1 | Kegiatan kerjasama HAM | Peningkatan kerjasama dalam dan luar negeri dalam rangka pemajuan HAM dan harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM serta Naskah Akademik instrument HAM internasional | Jumlah kerjasama luar negeri dalam rangka pemajuan HAM | 36 | 0,9 | Kemenhukham |
| | | | Jumlah kerjasama dalam negeri dalam rangka implementasi HAM/RANHAM | 6 instrumen 2 naskah akademik | | |
| | | | Jumlah kerjasama dalam melakukan harmonisasi RUU yang harmonis dengan HAM | 14 negara/ngo | | |
| | | | Jumlah analisis laporan pelaksanaan egaraent HAM Internasional dan Naskah akademik egaraent HAM Internasional | 50 pusat & daerah | | |
| XXVII.2 | Kegiatan Penguatan HAM | Presentasi KL pemerintah propinsi dan kabupaten/kotamadya telah mengikuti pelatihan HAM | Jumlah modul dan panduan HAM, bahan ajar HAM, dan tenaga Penguatan HAM | 3 dan 30 | 1,1 | Kemenhukham |
| | | | Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM Wilayah I | 4 | | |
| | | | Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM Wilayah II | 4 | | |
| | | | Jumlah K/L, Pemprov, Pemkab/kota yang telah mengikuti penguatan HAM dan melaksanakan program/kegiatan berperspektif HAM Wilayah III | 4 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------------|--|---|--|--------------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| XXVII.3 | Kegiatan Diseminasi HAM | Meningkatnya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memperoleh diseminasi HAM | Jumlah aparatur pemerintah dan masyarakat yang telah memperoleh diseminasi HAM Jumlah Penyuluh Ham Jumlah Evaluasi dan Pengembangan Diseminasi Ham | 720 60 penyuluh 3 | 0,8 | Kemenhukham |
| XXVII.4 | Kegiatan Informasi HAM | Informasi yang dapat diakses dari K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota tentang HAM | Jumlah data implementasi HAM yang diolah Jumlah evaluasi dan laporan tentang HAM Jumlah pengembangan egera informasi HAM Jumlah layanan publikasi dan dokumentasi HAM | 60 80 1 12 | 0,6 | Kemenhukham |
| XXVIII | PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR MAHKAMAH AGUNG | | | | | |
| XXVIII.1 | Peningkatan Profesionalitas Tenaga Teknis Peradilan dan Aparatur Peradilan | Tersedianya sumber daya aparatur eger yang professional dan kompeten dalam melaksanakan penyelenggaraan peradilan | Pelatihan bagi Program pendidikan calon hakim terpadu (Magang & Diklat) Untuk 2 Angkatan Jumlah Pelatihan bagi hakim dan panitera berkelanjutan sertifikasi Tipikor dan materi Terkini lainnya | 420 orang 2.550 orang | 27,5 | MA-RI |
| XXIX | PROGRAM PENYELESAIAN PERKARA MAHKAMAH AGUNG | | | | | |
| XXIX.1 | Percepatan peningkatan penyelesaian perkara | Terselesaikannya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel | Jumlah penyelesaian perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu Jumlah penyelesaian tunggakan perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu | 10.300 perkara | 13,1 | MA-RI |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------------|---|---|---|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah penyelesaian minutasasi, pemberkasan dan pengiriman perkara sampai ke Pengadilan perkara Pidana, PHI (yang nilainya kurang dari 150 juta) termasuk perkara KKN dan HAM yang tepat waktu | | | |
| XXX | PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN UMUM | | | | | |
| XXX.1 | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum | Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara | Jumlah penyelesaian administrasi perkara (termasuk di di dalamnya perkara yg diajukan masyarakat miskin, penetapan akta kelahiran anak bagi masyarakat kurang mampu, PHI yang nilainya kurang dari Rp 150.000.000, perkara Tipikor dan perkara HAM) | 116.836 perkara | 67,3 | MA-RI |
| | | | Jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan | 116.400 perkara | | |
| | | | Jumlah penyampaian berkas perkara Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu | 3.798 perkara | | |
| | | | Jumlah pelaksanaan zitting plaatz (tempat sidang tetap di tingkat pertama | 105 lokasi | | |
| | | | Operasional pelayanan hukum kepada masyarakat melalui pos pelayanan di lingkungan peradilan umum | 40 | | |
| | | | Jumlah standar pelaksana tata kerja dan tata kelola pengadilan di lingkungan peradilan umum yang disusun | 1 | | |
| | | | Jumlah aparaturnya yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan umum | 140 | | |
| | | | Persentase ketersediaan data dan dokumen statistik perkara di lingkungan peradilan umum yang akurat | 1 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|-------------|--|---|--|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| XXXI | PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA | | | | | |
| XXXI.1 | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara | Jumlah penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama dan banding di lingkungan peradilan Agama (termasuk perkara yang diajukan oleh masyarakat miskin dan perkara yang dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 6 (enam) bulan) | 500.000 perkara | 43,0 | MA-RI |
| | | | Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi, PK dan Kesyar'iyahan yang lengkap dan tepat waktu | 450.000 perkara | | |
| | | | Jumlah pelaksanaan e-gara keliling di lingkungan peradilan agama | 10.000 perkara | | |
| | | | | 436 lokasi | | |
| | | | | 110 pos | | |
| XXXI | PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA | | | | | |
| XXXI.1 | Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara | Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara (yang Sederhana, dan Tepat Waktu) Ditingkat Pertama dan Banding di Lingkungan Peradilan Agama (termasuk yang diajukan masyarakat miskin) | 106.787 perkara | 25.3 | MA-RI |
| | | | Jumlah penyelesaian perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan | 3.609 perkara | | |
| | | | Jumlah penyampaian berkas perkara kasasi, PK, dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu | 400 perkara | | |
| | | | Jumlah pelaksanaan hakim terbang (detasering) | 23 satker | | |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Militer | 60 | | |
| | | | Penyusunan kebijakan manajemen tata laksana dan administrasi tenaga teknis di lingkungan Peradilan Militer | 2 | | |
| | | | Jumlah pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan | 90 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------------|--|---|--|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| XXXII | PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN MILITER DAN TUN | | | | | |
| XXXII.1 | Peningkatan Manajemen Peradilan Militer | Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara | Jumlah Penyelesaian Administrasi Perkara di Tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan Militer (termasuk penyelesaian perkara yang kurang dari 6 bulan) | 3.609 perkara | 4,1 | MA-RI |
| | | | Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK, dan Grasi Yang Lengkap dan Tepat Waktu | 269 perkara | | |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis di lingkungan Peradilan Militer | 60 kegiatan | | |
| | | | Penyusunan Kebijakan Manajemen Tatalaksana dan Administrasi Tenaga Teknis Peradilan Militer | 2 | | |
| | | | Jumlah Pemenuhan Tenaga Teknis Sesuai Kebutuhan | 90 orang | | |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Hakim terbang (detasering) | 23 satker | | |
| XXXII.2 | Peningkatan Manajemen Peradilan TUN | Peningkatan penyelesaian dan penanganan perkara | Jumlah penyelesaian administrasi perkara (yang sederhana dan tepat waktu) di tingkat Pertama dan Banding di lingkungan Peradilan TUN (termasuk penyelesaian perkara yang kurang dari 6 (enam) bulan) | 1.671 perkara | 5,5 | MA-RI |
| | | | Jumlah Penyampaian Berkas Perkara Kasasi, PK, Hak Uji Materil dan Sengketa Pajak Peradilan TUN yang lengkap dan tepat waktu | 269 perkara | | |
| | | | Operasional pelayanan egar kepada masyarakat melalui pos pelayanan di lingkungan Peradilan TUN | 5 satker | | |
| | | | Pembebasan Biaya Perkara Prodeo Dilingkungan Peradilan TUN | 84 perkara | | |
| | | | Penyusunan kebijakan mengenai manajemen dan tata laksana di lingkungan Peradilan TUN | 2 | | |
| | | | Jumlah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Dilingkungan Peradilan TUN | 80 kegiatan | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|-----------------|--|--|--|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah pemenuhan tenaga teknis sesuai kebutuhan | 160 orang | | |
| XXXIII | PROGRAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PERKARA PIDANA KHUSUS, PELANGGARAN HAM YANG DAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI | | | | | |
| XXXIII.1 | Penanganan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Agung RI | Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, tindak pidana korupsi dan pelanggaran HAM yang berat secara cepat, tepat dan akuntabel. | Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana Korupsi yang diselesaikan | 80 pkr | 12,8 | Kejagung |
| | | | Jumlah Penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana khusus lainnya yang diselesaikan | 5 pkr | | |
| | | | Jumlah Penyidikan perkara pelanggaran HAM berat yang diselesaikan | 2 pkr | | |
| XXXIII.2 | Peningkatan Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Agung | Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel. | Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan | 80 pkr | 4,5 | Kejagung |
| | | | Jumlah perkara tindak pidana korupsi lainnya yang diselesaikan dalam tahap Pra Penuntutan dan penuntutan | 20 pkr | | |
| | | | Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan. | 80 pkr | | |
| | | | Jumlah Pra Penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan | 2 pkr | | |
| | | | Jumlah perkara pelanggaran HAM yang berat yang diselesaikan dalam tahap Penuntutan | 2 pkr | | |
| XXXIII.3 | Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya di Kejati, Kejari dan Cabjari | Meningkatnya penyelesaian perkara pidana khusus, dan tindak pidana korupsi secara cepat, tepat dan akuntabel yang dilaksanakan oleh jajaran Kejaksaan di daerah. | Jumlah perkara tindak pidana khusus (ZEE, perikanan, kepabeanan dan cukai) yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari | 250 pkr | 417,6 | Kejaksaan RI |
| | | | Jumlah perkara tindak pidana korupsi yang diselesaikan oleh Kejati, Kejari dan Cabjari | 1440 pkr | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|----------------|---|---|--|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| XXXIV | PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEJAKSAAN RI | | | | | |
| XXXIV.1 | Pelayanan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Kerjasama Hukum | Meningkatnya Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan dan pembinaan hubungan dengan lembaga negara, lembaga pemerintah dan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri. | Jumlah kerja sama egar sebagai implementasi MLA dalam rangka pengembalian terdakwa/tersangka dan asset egara hasil tindak pidana korupsi yang disembunyikan di luar negeri | 1 laporan | 2,8 | Kejagung |
| | | | Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan yang dilakukan penelaahan | 2 rancangan | | |
| XXXV | PROGRAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI | | | | | |
| XXXV.1 | Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi | Penyelidikan | Kasus Potensial (Kasus) | 80 | 9.4 | KPK |
| XXXV.2 | Penyidikan Tindak Pidana Korupsi | Penyidikan | Penyidikan (Perkara) | 75 | 9.2 | KPK |
| XXXV.3 | Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Korupsi | Penuntutan dan Eksekusi | Perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor | 75 | 19.1 | KPK |
| | | | Persentase pelaksanaan pidana badan terhadap putusan yang berkekuatan hokum tetap | 35 | | |
| XXXV.4 | Koordinasi dan Supervisi Penindakan (Korsup) | Korsup Penindakan | Koordinasi kepatuhan penyampaian SPDP | 70 | 15.0 | KPK |
| | | | Kasus yang disupervisi KPK lanjut ke tahap berikutnya | 140 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------|---|--------------------------------------|---|----------------------|--|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | TPK | | Pelatihan peningkatan SDM Apgakum | 800 | | |
| XXXV.5 | Pengelolaan LHKPN | Penanganan LHKPN | LHKPN yang diumumkan dalam TBN (Jumlah PN) | 32.000 | 5.6 | KPK |
| | | | Pemeriksaan LHKPN (Adm, Substantif, Khusus) | 150 | | |
| XXXV.6 | Pengelolaan Gratifikasi | Penanganan gratifikasi | Keputusan pimpinan KPK terkait gratifikasi | 700 | 4.2 | KPK |
| | | | Kasus diserahkan ke direktorat lain | 14 | | |
| | | | Instansi/lembaga (Pemerintah, BUMN, Swasta) terkait Nasional Integrity dan pondasi Sistem Integrasi Nasional (SIN) pelaksana pengendalian gratifikasi | 22 | | |
| | | | Jumlah Laporan Deteksi yang diserahkan ke KLOP | 9 | | |
| | | | Jumlah Regulasi Gratifikasi | 1 | | |
| XXXV.7 | Penyelenggaraan pendidikan, sosialisasi dan kampanye anti korupsi | Pendidikan, sosialisasi dan kampanye | Terlaksananya penerapan modul anti korupsi di setiap jenjang pendidikan sesuai dengan criteria dan persyaratan | 110 | 24.7 | KPK |
| | | | Terbentuknya komunitas anti korupsi sesuai dengan criteria dan persyaratan | 35 | | |
| | | | Terbentuknya zona anti korupsi layanan public di K/L, Pemda dan instansi yang memuat pencegahan terintegrasi | 26 | | |
| | | | Terlaksananya kegiatan pembelajaran anti korupsi (ACLC) | 10 | | |
| | | | Ketersediaan perangkat sosialisasi | 9050 | | |
| | | | Jumlah Parpol yang memperoleh pendidikan Politik berintegritas | 10 | | |
| | | | Penguatan Pemilu (Pemilihan Umum) / Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Berintegritas | 10 | | |
| XXXV.8 | Penanganan pengaduan masyarakat | Penanganan dumas | Jumlah laporan hasil penelitian pemberantasan korupsi | 4 | 14,5 | KPK |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU TAHUN 2014 (MILYAR RUPIAH) | INSTANSI PELAKSANA |
|------------|---|----------------|--|------------------------------|--|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Upaya Pencegahan Korupsi | 10 | | |

*) Alokasi anggaran penyelenggaraan Pemilu sebesar Rp. 16 Triliun ada di BA 999

MATRIKS BUKU I RKP TAHUN 2014

| | |
|---------------------------|--|
| PRIORITAS LAINNYA | PROGRAM AKSI BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT |
| Tema Prioritas | - |
| Penanggungjawab | Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
| Bekerjasama dengan | Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PP&PA, Kementerian Pemuda dan Olahraga |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 (Rp MILIAR) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| I. Pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar | | | | | | |
| I.1. | Pelayanan Haji | Terlaksananya pelayanan ibadah haji dan umrah serta pengawasan haji | Pelayanan Pendaftaran Haji (lokasi) | 506 | 216,4 | Kementerian Agama |
| | | | Revitalisasi dan pengembangan asrama haji (lokasi) | 4 | | |
| I.2. | Pembinaan Ibadah Haji dan Umrah | Terlaksananya pembinaan ibadah haji dan umrah | Pembinaan dan Operasional PPIH Arab Saudi (orang) | 1.490 | 273,3 | Kementerian Agama |
| | | | Pembinaan dan Operasional PPIH Embarkasi (orang) | 2.600 | | |
| | | | Tenaga Musiman PPIH Arab Saudi (orang) | 619 | | |
| I.3. | Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji | Meningkatnya pembinaan dan pelayanan kesehatan sebelum, saat pelaksanaan dan pasca haji | Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan pemeriksaan dan pembinaan kesehatan haji sesuai standar | 100 | 199,2 | Kementerian Kesehatan |
| | | | Angka kematian jemaah haji per 1.000 jemaah | 2,1 | | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 (Rp MILIAR) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|------------------------------------|---|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| II. Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pembentukan dan peningkatan efektivitas Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) | | | | | | |
| II.1. | Pembinaan Urusan Agama Khonghucu | Tersedianya pelayanan umat khonghucu | Tunjangan penyuluh Agama Konghucu Non PNS | 100 | 4,9 | Kementerian Agama |
| II.2. | Pembinaan Kerukunan Umat Beragama | Tersedianya dana operasional FKUB tingkat provinsi | Operasional FKUB tingkat provinsi | 33 | 37,5 | Kementerian Agama |
| | | Tersedianya dana operasional FKUB Tingkat kabupaten | Operasional FKUB tingkat kabupaten | 461 | | |
| | | Terlaksananya pembangunan sekretariat bersama kerukunan umat beragama | Sekretariat bersama tingkat kabupaten/kota | 40 | | |
| | | Terlaksananya pembinaan dan pengembangan KUB | Pembinaan dan pengembangan KUB | 15 | | |
| III. Pariwisata: Promosi pariwisata pemberdayaan masyarakat daerah tujuan wisata, koordinasi pembangunan sarana dan prasarana di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), serta penataan daya tarik daerah wisata. | | | | | | |
| III. 1. | Pengembangan Daya Tarik Pariwisata | Meningkatnya kualitas dan kuantitas penataan daya tarik wisata | 1. Jumlah Lokasi daya tarik di DPN yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata | 29 | 75,6 | Kemparekraf |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 (Rp MILIAR) | INSTANSI PELAKSANA |
|--------|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| III.2. | Peningkatan PNPB Mandiri Bidang Pariwisata | Meningkatnya pengembangan desa wisata | Jumlah desa wisata | 837 | 95,0 | Kemparekraf |
| III.3. | Pengembangan Industri Pariwisata | Meningkatnya kualitas industri pariwisata | Jumlah standar usaha pariwisata (naskah) | 4 | 16,2 | Kemparekraf |
| III.4. | Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata | Meningkatnya perancangan destinasi dan investasi pariwisata | 1. Jumlah lokasi KSPN yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola destinasi (<i>destination management organization/DMO</i>) | 15 | 39,5 | Kemparekraf |
| III.5. | Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri | Meningkatnya partisipasi pariwisata Indonesia pada bursa, misi penjualan (<i>sales mission</i>) dan festival di tingkat internasional | 1. Jumlah partisipasi pada bursa pariwisata, misi penjualan (<i>sales mission</i>) dan festival di tingkat internasional (even) 2. Jumlah penyelenggaraan perwakilan promosi pariwisata Indonesia (<i>Indonesia tourism promotion representative officers</i>) di luar negeri | 27 14 | 98,8 | Kemparekraf |
| III.6. | Peningkatan Promosi Pariwisata Dalam Negeri | Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara | 1. Jumlah penyelenggaraan promosi langsung (<i>direct promotion</i>), dan penyelenggaraan even pariwisata berskala nasional dan internasional | 17 | 44,9 | Kemparekraf |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 (Rp MILIAR) | INSTANSI PELAKSANA |
|---------|---|---|---|---------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| III.7. | Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata | Meningkatkan informasi pasar dan strategi pemasaran pariwisata | 1. Jumlah pengembangan informasi pasar dalam dan luar negeri (naskah) 2. Jumlah perancangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri(naskah) | 14 1 | 25,3 | Kemparekraf |
| III.8. | Peningkatan Pencitraan Pariwisata | Meningkatnya pelayanan informasi dan kelengkapan informasi pariwisata Indonesia | 1. Jumlah publikasi pariwisata dan pencitraan Indonesia di media cetak, elektronik, digital, dan media luar ruang (media) 2. Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi cetak (ribu eksemplar) 3. Jumlah pembuatan dan pengadaan bahan promosi elektronik (ribu keping) | 45 625 82,5 | 108,4 | Kemparekraf |
| III.9. | Peningkatan Promosi Konvensi, Insentif, Even dan Minat Khusus | Meningkatnya kualitas dan kuantitas promosi konvensi, insentif, even dan minat khusus | 1. Jumlah promosi pada even internasional konvensi, insentif, even, dan minat khusus (kegiatan) 2. Jumlah pendukung even peningkatan konvensi, insentif, even, dan minat khusus (kegiatan) | 6 25 | 36,9 | Kemparekraf |
| III.10. | Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya kapasitas SDM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif | Jumlah SDM peserta pembekalan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif (orang) | 1.200 | 10,0 | Kemparekraf |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 (Rp MILIAR) | INSTANSI PELAKSANA | |
|--|--|---|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| III.11. | Peningkatan Kompetensi Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif | Meningkatnya Kapasitas dan Profesionalisme SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Jumlah SDM bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi (orang) | 5.500 | 17,0 | Kemparekraf | |
| III.12. | Pengembangan Pendidikan Tinggi Bidang Pariwisata | Meningkatnya profesionalisme dan daya saing SDM bidang pariwisata di lembaga pendidikan tinggi pariwisata | Jumlah lulusan pendidikan pariwisata di 4 UPT pendidikan tinggi pariwisata (orang) | 1.490 | 180 | Kemparekraf | |
| IV. Perumusan kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan (<i>mainstreaming</i>) Gender (PUG) oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan | | | | | | | |
| IV.1 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender | Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang pendidikan | Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan | 1 | 1,1 | Kementerian PP dan PA | |
| | | | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan | K/L | | | 1 |
| | | | | Prov | | | 5 |
| IV.2 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender | Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang kesehatan | Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan | - | 1,0 | Kementerian PP dan PA | |
| | | | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan | K/L | | | 1 |
| | | | | Prov | | | 5 |
| IV.3 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan | Meningkatnya jumlah kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan | Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan | 1 pedoman | 1,5 | Kementerian PP dan PA | |
| | | | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan | K/L | | | 2 |
| | | | | Prov | | | 3 |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 (Rp MILIAR) | INSTANSI PELAKSANA | |
|------|---|--|---|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|----|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| IV.4 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender | Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan | Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan | 1 | 1,2 | Kementerian PP dan PA | |
| | | | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan | K/L | | | 2 |
| | | | | Prov | | | 3 |
| IV.5 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | - | 3,1 | Kementerian PP dan PA | |
| | | | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | K/L | | | - |
| | | | | Prov | | | 12 |
| IV.6 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender | Meningkatnya jumlah kebijakan penerapan sistem data gender | Jumlah pedoman penyusunan data dan informasi gender dan anak | - | 1,2 | Kementerian PP dan PA | |
| | | | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pengelola data gender dan anak | K/L | | | - |
| | | | | Prov | | | - |
| IV.7 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | 1 | 0,9 | Kementerian PP dan PA | |
| | | | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | K/L | | | 1 |
| | | | | Prov | | | 2 |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 (Rp MILIAR) | INSTANSI PELAKSANA | |
|--|---|---|--|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
| IV.8 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang | Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang | Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang | - | 1,8 | Kementerian PP dan PA | |
| | | | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang | K/L | | | 5 |
| | | | | Prov | | | 5 provinsi 5 kab/kota |
| IV.9 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak | Meningkatnya jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak | Jumlah kebijakan penghapusan kekerasan pada anak | 1 | 1,4 | Kementerian PP dan PA | |
| | | | Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak | K/L | | | 3 |
| | | | | Prov | | | 8 |
| | | | Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak korban kekerasan | K/L | | | 1 |
| | | | | Prov | | | 2 |
| Tindak lanjut pelaksanaan survey KtA (Analisis Data Hasil SKTA 2013) | dok | 1 | | | | | |
| IV.10 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan | Meningkatnya jumlah kebijakan penanganan anak yang | Jumlah kebijakan untuk penanganan anak yang berhadapan dengan hukum | - | 1,3 | Kementerian PP dan PA | |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | | TARGET TAHUN 2014 | PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 (Rp MILIAR) | INSTANSI PELAKSANA |
|--|---------------------------------------|--|---|------|-------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | (6) | (7) |
| | hukum | berhadapan dengan hukum | Sistem peradilan pidana anak | K/L | 3 | | |
| | | | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum | K/L | 6 | | |
| | | | | Prov | 8 | | |
| | | | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data anak yang berhadapan dengan hukum | K/L | 3 | | |
| | | | | Prov | 4 | | |
| IV.11 | Penguatan kelembagaan PUG di provinsi | Memperkuat kelembagaan PUG di provinsi | Jumlah kab/kota yang memiliki SDM yang kompeten dalam analisis PPRG | | 180 | 5 | Kementerian PP dan PA |
| | | | Jumlah kab/kota yang memiliki kelembagaan dan jejaring PUG | | 180 | | |
| | | | Jumlah kab/kota yang memiliki data gender | | 180 | | |
| V. a. Peningkatan character building melalui gerakan, revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan | | | | | | | |
| b. Revitalisasi gerakan pramuka | | | | | | | |
| V.1. | Peningkatan Wawasan Pemuda | Meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup | Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup, | | 7.500 | 45,0 | Kemenpora |

| NO | SUBSTANSI INTI/ KEGIATAN PRIORITAS | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2014 | PAGU INDIKATIF TAHUN 2014 (Rp MILIAR) | INSTANSI PELAKSANA |
|---|---|---|---|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| V.2. | Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan | Meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan | 1. Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program, 2. Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam memenuhi kualifikasi berdasarkan standar organisasi kepemudaan | 10.000 140 | 65,0 | Kemendpora |
| V.3. | Pengembangan Kepramukaan | Terlaksananya pendidikan, pengembangan, dan masyarakatan Kepramukaan | 1. Jumlah pemuda yang difasilitasi dalam pendidikan kepramukaan | 5.600 | 80,0 | Kemendpora |
| V.4. | Pengembangan Kepemimpinan Pemuda | Meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan pemuda | Jumlah pemuda kader kepemimpinan | 11.500 | 34,2 | Kemendpora |
| V.5. | Pengembangan Kewirausahaan Pemuda | Meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda | Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan | 4.000 | 45,0 | Kemendpora |
| V.6. | Peningkatan prasarana dan sarana keolahragaan | Meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi standar kelayakan | 1. Jumlah fasilitas penyediaan prasarana olahraga. 2. Jumlah penyediaan sarana olahraga | 5 20 | 158,6 | Kemendpora |
| VI. Pencapaian posisi papan atas pada South East Asia (SEA) Games pada tahun 2011, peningkatan perolehan medali di Asian Games tahun 2010 dan Olimpiade tahun 2012 | | | | | | |
| VI.1. | Pembinaan Olahraga Prestasi | Meningkatnya pembinaan olahraga prestasi | 1. Jumlah olahragawan andalan nasional 2. Jumlah fasilitas keikutsertaan pada Asian Games (Korsel), Asian Paragames (Korsel), Asian Beach Games (Thailand), Asian School Games (Brunei), Youth Olympic Games (China) | 1.500 5 | 439,7 | Kemendpora |



RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014



BUKU II: PRIORITAS PEMBANGUNAN BIDANG

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| DAFTAR ISI | I |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR | VIII |
| | |
| BAB 1 KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN DAN LINTAS BIDANG | 1 |
| 1.1 PENGARUSTAMAAN | 1 |
| 1.1.1 Pengarustamaan Pembangunan Berkelanjutan | 1 |
| 1.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik | 6 |
| 1.1.3 Pengarustamaan Gender | 16 |
| 1.2 KEBIJAKAN LINTAS BIDANG | 45 |
| 1.2.1 Penanggulangan Kemiskinan | 45 |
| 1.2.2 Perubahan Iklim Global | 60 |
| 1.2.3 Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan | 67 |
| 1.2.4 Perlindungan Anak | 73 |
| 1.2.5 Pembangunan Karakter Bangsa | 80 |
| 1.2.6 Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat | 86 |
| 1.2.7 Percepatan Pencapaian Sasaran MDGs | 91 |
| | |
| BAB 2 BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA ... | 95 |
| 2.1 KONDISI UMUM | 95 |
| 2.2 PERMASALAHAN DAN SASARAN TAHUN 2014 | 120 |
| 2.2.1 Permasalahan | 120 |
| 2.2.2 Sasaran | 129 |
| 2.3 ARAH KEBIJAKAN | 139 |
| | |
| BAB 3 EKONOMI | 153 |
| 3.1 KONDISI UMUM | 153 |
| 3.1.1 Keuangan Negara | 155 |
| 3.1.2 Moneter | 159 |
| 3.1.3 Investasi | 164 |
| 3.1.4 Ekspor | 169 |
| 3.1.5 Daya Beli Masyarakat | 172 |
| 3.1.6 Industri | 173 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 3.1.7 | Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif..... | 177 |
| 3.1.8 | Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) | 182 |
| 3.1.9 | Sektor Keuangan..... | 184 |
| 3.1.10 | Ketenagakerjaan..... | 188 |
| 3.1.11 | Jaminan Sosial..... | 191 |
| 3.2 | PERMASALAHAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014 | 193 |
| 3.2.3 | Keuangan Negara | 193 |
| 3.2.4 | Stabilitas Harga dan Nilai Tukar..... | 196 |
| 3.2.5 | Investasi..... | 197 |
| 3.2.6 | Ekspor..... | 200 |
| 3.2.7 | Daya Beli Masyarakat | 203 |
| 3.2.8 | Industri..... | 205 |
| 3.2.9 | Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif..... | 206 |
| 3.2.10 | Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)..... | 209 |
| 3.2.11 | Sektor Keuangan | 210 |
| 3.2.12 | Ketenagakerjaan..... | 212 |
| 3.2.13 | Jaminan Sosial..... | 213 |
| 3.3 | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014 | 215 |
| 3.3.3 | Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan..... | 215 |
| 3.3.4 | Keuangan Negara | 223 |
| 3.3.5 | Stabilitas Harga..... | 223 |
| 3.3.6 | Peningkatan Investasi | 225 |
| 3.3.7 | Peningkatan Ekspor | 226 |
| 3.3.8 | Daya Beli Masyarakat | 228 |
| 3.3.9 | Revitalisasi Industri..... | 229 |
| 3.3.10 | Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif..... | 232 |
| 3.3.11 | Pemberdayaan Koperasi dan UMKM..... | 234 |
| 3.3.12 | Stabilitas Sektor Keuangan..... | 235 |
| 3.3.13 | Daya Saing Ketenagakerjaan | 237 |
| 3.3.14 | Jaminan Sosial..... | 239 |
| BAB 4 | BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI..... | 241 |
| 4.1 | KONDISI UMUM..... | 241 |
| 4.1.1 | Sistem Inovasi Nasional (SIN) | 241 |
| 4.1.2 | Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek) | 243 |
| 4.2 | PERMASALAHAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN | 249 |
| 4.3 | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN | 251 |

| | |
|---|----------------|
| BAB 5 BIDANG SARANA DAN PRASARANA..... | 259 |
| 5.2 KONDISI UMUM..... | 260 |
| 5.2.1 Prasarana untuk Menunjang Peningkatan Kesejahteraan | 260 |
| 5.2.2 Prasarana untuk Peningkatan Daya Saing dalam Menjamin Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa..... | 261 |
| 5.2.3 Prasarana untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah..... | 264 |
| 5.2.4 Infrastruktur untuk Mendukung Ketahanan Pangan..... | 265 |
| 5.2.5 Infrastruktur untuk Ketahanan Energi..... | 266 |
| 5.2.6 Ketahanan Infrastruktur dalam Upaya Mitigasi Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim | 267 |
| 5.2.7 Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)..... | 268 |
| 5.2.8 Permasalahan dan Sasaran..... | 269 |
| 5.2.9 Prasarana dan Sarana Dasar untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat..... | 269 |
| 5.2.10 Prasarana untuk Peningkatan Daya Saing dalam Menjamin Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa..... | 270 |
| 5.2.11 Infrastruktur untuk Mendukung Ketahanan Pangan (irigasi & pengairan, green infrastruktur, prasarana terintegrasi dengan sumber daya alam, hulu-hilir)..... | 271 |
| 5.2.12 Infrastruktur untuk Ketahanan Energi..... | 272 |
| 5.2.13 Ketahanan Infrastruktur dalam Upaya Mitigasi Bencana dan Penanganan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim | 272 |
| 5.2.14 Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) | 273 |
| 5.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN 2014 | 279 |
| BAB 6 BIDANG POLITIK..... | 285 |
| 6.1 SUBBIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN KOMUNIKASI | 286 |
| 6.1.1 Kondisi Umum | 286 |
| 6.1.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014 | 293 |
| 6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014 | 296 |
| 6.2 SUBBIDANG POLITIK LUAR NEGERI | 299 |
| 6.2.1. Kondisi Umum..... | 300 |
| 6.2.2. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014 | 308 |
| 6.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014 | 317 |
| BAB 7 BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN | 319 |
| 7.1. KONDISI UMUM | 319 |

| | |
|--|------------|
| 7.1 PERMASALAHAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 | 324 |
| 7.1.1 Permasalahan..... | 324 |
| 7.1.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2013..... | 331 |
| 7.2 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014 | 333 |
| BAB 8 BIDANG HUKUM DAN APARATUR..... | 339 |
| 8.1 KONDISI UMUM..... | 339 |
| 8.2 PERMASALAHAN DAN SASARAN TAHUN 2014 | 355 |
| 8.2.1 Permasalahan..... | 355 |
| 8.2.2 Sasaran..... | 358 |
| 8.3 ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014 | 359 |
| 8.3.1 Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan..... | 359 |
| 8.3.2 Peningkatan Kinerja Lembaga Penegak Hukum..... | 360 |
| 8.3.3. PENINGKATAN PENGHORMATAN TERHADAP HAM..... | 362 |
| 8.3.4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN..... | 362 |
| 8.3.5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik..... | 363 |
| 8.3.6. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah..... | 365 |
| 8.3.7. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi | 367 |
| BAB 9 BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG | 369 |
| 9.1 KONDISI UMUM..... | 369 |
| 9.1.2 Data dan Informasi Spasial | 374 |
| 9.1.3 Penataan Ruang..... | 377 |
| 9.1.4 Pertanahan | 380 |
| 9.1.5 Perkotaan..... | 383 |
| 9.1.6 Perdesaan..... | 391 |
| 9.1.7 Ekonomi Lokal dan Daerah..... | 396 |
| 9.1.8 Kawasan Strategis | 400 |
| 9.1.9 Kawasan Perbatasan | 404 |
| 9.1.10 Daerah Tertinggal..... | 407 |
| 9.1.11 Kawasan Rawan Bencana | 408 |
| 9.1.12 Desentralisasi Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah..... | 410 |
| 9.1.13 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah | 416 |
| 9.2 PERMASALAHAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN | 422 |
| 9.2.1 Permasalahan..... | 422 |

| | | |
|--|--|------------|
| 9.2.2 | Sasaran..... | 434 |
| 9.3 | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014 | 444 |
| 9.3.1 | Pembangunan Data Dan Informasi Spasial..... | 444 |
| 9.3.2 | Penyelenggaraan Penataan Ruang | 444 |
| 9.3.3 | Pengelolaan Pertanahan..... | 445 |
| 9.3.4 | Pembangunan Perkotaan | 448 |
| 9.3.5 | Pembangunan Perdesaan..... | 451 |
| 9.3.6 | Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Daerah | 452 |
| 9.3.7 | Pengembangan Kawasan Strategis..... | 453 |
| 9.3.8 | Pengembangan Kawasan Perbatasan | 456 |
| 9.3.9 | Pembangunan Daerah Tertinggal..... | 458 |
| 9.3.10 | Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Resiko Bencana | 461 |
| 9.3.11 | Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat Daerah Dan Antardaerah | 463 |
| 9.3.12 | Tata Kelola Dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah..... | 464 |
| BAB 10 BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | | 465 |
| 10.1 | KONDISI UMUM | 465 |
| 10.1.1 | Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan..... | 470 |
| 10.1.2 | Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi..... | 475 |
| 10.1.3 | Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Mineral dan Pertambangan | 476 |
| 10.1.4 | Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup | 478 |
| 10.1.5 | Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan | 480 |
| 10.1.6 | Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan | 482 |
| 10.1.7 | Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | 484 |
| 10.2 | PERMASALAHAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014 | 486 |
| 10.2.1 | Permasalahan..... | 486 |
| 10.2.2 | Sasaran | 491 |
| 10.3 | ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2013 | 494 |
| 10.3.1 | Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan | 494 |
| 10.3.2 | Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi..... | 496 |
| 10.3.3 | Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan | 498 |
| 10.3.4 | Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup | 498 |
| 10.3.5 | Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan | 499 |
| 10.3.6 | Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan | 500 |

| | |
|---|-----|
| 10.3.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim | 501 |
|---|-----|

BAB 11 SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL..... 503

| | |
|--|-----|
| 11.1 KONDISI UMUM | 503 |
| 11.2 PERMASALAHAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN | 511 |
| 11.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN..... | 515 |
| 11.3.1 Perkuatan Perencanaan dan Pembangunan | 515 |
| 11.3.2 Perkuatan Data dan Informasi Statistik..... | 516 |
| 11.3.3 Perkuatan Pengadaan Barang dan Jasa | 519 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|-----|
| TABEL 1.1 PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK | 13 |
| TABEL 1.2 TARGET KINERJA PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2014 | 22 |
| TABEL 1.3 TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PKH TAHUN 2007-2012..... | 49 |
| TABEL 3.2 PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2010 – 2013 | 155 |
| TABEL 3.1 REALISASI PENANAMAN MODAL SEKTOR NONMIGAS 2010-2013 | 165 |
| TABEL 3.2 PERKEMBANGAN KINERJA EKSPOR INDONESIA (2009-2013)..... | 170 |
| TABEL 3.3 PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS (%)..... | 174 |
| TABEL 3.4 REALISASI PENANAMAN MODAL INDONESIA | 176 |
| TABEL 3.5 JUMLAH TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS LAPANGAN PEKERJAAN..... | 177 |
| TABEL 3.6 PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2011-2012..... | 178 |
| TABEL 3.7 INDIKATOR PERBANKAN..... | 185 |
| TABEL 3.8 PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK TAHUN 2009 – 2012..... | 187 |
| TABEL 3.9 KETENAGAKERJAAN, PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN..... | 189 |
| TABEL 3.10 PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN INDONESIA 2012 | 192 |
| TABEL 3.11 PANGSA PASAR PRODUK NEGARA EKSPORTIR DI PASAR AFRIKA, TIMUR, AMERIKA LATIN DAN EROPA TIMUR | 201 |
| TABEL 3.12 SASARAN PERTUMBUHAN INDUSTRI (%)..... | 206 |
| TABEL 4.2 ISU STRATEGISPEMBANGUNAN IPTEK..... | 256 |
| TABEL 5.1 REALISASI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN WARGA TERDAMPAK LUMPUR SIDOARJO STATUS S.D AKHIR TAHUN 2012..... | 268 |
| TABEL 8.1 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN..... | 346 |
| TABEL 8.2 KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP TAHUN 2010 – 2012 | 348 |
| TABEL 8.3 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PELAYANAN PUBLIK | 350 |
| TABEL 8.4 PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS BIROKRASI, SERTA REFORMASI BIROKRASI PADA INSTANSI PEMERINTAH | 352 |
| TABEL 9.1 DISTRIBUSI NILAI PDRB ADHB MENURUT PULAU TAHUN 2005-2011 | 370 |
| TABEL 9.2 PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA TAHUN 2011-2013..... | 398 |
| TABEL 9.3 CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | 407 |
| TABEL 9.4 PENETAPAN NSPK 2010-2012..... | 414 |
| TABEL 9.5 PENETAPAN SPM 2010-2012..... | 417 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|-----|
| GAMBAR 1.1 PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN..... | 47 |
| GAMBAR 2.1 PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PKH TAHUN 2007-2012, DAN RENCANA TARGET TAHUN 2013..... | 115 |
| GAMBAR 3.1 PERKEMBANGAN LAJU INFLASI | 160 |
| GAMBAR 3.2 PERKEMBANGAN INDEKS NILAI TUKAR..... | 163 |
| GAMBAR 3.3 KOMPOSISI PMDN BERDASARKAN SEKTOR..... | 165 |
| GAMBAR 3.4 KOMPOSISI PMA BERDASARKAN SEKTOR..... | 165 |
| GAMBAR 3.5 REALISASI PMDN MENURUT LOKASI..... | 167 |
| GAMBAR 3.6 REALISASI PMA MENURUT LOKASI..... | 167 |
| GAMBAR 3.7 REALISASI PMA MENURUT NEGARA ASAL (%)..... | 167 |
| GAMBAR 3.8 KINERJA FDI 2009-2012..... | 168 |
| GAMBAR 3.9 PERKEMBANGAN EKSPOR NONMIGAS INDONESIA DAN IMPOR DUNIA(2009-2012)..... | 171 |
| GAMBAR 3.10 PERKEMBANGAN PENJUALAN RITEL DAN KEYAKINAN KONSUMEN | 173 |
| GAMBAR 3.11 PERTUMBUHAN PDB NASIONAL DAN INDUSTRI MANUFAKTUR NON MIGAS (DALAM PERSEN) | 175 |
| GAMBAR 3.12 PERANAN SEKTOR MANUFAKTUR DAN KANDUNGAN TEKNOLOGINYA DALAM EKSPOR NONMIGAS (2009-2012) | 202 |
| GAMBAR 3.13 NILAI TAMBAH PRODUK EKSPOR BERDASARKAN KANDUNGAN DOMESTIK DAN IMPOR (%)..... | 202 |
| GAMBAR 3.14 PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISMAN TAHUN 1997-2012..... | 206 |
| GAMBAR 3.15 KETAHANAN (DAYA TAHAN) PEREKONOMIAN NASIONAL..... | 221 |
| GAMBAR 3.16 KETAHANAN (DAYA TAHAN) MIKRO/SEKTOR RIIL..... | 222 |
| GAMBAR 3.17 KERANGKA KEBIJAKAN INVESTASI..... | 226 |
| GAMBAR 3.18 KERANGKA KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI..... | 227 |
| GAMBAR 3.19 KERANGKA KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI | 229 |
| GAMBAR 4.1 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN IPTEK | 241 |
| GAMBAR 4.2 INISIATIF INOVASI 1-747 | 252 |
| GAMBAR 4.3 PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL INDONESIA..... | 255 |
| GAMBAR 5.1 KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG SARANA DAN PRASARANA..... | 260 |
| GAMBAR 6.1 PERKEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2009-2011..... | 286 |
| GAMBAR 6.2 PERBANDINGAN KINERJA ASPEK KEBEBASAN SIPIL, HAK-HAK POLITIK DAN LEMBAGA DEMOKRASI | 288 |
| GAMBAR 6.3 JUMLAH PPID YANG TELAH TERBENTUK..... | 293 |
| GAMBAR 6.4 KERANGKA BERPIKIR SUB BIDANG POLITIK LUAR NEGERI..... | 299 |

| | |
|---|-----|
| GAMBAR 7.1 KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA PEMERINTAH 2014..... | 336 |
| GAMBAR 8.1 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN BIDANG HUKUM DAN APARATUR..... | 340 |
| GAMBAR 9.1 KONTRIBUSI PDRB MENURUT PULAU TAHUN 2011 | 370 |
| GAMBAR 9.2 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT WILAYAH TAHUN 2006-2012 | 371 |
| GAMBAR 9.3 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2011 | 372 |
| GAMBAR 9.4 REALISASI INVESTASI PMA MENURUT LOKASI TAHUN 2012..... | 373 |
| GAMBAR 9.5 FRAMEWORK PENYELENGARAAN PENATAAN RUANG..... | 377 |
| GAMBAR 9.6 TARGET DAN CAPAIAN PEMBUATAN PETA PERTANAHAN TAHUN 2010-2013 | 382 |
| GAMBAR 9.7 TARGET DAN CAPAIAN LEGALISASI ASET TANAH TAHUN 2010-2013 | 382 |
| GAMBAR 9.8 TARGET DAN CAPAIAN INVENTARISASI P4T TAHUN 2010-2013..... | 383 |
| GAMBAR 9.9 TARGET DAN CAPAIAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN 2010-2013..... | 383 |
| PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DI KOTA..... | 384 |
| GAMBAR 9.10 MENURUT TIPOLOGI KOTA TAHUN 2007-2011 (JIWA)..... | 384 |
| KETIMPANGAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR..... | 385 |
| GAMBAR 9.11 MENURUT TIPOLOGI KOTA TAHUN 2010 | 385 |
| GAMBAR 9.12 BANYAKNYA KEJADIAN BENCANA ALAM YANG TERJADI MENURUT TIPOLOGI KOTA TAHUN 2008-2011..... | 387 |
| GAMBAR 9.13 JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENURUT TIPOLOGI KOTA TAHUN 2005-2010..... | 389 |
| GAMBAR 9.14 LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MENURUT TIPOLOGI KOTA TAHUN 2005-2010..... | 390 |
| GAMBAR 9.15 PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN DESA-KOTA TAHUN 2012 | 391 |
| GAMBAR 9.16 PROYEKSI JUMLAH DESA DAN KELURAHAN INDONESIA | 391 |
| GAMBAR 9.17 PERSENTASE PENGANGGURAN DESA-KOTA TAHUN 2005-2012 | 392 |
| GAMBAR 9.18 PERSENTASE APM DESA-KOTA | 393 |
| GAMBAR 9.19 PRESENTASE PENGGUNA LISTRIK PLN, JAMBAN, DAN JALAN BERASPAL DI DESA | 393 |
| GAMBAR 9.20 PERSENTASE KOMPOSISI JUMLAH PENDUDUK KOTA-DESA TAHUN 1960-2012..... | 397 |
| GAMBAR 9.21 UPAH RATA-RATA PEKERJA DI DESA DAN KOTA TAHUN 1997-2011..... | 397 |
| GAMBAR 9.22 PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DI KAWASAN BATAM TAHUN 2008-JUNI 2012 | 403 |
| GAMBAR 9.23 JENIS INVESTASI SWASTA DI KAWASAN BATAM TAHUN 2008- JUNI 2012..... | 403 |
| GAMBAR 9.24 INTENSITAS KEJADIAN BENCANA TAHUN 2002-2011..... | 409 |
| GAMBAR 9.25PEMEKARAN DAERAH PASCA DESENTRALISASI (1999-2013)..... | 411 |
| GAMBAR 9.26 JUMLAH PNS PUSAT DAN DAERAH 2005 – 2011..... | 418 |
| GAMBAR 9.27 REKAPITULASI PEMBATALAN PERDA 2002-2012..... | 419 |
| GAMBAR 9.28 KOMPOSISI PENDAPATAN DAERAH 2006-2012 | 419 |
| GAMBAR 9.29 KOMPOSISI BELANJA DAERAH 2007-2012..... | 421 |
| GAMBAR 10.1 KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN SDA DAN LH | 467 |
| GAMBAR 11.1 PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI LELANG ELEKTRONIK TAHUN 2010-2012..... | 511 |

BAB 1

KEBIJAKAN PENGARUSTAMAAN DAN LINTAS BIDANG

1.1 Pengarustamaan

1.1.1 Pengarustamaan Pembangunan Berkelanjutan

1.1.1.1 Kondisi Saat ini

Pembangunan berkelanjutan merupakan perwujudan proses pembangunan yang menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan saat ini maupun di masa mendatang. Dalam mewujudkan keberlanjutan tersebut, diperlukan tiga kunci dasar/ pilar utama pembangunan, yang terpadu dan bersinergi satu dengan lainnya, yakni keberlanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di samping itu, untuk memperkuat sinergi ketiga pilar tersebut, diperlukan penguatan kelembagaan yang meliputi penguatan kerangka kerja kelembagaan dan kemampuan lembaga/ institusi-institusi yang ada dalam melaksanakan kegiatan, sebagai jaminan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan telah lama diterapkan, ditandai pada tahun 1997 dengan disusunnya *National Sustainable Development Strategy (Agenda 21)*. Dalam dokumen tersebut disebutkan rekomendasi strategi untuk sektor-sektor terkait dalam menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2020. Sebagai tindak lanjut konsep dan implementasi, pembangunan berkelanjutan dirasa penting dan terus untuk menjadi dasar pemikiran dan semangat pembangunan, dengan ditetapkannya kebijakan pengarusutamaan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009, RPJMN 2010-2014 dan Rencana Kerja Tahunannya.

Dalam RKP 2013, masih ditekankan strategi pembangunan yang *pro-growth, pro-poor, pro-job, dan pro-environment* menuju pembangunan yang berkelanjutan. Upaya untuk melaksanakan strategi tersebut adalah dengan mengembangkan konsep/ model pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan atau disebut sebagai *green economy*, yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Dalam

pemahaman konsep *green economy*, kesejahteraan masyarakat diarahkan untuk tidak menurun bahkan meningkat secara terus menerus dalam hal kualitas lingkungan fisik dan sosial. Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa paradigma *green economy* merupakan pembangunan yang berlandaskan pendekatan efisiensi sumberdaya dengan penekanan kepada internalisasi biaya deplesi dan degradasi lingkungan, usaha untuk memerangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja yang layak, dan memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi (Presiden RI dalam pertemuan *Special Session on Governing Council* ke-11 UNEP di Bali tahun 2010). Beberapa inisiatif untuk menerapkan *green economy*/ ekonomi hijau di Indonesia antara lain melalui penerapan efisiensi energi, pemakaian energi terbarukan, penerapan mekanisme pembangunan bersih, subsidi dan pajak lingkungan, peningkatan transportasi massal yang rendah karbon, penerapan penangkapan ikan berkelanjutan, penerapan pola pertanian berkelanjutan, serta pemanfaatan hasil hutan yang lestari.

Upaya lainnya, Indonesia telah mensinergikan tujuan pembangunan berkelanjutan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium (*Millennium Development Goals*-MDGs) pada tahun 2015. Indonesia telah menerapkan pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan dan setiap tahun melaporkan kemajuan capaiannya. Untuk memastikan pencapaian tujuan MDG, Indonesia juga telah menyusun Roadmap MDG 2010-2015. Selain itu, untuk mempercepat pencapaian tujuan MDGs, Pemerintah Pusat juga membantu Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Aksi Daerah pencapaian MDGs (RAD MDGs) dan melakukan review dan memberikan *feed back* atas pemantauan pelaksanaan RAD MSGs tersebut. Langkah-langkah ini akan memungkinkan adanya keselarasan dalam pembangunan sosial ekonomi dan lingkungan hidup. Pada aspek lingkungan hidup, Indonesia juga telah menyusun langkah-langkah konkrit antara lain diundangkannya Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memerlukan perangkat hukum turunan untuk operasionalisasi aturan-aturan yang ada. Selain itu, untuk menurunkan dampak perubahan iklim telah disusun Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang disahkan dengan landasan hukum berupa Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011, dan diikuti dengan penyusunan

Rencana Aksi Daerah (RAD) GRK yang disahkan dengan Peraturan Gubernur (sampai dengan Desember 2012, telah disahkan 29 Peraturan Gubernur terkait dengan RAD-GRK). Untuk bidang kehutanan, Indonesia telah menyusun Strategis Nasional *Reduction Emission from Forest Degradation and Deforestation* (REDD+). Sementara, untuk pelestarian lingkungan hidup, Indonesia juga telah memiliki *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2003-2030 yang penerapannya masih perlu diperkuat dan ditingkatkan, terutama untuk disesuaikan dengan isu-isu baru yang berkembang. Pada tahun 2013 dilakukan review IBSAP untuk pemutakhiran dokumen IBSAP tersebut, untuk menyesuaikan target di dalamnya, sesuai dengan kesepakatan global (*Aichi Target*) dan isu-isu lingkungan yang lebih kontekstual dengan situasi saat ini.

Dalam tataran internasional, Indonesia berperan aktif dalam forum internasional yang membahas implementasi pembangunan berkelanjutan seperti pertemuan-pertemuan para pihak untuk tiga konvensi hasil pertemuan tingkat tinggi bumi di Rio de Janeiro (*United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC*, *United Nations Convention on Biological Diversity/UNCBD*, dan *United Nations Convention to Combat Desertification/UNCCD*) serta berbagai pertemuan terkait lainnya. Indonesia berperan aktif pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan pada tanggal 13-22 Juni 2012 di Brasil (Rio+20), dengan memberikan masukan posisi Indonesia di dalam *zero draft United Nations Conference on Sustainable Development/UNCSD*. Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI (dan didampingi oleh sejumlah menteri) hadir dan menyampaikan pernyataan politik, yang memfokuskan pada isu-isu: (1) penerapan ekonomi hijau di Indonesia (*green economy*: pembangunan berkelanjutan dan penanggulangan kemiskinan); (2) kelembagaan (penunjang pembangunan berkelanjutan-*Institutional Framework for Sustainable Development/IFSD*); dan (3) penerapan/pelaksanaan 20 tahun KTT Bumi di Indonesia. Dalam KTT tersebut disepakati Dokumen *The Future We Want* yang menjadi arahan bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di tingkat global, regional, dan nasional. Dokumen memuat kesepahaman pandangan terhadap masa depan yang diharapkan oleh dunia (*common vision*) dan penguatan komitmen untuk menuju pembangunan berkelanjutan (*renewing political commitment*).

Adapun isi dari dokumen *The Future We Want* adalah tiga isu utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, yaitu: (i) *Green Economy in the context of sustainable development and poverty eradication*, (ii) pengembangan kerangka kelembagaan pembangunan berkelanjutan tingkat global (*Institutional Framework for Sustainable Development*), serta (iii) kerangka aksi dan instrumen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (*Framework for Action and Means of Implementation*). Kerangka aksi tersebut termasuk penyusunan *Sustainable Development Goals (SDGs) post-2015* yang mencakup tiga pilar pembangunan berkelanjutan secara inklusif, yang terinspirasi dari penerapan *Millennium Development Goals (MDGs)*. Kebijakan Pemerintah Indonesia “*pro-growth, pro-poor, pro-job, pro-environment*” pada dasarnya telah selaras dengan dokumen *The Future We Want*. Presiden RI menekankan bahwa untuk mewujudkan tujuan utama pembangunan berkelanjutan yaitu pengentasan kemiskinan, diperlukan tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi, namun pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pemerataan atau “*Sustainable Growth with Equity*”.

1.1.1.2 Permasalahan dan Sasaran

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program pembangunannya. Namun demikian, sampai saat ini masih diperlukan sistem dan mekanisme yang efektif untuk melakukan pengintegrasian isu pembangunan berkelanjutan tersebut ke dalam implementasi program-program pembangunan secara terpadu dan terarah.

Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan perlu diaplikasikan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, untuk mengurangi pembangunan yang bertumpu pada peningkatan perekonomian yang didominasi penggunaan sumber daya alam secara berlebihan, penggunaan teknologi yang belum efisien dan tidak ramah lingkungan, yang akan menyebabkan turunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dari sisi lingkungan, walaupun sudah dilakukan berbagai upaya untuk menanggulangi kerusakan lingkungan hidup, pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan hidup masih terus terjadi. Untuk itu, pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang/ sektor dengan mengintegrasikan pengelolaan dampak terhadap lingkungan masih perlu terus dilakukan.

Permasalahan lain yang dihadapi dari sisi lingkungan adalah belum adanya indikator/ ukuran secara nasional yang dipakai untuk mengetahui perkembangan kondisi kualitas lingkungan di Indonesia. Saat ini, BPS dan KLH telah menyusun Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan data-data serta konsep indikator sudah disusun. Namun demikian, Indeks yang bersifat komposit tersebut masih perlu dipertajam dan disederhanakan agar dapat dan mudah dilaksanakan, dimonitor dan dievaluasi di lapangan. Sebagai upaya nyata, pada tahun 2014 akan dilakukan penyempurnaan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, yang disepakati oleh para pemangku kepentingan sehingga dapat digunakan untuk pengukuran pencapaian pembangunan lingkungan hidup dalam RPJMN 2015-2019 yang akan datang.

Banyaknya pemangku kepentingan dalam pembangunan berkelanjutan mengharuskan adanya koordinasi serta sinergi yang baik antar berbagai pihak tersebut. Setiap pihak mempunyai peran dan fungsi dalam menggerakkan subsistem yang membentuk sistem pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, konsep pembangunan berkelanjutan harus bersifat transparan dan membuka akses seluruh pihak (masyarakat, swasta dan pemerintah) untuk dapat berperan aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan itu. Pemerintah dapat berperan memberikan arah kebijakan, standar, manual, serta kerangka kebijakan penunjang lainnya yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan.

Memperhatikan kondisi dan permasalahan di atas, sasaran pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2014 adalah: (1) Meningkatnya pelaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; (2) Terpadunya pelaksanaan program-program pembangunan yang mengarah kepada perwujudan pembangunan berkelanjutan, yaitu: MDGs, Ekonomi Hijau/*Green Economy*, serta Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam perencanaan pembangunan; (3) Ditetapkannya suatu instrumen untuk mengukur pencapaian pembangunan yang berkelanjutan; serta (4) Terwujudnya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparat pemerintah di Indonesia dalam penerapan pembangunan yang berkelanjutan.

1.1.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai arahan RPJMN 2010-2014, prinsip pengarusutamaan dilakukan dengan cara yang terstruktur dengan kriteria sebagai berikut: (1) kegiatan yang dilakukan merupakan upaya integral dalam kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan; (2) kegiatan tidak mengimplikasikan adanya tambahan pendanaan (investasi) yang signifikan karena berdasarkan koordinasi dan sinergi; (3) pembangunan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi sosial kemasyarakatan, kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya; dan (4) pengarusutamaan terutama dilakukan pada sektor yang memberikan dampak besar terhadap kualitas lingkungan dan di wilayah/daerah yang rawan kerusakan lingkungan, diprioritaskan pada kegiatan strategis pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan serta keadilan dan keberlanjutan sosial.

Sebagai kelanjutan dari capaian yang sudah diperoleh dan adanya permasalahan yang dihadapi, arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan tahun 2014 adalah:

1. Memantapkan proses internalisasi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam tiga pilar utama pembangunan berkelanjutan.
2. Menjabarkan hal-hal konkrit dalam kerangka kelembagaan terutama untuk memastikan peran serta berbagai pemangku kepentingan dalam kerangka kelembagaan yang tepat dan dapat mempercepat internalisasi tiga prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Menyepakati ukuran-ukuran untuk pembangunan berkelanjutan yang tepat dan dapat digunakan baik di tingkat nasional maupun daerah sehingga prinsip pembangunan berkelanjutan dapat berjalan nyata di lapangan.

1.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1.1.2.1 Kondisi Umum

Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi prasyarat penting dalam mencapai sasaran pembangunan nasional yakni mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten juga akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di lingkungan internasional. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan

berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, pemerintah telah menerbitkan Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013. Salah satu kebijakan yang telah dan sedang dikembangkan melalui Inpres dimaksud adalah pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Hingga Januari 2013, pencaangan dan pembangunan zona integritas telah dilakukan di 109 instansi, terdiri dari 28 K/L, 1 Sekretariat Lembaga Negara, 11 Provinsi, dan 69 Kabupaten/Kota. Di samping pengembangan zona integritas, peningkatan implementasi pakta integritas juga terus diperluas dimana hingga April 2012 telah dilakukan penandatanganan dokumen pakta integritas di 34 K/L, 5 Lembaga Tinggi Negara, 22 LPNK, 5 Lembaga Setingkat Menteri, 33 provinsi, dan 458 kabupaten/kota. Selain itu, saat ini juga sedang dikembangkan pondasi Sistem Integritas Nasional (SIN) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan target pelembagaan/implementasi SIN di instansi-instansi pemerintah.

Upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih juga dilakukan melalui penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Terkait dengan hal tersebut, hingga Desember 2012, 86 K/L dan 524 Pemda telah menyusun peraturan tentang SPIP. Selain itu, BPKP sebagai koordinator Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) telah menerbitkan 41 pedoman teknis terkait SPIP. Selanjutnya, untuk meningkatkan kapasitas SDM APIP, BPKP telah melaksanakan diklat SPIP bagi 12.962 peserta dari K/L/Pemda, dan menyelenggarakan bimbingan dan konsultasi teknis SPIP kepada 580 instansi, baik K/L maupun pemerintah daerah.

Upaya pencegahan KKN juga dilakukan melalui penerapan

sistem *e-procurement* nasional. Hingga Januari 2013 telah terbentuk 549 unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang tersebar di 33 provinsi, melayani 731 instansi dan 284.315 penyedia terdaftar. Jumlah paket yang tendernya menggunakan *e-procurement* mencapai 91.088 paket dengan nilai Rp150,224 triliun. Penggunaan *e-procurement* dalam pengadaan barang/jasa telah menghemat anggaran negara sebesar 11,62 persen. Upaya ini disertai dengan penguatan SDM pengadaan melalui sertifikasi ahli pengadaan, yang hingga Januari 2013 telah mencapai 206.274 ahli bersertifikat.

Di bidang pelayanan publik, untuk memberikan kepastian penyediaan pelayanan bagi masyarakat, KemenPAN & RB telah menerbitkan PermenPAN & RB No. 36/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Selain itu, sebagai tindak lanjut diterbitkannya UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik, telah terbit PP Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan PermenPAN & RB No. 38/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penerapan PTSP juga terus meningkat, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Saat ini telah terbentuk 444 unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang terdiri dari 18 PTSP provinsi, 330 PTSP kabupaten dan 96 PTSP kota. Selain itu, untuk memantapkan kelembagaan PTSP, saat ini sedang disusun Rancangan Perpres tentang kelembagaan PTSP.

Untuk meningkatkan kapasitas birokrasi, terus dilakukan pembenahan baik dari sisi kelembagaan maupun ketatalaksanaan. Dari sisi kelembagaan, telah dibentuk Tim Penataan Organisasi K/L dengan Keputusan Menteri PAN dan RB Nomor 99/2012, yang bertugas menyiapkan bahan pertimbangan kepada pemerintah untuk penataan organisasi K/L dan menyusun program restrukturisasi organisasi pemerintah pusat. Selain itu, dalam rangka penataan organisasi LPNK telah dan sedang dilakukan: (a) Penyusunan Rancangan Perpres tentang Lembaga Pemerintah Non Kementerian; dan (b) Rancangan Perpres tentang Pembubaran 10 (Sepuluh) Lembaga Non Struktural (LNS) yang pembentukannya dengan Peraturan Presiden/Keputusan Presiden.

Dari segi ketatalaksanaan birokrasi, terus dilakukan upaya pembenahan, diantaranya melalui perbaikan *standard operating procedure* (SOP), pengembangan sistem elektronik (*e-government*), dan pengembangan sistem manajemen kearsipan modern berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Terkait dengan pengembangan *e-government*, saat ini sedang disusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang *e-government* yang bertujuan untuk mengatur *e-government* secara nasional dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas, keamanan dan kemandirian. RPP ini akan menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam penyusunan kebijakan, penyediaan infrastruktur, penyediaan dan pengembangan aplikasi, pengaturan data dan informasi, pengembangan SDM, serta penyelenggaraan kelembagaan terkait *e-government*.

Terkait dengan manajemen kearsipan, telah diterbitkan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang kemudian dioperasionalkan melalui 5 (lima) Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang meliputi tentang Jadwal Retensi Arsip Barang Milik Negara; Penyelenggaraan Pengelolaan Arsip Dinamis; Penyerahan Arsip Statis Bagi Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Perseorangan; Pedoman Pengelolaan Kearsipan Pada Lembaga Negara; dan Pembuatan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip.

Dari sisi SDM aparatur, RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini sedang dibahas di DPR, nantinya diharapkan dapat menjadi landasan pembenahan secara mendasar terhadap manajemen kepegawaian berbasis merit. Pembenahan ini juga diperkuat dengan penerbitan beberapa peraturan, yakni PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS; PP Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya; Permenpan dan RB Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya; dan Permenpan dan RB Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Assesor SDM Aparatur dan Angka Kreditnya. Selain itu, dalam rangka penataan PNS telah dilaksanakan diklat analisis kepegawaian dengan peserta lebih dari 4.125 peserta dari K/L dan pemda.

Dalam rangka melihat perkembangan implementasi

kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik pada kementerian/lembaga (K/L), pada awal tahun 2013 Bappenas menyampaikan edaran kepada seluruh K/L agar dapat menyampaikan data dan informasi kemajuan pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik di masing-masing instansi. Hingga awal Mei 2013, terdapat 51 K/L atau kurang lebih 64 % dari seluruh K/L telah menyampaikan laporan perkembangan di masing-masing instansinya, yang terdiri dari 5 Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, 22 Kementerian, 21 LPNK, dan 3 LNS. Persentase implementasi kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik, yang telah dilaksanakan oleh K/L telah mencapai 63%. Angka ini meningkat dibandingkan dengan perkembangan pada tahun 2010 yang mencapai 52%. Adapun rincian perkembangan untuk masing-masing sasaran sebagai berikut:

- a. Untuk sasaran penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah sebesar 77%, atau meningkat jika dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 60%. Indikator yang diukur antara lain, penegakan disiplin, penerapan pakta integritas, kepatuhan penyampaian LHKPN, penerapan SPIP, penerapan e-procurement, dan tindaklanjut hasil temuan.
- b. Untuk sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebesar 60%, atau meningkat jika dibandingkan tahun 2010 yang baru mencapai 43%. Indikator yang diukur antara lain, penerapan standar pelayanan, penerapan maklumat pelayanan, dan penerapan manajemen pengaduan.
- c. Untuk sasaran peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah sebesar 53%, atau meningkat jika dibandingkan tahun 2010 yang mencapai 50%. Indikator yang diukur antara lain penataan kelembagaan, penyusunan SOP utama, manajemen SDM aparatur, dan penerapan SAKIP.

Perkembangan capaian tersebut menunjukkan bahwa komitmen K/L dalam mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik terus meningkat. Namun demikian, capaian tersebut harus terus ditingkatkan, baik kuantitas maupun kualitasnya sehingga diharapkan pada tahun 2014 seluruh K/L telah sepenuhnya mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal tersebut

1.1.2.2 Permasalahan dan Sasaran

sekaligus sebagai salah satu upaya dalam rangka memperluas dan meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.

Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN masih menghadapi beberapa persoalan, diantaranya belum terbentuknya sistem pengawasan nasional yang kuat dan terintegrasi, penerapan sistem pengendalian internal belum berjalan maksimal, masih rendahnya kapasitas aparat pengawasan dan para pengelola keuangan negara, proses pengadaan barang dan jasa yang belum sepenuhnya menerapkan *e-procurement*, dan belum seluruh K/L/Pemda yang menerapkan pakta integritas.

Dalam hal pelayanan publik, permasalahan yang muncul diantaranya adalah profesionalisme SDM pelayanan masih perlu ditingkatkan, pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pelayanan publik masih rendah, belum adanya kesepahaman tentang kelembagaan PTSP di daerah, Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum dilaksanakan secara konsisten; dan belum terselenggaranya sistem pengaduan yang efektif.

Terkait dengan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, beberapa permasalahan yang muncul diantaranya adalah penataan kelembagaan birokrasi belum berjalan maksimal, sistem ketatalaksanaan instansi pemerintah masih belum efektif dan efisien, belum terselesaikannya beberapa peraturan terkait manajemen kepegawaian, serta masih rendahnya kinerja pegawai dan kinerja birokrasi dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

Untuk itu, sasaran kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan dalam bidang hukum dan aparatur, yakni: (1) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebasKKN; (2) Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (3) Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sasaran tersebut, diuraikan lebih lanjut pada RKP 2014 Bab VIII Bidang Hukum dan Aparatur.

Untuk mendukung tercapainya sasaran-sasaran tersebut di atas, maka target kinerja yang perlu diwujudkan oleh K/L/Pemda adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, yang ditandai dengan, antara

- lain: (a) Meningkatnya persentase penegakan disiplin PNS di seluruh instansi pemerintah; (b) Makin meningkatnya penerapan pakta integritas bagi pejabat pemerintah; (c) Meningkatnya Kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); (d) Meningkatnya prosentase pelaporan gratifikasi; (e) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan SPIP; (f) Meningkatnya penerapan *e-procurement* dalam pengadaan barang dan jasa; (g) Meningkatnya persentase tindak lanjut atas hasil pemeriksaan BPK; (h) Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran; dan (i) Meningkatnya persentase tindak lanjut atas pengaduan masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang ditandai dengan, antara lain: (a) Meningkatnya persentase penerapan Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; (b) Meningkatnya persentase penerapan Maklumat Pelayanan pada unit pelayanan publik; (c) Meningkatnya jumlah Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama dan investasi; (d) Meningkatnya persentase penerapan manajemen pengaduan yang efektif pada unit penyelenggara pelayanan publik; (e) Tersusun dan terlaksananya rencana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan (f) terlaksananya evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik.
 3. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, yang ditandai dengan, antara lain: (a) Meningkatnya persentase kelembagaan dan tatalaksana instansi pemerintah yang proporsional, efektif dan efisien; (b) Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang telah menyusun SOP utama; (c) Meningkatnya kualitas penerapan manajemen SDM (transparan dan berbasis merit/kompetensi); (d) Tersusunnya rencana penerapan *e-government*; (e) Meningkatnya persentase penerapan manajemen kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK; dan (f) Meningkatnya persentase penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain)

1.1.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk mendorong implementasi kebijakan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik maka akan ditempuh strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan sosialisasi dan asistensi kebijakan nasional tatakelola pemerintahan yang baik;

2. Pengintegrasian implementasi kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik dalam sistem perencanaan dan penganggaran;
3. Pengembangan sistem *reward and punishment* atas implementasi kebijakan tatakelola pemerintahan yang baik;
4. Peningkatan monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan pengarusutamaan tatakelola pemerintahan yang baik.

TABEL 1.1
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN
TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

| No. | Isu/Kebijakan Nasional | Kebijakan Instansi dalam Rencana Kerja K/L 2014 | Indikator di setiap instansi | Capaian 2010 | Capaian 2012 | Target Rencana Kerja K/L 2014 |
|--|---|--|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 1. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN | | | | | | |
| 1.1 | Penegakan disiplin PNS di seluruh instansi pemerintah | Penegakan peraturan mengenai disiplin PNS | Sistem penegakan disiplin yang efektif | 65% | 66% | 100% |
| | | | % Pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi | 84% | 78% | 100% |
| 1.2 | Penerapan pakta integritas bagi pejabat pemerintah | Penerapan pakta integritas bagi pejabat Eselon I, II, dan III | % pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas | 58% | 98% | 100% |
| 1.3 | Kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) | Mewajibkan pejabat untuk melaporkan LHKPN | % pejabat yang telah melaporkan LHKPN | 72% | 96% | 100% |
| 1.4 | Kebijakan anti korupsi | Mewajibkan pelaporan gratifikasi | Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi | 12% | 26% | 100% |
| 1.5 | Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) | Penerapan sistem pengendalian internal yang efektif | Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif | 26% | 72% | 100% |
| 1.6 | Pengembangan Sistem <i>e-Procurement</i> Nasional | Penerapan <i>e-procurement</i> dalam pengadaan barang dan jasa | % pengadaan menggunakan <i>e-procurement</i> | 40% | 90% | 75% |
| 1.7 | Tindak lanjut hasil | Peningkatan tindak | % temuan yang | 91% | 90% | 100% |

| No. | Isu/Kebijakan Nasional | Kebijakan Instansi dalam Rencana Kerja K/L 2014 | Indikator di setiap instansi | Capaian 2010 | Capaian 2012 | Target Rencana Kerja K/L 2014 |
|---|--|--|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| | pemeriksaan BPK | lanjut atas temuan hasil pemeriksaan | ditindaklanjuti | | | |
| 1.8 | Akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara | Peningkatan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan pelaporannya | Opini BPK atas LK K/L | 63% WTP | 77% WTP | 100% WTP |
| 1.9 | Pengaduan masyarakat | Tindak lanjut pengaduan masyarakat | Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif | 60% | 74% | 100% |
| | | | % Penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan masyarakat | 77% | 80% | 100% |
| 2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | | | | |
| 2.1 | Penerapan Standar Pelayanan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik | Penerapan Standar Pelayanan Publik untuk seluruh unit penyelenggara pelayanan publik | % unit penyelenggara pelayanan publik yang sudah menerapkan Standar Pelayanan | 51% | 64% | 100% |
| 2.2 | Penerapan Maklumat Pelayanan pada unit pelayanan publik | Menerapkan maklumat pelayanan untuk unit pelayanan publik | % unit pelayanan publik yang sudah menerapkan maklumat pelayanan | 42% | 47% | 100% |
| 2.3 | Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk pelayanan utama dan investasi | Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Pemerintah Daerah menerapkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)/One Stop Services (OSS) | 74% | 83% | 100% |
| 2.4 | Penerapan Manajemen Pengaduan | Penerapan manajemen pengaduan yang efektif pada unit penyelenggara pelayanan publik | % unit pelayanan publik yang menerapkan manajemen pengaduan yang efektif | 56% | 77% | 100% |
| 2.5 | Percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik | Menyusun rencana percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dan melaksanakannya sesuai batas waktu yang ditetapkan | Tersusunnya rencana peningkatan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik | 44% | 64% | 100% |
| | | | Terlaksananya rencana peningkatan kualitas | 42% | 64% | 100% |

| No. | Isu/Kebijakan Nasional | Kebijakan Instansi dalam Rencana Kerja K/L 2014 | Indikator di setiap instansi | Capaian 2010 | Capaian 2012 | Target Rencana Kerja K/L 2014 |
|---|--|---|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| | | oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pelayanan publik | pelayanan publik sesuai batas waktu yang ditetapkan | | | |
| 2.6 | Pelaksanaan evaluasi dan penilaian terhadap kinerja pelayanan publik | Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang ada | Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik | 33% | 60% | 100% |
| | | | % Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang mendapat penilaian baik | 16% | 51% | 90% |
| 3. Peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi | | | | | | |
| 3.1 | Penataan kelembagaan instansi pemerintah | Melakukan restrukturisasi organisasi dan tata kerja instansi untuk rightsizing di dasarkan visi, misi, strategi dan analisis obyektif, serta tupoksi. | % Tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien | 42% | 46% | 100% |
| 3.2 | Penataan ketatalaksanaan instansi pemerintah | Penyederhanaan proses bisnis dan penyusunan SOP utama | % SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana | 72% | 84% | 100% |
| 3.3 | Pemantapan kualitas manajemen SDM | Penerapan manajemen SDM yang berkualitas (transparan dan berbasis merit/kompetensi) | Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan | 56% | 64% | 100% |
| | | | Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur | 28% | 42% | 100% |
| | | | Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan | 40% | 40% | 100% |
| | | | Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi | 33% | 32% | 100% |
| | | | Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan <i>reward and punishment</i> | 47% | 76% | 100% |

| No. | Isu/Kebijakan Nasional | Kebijakan Instansi dalam Rencana Kerja K/L 2014 | Indikator di setiap instansi | Capaian 2010 | Capaian 2012 | Target Rencana Kerja K/L 2014 |
|-----|---|--|--|--------------|--------------|-------------------------------|
| 3.4 | Pengembangan dan penerapan <i>e-government</i> | Pengembangan dan penerapan <i>e-government</i> | Tersusunnya rencana penerapan <i>e-government</i> yang konkrit dan terukur | 51% | 50% | 100% |
| 3.5 | Sistem kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK | Penerapan manajemen kearsipan dan dokumentasi berbasis TIK | Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK | 51% | 34% | 100% |
| 3.6 | Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur | Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah | % penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain) | 67% | 68% | 100% |

1.1.3 Pengarustaman Gender

1.1.3.1 Kondisi Umum

Pembangunan di berbagai bidang selayaknya memberikan akses dan manfaat yang adil dan setara bagi perempuan dan laki-laki, serta perempuan dan laki-laki sama-sama turut mempunyai andil, dan partisipasi dalam proses pengendalian pembangunan. Namun, masih terdapat kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal perolehan akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kontrol terhadap sumber daya pembangunan. Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menerapkan strategi pengarusutamaan gender (PUG) di setiap bidang pembangunan. PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang) gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang. Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

Peranti analisis yaitu Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway – GAP*) diperlukan dalam melakukan analisis gender terkait pelaksanaan PUG pada perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Hasil analisis tersebut digunakan dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) di tingkat pusat dan daerah guna terciptanya pengalokasian sumber daya pembangunan yang lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberikan

manfaat kepada perempuan dan laki-laki.

Dalam rangka mempercepat pelaksanaan pengarusutamaan gender, maka perspektif gender tidak hanya diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan tetapi juga penganggaran. Inisiatif ini dimulai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Tim Pengarah dan Tim Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Di samping itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bekerja sama dengan Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) telah menyusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.02/2009, tentang Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2010.

Selanjutnya, PMK tersebut diperbarui dengan PMK No. 93/PMK.02/2011 dan PMK No. 112/PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang mencantumkan bahwa ARG diterapkan di 28 K/L dan 10 provinsi pada T.A. 2012; dan di 34 K/L dan 20 Provinsi pada T.A. 2013. Keberhasilan penerapan pengarusutamaan gender (PUG) di 28 K/L dan 10 provinsi pada T.A 2012 itu disebabkan oleh semakin meningkatnya komitmen dan pemahaman K/L.

Keberhasilan peningkatan kesetaraan gender tersebut dapat diukur dengan melihat indikator *outcome*, antara lain Indeks Pembangunan Gender (IPG) (*Gender-related Development Index/GDI*) dan indikator *Gender Empowerment Measurement* (GEM) atau Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

IPG secara nasional meningkat dari sebesar 68,7 pada tahun 2005 menjadi sebesar 72,77 pada tahun 2011 (KPP&PA-BPS, 2012), sedangkan IDG meningkat dari sebesar 63,90 pada tahun 2005 menjadi sebesar 67,80 pada tahun 2011 (KPP&PA-BPS, 2012). Namun dalam perkembangannya, IPG selalu menunjukkan posisi lebih rendah dibandingkan IPM. Besaran rasio yang diperoleh berdasarkan perbandingan antara IPG dengan IPM pada kisaran 93 persen. Hal ini dapat dimaknai, meski IPG memperlihatkan perkembangan yang selalu meningkat selama periode 2005-2011, tetapi kesenjangan gender masih terjadi. Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kapabilitas dasar penduduk melalui berbagai kebijakan pembangunan di

berbagai bidang kehidupan sehingga gap yang terjadi antara kapabilitas dasar laki-laki dan perempuan dapat diperkecil jaraknya. Keberhasilan upaya peningkatan kapabilitas dasar penduduk pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan angka IPG.

Dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan tersebut, beberapa hasil yang telah dicapai di berbagai bidang dengan rincian masing-masing bidang diuraikan sebagai berikut:

1. Di bidang pendidikan pada tahun 2011, antara lain dapat dilihat dari Indeks Paritas Gender, yang merupakan rasio APM perempuan terhadap APM laki-laki. Pada tahun 2011, Indeks Paritas Gender APM pada tingkat sekolah dasar termasuk Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah sebesar 98 persen; di tingkat sekolah menengah pertama termasuk Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) sebesar 97 persen; dan di tingkat sekolah menengah atas termasuk Madrasah Aliyah (SMA/MA) sebesar 85 persen. Angka-angka pencapaian indeks ini mendekati angka 100 persen yang berarti menunjukkan semakin meratanya akses terhadap pendidikan, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selain itu, pencapaian pengarusutamaan gender di bidang pendidikan juga dapat dilihat oleh beberapa hal, yaitu: (1) bantuan peningkatan kapasitas PUG Pokja Gender di 33 provinsi dan kabupaten dalam bentuk *workshop* ARG dan sinkronisasi lintas Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD); (2) bantuan peningkatan kapasitas PPRG di seluruh unit utama Kemendikbud sejak tahun 2010-2012; (3) bantuan peningkatan kapasitas PPRG kelembagaan kepada Pusat Studi Wanita/Gender (PSW/G) yang bertujuan untuk penguatan kelembagaan internal, pendampingan kabupaten/kota, dan *trafficking*; (4) bantuan langsung ke lembaga pendidikan tentang pendidikan keluarga berwawasan gender melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), majelis taklim, dan kursus *life skill*; serta (5) bimbingan teknis monitoring dan evaluasi oleh tim pakar.
2. Di bidang kesehatan, upaya peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan antara lain ditandai dengan: (1) meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih dari 81,25 persen pada tahun 2011 (Susenas, 2011) menjadi 83,1 persen pada tahun 2012 (SDKI, 2012); serta (2) meningkatnya persentase ibu

hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan keempat/K4) dari 88,27 persen pada tahun 2011 (Profil Kesehatan, 2011) menjadi sebesar 90,2 persen pada tahun 2012 (SDKI, 2012).

3. Di bidang politik dan pengambilan keputusan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara PP dan PA tentang Pedoman PPRG di Kementerian PAN dan RB; Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada Kemenko Polhukam; serta Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum; serta ditetapkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tersebut disebutkan bahwa dalam pendaftaran Partai Politik sebagai calon dalam pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dipersyaratkan memuat paling sedikit tiga puluh persen keterwakilan perempuan. Apabila nama-nama calon dalam daftar bakal calon tersebut disusun berdasarkan nomor urut, maka disyaratkan bahwa setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon.

Di samping itu, berbagai upaya yang juga telah dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan pada tahun 2011-2012, antara lain telah ditetapkannya: (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 93 Tahun 2011, yang kemudian diperbaharui dengan PMK No. 112/PMK.02/2012, tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang di dalamnya mengatur tentang anggaran responsif gender di kementerian/lembaga; (2) Naskah Akademis RUU tentang Kesetaraan Gender, yang pada perkembangan selanjutnya, RUU tentang Kesetaraan Gender telah diambil alih menjadi hak RUU inisiatif DPR RI; dan (3) Ditandatanganinya Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG (yang selanjutnya disebut dengan Stranas PPRG) pada tahun 2012 sebagai Surat Edaran oleh 4 K/L selaku Tim Penggerak PPRG, yaitu Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunan Stranas

PPRG tersebut dikoordinasikan oleh Bappenas, dan disusun bersama-sama dengan 3 K/L Tim Penggerak PPRG lainnya. Dengan adanya Stranas PPRG ini, diharapkan pelaksanaan PUG dalam tataran siklus pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah menjadi lebih terarah, sistematis dan sinergis serta berkelanjutan.

Dalam rangka perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, telah dilakukan upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan meliputi 7 (tujuh) kebijakan, dan dibentuknya lembaga-lembaga pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan. Selain itu, dalam rangka perlindungan tenaga kerja perempuan, pada tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Masyarakat Yang Akan Menjadi Calon dan Purna Tenaga Kerja Indonesia.

Di samping itu, pada saat ini sedang disusun Peraturan Menteri Negara PP dan PA tentang Kebijakan Perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan (*putting-out system*), dan Modul Panduan Fasilitator Penguatan Mental Calon TKI Perempuan. Modul tersebut akan dimanfaatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dan Kementerian Luar Negeri melalui *citizen service*.

Dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang telah terbentuk: Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Pusat dengan 6 Sub Gugus Tugas yang melibatkan 19 kementerian/lembaga terkait; 27 Gugus Tugas Provinsi yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur/Sekda; dan 82 Gugus Tugas Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota/Sekda, serta fasilitasi terhadap 19 K/L dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (Kemenko Kesra, Kemendagri, Kemenlu, Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemenakertans, Kemenpora, Kemenkominfo, Kemenpar dan Ekonomi Kreatif, POLRI, BNP2TKI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenhukham, Kemenag, Kemenhub, BIN, dan BKKBN).

Hasil yang dicapai dalam upaya peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, termasuk percepatannya melalui PPRG dan penyediaan data terpilah, antara lain telah ditandatangani MoU dengan BPS tentang Penyediaan Data dan Informasi Gender dan Anak yang

ditindaklanjuti dengan diterbitkannya publikasi tahunan yang menyajikan data tentang akses dan partisipasi perempuan dan laki-laki di berbagai bidang pembangunan serta indikator gender; tersusunnya Pedoman Pengelolaan Data Gender di KPP&PA; serta telah dilaksanakannya advokasi, sosialisasi, fasilitasi PUG, dan pelatihan analisis gender di 39 K/L dan 33 provinsi.

1.1.3.2 Permasalahan dan Sasaran

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah sebagai berikut. *Pertama*, masih terdapat kesenjangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan di berbagai bidang, baik terhadap perempuan, maupun laki-laki; yang dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek utama: akses, partisipasi dalam proses pembangunan/pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, maupun manfaat pembangunan.

Kedua, program kesetaraan gender dan/atau pemberdayaan perempuan selama ini hanya meliputi sosialisasi/advokasi untuk perempuan belaka, belum menyentuh pada substansi inti kegiatan/program pembangunan, dan tidak menyentuh laki-laki yang juga tertinggal di beberapa bidang pembangunan.

Ketiga, masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, yang ditandai dengan maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka sasaran pengarusutamaan gender di tahun 2014 adalah: (i) meningkatnya pemerataan hasil pembangunan, baik untuk laki-laki maupun perempuan, yang meliputi empat aspek utama yaitu akses, partisipasi dalam pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, maupun manfaat pembangunan; (ii) meningkatnya penerapan pengarusutamaan gender pada substansi inti kegiatan/program pembangunan, terutama yang mendukung pencapaian prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan target-target MDGs, serta ikut menyentuh pihak laki-laki yang juga tertinggal di beberapa bidang pembangunan, (iii) meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, yang ditandai dengan menurunnya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, (iv) tersusunnya kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan; (v) terlaksananya fasilitasi penerapan PUG di bidang pendidikan, kesehatan,

politik dan pengambilan keputusan, penerapan kebijakan pelaksanaan PUG dan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, serta kebijakan perlindungan korban perdagangan orang; dan (vi) terlaksananya penerapan sistem data terpilah yang berkelanjutan.

1.1.3.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Melihat dari permasalahan dan sasaran pengarusutamaan gender dalam pembangunan, maka strategi dan arah kebijakan pengarusutamaan gender dilakukan melalui tiga isu nasional, yaitu:

1. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan;
2. Perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; dan
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pencapaian penerapan strategi pengarusutamaan gender di berbagai bidang pembangunan selengkapnya adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

TABEL 1.2
TARGET KINERJA PEMBANGUNAN PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2014

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|-----------|---|--|-------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 1. | Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan | | | | |
| 1.1 | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD ¹⁾ | Rasio kesetaraan gender SD/SDLB | 97,8 | Program Pendidikan Dasar | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.2 | Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Ibtidaiyah ¹⁾ | Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MI | 1 | Program Pendidikan Islam | Kementerian Agama |
| 1.3 | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP ¹⁾ | Rasio kesetaraan gender SMP/SMPLB | > 98 | Program Pendidikan Dasar | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.4 | Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Tsanawiyah ¹⁾ | Rasio APM peserta didik perempuan:laki laki pada MTs | 1 | Program Pendidikan Islam | Kementerian Agama |
| 1.5 | Penyediaan dan Peningkatan Pendidikan SMA ¹⁾ | Rasio kesetaraan gender siswa SMA | 36% | Program Pendidikan Menengah | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.6 | Penyediaan dan Peningkatan | Peserta didik SMK | 90.0 | Program | Kementerian |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|------|---|--|-------------------|---|---------------------------------------|
| | Layanan Pendidikan SMK | berkesetaraan/ responsif gender | | Pendidikan Menengah | Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.7 | Peningkatan akses dan mutu PK dan PLK SMLB | Peserta didik SMLB mendapat beasiswa yang responsif gender | 90.0 | Program Pendidikan Menengah | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.8 | Peningkatan Akses dan Mutu Madrasah Aliyah ¹⁾ | Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada MA | >0,95 | Program Pendidikan Islam | Kementerian Agama |
| 1.9 | Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa | Rasio kesetaraan gender PT | 1,05 | Program Pendidikan Tinggi | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| 1.11 | Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan Tinggi Islam ¹⁾ | Rasio APK peserta didik perempuan:laki laki pada PTA | 1,12 | Program Pendidikan Islam | Kementerian Agama |
| 1.12 | Peningkatan akses, kualitas, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dan tersalurkannya subsidi RA/BA dan madrasah | 1. Rasio APM Peserta didik perempuan : laki-laki pada MI | 1.0 | Program Pendidikan Islam | Kementerian Agama |
| | | 2. Rasio APM peserta didik perempuan : laki-laki pada MTs | 1.0 | Program Pendidikan Islam | Kementerian Agama |
| | | 3. Rasio APM peserta didik perempuan : laki-laki pada MA | 0,9 | Program Pendidikan Islam | Kementerian Agama |
| 1.13 | Peningkatan akses, kualitas, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dan tersalurkannya subsidi PTAI | Rasio APM peserta didik perempuan : laki-laki pada PTA | 1.12 | | |
| 1.14 | Penyediaan Layanan Pendidikan Masyarakat ¹⁾ | 1. Persentase penduduk perempuan berkeaksaraan dasar yang memperoleh layanan kecakapan hidup | 72.0 | Program Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal | Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | 2. Disparitas gender penduduk berkeaksaraan usia ≥ 15 tahun minimal 2% | 25.0 | | |
| | | 3. Persentase kabupaten/kota yang telah menerapkan PUG bidang pendidikan | 98.0 | | |
| 1.15 | Pembinaan Pelayanan Kesehatan | 1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh nakes | 90 | Bina Gizi dan Kesehatan Ibu | Kementerian |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|------|---|---|-------------------------------------|---|-----------------------|
| | Ibu dan Reproduksi ¹⁾ | terlatih (cakupan PN) | | dan Anak | Kesehatan |
| | | 2. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan K4) | 95 | | |
| 1.16 | Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketechnisian Medis ¹⁾ | Jumlah Puskesmas yang menerapkan pelayanan keperawatan dan kebidanan sesuai standar dan pedoman | 791 | Pembinaan Upaya Kesehatan | Kementerian Kesehatan |
| 1.17 | Penyehatan Lingkungan ¹⁾ | Persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas | 67 | Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Kementerian Kesehatan |
| 1.18 | Penanggulangan Krisis Kesehatan ¹⁾ | Jumlah kab/kota yang mempunyai kemampuan tanggap darurat dalam penanganan bencana | 300 | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan lainnya | Kementerian Kesehatan |
| 1.19 | Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi ¹⁾ | Jumlah provinsi yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak serta PMKR | 33 provinsi | Program Kependudukan dan Keluarga Berencana | BKKBN |
| 1.20 | Peningkatan advokasi dankomunikasi, informasi, dan edukasi(KIE) Program Kependudukan dan KB ¹⁾ | Persentase PUS, WUS, dan remaja yang mengetahui informasi Kependudukan dan KB melalui media massa (cetak dan elektronik) dan media luar ruang | 95 persen | Program Kependudukan dan Keluarga Berencana | BKKBN |
| 1.21 | Pembinaan Keluarga Balita dan Anak | Persentase keluarga yang mempunyai balita dan anak memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak | 80,9 (dari 4,45 juta anggota aktif) | Program Kependudukan dan Keluarga Berencana | BKKBN |
| 1.22 | Pembinaan ketahanan remaja | Jumlah kebijakan, strategi dan materi pembinaan ketahanan remaja yang dapat dioperasionalkan | 2 | Program Kependudukan dan Keluarga Berencana | BKKBN |
| 1.23 | Peningkatan kesertaan KB Galciltas, wilayah khusus, dan sasaran khusus | Jumlah kebijakan, stertagi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB berwawasan gender yang dapat dioperasionalkan | 1 | Program Kependudukan dan Keluarga Berencana | BKKBN |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|------|---|--|---|---|--------------------------|
| 1.24 | Pengelolaan pembangunan KKB di Provinsi | <ol style="list-style-type: none"> Jumlah frekuensi pelayanan KB mobile di wilayah Galcitas (12 kali dalam 1 tahun) (pelaksanaan kebijakan peningkatan kesertaan KB pria) Jumlah pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga di provinsi | <p>uji coba di Prov. Jabar, Jatim, Bali, dan Bengkulu</p> <p>uji coba di Prov. Jabar, Jatim, Bali, dan Bengkulu</p> | Program Kependudukan dan Keluarga Berencana | BKKBN |
| 1.25 | Pelayanan Sosial Lanjut Usia ¹⁾ | Jumlah lanjut usia telantar yang berhasil dilayani, dilindungi dan direhabilitasi baik di dalam maupun di luar panti (jiwa) | 58.152 | Program Rehabilitasi Sosial | Kementerian Sosial |
| 1.26 | Bantuan Sosial Korban Bencana Alam ¹⁾ | Jumlah korban bencana alam yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) | 87.589 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Kementerian Sosial |
| 1.27 | Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial ¹⁾ | Jumlah korban bencana sosial yang berhasil dibantu dan dilayani (jiwa) | 158.417 | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial | Kementerian Sosial |
| 1.28 | Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervisi/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan pendidikan pemilih ³⁾ | <ol style="list-style-type: none"> Jumlah modul pendidikan pemilih untuk kelompok perempuan, miskin, cacat, pemilih pemula, lansia Jumlah kegiatan pendidikan pemilih bagi caleg perempuan | <p>5</p> <p>10</p> | <p>Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik</p> | KPU |
| 1.29 | Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ³⁾ | Jumlah forum sosialisasi pengembangan nilai kebangsaan untuk pemuda, perempuan, aparatur pemerintah | 25 | Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kementerian Dalam Negeri |
| 1.30 | Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan ³⁾ | Jumlah modul pengembangan nilai kebangsaan | 1 Modul Bingkai Kebangsaan | Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kementerian Dalam Negeri |
| 1.31 | Fasilitasi Politik Dalam Negeri ³⁾ | Jumlah paket kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dalam peningkatan partisipasi politik perempuan | 100 | Program Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik | Kementerian Dalam Negeri |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|------|---|---|-------------------|---|----------------------------|
| 1.32 | Penyelenggaraan Kegiatan di bidang Kesehatan dan Perawatan | Persentase bayi, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok resiko tinggi yang memperoleh perlindungan secara tepat waktu dan akuntabel | 50% | Program Pembinaan dan Penyelenggaraa Pemasarakatan | Kementerian Hukum dan HAM |
| 1.33 | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air lainnya | Jumlah buah Embung/Situ/Bangunan Penampung Air Lainnya yang dibangun | 239 buah | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Kementerian Pekerjaan Umum |
| 1.34 | Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI | Pengadaan Sekolah Lapang-Pengendalian Hama Terpadu (unit) | 150 | Program Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Kementerian Pertanian |
| 1.35 | Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura | Pengadaan Sekolah Lapang-Pengendalian Hama Terpadu (kelompok) | 600 | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan | Kementerian Pertanian |
| 1.36 | Dukungan perlindungan perkebunan | Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan (kelompok) | 144 | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | Kementerian Pertanian |
| 1.37 | Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal | Peningkatan usaha budidaya ternak (kelompok) | 600 | Program Pencapaian swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal | Kementerian Pertanian |
| 1.38 | Pengelolaan air irigasi untuk | Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air | 300 | Program Penyediaan dan | Kementerian |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|------|--|--|-------------------|--|------------------------------------|
| | pertanian | (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. | | Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Pertanian |
| 1.39 | Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian | Jumlah (Paket) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi | 5 | Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Kementerian Pertanian |
| 1.40 | Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan | Jumlah Desa yang diberdayakan/Demapan | 40 | Program peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Kementerian Pertanian |
| 1.41 | Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian | Jumlah non aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian (orang) | 22.200 | Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani | Kementerian Pertanian |
| 1.42 | Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan, Penganggaran, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kelautan dan Perikanan | Jumlah dokumen perencanaan program dan kegiatan yang terintegrasi, tepat waktu dan berbasis data yang akurat (dokumen) | 25 | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 1.43 | Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan | Jumlah model penerapan IPTEK pengolahan produk kelautan dan perikanan (model) | 3 | Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Kelautan dan Perikanan | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 1.44 | Pendidikan Kelautan dan Perikanan | Jumlah lulusan pendidikan yang kompeten sesuai kebutuhan (orang) | 1.588 | Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan | Kemeterian Kelautan dan Perikanan |
| 1.45 | Pelatihan Kelautan dan Perikanan | Jumlah lulusan pelatihan sesuai standar kompetensi dan kebutuhan (orang) | 17.200 | Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 1.46 | Pengembangan Usaha | 1. Jumlah pembinaan dan | 33 | Pengembangan | Kementerian |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|------|---|--|--------------------------------|---|------------------------------------|
| | Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil | pengelolaan usaha mendukung minapolitan (lokasi) 2. Pengembangan diversifikasi usaha bagi nelayan (paket) | 15 | dan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Kelautan dan Perikanan |
| 1.47 | Pengawasan dan Penerapan Teknologi Terapan Adaptif Perikanan Budidaya | Jumlah diseminasi teknologi dalam rangka pengembangan kawasan budidaya (kali kegiatan) | 71 | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 1.48 | Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan | Lokasi pengembangan dan pembinaan sentra pengolahan hasil perikanan untuk usaha skala mikro, kecil, dan menengah (lokasi) | 42 | Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 1.49 | Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha | Jumlah pelaku usaha mikro yang mandiri di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil (kelompok dan orang) | 3.000 kelompok; 2.500 orang | Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | |
| 1.50 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen) | 7 | Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 1.51 | Peningkatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya | Jumlah perencanaan, kerjasama, evaluasi, dan pelaporan program dan anggaran berdasarkan data yang terkini dan akurat (dokumen) | 3 | Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 1.52 | Pembinaan Organisasi dan Pengelolaan Kepegawaian BPN | Jumlah Penerimaan Pegawai | 1.000 orang | Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Di Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia | BPN |
| 1.53 | Pengelolaan Pertanahan Propinsi | Pelaksanaan Legalisasi Aset | 33 provinsi | Pengelolaan Pertanahan Nasional | BPN |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana | |
|------|--|--|--|--|--|---|
| 1.54 | Dukungan Manajemen Ditjen Penataan Ruang dan Informasi Penataan Ruang | 1 | Jumlah kegiatan pelatihan bidang penataan ruang yang dilaksanakan | 15 Kegiatan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Kementerian PU |
| | | 2 | Jumlah kegiatan penyebarluasan informasi penataan ruang | 20 Kegiatan | | |
| 1.55 | Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah I | Jumlah sosialisasi bidang penataan ruang | 2 Kegiatan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Kementerian PU | |
| 1.56 | Pembinaan Pelaksanaan Penataan Ruang Daerah Wilayah II | Jumlah sosialisasi bidang penataan ruang | 2 Kegiatan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Kementerian PU | |
| 1.57 | Pelaksanaan Penataan Ruang Nasional | Jumlah sosialisasi bidang penataan ruang | 1 Kegiatan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Kementerian PU | |
| 1.58 | Pelaksanaan Pengembangan Perkotaan | 1. | Jumlah Sosialisasi Bidang Penataan Ruang | 3 Kegiatan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Kementerian PU |
| | | 2. | Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Pengembangan Perkotaan melalui penyusunan rencana detail pengembangan RTH dan percontohan RTH | 112 Kab/Kota | | |
| 1.59 | Pembinaan Program Ditjen Penataan Ruang | Jumlah sosialisasi bidang penataan ruang | 1 Kegiatan | Program Penyelenggaraan Penataan Ruang | Kementerian PU | |
| 1.60 | Partisipasi Masyarakat | 1. | Jumlah kawasan yang terdapat partisipasi dari lembaga pemerintah di daerah tertinggal/ perbatasan | 6 Kawasan (54 Lembaga) | Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | 2. | Jumlah kawasan yang terdapat partisipasi dari lembaga pemerintah di daerah strategi | 6 Kawasan (7 lembaga) | | |
| 1.61 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi | 1. | Jumlah Kimtrans/Kawasan yang mendapat layanan Sosial Budaya/Pendidikan, Mental Spiritual di Daerah Tertinggal/Perbatasan | 225 Kimtrans/ 14 kawasan | Program Pengembangan Masyarakat Dan Kawasan Transmigrasi | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | 2. | Jumlah Kimtrans/Kawasan yang mendapat layanan Sosial Budaya/Pendidikan, Mental Spiritual di Daerah Strategis | 75 Kimtrans/ 4 kawasan | | |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|------|--|---|--|---|---|
| | | 3. Jumlah kawasan yang mendapat pendampingan/ pemberdayaan di daerah tertinggal/ perbatasan | 22.315 KK/ 92 Kimtrans/ 54 kawasan | | |
| | | 4. Jumlah kawasan yang mendapat pendampingan/ pemberdayaan di daerah strategis | 14.877 KK/70 Kimtrans/ 51 kawasan | | |
| 1.62 | Penguatan inisiatif masyarakat | Jumlah peserta ADIWIYATA | 5000 sekolah | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | KLH |
| 1.63 | Peningkatan peran masyarakat | 1. Jumlah orang target revitalisasi Kalpataru 2. Jumlah komunitas masyarakat yang aktif dalam pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan, dan perubahan iklim | 150 orang 300 komunitas | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | KLH |
| 1.64 | Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan Dalam dan Luar Negeri | Jumlah Peserta yang mengikuti pemagangan di perusahaan; | 14.500 Org | Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 1.65 | Pengembangan Standarisasi Kompetensi Kerja dan Program Pelatihan | Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi | 38.000Org | Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 1.66 | Pengembangan dan Peningkatan Produktivitas | Jumlah tenaga kerja yang tingkatkan produktivitasnya | 13.750 Org | Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| 1.67 | Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan kerja | Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara | 100.000 Org | Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja | |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|-----------|---|---|-------------------|---|---|
| 2. | Perlindungan Perempuan terhadap Berbagai Tindak kekerasan | | | | |
| 2.1 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan ¹⁾ | <ol style="list-style-type: none"> Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam mengembangkan data perempuan korban kekerasan Persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan Persentase cakupan anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan | 4 Provinsi | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |
| 2.2 | Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Timur dan Pasifik ³⁾ | Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya | 25% | Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika | Kementerian Luar Negeri |
| 2.3 | Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri di Kawasan Asia Selatan dan Tengah ³⁾ | Tingkat penanganan isu <i>illegal migrant</i> dan <i>human trafficking</i> serta isu-isu lainnya | 25% | Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika | Kementerian Luar Negeri |
| 2.4 | Peningkatan perlindungan dan pelayanan WNI/BHI di Luar Negeri ³⁾ | Prosentase pemberian bantuan hukum (advokasi dan lawyer) bagi WNI terutama tenaga kerja wanita | 29,17% | Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran | Kementerian Luar Negeri |
| 2.5 | Peningkatan Perlindungan Pekerja Perempuan dan Penghapusan Pekerja Anak ²⁾ | <ol style="list-style-type: none"> Persentase perusahaan yang memenuhi norma kerja perempuan dan anak Jumlah pekerja anak yang | Naik 40% | Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan | Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| | | | 15.000 org | | |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|-----|---|---|-------------------------|--|------------|
| | | ditarik dari tempat kerja/BPTA; | | Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan | |
| | | 3. Presentase pekerja anak yang ditarik yang dikembalikan ke unia pendidikan dan/atau memperoleh ketrampilan | 100% | | |
| 2,6 | Pencegahan dan Penanggulangan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Pemenuhan Hak Korban ⁴⁾ | 1. Tingkat pelibatan dan penyikapan aparat negara dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan | 20% konsep | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM | Komnas HAM |
| | | 2. Tingkat pelibatan dan penyikapan masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan serta perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM perempuan | 20% stakeholder | | |
| | | 3. Hasil kajian dan rekomendasi yang ditindaklanjuti terkait isu kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan HAM perempuan | 1 kajian dan konsep | | |
| | | 4. Jumlah pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian pelanggaran HAM perempuan | 1 laporan | | |
| | | 5. Prosentase respon pengaduan perempuan korban kekerasan | 20% laporan | | |
| | | 6. Prosentase sistem pemulihan korban pelanggaran HAM yang dikembangkan | 20% | | |
| | | 7. Meningkatnya fungsi kelembagaan Komnas | 50% layanan perkantoran | | |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|---|--|---|----------------------|--|------------|
| | | Perempuan dalam rangka menciptakan lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan mandat Komnas Perempuan | | | |
| 2.7 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penghapusan kekerasan pada anak | Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi tentang penghapusan kekerasan pada anak | 1 K/L dan 5 provinsi | Program Perlindungan Anak | KPP dan PA |
| 2.8 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang ¹⁾ | Jumlah kompilasi data perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang | 5 K/L dan 3 provinsi | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |
| 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | | | | | |
| 3.1 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pendidikan yang responsif gender ¹⁾ | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan | 1 | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |
| | | 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pendidikan | K/L prov 1 5 | | |
| | | 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pendidikan | K/L prov 1 2 | | |
| 3.2 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang kesehatan yang responsif gender ¹⁾ | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang kesehatan | - | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |
| | | 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang kesehatan | K/L prov 1 5 | | |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana | |
|-----|--|--|-------------------|-----------|--|------------|
| | | 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang kesehatan | K/L prov 4 | 1 | | |
| 3.3 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang sumber daya alam dan lingkungan yang responsif gender ¹⁾ | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sumber daya alam dan lingkungan | K/L | 1 | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |
| | | 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang sumber daya alam dan lingkungan | K/L prov 4 | 2 | | |
| | | 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang sumber daya alam dan lingkungan | K/L prov 2 | 2 | | |
| 3.4 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan ¹⁾ | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang politik dan pengambilan keputusan | | 1 pedoman | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |
| | | 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang politik dan pengambilan keputusan | K/L prov 3 | 2 | | |
| | | 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi | K/L | 2 | | |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|-----|---|--|-------------------|--|------------|
| | | dalam penyusunan data terpilah di bidang politik dan pengambilan keputusan | prov 2 | | |
| 3.5 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang hukum yang responsif gender ¹⁾ | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang hukum | 3 | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |
| | | 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang hukum | K/L 5 prov 4 | | |
| | | 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang hukum | K/L 3 prov 2 | | |
| 3.6 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang ketenagakerjaan yang responsif gender ¹⁾ | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ketenagakerjaan | 1 | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |
| | | 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang ketenagakerjaan | K/L 2 prov 3 | | |
| | | 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang ketenagakerjaan | K/L 2 prov 1 | | |
| 3.7 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan yang responsif gender ¹⁾ | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan | - | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|-----|---|---|-----------------------|--|------------|
| | | 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan | K/L prov 4 2 | | |
| | | 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang koperasi, usaha mikro dan kecil, industri, dan perdagangan | K/L prov 4 2 | | |
| 3.8 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis yang responsif gender ¹⁾ | 1. Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis | - | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |
| | | 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis | K/L prov 3 3 | | |
| | | 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, | K/L prov 3 2 | | |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|------|---|---|---|--|------------|
| | | kelautan, ketahanan pangan, dan agrobisnis | | | |
| 3.9 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi yang responsif gender ¹⁾ | <ol style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi | <ul style="list-style-type: none"> - 6 2 1 1 | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |
| 3.10 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan bidang infrastruktur yang responsif gender ¹⁾ | <ol style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang infrastruktur Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan ARG di bidang infrastruktur Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data terpilah di bidang infrastruktur | <ul style="list-style-type: none"> - 6 2 6 1 | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana | |
|------|---|--|--------------------------------|--|------------|---|
| 3.11 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan ¹⁾ | 1. Jumlah kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | - | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA | |
| | | 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan | K/L prov 12 | | | - |
| 3.12 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan penyusunan data gender ¹⁾ | 1. Jumlah pedoman penyusunan data dan informasi gender dan anak | - | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA | |
| | | 2. Tersedianya sistem data gender dan anak | K/L prov 2 | | | - |
| | | 3. Jumlah K/L dan Pemda yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas pengelola data gender dan anak | K/L prov - | | | - |
| | | 4. Jumlah pengolahan, penyajian, pemutahiran, dan pengembangan data dan informasi gender dan anak | 1 sistem, 1 publikasi | | | - |
| 3.13 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan ¹⁾ | 1. Jumlah kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan | - | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA | |
| | | 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan masalah sosial perempuan | K/L prov 3 prov, 3 kab/kota | | | 1 |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|------|--|---|--|--|------------|
| | | 3. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penyusunan data perlindungan masalah sosial perempuan | K/L prov - 2 | | |
| 3.14 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan ¹⁾ | 1. Jumlah kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | 1 | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |
| | | 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan | K/L prov 1 2 | | |
| | | 3. Jumlah kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan | K/L prov 1 1 | | |
| 3.15 | Penyusunan dan harmonisasi kebijakan perlindungan korban perdagangan orang ¹⁾ | 1. Jumlah kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang | - | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |
| | | 2. Jumlah K/L dan pemda yang difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang | K/L prov 5 5 provinsi, 5 kab/kota | | |
| 3.16 | Penguatan Kelembagaan PUG di provinsi | 1. Jumlah kab/kota yang memiliki SDM yang kompeten dalam analisis PPRG | - | Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan | KPP dan PA |
| | | 2. Jumlah kab/kota yang memiliki kelembagaan dan | - | | |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|------|--|--|---|--|----------------------------|
| | | jejaring PUG | | | |
| | | 3. Jumlah kab/kota yang memiliki data gender | - | | |
| 3.17 | Sistem Informasi Manajemen 4) | Jumlah kegiatan pendataan perkara yang disajikan berdasarkan jenis penanganan perkara termasuk jenis perkara KDRT, perkara anak dan perkara lainnya | 1 laporan | Program Dukungan Manajemen & Pelaksanaan Tugas Teknis Kejaksaan RI | Kejaksaan Agung |
| 3.18 | Kegiatan Kerjasama HAM 4) | Persentase harmonisasi rancangan peraturan perundang-undangan dalam perspektif HAM | 36 | Program Perlindungan dan Pemenuhan HAM | Kementerian Hukum dan HAM |
| 3.19 | Kegiatan Perancangan Peraturan Perundang-undangan 4) | Persentase Peraturan perundang-undangan di bidang mekanisme Perlindungan Saksi dan Pelapor | 80% | Program Pembentukan Hukum | Kementerian Hukum dan HAM |
| 3.20 | Peningkatan kesertaan KB Galciltas wilayah khusus dan sasaran khusus | 1. Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus. yang dapat dioperasionalkan | 5 (salah satunya adalah kebijakan peningkatan akseptor KB pria) | Program Kependudukan dan Keluarga Berencana | BKKBN |
| | | 2. Jumlah kebijakan, strategi dan informasi tentang akses dan kualitas pelayanan KB berwawasan gender yang dapat dioperasionalkan | 1 | | |
| | | 3. Jumlah peta kerja pelayanan KB Galciltas, wilayah khusus, dan Sasaran Khusus lengkap dan up to date | 1 | | |
| 3.21 | Penyelenggaraan dan Pembinaan Informasi Publik | Jumlah Publikasi melalui berbagai media | 3 kegiatan | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PU | Kementerian Pekerjaan Umum |
| 3.22 | Meningkatnya Jumlah IPTEK dan SPMK Bidang SOSEKLING | <i>Review dan Updating Gender Impact Assesment</i> | 2 Naskah Kebijakan | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial, | Kementerian Pekerjaan |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|------|---|---|----------------------------|--|----------------------------|
| | | | | Ekonomi, dan Lingkungan | Umum |
| 3.23 | Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan (Larasita Daerah) | Tersedianya Data dan Informasi Pertanahan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) | 419 kab/kota | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI | BPN |
| 3.24 | Pengelolaan Data dan Informasi Pertanahan (Larasita Pusat) | Tersedianya Data dan Informasi Pertanahan yang terintegrasi secara nasional dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan Nasional (SIMTANAS) | 1 paket | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI | BPN |
| 3.25 | Pengelolaan Sarana dan Prasarana (Daerah) | Terlaksananya pengelolaan Sarana dan Prasarana Kanwil BPN Provinsi dan Kantah Kab/Kota | 62 satker | Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN RI | BPN |
| 3.26 | Pembinaan Ketahanan Remaja ¹⁾ | <ol style="list-style-type: none"> Jumlah kebijakan, strategi dan materi Pembinaan Ketahanan Remaja yang dapat dioperasionalkan Jumlah Grand Design program pembinaan ketahanan remaja yang dapat dioperasionalkan Jumlah peta kerja Pembinaan Remaja dan Keluarga yang akurat dan terkini | <p>2</p> <p>1</p> <p>1</p> | Program Kependudukan dan Keluarga Berencana | BKKBN |
| 3.27 | Pembinaan Kapasitas Aparatur | Jumlah Pembinaan Kapasitas Aparatur | 8 Angkatan | Penyelenggaraan Pelayanan Teknis dan Administrasi Pembinaan Konstruksi | Kementerian Pekerjaan Umum |
| 3.28 | Pembinaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Jumlah pembinaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) konstruksi | 2 angkatan | Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi | Kementerian Pekerjaan Umum |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|------|---|--|------------------------|--|------------------------------------|
| 3.29 | Pelatihan Kelautan dan Perikanan | Jumlah lulusan pelatihan yang sesuai standar kompetensi dan kebutuhan (orang) | 800 orang | Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan | Kementerian Kelautan dan Perikanan |
| 3.30 | Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pertanahan | Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi pegawai di lingkungan BPN RI | 2830 orang | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI | BPN |
| 3.31 | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Pendidikan STPN | Jumlah lulusan Program Diploma I Pengukuran dan Pemetaan Kadastral | 80 % | Dukungan Manajemen dan pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN RI | BPN |
| 3.32 | Penyelenggaraan urusan tata usaha pimpinan, pengamanan, dan urusan keprotokolan | Presentase Terjaminnya Keamanan Lingkungan Kantor BPN RI, Presentase Terjaminnya Keamanan Pimpinan BPN RI | 1 paket | Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya di BPN RI | BPN |
| 3.33 | Pendidikan dan Pelatihan Bidang Pertanahan | Penyelenggaraan Tugas Belajar jenjang pendidikan S2 dan S3 bagi pegawai di lingkungan BPN RI | 1 paket | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPN RI | BPN |
| 3.34 | Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat | Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Dalam Pemberdayaan Perempuan Melalui Penyusunan Regulasi, Pedoman, Standarisasi, Bintek, Orientasi, dan Sosialisasi | 25 Prov 50 Kab | Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | Kementerian Dalam Negeri |
| 3.35 | Pengembangan komunikasi lingkungan | 1. Jumlah kebijakan, program dan strategi komunikasi lingkungan 2. Jumlah lokasi pelaksanaan kegiatan program komunikasi lingkungan hidup di daerah | 1 dokumen 60 lokasi | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | KLH |
| 3.36 | Peningkatan peran organisasi kemasyarakatan | 1. Jumlah kebijakan, program, strategi, dan model peningkatan peran organisasi kemasyarakatan lingkungan | 3 dokumen | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | KLH |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana |
|------|---|---|-------------------|---|------------|
| | | 2. Jumlah organisasi masyarakat dan profesi yang meningkat perannya dalam perlindungan dan pengelolaan LH | 100 organisasi | Hidup | |
| | | 3. Jumlah perusahaan yang melaksanakan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) | 180 perusahaan | | |
| 3.37 | Penguatan inisiatif masyarakat | 1. Jumlah kebijakan, program, strategi, dan model penguatan inisiatif masyarakat | 4 dokumen | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | KLH |
| | | 2. Jumlah komunitas pendidikan lingkungan hidup dan komunitas keagamaan kader lingkungan hidup yang terbentuk | 400 komunitas | | |
| 3.38 | Peningkatan peran masyarakat | Jumlah kebijakan, program, strategi, dan model peningkatan peran masyarakat | 3 dokumen | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | KLH |
| 3.39 | Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup daerah | 1. Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan | 33 provinsi | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | KLH |
| | | 2. Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan | 33 provinsi | | |
| | | 3. Jumlah provinsi yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelolaan LH | 33 provinsi | | |
| | | 4. Jumlah provinsi yang mengkoordinir pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kab/Kota | 33 provinsi | | |
| 3.40 | Penelitian dan Pengembangan Aplikasi Informatika, Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah karya litbang bidang aplikasi informatika dan informasi publik | 5 dokumen | Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan | Kemkominfo |

| No | Isu/Kebijakan Nasional | Indikator | Target Tahun 2014 | Program | Pelaksana | |
|------|---|--|--|---|--|------------|
| | | | | Informatika | | |
| 3.41 | Penelitian dan Pengembangan Literasi dan Profesi, serta Pengembangan SDM Komunikasi dan Informatika | 1 | Jumlah peserta bimtek CIO | 500 | Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Kemkominfo |
| | | 2 | Jumlah peserta bimtek budaya dokumentasi | 500 | | |
| | | 3 | Jumlah peserta pelatihan komunikasi publik | 500 | | |
| | | 4 | Jumlah penerima beasiswa S2/S3 dalam dan luar negeri | 445 | | |
| 3.42 | Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika | Jumlah makalah kebijakan/kajian kebijakan bidang komunikasi dan informatika | 1 | Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Kemkominfo | |
| 3.43 | Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Jumlah peserta diklat teknologi informasi dan komunikasi | 3289 | Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika | Kemkominfo | |
| 3.44 | Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit | Jumlah operator radio yang bersertifikat | 5100 | Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika | Kemkominfo | |
| 3.45 | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Penyelenggaraan Pos dan Informatika | Jumlah rencana kerja dan anggaran, laporan evaluasi program kerja, serta sarana dan prasarana; Jumlah peraturan perundang-undangan yang diselesaikan, penelaahan hukum, pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan; Jumlah laporan tahunan, keuangan | 12 paket | Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika | Kemkominfo | |
| 3.46 | Pembinaan dan Pengembangan TIK untuk Pemberdayaan Masyarakat | Jumlah peserta bimbingan teknis sebagai <i>agent of change</i> untuk peningkatan e-literasi masyarakat | 3600 | Program Pengembangan Aplikasi Informatika | Kemkominfo | |
| | Pembinaan dan Pengembangan Kemitraan Lembaga Komunikasi | Jumlah desa informasi yang efektif di wilayah perbatasan dan daerah tertinggal | 150 | Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik | Kemkominfo | |

1.2 Kebijakan Lintas Bidang

1.2.1 Penanggulangan Kemiskinan

1.2.1.1 Kondisi Umum

Penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu sasaran utama pembangunan nasional. Secara nasional, meskipun tingkat kemiskinan telah berhasil diturunkan dari 12,49 persen (30,02 juta jiwa) pada tahun 2011 menjadi 11,96 persen (29,13 juta jiwa) pada tahun 2012, penurunan kemiskinan tersebut mengalami perlambatan. Pada tahun 2012 tingkat kemiskinan hanya turun sebesar 0,53 persen, jauh lebih rendah dibandingkan penurunan tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,84 persen, dalam periode yang sama. Perlambatan penurunan kemiskinan ini memerlukan upaya keras agar tingkat kemiskinan di akhir tahun 2014 sebesar 8-10 persen, sesuai dengan yang telah ditargetkan dalam RPJMN 2010-2014. Upaya keras tersebut dilakukan melalui peningkatan dan perluasan terhadap akses pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin, peningkatan dan penguatan sektor ekonomi dimana masyarakat miskin berada, serta sinergi 4 klaster program penanggulangan kemiskinan agar dapat menjangkau kebutuhan dari seluruh lapisan masyarakat miskin.

1.2.1.2 Pelaksanan Program Tahun 2012 dan Rencana Pelaksanaan Tahun 2013

Penurunan tingkat kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan sosial yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, penyerapan tenaga kerja, dampak bencana dan iklim, serta ketersediaan pangan dan energi. Pertumbuhan ekonomi 2012 sekitar 6,23 persen dengan laju pertumbuhan di sektor pertanian sebesar 3,97 persen, yang dinilai relatif stabil mengingat kondisi ekonomi global yang tidak menentu. Hal ini memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2012. Pertumbuhan di sektor pertanian berperan dalam mempertahankan mata pencaharian petani dan menjaga pendapatan petani agar tidak jatuh ke kemiskinan.

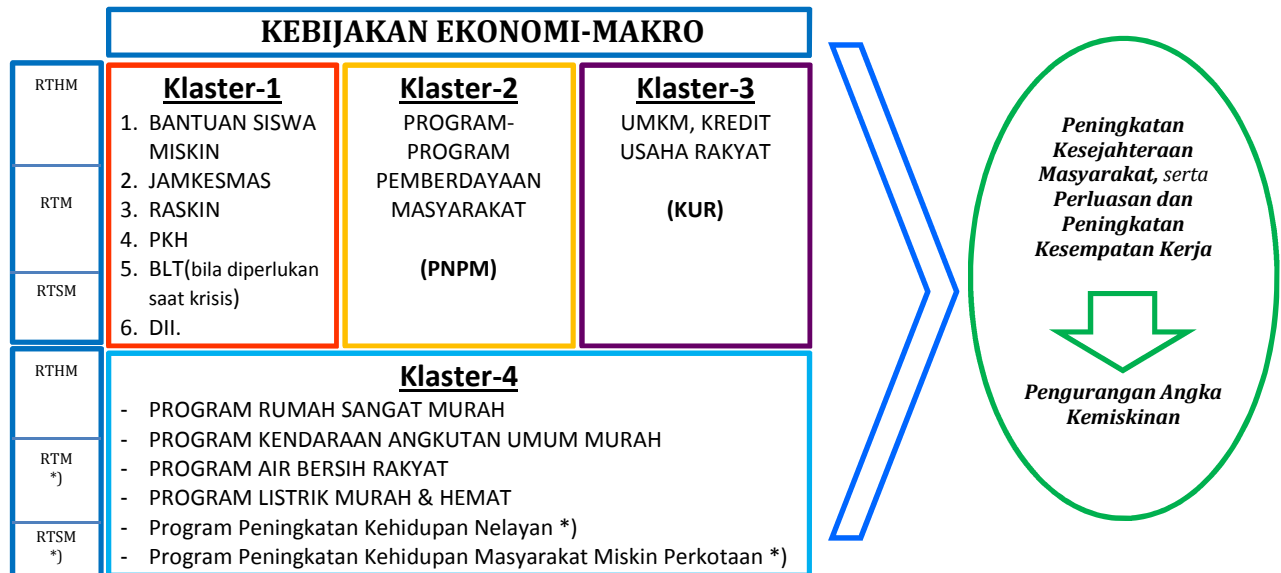
Tingginya inflasi pada tahun 2012, yaitu mencapai 4,30 persen, dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 3,79 persen dinilai menjadi salah satu penyebab perlambatan penurunan kemiskinan pada tahun 2012. Hal ini terjadi terutama pada kelompok masyarakat hampir miskin/rentan miskin yang sangat mudah menjadi kembali miskin akibat fluktuasi harga yang berpengaruh terhadap penurunan daya

beli mereka. Untuk itu, kestabilan kondisi perekonomian terutama harga-harga bahan makanan perlu dijaga, mengingat proporsi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) terhadap Garis Kemiskinan (GK) pada tahun 2012 ini masih 73,5 persen.

Penyerapan tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor utama dalam mengurangi jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan juga terus ditingkatkan. Selama bulan Agustus 2011 sampai dengan Agustus 2012 telah dapat diciptakan 1,1 juta kesempatan kerja.

Sejalan dengan berbagai upaya perbaikan kondisi ekonomi makro, meliputi stabilisasi ekonomi termasuk penciptaan lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan telah dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat pemihakan (*affirmative*) kepada masyarakat miskin melalui 4 (empat) klaster program penanggulangan kemiskinan, yaitu: klaster 1 adalah program perlindungan sosial berbasis keluarga, klaster 2 adalah program yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, klaster 3 adalah program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil, serta klaster 4 adalah program pro-rakyat yang ditujukan untuk meningkatkan serta memperluas cakupan program-program penanggulangan kemiskinan lainnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan. Secara umum, pelaksanaan berbagai kegiatan di dalam keempat klaster tersebut berjalan dengan baik.

GAMBAR 1.1
PROGRAM-PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN



Klaster 1 untuk pelaksanaan kegiatan Raskin yang ditujukan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Pada tahun 2012, realisasi penyaluran Raskin mencapai 3,37 Juta ton beras atau sebesar 98,90 persen dari pagu yang diberikan kepada 17,5 Juta RTS dengan harga Rp. 1.600,- per kg.

Dalam rangka perlindungan terhadap risiko finansial akibat masalah kesehatan, pelaksanaan Jamkesmas telah berhasil mendorong peningkatan cakupan jaminan pembiayaan/asuransi kesehatan. Pada tahun 2012, cakupan asuransi kesehatan telah mencapai sekitar 64,58 persen. Cakupan tersebut akan terus ditingkatkan dengan perkiraan pencapaian pada tahun 2013 menjadi sekitar 75,4 persen. Jamkesmas telah mampu meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit, terutama untuk daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Sementara itu, pemerintah terus menyediakan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di semua jenjang pendidikan sebagai upaya mendukung peningkatan akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga miskin. BSM diberikan untuk meringankan beban biaya pendidikan, terutama untuk membiayai pengeluaran individu siswa seperti seragam

sekolah, buku tulis, biaya transportasi, dan lain sebagainya. Pada tahun 2012, hampir 8 juta BSM yang disediakan di semua jenjang dan sebanyak 95 persen tersalurkan kepada penerima, yaitu kepada 4,2 juta siswa miskin di jenjang SD/MI, 1,8 juta siswa miskin jenjang SMP/MTs, 1,5 juta siswa miskin di jenjang SMA/SMK/MA serta sekitar 140 ribu mahasiswa miskin. Pada tahun 2013, penyediaan BSM meningkat menjadi ditujukan bagi 8,8 juta siswa di semua jenjang pendidikan, baik yang duduk di pendidikan umum, maupun di pendidikan bercirikan agama seperti madrasah dan perguruan tinggi agama. Selain itu, biaya satuan BSM juga ditingkatkan pada tahun 2013, dari Rp 360 ribu/siswa/tahun menjadi Rp 450 ribu/siswa/tahun untuk jenjang SD/MI, dari Rp 550 ribu/siswa/tahun menjadi Rp 750 ribu/siswa/tahun untuk jenjang SMP/MTs, dan dari Rp 780 ribu/siswa/tahun menjadi Rp 1 juta/siswa/tahun untuk jenjang SMA/SMK/MA. Kenaikan tersebut didasarkan pada kebutuhan pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan yang dihitung dari SUSENAS.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial melalui pemberian uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan kewajiban untuk memeriksakan kesehatan rutin anak balita dan ibu hamil/menyusui, serta menyekolahkan anak. PKH ditujukan untuk mengubah perilaku penerima manfaat agar dapat memanfaatkan akses dan pelayanan sosial dasar kesehatan dan pendidikan dengan lebih baik. Program Keluarga Harapan diharapkan dapat berpengaruh pada peningkatan produktivitas kerja dan penurunan angka kemiskinan dalam jangka panjang. Bantuan kepada RTSM dilaksanakan selama enam tahun dengan verifikasi reguler setiap periode pembayaran untuk evaluasi kondisi penerima. Pembatasan masa kepesertaan PKH tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran agar tidak terjadi ketergantungan RTSM terhadap bantuan. Perluasan pelaksanaan hingga tahun 2012 telah mampu mencakup sasaran hingga 1.492.473 RTSM dengan sebaran di 33 provinsi, 166 Kabupaten, dan 1.787 Kecamatan dari cakupan sekitar 287.928 RTSM pada tahun 2007. Sedangkan jumlah total target di tahun 2013 adalah 2.400.000 RTSM.

TABEL 1.3
TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PKH TAHUN 2007-2012

| Tahun | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Sasaran (RTSM) | Target | 500.000 | 642.000 | 720.000 | 816.000 | 1.116.000 | 1.516.000 |
| | Realisasi | 387.947 | 620.848 | 726.376 | 774.293 | 1.052.201 | 1.492.473 |
| Lokasi | Provinsi | 7 | 13 | 13 | 20 | 25 | 33 |
| | Kabupaten | 48 | 70 | 70 | 88 | 118 | 166 |
| | Kecamatan | 337 | 637 | 781 | 946 | 1.387 | 1.787 |

Sumber : Kemensos, 2012

Pencapaian jumlah Peserta KB Baru yang berasal dari keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera 1/KS-1) pada tahun 2012 sebesar 4,25 juta akseptor. Capaian ini melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2012, yaitu sebesar 3,89 juta akseptor. Sedangkan untuk tahun 2013, berdasarkan sasaran target yang ditetapkan, diperkirakan sebesar 3,97 juta peserta KB Baru berasal dari keluarga miskin. Sementara itu, pencapaian jumlah peserta KB Aktif yang berasal dari keluarga miskin (KPS dan KS-1) pada tahun 2012 sebesar 14,59 juta akseptor atau lebih besar dari target ditetapkan pada tahun 2012, yaitu sebesar 12,5 juta peserta. Untuk tahun 2013, berdasarkan sasaran target yang ditetapkan, diperkirakan sebesar 12,8 juta peserta KB Aktif berasal dari keluarga miskin.

Sasaran kegiatan prioritas peningkatan perlindungan pekerja perempuan dan penghapusan pekerja anak adalah mengurangi jumlah pekerja anak yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) dan memfasilitasi pekerja anak untuk kembali ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan. Pada tahun 2012 jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA sesuai dengan target yaitu mencapai 10.750 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 92,33 persen atau sebanyak 9.926 orang dikembalikan ke dunia pendidikan dan memperoleh keterampilan. Tahun 2013, jumlah pekerja anak yang ditarik dari BPTA diharapkan sebanyak 11.000 orang dan diperkirakan persentase yang dikembalikan ke dunia pendidikan atau memperoleh pelatihan keterampilan mencapai lebih dari 90 persen.

Kegiatan prioritas pengembangan dan peningkatan perluasan kesempatan kerja sasarannya adalah tersedianya pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dan terbangunnya fisik yang dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2012, telah

berhasil diciptakan kesempatan kerja untuk sementara waktu bagi penganggur sebanyak 105.072 orang yang tersebar di 360 kabupaten/kota. Pada tahun 2013 diperkirakan dapat disediakan pekerjaan untuk sementara waktu bagi penganggur dengan jumlah lebih dari 90 ribu orang yang tersebar di lebih dari 360 kabupaten/kota.

Dalam kerangka pengurangan ketimpangan kepemilikan tanah telah dilakukan reformasi agraria melalui kegiatan redistribusi tanah. Pada tahun 2012 telah dilakukan redistribusi tanah sebanyak 69.499 bidang dan target untuk tahun 2013 sebanyak 175.500 bidang.

Klaster 2 untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan pada tahun 2012 telah dilaksanakan di 5.020 kecamatan. Disamping itu, melalui PNPM Penguatan yang lokasinya merupakan lokasi PNPM Inti telah dilaksanakan PNPM Generasi di 290 Kecamatan, PNPM Integrasi SPP-SPPN di 83 Kabupaten, PNPM Perbatasan di 80 Kecamatan, dan PNPM Respek Pertanian di 24 Kecamatan. Perkiraan pencapaian pada tahun 2013 untuk PNPM-MP adalah di 5.100 kecamatan sebagai antisipasi terhadap penambahan kecamatan baru sebagai akibat pemekaran. Untuk PNPM Penguatan akan dilaksanakan melalui PNPM Generasi di 369 Kecamatan, PNPM Integrasi SPP-SPPN di 85 Kabupaten, dan PNPM Perbatasan di 80 Kecamatan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan ekonomi perdesaan, hasil-hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2012 adalah terlaksananya pengembangan usaha ekonomi masyarakat tertinggal termasuk PNPM-PISEW (Pengembangan Infrastruktur Ekonomi Wilayah) di 34 kabupaten dalam 9 provinsi. Dalam upaya meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana di wilayah perdesaan, hasil-hasil yang telah dicapai sampai dengan tahun 2012 diantaranya adalah (a) terlaksananya PNPM-LMP di 78 Kecamatan, dan (b) terlaksananya orientasi, pelatihan, koordinasi, bimtek air minum, dan penyehatan lingkungan termasuk penyediaan air minum berbasis masyarakat (PAMSIMAS) di 108 Kab/Kota.

Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) yang dimulai tahun 2006 bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mempercepat

pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah-daerah tertinggal dan khusus seperti daerah-daerah pasca konflik dan rawan bencana alam/sosial. Program ini telah dilaksanakan di 186 kecamatan, 51 kabupaten dan 10 provinsi (8 provinsi, 32 kabupaten dan 186 kecamatan untuk P2DTK Nasional dan 2 provinsi, 19 kabupaten untuk P2DTK Aceh-Nias) dan telah berakhir pada 31 Desember 2012. Hasil capaian untuk kegiatan P2DTK sampai dengan tahun 2012 untuk P2DTK Nasional adalah tersalurkannya Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang terbagi menjadi BLM Kecamatan dan BLM Kabupaten untuk membiayai 8.651 sub proyek/kegiatan yang terdiri dari 2.123 sub proyek (24,54%) di bidang pendidikan, 1.608 sub proyek (18,59%) bidang kesehatan, 4.015 sub proyek (46,41%) di bidang infrastruktur dan 905 sub proyek (10,46%) bidang kepemudaan. Kegiatan-kegiatan tersebut bermanfaat bagi 4.771.900 jiwa atau sebesar 56,74 persen dari jumlah penduduk di 32 kabupaten sasaran.

Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) merupakan program yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah, mengentaskan kemiskinan, mengurangi angka pengangguran terbuka, dan juga meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah. Dari target RPJMN 2010-2014 sebanyak 185 kawasan, pada tahun 2012 program ini mampu membangun infrastruktur sosial-ekonomi di 237 desa. Total capaian pembangunan infrastruktur sosial-ekonomi pada tahun 2010 hingga 2012 adalah sebanyak 711 desa. Perkiraan capaian program ini pada tahun 2013 adalah sebanyak 79 kecamatan.

Untuk Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIPP), selama dua tahun pelaksanaan dari tahun 2010-2012 telah dilaksanakan di 15.362 desa dan telah melebihi target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu sebanyak 8.803 desa. Pada tahun 2013 PPIP diperkirakan dapat terealisasi di 6.640 desa.

Pada tahun 2012 kegiatan Program Usaha Agribisnis Pertanian (PUAP) dapat terlaksana bagi 6.050 Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau melebihi target sasaran sebanyak 50 Gapoktan yang disebabkan adanya penambahan anggaran.

Pada tahun 2012, untuk lokasi di luar lokasi Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), telah dilaksanakan

kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP) perikanan budidaya sebanyak 3.000 kelompok dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR) sebanyak 3.422 kelompok di 9 provinsi meliputi 40 kab/kota. Sementara itu pada tahun 2013, diperkirakan akan disalurkan bantuan untuk kegiatan PUMP perikanan tangkap untuk 1.000 kelompok; PUMP perikanan budidaya untuk 3.700 kelompok; PUMP pengolahan dan pemasaran untuk 500 kelompok; dan PUGAR untuk 1.400 kelompok.

Klaster 3 dilaksanakan untuk memfasilitasi rakyat yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar, namun masih membutuhkan bantuan untuk meningkatkan akses permodalan dan mengembangkan usaha melalui pemberdayaan koperasi, dan usaha mikro dan kecil. Hasil-hasil pelaksanaan pada tahun 2012 mencakup penyaluran KUR dan bantuan permodalan lainnya, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, penguatan lembaga pembiayaan dan sarana usaha, serta penyuluhan perkoperasian. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada tahun 2012 mencapai sebesar Rp 34,23 triliun untuk lebih dari 1,96 juta debitur, dengan rata-rata kredit/pembiayaan sebesar Rp 17,45 juta. Volume penyaluran KUR tersebut telah melampaui target tahun 2012 sebesar Rp 30 triliun. Tingkat *Non-Performing Loan* (NPL) KUR pada tahun 2012 cukup rendah yaitu 3,60 persen. Sebagian besar KUR disalurkan ke sektor perdagangan (37,49 persen), sektor pertanian dan perikanan (17,08 persen), dan sektor perdagangan terintegrasi dengan sektor hulu (14,16 persen).

Hasil pelaksanaan kegiatan di Klaster 3 lainnya pada tahun 2012 mencakup: (1) pendampingan bagi 27.520 calon debitur KUR dan sosialisasi KUR di 33 provinsi; (2) penyediaan 425 penyuluh perkoperasian bagi masyarakat dan diklat perkoperasian bagi 600 orang; (3) pemasyarakatan dan pelatihan kewirausahaan bagi 2.100 orang; (4) peningkatan kapasitas 360 Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Jasa keuangan Syariah (KSP/KJKS) dan 360 orang pengelola KSP/KJKS; (5) fasilitasi transformasi 100 LKM menjadi KSP/KJKS; (6) fasilitasi bagi 500 koperasi untuk membangun kerja sama pembiayaan melalui *linkage*; (7) fasilitasi pembentukan lembaga penjaminan kredit daerah; dan (8) peningkatan kapasitas 150 konsultan keuangan mitra bank (KKMB) untuk memberikan layanan bagi koperasi dan usaha mikro dan kecil, serta fasilitasi 50 koperasi untuk

memanfaatkan layanan KKMB; dan (9) revitalisasi tiga unit pasar tradisional yang dikelola koperasi di daerah tertinggal/perbatasan.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Klaster 3 akan terus dilanjutkan pada tahun 2013 melalui penajaman sasaran dan target, serta perluasan kegiatan yang tidak saja ditujukan untuk meningkatkan akses usaha mikro dan kecil ke sumber permodalan, namun juga untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), akses pemasaran, kualitas produksi, dan kelembagaan koperasi dan usaha mikro dan kecil. Beberapa target yang ditetapkan untuk tahun 2013 di antaranya: (1) dukungan penjaminan Pemerintah untuk penyaluran KUR sebesar Rp 36 triliun; (2) pendampingan bagi 27.520 usaha mikro dan kecil untuk mengakses KUR; (3) penguatan permodalan bagi 1.320 koperasi di perkotaan dan perdesaan; (4) penguatan kapasitas KSP/KJKS untuk memberikan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil; (5) revitalisasi 25 unit sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan; dan (6) peningkatan kapasitas kewirausahaan bagi 4.600 orang dan diklat perkoperasian bagi 600 orang.

Klaster 4 dalam rangka pelaksanaan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN), pada tahun 2012 telah dilaksanakan pada 400 PPI. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 meliputi bantuan langsung pada individu nelayan, kelompok nelayan, dan sarana prasarana PPI itu sendiri. Beberapa target kegiatan untuk individu nelayan di tahun 2012 yang telah dicapai mencakup pemberian sertifikasi hak atas tanah nelayan sebanyak 13.741 sertifikat. Untuk bantuan pada kelompok nelayan telah diberikan bantuan kapal penangkap ikan, bantuan langsung melalui PUMP perikanan tangkap untuk 3.700 kelompok, budidaya untuk 600 kelompok dan pengolahan untuk 1.500 kelompok.

Pelaksanaan pembangunan rumah sangat murah pada tahun 2012 telah terbangun rumah swadaya sebanyak 18.159 unit atau total akumulatif 32.512 unit dari tahun 2010 hingga 2012. Perkiraan realisasi pembangunan perumahan swadaya pada tahun 2013 adalah sebanyak 20.000 unit sehingga dapat melampaui target RPJMN 2010-2014 yaitu sebanyak 50.000 unit.

Penyediaan air minum (SPAM) terdiri dari SPAM di kawasan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), SPAM Perdesaan,

SPAM di Ibukota Kecamatan (IKK), dan SPAM di kawasan khusus. Dari target RPJMN 2010-2014 sebanyak 577 kawasan, hingga tahun 2012 telah mencapai 568 kawasan. Untuk SPAM di IKK, hingga tahun 2012 telah mencapai 523 IKK dari target sebanyak 820 IKK. Sementara itu, pengembangan SPAM Perdesaan yang ditargetkan di sebanyak 4.650 desa telah mencapai 6.570 desa. Adapun SPAM kawasan khusus telah mencapai 329 kawasan dari 100 kawasan yang ditargetkan. Perkiraan realisasi SPAM pada tahun 2013 adalah 322 SPAM kawasan MBR, 1.685 SPAM kawasan perdesaan, 243 SPAM IKK, dan 225 SPAM kawasan khusus.

1.2.1.3 Permasalahan dan Sasaran

Permasalahan Umum

1. Permasalahan pendataan target sasaran merupakan permasalahan utama terutama untuk pelaksanaan program-program di Klaster I yaitu program Raskin, Jamkesmas, BSM, dan PKH.
2. Sinergisitas antar program penanggulangan kemiskinan masih belum terjaga terutama untuk pelaksanaan program klaster 2.
3. Pendampingan pelaksanaan program belum memadai, baik dari sisi kualitas sumber daya manusia maupun dari sisi dukungan pemerintah daerah

Permasalahan Khusus

1. Permasalahan pelaksanaan PKH:
 - a. Terkait dengan fungsi pendampingan yang masih terkendala oleh rasio jumlah personil dan kapasitas kemampuan. Efektivitas kinerja pendamping sangat dipengaruhi kondisi geografis dan mekanisme pengembangan kapasitas.
 - b. Keterkaitan (*linkage*) dengan program penanggulangan kemiskinan dan inisiatif program daerah lainnya yang masih lemah. Komplementaritas ini belum terintegrasi dengan baik padahal peningkatan sumberdaya tidak hanya diperlukan pada anak peserta PKH saja namun juga pada sumberdaya rumah tangga atau keluarga secara keseluruhan.
 - c. Sistem Informasi Manajemen PKH (SIM-PKH) merupakan tulang punggung program yang berkaitan dengan kondisi peserta. Terkait dengan perluasan cakupan, maka peningkatan jumlah RTSM akan berdampak pada SIM secara keseluruhan. Selain itu

perlu disiapkan mekanisme yang dapat mengakomodasi pergeseran fungsi MIS dari pusat ke daerah untuk meningkatkan efektivitas fungsi monitoring dan evaluasi program.

2. Pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) program KB belum optimal terjangkau secara merata, terutama pada sasaran khusus atau sulit seperti masyarakat miskin dan wilayah kumuh, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta wilayah kepulauan dan sungai. Disamping itu juga, sasaran belum ditunjukan/difokuskan kepada pasangan muda dan pasangan yang memiliki dua anak. Hal ini mengakibatkan masih tingginya tingkat ketidakberlanjutan (DO) kesertaan ber-KB, yaitu sekitar 20 persen.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan redistribusi tanah kendala yang dihadapi adalah semakin berkurangnya jumlah sumber tanah obyek reforma agraria (TORA). Hal ini dikarenakan faktor kelangkaan tanah TORA yang telah didistribusikan sejak tahun 1961. Dari berbagai jenis sumber TORA tersebut, hanya tanah terlantar dan kawasan hutan yang telah dilepaskan masih cukup tersedia.
4. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program klaster 2 adalah (i) minimnya dukungan regulasi bagi pengembangan desa dan perdesaan dan (ii) belum memadainya kapasitas SDM, baik pemerintah desa, lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan.
5. Permasalahan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan desa melalui PNPM-MP adalah (i) masih rendahnya komitmen daerah dalam pengalokasian Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) untuk mendukung Program PNPM-MP dan (ii) koordinasi lintas SKPD yang masih lemah. Perkiraan permasalahan tersebut teridentifikasi dari beberapa kasus yang sering muncul dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan menjadi permasalahan pada tahun berikutnya. Dalam pelaksanaan kegiatan PUAP masih ditemui kendala adanya keterlambatan dalam penyampaian bantuan PUAP kepada penerima manfaat karena lokasi penerima yang jauh (terpencil) dan ketidaksiapan penerima manfaat dalam memenuhi persyaratan antara lain dalam penyediaan rekening bank sebagai media penyaluran bantuan.

6. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program di Klaster 3 yaitu belum optimalnya upaya-upaya yang ada untuk meningkatkan produktivitas usaha mikro dan kecil. Usaha mikro dan kecil juga belum banyak yang terhubung dengan layanan pendampingan usaha, kerja sama usaha yang berbasis nilai tambah, dan pasar yang dibutuhkan untuk mendukung pengembangan usahanya serta meningkatkan pendapatannya secara berkelanjutan.
7. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program di Klaster 4 antara lain (i) dalam hal koordinasi lintas sektor antara pusat dan daerah dalam pelaksanaan program, (ii) status lahan dalam rangka sertifikasi tanah dan pembangunan rumah untuk nelayan, (iii) belum memadainya kesiapan kelompok penerima; (iv) belum maksimalnya sistem pelayanan di tingkat penyedia layanan, terutama dari segi kualitas dan kemampuan layanan untuk menjangkau kelompok miskin yang sulit terjangkau; (v) masih adanya ketimpangan antar daerah dan antar kelompok masyarakat (miskin dan non-miskin) untuk mengakses pelayanan dasar; (vi) belum tersedianya sistem pelayanan terpadu yang menyediakan informasi dan pendampingan bagi kelompok penerima potensial untuk mengakses program-program yang ada, terutama di tingkat komunitas.
8. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan capaian pelaksanaan program-program di tahun 2013 dan permasalahan yang akan dihadapi di tahun 2014, tingkat kemiskinan nasional ditargetkan dapat diturunkan hingga pada kisaran 8-10 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2014.

1.2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mendukung tema RKP 2014 untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, program-program penanggulangan kemiskinan perlu dipertajam dan diperluas baik target maupun sasarannya. Untuk itu, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan adalah

Mempercepat sasaran pengurangan kemiskinan melalui:

Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkeadilan;

Penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung kebutuhan dasar berupa pangan, sandang, perumahan, kesehatan,

pendidikan, dan pemberian akses modal yang mendukung peningkatan produktivitas usaha dan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah;

Perbaiki pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui sinergisitas pelaksanaan program-program tersebut terutama di kantong-kantong kemiskinan yang telah ditentukan sebagai *Quick Wins* 2014 MP3KI

Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial yang telah ada sehingga semua penduduk miskin dan rentan dapat berpartisipasi penuh dan menerima manfaatnya;

Mengoptimalkan sistem pembangunan partisipatif yang dirancang untuk menjamin partisipasi aktif penduduk miskin dan rentan dalam pengambilan keputusan di berbagai tahapan proses pembangunan.

Memperkuat kegiatan usaha masyarakat miskin, termasuk membangun keterkaitan dengan MP3EI;

Adapun arah kebijakan lainnya dijabarkan melalui 5 (lima) fokus prioritas yaitu:

Fokus 1. Penyempurnaan dan Pengembangan Sistem Perlindungan Sosial yang Komprehensif

Pada tahun 2014 Fokus 1 yang terkait bantuan sosial berbasis keluarga akan diperkuat dan ditingkatkan cakupannya dalam rangka membangun sistem perlindungan sosial yang komprehensif. Pengembangan sistem jaminan sosial bidang kesehatan dan ketenagakerjaan sebagai bagian dari skema perlindungan sosial terus disempurnakan sehingga semua penduduk miskin dapat berpartisipasi penuh. Mulai 1 Januari 2014 penyelenggaraan jaminan sosial akan dikelola oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Dalam UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, ditetapkan dua badan penyelenggara yang bertanggung jawab mengelola program jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan akan menyelenggarakan jaminan kesehatan, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan akan menyelenggarakan jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Saat ini, program jaminan kesehatan telah mencakup sekitar 63,2 persen total penduduk Indonesia. Namun masih terfragmentasi dalam banyak program dan penyelenggara. Sasaran jaminan kesehatan pada tahun 2014 ditargetkan untuk mencakup 121,6 juta orang (Askes, JPK Jamsostek, TNI Polri, Jamkesmas, dan sebagian

Jamkesda) sejalan dengan mulai beroperasinya BPJS Kesehatan, dan akan mencakup seluruh penduduk pada tahun 2019.

Pada tahun 2014 akan dilakukan pula: (i) Perluasan cakupan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 3,0 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS); (ii) Penyiapan strategi perluasan sasaran program dan komplementaritas kesiapan sisi layanan, (iii) Penguatan kapasitas manajemen dan jumlah pendamping, (iv) Peningkatan sistem informasi manajemen yang komprehensif, dan (v) Peningkatan koordinasi dan peran antara K/L dan pemerintah daerah; (vi) Peningkatan kualitas dan penyempurnaan pola pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar, lanjut usia telantar dan penyandang disabilitas telantar dan/atau berat; (vii) Pelaksanaan redistribusi tanah sebanyak 142.750 bidang; serta (viii) Penguatan akses dan kualitas pelayanan program KB bagi keluarga miskin di daerah tertinggal, terpencil dan perbatasan.

Fokus 2. Penyempurnaan dan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan PNPM Mandiri

Dalam Fokus 2, pada tahun 2014, penyempurnaan pelaksanaan PNPM Mandiri dilakukan dengan: (i) Melanjutkan pelaksanaan PNPM Mandiri inti di 6.894 kecamatan di seluruh Indonesia; (ii) Memperbaiki desain program dan mekanisme untuk meningkatkan partisipasi kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan, antara lain dengan penguatan kegiatan khusus untuk kepala keluarga perempuan dan kelompok masyarakat rentan terkena dampak krisis; (iii) Penguatan integrasi perencanaan partisipatif ke dalam perencanaan regular antara lain melalui perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada masyarakat miskin (*pro-poor planning and budgeting*). Penguatan integrasi perencanaan ini diharapkan akan menjadi dasar bagi sinergi program-program sektoral dan daerah lainnya yang ditujukan untuk pengurangan kemiskinan; (iv) Memperbaiki kompetensi dan profesi tenaga pendamping atau fasilitator PNPM Mandiri melalui antara lain sertifikasi, perbaikan pelatihan, dan pengembangan basis data profil dan kinerja fasilitator. Selain itu, perlu juga dikembangkan sistem *reward* yang akan memotivasi fasilitator untuk lebih berdedikasi dan berprestasi; (v) Melakukan koordinasi dan komunikasi secara intensif antara pemerintah pusat dan daerah untuk koordinasi pelaksanaan dan pengembangan sistem pendukung program seperti data dan informasi, supervisi dan monitoring, serta penanganan pengaduan masyarakat. Terkait

hal ini, perlu dilakukan penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); serta (vi) Meningkatkan efektivitas Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) melalui perbaikan kriteria alokasi yang tidak hanya mempertimbangkan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan wilayah, namun juga memasukkan kriteria tingkat kesulitan wilayah agar keseimbangan biaya dan efektivitas hasil yang didapat lebih baik.

Fokus 3. Penguatan Usaha Mikro dan Kecil

Fokus Pemerintah untuk penguatan usaha mikro dan kecil pada tahun 2014 mencakup arah kebijakan yang lebih menyeluruh dalam rangka meningkatkan produktivitas usaha mikro, serta akses usaha mikro dan kecil kepada sumber daya produktif (modal, bahan baku, informasi dan teknologi). Selain itu, untuk menghadapi tantangan pada tahun 2014, serta dalam rangka meningkatkan sinergi dan keterpaduan, berbagai upaya akan dilakukan antara lain (i) pengintegrasian usaha mikro di 6 sentra produksi di 6 koridor ekonomi, (ii) pengembangan wirausaha baru dan penguatan kewirausahaan usaha mikro, (iii) peningkatan akses kepada sumber daya produktif dan pasar; (iv) peningkatan kapasitas teknis dan manajemen; dan (v) penerapan teknologi. Hasilnya diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan dan peran usaha mikro dan kecil dalam skema usaha yang berbasis rantai nilai melalui optimalisasi sumber daya lokal di sentra-sentra pertanian, perikanan dan industri pengolahan. Penguatan kapasitas usaha mikro dan kecil, peningkatan akses ke sumber daya produktif dan pasar, serta penerapan teknologi diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan usaha, peningkatan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, dan peningkatan keberlanjutan usaha yang akan berdampak pada perbaikan pendapatan dan kesejahteraan penduduk miskin dan rentan.

Fokus 4. Peningkatan dan Perluasan Program-Program Pro-Rakyat

Dalam Fokus 4 pada tahun 2014 akan tetap dilanjutkan peningkatan dan perluasan program-program pro-rakyat yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan termarjinalkan. Program Pro-Rakyat dalam Kluster 4 Program Penanggulangan Kemiskinan, meliputi fasilitasi akses terhadap rumah murah, pengembangan akses air minum dan sanitasi, serta penyediaan sambungan listrik bagi rumah tangga miskin. Terlepas dari kemajuan yang telah dicapai, penyediaan akses

elayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan di kantong-kantong kemiskinan dan daerah terpencil masih menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, dalam meningkatkan pelayanan dasar untuk pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar penduduk miskin dan rentan akan dilakukan melalui strategi *supply side* (i) meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sarana pelayanan publik dan (ii) meningkatkan jangkauan layanan publik untuk penduduk miskin dan rentan.

Fokus 5. Peningkatan Sinkronisasi dan Efektivitas Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan serta Harmonisasi antar Pelaku

Fokus 5 di tahun 2014 akan dilakukan: (i) pengembangan kebijakan teknis khususnya dalam penguatan desentralisasi program penanggulangan kemiskinan; (ii) pengembangan skema kebijakan alokasi pembiayaan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan penetapan pagu indikatif kecamatan; penyusunan pedoman umum yang menegaskan peran dan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penetapan sistem dan mekanisme *pro-poor budgeting*, dan penerapan mekanisme tanggung jawab; (iii) penguatan kelembagaan masyarakat yang mencakup kegiatan untuk merumuskan dasar hukum bagi eksistensi lembaga pemberdayaan masyarakat dan perannya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat serta penerapan kebijakan kelembagaan dana bergulir masyarakat termasuk prosedur dan mekanisme pengelolannya; (iv) mengembangkan pola kemitraan dengan dunia usaha dan BUMN, yaitu dengan program penyaluran dana tanggung jawab sosial (*Corporate Social Responsibility/CSR*, dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan/PKBL) untuk membantu mengembangkan daerah miskin; dan (v) penguatan peran lembaga TKPK Daerah khususnya dalam mengkoordinasikan program-program penanggulangan kemiskinan.

1.2.2 Perubahan Iklim Global

1.2.2.1 Kondisi Umum

Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan fenomena yang penting dalam perencanaan pembangunan nasional, karena berdampak signifikan terhadap hasil pembangunan dan keberlangsungan kehidupan. Fenomena yang terjadi seperti (1) kenaikan permukaan air laut, (2) perubahan dan pergeseran musim hujan dan musim kering yang berdampak pada produksi pertanian,

dan (3) peningkatan frekuensi dan intensitas banjir, kekeringan dan kebakaran hutan akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan apabila tidak ditangani secara tepat dan menyeluruh. Secara global, perubahan iklim juga telah berdampak pada gagalnya produksi komoditas pangan yang mengakibatkan naiknya harga komoditas pangan pokok dunia.

Berkaitan dengan itu, Indonesia terus berperan aktif dalam upaya menurunkan laju perubahan iklim dengan mengurangi emisi gas rumah kaca. Indonesia telah mensahkan *United Nations Framework Convention on Climate Change*-UNFCCC melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 dan telah meratifikasi Protokol Kyoto atas UNFCCC melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 2004, serta berperan aktif melalui berbagai kerjasama baik bilateral maupun multilateral di bidang perubahan iklim, seperti dengan Australia, Jerman, Inggris, UNDP, Bank Dunia dan sebagainya.

Sebagai wujud komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020, pada tahun 2011 telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), Peraturan Presiden ini berisikan rencana aksi dari sektor-sektor prioritas untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional. Untuk mendukung penyusunan RAN-GRK tersebut, telah ditetapkan pula Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional. Di samping itu, telah diluncurkan dan disosialisasikan Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), yang akan memberikan arahan bagi daerah dalam menyusun RAD-GRK dalam kurun waktu 12 bulan sejak RAN-GRK ditandatangani. Pada tahun 2012 telah disahkan 29 RAD-GRK dalam bentuk Peraturan Gubernur (Pergub), dan di tahun 2013 ditargetkan untuk dapat memfinalkan baseline emisi dan upaya pelaksanaan penurunan emisi di tingkat nasional/daerah, serta dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAN/RAD-GRK. Selain mitigasi, upaya adaptasi juga dilakukan sebagai bentuk antisipasi dalam mengatasi perubahan iklim global. Saat ini pemerintah

sedang menyusun Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API), yang berisikan rencana aksi adaptasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di Bidang Ketahanan Ekonomi (Sub-bidang Ketahanan Pangan dan Sub-bidang Kemandirian Energi), Bidang Ketahanan Sistem Kehidupan (Sub-bidang Kesehatan, Sub-bidang Pemukiman, dan Sub-bidang Infrastruktur), Bidang Ketahanan Ekosistem, Bidang Ketahanan Wilayah Khusus (Sub-bidang Perkotaan, dan Sub-bidang Pesisir dan Pulau-pulau Kecil), dan Bidang Pendukung. Diharapkan, rancangan RAN-API tersebut dapat difinalisasi pada kuartal pertama tahun 2013, dan dilanjutkan dengan implementasi di masing-masing sektor terkait.

Dalam hal pendanaan Pemerintah telah membentuk wadah pengelolaan dana perubahan iklim berupa *Indonesia Climate Change Trust Fund* (ICCTF). Melalui ICCTF, masyarakat internasional akan dapat menyalurkan dana komitmen perubahan iklim mereka untuk dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Dana dalam ICCTF disepakati untuk digunakan bagi 3 (tiga) kegiatan yaitu: (1) pengembangan pengelolaan lahan gambut berkelanjutan, (2) langkah-langkah konservasi energi, dan (3) penyadaran publik, pelatihan dan pendidikan untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Berkaitan dengan pengelolaan hutan, upaya menghadapi perubahan iklim dilakukan melalui penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan (*Sustainable Forest Management/ SFM*). Emisi gas rumah kaca pada sektor kehutanan disebabkan oleh pembukaan lahan untuk kegiatan lain, seperti pertanian, perkebunan, permukiman, pertambangan, infrastruktur dan terjadinya kerusakan hutan akibat bencana alam. Dalam rangka pengurangan dorongan pembukaan hutan dan penyebab kerusakan hutan, telah dilakukan penanganan *illegal logging*, pencegahan kebakaran hutan, serta penanggulangan perambahan hutan secara liar. Di sisi lain, untuk meningkatkan penyerapan gas karbon dioksida dan stok karbon telah dilaksanakan upaya penanaman dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis di berbagai wilayah. Pada tahun 2012 upaya tersebut diperkirakan telah mencapai 509.518 hektar. Sebagai upaya pendukung di sektor kehutanan telah dilakukan juga peningkatan *forest governance* melalui penyelesaian tata batas 16.336,07 km

pada tahun 2012 dan pembentukan kelembagaan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) di seluruh provinsi, serta penetapan peruntukan dan fungsi kawasan hutan di 22 provinsi yang digunakan sebagai bahan masukan penetapan RTRW Provinsi. Sejalan dengan hasil UNFCCC, Indonesia juga telah mengembangkan mekanisme *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation* (REDD) serta demonstration activities, dan penyusunan strategi, kelembagaan dan mekanisme pendanaan.

Pada sektor energi, telah dilakukan berbagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, diantaranya melalui optimalisasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai energi bersih yang ramah lingkungan, dan kebijakan konservasi/efisiensi energi. Sebagai langkah nyata untuk menarik investasi pengembangan energi terbarukan, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan "*Feed in Tariff*" melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2012 untuk biogas, biomassa, dan sampah kota, dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2012 untuk panas bumi. Sementara *Feed in Tariff* untuk jenis energi air (mini/mikro hidro) dan surya masih dalam tahap finalisasi. Selain itu, saat ini sedang dilakukan finalisasi penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengembangan Energi Baru dan terbarukan sebagai amanat dari Undang Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi. Untuk kebijakan konservasi/efisiensi energi, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air dalam mendukung pelaksanaan peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 70 Tahun 2009 mengenai Konservasi Energi.

Pada sektor kelautan, telah dilakukan peningkatan kapasitas dan ketahanan masyarakat di wilayah pesisir dalam mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim melalui sosialisasi, penyadaran masyarakat dan pelatihan. Dalam rangka peningkatan ketahanan wilayah pesisir terhadap perubahan iklim dan bencana, pada tahun 2012 telah dinisiasi pengembangan Desa Pesisir Tangguh di 48 desa pada 16 Kabupaten/Kota yang memiliki kondisi lingkungan yang kumuh, terjadi degradasi lingkungan pesisir, dan rawan terhadap bencana dan perubahan iklim. Selain itu, rehabilitasi mangrove juga dilakukan di berbagai lokasi wilayah pesisir

dengan luas rehabilitasi mencapai 110 hektar. Kelembagaan pengelolaan mangrove telah diperkuat dengan adanya Kelompok Kerja Mangrove Nasional yang melibatkan berbagai institusi. Dalam rangka adaptasi perubahan iklim di wilayah pesisir, pengelolaan ekosistem pesisir juga telah dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi perairan seluas 15,7 juta ha.

Dalam rangka peningkatan kualitas informasi, dilakukan pengembangan informasi dini di bidang iklim dan cuaca secara cepat dan akurat, sebagai instrumen untuk mengambil langkah-langkah antisipasi. Pada saat ini sedang disusun pula Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Mitigasi Bencana sebagai turunan dari Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan data BNPB, tahun 2002-2011 menunjukkan bahwa sekitar 89% dari total bencana di Indonesia didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Perubahan iklim global, degradasi lingkungan, dan bertambahnya jumlah penduduk semakin memperbesar ancaman risiko bencana. Untuk itu, upaya penanggulangan bencana telah dilakukan peningkatan kapasitas pemerintah dan masyarakat di 33 kab/kota risiko tinggi bencana melalui pengurangan risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, dan sosialisasi pengurangan risiko bencana kepada masyarakat.

Pengembangan upaya adaptasi dampak perubahan iklim yang telah dilaksanakan di bidang pertanian antara lain meliputi: pengembangan Sistem Intensifikasi Beras (*System of Rice Intensification* – SRI), pengembangan penelitian sumber daya lahan pertanian, penyiapan kalender tanam semi dinamik untuk Kalimantan dan Sulawesi, pengembangan pola integrasi tanaman-ternak, pengembangan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) Perubahan Iklim, pengelolaan sumberdaya ikan, serta pengembangan sistem kesehatan ikan dan lingkungan pembudidayaan ikan.

Langkah-langkah konkrit tersebut menunjukkan adanya keseriusan masyarakat Indonesia dalam melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Indonesia sekaligus berkontribusi pada masyarakat global.

1.2.2.2 Permasalahan

Berkaitan dengan kelembagaan, dirasakan banyaknya pemangku kepentingan dalam penanggulangan dampak perubahan iklim, rendahnya kesiapan institusi, dan penanganan yang bersifat parsial. Pengarusutamaan dalam melaksanakan berbagai upaya adaptasi dan mitigasi tersebut diatas perlu terus didukung dengan peningkatan kapasitas, baik kelembagaan penanganan dampak perubahan iklim, dan kemampuan serta partisipasi masyarakat.

Berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, masih dihadapi: (1) rendahnya kapasitas sumber daya manusia; (2) masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap upaya penanganan perubahan iklim; (3) masih kurangnya kapasitas pemerintah daerah dalam memadukan adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana ke dalam perencanaan pembangunan daerah; dan (4) masih kurangnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Di bidang instrumen penerapan, dirasakan masih kurangnya kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pelaksana kegiatan di bidang perubahan iklim; masih terbatasnya sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan penanganan dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana; serta belum terciptanya sistem dan mekanisme insentif/disinsentif.

Mengingat hal-hal tersebut di atas, sasaran pembangunan lintas bidang perubahan iklim dalam RKP 2014 adalah: (1) Meningkatnya pemahaman dan kesadaran para pelaku pembangunan untuk menerapkan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dalam setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan; (2) Meningkatnya kapasitas para pelaku dan langkah-langkah konkrit adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian, kelautan perikanan, pesisir, sarana dan prasarana, kesehatan; (3) Meningkatnya pelaksanaan rencana aksi mitigasi perubahan iklim di sektor pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi, transportasi, industri, dan pengelolaan limbah; (4) Tersusunnya basis data dan indikator dalam pengukuran capaian pengendalian dampak perubahan iklim; (5) Terciptanya sistem dan mekanisme untuk mendorong diberlakukannya insentif/disinsentif di bidang perubahan iklim, (6) Meningkatnya sumber-sumber pendanaan alternatif bagi kegiatan perubahan iklim; (7) Tersusunnya rencana aksi

pengurangan risiko bencana, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di daerah; dan (8) Meningkatnya kapasitas kesiapsiagaan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.

1.2.2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Untuk itu strategi untuk mengantisipasi dampak dan mengendalikan laju perubahan iklim adalah sebagai berikut: (1) Mensosialisasikan dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional (RAN) serta Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK); (2) Melaksanakan RAN Adaptasi Perubahan Iklim; (3) Meningkatkan riset dan menerapkan teknologi mutakhir dan rendah emisi dalam rangka adaptasi terhadap perubahan iklim; (4) Sosialisasi dan diseminasi informasi mengenai perubahan iklim, mitigasi dan adaptasinya kepada masyarakat luas, baik secara langsung, maupun melalui media massa/ elektronik; (5) Menyiapkan inventarisasi GRK sebagai basis data dalam menurunkan emisi GRK; (6) Melakukan pemantauan melekat terhadap pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi untuk mengukur capaian target penanganan pencegahan dampak perubahan iklim; (7) Sosialisasi dan dukungan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PRB) di daerah; dan (8) Dukungan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana, melalui gladi, simulasi penanggulangan bencana dan pemberdayaan masyarakat di daerah rawan bencana.

Arah kebijakan lintas bidang untuk mengantisipasi dampak dan mengendalikan laju perubahan iklim pada tahun 2014 diarahkan untuk (1) melaksanakan inventarisasi dan penurunan emisi gas rumah kaca; (2) meningkatkan upaya mitigasi terutama di sektor kehutanan dan energi; (3) meningkatkan upaya adaptasi pada sektor pertanian dan perikanan, terutama dalam rangka pengamanan produksi pangan; (4) meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat dalam mitigasi dan adaptasi terutama di daerah-daerah; dan (5) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya pengurangan risiko bencana dan mitigasi bencana.

1.2.3 Pembangunan Kelautan Berdimensi Kepulauan

1.2.3.1 Kondisi Umum

Pembangunan kelautan di Indonesia sangat memerlukan keterpaduan dan harmonisasi dari sektor-sektor yang terkait didalamnya. Pentingnya sinergi antar sektor merupakan kunci utama dalam membangun kelautan secara berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2010-2014 telah mengamanatkan tentang pentingnya pembangunan kelautan sebagaimana yang dituangkan pada misi ketujuh, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Misi ini ditujukan untuk menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Selain itu, keterpaduan juga diupayakan dalam pengelolaan sumber daya kelautan serta peningkatan kesejahteraan melalui pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil, termasuk pulau terdepan/terluar, termasuk sarana dan prasarana penghubung antarpulau, serta meningkatkan upaya pelestarian lingkungan pesisir dan laut.

Salah satu isu penting dalam kelautan adalah penyelesaian batas dengan negara tetangga untuk membuat kesepakatan tentang penetapan garis batas laut teritorial, landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Penetapan batas secara tuntas telah dilakukan dengan Papua Nugini berupa batas laut serta Australia berupa batas landas kontinen dan ZEE. Ketetapan batas laut teritorial sudah tercapai pada sebagian segmen batas laut wilayah dengan Malaysia dan Singapura, landas kontinen dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini. Hingga tahun 2012, telah tercapai 16 perjanjian perbatasan laut antara Indonesia dengan negara tetangga. Khusus tahun 2012, telah dilaksanakan perundingan batas maritim sebanyak 15 kali, antara lain dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Palau.

Dalam rangka menekan ancaman kekerasan berupa pembajakan, perompakan, sabotase, dan teror terhadap obyek vital; ancaman navigasi berupa kekurangan dan pencurian sarana bantu navigasi; ancaman sumber daya berupa perusakan dan pencemaran laut; dan ancaman kedaulatan dan hukum berupa illegal fishing, illegal logging, illegal mining termasuk pengambilan harta karun, penyelundupan barang dan senjata, serta imigran gelap, pemerintah terus menerus meningkatkan upaya-upaya pengamanan perairan Indonesia, termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

Dalam tahun 2012, telah dilakukan harmonisasi serta koordinasi antarinstansi yang memiliki tugas di laut, yaitu Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla), TNI-AL, TNI-AU, Polisi Air, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan dalam pengamanan dan pengawasan di laut. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kemampuan operasi pengawasan, pengejaran, dan upaya keselamatan pelayaran di laut, Bakorkamla telah membangun kapal patroli katamaran; *National Picture Compilation* (NPC), *Ground Station* (GS) Kamla, *Maritime Regional Control Center* (MRCC)/*Regional Control Center* (RCC), dan menyediakan *Call Center*.

Keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI perlu didukung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di pulau-pulau kecil. Untuk itu, pada tahun 2012 pengelolaan pulau-pulau kecil difokuskan pada identifikasi potensi dan pemetaan pulau-pulau kecil di 66 pulau dari target 60 pulau. Khusus untuk penyediaan infrastruktur pulau-pulau kecil termasuk pulau-pulau kecil terdepan/terluar, upaya yang dilakukan pada tahun 2012 antara lain melalui pembangunan sarana dan prasarana yang meliputi listrik tenaga surya, sarana air minum, jalan setapak, dan dermaga di 102 pulau kecil dari target sebanyak 60 pulau. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut berdampak pada peningkatan aksesibilitas masyarakat pulau-pulau kecil ke sumber pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan pembangunan antara pulau besar atau negara tetangga dengan pulau-pulau kecil.

Sehubungan dengan berkembangnya kerjasama ekonomi trans regional seperti ASEAN, *Asia Pacific Economic*

Cooperation (APEC), *Asean Free Trade Area* (AFTA), dan *East Asia Summit* (EAS), yang menuntut Indonesia untuk bekerjasama dan membuka akses pasar, akses transportasi, maupun akses terhadap fasilitas prasarana dan sarana lainnya di Indonesia khususnya transportasi laut, maka penguatan konsep kedaulatan ekonomi dan wilayah harus dapat dijabarkan dalam arah dan kebijakan pembangunan berdimensi kepulauan yang ditujukan untuk memperkuat konektivitas nasional Indonesia sebelum terlanjur membuka akses yang luas terhadap regional maupun global.

Peningkatan penyediaan pelayanan jasa transportasi antara lain dilakukan melalui pembangunan baru dan lanjutan 9. unit kapal perintis/penumpang dan subsidi pelayaran perintis sebanyak 75 trayek. Selain itu, pada tahun 2012 telah dilakukan (i) pengerukan dan pemeliharaan alur pelayaran sejumlah 11,5 juta M³; (ii) peningkatan/pembangunan pelabuhan baru dan lanjutan di 245 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia; (iii) pembangunan sarana bantu navigasi pelayaran (SBNP) yang meliputi menara suar 89 unit dan rambu suar 250 unit, pelampung suar 85 unit.

Selanjutnya, dalam rangka mempertahankan fungsi ekosistem pesisir dan laut sebagai pendukung kehidupan, dan mewujudkan pembangunan wilayah pesisir dan laut yang berkelanjutan, upaya yang dilakukan antara lain melalui penetapan kawasan konservasi perairan yang mencapai 15,78 juta ha sampai dengan tahun 2012, rehabilitasi dan pemeliharaan terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi, peningkatan penanaman mangrove, serta peningkatan kerja sama internasional dalam rangka konservasi laut melalui *Coral Triangle Initiative* (CTI), *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion* (SSME), *Mangrove for the Future* (MFF), *Bismarck Solomon Seas Ecoregion* (BSSE), *Arafura and Timor Seas Action* (ATSEA). Upaya kerja sama antardaerah juga dilakukan dalam rangka pengelolaan Teluk Bone, Teluk Tomini dan Selat Karimata.

Dalam kancah internasional, pertemuan APEC tahun 2012 telah menghasilkan beberapa kesepakatan diantaranya mendorong upaya untuk isu-isu utama terkait laut dalam mendukung integrasi ekonomi regional sejalan dengan Strategi Pertumbuhan. Hal ini dijabarkan dalam upaya

memerangi IUU fishing dan perdagangan yang terkait, dan menangani keberlanjutan laut dan sumber daya kelautan melalui pendekatan holistik.

Pembangunan kelautan berdimensi kepulauan ini perlu didukung dengan informasi geospasial kelautan yang merupakan informasi utama dalam pengelolaan lingkungan, penanganan bencana dan pengamanan serta perundingan batas yurisdiksi negara Indonesia dengan negara tetangga. Pencapaian tahun 2012 terkait pembangunan data dan informasi geospasial kelautan antara lain: (i) Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) skala 1:25.000, 1:50.000, 1:250.000, dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) skala 1:500.000 sebanyak 80 Nomor Lembar Peta (NLP); (ii) peta resmi tingkat peringatan tsunami sebanyak 4 NLP; (iii) peta dasar kelautan dan kedirgantaraan sebanyak 2 NLP; dan (iv) peta tematik sumber daya alam dan lingkungan hidup laut sebanyak 90 NLP.

1.2.3.2 Kondisi Umum

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan antara lain adalah masih adanya tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan adanya konflik antarsektor dan antardaerah dalam pemanfaatan sumber daya kelautan. Dari sisi kedaulatan NKRI, permasalahan yang dihadapi adalah masih belum selesainya batas wilayah laut Indonesia dengan beberapa negara tetangga dan masih sering terjadi pelanggaran lintas batas laut, serta rendahnya tingkat keamanan di beberapa wilayah laut. Dalam melaksanakan diplomasi perbatasan, kesediaan negara mitra perbatasan untuk berunding menjadi faktor krusial atas kemajuan perundingan.

Luasnya wilayah perairan Indonesia yang dihadapkan pada keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan dan pengawasan terutama kapal patroli, *surveillance system*, dan pos-pos keamanan mengakibatkan masih banyaknya area-area kosong (*blank spot*) yang tidak terjangkau operasi pengawasan dan pengamanan. Akibatnya di wilayah laut yurisdiksi nasional, intensitas gangguan keamanan dan pelanggaran hukum masih tinggi dan belum sepenuhnya dapat ditangani oleh negara. Kondisi ini juga terkait dengan intensitas operasi yang sangat

terbatas baik yang dilakukan secara terpadu maupun secara mandiri oleh lembaga-lembaga yang berwenang di laut. Masih rentannya keamanan pelayaran di wilayah yuridiksi Indonesia membuat dunia pelayaran internasional masih menempatkan Selat Malaka dan perairan internasional Indonesia lainnya sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Pengamanan jalur pelayaran internasional yang melalui Selat Malaka dan tiga jalur ALKI adalah tanggung jawab Pemerintah Indonesia.

Dalam upaya penguatan konektivitas nasional, permasalahan yang masih dihadapi dalam transportasi laut yang berperan sebagai penghubung antarpulau adalah terbatasnya jumlah kapal dan rute pelayanan penyediaan transportasi angkutan laut dan penyeberangan perintis. Hal ini menyebabkan rendahnya aksesibilitas dari dan ke pulau-pulau yang merupakan daerah terpencil dan tertinggal.

Khusus di pulau-pulau kecil terluar, masih terdapat kesenjangan ekonomi antara masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tersebut dengan penduduk di negara tetangga yang dapat berdampak bagi penurunan rasa kebangsaan atau nasionalisme. Pulau-pulau kecil terluar merupakan daerah yang rawan terhadap pelanggaran wilayah kedaulatan dan pelanggaran hukum (misalnya sebagai daerah transit kegiatan penyelundupan, *illegal entry*, terorisme, dan *illegal fishing*).

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pembangunan kelautan adalah menurunnya kualitas ekosistem pesisir dan laut, yang berakibat pada menurunnya ketersediaan sumber daya plasma nutfah. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kegiatan ekonomi di wilayah pesisir menimbulkan dampak negatif terhadap ekosistem pesisir dan laut, seperti pencemaran lingkungan laut dan pesisir akibat limbah hasil samping kegiatan pertambangan, manufaktur dan agroindustri, limbah aktivitas kehutanan, dan pencemaran akibat tumpahan minyak. Praktik penangkapan ikan yang merusak dan penambangan terumbu karang juga telah memperparah kondisi ekosistem pesisir dan laut. Selain itu, kerusakan lingkungan juga berpotensi semakin meningkat akibat adanya pemanasan global yang menyebabkan meningkatnya muka air laut yang menyebabkan terjadinya

banjir, abrasi dan intrusi air laut, serta terjadinya pemutihan terumbu karang (*coral bleaching*) akibat perubahan iklim.

Dalam hal untuk data dan informasi spasial kelautan, permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dalam hal survey dan kemudahan aksesibilitas data geospasial, sehingga kegiatan penyelenggaraan data geospasial kelautan menjadi tumpang tindih antar instansi penyelenggara. Selain itu, belum banyak survey kelautan terkait dengan pemetaan batimetri dilakukan di Indonesia karena biayanya sangat besar. Padahal, survey batimetri sangat penting dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama di batas landas kontinen, dan pulau-pulau terluar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sasaran pembangunan lintas bidang pembangunan kelautan berdimensi kepulauan adalah: (i) tersusunnya kebijakan kelautan yang terpadu; (ii) terselenggaranya penyelesaian tata batas wilayah laut dengan negara tetangga; (iii) meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana di pulau-pulau kecil, termasuk pulau-pulau terdepan/terluar di 30 pulau serta pemetaan dan identifikasi potensi di 30 pulau-pulau kecil, termasuk penyusunan *masterplan* pulau-pulau kecil terluar; (iv) meningkatnya pengawasan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan pelanggaran di wilayah laut NKRI terutama di Selat Malaka dan jalur ALKI; (v) terkelolanya kawasan konservasi perairan secara berkelanjutan seluas 4,5 juta hektar, dan terpeliharanya kerja sama antardaerah dan antarnegara dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut berupa CTI, SSME, MFF, BSSE, ATSEA, Teluk Tomini, Teluk Bone, dan Selat Karimata; dan (vi) meningkatnya SDM kelautan yang memiliki kompetensi dan daya saing di bidang industri pelayaran, kelautan dan perikanan; (vii) tersedianya data dan informasi geospasial spasial kelautan nasional yang terintegrasi antarinstansi pengelola data spasial kelautan, termasuk pelaksanaan survei batimetri di beberapa wilayah di Indonesia.

1.2.3.3 Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan dan sasaran di atas, kebijakan pembangunan kelautan berdimensi kepulauan diarahkan pada : (i) penyelesaian penyusunan kebijakan kelautan

atau peraturan perundangan tentang kelautan sebagai landasan kebijakan dalam pembangunan kelautan; (ii) mempercepat penyelesaian batas laut yang masih bermasalah melalui peningkatan diplomasi perbatasan; (iii) meningkatkan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan; (iv) meningkatkan kehidupan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, termasuk pulau-pulau kecil terdepan/terluar termasuk pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar masyarakat seperti perhubungan dan komunikasi, transportasi, air bersih, listrik, (v) meningkatkan penyediaan pelayanan transportasi perintis terutama di pulau-pulau kecil, pulau-pulau terluar dan perbatasan serta public service obligation untuk angkutan laut; dan (vi) meningkatkan kualitas ekosistem pesisir dan laut, melalui peningkatan pengelolaan konservasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir (mangrove, lamun dan terumbu karang), pengendalian pencemaran, serta peningkatan kerja sama antardaerah dan antarnegara dalam pengelolaan ekosistem; (vii) meningkatkan kapasitas dan profesionalisme SDM kelautan; (viii) menyediakan data dan informasi spasial kelautan nasional yang terintegrasi antar instansi pengelola data spasial kelautan, termasuk pelaksanaan survey batimetri di beberapa wilayah di Indonesia.

1.2.4 Perlindungan Anak

1.2.4.1 Kondisi Umum

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, definisi anak adalah semua orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Hasil Sensus Penduduk 2010 menunjukkan bahwa jumlah anak mencapai 34,26 persen dari penduduk Indonesia atau sekitar 81,4 juta anak dan diperkirakan meningkat menjadi 33,9 persen atau sekitar 82,5 juta anak pada tahun 2012 menurut hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Melihat jumlah anak Indonesia yang mencapai sepertiga dari jumlah penduduk Indonesia, maka diperlukan upaya yang besar dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan anak-anak Indonesia terpenuhi hak dasarnya dan terlindungi dari berbagai tindak kekerasan agar mereka menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Adapun hak dasar anak tersebut mencakup hak hidup, hak tumbuh dan berkembang secara optimal, serta hak berpartisipasi. Selain itu, setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.

Pemenuhan hak-hak anak seperti diuraikan di atas menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Sesuai dengan UU Perlindungan Anak, negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana dan prasarana dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat adalah berperan serta dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: (a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan (c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

1.2.4.2 Kemajuan Yang Dicapai Sampai Tahun 2012 dan Perkiraan Pencapaian Tahun 2013

Pemenuhan hak anak secara komprehensif dan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan dapat dilihat dari hasil pencapaian pembangunan di berbagai bidang pembangunan terkait, sebagai berikut: Pada bidang kesehatan, terlihat dari peningkatan derajat kesehatan yang ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 32 dan balita dari 44 menjadi 40 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007 dan 2012). Untuk peningkatan status gizi, ditandai dengan menurunnya prevalensi kurang gizi dan stunting (pendek) pada anak balita dari 18,4 persen dan 36,8 persen pada tahun 2007 menjadi masing-masing 17,9 persen dan 35,6 persen pada tahun 2010 (Riskesdas 2007 dan 2010). Selain itu, pemberian imunisasi dasar lengkap terus meningkat dari 53,8 persen pada tahun 2010 menjadi 84,70 persen pada tahun 2011 (Susenas 2011).

Pada bidang pendidikan, terlihat peningkatan akses anak terhadap layanan pendidikan ditandai dengan meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS). Data

Susenas mengindikasikan proporsi anak usia 7-12 tahun yang duduk di bangku sekolah (APS 7-12 tahun) pada persentase yang hampir sama dari 98,02 persen pada tahun 2010 menjadi 97,58 persen pada tahun 2011. Sedangkan Pada kelompok usia 13-15 tahun, APS meningkat dari 86,24 persen pada tahun 2010 menjadi 87,78 persen. Pada periode tahun yang sama, APS 16-17 tahun juga mengalami peningkatan dari 56,01 persen menjadi 57,85 persen. Di samping itu, data Kemendiknas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada tahun 2011 meningkat menjadi 34,54 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 28,97 persen.

Sebagai upaya pemenuhan hak anak dalam mendapatkan identitas kependudukan, telah diterbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Pencatatan Kelahiran Yang Melampaui Batas Waktu Satu Tahun Secara Kolektif, yang diedarkan kepada seluruh hakim dan Pengadilan Negeri dalam rangka mempermudah pengurusan akta kelahiran bagi anak yang usianya sudah lebih dari satu tahun. Menurut data Susenas 2011, cakupan anak usia 0-4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran sebanyak 59 persen. Sedangkan cakupan anak 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran sebesar 63,72 persen diantaranya 47,3 persen dapat menunjukkan akta kelahiran tersebut, dan 16,42 tidak bisa menunjukkan (Susenas 2011).

Upaya perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) mencatat kemajuan yang progresif dengan disyahrkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sebagai tindak lanjutnya, telah disusun pula Modul Terpadu Dalam Rangka Perlindungan dan Penanganan ABH Bagi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait.

Selain itu, upaya perlindungan anak lainnya tercermin dari: (1) disusunnya Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengasuhan, Perwalian dan pengangkatan Anak sebagai penyempurnaan dari PP No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; dan (2) terbitnya PP No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif, sebagai peraturan pelaksanaan dari Pasal 116 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. PP tersebut diantaranya berisi larangan untuk menjual

rokok kepada anak dibawah usia 18 tahun dan ibu hamil.

Data Sakernas Agustus 2012 menunjukkan sekitar 2,7 juta anak usia 15-17 tahun yang masuk dalam kelompok pekerja. Dalam upaya menurunkan jumlah pekerja anak, pada tahun 2012 telah dilaksanakan penarikan terhadap 10.750 pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) dalam rangka Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Sebanyak 9.926 orang atau sekitar 92,33persen dari pekerja anak tersebut, telah berhasil dikembalikan ke dalam satuan pendidikan.

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial bagi anak, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pada tahun 2013 mencakup sekitar 7.610 balita terlantar, 137.376 anak terlantar, 8.515 anak jalanan, 1.040 anak berhadapan dengan hukum (ABH), 1.820 anak dengan kecacatan (ADK), dan 2.145 anak yang membutuhkan perlindungan khusus (AMPK). Kepada anak-anak tersebut diberikan subsidi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti akte kelahiran, kesehatan, gizi, pendidikan, pakaian, penyatuan kembali dengan orang tua/keluarga, alat bantu, dan lain-lain.

Dalam upaya meningkatkan kualitas data perlindungan anak, pada tahun 2012 telah dilakukan persiapan pelaksanaan survey kekerasan terhadap anak (KtA) yang bertujuan untuk mengetahui besaran masalah kekerasan terhadap anak di Indonesia, faktor penyebab, dan dampak KtA terhadap tumbuh kembang anak. Pelaksanaan survey KtA tersebut direncanakan selesai pada tahun 2013.

Sebagai upaya mewujudkan lingkungan yang layak bagi anak, sampai pada tahun 2011 sebanyak 76 kabupaten/kota telah menuju Kota Layak Anak (KLA). KLA merupakan gambaran pencapaian kabupaten/kota dalam hal pemenuhan hak anak, yang mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, partisipasi, serta perlindungan dari tindak kekerasan, penelantaran, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya.

Perkiraan pencapaian perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan pada tahun 2013, antara lain telah direncanakan kegiatan: (1) penyusunan *grand design* pencatatan sipil dan *road map* 2013-2014 oleh Kemendagri, dengan target semua anak 0-4 tahun memiliki akta kelahiran akan dicapai tahun 2014, semua

anak usia 0-17 tahun memiliki akta kelahiran akan dicapai tahun 2017, dan semua penduduk Indonesia memiliki akta kelahiran akan dicapai tahun 2020; (2) evaluasi pelaksanaan kesepakatan 8 menteri tentang Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran Dalam Rangka Perlindungan Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak; dan (3) revisi UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 32 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pengurusan akta untuk anak yang lebih dari satu tahun harus ke pengadilan negeri, akan dihapuskan; (4) penyusunan 6 Peraturan Pemerintah dan 2 Perpres sebagai amanat dari UU SPPA, yaitu tentang Pendidikan dan Pelatihan Aparat Penegak Hukum (APH) dan Hak Anak Sebagai Korban Dan Saksi; serta (5) pelaksanaan Survey Prevalensi KtA, sebagai dasar untuk penyusunan strategi pencegahan anak dari KtA dan penanganan anak korban KtA; (6) Penyusunan Peraturan Presiden tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) sebagai upaya untuk mempercepat pelaksanaan PAUD HI di daerah.

1.2.4.3 Permasalahan dan Sasaran

Pencapaian di bidang perlindungan anak belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak anak secara utuh. Masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dan terus menjadi perhatian pemerintah dalam mengoptimalkan upaya pemenuhan hak anak.

Permasalahan *pertama*, masih belum optimal dan meratanya akses anak dari kelompok tertentu terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang dan kelangsungan hidup. Di bidang pendidikan, antara lain ditunjukkan oleh masih rendahnya: akses anak usia dini ke layanan pengembangan yang holistik dan integratif, akses anak berkebutuhan khusus (ABK) kepada pendidikan inklusif yang berkualitas, akses anak yang ditarik dari pekerja anak ke layanan pendidikan, serta rendahnya angka partisipasi sekolah dan angka melanjutkan sekolah anak dari kelompok miskin. Selain itu, akses anak korban kekerasan dan atau eksploitasi serta anak yang berhadapan hukum ke pelayanan pendidikan masih belum optimal. Di bidang kesehatan, permasalahan terkait anak antara lain masih rendahnya anak usia 2-4 tahun yang menerima ASI eksklusif yaitu sebesar 40,25 persen (Susenas 2011), belum maksimalnya jumlah anak usia 1-4 tahun yang menerima imunisasi lengkap yaitu sebesar

65,25 persen (Susenas 2011). Berdasarkan data Susenas 2011, anak di daerah perdesaan cenderung lebih rendah dalam mendapatkan ASI eksklusif dan imunisasi lengkap dibandingkan dengan anak yang berada di perkotaan. Selain itu juga terjadi kesenjangan capaian imunisasi lengkap yang tinggi antarprovinsi.

Permasalahan *kedua*, masih kurang terlindunginya anak-anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Data Susenas 2011 menunjukkan bahwa sekitar 385,5 ribu anak menjadi korban kejahatan. Pada tahun yang sama, lembaga pemasyarakatan melaporkan sebanyak 51.400 anak berstatus sebagai tahanan dan 3.312 anak berstatus sebagai narapidana. Bareskrim Mabes Polri mencatat bahwa dalam tahun 2011, terdapat 34 anak sebagai korban perdagangan orang. Sampai dengan akhir 2011, terdapat sekitar 500 ribu anak berada dalam pengasuhan/pengawasan panti asuhan dan 4,3 juta anak terlantar (Kemensos). Selain itu, munculnya berbagai tindak kekerasan baru, seperti pornografi dan perdagangan anak melalui media online. Selanjutnya, sekitar 41 persen anak balita dan 36,28 persen anak belum memiliki akta kelahiran (Susenas 2011). Hal ini antara lain karena pengurusan akte kelahiran bagi anak yang usianya sudah diatas 1 tahun harus melalui peradilan dan terdapat banyak pasangan suami istri yang tidak mencatatkan pernikahan mereka secara resmi yang merupakan salah satu syarat dalam pengurusan akte kelahiran anak.

Permasalahan *ketiga*, masih rendahnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh: (1) kapasitas lembaga perlindungan anak terkait implementasi dari berbagai perundang-undangan dan kebijakan yang telah disusun atau disahkan. Hal ini tercermin dari kapasitas sumber daya manusia pelaksana layanan dan sarana prasarana yang tersedia; (2) koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan pusat-daerah dalam pelaksanaan perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan; dan (3) data tentang KtA belum optimal, masih bersifat sektoral dan tidak berkelanjutan.

Permasalahan *keempat*, faktor kultural masih berperan dalam melanggengkan perilaku kekerasan terhadap anak, dengan alasan “demi kebaikan si anak atau tujuannya

baik”. Hal ini menyebabkan pelaku pelanggaran terhadap hak-hak anak dan segala bentuk perlakuan salah yang dialami oleh anak sebagian besar adalah orang-orang terdekat dengan anak. Partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap anak juga belum optimal. Selain itu, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak dilaporkan karena masih menganggap bahwa kasus tersebut adalah aib.

Dengan memperhatikan permasalahan tersebut di atas, maka sasaran pembangunan lintas bidang perlindungan anak pada tahun 2014 adalah:

1. Meningkatnya akses anak atas layanan yang berkualitas untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, termasuk anak dari kelompok miskin, ABK, pekerja anak, dan anak korban kekerasan. Hal ini antara lain diukur dengan menurunnya persentase balita yang kekurangan gizi, meningkatnya cakupan imunisasi dasar, meningkatnya balita yang mendapat ASI eksklusif, meningkatnya APK PAUD, APS7-12 tahun, APS 13-15 tahun, dan APS 16-18 tahun.
2. Meningkatnya perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah. Hal ini diukur dengan menurunnya jumlah kasus kekerasan terhadap anak, meningkatnya akses anak korban kekerasan ke pelayanan yang dibutuhkan, meningkatnya cakupan anak balita/anak yang memiliki akte kelahiran, meningkatnya penanganan kasus ABH berbasis *restorative justice*, serta menurunnya jumlah/pekerja anak.
3. Meningkatnya efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak, sinergi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak, kuantitas dan kualitas tenaga pelaksana perlindungan anak, koordinasi antar kementerian/lembaga/SKPD dan antar pusat dan daerah dalam perlindungan anak, dan pengawasan terhadap efektivitas perlindungan anak.
4. Meningkatnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan, pemangku kepentingan lainnya, dan masyarakat tentang hak-hak anak, pentingnya perlindungan anak, dan pengasuhan yang baik.

1.2.4.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan sasaran yang akan dicapai di atas, kebijakan lintas bidang perlindungan anak tahun 2014 diarahkan pada: (a) peningkatan akses anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak; (b) peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan segala bentuk perlakuan salah; (c) peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak; dan (d) peningkatan advokasi dan sosialisasi tentang hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak. Kebijakan perlindungan anak tersebut dilaksanakan melalui tiga fokus prioritas. *Pertama*, peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak. *Kedua*, perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi. *Ketiga*, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Detil kegiatan prioritas dari 3(tiga) fokus prioritas diatas dapat dilihat di Tabel 2.2.A tentang Target Kinerja Lintas Bidang Perlindungan Anak.

1.2.5 Pembangunan Karakter Bangsa

1.2.5.1 Kondisi Umum

Pembangunan karakter bangsa merupakan salah satu upaya kunci untuk mewujudkan bangsa yang memiliki jati diri dan bermartabat di antara bangsa-bangsa di dunia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025, bahwa visi dan misi pembangunan nasional antara lain adalah mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang maju, mandiri, dan adil, serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika dan berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.

Berbagai upaya untuk memperkuat karakter dan jati diri bangsa telah memberikan landasan bagi terbangunnya masyarakat madani, antara lain ditandai oleh: (1) semakin kokohnya konsolidasi demokrasi yang dilandasi oleh empat pilar bangsa yakni NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika; (2) semakin berkembangnya proses internalisasi nilai-nilai luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara, seperti nilai-nilai persaudaraan, solidaritas

sosial, saling menghargai, serta rasa cinta tanah air; (3) meningkatnya kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan berserikat; dan (4) meningkatnya kohesivitas antar kelompok dalam masyarakat serta tumbuhnya sikap gotong-royong, toleransi, ramah tamah dan menghargai perbedaan.

1.2.5.2 Permasalahan dan Sasaran

Pembangunan karakter bangsa sampai dengan tahun 2012 telah menunjukkan berbagai kemajuan, namun masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi.

Pertama, belum optimalnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan lokal yang relevan dengan tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam Pancasila merupakan landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai filosofi dan ideologi bangsa merupakan pandangan hidup yang diharapkan dapat diejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang merupakan intisari Pancasila dengan menumbuhkembangkan etika kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, meningkatnya konflik horizontal karena alasan perbedaan pandangan politik, agama, kesukuan dan kedaerahan. Perkembangan dunia global yang disertai oleh perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi, dan transportasi menjadikan interaksi antar manusia menjadi semakin intensif. Kondisi yang sedemikian dinamis membawa pengaruh terhadap perubahan orientasi nilai dan perilaku. Kondisi tersebut selain dapat menjadi modal dan pendukung dalam pembangunan nasional, juga dapat memicu terjadinya konflik yang tidak sehat. Untuk itu diperlukan adanya suatu orientasi yang berkelanjutan dalam rangka internalisasi peningkatan tata nilai sosial kemasyarakatan dan budaya dalam setiap aspek pembangunan. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan upaya pelestarian dan penanaman nilai-nilai luhur budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air

sebagai identitas budaya yang berfungsi sebagai perekat persatuan bangsa.

Ketiga, masih rendahnya daya saing dan kemandirian bangsa. Daya saing merupakan modal kemandirian suatu bangsa. Kemampuan bangsa untuk berdaya saing ditentukan oleh upaya bangsa tersebut untuk melestarikan dan mengembangkan pranata sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang kreatif, inovatif, efektif dan efisien. Dengan demikian tantangan yang dihadapi adalah mewujudkan bangsa yang mandiri, berdaya saing, memiliki etos kerja melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta kemandirian aparatur pemerintahan dan aparatur penegak hukum.

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan tersebut, maka sasaran pembangunan karakter bangsa pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (1) meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya karakter bangsa yang berdasarkan falsafah Pancasila untuk meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa; dan (2) meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang maju, mandiri, adil, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab.

1.2.5.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan dan tantangan tersebut di atas, kebijakan pembangunan karakter bangsa diarahkan pada (1) Pengembangan karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing, dinamis, dan berorientasi iptek yang dilandasi oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila; dan (2) Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh; dan (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter dalam rangka mewujudkan daya saing dan kemandirian bangsa dalam era globalisasi.

Kebijakan pembangunan karakter bangsa pada tahun 2014 dilaksanakan sesuai dengan Prioritas Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014, terutama yang memuat upaya-upaya strategis dalam membangun karakter bangsa, antara lain prioritas di bidang: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Sarana dan Prasarana (Komunikasi dan Informatika); (4) Kebudayaan,

Kreativitas dan Inovasi Teknologi; (5) Kesejahteraan Rakyat (Agama, Pemuda dan Olahraga, dan Kependudukan dan Keluarga Berencana); (6) Politik, Hukum dan Keamanan (Politik dan Komunikasi, Pertahanan dan Keamanan); dan (7) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola (Hukum dan Aparatur).

Di bidang pendidikan, upaya peningkatan pendidikan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (1) sosialisasi, edukasi dan internalisasi pentingnya bangsa yang berkepribadian unggul dan berkarakter, (2) internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran pada pendidikan formal, nonformal, informal dalam keluarga dan di tempat bekerja, (3) intervensi regulasi, pelatihan dan pemberdayaan, serta pembiasaan (habitulasi) bagi semua kepentingan, (4) pembudayaan berperilaku dan berkarakter yang dikuatkan dengan penanaman nilai-nilai kehidupan agar menjadi budaya, (5) membangun kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan, dan (6) peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta bahasa perhubungan luas antarbangsa.

Di bidang kesehatan, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan sebagai upaya perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.

Di bidang sarana dan prasarana, khususnya sub bidang komunikasi dan informatika antara lain dilakukan melalui: (1) penyediaan infrastruktur dasar untuk mendukung peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan aksesibilitas terhadap infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika, serta peningkatan jangkauan dan keberlanjutan layanan komunikasi dan informatika di wilayah perbatasan, perdesaaan, terpencil, dan wilayah non-komersial lainnya, dan (2) peningkatan e-literasi melalui peningkatan kualitas SDM TIK termasuk aparatur pemerintah serta mendukung pengembangan industri manufaktur TIK dalam negeri.

Di bidang kebudayaan, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (1) pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal, (2) pemahaman tentang kesejarahan dan

wawasan kebangsaan, (3) pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa, (4) pemberdayaan masyarakat adat, dan (5) pengembangan promosi kebudayaan dengan pengiriman misi kesenian, pameran, dan pertukaran budaya.

Di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (1) penguatan Sistem Inovasi Nasional (SIN) yang diprioritaskan pada penataan kelembagaan iptek untuk membangun tata kelola penelitian dan pengembangan yang efisien dan efektif, yang mampu mendorong kreativitas dan profesionalisme masyarakat iptek, serta mampu membangun kesadaran iptek dan partisipasi masyarakat, dan (2) peningkatan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, ketahanan energi, penciptaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, penyediaan teknologi transportasi, kebutuhan teknologi pertahanan, teknologi kesehatan, serta pengembangan teknologi material maju.

Di bidang agama, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (1) peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, (2) peningkatan layanan keagamaan, (3) peningkatan kualitas lembaga sosial keagamaan, serta penelitian dan pengembangan agama.

Di bidang pemuda dan olahraga, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (1) peningkatan character building, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan, (2) revitalisasi gerakan pramuka, (3) pengembangan penguasaan teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kreativitas pemuda, (4) kesadaran pemuda, (5) pemberdayaan pemuda, (6) pengembangan kepemimpinan pemuda, (7) pengembangan kewirausahaan pemuda, (8) pengembangan kepeloporan/kreativitas pemuda, (9) pembinaan dan pengembangan olahraga, (10) pengelolaan keolahragaan, (11) penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan, dan (12) pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga.

Di bidang kependudukan dan keluarga berencana, upaya

pembangunan karakter bangsa dilakukan melalui pembinaan keluarga melalui: (1) pembinaan keluarga balita dan anak; (2) pembinaan ketahanan remaja; dan (3) pemberdayaan keluarga dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan kesertaan ber-KB, serta meningkatkan kesertaan KB mandiri.

Dibidang politik dan komunikasi, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui : (1) Pemantapan pembangunan Pusat Pendidikan Kebangsaan yang berintikan pada pengembangan dan pemahaman empat pilar dengan konten yang mengutamakan pendekatan kultural dalam menyelesaikan berbagai perbedaan, dan pendidikan budi pekerti, (2) Pelaksanaan pendidikan pemilih secara konsisten, terutama dengan menanamkan hak dan kewajiban dalam demokrasi dengan mengutamakan konten anti-politik uang dan persamaan hak kaum penyandang disabilitas dalam pemilu, (3) Penguatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) serta pemantapan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, (4) Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindakan terorisme, dengan menerapkan pendekatan yang tepat sehingga meminimalisir eksekusi sosial politik yang kontraproduktif terhadap tujuan semula, (5) Pelembagaan dialog publik antara pemerintah dengan berbagai kelompok yang berbeda kepentingan, melalui penguatan FKUB, FKDM, Kominda, FPK, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di daerah dalam mendukung proses konsolidasi demokratisasi dan penyelesaian konflik, (6) Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM komunikasi dan informasi terutama di daerah. (7) Peningkatan kualitas konten informasi publik, (8) Penyebaran informasi publik melalui berbagai media, dengan mempertimbangkan kearifan lokal, (9) Peningkatan efektivitas pelayanan media center terutama di daerah terdepan/terluar, tertinggal, terpencil, serta daerah konflik dan pasca konflik vertikal dan horisontal, (10) Penguatan peran media tradisional dan peningkatan kapasitas media komunitas dalam penyebaran informasi publik.

Di bidang pertahanan dan keamanan, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (1) percepatan pembentukan komponen bela negara, dan (2) ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan

penyalahgunaan narkoba, penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, dan pemberantasan jaringan narkoba.

Di bidang hukum dan aparat, upaya pembangunan karakter bangsa antara lain dilakukan melalui: (1) peningkatan kinerja lembaga penegak hukum, diantaranya melalui pelaksanaan akuntabilitas penegakan hukum, dan perbaikan pelayanan hukum yang lebih berkualitas, (2) peningkatan penghormatan terhadap HAM, diantaranya melalui pembaruan materi hukum, (3) peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, diantaranya melalui penegakan hukum yang kuat dan dipercaya, pencegahan KKN melalui penegakan sistem integritas aparat negara, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

1.2.6 Peningkatan Status Pangan dan Gizi Masyarakat

1.2.6.1 Kondisi Umum

Gizi masih merupakan salah satu masalah utama di Indonesia terutama pada kelompok rentan yakni ibu dan anak. Pada tahun 2007, prevalensi anak balita yang mengalami kekurangan gizi dan tumbuh pendek (*stunting*) masing-masing 18,4 persen dan 36,8 persen. Walaupun prevalensi kekurangan gizi dan pendek (*stunting*) menurun menjadi masing-masing 17,9 persen dan 35,6 persen pada tahun 2010, tetapi masih terjadi disparitas antarprovinsi yang perlu mendapat penanganan secara lintas sektor di wilayah rawan (Risikesdas, 2010). Permasalahan gizi lainnya yang perlu mendapatkan perhatian yakni masih tingginya penduduk dengan Kekurangan Vitamin A (KVA), iodium (Gangguan Akibat Kurang Iodium/GAKI), anemia gizi besi dan kekurangan zat gizi mikro lainnya serta rendahnya pemberian ASI eksklusif. Disamping itu, status gizi pada ibu hamil perlu ditingkatkan karena masih tingginya bayi yang lahir dengan berat badan rendah (kurang dari 2.500 gram) yaitu sebesar 11,1 persen (Risikesdas, 2010).

Status gizi masyarakat yang masih rendah berkaitan erat dengan status pangan. Peta penduduk rawan pangan berdasarkan data BPS tahun 2010 masih menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Jumlah penduduk sangat rawan pangan yaitu dengan asupan kalori kurang dari 1.400 Kkal per orang per hari mencapai 15,34 persen,

angka ini meningkat dibandingkan dengan kondisi tahun 2009 yaitu 14,47 persen. Perkembangan kualitas konsumsi pangan masyarakat dicerminkan pada skor Pola Pangan Harapan (skor PPH), rata-rata konsumsi kalori penduduk pada tahun 2011 mencapai 1926 kkal per kapita dengan skor PPH sebesar 77,3. Meningkatnya produksi perikanan turut mendorong peningkatan konsumsi ikan masyarakat yang meningkat dari 31,64 kg perkapita per tahun pada tahun 2011 menjadi 33,89 kg perkapita per tahun pada tahun 2012.

Kelembagaan pangan memiliki peran yang penting dalam peningkatan pencapaian status pangan. Sampai dengan 2011 kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan) telah dilaksanakan di 33 provinsi, 399 kabupaten/kota pada 2.851 desa. Pada tahun 2012 dialokasikan 563 desa baru, sehingga secara kumulatif, jumlah desa yang dibina menjadi 3.414 desa, di 410 kabupaten/kota, pada 33 provinsi, terdiri dari tahap: persiapan 563 desa, penumbuhan 838 desa, pengembangan 829 desa kemandirian 359 desa, dan 825 desa mandiri. Selain itu, untuk memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman, pemerintah mengimplementasikan gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP). Pada tahun 2012, cakupan wilayah pelaksanaan P2KP diperluas menjadi 363 kabupaten/kota di 33 provinsi dengan Desa Pelaksana P2KP sejumlah 6.000 desa.

Status gizi yang masih rendah ini dipengaruhi oleh faktor perilaku konsumsi pangan masyarakat yang mencakup pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan pola pangan keluarga. Sementara itu, kondisi keamanan pangan masih memprihatinkan. Situasi keamanan pangan pada periode 2006-2010, antara lain dapat dilihat dari adanya kenaikan produk industri pangan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Penyebab masalah keamanan tersebut antara lain : cemaran mikroba, Bahan Tambahan Pangan (BTP), pemanis berlebih, pewarna bukan untuk makanan, BTP pengawet (benzoat) berlebih, serta penyalahgunaan bahan berbahaya boraks dan formalin.

Tingginya masalah gizi juga berkaitan dengan faktor sosial budaya, antara lain kesadaran individu dan keluarga untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) termasuk

sadar gizi dalam hal pemberian ASI eksklusif dan asupan gizi seimbang. Hanya 41 persen keluarga yang mempunyai perilaku pemberian makanan bayi yang benar. Asupan kalori ibu hamil tidak memenuhi kebutuhan karena ditemukan 44,4 persen ibu hamil mendapat asupan kalori di bawah kebutuhan minimum. Menurut hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas), cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi sampai 6 bulan hanya berkisar 28,6 persen (2007), 24,3 persen (2008) dan 34,3 persen (2009). Hasil Riskesdas (2010) menunjukkan bahwa persentase bayi yang diberikan ASI eksklusif sampai dengan 6 bulan hanya 15,3 persen dan menurut SDKI tahun 2012 persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif adalah sebesar 42 persen.

Sejalan dengan kondisi di atas, pada tahun 2010 telah dikeluarkan Instruksi Presiden No. 3 yang menugaskan Pemerintah untuk melakukan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pangan Gizi (RAN-PG) dan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG). Selanjutnya pada tahun 2012 telah tersusun peraturan gubernur untuk RAD-PG di 32 provinsi.

Upaya penanganan permasalahan gizi ini memerlukan koordinasi lintas bidang, lintas sektor, lintas program, lintas pelaku, dan lintas kementerian/lembaga (K/L). Beberapa sektor dan lembaga terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sektor industri dan organisasi non pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Seluruh pihak terkait perlu terlibat dalam perbaikan gizi secara terpadu, efisien, berdampak luas dalam upaya koordinasi antara jaringan (*networkings*), serta perlunya gerakan yang memungkinkan berbagai pemangku kepentingan bekerjasama dan berkontribusi secara berkesinambungan.

1.2.6.2 Permasalahan dan Sasaran

Beberapa permasalahan terkait status pangan dan gizi masyarakat, antara lain : (i) masih rendahnya status gizi masyarakat; (ii) masih rendahnya akses pangan; (iii)

masih rendahnya mutu dan keamanan pangan; (iv) masih rendahnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS); dan (v) masih lemahnya kelembagaan bidang pangan dan gizi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sasaran kebijakan lintas bidang peningkatan status gizi masyarakat pada tahun 2014, antara lain :(i) meningkatnya status gizi masyarakat dengan fokus utama pada perbaikan status gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan dimulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun yang ditandai dengan penurunan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita menjadi kurang dari 15 persen dan penurunan prevalensi *stunting* pada balita menjadi sebesar 32 persen; (ii) meningkatnya akses pangan yang ditandai dengan peningkatan konsumsi asupan kalori sebesar 2.000 Kkal/hari; (iii) meningkatnya mutu dan keamanan pangan yang ditunjukkan dengan adanya penurunan persentase makanan yang mengandung cemaran bahan berbahaya atau dilarang menjadi sebesar 10 persen; (iv) meningkatnya PHBS yang diwujudkan dengan adanya peningkatan persentase rumah tangga yang melakukan PHBS menjadi 70 persen; dan (v) menguatnya kelembagaan pangan dan gizi yang ditandai dengan adanya peningkatan jumlah kecamatan dengan tenaga PPL pertanian yang telah mengikuti pelatihan pangan dan gizi menjadi 10.000 desa 2.000 kecamatan.

1.2.6.3 Kebijakan dan Strategi

Kebijakan peningkatan status pangan dan gizi masyarakat dilakukan melalui :

1. Intervensi kegiatan gizi langsung yaitu tindakan atau kegiatan yang ditujukan untuk menangani masalah gizi dan pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan mencakup :
 - a. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita, melalui : (i) peningkatan persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan ke empat (K4)); (ii) peningkatan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1); (iii) peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bayi dan cakupan pelayanan kesehatan balita; serta (iv) perluasan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas.
 - b. Peningkatan pembinaan gizi masyarakat meliputi :

- (i) peningkatan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin; (ii) peningkatan Puskesmas mampu melaksanakan tata-laksana gizi buruk; (iii) pemberian makanan tambahan dan mikronutrien bagi ibu hamil, bayi, dan balita; (iv) peningkatan gerakan nasional percepatan perbaikan gizi.
2. Intervensi kegiatan gizi tidak langsung yaitu tindakan atau kegiatan pembangunan di luar sector kesehatan yang berperan penting dalam perbaikan gizi masyarakat mencakup :
- a. Penyediaan air bersih dan sanitasi melalui investasi pembangunan infrastruktur air bersih di perkotaan dan perdesaan serta perkampungan kumuh.
 - b. Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan Ibu Bersalin (Jampersal) dengan menjangkau seluruh lapisan masyarakat tidak mampu.
 - c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan melalui peningkatan persentase rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
 - d. Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar dilakukan, melalui : (i) keragaman pangan olahan dengan tambahan unsur gizi dan berbasis sumber pangan lokal; (ii) pemerataan distribusi dan aksesibilitas pangan olahan; (iii) pemberdayaan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan; (iv) kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman; (v) peran kelembagaan keamanan pangan; dan (vi) Peningkatan Fortifikasi Pangan.
 - e. Peningkatan pengawasan pangan, melalui : (i) peningkatan pengawasan produk dan bahan berbahaya; (ii) peningkatan jumlah sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diperiksa (dihitung dari sekitar 150.000); (iii) peningkatan jumlah produk Obat dan Makanan yang disampel dan diuji (dihitung dari sekitar 1 juta produk beredar); (iv) peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut informasi jejaring

nasional, regional dan internasional terkait *rapid alert* dan response permasalahan keamanan makanan (dihitung dari jumlah informasi yang masuk dalam jejaring), serta (v) peningkatan persentase pangan jajanan anak sekolah (PJAS) yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi.

- f. Peningkatan Pendidikan gizi masyarakat dan penyediaan layanan PAUD yang mencakup peningkatan pengetahuan dan kecakapan keorangtuan (*parenting education*).
- g. Peningkatan Kualitas Kesehatan Reproduksi, mencakup: (i) pengembangan kebijakan, strategi, dan materi informasi kualitas hidup ibu, bayi dan anak (KHIBA) dan pencegahan masalah kesehatan reproduksi (PMKR) yang dapat dioperasionalkan; dan (ii) fasilitasi pembinaan kelangsungan hidup ibu, balita, dan anak serta PMKR; dan (iii) Peningkatan intervensi gizi untuk remaja perempuan.
- h. Pembinaan Keluarga Balita dan Anak, mencakup : (i) pengembangan kebijakan, strategi dan materi pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak yang dapat dilaksanakan; (ii) peningkatan pemahaman keluarga yang memiliki balita dan anak dalam melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita dan anak; dan (iii) peningkatan sarana dan prasarana pembinaan ketahanan keluarga balita dan anak.
- i. Penguatan kelembagaan gizi melalui : (i) peningkatan kemitraan dan kerjasama multi-sektor dalam bidang pangan dan gizi; dan (ii) peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan di bidang gizi yang memadai; dan (iii) penguatan lembaga pangan dan gizi termasuk Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

1.2.7 Percepatan Pencapaian Sasaran MDGs

1.2.7.1 Kondisi Umum

Upaya pencapaian sasaran *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan komitmen bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sekaligus memenuhi komitmen global. Untuk mempercepat pencapaian sasaran MDGs telah ditetapkan Instruksi Presiden No. 3 Tahun

2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

Sampai dengan tahun 2011, beberapa sasaran MDGs telah dicapai, sebagian besar akan dapat dicapai pada tahun 2015, sedangkan sebagian lagi memerlukan upaya keras untuk dapat mencapainya. Sasaran MDGs yang telah dicapai adalah: (i) Tujuan MDG 1, dengan target proporsi penduduk dengan pendapatan kurang dari USD 1,00 (PPP) per kapita per hari; (ii) Tujuan MDG 3, dengan target rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan terhadap laki-laki SMA/MA/Paket C dan rasio angka melek huruf perempuan terhadap laki-laki umur 15-24 tahun; (iii) Tujuan MDG 6, dengan target angka kejadian dan tingkat kematian, serta proporsi tuberkulosis yang ditemukan, diobati dan disembuhkan dalam program *Directly Observe Treatment Shortcourse* (DOTS).

Sasaran MDGs yang diperkirakan dapat tercapai pada tahun 2015 (*on-track*) adalah: (i) Tujuan MDG 1, dengan target indeks kedalaman kemiskinan, proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja, dan prevalensi balita dengan berat badan rendah/kekurangan gizi; (ii) Tujuan MDG 2, dengan target APM SD, proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar, serta angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun; (iii) Tujuan MDG 3, dengan target rasio APM perempuan/laki-laki di tingkat SMA, dan kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor nonpertanian, serta proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR; (iv) Tujuan MDG 4, dengan target angka kematian neonatal, bayi, dan balita serta proporsi anak usia 1 tahun yang mendapat imunisasi campak; (v) Tujuan MDG 5, dengan target angka pemakaian kontrasepsi bagi perempuan menikah dengan menggunakan cara modern, angka kelahiran remaja perempuan umur 15-19 tahun, cakupan pelayanan antenatal, dan penurunan kebutuhan KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*); (vi) Tujuan MDG 6, dengan target peningkatan proporsi penduduk terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan Antiretroviral (ARV), dan proporsi anak balita yang tidur dengan kelambu berinsektisida; (vii) Tujuan MDG 7, dengan konsumsi bahan perusak ozon, proporsi tangkapan ikan yang tidak melebihi batas biologis yang aman, serta rasio luas kawasan lindung untuk menjaga kelestarian

keanekaragaman hayati terhadap total luas kawasan hutan dan rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial; (viii) Tujuan MDG 8, dengan target rasio ekspor dan impor terhadap PDB, rasio pinjaman terhadap simpanan di bank umum, rasio pinjaman terhadap simpanan di BPR, rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB, rasio pembayaran pokok utang dan bunga utang luar negeri terhadap penerimaan hasil ekspor (DSR), dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta proporsi penduduk yang memiliki jaringan telepon tetap dan telepon seluler.

1.2.7.2 Permasalahan dan Sasaran

Pembangunan percepatan pencapaian MDGs terutama diarahkan untuk mencapai beberapa sasaran yang masih memerlukan upaya keras yaitu: (i) Tujuan MDG 1, yaitu menurunkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional; (ii) Tujuan MDG 5, yaitu menurunkan hingga tiga perempatnya angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup; (iii) Tujuan MDG 6, yaitu mengendalikan prevalensi HIV/AIDS, meningkatkan penggunaan kondom pada hubungan seks berisiko tinggi dan meningkatkan proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV/AIDS; (iv) Tujuan MDG 7, yaitu meningkatkan rasio luas kawasan tertutup pepohonan terhadap luas daratan, menurunkan jumlah emisi CO₂, serta meningkatkan proporsi rumah tangga terhadap air minum layak dan sanitasi layak; (v) Tujuan MDG 8, yaitu meningkatkan proporsi rumah tangga dengan akses internet dan yang memiliki komputer pribadi.

1.2.7.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Berdasarkan permasalahan di atas, kebijakan percepatan pencapaian sasaran MDGs diarahkan pada: (i) mempertahankan sasaran MDGs yang telah dicapai; (ii) meningkatkan upaya untuk menjamin tercapainya sasaran MDGs; (iii) melakukan upaya keras untuk mencapai sasaran MDGs yang perlu perhatian khusus. Salah satu strategi untuk mencapai sasaran MDGs pada tahun 2015 sebagaimana ditetapkan dalam Inpres No. 3 Tahun 2010 adalah dengan meningkatkan dukungan bagi daerah melalui penyediaan pembiayaan untuk percepatan pencapaian MDGs dalam bentuk pemberian insentif MDGs kepada daerah, baik insentif fiskal maupun non-fiskal.

Pemberian insentif MDGs kepada daerah tersebut

dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada Provinsi yang menunjukkan komitmen dan kinerja pencapaian MDGs yang baik. Indikator terpilih yang digunakan untuk menilai kinerja pencapaian MDGs mencakup 10 indikator, yaitu (i) Persentase penduduk miskin; (ii) APM SMP/MTs; (iii) Rasio Angka Melek Huruf (AMH) 15-24 perempuan terhadap laki-laki; (iv) Rasio APM perempuan/laki-laki di sekolah menengah (SMP/MTs); (v) Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak; (vi) Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga kesehatan terlatih; (vii) Proporsi jumlah penemuan penderita TB (*Case Detection Rate-CDR*); (viii) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan; (ix) Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sanitasi, perkotaan dan pedesaan; dan (x) Persentase rumah tangga menurut kriteria rumah tangga kumuh perkotaan. Kinerja pencapaian MDGs di daerah akan diamati selama tiga tahun untuk melihat kecenderungan laju pencapaiannya. Data indikator terpilih yang akan digunakan harus memenuhi kriteria yang meliputi ketersediaan, kontinuitas, dan kredibilitas data. Sebagian besar data indikator berasal dari BPS, sedangkan indikator yang tidak tersedia dari BPS, akan digunakan data dari Kementerian terkait.

Insentif non-fiskal berupa penghargaan akan diberikan pada saat pelaksanaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas), sedangkan insentif fiskal yang diberikan akan digunakan oleh Provinsi untuk: (i) melaksanakan program-program percepatan pencapaian MDGs khususnya indikator yang capaiannya masih berada dibawah rata-rata nasional; (ii) membantu kabupaten/kota yang kinerja pencapaian MDGs berada dibawah rata-rata provinsi; (iii) memperkuat sistem database MDGs di provinsi dan kabupaten/kota; (iv) memperkuat koordinasi perencanaan dan penganggaran MDGs di provinsi dan kabupaten/kota; (v) memperkuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi MDGs di provinsi dan kabupaten/kota; dan (vi) memperkuat dan memperluas informasi terkait MDGs melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada para pemangku kepentingan utama di daerah.

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

BAB 2

BIDANG PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

2.1 Kondisi Umum

Pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama yang mencakup bidang-bidang kependudukan dan keluarga berencana, kesehatan dan gizi, pendidikan, perpustakaan, pemuda dan olahraga, agama, kebudayaan, pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan rangkaian upaya peningkatan kualitas hidup manusia guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, berpendidikan, berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab, serta berdaya saing untuk mencapai masyarakat Indonesia yang lebih makmur dan sejahtera. Pencapaian sasaran pokok tersebut dilakukan melalui pembangunan manusia seutuhnya yang meliputi manusia sebagai insan dan sumber daya pembangunan baik laki-laki maupun perempuan.

Kemampuan bangsa yang berdaya saing tinggi merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan dan kemakmuran bangsa, karena daya saing bangsa yang tinggi akan menjadikan Indonesia siap menghadapi tantangan globalisasi dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Untuk memperkuat daya saing bangsa, pembangunan nasional diarahkan untuk mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, baik laki-laki maupun perempuan. Perkuatan daya saing bangsa mensyaratkan negara yang aman, damai, dan demokratis yang masyarakatnya rukun dan harmonis yang didukung oleh pemerataan pembangunan di segala bidang. Disamping itu, jumlah dan persebaran penduduk juga harus dijaga agar terjadi keseimbangan dengan daya dukung lingkungan.

Pada periode tahun 2012, berbagai upaya pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama telah dilaksanakan dan berkontribusi pada semakin meningkatnya kualitas hidup sumber daya manusia (SDM), yang ditandai oleh antara lain membaiknya derajat kesehatan dan tingkat pendidikan penduduk Indonesia serta yang didukung oleh meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan sosial dasar.

Kependudukan dan Keluarga Berencana. Pembangunan kependudukan dilaksanakan dalam rangka mencapai jumlah, struktur dan persebaran penduduk yang terkendali serta kualitas penduduk yang meningkat. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui kebijakan pembangunan di berbagai bidang, dengan fokus utama penduduk sebagai pusat pembangunan (*people centered development*) yaitu, baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dilaksanakan melalui program Keluarga Berencana (KB) sebagai upaya membentuk keluarga kecil berkualitas. Selama 10 tahun terakhir, hasil Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2002, 2007, dan 2012 menunjukkan stagnansi angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) yaitu sebesar 2,6 per perempuan usia reproduktif. Selain itu, hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 dan SP 2010, laju pertumbuhan penduduk (LPP) meningkat dari 1,45 persen menjadi 1,49 persen. Stagnansi angka kelahiran total ini disebabkan angka pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) yang masih rendah dan jangkauan layanan KB yang belum menjangkau secara merata. Hasil SDKI 2012, CPR adalah sebesar 57,9 persen dan hanya meningkat sebesar 0,5 persen bila dibandingkan dengan hasil SDKI 2007. Peningkatan CPR selama 5 tahun yang kecil ini disebabkan masih tingginya ketidakberlangsungan (*Drop-Out/DO*) kesertaan dalam ber-KB dan rendahnya pemakaian metode jangka panjang (MKJP). Di sisi lain, jangkauan layanan KB belum menjangkau secara merata ditunjukkan dengan pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB namun tidak terlayani (*unmet need*) yang masih tinggi, yaitu 8,5 persen (SDKI 2012) dan hanya mengalami penurunan sebesar 0,6 persen dari hasil SDKI 2007.

Faktor lain yang mempengaruhi angka kelahiran adalah usia kawin pertama bagi wanita. Hasil SDKI 2007, usia kawin pertama wanita adalah 19,8 tahun dan mengalami penurunan menjadi 19 tahun (SDKI 2012). Penurunan usia kawin pertama mengakibatkan angka kelahiran usia remaja (*Age Specific Fertility Rate/ASFR*) 15-19 tahun meningkat, yaitu dari 35/1000 kelahiran (SDKI 2007) menjadi 48/1000 kelahiran (SDKI 2012). Salah satu penyebab peningkatan kelahiran usia muda 15-19 tahun adalah masih kurangnya partisipasi perempuan di jenjang pendidikan tinggi.

Pada tahun 2012, jumlah peserta KB Aktif adalah sebanyak 35,85 juta akseptor (Statistik Rutin BKKBN), yang diantaranya sebesar 14,59 juta akseptor berasal dari keluarga miskin (Keluarga Pra Sejahtera/KPS dan Keluarga Sejahtera 1/KS-1). Sementara itu, jumlah peserta KB Baru sebanyak 9,39 juta akseptor, yang diantaranya sebesar 4,25 juta akseptor baru dari KPS dan KS-1. Perkiraan pencapaian tahun 2013 berdasarkan sasaran target yang telah ditetapkan adalah jumlah peserta KB Aktif menjadi sebanyak 29,0 juta akseptor, yang diantaranya sebanyak 12,8 juta peserta KB Aktif KPS dan KS-1, dan jumlah peserta KB Baru diperkirakan sebanyak 7,5 juta akseptor, yang diantaranya sebanyak 3,97 juta peserta KB baru KPS dan KS-1.

Berkenaan dengan penyerasian kebijakan dalam rangka mendukung pembangunan bidang Kependudukan dan KB telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sampai dengan tahun 2012 penyerasian kebijakan pembangunan yang terkait dengan bidang Kependudukan dan KB telah berhasil diinventarisasi dan diidentifikasi sebanyak 31 kebijakan, sebanyak 18 kebijakan diantaranya telah bersinergi dengan program KB, dan 13 kebijakan lainnya dianggap belum bersinergi dengan program KB. Selain itu telah tersusunnya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan.

Keberhasilan pembangunan kependudukan dan KB didukung pula oleh penguatan manajemen data dan informasi kependudukan. Pada tahun 2012, Pendataan Keluarga secara berkala telah dilakukan untuk memonitor perkembangan program Kependudukan dan KB. Sementara itu, untuk pelayanan registrasi penduduk dan pencatatan sipil, sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) telah dibangun di 497 kabupaten/kota. Pengembangan SIAK merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang mengamanatkan pemerintah untuk memberikan nomor induk kependudukan (NIK) kepada setiap penduduk dan menggunakan NIK sebagai dasar dalam menerbitkan dokumen kependudukan. Penerapan Undang-Undang tersebut dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional.

Kesehatan. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi penduduk melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak, pelayanan KB yang merata, perbaikan gizi, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, penyiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) bidang kesehatan, dan peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan.

Pada tahun 2012, status kesehatan dan gizi masyarakat terus menunjukkan perbaikan walaupun beberapa status masih memerlukan upaya yang cukup keras untuk mencapai target. Perbaikan status kesehatan dan gizi ditandai dengan meningkatnya umur harapan hidup (UHH) dari 70,9 tahun pada tahun 2010 menjadi 71,1 tahun pada tahun 2012, menurunnya prevalensi kekurangan gizi dari 18,4 persen (2007) menjadi sebesar 17,9 persen (2010), dan menurunnya prevalensi anak balita yang pendek (*stunting*) dari 36,8 persen (2007) menjadi sebesar 35,6 persen (2010).

Namun, masih terdapat indikator seperti angka kematian ibu melahirkan yang masih cukup tinggi. Data terakhir menunjukkan masih sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup dengan target tahun 2014 sebesar 118 per 100.000 kelahiran hidup. Indikator lainnya yaitu kematian bayi juga masih menunjukkan angka 32 per 1.000 kelahiran hidup, masih jauh dari target 2014 sebesar 24 per 1.000 kelahiran hidup. Masih diperlukan upaya yang cukup keras dalam mencapai target untuk kedua indikator tersebut.

Upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dilakukan antara lain melalui pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bersalin, pelayanan keluarga berencana (KB), dan penyediaan bantuan operasional kesehatan (BOK) pada fasilitas kesehatan. Data menunjukkan pertolongan terhadap ibu bersalin oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) meningkat dari 81,25 persen (2011) menjadi 83,1 persen (2012) dan cakupan kunjungan ibu hamil (K1 dan K4) masing-masing telah meningkat dari 95,7 persen dan 88,27 persen (2011) menjadi sebesar 95,7 persen dan 90,2 persen (2012).

Pelayanan kesehatan ibu dan anak didukung dengan peningkatan fasilitas kesehatan antara lain peningkatan puskesmas yang mampu memberikan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi dasar (PONED) dan pelayanan obstetri dan neonatal emergensi komprehensif (PONEK). Persentase puskesmas perawatan yang melaksanakan PONED sudah mencapai 100 persen sedangkan rumah sakit kabupaten/kota yang telah melaksanakan PONEK mencapai 92,34 persen (Kemkes, 2012).

Upaya lainnya dalam rangka pelayanan kesehatan anak terus ditingkatkan melalui perbaikan akses dan kualitas pelayanan imunisasi. Persentase bayi yang mendapat imunisasi dasar lengkap (DPT, Polio, DPT-HB, DPT-HIB dan Campak) meningkat cakupannya dari 53,8 persen (2010) menjadi 66,0 persen (2012). Sedangkan imunisasi campak, walaupun sudah meningkat dari 77,67 persen pada tahun 2010 menjadi 87,30 persen pada tahun 2011 namun masih diperlukan upaya untuk mencapai target sebesar 93 persen pada tahun 2014. Kunjungan neonatal pertama/KN1 yang terus meningkat dari 84,01 pada tahun 2010 menjadi 90,51 persen pada tahun 2011, dan cakupan pelayanan kesehatan bayi meningkat dari 84,01 persen (2010) menjadi 85,16 persen (2011), dan cakupan pelayanan kesehatan balita meningkat dari 78,11 persen (2010) menjadi 80,95 persen (2011).

Status perbaikan gizi terus menunjukkan peningkatan, diperkirakan target ini akan tercapai pada tahun 2014. Hal ini ditandai dengan perbaikan indikator antara seperti prevalensi anak balita pendek (*stunting*) telah mencapai 35,6 persen (tahun 2010) dari target sebesar 32 persen pada tahun 2014. Upaya yang telah dilakukan mencakup pemberian ASI eksklusif, penyediaan makanan pendamping ASI, suplementasi vitamin A, pemantauan pertumbuhan balita secara rutin melalui pengukuran berat badan (D/S) yang telah mencapai 71,36 persen (2011), serta kegiatan pendukung lainnya mencakup penyediaan air bersih dan sanitasi, pendidikan gizi, ketahanan pangan dan gizi, serta fortifikasi bahan pangan. Perbaikan gizi terutama pada balita juga terus dilakukan untuk mendukung upaya peningkatan kesehatan anak. Upaya penanganan masalah gizi tersebut dilakukan melalui peningkatan partisipasi seluruh sektor dalam bentuk Gerakan Nasional Percepatan

Perbaiki Gizi dan sejalan dengan upaya global yaitu *Scaling-up Nutrition (SUN) Movement*.

Dalam rangka pengendalian penyakit menular, upaya yang dilakukan terutama untuk mencapai target *Millenium Development Goals (MDGs)*, yaitu, meningkatkan jumlah kasus tuberculosis (TB) yang ditemukan dan disembuhkan, menurunkan kasus malaria, dan mengurangi prevalensi dan jumlah kasus HIV dan AIDS. Penanganan kasus baru TB paru (Basil Tahan Asam/BTA positif) yang disembuhkan meningkat dari 86,2 persen (2011) menjadi 84,35 persen (2012), angka penemuan kasus malaria *annual parasite index (API)* per 1.000 penduduk menurun dari 1,75 (2011) menjadi 1,69 per 1.000 penduduk (2012), dan meningkatnya orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV dari 548.256 orang (2011) menjadi 884.905 orang (2012), dan yang memiliki pengetahuan HIV dan AIDS dari 57,5 persen (2010) menjadi sebesar 79,5 persen (2012). Upaya pengendalian penyakit menular lainnya seperti demam berdarah dengue (DBD) dan diare juga terus dilakukan. Berbagai capaian penurunan kasus penyakit menular tersebut dilakukan melalui dukungan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan preventif dan promotif, serta kegiatan kuratif dan rehabilitatif.

Dalam rangka pengendalian penyakit, penyediaan air bersih dan sanitasi sebagai upaya penyehatan lingkungan, juga terus dilakukan. Sampai saat ini, jumlah penduduk yang memiliki akses terhadap sumber air bersih meningkat dari sebesar 44,2 persen (2010) menjadi 55,04 persen (2011), namun pencapaiannya masih jauh dibawah target 68 persen pada tahun 2014. Demikian pula dengan persentase penduduk yang menggunakan jamban sehat yang mencapai 55,6 persen, masih memerlukan upaya kerja keras untuk dapat mencapai target 75 persen di tahun 2014. Pencapaian tersebut didukung Gerakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang dilakukan di 7.325 desa atau sebesar 36 persen dari total target tahun 2014.

Perbaiki status kesehatan juga tidak terlepas dari dukungan pelayanan kesehatan mencakup aspek fasilitas layanan kesehatan, jumlah, kualitas, dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan, serta jaminan pembiayaan kesehatan. Ketersediaan tenaga kesehatan antara lain

ditunjukkan oleh tenaga dokter sebanyak 32.492 orang, perawat 220.575 orang, dan bidan 124.164 orang. Sementara, ketersediaan fasilitas kesehatan antara lain ditunjukkan oleh jumlah puskesmas sebanyak 9.510 unit (2012), puskesmas perawatan sebanyak 3.152 unit, puskesmas non perawatan sebanyak 6.358 unit, RS pemerintah sebanyak 888 unit (2012) dan tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif sebanyak 4.354 orang yang ditempatkan pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK).

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan berstandar internasional, pada tahun 2012 telah terdapat beberapa kota di Indonesia yang memiliki rumah sakit standar kelas dunia (*world class*) yaitu RS Santosa di Bandung, RS Siloam Gleneagles Karawaci di Tangerang, RS Eka Bumi Serpong Damai Tangerang, RS Premier Bintaro Tangerang, dan RS Premier Jatinegara Jakarta Timur. Pencapaian ini telah melebihi target yang ditetapkan pada tahun 2012, yaitu 3 kota di Indonesia yang memiliki rumah sakit standar kelas dunia (*world class*).

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, keterjangkauan masyarakat terhadap obat, ketersediaan obat dan vaksin di sarana pelayanan kesehatan terus ditingkatkan. Penggunaan obat generik oleh masyarakat di fasilitas kesehatan sudah cukup tinggi yaitu telah mencapai 82,8 persen. Demikian pula dengan ketersediaan obat dan vaksin meningkat dari 87 persen (2011) menjadi 92,82 persen (2012). Dalam upaya meningkatkan kemandirian bahan baku obat, telah dilakukan penyediaan bahan baku obat dan obat tradisional di dalam negeri sebanyak 15 jenis, dilakukan dengan berbagai penelitian yang melibatkan lembaga penelitian maupun industri obat dengan fokus memberdayakan keragaman hayati yang dimiliki Indonesia.

Upaya peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dilakukan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan. Sampai dengan tahun 2012, cakupan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan telah mencapai masing-masing 27 persen dan 16 persen dari sarana yang ada, dan mutu pengujian sampel obat dan makanan berkisar rata-rata 8 parameter uji per sampel dengan jumlah sampel

sebanyak 100.559 sampel. Sementara untuk sarana produksi obat yang telah memiliki sertifikasi *Good Manufacturing Practices* (GMP) terkini meningkat dari 60,1 persen (2011) menjadi 67,82 persen (2012).

Dalam rangka memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, terus dikembangkan sistem jaminan kesehatan. Sampai saat ini, puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin meningkat dari 9.321 (2011) menjadi seluruh puskesmas (9.510 puskesmas) pada tahun 2012 dan penduduk yang memiliki jaminan kesehatan telah meningkat dari 63,1 persen (2011) menjadi 64,58 persen (2012). Jumlah ini termasuk penduduk yang menerima jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) sebesar 32,4 persen dan jaminan persalinan yang mencakup hampir 1,5 juta ibu bersalin. Pada tahun 2014 sistem jaminan kesehatan akan dilakukan secara terpadu dengan menggabungkan berbagai jenis jaminan kesehatan seperti jamkesmas, jamsostek, askes, jamkesda dan lain-lain dalam satu pengelolaan di bawah Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Selain itu, pada tahun 2012 untuk mendukung kegiatan promotif dan preventif pelayanan kesehatan dasar di puskesmas dan jaringannya telah dilakukan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi 9.323 puskesmas.

Dalam rangka mengurangi disparitas status kesehatan, terus dilakukan upaya peningkatan status kesehatan di berbagai daerah khususnya pada daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) serta di daerah bermasalah kesehatan (DBK). Upaya yang dilakukan antara lain dengan peningkatan integrasi perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah dalam upaya akselerasi pencapaian target pembangunan melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) percepatan pencapaian target MDGs dan RAD Pangan dan Gizi.

Pendidikan. Pembangunan pendidikan berperan penting dan strategis dalam pembangunan nasional karena akan berdampak positif pada upaya meningkatkan kemakmuran masyarakat dan kemajuan bangsa. Melalui pembangunan pendidikan, Pemerintah berikhtiar untuk menunaikan amanat UUD 1945 dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi, setiap warga negara berhak

mendapatkan pendidikan yang bermutu untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Pendidikan juga sangat penting untuk membangun basis sosial yang kuat dan menciptakan lapisan masyarakat terpelajar, yang menjadi prasyarat terbentuknya bangsa yang maju, mandiri, demokratis, dan sejahtera.

Sampai dengan tahun 2012, pembangunan pendidikan telah berhasil meningkatkan taraf pendidikan penduduk, bahkan capaian beberapa indikator telah melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat tersebut tercermin dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas, yang pada tahun 2009 sebesar 7,7 tahun, meningkat menjadi 7,9 tahun pada tahun 2012. Selain itu, proporsi buta aksara penduduk berusia 15 tahun ke atas diwakili oleh penduduk usia 15-59 tahun juga mengalami penurunan signifikan, dari 5,3 persen pada tahun 2009 menjadi 5,0 persen pada tahun 2010, dan terus menurun menjadi 4,4 persen pada tahun 2011. Angka tersebut diperkirakan akan terus turun dan mencapai 4,3 persen pada tahun 2013.

Pencapaian pembangunan pendidikan tersebut juga ditandai oleh meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada semua jenjang pendidikan. Pada tahun 2009, APM SD/MI/ sederajat dan APM SMP/MTs/ sederajat masing-masing sebesar 95,23 persen dan 74,52 persen, dan pada tahun 2010 meningkat menjadi 95,41 persen dan 75,64 persen, serta pada tahun 2011 terus meningkat menjadi 95,55 persen dan 77,71 persen. Pada tahun 2013, diharapkan kedua angka tersebut masing-masing dapat mencapai 95,8 persen dan 80,1 persen. Demikian pula partisipasi pendidikan jenjang pendidikan menengah terus membaik. Hal ini terlihat pada APK SMA/SMK/MA/ sederajat pada tahun 2009 sebesar 69,60 persen, meningkat menjadi 70,53 persen pada tahun 2010, dan pada tahun 2011 meningkat lagi menjadi 76,50 persen. Diperkirakan pada tahun 2013 angka partisipasi kasar jenjang pendidikan menengah menjadi 82,0 persen sesuai dengan target 2013 yang ditetapkan RPJMN 2010-2014. Sementara itu, APK jenjang pendidikan tinggi pada tahun 2011 telah mencapai 27,09 persen, dan pada tahun 2013 diperkirakan mencapai 28,7 persen.

Berbagai upaya Pemerintah yang telah dilakukan untuk meningkatkan akses penduduk terhadap pelayanan pendidikan, antara lain, adalah penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). BOS dimaksudkan untuk mengurangi beban siswa untuk membiayai operasional pembelajaran di sekolah. Sejak tahun 2012, biaya satuan BOS untuk jenjang SD/MI/ sederajat ditingkatkan menjadi Rp 580 ribu/siswa/tahun, dari tahun sebelumnya (2011) Rp 397 ribu/siswa/tahun (kabupaten) atau Rp 400 ribu/siswa/tahun (kota). Demikian pula untuk jenjang SMP/MTs/ sederajat, sejak tahun 2012 biaya satuan BOS meningkat menjadi Rp 710 ribu/siswa/tahun, dari tahun sebelumnya (2011) Rp 570 ribu/siswa/tahun (di kabupaten) dan Rp 575 ribu/siswa/tahun (di kota). Untuk mendukung pelaksanaan program Pendidikan Menengah Universal (PMU), pada tahun 2013 telah disediakan BOS untuk seluruh siswa di jenjang SMA/SMK/MA sebesar Rp 1.010 ribu/siswa/tahun. Cakupan penerima BOS pada tahun 2013 di semua jenjang diperkirakan mencapai 52,3 juta siswa.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan juga ditandai oleh penurunan kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi, yang tercermin pada angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia sekolah. APS penduduk usia 13-15 tahun (SMP/MTs) pada kuantil termiskin meningkat dari sebesar 72,2 persen pada tahun 2009 menjadi 77,9 persen pada tahun 2011. Peningkatan APS terjadi pada seluruh kelompok umur di kuantil termiskin, sehingga selisih persentase APS antara penduduk paling miskin dan paling kaya pada kelompok umur 13-15 dalam waktu 2009-2011 menurun dari 22,8 persen menjadi 17,1 persen dan pada kelompok umur 16-18 tahun menurun dari 41,6 persen menjadi 36,3 persen. Capaian ini antara lain didukung oleh program-program pengentasan kemiskinan termasuk penyediaan Bantuan Siswa Miskin (BSM) di semua jenjang dan jenis pendidikan. Pada tahun 2012, dari hampir 8 juta BSM yang disediakan di semua jenjang dan jenis pendidikan, 95 persennya tersalurkan kepada penerima. Pemberian BSM diyakini telah membantu menurunkan persentase jumlah siswa putus sekolah dan lulusan yang tidak melanjutkan, terutama siswa yang berasal dari keluarga miskin. Semua capaian tersebut menggambarkan bahwa efisiensi internal pendidikan terus

membaik, yang ditandai oleh menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka melanjutkan, dan mengecilnya kesenjangan angka partisipasi pendidikan antarkelompok status ekonomi, sekaligus membuktikan efektivitas kebijakan Pemerintah yang berpihak kepada masyarakat miskin. Dalam konteks ini, untuk meningkatkan efektivitas BSM, distribusi jumlah penerima di daerah tertinggal, terpencil, kawasan nelayan, dan daerah sentra pengirim tenaga kerja ke luar negeri (TKI) ditingkatkan untuk mempercepat peningkatan partisipasi siswa serta mengurangi kesenjangan dengan daerah yang lebih maju.

Untuk mendukung perluasan dan pemerataan pendidikan, Pemerintah juga terus meningkatkan kualitas layanan pembelajaran antara lain dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk merehabilitasi ruang kelas rusak berat/rusak sedang. Data Kemdikbud tahun 2012 menunjukkan, sebanyak 67.286 ruang kelas jenjang SD/MI dan SMP/MTs dalam kondisi rusak berat. Kondisi ini merupakan hasil dari upaya Pemerintah yang sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 telah merehabilitasi sebanyak 91.093 ruang kelas rusak berat di jenjang SD/MI dan 23.464 ruang kelas rusak berat di jenjang SMP/MTs. Sisa ruang rusak berat yang belum direhabilitasi sebanyak 52.739 ruang kelas SD/MI dan 14.547 ruang kelas SMP/MTs rencananya akan diselesaikan pada tahun 2013 dan 2014.

Dengan melihat keberhasilan pelaksanaan program pendidikan dasar sembilan tahun, yang ditandai oleh makin meningkatnya jumlah lulusan SMP/MTs/ sederajat, mulai tahun ajaran 2012/2013 Pemerintah melaksanakan program Pendidikan Menengah Universal (PMU). Program PMU bertujuan untuk: (1) memperluas pemerataan pendidikan dan mewujudkan keadilan sosial; (2) mengurangi kesenjangan pencapaian pendidikan tingkat menengah antarkelompok masyarakat; (3) meningkatkan daya saing nasional serta membangun dan mengembangkan kualitas bangsa; dan (4) mempersiapkan anak-anak didik dengan landasan keilmuan yang baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, program PMU juga bernilai strategis terutama untuk (1) menciptakan lapisan *critical mass* dalam cakupan yang lebih luas dan (2) mempersiapkan anak-anak didik (penduduk usia produktif) memasuki masa transisi antara meneruskan ke jenjang

pendidikan tinggi atau langsung masuk ke pasar kerja.¹ Dalam konteks ini, bagi anak-anak didik yang memilih untuk memasuki pasar kerja, PMU akan membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih baik, sehingga diharapkan lebih produktif di dunia kerja. Program PMU juga dimaksudkan untuk menyiapkan landasan sosial yang kuat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Penduduk usia muda merupakan aset ekonomi sangat potensial untuk menopang produktivitas nasional, terutama terkait dengan pemanfaatan bonus demografi.

Taraf pendidikan penduduk usia sekolah yang terus meningkat dan pemerataan layanan pendidikan yang makin membaik juga diikuti dengan meningkatnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan. Sampai dengan tahun 2012, telah terjadi peningkatan kualitas yang ditandai, antara lain, dengan meningkatnya rata-rata nilai ujian nasional (UN) dan pencapaian berbagai prestasi dalam berbagai kompetisi nasional dan internasional. Dalam kurun waktu tahun 2004-2012, nilai UN dan angka kelulusan siswa pada jenjang SMP/MTs dan SMA/MA/SMK mengalami peningkatan. Selain itu, guna meningkatkan mutu pendidikan, ketersediaan guru dan tenaga kependidikan lainnya yang berkualitas merupakan syarat mutlak yang harus mutlak dipenuhi. Sampai dengan tahun 2012 proporsi guru yang memiliki kualifikasi minimal S1/D4 meningkat menjadi sebesar 62,30 persen, dari proporsi sebelumnya pada tahun 2011 sebesar 58,00 persen. Peningkatan juga terjadi pada proporsi guru yang telah tersertifikasi, yaitu menjadi sebesar 59,28 persen dari jumlah guru yang masuk kriteria untuk disertifikasi, atau 42,60 persen dari total jumlah guru di tahun 2012. Capaian tersebut diperkirakan terus meningkat menjadi 65,96 persen yang memiliki kualifikasi S1/D4 dan 69,14 persen yang tersertifikasi pada tahun 2013. Sejalan dengan peningkatan kualifikasi dan sertifikasi guru, mulai tahun 2013 Pemerintah juga melaksanakan Kurikulum Baru 2013 setelah dilakukan perbaikan dan pembaruan muatan mata pelajaran serta sesudah dilakukan uji publik di sejumlah sekolah dan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan,

¹ Menurut data Bank Dunia (2012), mengungkapkan bahwa 1 dari 3 lulusan Sekolah Menengah meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi dan 2 dari 3 lulusan Sekolah Menengah memilih bekerja.

termasuk lembaga swasta seperti Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pendidikan telah dilakukan perbaikan manajemen pendidikan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah dengan memberi kewenangan penuh untuk melakukan pengelolaan urusan sekolah. Dengan pendekatan MBS, proses pembuatan kebijakan dan perencanaan pembelajaran, pengalokasian sumber daya, serta pengorganisasian kegiatan-kegiatan persekolahan bertumpu pada seluruh pemangku kepentingan di sekolah, termasuk komite sekolah. Melalui MBS, sekolah diharapkan mampu mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menyelenggarakan aktivitas pembelajaran di sekolah.

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, Pemerintah terus berupaya memantapkan pelembagaan otonomi perguruan tinggi, sebagaimana diamanatkan di dalam UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Guna memenuhi amanat UU PT, Pemerintah juga menyediakan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) yang bertujuan untuk meringankan beban perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pada tahun 2013 disediakan dana BOPTN bagi 92 PTN dan 65 PTAN. Sebagian dana BOPTN dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan penelitian dan pengembangan, termasuk oleh perguruan tinggi swasta. Pelaksanaan BOPTN dimaksudkan untuk mengurangi beban pembiayaan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

Sejak tahun 2009 telah dilakukan pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN sesuai amanat Konstitusi. Pada tahun 2013, anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN mencapai Rp336,8 triliun yang dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp117,8 triliun, dana Transfer Daerah sebesar Rp214,0 triliun, dan dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp5,0 triliun. Selain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama, pemanfaatan belanja pemerintah pusat untuk fungsi pendidikan juga dilaksanakan oleh 17 kementerian/lembaga.

Perpustakaan. Perpustakaan merupakan sarana dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan karya rekam. Sebagai wahana belajar sepanjang hayat, perpustakaan diharapkan mampu mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Di samping itu, dalam rangka untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa. Berbagai upaya yang dilakukan telah menunjukkan kemajuan antara lain meningkatnya layanan perpustakaan dan budaya gemar membaca di masyarakat yang ditandai oleh: (1) meningkatnya jumlah pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan menjadi 4,5 juta orang; (2) meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan menjadi sebanyak 144.000 koleksi; dan (3) meningkatnya jumlah perpustakaan yang dikelola sesuai standar.

Pencapaian tersebut didukung oleh meningkatnya berbagai kegiatan antara lain: (1) layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta pengembangan perpustakaan elektronik (*e-library*) di perpustakaan provinsi dan meningkatnya kualitas perpustakaan umum di 350 kabupaten/kota; (2) sosialisasi dan kampanye perpustakaan dan gemar membaca melalui berbagai media; (3) pemberian bantuan mobil perpustakaan keliling dan kapal perpustakaan keliling sebagai stimulan untuk provinsi dan kabupaten/kota; (4) penyusunan pedoman penyelenggaraan perpustakaan, jabatan fungsional pustakawan, serta pendidikan dan pelatihan bidang perpustakaan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan; (5) pengelolaan *International Standard Book Number* (ISBN), dan *International Standard Music Number* (ISMN), penerbitan Bibliografi Nasional Indonesia (BNI) dan Katalog Induk Nasional (KIN), dan penerbitan literatur sekunder lain; (6) pengelolaan 80.000 eksemplar terbitan nasional (karya cetak dan karya rekam); dan (7) diseminasi bahan bacaan

kepada perpustakaan umum provinsi dan kabupaten/kota, desa, sekolah, rumah ibadah, dan pondok pesantren.

Pemuda dan Olahraga. Pembangunan kepemudaan dan keolahragaan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, terutama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2005-2025, pada tahun 2014 jumlah pemuda diperkirakan sebanyak 62,47 juta jiwa atau 25,5 persen dari penduduk Indonesia. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Dalam rangka meningkatkan peran aktif pemuda, maka Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya.

Pembangunan kepemudaan yang dilaksanakan lintas bidang/sektor/program telah menunjukkan berbagai kemajuan yang ditandai antara lain: (1) meningkatnya Angka Partisipasi Sekolah (APS) pemuda, yaitu APS penduduk usia 16-18 tahun meningkat dari 56,01 persen pada 2010 menjadi 57,85 persen pada 2011; APS penduduk usia 19-24 tahun meningkat dari 13,77 persen pada 2010 menjadi 14,26 persen pada 2011 (Susenas, 2011); dan (2) meningkatnya partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pemuda meningkat dari 62,69 persen pada 2009 menjadi 63,44 persen pada 2011 (Sakernas Agustus 2009 dan 2011).

Dalam upaya peningkatan pembangunan karakter (*character building*), revitalisasi dan konsolidasi gerakan kepemudaan, serta revitalisasi gerakan pramuka pada tahun 2012 dilakukan kegiatan, antara lain: (1) fasilitasi pemuda kader dalam peningkatan kapasitas pemuda di bidang iptek dan imtaq, serta pengembangan kreativitas dan kualitas pemuda bagi 2.957 orang; (2) fasilitasi pengelola organisasi kepemudaan dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program bagi 200 orang; (3) fasilitasi pemuda kader pelopor bagi 426 orang; (4) fasilitasi pemuda kader kepemimpinan bagi 158 orang; (5) fasilitasi pemuda kader kewirausahaan bagi 3.061 orang; dan (6) fasilitasi pemuda dalam pendidikan kepramukaan bagi 892 orang.

Sementara itu, pembangunan keolahragaan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran masyarakat yang dapat menunjang kinerja dan produktivitas bangsa. Selain itu, melalui olahraga prestasi dapat menjadi wahana untuk menanamkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Pembangunan keolahragaan pada tahun 2012 terus ditingkatkan melalui pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga pendidikan, dan olahraga prestasi, antara lain: (1) fasilitasi pelatihan bagi 520 olahragawan andalan nasional; (2) fasilitasi peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan bagi 689 orang; (3) fasilitasi pelayanan, pengujian dan pemeriksaan kesehatan olahragawan di daerah bagi 1.980 orang; (4) fasilitasi pelatihan bagi pelatih olahraga pendidikan yang memiliki kompetensi di satuan-satuan pendidikan bagi 240 orang; (5) fasilitasi perlombaan, festival dan invitasi olahraga massal dan tradisional bagi 1.650 orang; dan (6) pemberian penghargaan bagi 400 atlet dan tenaga keolahragaan berprestasi. Selain itu prestasi olahraga Indonesia terus meningkat yang ditunjukkan dengan menjadi juara umum pada kejuaraan SEA Games 2011. Pada kejuaraan Olympiade tahun 2012 di London perolehan medali kontingen Indonesia yaitu 1 perak dan 1 perunggu.

Agama. Kualitas kehidupan beragama masyarakat tercermin pada keyakinan, nilai-nilai, yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku keseharian dari masing-masing individu pemeluk agama. Beberapa upaya dalam rangka meningkatkan pemahaman keagamaan adalah melalui pengajaran dan pembinaan keagamaan. Beberapa contoh dari bentuk peningkatan pengajaran dan pembinaan keagamaan adalah melalui pengkajian kitab-kitab suci, perayaan hari besar keagamaan, pembinaan keluarga sakinah/sejahtera, serta menanamkan rasa cinta kasih terhadap sesama melalui pengelolaan dana sosial keagamaan. Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap agama dan menjadikan nilai-nilai agama sebagai landasan etika dan moral baik secara individual maupun secara bersama dalam kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, mengembangkan pola dan nilai-nilai keagamaan, serta

meningkatkan rasa keimanan baik secara individu maupun sosial.

Peningkatan kerukunan umat beragama dan peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji merupakan fokus prioritas pembangunan bidang agama, disamping peningkatan layanan keagamaan, dan peningkatan tata kelola pembangunan bidang agama. Walaupun pembangunan agama terus dilakukan namun masih terjadi beberapa kasus kekerasan yang dilatarbelakangi isu agama di beberapa wilayah di Indonesia. Selama ini, paling tidak terdapat dua isu yang kerap melatarbelakangi terganggunya kehidupan umat beragama, yaitu isu tuduhan penyimpangan ajaran agama dan perolehan ijin pendirian rumah ibadah. Isu tersebut tidak hanya terjadi pada antarumat beragama, namun juga intern umat beragama. Selain dua isu utama tersebut, ketegangan yang kerap terjadi merupakan ekses dari faktor lain seperti kesenjangan ekonomi, masalah politik, serta permasalahan sosial lain yang merupakan konsekuensi logis dari adanya keragaman di Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka menjaga suasana yang aman dan damai di masyarakat, yaitu melalui pengembangan sikap dan perilaku keberagamaan yang toleran, peningkatan wawasan multikultur diantara para guru dan siswa, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama melalui berbagai pertemuan diantara umat dan pemuka agama, serta fasilitasi operasional FKUB di 33 provinsi dan di 461 Kabupaten/Kota. Selain itu, dilakukan pula reharmonisasi kehidupan sosial keagamaan di daerah konflik melalui kegiatan jangka pendek (menenangkan masyarakat), jangka menengah (perjanjian damai), dan panjang (*trauma healing* dan penyuluhan).

Prioritas lainnya pembangunan bidang agama adalah layanan keagamaan kepada masyarakat. Salah satu kegiatan besar dan seringkali menjadi perhatian adalah penyelenggaraan ibadah haji. Berbagai upaya perbaikan dan pengembangan dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan haji, diantaranya: (1) perbaikan proses pelaksanaan ibadah haji, dengan adanya peningkatan efisiensi dan transparansi pendaftaran calon jemaah haji melalui Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat); (2)

pemberian subsidi beberapa komponen biaya haji seperti pemondokan dan katering haji dari hasil manfaat dana setoran awal; (3) penerbitan paspor dan visa haji yang lebih tepat waktu; (4) realisasi penyediaan 98 persen pemondokan jemaah di lokasi radius 2.500 meter dari Masjidil Haram dan penyediaan transportasi publik, disamping peningkatan kualitas pemondokan di Madinah dan Armina; (5) perbaikan sistem katering dengan perbaikan pelayanan mulai dari bandara King Abdul Aziz Madinah, dan Armina; (6) peningkatan ketepatan waktu transportasi para jemaah haji hingga tiba di tanah air; (7) perbaikan pembinaan dan penyuluhan haji melalui bimbingan manasik haji di tingkat kecamatan dan sosialisasi di media elektronik; pelatihan (ToT) bagi para instruktur di pusat; dan orientasi bagi kepala KUA; (8) perbaikan seleksi petugas haji melalui seleksi administrasi di tingkat kabupaten/kota, ujian tertulis/tes kompetensi dan psikologi di tingkat provinsi; dan (9) telah terbentuknya Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI).

Bentuk layanan keagamaan lainnya adalah penyuluhan dan bimbingan, penyediaan dan penyebaran kitab suci, penyebaran beberapa buku-buku keagamaan secara cuma-cuma kepada masyarakat dan bantuan rehabilitasi tempat ibadah di daerah pascabencana, penyediaan tunjangan operasional bagi penyuluh agama, serta pengelolaan dana sosial keagamaan. Selain itu untuk mendukung efisiensi dan efektifitas tata kelola pembangunan bidang agama adalah melalui penataan organisasi; pengembangan *assessment center* bagi perekrutan, pengembangan potensi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM); serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan.

Kebudayaan. Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk memperkuat jati diri dan karakter bangsa serta pelestarian budaya. Pengembangan dan perlindungan terhadap kebhinekaan budaya, karya seni, dan ilmu serta apresiasinya diperlukan untuk memperkaya khazanah artistik dan intelektual bagi tumbuh-mapannya jati diri dan kemampuan adaptif kompetitif bangsa. Untuk mencapai sasaran tersebut telah dilakukan berbagai upaya yaitu: *pertama*, meningkatkan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) akan pentingnya pembangunan karakter dan jati diri bangsa; *kedua*, meningkatkan apresiasi masyarakat

terhadap keragaman seni dan budaya; *ketiga*, meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya, serta *keempat*, meningkatkan kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan.

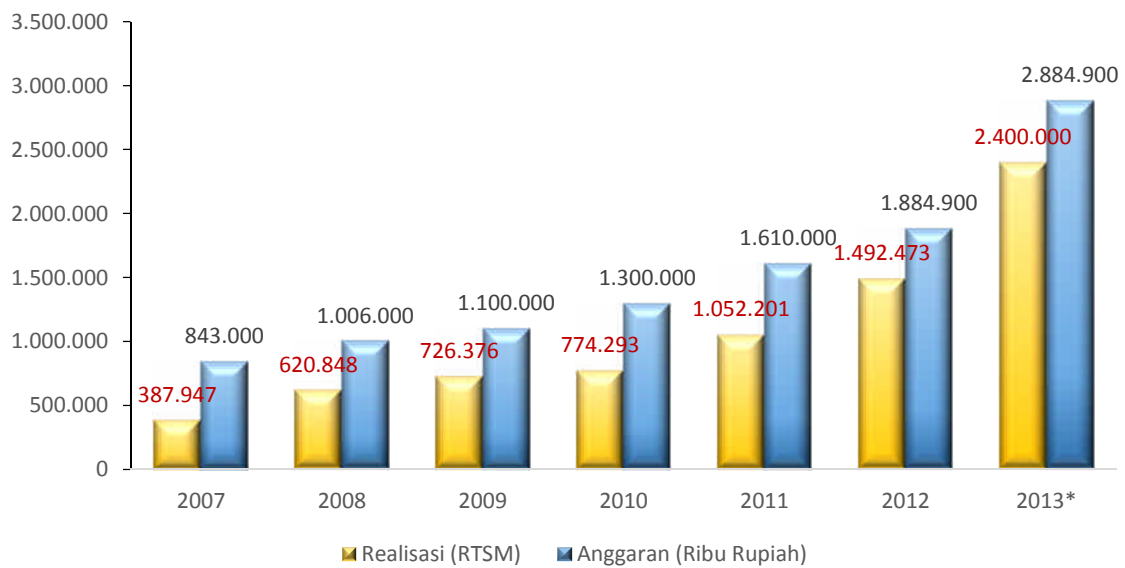
Pada tahun 2012, hasil capaian pembangunan kebudayaan antara lain: (1) semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya karakter dan jati diri bangsa berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang ditandai dengan meningkatnya upaya: (a) inventarisasi nilai-nilai tradisi dan aktualisasi karya budaya; (b) sosialisasi pembangunan karakter bangsa, serta anugerah penghargaan terhadap pelaku budaya; (c) pemetaan komunitas adat; (d) kajian, bimbingan dan penyuluhan, inventarisasi dan dokumentasi sejarah serta nilai tradisional; (e) revitalisasi kesenian yang hampir punah dan inventarisasi seni budaya; (f) pencatatan warisan budaya tak benda; (g) layanan Lembaga Sensor Film; (2) meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap hasil karya seni budaya dan perfilman yang ditandai oleh: (a) fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, serta pagelaran seni dan budaya 25 unit di ibukota provinsi dan 399 di ibukota kabupaten dan kota; (b) fasilitasi pagelaran, pameran, festival, lomba dan pawai kesenian; (c) fasilitasi penyelenggaraan event festival film di dalam dan luar negeri; (d) perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) terhadap karya seni dan budaya; (e) pengembangan galeri nasional; (f) fasilitasi pendukung pengembangan seni budaya di Taman Budaya; (3) meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya (BCB)/situs yang ditandai oleh: (a) pengelolaan terpadu cagar budaya: Kawasan Candi Borobudur, Kawasan Candi Prambanan dan Kawasan Situs Manusia Purba Sangiran; (b) revitalisasi 6 buah museum; (c) pendaftaran dan penetapan benda cagar budaya/situs/kawasan secara nasional; (d) identifikasi, inventarisasi, pemetaan, eksplorasi situs bawah air; dan (4) meningkatnya dukungan sumber daya kebudayaan yang ditandai oleh: (a) pelaksanaan 13 penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan; (b) 148 penelitian dan pengembangan bidang arkeologi; dan (c) pendidikan dan pelatihan SDM kebudayaan.

Kesejahteraan Sosial. Dalam rangka memperluas pembangunan yang berkeadilan, prioritas pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dengan memberi

perhatian yang lebih besar pada kelompok masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat miskin dan rentan terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), serta masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana. Pembangunan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh komponen bangsa di berbagai wilayah akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan. Upaya pemerintah untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan, dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan perlindungan sosial dalam bentuk jaminan dan bantuan sosial, pemberdayaan sosial, serta pelayanan dan rehabilitasi sosial.

Salah satu program prioritas nasional bidang kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk rumah tangga sangat miskin adalah Program Keluarga Harapan (PKH). PKH diberikan dalam bentuk uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan kewajiban memeriksakan kesehatan rutin anak balita dan ibu hamil/menyusui, serta menyekolahkan anak. Program yang dilaksanakan sejak tahun 2007, pada tahun 2012 telah mencakup sasaran hingga 1.492.473 RTSM dengan sebaran di 33 provinsi, 166 Kabupaten, dan 1787 Kecamatan. Pada tahun 2013, peserta PKH mencakup 2,4 juta RTSM, dan pada tahun 2014 diharapkan PKH mampu mencakup hingga 3,2 juta penerima manfaat. Perkembangan realisasi penerima dan anggaran PKH dari tahun 2007 sampai 2012 dan rencana 2013 ditampilkan pada tabel 2.1.

GAMBAR 2.1
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN PKH
TAHUN 2007-2012, DAN RENCANA TARGET TAHUN 2013



Sumber: UPPKH Pusat, Kementerian Sosial (dari berbagai tahun).

*) Rencana sasaran dan anggaran TA 2013

Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.

Upaya mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dilakukan melalui pengarusutamaan gender (PUG) di seluruh bidang pembangunan, yaitu dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam kebijakan dan program pembangunan nasional untuk mengembangkan kapasitas kelembagaan mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaannya.

Percepatan pelaksanaan PUG ini dilakukan melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). Dengan penerapan PPRG diharapkan bahwa pengintegrasian gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah, pengalokasian sumber daya pembangunan akan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan adil dalam memberi manfaat kepada perempuan dan laki-laki.

Sementara itu, pencapaian pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) di bidang pendidikan, upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2012 dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender dalam pendidikan agama antara lain pelaksanaan PUG di Madrasah dan pelaksanaan PPRG dalam pendidikan Islam, serta menyusun Panduan Umum Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Keagamaan; (2) di bidang kesehatan, telah ditetapkannya Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya NAPZA; (3) di bidang politik dan pengambilan keputusan, telah ditetapkan Peraturan Menteri Negara PP dan PA tentang Pedoman PPRG di Kementerian PAN dan RB; Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada Kemenko Polhukam; serta Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum; serta ditetapkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2012, pengganti Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tersebut ditetapkan bahwa dalam pendaftaran Partai Politik sebagai calon dalam pengajuan bakal calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dipersyaratkan memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan. Apabila nama-nama calon dalam daftar bakal calon tersebut disusun berdasarkan nomor urut, maka disyaratkan bahwa setiap 3 orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan bakal calon; (4) di bidang ketenagakerjaan, telah tercapai penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan, dari sebesar 8,74 persen pada tahun 2010 (Sakernas 2010) menjadi sebesar 7,62 persen (Sakernas 2011), lebih tinggi dengan TPT laki-laki sebesar 5,90 persen, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sebesar 52,44 persen, lebih rendah dibandingkan TPAK laki-laki sebesar 84,30 persen. Dalam rangka perlindungan tenaga kerja perempuan, pada tahun 2012 telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Yang Akan Menjadi Calon dan Purna Tenaga Kerja

Indonesia. Selain itu, saat ini sedang disusun Peraturan Menteri Negara PP dan PA tentang Kebijakan Perlindungan Perempuan Pekerja Rumahan (*putting-out system*), dan Modul Panduan Fasilitator Penguatan Mental Calon TKI Perempuan. Modul tersebut akan dimanfaatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BNP2TKI melalui Balai Latihan Kerja (BLK), dan Kementerian Luar Negeri melalui *citizen service*; (5) di bidang ekonomi, telah disusun (a) Pedoman Perencanaan dan Penganggaran BUMN; (b) Kebijakan Industri Rumahan melalui Pemberdayaan Ekonomi Rumah Tangga; (c) Pedoman PPRG bidang Perindustrian dan Perdagangan; (d) Pedoman Penyusunan Data Terpilah Gender bidang Kelautan dan Perikanan; (e) Panduan Pelaksanaan PUG pada Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan; (f) Strategi Pendayagunaan TIK untuk sosialisasi kesetaraan gender; (g) Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Dalam Pembangunan Bidang Kesejahteraan Rakyat, serta (h) *Grand Desain* Pelaksanaan PUG di Kementerian Perhubungan.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang telah terbentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tingkat Pusat dengan 6 Sub Gugus Tugas yang melibatkan 19 kementerian/lembaga terkait; 27 Gugus Tugas Provinsi yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Gubernur/Sekda; dan 82 Gugus Tugas Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota/Sekda, serta sebanyak 19 K/L telah difasilitasi dalam penerapan kebijakan perlindungan korban tindak pidana perdagangan orang (Kemenko Kesra, Kemendagri, Kemenlu, Kemendikbud, Kemenkes, Kemensos, Kemenakertans, Kemenpora, Kemenkominfo, Kemenpar dan Ekonomi Kreatif, POLRI, BNP2TKI, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kemenhukham, Kemenag, Kemenhub, BIN, dan BKKBN).

Sementara upaya perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan sampai dengan tahun 2012, dilakukan melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan antara lain melalui penyusunan berbagai peraturan dan pedoman: (1) pedoman penjangkauan korban kekerasan, (2) pedoman penanganan pengaduan

korban kekerasan, (3) pedoman umum bantuan hukum bagi korban kekerasan, (4) pedoman pencatatatan dan pelaporan korban kekerasan, (5) pedoman pelibatan laki-laki dalam pencegahan kekerasan, (6) diintegrasikannya materi anti kekerasan terhadap perempuan ke dalam diklat penjenjangan, (7) Permen No. 18 Tahun 2011 Tentang Pedum Pengintegrasian Materi Anti Kekerasan terhadap Perempuan dimasukkan ke dalam diklat penjenjangan teknis, (8) modul pelatihan pencegahan kekerasan melalui pendidikan keluarga, (9) Permen No. 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan (penelantaran), (10) pedoman pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga yang responsif gender; serta dibentuk dan difungsikannya lembaga-lembaga pelayanan perempuan dan anak korban kekerasan, seperti (a) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 27 provinsi dan 197 kabupaten/kota; (b) 456 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di Polres yang tersebar di seluruh Indonesia; (c) 22 Pusat Krisis Terpadu/PKT di Rumah Sakit Umum Daerah dan Vertikal, dan 42 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di RS Polri; dan (d) 33 Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC), 15 Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA), dan 1 Rumah Perlindungan Sosial Wanita (RPSW).

Upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan juga didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan, termasuk percepatannya melalui PPRG dan penyediaan data terpilah. Terkait dengan data gender, telah dilakukan penandatanganan MoU dengan BPS tentang Penyediaan Data dan Informasi Gender dan Anak; dan tersusunnya Pedoman Pengelolaan Data Gender di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di samping itu, telah dilaksanakan pula advokasi, sosialisasi, fasilitasi PUG, dan pelatihan analisis gender di 39 kementerian/lembaga dan 33 provinsi.

Perlindungan Anak. Agar anak-anak Indonesia menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas diperlukan upaya yang besar dari pemerintah dan masyarakat untuk memastikan hak dasarnya terpenuhi dan mereka terlindungi dari berbagai tindak kekerasan. Capaian pembangunan perlindungan anak terkait pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang

antara lain ditunjukkan dari capaian di bidang kesehatan dan pendidikan.

Sampai pada tahun 2012, capaian pemenuhan hak anak dalam bidang kesehatan ditunjukkan dengan peningkatan derajat kesehatan dan gizi anak yang ditandai dengan menurunnya angka kematian bayi dari 34 menjadi 32 dan balita dari 44 menjadi 40 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007 dan 2012), dan menurunnya prevalensi kurang gizi pada anak balita dari 18,4 persen pada tahun 2007 menjadi 17,9 persen pada tahun 2010 (Riskesdas 2007 dan 2010).

Sedangkan capaian di bidang pendidikan terlihat dari angka partisipasi sekolah (APS) anak usia 7-12 tahun yang mencapai 97,58 persen pada tahun 2011, APS anak usia 13-15 menjadi 87,78 persen, dan APS anak usia 16-17 tahun juga mengalami peningkatan menjadi 57,85 persen. Di samping itu, data Kemendikbud menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD pada tahun 2011 meningkat menjadi 34,54 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 28,97 persen.

Capaian perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan dapat dilihat dari meningkatnya presentase anak usia balita dan usia 0-17 tahun yang telah memiliki akta kelahiran menjadi sebesar 59 persen dan 63,72 persen (Susenas 2011). Selain itu pada tahun 2012, di bidang tenaga kerja, telah dilakukan penarikan 10.750 pekerja anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak (BPTA) dalam rangka Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Sebanyak 9.926 orang atau sekitar 92,33 persen dari pekerja anak tersebut, telah berhasil dikembalikan kedalam satuan pendidikan. Dalam rangka meningkatkan pelayanan sosial bagi anak, Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) pada tahun 2012 mencakup sekitar 7.610 balita telantar, 137.376 anak telantar, 8.515 anak jalanan, 1.040 Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), 1.820 Anak Dengan Kecacatan (ADK), dan 2.145 Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK). Pencapaian yang progresif dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum adalah disyahrkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Dalam upaya melengkapi ketersediaan data terkait kekerasan terhadap anak (KtA), pada tahun 2012, telah dilaksanakan persiapan Survei Prevalensi KtA yang

bertujuan untuk mengetahui besaran masalah KtA di Indonesia. Selanjutnya hasil survei tersebut sebagai dasar untuk penyusunan strategi pencegahan anak dari KtA dan penanganan anak korban KtA. Adapun pelaksanaan survei KtA ini direncanakan pada tahun 2013.

2.2 Permasalahan dan Sasaran Tahun 2014

2.2.1 Permasalahan

Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2012 dan perkiraannya tahun 2013, permasalahan dan tantangan utama yang harus dipecahkan dan dihadapi pembangunan bidang sosial budaya dan kehidupan beragama pada tahun 2014 adalah sebagai berikut.

Kependudukan dan Keluarga Berencana. Permasalahan yang dihadapi pembangunan bidang kependudukan dan keluarga berencana adalah: *pertama*, masih belum terkendalinya laju pertumbuhan dan penambahan jumlah penduduk melalui program KB. Meskipun pencapaian jumlah peserta KB sudah mencapai target, namun masih terdapat permasalahan dan tantangan yang meliputi: (a) masih tingginya tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB, yaitu sebesar 27 persen; (b) masih banyak akseptor yang menggunakan metode kontrasepsi jangka pendek, yaitu sebesar 47,3 persen (*all method*) atau 43,6 persen (*modern method*), yang dapat menyebabkan risiko terhadap tingginya tingkat DO ber-KB; (c) pelayanan KB dan pelaksanaan advokasi-KIE (advokasi dan komunikasi, infomasi dan edukasi) program KB belum optimal terjangkau secara merata, baik antar-provinsi, wilayah perdesaan dan perkotaan, tingkat kesejahteraan, tingkat pendidikan, maupun pada kelompok umur tertentu serta wilayah kumuh, daerah tertinggal, terpencil, dan perbatasan, serta wilayah kepulauan dan sungai; (d) jangkauan sasaran target calon akseptor kurang terfokus pada pasangan usia muda dan paritas rendah atau pasangan yang memiliki jumlah 2 anak ke bawah; dan (e) lemahnya pembinaan pada pelestarian akseptor KB; *kedua*, belum sinergisnya kebijakan pengendalian penduduk antara kuantitas, kualitas, dan mobilitas baik antara pusat dan daerah, antardaerah, maupun antarsektor pembangunan; dan *ketiga*, masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi kependudukan, terutama yang berkenaan dengan administrasi kependudukan sebagai salah satu sumber data

dan informasi kependudukan. Sampai saat ini data registrasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena masih terbatasnya cakupan daerah dalam penerapan SIAK *on-line* untuk pelayanan publik, terbatasnya SDM dalam pengelolaan SIAK, dan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan perubahan atas peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk dan keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut, tantangan ke depan adalah: (1) meningkatkan pemerataan pelayanan KB yang berkualitas dan pelaksanaan Advokasi-KIE program KB, dengan menurunkan kesenjangan jangkauan pelayanan KB baik antar provinsi, wilayah, dan tingkat sosial dan ekonomi, serta meningkatkan pemakaian MKJP, dan menurunkan pemakaian kontrasepsi jangka pendek, sehingga tingkat ketidakberlangsungan (DO) kesertaan ber-KB berkurang; (2) mensinergikan kebijakan dan pendanaan pembangunan bidang kependudukan dan KB baik antara pusat dan daerah; (3) menguatkan dukungan data dan informasi yang tepat waktu dan berkualitas.

Kesehatan. Meskipun berbagai kemajuan pembangunan telah dicapai, namun masih banyak permasalahan dan tantangan yang harus diselesaikan dalam pembangunan agar berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM 2010-2014 dapat dicapai. Beberapa permasalahan ke depan yang memerlukan perhatian di bidang kesehatan, antara lain: (1) masih tingginya disparitas akses pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak yang mencakup fasilitas, tenaga, jaminan pelayanan kesehatan; (2) upaya preventif dan promotif belum dilaksanakan secara optimal yang mencakup kualitas pemeriksaan pra kehamilan (*antenatal care/ANC*), cakupan imunisasi, dan promosi kesehatan di masyarakat; (3) belum terpenuhinya tenaga kesehatan strategis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dalam penanganan kesehatan ibu dan anak; (4) belum optimalnya dukungan lintas sektor dalam penanganan masalah gizi; (5) belum optimalnya upaya preventif terpadu dalam pengendalian penyakit yang ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular, serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan; (6) belum optimalnya ketersediaan obat dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan dasar; (7) meningkatnya volume kegiatan akibat *Free Trade Market*,

AEC serta pemekaran wilayah yang menyebabkan meningkatnya peredaran volume dan jenis obat dan makanan; (8) belum optimalnya pengawasan obat dan makanan; dan (9) belum optimalnya pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk, termasuk sistem rujukan dalam mendukung pelaksanaan SJSN bidang kesehatan, meliputi kesiapan fasilitas pelayanan, ketersediaan tenaga, serta ketersediaan obat dan vaksin.

Tantangan dalam peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan antara lain: (1) meningkatkan pemenuhan tenaga kesehatan strategis di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mengatasi disparitas akses pelayanan kesehatan; (2) meningkatkan dukungan lintas sektor dalam penanganan masalah kesehatan ibu dan anak, gizi, pengendalian penyakit serta penyehatan lingkungan dan pelaksanaan SJSN bidang kesehatan; dan (3) meningkatkan kapasitas pengawasan obat dan makanan.

Pendidikan. Meskipun pembangunan pendidikan telah menghasilkan banyak capaian yang menggembirakan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan ke depan untuk dipecahkan. Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dan harus diupayakan pemecahannya untuk mencapai target pembangunan pendidikan 2014, antara lain adalah: (1) masih belum meratanya akses pendidikan, terutama dimulai pada jenjang SMP keatas, yang ditunjukkan dengan masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah; (2) masih rendahnya kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan, yang ditandai oleh pengetahuan dan keterampilan lulusan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja/dunia usaha dan rendahnya kemampuan bersaing bangsa; (3) masih rendahnya proporsi guru yang memiliki kualifikasi akademik minimal S1/D4 dan jumlah guru yang telah tersertifikasi, serta belum meratanya distribusi guru yang berdampak pada masih rendahnya rasio guru/murid pada jenjang SD/MI; dan (5) belum optimalnya pendidikan karakter bangsa yang ditandai antara lain oleh masih munculnya gejala perilaku kekerasan di kalangan anak-anak usia sekolah, melemahnya nilai-nilai moral, dan memudarnya ikatan sosial.

Tantangan dalam peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, antara lain: (1) meningkatkan

pemerataan akses pendidikan di semua jenjang, termasuk akses terhadap pendidikan agama dan pendidikan keagamaan; (2) meningkatkan tingkat keberaksaraan; (3) meningkatkan kesiapan anak bersekolah; (4) meningkatkan kemampuan kognitif, karakter, dan *soft-skills* lulusan; (5) melaksanakan Kurikulum Baru Tahun 2013; (6) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan menengah sesuai dengan kebutuhan pembangunan; (7) meningkatkan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi termasuk kualitas penelitiannya, yang disertai peningkatan jumlah publikasi di jurnal-jurnal ilmiah, untuk mendukung kebutuhan pembangunan; dan (8) meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Tantangan pada aspek ketenagaan serta sarana dan prasarana pendidikan, adalah: (1) meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru; (2) meningkatkan pemerataan distribusi guru; (3) mempercepat penuntasan rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; (4) meningkatkan ketersediaan bahan ajar yang murah dan berkualitas; (5) meningkatkan ketersediaan prasarana peningkatan mutu seperti laboratorium dan perpustakaan; serta (6) meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan.

Sedangkan tantangan dalam mewujudkan manajemen, tatakelola, serta pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, antara lain: (1) meningkatkan manajemen, tatakelola, dan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan; (2) memantapkan proses pelembagaan otonomi perguruan tinggi; (3) meningkatkan kemitraan publik dan swasta dalam sektor pendidikan; dan (4) memantapkan alokasi dan mekanisme penyaluran dana pendidikan yang efisien, efektif, dan akuntabel.

Sementara itu, pembangunan perpustakaan masih dihadapkan pada permasalahan dan tantangan antara lain: (1) koleksi perpustakaan sangat terbatas, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; (2) eksistensi kelembagaan dan pendanaan perpustakaan di daerah sangat tergantung pada pemerintah daerah serta sangat cepatnya mobilitas mutasi penggantian pimpinan perpustakaan, sehingga kurang mendukung percepatan program pembangunan perpustakaan dan minat baca di daerah; (3) diversifikasi layanan perpustakaan belum dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pemustaka; (4) layanan

perpustakaan belum menjangkau seluruh wilayah tanah air; perdesaan, daerah terpencil, pulau-pulau kecil, dan daerah perbatasan; (5) apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal serta apresiasi terhadap penyelamatan naskah kuno sebagai warisan budaya (*memory of nation*) masih rendah; (6) jumlah dan kualitas tenaga pengelola perpustakaan belum memadai dan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi dibidang perpustakaan masih terbatas; (7) belum optimalnya pelaksanaan Undang Undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, sehingga belum semua terbitan di Indonesia terhimpun, terkelola dan berdayaguna di Perpustakaan Nasional maupun Perpustakaan Provinsi; (8) standardisasi prosedur penyelenggaraan perpustakaan belum dibakukan dengan SOP berstandar Internasional, seperti ISO 9001:2000.

Pemuda dan Olahraga. Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dan harus diupayakan pemecahannya untuk mencapai target pembangunan pemuda 2014, antara lain: (1) terbatasnya kapasitas, kompetensi, kreativitas dan inovasi pemuda; (2) terbatasnya pemahaman wawasan kebangsaan, nasionalisme, perdamaian dan lingkungan hidup di kalangan pemuda; (3) terbatasnya kepeloporan dan kesukarelaan di kalangan pemuda; (4) terbatasnya kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda; (5) belum optimalnya peran organisasi kepemudaan dalam pembangunan; dan (6) terbatasnya sarana dan prasarana kepemudaan. Dengan demikian tantangan pembangunan kepemudaan ke depan adalah meningkatkan pelayanan kepemudaan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan.

Pembangunan keolahragaan masih dihadapkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut: (1) terbatasnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga; (2) terbatasnya sarana dan prasarana olahraga; (3) belum optimalnya upaya pembibitan atlet unggulan; (4) terbatasnya tenaga dan pembina keolahragaan yang berkualitas; (5) terbatasnya apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi; (6) belum optimalnya penerapan teknologi olahraga dan kesehatan olahraga dalam rangka peningkatan prestasi; dan (7) belum optimalnya sistem manajemen keolahragaan nasional. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah meningkatkan

pembinaan dan pengembangan olahraga yang didukung oleh prasarana dan sarana olahraga, serta penerapan teknologi dan kesehatan olahraga dalam rangka meningkatkan budaya dan prestasi olahraga.

Agama. Peningkatan kualitas kehidupan beragama dihadapkan pada masalah bahwa sebagian pemeluk agama belum mampu melaksanakan ajaran agama secara baik. Keinginan dan semangat individu dalam mempelajari ajaran agama tersebut belum berbanding lurus dengan penerapannya dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan. Kondisi tersebut mengakibatkan masih adanya sikap dan perilaku masyarakat yang tidak sejalan dengan ajaran agama, penyimpangan ajaran agama, dan gesekan-gesekan antarpemeluk agama dan intraumat beragama.

Upaya peningkatan kerukunan beragama masih menghadapi beberapa permasalahan, yaitu: (1) peraturan perundangan yang ada belum secara komprehensif mengakomodasi perkembangan di masyarakat; (2) beberapa peraturan perundangan yang ada belum dapat di fahami sepenuhnya sehingga tidak dapat dijalankan dengan baik; dan (3) pengelolaan partisipasi masyarakat dan pemberdayaan kearifan lokal sebagai sistem perekat sosial belum maksimal.

Sejalan dengan pencapaian pembangunan bidang agama tersebut pelayanan kehidupan beragama sampai saat ini masih sangat terbatas. Kualitas dan kapasitas penyuluhan dan bimbingan keagamaan baik melalui fasilitasi pemerintah maupun oleh lembaga sosial keagamaan masih belum dapat menjawab tantangan yang tercermin pada kegelisahan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, bentuk pengelolaan dana sosial keagamaan sebagian besar masih belum optimal, walaupun banyak ditemui lembaga sosial yang melaksanakannya sudah memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesional.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan haji adalah: (1) masih belum efisiensinya pelayanan haji baik di dalam maupun di luar negeri; (2) Belum maksimalnya pelayanan terhadap jemaah selama di embarkasi haji dan masih panjangnya *waiting list* berbanding dengan kuota yang tersedia; (3) Masih adanya permasalahan yang berkaitan dengan kelompok bimbingan ibadah haji (KBIH) dan penyelenggara haji khusus (PIHK); (4) masih

kurangnya transparansi pengelolaan dana haji; dan (5) masih adanya 34 kabupaten/kota yang belum memiliki sistem komputerisasi haji terpadu (Siskohat) yang online dan 161 kabupaten/kota yang belum *upgrade* sistem *biometrik*.

Melihat berbagai permasalahan di atas, maka tantangan yang masih dihadapi pembangunan bidang agama antara lain: (1) menanamkan nilai-nilai ajaran agama ke dalam perilaku bermasyarakat dan berbangsa; (2) meningkatkan kondisi umat beragama yang aman damai melalui penjangkaran aspirasi masyarakat dan semua *stake holders* untuk menyusun draf penyempurnaan perundangan mengenai kerukunan umat beragama, melakukan sosialisasi peraturan perundangan mengenai kerukunan umat beragama, dan memberdayakan FKUB sebagai wadah bersama umat beragama; (3) meningkatkan pelayanan kehidupan beragama melalui bimbingan dan fasilitasi bagi penyuluh agama, perbaikan manajemen dana sosial keagamaan, serta peningkatan kapasitas lembaga sosial keagamaan; dan (4) meningkatkan kualitas pelayanan haji melalui upaya reformasi internal birokrasi; efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana haji; meningkatkan kualitas petugas haji; dan meningkatkan kapasitas serta integrasi sistem informasi.

Kebudayaan. Dalam pembangunan kebudayaan, sejumlah perkembangan penting dalam upaya memperkuat karakter dan jati diri bangsa, masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain: (1) karakter dan jati diri bangsa belum sepenuhnya kuat, diantaranya ditunjukkan dengan terjadinya pengaruh negatif dari interaksi budaya antar-bangsa seperti perilaku yang tidak sesuai dengan nilai luhur bangsa, memudarnya sikap toleransi dan nilai solidaritas; (2) pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap keragaman budaya masih terbatas, antara lain disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana kesenian, seperti galeri, taman budaya, gedung kesenian, dan gedung bioskop; menurunnya minat masyarakat dalam menonton kegiatan seni-budaya; dan terjadinya pembajakan karya cipta seni dan budaya; (3) kualitas pengelolaan warisan budaya masih rendah, yang antara lain ditunjukkan oleh belum optimalnya pengelolaan cagar budaya dan terbatasnya prasarana dan sarana kebudayaan; dan (4) sumber daya di bidang kebudayaan masih terbatas. Berdasarkan permasalahan tersebut,

tantangan yang dihadapi pembangunan bidang kebudayaan ke depan adalah memperkuat karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman budaya dan meningkatkan kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi, dan pengembangan kebudayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan Sosial. Melalui Inpres No. 1 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional, beberapa program dan kegiatan selain PKH masuk sebagai program Prioritas Nasional yaitu pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, pelayanan sosial lanjut usia, dan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Namun, karena anggaran yang terbatas dibandingkan kebutuhan yang meningkat, pelayanan yang diberikan masih sangat terbatas dan parsial. Selain itu, pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi anak, lanjut usia dan disabilitas belum mendapatkan perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah, khususnya dalam bentuk penyediaan dana pendamping sesuai kemampuan keuangan daerah dan mekanisme pembagian kewenangan, serta belum adanya dukungan kebijakan afirmatif sektor terkait lainnya.

Permasalahan lainnya terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dalam bidang kesejahteraan sosial. Pekerja sosial dan tenaga kerja sosial masyarakat atau pendamping merupakan ujung tombak berbagai kegiatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, kualitas pelatihan dan *transfer* pengetahuan mengenai pelayanan kesejahteraan sosial masih terbatas dan belum berjalan optimal. Proses pelatihan dan kurikulum materi pendukung belum dikembangkan secara aplikatif dan sertifikasi sumber daya manusia yang terdidik, terlatih, dan memiliki keterampilan dalam bidang kesejahteraan sosial masih sangat terbatas. Selain itu, penerima layanan kesejahteraan sosial tidak didukung oleh program pembangunan lainnya sehingga peningkatan kesejahteraan tidak berjalan secara berkesinambungan. Dalam pelaksanaan PKH misalnya, masih terdapat permasalahan *supply side* bidang kesehatan dan pendidikan yang belum memadai, terutama di daerah tertinggal. Bagi rumah tangga sangat miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia telantar, dan kelompok termarginalkan lainnya, integrasi berbagai program merupakan kunci

keberhasilan pelayanan kesejahteraan sosial.

Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan ditunjukkan antara lain oleh: (1) masih terdapat kesenjangan dalam pemerataan hasil-hasil pembangunan di berbagai bidang, baik terhadap perempuan maupun laki-laki; dalam empat aspek utama: akses, partisipasi dalam proses pembangunan/pengambilan keputusan, kontrol terhadap sumber daya, dan manfaat pembangunan, (2) program kesetaraan gender dan/atau pemberdayaan perempuan selama ini hanya meliputi sosialisasi/advokasi untuk perempuan belaka, belum sepenuhnya menyentuh pada substansi inti kegiatan/program pembangunan, dan belum sepenuhnya menyentuh laki-laki yang juga tertinggal di beberapa bidang pembangunan; serta (3) masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, yang ditandai dengan maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan.

Perlindungan Anak. Berbagai keberhasilan yang dicapai sampai tahun 2012, belum mengindikasikan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak sudah sepenuhnya efektif. Beberapa permasalahan masih dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Permasalahan pertama, masih belum optimal dan meratanya akses anak dari kelompok tertentu terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang dan kelangsungan hidup, antara lain masih rendahnya: akses anak usia dini ke layanan pengembangan yang holistik dan integratif, akses anak berkebutuhan khusus (ABK) terhadap pendidikan inklusif dan layanan kesehatan, akses anak yang ditarik dari pekerja anak ke layanan pendidikan, serta akses anak korban kekerasan dan anak yang berhadapan hukum (ABH) ke pelayanan pendidikan dan kesehatan. Permasalahan kedua, masih kurang terlindunginya anak-anak dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Data Susenas 2011 menunjukkan bahwa sekitar 385,5 ribu anak menjadi korban kejahatan. Selain itu, sampai dengan akhir 2011, terdapat sekitar 4,3 juta anak terlantar (Kemensos), 51.400 anak berstatus tahanan dan 3.312

narapidana anak (lembaga pemasyarakatan), serta 34 anak sebagai korban perdagangan orang (Bareskrim Polri).

Permasalahan ketiga, masih rendahnya pemahaman keluarga dan masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak, antara lain: masih rendahnya kesadaran keluarga dan masyarakat tentang pemberian gizi seimbang, imunisasi lengkap, dan ASI eksklusif bagi anak, banyak tradisi yang melanggengkan perilaku kekerasan pada anak, masih rendahnya kesadaran dalam melaporkan kasus-kasus kekerasan pada anak, serta kurangnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat tentang pola pengasuhan yang baik terhadap anak.

Berbagai permasalahan seperti diuraikan di atas muncul sebagai akibat dari masih rendahnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh belum harmonisnya perundang-undangan dan kebijakan yang ada, belum lengkapnya aturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang telah disusun, belum optimalnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait karena keterbatasan sumber daya, belum tersedianya data dan informasi perlindungan anak yang holistik dan berkelanjutan, masih rendahnya kapasitas tenaga pemberi layanan, dan masih kurangnya koordinasi antarkementerian/lembaga terkait baik di tingkat nasional maupun di daerah, serta antara pusat dan daerah.

2.2.2 Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan seperti tersebut di atas, sasaran pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2014 sasaran pembangunan bidang kependudukan dan KB (KKB) mengalami perubahan, yaitu sasaran keluaran *outcome* pembangunan bidang KKB, menurunnya rata-rata laju pertumbuhan penduduk dengan angka kelahiran total (*total fertility rate/TFR*) sebesar 2,36 per perempuan usia reproduktif, yang ditandai dengan meningkatnya persentase pemakaian kontrasepsi (*contraceptive prevalence rate/CPR*) sebesar 60,1 persen dan menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) sebesar 6,5 persen, dengan

sasaran keluaran *output* sebagai berikut:

- a. meningkatnya jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 29,8 juta akseptor, yang terdiri dari peserta KB aktif KPS dan KS-1 serta rentan lainnya sebanyak 13,1 juta akseptor, dan pemakaian MKJP sebesar 27,5 persen;
- b. terlayannya peserta KB baru yang memberikan kontribusi terhadap peserta KB Aktif sebanyak 7,63 juta akseptor yang terdiri dari peserta KB baru KPS dan KS 1 serta rentan lainnya sebanyak 4,05 juta akseptor, serta peserta KB baru pria sebesar 5 persen;
- c. menurunnya ketidakberlangsungan (DO) pemakaian kontrasepsi dan menurunnya penggunaan kontrasepsi dengan metode jangka pendek;
- d. menurunnya kesenjangan pelayanan KB dan advokasi-KIE program KB baik antar provinsi, wilayah, dan tingkat sosial dan ekonomi;
- e. tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB bagi klinik KB pemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB;
- f. meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan advokasi dan KIE melalui berbagai media;
- g. menguatnya kapasitas tenaga lini lapangan KB, Institusi Masyarakat Perdesaan/Perkotaan, serta kelembagaan KB di daerah dalam rangka meningkatkan kesertaan dan kemandirian ber-KB;
- h. meningkatnya keserasian kebijakan pembangunan dengan kebijakan kependudukan dan KB, serta tersedianya parameter dan analisis kependudukan di tingkat pusat dan daerah;
- i. meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data dan informasi kependudukan dari berbagai sumber (data sensus, survei, sektoral, dan lainnya);
- j. meningkatnya kuantitas dan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan sebagai

data registrasi penduduk vital dengan tertatanya peraturan pelaksana dan peraturan lainnya.

2. Meningkatnya status kesehatan masyarakat (sasaran *outcome*), yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya umur harapan hidup (UHH) menjadi 72,0 tahun;
 - b. menurunnya angka kematian ibu (AKI) melahirkan menjadi 118 per 100.000 kelahiran hidup;
 - c. menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup; dan
 - d. menurunnya prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) pada anak balita menjadi <15,0 persen.
3. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapat bantuan operasional kesehatan (BOK) menjadi 9.536 puskesmas;
 - b. meningkatnya jumlah poskesdes menjadi 58.500 poskesdes;
 - c. meningkatnya cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) menjadi 90 persen;
 - d. meningkatnya persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN) menjadi 90 persen;
 - e. meningkatnya persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (cakupan kunjungan kehamilan keempat/K4) menjadi 95 persen;
 - f. meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bayi menjadi sebesar 90 persen; dan
 - g. meningkatnya persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap menjadi sebesar 90 persen.
4. Meningkatnya status gizi masyarakat, ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan menjadi sebesar 100 persen;
 - b. meningkatnya persentase balita ditimbang berat

- badannya (D/S) menjadi sebesar 85 persen;
- c. meningkatnya pelaksanaan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk gerakan nasional percepatan perbaikan gizi di provinsi dan kabupaten/kota sebesar 100 persen.
5. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular dan meningkatnya kesehatan lingkungan, ditandai dengan:
- a. meningkatnya penanggulangan faktor resiko dan pelayanan kesehatan pada wilayah kondisi matra sebesar 80 persen;
 - b. meningkatnya provinsi yang melakukan pembinaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular (SE, deteksi dini, KIE, dan penanganan kasus) sebesar 100 persen;
 - c. meningkatnya jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan *testing* HIV sebanyak 700.000 orang;
 - d. meningkatnya penduduk 15 tahun ke atas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS sebesar 95 persen;
 - e. meningkatnya persentase ODHA yang mendapatkan *anti retroviral treatment* (ART) sebesar 50 persen;
 - f. meningkatnya penanganan kasus baru TB (BTA Positif) yang disembuhkan sebesar 88 persen;
 - g. meningkatnya angka penemuan kasus malaria per 1.000 penduduk sebesar 1 per 1.000 penduduk;
 - h. meningkatnya penemuan dan penanganan kasus zoonosis sebesar 90 persen;
 - i. meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 20.000 desa;
 - j. meningkatnya persentase penduduk yang memiliki akses terhadap air minum berkualitas menjadi 67 persen;
 - k. meningkatnya persentase kualitas air minum yang memenuhi syarat menjadi 100 persen; dan
 - l. meningkatnya penduduk yang menggunakan jamban sehat menjadi 75 persen; dan

6. Terlaksananya Sistem Jaminan Kesehatan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional Bidang Kesehatan, ditandai dengan:
 - a. meningkatnya jumlah penduduk yang mendapat subsidi Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan menjadi 86,4 juta jiwa;
 - b. meningkatnya persentase RS kabupaten/kota yang mampu melaksanakan pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif (PONEK) menjadi 100 persen;
 - c. meningkatnya penguatan rumah sakit rujukan regional di 12 Provinsi;
 - d. meningkatnya ketersediaan alat kesehatan (termasuk PONEK) di 33 rumah sakit Provinsi;
 - e. meningkatnya puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk menjadi 96 persen;
 - f. meningkatnya persentase puskesmas yang mampu melaksanakan pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED) menjadi 100 persen;
 - g. meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan di daerah bermasalah kesehatan (DBK) sebanyak 7.020 orang;
 - h. meningkatnya residen senior yang didayagunakan dan diberi insentif sebanyak 4.850 orang;
 - i. meningkatnya kemampuan SDM kesehatan di fasilitas kesehatan melalui pendidikan berkelanjutan sebanyak 9.500 orang; dan
7. Meningkatnya efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan, ditandai dengan:
 - a. meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan (dihitung dari 6.500 sarana) sebesar 42 persen;
 - b. meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan (dihitung dari

- 143.500 sarana) sebesar 22 persen;
- c. meningkatnya jumlah parameter uji obat dan makanan untuk setiap sampel (dihitung dari sekitar 97.000 Sampel) sebanyak 10 parameter;
- d. meningkatnya persentase sarana produksi obat yang memiliki sertifikasi GMP yang terkini (total jumlah sarana 202 unit) sebesar 85 persen; dan
- e. meningkatnya persentase sarana produksi makanan MD yang memenuhi standar GMP yang terkini (dihitung dari 1.000 sarana yang diperiksa) sebesar 65 persen.

8. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat yang ditandai dengan:

| Sasaran | Target 2014 |
|--|--------------------|
| a. rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas | 8,25 tahun |
| b. angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas | 4,20 persen |
| c. APM SD/SDLB/MI/Paket A | 96,0 persen |
| d. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B | 81,9 persen |
| e. APK SD/SDLB/MI/Paket A | 119,1 persen |
| f. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B | 109,6 persen |
| g. APK SMA/SMK/MA/Paket C | 85,0 persen |
| h. APK PT usia 19-23 tahun | 30,0 persen |
| i. APS penduduk usia 7-12 tahun | >99,0 persen |
| j. APS penduduk usia 13-15 tahun | >95,0 persen |
| k. meningkatnya tingkat efisiensi internal yang ditandai dengan meningkatnya angka melanjutkan dan menurunnya angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah; | |
| l. menurunnya disparitas partisipasi dan kualitas pelayanan pendidikan antarwilayah, gender, dan sosial ekonomi, serta antarsatuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat. | |

9. Meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan yang ditandai dengan:

- a. meningkatnya APK pendidikan anak usia dini

- (PAUD);
- b. meningkatnya tingkat ke bekerjaan lulusan pendidikan kejuruan;
 - c. meningkatnya proporsi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta yang terakreditasi minimal B pada semua jenjang pendidikan: SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA/SMK;
 - d. meningkatnya proporsi program studi di perguruan tinggi yang terakreditasi minimal B dan bertambahnya jumlah perguruan tinggi yang masuk 500 terbaik versi lembaga pemeringkatan independen internasional; dan
 - e. tercapainya Standar Nasional Pendidikan (SNP) bagi satuan pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

10. Meningkatnya kualifikasi dan kompetensi guru, dosen, dan tenaga kependidikan yang ditandai dengan:

| Indikator | Target 2014 |
|---|--------------------|
| a. persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4 | |
| • SD/MI/SDLB | 88,0 persen |
| • SMP/SMPLB/MTs | 98,0 persen |
| • SMA/SMK/MA/SMALB | 98,0 persen |
| b. persentase guru yang bersertifikat pendidik | |
| • SD/MI/SDLB | 80,0 persen |
| • SMP/MTs/SMPLB | 90,0 persen |
| • SMA/SMK/MA/SMALB | 90,0 persen |
| c. meningkatnya proporsi dosen program sarjana/diploma/profesi berkualifikasi S2 | 85,0 persen |
| d. meningkatnya proporsi dosen program sarjana/diploma/profesi berkualifikasi S3 | 90,0 persen |
| e. semakin membaiknya pemerataan distribusi guru antarsatuan pendidikan dan antarwilayah termasuk terpenuhinya kebutuhan guru di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal. | |

| Indikator | Target 2014 |
|--|-------------|
| f. semakin meningkatnya kapasitas tenaga kependidikan termasuk kepala sekolah dan pengawas sekolah dalam pengelolaan dan penjaminan mutu pendidikan. | |

11. Meningkatnya pembiayaan pendidikan yang berkeadilan yang ditandai:
 - a. terselenggaranya pendidikan dasar sembilan tahun berkualitas yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan dasar untuk mencapai standar nasional pendidikan; dan
 - b. meningkatnya proporsi peserta didik yang mendapatkan beasiswa bagi keluarga miskin untuk jenjang pendidikan dasar sampai dengan perguruan tinggi.
12. Meningkatnya minat dan budaya gemar membaca masyarakat serta layanan perpustakaan yang ditandai oleh:
 - a. meningkatnya jumlah pengunjung perpustakaan;
 - b. meningkatnya jumlah koleksi perpustakaan; dan
 - c. meningkatnya jumlah perpustakaan yang dikelola sesuai dengan standar/tipologi.
13. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, yang ditandai antara lain:
 - a. meningkatnya wawasan pemuda kader di bidang kebangsaan, perdamaian, dan lingkungan hidup;
 - b. meningkatnya kapasitas pengelolaan organisasi kepemudaan bagi 140 organisasi kepemudaan;
 - c. terlaksananya fasilitasi pelayanan kepemudaan pada pembina pramuka, penegak, dan pandega;
 - d. meningkatnya kapasitas dan potensi kepemimpinan; dan
 - e. meningkatnya kapasitas dan potensi kewirausahaan pemuda;
14. Meningkatnya budaya dan prestasi olahraga, yang ditandai dengan:
 - a. meningkatnya penyelenggaraan olahraga prestasi, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;

- b. meningkatnya penyediaan prasarana dan sarana keolahragaan yang memenuhi kelayakan; dan
 - c. meningkatnya perolehan medali pada kejuaraan Asian Games tahun 2014 di Korea Selatan.
15. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama pada masyarakat;
 - b. terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun dan damai dikalangan umat beragama diantaranya melalui fasilitasi pembentukan sekretariat bersama (Sekber) kerukunan umat beragama, serta bantuan operasional FKUB di 33 provinsi dan 461 kabupaten/ kota;
 - c. meningkatnya kualitas dan profesionalisme pelayanan ibadah haji yang ditandai dengan pelaksanaan ibadah haji yang tertib dan lancar bagi 211.000 jamaah; dan
 - d. meningkatnya tata kelola pembangunan bidang agama yang ditandai dengan semakin transparan dan akuntabelnya penataan organisasi, tata kelola sumber daya manusia (SDM), dan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan.
16. Mewujudkan karakter dan jati diri bangsa yang tangguh, berbudi luhur dan berakhlak mulia yang ditandai dengan:
- a. meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya karakter dan jati diri bangsa agar memiliki ketahanan budaya yang tangguh, diantaranya melalui internalisasi nilai budaya;
 - b. meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap keragaman seni dan budaya, serta kreativitas seni dan budaya yang didukung oleh suasana yang kondusif dalam penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat, diantaranya melalui penyelenggaraan even kesenian dan perfilman;
 - c. meningkatnya perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya, diantaranya melalui fasilitasi produksi film pendek

- dan film dokumenter;
- d. meningkatnya penyediaan sarana yang memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pergelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten, diantaranya melalui revitalisasi Taman Budaya;
 - e. meningkatnya kualitas perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, diantaranya melalui revitalisasi museum, pembangunan museum, pengelolaan cagar budaya, registrasi cagar budaya, dan revitalisasi cagar budaya;
 - f. meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan;
17. Memperluas cakupan sasaran penerima PKH menjadi 3,2 juta rumah tangga sasaran yang tersebar di sekitar 3.908 kecamatan dan 416 kabupaten/kota di 33 provinsi;
 18. Meningkatnya kualitas pelayanan, perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi anak telantar, lanjut usia telantar, dan penyandang disabilitas;
 19. Meningkatnya kualitas pemberdayaan sosial bagi masyarakat rentan dan miskin.
 20. Meningkatnya efektivitas kelembagaan PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di tingkat nasional dan daerah, yang antara lain ditandai dengan:
 - a. tersusunnya kebijakan pelaksanaan PUG bidang ketenagakerjaan, serta bidang IPTEK dan sumber daya ekonomi;
 - b. tersusunnya kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan;
 - c. terlaksananya fasilitasi kebijakan pelaksanaan PUG di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, ketenagakerjaan, kebijakan partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan keputusan, perlindungan perempuan dari masalah sosial, perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan, perlindungan bagi tenaga kerja perempuan, serta penerapan sistem data terpisah; dan

- d. meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan PUG dalam rangka percepatan penerapan PUG melalui PPRG, baik di tingkat nasional maupun daerah.
21. Meningkatkan efektivitas kelembagaan perlindungan anak, baik di tingkat nasional maupun daerah yang ditandai antara lain dengan:
- a. meningkatnya sinergi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak;
 - b. meningkatnya koordinasi antarkementerian/ lembaga/ SKPD dan antarpusat dan daerah dalam perlindungan anak;
 - c. meningkatnya ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak;
 - d. meningkatnya upaya advokasi dan sosialisasi perlindungan anak;
 - e. meningkatnya efektivitas pengawasan pelaksanaan perlindungan anak;
 - f. meningkatnya pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan, pemangku kepentingan, dan masyarakat tentang hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan yang baik.

2.3 Arah Kebijakan

Dengan memperhatikan permasalahan dan sasaran yang akan dicapai pada tahun 2014, maka arah kebijakan pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama diprioritaskan pada upaya:

1. Peningkatan akses pelayanan KB yang berkualitas dan merata, yang ditekankan pada upaya antara lain: (a) pembinaan Akseptor dan Peningkatan Advokasi-KIE difokuskan pada sasaran kelompok khusus (pasangan usia muda dan memiliki dua anak); PUS dari keluarga miskin, serta pelayanan KB di wilayah sulit dan kumuh melalui kampanye “2 ANAK CUKUP” dan “4 TERLALU” (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering, dan terlalu dekat dalam melahirkan); (b) pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB melalui intensifikasi penggarapan pembangunan KB di 16 provinsi, yang terdiri dari 10 provinsi penyangga utama (Sumut, Sumsel, Lampung, Jabar, Banten, DKI Jakarta, Jateng,

Jatim, Sulsel dan NTT) dan perhatian terhadap 7 provinsi, yaitu 2 provinsi (Papua dan Papua Barat) dan 4 provinsi (Aceh, NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara); (c) penguatan *demand side* dan *supply side* secara seimbang antara lain mewajibkan setiap tenaga kesehatan melayani KB, menjamin ketersediaan alokon di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes/puskesmas/klinik kb), penggerakan lini lapangan dan pemberdayaan institusi masyarakat perdesaan/perkotaan; (d) harmonisasi Program dan Penganggaran dalam bidang KB dan Kesehatan antara lain penegasan pelayanan KB dalam bidang kesehatan, pembiayaan antara APBN dan APBD; (e) penguatan kapasitas kelembagaan Kependudukan dan KB di Kab/Kota; (f) pembinaan/pelestarian terhadap akseptor KB untuk meningkatkan jumlah akseptor, dan menurunkan angka DO, serta meningkatkan penggunaan alat dan obat kontrasepsi jangka panjang (MKJP); (g) peningkatan distribusi alokon ke Klinik KB/Puskesmas secara optimal agar kebutuhan ber-KB terpenuhi secara baik; dan (h) pembinaan remaja melalui Generasi Berencana (*genre*).

2. Penyerasian kebijakan kependudukan dan KB, yang ditekankan pada inventarisasi dan identifikasi peraturan perundangan dan kebijakan sektor yang terkait dengan program kependudukan KB; perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas; penyediaan sasaran parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait; analisis dampak kependudukan; serta peningkatan kerjasama kependudukan dalam pendidikan.
3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas data-informasi kependudukan yang memadai, akurat, dan tepat waktu, terutama pada penyediaan data kependudukan yang bersumber dari sensus penduduk, survei kependudukan, dan data sektoral bidang KKB; serta peningkatan cakupan registrasi vital dengan mendorong pemberian NIK kepada setiap penduduk dan menyelenggarakan koneksitas data kependudukan, serta penyusunan dan penyelarasan peraturan pelaksana dan peraturan daerah dalam

penyelenggaraan administrasi kependudukan.

4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk menurunkan AKI dan AKB, antara lain melalui :
 - (a) peningkatan puskesmas yang mampu PONED;
 - (b) peningkatan rumah sakit yang mampu PONEK;
 - (c) peningkatan upaya preventif dan promotif;
 - (d) peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan anak;
 - (e) peningkatan pelayanan kesehatan ibu; dan (f) peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap.
5. Peningkatan perbaikan gizi, antara lain melalui: (a) peningkatan pemantauan pertumbuhan balita secara rutin; (b) pemberian makanan tambahan dan mikronutrient bagi ibu hamil, bayi dan balita; dan (c) peningkatan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
6. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular serta penyehatan lingkungan, antara lain melalui: (a) penanggulangan faktor resiko penyakit; (b) peningkatan pencegahan penyakit tidak menular; (c) peningkatan layanan konseling HIV/AIDS, testing HIV/AIDS dan pengetahuan tentang HIV/AIDS; (d) peningkatan pemberian obat ARV bagi ODHA; (e) pengendalian penyakit TB; (f) pengendalian penyakit Malaria; (g) pengendalian kasus zoonosis; (h) peningkatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
7. Pelaksanaan jaminan kesehatan dalam rangka SJSN Kesehatan, antara lain melalui: (a) penyediaan Subsidi Bantuan Iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu; (b) peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mencakup tempat tidur kelas III RS, pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, peningkatan jumlah puskesmas mampu PONED dan RS mampu PONEK; (c) peningkatan ketersediaan tenaga kesehatan melalui program PTT, insentif bagi tenaga kesehatan di DTPK, dan residen senior; dan (d) pengembangan manajemen, sistem monitoring dan rujukan pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan SJSN bidang kesehatan.
8. Peningkatan efektifitas pengawasan obat dan makanan dalam rangka peningkatan keamanan, mutu dan manfaat/khasiat obat dan makanan, melalui: (a) penyusunan standar, regulasi dan pedoman pengawasan obat dan makanan serta dukungan

regulatori kepada pelaku usaha untuk pemenuhan standar dan ketentuan yang berlaku; (b) peningkatan evaluasi pre market obat dan makanan yang diselesaikan tepat waktu; (c) peningkatan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang memenuhi Standar GMP/GDP; (d) peningkatan pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia oleh 31 BB/BPOM; (e) penguatan kapasitas laboratorium Badan POM; (f) peningkatan investigasi awal dan penyidikan kasus di bidang obat dan makanan; (g) peningkatan pengawasan pada produk garam dan tepung terigu yang wajib di-fortifikasi; (h) peningkatan implementasi reformasi birokrasi melalui peningkatan layanan publik dan akuntabilitas kinerja; (i) pengembangan tenaga pengawas obat dan makanan; (j) peningkatan KIE dalam rangka memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan.

9. Peningkatan kualitas manajemen pembangunan kesehatan, sistem informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) kesehatan, melalui: (a) peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi pembangunan kesehatan untuk mendukung pencapaian target MDGs; (b) penguatan peraturan perundangan pembangunan kesehatan; (c) peningkatan kualitas penyediaan data dan informasi kesehatan berbasis elektronik (*e-health*); (d) peningkatan penguasaan dan penerapan iptek kesehatan dalam bidang kedokteran, kesehatan masyarakat, rancang bangun alat kesehatan dan penyediaan bahan baku obat; dan (e) pelaksanaan riset kesehatan nasional.
10. Peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang merata melalui: (a) penyelenggaraan pendidikan dasar bermutu yang terjangkau bagi semua dalam kerangka pelaksanaan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan; (b) pemantapan/rasionalisasi implementasi Bantuan Operasional Sekolah (BOS); (c) peningkatan daya tampung SMP/MTs/ sederajat terutama di daerah terpencil dan kepulauan; (d) penurunan angka putus sekolah dan angka mengulang, peningkatan angka melanjutkan, serta penurunan rata-rata lama penyelesaian pendidikan di jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) untuk

mendukung peningkatan efisiensi internal pendidikan; (e) penuntasan rehabilitasi ruang kelas SD/MI/ sederajat dan SMP/MTs/ sederajat untuk memenuhi standar pelayanan minimal; (f) peningkatan mutu proses pembelajaran; (g) peningkatan pendidikan inklusif untuk anak-anak cerdas dan berkebutuhan khusus; (h) peningkatan kesempatan lulusan SD/MI/ sederajat yang berasal dari keluarga miskin untuk dapat melanjutkan ke SMP/MTs/ sederajat, dan (i) pengembangan pendidikan karakter bangsa; serta (j) penguatan pelaksanaan proses belajar mengajar dengan iklim sekolah yang mendukung tumbuhnya sikap saling menghargai, sportif, kerja sama, kepemimpinan, kemandirian, partisipatif, kreatif, dan inovatif (*soft skills*), serta jiwa kewirausahaan.

11. Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan menengah universal, melalui: (a) peningkatan akses pendidikan menengah jalur formal dan nonformal; (b) rehabilitasi ruang kelas rusak berat, serta pembangunan RKB dan USB bagi SMA/SMK/MA/ sederajat; (c) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusan agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya atau memasuki dunia kerja; (d) peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pembangunan termasuk kebutuhan lokal untuk menghasilkan lulusan yang siap memasuki dunia kerja dan memiliki etos kewirausahaan; (e) harmonisasi pendidikan menengah kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan untuk membangun sinergi dalam rangka merespon kebutuhan pasar yang dinamis; (f) peningkatan kemitraan antara pendidikan kejuruan, pendidikan tinggi vokasi, dan pelatihan keterampilan dengan dunia industri dalam rangka memperkuat intermediasi dan memperluas kesempatan pemagangan serta penyelarasan pendidikan/pelatihan dengan dunia kerja; (g) peningkatan pendidikan kewirausahaan untuk jenjang pendidikan menengah; dan (h) peningkatan ketersediaan guru SMK yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan

pembangunan termasuk kebutuhan lokal.

12. Peningkatan kualitas, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi, melalui: (a) peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tinggi dengan memperhatikan keseimbangan antara jumlah program studi sejalan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan dan masyarakat serta daerah; (b) penguatan otonomi perguruan tinggi dan manajemen pendidikan tinggi dalam rangka membangun universitas riset (*research university*) menuju terwujudnya universitas kelas dunia (*world class university*); (c) penataan program studi dan bidang keilmuan yang fleksibel untuk memenuhi kebutuhan pembangunan; (d) peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan tinggi, seperti perpustakaan dan laboratorium yang sesuai dengan kebutuhan program studi; (e) pengembangan dan pelaksanaan *roadmap* penelitian sesuai dengan kebutuhan pembangunan untuk mendukung terwujudnya perguruan tinggi sebagai lembaga pengembangan dan penelitian iptek; (f) peningkatan kualifikasi dosen melalui pendidikan S2/S3 baik di dalam maupun di luar negeri; (g) penguatan kualitas dosen melalui peningkatan intensitas penelitian dan *academic recharging*; (h) penguatan sistem insentif bagi dosen dan peneliti untuk mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal-jurnal ilmiah internasional dan mendapatkan paten; (i) penguatan kemitraan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan industri, termasuk lembaga pendidikan internasional, dalam penguatan kelembagaan perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan dan penelitian iptek; (j) peningkatan pendidikan kewirausahaan, termasuk *technopreneur* bagi dosen dan mahasiswa dengan menjalin kerja sama antara institusi pendidikan dan dunia usaha; dan (k) pemberian beasiswa perguruan tinggi untuk siswa SMA/SMK/MA yang berprestasi dan kurang mampu.
13. Peningkatan profesionalisme dan pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan, melalui: (a) peningkatan kualifikasi akademik, sertifikasi kompetensi, evaluasi, pelatihan, pendidikan, dan penyediaan berbagai tunjangan guru; (b) penguatan kemampuan guru, termasuk kepala sekolah dan

pengawas sekolah, dalam menjalankan paradigma pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan mendorong tumbuhnya jiwa kewirausahaan; (c) peningkatan kompetensi guru melalui pengembangan profesional berkelanjutan (*continuous professional development*); (d) pemberdayaan peran kepala sekolah sebagai manager sistem pendidikan yang unggul; (e) revitalisasi peran pengawas sekolah sebagai entitas *quality assurance*; (f) peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) untuk mencetak guru yang berkualitas, dengan menyelenggarakan *pre-service* dan *in-service training* yang bermutu; (g) peningkatan pengawasan pendirian LPTK dan pengendalian mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan guru; (h) peningkatan efisiensi, efektivitas, pengelolaan, dan pemerataan distribusi guru; dan (i) penyediaan tenaga pendidik di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan sesuai dengan standar pelayanan minimal.

14. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan nonformal dan pendidikan informal, melalui: (a) penguatan kapasitas lembaga penyelenggara pendidikan nonformal; (b) peningkatan pendidikan kecakapan hidup untuk warga negara usia sekolah yang putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah dan bagi warga usia dewasa; (c) peningkatan pengetahuan dan pendidikan pengasuhan (*parenting education*) bagi orang tua dan *homeschooling* serta pendidikan sepanjang hayat; dan (d) peningkatan keberaksaraan penduduk yang diikuti dengan upaya pelestarian kemampuan keberaksaraan dan peningkatan minat baca.
15. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, melalui peningkatan kemampuan guru dalam pengajaran, kapasitas penyelenggara pendidikan, pemberian bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan, serta pemantapan pelaksanaan Kurikulum Baru 2013 dan pengembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama dan keagamaan yang efektif sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).
16. Pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional, dengan meningkatkan: (a) percepatan penyusunan

peraturan perundangan untuk mendukung pemantapan pelaksanaan sistem pendidikan nasional; (b) penataan pelaksanaan pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundangan; dan (c) pengembangan kurikulum baik nasional maupun lokal yang disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni serta perkembangan global, regional, nasional, dan lokal termasuk pendidikan agama, pengembangan kinestetika dan integrasi pendidikan kecakapan hidup untuk meningkatkan etos kerja dan kemampuan kewirausahaan peserta didik dalam rangka mendukung pendidikan berwawasan pembangunan berkelanjutan.

17. Peningkatan efisiensi dan efektivitas manajemen pelayanan pendidikan melalui: (a) pemantapan pelaksanaan desentralisasi pendidikan; (b) pengelolaan pendanaan di tingkat pusat dan daerah yang transparan, efektif dan akuntabel serta didukung sistem pendanaan yang andal; (c) peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, antara lain, dalam bentuk komite sekolah; (d) peningkatan kapasitas pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelaksanaan desentralisasi pendidikan termasuk di antaranya dalam bentuk dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota; (e) peningkatan kapasitas satuan pendidikan untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi pendidikan, termasuk manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (f) konsolidasi sistem informasi dan hasil penelitian dan pengembangan pendidikan untuk dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan.
18. Penguatan tata kelola pendidikan melalui: (a) penguatan sistem evaluasi, akreditasi dan sertifikasi kompetensi termasuk sistem pengujian dan penilaian pendidikan dalam rangka penilaian kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional; (b) penyusunan peraturan perundang-undangan yang menjamin tercapainya pendidikan dasar sembilan tahun yang bermutu dan terjangkau; (c)

peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan didukung oleh ketersediaan buku-buku mata pelajaran yang berkualitas dan murah, untuk memenuhi standar pelayanan minimal termasuk di daerah pemekaran baru; (d) peningkatan penerapan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pendidikan termasuk penyediaan internet ber-*content* pendidikan mulai jenjang pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

19. Peningkatan pendidikan karakter melalui: (a) sosialisasi, edukasi dan internalisasi pentingnya bangsa yang berkepribadian unggul dan berkarakter; (b) internalisasi nilai-nilai budaya ke dalam proses pembelajaran pada pendidikan formal, nonformal, informal dalam keluarga dan di tempat bekerja; (c) intervensi regulasi, pelatihan dan pemberdayaan, serta pembiasaan (*habituaasi*) bagi semua kepentingan; (d) pembudayaan berperilaku dan berkarakter yang dikuatkan dengan penanaman nilai-nilai kehidupan agar menjadi budaya; (e) membangun kerja sama yang sinergis antarpemangku kepentingan; dan (f) peningkatan mutu bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi dan seni serta bahasa perhubungan luas antarbangsa.
20. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan taraf pendidikan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antartingkat sosial ekonomi dengan meningkatkan: (a) pemihakan pada siswa dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin melalui pemberian bantuan beasiswa bagi siswa dan mahasiswa miskin; (b) pemihakan kebijakan bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal (*underserved*); (c) pengalokasian sumberdaya yang lebih memihak kepada daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal; (d) pemihakan kebijakan pendidikan yang responsif gender di seluruh jenjang pendidikan; (e) pengembangan instrumen untuk memonitor kesenjangan antarwilayah, antarjenis kelamin, dan antartingkat sosial ekonomi; dan (f) peningkatan advokasi dan *capacity building* bagi daerah dan satuan pendidikan yang tertinggal.
21. Peningkatan budaya gemar membaca dan layanan

perpustakaan, melalui: (a) penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat; (b) revitalisasi perpustakaan; (c) peningkatan ketersediaan layanan perpustakaan secara merata; (d) peningkatan kualitas dan keberagaman koleksi perpustakaan; (e) peningkatan promosi gemar membaca dan pemanfaatan perpustakaan; dan (f) pengembangan kompetensi dan profesionalitas tenaga perpustakaan.

22. Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan, melalui: (a) peningkatan *character building*, revitalisasi, dan konsolidasi gerakan kepemudaan; (b) peningkatan kapasitas, kreativitas dan kualitas pemuda; (c) peningkatan wawasan kebangsaan, perdamaian dan lingkungan; (c) pemberdayaan organisasi kepemudaan; (d) peningkatan pendidikan kepramukaan bagi pemuda; (e) pengembangan kepemimpinan pemuda; (f) pengembangan kewirausahaan pemuda; dan (g) pengembangan kepeloporan pemuda.
23. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, antara lain melalui: (a) peningkatan perolehan medali pada kejuaraan Asian Games tahun 2014 di Korea Selatan; (b) pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi; (c) penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi; (d) konsolidasi manajemen sistem keolahragaan nasional; (e) penyelenggaraan kejuaraan keolahragaan; (f) pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga; (g) peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga; (h) pengembangan iptek keolahragaan; (i) peningkatan peran serta masyarakat; (j) pembinaan dan pengembangan industri olahraga; (k) pengembangan standar nasional keolahragaan; (l) penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi olahraga; dan (m) pemberian penghargaan keolahragaan.
24. Peningkatan kualitas kehidupan beragama melalui peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan, peningkatan layanan keagamaan, peningkatan kualitas lembaga sosial keagamaan, serta penelitian dan pengembangan

agama.

25. Peningkatan kerukunan umat beragama melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi sosial keagamaan, serta pemuka agama agar secara mandiri dapat mencegah dan menyelesaikan konflik, optimalisasi harmonisasi kehidupan sosial keagamaan di daerah yang memiliki potensi konflik; peningkatan pemahaman agama berwawasan multikultur yang berkelanjutan; dan menuntaskan pembentukan dan pemberdayaan forum kerukunan umat beragama (FKUB) diseluruh Indonesia hingga tingkat kabupaten/kota;
26. Peningkatan kualitas penyelenggaraan haji melalui reformasi birokrasi melalui reorganisasi pelayanan haji di dalam dan luar negeri, revitalisasi asrama haji dan pelayanan haji, peningkatan kualitas penyelenggara haji oleh masyarakat dan swasta, peningkatan kualitas pengelolaan dana haji, peningkatan kualitas sistem kualitas haji terpadu (Siskohat) haji yang terintegrasi.
27. Peningkatan tata kelola pembangunan bidang agama melalui penataan organisasi, tata kelola SDM, serta kualitas pelaporan kinerja dan keuangan.
28. Penguatan karakter dan jati diri bangsa yang berbasis pada keragaman budaya, dengan meningkatkan: (a) pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai kearifan lokal; (b) pemahaman tentang kesejarahan dan wawasan kebangsaan; (c) pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkuat khasanah budaya bangsa; (d) pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya; dan (e) pengembangan internalisasi nilai dan diplomasi budaya dengan pengiriman misi kesenian, pameran, dan pertukaran budaya.
29. Peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya, melalui: (a) peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program-program seni budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi terhadap kemajemukan budaya; (b) penyediaan sarana yang

memadai bagi pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota kabupaten; (c) pengembangan kesenian; (d) pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan kualitas seni dan budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukung dan penghargaan; dan (e) pengembangan perfilman nasional.

30. Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, melalui: (a) penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk pengelolaan cagar budaya; (b) perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; (c) pengembangan permuseuman sebagai sarana edukasi, rekreasi, serta pengembangan kesejarahan dan kebudayaan; dan (d) penelitian dan pengembangan arkeologi nasional.
31. Pengembangan sumber daya kebudayaan, melalui: (a) pengembangan kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi, memudahkan akses dan penggunaan oleh masyarakat luas di bidang kebudayaan; (b) peningkatan jumlah, pendayagunaan, serta kompetensi dan profesionalisme SDM kebudayaan; (c) peningkatan pendukung sarana dan prasarana untuk pengembangan seni dan budaya masyarakat; (d) peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan; (e) peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; dan (f) pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, sektor terkait, masyarakat dan swasta.
32. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial melalui: (a) pelaksanaan transformasi kepesertaan dan strategi perluasan PKH; (b) peningkatan kualitas dan penyempurnaan pola pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak telantar, lanjut usia telantar dan penyandang disabilitas telantar dan/atau berat; (c) pengembangan sistem pendampingan dan kelembagaan pekerja sosial sejalan dengan penyempurnaan sistem perlindungan sosial yang komprehensif; dan (d) penyempurnaan basis data dan sistem informasi manajemen yang berkualitas.

33. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan melalui penerapan strategi PUG, termasuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di seluruh kementerian dan lembaga, peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang, lintassektor, lintasprogram, lintaspelaku, dan lintaskementerian/lembaga (K/L), serta sistem manajemen data dan informasi gender, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; serta peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan. Dalam rangka percepatan PUG, pada tahun 2014 akan dilaksanakan penerapan PPRG pada 36 K/L dan 12 provinsi.
34. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, melalui: (a) peningkatan sinergi perundang-undangan dan kebijakan terkait perlindungan anak; (b) peningkatan koordinasi antarkementerian/ lembaga/ SKPD dan antarpusat dan daerah dalam perlindungan anak; (c) peningkatan ketersediaan dan kualitas data/informasi perlindungan anak; (d) peningkatan upaya advokasi dan sosialisasi kepada pengambil keputusan, pemangku kepentingan dan masyarakat tentang hak anak dan pengasuhan anak; dan (e) peningkatan efektivitas pengawasan pelaksanaan perlindungan anak.

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

BAB 3 EKONOMI

3.1 Kondisi Umum

Perkembangan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kondisi ekonomi dunia. Selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh tekanan eksternal yang berat yang bersumber dari ketidakpastian penyelesaian krisis keuangan Eropa, masih lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat, perlambatan ekonomi negara-negara maju maupun berkembang, serta gejolak harga komoditas dunia. Namun demikian, ketahanan ekonomi Indonesia yang tetap terjaga dan stabilitas ekonomi yang didukung oleh daya beli masyarakat, perekonomian Indonesia dapat tumbuh sebesar 6,2 persen pada tahun 2010, 6,5 persen pada tahun 2011, dan 6,2 persen pada tahun 2012. Secara rata-rata, perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 6,3 persen selama tiga tahun pertama pelaksanaan RPJMN tahun 2010 – 2014.

Dari sisi pengeluaran, dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama ditopang oleh peningkatan investasi dan konsumsi rumah tangga. Investasi dalam wujud Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh rata-rata sebesar 9,0 persen, terutama bersumber dari investasi alat angkutan luar negeri serta mesin dan perlengkapan luar negeri. Daya beli masyarakat yang dapat terjaga mendorong konsumsi rumah tangga tumbuh rata-rata sebesar 4,9 persen dan pengeluaran pemerintah tumbuh rata-rata sebesar 1,6 persen. Peningkatan pengeluaran rumah tangga terutama didorong oleh pengeluaran rumah tangga bukan makanan. Sedangkan pengeluaran pemerintah terutama didorong oleh komponen pengeluaran barang dan jasa. Perlambatan ekonomi dunia memberi tekanan menurun pada transaksi perdagangan luar negeri Indonesia. Ekspor barang dan jasa Indonesia hanya tumbuh sebesar 2,0 persen pada tahun 2012, meskipun dalam periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, ekspor barang dan jasa dapat tumbuh rata-rata sebesar 10,3 persen. Sejalan dengan peningkatan investasi, impor barang dan jasa tumbuh rata-rata sebesar 12,4 persen.

Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terutama didukung oleh sektor tersier yaitu sektor pengangkutan dan komunikasi serta

perdagangan, hotel, dan restoran dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 11,4 persen dan 8,7 persen. Sektor pengangkutan dan komunikasi meningkat tinggi didorong oleh pertumbuhan pada sub sektor komunikasi, sedangkan sektor perdagangan, hotel, dan restoran terutama didukung oleh peningkatan pada sub sektor perdagangan besar dan eceran. Sektor tersier lainnya yaitu listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa masing-masing tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen; 7,0 persen; 6,6 persen; dan 6,0 persen dalam periode tiga tahun pertama RPJMN Tahun 2010 - 2014. Sektor sekunder yaitu industri pengolahan serta pertambangan dan penggalian tumbuh rata-rata sebesar 5,5 persen dan 2,3 persen. Pertumbuhan pada sektor industri pengolahan terutama didorong oleh sub sektor industri nonmigas alat angkutan, mesin, dan peralatannya; serta logam dasar besi dan baja. Sektor primer yaitu pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan tumbuh rata-rata sebesar 3,5 persen dalam periode yang sama, terutama didukung oleh sub sektor perikanan.

Pada triwulan I tahun 2013, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh sebesar 1,4 persen (q-t-q) atau 6,0 persen (y-o-y). Dari sisi produksi, sektor pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat dan jasa perusahaan; serta konstruksi tumbuh tinggi masing-masing sebesar 10,0 persen; 8,4 persen; dan 7,2 persen. Sedangkan sektor pertanian dan industri pengolahan masing-masing tumbuh sebesar 3,9 persen dan 5,7 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama didorong pembentukan modal tetap bruto (PMTB) serta konsumsi rumah tangga yang masing-masing tumbuh sebesar 5,9 persen dan 5,2 persen. Adapun pengeluaran pemerintah, ekspor barang dan jasa, serta impor barang dan jasa masing-masing tumbuh sebesar 0,4 persen, 3,4 persen, dan menurun sebesar 0,4 persen.

Pada tahun 2013, krisis keuangan Eropa yang masih belum dapat diselesaikan serta pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang masih lambat terutama dengan adanya permasalahan fiskal yang cukup berat diperkirakan masih membayangi kondisi ekonomi dunia. Meskipun demikian, ekonomi dunia pada tahun 2013 diperkirakan lebih baik dari tahun 2012 terutama didorong oleh pulihnya perekonomian Cina. Dengan stabilitas ekonomi yang terjaga disertai upaya penguatan ekonomi domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan dapat mencapai 6,2 persen pada tahun 2013.

TABEL 3.2
PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TAHUN 2010 – 2013

| URAIAN | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (TWI) |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| PERTUMBUHAN EKONOMI (persen) | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 6,0 |
| <u>Sisi Pengeluaran</u> | | | | |
| Konsumsi Masyarakat | 4,7 | 4,7 | 5,3 | 5,2 |
| Konsumsi Pemerintah | 0,3 | 3,2 | 1,2 | 0,4 |
| PMTB | 8,5 | 8,8 | 9,8 | 5,9 |
| Ekspor Barang dan Jasa | 15,3 | 13,6 | 2,0 | 3,4 |
| Impor Barang dan Jasa | 17,3 | 13,3 | 6,6 | -0,4 |
| <u>Sisi Produksi</u> | | | | |
| Pertanian | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 3,7 |
| Pertambangan | 3,9 | 1,4 | 1,5 | -0,4 |
| Industri Pengolahan | 4,7 | 6,1 | 5,7 | 5,8 |
| Listrik, Gas, dan Air Bersih | 5,3 | 4,8 | 6,4 | 6,5 |
| Konstruksi | 7,0 | 6,6 | 7,5 | 7,2 |
| Perdagangan, Hotel, dan Restoran | 8,7 | 9,2 | 8,1 | 6,5 |
| Pengangkutan dan Komunikasi | 13,4 | 10,7 | 10,0 | 10,0 |
| Keuangan, Persewaan, Jasa Usaha | 5,7 | 6,8 | 7,1 | 8,4 |
| Jasa-jasa | 6,0 | 6,7 | 5,2 | 6,5 |

Sumber: BPS

Kondisi ekonomi makro yang stabil dan kondusif, didukung oleh kebijakan fiskal dan moneter yang sehat dan berhati-hati.

3.1.1 Keuangan Negara

Strategi kebijakan fiskal dalam jangka menengah akan diarahkan untuk tetap menjaga kesinambungan fiskal melalui peningkatan pendapatan negara dan efisiensi belanja negara. Hal itu dilakukan agar defisit anggaran dapat dikendalikan sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB dapat terus diturunkan. Namun, Pemerintah juga menyadari perlunya kebijakan fiskal yang ekspansif dengan pengelolaan secara hati-hati dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk itu, dalam pelaksanaan paruh waktu RPJMN 2010-2014, terlihat bahwa realisasi pendapatan negara sepanjang tahun 2010-2012 meningkat rata-rata sebesar 15,8 persen atau naik dari Rp 995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 1.335,7

triliun pada tahun 2012. Peningkatan tersebut utamanya didorong oleh peningkatan penerimaan perpajakan yang menyumbang sebesar 73,6 persen dari total penerimaan dalam negeri. Realisasi penerimaan perpajakan sepanjang tahun 2010-2012 meningkat rata-rata sebesar 16,4 persen atau naik dari Rp 723,3 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 980,1 triliun pada tahun 2012. Meningkatnya penerimaan perpajakan tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan dan langkah-langkah penting yang telah dilakukan antara lain; (i) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan ditahun tahun sebelumnya seperti penerapan sistem informasi perpajakan, perbaikan proses bisnis pelayanan perpajakan serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia; dan (ii) meningkatkan perbaikan penggalan potensi perpajakan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target APBN-P 2012, realisasi penerimaan perpajakan tersebut lebih rendah Rp 48,9 triliun atau 96,4 persen dari target APBN-P. Tidak tercapainya target penerimaan perpajakan di tahun 2012 utamanya disebabkan karena tidak tercapainya target pajak penghasilan sebagai dampak kondisi perekonomian global.

Di sisi lain, realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sepanjang tahun 2010-2012 meningkat rata-rata sebesar 14,1 persen atau naik dari Rp 268,9 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp351,6 triliun pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan target APBN-P 2012, realisasi PNBP ini lebih tinggi Rp 10,5 triliun. Realisasi tersebut terutama ditopang oleh penerimaan sumber daya alam (SDA) migas yang meningkat rata-rata 16,1 persen (Rp 152,7 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 205,8 triliun pada tahun 2012). Sementara itu, jika dibandingkan dengan target APBN-P 2012, realisasi PNBP SDA migas lebih tinggi Rp 7,5 triliun. Pencapaian tersebut sangat dipengaruhi oleh perkembangan beberapa variabel, terutama harga komoditas migas di pasaran internasional (ICP) lebih tinggi sebesar USD 8 per barel dari yang direncanakan pada APBN-P tahun 2012.

Di sisi belanja negara, realisasi sepanjang tahun 2010-2012 meningkat rata-rata sebesar 19,2 persen atau meningkat dari Rp 1.042 triliun (16,2 persen PDB tahun 2010) menjadi Rp1.481,7 triliun (18,0 persen PDB tahun 2012). Peningkatan belanja negara tersebut adalah hasil dari upaya pemerintah dalam memberikan stimulasi terhadap perekonomian dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Hal ini tercermin dari realisasi belanja barang dan modal yang meningkat rata-rata

18,6 persen dan 32,1 persen sepanjang tahun 2010-2012. Namun demikian jika dibandingkan dengan target APBN-P 2012, realisasi belanja negara ini lebih rendah Rp 66,6 triliun atau 95,7 persen dari target. Kondisi ini disebabkan masih belum optimalnya penyerapan alokasi belanja negara utamanya belanja pemerintah pusat yang pada tahun 2012 mencapai Rp 1.001,3 triliun atau 93,6 persen dari rencana APBN-P.

Jika dilihat lebih rinci, tidak tercapainya target realisasi belanja pemerintah pusat dalam tahun 2012 dikarenakan rendahnya realisasi seluruh komponen belanja pemerintah pusat kecuali komponen subsidi. Realisasi belanja pegawai pada tahun 2012 sebesar Rp 197,7 triliun atau hanya 93,1 persen dari yang direncanakan, yang antara lain berkaitan dengan pos honorarium, vakansi, serta anggaran remunerasi kementerian/lembaga. Selain itu, realisasi belanja barang hanya mencapai 84,7 persen dari rencana. Sementara itu, realisasi belanja modal hanya mencapai 79,6 persen, yang antara lain disebabkan oleh: (i) adanya hambatan dalam pembangunan infrastruktur; (ii) hambatan pengadaan lahan; (iii) penghematan anggaran dalam pelaksanaan tender; serta (iv) belum optimalnya penarikan dan pemanfaatan pinjaman luar negeri. Khusus untuk alokasi belanja subsidi energi, pada tahun 2012 terjadi kenaikan yang sangat signifikan hingga mencapai Rp 306,5 triliun (meningkat 151,5 persen dari yang dialokasikan di APBN-P), dengan rincian Rp 211,9 triliun untuk BBM jenis tertentu dan LPG tabung 3 Kg, serta Rp 94,6 triliun untuk listrik. Peningkatan pada realisasi belanja subsidi energi disebabkan tingginya harga minyak dunia, tidak tercapainya target produksi dan peningkatan konsumsi BBM bersubsidi.

Dengan tingkat pendapatan negara dan belanja negara sebagaimana tersebut di atas, defisit anggaran sepanjang 2010-2012 tetap terjaga dibawah 3,0 persen terhadap PDB sebagaimana yang diamanatkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di akhir tahun 2012, defisit anggaran mencapai 1,8 persen terhadap PDB, lebih rendah dibandingkan dengan rencana didalam APBN-P sebesar 2,2 persen terhadap PDB. Selanjutnya, posisi utang pemerintah pada tahun 2012 mencapai Rp 1.975,4 triliun atau 24,0 persen terhadap PDB. Rasio ini menurun bila dibandingkan dengan rasio pada tahun sebelumnya yakni 24,4 persen terhadap PDB.

Pada tahun 2013 kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan tetap

menjaga kesinambungan fiskal, yaitu: (a) optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan hidup; (b) meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan; (c) menjaga defisit anggaran pada batas aman (di bawah 3 persen terhadap PDB); dan (d) menurunkan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali.

Berdasarkan arah dan strategi kebijakan fiskal di atas, maka postur pendapatan negara pada tahun 2013 direncanakan mencapai Rp 1.529,7 triliun, yang berarti mengalami kenaikan sebesar Rp 194,0 triliun atau 14,5 persen dari realisasi APBN tahun 2012 sebesar Rp 1.335,7 triliun. Kenaikan rencana pendapatan negara tersebut diharapkan akan didukung oleh kenaikan penerimaan perpajakan.

Total belanja negara pada tahun 2013 direncanakan sebesar Rp 1.683,0 triliun dimana jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp 201,3 triliun atau 20,1 persen dari realisasi anggaran belanja negara tahun 2012. Belanja pemerintah pusat dalam tahun 2013 direncanakan sebesar Rp 1.154,4 triliun, yaitu meningkat sebesar Rp 153,1 triliun atau 15,3 persen dari realisasi APBN tahun 2012. Sementara itu, anggaran transfer ke daerah tahun 2013 direncanakan sebesar Rp 528,6 triliun, yang berarti naik sebesar Rp 48,2 triliun atau 10,0 persen triliun dari realisasi APBN 2012. Sementara itu, pos belanja subsidi BBM, LPG, dan BBN pada tahun 2013 diperkirakan sebesar Rp193,8 triliun. Disisi lain, besaran anggaran subsidi listrik tahun 2013 direncanakan sebesar Rp80,9 triliun.

Dengan pendapatan negara dan belanja negara sebagaimana tersebut di atas, defisit anggaran diperkirakan mencapai Rp 153,3 triliun atau 1,65 persen PDB. Rencana defisit anggaran ini mengalami kenaikan Rp7,3 triliun atau 5,0 persen bila dibandingkan dengan realisasi defisit anggaran tahun 2012 yang bernilai sebesar Rp 146,0 triliun. Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran pada kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif demi mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Untuk menutup defisit anggaran ini, Pemerintah merencanakan pembiayaan anggaran tahun 2013 sebesar Rp 153,3 triliun yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 172,8 triliun dan pembiayaan luar negeri sebesar minus Rp

19,5 triliun. Pembiayaan luar negeri yang direncanakan menurun sebesar Rp 19,5 triliun mengindikasikan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri dalam rangka kemandirian bangsa.

Di sisi lain, perkembangan moneter juga dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal dari perekonomian domestik.

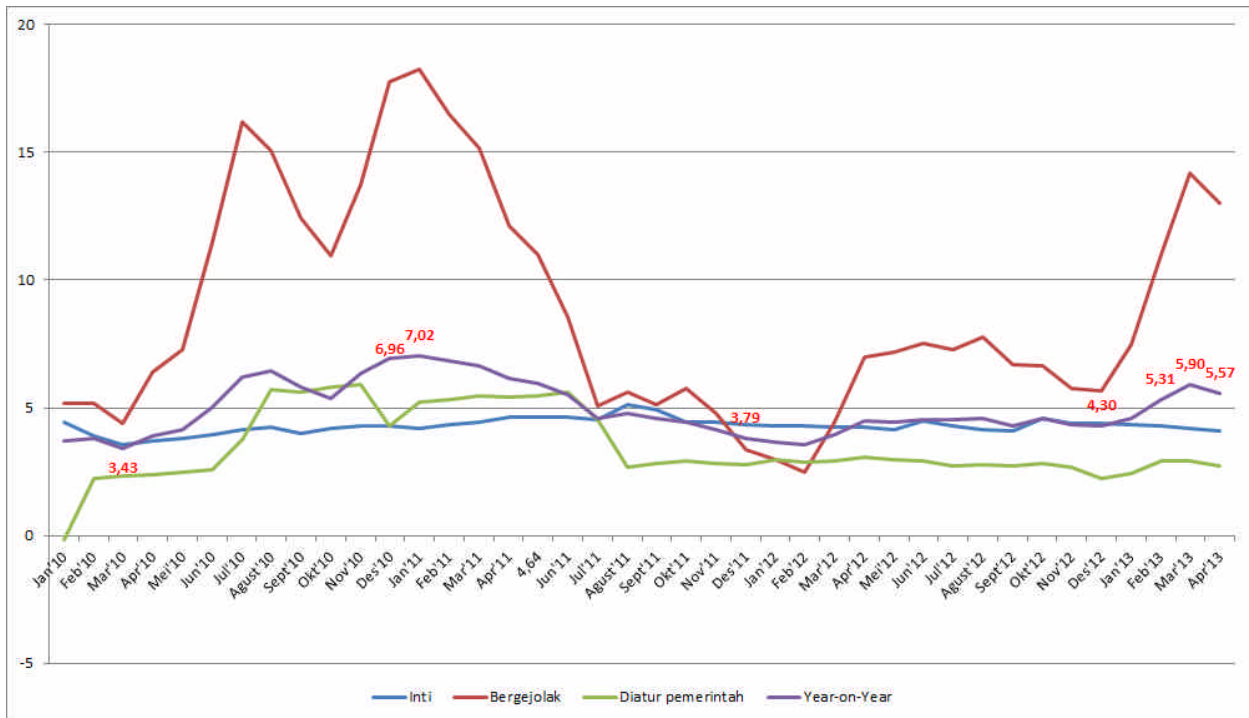
3.1.2 Moneter

Pertumbuhan ekonomi global cenderung melemah sebagai dampak dari krisis utang di negara-negara Zona Eropa dan lambatnya pemulihan ekonomi Amerika Serikat. Ekonomi Eropa masih mengalami kontraksi akibat krisis utang. Sementara itu, ekonomi AS mulai membaik meskipun masih rentan dan dibayangi isu keterbatasan stimulus fiskal (*fiscal cliff*) serta krisis lapangan pekerjaan. Komposisi pertumbuhan ekonomi AS didominasi oleh komponen belanja masyarakat yang besar, sehingga apabila lapangan pekerjaan tidak mencukupi, maka daya dukung masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi akan melemah. Rendahnya kepercayaan masyarakat AS terhadap kondisi perekonomian global juga membuat masyarakat berhati-hati dalam melakukan konsumsi. Di sisi lain, sektor ekspor AS juga sulit diandalkan karena lemahnya permintaan dunia.

Resesi di Eropa dan Amerika Serikat tersebut mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia akibat ekonomi dunia yang makin terintegrasi. Negara-negara Asia yang diharapkan mampu menjadi mesin pendorong pertumbuhan justru pertumbuhan ekonominya terhambat. Pertumbuhan ekonomi global yang melambat juga diikuti dengan penurunan harga komoditas yang cukup tajam dan penurunan ekspor dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Selain itu, dengan semakin tingginya resiko, investor semakin berhati-hati dalam menempatkan dananya sehingga berpotensi terjadi pelarian modal ke luar negeri (*capital outflow*) di negara-negara berkembang.

Dalam kurun waktu 2010-2012 stabilitas moneter relatif terjaga berkat koordinasi yang baik antara BI dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Terjadi inflasi masing-masing sebesar 6,96 persen pada tahun 2010, 3,79 persen pada tahun 2011, dan 4,30 persen pada tahun 2012 (Grafik 3.1).

**GAMBAR 3.1
PERKEMBANGAN LAJU INFLASI**



Sumber: BPS, diolah kembali.

Sementara itu dalam pelaksanaan paruh waktu RPJMN 2010-2014, tekanan inflasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis. Pada awal tahun 2010, perkembangan inflasi relatif terkendali dan selama kurun waktu 2010-2012 mencapai titik terendah pada bulan Maret 2010 yaitu 3,43 persen (*year on year, y-o-y*). Namun demikian, tekanan inflasi mulai meningkat sejak akhir semester pertama tahun 2010 hingga mencapai puncaknya pada Januari tahun 2011 yang tercatat 7,02 persen (*y-o-y*). Tingginya tekanan inflasi tersebut terutama bersumber dari kelompok bahan makanan, dengan sumbangan inflasi sekitar 3,5 persen, akibat anomali cuaca yang menyebabkan gangguan produksi dan distribusi, terutama pada komoditas beras, cabe merah, dan bawang merah. Selanjutnya, sepanjang tahun 2012, inflasi tetap terkendali pada level yang rendah dan pada akhir tahun mencapai 4,30 persen (*y-o-y*), atau berada dalam kisaran sasarannya sebesar 4,5 persen \pm 1 persen (*y-o-y*). Hal ini terutama didorong oleh inflasi inti yang stabil, inflasi kelompok bahan

makanan yang berfluktuasi (*volatile food*) yang terkendali dan inflasi kelompok komoditas yang harganya di atur pemerintah (*administered prices*) yang rendah.

Meskipun Inflasi IHK pada Januari - April 2013 cukup tinggi, namun sampai akhir tahun diperkirakan akan tetap terkendali. Inflasi IHK bulan Maret 2013 mencapai 0,63 persen (*month to month, m-t-m*) atau 5,90 persen (*y-o-y*) akibat tingginya curah hujan yang menimbulkan gangguan distribusi dan produksi. Pasokan yang terganggu mendorong inflasi bahan makanan meningkat cukup tinggi dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan harga bawang putih tercatat memberikan andil inflasi sebesar 0,20 persen atau kedua terbesar sesudah bawang merah yang menyumbang inflasi sebesar 0,44 persen. Pada bulan April 2013 terjadi deflasi IHK sebesar 0,10 persen secara bulanan (*m-t-m*). Sedangkan secara tahunan inflasi IHK mencapai 5,57 persen (*y-o-y*). Penurunan angka inflasi didorong oleh penurunan harga komoditas pangan. Inflasi inti pada bulan April 2013 secara tahunan turun menjadi 4,12 persen (*y-o-y*), namun meningkat menjadi 0,14 persen secara bulanan (*m-t-m*). Sedangkan inflasi harga bergejolak pada bulan April 2013 turun menjadi 13,03 persen (*y-o-y*) dan -0,96 persen (*m-t-m*). Komoditas yang memberikan sumbangan terbesar pada deflasi bulan April 2013 adalah bawang putih dan emas perhiasan, yakni sebesar 0,18 persen dan 0,10 persen.

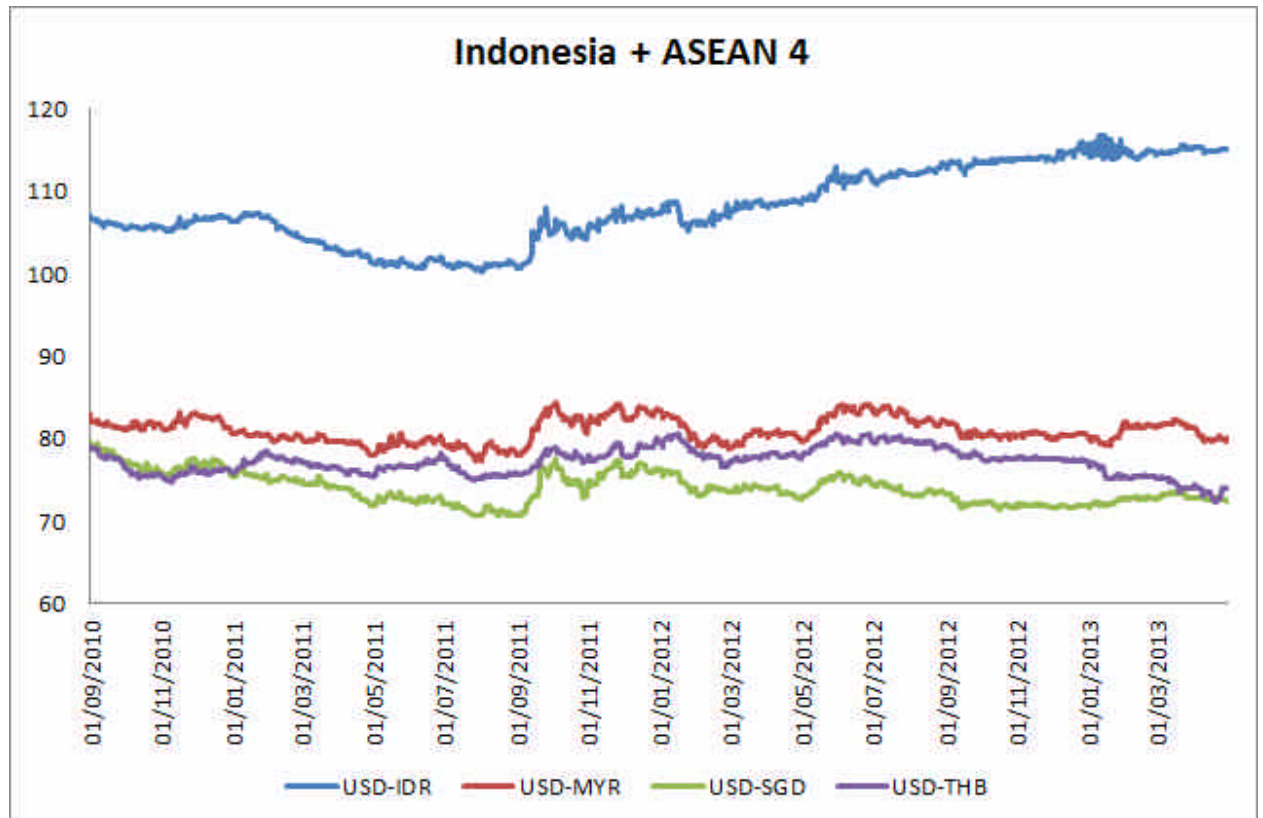
Sementara itu, nilai tukar Rupiah melemah secara berarti, dari Rp8.996 per Dollar AS pada akhir tahun 2010, secara bertahap menjadi Rp9.069 per Dollar AS pada akhir tahun 2011, dan mencapai Rp9.793 per Dollar AS pada akhir tahun 2012. Selama tahun 2011, nilai tukar Rupiah terdepresiasi sebesar 0,81 persen (*point to point, p-t-p*), sedangkan nilai tukar Rupiah selama tahun 2012 mengalami depresiasi sebesar 7,98 persen (*p-t-p*) dengan volatilitas yang cukup rendah. Tekanan depresiasi terutama terjadi pada triwulan II dan III tahun 2012 terkait dengan memburuknya kondisi perekonomian global, khususnya di kawasan Eropa, yang berdampak pada penurunan arus masuk portofolio asing ke Indonesia dan tertekannya neraca pembayaran Indonesia. Dari sisi domestik, tekanan Rupiah berasal dari tingginya permintaan valuta asing (*valas*) untuk keperluan impor (termasuk kebutuhan *valas* untuk impor BBM) di tengah perlambatan kinerja ekspor.

Nilai tukar Rupiah kembali bergerak stabil pada triwulan IV-2012 seiring dengan peningkatan arus masuk modal asing yang cukup besar, baik dalam bentuk arus masuk modal portofolio maupun investasi langsung.

Dibandingkan dengan negara-negara ASEAN-4 yang lain seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand, dapat dilihat bahwa fluktuasi indeks nilai tukar keempat negara tersebut cenderung stabil dari periode September 2010 sampai dengan September 2011 (Grafik 3.2). Sementara itu, mulai terjadi depresiasi pada periode September 2011 – Desember 2011.

Selanjutnya, sejak Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, nilai tukar Malaysia, Singapura dan Thailand kembali mengalami apresiasi. Berbeda dengan ketiga negara tersebut, nilai tukar Rupiah secara perlahan terus mengalami depresiasi. Pada akhir bulan Februari 2013 Rupiah menguat menjadi Rp9.669 per Dollar AS. Pada akhir bulan Maret 2013 Rupiah kembali melemah menjadi Rp9.735 per Dollar AS. Namun pada akhir bulan April 2013 Rupiah menguat tipis menjadi Rp9.734 per Dollar AS. Dalam rangka menjaga kestabilan nilai tukar, bank sentral (Bank Indonesia) terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamental perekonomian. Sementara dari sisi pemerintah daya ekspor non-migas terus ditingkatkan.

GAMBAR 3.2
PERKEMBANGAN INDEKS NILAI TUKAR



Sumber: *Bloomberg*, diolah kembali.

Pada bulan April 2013, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI Rate pada level 5,75 persen. Tingkat BI Rate tersebut dinilai masih konsisten dengan sasaran inflasi sebesar 5,6 persen pada tahun 2013 yang belum memperhitungkan kenaikan harga BBM, dan sebesar 5,0 persen pada tahun 2014. Dengan penguatan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial, serta langkah-langkah koordinasi yang solid antara Bank Indonesia dan Pemerintah, sasaran inflasi diharapkan dapat tercapai sekaligus mendorong tercapainya keseimbangan eksternal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Stabilitas moneter juga berpengaruh pada perkembangan investasi dan daya beli masyarakat.

3.1.3 Investasi

Sejak tahun 2009, kinerja investasi dalam bentuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) sektor nonmigas terus mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Walaupun kondisi ekonomi global mengalami pelemahan di sepanjang tahun 2012, kinerja investasi tetap baik dan optimisme pelaku bisnis tetap tinggi. Tingkat optimisme pelaku usaha ditunjukkan dengan Indeks Tendensi Bisnis (ITB) domestik, dimana sepanjang tahun 2012 yang mencapai rata-rata 105,2 per triwulan. Pada tahun 2012, nilai realisasi investasi dalam bentuk PMDN dan PMA meningkat sebesar 21,3 persen dan 26,1 persen, dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Tabel 3.2); kemudian pada Triwulan I-2013, PMA tumbuh sebesar 23,1 persen dan PMDN tumbuh sebesar 39,6 persen.

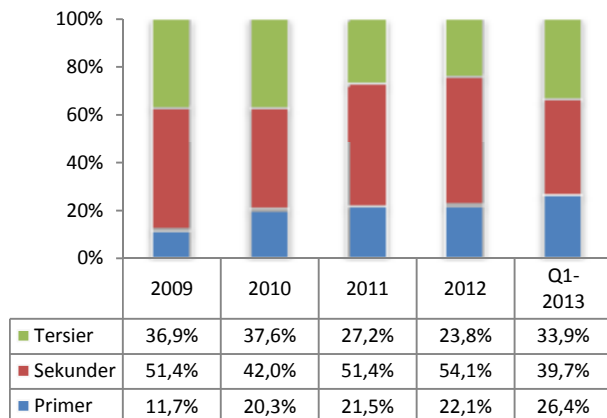
Peningkatan realisasi PMDN dan PMA pada tahun 2012 terhadap 2011 terutama didorong oleh tingginya pertumbuhan sektor pengolahan (sekunder) yang masing-masing mencapai 29,5 persen dan 73,4 persen. Kondisi ini terus berlanjut sampai dengan Triwulan I-2013. Nilai realisasi sektor sekunder pada PMDN tahun 2013 (Triwulan I) adalah sebesar Rp 10,9, kemudian pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 49,9 triliun, sementara pada tahun 2011 sebesar Rp 38,5 triliun. Selanjutnya, realisasi sektor sekunder untuk PMA pada tahun 2013 (Triwulan I) adalah sebesar USD 4,5 miliar, pada tahun 2012 mencapai USD 11,8 miliar, sedangkan pada tahun 2011 nilainya adalah sebesar USD 6,8 miliar. Peran sektor pengolahan sepanjang tahun 2012 pada PMDN dan PMA juga meningkat yang mencapai 54,1 persen dan 47,9 persen, dimana pada tahun sebelumnya masing-masing hanya sebesar 51,4 persen dan 34,8 persen. Kondisi ini terus berlanjut di tahun 2013 terutama untuk PMA, dimana peran sektor sekunder adalah sebesar 64,6 persen; sedangkan peran sektor sekunder pada PMDN cenderung berimbang dengan sektor tersier, dengan kontribusi sektor sekunder sebesar 39,7 persen. Dengan demikian, peningkatan pertumbuhan investasi dan peran sektor pengolahan yang cukup tinggi ini merupakan sinyal positif yang menunjukkan berkembangnya proses industrialisasi di Indonesia.

TABEL 3.2
REALISASI PENANAMAN MODAL SEKTOR NONMIGAS 2010-2013

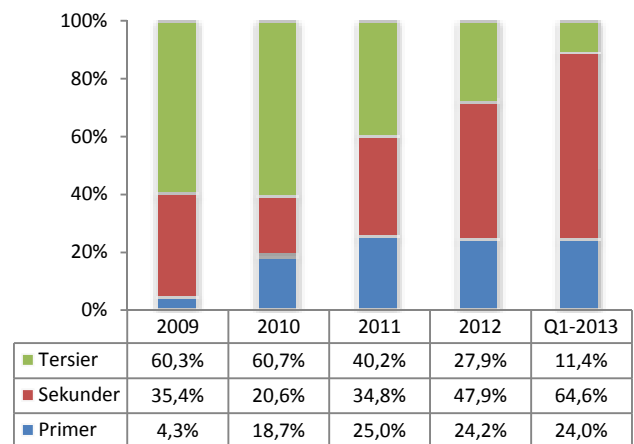
| No. | Investasi | Satuan | Tahun | | | | |
|-----|-----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Q1-2013 |
| 1 | PMDN | Nilai (Rp Miliar) | 37.799,8 | 60.626,3 | 76.000,6 | 92.182,0 | 27.497,5 |
| | | Pertumbuhan (%) | 85,6 | 60,4 | 25,4 | 21,3 | 39,6 |
| 2 | PMA | Nilai (US\$ Juta) | 10.815,2 | 16.214,8 | 19.474,5 | 24.564,7 | 7.048,2 |
| | | Pertumbuhan (%) | -27,3 | 49,4 | 20,1 | 26,1 | 23,1 |

Sumber: BKPM

GAMBAR 3.3
KOMPOSISI PMDN BERDASARKAN SEKTOR



GAMBAR 3.4
KOMPOSISI PMA BERDASARKAN SEKTOR



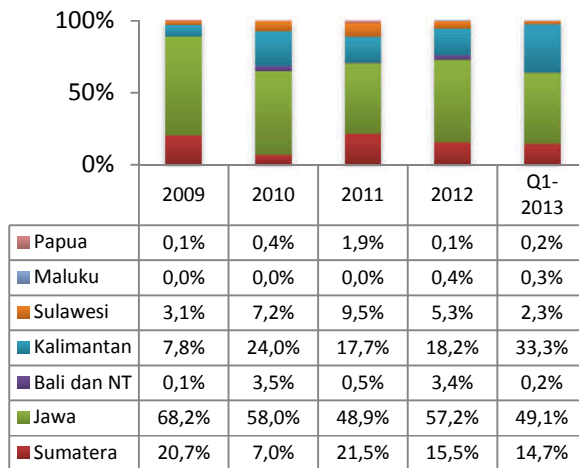
Sumber: BKPM (diolah Bappenas)

Sepanjang tahun 2012, realisasi PMDN terutama didominasi oleh industri makanan (12,1 persen), industri mineral non logam (11,6 persen), dan pertambangan (11,4 persen); sedangkan pada tahun 2013 (Triwulan I), realisasi PMDN sebagian besar berada pada sektor pertambangan (21,7 persen), sektor transportasi, gudang, dan komunikasi (21,7 persen) dan industri

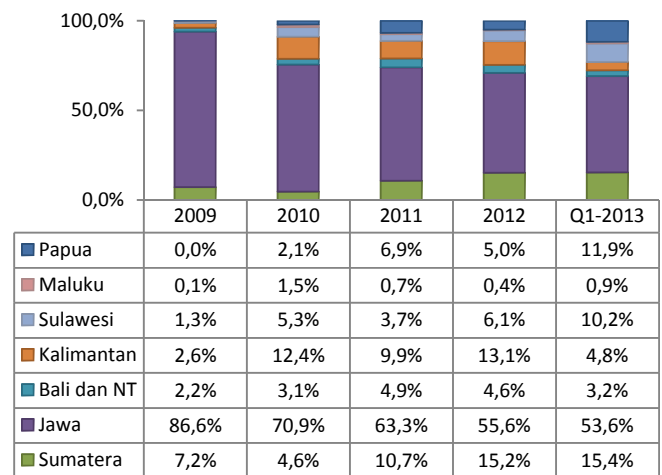
makanan (14,5 persen). Sementara itu, realisasi PMA pada tahun 2012 terutama pada sektor pertambangan (17,3 persen), transportasi, gudang dan komunikasi (11,4 persen), dan industri kimia dan farmasi (11,3 persen); sedangkan pada tahun 2013 (Triwulan I) realisasi PMA sebagian besar berada pada sektor pertambangan (19,5 persen), industri kimia dan farmasi (17,4 persen), dan industri logam, mesin dan elektronik (14,8 persen).

Sebagian besar lokasi PMDN dan PMA berada di pulau Jawa, dengan proporsi yang semakin menurun di setiap tahunnya. Pada tahun 2012, proporsi PMDN dan PMA di pulau Jawa masing-masing sebesar 57,2 persen dan 55,6 persen yang kemudian menurun menjadi 49,1 persen dan 53,6 persen di Triwulan I-2013 (Gambar 3.5 dan Gambar 3.6). Jawa Timur dan Jawa Barat merupakan propinsi yang paling diminati oleh investor domestik, sedangkan lokasi yang paling diminati oleh PMA adalah Jawa Barat dan DKI Jakarta. Lokasi di luar Pulau Jawa yang diminati oleh investor dalam negeri (PMDN) adalah Kalimantan dan Sumatera. Adapun lokasi luar Jawa yang diminati PMA pada tahun 2012 adalah Sumatera dan Kalimantan, yang kemudian bergeser ke Sumater dan Papua pada tahun 2013. Selain itu, PMA di Sulawesi terlihat meningkat dengan cukup pesat sejak tahun 2009 sampai dengan 2012, bahkan sepanjang tahun 2012 telah terjadi peningkatan sebesar 110,7 persen dari tahun sebelumnya.

GAMBAR 3.5
REALISASI PMDN MENURUT LOKASI

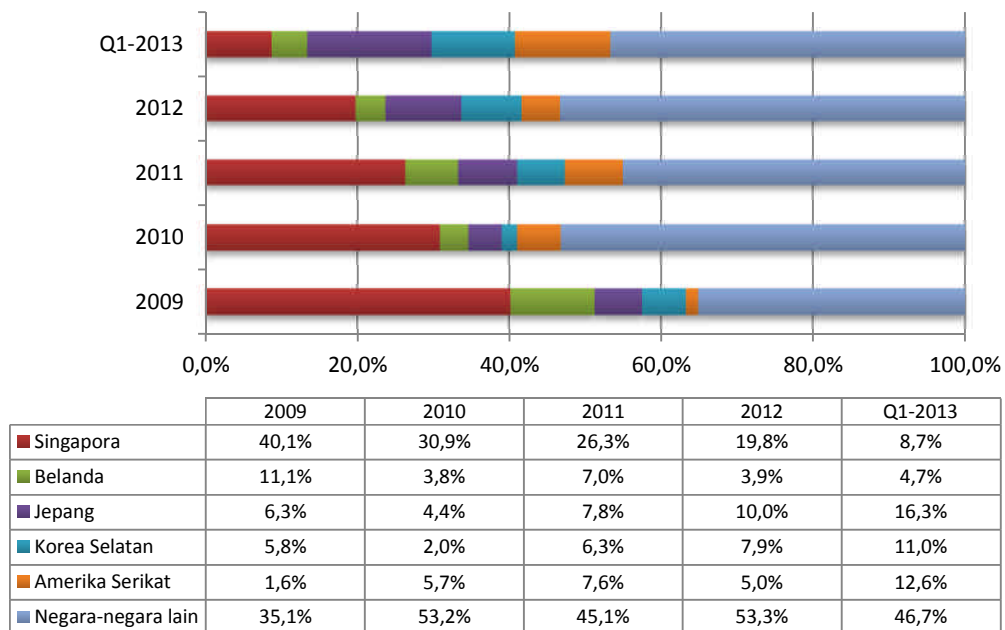


GAMBAR 3.6
REALISASI PMA MENURUT LOKASI



Sumber: BKPM (diolah Bappenas)

GAMBAR 3.7
REALISASI PMA MENURUT NEGARA ASAL (%)

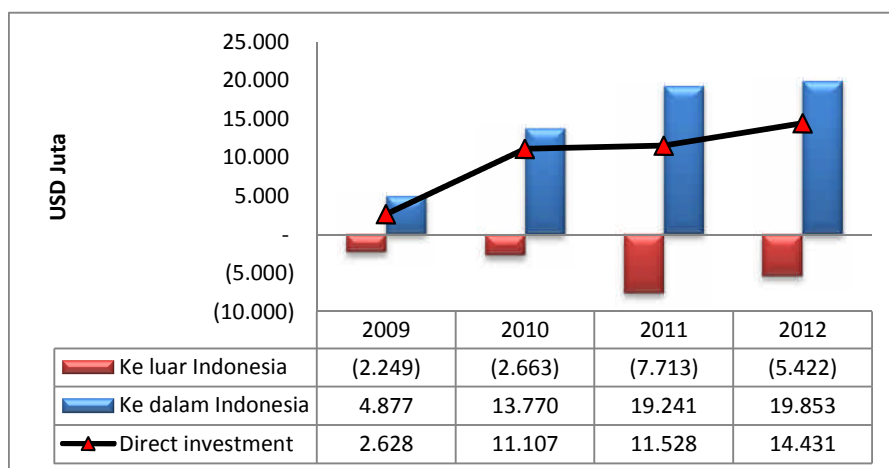


Sumber: BKPM (diolah)

Berdasarkan negara asalnya, PMA sektor nonmigas selama tahun 2012 terutama berasal dari kawasan Asia, dengan tiga negara asal investasi terbesar yaitu Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Pada tahun 2012, komposisi PMA yang berasal dari masing-masing ketiga negara tersebut adalah sebesar 37,7 persen. Kemudian, pada tahun 2013 (Triwulan I), tiga negara terbesar asal PMA adalah Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat; dengan total kontribusi sebesar 39,9 persen.

Sementara itu, meskipun kinerja investasi berupa investasi langsung asing (FDI) yang masuk ke Indonesia tahun 2012 mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2011, namun nilainya masih menunjukkan kecenderungan meningkat dari USD 19,2 miliar menjadi USD 19,9 miliar (Gambar 3.8). Upaya untuk memperkuat ekonomi domestik telah mampu menurunkan aliran ke luar FDI yang menurun cukup besar dari negatif USD 7,7 miliar menjadi USD 5,4 miliar. Dengan demikian, berimplikasi kepada meningkatnya surplus investasi langsung sebesar USD 2,9 miliar, yaitu dari USD 11,5 miliar pada tahun 2011 menjadi USD 14,4 miliar pada tahun 2012.

GAMBAR 3.8
KINERJA FDI 2009-2012



Sumber: Bank Indonesia

Perkembangan PMA dan PMDN cukup erat kaitannya dengan perkembangan ekspor dan impor.

3.1.4 Ekspor

Transmisi utama krisis ekonomi global pada tahun 2011 terhadap perekonomian Indonesia terlihat melalui jalur perdagangan (*trade channel*), baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dampaknya terhadap kinerja ekspor Indonesia terasa pada tahun 2012. Berdasarkan IMF *World Economic Outlook* (Januari, 2013), perekonomian dunia tumbuh melambat dari 3,9 persen di tahun 2011 menjadi 3,2 di tahun 2012; yang disebabkan oleh melambatnya perekonomian negara-negara maju (*Advanced Economies*) terutama negara di kawasan Eropa. Efek dari perlambatan ekonomi dunia ini juga mengakibatkan perekonomian negara-negara berkembang (*Emerging Market and Developing Economies*) mengalami perlambatan, terutama negara China, India, dan Brazil.

Pada tahun 2012 total nilai ekspor Indonesia hanya mencapai USD 190,04 miliar atau turun sebesar -6,6 persen dibanding tahun 2011 (Tabel 3.3). Penurunan kinerja ekspor Indonesia disumbang oleh terkontraksinya ekspor migas dan nonmigas yang tumbuh -10,8 persen dan -5,5 persen atau hanya mencapai nilai ekspor sebesar USD 36,97 miliar dan USD 153,07 miliar. Penurunan ekspor ini terus berlanjut di tahun 2013 (Triwulan I), dengan penurunan total ekspor sebesar -6,4 persen dan ekspor nonmigas yang turun sebesar -3,3 persen.

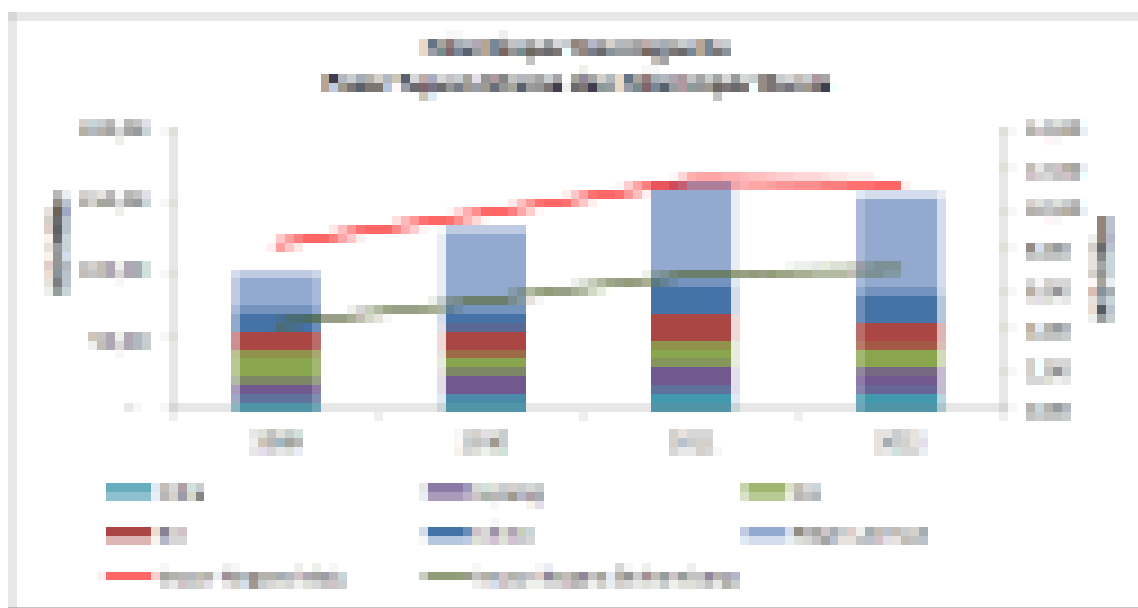
Kontribusi ekspor nonmigas pada Triwulan I - 2013 mengalami sedikit peningkatan dibandingkan tahun 2012, yang kontribusinya terhadap total ekspor sebesar 82,1 persen; dimana sebelumnya hanya mencapai 80,5 persen. Hal ini seiring dengan penurunan ekspor migas yang lebih besar dibandingkan dengan ekspor nonmigas di tahun 2013. Penurunan permintaan dari negara-negara tujuan ekspor utama Indonesia dan turunnya harga komoditas merupakan faktor utama yang menyebabkan turunnya kinerja ekspor Indonesia.

TABEL 3.3
PERKEMBANGAN KINERJA EKSPOR INDONESIA (2009-2013)

| Komoditas | Nilai ekspor(Miliar USD) | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Q1-2013 |
|---|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Q1-2013 | | | | | |
| Nilai dan Pertumbuhan | | | | | | | | | | |
| Total ekspor | 116,5 | 157,7 | 203,5 | 190,0 | 48,5 | -15,0% | 35,4% | 29,0% | -6,6% | -6,4% |
| Ekspor Migas | 19,0 | 28,0 | 41,5 | 36,9 | 10,0 | -34,7% | 47,4% | 47,9% | -10,9% | -18,7% |
| Ekspor Nonmigas | 97,5 | 129,7 | 162,0 | 153,1 | 37,3 | -9,6% | 33,1% | 24,9% | -5,5% | -3,3% |
| Pertanian | 4,3 | 5,0 | 5,2 | 5,6 | 1,2 | -5,1% | 14,9% | 3,3% | 8,0% | -1,3% |
| Industri | 73,4 | 98,0 | 122,2 | 116,1 | 28,3 | -16,9% | 33,5% | 24,7% | -4,9% | -2,9% |
| Pertambangan | 19,7 | 26.722,5 | 34,6 | 31,3 | 7,8 | 32,1% | 35,6% | 29,7% | -9,6% | -4,7% |
| Proporsi (terhadap total ekspor) | | | | | | | | | | |
| Ekspor Migas | 16,0% | 17,8% | 20,4% | 19,5% | 17,9% | | | | | |
| Ekspor Nonmigas | 83,7% | 82,2% | 79,6% | 80,5% | 82,1% | | | | | |
| Pertanian | 3,7% | 3,2% | 2,5% | 2,9% | 2,7% | | | | | |
| Industri | 63,0% | 62,1% | 60,0% | 61,1% | 62,3% | | | | | |
| Pertambangan | 16,9% | 16,9% | 17,0% | 16,5% | 17,1% | | | | | |

Sumber: BPS

GAMBAR 3.9
PERKEMBANGAN EKSPOR NONMIGAS INDONESIA DAN IMPOR DUNIA
(2009-2012)



Sumber: BPS dan IMF (diolah)

Pasar tujuan ekspor nonmigas yang memberikan kontribusi utama terhadap perlambatan kinerja ekspor Indonesia tahun 2012 adalah China, Jepang, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan India (Gambar 3.9).

Pada tahun 2013 volume perdagangan global diperkirakan akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012, dengan perkiraan pertumbuhan sebesar 3,6 persen dari yang tahun sebelumnya hanya tumbuh sebesar 2,5 persen (IMF, April 2013). Perbaikan perdagangan global ini akan lebih banyak didorong oleh meningkatnya aktivitas perdagangan dari negara-negara berkembang. Namun demikian, Indonesia perlu mewaspadaai kemungkinan adanya risiko ke bawah (*downside risk*) yang antara lain disebabkan oleh: (i) potensi penurunan harga komoditas di pasar internasional yang akan mempengaruhi nilai ekspor Indonesia; (ii) terhambatnya proses pemulihan ekonomi kawasan Eropa dan turunnya kepercayaan pasar terhadap proses pemulihan ekonomi Jepang; serta (iv) tingkat persaingan di

3.1.5 Daya Beli Masyarakat

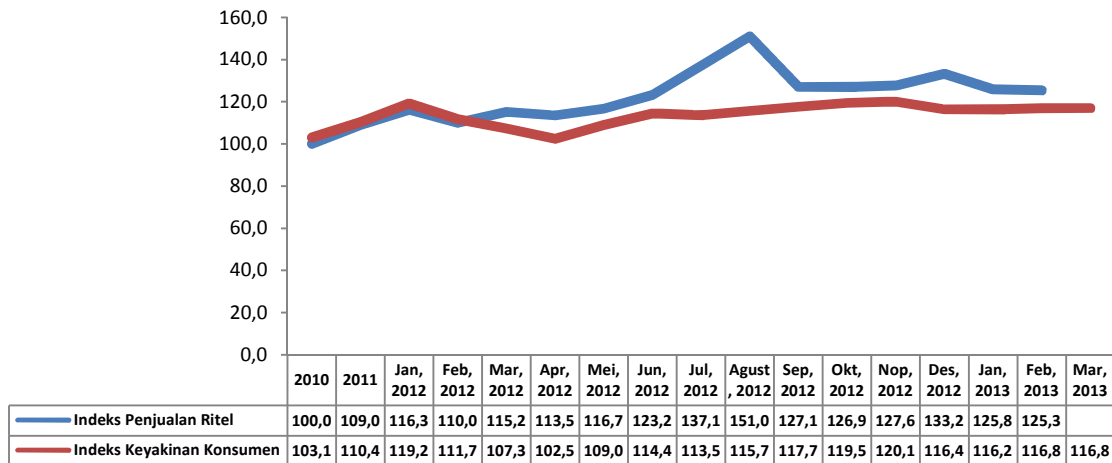
pasar barang kawasan Asia yang semakin meningkat, yang dipertajam dengan depresiasi nilai tukar yen.

Perkembangan ekspor, impor dan pendapatan nasional berpengaruh pada perkembangan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 dari sisi pengeluaran terutama ditopang oleh besarnya konsumsi masyarakat, dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 54,5 persen. Faktor utama yang mendorong konsumsi masyarakat adalah peningkatan daya beli masyarakat, terutama pertumbuhan masyarakat kelas menengah, peningkatan pendapatan riil masyarakat, serta pola hidup masyarakat yang cenderung konsumtif. Tingkat konsumsi masyarakat sebagai penopang pertumbuhan ekonomi tercermin dari peranannya yang besar dalam PDB dan tingkat pertumbuhannya yang cukup tinggi, yaitu sebesar 5,28 persen pada tahun 2012 dan 5,17 pada Triwulan I-2013.

Daya beli masyarakat yang meningkat merupakan salah satu faktor penggerak sektor perdagangan, hotel dan restoran yang pertumbuhannya pada tahun 2012 mencapai 8,11 persen. Walaupun pertumbuhannya sedikit melambat di tahun 2012 dan 2013, kontribusinya terhadap PDB meningkat dari 13,80 persen di tahun 2011 menjadi 13,90 di tahun 2012 dan 14,11 persen di Triwulan I-2013. Sementara itu, indeks penjualan ritel terlihat dalam *trend* stabil dalam beberapa bulan terakhir; namun indeks keyakinan konsumen terlihat sedikit menurun (Gambar 3.10). Walaupun demikian, indeks keyakinan konsumen tersebut masih dalam rentang optimis (di atas 100), yang menunjukkan bahwa konsumen masih memiliki optimisme positif terhadap kondisi perekonomian saat ini dan ke depan.

GAMBAR 3.10
PERKEMBANGAN PENJUALAN RITEL DAN KEYAKINAN KONSUMEN



Sumber: BI dan CEIC (diolah)

Salah satu sektor andalan dalam perekonomian nasional adalah sektor industri

3.1.6 Industri

Industri Pengolahan Non-Migas tumbuh sebesar 6,40% pada tahun 2012 yang ditopang oleh tingginya pertumbuhan Subsektor Pupuk Kimia dan Subsektor Semen yang tumbuh sebesar 10,25% dan 7,85%. Selain itu, pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas juga ditopang oleh industri yang banyak menyerap tenaga kerja formal seperti Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau, Industri Tekstil dan Produk Tekstil, serta Industri Alat Angkut yang menyerap banyak tenaga kerja berturut-turut sebesar 7,74%, 4,19% dan 6,94%.

Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas di tahun 2012 lebih sedikit jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang mencapai 6,74% (Tabel 3.4). Hal ini disebabkan oleh masih lemahnya pasar ekspor internasional sehingga membuat subsektor menghasilkan pertumbuhan yang negatif. Antara lain adalah Subsektor Kertas dan Barang Cetak serta Subsektor Barang Kayu dan Hasil Hutan yang turun sebesar -5,26% dan -2,78%. Akan tetapi, pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas di

tahun 2013 berpeluang untuk dapat tumbuh lebih tinggi dengan memanfaatkan perkembangan positif pada kondisi ekonomi Amerika Serikat dan kondisi ekonomi beberapa negara mitra dagang Indonesia seperti Cina, Afrika, dan Amerika Selatan.

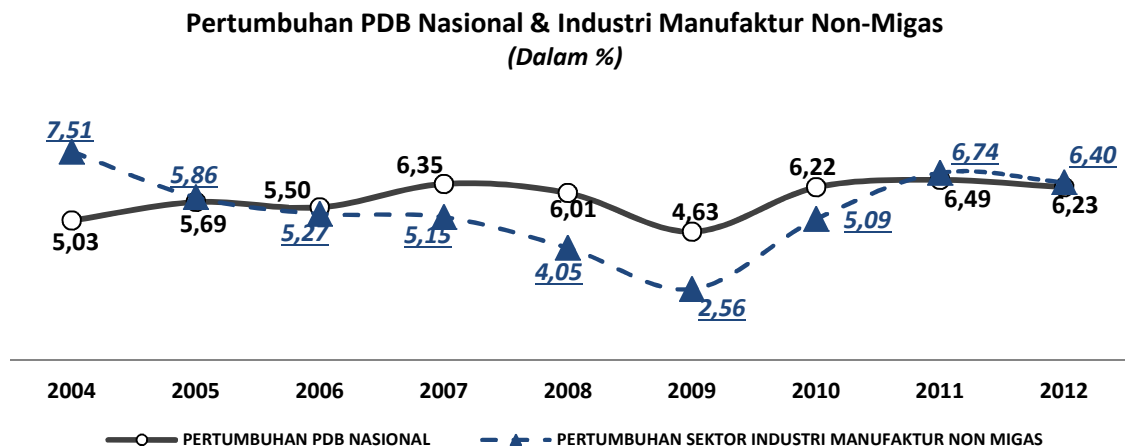
TABEL 3.4
PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN NON MIGAS (%)

| No | SubSektor Industri | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 | Makanan, Minuman, Tembakau | 2,73 | 9,14 | 7,74 |
| 2 | Tekstil, Brg. Kulit dan Alas Kaki | 1,74 | 7,52 | 4,19 |
| 3 | Brg. Kayu dan Hasil Hutan | -3,50 | 0,35 | -2,78 |
| 4 | Kertas dan Barang Cetak | 1,64 | 1,40 | -5,26 |
| 5 | Pupuk, Kimia dan Barang Karet | 4,67 | 3,95 | 10,25 |
| 6 | Semen, Brg. Galian Non Logam | 2,16 | 7,19 | 7,85 |
| 7 | Logam Dasar Besi dan Baja | 2,56 | 13,06 | 6,45 |
| 8 | Alat Angkut, Mesin dan Peralatan | 10,35 | 6,81 | 6,94 |
| 9 | Barang Lainnya | 2,98 | 1,82 | -1,00 |
| Industri Pengolahan Non-Migas | | 5,09 | 6,74 | 6,40 |

Sumber: BPS

Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-Migas pada tahun 2012 mampu melanjutkan kecenderungan positif pertumbuhan yang lebih tinggi dari Pertumbuhan PDB Nasional sebesar 6,23% (Grafik 3.11). Kecenderungan pertumbuhan industri pengolahan yang lebih tinggi dari PDB sudah berlangsung dari tahun 2011. Hal ini menandakan bahwa sektor industri pengolahan non migas telah menjadi salah satu sektor utama pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

GAMBAR 3.11
PERTUMBUHAN PDB NASIONAL DAN INDUSTRI MANUFAKTUR NON MIGAS
(DALAM PERSEN)



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pertumbuhan positif perekonomian nasional menarik perhatian para pemodal untuk berinvestasi di sektor industri, baik melalui skema penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Dalam skema PMDN, pada tahun 2012 jumlah ijin PMDN yang dikeluarkan meningkat 1,13% dari tahun sebelumnya menjadi 714 ijin dan nilai investasinya meningkat 29,47% menjadi Rp 49,8 triliun. Dari skema PMA, pada tahun 2012 jumlah ijin yang dikeluarkan meningkat 4,32% dari tahun sebelumnya menjadi 1.714 ijin. Sedangkan nilai investasi PMA pada tahun 2012 meningkat 73,35% dari tahun sebelumnya menjadi USD 11,8 miliar. Secara berkelanjutan investasi industri baik PMDN maupun PMA mengalami peningkatan yang konsisten selama tiga tahun terakhir.

Pada tahun 2012 sektor industri yang menjadi favorit PMDN adalah industri makanan dengan nilai investasi Rp 11,2 triliun disusul industri mineral non-logam Rp 10,7 triliun. Untuk skema investasi PMA, pada tahun 2012 sektor industri yang menjadi favorit PMA bergeser pada industri kimia dan farmasi dengan nilai investasi USD 2,8 miliar disusul logam, mesin dan elektronik dengan nilai investasi USD 2,5 miliar.

Survey Perbankan Indonesia untuk Triwulan IV tahun 2012 juga menunjukkan perbaikan persepsi kalangan perbankan bagi sektor industri. Walau sepanjang tahun 2012 mereka menganggap bahwa sektor industri bukan prioritas nomor satu dalam pemberian kredit baru, namun untuk tahun 2013 perbankan menempatkan sektor industri pada prioritas nomor 1. Hal ini adalah untuk pertama kali sejak reformasi tahun 1998.

TABEL 3.5
REALISASI PENANAMAN MODAL INDONESIA

| NO. | Sektor | Penanaman Modal Dalam Negeri (Rp Triliun) | | | | | | | | Penanaman Modal Asing (USD Juta) | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|------------|-----------------|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|
| | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | Q1 2013 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | | Q1 2013 | |
| | | P | I | P | I | P | I | P | I | P | I | P | I | P | I | P | I |
| 1 | Makanan | 166 | 16.405,4 | 258 | 7.940,9 | 222 | 11.166,7 | 81 | 3.978,9 | 194 | 1.025,7 | 308 | 1.104,6 | 347 | 1.782,9 | 156 | 405,5 |
| 2 | Tekstil | 26 | 431,7 | 52 | 999,2 | 51 | 4.450,9 | 22 | 811,9 | 110 | 154,8 | 166 | 497,3 | 149 | 473,1 | 42 | 234,3 |
| 3 | Barang Dari Kulit & Alas Kaki | 4 | 12,5 | 3 | 13,5 | 9 | 76,7 | 1 | - | 30 | 130,4 | 59 | 255,0 | 73 | 158,9 | 19 | 25,4 |
| 4 | Kayu | 6 | 451,3 | 14 | 514,9 | 15 | 57,0 | 4 | 49,4 | 31 | 43,1 | 29 | 51,1 | 38 | 76,3 | 5 | 0,9 |
| 5 | Kertas dan Percetakan | 25 | 1.102,8 | 53 | 9.296,3 | 64 | 7.561,0 | 20 | 956,1 | 32 | 46,4 | 42 | 257,5 | 57 | 1.306,6 | 20 | 579,3 |
| 6 | Kimia dan Farmasi | 64 | 3.266,0 | 106 | 2.711,9 | 94 | 5.069,5 | 33 | 1.522,0 | 159 | 793,4 | 223 | 1.467,4 | 230 | 2.769,8 | 90 | 1.228,2 |
| 7 | Karet dan Plastik | 48 | 522,8 | 81 | 2.295,7 | 110 | 2.855,0 | 25 | 482,8 | 100 | 104,3 | 148 | 370,0 | 147 | 660,3 | 41 | 122,1 |
| 8 | Mineral Non Logam | 13 | 2.264,6 | 39 | 7.440,5 | 37 | 10.730,7 | 15 | 1.288,2 | 8 | 28,4 | 46 | 137,1 | 48 | 145,8 | 25 | 30,0 |
| 9 | Logam, Mesin & Elektronik | 50 | 789,6 | 76 | 6.787,0 | 81 | 7.225,7 | 28 | 1.769,7 | 269 | 589,5 | 383 | 1.772,8 | 364 | 2.452,6 | 121 | 1.041,9 |
| 10 | Instrumen Kedokteran, Presisi & Optik & Jam | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 5,5 | 2 | - | 5 | 41,9 | 4 | 3,4 | 3 | 0,1 |
| 11 | Alat angkut | 15 | 362,2 | 16 | 529,1 | 21 | 664,4 | 6 | 39,6 | 97 | 393,8 | 147 | 770,1 | 163 | 1.840,0 | 49 | 866,4 |
| 12 | Industri lainnya | 2 | 3,7 | 7 | 4,8 | 10 | 31,5 | 5 | 22,3 | 59 | 27,6 | 87 | 64,7 | 94 | 100,2 | 37 | 18,1 |
| | TOTAL | 419 | 25.612,6 | 706 | 38.533,8 | 714 | 49.888,9 | 241 | 10.926,4 | 1.091 | 3.337 | 1.643 | 6.790 | 1.714 | 11.770 | 608 | 4.552 |

Sumber: BKPM (diolah)

P : Jumlah Proyek / Total of Project

I : Nilai Investasi dalam Rp. Miliar / Value of Investment in Billion Rupiah.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan non-migas yang tinggi di tahun 2012 memberikan dampak yang positif dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data BPS, jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor industri pada tahun 2012 mencapai 15,4 juta jiwa; naik sebesar 900 ribu pekerja dari tahun 2011. Kenaikan tersebut merupakan jumlah kenaikan terbesar jika dibandingkan dengan sektor-

sektor lainnya. Jumlah penyerapan tenaga kerja sektor industri yang naik di tahun 2012 sejalan dengan kecenderungan positif penyerapan tenaga kerja yang telah naik secara konsisten dari tahun 2010; dan hal ini memberikan indikasi positif dalam hal keberlangsungan pembangunan perekonomian Indonesia.

TABEL 3.6
JUMLAH TENAGA KERJA BERDASARKAN JENIS LAPANGAN PEKERJAAN

| No | Lapangan Pekerjaan | Feb 2011 | Feb 2012 | Feb 2013 |
|--------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Sektor Industri | 13,7 | 14,2 | 14,8 |
| 2 | Sektor Pertanian | 42,5 | 41,2 | 39,9 |
| 3 | Sektor Perdagangan | 23,2 | 24,0 | 24,8 |
| 4 | Sektor Jasa Kemasyarakatan | 17,0 | 17,4 | 17,5 |
| 5 | Sektor Lainnya | 14,8 | 16,0 | 16,9 |
| Total | | 111,3 | 112,8 | 114,0 |

Sumber: BPS

Selain sektor industri, sektor lain yang berpengaruh signifikan terhadap perekonomian adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

3.1.7 Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pembangunan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif pada umumnya menunjukkan kecenderungan pencapaian kinerja yang semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan antara lain oleh jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan penerimaan devisa dan semakin meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB dan tenaga kerja Nasional.

Pada tahun 2012 kunjungan wisman mencapai sebesar 8.044.462 juta orang atau meningkat 5,16 persen dibanding tahun 2011. Jumlah penerimaan devisa diperkirakan sebesar USD 9,12 miliar atau meningkat 6,6 persen dari penerimaan devisa tahun 2011 yang sebesar USD 8,55 miliar. Sementara itu, perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2012 mencapai 245 juta perjalanan, dengan pengeluaran wisnus sebesar Rp. 171,5 triliun.

TABEL 3.7
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN TAHUN 2011-2012

| URAIAN | 2011 | 2012 |
|---|--------|-------|
| Wisatawan Mancanegara (wisman) | | |
| - Jumlah (juta orang) | 7,65 | 8,04 |
| - Rata-rata pengeluaran per kunjungan (US \$) | 1.118 | 1.133 |
| - Rata-rata lama tinggal (hari) | 7,84 | 7,70 |
| - Rata-rata pengeluaran per hari (US \$) | 142 | 147 |
| - Perkiraan penerimaan devisa (miliar US \$) | 8,55 | 9,12 |
| Wisatawan Nusantara (wisnus) | | |
| - Jumlah perjalanan (juta perjalanan) | 236,75 | 245 |
| - Total pengeluaran (Rp triliun) | 156 | 171 |

Sumber: BPS dan Kementerian Parekras

Sementara itu, daya saing pariwisata Indonesia di tingkat global mengalami peningkatan. Berdasarkan *The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum (WEF)*, peringkat daya saing pariwisata Indonesia pada tahun 2012 meningkat menjadi posisi 70 dari 140 negara, dari peringkat 74 dari 139 negara pada tahun 2011.

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan utama di sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2012, diantaranya adalah Pertama, terselenggaranya pengelolaan destinasi pariwisata melalui:

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata salah satunya adalah membangun daya tarik yang ada di dalam destinasi tersebut. Tahun 2012 fasilitas pariwisata yang telah dibangun di 33 provinsi (62 kegiatan pembangunan fisik) dan 6 kegiatan perencanaan daya tarik wisata. Pembangunan fisik berupa pusat informasi pariwisata, dermaga pariwisata, jalan setapak, toilet, pintu gerbang, dan gardu pandang;
- b. Ditetapkannya Kaldera Batur, Bangli sebagai salah satu anggota *Global Geopark Network (GGN)* pada *11th European Geoparks Conference* di Portugal tanggal 19-21 September 2012;

- c. Penyebaran informasi kegiatan Indonesia *World Underwater Photo Contest (IWUPC) 2013* baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kedatangan wisatawan khususnya wisatawan selam ke Indonesia, meningkatkan pencitraan Indonesia sebagai “*Divers Heaven One Nation*”;
- d. Peluncuran Indonesia *Wellness and Healthcare Tourism (IWHT)* tanggal 12 Oktober 2012 dengan tujuan mengembangkan wisata kesehatan Indonesia yang memiliki ciri khas natural dan *holistic* dengan memanfaatkan kearifan budaya lokal;
- e. *Familliarization Trip* ke beberapa titik labuh *Yacht* di Indonesia di Alor dan Morotai dengan harapan dapat ditentukannya jalur-jalur *Yacht* di Indonesia yang mengarahkan kepada destinasi yang memiliki daya tarik wisata alam/ budaya;
- f. Workshop Internasional “*Aspiring Geoparks of Indonesia*” dengan bahasan konsep Geopark dan pengembangannya, terutama di kawasan Kaldera Gunung Batur yang telah berhasil menjadi jaringan geopark dunia. Diharapkan dengan potensi Indonesia akan Geopark, keberhasilan Kawasan Kaldera Gunung Batur dapat menjadi contoh bagi kawasan-kawasan Geopark lain;
- g. Peluncuran Daftar 30 Ikon Kuliner Tradisional Indonesia yang akan digunakan sebagai landasan makanan populer Indonesia yang akan diperkenalkan secara luas, baik nasional maupun Internasional;
- h. Penyusunan Kriteria dan Pemetaan Destinasi *Meeting, Incentive, Conference and Exhibition/MICE*.

Kedua, terselenggaranya promosi dan pemasaran pariwisata ke 10 tujuan pariwisata Indonesia melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif diantaranya:

- a. Untuk menunjang promosi pariwisata Indonesia agar lebih dapat dikenal di pasar-pasar utama Ditjen Pemasaran menunjuk kantor perwakilan promosi pariwisata Indonesia di 12 negara pasar utama atau 13 lokasi (termasuk di RRT yang terbagi atas dua lokasi, yaitu Beijing dan Guang Zhou);
- b. Mendorong minat investasi asing di bidang Kepariwisata, dan destinasi wisata yang dipromosikan dan diupayakan untuk mendapatkan investasi, adalah: Danau Toba-Sumatra Utara, Bintan – Kepulauan Riau, Belitung – Babel, Tanjung lesung – Banten, Bugam Raya – Central Kalimantan, Mandalika – NTB, Wakatobi-Sulawesi Tenggara;
- c. Partisipasi pada *Java Jazz 2012* dengan desain *booth* mengambil tema *Green and Creative Tourism*, yang dimanfaatkan untuk menyebarluaskan informasi tentang pariwisata Indonesia, dan juga mempromosikan perfilman Indonesia;
- d. Keikutsertaan berbagai event internasional maupun nasional seperti: *Tournament of roses* di Pasadena USA; *Asean Tourism Forum* di Manado, Sulawesi Utara; *Vakantiebeurs*, Utrech, Belanda; Promosi *Wonderful Indonesia* melalui pelayaran KRI Dewaruci; *NATAS Travel Fair*, Singapore Expo; ITB Berlin, Jerman; *Cruise Shipping Miami*, Florida, USA; *MATTA Fair*, Kuala Lumpur, Malaysia; *Arabian Travel Market*, Dubai, Uni Emirat Arab; *Floriade 2012*, Venlo, Belanda; *Korea World Travel Fair*, Seoul, Korea Selatan; *Borobudur Interhash*, Magelang, Jawa Tengah; *Jata Travel Show Case*, Tokyo, Jepang; *Pata Travel Mart*, Manila, Filipina; *World Travel Market*, London, Inggris, *China International Travel Mart*,

Shanghai, China; Pelaksanaan *Familiarization Trip*.

Ketiga, pengembangan sumber daya pariwisata melalui:

- a. Pengembangan SDM kebudayaan dan pariwisata berupa (i) Pembekalan Sumber Daya Manusia Bidang Perfilman sebanyak 220 orang, dilaksanakan di Palembang, D.I Yogyakarta, Probolinggo, dan solo (ii) Pembekalan Pengembangan SDM bidang Kuliner, sebanyak 150 orang dilaksanakan di Solo, Yogyakarta, Bali, Malang, Medan dan Cirebon (iii) Pembekalan Pengembangan SDM bidang Fashion, sebanyak 90 orang dilaksanakan di Palembang, Aceh, dan Makassar (iv) Pembekalan MICE, sebanyak 30 orang dilaksanakan di Makassar (v) ASEAN Workshop on Culture Heritage Tourism, sebanyak 30 orang di Semarang (vi) Pembekalan Kepariwisataa Bagi Pengelola Desa Wisata, sebanyak 285 orang dilaksanakan di D.I Yogyakarta, Malang, Subang, Bali, Banten, Mataram, dan Ternate (vii) Pembekalan Pelayanan Prima Bagi Pengelola Hotel, sebanyak 240 orang dilaksanakan di Ambon, Tana Toraja, Solo, Tanjung Balai, Bali, dan Pontianak;
- b. Penelitian dan pengembangan bidang pariwisata yaitu Penelitian Industri Kreatif Berbasis Komunitas Bidang Pariwisata, Penelitian Daya Saing Pariwisata Regional, dan Pengembangan Paket Wisata Berbasis TOC (*Trail of Civilization*);
- c. Pengembangan pendidikan tinggi bidang pariwisata yang ditunjukkan oleh (i) jumlah kelulusan sebanyak 1216 orang dari 4 (empat) UPT Pendidikan Tinggi Pariwisata yang terdiri dari STP Bandung 480 orang, STP Bali 379 orang, Akpar Medan 258 orang, dan Akpar Makassar 99 orang;

- d. Pada tahun 2012 Kemenparekraf telah melaksanakan Sertifikasi Kompetensi sebanyak 21.500 orang tenaga kerja pariwisata di 33 propinsi yang meliputi bidang Hotel dan Restoran, Spa, Usaha Perjalanan Wisata, Pemandu Wisata, Jasa Boga, MICE, Pemandu Wisata Selam, Pemandu Ekowisata, Pemandu Wisata Arung Jeram, dan Pemandu Museum. Pelaksana Sertifikasi Kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Bidang Pariwisata, adapun LSP yang sudah terakreditasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yaitu LSP Hotel dan Restoran, LSP Pariwisata, LSP Pariwisata Indonesia, LSP Pariwisata Nusantara, LSP Spa Nasional, LSP Cohespa, LSP Pariwisata Nasional, LSP Wiyata Nusantara dan LSP MICE.

Jumlah usaha di sektor ekonomi kreatif tahun 2012 mencapai 5,4 juta usaha, atau setara 9,72% dari total usaha nasional. Sektor ini meningkat sebesar 1,25% dibanding tahun 2011. Sebagian besar unit usahanya merupakan kelompok UMKM dengan jumlah pekerja 3-10 orang per unit. Jumlah tenaga kerja yang diserap di sektor ini tahun 2012 mencapai 11,8 juta pekerja, atau setara 10,65% dari total tenaga kerja nasional. Dibanding tahun 2011, jumlah tenaganya naik sebesar 1,18% di tahun 2012.

Selain sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, sektor yang cukup besar andilnya dalam perekonomian dan menyerap jumlah pekerja yang besar adalah sektor koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

3.1.8 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Upaya-upaya pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diharapkan dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berdaya saing. Hal ini diwujudkan melalui peningkatan kontribusi koperasi dan UMKM dalam mendorong perkembangan usaha-usaha produktif, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat.

Peran dan kontribusi koperasi pada tahun 2012 dapat dilihat dari perbaikan usaha dan kelembagaannya.

Volume usaha koperasi meningkat sebesar 25,37 persen sehingga mencapai Rp 119,18 triliun pada tahun 2012. Pada tahun yang sama, selisih hasil usaha (SHU) yang merupakan indikator kemanfaatan koperasi bagi anggota koperasi juga meningkat sebesar 5,14 persen. Perkembangan koperasi tersebut didukung oleh peningkatan jumlah koperasi sebesar 3,25 persen, dan jumlah anggota koperasi sebesar 9,79 persen. Sampai akhir tahun 2012, jumlah unit koperasi mencapai 194.295 unit, dengan jumlah anggota koperasi mencapai 30,8 juta orang. Perbaikan kelembagaan juga ditunjukkan oleh penurunan jumlah koperasi tidak aktif, dan peningkatan proporsi koperasi aktif yang menjalankan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dari 43,4 persen pada tahun 2011 menjadi 47,36 persen pada tahun 2012. Penyerapan tenaga kerja oleh koperasi juga meningkat sehingga secara akumulatif sampai akhir 2012 mencapai 429.678 orang.

Peran UMKM pada tahun 2012 juga terus meningkat. Jumlah UMKM pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 56,53 juta unit usaha, dengan jumlah tenaga kerja 107,66 juta orang. Perkembangan tersebut menunjukkan peningkatan jumlah unit usaha dan tenaga kerja masing-masing sebesar 2,41 persen, dan 5,83 persen dibandingkan posisi pada tahun 2011. Sumbangan UMKM terhadap pembentukan PDB nasional pada tahun 2012 (harga berlaku) tercatat sebesar 59,08 persen, sehingga produktivitas UMKM pada tahun 2012 tercatat sebesar Rp 86,13 juta/unit. Usaha mikro masih mendominasi struktur UMKM baik dari sisi populasi unit usaha (98,80 persen), jumlah tenaga kerja (92,75 persen), dan sumbangan pada PDB UMKM (60,60 persen).

Sementara itu pangsa nilai ekspor non migas UMKM meningkat dari 15,81 persen pada tahun 2010 menjadi 16,44 persen pada tahun 2011. Peningkatan juga tercatat pada pangsa investasi UMKM dari 48,34 persen pada tahun 2010 menjadi 49,11 persen pada tahun 2011. Perbaikan kinerja UMKM ini didorong oleh pertumbuhan usaha menengah selama tahun 2012 yang tercatat paling tinggi yaitu kenaikan 10,65

persen untuk jumlah unit, dan 14,67 persen untuk tenaga kerja.

Sektor lain yang penting perannya dalam perekonomian dan menunjang perkembangan sektor-sektor lainnya adalah sektor keuangan.

3.1.9 Sektor Keuangan

Pada tahun 2012, masih berlanjutnya krisis ekonomi dan keuangan di Eropa, gejolak di Amerika Serikat serta berbagai tekanan yang terjadi di pasar keuangan, membuat sektor keuangan domestik tak lepas dari gejolak dan tekanan ekonomi. Namun, kondisi ketahanan sektor keuangan secara umum relatif cukup baik. Beberapa indikator di sektor pasar modal, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya yang menunjukkan kondisi yang cukup terkendali ini, adalah sebagai berikut.

Meskipun kondisi pasar modal Indonesia bergairah/meningkat pada awal tahun 2012, yaitu dari level IHSG 3.192 pada bulan Januari 2012, dan terus meningkat secara bertahap sampai mencapai 4.181 level pada bulan April 2012, tekanan akibat krisis utang Eropa kemudian membawa IHSG sempat turun ke level 3.833 pada bulan Mei 2012. Tekanan terhadap IHSG tersebut didorong oleh kepanikan sebagian investor asing dan dalam negeri. IHSG kemudian kembali menunjukkan peningkatan menjadi 3.956 pada bulan Juni 2012 secara bertahap ke level 4.350 pada bulan Oktober 2012, sedikit menurun pada bulan November, dan mencapai 4.317 pada akhir Desember 2012 atau menguat 12,9 persen selama tahun 2012. Peningkatan indeks saham ini terus berlanjut pada tahun 2013, dan mencapai 5.034 pada akhir April 2013.

Di sektor perbankan, meskipun terjadi krisis Eropa dan gejolak politik dan ekonomi di Amerika Serikat, kinerja sektor perbankan masih terjaga dengan baik (Tabel 3.8). Indikator rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio – CAR*) pada akhir 2012 menunjukkan angka 17,4 persen, meningkat dibandingkan tahun 2011 (16,1 persen) dan 2010 (17,0 persen). Indikator lain seperti rasio kredit bermasalah (*Non Performing Loan – NPL*), tercatat menurun (membaik) menjadi 1,9 persen pada akhir 2012, dibanding 2011 (2,2 persen)

dan 2010 (2,6 persen), terkait dengan kebijakan *Loan to Value* dan *Down Payment* perbankan. Dari segi aset, total aset bank-bank umum pada tahun 2012 tercatat tumbuh sebesar 16,7 persen, sedikit menurun dibanding tahun 2011 (21,4 persen).

TABEL 3.8
INDIKATOR PERBANKAN

| Indikator | 2010 | 2011 | 2012 | Pertumbuhan (persen y-o-y) |
|---------------------------|---------|---------|---------|----------------------------|
| Total Aset (Triliun Rp) | 3.008,9 | 3.652,8 | 4.262,6 | 16,7 |
| Simpanan DPK (Triliun Rp) | 2.338,8 | 2.784,9 | 3.225,2 | 15,8 |
| Kredit (Triliun Rp) | 1.756,8 | 2.200,1 | 2.707,9 | 23,1 |
| CAR (persen) | 17,0 | 16,1 | 17,4 | 8,1 |
| NPL (persen) | 2,6 | 2,2 | 1,9 | -13,6 |
| ROA (persen) | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
| LDR (persen) | 75,2 | 78,8 | 83,6 | 6,1 |

Sumber: Bank Indonesia

Penyaluran kredit perbankan juga mengalami pertumbuhan. Kinerja penyaluran kredit hingga Desember 2012 mencapai Rp2.707,9 triliun atau tumbuh sebesar 23,1 persen (y-o-y) sedikit menurun dibanding tahun 2011 (24,6 persen). Diturunkannya BI rate pada bulan Februari 2012 menjadi 5,75 persen, telah sedikit mendorong penurunan suku bunga kredit. Tingkat suku bunga kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi masing-masing menurun dari 12,16 persen, 12,04 persen dan 14,15 persen pada akhir 2011 menjadi 11,49 persen, 11,27 persen dan 13,58 persen pada akhir 2012. Menurunnya suku bunga kredit tersebut juga terkait dengan kebijakan yang mewajibkan bank mempublikasikan Suku Bunga Dasar Kredit, yang bertujuan untuk mendorong efisiensi perbankan.

Membbaiknya kegiatan perekonomian, khususnya di bidang produksi dan perdagangan telah mendorong peningkatan penyaluran kredit, baik kredit modal kerja (KMK), kredit investasi (KI) dan kredit konsumsi (KK). Pertumbuhan kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi pada tahun 2012 masing-masing mencapai 23,2 persen, 27,6 persen, dan 20,0 persen (y-

o-y). Pada tahun 2011, komposisi pertumbuhan KMK, KI dan KK masing-masing adalah 21,4 persen, 33,2 persen dan 24,2 persen (y-o-y).

Peningkatan pertumbuhan kredit juga terjadi pada kredit yang berskala Mikro, Kecil dan Menengah (kredit MKM). Pada tahun 2012, kredit MKM yang disalurkan tercatat sebesar Rp1.350,6 triliun atau meningkat sebesar 17,3 persen dibanding tahun sebelumnya, meskipun agak lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2011.

Di sisi penghimpunan dana, pertumbuhan simpanan masyarakat terus meningkat ditengah tingkat suku bunga deposito yang berfluktuasi. Sampai dengan akhir tahun 2012 simpanan masyarakat mencapai Rp3.225,2 triliun atau meningkat sebesar 15,8 persen (y-o-y). Dengan perkembangan tersebut, dimana pertumbuhan kredit sedikit lebih tinggi dari pertumbuhan simpanan, maka rasio antara kredit yang disalurkan dengan simpanan pada akhir tahun 2012 meningkat menjadi 83,6 persen atau lebih tinggi dari akhir 2011 (78,8 persen) dan akhir 2010 (75,2 persen).

Kinerja perbankan syariah juga terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2012 pembiayaan syariah mampu tumbuh sebesar 25,9 persen (y-o-y) atau meningkat dari Rp112,8 triliun pada 2011 menjadi Rp 142,1 triliun pada 2012. Sedangkan penghimpunan dana masyarakat melalui perbankan syariah mencapai Rp133,2 triliun atau meningkat sebesar 26,2 persen (y-o-y). Kinerja perbankan syariah juga cukup baik bila dilihat dari potensi pembiayaan macet yang tercermin dari rasio pembiayaan berkinerja buruk (*Non Performing Financing-NPF*) yang menurun/membaik dan berada pada level 2,26 persen pada akhir 2012, dibanding 2011 (2,52 persen) dan 2010 (3,02 persen).

Disamping sektor pasar modal dan perbankan, perkembangan positif juga ditunjukkan oleh kinerja Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Kepercayaan masyarakat terhadap IKNB terus meningkat, ditunjukkan oleh meningkatnya aset IKNB seperti asuransi, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Meskipun terjadi krisis utang Eropa, aset perusahaan *multifinance* pada tahun 2012 tumbuh sebesar 17,3

persen (y-o-y), sedikit menurun dibanding tahun 2011 (26,5 persen). Hal serupa juga terjadi pada nilai aset perusahaan asuransi yang sedikit mengalami penurunan sebesar 18,2 persen dibandingkan tahun 2011 (18,9 persen). Sementara itu, sektor dana pensiun mengalami peningkatan nilai aset bersih yang tumbuh sebesar 11,9 persen (y-o-y), naik dibandingkan tahun 2011 yang tumbuh sebesar 8,6 persen. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hingga Desember 2012, tidak hanya ketiga sektor di atas yang mengalami peningkatan aset, tetapi juga sektor IKNB lainnya, seperti modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur, perusahaan penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor dan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan.

TABEL 3.9
PERKEMBANGAN INDUSTRI KEUANGAN NON BANK TAHUN 2009 - 2012

| | 2009 | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
|--|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | Aset (triliun) | % PDB | Aset (triliun) | % PDB | Aset (triliun) | % PDB | Aset (triliun) | % PDB |
| Perusahaan Asuransi | 320,9 | 5,7 | 405,2 | 6,3 | 481,8 | 6,5 | 569,3 | 6,91 |
| Dana Pensiun | 112,5 | 2,0 | 130,4 | 2,0 | 141,6 | 2,0 | 158,37 | 1,92 |
| Perusahaan Pembiayaan | 174,4 | 3,1 | 230,3 | 3,6 | 291,4 | 3,9 | 341,8 | 4,15 |
| Perusahaan Modal Ventura | 3,2 | 0,06 | 3,5 | 0,05 | 3,4 | 0,05 | 6,9 | 0,08 |
| Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur | 1,1 | 0,02 | 2,8 | 0,04 | 3,2 | 0,04 | 7,1 | 0,09 |
| Perusahaan Penjaminan | 1,7 | 0,03 | 3,1 | 0,05 | 5,3 | 0,07 | 7,0 | 0,08 |
| Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia | 13,0 | 0,23 | 20,9 | 0,32 | 26,3 | 0,35 | 33,3 | 0,4 |
| Pembiayaan Sekunder Perumahan (PT SMF) | 1,9 | 0,03 | 2,6 | 0,04 | 4,8 | 0,07 | 6,2 | 0,08 |
| Catatan: PDB Nominal | 5.606,2 | | 6.446,8 | | 7.422,8 | | 8.241,9 | |

Sumber: Bapepam-LK (laporan akhir tahun 2012)

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan stabilitas sektor keuangan, upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang (TPPU) terus ditingkatkan. Terhitung sejak tahun 2001 hingga akhir

Januari 2013, secara kumulatif sebanyak 111.857 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) telah dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dengan jumlah Penyedia Jasa Keuangan (PJK) Pelapor sebanyak 381. Selanjutnya, sampai dengan Pebruari 2013 tercatat sudah ada sebanyak 93 kasus yang telah diputus pengadilan terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Guna meningkatkan efektifitas pencegahan TPPU, kerjasama dengan lembaga FIU (*Financial Intelligence Unit*) di luar negeri dan lembaga/organisasi di dalam negeri terus ditingkatkan. Sampai dengan Juli 2012 PPATK sudah menjalin kerjasama dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan lembaga/organisasi di dalam negeri telah mencapai 54 institusi. Sementara FIU yang telah menjalin kerjasama dengan PPATK melalui penandatanganan Nota Kesepahaman, sampai Juli 2012 sebanyak 44 FIU. Meski begitu masih terdapat tiga negara anggota ASEAN yang belum ada Nota Kesepahaman dengan PPATK ada 3 (tiga) negara yaitu Singapura, Kamboja dan Laos.

Selain sektor keuangan, sektor yang besar sumbangannya kepada perekonomian, dan sektor-sektor lainnya, adalah sektor ketenagakerjaan.

3.1.10 Ketenagakerjaan

Pertumbuhan ekonomi telah membawa perubahan dalam struktur pasar tenaga kerja ke arah lapangan kerja yang baik (*Decent Work*). Pasar tenaga kerja mengalami kemajuan yang berarti, dari tahun ke tahun, dan angka pengangguran dapat diturunkan ke tingkat 5,92 persen pada Februari 2013. Perkembangan ini membawa dampak terhadap tiga indikator penting pencapaian kinerja pasar tenaga kerja, yaitu: (a) Rasio kesempatan kerja terhadap angkatan kerja terus meningkat, (b) Perubahan dalam struktur tenaga kerja, yaitu meningkatnya tenaga kerja sektor formal dan sebaliknya terjadi penurunan tenaga kerja sektor informal dan (c) Perkembangan upah dan produktivitas yang memperlihatkan, secara umum terus meningkat, dan produktivitas pekerja yang membaik.

TABEL 3.10
KETENAGAKERJAAN, PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN

| Tahun | Angkatan Kerja (Juta Orang) | Kesempatan Kerja (Juta orang) | Pertumbuhan Ekonomi (%) | Penganggur (Juta Orang) | TPT (%) |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| 2009 | 113,74 | 104,48 | 4,5 | 9,26 | 8,14% |
| 2010 | 115,99 | 107,41 | 6,1 | 8,59 | 7,41% |
| 2011 | 119,40 | 111,28 | 6,5 | 8,12 | 6,80% |
| 2012 | 120,42 | 112,80 | 6,2 | 7,61 | 6,32% |
| 2013 ^{tw1} | 121,19 | 114,02 | 6,0 | 7,17 | 5,92% |

Sumber: BPS

Sejak tahun 2010, rasio pekerja yang mempunyai pekerjaan meningkat hampir sama antara kota dan desa, dan kecenderungan dalam rasio pekerja untuk kaum muda menunjukkan situasi yang lebih baik. Struktur lapangan kerja formal mengalami peningkatan yang berarti. Antara 2012-2013 pekerja formal meningkat 3,53 juta pekerja dan pekerja informal menurun 2,31 juta. Peningkatan tersebut diikuti dengan perubahan struktur pekerja non-pertanian dari 63,5 persen tahun 2012 menjadi 65 persen tahun 2013. Sementara itu, struktur pekerja di sektor industri mengalami perubahan meskipun relatif kecil. Tahun 2002, presentase pekerja di sektor industri adalah sebesar 13,2% menurun menjadi 12,19% tahun 2008, dan mulai meningkat hingga 12,96% tahun 2013. Sektor jasa telah berkembang baik, dari 42,45% tahun 2002 menjadi 52% tahun 2013. Sementara itu, pekerja sektor pertanian sudah banyak yang meninggalkan perdesaan. Mereka banyak yang beralih ke sektor jasa perkotaan.

Meskipun terdapat perbaikan kualitas tenaga kerja—yang ditunjukkan oleh kecenderungan menurunnya tenaga kerja berpendidikan rendah (SD dan SMP) dan meningkatnya tenaga kerja yang berpendidikan tinggi—tetapi jumlah lulusan SMP dan SMA yang mencari pekerjaan masih cukup besar, rata-rata sekitar 3,5 juta orang per tahun. Umumnya lulusan ini tidak memiliki keterampilan tertentu untuk siap memasuki pasar tenaga kerja. Dengan kondisi ini, penerapan pelatihan berbasis kompetensi sangat dibutuhkan agar mereka yang membutuhkan pelatihan sebelum memasuki pasar tenaga kerja dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Salah satu hambatan dalam iklim investasi adalah peraturan

ketenagakerjaan yang sampai saat ini belum dapat disempurnakan, terutama terkait pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tentang kompensasi dan penetapan pemutusan hubungan kerja (PHK), hubungan kerja (perjanjian kerja waktu tertentu dan *outsourcing*), dan pengupahan. Dalam perkembangannya, kebijakan ketenagakerjaan yang diambil selama 2010–2012 belum sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dalam RPJMN. Pada tahun 2010 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menyusun rancangan amandemen UU No. 13/2003, tetapi karena masih adanya perbedaan pandangan antara pengusaha dan serikat pekerja, maka pada tahun 2011 DPR menanggihkan pembahasan amandemen UU ini dengan mengeluarkannya dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2011. Untuk mengatasi hal ini, beberapa upaya yang dilakukan Kemenakertrans adalah mengeluarkan Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kehidupan Layak dan Permenakertrans Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Pada tahun 2012 Pemerintah telah menempatkan TKI keluar negeri sebanyak 494.609 orang. Peningkatan pelayanan kepada TKI yang terus disempurnakan, antara lain adalah mempercepat proses penyelesaian pengaduan, menghilangkan diskriminasi saat kepulangan dengan menghilangkan ketentuan yang mengharuskan TKI pulang melewati Terminal 4 Selapanjang di Bandara Soekarno-Hatta, meningkatkan akses TKI kepada kredit murah untuk membiayai keberangkatan, serta memberi bantuan dan pendampingan hukum kepada TKI yang bermasalah hukum di luar negeri.

Dari sisi perlindungan, pada tahun 2012 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya melalui Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2012. Selanjutnya, pada awal Januari 2013 Pemerintah telah mengeluarkan tiga peraturan pemerintah (PP) turunan dari UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Ketiga PP tersebut adalah PP Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, PP Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja

Indonesia di Luar Negeri Oleh Pemerintah, dan PP Nomor 5 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Mitra Usaha dan Pengguna Perseorangan. Peraturan perundangan tersebut diharapkan mampu memberi kepastian hukum dan sekaligus memperjelas peran pemerintah dalam proses penempatan dan perlindungan TKI. Pada tahun 2013 diperkirakan UU Nomor 39 Tahun 2004 telah selesai direvisi, sehingga pada tahun 2014 diharapkan peraturan turunannya dapat diselesaikan.

Di samping sektor ketenagakerjaan, sektor jaminan sosial juga berperan penting dalam perekonomian dan pembangunan sosial masyarakat.

3.1.11 Jaminan Sosial

Pembangunan bidang sosial saat ini diarahkan untuk lebih bersifat inklusif dan partisipatif. Manfaat pembangunan harus dirasakan oleh masyarakat secara luas yang sekaligus memberikan edukasi supaya masyarakat lebih terberdayakan. Salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan bidang sosial adalah dengan mengembangkan sistem jaminan sosial yang berbasis asuransi (*social insurance*) bagi seluruh masyarakat.

Perpaduan pelaksanaan jaminan sosial dengan komponen bantuan sosial bagi penduduk miskin dan tidak mampu merupakan bentuk ideal penyelenggaraan sistem perlindungan sosial di Indonesia. Peran serta masyarakat dan kemitraan antara pemberi kerja dan pekerja merupakan kunci keberhasilan implementasi jaminan sosial yang berkelanjutan dan layak. Jaminan sosial dimaksudkan untuk mengantisipasi risiko yang dapat bersumber dari siklus hidup individual, ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui empat tujuan utama perlindungan sosial, yaitu: preventif, protektif, promotif, dan transformatif.

Menjelang pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014, Pemerintah berupaya memperluas cakupan peserta jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara signifikan dari sebelumnya sebanyak 76,4 juta menjadi 86,4 juta jiwa dimulai pada tahun 2013. Sebagian pemerintah daerah juga menyambut baik inisiatif penyediaan jaminan kesehatan bagi warganya melalui berbagai konsep jaminan kesehatan lokal dengan karakteristik yang bervariasi. Jaminan kesehatan juga tersedia bagi kelompok tertentu seperti PNS, TNI, Polri, dan sebagian pekerja di sektor swasta.

TABEL 3.11
PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN INDONESIA 2012

| Jenis Jaminan Kesehatan | Jiwa | % terhadap populasi |
|---|--------------------|---------------------|
| Peserta Askes PNS | 17.274.520 | 7,3% |
| TNI dan Polri | 2.200.000 | 0,1% |
| Peserta Jamkesmas | 76.400.000 | 32,1% |
| Peserta JPK Jamsostek | 5.600.000 | 2,1% |
| Peserta Jamkesda | 31.866.390 | 13,3% |
| Jaminan Kesehatan oleh Perusahaan (<i>self insured</i>) | 15.351.532 | 2,7% |
| Peserta Asuransi Kesehatan komersial | 2.856.539 | 5,6% |
| Jumlah | 151.548.981 | 63,2% |

Sumber: Kemenkes RI, 2012

Guna menjamin hak setiap orang atas jaminan kesehatan masyarakat dapat terwujud sebagaimana amanat konstitusi, kebijakan jaminan sosial perlu senantiasa dikembangkan sejalan dengan strategi teknis yang dituangkan dalam Peta Jalan Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 dan menjadi acuan utama seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan strategi dalam peta jalan dimaksudkan untuk mempersiapkan beroperasinya BPJS Kesehatan dan tercapainya Jaminan Kesehatan Nasional (*INA Medicare*) untuk seluruh penduduk Indonesia di tahun 2019.

Sebagai langkah utama dalam rangka menerjemahkan amanat implementasi jaminan kesehatan, Pemerintah telah menerbitkan dua regulasi teknis yang diperlukan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PP PBI) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Perpres Jamkes).

Selain penyiapan pembentukan dan transformasi penyelenggaraan jaminan kesehatan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga mengamanatkan pelaksanaan jaminan ketenagakerjaan, yaitu: (1) jaminan pensiun; (2) jaminan hari tua; (3) jaminan kecelakaan kerja; dan (4) jaminan kematian pada Juli 2015. Untuk melaksanakan UU tersebut, pemerintah menindaklanjutinya melalui pembentukan kelompok kerja dengan penugasan khusus untuk membahas seluruh aspek penyiapan pembentukan BPJS Ketenagakerjaan termasuk

penyusunan rancangan Peta Jalan (*road map*) yang berisi langkah-langkah teknis strategis.

Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), sesuai dengan amanat yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2008, berperan penting melalui penetapan fokus prioritas Penataan Kelembagaan SJSN dengan agenda utama penataan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 melalui tugas-tugas sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan mensinkronisasi rancangan regulasi-regulasi pendukung pelaksanaan SJSN, meliputi rancangan peraturan pemerintah tentang aset dan liabilitas.
2. Berkontribusi dalam proses penyelesaian dan pengesahan PP PBI dan Perpres Jamkes.
3. Menyusun konsep transformasi dan pembentukan BPJS dengan penyusunan konsep pembentukan *Project Management Office* (PMO), penyusunan cetak biru sistem teknologi informasi pendukung, perancangan strategi sosialisasi dan advokasi serta penyusunan desain peraturan standar pelaporan keuangan.
4. Menyelesaikan beberapa studi pendukung diantaranya adalah penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) bagi peningkatan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, analisis dampak pelaksanaan jaminan sosial terhadap fiskal, penghitungan premi dan manfaat jaminan sosial, dan integrasi data kepesertaan.

3.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014

3.2.3 Keuangan Negara

Pembahasan permasalahan dan pembangunan tahun 2014, dimulai dari sektor/bidang Keuangan Negara yang berperan besar dalam perekonomian.

Dengan memperhatikan pencapaian kinerja pembangunan bidang Keuangan Negara sepanjang 2010-2012 dan perkiraan tahun 2013, permasalahan yang diperkirakan masih akan dihadapi dalam pengelolaan APBN yang berkelanjutan antara lain adalah menjaga dan mempertahankan kesinambungan fiskal melalui optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi untuk keberkelanjutan dunia usaha serta upaya mendorong efisiensi dan peningkatan kualitas belanja negara. Dengan demikian, diharapkan defisit anggaran dapat dikendalikan sehingga rasio utang pemerintah terhadap

PDB menurun.

Di sisi pendapatan negara baik penerimaan perpajakan maupun penerimaan bukan pajak (PNBP), permasalahan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah sebagai berikut.

Terkait dengan penerimaan perpajakan, beberapa permasalahan yang diperkirakan masih akan dihadapi adalah: (i) sulitnya mendorong peningkatan penerimaan perpajakan dalam kondisi ekonomi dunia yang masih belum sepenuhnya stabil, sehingga perluasan basis pajak masih terkendala; (ii) banyaknya sumber-sumber penerimaan pajak yang belum tergali, baik dari sektor unggulan maupun sektor informal yang sampai saat ini masih belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi penerimaan negara; (iii) meningkatnya penandatanganan perjanjian perdagangan internasional dengan negara-negara lain yang berpotensi untuk memberikan dampak negatif bagi penerimaan negara.

Dilihat dari sisi PNBP, permasalahan utama yang masih akan dihadapi pada tahun mendatang adalah: (i) kecenderungan penurunan lifting minyak mentah Indonesia dikarenakan penurunan secara alamiah dan rendahnya investasi migas baru; (ii) masih banyaknya sumber-sumber PNBP SDA non-migas yang belum tergali; (iii) masih belum optimalnya peraturan perundang-undangan di bidang PNBP utamanya terkait dengan mekanisme pengelolaan PNBP; (iv) belum optimalnya penerimaan iuran tetap dan royalti yang bersumber dari pertambangan mineral dan batubara; serta (v) masih tingginya risiko tidak tercapainya penerimaan atas laba BUMN, terutama karena faktor kinerja BUMN dan kondisi ekonomi makro.

Disisi belanja negara, permasalahan utama yang masih akan dihadapi adalah : (i) masih terbatasnya ruang gerak fiskal akibat belanja-belanja yang bersifat wajib; (ii) masih rendahnya efisiensi dan efektifitas belanja negara; (iii) masih belum optimalnya pengelolaan pelaksanaan belanja negara yang tercermin dari masih lebih rendahnya realisasi terhadap target, terutama untuk belanja modal sementara belanja subsidi justru lebih tinggi dari target; serta (iv) belum optimalnya pelaksanaan sistem pengelolaan belanja negara, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang antara lain meliputi sistem penganggaran terpadu (*unified budget*), anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), dan kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*). Selanjutnya terkait dengan belanja subsidi, permasalahan yang masih akan dihadapi adalah selain masih tingginya harga minyak mentah

dunia dan peningkatan volume konsumsi BBM bersubsidi yang akan mendorong meningkatnya beban subsidi dalam APBN juga terkait tidak tepatnya sasaran belanja subsidi tersebut sehingga kurang mampu mendorong perekonomian.

Selanjutnya dari sisi pembiayaan APBN, permasalahan yang masih akan dihadapi adalah masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan dari non-utang sehingga pembiayaan APBN masih mengandalkan pada pembiayaan utang yang bersumber baik dari dalam maupun luar negeri.

Terkait dengan bidang pembiayaan APBN dalam negeri, beberapa permasalahan yang masih akan dihadapi adalah: (i) belum optimalnya pasar keuangan domestik dan infrastruktur SBN; (ii) tingginya kepemilikan SBN oleh asing sehingga rentan terhadap risiko terjadinya penarikan dana secara besar-besaran jika terjadi krisis kepercayaan yang dapat berdampak sistemik terhadap perekonomian secara nasional; dan (iii) masih lemahnya koordinasi pengelolaan SBN.

Sementara itu, permasalahan utama yang dihadapi dalam pembiayaan luar negeri adalah: (i) tingginya beban pembayaran cicilan pokok utang dan bunga utang pemerintah; dan (ii) belum optimalnya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan utang luar negeri yang berdampak terhadap meningkatnya beban biaya kesungguhan (*commitment fee*) akibat dari keterlambatan pemenuhan persyaratan pemberi pinjaman (*lender*), khususnya pada utang baru;

Dari sisi pengelolaan barang milik negara, beberapa permasalahan utama yang masih akan dihadapi adalah sebagai berikut: (i) belum memadainya peraturan turunan terkait dengan pengelolaan kekayaan negara; (ii) belum optimalnya pengamanan Barang Milik Negara (BMN), baik secara administratif, hukum, maupun fisik; (iii) belum optimalnya pemanfaatan BMN sesuai prinsip pemanfaatan tertinggi dan terbaik (*The Highest and Best Use*); serta (iv) masih lemahnya koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait dengan penilaian barang milik Negara.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang ada dan target yang ingin dicapai pada tahun 2014, sasaran sektor Keuangan Negara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut. Pertama, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi agar tidak rentan terhadap resiko ketidakpastian (*uncertainty risk*) dari sistem keuangan dunia. Kedua, meningkatkan penerimaan negara terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan, administrasi, dan pengawasan perpajakan dan kepabeanan,

serta optimalisasi PNBPN, baik dari jenisnya maupun perbaikan administrasinya. Ketiga, memberikan dorongan terhadap percepatan dan perkuatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dengan mendorong pembangunan infrastruktur dan industri di berbagai koridor ekonomi sejalan dengan pelaksanaan MP3EI, mendukung MP3EI, serta tetap menjaga keberlanjutan fiskal. Keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja negara. Kelima, mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara, serta meningkatkan optimalisasi pengamanan BMN, baik secara administrasi, hukum, maupun fisik.

Selain sektor/bidang Keuangan Negara, permasalahan utama di bidang perekonomian adalah bidang Stabilisasi Harga dan Nilai Tukar.

3.2.4 Stabilitas Harga dan Nilai Tukar

Sepanjang tahun 2012, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS secara umum menunjukkan kecenderungan pelemahan. Pergerakan Rupiah juga dipengaruhi oleh faktor eksternal yang menciptakan sentimen negatif. Kekhawatiran terhadap prospek kebijakan fiskal Amerika Serikat, kelangsungan program stimulus ekonomi, masih tingginya ketidakpastian prospek penanganan krisis Eropa dan kondisi ekonomi makro Eropa yang masih lemah menyebabkan masih rentannya proses pemulihan ekonomi global. Selain itu, masih rendahnya harga komoditas internasional yang menjadi basis utama ekspor Indonesia ikut menciptakan kondisi yang kurang kondusif bagi perkembangan Rupiah. Namun, kebijakan bank sentral negara maju yang masih akomodatif serta kebijakan stimulus AS dan *European Central Bank* (ECB) akan mendorong aliran dana masuk ke negara-negara dengan fundamental ekonomi yang cukup baik terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian, pelemahan Rupiah dapat tertahan dengan masuknya arus dana dari negara-negara maju tersebut. Selain sentimen negatif, perkembangan eksternal juga memberikan sentimen positif yang ikut mempengaruhi pergerakan Rupiah. Sentimen positif bagi penguatan Rupiah muncul setelah tercapainya kesepakatan di bidang fiskal di AS.

Dari sisi eksternal, perekonomian global yang diperkirakan akan membaik pada tahun 2014 akan mendorong peningkatan permintaan global sehingga berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi dari barang-barang yang diimpor (*imported inflation*), terutama bahan pangan dan bahan bakar minyak (BBM). Cuaca ekstrim sebagai dampak dari pemanasan global diperkirakan mempengaruhi pasokan dan produksi bahan

pangan, termasuk yang diimpor oleh Indonesia sehingga berpotensi memberikan tekanan pula kepada inflasi domestik.

Perkiraan membaiknya ekonomi global pada tahun 2014 di satu sisi diduga bisa mendorong AS untuk mengurangi kebijakan pelonggaran fiskalnya dan menaikkan suku bunga acuan bank sentralnya (*The Fed*). Hal ini akan berpengaruh pada aliran modal global, terutama modal portofolio, sehingga perlu diwaspadai dan diantisipasi karena berpotensi menimbulkan pembalikan mendadak (*sudden reversal*) arus modal jangka pendek di pasar modal yang pada gilirannya akan menekan nilai tukar Rupiah. Namun di sisi lain, perekonomian global yang semakin membaik juga akan mendorong peningkatan ekspor dan membaiknya neraca pembayaran sehingga memberikan sentimen positif kepada nilai tukar Rupiah.

Dari sisi domestik, perkembangan harga bahan pokok yang berfluktuasi akibat ketidakseimbangan antara pasokan/produksi dan permintaan memerlukan pemantauan secara terus menerus dan seksama. Dukungan sistem distribusi/logistik yang mantap dan operasi pasar yang terukur dan tepat waktu juga diperlukan mengingat kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, terutama agar dapat menjangkau daerah-daerah terpencil.

Harga barang dan jasa yang diatur pemerintah (*administered prices*) terutama yang terkait subsidi perlu dikelola dan disesuaikan secara hati-hati, tepat sasaran (*well targeted*) dan tepat waktu (*time consistent*) agar tidak menimbulkan gejolak inflasi yang berarti serta tidak membahayakan keberlanjutan fiskal. Selain itu pembangunan infrastruktur perlu dipercepat dan pembangunan kelembagaan seperti layanan birokrasi dan pemberantasan korupsi perlu dimantapkan untuk mengurangi hambatan-hambatan struktural yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Demikian pula struktur pasar bahan pokok yang bersifat oligopoli perlu diperbaiki agar tercipta keseimbangan harga yang wajar dan tidak mengganggu daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin.

Selain permasalahan stabilitas harga dan nilai tukar, permasalahan investasi adalah permasalahan penting yang perlu diamati dalam perekonomian, mengingat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

3.2.5 Investasi

Ketersediaan sumber daya alam yang banyak dan bervariasi serta jumlah penduduk yang besar, merupakan salah satu faktor

yang menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia. Oleh sebab itu, potensi investasi di Indonesia masih cukup besar sehingga masih berpeluang untuk terus berperan dalam memperkuat ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing nasional. Namun demikian, beberapa kendala yang diperkirakan masih menjadi hambatan investasi pada tahun 2014 antara lain adalah:

1. **Proses perijinan.** Proses perijinan untuk memulai usaha, memperoleh ijin sambungan listrik, dan menyelesaikan kepailitan di Indonesia dinilai masih membutuhkan waktu lama, prosedur yang cukup panjang, serta biaya tinggi dengan proses yang kurang transparan. Berdasarkan hasil survei IFC mengenai *Ease of Doing Business 2013* atas 185 negara, bahwa proses untuk memulai usaha di Indonesia masih memerlukan waktu 47 hari dengan jumlah prosedur 9. Sementara Thailand dapat melakukannya dalam waktu 29 hari dengan 4 prosedur; dan Malaysia dalam waktu 6 hari dengan 3 prosedur. Proses perijinan untuk memperoleh sambungan listrik di Indonesia membutuhkan waktu selama 108 hari, sedangkan di Thailand dan Malaysia masing-masing hanya memerlukan waktu 35 hari dan 46 hari. Di Indonesia untuk menyelesaikan kepailitan memerlukan waktu 5,5 tahun, sementara Thailand dan Malaysia masing-masing hanya memerlukan 2,7 tahun dan 1,5 tahun;
2. **Infrastruktur dan energi.** Berdasarkan *Global Competitiveness Index 2012-2013*, selain masalah birokrasi yang kurang efisien dan korupsi, kurangnya ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu faktor penghambat investasi masuk ke Indonesia. Sementara itu, laporan survei JBIC (2013) terhadap 613 perusahaan Jepang menunjukkan isu kedua terpenting untuk melakukan bisnis di Indonesia adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur. Permasalahan lain adalah pembangunan infrastruktur melalui mekanisme kerjasama pemerintah swasta (KPS) masih terhambat oleh belum sinerginya antara peraturan di tingkat pusat dan antara pusat dengan daerah. Selain itu, peran daerah dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya masih belum optimal;
3. **Ketersediaan lahan.** Salah satu faktor penghambat pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah masih adanya hambatan dalam proses penyediaan dan perijinan lahan untuk pembangunan. Status kepemilikan dan

peningkatan harga tanah akibat spekulasi juga berperan sebagai penghambat dalam pembangunan infrastruktur;

4. **Peraturan daerah (perda).** Masih banyaknya pemerintah daerah yang belum menyadari peran investasi bagi pembangunan daerahnya, telah mendorong diterbitkannya perda yang kontra produktif bagi pengembangan usaha di daerah;
5. **Akses kredit.** Akses terhadap penyedia jasa keuangan berperan penting dalam mendorong peningkatan usaha dan akhirnya menumbuhkan ekonomi di berbagai kalangan. Khususnya untuk investor domestik, akses memperoleh kredit pendanaan usaha dari bank masih dirasa sulit dan dengan bunga yang masih memberatkan. Akurasi data mengenai debitur masih belum lengkap dan akurat bagi bank untuk mengucurkan pinjaman. Indeks informasi kredit Indonesia baru mencapai 4 karena memang baru mulai dikembangkan diperkuatnya sistem informasi debitur (SID). Angka tersebut masih dibawah Malaysia yang mencapai angka sempurna yakni 6, sedangkan Thailand;

Berdasarkan data *Global Financial Inclusion Index* 2012 Bank Dunia, hanya 20 persen penduduk Indonesia berusia di atas 15 tahun yang telah menikmati akses jasa keuangan, sementara China 64 persen, dan India 35 persen. Jumlah rekening bank per 1.000 penduduk usia dewasa Indonesia hanya sebanyak 505, Thailand 1.449 dan Malaysia 2.063.

Selain masalah domestik, kondisi perekonomian global perlu juga dipertimbangkan, mengingat perlemahan perekonomian yang terjadi di belahan dunia/negara lain terutama negara industri sebagai mitra dagang dan usaha Indonesia akan berimbas secara langsung dan tidak langsung ke Indonesia. Meskipun sampai dengan awal tahun 2013 Amerika Serikat (AS) masih menghadapi perdebatan fiskal karena kemungkinan dilakukannya pemangkasan anggaran yang berdampak pada pertumbuhan ekonominya, namun untuk tahun 2014 oleh IMF, AS diperkirakan akan tumbuh 3,0 persen sementara tahun 2013 hanya 2,0 persen. Kawasan Uni Eropa diperkirakan mencapai positif 1,0 persen karena membaiknya ekonomi di Jerman, Perancis, Italia, dan Spanyol.

Dengan mempertimbangkan kondisi global dan berbagai faktor penarik investasi di Indonesia, investasi diperkirakan masih akan meningkat dan menjadi salah satu komponen pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pada tahun 2014

sasaran PMDN dan PMA diharapkan akan meningkat masing-masing sebesar 16,8 persen dan 14,0 persen.

Selain permasalahan investasi, permasalahan ekspor menjadi masalah perekonomian yang penting mengingat banyaknya tantangan dan hambatan yang dihadapi.

3.2.6 Ekspor

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia di bidang perdagangan luar negeri pada tahun 2014 secara umum adalah sebagai berikut:

1. **Risiko kondisi global.** Kinerja ekspor Indonesia sangat dipengaruhi oleh sisi permintaan global. Sehingga, walaupun pada tahun 2013 kondisi perekonomian akan mulai pulih, dan ekspor Indonesia diharapkan akan tumbuh positif, namun risiko pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan harga komoditas dengan kecenderungan menurun akan secara tidak langsung memberikan dampak terhadap lambatnya proses pemulihan kinerja ekspor Indonesia;
2. **Diversifikasi pasar ekspor belum optimal.** Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah telah berupaya untuk melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor terutama ke negara-negara yang potensial, seperti Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur. Namun demikian, upaya ini terlihat belum optimal karena pangsa pasar produk Indonesia di pasar Afrika, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Eropa Timur terlihat masih belum meningkat secara signifikan. Sebagai contoh, di pasar Timur Tengah, pangsa pasar Indonesia hanya sebesar 0,73% (2010) dan meningkat menjadi 0,87% (2011); namun masih lebih rendah dibandingkan pangsa pasar produk China, Malaysia, dan Thailand di Timur Tengah (Tabel 3.12).

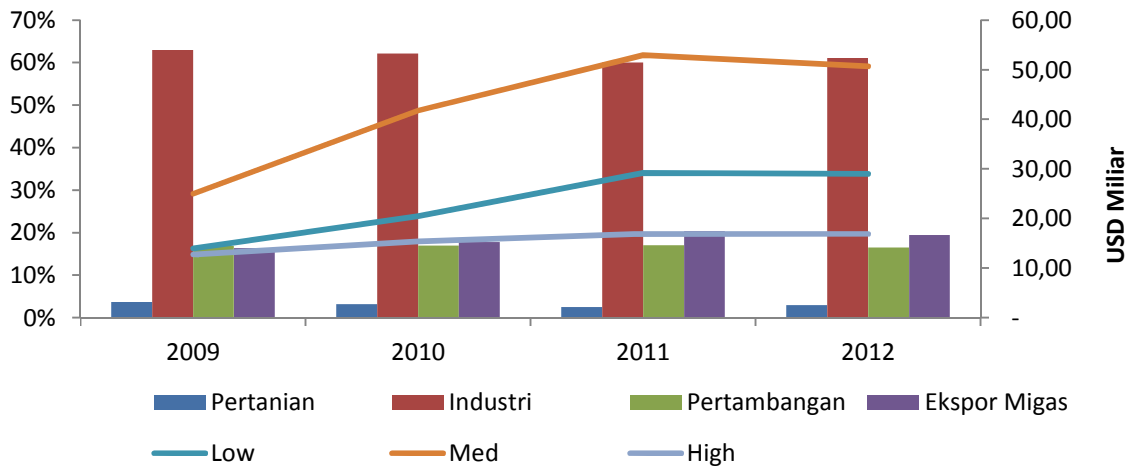
TABEL 3.12
PANGSA PASAR PRODUK NEGARA EKSPORTIR
DI PASAR AFRIKA, TIMUR, AMERIKA LATIN DAN EROPA TIMUR

| | Negara Importir | Negara Eksportir (Share, %) | | | |
|-------------|------------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|
| | | China | Indonesia | Malaysia | Thailand |
| 2010 | Afrika | 13,45% | 0,71% | 1,10% | 1,52% |
| | Timur Tengah | 10,35% | 0,73% | 1,16% | 1,34% |
| | Amerika Latin | 34,44% | 10,46% | 0,39% | 0,42% |
| | Eropa Timur dan Tengah | 8,12% | 0,27% | 0,39% | 0,52% |
| 2011 | Afrika | 14,55% | 1,02% | 1,18% | 1,54% |
| | Timur Tengah | 11,72% | 0,87% | 1,18% | 1,28% |
| | Amerika Latin | 34,50% | 11,45% | 0,37% | 0,39% |
| | Eropa Timur dan Tengah | 7,7% | 0,28% | 0,39% | 0,43% |

Sumber: *Trademap* (diolah Bappenas)

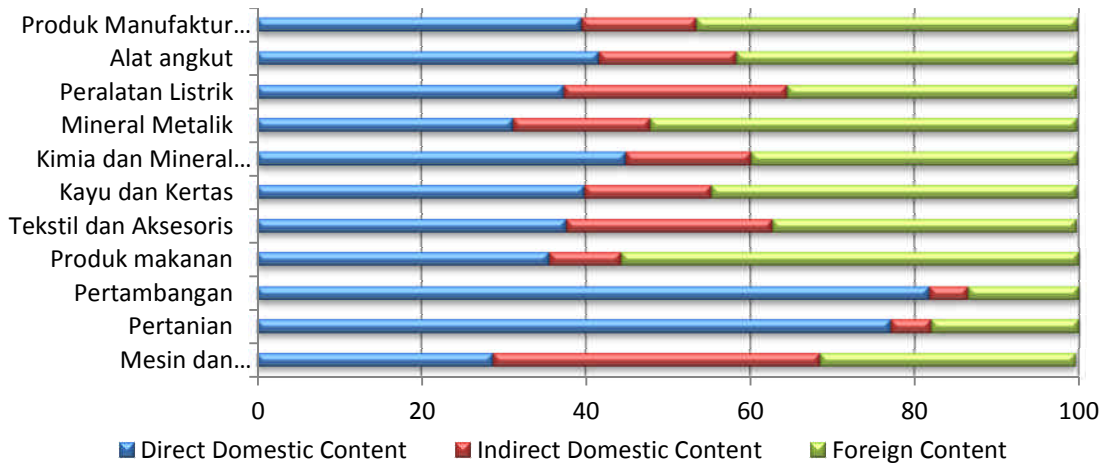
- 3 **Nilai tambah pada produk ekspor Indonesia masih rendah.** Peranan sektor industri dalam ekspor nonmigas Indonesia masih sangat dominan, walaupun secara umum mengalami penurunan pangsa, dari tahun 2009 dengan pangsa terhadap total ekspor sebesar 63,03 persen sampai tahun 2012 tercatat memiliki pangsa sebesar 61,11 persen (Gambar 3.12). Namun demikian, kinerja ekspor sektor industri tersebut masih didominasi oleh industri dengan teknologi menengah dan rendah (sesuai Klasifikasi OECD). Sementara itu, ekspor sektor industri berbasis teknologi menengah dan rendah secara umum adalah industri ekstraktif berbasis sumber daya alam.

GAMBAR 3.12
PERANAN SEKTOR MANUFAKTUR DAN KANDUNGAN TEKNOLOGINYA
DALAM EKSPOR NONMIGAS
(2009-2012)



Sumber: BPS (diolah)

GAMBAR 3.13
NILAI TAMBAH PRODUK EKSPOR BERDASARKAN
KANDUNGAN DOMESTIK DAN IMPOR (%)



Sumber: *Trade in Value Added Database OECD-WTO* (diolah Bappenas)

Di lain pihak berdasarkan nilai tambahnya, produk ekspor Indonesia masih banyak mengandung komponen impor dalam pengolahannya, seperti produk makanan, produk mineral metalik, dan produk manufaktur lainnya.

Sementara itu, tingginya angka pertumbuhan investasi yang masuk ke Indonesia belakangan ini juga turut mendorong naiknya angka impor. Pada tahun 2011, impor tercatat sebesar USD 177,43 miliar dan pada tahun 2012 naik sebesar 8,02 persen atau mencapai USD 191,67 miliar. Pertumbuhan impor tersebut disebabkan oleh impor barang modal yang tumbuh sebesar 15,21 persen dan impor bahan baku yang memberikan kontribusinya terhadap total impor sebesar 73,10 persen.

Pada tahun 2014, proses pemulihan ekonomi dunia diperkirakan akan berjalan lebih baik, sehingga kinerja ekspor Indonesia diperkirakan akan lebih baik dari tahun 2013. Walaupun demikian, peningkatan investasi di Indonesia yang diperkirakan akan tinggi di tahun 2014 akan diiringi oleh pertumbuhan impor yang tinggi. Hal ini tentunya akan menjadi tantangan bagi Pemerintah untuk dapat menerapkan kebijakan pengelolaan impor yang seimbang dan kondusif bagi dunia usaha.

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan pada tahun 2013, laju pertumbuhan ekspor nonmigas Indonesia tahun 2014 diperkirakan akan meningkat dibandingkan dengan tahun 2013, dengan target pertumbuhan sebesar 8,1 persen.

Permasalahan utama berikutnya adalah permasalahan daya beli masyarakat, yang terkait dengan perkembangan harga dan pendapatan nasional.

3.2.7 Daya Beli Masyarakat

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2014 untuk menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat antara lain adalah:

1. **Rantai distribusi yang tidak efisien** menyebabkan: (i) masih tingginya harga-harga kebutuhan pokok di wilayah-wilayah tertentu atau pada saat hari-hari besar; dan (ii) masih tingginya biaya distribusi, termasuk biaya transportasi dan penyimpanan;
2. **Rente ekonomi dan spekulasi komoditas**, terutama untuk bahan pangan, menyebabkan terhambatnya pasokan barang dan tingginya harga pangan yang dibayar oleh konsumen;
3. **Perilaku anti-persaingan pada pelaku usaha** terutama dalam struktur pasar oligopoli dapat menurunkan daya beli masyarakat. Dalam sektor

pangan, perilaku anti-persaingan seperti kartel sering diduga menjadi salah satu penyebab terdistorsinya pembentukan harga yang wajar. Kartel dalam pemasaran barang, baik oleh produsen maupun distributor, berpotensi menaikkan harga jual produk di pasar. Sementara itu, kartel dalam pembelian hasil pertanian dari petani dapat menyebabkan rendahnya harga jual petani, yang pada gilirannya akan berakibat pada berkurangnya pendapatan petani dan mengurangi daya beli petani. Dua kondisi ini tentu akan menyebabkan melebarnya kesenjangan keuntungan yang didapat oleh para pelaku perdagangan sehingga memperlebar jurang kesejahteraan antar komponen masyarakat. Lebih lanjut, struktur pasar yang mendukung kartel tersebut seringkali difasilitasi oleh kebijakan pemerintah baik berupa aturan tata niaga atau regulasi harga yang kurang tepat. Ketidakserasian kebijakan pemerintah yang ada dengan nilai-nilai persaingan usaha yang sehat tentunya akan berdampak pada tidak efisiennya pasar dan pada akhirnya memperlemah daya beli masyarakat.

Dalam upaya memecahkan masalah yang terkait dengan peningkatan daya beli masyarakat, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: (i) peningkatan kinerja logistik dalam negeri, dalam upaya menciptakan efektivitas dan efisiensi perdagangan dalam negeri; (ii) perlindungan pasar dalam negeri, dalam upaya melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam negeri dari barang beredar yang tidak berkualitas ataupun barang yang diimpor secara ilegal; (iii) meningkatkan iklim usaha yang kondusif, dalam upaya meningkatkan kesempatan berusaha, dan menjaga persaingan usaha.

Dengan memperhatikan permasalahan dan tantangan yang dihadapi pada tahun 2013, maka daya beli masyarakat di tahun 2014 masih akan meningkat, yang di indikasikan dengan meningkatnya pertumbuhan tingkat konsumsi masyarakat di dalam PDB sebesar 5,3 persen serta meningkatnya pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran sebesar 8,3 persen.

Selanjutnya, diuraikan permasalahan sektor-sektor utama penunjang pertumbuhan ekonomi, seperti permasalahan sektor industri, pariwisata dan ekonomi kreatif dan seterusnya.

3.2.8 Industri

Sektor industri dihadapkan pada permasalahan internal sektor industri dan permasalahan yang berada eksternal sektor industri. Permasalahan umum internal industri yang harus segera diatasi adalah sebagai berikut: (i) hubungan antara industri hulu dan hilir yang rendah; (ii) keterbatasan industri dasar menjadi pemasok bahan baku dan bahan penolong industri yang membuat tingginya ketergantungan impor; (iii) struktur ekspor yang didominasi oleh bahan mentah; (iv) belum optimalnya penggunaan kapasitas produksi; (v) inovasi produk dan proses produksi masih rendah; serta (vi) penerapan standar produk masih terbatas, sehingga menjadi kendala pemasaran produk domestik di pasar ekspor dan memudahkan penetrasi produk impor ke pasar domestik.

Sementara itu, permasalahan eksternal industri secara umum meliputi: (i) ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi dan pembangkit energi yang belum memadai; (ii) belum pulihnya kondisi perekonomian global dari krisis yang melanda dari tahun 2009; (iii) birokrasi yang pro-bisnis belum optimal; (iv) aturan ketenagakerjaan (pemberian pesangon, pembayaran premi Jamsostek, penetapan UMR) yang tidak mendukung pertumbuhan industri; (v) insentif fiskal belum bersaing dengan yang ditawarkan oleh negara tetangga; (vi) suku bunga perbankan mahal; serta (vii) ketentuan limbah B3 (limbah batu bara, baja, dan lain-lain) seringkali menyulitkan dunia usaha.

Dengan mempergunakan asumsi sasaran pertumbuhan PDB 2014 sebesar 7,0 persen dan pertumbuhan industri pengolahan berbasis migas sebesar -1,0 persen, maka rentang sasaran pertumbuhan industri pengolahan non migas pada tahun 2014 adalah sebesar 6,52 – 8,52 persen dengan rincian pertumbuhan setiap sub-sektor sebagai berikut:

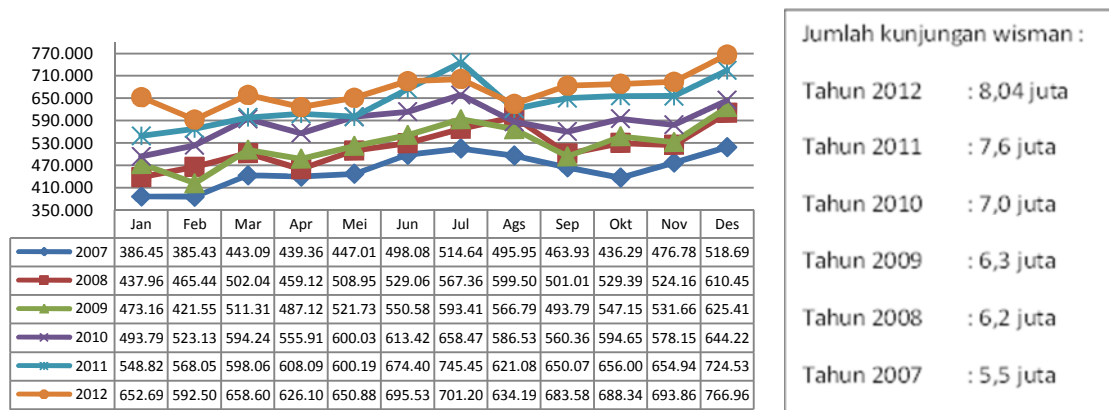
TABEL 3.13
SASARAN PERTUMBUHAN INDUSTRI (%)

| No | Sub-Sektor Industri | 2014 |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1 | Makanan, Minuman, Tembakau | 7,00 – 9,00 |
| 2 | Tekstil, Brg. Kulit dan Alas Kaki | 5,00 – 7,00 |
| 3 | Brg. Kayu dan Hasil Hutan | 1,10 – 3,10 |
| 4 | Kertas dan Barang Cetak | 3,50 – 5,50 |
| 5 | Pupuk, Kimia dan Barang Karet | 7,50 – 9,50 |
| 6 | Semen, Brg. Galian Non Logam | 7,00 – 9,00 |
| 7 | Logam Dasar Besi dan Baja | 6,10 – 8,10 |
| 8 | Alat Angkut, Mesin dan Peralatan | 7,00 – 9,00 |
| 9 | Barang Lainnya | 3,00 – 5,00 |
| Industri Pengolahan Non-Migas | | 6,52 – 8,52 |

3.2.9 Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pembangunan kepariwisataan nasional telah menunjukkan perkembangan yang menggembirakan, namun pertumbuhan kunjungan wisman belum mencapai pertumbuhan tertinggi seperti pertumbuhan pada periode 2003-2004, yaitu 19,1 persen (lihat gambar 3.14). Disamping itu, jumlah kunjungan wisman yang masih jauh tertinggal di bawah negara-negara lain di ASEAN seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, menunjukkan bahwa daya saing kepariwisataan Indonesia masih rendah (lihat gambar 3.14).

GAMBAR 3.14
PERKEMBANGAN KUNJUNGAN WISMAN TAHUN 1997-2012



Beberapa permasalahan yang merupakan kendala dalam pembangunan kepariwisataan antara lain: (1) Destinasi pariwisata belum sepenuhnya siap bersaing di pasar global. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh (a) belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata; (b) belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti transportasi darat, laut dan udara, dan ketersediaan fasilitas umum; (c) belum optimalnya kemitraan dan kerja sama antara pemerintah dan swasta termasuk masyarakat (public and private partnership); (d) belum efektifnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi di bidang pariwisata; (2) Belum efektifnya pelaksanaan pemasaran dan promosi pariwisata yang disebabkan oleh: (a) belum memadainya informasi pariwisata di dalam dan luar negeri; (b) belum optimalnya kemitraan antar pemangku kepentingan dalam melakukan pemasaran dan promosi; (c) belum optimalnya pemanfaatan media massa, elektronik, dan media cetak serta teknologi informasi dan komunikasi (*information and communication technology/ICT*) sebagai sarana promosi; dan (d) masih terbatasnya dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mendukung promosi pariwisata daerah; (3) Kurangnya daya saing sumber daya pariwisata yang disebabkan antara lain oleh: (a) masih terbatasnya jumlah, jenis, dan kualitas SDM di bidang pariwisata; dan (b) belum optimalnya kapasitas dan kualitas penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata; dan (4) belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan di pusat maupun di daerah dalam mendukung pembangunan kepariwisataan.

Selanjutnya, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kepariwisataan pada tahun 2013 adalah: (i) meningkatkan profesionalisme dan kemampuan (*skill*) SDM di bidang pariwisata sehingga mampu bersaing di pasar global dan meningkatkan pelayanan prima kepada wisatawan; (ii) meningkatkan kemitraan (*Public Private Partnership*) dan kerjasama lintas bidang dalam upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan; (iii) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi; dan (iv) menciptakan iklim yang kondusif.

Dari sisi ekonomi kreatif, permasalahan utama yang dihadapi adalah: (i) kemampuan berkreasi sumber daya insani belum memadai dalam kuantitas maupun kualitas sehingga produk-

produk ekonomi kreatif belum sepenuhnya mampu bersaing di pasar global; (ii) apresiasi masyarakat terhadap produk atau karya,serta pelaku kreatif di Indonesia masih rendah; (iii) infrastruktur dan regulasi teknologi informasi belum optimal mendukung ekonomi kreatif; dan (iv) fasilitas pendukung bagi pengembangan ekonomi kreatif masih terbatas. Dengan demikian tantangan pembangunan ekonomi kreatif pada tahun 2014 adalah menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif sehingga mampu bersaing di pasar global, meningkatkan kualitas SDM di bidang ekonomi kreatif, dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk ekonomi kreatif.

Dengan melihat kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi, sasaran pembangunan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah:

1. Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 10 juta orang dan jumlah pergerakan wisatawan nusantara menjadi 255 juta perjalanan;
2. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap penyerapan tenaga kerja nasional menjadi 8,74 juta orang;
3. Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PDB menjadi sebesar 4,25 persen;
4. Meningkatnya nilai investasi terhadap nilai investasi nasional menjadi 4,83 persen;
5. Meningkatnya penerimaan devisa yang diperoleh dari kunjungan wisman menjadi USD 12 miliar;
6. Meningkatnya pengeluaran wisatawan nusantara menjadi sebesar Rp. 191,25 triliun;
7. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDB sebesar 7,5 persen;
8. Meningkatnya partisipasi tenaga kerja di bidang ekonomi kreatif sebesar 8,48 persen;
9. Meningkatnya kontribusi unit usaha di bidang ekonomi kreatif terhadap unit usaha nasional sebesar 7,35 persen.
10. Meningkatnya kuantitas dan kualitas lulusan pendidikan tinggi kepariwisataan yang terserap di pasar kerja sebesar 1.490 orang;

11. Meningkatnya profesionalisme tenaga kerja pariwisata dan ekonomi kreatif yang disertifikasi sebesar 6.000 orang.

3.2.10 Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Permasalahan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM secara umum dapat dibedakan menjadi permasalahan yang dihadapi oleh usaha mikro dan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM. Secara umum, masalah yang dihadapi oleh usaha mikro berkaitan dengan ketimpangan peran usaha mikro dalam perekonomian. Secara populasi dan jumlah tenaga kerja, usaha mikro merupakan struktur pelaku UMKM yang dominan. Namun tingkat produktivitas usaha mikro pada tahun 2012 masih merupakan yang terendah yaitu Rp 52,83 juta/unit. Sebagai perbandingan, tingkat produktivitas usaha kecil dan usaha menengah pada tahun 2012 tercatat masing-masing sebesar Rp 1,27 miliar/unit dan Rp 22,87 miliar/unit. Kesenjangan produktivitas juga dapat diamati antar sektor, dimana produktivitas usaha mikro di sektor pertanian merupakan yang terendah. Permasalahan ini disebabkan sebagian besar usaha mikro memiliki keterbatasan akses kepada sumber daya produktif terutama modal, bahan baku dan teknologi. Usaha mikro juga memiliki keterbatasan dalam menjangkau jasa pendampingan usaha, serta belum terhubung dengan jaringan usaha dan pemasaran berbasis nilai tambah. Kondisi ini menyebabkan peluang usaha yang dihasilkan dari pertumbuhan ekonomi masih lebih banyak dimanfaatkan oleh usaha kecil, menengah dan besar dibandingkan oleh usaha mikro.

Sementara itu koperasi dan usaha kecil dan menengah (UKM) memiliki permasalahan terkait kesiapan mereka untuk menghadapi perubahan pasar yang dinamis, yang ditandai dengan persaingan usaha yang semakin tinggi, perubahan permintaan/selera pasar, dan pergantian produk yang semakin cepat. Hal ini ditunjukkan oleh produktivitas UKM (Rp 8,27 miliar/unit) yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan produktivitas usaha besar (Rp 203,51 miliar/unit). Kontribusi UKM terhadap nilai ekspor non migas juga masih berfluktuasi (antara 14-18 persen pada periode 2005-2011). Peran koperasi juga belum optimal dalam meningkatkan posisi tawar UKM anggotanya. Hal ini disebabkan terbatasnya skema bisnis koperasi, rendahnya posisi tawar koperasi produsen, dan rendahnya kapasitas SDM koperasi. Rendahnya kesiapan koperasi dan UKM dalam menghadapi persaingan juga berkaitan dengan

tingginya biaya transaksi dan keterbatasan infrastruktur penunjang usaha, terutama yang terkait akses distribusi dan energi. Kondisi ini menyebabkan koperasi dan UKM belum mampu untuk mengembangkan usahanya secara berkelanjutan.

Koperasi dan UMKM membutuhkan adanya dukungan iklim usaha kondusif, sistem pendukung usaha yang kuat dan terjangkau, serta kualitas SDM yang memadai untuk menghadapi tantangan yang semakin besar ke depan. Tantangan tersebut terkait dengan peningkatan kontribusi koperasi dan UMKM dalam mengurangi kesenjangan pembangunan, kemiskinan dan pengangguran. Penguatan koperasi dan UMKM juga diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar dan kapasitas mereka dalam menghadapi penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN pada tahun 2015.

Berdasarkan permasalahan dan tantangan yang dihadapi, upaya-upaya pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2014 diarahkan untuk mencapai sasaran-sasaran: (i) peningkatan produktivitas UMKM sebesar 5,0 persen; (ii) peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,0 persen; (iii) peningkatan sumbangan UMKM pada pembentukan PDB sebesar 6,0 persen; (iv) peningkatan nilai ekspor produk UMKM sebesar 15,0 persen; (v) peningkatan nilai investasi UMKM sebesar 25,0 persen; (vi) peningkatan proporsi jumlah koperasi aktif menjadi 80,0 persen dari total koperasi; (vii) peningkatan proporsi jumlah koperasi yang melaksanakan RAT menjadi 55,0 persen dari koperasi aktif; dan (viii) peningkatan volume usaha koperasi sebesar 20,0 persen.

3.2.11 Sektor Keuangan

Kondisi stabilitas dan kinerja sektor keuangan dalam tahun 2012 relatif baik dan terjaga. Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan/permasalahan yang perlu diatasi agar lebih dapat mengoptimalkan peran sektor keuangan bagi pembiayaan pembangunan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian.

Pertama, aliran masuk modal asing ke Indonesia adalah positif sekaligus berisiko. Hal ini perlu diwaspadai karena adanya potensi/risiko aliran modal keluar (*capital outflow*) terutama jika terjadi gejolak pada perekonomian/keuangan dunia memburuk mengingat kepemilikan asing di pasar modal masih cukup besar. Aliran modal keluar yang besar

dan tiba-tiba ini dapat mendorong penarikan dana besar-besaran pada perbankan (*bank rush*), yang akan berpengaruh terhadap stabilitas sektor keuangan. Karena itu tantangannya adalah bagaimana menjaga tingkat kesehatan dan ketahanan perbankan, serta mengarahkan dana masuk ke instrumen jangka panjang yang produktif.

Dari sektor perbankan, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih terkendalanya fungsi intermediasi perbankan yang disebabkan oleh masih tingginya Net Interest Margin (NIM) mengingat masih tingginya tingkat suku bunga kredit di Indonesia, termasuk kredit mikro. Sektor perbankan Indonesia masih belum beroperasi secara efisien jika dibandingkan dengan bank-bank di Asia Tenggara. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Indonesia mencapai 74,1 per Desember 2012, lebih tinggi dibandingkan rasio BOPO perbankan di kawasan ASEAN yang berada di kisaran 40-60 persen.

Peran perbankan syariah dalam perbankan nasional masih relatif terbatas, yaitu masih di bawah 5,0 persen dari total aset perbankan nasional, yang antara lain disebabkan oleh beberapa permasalahan, yaitu: (i) pemahaman publik yang belum menyeluruh dan mendalam tentang perbankan syariah; (ii) jumlah SDM perbankan syariah yang belum memadai; dan (iii) pasar keuangan syariah (pasar sukuk, pasar saham, dll) yang belum berkembang.

Beberapa permasalahan di industri BPR, antara lain: (i) kondisi permodalan sebagian besar BPR yang relatif kecil dan terbatas; (ii) kesenjangan (*gap*) industri BPR yang cukup besar dari sisi aset, modal serta produk dan pelayanan membutuhkan kebijakan pengawasan dan pengaturan yang lebih spesifik sesuai dengan kondisi masing-masing BPR; (iii) kemampuan BPR menghimpun dana murah dari masyarakat masih terbatas yang mengakibatkan biaya dana BPR cukup tinggi.

Pada sektor pembiayaan mikro, masih terdapat beberapa persoalan seperti: (i) program-program kredit maupun inisiatif –inisiatif kebijakan sistem keuangan inklusif yang dilakukan berbagai kementerian dan pemerintah daerah saling tumpang tindih dan kontradiktif; (ii) belum ada sistem informasi debitur; (iii) belum optimalnya diversifikasi skema pembiayaan; (iv) belum memadainya peran fasilitator UMKM.

Peran Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) masih sangat kecil dalam perekonomian, meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga belum dapat secara optimal menjadi sumber pendanaan jangka panjang untuk menunjang kegiatan pembangunan ekonomi nasional.

Dengan makin berkembangnya sektor keuangan baik perbankan, non bank dan keuangan mikro serta integrasi produk perbankan dan non perbankan, modus dan ancaman terjadinya tindak pidana pencucian uang juga terus meningkat. Hal tersebut bisa menjadi gangguan terhadap stabilitas sistem keuangan dan pengembangan sektor keuangan secara menyeluruh. Ini merupakan tantangan bagi Indonesia dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang sehat dan terpercaya/kredibel.

3.2.12 Ketenagakerjaan

Meskipun tingkat pengangguran berpendidikan tinggi sudah menurun, tetapi struktur pekerja yang lulus SD dan SLTP masih sangat besar yaitu 65,7 persen. Kondisi seperti ini menyebabkan kualitas pekerja tidak sebaik mereka yang lulus SMTA dan perguruan tinggi yang besarnya 34,3 persen. Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja masih belum memadai, diikuti dengan rendahnya kompetensi tenaga kerja, dan juga sertifikasi kompetensi masih belum banyak yang diakui oleh pengguna kerja. Langkah yang sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga pelatihan kerja dalam menyelenggarakan pelatihan berbasis kompetensi sudah semakin baik, meskipun masih terbatas dan belum merata. Penyelenggara pelatihan kerja juga masih terkendala dalam mengembangkan standar kompetensi kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, banyak diantara lembaga pelatihan yang belum memiliki kriteria dan standar yang lazim digunakan untuk lembaga pelatihan berbasis kompetensi.

Indonesia masih mengalami kendala dalam menciptakan iklim ketenagakerjaan yang baik, sehingga ranking Indonesia dalam pilar efisiensi pasar tenaga kerja yang dilaporkan oleh *Global Competitiveness Report* mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Terkait biaya redundansi dan fleksibilitas penentuan upah, pada tahun 2012 Indonesia menduduki ranking 137 dan 114 dari 144 negara.

Dengan masih terkendalanya revisi UU No. 13/2003, maka tantangan terbesar adalah mengupayakan pengurangan gejolak dalam pasar kerja dengan mengedepankan

perundingan bipartit antara pekerja dan pengusaha dalam penentuan upah, syarat kerja, dan hubungan kerja. Dengan demikian, penguatan kelembagaan hubungan industrial menjadi upaya strategis kedepan, dengan mendorong terwujudnya perundingan kolektif (*collective bargaining*) untuk mencapai kesepakatan kerja bersama dengan mengadopsi prinsip-prinsip berunding dengan itikad baik.

Masalah lain erat kaitannya dengan isu TKI antara lain: (1) pelayanan masih terkendala pada persoalan keterbatasan sumber daya internal, persoalan jangkauan terhadap pekerja domestik dan sistem hukum dan budaya di negara setempat; (2) belum seluruh daerah memberikan pelayanan dalam proses perekrutan sesuai standar pelayanan minimal (SPM), (3) kasus di beberapa negara, terdapat kesulitan untuk mendapatkan akses kekonsuleran. Permasalahan tersebut memberikan tantangan kedepan dalam memperluas jangkauan informasi kerja luar negeri di wilayah-wilayah kantong TKI, mendekatkan pelayanan calon TKI ke masyarakat di daerah sekaligus menyerahkan proses rekrutmen kepada pemerintah daerah, dan menyederhanakan prosedur keberangkatan bagi calon TKI.

3.2.13 Jaminan Sosial

Dalam pelaksanaan pembangunan jaminan sosial, masih terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi. Terkait dengan penyiapan operasionalisasi BPJS Kesehatan misalnya, terdapat beberapa tantangan sebagai berikut:

1. Transisi pelaksanaan jaminan kesehatan yang tersebar dalam berbagai program seperti Jamkesmas, Jamkesda, jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemberi kerja, jaminan kesehatan khusus bagi personil TNI dan Polri, jaminan kesehatan yang saat ini dikelola oleh PT Askes, dan jaminan kesehatan komersial yang dikelola oleh pihak swasta untuk diintegrasikan ke dalam satu pengelolaan;
2. Penyiapan pengembangan fasilitas kesehatan, tenaga medis, farmasi, dan sarana pendukung lainnya untuk mengantisipasi kenaikan utilisasi jaminan kesehatan, khususnya di daerah dengan populasi padat dan daerah terpencil, terdepan, dan perbatasan;
3. Pembenahan sistem pelayanan, pembayaran manfaat secara prospektif, dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) serta aspek administratif lainnya untuk

- menunjang implementasi jaminan kesehatan dengan cakupan menyeluruh;
4. Penyampaian informasi secara tepat melalui media komunikasi dan strategi sosialisasi, edukasi, dan advokasi yang tepat kepada para peserta, pekerja, dan pemberi kerja khususnya mengenai manfaat layanan dan komposisi pembagian iuran;
 5. Penyusunan tata cara yang mewajibkan kepesertaan dengan perangkat penegak peraturan untuk menjamin terlaksananya jaminan sosial secara menyeluruh khususnya di sektor swasta untuk usaha skala menengah dan besar; dan
 6. Pengembangan organisasional BPJS meliputi infrastruktur, sistem, sumber daya manusia, dan kesiapan finansial guna mengantisipasi kenaikan jumlah peserta jaminan sosial.

Selain tantangan diatas, upaya perluasan keanggotaan jaminan sosial juga masih terkendala dengan kondisi ketenagakerjaan yang didominasi oleh pekerja sektor informal yang saat ini mencapai 66,6 juta orang (60,14 persen) dari angkatan kerja dengan karakteristik yang sangat beragam.

Hal penting lainnya yang perlu dilakukan adalah perbaikan manajemen pelayanan jaminan sosial dan pengenalan asuransi kesehatan yang terintegrasi dan dikelola secara luas (*publicly managed*) melalui strategi pemasaran sosial dan edukasi di tingkat masyarakat secara efektif dalam memperkenalkan konsep asuransi untuk membangun kepercayaan masyarakat.

Mengacu pada rencana nasional jangka menengah yang tersusun dalam RPJMN 2010-2014 dan menyesuaikan dengan berbagai perkembangan terakhir, maka sasaran prioritas jaminan sosial pada tahun 2014 adalah:

1. Tersusunnya berbagai perangkat hukum secara lengkap yang mendukung pembentukan BPJS Kesehatan mulai tahun 2014 dan pembentukan BPJS Ketenagakerjaan mulai Juli tahun 2015;
2. terselesaikannya transformasi berbagai program jaminan kesehatan yang sebelumnya dikelola oleh banyak pihak terintegrasi ke dalam pengelolaan BPJS Kesehatan;
3. Terbangunnya sistem pendataan peserta jaminan sosial,

khususnya data penerima bantuan iuran (PBI) yang bersumber dari Basis Data Terpadu dengan proses pengkinian (*updating*) secara rutin;

4. Tersusunnya standar baku pelayanan jaminan kesehatan yang meliputi pemberian manfaat kesehatan secara komprehensif didukung dengan sistem administrasi dan pengawasan yang handal;
5. Terharmonisasinya berbagai peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem jaminan sosial pada berbagai pihak pemangku kepentingan di berbagai tingkatan;
6. Tersusunnya berbagai rancangan konsep terkait aspek-aspek implementasi jaminan ketenagakerjaan dan pembentukan BPJS Ketenagakerjaan; dan
7. Meningkatnya pemahaman masyarakat luas tentang konsep jaminan sosial.

3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014

3.3.3 Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan adalah elemen yang tidak bisa ditinggalkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi menggambarkan terjadinya peningkatan dan perluasan kegiatan ekonomi suatu negara. Peningkatan tersebut akan memperluas terbukanya kesempatan kerja baru bagi rakyat. Disamping itu, pertumbuhan ekonomi yang positif memungkinkan suatu negara untuk meningkatkan kemampuannya dalam melakukan akumulasi modal (baik fisik maupun modal sumber daya manusia) dan memacu inovasi teknologi yang kemudian akan berdampak pada peningkatan produktivitas. Terbukanya lapangan pekerjaan baru dan peningkatan produktivitas pada akhirnya berimplikasi positif pada penghasilan yang diterima rakyat. Apabila hal ini berkelanjutan, tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan melalui dua sisi, yakni sisi permintaan dan sisi penawaran. Dari sisi permintaan terdapat empat komponen utama yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama adalah investasi yang

memegang peran penting bagi pertumbuhan ekonomi karena akan menciptakan akumulasi modal yang dapat mendorong peningkatan produktivitas. Kebutuhan investasi masih belum mampu dibiayai sepenuhnya oleh penanaman modal dalam negeri sehingga usaha untuk menarik investasi asing agar masuk ke Indonesia masih harus terus dilakukan, terutama melalui upaya perbaikan iklim investasi yang terus-menerus. Selain itu, investasi masih terpusat pada daerah dan industri tertentu. Dengan demikian, langkah kebijakan diversifikasi dan penyebaran investasi harus secara intensif dilakukan, disesuaikan dengan karakter/sifat industri dan potensi atau sumber daya spesifik yang dimiliki daerah.

Kedua adalah ekspor netto yang juga merupakan sumber bagi pertumbuhan ekonomi. Dari waktu ke waktu kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan perbaikan. Namun, peningkatan kinerja ekspor pertanian dan pertambangan masih sangat dipengaruhi oleh peningkatan harga di pasar internasional. Seiring dengan peningkatan persaingan di pasar global, peningkatan ekspor akan lebih diutamakan pada produk-produk yang mampu memberikan nilai tambah yang lebih besar, peningkatan diversifikasi pasar tujuan ekspor, dan peningkatan daya saing produk ekspor. Peningkatan daya saing produk ekspor dilakukan dengan menurunkan biaya logistik, meningkatkan ketersediaan infrastruktur, mengurangi pungutan liar, dan menyederhanakan peraturan dan prosedur perizinan, sehingga biaya ekonomi dapat ditekan.

Ketiga, kebijakan menjaga daya beli. Daya beli rakyat akan dapat ditingkatkan apabila pendapatan masyarakat mengalami peningkatan. Selain itu, masyarakat akan merasa sejahtera ketika dapat membeli kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Hal ini tidak dapat terjadi apabila harga meningkat tiba-tiba, sementara penghasilannya tetap (daya beli rakyat turun). Oleh karena itu, dalam menjaga daya beli rakyat, salah satu langkah kebijakan yang perlu dilakukan adalah menjaga tingkat inflasi. Untuk itu harus diantisipasi faktor-faktor yang menimbulkan gejolak inflasi, terutama yang terkait dengan proses distribusi dan pergerakan harga di pasar internasional. Apabila daya beli terjaga, tingkat konsumsi rakyat juga akan terjaga, yang kemudian akan mendukung pula terciptanya pertumbuhan ekonomi. Hal ini menjadi penting, terutama apabila mengingat masih

tingginya kontribusi konsumsi rumah tangga bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Keempat, optimalisasi pengeluaran pemerintah dan pengelolaan kekayaan negara. Pengeluaran pemerintah memiliki peran yang tidak kalah penting apabila dibandingkan dengan komponen pertumbuhan ekonomi lainnya, terutama di saat terjadi ancaman krisis ekonomi. Pemberian stimulus fiskal diharapkan mampu mendorong peningkatan permintaan, serta menutupi penurunan permintaan akibat turunnya investasi dan ekspor. Namun, pengeluaran pemerintah juga dibatasi oleh ketersediaan anggaran (*resource envelope*) yang dimiliki. Apabila pengeluaran terlalu besar, defisit anggaran akan membesar, dan dapat mengancam keberlangsungan kebijakan fiskal ke depan. Di sisi lain, pengeluaran yang terlalu besar juga dapat mengurangi porsi konsumsi dan investasi swasta dalam perekonomian (*crowding out effect*). Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan optimalisasi pengeluarannya secara efektif dan efisien, yang didukung dengan pengelolaan aset secara akuntabel dan bertanggung jawab melalui pengelolaan kekayaan negara yang andal dan kredibel.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan ekonomi akan diperoleh melalui peningkatan produksi. Sektor yang diharapkan menjadi pendorong utama peningkatan pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi adalah sektor industri manufaktur. Hal ini terjadi karena sektor industri manufaktur dapat memberikan nilai tambah yang besar. Di luar sektor industri manufaktur, masih diandalkan pula sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, sektor-sektor lainnya juga diharapkan dapat mendukung peningkatan produksi demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam rangka terwujudnya pertumbuhan yang berkelanjutan, pertumbuhan ekonomi dalam tahun 2014 diharapkan meningkat sebesar 6,6 persen. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan investasi sebesar 9,3 persen, pertumbuhan ekspor sebesar 6,9 persen, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebesar 5,3 persen, dan pertumbuhan konsumsi pemerintah sebesar 5,0 persen. Dari sisi produksi,

pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh pertumbuhan sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan sebesar 3,7 persen dan pertumbuhan sektor industri pengolahan yang tumbuh rata-rata sebesar 6,7 persen.

3.3.3.1 Stabilitas Ekonomi yang Kokoh

Terciptanya stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian nasional hanya dapat memberikan kinerja yang baik apabila didukung oleh kestabilan ekonomi yang kokoh. Ketidakstabilan pada harga barang, tingkat suku bunga, tingkat pertumbuhan ekonomi, atau utang pemerintah dapat memberikan gangguan pada perekonomian, terutama sektor swasta, yang membutuhkan kepastian dalam menjalankan usahanya yang pada gilirannya akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh, stabilitas harga dan stabilitas nilai tukar harus dapat dijaga. Gejolak harga yang tinggi selain mengurangi daya beli masyarakat juga akan menimbulkan ketidakpastian dalam berusaha. Nilai tukar yang belfluktuasi juga akan menimbulkan ketidakpastian bagi kinerja sektor perdagangan karena ketika nilai tukar terlalu menguat daya saing ekspor akan menurun dan sebaliknya ketika nilai tukar melemah perekonomian akan terganggu oleh tingginya harga barang impor. Untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut langkah kebijakan moneter harus dipertajam.

Stabilitas ekonomi juga didukung oleh kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Tingkat defisit atau utang yang terlalu tinggi akan meningkatkan ketidakpercayaan swasta kepada pemerintah. Kebijakan anggaran defisit akan mendorong pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan, baik luar negeri dalam bentuk pinjaman luar negeri maupun dari pinjaman dalam negeri dalam bentuk penerbitan surat berharga negara (SBN). Dengan kebijakan seperti ini, risiko memegang obligasi negara semakin meningkat yang pada gilirannya mendorong tingginya imbal hasil (*yield*) yang harus dibayar pemerintah. Bila itu terjadi, stabilitas makroekonomi dapat terganggu. Pengelolaan tingkat defisit anggaran dan utang yang baik melalui pengalihan hutang (*debt switch*) atau pembelian kembali (*buy back*) yang ada dalam kebijakan fiskal dan berkelanjutan menjadi penting dalam menyokong terciptanya stabilitas makroekonomi.

3.3.3.2 Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan

Stabilitas ekonomi juga sangat bergantung pada sektor kebijakan sektor keuangan. Krisis ekonomi Indonesia tahun 1998 berawal dari krisis di sektor keuangan yang selanjutnya memberikan pengaruh buruk pada seluruh bidang pembangunan. Krisis ekonomi dunia yang sedang terjadi juga dipicu oleh krisis di sektor keuangan. Oleh karena itu, stabilitas sektor keuangan ini harus menjadi fokus utama dalam mendukung stabilitas ekonomi yang kokoh.

Dalam rangka terciptanya stabilitas ekonomi yang kokoh, diupayakan tingkat inflasi dapat dijaga sebesar 5,0 persen pada tahun 2014, stabilitas nilai tukar rupiah terjaga, defisit anggaran terjaga pada tingkat 1,2 persen dari PDB dan stok utang pemerintah terhadap PDB menurun menjadi 22-23 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas ekonomi akan menjadi kurang berarti apabila hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil rakyat yang menikmati peningkatan kesejahteraan rakyat sehingga tidak sesuai dengan tujuan pembangunan bidang ekonomi. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan merupakan elemen penting yang menjamin pengembangan ekonomi dapat dinikmati oleh semua rakyat secara adil.

Pembangunan ekonomi inklusif adalah pembangunan yang memberikan kesempatan pada seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam proses pertumbuhan ekonomi dengan status yang setara, terlepas dari latar belakang mereka. Dengan demikian, pembangunan ekonomi inklusif menciptakan kesempatan bagi semua dan memastikan akses yang sama terhadap kesempatan tersebut.

Pencapaian pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan didukung oleh kebijakan pada sektor tenaga kerja, kemiskinan, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)/koperasi. Di sisi kebijakan tenaga kerja, kebijakan-kebijakan seperti pelatihan, pembekalan, pengembangan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dapat memberikan tambahan keahlian bagi tenaga kerja sehingga memudahkan untuk dapat mengisi lowongan kerja yang tersedia. Dengan begitu, semakin banyak orang terlibat dalam proses pembangunan.

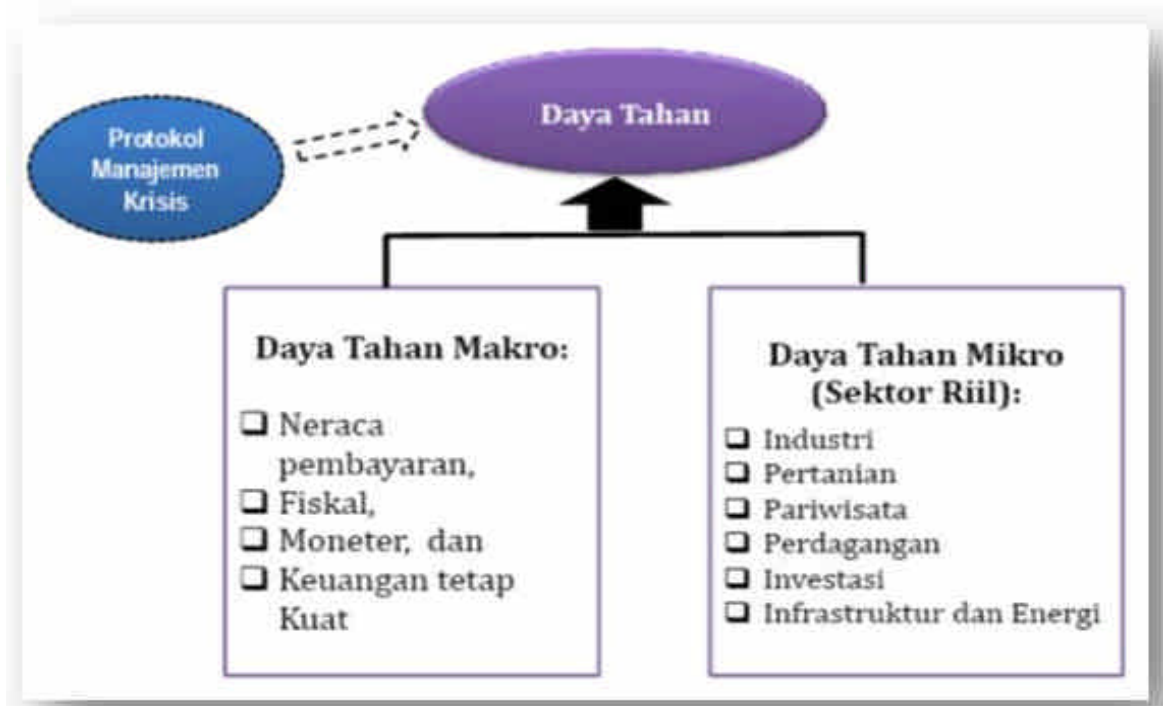
Terkait dengan kebijakan pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan memiliki kaitan yang sangat erat. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan dapat memiliki dampak positif terhadap agenda pengurangan kemiskinan. Hal ini dapat ditempuh melalui pertumbuhan ekonomi yang akan meningkat ketika kesenjangan berhasil diatasi. Selain itu, pembangunan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan efektivitas kebijakan pengurangan kemiskinan dengan memfokuskan pada penciptaan dan pemberian akses yang sama pada kesempatan kerja. Dengan begitu, mereka yang selama ini miskin karena tidak pernah mendapat kesempatan kerja, dapat memanfaatkan kesempatan kerja yang ada untuk keluar dari kemiskinan. Sebaliknya, kebijakan pengurangan kemiskinan melalui pemberian bantuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar (pendidikan dan kesehatan) juga akan memberikan dukungan pada terciptanya pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Di samping kebijakan di ketenagakerjaan dan kebijakan dalam pengurangan kemiskinan, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan perlu didukung oleh kebijakan UKM. Dengan keterbatasan sektor formal untuk menampung tenaga kerja, kesempatan bagi mereka yang tidak tertampung untuk turut serta dalam proses pembangunan adalah melalui sektor-sektor informal. Oleh sebab itu, pengembangan UKM penting dilakukan, baik pengembangan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan keterbatasan dana dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam bentuk pemberian pelatihan yang memungkinkan UMKM dapat berkembang dengan kemampuannya sendiri.

Dalam kaitannya dengan Tema RKP 2014 yaitu memantapkan perekonomian nasional bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, Tema tersebut mempunyai tiga titik berat, yaitu: 1) peningkatan daya saing, 2) peningkatan ketahanan ekonomi, 3) mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sedangkan unsur-unsur pokok Tema RKP 2014 adalah: (1) Pemantapan perekonomian nasional, (2) Peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, dan (3) Pemeliharaan stabilitas sosial dan politik.

3.3.3.3 Ketahanan (Daya Tahan) Perekonomian Nasional

GAMBAR 3.15
KETAHANAN (DAYA TAHAN) PEREKONOMIAN NASIONAL



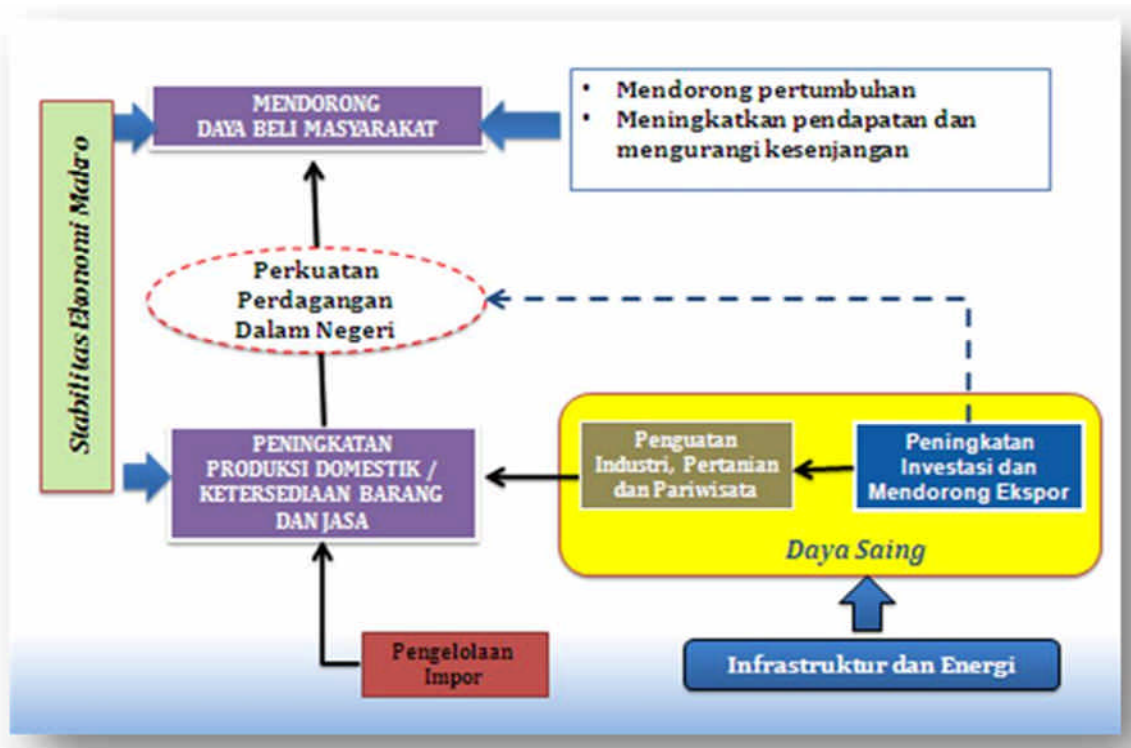
Ketahanan atau daya tahan perekonomian nasional, paling tidak didukung oleh tiga faktor utama: a) Protokol Manajemen Krisis, yang merupakan konsep prosedur pelaksanaan yang standar dari langkah-langkah kebijakan apabila krisis keuangan terjadi dan mempengaruhi perekonomian nasional, b) Daya Tahan Makro, yang meliputi kebijakan neraca pembayaran, fiskal, moneter dan keuangan, dan c) Daya Tahan Mikro (sektor riil) meliputi daya tahan di sektor industri, pertanian, pariwisata, perdagangan, investasi, infrastruktur dan energi.

Di bidang fiskal, kebijakan-kebijakan turunannya meliputi kebijakan pengendalian defisit fiskal/APBN, pengendalian subsidi baik subsidi BBM dan non BBM, serta kebijakan pengendalian rasio hutang Pemerintah terhadap PDB yang terus menurun. Kebijakan di bidang moneter meliputi kebijakan bauran, baik pengendalian nilai tukar dan inflasi, agar berjalan dengan optimal. Kebijakan sektor keuangan meliputi kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan serta mitigasi resiko

sistemik di sektor keuangan, khususnya di sub sektor perbankan. Kebijakan neraca pembayaran meliputi kebijakan untuk menjaga surplus transaksi berjalan, menjaga kecukupan cadangan devisa dan mengelola arus modal asing yang sehat dan terkendali.

Sedangkan pola pikir Ketahanan atau Daya Tahan Sektor Riil (Mikro) terhadap faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat digambarkan pada gambar/bagan di bawah ini.

GAMBAR 3.16
KETAHANAN (DAYA TAHAN) MIKRO/SEKTOR RIIL



Peningkatan daya saing yang tercermin dari peningkatan investasi dan ekspor, serta penguatan sektor industri, pertanian dan pariwisata didukung oleh tersedianya infrastruktur dan energi. Peningkatan daya saing dan pengelolaan impor yang sehat/konduktif akan meningkatkan produksi/ketersediaan barang dan jasa di dalam negeri, di dukung oleh stabilitas ekonomi makro yang stabil. Peningkatan produksi ini akan memperkuat

perdagangan dalam negeri, yang didukung pula oleh peningkatan daya saing. Pada gilirannya, perkuatan perdagangan dalam negeri pada kondisi stabilitas ekonomi makro yang baik/terkendali akan mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Peningkatan daya beli masyarakat ditentukan juga oleh peningkatan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat serta penurunan kesenjangan pendapatan masyarakat.

Secara lebih rinci, kebijakan-kebijakan perekonomian, seperti Keuangan Negara, Stabilitas Harga, Investasi dan Ekspor, serta sektor/bidang perekonomian lainnya diuraikan sebagai berikut.

3.3.4 Keuangan Negara

Berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, kebijakan fiskal tahun 2014 akan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pelaksanaan kebijakan fiskal yang sehat dan efektif.

Adapun arah kebijakan keuangan negara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: Pertama menyediakan stimulasi fiskal secara terukur dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal. Kedua memperkuat kapasitas fiskal (*fiscal capacity*). Ketiga memperlebar ruang fiskal (*fiscal space*). Keempat meningkatkan kualitas belanja (*quality of spending*). Kelima memperkuat pengelolaan keuangan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Keenam memantapkan pengelolaan pembiayaan anggaran.

3.3.5 Stabilitas Harga

Secara umum diarahkan untuk menjaga inflasi agar tetap rendah dan terkendali, serta menjaga stabilitas nilai tukar. Sehubungan dengan hal tersebut, strategi ke depan yang akan ditempuh antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro, khususnya dalam memperkuat struktur perekonomian, memperluas sumber pembiayaan ekonomi, penguatan respon sisi penawaran, pengendalian inflasi, serta pemantapan Protokol Manajemen Krisis (PMK).

2. Mendorong pengembangan bauran kebijakan moneter serta kebijakan makroprudensial terutama untuk pengelolaan ekspos likuiditas dan arus modal asing untuk mengurangi dampak negatif dari aliran masuk modal asing dan ketidakstabilan perekonomian global terhadap perekonomian domestik dan sistem keuangan nasional.
3. Menjaga stabilitas nilai tukar dan diarahkan agar sesuai dengan kondisi fundamentalnya.
4. Menjaga stabilitas harga, khususnya harga makanan pokok yang mudah bergejolak antara lain melalui percepatan pelaksanaan Sistem Logistik Nasional, yang memperlancar distribusi barang dan jasa melalui pengembangan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara, pergudangan, sistem informasi dan komunikasi, serta harmonisasi peraturan yang terkait dengan distribusi tersebut.
5. Mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik di pusat (Kementerian/Lembaga terkait serta asosiasi produsen/pedagang dan asosiasi konsumen) maupun di daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perkembangan harga bahan pokok secara intensif, dengan meningkatkan peran aktif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
6. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi untuk mengatasi masalah struktural, seperti percepatan pembangunan infrastruktur serta reformasi regulasi/kebijakan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, baik di pusat (Kementerian/Lembaga) maupun daerah (provinsi dan kabupaten/kota).
7. Meningkatkan kualitas kelembagaan termasuk dunia usaha dan masyarakat dimana kenaikan harga yang rendah dan wajar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.
8. Melakukan kajian-kajian di bidang ketahanan pangan/pertanian dan ketahanan energi dalam rangka optimalisasi subsidi pertanian dan energi,

agar dapat dihasilkan kebijakan harga barang/jasa yang diatur pemerintah dengan tepat waktu.

3.3.6 Peningkatan Investasi

Arah kebijakan pembangunan investasi 2014 adalah: penyebaran wilayah investasi yang lebih berimbang dengan mendorong berkembangnya potensi investasi daerah.

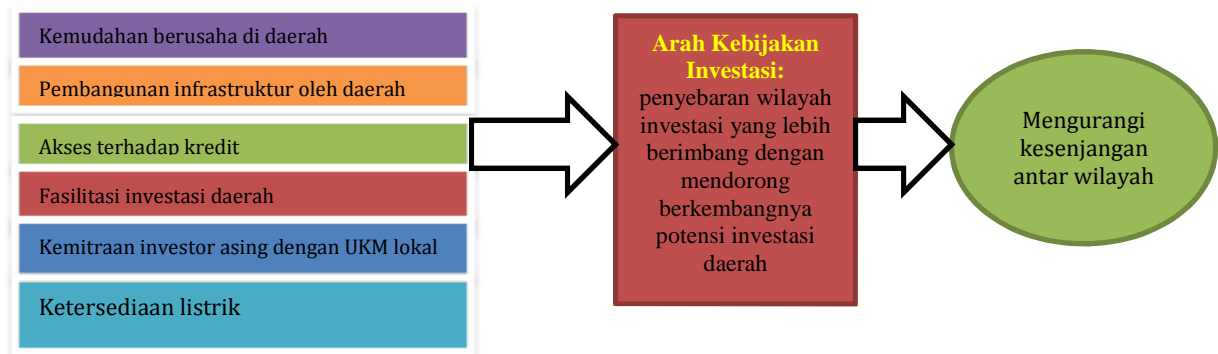
Strategi untuk melaksanakan arah kebijakan dan mencapai sasaran investasi dan perekonomian Indonesia tahun 2014 adalah: (i) mendorong seluruh provinsi dan kabupaten/kota melakukan kemudahan investasi dan berusaha, terutama melalui: penyederhanaan prosedur berusaha dengan membangun dan menyempurnakan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), penghapusan biaya perijinan tidak resmi, dan penerapan sistem pelayanan informasi dan perijinan investasi secara elektronik (SPIPISE) pada PTSP; (ii) mendorong peran daerah dalam pembangunan infrastruktur di wilayahnya dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui KPS; (iii) meningkatkan akses investor dalam negeri terhadap kredit, yang antara lain dengan mendorong segera beroperannya sistem informasi kredit bagi debitur; (iv) meningkatkan fasilitasi investasi daerah, antara lain melalui: peningkatan promosi investasi daerah di dalam dan luar negeri, penyempurnaan peta potensi investasi daerah, dan pemberian insentif investasi oleh pemerintah daerah; (v) mendorong kemitraan antara investor asing dengan usaha kecil menengah lokal; serta (vi) memfasilitasi penyediaan energi/listrik melalui kerjasama antara investor dengan pelaku bisnis energi/listrik swasta.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas Peningkatan Investasi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Peningkatan Harmonisasi Kebijakan dan Penyederhanaan Perijinan Investasi

Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Investasi

GAMBAR 3.17
KERANGKA KEBIJAKAN INVESTASI



3.3.7 Peningkatan Ekspor

Peran ekspor, terutama ekspor nonmigas, dalam Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih akan mendapat perhatian untuk terus ditingkatkan. Untuk mendorong upaya tersebut, arah kebijakan perdagangan luar negeri adalah peningkatan ekspor produk yang bernilai tambah lebih tinggi dengan upaya diversifikasi pasar tujuan ekspor yang lebih berkelanjutan.

Strategi yang akan dijalankan untuk mencapai arah kebijakan tersebut diatas adalah sebagai berikut: (i) **Meningkatkan penetrasi produk ekspor di pasar ekspor non-tradisional**, terutama negara-negara Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah dan Eropa Timur, yang antara lain melalui: optimalisasi skema kerjasama perdagangan internasional terutama secara bilateral, memaksimalkan peran atase perdagangan dan kantor promosi perdagangan di negara-negara tersebut, serta mengoptimalkan upaya promosi terpadu yang perlu difokuskan pada negara-negara tujuan ekspor non tradisional; (ii) **mempertahankan pangsa pasar ekspor** di pasar ekspor tradisional (Amerika, Jepang, Eropa) dan pasar utama ekspor kawasan Asia (ASEAN, China, dan India); (iii) **melanjutkan upaya peningkatan ekspor produk hilir**, terutama produk mineral dan pertambangan agar dapat menghasilkan nilai tambah yang lebih besar untuk perekonomian nasional; (iv) **melanjutkan upaya pengawasan dan pengelolaan impor** bagi produk-produk yang berpotensi menurunkan daya saing produk domestik di

pasar dalam negeri dan membahayakan konsumen, yang antara lain melalui mekanisme: penerapan kebijakan pengamanan perdagangan, *safeguards*, dan anti dumping, serta peningkatan pemanfaatan kesepakatan kerjasama perdagangan ASEAN dan ASEAN+1; (v) **meningkatkan kapasitas eksportir dan calon eksportir** melalui pelatihan dan fasilitasi pembiayaan ekspor.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di atas, fokus prioritas Peningkatan Ekspor pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Peningkatan Diversifikasi Pasar Tujuan Ekspor
- Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Peningkatan Kualitas dan Keberagaman Produk Ekspor
- Fokus Prioritas 3: Fokus Prioritas Peningkatan Fasilitasi Ekspor.

GAMBAR 3.18
KERANGKA KEBIJAKAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI



3.3.8 Daya Beli Masyarakat

Upaya menjaga dan meningkatkan daya beli masyarakat ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat. Adapun arah kebijakan untuk peningkatan daya beli masyarakat adalah dilakukan melalui mekanisme kebijakan moneter dan penerapan kebijakan perdagangan dalam negeri yang lebih konsisten.

Untuk itu, arah kebijakan perdagangan dalam negeri di tahun 2014 adalah memperkuat rantai pasok dan ketersediaan barang domestik terutama bahan kebutuhan pokok yang didukung oleh iklim persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang lebih baik.

Penjelasan secara terperinci mengenai upaya menjaga stabilitas harga dapat dilihat pada prioritas bidang stabilitas moneter (harga), sedangkan program pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial dapat dilihat secara lebih terperinci pada Bab I mengenai Pengarusutamaan dan Isu Lintas Bidang.

Adapun strategi yang akan dilakukan pada perdagangan dalam negeri untuk tahun 2014 adalah: (i) meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan informasi dan sarana distribusi perdagangan sehingga stabilitas harga dan ketersediaan barang, terutama bahan pokok dapat terjaga; (ii) meningkatkan arus perdagangan antar wilayah untuk membantu pengurangan kesenjangan antar wilayah; (iii) melanjutkan penataan usaha perdagangan dan pengembangan usaha baru, yang mencakup: penataan usaha ritel modern dan bisnis waralaba, serta pengembangan usaha dagang kecil dan menengah; (iv) mendorong penggunaan produk dalam negeri; (v) melanjutkan upaya perlindungan konsumen terutama dengan penerapan aturan standar, pengukuran dan kualitas barang beredar; (vi) **menekan perilaku usaha anti persaingan** terutama sektor komoditas pangan, yang antara lain melalui: peningkatan pengawasan terhadap pelaku usaha baik melalui upaya pencegahan atau penegakan hukum yang akan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat umum dan petani serta peningkatan harmonisasi kebijakan seperti melalui penerapan manual kebijakan persaingan (*competition checklist*) dalam rangka mencegah diberlakukannya kebijakan yang memfasilitasi perilaku anti-persaingan.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan di

atas, fokus prioritas Peningkatan Daya Beli Masyarakat pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Fokus Prioritas 1: Fokus Prioritas Peningkatan Jaringan Distribusi Untuk Menunjang Pengembangan Logistik Nasional

Fokus Prioritas 2: Fokus Prioritas Penguatan Pasar Domestik dan Efisiensi Pasar Komoditi

Fokus Prioritas 3: Fokus Prioritas Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Iklim Usaha Perdagangan.

GAMBAR 3.19
KERANGKA KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI



3.3.9 Revitalisasi Industri

Pada tahun 2014, pertumbuhan sektor industri akan dipercepat agar kinerja ekonomi tetap terjaga dalam menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu perlu adanya fokus pengembangan subsektor industri sehingga kebijakan dapat berdampak optimal pada pencapaian pembangunan industri.

Arah kebijakan pembangunan sektor industri dan fokus pengembangannya adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan industri pengolah sumber daya alam dan penyedia utama lapangan kerja, dengan Fokus Prioritas pengembangan industri berupa pertumbuhan industri dibawah ini:
 - a. Tumbuhnya industri berbasis hasil tambang:
 - industri aluminium (pasca pembelian kembali PT Inalum) di Kuala Tanjung – Sumut dan industri alumina di Kalbar;
 - industri besi baja di Kulonprogo - DIY dan Batulicin - Kalsel;
 - industri berbasis nikel, tembaga, batubara, petrokimia, dan migas
 - b. Tumbuhnya industri pengolah hasil pertanian :
 - industri minyak sawit di KEK Sei Mangke - Sumut, dan Dumai – Riau;
 - industri pengolah karet, coklat, bubur kayu dan kertas;
 - industri gula berbasis tebu, serta industri minyak dan lemak nabati.
 - c. Tumbuhnya industri berbasis SDM dan untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik:
 - tekstil, pakaian jadi, alas kaki;
 - komponen elektronika;
 - komponen dan aksesoris kendaraan bermotor, dan galangan kapal;
 - alat rumah tangga, furnitur dan rotan;
 - industri obat dan alat kesehatan.
2. Pembangunan industri kecil dan menengah (IKM) yang kuat, sehat, dan mandiri dengan Fokus Prioritas pengembangan industri berupa tumbuhnya industri kecil dan menengah melalui peningkatan populasi IKM, pengembangan inovasi pada IKM, penumbuhan industri kreatif dan pengembangan IKM sebagai pemasok bagi industri besar.

Selanjutnya kondisi yang memungkinkan perlu diciptakan agar mendorong pelaku usaha untuk meningkatkan investasi untuk memperluas kapasitas produksi dan peningkatan produktifitas industri. Untuk itu harus didukung strategi sebagai berikut:

1. Dukungan infrastruktur produksi dan distribusi yang lebih memadai, seperti: (i) peningkatan kualitas jalan

- dan rel KA dari sentra produksi ke pabrik pengolahan; (ii) perluasan kapasitas pelabuhan laut (Belawan, Makasar, dan Bitung); (iii) peningkatan kapasitas pembangkit dan jaringan listrik; dan (iv) pengurangan 50 persen PPh selama 5 tahun dan pembebasan PPh atas pembebasan lahan untuk kawasan industri bagi perusahaan yang membangun infrastruktur (kawasan industri);
2. Kepastian regulasi dan efektifitas layanan birokrasi, seperti: (i) penghapusan Perda yang menghambat; (ii) penyerdehanaan prosedur visa dan izin kerja bagi tenaga asing; dan (iii) peningkatan kualitas layanan kepabeanan;
 3. Dukungan ketersediaan bahan baku, seperti: (i) terutama gas dan bahan mineral lainnya; (ii) penindakan atas penyelundupan bahan mentah (kayu, batubara bijih timah, dan lainnya); dan (iii) rasionalisasi tarif keluar;
 4. Dukungan ketersediaan energi, seperti: (i) penerapan 40 persen *domestic market obligation* (DMO) batubara pada harga keekonomiaannya; (ii) gas sebagai sumber energi; dan (iii) penyediaan tenaga listrik mandiri oleh swasta;
 5. Peningkatan akses sumber pembiayaan, seperti: (i) peningkatan portofolio kredit ke sektor industri; (ii) penurunan suku bunga kredit investasi; dan (iii) fasilitasi perbankan yang membolehkan mesin produksi sebagai agunan kredit investasi;
 6. Dukungan SDM industrial yang andal, seperti: penambahan lembaga pendidikan vokasi sesuai kebutuhan industri;
 7. Dukungan teknologi produksi, seperti: penerapan deduksi pajak terhadap aktivitas dan komersialisasi produk litbang;
 8. Dukungan akses ke pasar domestik dan ekspor, seperti: (i) Preferensi harga pada produk lokal dibanding produk impor untuk pengadaan pemerintah dan BUMN; (ii) pengurangan biaya penanganan terminal peti kemas; dan (iii) standardisasi produk industri;
 9. Dukungan pada peningkatan peran IKM, khususnya untuk mendorong keterkaitan antar industri, pembiayaan usaha, teknologi, dan pemasaran.

3.3.10 Peningkatan Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pembangunan kepariwisataan dan pembangunan ekonomi kreatif pada tahun 2014 diarahkan untuk mendorong peningkatan penerimaan devisa dan peningkatan nilai tambah produk-produk ekonomi kreatif melalui penguatan pariwisata berbasis masyarakat dan peningkatan kualitas produk-produk kreatif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Adapun strategi untuk mencapai sasaran pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan destinasi pariwisata nasional melalui penataan dan penguatan manajemen dan tata kelola destinasi pariwisata, peningkatan daya tarik wisata alam, bahari dan budaya termasuk daya tarik pariwisata di pulau-pulau terdepan dan wilayah perbatasan yang mempunyai potensi pariwisata;
2. Mendorong dan memfasilitasi perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata; melakukan konsolidasi akses transportasi dalam dan luar negeri; dan mengembangkan desa wisata melalui PNPM Mandiri;
3. Mengembangkan usaha, industri dan investasi pariwisata, terutama yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja antara lain melalui penciptaan iklim investasi pariwisata yang kondusif dengan penataan kebijakan usaha pariwisata, penyusunan dan penerapan pedoman sertifikasi usaha, dan pengaturan usaha;
4. Mengembangkan pemasaran dan promosi pariwisata dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara sebesar 20 persen secara bertahap dalam 5 (lima) tahun terutama dengan mempromosikan ke 10 destinasi pariwisata Indonesia.
5. Mengembangkan sumber daya pariwisata dengan mendorong peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal untuk mencapai tingkat mutu pelayanan dan pengelolaan keramahtamahan yang kompetitif di kawasan Asia; pengembangan dan penguatan kelembagaan

- kepariwisataan, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan;
6. Meningkatkan industri berbasis kreatifitas yang mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar dalam dan luar negeri melalui peningkatan daya tarik dan kualitas produk dan peningkatan efisiensi dan produktivitas industri, peningkatan inovasi bermuatan lokal; mendorong dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana yang memadai;
 7. Meningkatkan usaha-usaha berbasis kreatifitas terutama yang berorientasi pada penyerapan tenaga kerja dan pengentasan kemiskinan melalui penciptaan iklim yang kondusif bagi investasi ekonomi kreatif termasuk penegakan terhadap hak kekayaan intelektual;
 8. Mengembangkan pemasaran produk dan jasa kreatif unggulan melalui saluran promosi terpadu dan berkesinambungan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta responsif terhadap pasar;
 9. Mengembangkan sumber daya kreatif melalui upaya mendorong peningkatan profesionalisme pelaku sektor ekonomi kreatif dan mendorong peningkatan daya cipta dan daya inovasi baru dengan memperkuat lembaga penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif; dan
 10. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap produk dan karya kreatif melalui peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ekonomi kreatif dan peningkatan konsumsi produk dan jasa lokal berbasis kreatifitas.

Kebijakan dan strategi tersebut di atas didukung oleh peningkatan koordinasi lintas sektor pada tataran kebijakan, program, dan kegiatan kepariwisataan, terutama di bidang (i) pelayanan kepabeanan keimigrasian, dan karantina; (ii) keamanan dan ketertiban; (iii) prasarana umum yang mencakup jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi, dan kesehatan lingkungan; (iv) transportasi darat, laut, dan udara; dan (v) bidang promosi dan kerjasama luar negeri; (vi) koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; dan (vii) penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan ekonomi kreatif.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif tahun 2014, fokus prioritas Peningkatan Daya Saing Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah sebagai berikut:

Fokus Prioritas 1 : Fokus Prioritas Pengembangan Pariwisata

Fokus Prioritas 2 : Fokus Prioritas Pengembangan Ekonomi Kreatif

3.3.11 Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

Pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2014 diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas usaha mikro dalam rangka memperkuat usaha-usaha masyarakat, dan untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UKM untuk menjadi usaha yang berdaya saing tinggi. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan peran koperasi dan UMKM dalam pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan daya saing perekonomian nasional.

Arah kebijakan pembangunan pemberdayaan koperasi dan UMKM pada tahun 2014 merupakan rangkaian arah kebijakan yang berkelanjutan sesuai RPJMN 2010-2014 dan dilengkapi dengan beberapa arah kebijakan untuk menjawab kebutuhan terkini dan dinamika perubahan pasar sebagai berikut:

1. Meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi koperasi dan UMKM, yang mencakup penataan peraturan perundang-undangan di bidang koperasi dan UMKM, serta pengembangan, pengendalian dan pengawasan koperasi;
2. Mengembangkan produk dan pemasaran bagi koperasi dan UMKM, yang mencakup penyediaan dukungan pemasaran, produksi, kemitraan, investasi dan pengembangan produk unggulan;
3. Meningkatkan daya saing sumber daya manusia (SDM) koperasi dan UMKM, yang mencakup pemasyarakatan dan pengembangan kewirausahaan, kapasitas dan kompetensi SDM, penyediaan layanan pengembangan bisnis, revitalisasi pendidikan dan pelatihan koperasi dan UMKM, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan SDM koperasi dan UMKM;
4. Meningkatkan akses usaha mikro dan kecil kepada sumberdaya produktif, yang meliputi peningkatan akses permodalan, pengembangan dan pengendalian koperasi simpan pinjam yang disertai dengan peningkatan kapasitas dan kompetensi pengelolanya, pengembangan jasa keuangan bagi koperasi dan UMKM, perluasan KUR; dan
5. Memperkuat kelembagaan koperasi, yang mencakup peningkatan kualitas organisasi dan badan hukum

koperasi, ketatalaksanaan koperasi, dan keanggotaan koperasi, serta penguatan kapasitas koperasi sesuai dengan amanat Undang-undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.

3.3.12 Stabilitas Sektor Keuangan

Strategi dan arah kebijakan utama perbankan ke depan, dapat dikelompokkan dalam tiga koridor, yaitu:

- 1) Pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, yang diimplementasikan dengan memperkuat ketentuan makroprudensial. Kebijakan ini, bersama-sama dengan kebijakan suku bunga dan nilai tukar, merupakan bagian dari bauran kebijakan makroprudensial yang terkait dengan prinsip kehati-hatian perbankan. Protokol manajemen krisis BI telah berintegrasi di bawah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK). Forum ini perlu dipayungi oleh Undang-undang Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK), agar dapat menanggulangi krisis keuangan dengan lebih baik.

Kebijakan makroprudensial akan memperkuat fungsi dan peran aktif BI sebagai salah satu otoritas pengelola krisis moneter/perbankan yang membahayakan sistem moneter/perbankan secara keseluruhan. Penguatan fungsi ini sangat tepat waktu pasca disahkannya UU Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dimana fungsi pengaturan dan pengawasan bank akan beralih kepada OJK pada akhir tahun 2013.

Penguatan ketahanan dan daya saing perbankan ditempuh melalui: (i) penataan struktur kepemilikan bank, dan (ii) pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank berdasarkan modal (inti), bertujuan untuk meningkatkan tata kelola dan kesehatan bank. Sementara itu, pengaturan penyesuaian kegiatan usaha dan perluasan jaringan kantor bank, sangat diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing perbankan. Perbankan juga didorong berkontribusi dalam pembangunan ekonomi, di wilayah yang selama ini kurang terlayani. Selain itu, juga perlu dilengkapi dengan penyempurnaan aturan kepemilikan tunggal pada perbankan Indonesia.

Dalam ketentuan mengenai Pemegang Saham Pengendali (PSP) akan diatur pembatasan pemilikan lebih dari satu bank dengan memberikan opsi bagi PSP untuk melakukan penggabungan anak-anak perusahaan/bank-banknya, membentuk perusahaan induk bagi PSP yang

berkedudukan di luar negeri atau membentuk perusahaan induk bagi PSP yang berbadan hukum di Indonesia.

- 2) Kebijakan penguatan fungsi intermediasi. Diupayakan peningkatan akses layanan pemberian kredit/.pembiayaan UMKM oleh bank umum. Perluasan akses layanan keuangan dilakukan pula tanpa melalui kantor bank atau dilakukan melalui cara non-konvensional, melalui pemanfaatan teknologi informasi, dan kerjasama keagenan (*branchless banking*). Secara lebih rinci, intermediasi perbankan didorong melalui berbagai langkah seperti: (i) perluasan akses perbankan (*financial inclusion*) kepada masyarakat khususnya layanan perbankan berbiaya rendah bagi masyarakat perdesaan, termasuk peningkatan kualitas program Tabunganku, edukasi keuangan, pelaksanaan survey pemahaman terhadap pelayanan perbankan dan pelaksanaan penyusunan nomor identitas keuangan nasabah (*financial identity number*) (ii) fasilitasi intermediasi untuk mendukung pembiayaan di berbagai sektor potensial bekerjasama dengan berbagai instansi-pemerintah.

Sedangkan, arah kebijakan pengembangan lembaga keuangan non bank termasuk pasar modal dan lembaga keuangan mikro (LKM) antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perkuatan kualitas manajemen dan operasional lembaga jasa keuangan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kemudahan bertransaksi serta pelaporan di bidang pasar modal/lembaga jasa keuangan non bank;
2. Pengembangan lembaga keuangan non bank sebagai sumber pembiayaan pembangunan termasuk pengembangan sistem keuangan syariah dan lembaga keuangan mikro (LKM);
3. Perkuatan koordinasi dan kerjasama dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait lembaga keuangan mikro dalam rangka memperluas cakupan pelayanan lembaga jasa keuangan terutama untuk sektor UMKM dan masyarakat miskin;
4. Pengembangan aspek legal (peraturan pemerintah) dan infrastruktur LKM.

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan di atas maka untuk

3.3.13 Daya Saing Ketenagakerjaan

Stabilitas Sektor Keuangan diupayakan: Fokus Prioritas Kesinambungan Ketahanan Sektor Keuangan, Mitigasi Resiko Sistemik dan Peningkatan Daya Saing Sektor Keuangan.

Langkah-langkah yang diperlukan dalam peningkatan daya saing ketenagakerjaan adalah:

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Pekerja

- (a) Penyempurnaan pelaksanaan uji kompetensi dan memperbaiki peraturan yang dapat mempermudah penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja;
- (b) Memperbaiki sistem sertifikasi kompetensi dan memberikan kewenangan kepada lembaga sertifikasi dengan meningkatkan sumber daya yang memadai serta keleluasaan dalam menjalankan perannya;
- (c) Mengembangkan pedoman dan prosedur sertifikasi kompetensi dan pengembangan materi uji kompetensi.

Erat kaitannya dengan penyiapan lembaga pelatihan, kualitas instruktur/tenaga kepelatihan juga harus memenuhi kualifikasi terhadap sesuatu yang dikerjakan untuk memperbaiki mutu pelatihan kerja, serta perbaikan kurikulum, baik secara kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kualitas instruktur dapat dilakukan dengan penilaian kebutuhan pelatihan (*training need assesment*), agar diketahui dengan jelas kebutuhan yang diinginkan dalam meningkatkan profesionalismenya. Proses ini sangat diperlukan untuk mencapai keluaran (*output*) dengan legitimasi sertifikat atau ijazah yang telah dilakukan dengan benar.

2. Perbaikan iklim Ketenagakerjaan

Kebijakan diarahkan kepada: (a) Pengembangan pasar tenaga kerja yang dapat mempengaruhi terbentuknya sistim dan mekanisme hubungan industrial yang kondusif untuk menjaga ketenangan bekerja dan berusaha; (b) Penerapan kebijakan pengupahan dan penerimaan-pemberhentian pekerja (*hiring-firing*) kearah suatu sistim yang dapat menerima fleksibilitas, dalam rangka memperbaiki efisiensi pasar tenaga kerja.

Langkah-langkah dan strategi yang dilakukan antara lain: (i) meningkatkan kemampuan serikat pekerja dan pengusaha dalam berunding, (ii) memperkuat peran dan fungsi lembaga bipartit sebagai forum komunikasi yang

efektif, dan (iii) memperluas forum-forum dialog secara tripartit di fokuskan kepada daerah yang rawan permasalahan hubungan industrial.

3. Peningkatan Fasilitasi dan Perlindungan untuk Mendukung Mobilitas Tenaga Kerja

Kebijakan pelayanan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI), diarahkan pada peningkatan pelayanan kepada TKI dengan penekanan kepada aspek perlindungan pekerja, baik di dalam maupun di luar negeri. Langkah strategis dalam rangka memberikan perlindungan TKI yaitu:

- (a) Menyusun peraturan pelaksanaan atau peraturan turunan dari undang-undang penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri yang telah disempurnakan;
- (b) Meningkatkan kapasitas aparat pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan bagi calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri secara merata untuk memastikan calon TKI memperoleh pelayanan yang baik;
- (c) Memperluas jangkauan informasi pasar tenaga kerja luar negeri bagi calon TKI yang akan bekerja hingga tingkat kelurahan; dan
- (d) Melaksanakan rekrutmen calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri menggunakan sistem “online” yang telah terintegrasi dengan NIK (SIM-TKI), dan
- (e) Mengupayakan agar kebijakan asuransi dapat memberikan perlindungan bagi TKI.

Dalam rangka memaksimalkan perlindungan TKI di luar negeri fokus kebijakan diarahkan kepada: (1) Bantuan hukum yang cepat, tepat, dan efektif, bagi TKI yang mengalami permasalahan hukum di negara penempatan, (2) melanjutkan upaya membangun kesepakatan dengan negara penempatan, melalui diplomasi untuk memperjuangkan perlindungan TKI di tingkat regional dan multilateral, seperti misalnya di ASEAN, PBB dan G20, (3) memberikan bantuan hukum dan akses kekonsuleran, melalui Perwakilan RI dengan mengawal proses hukum agar memperoleh keringanan hukum dan menghindari jatuhnya hukuman mati; (4) penerapan prosedur yang sesuai standar (SOP) dan pembentukan unit kerja khusus dalam rangka menyelesaikan kasus-kasus yang menimpa TKI.

3.3.14 Jaminan Sosial

Dengan sasaran prioritas jaminan sosial yang sejalan dengan RPJMN 2010-2014, dan berkaitan dengan substansi Peta Jalan (*Road Map*) Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2012-2019 untuk mencapai cakupan menyeluruh (*universal coverage*) jaminan kesehatan, maka kebijakan pembangunan jaminan sosial antara lain diarahkan melalui langkah-langkah berikut:

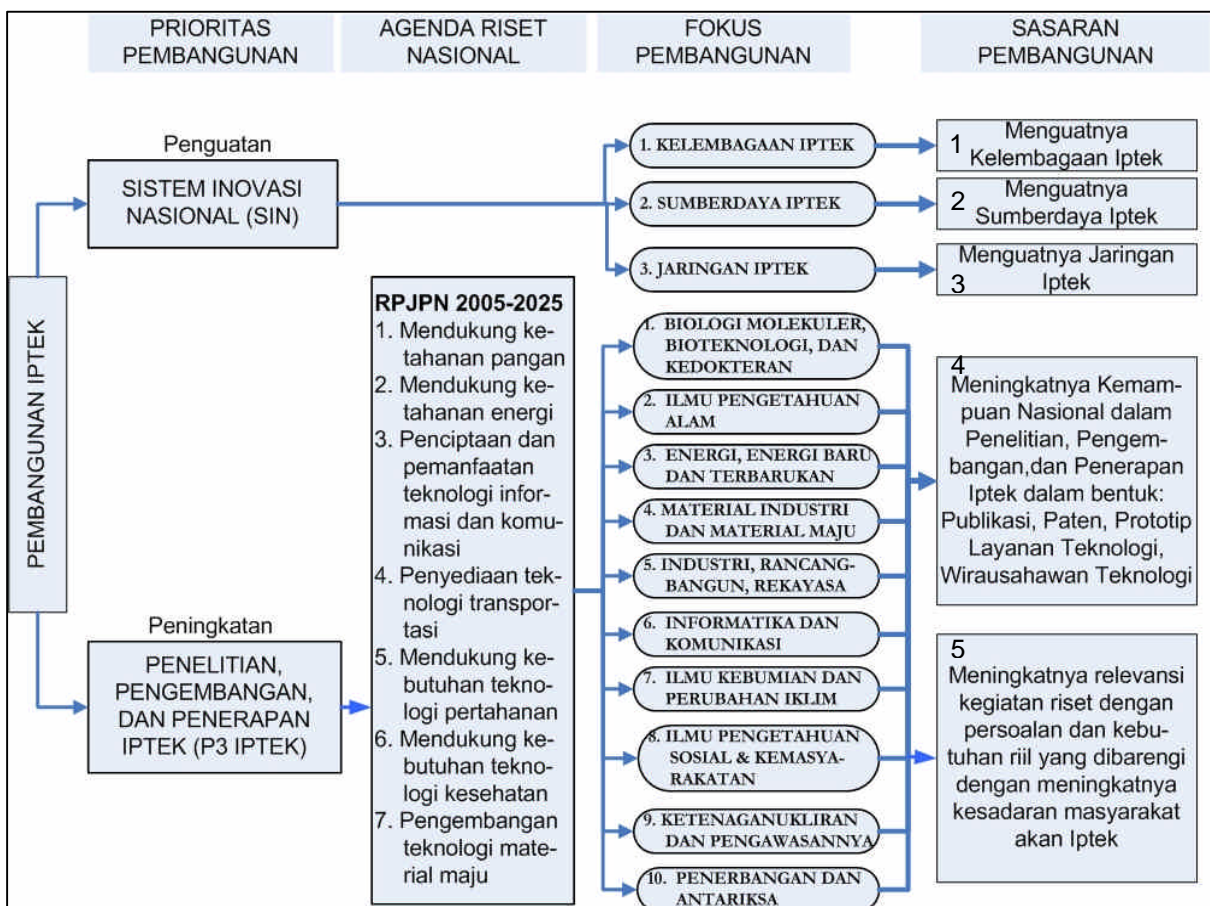
1. Melengkapi perangkat hukum sebagai dasar pelaksanaan SJSN dan mempercepat penyelesaian proses penyusunan peraturan teknis dalam berbagai forum di dalam kelompok kerja penyiapan pelaksanaan BPJS yang telah terbentuk sebelumnya;
2. Mengidentifikasi dan menginventarisasi ketentuan-ketentuan terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan di berbagai instansi dan melaksanakan langkah-langkah transformasi yang berintegrasi ke BPJS Kesehatan sesuai dengan substansi Peta Jalan;
3. Membangun basis data peserta jaminan kesehatan sejalan dengan langkah yang diatur dalam Peta Jalan serta pemanfaatan Basis Data Terpadu dan infrastruktur pendukung sistem manajemen informasi;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan secara bertahap dengan prioritas antara lain pemenuhan ketersediaan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan termasuk obat, perlengkapan medis, dan tenaga kesehatan berikut rancang bangun sistem monitoring dan evaluasi jaminan kesehatan nasional yang dilengkapi dengan berbagai indikator pelaksanaan dan dampak;
5. Melaksanakan harmonisasi regulasi di bidang jaminan sosial diantaranya dengan UU Dana Pensiun, UU Jamsostek, UU Pokok Kepegawaian, UU Pemerintah Daerah, UU Ketenagakerjaan, UU Kesejahteraan Sosial dan UU Penanganan Fakir Miskin;
6. Mengembangkan konsep dan desain penyelenggaraan jaminan ketenagakerjaan secara detail dan strategis yang disusun dalam dokumen peta jalan menuju pembentukan BPJS Ketenagakerjaan; dan
7. Mengembangkan strategi pemasaran sosial dan edukasi

masyarakat yang efektif untuk memperkenalkan konsep asuransi yang menjunjung tinggi prinsip gotong-royong dengan pembangunan sistem pengaduan dan pengawasan secara komprehensif.

BAB 4 BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dilaksanakan dengan kerangka pikir sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. diarahkan pada (1) penguatan sistem inovasi nasional (SIN) agar mampu menjadi wahana pembangunan iptek yang efektif dan efisien; serta (2) peningkatan dukungan penelitian, pengembangan dan penerapan iptek bagi pembangunan nasional.

**GAMBAR 4.1
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN IPTEK**



4.1 Kondisi Umum

4.1.1 Sistem Inovasi Nasional (SIN)

Dalam rangka meningkatkan penguatan kebijakan sistem inovasi, dilaksanakan pembangunan kelembagaan, sumber daya, dan jaringan Iptek, maka pada tanggal 25 April 2012, Kementerian Riset

dan Teknologi dan Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan peraturan bersama tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Peraturan ini bertujuan untuk mengatur serta memperkuat koordinasi pengembangan SIDa agar kegiatan inovasi di tingkat daerah terintegrasi dengan Sistem Inovasi Nasional (SINas).

Sedangkan untuk memperkuat sumberdaya IPTEK, disediakan beasiswa pascasarjana untuk jenjang magister (S2) dan doktoral (S3), dan program non-gelar berupa training, pemagangan riset, kursus di dalam dan luar negeri. Di samping itu juga disediakan dukungan pembiayaan untuk publikasi ilmiah, pendaftaran konferensi/ seminar dan pelatihan untuk karyasiswa.

Pada tahun 2011, hasil-hasil yang dicapai adalah Program Pendidikan Bergelar yaitu: (1) telah lulus 7 orang program S3 dan 6 orang program S2; (2) jumlah karyasiswa yang kuliah S2 dan S3 Dalam Negeri Angkatan Tahun 2011 sebanyak 70 orang termasuk yang berasal dari berbagai institusi; (3) jumlah karyasiswa yang kuliah S2 dan S3 di Luar Negeri sebanyak 11 orang yang tersebar di berbagai negara diantaranya Jerman, Cina, Turki, dan Jepang; (4) jumlah karyasiswa pascasarjana yang masih dibiayai sebanyak 334 orang di dalam maupun luar negeri.

Terkait dengan Program Pendidikan Non-Gelar telah dilaksanakan yaitu: (1) program pemagangan/training/kerjasama riset di luar negeri sebanyak 51 orang; (2) pelatihan intermediasor teknologi bekerjasama dengan BMBF Jerman sebanyak 30 orang; dan lain-lain.

Untuk meningkatkan jaringan Iptek, telah dilaksanakan program insentif dengan menyediakan dana untuk paket-paket riset unggulan. Pada tahun 2011, program insentif yang dilaksanakan meliputi 44 paket Riset Dasar, 78 paket Riset Terapan, 100 paket insentif Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi dan 80 paket insentif Percepatan Difusi dan Pemanfaatan Iptek. Diantara kegiatan insentif riset yang menghasilkan temuan baru (*academic excellence*) maupun yang berpotensi dan atau telah menghasilkan kemanfaatan ekonomi (*economic values*) dilaksanakan berupa 141 publikasi ilmiah, 28 draft paten, 111 prototipe, 2 merek dagang, 4 software, dan 7 model. Selain kegiatan insentif di atas, kegiatan penelitian di LPNK juga telah menghasilkan keluaran ilmiah berupa publikasi, prototipe dan HKI. Sampai bulan Juli, berhasil didaftarkan 12 paten dari 45 paten yang direncanakan pada tahun 2012.

Untuk menjembatani antara lembaga riset dan masyarakat pengguna dilaksanakan program intermediasor iptek yang hasilnya antara lain: a) komersialisasi inovasi alat penghancur jarum suntik yang sangat potensial digunakan oleh industri alat

kesehatan; b) aplikasi teknologi “Kedelai Plus” yang merupakan proses penambahan mikroba ke dalam benih kedelai yang dapat meningkatkan produktivitas kedelai; c) aplikasi komersial akustik-*Soundproof Generator* hasil litbang BPPT di salah satu perusahaan swasta; d) implementasi teknologi pembibitan sapi unggul di Indonesia yang melibatkan Puslit Bioteknologi LIPI dan pihak swasta/investor; e) biskuit fungsional berbahan dasar tepung ikan lele hasil riset dari Institut Pertanian Bogor.

Selanjutnya, kegiatan-kegiatan difusi iptek yang bersifat Spesifik Lokasi dilaksanakan dengan tujuan untuk: (1) membentuk dan memperkuat jaringan antarlembaga penghasil dan pengguna iptek di daerah; (2) memberdayakan lembaga litbang khususnya LPNK Ristek dan Lembaga Litbang Daerah; (3) memberikan solusi permasalahan teknologi yang dihadapi oleh daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah; (4) meningkatkan kemampuan SDM Iptek di daerah melalui penguatan difusi dan diseminasi hasil litbang; serta (5) meningkatkan integrasi lembaga litbangyasa dengan dunia usaha. Pada tahun 2011 telah didiseminasikan hasil-hasil riset LPNK Ristek di 23 Kabupaten. Selain itu, pada tahun 2012, melalui kegiatan Iptekda telah dilakukan pembinaan bagi 130 UMKM di 20 propinsi.

4.1.2 Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek (P3 Iptek)

4.1.2.1 Bidang Iptek dalam Agenda Riset Nasional

Uraian lebih rinci dari hasil-hasil penelitian menurut tujuh bidang yang disajikan dalam bagian berikut ini.

(1) Bidang Biologi Molekuler, Bioteknologi, dan Kedokteran. Penelitian di bidang ini telah berhasil mengembangkan varietas dan penangkaran benih unggul untuk peningkatan produktivitas dan mutu tanaman pangan. Hasilnya antara lain telah dilepas Galur Mutan Padi Sawah OBS1703/PSJ sebagai Varietas Unggul dengan nama Inpari “Sidenuk”. Varietas Inpari Sidenuk ini memiliki warna daun dan batang hijau, bentuk gabah ramping bewarna kuning bersih dengan jumlah gabah per malai 175-200 butir, memiliki potensi hasil sebesar 9,1 ton/Ha GKG, relatif tahan wereng batang coklat biotipe 1, 2 dan 3 serta serangan penyakit seperti hawar daun bakteri patotipe III. Keberhasilan lain yang telah dicapai adalah melepas 2 (dua) jenis galur padi gogo yang toleran terhadap kekeringan, tahan penyakit blas serta toleran pada cekaman aluminium. Galur tersebut dikenal dengan nama INPAGO LIPI Go 1 dan 2.

Selain tanaman padi, juga telah dihasilkan varietas Sorghum Pahat yang memiliki keunggulan diantaranya produktivitas biji tertinggi 5,78 ton/Ha, kandungan karbohidrat 72,86 persen, protein 12,80 persen, lemak 2,42 persen, dan serat 2,21 persen

serta tanin yang rendah (0,012 persen), telah dihasilkan pula varietas kedelai biji besar "Mutiara-1", memiliki potensi hasil 4,1 ton/Ha, ukuran biji super besar, bobot 100 butir + 23,2 gram, warna biji kuning, tahan rebah, tahan penyakit karat daun, tahan penyakit bercak/hawar daun coklat, dan tahan hama penggerek pucuk, adaptif di lahan kering tegalan dan lahan sawah.

Untuk mendukung peternakan, telah berhasil dikembangkan pakan komplit, biosuplemen, serta teknologi reproduksi ternak ruminansia. Kegiatan penelitian dalam bidang peternakan sapi terus diupayakan melalui kegiatan penggemukan dengan cara penambahan biosuplemen pakan dan pembibitan sapi dengan penerapan inseminasi buatan (IB) *Sexing* dan Gertak Birahi.

Di bidang kedokteran dan kesehatan, didorong sinergi pengembangan riset vaksin untuk penyakit influenza H1N1 dan H5N1. Hasil lain yang diperoleh adalah teknik pasteurisasi radiasi, pengembangan dan uji coba prototipe telehealth, sistem pengkonversi citra digital fungsi faal tubuh, *skrining actinomycetes-symbion spons* laut sebagai produsen senyawa bioaktif anti infeksi, rancang bangun monitoring pasien, teknologi produksi khitin kualitas farmasetik, pemanfaatan cairan pleura dan sebagainya.

Selain itu, melalui Lembaga Biologi Molekuler Eijkman diperoleh 5 (lima) hasil penelitian unggulan di bidang kesehatan dan obat, yaitu Kelainan Sel Darah Merah, Infeksi Malaria dan Resistensi Obat, Keanekaragaman Genom dan Penyakit, Patogenesis Infeksi Virus Hepatitis B dan Identifikasi DNA Forensik. Hasil penelitian telah dipresentasikan pada konferensi di Biopolis, Singapore, 5-7 Oktober 2011 dan acara *5th International Eijkman Conference* di Jakarta, 8-10 November 2011.

Kemudian telah berhasil dilakukan beberapa penanganan penyakit melalui penelitian di bidang isotop dan radiasi, antara lain: (a) menguasai metode teknik deteksi resistensi bakteri *M. tuberculosis* (TBC) terhadap obat *rifampisin*, *isoniazid* (INH), *ethambutol* dan *pirazinamid* dengan menggunakan teknik biologi molekuler berbasis nuklir; (b) menguasai teknik kultur *in-vitro Plasmodium falciparum*, serta telah diperoleh dosis optimal iradiasi gamma untuk melemahkan *Plasmodium falciparum* untuk mendukung kegiatan pembuatan vaksin malaria dengan radiasi gamma; (c) menguasai teknik deteksi NOR dan Ki-67 sebagai biomarker radiosensitivitas sel untuk mengoptimalkan pengobatan dengan radioterapi/kemoterapi pada penderita kanker (serviks dan payudara); (d) menguasai teknik pengendalian Vektor Penyakit DBD (*Aedes aegypti*) dan Malaria (*Anopheles sp.*) dengan Teknologi Serangga Mandul (TSM); dll.

(2) **Bidang Ilmu Pengetahuan Alam.** Untuk melestarikan

dan mengembangkan sumberdaya hayati, telah dilakukan kegiatan eksplorasi dalam upaya menemukan jenis baru flora, fauna dan mikroba. Kegiatan ini dikombinasikan dengan upaya konservasi dan penggalian potensi keanekaragaman hayati sampai tingkat molekular, untuk mempercepat program konservasi dan pemanfaatannya secara berkelanjutan. Konservasi ex-situ dilakukan melalui pembangunan Kebun Raya sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011. Konservasi in-situ dilakukan dengan konsep Cagar Biosfer melalui program Man and Biosphere (MAB) – UNESCO. Tahun ini, Wakatobi berhasil ditetapkan sebagai Cagar Biosfer ke VIII oleh *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)*.

Dalam hal survey dan riset lingkungan kelautan, Penelitian Kerusakan Terumbu Karang dilakukan di lokasi yang telah menjalankan program rehabilitasi terumbu karang. Hasil penelitian menunjukkan telah terjadi kenaikanutupan terumbu karang di beberapa lokasi. Di Provinsi Riau (Batam, Bintan, Lingga, Natuna, Nias dan Mentawai), presentaseutupan karang mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu antara 0,08-5,64 persen. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian timur, kenaikanutupan karang terjadi di wilayah Pangkep, Raja Ampat, Sikka dan Selayar berkisar antar 3,15 – 7,19 persen.

(3) Bidang Energi Baru Terbarukan. Telah berhasil dibangun prototip energi listrik alternatif berupa gabungan (*hybrid*) antara kincir angin dan solar panel yang digunakan di Kepulauan Marampit Kab. Talaud, Sulawesi Utara yang merupakan wilayah terdepan dan terluar.

Kemudian telah dihasilkan prototip sistem uji untuk regulator tabung gas LPG dalam rangka mendukung program konversi minyak tanah ke gas. Selain itu dikembangkan pilot plant pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit dan pelepah untuk menghasilkan bioetanol berbasis *lignoselulosa*, serta dukungan penyebaran informasi bagi implementasi kebijakan konversi BBM ke BBG.

Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) Skala Kecil juga telah dikembangkan dengan uji coba berskala 3 MW telah selesai dibangun di lapangan panas bumi Kamojang (Jabar) yang dikelola oleh PT. Pertamina Geothermal Energy (PT. PGE). Di samping itu telah berhasil dikembangkan teknologi gasifikasi batubara/biomassa untuk memproduksi bahan bakar gas sintetis sebagai substitusi bahan bakar minyak bumi dan gas alam serta bahan baku untuk industri, menghasilkan prototipe gasifikasi batubara 200 KW untuk Pembangkit Listrik Tenaga Gas Batubara (PLTGB).

(4) Bidang Material Industri dan Material Maju. Telah dilakukan: a) ujicoba konsorsium riset penguatan SINas material maju pengembangan material silikon untuk PLTS; b) koordinasi antara akademisi, industri, dan pemerintah baik pusat maupun daerah selaku fasilitator di daerah melalui pemanfaatan dan pengembangan peran kelembagaan, sumber daya iptek dan jejaring terkait; c) Mendorong peningkatan pembiayaan dan SDM untuk kegiatan uji coba konsorsium riset material maju pengembangan material silikon untuk PLTS serta pembuatan model konsorsium riset material maju pengembangan baja; dan d) evaluasi regulasi untuk mengantisipasi perkembangan global.

(5) Industri, Rancang Bangun, dan Rekayasa. Telah dihasilkan beberapa teknologi antara lain pengembangan sistem kendali untuk propulsi kereta rel diesel-elektrik (KRDE)/kereta rel listrik (KRL), pengembangan transmisi manual untuk engine RUSNAS, riset dan rancang bangun struktur lokomotif, pengembangan metode analisis kesalahan manusia (*human error*) sebagai upaya menekan kecelakaan kereta api, pengembangan perangkat simulasi *maritime traffic*, pengembangan pembebanan lalu lintas untuk mendukung penerapan *intelligent transportation system (ITS)*, dan sebagainya.

Melalui program insentif riset, telah dihasilkan beberapa teknologi antara lain *self controlled erbium doped fiber amplifier* pada rentang C+L, pengembangan konten *middleware* interaktif pada sistem siaran TV, pembuatan *power amplifier* 10 KW, desain dan realisasi suatu prototipe *repeater fixed broadband wireless access WiMAX frequency division duplex* pada 3,3 GHz, pengembangan *motion capture*, agen sosial dan render farm mendukung industri kreatif nasional dan sebagainya. Disamping pengembangan Pemancar Siaran Televisi Digital standar DVB-T pada Frekuensi UHF, serta Pemanfaatan SMS dan jaringan komunikasi untuk pengiriman data, monitoring kualitas air tambak udang secara kontinu.

Pada tahun 2012, konsorsium peneliti dari berbagai lembaga telah berhasil mengembangkan *Computer Based Interlocking (CBI)* yang merupakan bagian inti dari sistem persinyalan listrik kereta api. Prototipe CBI tersebut telah digunakan di Stasiun Gumilir Cilacap.

Selain itu juga telah berhasil dikembangkan kendaraan angkutan berkapasitas 14 penumpang menggunakan sistem penggerak listrik. Di samping mobil listrik, pengembangan angkutan umum berbahan bakar gas (BBG) juga telah dilaksanakan yang bertujuan untuk mendapatkan desain yang paling optimal dari body *monocoque bis* BBG.

(6) Teknologi Informasi dan Informatika. Telah dicanangkan Program OSS *Start Up Capital* (SUCP) yaitu program kegiatan yang memberikan insentif kepada para pengembang software melalui kompetisi. Aplikasi tersebut antara lain yaitu SliMS (Sistem Pengelolaan Perpustakaan), AhadPOS (Sistem Akuntansi dan Kontrol Stok Praktis), Sistem Pengenal Wicara Indonesia (Lisan dan Perisalah), Game Engine, Nusantara View (Situs Pariwisata Masa Depan), dan SIJALU (Sistem Informasi Peternak Unggas Lokal Indonesia). Juga melakukan beberapa kegiatan sosialisasi dan disseminasi perangkat lunak berbasis Open Source beserta produk-produk OSS, pengembangan aplikasi dan migrasi ke OSS di berbagai instansi pemerintah pusat maupun daerah. Di samping itu dukungan pada Pengembangan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK) dan e-KTP telah berhasil meningkatkan kemampuan industri nasional yang meliputi faktor humanware, infoware, hardware, software dan netware.

(7) Bidang Ilmu Kebumihan dan Perubahan Iklim. Hasil penelitian dan pengembangan yang dicapai antara lain informasi kondisi lingkungan bawah permukaan cekungan Jakarta yang menunjukkan bahwa pengambilan air tanah yang berlebihan telah menyebabkan penurunan muka tanah dan air tanah. Kajian sesar aktif di wilayah Bandung khususnya patahan Lembang menunjukkan bahwa patahan itu sewaktu-waktu dapat bergerak kembali dan menghasilkan gempa bumi dengan *magnitude* setidaknya sebesar 6,8 Mw. Kemudian juga telah dikembangkan sistem jaringan GPS untuk penelitian gempa bumi dan sistem peringatan dini kepada masyarakat.

Kegiatan kerekayasaan dan upaya pengembangan teknologi mitigasi untuk mengurangi dampak bencana dalam suatu program “Teknologi Pengendalian dan Mitigasi Dampak Pemanasan Global (*Global Warming*) yang meliputi 4 (empat) gugus tugas (*Work Breakdown Structure, WBS*), yaitu: (1) WBS Neraca Gas Rumah Kaca (GRK) Indonesia; (2) WBS Teknologi Penangkapan dan Penyerapan CO₂ Secara Biologis; (3) WBS Mitigasi Dampak Pemanasan Global (Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC)); (4) WBS Monitoring dan Pemodelan Dampak Pemanasan Global. Pada WBS Neraca GRK telah dikaji 3 (tiga) hal yang terkait dengan emisi CO₂ yaitu: (1) Sistem MRV Nasional; (2) pengukuran karbon laut; dan (3) pemodelan Biogeokimia laut.

(8) Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Kemasyarakatan. LIPI telah melakukan beberapa kegiatan penelitian yang mengacu pada program strategis dan prioritas nasional, antara lain berupa kajian di bidang: regulasi ketenagakerjaan, kesejahteraan keluarga TKI, kemiskinan, sistem perekonomian, serta hubungan internasional.

(9) Bidang ketenaganukliran dan Pengawasannya. Untuk mendukung persiapan pembangunan PLTN, telah disusun Pedoman Infrastruktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional, meliputi Dokumen Pengembangan sistem kelistrikan opsi nuklir dan Dokumen konsep infrastruktur calon tapak PLTN, serta Pedoman Infrastruktur Dasar Pendukung Program Energi Nuklir Nasional. Di samping itu telah juga berhasil dikembangkan teknologi proses pembuatan paduan *zirkonium* (ZrNbMoGe) sebagai bahan struktur reaktor kelongsong bahan bakar dan bahan feritik (FeCrNi) untuk vesel, prototipe Mesin Berkas Elektron (MBE) untuk iradiasi lateks yang secara keseluruhan telah diinstal dan siap diuji fungsi, teknologi tracer untuk Industri, EOR dan Panasbumi, teknologi isotop alam untuk air tanah dan panas bumi yang cepat menentukan daerah recharge serta potensi air tanah dan panasbumi, dan menentukan suhu reservoir dan genesis fluida.

Dalam Bidang Pengawasan Iptek Nuklir, Dalam rangka memperkuat infrastruktur pengawasan terkait dengan kebijakan energi nuklir, telah dirumuskan berbagai peraturan terkait dengan keselamatan dan keamanan nuklir, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2012 tentang Keselamatan dan Keamanan Instalasi Nuklir untuk melengkapi PP Nomor 46 Tahun 2009 tentang Batas Pertanggungjawaban Kerugian Nuklir.

Sebagai upaya peningkatan kompetensi SDM pengawas PLTN telah dikirim personel untuk mengikuti pelatihan, On the Job Training (OJT) dan melaksanakan tugas belajar baik di dalam negeri (seperti di UGM, ITB dan UI) dan luar negeri (Korea Selatan, Perancis dan Amerika Serikat). Selain itu juga secara aktif mengikuti berbagai program pelatihan dan kegiatan capacity building lainnya bekerjasama dengan Badan Tenaga Atom Internasional (International Atomic Energy Agency, IAEA).

(10) Bidang Penerbangan Dan Antariksa. Telah berhasil dibuat perencanaan (road-mapping) roket peluru kendali, rancang-bangun, rekayasa dan peluncuran berbagai jenis Roket. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung program 1000 Roket Pertahanan. Dengan keberhasilan produksi roket dengan jangkauan 14, 20 dan 40 km, maka akan terus dikembangkan roket dengan jangkauan sampai 300 km. Roket jangkauan 300 km adalah merupakan derivat booster dari Roket Pengorbit Satelit (RPS) yang dikembangkan oleh LAPAN.

Melalui program insentif riset telah dihasilkan rancang bangun sistem kendali multivariable robust untuk Pesawat Udara Nir Awak (PUNA), rancang bangun dan uji Hidrodinamika (Resistance, Propulsion, dan Manuever Test) sistem propulsi dan sistem kontrol/kemudi kapal selam mini 22 m, pengembangan

sistem uji terbang roket kendali 3-dimensi berkemampuan 6 *degree of freedom*, implementasi sistem tracking obyek bergerak untuk penerapan ground station roket/UAV, pengembangan dan penerapan sistem navigasi pesawat udara nir awak, rancang bangun sistem radar FMCW S-Band untuk aplikasi long-range surveillance pada KRI dan sebagainya.

Pengembangan PUNA untuk berbagai keperluan pemantauan dari udara, seperti pemetaan, pemantauan kebakaran hutan, mitigasi bencana, pencarian korban hingga keperluan militer. Dengan pengendalian dari jarak jauh, juga dikembangkan PUNA Wulung, pengembangan sistem kendali 300 km dengan teknologi Aeronotika, Tele command Control, Motor Bakar dengan sistem Join Operation, pembinaan industri dan kemitraan.

4.1.2.2 Bidang-Bidang Tematik Lainnya

(1) Bidang Standardisasi, untuk mendukung produk nasional dalam menghadapi proses globalisasi, Indonesia terus berupaya secara maksimal meningkatkan pengembangan harmonisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) terhadap standar internasional, sebagai bagian strategi memperlancar perdagangan produk-produk Indonesia di pasar internasional. Dalam mengembangkan standar dan penilaian kesesuaian untuk mengurangi hambatan perdagangan Indonesia berperan aktif juga dalam organisasi di tingkat regional ASEAN, pasifik serta internasional.

Sampai saat ini, sebanyak 252 SNI telah diberlakukan secara wajib dalam bentuk regulasi teknis. Yaitu antara lain, ban kendaraan bermotor, peralatan listrik, pupuk, semen, baja, dan lain-lain. Dengan demikian SNI tersebut telah menjadi persyaratan yang wajib dipenuhi pelaku usaha dalam memproduksi produknya, baik produk dalam negeri maupun produk impor yang akan masuk ke Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa SNI berperan penting sebagai filter masuknya produk impor sub standar ke Indonesia sehingga dapat melindungi keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen, dan melindungi fungsi lingkungan hidup. Disisi lain, hal tersebut dapat mendorong pelaku usaha dalam negeri untuk menghasilkan produk yang bermutu dalam rangka meningkatkan daya saing produk nasional.

4.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

Secara umum masalah mendasar yang dihadapi meliputi kemampuan sisi litbang menyediakan solusi-solusi teknologi, kemampuan sisi pengguna dalam menyerap teknologi baru yang tersedia dan integrasi sisi penyedia dan pengguna teknologi belum

terbangun dengan baik. Dengan kata lain, masih perlu peningkatan sinergi iptek di antara penyedia dan pengguna.

Permasalahan di sisi litbang dalam menyediakan solusi teknologi ditandai dengan masih terbatasnya kemampuan sumber daya iptek (jumlah SDM, kepakaran, kekayaan intelektual, sarana dan prasarana serta anggaran), kelembagaan iptek (organisasi, regulasi, koordinasi, intermediasi), serta jaringan iptek.

Permasalahan di sisi pengguna ditandai dengan tingginya ketergantungan produk industri nasional terhadap impor bahan baku serta masih kurangnya minat dan kontribusi industri dalam pembangunan iptek nasional. Permasalahan yang menghambat sinergi sisi penyedia dan pengguna teknologi antara lain adalah: (1) lemahnya sinergi kebijakan iptek dalam hal integrasi program, koordinasi, harmonisasi kegiatan, dukungan anggaran, serta intermediasi, yang terjadi baik antarlembaga iptek, maupun antar penghasil iptek dengan pengguna iptek; (2) masih kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemangku kepentingan pembangunan iptek; dan (3) lemahnya sosialisasi regulasi yang telah ada.

Sasaran pembangunan Iptek tahun 2014 disusun menuju pencapaian sasaran RPJMN 2010-2014 sebagai berikut:

1. penguatan kelembagaan iptek yang ditunjukkan oleh peningkatan efisiensi dan produktivitas litbang;
2. pengembangan kapasitas sumber daya iptek yang semakin kuat dalam bentuk: peningkatan jumlah, dan kompetensi peneliti, peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penelitian, dan peningkatan kualitas dan output kegiatan penelitian;
3. pengembangan jaringan iptek yang semakin kuat dan luas dalam bentuk jalinan kerjasama antar sisi penyedia; dan antara sisi penyedia teknologi dengan sisi pengguna yang lebih intensif dan lebih produktif;
4. peningkatan kemampuan nasional dalam penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek, dalam bentuk publikasi di jurnal ilmiah internasional, paten, prototip, layanan teknologi bagi pengguna, serta meningkatnya kemampuan keteknikan nasional, serta tumbuhnya wirausahawan inovatif berbasis pengetahuan dan teknologi;
5. peningkatan pendayagunaan iptek dengan pemenuhan kebutuhan riil yang dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penghargaan masyarakat bagi kegiatan penelitian dan pengembangan iptek.

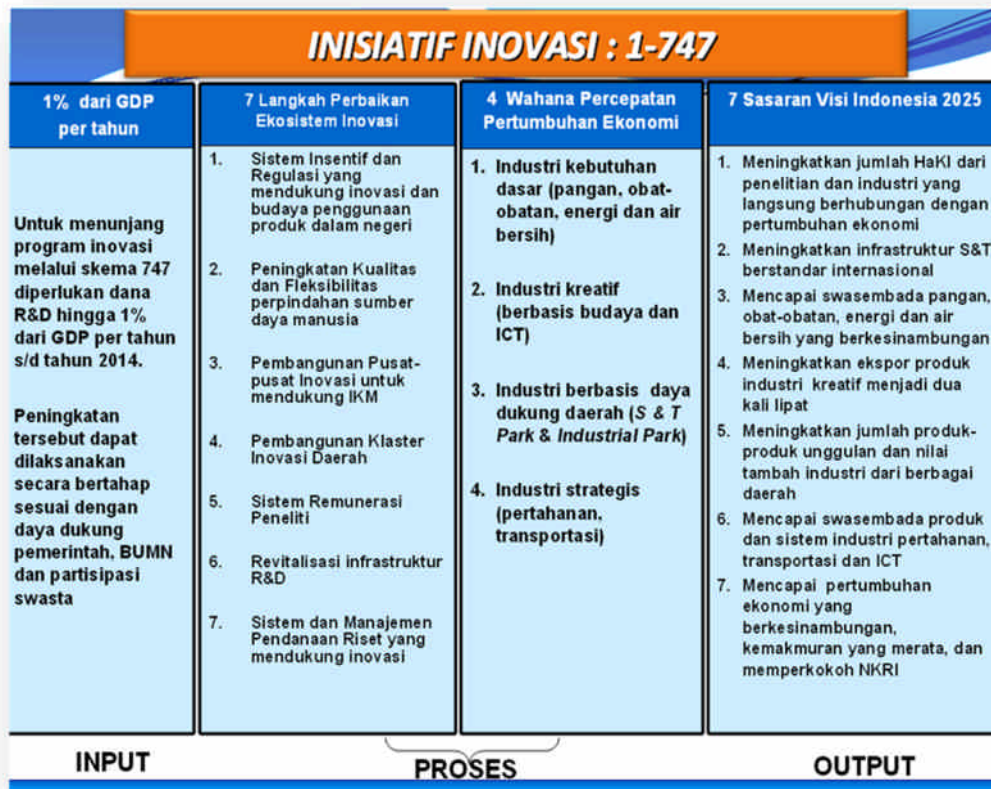
4.3 Arah Kebijakan Pembangunan

Salah satu pilar utama Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah pembangunan SDM dan Iptek. Khusus untuk pembangunan Iptek, percepatan pembangunan kemampuan iptek dilakukan melalui 6 prakarsa utama yakni:

1. Inisiatif Inovasi, 1-747.

Untuk mewujudkan peningkatan produktivitas, maka direkomendasikan usulan Inisiatif Inovasi 1-747 (Gambar 1.2) sebagai pendorong utama terjadinya proses transformasi sistem ekonomi berbasis inovasi melalui penguatan sistem pendidikan (*human capital*) dan kesiapan teknologi (*technological readiness*). Proses transformasi tersebut memerlukan input pendanaan R&D sebesar 1% dari GDP yang terus ditingkatkan secara bertahap sampai dengan 3% GDP menuju 2025. Pelaksanaannya dilakukan melalui 7 langkah perbaikan ekosistem inovasi, sedangkan prosesnya dilakukan dengan menggunakan 4 wahana percepatan pertumbuhan ekonomi sebagai model penguatan aktor-aktor inovasi yang dikawal dengan ketat. Dengan demikian diharapkan 7 sasaran MP3EI di bidang SDM & IPTEK akan dapat tercapai sehingga menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

GAMBAR 4.2
INISIATIF INOVASI 1-747



2. Pengembangan Klaster Inovasi Solusi untuk 6 Koridor Ekonomi

Pengembangan 6 koridor ekonomi harus diiringi dengan penguatan klaster inovasi dalam kerangka meningkatkan keunggulan bersaing dan berinovasi. Keunggulan bersaing industri untuk berinovasi ditentukan oleh beberapa kondisi, antara lain faktor produksi, permintaan, industri pendukung, dan strategi & struktur perusahaan. Keempat faktor di atas sama lain membentuk suatu lingkungan nasional yang kondusif di mana perusahaan-perusahaan unggul dapat dilahirkan untuk berkompetisi.

3. Revitalisasi PUSPIPTEK sebagai Science & Technology Park

Merevitalisasi PUSPIPTEK sebagai S&T Park bertujuan untuk melahirkan IKM/UKM berbasis inovasi dalam berbagai bidang strategis yang mampu mengoptimalkan interaksi dan pemanfaatan sumber daya universitas, lembaga litbang, dan dunia industri/usaha sehingga dapat menghasilkan produk inovatif. Untuk menjaga sustainability pengelolaan S&T Park tersebut perlu dilakukan :

1. Menjadikan PUSPIPTEK sebagai Badan Layanan Umum (BLU) dengan manajemen profesional sehingga tercipta *link* antara bisnis dan riset.
2. Menjadikan PUSPIPTEK sebagai pusat unggulan riset berteknologi tinggi.

4. Pembentukan Klaster Inovasi Daerah untuk Pemerataan Pertumbuhan

MP3EI akan mendorong dan mengikutsertakan upaya masyarakat/pelaku usaha/pemerintah provinsi/daerah yang relatif sudah memiliki inisiatif untuk menumbuhkembangkan potensi inovasi pada produk dan program unggulan daerah. Sebagai contoh antara lain sebagai berikut:

1. Model Pengembangan Kawasan Inovasi Agroindustri, Gresik Utara, Pemprov Jawa Timur seperti mangga dan tanaman hortikultura lainnya.
2. Model pengembangan kawasan industri inovasi produk-produk hilir yang terintegrasi, antara lain kelapa sawit, kakao, dan perikanan.
3. Model Pengembangan Kawasan Inovasi Energi Kalimantan Timur sebagai model pengembangan kawasan industri inovasi energi terkemuka berbasis *non-renewable* dan *renewable energy* meliputi minyak, gas, batubara, *bioenergy*/CPO

5. Penguatan Aktor Inovasi

Salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan MP3EI tergantung pada upaya cerdas dan efektif para aktor inovasi dari unsur akademisi/peneliti, dunia usaha/industri, masyarakat, legislator, dan pemerintah. Beberapa pemikiran berikut harus diupayakan dalam perencanaan dan pemanfaatan secara cerdas potensi anak bangsa dalam rangka membangun Indonesia maju dan bermartabat, antara lain:

1. Menciptakan SDM yang memiliki kompetensi, berkepribadian luhur, berharkat dan bermartabat melalui pendidikan sains teknologi, pranata sosial dan humaniora yang berkualitas.
2. Optimalisasi sumber daya manusia berpendidikan S2 dan S3 yang telah ada, dan menambah 7.000-10.000 Ph.D di bidang sains dan teknologi secara bertahap dan terencana sampai tahun 2014.
3. Pengadaan laboratorium berstandar internasional baik di bidang ilmu-ilmu dasar maupun terapan di perguruan tinggi, lembaga litbang LPK dan LPNK serta pusat riset swasta, untuk kepentingan kemakmuran bangsa.
4. Kerjasama internasional yang mendorong pemahaman dan

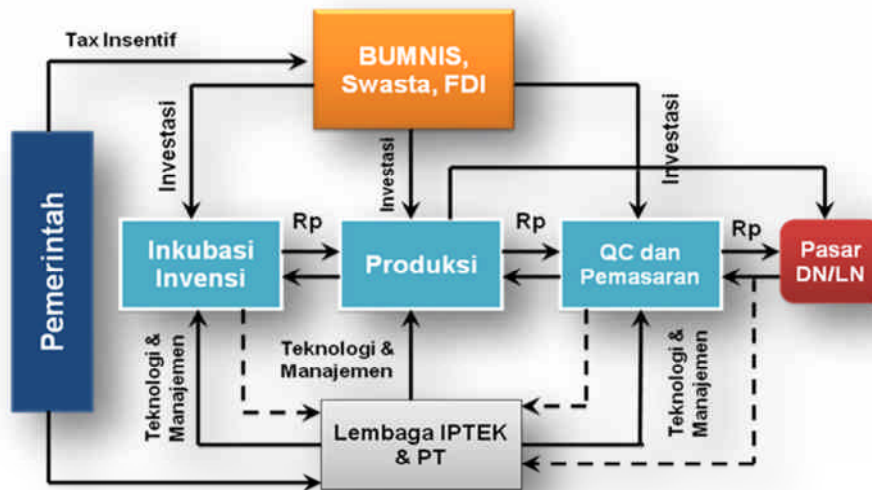
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pemanfaatan berbagai best practices yang sudah dikembangkan di berbagai negara.

6. Memperkuat Operasionalisasi Sistem Inovasi Nasional

Pengembangan inovasi produk suatu inovasi melibatkan 3 pelaku utama dalam sistem inovasi nasional yaitu, pemerintah sebagai regulator, pelaku usaha/industri sebagai pengguna hasil inovasi dan lembaga-lembaga penelitian dan perguruan tinggi sebagai penghasil produk inovasi. Seluruh aliran pengetahuan ini perlu diperkuat dan diupayakan konsensus nasional untuk menggunakan skema usulan ini sebagai dasar pengembangan produk inovasi. Pemerintah dalam hal ini akan memberikan tax insentif kepada industri, BUMNIS dan perusahaan dari luar negeri yang hendak melakukan investasi *foreign direct investment(FDI)* yang nantinya akan menggunakan teknologi dalam negeri atau mentransfer teknologi dari luar negeri ke Indonesia. Kepada pelaku inovasi pemerintah akan memberikan insentif penelitian berupa peningkatan dana penelitian dengan syarat utama bahwa pihak industri sudah berminat menggunakan teknologi yang dikembangkan. Insentif dapat diberikan oleh pemerintah jika produk inovasi sudah pasti memiliki nilai pasar yang tinggi melalui persyaratan yang ketat seperti telah memiliki *feasibility studies* dan *return of investment* yang jelas. Persyaratan ini menjadi penting sebagai awal terjadinya inovasi di dalam sebuah Negara. Selain itu Industri diminta untuk menjadi penggerak utama inovasi dengan memberikan *state of the art* kebutuhan inovasi teknologi yang memiliki nilai pasar yang baik.

Kebijakan pembangunan Iptek tahun 2014 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Iptek Nasional mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Dukungan ini akan berwujud dalam bentuk peningkatan produktivitas menuju keunggulan kompetitif yang akan dicapai seiring dengan upaya memperkuat kemampuan sumber daya manusia berbasis inovasi. Warisan ekonomi berbasis sumber daya alam yang bertumpu pada *labor intensive* perlu ditingkatkan secara bertahap menuju *skilled labor intensive* dan kemudian menjadi *human capital intensive*. Peningkatan kemampuan modal manusia yang menguasai Iptek sangat diperlukan ketika Indonesia memasuki tahap *innovation-driven economies*.

GAMBAR 4.3
PENGUATAN SISTEM INOVASI NASIONAL INDONESIA



Untuk dapat menjalankan MP3EI pilar SDM Iptek yang diuraikan diatas, maka secara bertahap mulai pada tahun 2014 pembangunan iptek akan memusatkan upaya untuk menjawab isu strategis utama yakni bagaimana meningkatkan kemampuan iptek nasional dalam mendukung percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi, dengan kerangka sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.1 dibawah ini :

TABEL 4.1
ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN IPTEK

| NO | ISU STRATEGIS | SASARAN | KEGIATAN UTAMA |
|---|---|---|---|
| 1 | Peningkatan kemampuan Iptek mendukung percepatan dan perluasan ekonomi nasional | Meningkatnya penguasaan teknologi dan produksi kendaraan murah ramah lingkungan | Penelitian tenaga listrik dan mekatronika untuk mendukung <i>Low Cost Green Car</i> |
| Meningkatnya produktivitas tanaman pangan khususnya padi melalui pemanfaatan teknologi penghasil bibit unggul berkualitas | | Pengembangan penelitian dan aplikasi teknologi isotop dan biologi molekuler untuk bibit unggul padi | |
| Meningkatnya penguasaan teknologi dan produksi pesawat terbang yang mendukung jalur penerbangan perintis | | Pengembangan teknologi dan rancang bangun (prototype) pesawat N-219 | |

Kebijakan pembangunan Iptek pada tahun 2014 yang diuraikan di atas selanjutnya diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan Iptek yang dituangkan dalam RPJMN 2010-2014 yaitu:

Pertama: Penguatan SIN yang difokuskan pada penguatan ketiga unsurnya, namun akan ditekankan pada penguatan sumberdaya iptek. Rincian masing-masing pembangunan unsur SIN tersebut dengan urutan prioritas sebagai berikut:

1. Penguatan sumberdaya iptek dengan merevitalisasi fasilitas-fasilitas riset dan melanjutkan pembangunan laboratorium-laboratorium yang baru. Di samping itu, kualitas pendidikan dan kuantitas peneliti ditingkatkan baik melalui pendidikan paska sarja di dalam maupun di luar negeri.
2. Penataan jaringan iptek dengan membangun kerja sama antar lembaga litbang (lemlit); antarlemlit dengan perguruan tinggi; dan antara lemlit dan industri/masyarakat pengguna melalui antara lain pembangunan infrastruktur komunikasi modern,

institusi finansial, serta otoritas publik yang memfasilitasi struktur jaringan yang mendorong interaksi kreatif dan lingkungan yang atraktif bagi para pekerja pengetahuan (*knowledge workers*).

3. Penataan kelembagaan iptek dengan menekankan pada pematangan rencana pelaksanaan reformasi birokrasi di kementerian riset dan teknologi serta lembaga-lembaga penelitian non-kementerian.

Kedua: Peningkatan penelitian, pengembangan, dan penerapan iptek (P3 Iptek) diarahkan pada peningkatan relevansi antara kegiatan iptek dengan kebutuhan masyarakat sehingga terbangun hubungan yang main intens dan berkualitas. Di samping itu, kualitas pelaksanaan riset akan terus ditingkatkan. Arahan ini berlaku untuk semua klaster puslitbang yang menjadi fokus prioritas ini, sehingga fokus-fokus dari prioritas ini diberi penekanan yang sama. Adapun klaster yang dimaksud (fokus-fokus) yang diatur dalam RPJMN 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Biologi molekuler, bioteknologi, dan kedokteran;
2. Ilmu pengetahuan alam;
3. Energi, energi baru dan terbarukan;
4. Material industri dan material maju;
5. Industri, rancangbangun, danrekayasa;
6. Informatika dan komunikasi;
7. Ilmu kebumihan dan perubahan iklim;
8. Ilmu pengetahuan sosial dan kemasyarakatan;
9. Ketenaganukliran dan pengawasannya; dan
10. Penerbangan dan antariksa.

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

BAB 5

BIDANG SARANA DAN PRASARANA

Pembangunan infrastruktur tahun 2014, yang meliputi prasarana jalan, sumber daya air, transportasi, perumahan dan permukiman, ketenagalistrikan, serta informasi dan telekomunikasi diarahkan pada peningkatan daya saing perekonomian nasional melalui percepatan penguatan konektivitas nasional (*national connectivity*) yang dapat mendukung semakin tumbuhnya pusatperdagangan dan industri, serta menjamin ketersediaan infrastruktur dasar melalui peningkatan aksesibilitas pelayanan infrastruktur yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk meningkatkan kinerja infrastruktur, upaya-upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah optimalisasi terhadap pemanfaatan infrastruktur yang telah dibangun melalui *debottlenecking* terhadap infrastruktur yang telah beroperasi, serta penyempurnaan dan reformasi kerangka peraturan dan perundangan yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

Dalam upaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), 3 (tiga) pilar utama pembangunan yang menjadi fokus perhatian adalah meningkatkan konektivitas, sumber daya manusia dan IPTEK, serta kelembagaan yang kondusif sehingga diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi nasional dan regional yang berkualitas.

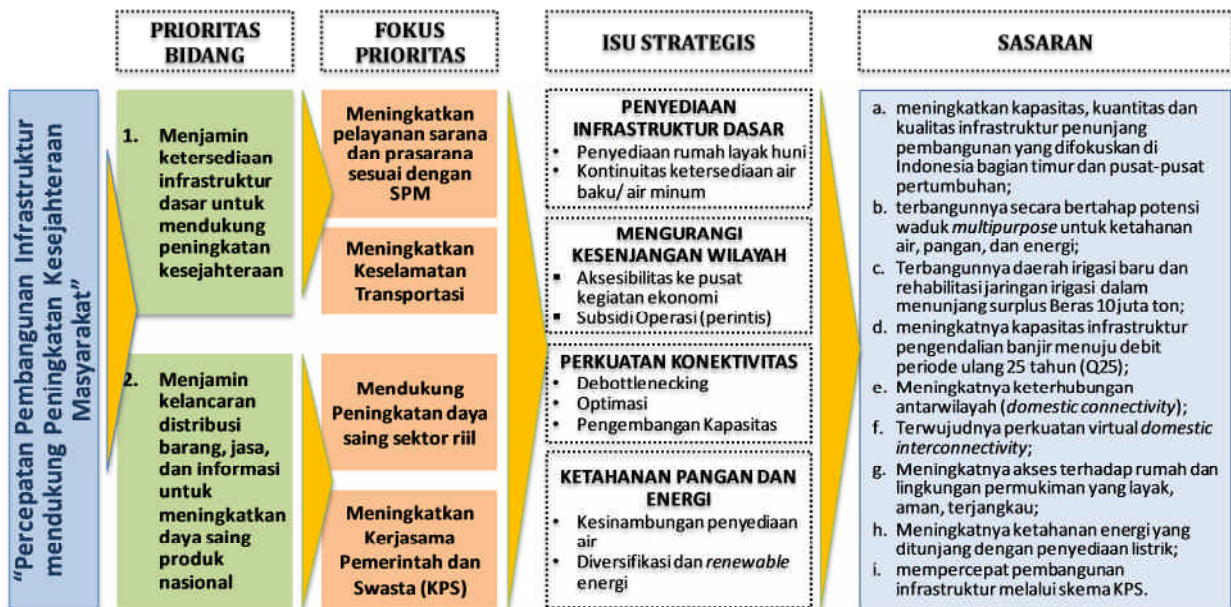
Pada sisi lain, pembangunan infrastruktur juga diprioritaskan pada upaya pengurangan terhadap resiko bencana di kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan melalui penataan sistem transportasi umum perkotaan, penataan lingkungan perumahan dan permukiman masyarakat, serta pembangunan prasarana pengendali banjir. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketahanan pelayanan Infrastruktur yang merespon upaya mitigasi bencana dan adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

RPJMN 2010-2014 mengamanatkan arah kebijakan pembangunan infrastruktur diprioritaskan pada peningkatan

pelayanan infrastruktur dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); mendukung peningkatan dan percepatan daya saing sektor riil; serta meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS).

Kerangka pikir kebijakan pembangunan infrastruktur tahun 2014 seperti pada gambar 5.1 berikut ini :

GAMBAR 5.1
KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
BIDANG SARANA DAN PRASARANA



5.2 Kondisi Umum

5.2.1 Prasarana untuk Menunjang Peningkatan Kesejahteraan

Selama Periode pelaksanaan RPJMN 2010-2014, pada tahun 2012, *penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat* telah dilaksanakan melalui beberapa kegiatan utama, antara lain telah dibangun 265 *Twin Blok* (TB) rumah susun sederhana sewa (rusunawa); fasilitasi pembangunan rumah swadaya 18.159 unit; fasilitasi peningkatan kualitas perumahan swadaya 230.000 unit; penataan lingkungan permukiman kumuh seluas 228 Ha; fasilitasi penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan perumahan yang melayani 80.009 unit; penyaluran FLPP untuk 73.923 unit; serta peningkatan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan sosial di 237 kecamatan. Di samping itu, untuk penanganan perumahan di NTT, Pemerintah telah

membangun rumah khusus sebanyak 2.334 unit, PSU kawasan perumahan dan permukiman sebanyak 2.389 unit, fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan swadaya sebanyak 1.766 unit, serta fasilitasi dan stimulasi peningkatan kualitas perumahan swadaya sebanyak 12.981 unit.

Untuk mendukung pencapaian target MDGs dalam cakupan air minum, pada tahun 2012 pemerintah telah melakukan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 2.314 desa, 331 kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan, 196 Ibu Kota Kecamatan (IKK), 245 kawasan khusus, dan 3 kawasan regional; pembangunan infrastruktur air limbah (*on-site* dan *off-site*) di 358 kawasan; pembangunan infrastruktur drainase perkotaan di 47 kab/kota; peningkatan infrastruktur tempat pemrosesan akhir sampah di 113 kab/kota; serta penyediaan infrastruktur tempat pengolahan sampah terpadu 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di 91 kawasan. Disamping itu, juga telah dicapai peningkatan kapasitas air baku sebesar **14,94** m³/detik, diantaranya di Air Baku Regional Bregas (Brebes-Tegal-Selawi)-Jawa Tengah, Air baku Lamongan-Jawa Timur, Telagawaja-Bali, Teluk Lerong Samarinda-Kalimantan Timur dan Maron Pacitan - Jawa Timur. Pada tahun 2013, diperkirakan pembangunan sarana/prasarana air baku akan dapat meningkatkan kapasitas sebesar **9,73** m³/detik, serta melakukan rehabilitasi untuk mengembalikan kapasitas prasarana air baku sebesar **7,76** m³/detik antara lain Air Baku Galang Batang di Kab. Bintan-Prov. Kepri, Air Baku Kota Lahat-Prov. Sumsel, Intake dan Pipa Transmisi Air Baku (SPAM) di Kota Bandung-Prov. Jabar, Air Baku Sungai Semalagi di Kota Singkawang-Prov. Kalbar, Air Sungai Saluki Gumbasa Spam Regional Pasigala-Prov. Sulteng, Air Baku Malillin Mengkendek di Kab. Tana Toraja-Prov. Sulsel, Air Baku Telagawaja di Kab. Karangasem-Prov. Bali, Air Baku di P. Timor Bagian Barat, Air Baku Dusun Wai Mital, P. Haruku, Kab. Maluku Tengah-Prov. Maluku.

5.2.2 Prasarana untuk Peningkatan Daya Saing dalam Menjamin Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa

Dalam upaya untuk meningkatkan **konektivitas untuk lebih mendorong pertumbuhan** pusat-pusat perdagangan dan secara terintegrasi dengan pengembangan wilayah, maka pembangunan sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi dan ketenagalistrikan terus diperluas dan ditingkatkan. Pada tahun 2012 telah dilaksanakan preservasi jalan nasional sepanjang 36.267Km dan preservasi jembatan sepanjang 289.909 m; peningkatan kapasitas jalan (pelebaran)

sepanjang 4.632km dan peningkatan jembatan sepanjang 9.746m; serta pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 6.890meter. Penguatan konektivitas tersebut didukung pula melalui pelayanan prasarana transportasi secara intermoda dan antarpulau yang terintegrasi terutama melalui pembangunan pembangunan Terminal Tipe A (antar propinsi) dan terminal antarlintas batas negara yang tersebar di 31 lokasi; pembangunan 15 unit dermaga penyeberangan baru, 38 unit dermaga penyeberangan lanjutan dan 11 unit dermaga penyeberangan yang telah selesai pembangunannya yang tersebar di 12 lokasi. Serta pembangunan dan pengembangan bandara strategis, meliputi Bandara Kuala Namu-Medan Baru, dan Bandara Samarinda Baru, serta pengembangan 14 bandara di daerah perbatasan dan rawan bencana.

Pada tahun 2013, upaya tersebut akan terus ditingkatkan sehingga diharapkan akan dapat dicapai preservasi jalan sepanjang 35.071,00 Km dan jembatan sepanjang 247.692,00 m; peningkatan kapasitas jalan (pelebaran) sepanjang 4.277,6 km dan peningkatan jumlah jembatan yang dibangun sepanjang 7.164,00 meter; serta pembangunan *flyover/underpass* sepanjang 3.510,00 meter. Pembangunan transportasi perlu didukung dengan fasilitas terminal dan dermaga yang sesuai dengan kebutuhannya melalui pembangunan Terminal Tipe A (antarpropinsi) dan terminal antarlintas batas negara yang tersebar di 24 lokasi, pembangunan dermaga di 61 lokasi berupa dermaga sungai danau dan penyeberangan.

Untuk meningkatkan kelancaran **distribusi barang dan jasa dalam sistem logistik nasional** pada tahun 2012 pembangunan infrastruktur perkeretaapian telah berhasil diselesaikan pembangunan jalur KA baru termasuk jalur ganda sepanjang 103,08 km untuk mendukung kelancaran jalur distribusi utama nasional pada lintas Utara dan Selatan Pulau Jawa, peningkatan kondisi dan pengaktifan kembali jalur kereta api sepanjang 79,35 km dan didukung dengan pengadaan rel kereta api sepanjang 550 Km'sp, peningkatan jumlah sarana KA sebanyak 20 paket, serta peningkatan persinyalan dan fasilitas keselamatan kereta api sejumlah 68 paket. Selain itu, untuk meningkatkan arus barang ekspor dan impor, juga dilaksanakan pembangunan dan peningkatan serta pemeliharaan 245 pelabuhan, termasuk beberapa pelabuhan strategis, antara lain Pelabuhan Belawan, Dumai, Tanjung

Priok, Batang, Kendal, Probolinggo, Sape, Kariangau, Pantoloan, Bitung, Ternate dan Pelabuhan Arar-Sorong, serta beberapa pelabuhan lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara.

Pada tahun 2013 upaya tersebut tetap dilaksanakan dan diperkirakan akan dapat dicapai pembangunan jalur KA baru termasuk jalur ganda sepanjang 383,37 km terutama lintas utara dan selatan Pulau Jawa, peningkatan kondisi dan pengaktifan kembali jalur kereta api sepanjang 22,81 km, pengadaan rel kereta api sepanjang 192 Km'sp, peningkatan jumlah sarana KA sebanyak 18 paket, dan peningkatan persinyalan untuk keselamatan kereta api sejumlah 64 paket. Disamping itu untuk meningkatkan sistem logistik nasional akan dicapai peningkatan dan rehabilitasi sejumlah pelabuhan strategis antara lain, Pelabuhan Belawan, Tanjung Priok, dan Pelabuhan Bitung, serta dilakukan persiapan pembangunan pelabuhan Cilamaya, peningkatan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) sebanyak 24 menara suar, 53 rambu suar dan 43 pelampung suar; serta pengembangan transportasi udara yang meliputi pembangunan sisi udara bandara baru Kertajati di Jawa Barat yang diharapkan akan dapat menjadi salah satu solusi alternatif permasalahan *over capacity* di Bandara Soekarno-Hatta; pengembangan dan rehabilitasi 41 bandara di daerah perbatasan dan rawan bencana serta peningkatan prasarana keamanan sebanyak 16 paket dan prasarana navigasi sebanyak 187 paket.

Upaya peningkatan konektivitas juga dikembangkan melalui pembangunan sektor informatika, komunikasi dan telekomunikasi (ICT), dimana pada tahun 2012 telah dicapai layanan *broadband* di 343 kabupaten/kota oleh PT Telkom (78 persen dari target 437 kabupaten/kota); jasa akses internet melalui *community access point* di 222 kecamatan di Lampung, Jawa Barat, dan Banten; indeks *e-government* nasional baru 2,5 dari skala 4,0, serta jangkauan siaran Lembaga Penyiaran Publik televisi (TVRI) dan radio (RRI) yang mencapai 65 persen terhadap populasi. Pada tahun 2013, perkiraan pencapaian utama pembangunan sektor komunikasi dan informatika antara lain: (a) layanan *broadband* di 382 kabupaten/kota oleh PT Telkom (87 persen dari target 437 kabupaten/kota) serta dimulainya proses pelelangan pembangunan proyek *Palapa Ring* yang dilakukan oleh Pemerintah; (b) Dokumen Indonesia *Broadband Plan* yang

memberikan arah pengembangan ekosistem *broadband* nasional; (c) Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran *Multipleksing* sebagai penyelenggara infrastruktur TV digital yang dipilih melalui pelelangan untuk provinsi NAD, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan; (d) Rencana Induk (Master Plan) dan Peraturan Pemerintah terkait penyelenggaraan *e-Government* Nasional; (e) sistem e-pendidikan di 500 sekolah di provinsi DIY; serta (f) indeks *e-government* nasional mencapai 3,0 dari skala 4,0 sesuai target RPJMN 2010-2014. Jangkauan siaran Lembaga Penyiaran Publik televisi dan radio terhadap populasi masing-masing diperkirakan mencapai 68 persen dan 70 persen.

5.2.3 Prasarana untuk Mengurangi Kesenjangan Wilayah

Dalam rangka **penyediaan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah**, Pemerintah terus mendorong bagi ketersediaan jaringan infrastruktur di wilayah marjinal melalui pembangunan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan, pembangunan infrastruktur jalan di wilayah terpencil, perbatasan, perbatasan dan pulau terluar sepanjang 928,31 Km, pembangunan 9 unit kapal perintis/penumpang, subsidi pelayaran perintis sebanyak 75 trayek, serta penyediaan layanan telekomunikasi melalui Program *Universal Service Obligation* (USO) yang meliputi jasa akses telekomunikasi di 31.392 desa (94,6 persen dari target Desa Berdering sebanyak 33.184) dan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di 6.694 desa ibukota kecamatan, *Nusantara Internet Exchange* (NIX) di Medan, Palembang, Surabaya, Denpasar, Balikpapan, Makassar, Jayapura, dan Ternate, serta 36 Base Transceiver Stations (BTS) untuk mendukung penyediaan jasa telekomunikasi dan informatika di daerah perbatasan dan pulau terluar.

Upaya tersebut akan terus ditingkatkan hingga tahun 2013 dan diperkirakan dapat dicapai pembangunan jalan di wilayah terpencil, perbatasan dan perdalam sepanjang 386,86 km, pembangunan baru dan lanjutan 22 unit kapal perintis/penumpang, subsidi pelayaran perintis sebanyak 79 trayek, serta layanan Desa Berdering Program USO tersedia di 33.184 desa sesuai target dan lanjutan layanan PLIK di 6.694 desa

5.2.4 Infrastruktur untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Dalam rangka **penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan**, pada tahun 2012 telah dilakukan upaya pembangunan/peningkatan jaringan irigasi seluas **94,8** ribu ha dan rehabilitasi seluas **589,4** ribu ha antara lain Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Lhok Guci di Kab. Aceh Barat-Prov. NAD, Pembangunan/Peningkatan Daerah Irigasi Way Bumi Agung di Kab. Lampung Utara-Prov. Lampung, Pembangunan Bendung Slinga di Kab. Purbalingga-Prov. Jateng, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Batang Alai di Kab. Hulu Sungai Tengah-Prov. Kalsel. Pada tahun 2013, akan dilakukan pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi seluas **77,74** ribu ha dan rehabilitasi seluas **238,14** ribu ha, antara lain Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Lhok Guci di Kab. Aceh Barat-Prov. NAD (lanjutan), Pembangunan Bendung D.I. Belutu di Kab. Deli Serdang-Prov. Sumut, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Air Lakitan di Kab. Musirawas-Prov. Sumsel, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Leuwigoong di Kab. Garut-Prov. Jabar, Peningkatan Jaringan irigasi Peterongan di Kab. Jombang-Prov. Jatim, Pembangunan D.I Bajo di Kab. Luwu-Prov. Sulsel (lanjutan), Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Way Apu, P. Buru, di Kab. Buru-Prov. Maluku (lanjutan).

Disamping itu, dalam rangka peningkatan ketersediaan air melalui pembangunan waduk dan embung yang telah diselesaikan pada tahun 2012 adalah pembangunan Waduk Rajui di Provinsi NAD dengan kapasitas 2,6 juta m³, serta **175** embung yang tersebar di seluruh Indonesia. Pada tahun 2013, direncanakan satu waduk akan selesai terbangun yaitu **Waduk Marangkayu di Kab. Kutai Kartanegara-Prov. Kaltim**. Selain itu, Pemerintah akan melaksanakan pembangunan **252** embung, serta melanjutkan pembangunan beberapa waduk, antara lain Waduk Pandanduri, Waduk Jatigede, dan Waduk Karian.

Upaya pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana sumber daya air tersebut, diiringi dan didorong dengan serangkaian kebijakan operasional pengelolaan sumber daya air. Beberapa kebijakan pengelolaan sumber daya air yang telah diselesaikan pada tahun 2012 antara lain melalui penerbitan Kepres 12/2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, diselesaikannya rancangan PP tentang Rawa, dan ditetapkannya Perpres 88/2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi Pada Tingkat Nasional, Permenko No. Per-

07/M.Ekon/05/2012 tentang Matriks Tindak Lanjut Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air. Upaya tersebut tetap terus dilanjutkan pada tahun 2013 dengan target antara lain penetapan PP tentang Rawa, melanjutkan proses penetapan Pola Pengelolaan Wilayah Sungai sebanyak 42 Pola Wilayah Sungai Kewenangan Pusat.

5.2.5 Infrastruktur untuk Ketahanan Energi

Sementara itu, untuk mendukung **kemandirian energi** dan memenuhi pasokan listrik nasional, selama tahun 2010-2012 telah dibangun pembangkit listrik sehingga total kapasitas pembangkit dapat ditingkatkan menjadi 44.064 MW, jumlah penambahan jaringan transmisi melalui pendanaan APBN sebesar 5.530,97 kms, jumlah penambahan jaringan distribusi melalui pendanaan APBN sebesar 32.288,12 kms, jumlah penambahan kapasitas gardu distribusi melalui pendanaan APBN sebesar 670,175 MVA serta total kapasitas terpasang pembangkit energi panas bumi masih kecil yaitu sebesar 1.341 MW. Sedangkan pelaksanaan program listrik murah dan hemat mencapai 60.702 rumah tangga sasaran sehingga capaian rasio elektrifikasi tahun 2012 yaitu sebesar 76,56 persen melebihi target RPJMN 2010-2014 yaitu sebesar 73,6 persen dan rasio listrik perdesaan menjadi 96,70 persen. Pemerintah juga telah melakukan pembangunan penambahan jaringan distribusi gas untuk rumah tangga di 4 kota sebesar 11.424 sambungan rumah dan 4 unit pembangunan SPBG.

Pada tahun 2013 pembangunan energi dan ketenagalistrikan diperkirakan dapat dicapai: (a) pengembangan Jaringan Distribusi Gas di 4 kota di Ogan Ilir, Subang, Blora, dan Sorong, dengan 16.000 sambungan rumah; (b) pembangunan infrastruktur BBG untuk transportasi (SPBG) sebesar 7 unit di Balikpapan 2 unit, Samarinda 2 unit, dan 3 unit di Jabodetabek; (c) berkembangnya pemanfaatan potensi energi lokal dengan memanfaatkan EBT terutama di daerah perdesaan termasuk kegiatan diseminasi dan capacity building guna mendukung pelaksanaan Desa Mandiri Energi (DME); (d) terlaksananya persiapan dan pengembangan infrastruktur gas untuk transportasi; (e) terlaksananya pengaturan BBM bersubsidi; (f) meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi sekitar 97,80 persen; (g) meningkatnya rasio elektrifikasi menjadi sebesar 79,3 persen.

5.2.6 Ketahanan Infrastruktur dalam Upaya Mitigasi Bencana dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

Sejalan dengan prioritas **ketahanan infrastruktur dalam upaya mitigasi bencana dan penanganan dampak perubahan iklim**, penanganannya difokuskan pada pengurangan dampak akibat banjir. Selama tahun 2012 telah dilakukan pembangunan dan rehabilitasi prasarana pengendali banjir sepanjang **605,97** km antara lain normalisasi dan pengerukan secara multiyears sungai Pesanggrahan, Angke dan Sunter di Wilayah Sungai (WS) Ciliwung-Cisadane; serta pembangunan Bendung Gerak/Bojonegoro Barrage di WS Bengawan Solo. Disamping itu, juga dilakukan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pengendali lahar/sedimen sebanyak **95** buah pada daerah-daerah rawan bencana. Pada tahun 2013 kegiatan yang akan dilakukan antara lain: (i) lanjutan pembangunan Bendung Gerak Sembayat dan Jabung Ring Dike sebagai bagian dari instrumen pengendali banjir di Bengawan Solo Hilir, (ii) pembangunan dan rehabilitasi sarana/prasarana pengendali banjir sepanjang **447,29** km dan pembangunan dan rehabilitasi pengaman pantai sepanjang **73,15** km, dan (iii) pembangunan dan rehabilitasi pengendali lahar/sedimen gunung berapi sejumlah total **71** buah.

Sejalan dengan upaya pemulihan kegiatan sektor ekonomi di Provinsi Jawa Timur akibat dampak luapan lumpur Sidoarjo, keseluruhan (4 paket) pekerjaan konstruksi jalan arteri Siring-Porong telah dituntaskan 100% pada akhir tahun 2012 dan telah mulai beroperasi untuk mendukung kelancaran distribusi arus barang dan jasa di lintas Surabaya-Malang. Selain itu, pembangunan relokasi pipa air PDAM Surabaya juga diperkirakan dapat dituntaskan pada akhir tahun 2013 sehingga gangguan terhadap suplai air yang kerap dialami warga Kota Surabaya akibat sering pecahnya pipa jaringan dapat dihindari. Dalam rangka percepatan pemulihan kondisi sosial masyarakat, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 37 Tahun 2012 tentang perubahan keempat Peraturan Presiden No. 14 tentang BPLS yang utamanya mengatur penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar Peta Area Terdampak (PAT) 2 Maret 2007 termasuk diantaranya jual beli tanah dan bangunan warga dengan rekapitulasi penyelesaian sebagai berikut:

TABEL 5.2
REALISASI JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN WARGA TERDAMPAK
LUMPUR SIDOARJO STATUS S.D AKHIR TAHUN 2012

| No | Wilayah | Landasan Hukum | Penanggung Jawab | Realisasi |
|----|-------------------|-----------------|------------------------------|-----------|
| 1 | PAT 22 Maret 2007 | Perpres 14/2007 | PT Lapindo Brantas/PT MLJ | 77.78% |
| 2 | 3 Desa | Perpres 48/2008 | BPLS | 81.45% |
| 3 | 9 RT | Perpres 68/2011 | BPLS | 86.10% |
| 4 | 65 RT | Perpres 37/2012 | BPLS | 11.62% |

Penyelesaian jual beli tanah dan bangunan warga di wilayah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah terutama di wilayah 3 Desa dan 9 RT akan terus diupayakan agar dapat diselesaikan pada TA 2013 mengingat sebagian besar pembayaran yang tersisa lebih banyak berupa Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum di wilayah tersebut. Sementara itu, jual beli tanah dan bangunan warga di wilayah PAT 22 Maret 2007 sesuai komitmen PT Lapindo Brantas/PT MLJ pada Rapat Koordinasi Dewan Pengarah BPLS 4 Januari 2013 juga diharapkan dapat dituntaskan pada akhir TA 2013.

5.2.7 Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Dalam rangka untuk meningkatkan **kerjasama pemerintah dan swasta (KPS)** dalam pembangunan infrastruktur, beberapa investasi proyek KPS telah digulirkan selama tahun 2012 dengan perkiraan total investasi mencapai USD 51 Milyar atau sekitar Rp. 500 Triliun, diantaranya adalah (i) telah beroperasinya 1 proyek air minum yaitu sistem penyediaan air minum Kabupaten Tangerang, (ii) 3 proyek jalan tol yang telah menyelesaikan tahapan konstruksi yaitu: Nusa Dua-Bandara Ngurahrai-Benoa, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono; (iii) telah selesainya transaksi PLTU di Jawa Tengah yang saat ini sedang menunggu penyelesaian *Financial Close* dan pengadaan lahan, (iv) 17 proyek dalam proses transaksi yaitu 2 proyek ketenagalistrikan, PLTU Sumatera Selatan 9 dan 10, lalu 8 proyek jalan tol dengan ruas Kemayoran-Kampung Melayu, Sunter-RawaBuaya-Batuceper, Ulujami-Tanah Abang, Pasar Minggu-Cassablanca, Sunter-PuloGebang-Tambelang, Duri Pulo-Kampung Melayu, Serpong-Balaraja, Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, 3 proyek air minum yaitu air minum Umbulan, Bandar Lampung dan Maros, 2 proyek transportasi yaitu proyek Kereta Api Batu bara Puruk Cahu-Bangkuang dan Terminal KapalPesiari Tanah Ampo, serta 2 proyeksanitasi yaitu Pengolahan Sampah Kota

Bandung dan *Intermediate Treatment Facility Sunter*; (v) serta terdapat 13 proyek masih dalam persiapan transaksi yaitu 5 proyek air minum yaitu proyek air minum Bali Selatan, Semarang Barat, Lamongan, Paludan air minum Jatiluhur; 3 proyek sanitasi yaitu di Kota Batam, Surakarta dan DKI Jakarta *Sewage Treatment Plant*; 1 proyek ketenagalistrikan yaitu PLTA Karama; serta 4 proyek transportasi khususnya dalam mendukung transportasi DKI Jakarta terdapat pula proyek *Jakarta Integrated Urban Transport Hub Development* dan Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai serta di luar itu ada Monorail di kota Makassar dan *Revitalization of Rail Station and Pedestrianization of Malioboro*, DI Yogyakarta.

5.2.8 Permasalahan dan Sasaran

Pembangunan infrastruktur dalam mendukung kesejahteraan masyarakat terutama masih dihadapkan pada kendala-kendala masih belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan masyarakat terhadap pelayanan jasa sarana dan prasarana infrastruktur antardaerah, seperti listrik, transportasi yang terjangkau, telekomunikasi, irigasi, air baku, waduk, serta perumahan dan permukiman yang memadai.

5.2.9 Prasarana dan Sarana Dasar untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

Dalam kaitannya dengan percepatan peningkatan kapasitas tampung *multipurpose* per-kapita serta kapasitas penyediaan air baku bagi masyarakat, berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi antara lain: (a) Masih minimnya kesiapan teknis, lahan dan penanggulangan masalah sosial, serta pendanaan untuk percepatan pembangunan waduk baru, terutama yang berada di kawasan berpenghuni dan kawasan hutan; (b) Penurunan usia pakai waduk yang ada dan peningkatan resiko keamanan bendungan menjadi *Medium-High Risk* akibat masalah sedimentasi, serta kelembagaan unit pengelola bendungan, dan kecukupan pendanaan operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi bendungan; (c) Menurunnya kondisi 15 Danau Prioritas akibat sedimentasi dan kelemahan pengendalian pemukiman dan aktivitas sekitar danau. (d) Kesenjangan antara kebutuhan dan kapasitas penyediaan serta kualitas air baku di wilayah Jabodetabek, Bandung, dan Semarang yang beresiko kepada pengambilan air tanah berlebihan; (e) Belum tersedianya infrastruktur air baku yang handal serta terpadu dalam satu kesatuan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di 30 Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan 81 Kota Pusat Investasi (KPI) prioritas MP3EI; (f) Sangat terbatasnya akses air baku

pertanian dan domestik di daerah kantong kemiskinan MP3KI dan Pulau-Pulau Kecil berpenghuni.

Sehubungan dengan penyediaan perumahan dan permukiman, kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR), belum dapat dipenuhi seluruhnya. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh: (a) lemahnya dukungan kelembagaan bidang perumahan dan kawasan permukiman di daerah; (b) terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan dan legalitas lahan; (c) terbatasnya akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan; (d) belum optimalnya dan tersedianya kelembagaan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman; (e) belum mantapnya pasar primer dan pembiayaan sekunder perumahan; serta (f) masih rendahnya efisiensi dalam pembangunan perumahan.

Di samping itu, pemenuhan terhadap layanan air minum dan sanitasi yang layak masih belum mampu menjangkau hingga seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil, perdesaan, perdalaman dan wilayah terluar. Beberapa kendala yang dihadapi antara lain: (a) masih rendahnya prioritas pembangunan air minum dan sanitasi di pemerintah daerah; (b) masih perlunya peningkatan kualitas dari pemenuhan kriteria kesiapan program dan kegiatan termasuk lahan dan institusi pengelola; (c) masih diperlukannya peningkatan kualitas kelembagaan Pemerintah Daerah, termasuk untuk koordinasi serta pengelolaan data dan informasi; (d) masih perlu ditingkatkannya pendampingan dan fasilitasi dari pemerintah pusat dan daerah kepada masyarakat desa serta (e) masih perlunya peningkatan kualitas rencana pembangunan air minum dan sanitasi kabupaten/kota.

5.2.10 Prasarana untuk Peningkatan Daya Saing dalam Menjamin Kelancaran Distribusi Barang dan Jasa

Pada sisi lain, rendahnya daya saing infrastruktur serta belum memadainya sistem logistik nasional memberikan kontribusi pada kurang lancarnya arus distribusi barang dalam menjangkau ke seluruh pelosok wilayah nusantara (*konektivitas wilayah*) dan dalam mendukung aktivitas ekspor-impor. Hal tersebut akibat dari belum memadainya jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan menghubungkan lapisan wilayah serta ketersediaan infrastruktur komunikasi dan informatika hingga saat ini masih belum memadai, sedangkan pemanfaatannya juga belum optimal yang diakibatkan terbatasnya infrastruktur

broadband dan belum terhubungnya pulau Maluku dan Papua dalam jaringan *backbone* serat optik nasional. Kondisi tersebut memicu terjadinya disparitas harga dan kesenjangan antarwilayah serta menghambat terjadinya akselerasi pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan. Pada perspektif global, daya saing infrastruktur Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan dengan negara-negara di kawasan regional. Rendahnya daya saing infrastruktur serta belum memadainya sistem logistik nasional memberikan kontribusi pada kurang lancarnya arus distribusi barang dalam menjangkau ke seluruh pelosok wilayah nusantara (*national connectivity*) dan dalam mendukung aktivitas ekspor-impor. Hal tersebut akibat dari belum memadainya jaringan infrastruktur transportasi yang terintegrasi dan menghubungkan lapisan wilayah serta terbatasnya infrastruktur *broadband* dan belum terhubungnya seluruh wilayah dalam jaringan *backbone* serat optik nasional. Kondisi tersebut memicu terjadinya disparitas harga dan kesenjangan antarwilayah serta menghambat terjadinya akselerasi pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kesejahteraan.

Sementara itu kinerja logistik Indonesia yang diukur dari *Logistics Performance Index* (LPI) walaupun terjadi peningkatan yang cukup signifikan, tetapi masih diperlukan pelayanan logistik yang lebih efisien. Indonesia berada pada posisi ke 59, masih tertinggal dibanding negara Asean lainnya seperti Singapura (1), Malaysia (29), Thailand (38) dan Filipina (52).

5.2.11 Infrastruktur untuk Mendukung Ketahanan Pangan (irigasi & pengairan, green infrastruktur, prasarana terintegrasi dengan sumber daya alam, hulu-hilir)

Sementara itu dalam rangka memberikan dukungan terhadap pencapaian ketahanan pangan nasional, pembangunan sektor irigasi akan dihadapkan kepada berbagai permasalahan dan tantangan yang terkait dengan: (1) masih minimnya operasi, pemeliharaan dan efektifitas rehabilitasi yang terbukti dengan rusaknya 52% daerah irigasi (2010) terutama di DI. kewenangan Pemerintah Daerah akibat masih kurangnya prioritas pendanaan APBD, kapasitas teknis pengelolaan, kemampuan pembiayaan asli daerah, sementara upaya bantuan pemerintah pusat terbentur kepada belum optimalnya mekanisme pelaksanaan DAK Irigasi dan belum diaturnya instrumen payung hukum lintas kewenangan. (2) Meskipun secara fisik lahan dan air masih terdapat potensi pengembangan, namun hal tersebut perlu didukung kebijakan terpadu mulai tingkat tata ruang provinsi-kabupaten,

dukungan penyediaan lahan, pembinaan aktivitas pertanian yang konsisten, serta percepatan penyiapan proses rencana dan studi teknis pengembangan jaringan Irigasi. (3) Belum berfungsinya secara efektif kelembagaan irigasi amanat PP 20/2006 terutama di level manajemen air jaringan sekunder dan tersier irigasi.

5.2.12 Infrastruktur untuk Ketahanan Energi

Untuk mendukung ketahanan dan kemandirian energi di seluruh wilayah Indonesia, sistem ketenagalistrikan nasional juga masih mempunyai kendala belum mampu memberikan pelayanan memadai dan menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah terpencil dan perbatasan. Tingkat elektrifikasi nasional baru mencapai 76,56 persen dengan rasio jumlah desa berlistrik baru mencapai 96,70 persen. Kendala lain yang masih dihadapi di antaranya adalah : (1) masih rendahnya tingkat produksi dan olahan minyak serta gas bumi dikarenakan mayoritas lapangan minyak dan gas merupakan lapangan tua serta terbatasnya kapasitas kilang BBM dan kilang LPG; (2) pemanfaatan panas bumi untuk sektor ketenagalistrikan masih jauh dibawah target disebabkan oleh lamanya proses ijin pinjam pakai lahan karena tumpang tindih lahan wilayah kerja panas bumi (WKP) dengan kawasan hutan lindung/konservasi serta penentuan harga jual panas bumi yang berlarut-larut; (3) diversifikasi pemanfaatan energi terutama konversi BBM ke gas masih dibawah target dikarenakan masih kurangnya pasokan gas bumi untuk konsumsi domestik serta infrastruktur gas yang masih terbatas; (4) kurangnya partisipasi pemerintah daerah dalam berkontribusi dalam pembangunan ketenagalistrikan.

5.2.13 Ketahanan Infrastruktur dalam Upaya Mitigasi Bencana dan Penanganan Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim

Permasalahan infrastruktur lainnya adalah meningkatnya resiko kejadian banjir/rob di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi (MP3EI), kawasan permukiman dan industri, disebabkan antara lain oleh: (a) Keterbatasan kapasitas desain infrastruktur pengendali banjir dalam mengakomodir prediksi dinamika perubahan lingkungan yang cukup cepat; (b) Belum optimalnya pengendalian banjir di perkotaan secara terpadu antara pengelolaan daerah paparan banjir dan manajemen pengelolaan sungai terutama dalam hal penetapan garis sempadan dan revitaliasi tepian sungai menjadi ruang publik, mekanisme pemberian Izin penggunaan, dan sinkronisasi dengan tata ruang dalam kerangka "Water Front City"; (c) Telah berubahnya kondisi Daerah Aliran

Sungai dan perubahan iklim yang diluar perhitungan dokumen Master Plan Pengendalian Banjir yang tersedia; (d) Meningkatnya potensi Bencana Lahar Gunung Berapi akibat letusan yang terjadi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Selain itu, upaya penanggulangan lumpur Sidoarjo diperkirakan masih akan diwarnai gejolak sosial kemasyarakatan yang dipicu tidak lancarnya proses penuntasan jual beli tanah dan bangunan warga di dalam wilayah PAT 22 Maret 2007 oleh PT Lapindo Brantas/PT Minarak Lapindo Jaya. Warga PAT 22 Maret 2007 merasa diperlakukan tidak adil dengan penuntasan penanganan masalah sosial kemasyarakatan di luar PAT 22 Maret 2007 (3 Desa, 9 RT dan 65 RT) yang relatif lebih pasti dan terjamin. Munculnya persepsi bahwa terdapat diskriminasi kebijakan dan perlakuan penanganan masalah sosial di dalam dan di luar wilayah PAT 22 Maret 2007 dikhawatirkan memberikan implikasi negatif yang sangat luas. Konflik horizontal di masyarakat sampai dengan aksi blokade terhadap operasi pengaliran lumpur serta pemeliharaan infrastruktur luapan lumpur dapat berdampak sangat fatal dan berpotensi menimbulkan bencana baru akibat jebolnya tanggul lumpur.

5.2.14 Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Permasalahan dan tantangan terkait dengan penyediaan infrastruktur dengan skema kerjasama pemerintah dan swasta antara lain: (i) belum optimalnya pemanfaatan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur; (ii) rendahnya kapasitas aparatur dan kelembagaan dalam pembangunan infrastruktur; (iii) kompleksitas regulasi dalam pengadaan dan penyediaan infrastruktur yang menghambat; serta; (iv) lambannya pengadaan tanah untuk penyediaan infrastruktur; (v) rendahnya penerapan inovasi teknologi dalam pembangunan infrastruktur; (vi) Mutu yang tidak memadai dari pemilihan proyek yang dilakukan oleh PJK; (vii) Kesulitan untuk mendapatkan konsultan dan tenaga ahli dalam melaksanakan *project preparation*.

Memperhatikan kondisi di atas, sasaran umum pembangunan infrastruktur tahun 2014 adalah : (a) meningkatkan kapasitas, kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang pembangunan yang difokuskan penyediaannya di Indonesia bagian timur dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; (b) terbangunnya secara bertahap potensi waduk *multipurpose* untuk ketahanan air, pangan, dan energi dalam

rangka meningkatkan kapasitas tampungan/kapita menuju 1.975 m³/kapita serta peningkatan usia pakai dan penurunan resiko keamanan 242 waduk eksisting yang didukung oleh beroperasinya unit pengelolaan bendungan sesuai dengan amanat PP 37/2011 tentang bendungan; (c) terlaksananya pembangunan/peningkatan daerah irigasi baru dan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka menunjang surplus Beras 10 juta ton yang didukung dengan beroperasinya kelembagaan irigasi di tingkat petani; (d) meningkatnya kapasitas infrastruktur pengendalian banjir menuju debit periode ulang 25 tahun (Q25) dan tingkat kesehatan sungai-sungai perkotaan serta 15 danau prioritas; (e) pemulihan dan penanggulangan daerah rawan bencana; (f) meningkatkan keterhubungan antarwilayah (*domestic connectivity*) dalam mendukung pengembangan 6 koridor ekonomi nasional; (g) memperkuat *virtual domestic interconnectivity (Indonesia connected)*; (h) meningkatkan akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai; (i) meningkatkan ketahanan energi yang ditunjang dengan penyediaan listrik; (j) peningkatan mutu konstruksi infrastruktur dalam memenuhi rancangan usia guna/usia pelayanannya; (k) pemulihan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat terdampak luapan lumpur Sidoarjo dan pengurangan potensi ancaman luapan lumpur untuk mencegah meluasnya Peta Area Terdampak; serta (l) mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (KPS).

Secara lebih terinci sasaran pembangunan infrastruktur tahun 2014 adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran | Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014 |
|-----------------------|---|---|
| SumberDaya Air | | |
| 1. | Terbangunnya secara bertahap potensi waduk <i>multi purpose</i> untuk ketahanan air, pangan, dan energi dalam rangka meningkatkan kapasitas tampungan/kapita menuju 1.975 m ³ /kapita serta peningkatan usia pakai dan penurunan resiko keamanan 242 waduk eksisting yang didukung | a. Lanjutan pembangunan 20 waduk, (Waduk Lausimeme di Kab. Deli Serdang- Prov. Sumut , Waduk Karian di Kab. Lebak- Prov. Banten , Waduk Jatigede di Kab. Sumedang dan Waduk Kuningan di Kab. Kuningan- Prov. Jabar , Waduk Jatibarang serta Waduk Diponegoro di Kota Semarang, Waduk Pidekso di Kab. Wonogiri, dan Waduk Gondang di Kab. Karanganyar- Prov. Jateng , Waduk Tugu di Kab. Trenggalek, Waduk |

| No | Sasaran | Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014 |
|----|---|--|
| | oleh beroperasinya unit pengelolaan bendungan sesuai dengan amanat PP 37/2011 tentang Bendungan. | <p>Bajulmati di Kab. Banyuwangi, Waduk Bendo di Kab. Ponorogo, Waduk Tukul di Kab. Pacitan dan Waduk Gonseng di Kab. Bojonegoro-Prov. Jatim, Waduk Teritip di Kota Balikpapan-Prov. Kaltim, Waduk Lolak di Kab. Bolaang Mongondow-Prov. Sulut, Waduk Karalloe di Kab. Gowa dan Waduk Nipa-Nipa di Kota Makassar-Prov. Sulsel, Waduk Titab di Kab. Buleleng-Prov. Bali, Waduk Pandanduri di Kab. Lombok Timur dan Waduk Rababaka di Kab. Dompu-Prov. NTB.</p> <p>b. Mulainya pembangunan 3 waduk, (Waduk Keureuto di Kab. Aceh Utara-Prov. NAD, serta Waduk Raknamo dan Waduk Kolhua di Kab. Kupang-Prov. NTT).</p> |
| 2. | Terlaksananya pembangunan/ peningkatan Daerah Irigasi barudan percepatan rehabilitasi jaringan irigasi dalam rangka menunjang surplus Beras 10 Juta Ton yang didukung dengan beroperasinya kelembagaan irigasi di tingkat petani. | <p>a. Peningkatan luas lahan beririgasi teknis seluas 44,1 ribu ha;</p> <p>b. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 129,8 ribu ha;</p> <p>c. Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi seluas 2,35 juta hektar yang didukung revitalisasi kelembagaan P3A.</p> <p>d. Peningkatan daerah irigasi rawa seluas 20,56 ribu ha;</p> <p>e. Rehabilitasi daerah irigasi rawa seluas 69,22 ribu ha;</p> <p>f. Rehabilitasi sumur air tanah sebanyak 608 buah.</p> |
| 3. | Meningkatnya kapasitas infrastruktur pengendalian banjir menuju debit periode ulang 25 tahun (Q25) dan Tingkat Kesehatan Sungai-Sungai perkotaan serta 15 Danau Prioritas. | <p>a. Pengembangan dan reviu master plan pengendalian banjir di wilayah Metropolitan</p> <p>b. Terlaksananya pengendalian Banjir Bengawan Solo dalam bentuk pembangunan waduk dan <i>floodway</i></p> <p>c. Pembangunan Sarana Pengendali Banjir sepanjang 131,9 Km</p> <p>d. Percepatan revitalisasi Sungai Citarum dan Ciliwung dan konservasi kawasan sumber air di 2 Danau Prioritas (Danau Kerinci-Prov. Jambi dan Danau Cascade Mahakam-Prov. Kaltim)</p> |
| 4. | Pemulihan sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat terdampak luapan lumpur Sidoarjo serta Pengurangan potensi ancaman luapan lumpur untuk mencegah meluasnya Peta Area Terdampak | <p>a. terselesaikannya pembayaran jual beli tanah dan bangunan warga di wilayah terdampak yang menjadi tanggung jawab PT Lapindo Brantas/PT Minarak Lapindo Jaya (PAT 22 Maret 2007) maupun tanggung jawab Pemerintah (3 Desa, 9 RT, 65 RT).</p> <p>b. Terjaminnya operasi pengaliran lumpur ke Kali Porong dan pemeliharaan infrastruktur pengamanan luapan lumpur Sidoarjo.</p> <p>c.</p> |

| No | Sasaran | Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014 |
|---------------------|--|---|
| Transportasi | | |
| 1. | Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi <i>backlog</i> maupun <i>bottleneck</i> kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda | <ul style="list-style-type: none"> a. Kondisi mantap jalan nasional menjadi 94 persen; b. Bertambahnya jumlah lajur-Km jalan menjadi sepanjang 104.702 km pada jalan nasional; c. Terpenuhinya implementasi azas cabotage untuk angkutan laut domestik menjadi 100 persen; d. Pangsa angkutan KA barang menjadi 3 persen dan angkutan penumpang 10 persen; e. Ppertumbuhan penumpang angkutan udara dalam negeri menjadi 12 persen/tahun dan angkutan udara luar negeri menjadi 14 persen/tahun. |
| 2. | Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Terbangunnya sistem jaringan transportasi perkotaan dan perdesaan di wilayah terpencil, pedalaman, perbatasan dan pulau terdepan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang juga didorong melalui transportasi perintis dan DAK bidang transportasi perdesaan; b. Jumlah jalan/jembatan di kawasan strategis, perbatasan, wilayah terluar dan terdepan yang dibangun 386,86 km c. Meningkatnya pelayanan perintis untuk wilayah tertinggal, terpencil, perbatasan, terisolir, dan pelayanan transportasi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui skema subsidi perintis d. Meningkatnya keterjangkauan terhadap jasa transportasi bagi golongan masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, berpendapatan rendah, dan lanjut usia. |
| 3. | Meningkatnya keselamatan masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana transportasi. | <ul style="list-style-type: none"> a. Menurunnya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan sampai dengan tahun 2015 sebesar 20 % persen dari kondisi eksisting tahun 2010 sesuai RUNK. b. Terpenuhinya pemeliharaan prasarana termasuk penyediaan IMO untuk prasarana kereta api. |
| 4. | Restrukturisasi kelembagaan | Selesaiannya peraturan turunan dari undang-undang bidang transportasi |
| 5. | Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada transportasi | <ul style="list-style-type: none"> a. Berkurangnya emisi kendaraan bermotor; b. Terbangunnya pelabuhan dan bandar udara yang ramah lingkungan (<i>eco port</i> dan <i>eco airport</i>) c. Terbangunnya transportasi umum massal |

| No | Sasaran | Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014 |
|----|---------|---|
| | | berbasis bus di perkotaan; d. Penggunaan energi yang ramah lingkungan. |

Perumahan dan Permukiman

| | |
|---|---|
| Meningkatkan akses bagi rumah tangga terhadap rumah dan lingkungan permukiman yang layak, aman, terjangkau dan didukung oleh prasarana dan sarana dasar serta utilitas yang memadai | <ul style="list-style-type: none"> a. Tersedianya akses bagi masyarakat terhadap perumahan baik perumahan baru maupun peningkatan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman serta kepastian hukum bagi 5,6 juta rumah tangga; b. Peningkatan pelayanan air minum melalui penyediaan sistem penyediaan air minum (SPAM) yang dapat melayani hingga 70 persen penduduk di akhir tahun 2014. c. Terciptanya kondisi stop buang air besar sembarangan melalui penyediaan infrastruktur air limbah yang mencakup 60,5 persen penduduk di akhir tahun 2014. d. Terlayannya 80% masyarakat perkotaan terhadap layanan pengelolaan persampahan di akhir tahun 2014. e. Berkurangnya genangan di kawasan strategis perkotaan di 100 kota yang sudah memiliki strategi pembangunan sanitasi kota. |
|---|---|

Energi dan Ketenagalistrikan

| | |
|--|---|
| 1. Tercapainya komposisi bauran energi yang sehat dengan menurunnya persentase pemanfaatan energi fosil dan meningkatnya persentase energi baru terbarukan (EBT) serta meningkatnya efisiensi pemanfaatan energi | Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional sebesar 9,3 persen. |
| 2. Penyusunan dan penyempurnaan regulasi dan kebijakan bidang pemanfaatan energi baru terbarukan, pengembangan konservasi dan efisiensi energi serta ketenagalistrikan | Tersusunnya regulasi dan kebijakan pemanfaatan energi baru terbarukan serta pengembangan konservasi dan efisiensi energi serta ketenagalistrikan. |
| 3. Peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana energi nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik dan komitmen ekspor | <ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya pembangunan jaringan gas kota untuk 16.000 sambungan rumah. b. Pembangunan SPBG di beberapa kota c. Tercapainya penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 3.000 MW beserta jaringan transmisi dan distribusinya. |

| No | Sasaran | Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014 |
|----|---|--|
| 4. | Peningkatan jangkauan pelayanan ketenagalistrikan | <ul style="list-style-type: none"> a. Rasio elektrifikasi meningkat menjadi 80 persen di tahun 2014 b. Meningkatnya rasio desa berlistrik menjadi 98,9 persen di tahun 2013 c. Terlaksananya pembangunan listrik murah dan hemat baik dari sisi pasokan maupun sisi permintaan. |
| 5. | Peningkatan jangkauan pelayanan ketenaga listrikan | Terlaksananya subsidi yang tepat sasaran pada yang berhak menerima (<i>benefeciaries</i>) |
| 6. | Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan sumberdaya manusia nasional yang mendukung industri energi dan ketenagalistrikan nasional | <ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatnya sertifikasi kompetensi bidang energi dan ketenagalistrikan b. Meningkatnya Tingkat Komponen Dalam Negeri sesuai peraturan yang ada |

Komunikasi dan Informatika

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Tersedianya infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika di seluruh desa, daerah perbatasan negara, pulau terluar, daerah terpencil, dan wilayah non komersial lain untuk mengurangi daerah <i>blank spot</i> | <ul style="list-style-type: none"> a. Jangkauan layanan pos universal mencapai 100 persen di wilayah PSO; b. Jangkauan layanan akses telekomunikasi universal dan akses internet mencapai 100 persen di wilayah USO; c. Jangkauan siaran TVRI dan RRI terhadap populasi masing-masing mencapai 42 dan 75 persen. |
| 2. | Tersedianya akses dan layanan komunikasi dan informatika yang modern | <ul style="list-style-type: none"> a. Tingkat penetrasi pengguna internet sekurang-kurangnya 50 persen; b. Tingkat penetrasi pengguna layanan broadband sekurang-kurangnya 30 persen; c. Tingkat penetrasi siaran TV digital terhadap populasi sekurang-kurangnya 35 persen; d. Prosentase jumlah ibukota kabupaten/kota yang dilayani jaringan <i>broadband</i> mencapai 88 persen dari target 497 kabupaten/kota. e. Prosentase ibukota provinsi yang terhubung dengan jaringan <i>backbone</i> serat optik nasional 100 persen |
| 3. | Tercapainya tingkat <i>e-literasi</i> masyarakat Indonesia | Tingkat e-literasi 50 persen. |
| 4. | Tersedianya informasi dan layanan publik yang dapat diakses secara <i>online</i> | Nilai rata-rata <i>e-government</i> instansi pemerintah sekurang-kurangnya 3,0. |
| 5. | Berkembangnya industri (manufaktur) penunjang TIK | <ul style="list-style-type: none"> a. Penggunaan alat dan perangkat telekomunikasi dalam negeri mencapai 30 persen; |

| No | Sasaran | Indikator dan Target Pencapaian Tahun 2014 |
|---|---|---|
| | | b. Prosentase TKDN set top box TV digital sekurang-kurangnya mencapai 50 persen. |
| Pengembangan Kerjasama Pemerintah dan Swasta | | |
| 1. | Penyiapan proyek KPS <i>bankable</i> | a. Terdapatnya proyek-proyek yang <i>bankable</i> yang menarik pihak swasta untuk bekerja sama b. Tercapainya <i>effectiveness of the financial</i> |
| 2. | Peningkatan kapasitas Dukungan (VGF) dan jaminan pemerintah serta lembaga pembiayaan | a. Mempermudah proses dalam tahapan skema KPS b. Menarik swasta untuk terlibat dalam proyek terkait infrastruktur |
| 3. | Peningkatan kapasitas dan kelembagaan PJKP | Makin mudahnya pelaksanaan proyek KPS terkait penyediaan infrastruktur |
| 4. | Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi terkait penyediaan infrastruktur | a. Makin mudahnya pelaksanaan skema KPS b. Mempersingkat proses dilakukannya proyek KPS |
| 5. | Penyediaan dan adanya kejelasan kelembagaan terkait dengan pengadaan tanah dalam penyediaan infrastruktur | Terselesaikannya harmonisasi aturan terkait pelaksanaan proyek KPS dan selesainya Perpres turunan UU Pengadaan Tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. |
| 6. | Peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi dalam kelembagaan pengelolaan infrastruktur | <i>Terlaksananya capacity building</i> di 3 wilayah Indonesia |

5.3 Arah Kebijakan Pembangunan 2014

Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2010-2014 yang meliputi: (1) Meningkatkan pelayanan infrastruktur dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (2) Mendukung peningkatan dan percepatan daya saing sektor riil; dan (3) Meningkatkan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), maka arah kebijakan pembangunan Infrastruktur tahun 2014 diprioritaskan pada : (a) membangun konektivitas nasional (*national connectivity*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan menghubungkan daerah tertinggal/terpencil dengan pusat pertumbuhan; (b) pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk dan dalam rangka mendukung ketahanan pangan dan air bersih; (c) penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi) untuk menunjang peningkatan kesejahteraan; dan (d) pembangunan infrastruktur dalam rangka pengurangan

resiko dampak perubahan.

Dalam rangka membangun **konektivitas nasional** (*national connectivity*) dengan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dan menghubungkan daerah tertinggal/terpencil dengan pusat pertumbuhan, arah kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Pembangunan sarana dan prasarana penghubung antar dan menuju koridor ekonomi dan kawasan-kawasan pertumbuhan ekonomi (jalan, pelabuhan, bandar udara) untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pokok kebutuhan masyarakat dan komoditas strategis lainnya dalam upaya mendorong pemulihan perekonomian nasional dari dampak resesi global.
2. Pembangunan sarana dan prasarana yang memenuhi standar dan kompatibilitas global pada koridor regional/global termasuk koridor *ASEAN connectivity*.
3. Memperluas jangkauan pelayanan infrastruktur ke daerah marjinal dengan penyediaan angkutan umum murah, penyediaan aksesibilitas dan kegiatan keperintisan baik transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.
4. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi untuk mengurangi *backlog* maupun *bottlenecking* kapasitas prasarana transportasi dan sarana transportasi antarmoda dan antarpulau yang terintegrasi sesuai dengan sistem transportasi nasional dan cetak biru transportasi multimoda.
5. Mendorong pengembangan moda angkutan laut, kereta api dan angkutan penyeberangan untuk mendukung pelaksanaan amanat Perpres No 26 tahun 2012 tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional (termasuk diantaranya pengembangan angkutan *Long Distance Ferry* (LDF) Jakarta-Surabaya).
6. Mendorong industri nasional untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana termasuk diantaranya industri dirgantara untuk memenuhi penyediaan pesawat berkapasitas di bawah 30 penumpang (Pesawat N-219), industri aspal buton untuk memenuhi kebutuhan pembangunan jalan, industri sarana kereta api untuk mendukung angkutan penumpang kelas ekonomi, dan industri perkapalan untuk mendukung angkutan barang dan penumpang.
7. Pengembangan transportasi di kota metropolitan untuk meningkatkan mobilitas bagi masyarakat melalui revitalisasi angkutan umum dan pembangunan

transportasi massal berbasis jalan dan rel di 6 kota besar (Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Makassar, dan Denpasar) termasuk pengembangan Bus Rapid Transit (BRT), pengembangan kereta api perkotaan di Bandung, pembangunan MRT Jakarta, dan peningkatan kapasitas angkut kereta api komuter Jabodetabek.

8. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi meliputi jaringan *backbone* serat optik di bagian timur Indonesia dengan pendanaan ICT Fund; mempercepat penetrasi siaran televisi digital; memperkuat pengembangan *e-government* nasional baik dalam bentuk kerangka regulasi maupun investasi dan koordinasi lintas kementerian; serta meningkatkan *e-literasi* melalui peningkatan kualitas SDM TIK termasuk aparatur pemerintah.
9. Revitalisasi infrastruktur Lembaga Penyiaran Publik RRI dan TVRI untuk menutup wilayah blank spot dan menyelesaikan pelaksanaan Program USO telekomunikasi untuk memastikan ketersediaan dan keberlanjutan layanan di wilayah perbatasan, perdesaan, terpencil, dan wilayah non komersial lain.
10. Penuntasan pembangunan pembangkit listrik 10.000 MW tahap I dan dimulainya beberapa proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap II berikut jaringan transmisinya sehingga dapat memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan meningkatkan rasio elektrifikasi.
11. Peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui peningkatan kapasitas, kehandalan dan efisiensi infrastruktur sistem penyediaan bahan bakar dan bahan baku industri.
12. Pengembangan energi terbarukan (EBT) lainnya yaitu bio-energi, dan aneka energi baru terbarukan, seperti biomassa, tenaga surya, tenaga angin, tenaga nuklir, dan tenaga hidrogen.
13. Pengembangan konservasi energi untuk dapat mewujudkan efisiensi energi dan penerapan teknologi energi bersih.
14. Pengembangan listrik murah dan hemat dengan meningkatkan pelayanan usaha penyediaan tenaga listrik, pengembangan usaha penyediaan tenaga listrik, dan mutu usaha penyediaan tenaga listrik.

Dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur irigasi dan waduk mendukung **ketahanan pangan**, arah kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Percepatan persiapan pembangunan Waduk : *Engineering Services*, Sertifikasi, dan pembebasan lahan, dan penanggulangan masalah sosial Waduk Multipurpose dan inisiasi Land Banking persiapan Lahan Waduk.
2. Rehabilitasi Waduk Eksisting dan Peningkatan kapasitas operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi Unit Pengelola Bendungan.
3. Meningkatkan kehandalan layanan jaringan irigasi melalui sinergi infrastruktur irigasi dengan kebutuhan ekstensifikasi lahan pertanian.
4. Pengembangan instrumen pembiayaan dan pengendalian pelaksanaan Operasi Pemeliharaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Peningkatan alokasi dan efektifitas pelaksanaan DAK Irigasi.
6. Peningkatan upaya persiapan pembangunan/peningkatan jaringan irigasi baru di daerah calon lumbung pangan.
7. Revitalisasi, dan perbaikan kelembagaan Irigasi di level Provinsi dan Kabupaten.

Dalam rangka **penyediaan infrastruktur dasar** (perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi) untuk menunjang peningkatan kesejahteraan, arah kebijakan yang dilakukan meliputi :

1. Peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak sesuai target MDG's melalui (a) penyediaan perangkat peraturan; (b) peningkatan kinerja manajemen penyelenggara penyedia/operator; (c) pengembangan alternatif sumber pendanaan; (d) peningkatan keterlibatan masyarakat dan swasta untuk keberlanjutan sarana, termasuk peningkatan kegiatan berbasis masyarakat; serta (e) peningkatan investasi pemerintah daerah untuk pelayanan air minum dan sanitasi.
3. Meningkatkan kapasitas layanan air baku untuk keperluan domestik dan industri terutama di daerah-daerah pusat pertumbuhan MP3EI, dan berkurangnya potensi krisis air jangka pendek di wilayah kepulauan kecil dan kantong-kantong kekeringan untuk mengurangi kesenjangan antara kebutuhan, potensi yang ada serta kapasitas layanan air baku yang sudah terbangun.

4. Konservasi dan pemeliharaan kualitas sumber-transmisi air baku
5. Peningkatan kordinasi dan sinkronisasi pembangunan Air Baku-SPAM dalam segi pendanaan dan pemeliharaan.
6. Pemenuhan sumber alternatif, termasuk air tanah, bagi daerah yang tidak memiliki ketersediaan sumber air baku permukaan yang memadai.

Dalam rangka pengurangan resiko bencana (banjir dan genangan) di pusat-pusat pertumbuhan, arah kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Normalisasi dan peningkatan kapasitas infrastruktur pengendali banjir terutama di WS Ciliwung-Cisadane, Citarum dan Bengawan Solo.
2. Peningkatan aktivitas revitalisasi Sungai-sungai besar dengan tekanan populasi-lahan yang tinggi seperti Ciliwung-Cisadane, Citarum, dan Bengawan-Solo menuju konsep "Water-Front Activities".
3. Penyusunan/Pembaharuan Master Plan Pengendalian Banjir di kota-kota pusat PKN
4. Rehabilitasi dan peningkatan daya tampung kantong-kantong sedimen dalam mengurangi resiko Banjir Lahan Gunung Berapi.
5. Pembangunan infrastruktur pengendali sedimen, penataan kawasan, dan peningkatan kualitas air di 15 Danau Prioritas.
6. Pengaliran lumpur ke Kali Porong dan pemeliharaan infrastruktur tanggul pengaman lumpur.

Sedangkan untuk **percepatan pembangunan infrastruktur melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)**, maka akan diarahkan pada:

1. Pembukaan peluang usaha bagi badan usaha secara kompetitif, tidak diskriminatif, dan transparan;
2. Penyiapan proyek KPS bankable;
3. Peningkatan kapasitas dukungan *viability gap fund* (VGF) dan jaminan pemerintah serta lembaga pembiayaan;
4. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan PJKP;
5. Penyederhanaan dan harmonisasi regulasi terkait penyediaan infrastruktur;
6. Penyediaan dana dan kejelasan kelembagaan terkait dengan pengadaan tanah dalam penyediaan infrastruktur;
7. Peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi dalam kelembagaan pengelolaan infrastruktur;

8. Peningkatan jumlah infrastruktur dan kualitasnya oleh pemerintah yang melibatkan swasta (skema KPS), BUMN atau swasta murni.

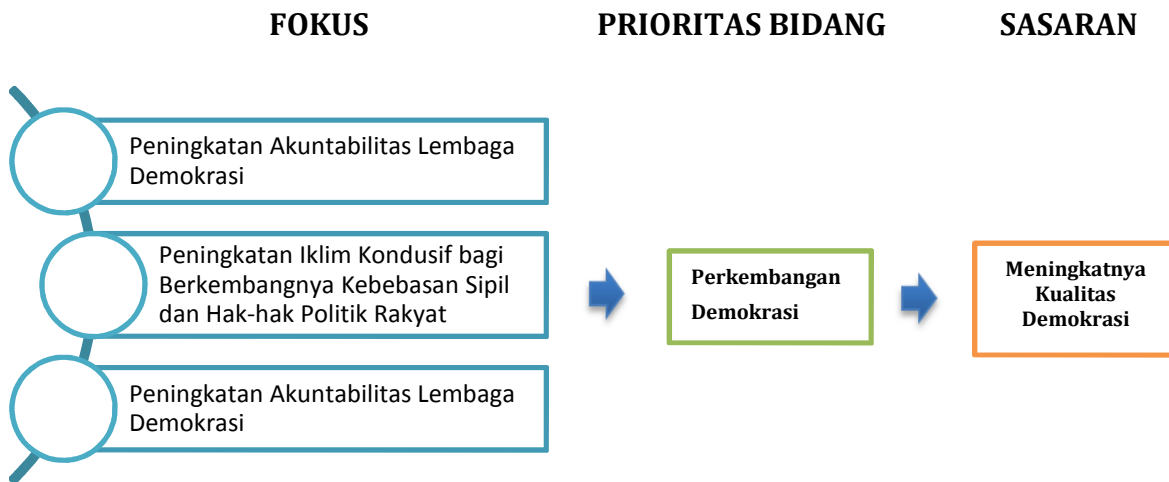
BAB 6 BIDANG POLITIK

Perjalanan konsolidasi demokrasi Indonesia dalam lima tahun terakhir ini tidak ringan untuk dihadapi dan dijalani. Stabilitas sosial dan politik, ditengah berbagai guncangan yang terjadi, relatif dapat terjaga sampai dengan saat ini. Pemerintah menyadari masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan dihadapi. Perlu upaya kerja keras dan kerja bersama untuk memantapkan arah perjalanan demokrasi menuju demokrasi yang terkonsolidasi. Diharapkan penyelenggaraan Pemilu 2014 akan semakin memperkuat kualitas demokrasi Indonesia pada lima tahun mendatang.

Sementara itu, di tingkat internasional, politik dan kebijakan luar negeri dihadapkan pada situasi global dan kawasan yang penuh tantangan, termasuk konflik dan potensi konflik, serta resesi ekonomi di sejumlah kawasan. Di sisi lain, situasi internasional juga memperlihatkan berbagai peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran sebagai aktor internasional yang mampu berkontribusi dalam memberikan solusi terhadap berbagai persoalan dan tantangan tersebut. Semakin meningkatnya kapasitas Indonesia yang disertai pengakuan dunia internasional kepada Indonesia dalam berbagai isu (termasuk status sebagai negara demokrasi, *middle income country* dan atribut positif lainnya) merupakan bekal penting untuk berperan di dunia internasional, dan memulihkan posisi penting Indonesia di dunia internasional.

6.1 Subbidang Politik Dalam Negeri dan Komunikasi

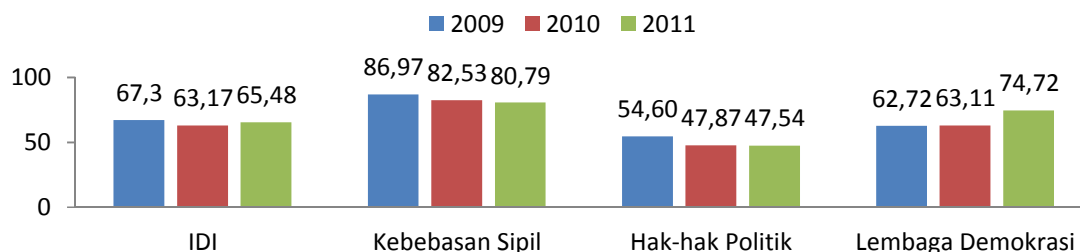
KERANGKA BERPIKIR SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI



6.1.1 Kondisi Umum

Secara umum, kualitas demokrasi Indonesia masih dalam kondisi sedang, sebagaimana ditunjukkan dengan angka indeks demokrasi dalam 3 tahun terakhir yang berada dalam kisaran rata-rata 60-80. Kondisi tersebut dikontribusi oleh adanya kebebasan sipil cukup tinggi dengan angka di atas 80, kinerja lembaga demokrasi memiliki kinerja yang sedang yaitu rata-rata 60-80, dan jaminan pemenuhan hak-hak politik masih rendah, dibawah 60. Perkembangan kualitas demokrasi disajikan dalam tabel di bawah ini.

GAMBAR 6.1
PERKEMBANGAN INDEKS DEMOKRASI INDONESIA 2009-2011

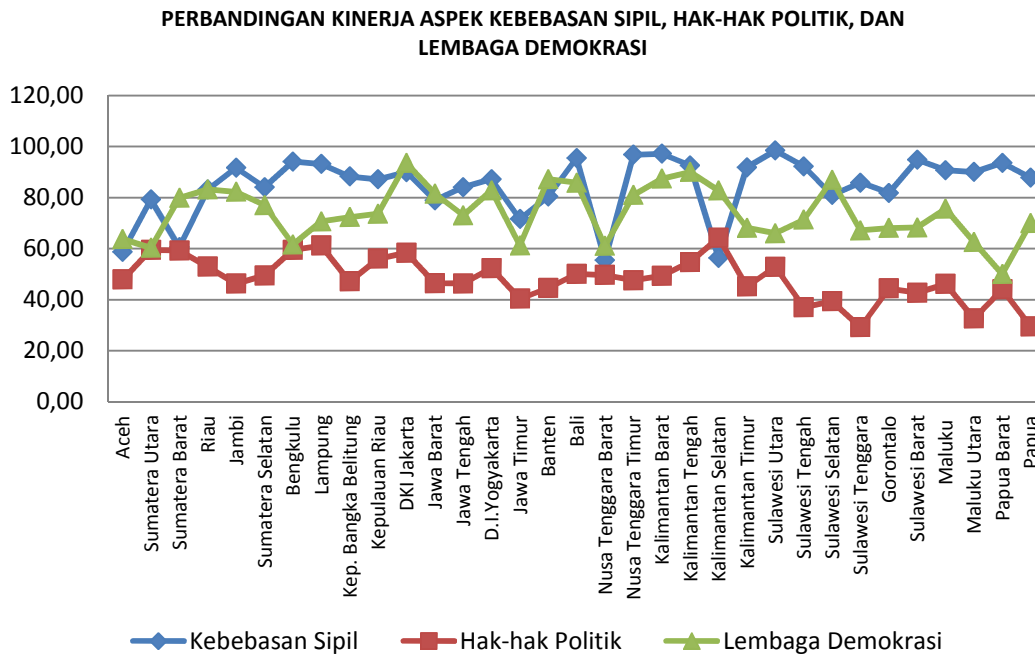


Sumber: Diolah dari Buku "Indeks Demokrasi Indonesia" (IDI) 2009, 2010, 2011 (IDI 2011 belum diluncurkan), diterbitkan oleh BPS

Kondisi kebebasan sipil dan jaminan pemenuhan hak-hak politik warga mengalami penurunan dari tahun ke tahun, dan berbeda halnya dengan kinerja lembaga demokrasi yang menunjukkan kenaikan. Hal ini tidak mengherankan, kondisi tersebut disebabkan oleh semakin berperannya partai politik dalam melaksanakan kaderisasi untuk menghadapi Pemilu 2014. Menurunnya kebebasan sipil disebabkan oleh meningkatnya ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan kebebasan berkeyakinan. Peristiwa penggerebekan forum-forum diskusi, tindakan kekerasan terhadap sejumlah kelompok minoritas agama, dan hambatan terhadap pembangunan rumah ibadah menunjukkan masih adanya persoalan dalam kebebasan berkeyakinan. Selain itu, kekerasan masih mewarnai proses penyampaian pendapat di tempat-tempat umum.

Perkembangan demokrasi di Indonesia ditandai pula dengan masih terdapatnya kesenjangan antara kebebasan sipil dan kinerja lembaga demokrasi, yang dikuatirkan akan memicu tensi rasa ketidakpuasan warga atas kinerja pemerintah. Kebebasan sipil yang tinggi, tidak diikuti dengan kinerja lembaga pemerintahan dalam merespon aspirasi dan kebutuhan rakyat. Adanya kesenjangan tersebut disajikan dalam grafik di bawah ini.

GAMBAR 6.2
PERBANDINGAN KINERJA ASPEK KEBEBASAN SIPIL, HAK-HAK POLITIK DAN
LEMBAGA DEMOKRASI



Sumber: Diolah dari Buku "Indeks Demokrasi Indonesia" (IDI) 2009, 2010, 2011

Pada tahun 2012, kompetisi politik lima tahunan mulai menghangat sejak dimulainya proses pentahapan pemilu pada pertengahan tahun. UU No 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu. KPU yang keanggotannya dilantik pada awal 2012 telah berhasil melakukan tugas-tugas awal pentahapan secara baik. Kerja keras KPU melakukan verifikasi parpol peserta, telah menghasilkan secara definitif 12 parpol peserta Pemilu 2014 mendatang, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Nasional Demokrat (Partai Nasdem), PAN, PKS, PPP, PKB, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai Bulan Bintang (PBB). Ada tiga partai politik baru yang lolos verifikasi parpol, yaitu Partai Nasdem, PKPI dan PBB. Parpol-parpol yang akan bertarung

pada pemilu legislatif tahun 2014 harus berjuang untuk memenuhi ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebesar 3,5%.

Terkait dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Pemerintah telah menyampaikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) pada KPU pada 7 Februari 2013, untuk selanjutnya akan dimutakhirkan oleh KPU. Penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi DPT oleh KPU akan dilakukan pada Oktober 2013.

Bawaslu, sebagai lembaga pengawas penyelenggara pemilu, mempunyai wewenang untuk membentuk Bawaslu Provinsi. Sampai dengan bulan Februari 2013, Bawaslu Provinsi sudah terbentuk di 26 Provinsi. Sedangkan 7 provinsi yang belum memiliki lembaga Bawaslu, adalah Sumatera Utara, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Selatan, Papua, Sulawesi Tenggara, dan Aceh. Enam provinsi menunggu tuntasnya pemilu kada, sedangkan pembentukan Bawaslu Provinsi Aceh masih menunggu hasil pembahasan antara Bawaslu dengan DPR Aceh yang telah difasilitasi oleh DPR RI. Sampai saat ini, Bawaslu provinsi yang telah dibentuk sudah membentuk Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2012 telah dilaksanakan 82 Pemilukada, sementara ada 3 daerah yang batal melaksanakan Pemilukada. Sedangkan untuk tahun 2013, direncanakan akan dilaksanakan 149 Pemilukada yaitu 15 Pemilukada provinsi dan 134 Pemilukada kabupaten/kota. Pemilukada di 149 daerah ini dibagi dalam 4 kategori, yaitu 3 daerah (1 provinsi, 2 kabupaten/kota) yang tertunda pelaksanaan pemungutan suaranya di tahun 2011/2012, atau melaksanakan pemungutan suara ulang dan putaran kedua di tahun 2013, 50 daerah (6 provinsi, 44 kabupaten/kota) yang awal tahapan Pemilukada di tahun 2012 dan pemungutan suaranya di tahun 2013, 61 daerah (6 provinsi, 55 kabupaten/kota) yang semua tahapan Pemilukada di Tahun 2013, dan 35 daerah (2 provinsi, 33 kabupaten/kota) yang awal tahapan Pemilukada di Tahun 2013 dan pemungutan suaranya di Tahun 2014. Sampai dengan bulan Februari 2013, telah dilaksanakan Pemilukada di 3 provinsi dan 10 kabupaten/kota.

Kaitannya dengan Pemilukada Tahun 2014, Pemerintah sedang mengusahakan untuk memajukan serta mengundurkan tahapan Pemilukada yang pemungutan suaranya dilaksanakan di Tahun 2014 agar tidak mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk hal ini, Pemerintah menunggu pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan memberikan tenggat waktu sampai dengan tanggal 1 Juli 2013 (terkait tahapan). Apabila sampai dengan tanggal tersebut RUU dimaksud belum disahkan maka akan dikeluarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu).

Selain kedua lembaga tersebut, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu, sampai dengan tanggal 18 Desember 2012 telah menyidangkan 67 kasus pelanggaran kode etik. Sedangkan pada Tahun 2013, per tanggal 13 Maret 2013, telah menyidangkan 60 kasus pelanggaran kode etik.

Dengan mengacu pada PP No. 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Pemerintah masih terus konsisten menyediakan bantuan keuangan negara untuk memperkuat parpol. Peran parpol dalam melaksanakan kaderisasi meningkat pada tahun 2011 dibandingkan tahun 2009 dan 2010. Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan adanya peningkatan ini menjadi 64,69 pada tahun 2011, dari 19,29 pada tahun 2009, dan 23,37 pada tahun 2010. Peningkatan ini tidak terlepas dengan semakin dekatnya Pemilu 2014, dimana parpol harus melakukan konsolidasi dan menyediakan kader terbaiknya untuk mengikuti pemilu legislatif dan presiden/wakil presiden.

Sebagai mitra, pemerintah konsisten meningkatkan keterlibatan OMS dalam setiap proses pengambilan kebijakan serta monitoring dan evaluasi dalam perencanaan pembangunan politik. Pemerintah bersama DPR dewasa ini sedang dalam proses akhir proses pembahasan revisi UU No.8 tahun 1985 tentang Ormas, yang salah satu klausul revisinya berkenaan dengan sanksi tegas atas tindak kekerasan oleh ormas. Pemerintah juga terus merumuskan bentuk kelembagaan yang tepat dari DTF (*Democracy Trust Fund*) yang merupakan amanat RPJMN 2010-2014 bagi upaya peningkatan kapasitas OMS dan keberlanjutan peran mereka bagi demokrasi di Indonesia.

Gerakan terorisme tetap memiliki potensi ancaman besar pada empat konsensus bangsa, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tungga Ika, dan NKRI. Merespon potensi ancaman tersebut, pada tahun 2012 pemerintah telah membentuk 15 Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) sedangkan pada tahun 2013 sampai dengan bulan April sudah dibentuk 3 FKPT.

Sehingga sudah terbentuk 18 FKPT diseluruh Indonesia. Forum tersebut dibentuk antara lain sebagai instrumen peringatan dini terhadap berkembangnya gagasan terorisme. Pada 2012, sebanyak 89 teroris ditangkap. Sekitar 58% dari jumlah yang ditangkap tersebut adalah tersangka yang berusia di bawah 30 tahun, bahkan 8 orang berusia di bawah 20 tahun. Pada tahun 2013, sampai dengan bulan April sudah ditangkap 8 tersangka teroris.

Di dalam masyarakat, konflik bernuansa kekerasan masih terjadi pada tahun 2012, seperti penyerangan dan perlakuan diskriminatif terhadap sejumlah kelompok minoritas di beberapa daerah. Pada awal tahun 2013, bahkan kekerasan telah terjadi di Papua yang menewaskan sejumlah anggota TNI. Merespon berbagai konflik dan tindakan terorisme yang masih terus terjadi, pemerintah mengeluarkan Inpres No 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Inpres tersebut merupakan penjabaran UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Melalui Inpres tersebut, Pemerintah dan penegak hukum perlu untuk melakukan upaya-upaya penanganan konflik sosial mulai dari pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik. Inpres No 2 Tahun 2013 juga mengamanatkan perlunya melibatkan masyarakat, pranata adat dan sosial untuk menangani konflik sosial politik tersebut.

Dimensi hubungan sosial politik penting yang perlu mendapat perhatian bersama adalah makin meningkatnya kekerasan terhadap kaum perempuan. Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan 2013 menemukan ada 216.156 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2012, mencakup kekerasan pada ranah personal, ranah komunitas, maupun ranah negara. Data ini meningkat hampir 181% (2 kali lipat) dari data tahun 2011.

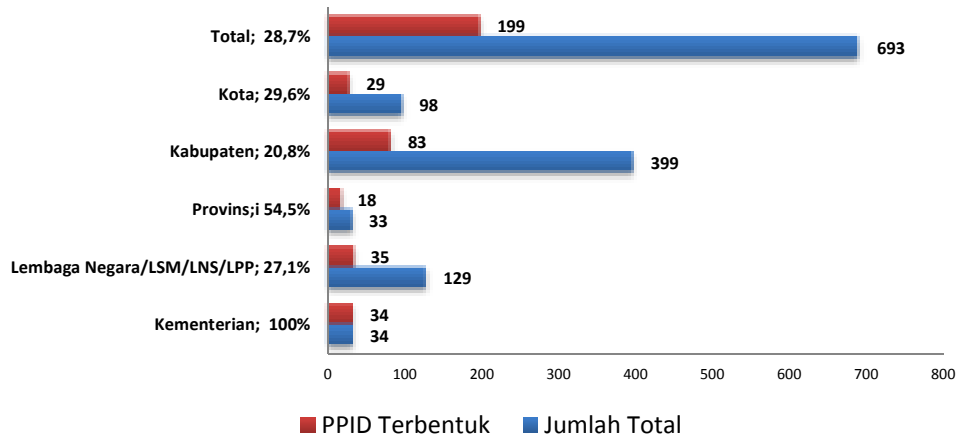
Perkembangan pembangunan komunikasi dan informasi hingga tahun 2012 antara lain ditunjukkan dengan dibangunnya Desa Informasi di 200 lokasi. Desa Informasi memiliki program pembangunan yang meliputi Desa Dering, Desa Pinter, Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK), Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK), dan radio komunitas. Namun, perkembangan infrastruktur tersebut belum dibarengi dengan konten pembangunan informasi publik. Pada tahun 2012, dibangun media center di 20 lokasi dan penguatan media center di 15 lokasi. Pada awal tahun 2013, sebagai pelaksanaan program tahun 2012, telah diserahkan secara resmi sebanyak

15 (lima belas) unit mobil Pusat Teknologi Informasi Komunitas (m-Pustaka) dan 15 unit motor Pustaka kepada daerah, terutama daerah terpencil, tertinggal, terdepan, rawan bencana, dan pasca/rawan konflik. Dengan adanya kendaraan penyuluh informasi publik roda 4 dan roda dua ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh teknologi informasi seperti TV dan internet. Mobil dan kendaraan roda dua tersebut dilengkapi berbagai peralatan untuk melakukan diseminasi informasi berbagai kebijakan pemerintah pusat maupun daerah kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Informasi dan Komunikasi, sampai dengan tahun 2012 telah dilakukan pelatihan *Chief Information Officer* (CIO) di 5 provinsi bagi 332 orang, bimbingan teknis budaya dokumentasi sebanyak 228 orang, pelatihan komunikasi publik, dan sertifikasi SDM Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sebanyak 200 orang. Di samping itu, pada tahun 2012 diberikan beasiswa dalam negeri kepada 225 orang dan beasiswa luar negeri sebanyak 27 orang.

Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum berjalan efektif. Hal ini dapat dilihat dari sejak berlaku efektif tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2012, PPID yang terbentuk baru mencapai 28,72% atau sebanyak 199 dari total 693 badan publik yang meliputi Kementerian/ Lembaga Negara/ Lembaga Setingkat Menteri/ LNS/ LPP. Pada tahun 2013, target PPID yang akan dibentuk mencakup perangkat pendukung yang diharapkan dapat mencapai 70 lembaga pemerintah non kementerian, 15 pemerintah provinsi, dan 136 kabupaten/kota. Kerja sama berbagai pihak termasuk masyarakat sangatlah penting untuk mendorong kesuksesan terwujudnya pemerintahan yang terbuka. Di bawah ini gambaran perkembangan pembentukan PPID sampai dengan akhir tahun 2012.

GAMBAR 6.3
JUMLAH PPID YANG TELAH TERBENTUK



Sumber : Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2012

6.1.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014

Berkenaan dengan kondisi umum politik di Indonesia, maka permasalahan yang akan dihadapi pada tahun 2014 mendatang adalah sebagai berikut:

Pertama, kesiapan lembaga penyelenggara Pemilu untuk mempersiapkan tahapan terakhir pelaksanaan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD pada bulan April 2014, dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden putaran pertama pada bulan Juli 2014. Tantangan pada tahun 2014 mendatang adalah bagaimanakah petugas teknis di lapangan dapat melakukan tugasnya terkait dengan pengadaan barang dan jasa, distribusi surat dan kotak suara tepat waktu, pengelolaan tempat pemungutan suara, dan penghitungan suara termasuk penyampaian rekap hasil perhitungan suara melalui teknologi informasi. Tantangan utama bagi lembaga pengawas Pemilu adalah memastikan semua tahapan dapat dilalui tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Berkenaan dengan pemutakhiran data pemilih, ketersediaan DPT yang akurat akan tetap menjadi tantangan dalam tahun 2014. KPU harus dapat bekerja sama dengan seluruh pemerintah daerah dan masyarakat agar aktif turut membantu pemutakhiran data sampai dengan awal tahun 2014. Sosialisasi aktif akan menjadi penentu ketersediaan data yang akurat dan tepat waktu

Kedua, pendidikan pemilih akan menghadapi tantangan intensitas dan tepat sasaran bagi pemilih pemula, orang miskin, perempuan dan penyandang cacat. Begitu pun dengan lingkup pelaksanaannya yang seharusnya menyentuh kelompok masyarakat di daerah terpencil. Dalam Pemilu 2014, ada perubahan metode pemberian suara di TPS, dari mencontreng menjadi mencoblos kembali. Pengenalan terhadap calon legislatif dan partai politik merupakan substansi dari pendidikan pemilih dan politik yang dilakukan dalam kurun waktu yang pendek pada awal tahun 2014 mendatang. Kerja sama dengan berbagai pihak perlu dilakukan agar pendidikan politik yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat saling mendukung dan melengkapi.

Dalam meningkatkan rasa cinta kebangsaan, meningkatkan toleransi, sekaligus menjaga situasi sosial dan politik menghadapi Pemilu, pengembangan lebih lanjut program pendidikan kebangsaan dan gagasan pembangunan pusat pendidikan kebangsaan sangat diperlukan. Masalah-masalah yang berkenaan dengan pendekatan dan metode pelaksanaan pendidikan kebangsaan perlu dicarikan jalan keluarnya yang terbaik, melalui diskusi dan pembahasan intensif diantara berbagai lembaga terkait.

Ketiga, partai politik akan menghadapi permasalahan dan tantangan akuntabilitas dan perannya sebagai wadah rekrutmen dan pengkaderan untuk menghasilkan calon pemimpin yang akan duduk di lembaga legislatif dan yang akan menduduki jabatan Presiden/Wakil Presiden untuk kurun waktu 2014–2019. Penurunan kredibilitas yang terjadi saat ini perlu dibuktikan ketidakbenarannya pada tahun 2014 mendatang.

Keempat, organisasi masyarakat sipil akan menghadapi tantangan terkait perannya dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2014 dan pengawasannya. Selain itu, konsolidasi OMS untuk membangun kapasitas dan menjamin keberlanjutannya ke depan antara melalui pengembangan *Democracy Trust Fund* (DTF) dan program pengembangan kapasitasnya akan menghadapi permasalahan kurang efektifnya program dimaksud, sehingga dampak pelaksanaan program peningkatan kapasitas bagi OMS belum dapat dirasakan. Begitu pula halnya dengan efektivitas program kerja sama dengan OMS yang masih akan menghadapi kendala terkait disain yang kurang tepat, proses seleksi yang masih belum partisipatif dan

transparan dan pengawasan pelaksanaannya yang belum cukup profesional dan akuntabel.

Kelima, penanggulangan terorisme menghadapi sejumlah permasalahan domestik maupun internasional. Pada sisi dalam negeri, BNPT masih menghadapi kendala hukum yang masih memberi keleluasaan bergerak cukup lebar bagi para ideolog, perencana, pelaku lapangan maupun simpatisan terorisme di Indonesia. Gerakan yang luas mencabut akar terorisme dari bumi Indonesia memerlukan payung konstitusi dan perundangan yang tegas, serta program pencegahan dan penindakan terhadap tindakan terorisme yang tepat waktu dan tepat sasaran. Penindakan secara dini perlu dilindungi oleh peraturan yang jelas, sehingga tidak mudah menimbulkan persepsi yang tidak diharapkan seolah-olah terorisme adalah persoalan yang tidak nyata, mengawang-awang dan karangan aparat intelijen belaka. Pada sisi internasional, ideologi terorisme yang menghalalkan cara kekerasan, mendapatkan dukungan secara langsung ataupun melalui jalur tidak langsung dari pendanaan pihak tertentu yang memiliki sumber daya keuangan yang besar. Hal ini kiranya perlu mendapatkan perhatian yang serius dari semua pihak, termasuk konsolidasi semua pihak untuk menghadapi bahaya besar terorisme bagi keamanan dan stabilitas politik, bahkan keberadaan NKRI sendiri.

Keenam, masih tingginya tingkat konflik kekerasan dalam masyarakat, termasuk terhadap kelompok-kelompok minoritas agama dan keyakinan tertentu serta kekerasan yang menyertai penyampaian aspirasi di ruang-ruang publik, yang berkaitan dengan isu-isu politik, maupun sosial budaya dan keagamaan. Selain itu, yang perlu diperhatikan secara serius adalah kekerasan terhadap kaum perempuan yang oleh sementara kalangan masyarakat sipil dianggap belum pernah menjadi *concern* Pemerintah untuk dapat ditangani secara serius dan mendasar. Apabila tidak ditangani secara tuntas, berbagai modus kekerasan yang tidak ditangani secara hukum, maka sewaktu-waktu diperkirakan dapat menjadi bibit-bibit konflik baru yang lebih sulit untuk diselesaikan dan dapat muncul terutama memanfaatkan momentum politik, termasuk momentum politik dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2014.

Ketujuh, di bidang informasi dan komunikasi, permasalahannya adalah masih rendahnya komitmen pimpinan badan publik yang masih menganggap keterbukaan informasi sebagai beban tambahan, bukan modalitas untuk mewujudkan badan

pemerintah yang kredibel dan akuntabel. Hal lain terkait dengan kesiapan badan publik dalam melaksanakan UU KIP dimaksud, seperti kesiapan sumber daya termasuk paradigma dan kapasitas, penyediaan isi informasi (*content*), dan anggaran. Disamping itu, gerakan bersama untuk melaksanakan keterbukaan informasi masih akan terbentur pada pola pendekatan dan intensitas pelaksanaan kampanye/ sosialisasi yang terbatas dan masih kurang menggema sampai ke daerah.

Disamping itu, meskipun pembangunan komunikasi dan informasi telah dan terus dilakukan untuk meningkatkan akses dan ketersediaan informasi publik, namun hingga saat ini masih ada kesenjangan akses informasi dan persebarannya antara masyarakat di perkotaan dan di perdesaan. Media tradisional di Indonesia akan menghadapi tantangan adanya persaingan pemilik perusahaan media yang memusatkan perhatian pada internet dan jejaring sosial. Begitupun yang dihadapi oleh media komunitas baik radio dan televisi. *Media center* yang telah dikembangkan di Indonesia dan telah diperkuat akan menghadapi tantangan efektifitasnya sebagai sarana penyebaran informasi publik dan akses komunikasi masyarakat.

Kekhasan media tradisional sebagai media yang relevan dengan budaya masyarakat setempat, yang sifatnya menghibur, dan sebagai sarana pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya sekaligus perekat persatuan dan kesatuan bangsa harus didukung oleh berbagai pihak. Peran media komunitas baik cetak maupun elektronik juga tetap dibutuhkan karena mempunyai segmentasi sendiri meskipun terbatas yaitu pada masyarakat lokal/setempat.

Dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan tersebut di atas, pada tahun 2014 sasaran pembangunan yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya akuntabilitas lembaga demokrasi;
2. Meningkatnya iklim politik kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat;
3. Meningkatnya peran informasi dan komunikasi.

6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014

Untuk mencapai sasaran pembangunan bidang politik dalam negeri dan komunikasi, prioritas bidang politik adalah pelembagaan demokrasi yang dilakukan melalui strategi (1) peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi; (2) peningkatan

iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak politik rakyat; serta (3) peningkatan peran informasi dan komunikasi.

Berdasarkan fokus prioritas di atas, maka untuk mencapai sasaran pada tahun 2014, arah kebijakan yang akan diambil adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas lembaga-lembaga penyelenggara negara melalui:
 - I. Penguatan kapasitas penyelenggara pemilu dalam menyelesaikan tahapan Pemilu 2014 dan meningkatkan kualitas pengawasan partisipatif oleh masyarakat terhadap tahapan pemilu, terutama dalam hal penyediaan DPT yang baik dan penyediaan fasilitas yang memadai bagi kelompok marjinal termasuk penyandang cacat sampai dengan pengumuman pemenang pemilu.
 - II. Pemberian bantuan keuangan pada partai politik untuk mendukung pelaksanaan fungsi pendidikan politik kepada masyarakat.
 - III. Pemantapan koordinasi dan konsolidasi antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil dalam pembentukan *democracy trust fund* untuk mendukung keberlanjutan OMS, serta peningkatan kapasitas OMS.
 - IV. Mendorong koordinasi dan kerjasama yang lebih solid antar lembaga pemerintah dalam penanggulangan tindakan terorisme.
 - V. Penguatan kapasitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)
- b. Menjaga dan menciptakan iklim politik yang dapat menjamin kebebasan sipil dan penghormatan terhadap hak-hak politik rakyat, serta berkembangnya demokrasi secara berkelanjutan, melalui:
 - I. Pendidikan kebangsaan Indonesia melalui program kerjasama dengan OMS, pemantapan pokja demokrasi di daerah dan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah.
 - II. Pemantapan pembangunan Pusat Pendidikan Kebangsaan (PPK). Pembangunan PPK dimaksud berintikan pada pengembangan dan pemahaman empat pilar dengan konten yang mengutamakan

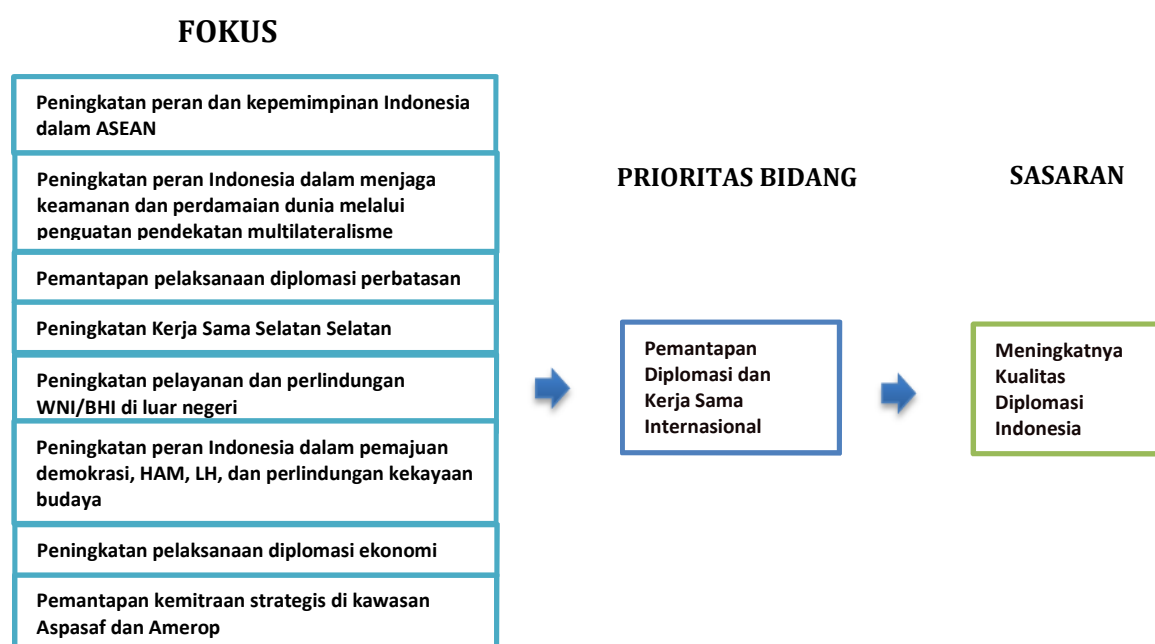
pendekatan kultural dalam menyelesaikan berbagai perbedaan, dan pendidikan budi pekerti.

- III. Pelaksanaan pendidikan pemilih secara konsisten, terutama dengan menanamkan hak dan kewajiban dalam demokrasi dengan mengutamakan konten anti-politik uang dan persamaan hak kaum majinal termasuk penyandang disabilitas dalam pemilu.
 - IV. Peningkatan fasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kredibilitas anggota parlemen perempuan.
 - V. Penguatan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT), serta pementapan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, dalam upaya penanggulangan kejahatan terorisme melalui pendekatan persuasi dan dialog.
 - VI. Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindakan terorisme.
 - VII. Penguatan FKUB, FKDM, Kominda, FPK, dan organisasi kemasyarakatan lainnya di daerah dalam mendukung proses pencegahan dan penyelesaian konflik vertikal dan horizontal, konflik yang diakibatkan oleh provokasi yang menyebar kebencian (*hate speech*), serta tindakan diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan.
 - VIII. Pelembagaan dialog publik antara pemerintah dengan berbagai kelompok di wilayah konflik dan pasca-konflik, baik vertikal dan horizontal serta difokuskan pada perlindungan khusus terhadap kelompok perempuan dan anak-anak.
- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyebaran dan pemanfaatan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat luas, melalui:
- I. Percepatan pelaksanaan UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP dan PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No.14 tentang KIP, serta peraturan pelaksanaan lainnya yang semakin luas untuk mendukung perwujudan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).
 - II. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM komunikasi dan informasi terutama di daerah.
 - III. Peningkatan kualitas konten informasi publik
 - IV. Penyebaran informasi publik melalui berbagai media.

- V. Peningkatan efektivitas pelayanan *media center* terutama di daerah terdepan/terluar, tertinggal, terpencil, serta daerah konflik dan pasca konflik vertikal dan horisontal.
- VI. Penguatan peran media tradisional dan peningkatan kapasitas media komunitas dalam penyebaran informasi publik.

6.2 Subbidang Politik Luar Negeri

GAMBAR 6.4
KERANGKA BERPIKIR SUB BIDANG POLITIK LUAR NEGERI



Politik dan kebijakan luar negeri Indonesia hingga tahun 2014 dirumuskan dan dilaksanakan dalam kerangka berpikir yang tertuang dalam RPJMN 2010-2014. Kerangka tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas diplomasi Indonesia, yang dicapai melalui pemantapan diplomasi dan kerja sama internasional. Dengan mengacu kepada tahapan RPJPN 2005-2025, yang menegaskan bahwa Indonesia akan memulihkan posisi penting di kancah internasional pada masa RPJMN 2010-2014, Indonesia memfokuskan perhatian pada 8 wilayah utama.

Delapan wilayah utama tersebut, yakni kerjasama ASEAN, perdamaian dunia, diplomasi perbatasan, perlindungan WNI di luar negeri, pemajuan demokrasi dan HAM, peningkatan kerjasama bilateral dan regional, diplomasi ekonomi, dan penguatan Kerjasama Selatan-Selatan, menjadi panduan Indonesia dalam melaksanakan politik dan kebijakan luar negerinya.

6.2.1. Kondisi Umum

Sepanjang tahun 2011 dan 2012, politik luar negeri Indonesia telah menghadapi situasi global dan kawasan yang penuh tantangan. Tantangan tersebut diantaranya adalah konflik di berbagai belahan dunia yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, kekhawatiran resesi perekonomian berkepanjangan di kawasan tertentu, serta perjuangan umat manusia memenuhi kebutuhan dasar. Kondisi ini mencerminkan semakin kompleksnya keterkaitan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat internasional dan perlunya mengambil langkah bersama untuk menghadapinya.

Keterkaitan berbagai permasalahan tersebut juga tercermin di kawasan Asia dan Pasifik, dimana stabilitas dan keamanan adalah suatu prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Sehubungan dengan hal itu, selama tahun 2012 politik luar negeri Indonesia telah bekerja keras untuk memelihara stabilitas dan keamanan di kawasan tersebut dari berbagai ancaman.

Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam Kerjasama ASEAN

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke 21 ASEAN pada bulan November 2012 di Phnom Penh Kamboja telah mengesahkan *ASEAN Human Rights Declaration (AHRD)*, meluncurkan *ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (AIPR)*, meluncurkan *Bali Concord III Plan of Action*, dan mengesahkan *Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*.

Peluncuran AIPR dalam KTT ke 21 tersebut menunjukkan peran Indonesia menggagas pendirian AIPR sejak keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2011. AIPR akan berlokasi di Jakarta, dan akan memberikan penguatan terhadap kapasitas ASEAN dalam mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai.

Untuk menguatkan peran di ASEAN, Indonesia mendukung gagasan untuk menjadikan Jakarta sebagai *diplomatic capital of Southeast Asia*. Hal ini diharapkan dapat menarik sebanyak mungkin pertemuan berskala internasional ke Jakarta dengan harapan bahwa selaku *host* dan/atau *chair* Indonesia dapat menjadi *agenda-setter* sehingga dapat memasukan kepentingan nasional ke dalam agenda internasional/global. Selain itu, kehadiran masyarakat asing (*expatriates*) akan membawa manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Dalam isu nuklir, tiga langkah yang diusulkan Indonesia pada KTT ASEAN ke-20 telah disepakati oleh negara-negara ASEAN dan akan ditindaklanjuti dengan penyelesaian pembahasan akses (pengesahan perjanjian internasional tanpa turut menandatangani naskah perjanjian) para negara pemilik senjata nuklir terhadap *Protokol Southeast Asian Nuclear Weapon Free Zone* (SEANWFZ). Ketiga langkah tersebut adalah penandatanganan *ASEAN Statement*; MOU antara ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengenai isu kedaulatan; dan Protokol SEANWFZ oleh para pemilik senjata nuklir.

Di bidang hak asasi manusia (HAM), disahkannya ASEAN *Human Rights Declaration* (AHRD) merupakan capaian penting pemajuan nilai-nilai HAM di ASEAN karena AHRD merupakan Deklarasi HAM regional pertama di Asia. Pengesahan AHRD juga merupakan keberhasilan Indonesia yang secara konsisten mendorong dibentuknya deklarasi HAM yang merupakan salah satu mandat ASEAN *Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR).

Dalam hal demokrasi, perkembangan di Myanmar merupakan contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam memberikan dorongan untuk tetap konsisten menjalankan demokrasi. Indonesia juga terus mengupayakan pencabutan seluruh sanksi yang dikenakan kepada Myanmar dalam kerangka mendukung proses demokratisasi dan pembangunan ekonomi, serta memenuhi komitmen untuk memberikan bantuan dan dukungan dalam mempersiapkan Keketuaan Myanmar untuk ASEAN di tahun 2014.

Dalam bidang ekonomi, diplomasi Indonesia telah berjuang untuk mendorong dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara yang kuat, berkelanjutan dan inklusif. Penyelesaian *scorecard* atau perangkat pencatatan capaian untuk pencapaian Komunitas Ekonomi ASEAN serta kesiapan

Indonesia dalam menyongsong Komunitas tersebut terus menjadi perhatian.

Peran Indonesia dalam Menjaga dan Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Penguatan Pendekatan Multilateralisme

Peran Indonesia dalam menjaga dan menciptakan perdamaian dunia telah dilaksanakan di berbagai belahan dunia. Di Asia Pasifik, terkait persoalan Laut China Selatan, Indonesia bergerak melalui *shuttle diplomacy* untuk mengkonsolidasikan posisi ASEAN. Diplomasi Indonesia telah mendorong momentum pelaksanaan secara menyeluruh *Guidelines for the Implementation of Declaration on Conduct of Parties in the South China Sea* (DoC) termasuk di dalamnya suatu *regional code of conduct* (COC) melalui disepakatinya elemen-elemen dasar CoC termaksud serta pengajuan suatu draft awal CoC.

Di tingkat multilateral, Indonesia diakui atas prakarsa dan konsistensinya dalam mendorong reformasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB). *Intermediate approach* yang diusung oleh Indonesia dalam mencegah kebuntuan perundingan telah mendapat perhatian dan dukungan sejumlah negara dari kelompok kunci. Partisipasi Indonesia dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB (UN PKO) juga mendapatkan apresiasi masyarakat internasional dan berperan penting dalam menguatkan postur Indonesia di PBB. Pada tahun 2012, Indonesia berada pada posisi ke-15 negara penyumbang pasukan pada misi-misi PBB dengan 7 misi dan 1,992 personel.

Di kawasan Timur Tengah, Indonesia mengirimkan enam personel dalam rangka misi pemantau PBB di Suriah untuk melihat kemungkinan pengiriman tim pemantau yang lebih besar. Terkait isu Palestina, pada tahun 2012 Indonesia bersama 63 negara lainnya memprakarsai pengajuan resolusi Majelis Umum PBB untuk memberikan status Negara Peninjau Non-Anggota PBB (*non-member observer state*). Berdasarkan pemungutan suara di PBB pada tanggal 29 November 2012, 138 negara mendukung, 9 negara menolak, dan 41 negara abstain. Pengesahan resolusi PBB tersebut membuat Palestina menjadi negara yang diakui oleh masyarakat internasional dan memiliki hak untuk berperan aktif dalam seluruh organ-organ PBB.

Terkait dengan perdagangan dan penyelundupan manusia, dalam kerangka multilateral, Indonesia juga telah memiliki komitmen dalam *Bali Process*, antara lain kerjasama pertukaran informasi dan intelijen, kerjasama antarlembaga penindakan

hukum di kawasan untuk mencegah dan memerangi jaringan perdagangan dan penyelundupan manusia, kerjasama perbatasan dan sistem pelayanan visa untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan-kegiatan ilegal, peningkatan kesadaran warga, kerjasama memverifikasi identitas dan kebangsaan pelintas batas dan korban perdagangan manusia, pelaksanaan legislasi nasional untuk penindakan kejahatan perdagangan dan penyelundupan manusia, pemberian perlindungan dan bantuan kepada korban perdagangan manusia, dan sebagainya.

Pelaksanaan Diplomasi Perbatasan

Indonesia memiliki batas laut dengan 10 (sepuluh) negara yakni India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Timor-Leste dan Australia; serta memiliki batas darat dengan 3 (tiga) negara, yakni Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste.

Indonesia telah menyepakati sebagian segmen batas laut wilayah dengan Malaysia, Singapura dan Papua Nugini; batas Landas Kontinen (LK) dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Australia, dan Papua Nugini; serta batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan Australia.

Indonesia terus melakukan peninjauan perundingan perbatasan laut yang terkait Laut Wilayah (Laut Teritorial) dengan Malaysia, Singapura dan Timor Leste; Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Palau dan Timor Leste; serta Landas Kontinen (LK) dengan Malaysia, Filipina, Palau dan Timor Leste. Prioritas utama tahun 2013 adalah menjajaki perundingan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, dan Palau.

Terkait penetapan batas darat, penetapan batas darat dengan Papua Nugini telah dilakukan dengan tuntas, sementara perundingan dengan Malaysia dan Timor Leste masih berlangsung. Segmen perbatasan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan adalah segmen Kalimantan Timur/Sabah, Kalimantan Barat/Serawak, dan Nusa Tenggara Timur/Timor Leste.

Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI

Upaya perlindungan WNI di luar negeri menjadi prioritas utama dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan. Hal ini dilakukan mulai dari pemberian bantuan dalam kasus hukum yang menyangkut tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri

hingga penyelamatan dan perlindungan WNI dari bencana alam serta instabilitas politik di suatu negara.

Beberapa capaian penting dalam rangka perlindungan WNI di luar negeri sepanjang tahun 2012 sampai dengan Februari 2013 antara lain repatriasi WNI dari Suriah, pembebasan WNI/TKI yang terancam hukuman mati, penanganan kasus anak buah kapal (ABK) yang terlibat *people smuggling*, penanganan kasus kasus penyanderaan ABK WNI, dan penanganan ABK yang mengalami kecelakaan. Selain itu, pada tahun 2012 penanganan kasus WNI bermasalah turun 50,57% dibandingkan tahun 2011, dimana tahun 2011 penanganan kasus WNI bermasalah sebanyak 38.880 sedangkan pada tahun 2012 turun menjadi 19.218 kasus.

Pemerintah telah melakukan negosiasi pembuatan perjanjian bilateral di bidang ketenagakerjaan, termasuk perlindungan hukum. Indonesia juga terus melaksanakan perundingan mengenai *Mandatory Consular Notification* (MCN) dengan negara-negara pengguna jasa TKI. Indonesia telah memiliki MCN dengan Australia dan Brunei Darussalam. Saat ini Indonesia sedang melakukan proses pembahasan MCN dengan Filipina, Vietnam, dan Persatuan Emirat Arab. Di samping itu Indonesia sedang melakukan pembahasan revisi MoU dengan Arab Saudi dan Malaysia, khususnya tentang pemberian libur satu hari, angka minimum gaji, dan ketentuan bahwa paspor dipegang oleh TKI yang bersangkutan.

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus WNI di luar negeri, database Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI telah dibangun sejak awal tahun 2012. Database ini berisi informasi mengenai jumlah, profil dan karakteristik WNI yang berada di luar negeri. Informasi ini berguna dalam merumuskan kebijakan, penanganan kasus dan diseminasi informasi terkait dengan isu perlindungan WNI di luar negeri, khususnya TKI.

Peningkatan Peran Indonesia di Dunia Internasional dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya

Dalam isu HAM, Indonesia terus berperan aktif sebagai anggota Dewan HAM PBB periode 2011-2014 dan dalam berbagai pembahasan isu HAM di Komite III Majelis Umum dan Dewan Ekonomi, Sosial dan Budaya PBB, salah satunya dengan memimpin Sidang Sesi ke-45 Komisi Pembangunan dan

Kependudukan PBB, yang menghasilkan pengadopsian Resolusi mengenai Remaja dan Pemuda.

Indonesia juga berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan peran perempuan di negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), antara lain dengan berperan aktif dalam pembentukan *Independent and Permanent Human Rights Commission* (IPHRC) OKI.

Di tingkat Kawasan, Indonesia bersama negara ASEAN lainnya terus mendorong agar agenda demokrasi dan HAM menjadi prioritas Komunitas ASEAN. Perkembangan positif demokrasi dan transformasi politik di Kawasan ditandaiolehperkembangan di Myanmar.

Pada tingkat bilateral, terus diberdayakan Dialog/Konsultasi HAM Bilateral dengan Norwegia, Swedia, Kanada, Rusia dan Uni Eropa sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk membangun kerjasama di bidang HAM dengan masyarakat internasional.

Melalui *Bali Democracy Forum* (BDF) V Indonesia secara konsisten mendorong agenda demokratisasi di kawasan Asia melalui dialog berbagi pengalaman pemajuan demokrasi yang universal tanpa menghilangkan nilai dan aspek kekhususan masing-masing negara. Berbeda dengan BDF I-IV yang merupakan pertemuan tingkat menteri, BDF V adalah Pertemuan Tingkat Tinggi dan dihadiri oleh 12 kepala negara dan 83 delegasi dari Asia Pasifik dan negara lainnya.

Indonesia berperan aktif melalui berbagai inisiatif dan dukungan untuk bidang kemanusiaan. Sebagai negara rawan bencana yang terbukti mampu bangkit pasca bencana besar, Indonesia telah menjadi salah satu model penanggulangan bencana. Terkait konflik Rohingya di Myanmar, Pemerintah Indonesia telah memberikan *pledge* bantuan kemanusiaan sebesar US\$ 1 juta.

Peningkatan Kerjasama Bilateral dan Regional di Kawasan Asia Pasifik Afrika dan Kawasan Amerika Eropa

Di tingkat bilateral, Indonesia telah memiliki 14 kemitraan strategis, yaitu dengan Australia, RRT, Jepang, Korea, India, Afrika Selatan, Uni Eropa, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Jerman, Brasil, Turki, dan Rusia. Saat ini, 15 perusahaan Indonesia telah beroperasi di sejumlah negara Afrika (mayoritas secara *joint venture*), utamanya Nigeria, Ghana, Zimbabwe dan Gambia. Total perdagangan RI-Afrika pada tahun 2011 mencapai US\$ 9.58 milyar, meningkat sebesar 59% dari

tahun sebelumnya. Pada pertengahan tahun 2012, pasar ekspor non-tradisional Indonesia di kawasan Afrika telah mencapai peningkatan 46%.

Dalam Kerangka Kemitraan Komprehensif RI- Amerika Serikat (AS), Pemerintah Indonesia dan AS telah melaksanakan *Plan of Action* (PoA) dan evaluasi pelaksanaannya di bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial budaya dan pendidikan. Dalam pertemuan *Joint Commission Meeting* (JCM) III, September 2012 di Washington D.C, kedua pemerintah menilai bahwa mekanisme *Comprehensive Partnership* semakin sistematis dan terarah, serta telah mencapai taraf yang lebih tinggi dengan memberikan kontribusi yang lebih luas di luar kerangka bilateral, termasuk mendukung terciptanya kawasan yang aman, stabil dan sejahtera.

Di tingkat regional, melalui Keketuaan Indonesia pada APEC 2013, Indonesia berpeluang menunjukkan kepemimpinannya dalam pembentukan tatanan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Tema APEC 2013 adalah "*Resilient Asia Pacific, Engine of Global Growth*". Dengan tema ini, Indonesia terus mendorong agar kawasan Asia Pasifik dapat terus tumbuh kuat, kokoh, dan berketahanan, sebagai lokomotif pertumbuhan ekonomi dunia. Indonesia memiliki 3 prioritas utama yaitu: (i) *Attaining the Bogor Goals*, dengan fokus pada pencapaian *Bogor Goals* - perluasan perdagangan dan investasi, dan reformasi struktural; (ii) *Achieving Sustainable Growth with Equity*, dengan fokus pada daya saing global UKM, *financial inclusion*, ketahanan pangan, dan kesehatan; dan (iii) *Promoting Connectivity* dengan fokus pada konektivitas fisik, termasuk pengembangan dan investasi infrastruktur dan konektivitas kelautan (*Blue Economy*), konektivitas institusional, dan konektivitas *people-to-people*.

Dengan perkembangan arsitektur kawasan yang semakin kompleks, Indonesia berkeyakinan di bawah kepemimpinannya pada APEC tahun 2013, APEC dapat memberikan kontribusi dan nilai tambah bagi ketahanan ekonomi kawasan Asia Pasifik dan bagi pertumbuhan ekonomi global dan kesejahteraan masyarakat dunia.

Pada tahun 2013, bersama Kolombia, Indonesia menjadi ketua *Forum for East Asia and Latin America Cooperation* (FEALAC), sekaligus tuan rumah pertemuan tingkat Menteri, yang difokuskan pada upaya untuk meningkatkan kerja sama antara kawasan Asia dan Amerika Latin untuk mengatasi tantangan

global, khususnya kondisi perekonomian global yang belum pulih.

Peningkatan Kerjasama Multilateral di Bidang Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Budaya dan Pariwisata, serta Pembangunan

Sepanjang tahun 2012, diplomasi Indonesia bekerja keras memperkecil dampak negatif perkembangan krisis perekonomian global terhadap perekonomian Indonesia, melalui penajaman prioritas hubungan bilateral dan peningkatan hubungan ekonomi dengan negara yang merupakan pasar non tradisional.

Dalam berbagai forum (APEC, G-20, WTO, PBB, KTT Rio+20, Pembahasan Agenda Pembangunan Pasca 2015), Indonesia menekankan pentingnya pendekatan "*sustainable growth with equity*", yang dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, seimbang dan inklusif untuk memastikan keadilan dan pemerataan pertumbuhan ekonomi global. Hal ini terkait erat dengan penunjukan Presiden RI oleh Sekjen PBB untuk menjadi pemimpin bersama *High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda* yang akan memberikan masukan mengenai agenda pembangunan global pasca 2015 untuk dapat dibahas oleh seluruh negara anggota PBB.

Indonesia juga terus mendorong tercapainya kesepakatan Perundingan Putaran *Doha Development Agenda* (DDA) dalam forum WTO, dan menekankan bahwa isu pembangunan merupakan fokus utama dari Mandat Doha. Pada tahun 2013, Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan tingkat Menteri WTO dan memainkan peran menjaga keberlangsungan sistem perdagangan multilateral yang adil, terbuka dan transparan, agar sistem perdagangan internasional selaras dengan dan menjadi penopang agenda pembangunan global pasca 2015.

Peningkatan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS)

Sepanjang 2000-2010, Indonesia telah berkontribusi dalam KSS sebesar USD 42 juta, melalui program peningkatan kapasitas dan berbagai pengalaman di berbagai bidang antar negara berkembang di Asia, Afrika, Timur Tengah dan Pasifik. Selanjutnya, untuk memfokuskan bidang unggulan yang dapat dibagikan ke negara berkembang lainnya, Indonesia telah menetapkan *flagship* program tahun 2010-2014, yaitu: 1)

Agriculture, Food Security and Social Protection; 2) Disaster Risk Management; 3) Democratization and Good Governance; 4) Trade and Industry; 5) Infrastructure; 6) Human Development; dan 7) Palestinian Development.

Pada tahun 2012, Indonesia menginisiasi dan menjadi tuan rumah Pertemuan Pejabat Tinggi Kerja Sama Selatan-Selatan bertema "Kepemimpinan Nasional Negara Berkembang sebagai Simpul Jaringan Pengetahuan". Pertemuan diikuti oleh 290 pengambil kebijakan, praktisi dari 46 negara, organisasi internasional, serta bertujuan untuk mendorong pertukaran pengetahuan khususnya dalam membangun dan mengembangkan simpul-simpul jaringan pertukaran pengetahuan atau *knowledge hubs*.

Pertemuan ini menghasilkan *Bali Communique By the Co-Organizers* yang menegaskan pentingnya membangun dan peran simpul jaringan pengetahuan dalam kerjasama Selatan Selatan dengan dukungan semua pihak (pemerintah; mitra pembangunan; *civil society*; akedemisi; dan sektor swasta).

Indonesia juga berkontribusi dengan berpartisipasi aktif dalam berbagai konferensi, *workshop* dan seminar internasional mengenai Kerja Sama Selatan - Selatan, termasuk pertemuan *UN High Level Committee on South - South Cooperation* di New York pada bulan Mei 2012, serta terus memperkuat kemitraan dengan sejumlah negara berkembang, disamping negara maju, organisasi internasional serta lembaga keuangan internasional.

Kerja sama teknik merupakan alat diplomasi ekonomi yang penting karena setiap bantuan dan kerja sama teknik Indonesia dilaksanakan untuk membuka peluang pasar atas produk/jasa dan investasi Indonesia di negara penerima bantuan. Upaya tersebut dilakukan Indonesia melalui berbagai peran, termasuk *matchmaker, bridge builder, marketer* dan *opportunity seeker and sustainability*.

6.2.2. Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014

Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia dalam kerja sama ASEAN

Permasalahan untuk mewujudkan Komunitas ASEAN adalah masih adanya kesenjangan pembangunan di antara negara-negara ASEAN, kondisi politik dalam negeri dan keamanan yang berbeda dan belum berjalan sesuai dengan nilai dan norma universal, serta belum terbukanya masyarakat dalam pergaulan internasional. Perbedaan dan kesenjangan tersebut berpotensi menghambat keterhubungan antar-anggota ASEAN.

Permasalahan lain adalah masih terbatas dan belum sistematisnya sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat domestik tentang perwujudan Komunitas ASEAN 2015 yang akan mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015. Untuk itu perlu ada dukungan dan koordinasi pemerintah pusat dan daerah, dan seluruh masyarakat Indonesia. Selain itu, perlu ada perencanaan program dan penganggaran yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pemerintah pusat dan daerah, dan pemantapan disain strategi komunikasi dan sosialisasi kepada publik.

Di bidang ekonomi, untuk mendukung pencapaian *ASEAN Economic Community*, diperlukan sinergi antara Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) dengan *Master Plan of ASEAN Connectivity* (MPAC). Selain itu, diperlukan pula kerja sama dengan mitra wicara ASEAN untuk mendorong terbukanya lapangan kerja baru dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sedangkan di bidang sosial budaya, operasionalisasi *ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management* (AHA Center) di Jakarta perlu dimaksimalkan bagi kepentingan nasional.

Peran Indonesia dalam Menjaga dan Menciptakan Perdamaian Dunia melalui Penguatan Pendekatan Multilateralisme

Di kawasan ASEAN, Indonesia akan terus mendorong negara-negara ASEAN untuk memiliki kesamaan pandangan mengenai Laut China Selatan. Indonesia juga akan berupaya meningkatkan momentum pelaksanaan secara menyeluruh pelaksanaan *Document of Conduct* (DoC) Laut China Selatan. Kemajuan dalam pelaksanaan DoC diharapkan mampu meredam potensi konflik di Laut China Selatan.

Untuk kawasan Asia Pasifik, timbul kekhawatiran bahwa kawasan ini masih dihadapkan pada suatu era persaingan yang dapat mengancam perdamaian dan stabilitas. Untuk itu Indonesia akan terus mengingatkan pentingnya seluruh negara untuk mengikatkan diri pada "*Bali Principles*" yang disepakati pada saat *East Asia Summit* di Bali tahun 2011. *Bali Principles* adalah sebuah prinsip yang mengatur norma dasar perilaku dan hubungan antar negara di kawasan Asia dan Pasifik yang mengedepankan cara-cara damai dan menghindari penggunaan kekerasan dan ancaman penggunaan kekerasan.

Di tingkat multilateral, tantangan yang dihadapi dalam pemecahan masalah/konflik melalui mekanisme PBB adalah dalam hal mekanisme pengambilan kebijakan strategis di PBB. Hal ini terjadi karena posisi Dewan Keamanan (DK) lebih dominan daripada Majelis Umum (MU) dalam isu-isu keamanan dan konflik. Contoh nyata hambatan ini adalah adanya kebuntuan upaya diplomasi sepanjang tahun 2012 mengenai masalah Suriah yang telah menimbulkan banyak korban jiwa.

Terkait diplomasi Indonesia di PBB, perjuangan Indonesia mendorong reformasi DK PBB masih akan terbentur sikap sebagian anggota DK PBB yang resisten terhadap reformasi, khususnya terkait isu *enlargement* (distribusi keanggotaan yang lebih adil secara geografis) dan *veto power*, sehingga butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa melihat hasil nyata dari upaya ini. Meskipun demikian, Indonesia perlu terus konsisten menyampaikan inisiatif mengenai *intermediate approach* yang dapat menyediakan jalan tengah di PBB. Indonesia perlu berupaya mendorong reformasi melalui jalur *working methods* (mendorong transparansi, akses informasi persidangan), yang dalam jangka panjang, diharapkan dapat mendorong reformasi yang lebih mendasar pada isu *enlargement*, sehingga DK PBB menjadi lebih representatif.

Terkait partisipasi dalam UN-PKO, dengan semakin multi dimensionalnya sifat PKO, Indonesia perlu memperkuat upaya pengembangan pakar sipil (*civilian expert*) dalam misi pemeliharaan perdamaian dan program *peacebuilding* yang menyertainya. Transformasi misi perdamaian dari *military-focused* menjadi *civilian-focused* sebagai bagian dari upaya mendukung implementasi perjanjian perdamaian secara lebih komprehensif sangat penting dalam misi perdamaian PBB.

Untuk kawasan Timur Tengah, isu Palestina akan terus menjadi agenda prioritas diplomasi dan politik luar negeri Indonesia. Indonesia bersama masyarakat internasional lainnya akan terus membantu perjuangan Palestina untuk meningkatkan statusnya sebagai negara anggota penuh PBB. Hal ini merupakan proses yang tidak singkat, namun dapat dilakukan antara lain melalui peningkatan kapasitas negara Palestina; rekonsiliasi antara elemen di Palestina, serta dorongan bagi pemulihan kembali proses perdamaian Timur Tengah ke arah pemenuhan hak-hak mendasar bangsa Palestina sesuai resolusi PBB yang relevan serta prinsip "*two states solution*".

Pelaksanaan Diplomasi Perbatasan

Dalam melaksanakan diplomasi perbatasan, kesediaan negara mitra perbatasan untuk berunding menjadi faktor krusial atas kemajuan perundingan. Meskipun demikian, Indonesia akan terus mengupayakan secara intensif penetapan batas wilayah negara baik darat, udara, dan laut serta pengelolaan masalah perbatasan melalui *border diplomacy*. Hal ini bisa dilakukan dengan menjajaki kesiapan dan kesediaan negara *counterpart* untuk melakukan perundingan, baik melalui perwakilan RI di negara tersebut, maupun melalui perwakilan diplomatik negara tersebut di Jakarta.

Sesuai dengan tingkat kepentingan kawasan termasuk faktor strategis, navigasi dan sumber kekayaan alam yang ada maka prioritas penyelesaian masalah perbatasan adalah perundingan penetapan perbatasan dengan Malaysia (batas darat dan laut), Singapura (batas laut wilayah segmen timur), Filipina (batas Zona Ekonomi Eksklusif - ZEE dan Landas Kontinen - LK), Palau (batas ZEE), Vietnam (batas ZEE), Thailand (batas ZEE), dan India (batas ZEE), Timor-Leste (batas darat), dan perundingan penetapan perbatasan dengan Timor Leste (batas laut wilayah, ZEE, LK).

Upaya pelaksanaan diplomasi perbatasan tersebut disertai dukungan, antara lain berupa survey dan verifikasi titik batas negara, verifikasi pelanggaran wilayah, sosialisasi penetapan garis batas negara kepada masyarakat di kawasan perbatasan, serta peningkatan efektivitas pos lintas batas (bea cukai, imigrasi, karantina dan keamanan). Selain itu, akan dilakukan pula kegiatan monitoring dan evaluasi implementasi perjanjian lintas batas (*Border Crossing Agreement*) antara RI dan Malaysia, PNG, Timor Leste dan Papua Nugini.

Dalam rangka menunjang diplomasi perbatasan, perlu dilaksanakan sosialisasi di dalam negeri bagi pihak-pihak yang sangat berkaitan dalam menggunakan informasi perbatasan, misalnya para nelayan Indonesia. Sosialisasi tersebut sangat penting untuk mengurangi jumlah nelayan Indonesia yang ditangkap di negara lain karena melanggar perbatasan. Di sisi lain, hal ini juga penting dalam menunjang upaya perlindungan bagi WN. Dalam hal ini, kegiatan kunjungan ke daerah-daerah perbatasan perlu terus dilaksanakan guna memperoleh data yang aktual dan akurat, serta tetap membina koordinasi.

Peningkatan Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI

Dalam hal pelayanan dan perlindungan WNI, beberapa permasalahan yang menonjol adalah evakuasi WNI, repatriasi dan deportasi, tuntutan hukuman mati, pembebasan sandera WNI dan pemutihan status TKI ilegal di Malaysia. Dalam kasus hukuman mati bagi WNI di luar negeri, di beberapa negara tidaklah mudah untuk mendapatkan akses kekonsuleran karena negara tersebut tidak mengikuti praktek internasional dimana setiap WNA yang bermasalah harus diinformasikan kepada kantor perwakilan pemerintahnya. Untuk lebih memaksimalkan bantuan advokasi dan litigasi kepada WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, pemerintah sedang mempersiapkan pengacara tetap (*retainer lawyer*) di Malaysia dan Arab Saudi yang akan mengawal proses hukum setiap WNI/TKI yang menghadapi kasus hukum pidana berat.

Sehubungan dengan pembelaan hukum bagi WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati, langkah yang perlu dikedepankan adalah pemberian bantuan hukum yang cepat, tepat dan efektif. Untuk itu Presiden telah mengeluarkan Keppres No 17 tahun 2011 tanggal 7 Juli 2011 tentang Satuan Tugas Penanganan kasus WNI/TKI di Luar Negeri Yang Terancam Hukuman Mati dan Keppres No. 15 tahun 2011 tanggal 14 Juni 2011 tentang Tim Terpadu Perlindungan TKI di Luar Negeri. Di samping itu, peningkatan pemahaman para TKI mengenai hukum, aturan, dan sistem yang berlaku di negara tempat mereka bekerja juga menjadi tuntutan mendesak yang harus dipenuhi.

Pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri menuntut kesadaran para petugas di kantor Perwakilan RI di luar negeri yang harus melihat pelayanan sebagai sebuah kewajiban, bukan hanya membantu memfasilitasi penyelesaian persoalan yang dihadapi TKI. Para petugas perlu memiliki kapasitas dan dedikasi penuh serta memiliki informasi yang cukup dalam rangka pelayanan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Dalam kebijakan jaminan asuransi, pemerintah harus memperbaiki dan mendorong sistem asuransi yang akuntabel dan memberikan pemahaman proses pelayanan dan hak atas asuransi tersebut. Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di luar negeri harus memberikan solusi bagi masalah perlindungan asuransi untuk TKI yang selama ini dipandang kurang efektif. Di samping itu, banyak kalangan melihat bahwa dalam RUU perlu

mencantumkan hak-hak TKI dan keluarga sesuai dengan konvensi, sanksi pidana untuk swasta dan aparat negara yang mengabaikan perlindungan TKI.

Dalam hal koordinasi perlindungan WNI, diperlukan sinergi penggunaan data WNI/TKI yang ada di berbagai Kementerian/Lembaga. Sinergi ini dapat meningkatkan upaya perlindungan bagi WNI/TKI bahkan sebelum mereka berangkat ke luar negeri, misalnya melakukan pencegahan seandainya terjadi pemalsuan umur. Di sisi lain, perlindungan bagi WNI/TKI yang baru tiba dari luar negeri juga perlu mendapat perhatian. Diperlukan koordinasi yang kuat untuk memangkas hal-hal yang cenderung merugikan WNI/TKI yang baru tiba dari luar negeri, misalnya adanya pungutan-pungutan liar bagi TKI yang melalui Terminal Selapajang, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang.

Peningkatan Peran Indonesia di Dunia Internasional dalam Pemajuan Demokrasi, HAM, Lingkungan Hidup, dan Perlindungan Budaya

Melalui *Bali Democracy Forum* dan forum pemajuan demokrasi lainnya, Indonesia akan memfokuskan pada upaya untuk membantu negara yang sedang mengalami transisi demokrasi, untuk mendorong agar proses transformasi demokrasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan agenda negara dimaksud. Hal ini semakin relevan terkait dengan transformasi di kawasan Timur Tengah.

Di sisi lain, masih adanya sejumlah persoalan di tingkat domestik dalam isu demokrasi dan HAM yang melibatkan kekerasan aparat terhadap masyarakat dan kekerasan antar kelompok masyarakat perlu ditangani dengan baik. Upaya penanganan tersebut kemudian dapat dikomunikasikan kepada dunia internasional untuk menunjang politik luar negeri Indonesia, khususnya dalam promosi demokrasi dan HAM.

Berbagai tantangan di bidang HAM yang dihadapi oleh Indonesia saat ini cukup mendapatkan sorotan dari masyarakat internasional. Untuk itu, penyusunan dan penyampaian laporan-laporan periodik pelaksanaan instrumen-instrumen HAM internasional yang merupakan kesempatan Pemerintah RI untuk menjelaskan langkah yang ditempuh kepada dunia internasional menjadi langkah prioritas. Sebagai tindak lanjut dari laporan-laporan yang telah disampaikan oleh Indonesia, Pemerintah RI akan berpartisipasi dalam pembahasan laporan-

laporan tersebut sepanjang 2013-2014, termasuk untuk *International Covenant on Civil and Political Rights*, dan *Convention on the Rights of the Child*.

Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional akan terus berperan aktif dalam upaya bersama menanggulangi masalah-masalah dunia terkait HAM, termasuk melalui Dewan HAM PBB, Komite III Majelis Umum PBB, ECOSOC, ASEAN, OKI, dan Dialog/Konsultasi HAM Bilateral dengan beberapa negara mitra. Dengan posisi Indonesia yang memegang sejumlah jabatan di organisasi internasional seperti *Executive Board UN Women*, *Executive Board UNICEF*, *Commission on the Status of Women*, *Commission on Population and Development*, dan *OIC Independent Permanent Human Rights Commission*, Indonesia diharapkan dapat mendorong organisasi-organisasi tersebut untuk berfungsi lebih baik dalam melaksanakan mandatnya.

Terkait isu kemanusiaan, hingga kini Indonesia masih tetap dihadapkan dengan berbagai bencana alam yang menuntut kesiapsiagaan nasional, dan pada tahap tertentu, peningkatan kerja sama internasional. Sebagai salah satu negara terdepan dalam isu tersebut, Indonesia perlu terus berperan aktif dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama pada berbagai tingkatan, terutama pada tingkatan regional dan global. Selain itu, Indonesia akan terus meningkatkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan terkait masalah kemanusiaan lainnya, seperti penanganan pengungsi.

Dalam hal implementasi rekomendasi Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) RI - Timor Leste, meskipun telah banyak kemajuan, masih banyak hal yang perlu dilakukan oleh kedua negara untuk lebih mendorong implementasi. Diharapkan pada tahun 2014 Indonesia dan Timor-Leste dapat lebih meningkatkan upayanya demi terlaksananya setiap butir rekomendasi KKP.

Peningkatan Kerjasama Bilateral dan Regional di Kawasan Asia Pasifik Afrika dan Kawasan Amerika Eropa

Terkait dengan kemitraan strategis dengan berbagai negara di Kawasan Asia Pasifik, Afrika dan Amerika serta Eropa, permasalahan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya implementasi berbagai kesepakatan yang telah ditandatangani. Mengingat dokumen kesepakatan kemitraan strategis tersebut terkait dengan berbagai bidang seperti investasi, perdagangan, pendidikan, demokrasi, keamanan dan lain-lain, maka implementasinya juga membutuhkan pelibatan dan koordinasi

dengan pemangku kepentingan dari sektor terkait. Implementasi yang optimal akan membutuhkan upaya koordinasi yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak, termasuk tersedianya forum reguler dan mekanisme pencatatan dan pelaporan kemajuan kerjasama yang telah dicapai. Mekanisme koordinasi ini, misalnya, telah coba dilakukan dalam kerangka *Comprehensive Partnership* RI-AS yang melibatkan 8 kelompok kerja yang bertemu setiap 2 kali dalam setahun.

Untuk kemitraan strategis dengan Kawasan Afrika, dalam rangka memperkuat fondasi hubungan bilateral, pada tahun 2014 Indonesia akan melakukan peningkatan kunjungan *dignitaries* Indonesia ke kawasan dan sebaliknya, pengiriman misi dagang, pengadaan forum bisnis, penguatan *people-to-people contact*, dan juga pemberian bantuan *capacity building* kepada *least developed countries* di berbagai sektor. Sedangkan dalam rangka penguatan *people-to-people contact* dengan negara-negara Asia Pasifik dan Afrika, pada 2014 Pemerintah Indonesia akan semakin mendorong hubungan antar elemen masyarakat (budayawan, akademisi, insan pers, pemuda, asosiasi, swasta, pengusaha, dll) untuk meningkatkan interaksi dengan mitra kerja dari negara-negara Asia Pasifik dan Afrika sesuai bidangnya masing-masing. Kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain *familiarization trip*, kunjungan jurnalistik, beasiswa, pengiriman misi budaya, pertukaran pelajar, dosen, dan tenaga ahli.

Peningkatan Kerjasama Multilateral di Bidang Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Budaya dan Pariwisata, serta Pembangunan

Sepanjang tahun 2012, meskipun secara umum kemakmuran masyarakat dunia terus meningkat, krisis perekonomian global masih terasa dampaknya dan sebagian besar umat manusia masih dilanda kondisi kemiskinan yang mendasar. Tentunya kondisi perekonomian di beberapa negara di kawasan Euro telah berdampak terhadap berbagai dimensi kehidupan di negara tersebut. Perkembangan perekonomian di kawasan Euro berdampak bagi perekonomian global secara keseluruhan.

Di sisi lain, upaya negara anggota *World Trade Organization* (WTO) untuk segera menyelesaikan Perundingan Putaran DDA terus menghadapi kendala, sehingga mengancam kredibilitas WTO sebagai satu-satunya forum multilateral yang mengatur perdagangan antar negara. Meskipun penyelesaian Putaran Doha dipandang dapat memitigasi dampak negatif dari krisis,

namun tampaknya belum ada keinginan politis yang cukup kuat untuk menyelesaikannya.

Peningkatan Peran Indonesia dalam Kerja Sama Selatan-Selatan

Permasalahan yang perlu segera diatasi dalam pelaksanaan KSST antara lain perlunya landasan hukum yang kuat guna mengimplementasikan dokumen *Grand Design* dan *Blue Print* Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Hal ini juga terkait dengan aspek pembiayaan kegiatan yang diharapkan dapat didukung dengan APBN, disamping melalui skema kerjasama Triangular dengan mitra pembangunan.

Khusus untuk kerja sama triangular, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam merumuskan mekanisme yang tepat untuk mengatur hubungan antara ketiga negara dengan melibatkan mitrapembangunan yang terlibat. Di samping itu, sejumlah pihak juga melihat bahwa dalam kerjasama triangular, pihak Negara penerima manfaat seringkali lebih mengenal nama mitra pembangunan dari pada nama Indonesia. Tantangan lain adalah konsolidasi dan sinergi berbagai elemen KSS yang meliputi kerjasama ekonomi, teknik, sosial budaya dan Iptek supaya memberikan kontribusi dan manfaat yang optimal. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah masih perlu mengupayakan terwujudnya mekanisme *one gate policy* melalui Tim Koordinasi KSST. Tantangan lainnya adalah masih belum kuatnya persepsi diri terhadap status Indonesia sebagai *Middle Income Country*, sehingga paradigma "memberi" masih belum menjadi perhatian sebagian besar pemangkukepentingan di Indonesia.

Tantangan lain adalah munculnya skema baru yang mendorong kerjasama antar kawasan dan desentralisasi KSS dengan melibatkan lembaga di luar pemerintah pusat dan pemerintahan lokal. Tantangan lain bersumber dari situasi internasional, terkait dengan adanya kompetitor yang kuat dalam melakukan KSST, seperti India, Cina, dan Korea Selatan.

Merespon berbagai tantangan tersebut, perlu segera dilakukan penguatan kelembagaan KSS, menyusun tata cara pelaksanaan kerjasama dengan negara dan lembaga internasional, kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di level nasional dan lokal, pihak swasta, dan peningkatan kemampuan SDM pengelola KSS. Kerumitan penguatan kelembagaan ditengarai terletak pada koordinasi dan pengelolaan kerja sama berbagai

kementerian/ lembaga yang telah melaksanakan kerja sama KSS sejak lama, secara terpisah-pisah

Sejalan dengan pembentukan lembaga sentral bagi pemberian bantuan pembangunan, bantuan teknis Indonesia harus lebih mengacu pada fungsi kerja sama teknik sebagai *tool of economic diplomacy*. Penguatan koordinasi pusat dan perwakilan dalam pemberian bantuan pembangunan merupakan salah satu unsur penting. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan *awareness* dari semua pihak terkait, strategi yang matang dan sinergis agar kerja sama teknik terorganisir dan dapat dimanfaatkan secara menyeluruh untuk pembangunan ekonomi dan pencapaian kepentingan nasional Indonesia.

6.2.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas dan dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014, Strategi Pembangunan bidang Hubungan Luar Negeri adalah (a) peningkatan kepemimpinan dan peran Indonesia di ASEAN dan upaya untuk mencapai/mewujudkan komunitas ASEAN 2015; (b) Peningkatan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia; (c) Peningkatan diplomasi perbatasan; (d) Peningkatan peran Indonesia dalam pemajuan demokrasi, isu HAM, lingkungan hidup, dan budaya; (e) Peningkatan diplomasi ekonomi dan fasilitasi perluasan pasar non tradisional; (f) Perlindungan terhadap WNI dan BHI; (g) peningkatan peran Indonesia dalam kerja sama Selatan-Selatan.

Adapun arah kebijakan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik tentang ASEAN, serta meningkatkan kepemimpinan dan peran Indonesia dalam konteks ASEAN sebagai bagian dari arsitektur regional yang dinamis untuk mewujudkan Komunitas ASEAN 2015 dan menjaga stabilitas perdamaian dan keamanan kawasan.
2. Meningkatkan peran Indonesia dalam menjaga keamanan nasional dan perdamaian dunia, serta menjaga konsistensi sikap Indonesia dalam mendorong reformasi Dewan Keamanan PBB dan peningkatan status Palestina.
3. Meningkatkan diplomasi perbatasan dan menindaklanjuti hasil-hasil perundingan perbatasan,

serta melakukan koordinasi untuk mendorong penyelesaian *ocean policy*.

4. Meningkatkan diplomasi terkait perjanjian ketenagakerjaan, dan pemberian fasilitasi penampungan, pemulangan, dan bantuan hukum bagi WNI/BHI di luar negeri, serta penguatan *citizen services*.
5. Meningkatkan peran Indonesia melalui pemajuan demokrasi dengan penyelenggaraan *Bali Democracy Forum*, memperkuat kerja sama internasional di bidang pemajuan HAM dan kemanusiaan, mendorong pelaksanaan komitmen di tingkat domestik dan internasional terkait isu lingkungan hidup, serta mempercepat terbentuknya rezim internasional yang dapat memberikan perlindungan kekayaan budaya Indonesia.
6. Meningkatkan upaya fasilitasi perluasan pasar nontradisional, termasuk upaya promosi, khususnya di kawasan Asia Selatan, Afrika, Timur Tengah, Eropa Tengah dan Timur, serta menindaklanjuti berbagai kemitraan/kerjasama yang telah disepakati dengan berbagai negara.
7. Meningkatkan peran Indonesia dalam diplomasi ekonomi melalui forum regional dan multilateral seperti APEC, WTO, G-20, G-33, dan forum IOR-ARC.
8. Memantapkan kelembagaan KSS dan memperluas kerja sama teknis.

BAB 7

BIDANG PERTAHANAN DAN KEAMANAN

7.1. Kondisi Umum

Sasaran pokok pembangunan bidang pertahanan dan keamanan dalam periode RPJMN 2010-2014 adalah peningkatan kemampuan pertahanan negara dan peningkatan kondisi keamanan dalam negeri guna menjamin aktivitas masyarakat dan dunia usaha terselenggara dengan aman dan nyaman. Prioritas pembangunan yang ditetapkan adalah : (i) Peningkatan kemampuan pertahanan menuju *minimum essential force*; (ii) Pemberdayaan industri pertahanan nasional; (iii) Pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut (*illegal fishing* dan *illegal logging*); (iv) Peningkatan rasa aman dan ketertiban masyarakat; (v) Modernisasi deteksi dini keamanan nasional; dan (vi) Peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional.

Kinerja pembangunan bidang pertahanan dan keamanan secara umum berhasil meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan menciptakan serta memelihara kondisi keamanan dalam negeri menjadi semakin kondusif. Meskipun masih ada gangguan keamanan berupa beberapa insiden yang memerlukan perhatian khusus baik dari aparat keamanan, pemerintah dan masyarakat. Dukungan anggaran pembangunan pertahanan yang semakin memadai dan peran industri pertahanan nasional yang meningkat telah meningkatkan kesiapan alutsista TNI baik dalam aspek jumlah, kualitas, maupun teknologi. Kondisi tersebut akan meningkatkan daya penggentar sistem pertahanan negara dalam menghalau gangguan dan potensi ancaman kedaulatan NKRI.

Keberhasilan pembangunan keamanan dalam negeri antara lain dapat ditunjukkan oleh kondisi keamanan dan ketertiban yang terus meningkat. Meskipun ada gangguan keamanan dan ketertiban masih terjadi dan berdampak pada keraguan bagi sebagian masyarakat terhadap keberhasilan tersebut. Beberapa contoh gangguan yang masih terjadi adalah kasus-perampokan dengan senjata api dan tindak kriminal lainnya yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya, kasus kekerasan pada masyarakat seperti yang terjadi di Sampang Madura dan di Balinuraga Lampung Selatan, insiden konflik

yang menjurus pada tindak kekerasan di Papua, pemblokiran jalan tol di Bekasi berlatar belakang permasalahan buruh yang terulang kembali dan penegakan hukum pada kasus-kasus kriminal ringan dengan motif keterbatasan ekonomi yang menurut pihak-pihak tertentu kurang berpihak terhadap keadilan masyarakat.

Untuk upaya peningkatan kemampuan pertahanan negara, pemerintah melakukan percepatan pembangunan pertahanan negara menuju *minimum essential force (MEF)*. Capaian kesiapan Alutsista TNI sampai dengan awal tahun 2013 rata-rata mencapai sekitar 64 persen untuk matra darat, 52 persen untuk matra laut; dan 74 persen untuk matra udara. Upaya peningkatan profesionalisme TNI secara berkesinambungan dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesejahteraan TNI diwujudkan dengan pemberian tunjangan kinerja, pemeliharaan kesehatan/asuransi, pembangunan perumahan dan mess prajurit, santunan risiko meninggal dalam tugas, dan pemberian tunjangan khusus penugasan. Disamping itu, dilakukan pendidikan dan latihan profesionalitas TNI dan penataan organisasi dan personel dilakukan dengan mempedomani kebijakan *zero growth* dan *right sizing*. Selanjutnya untuk mendukung misi perdamaian PBB, sedang dibangun Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) dengan fasilitas pendidikan dan pelatihan didukung dengan *stand by force* yang direncanakan pada tahun 2014 akan selesai.

Sementara itu, pelaksanaan pengamanan wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar secara bertahap terus dilakukan dengan penambahan pos-pos perbatasan dan pulau-pulau terluar. Meskipun kinerja pemantauan belum optimal dikarenakan kendala jarak antar pos belum memadai menjadi kendala. Pembangunan pos di wilayah perbatasan dan pulau terluar pada tahun 2012 mencapai 12 buah, yaitu sebanyak 7 pos perbatasan darat dan 5 pos di pulau terluar. Jarak rata-rata pos perbatasan darat pada saat ini adalah berkisar 29,27 km di Kalimantan Timur, dan 45,1 km Kalimantan Barat. Sedangkan di Papua dan NTT jarak pos perbatasan darat sudah relatif dekat, yaitu berkisar 7,47 km di Papua dan 5,08 km NTT. Prioritas peningkatan pos pulau terdepan (terluar), masih menempatkan pada 12 pulau sebagai prioritas (Permenhan 10/ 2010 menetapkan 92 pulau-pulau kecil terluar dengan prioritas 12 pulau). Kondisi jarak pos yang

belum memadai ini menjadi sebab tingkat kerawanan di wilayah perbatasan, khususnya wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat, serta pulau terdepan (terluar) lainnya masih relatif tinggi. Kegiatan *illegal logging*, *illegal mining*, *illegal fishing*, pergeseran patok batas negara, sengketa perbatasan dan klaim pemilikan gugusan pulau serta kejahatan lintas negara adalah bentuk gangguan dan pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan.

Kontribusi industri pertahanan nasional dalam mendukung pemenuhan alutsista TNI maupun almatsus Polri telah semakin meningkat. Pada tingkat pelaksanaan, kebijakan pemberdayaan industri pertahanan dikawal oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) dan *high level committee* (HLC) utamanya untuk penentuan jenis dan produk alutsista yang diproduksi industri pertahanan nasional. Disyiahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diharapkan dapat mempercepat laju peningkatan kapasitas dan kemampuan Industri Pertahanan Nasional. Dalam rangka meningkatkan sinergitas antar lembaga, mekanisme pengadaan, rendahnya kapasitas dan kemampuan industri dalam negeri dapat diatasi, diharapkan berbagai perangkat aturan pelaksanaan dapat segera tersusun, Beberapa produk militer produksi dalam negeri yang sudah mewarnai kelengkapan alutsista TNI dan Polri diantaranya adalah *Fast Patrol Boat 57 M*, *Landing Platform Dock (LPD) 100 M*, *KCR 40 M*, Kapal Angkut Tank, Torpedo SUT, Heli NBell 412, CN-235 MPA, Senjata SS-1 dan SS2 dalam berbagai varian, dan Ranpur APC (*Armoured Personnel Carrier*) 6x6. Adapun kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dalam pembuatan pesawat tempur KF-X/IF-X, telah menyelesaikan tahap *technology development phase* (TDP), namun demikian rencana tahap *engineering and manufacturing development* (EMD) untuk sementara ditunda.

Untuk pengamanan di wilayah perairan, dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat relatif aman. Berdasarkan data *International Maritime Bureau* (IMB), di Selat Malaka terjadi satu aksi perompakan pada tahun 2010, nihil pada tahun 2011 dan satu kali aksi perompakan pada semester pertama tahun 2012. Pada sisi lain, meskipun dalam skala yang lebih ringan, di wilayah laut Indonesia lainnya seperti di wilayah Anambas, Natuna, Mangkai, Subi, Kepulauan Marudung, Tanjung Priok, dan Dumai dalam periode 3 tahun terakhir terjadi 16 kali perompakan pada tahun 2010, 21 kali pada

tahun 2011 dan 32 kali pada tahun 2012. Pelaksanaan operasi dan patroli bersama *Malaca Strait Sea Patrol* (MSSP) antara Indonesia, Malaysia dan Singapura, dilakukan dalam rangka menanggulangi tindak perompakan di Selat Malaka dan pelaksanaan operasi mandiri oleh TNI AL dan operasi terpadu Bakorkamla bersama *stakeholder* keamanan laut dilakukan untuk peningkatan keamanan di laut ALKI dan wilayah perairan rawan lainnya.

Penanganan kejahatan Narkoba yang menjadi ancaman masa depan Indonesia, dilakukan melalui implementasi UU Nomor 35/2009 Tentang Narkotika. Kebijakan yang ditempuh adalah diterbitkannya sejumlah peraturan antara lain PP No. 23 tentang BNN, PP No. 25/2011 tentang Wajib Laporan Bagi Pecandu Narkoba, Perkep. BNN No. 1/2011 tentang Teknis Penyusunan Kejasama BNN, Perkep. BNN No. 2/2011 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka atau Terdakwa Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkoba, Perkep. BNN No. 5/2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana dan Prekursor Narkotika, dan Perkep. BNN No. 11/2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Laboratorium Pengujian Narkoba pada BNN. Sejumlah peraturan perundangan tersebut makin mempertegas tugas dan fungsi BNN dalam program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) yang saat ini sedang memperkuat struktur organisasi vertikalnya di daerah. Dalam rangka memutus jaringan rantai pasok Narkoba, BNN berhasil mengungkap 9 jaringan sindikat Narkoba internasional dan 6 kasus sindikat Narkoba nasional, serta mengungkap 9 kasus penyelundupan. Sementara itu, secara kuantitas tindak pidana Narkoba yang berhasil diungkap pada tahun 2012 adalah sebanyak 117 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 187 orang. Kasus yang berhasil diselesaikan penyidikannya dan diserahkan kejaksaan negeri adalah sebanyak 87 kasus atau 74 persen. Sementara itu, dalam kurun waktu Juli 2011–Desember 2012, dari sebanyak 328 WNI yang terancam hukuman mati di luar negeri, **203 orang** atau 61,89% terancam hukuman mati dengan dakwaan terkait tindak pidana Narkoba. Sebanyak 63 WNI telah terbebas dari ancaman hukuman mati, sehingga masih terdapat sebanyak 140 WNI di luar negeri yang terancam hukuman mati terakit tindak pidana Narkoba.

Aktivitas kehidupan masyarakat di Indonesia telah semakin aman dan tentram, kondisi tersebut bahkan diapresiasi oleh dunia internasional. Namun demikian, ancaman tindak kejahatan terorisme harus selalu menjadi prioritas aparat keamanan. Pada tahun 2012, aparat berhasil mengungkap 14 kasus aksi teror dengan jumlah tersangka 78 orang. Dari penangkapan tersebut, 10 orang diantaranya meninggal saat proses penangkapan, 68 orang diproses hukum, 2 orang telah divonis, 17 orang dalam proses pengadilan, dan 51 orang dalam proses penyidikan. Penanganan terorisme sepanjang tahun 2012, telah menyebabkan 8 anggota Polri gugur dalam tugas dan 6 anggota mengalami luka-luka. Secara kumulatif dalam kurun waktu tahun 2002 - 2012 aparat keamanan berhasil menangkap 773 orang yang diduga sebagai pelaku terorisme.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dilakukan melalui reformasi birokrasi yang disinergikan dengan revitalisasi Polri dalam rangka mewujudkan pelayanan prima. Upaya tersebut antara lain diwujudkan dengan model pengembangan karier Polri basis kompetensi, rekrutmen anggota Polri yang mengadopsi standar ISO 9001:2008 dan berhasil merekrut sebanyak 12.342 anggota untuk tingkat Tamtama sebanyak 2.000 anggota, Brigadir sebanyak 9.977 anggota dan Perwira Pertama sebanyak 365. Pengembangan ini didukung dengan pembentukan Sekolah Polisi Negara (SPN) di beberapa Polda yaitu Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Gorontalo dan Maluku. Disamping itu, ditetapkan SOP (*standard operation procedure*) untuk surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan (*SP2HP*) dan sistem informasi penyidikan, pelayanan perijinan bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan, pemilikan senapan non organik dan bahan peledak komersial. Masuknya NTMC (National Traffic Management Centre) sebagai 10 besar terbaik sistem pelayanan dari instansi pemerintah dengan standar ISO 9001:2000 adalah capaian kinerja Polri lainnya.

Upaya lainnya adalah pengawasan dan penindakan hukum. Pada tahun 2012 berhasil mengungkap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, yaitu sebanyak 6.017 anggota melakukan pelanggaran disiplin dan sebanyak 4.154 anggota atau 69% telah diselesaikan, pelanggaran kode etik terjadi 651 kasus atau meningkat 42,24% dari tahun sebelumnya dan berhasil diselesaikan sebanyak 449 kasus, dan sebanyak 595 anggota diberhentikan dengan tidak hormat atau meningkat

55,12% atau sebanyak 328 anggota dari tahun sebelumnya. Jumlah anggota Polri yang terlibat pelanggaran tata tertib, disiplin, kode etik, dan hukum secara keseluruhan mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak anggota Polri yang belum dapat beradaptasi dengan standar pelayanan prima yang diterapkan Polri.

7.1 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2013

7.1.1 Permasalahan

7.1.1.1 Kesenjangan Postur dan Struktur Pertahanan Negara

Lingkungan strategis dan dinamika ancaman pertahanan negara terus berkembang termasuk kekuatan militer negara lain dan ancaman dalam bentuk baru (*non-traditional threat*). Postur pertahanan negara harus dibangun mencapai tingkat kekuatan yang mampu menghalau segala potensi ancaman. Namun demikian, dengan kondisi keuangan negara yang terbatas, kebijakan pengembangan kekuatan pertahanan negara adalah menuju pada kekuatan pertahanan minimal (*minimum essential force/MEF*). Diharapkan pada skala MEF kekuatan pertahanan mampu menghadapi ancaman nyata yang dihadapi dan dapat mendukung doktrin pertahanan yang dianut oleh TNI. Dengan jumlah alutsista TNI yang masih kurang dan tingkat kesiapan yang belum optimal, serta sebagian besar alutsista TNI telah mengalami penurunan efek penggentar sebab usia teknis sudah tua dan tertinggal secara teknologi, pembangunan menuju MEF memerlukan dana yang sangat besar. Oleh sebab itu, rencana pembangunan MEF akan dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahapan Renstra. Selain dengan membangun Alutsista TNI, pengembangan postur dan struktur pertahanan negara dilakukan dengan membentuk prajurit TNI yang profesional, agar mampu memiliki pengetahuan dan penguasaan secara profesional teknologi Alutsista TNI yang digunakan serta memahami secara mendalam lingkungan strategis.

7.1.1.2 Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan (terluar)

Masih tingginya gangguan keamanan di wilayah perbatasan pada saat ini tidak terlepas akibat masih terbatasnya sarana dan prasarana pengamanan wilayah perbatasan. Di samping itu, perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat (*prosperity*) wilayah perbatasan dengan negara tetangga juga menjadi salah satu pemicu munculnya pelintas batas ilegal yang berdampak pada tindakan pencurian sumber daya alam, perpindahan patok perbatasan, atau kurangnya rasa cinta tanah air. Sampai dengan akhir 2014, sarana wilayah

perbatasan yang akan dibangun sebanyak 96 pos pertahanan darat dan 11 pos pulau terdepan (terluar), sehingga totalnya menjadi 295 pos pertahanan darat dan 23 pos pulau terdepan (terluar). Namun demikian, sampai dengan tahun ketiga RPJM 2010-2014 target pembangunan pos-pos perbatasan dan pos di pulau terdepan (terluar) belum dapat terpenuhi. Dengan demikian, kebutuhan pos-pos perbatasan dan pos di pulau terdepan (terluar) menjadi tantangan untuk segera dibangun oleh pemerintah.

7.1.1.3 Industri Pertahanan

Produk industri pertahanan nasional terus menambah variasi dan jumlah Alutsista TNI dan Almatsus Polri. Peningkatan cukup signifikan dicapai sejak tahun 2010 seiring dengan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan industri pertahanan nasional dan penggunaan skema pinjaman dalam negeri (PDN) untuk membiayai akuisisi Alutsista produk industri pertahanan nasional. Secara konsep dan desain, SDM industri pertahanan Indonesia telah mampu bersaing dengan SDM industri pertahanan luar negeri. Seperti dicontohkan pada proyek kerjasama pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X, tenaga ahli Indonesia berkolaborasi dengan tenaga ahli Korea Selatan. Namun demikian, tuntutan teknologi tinggi dan modern pada Alutsista, berdampak pada industri pertahanan nasional ketika pengembangan memasuki tahapan produksi. Industri hulu penghasil bahan baku belum memadai, sehingga menyebabkan sebagian besar komponen Alutsista harus impor. Perlu dicermati potensi kerugian ketika perekonomian global tidak stabil, posisi tersebut sangat memungkinkan dijadikan alat penekan untuk mengikuti *mainstream* negara mitra. Oleh sebab itu, Indonesia sangat memerlukan kebijakan khusus (terobosan) dalam upaya menambah kemampuan industri bahan baku bagi industri pertahanan nasional.

7.1.1.4 Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional

Dihadapkan pada luasnya wilayah perairan Indonesia, keterbatasan sarana dan prasarana penjagaan dan pengawasan terutama kapal patroli, *surveillance system*, dan pos-pos keamanan mengakibatkan masih banyak area-area kosong (*blank spot*) yang tidak terjangkau operasi dan sistem pengawasan dan pengamanan. Akibatnya intensitas gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional masih tinggi dan belum sepenuhnya dapat ditangani. Kondisi tersebut juga terkait dengan kemampuan dan intensitas operasi yang masih terbatas. Banyaknya instansi yang memiliki kewenangan menjaga dan mengawasi wilayah

laut Indonesia, menimbulkan kendala tersendiri terkait dengan efektifitas koordinasi. Dinamika ancaman dan gangguan keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional pada masa mendatang diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi yang dikuasai aktor pelaku tindak kejahatan. Hal ini harus diimbangi dengan peningkatan kemampuan penjaga dan pengawas keamanan di laut.

7.1.1.5 Keamanan dan Keselamatan Pelayaran di Selat Malaka dan ALKI

Berdasarkan data *International Maritime Bureau* (IMB), pada semester pertama tahun 2012 di wilayah perairan Indonesia terjadi serangan bajak laut sebanyak 177 kali. Insiden dengan kategori perompakan di wilayah perairan Indonesia sebanyak 32 kali dengan satu kali insiden terjadi di Selat Malaka. Insiden perompakan di perairan Indonesia menjadi kedua terbanyak setelah perairan Somalia yaitu sebanyak 44 kali. Kondisi ini menyebabkan dunia pelayaran internasional masih menempatkan perairan internasional Indonesia sebagai wilayah yang relatif berbahaya bagi pelayaran kapal-kapal asing. Pengamanan jalur pelayaran internasional yang melalui Selat Malaka dan tiga jalur ALKI adalah tanggung jawab Pemerintah Indonesia. Kelalaian dan kelemahan dalam pengamanannya, dapat membawa konsekuensi terhadap masuknya pasukan asing untuk turut mengamankannya sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1816 pada tanggal 2 Juni 2008 sebagaimana diterapkan di perairan Somalia. Kondisi keamanan laut yang cukup memprihatinkan menuntut upaya sistematis untuk menyelamatkan perairan Indonesia dari gangguan keamanan, hukum, dan kedaulatan.

7.1.1.6 Terorisme

Aksi-aksi teror seperti yang terjadi pada tahun 2012 merupakan salah satu insiden yang mengganggu upaya pemerintah dalam penciptaan rasa aman bagi masyarakat. Meskipun penegakan hukum telah dilakukan secara tegas khususnya terhadap para pelaku tindak kejahatan terorisme, namun nampak belum sepenuhnya dapat menyurutkan para pelaku kejahatan terorisme. Tingkat kekecewaan dan keputusasaan turut mempengaruhi suburnya aksi terorisme. Pelaku tindak kejahatan terorisme tidak hanya berasal dari kalangan pendidikan keagamaan atau yang memiliki keterbatasan ekonomi, tetapi terdapat tersangka yang berasal dari kelompok masyarakat yang secara ekonomi tergolong mampu. Meskipun masih belum menyeluruh, namun telah banyak masyarakat yang mempunyai pemahaman dan kesadaran terhadap bahaya terorisme dengan menempatkan

terorisme sebagai musuh bersama masyarakat dan bukan sebagai masalah keagamaan. Kebijakan penanganan terorisme tidak hanya menempatkan BNPT dan Polri sebagai pemangku kewenangan utama, tetapi juga menempatkan organisasi dan kelompok masyarakat ikut berperan aktif meminimalkan terjadinya aksi-aksi terorisme.

7.1.1.7 Kejahatan Lintas Negara dan Kejahatan Serius (serious crime)

Tingkat kejahatan lintas negara dan kejahatan serius pada tahun 2012 terjadi sebanyak 21.457 kasus, atau mengalami kenaikan sebesar 24,78 persen dari tahun 2011 sebanyak 16.138. Tingkat penyelesaian tindak kejahatan transnasional pada tahun 2012 mencapai 16.884 kasus atau sekitar 78%. Kejahatan dengan kategori serius seperti narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia, serta kejahatan terorganisir dan terorisme masih menjadi permasalahan yang sangat mengkhawatirkan bagi Indonesia. Banyaknya pintu dan celah yang dapat digunakan sebagai pintu masuk ke wilayah Indonesia menjadikan Indonesia sangat terbuka terhadap peluang dan kesempatan bagi para pelaku kejahatan yang bersifat lintas negara. Di samping itu, jumlah penduduk yang sangat banyak dan dihadapkan pada akses perekonomian yang terbatas, menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial sekaligus sumber rekrutmen kelompok kriminal seperti perdagangan narkoba, terorisme, perdagangan manusia. Pekerjaan yang relatif mudah dengan imbalan penghasilan besar dapat menyebabkan pribadi-pribadi yang kurang kuat menjadi mudah untuk terlibat atau menjadi korban kejahatan lintas negara. Permasalahan tersebut diperkirakan masih menjadi tantangan dalam menekan tindak kejahatan lintas negara mengingat masih lemahnya kemampuan membendung dan upaya-upaya perlindungan warga negara di luar negeri.

7.1.1.8 Intensitas dan Variasi Kejahatan Konvensional

Tindak kejahatan konvensional sepanjang tahun 2012 mencapai 267.181 perkara, menurun 6.999 perkara atau sebesar 2,5 % dibandingkan dengan kejahatan yang terjadi pada tahun 2011 yang mencapai 274.180 perkara. Ada enam jenis kejahatan konvensional yang banyak menimpa masyarakat, yaitu pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor, penipuan, penggelapan, penganiayaan berat, dan perjudian. Pemicu tindak kejahatan terdapat kecenderungan dengan motif atau dorongan dari keterbatasan ekonomi, keterbatasan lapangan kerja, serta tuntutan pemenuhan gaya hidup yang tidak sesuai dengan

kemampuannya. Semakin murah dan mudahnya akses informasi dan komunikasi juga mendorong terjadinya tindak kriminalitas lewat handphone yang berdampak pada banyak masyarakat yang tertipu, terpedaya, atau terintimidasi oleh orang-orang yang tidak dikenal. Berbagai model dan cara tindak kejahatan konvensional tersebut menjadi tantangan yang cukup serius dalam menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, upaya perlindungan dan pelayanan kepolisian masih terkendala dengan rasio polisi yang belum memadai, di mana saat ini baru mencapai 1 : 613 dari standar kebutuhan rasio minimal tahun 2014 sebesar 1 : 575.

7.1.1.9 Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Keselamatan Publik

Secara umum Pemerintah telah berhasil menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun demikian, gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi kepada aktivitas masyarakat masih tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Beberapa kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang seharusnya demokratis, masih diwarnai tindakan intimidasi dan anarkhis. Peristiwa Pilkada rusuh masih terulang bahkan ada yang mengakibatkan korban masyarakat yang meninggal. Pada sisi lain, kriminalitas dengan tindakan kekerasan di masyarakat masih terus terjadi pada tahun 2013, antara lain ditunjukkan oleh beberapa perampokan dengan senjata api di Jakarta dan sekitarnya. Banyak faktor yang dapat menjadi latar belakang aksi kekerasan dan kerusuhan mulai dari ekonomi, perbedaan pandangan terhadap keyakinan, politik dan faktor lainnya. Kondisi ini menunjukkan tantangan yang serius bagi pemerintah dalam upaya menciptakan dan memelihara keamanan serta ketertiban dalam rangka mengayomi dan melindungi masyarakat agar segala aktivitasnya berlangsung aman dan nyaman.

7.1.1.10 Penanganan dan Penyelesaian Perkara

Pelaksanaan penanganan dan penyelesaian perkara dalam 3 tahun terakhir masih bervariasi. Kinerja Polri dalam menyelesaikan perkara pada tahun 2010 mencapai 54 persen, pada tahun 2011 mencapai 53 persen, dan pada tahun 2012 mencapai 59 persen. Kejahatan konvensional menduduki urutan tertinggi dari sisi jumlah perkara yaitu sebanyak 267.181 perkara dengan tingkat penyelesaian sebesar 51 persen pada tahun 2012, sehingga masih 136.966 yang belum terselesaikan. Tingkat penyelesaian yang tertinggi adalah pada kasus kejahatan Narkoba yaitu sebesar 80 persen, dan

kejahatan transnasional sebesar 78 persen. Kinerja tersebut menunjuk bahwa Polri haru menyelesaikan banyak perkara yang belum terselesaikan pada tahun 2012. Dengan kondisi tersebut, Disamping penyelesaian pada kasus-kasus yang menonjol, Polri juga dituntut meningkatkan kinerjanya dalam menyelesaikan perkara kejahatan konvensional. Hal ini disebabkan kejahatan konvensional cenderung banyak yang bersinggungan dengan aspek keadilan masyarakat dengan mengedepankan sisi kemanusiaan, sehingga sangat baik untuk peningkatan pelayanan prima sekaligus citra kepolisian.

7.1.1.11 Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi

Tingkat pelanggaran disiplin anggota dan tindak pidana yang masih tinggi dilakukan oleh anggota Polri merupakan preseden negatif yang dapat menutupi tingkat keberhasilan Polri dalam pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum. Pandangan masyarakat bahwa Polisi masih bisa diarahkan sesuai dengan imbalan tertentu akan menjadi kelemahan yang sangat merugikan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kecil terhadap Polri. Reformasi Birokrasi Polri (RBP) telah dilaksanakan, melalui Penataan dan Penguatan Organisasi dan Tata Laksana, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Manajemen Perubahan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja Polri, dan Monitoring dan Evaluasi didukung oleh penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan sasaran peningkatan kualitas pelayanan kepada publik. Dengan permasalahan masih tingginya pelanggaran disiplin dan tindak pidana yang dilakukan anggota Polri, tuntutan kepada Polri untuk segera meningkatkan pelayanan kepada masyarakat menjadi pokok utama untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat.

7.1.1.12 Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, terbukti banyak menyengsarakan masyarakat, serta sangat mengancam masa depan bangsa. Narkoba menjadi ancaman serius bagi kehidupan manusia khususnya dalam aspek kesehatan dan produktivitas. Narkoba juga ditengarai memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai tindak kejahatan terorganisir di dunia termasuk pencucian uang, korupsi, terorisme, perang, perdagangan manusia, atau penyelundupan senjata. Permasalahan Narkoba ada pada dua sisi yaitu *supply* dan *demand*. Banyaknya celah yang dapat digunakan sebagai pintu masuk Narkoba dari berbagai negara

dan tingginya kemampuan pelaku tindak kejahatan Narkoba merupakan tantangan kebijakan *supply reduction*. Sementara itu, tingginya angka penyalahguna Narkoba pada kelompok pekerja merupakan tantangan yang sulit untuk dieliminasi, masalah yang tidak kalah penting adalah masalah pencegahan agar seseorang tidak terlibat baik dalam penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkoba.

7.1.1.13 Deteksi dini yang Masih Belum Memadai

Berbagai kasus gangguan keamanan dalam negeri yang masih terjadi khususnya di daerah-daerah rawan konflik dan daerah perbatasan. Permasalahan dan gangguan keamanan tersebut mengindikasikan bahwa sistem deteksi dini belum optimal dalam mendukung keamanan dalam negeri. Dalam insiden yang terjadi di Papua akhir Februari 2013 yang mengakibatkan 8 prajurit TNI gugur dalam tugas, sementara pihak memandang bahwa aparat keamanan telah melakukan kelengahan dalam tugas, bahkan pada saat pelaksanaan evakuasi masih terjadi insiden penembakan kepada helikopter yang digunakan untuk evakuasi prajurit tersebut. Demikian pula aksi-aksi anarkis yang masih terjadi pada pelaksanaan Pilkada dan aksi-aksi teror yang makin variatif menunjukkan data dan informasi intelijen yang dikumpulkan belum optimal dalam mendukung upaya pencegahan gangguan keamanan dalam negeri. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat berpotensi untuk disalahgunakan dan dapat menjadi ancaman keamanan nasional, sehingga harus dibarengi dengan modernisasi sistem deteksi dini, sehingga keputusan strategis yang dihasilkan dapat meredam atau menghilangkan potensi gangguan keamanan dalam negeri.

7.1.1.14 Keamanan Informasi Negara yang Masih Lemah

Perkembangan teknologi informasi, termasuk peralatan intelijen dan kontra intelijen yang sangat mungkin disalahgunakan, akan menjadi potensi ancaman bagi keamanan nasional, sehingga modernisasi deteksi dini sangat diperlukan untuk mendukung perlindungan proses pengambilan keputusan strategis. Perubahan, perkembangan situasi dan kondisi lingkungan strategis, menuntut perlunya dilakukan peningkatan deteksi dini dan peringatan dini terhadap berbagai ancaman keamanan nasional, utamanya ancaman bersifat kompleks dan memiliki spektrum yang sangat luas. Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara, kemampuan gelar pengamanan rahasia negara yang baru mencapai 44 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih banyak

daerah dan kota strategis yang belum terjangkau oleh sistem persandian nasional (Sisdina) yang berpotensi terjadinya kebocoran dan terganggunya komunikasi strategis di antara pimpinan pemerintah di pusat dan daerah.

7.1.1.15 Kesenjangan Kapasitas Lembaga Penyusun Kebijakan Pertahanan-Keamanan Negara

Upaya peningkatan ketahanan nasional dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan membutuhkan dukungan kebijakan Keamanan Nasional yang terintegrasi dan dilaksanakan secara harmonis oleh seluruh elemen bangsa. Berbagai permasalahan yang belum tuntas dan kerja sama antar pemangku kepentingan perlu segera diselesaikan dengan dibentuknya semacam dewan keamanan nasional. Diharapkan integrasi kerangka kebijakan keamanan nasional akan mampu meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga negara khususnya lembaga dengan fungsi keamanan nasional.

7.1.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2013

Sasaran pembangunan bidang pertahanan dan keamanan tahun 2014 merupakan tahapan pencapaian sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010 - 2014, yaitu :

1. Terwujudnya Postur dan Struktur kekuatan pokok minimum (*minimum essential force*) yang mampu melaksanakan operasi gabungan dan memiliki efek penggentar bagi upaya-upaya mengganggu kedaulatan dan kewibawaan NKRI. Tercapainya sasaran ini ditandai dengan meningkatnya profesionalisme personel TNI, meningkatnya kuantitas dan kualitas alutsista TNI, serta terbentuknya komponen bela negara.
2. Terbangunnya 36 pos pertahanan baru di wilayah perbatasan darat dan terbangunnya 5 pos pertahanan baru di pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran prajuritnya. Tercapainya sasaran ini diharapkan dapat menurunkan insiden pelanggaran batas wilayah NKRI dan angka gangguan keamanan di wilayah perbatasan darat dan wilayah perairan yurisdiksi nasional, termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE).
3. Terdayagunakannya industri pertahanan nasional bagi kelengkapan alutsista TNI dan Almitsus Polri produksi dalam negeri; terlaksananya kerjasama pengembangan teknologi baik dengan perguruan tinggi, dunia usaha, maupun industri pertahanan luar negeri. Pencapaian sasaran ini akan meningkatkan kemandirian alutsista TNI

dan Alut Polri baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun variasinya; dan terwujudnya prototipe alutsista baik matra darat, laut, dan udara serta prototipe Alut Polri yang siap menuju tahap produksi.

4. Menurunnya gangguan keamanan laut dan pelanggaran hukum di laut di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia termasuk di Selat Malaka. Pencapaian sasaran ini akan meningkatkan keselamatan pelayaran dan menurunnya tindak pelanggaran hukum dan perompakan di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia.
5. Terpantau dan terdeteksinya potensi tindak terorisme serta meningkatnya kemampuan dan keterpaduan pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme. Semakin efektifnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam koordinasi dan deradikalisasi terorisme, serta semakin meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat akan bahaya terorisme. Tercapainya sasaran ini dapat menekan rencana dan tindakan aksi terorisme.
6. Menurunnya tingkat kejahatan (*criminal rate*) yang meliputi kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, kekayaan negara, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penurunan tingkat kejahatan ini akan berdampak pada terselamatkannya SDA, menurunnya tindak kriminal khususnya terhadap anak dan perempuan, serta terwujudnya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat untuk mendukung aktivitas masyarakat dan dunia usaha.
7. Tercapainya penuntasan kejahatan konvensional, transnasional, kontingensi, kekayaan negara, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak rata-rata melebihi angka 55 persen. Tercapainya persentase penuntasan kejahatan tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi para tersangka, rasa adil bagi para korban, dan pemberian sanksi hukum yang tegas dan transparan dapat menekan kemauan dan kesempatan melakukan tindak kriminal.
8. Meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga kepolisian atas penyelenggaraan pelayanan kepolisian dan terselenggaranya pengamanan Pemilu tahun 2014. Dengan Pelayanan Kamtibmas Prima, masyarakat akan merasa nyaman dan terlindungi serta terbebas dari rasa

khawatir terkena tindak kriminal, dan pada akhirnya masyarakat berperan menjaga kamtibmas semakin meningkat, termasuk kemauannya untuk melaporkan dan bersaksi atas tindak kejahatan yang terjadi di lingkungannya.

9. Menurunnya angka penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sejalan dengan semakin intensifnya kampanye anti narkoba, interdiksi, operasi penindakan dan pengejaran, serta terapi dan rehabilitasi dengan cakupan operasi dan pelayanan yang semakin luas. Tercapainya sasaran ini akan dapat menekan tingkat prevalensi dan meningkatkan optimisme Pemerintah dalam menuju Indonesia bebas narkoba pada tahun 2015.
10. Terlaksananya pemantauan dan pendeteksian ancaman gangguan keamanan nasional. Tercapainya sasaran ini akan berdampak pada tercegahnya berbagai potensi gangguan keamanan negeri seperti kerusuhan massal, rencana aksi terorisme, kejahatan lintas negara, gerakan penentang keutuhan NKRI, dan kejahatan dunia maya yang berpotensi mengganggu kedaulatan dan kewibawaan negara.
11. Terlaksananya perlindungan informasi negara melalui perluasan Jaring Komunikasi Sandi Nasional di darat, laut maupun udara. Terlaksananya perlindungan informasi rahasia negara dari kebocoran akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, baik untuk kegiatan strategis maupun taktis di darat, laut maupun udara.
12. Terlaksananya transformasi penentu kebijakan Ketahanan Nasional dalam rangka meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan nasional yang terintegrasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Tersedianya rekomendasi kebijakan yang berkualitas akan berdampak pada presisi keputusan pimpinan negara dalam menyikapi dinamika sosial, politik, ekonomi, hukum, dan pertahanan dan keamanan.

7.2 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014

Berbagai alutsista produksi dalam negeri semakin mewarnai kelengkapan alutsista TNI, namun upaya pemberdayaan industri pertahanan nasional belum dapat dilaksanakan secara optimal. Di samping kemampuan penyerahan (*delivery*) yang belum memadai, riset dan pengembangan yang minim,

keterbatasan modal kerja, kepercayaan pengguna (*user*) terhadap hasil produksinya; peran serta industri pertahanan belum didukung aturan mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa, insentif fiskal, pengembangan SDM, penguasaan teknologi, dan jaminan kepada lembaga keuangan yang mendukung pembiayaan industri pertahanan. Dengan disyahrkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan diharapkan segera diikuti dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang dapat mempercepat proses kemandirian alutsista dalam negeri.

Untuk penanggulangan tindak kejahatan di laut, lembaga setingkat *sea and coast guard* (penjaga laut dan pantai) adalah lembaga yang lebih diakui di dunia internasional. *Sea and coast guard* telah semakin mendesak untuk segera dibentuk sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Hal ini untuk menghadapi aktivitas gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di laut, terutama aksi perompakan yang meningkat pada tahun 2012 setelah dalam beberapa tahun sebelumnya mengalami penurunan. Di samping itu, peningkatan kapasitas dan cakupan operasional pengawasan, penindakan secara cepat dan tepat serta penegakan hukum di laut melalui intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut diarahkan melalui operasi bersama maupun operasi mandiri dengan koordinasi (komando) yang efektif dan pengendalian efisien untuk menjangkau wilayah *blank spot* yang cenderung menjadi wilayah aktivitas ilegal di laut Indonesia.

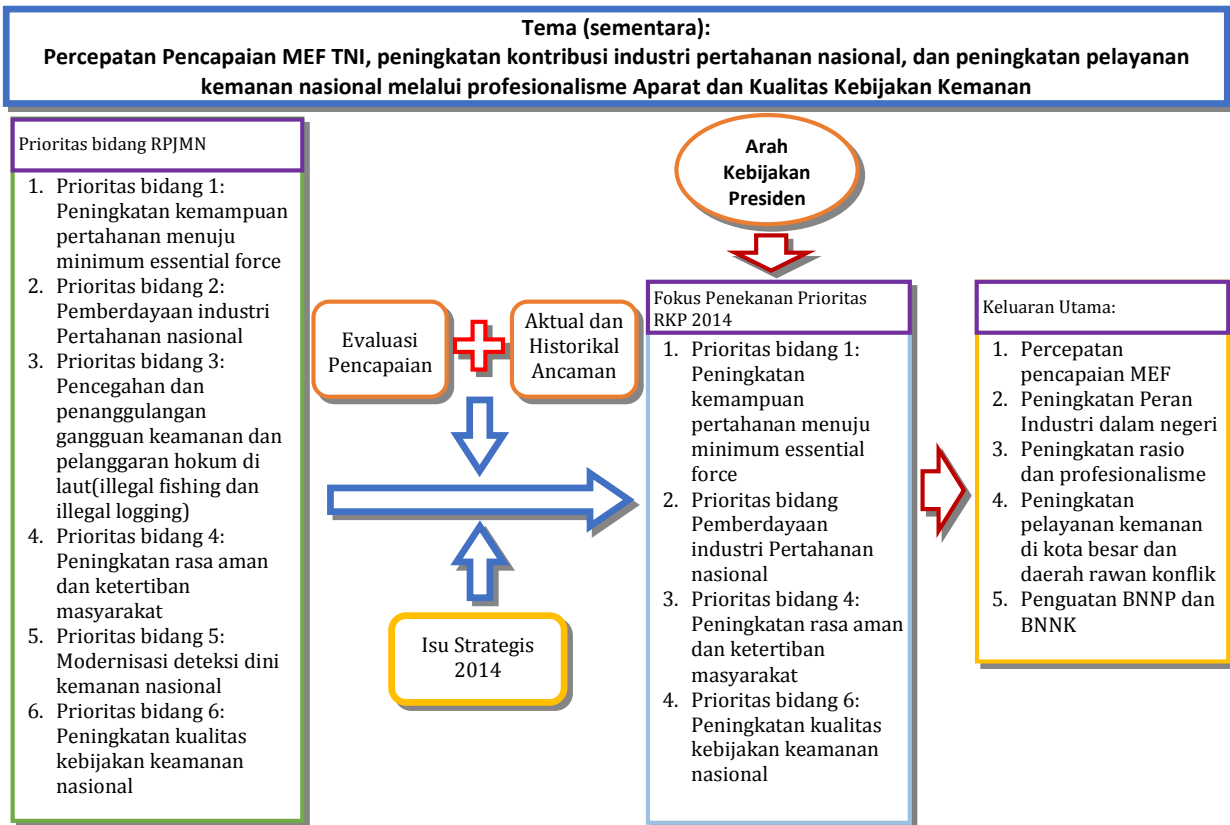
Upaya pemerintah dalam meningkatkan rasa aman dan ketertiban masyarakat terus meningkat. Meskipun demikian, kinerja kepolisian dalam melindungi dan melayani masyarakat serta dalam menegakkan hukum masih terhambat oleh pandangan belum positif di masyarakat ketika berurusan dengan anggota polisi dan lembaga kepolisian. Dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Polri meningkatkan upaya perubahan perilaku proses penyidikan secara transparan, menghilangkan budaya setoran dari bawahan kepada atasan maupun mencari dana terkait dengan penanganan kasus; serta setiap tindakan kepolisian sesuai SOP. Namun demikian, apresiasi masyarakat masih minimal karena masih banyak kasus-kasus menonjol yang belum terselesaikan dan bahkan melibatkan sejumlah anggota Polri. Sementara itu, mengingat saat ini BNN Propinsi dan BNN Kabupaten/Kota masih dalam taraf konsolidasi dan pengembangan kelembagaan,

pelaksanaan P4GN di daerah belum menunjukkan perkembangan yang memadai.

Pelaksanaan modernisasi deteksi dini keamanan nasional sudah menunjukkan kemajuan baik yang dilaksanakan oleh BIN, LSN, maupun BAIS. Namun demikian untuk meningkatkan cakupan area operasi dan penggelaran jaringan, diperlukan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana deteksi dini keamanan nasional, terutama untuk daerah-daerah yang dianggap rawan konflik dan wilayah perbatasan. Sedangkan untuk peningkatan kualitas kebijakan keamanan nasional pelaksanaannya berjalan sebagaimana biasanya, belum ada terobosan-terobosan baru. Hal ini dikarenakan sasaran pembentukan lembaga semacam dewan keamanan nasional sampai saat ini belum terwujud, sehingga sinergitas institusi pertahanan dan keamanan dalam mengelola ancaman keamanan nasional belum optimal.

Sesuai dengan perkembangan pelaksanaan prioritas bidang pertahanan dan keamanan tersebut, aktual dan historikal ancaman, arahan kebijakan presiden, dan isu strategis tahun 2014, maka tema khusus pembangunan bidang pertahanan dan keamanan pada tahun 2014 adalah : "Percepatan pencapaian MEF TNI, didukung peningkatan kontribusi industri pertahanan nasional, dan peningkatan pelayanan keamanan nasional melalui profesionalisme aparat dan kualitas kebijakan keamanan". Dengan tema tersebut maka pelaksanaan Prioritas Bidang Hankam tahun 2013 ditekankan pada : (a) Peningkatan Kemampuan Pertahanan Menuju Minimum Essential Force; (b) Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional; (c) Peningkatan Rasa Aman dan Ketertiban Masyarakat; dan (d) Peningkatan Kualitas Kebijakan Keamanan Nasional. Keluaran utama dari penekanan prioritas bidang ini adalah : terlaksananya percepatan pencapaian MEF, peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri, peningkatan pelayanan keamanan di kota besar dan daerah rawan konflik, dan terlaksananya penguatan BNNP dan BNNK.

GAMBAR 7.1
KERANGKA PIKIR RENCANA KERJA PEMERINTAH 2014



Kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan pada tahun 2014 pada dasarnya sama dengan kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan yang tercantum dalam RPJMN 2010 – 2014. Namun berdasarkan kondisi umum, permasalahan, dan sasaran pembangunan, maka diperlukan adanya penekanan dan percepatan pencapaian sasaran, terutama untuk program dan kegiatan prioritas pencapaiannya belum sesuai. Adapun arah kebijakan pembangunan pertahanan dan keamanan adalah :

1. Percepatan pencapaian MEF melalui modernisasi dan penggantian alutsista yang usia teknisnya sudah tua untuk meningkatkan profesionalisme dan keselamatan prajurit;
2. Peningkatan profesionalisme prajurit diiringi dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, diantaranya berupa pembangunan mess, tunjangan khusus operasi;

3. Percepatan pembangunan pos pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan negara dan pulau terdepan (terluar) beserta penggelaran personilnya;
4. Memperluas pendayagunaan industri pertahanan nasional dalam upaya membangun kemandirian Alutsista pertahanan negara dan Alut keamanan, serta meningkatkan penelitian dan pengembangan Alutsista pertahanan negara dan Alut keamanan.
5. Intensifikasi dan ekstensifikasi patroli keamanan laut dan mendorong segera terbentuknya Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang didukung Sistem Peringatan Dini (*Early Warning Sistem*) Keamanan Laut, efektifitas koordinasi, komando dan pengendalian;
6. Melanjutkan pemantapan tata kelola pencegahan dan penanggulangan tindak terorisme serta pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan tindak terorisme;
7. Percepatan peningkatan kapasitas SDM dan modernisasi teknologi kepolisian sebagai bagian penerapan reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia;
8. Akselerasi pelaksanaan program "*quick win*" oleh Polri sampai ke tingkat Polres di seluruh wilayah NKRI untuk peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap polisi dan lembaga kepolisian;
9. Melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyediaan fasilitas terapi dan rehabilitasi yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat, pemberantasan jaringan narkoba; serta dengan memperkuat BNN vertikal di daerah;
10. Peningkatan kompetensi SDM intelijen yang didukung dengan modernisasi teknologi intelijen dan koordinasi intelijen yang kuat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
11. Mempercepat pemantapan Sistem Persandian Nasional (Sisdina) dan perluasan cakupan Sisdina terutama untuk wilayah NKRI dan perwakilan RI di negara-negara tertentu;
12. Meningkatkan kapasitas dan keserasian lembaga penyusun kebijakan pertahanan keamanan negara, melalui pembentukan Dewan Keamanan Nasional.

BAB 8

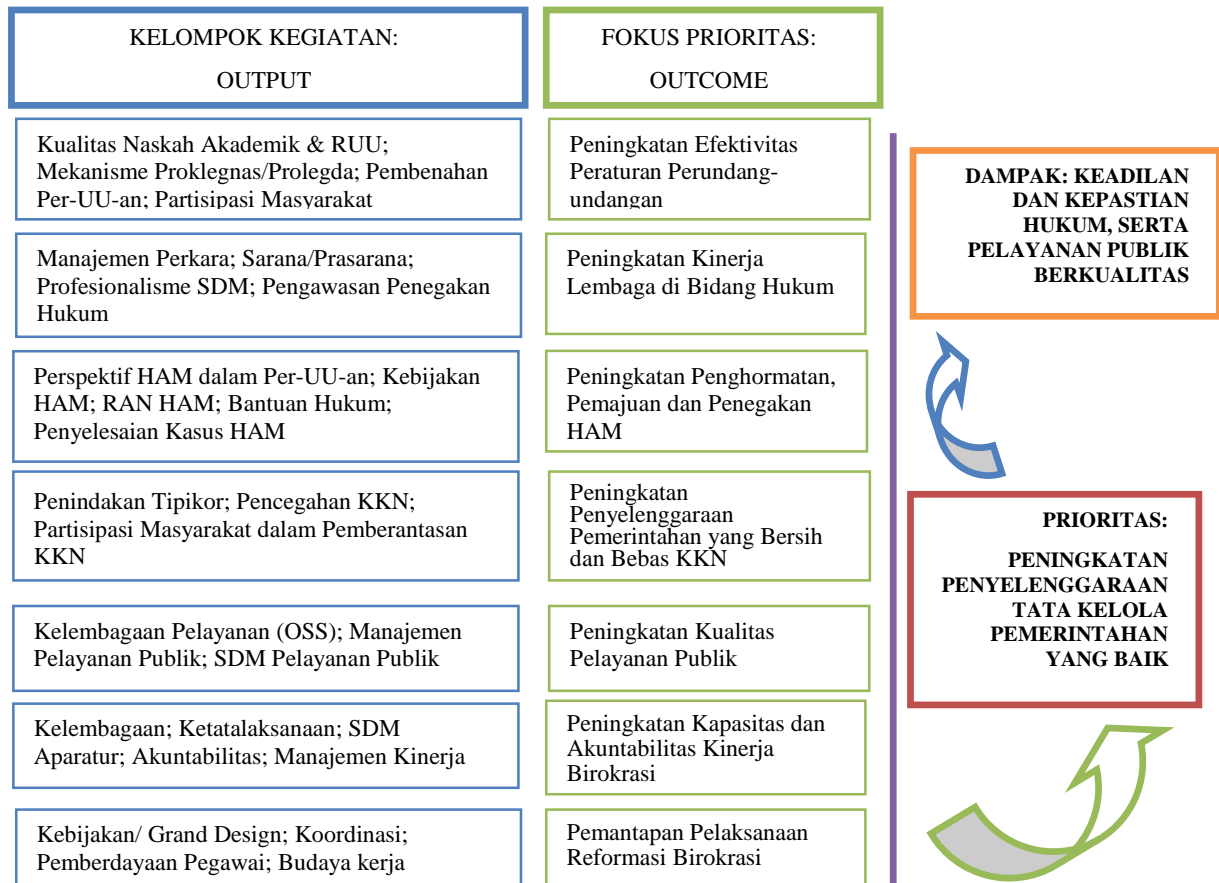
BIDANG HUKUM DAN APARATUR

Pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur memiliki peranan yang strategis untuk mendukung tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pembangunan bidang hukum, khususnya dari sisi kerangka regulasi akan berupaya untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional di berbagai bidang. Di sisi lain, pembangunan aparatur negara juga memiliki peranan yang sangat strategis untuk mendukung keberhasilan pembangunan melalui perumusan kebijakan publik secara tepat, penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, dan penciptaan birokrasi pemerintah yang profesional sebagai motor penggerak manajemen pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan hukum dan aparatur diharapkan dapat memberikan dukungan pada upaya mewujudkan daya saing nasional dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik.

8.1 Kondisi Umum

Pembangunan bidang hukum dan aparatur yang bersifat multidimensi diarahkan untuk melanjutkan sasaran pembangunan dari tahun sebelumnya. Kontinuitas pembangunan hukum dan aparatur ditujukan untuk menjamin pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan secara bertahap. Dalam pelaksanaan 5 (lima) tahun ke depan kebijakan pembangunan di Bidang Hukum dan Aparatur diarahkan untuk melanjutkan upaya untuk mencapai sasaran peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui strategi kebijakan: peningkatan efektivitas peraturan perundang-undangan; peningkatan kinerja lembaga di bidang hukum; peningkatan penghormatan, pemajuan, dan penegakan HAM; peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); peningkatan kualitas pelayanan publik; peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; dan pemantapan pelaksanaan reformasi birokrasi. Dalam RPJMN 2010-2014 telah dirumuskan kerangka pikir pembangunan hukum dan aparatur, sebagai berikut:

GAMBAR 8.1
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN
BIDANG HUKUM DAN APARATUR



Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Upaya untuk mensinergikan antara kebijakan dengan Prolegnas telah dilakukan melalui Pasal 18 Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga diharapkan di masa yang akan datang sinkronisasi antara kebijakan yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN dan RKP dengan Prolegnas akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Peraturan Presiden untuk melaksanakan UU No. 12 Tahun 2011 diharapkan dapat diterbitkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas baik undang-undang maupun peraturan pelaksanaan di bawahnya secara konsisten.

Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Kinerja lembaga-lembaga yang terkait dengan penegakan hukum pada tahun 2012 telah memperlihatkan perkembangan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam rangka penyelesaian tunggakan perkara, lingkungan peradilan merespon dengan melanjutkan berbagai upaya memperbaiki mekanisme pelaksanaan dalam proses pengikisan perkara dan rencana pembatasan perkara berdasarkan cetak biru (*blue print*) peradilan. Pada tahun 2012, penyelesaian perkara di tingkat kasasi, Peninjauan Kembali, Grasi dan permohonan hak uji materiil menerima sejumlah 13.412 perkara, dengan beban penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya sehingga total beban penyelesaian sejumlah 21.107 perkara. Dari total beban perkara tersebut yang berhasil diputus sebanyak 10.991 perkara (52,07%), sehingga sisa perkara di akhir tahun yang masih harus diselesaikan adalah sejumlah 10.116 perkara. Kondisi yang sangat berpengaruh pada proses penanganan perkara di tahap terakhir ini adalah berkurangnya 10 orang Hakim Agung karena memasuki masa purna bhakti ataupun meninggal dunia. Menjelang akhir 2012 Mahkamah Agung hanya memiliki 44 orang Hakim Agung. Bagi Hakim Agung yang pensiun, tiga bulan sebelumnya sudah tidak mendapat distribusi perkara baru sehingga rasio beban perkara untuk setiap Hakim Agung juga meningkat. Upaya untuk mengatasi tunggakan perkara di tingkat kasasi antara lain dilakukan melalui penerapan sistem kamar. Sistem ini dimaksudkan disamping untuk mempercepat proses penanganan perkara akan tetapi juga untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi putusan.

Upaya untuk mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi di lingkungan lembaga peradilan telah dilakukan. Pada saat ini jumlah putusan pengadilan yang telah dipublikasikan melalui *website* lembaga peradilan, dimana sampai dengan Desember 2012 jumlahnya kurang lebih mencapai 370.000-an putusan. Di samping itu, upaya penataan ulang tata laksana penanganan perkara juga dilakukan dengan tujuan memudahkan publik dalam mengakses pengadilan dan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkara melalui alternatif media pengiriman dokumen perkara secara elektronik, penyusunan contoh (*template*) putusan sebagai upaya *debottlenecking* masalah kelambanan proses minutasasi putusan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan kepada masyarakat, telah dilakukan pengembangan aplikasi manajemen perkara berbasis *web* yang dinamakan Sistem Informasi Penelusuran

Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS). Fungsi utama aplikasi CTS adalah untuk melakukan penelusuran (*tracking*) terhadap data perkara perdata gugatan, perdata permohonan, dan pidana biasa pada pengadilan negeri. Sampai dengan akhir Desember Tahun 2012, SIPP/CTS ini telah dikembangkan di lebih dari 130 pengadilan negeri. Selain itu, upaya lain yang dilaksanakan untuk mendukung proses peradilan yang transparan dan akuntabel, telah dimulai kegiatan perekaman proses persidangan. Rekaman audio visual persidangan menjadi bagian dari sistem administrasi perkara. Sebagaimana halnya sebuah berita acara, rekaman audio visual persidangan ini menjadi bagian dari kelengkapan berkas pengadilan (Bundel A). Sebagai rencana ke depan, rekaman persidangan ini akan menjadi prosedur bagi semua perkara pidana, namun untuk tahap pertama diprioritaskan bagi perkara Tindak Pidana Korupsi dan perkara menarik perhatian lainnya.

Untuk mendorong peningkatan kualitas hakim di pengadilan, sudah terjalin kerjasama antara lembaga peradilan dengan lembaga pengawas peradilan mengenai empat buah peraturan bersama terkait dengan seleksi pengangkatan hakim dan kode perilaku hakim. Diharapkan ke depan, mekanisme penegakan kode etik dan perilaku hakim akan lebih optimal, dan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Sinergi kedua lembaga tersebut antara lain memuat kesepakatan mengenai sanksi atas setiap pelanggaran kode etik, dan kesepakatan atas batasan-batasan pelanggaran yang menjadi kewenangan masing-masing. Sepanjang tahun 2012, lembaga peradilan menerima total pengaduan sejumlah 2.376 pengaduan yang ditindaklanjuti dengan sidang Majelis Kehormatan Hakim sebanyak empat kali. Selama proses satu tahun hasil yang telah dicapai berujung kepada pengenaan hukuman disiplin berat berupa mutasi, pengurangan tunjangan remunerasi, pengenaan hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan Hakim Agung.

Di sisi penegakan konstitusi, kinerja lembaga yang bertugas untuk mengawal konstitusi, memperlihatkan komitmen yang tinggi dalam mengawal konstitusi Republik Indonesia. Di tahun 2012 total perkara yang ditangani adalah sebanyak 287 perkara dan diputus sebanyak 207 perkara, yang didominasi dengan penanganan perkara Pengujian Undang-Undang (PUU). Dari tiga lingkup penanganan perkara oleh lembaga MK, penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Daerah (PHPUD)

pada tahun 2012 yang ditangani sebanyak 112 perkara yang menghasilkan 95 putusan dan 9 ketetapan. Dalam perkara Pengujian Undang-Undang (PUU), MK telah memutus 97 perkara dari 169 perkara PUU. Sedangkan perkara terkait Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) telah ditangani 6 perkara dengan 5 putusan dan 1 ketetapan.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Republik Indonesia terkait dengan penanganan perkara tindak pidana umum sampai dengan Desember Tahun 2012 telah menyelesaikan penanganan perkara pidana umum sebanyak 105.348 perkara, hal ini melebihi jumlah target perkara yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2012 sebanyak 13.400 perkara atau mencapai 786,18%. Terkait dengan pengawasan internal aparatur Kejaksaan Republik Indonesia, berdasarkan laporan pengaduan (Lapdu) yang ditetapkan sebanyak 1.189 pada Tahun 2012, sampai dengan akhir bulan Desember 2012 telah diselesaikan laporan pengaduan oleh jajaran pengawasan baik pusat maupun daerah sebanyak 1.037 laporan pengaduan (Lapdu).

Peningkatan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) akan segera berakhir pada tahun 2014. Sejauh ini upaya untuk membangun institusi sudah dilaksanakan, dimana telah terbentuk 189 Panitia RAN-HAM Kabupaten/Kota dari 499 jumlah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Sebagai tahun terakhir dari pelaksanaan dari RAN HAM maka perlu dilakukan langkah strategis untuk melihat sejauh mana pelaksanaan pembangunan HAM khususnya pelaksanaan 10 (sepuluh) hak dasar di Indonesia telah berjalan melalui aksi-aksi yang pelaksanaannya terbagi di Kementerian/Lembaga, di samping upaya untuk mengawal sinergitas pelaksanaannya. Kementerian Hukum dan HAM saat ini sedang menyusun Pedoman tentang Penilaian Kabupaten/Kota yang Peduli HAM. Diharapkan pedoman ini dapat memberikan motivasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota agar lebih memperhatikan penghormatan, pemenuhan, perlindungan, penegakan, dan pemajuan HAM pada wilayahnya masing-masing. Sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat dan pelaksana pembangunan HAM di Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota maka diharapkan akan mempercepat pelaksanaan pemenuhan dan perlindungan HAM termasuk untuk mendukung pelaksanaan RAN HAM 2011-2014. Untuk meningkatkan pemahaman tentang HAM serta mendorong

adanya komitmen dalam pelaksanaan pembangunan HAM pada tahun 2012 telah dilakukan pelatihan HAM terhadap 300 orang panitia RAN HAM pada 11 provinsi dan 30 orang siswa SMU se DKI. Disamping itu juga telah dilakukan pelatihan HAM terhadap 560 orang pejabat dari Kementerian/Lembaga serta anggota panitia RAN HAM di tiga Kabupaten/Kota.

Secara umum pelaksanaan bantuan hukum pada tahun 2012 masih melanjutkan implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, yang pada intinya meliputi pemberian jasa bantuan advokat, Pembebasan Biaya Perkara Prodeo, Sidang Keliling, dan Pos Bantuan Hukum, pada empat lingkungan peradilan. Alokasi anggaran operasional Pos Bantuan Hukum bagi 39 Pengadilan Negeri dan lebih dari 150 Pengadilan Negeri sudah menyediakan ruang Pos Bantuan Hukum. Kegiatan ini bekerja sama dengan 228 lembaga penyedia jasa advokat dan telah melayani 42.505 pencari keadilan. Di lingkungan Peradilan Agama (dengan jumlah 359 satuan kerja) telah dilaksanakan kegiatan Bantuan Hukum yaitu pelayanan perkara Prodeo, Sidang Keliling dan pelayanan Pos Bantuan Hukum. Sidang Keliling yang dilaksanakan pada 273 lokasi telah memproses 23.675 perkara dan pelayanan perkara prodeo yang berjumlah 18.549 perkara. Sedangkan pelayanan bantuan hukum telah melayani 55.860 pencari keadilan pada 69 lokasi di seluruh Indonesia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum mengamanatkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum untuk orang miskin penyaluran anggarannya melalui Kementerian Hukum dan HAM yang untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah lulus tahap verifikasi dan akreditasi. Secara nasional, operasional pelayanan bantuan hukum akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2013. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Bantuan Hukum pelaksanaan bantuan hukum akan lebih luas jangkauan pelayanan untuk masyarakat miskin dengan tetap menjamin kualitas pemberian layanan bantuan hukum.

Sampai dengan Bulan Maret tahun 2013 Pemerintah telah melakukan finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tata cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum: menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2013 tentang Verifikasi dan Akreditasi; dan draft Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Standar Bantuan Hukum dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Bantuan Hukum. Selanjutnya, tahapan verifikasi dan akreditasi terhadap Organisasi Bantuan

Hukum yang memenuhi persyaratan akan dilakukan untuk ditunjuk sebagai pihak pemberi bantuan hukum kepada masyarakat. Pemberian bantuan hukum ini meliputi upaya litigasi maupun non litigasi untuk perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara. Untuk tahun 2013, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp 40,8 miliar yang terdiri dari Rp 39 Miliar untuk bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi, dan Rp 1,8 Miliar untuk pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi. UU Bantuan dimaksud ditujukan untuk membantu orang miskin yang merupakan bagian dari upaya untuk penguatan dan perlindungan HAM, khususnya terkait dengan kewajiban negara sebagai pemenuhan hak dasar atas manusia dimuka hukum.

Kondisi penghormatan HAM khususnya bagi kelompok tertentu khususnya perempuan memiliki dinamika yang penting untuk diperhatikan lebih lanjut. Kesepakatan Bersama Akses Keadilan Bagi Perempuan Korban Kekerasan yang sudah ditandatangani pada 23 November 2011 antara Komnas Perempuan, Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Mahkamah Agung RI, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, dan Perhimpunan Advokat Indonesia. Kesepakatan tersebut dimaksudkan untuk mengawal Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP), Kurikulum HAM dan Gender untuk Aparat Penegak Hukum, dan Monitoring Evaluasi Akses Keadilan Bagi Perempuan. Hasil kongkrit pengawalan ini adalah adanya komitmen masing-masing institusi untuk pengintegrasian HAM dan Gender dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan pengembangan. Dari data pengaduan yang diterima Komnas Perempuan Sampai bulan November 2012, pengaduan yang diterima oleh Komnas Perempuan adalah 590 kasus (datang langsung dan telepon) serta 242 kasus melalui surat, email dan jejaring sosial *facebook*. Total penerimaan kasus adalah sejumlah 832 kasus. Surat dukungan yang dikeluarkan Komnas Perempuan sampai Juni 2012 tercatat adalah sebesar 56 buah surat dukungan yang ditujukan ke berbagai pihak, seperti Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan.

Upaya peningkatan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia terkait penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) salah satunya diwujudkan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam undang-undang ini difokuskan kepada proses atau sistem peradilan yang ramah terhadap anak melalui konsep Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*) dan Diversi pada

setiap tahapan proses peradilan. Dalam rangka implementasi Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti antara lain peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Dari sisi sarana dan prasarana pendukung di masing-masing kementerian/lembaga perlu dilengkapi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak hanya itu, kesiapan dan penguatan sumber daya manusia ataupun aparaturnya perlu ditingkatkan.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN. Pemerintah memiliki komitmen untuk terus mendorong terwujudnya birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Langkah yang ditempuh, tidak hanya aspek penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, namun juga aspek pencegahan melalui langkah-langkah kebijakan antara lain: pengembangan sistem integritas aparaturnya, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, peningkatan kapasitas aparat pengawas intern pemerintah (APIP), penyempurnaan pengelolaan keuangan negara/daerah, penyempurnaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan lainnya. Hasilnya, beberapa kemajuan ditunjukkan dari berbagai indikator sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

TABEL 8.1
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS KKN

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | Target 2014 |
|----|--|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1. | Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia | skor (0-10) | 2.8 | 3.0 | 32 | 5,0 |
| 2. | Opini WTP audit BPK atas LKKL (%)* | % | 56,41% | 63% | 77%* | 100% |
| 3. | Opini WTP audit BPK atas LKPD (%)* | % | 3% | 9% | 16%* | 60% |
| 4. | Jumlah K/L yang telah memiliki peraturan tentang SPIP | Jumlah (% dari 80 K/L) | 7 (8,75%) | 46 (57,57%) | 86 (107,5%) | 100% (80 KL) |
| 5. | Jumlah Pemda yang telah memiliki peraturan tentang SPIP | Jumlah (% dari 524 pemda) | 326 (62,2%) | 442 (84,3%) | 524 (100%) | 100% (524 Pemda) |
| 6. | Jumlah Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)** | Jumlah Unit LPSE | 137 | 353 | 549 | 600 |
| 7. | Jumlah Paket Pengadaan melalui LPSE dan Nilai Pagu Pengadaan | Paket Miliar Rp. | 6.397 12.971,8 | 24.475 38.163,4 | 91.088 133.871,7 | - - |

Sumber: Transparansi Internasional Indonesia, BPK, BPKP, dan LKPP

Keterangan: * Berdasarkan IHPS I, September 2012

** Data LKPP Januari 2013

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) Jangka Menengah 2012-2014 dan Jangka Panjang 2012-2025, telah disusun pelaksanaan aksi tahunan yaitu Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, yang terdiri dari 265 Aksi dan melibatkan 30 Kementerian dan 18 Lembaga dalam mendukung dan mendorong pencapaian target indikator besar Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Aksi PPK tahun 2013 ini pada dasarnya adalah tindak lanjut dari pelaksanaan aksi PPK tahun 2011 dan 2012 yang telah ditetapkan dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011.

Sebagai tindak lanjut dari Stranas PPK tersebut, pada tahun 2012 telah dilakukan Survey Perilaku Anti Korupsi (SPAK) yang dilakukan oleh BPS bersama dengan Bappenas. Skala Indeks penilaian dari SPAK adalah 0-5,0 dimana nilai 5,0 adalah nilai tertinggi untuk kategori sangat anti korupsi. Pada tahun 2012 telah dilakukan SPAK yang dilaksanakan di 170 Kabupaten/Kota (49 Kota dan 121 Kabupaten) pada 33 provinsi. Jumlah sampel dirancang 10.000 rumah tangga, 8.912 (89%) memberi respon dan 1.088 (11%) tidak memberi respon. Hasil dari SPAK pada tahun 2012 adalah 3,55 atau masyarakat Indonesia masuk kategori anti korupsi.

Pengembangan sistem integritas SDM aparatur merupakan faktor penting untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, agar dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara, memiliki sikap profesionalisme, menghindarkan praktek penyalahgunaan kewenangan dan KKN. Kemapan dan RB dengan KPK, terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan aparatur pemerintah untuk menyusun Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Langkah simultan lainnya, melalui penerapan disiplin pegawai yang lebih ketat di lingkungan instansi pemerintah terus ditingkatkan pula sejalan dengan PP 53 Tahun 2010. Telah diterbitkan pula, Permenpan dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, yang bertujuan untuk memperkuat penegakan integritas aparatur.

Upaya lain yang telah ditempuh adalah perluasan penerapan pakta integritas secara konsisten, kongkrit dan pengawasannya oleh masyarakat. Hingga April 2012, instansi pemerintah yang telah menandatangani Pakta Integritas berjumlah 34 K/L, 5

Lembaga Tinggi Negara, 22 LPNK, 5 Lembaga Setingkat Menteri, 33 Provinsi, dan 458 Kabupaten/Kota. Secara bersamaan, ditempuh upaya pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada K/L/Pemda. Sampai dengan Januari 2013, penancangan dan pembangunan zona integritas telah dilakukan di 109 instansi, terdiri dari 28 K/L, 1 Sekretariat Lembaga Tinggi Negara, 11 Provinsi, dan 69 Kabupaten/Kota. Untuk menciptakan landasan yang kuat, KPK saat ini juga sedang mengembangkan Sistem Integritas Nasional (SIN) dengan target pelembagaan/ implementasi SIN pada seluruh instansi pemerintah.

Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) merupakan upaya mendukung birokrasi yang bersih dan bebas KKN. Kemajuan sampai dengan tahun 2012 antara lain disusunnya berbagai SOP Pedoman Pembimbingan dan Konsultasi SPIP; Pedoman Penilaian Maturitas SPIP; Pedoman Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi SPIP; Pedoman Pelaksanaan *Control Environment Evaluation* (CEE); Pedoman Pelaksanaan *Control Self Assessment* (CSA) dalam Penilaian Resiko; dan Pedoman Evaluasi SPIP. Disamping itu, telah dilakukan beberapa kegiatan strategis lainnya, seperti diklat, sosialisasi, bimtek dan konsultasi SPIP pada instansi pusat dan daerah.

Kemajuan pembinaan penyelenggaraan SPIP yang telah dilaksanakan sampai dengan Desember 2012 adalah sebagai berikut:

TABEL 8.2
KEGIATAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SPIP TAHUN 2010 - 2012

| No. | Kegiatan | Satuan | Tahun | | | Jumlah |
|-----|--|---|-------|-------|-------|--------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1. | Penyusunan Pedoman Teknis SPIP | pedoman | 27 | 7 | 7 | 41 |
| 2. | Sosialisasi/Workshop SPIP | K/L/Pemda | 382 | 119 | 120 | 621 |
| 3. | Pendidikan dan Pelatihan SPIP | Orang | 5.805 | 4.435 | 2.722 | 12.962 |
| 4. | Pemetaan (<i>diagnostic assessment</i>) Penerapan SPIP | K/L/Pemda | 66 | 136 | 67 | 269 |
| 5. | Bimbingan dan Konsultasi SPIP | K/L/Pemda | 64 | 264 | 252 | 580 |
| 6. | Bimtek Penyusunan Perkada/Peraturan K/L tentang SPIP | Permen / Perka/ Perkadatentang SPIP | 333 | 155 | 122 | 610 |

Sumber : Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Disamping itu, dalam rangka peningkatan pengawasan pengelolaan keuangan negara telah dilaksanakan beberapa upaya, antara lain: bimtek/asistensi implementasi *fraud control plan* (FCP); audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli atas permintaan instansi penyidik; penyelenggaraan pengawasan lintas sektor; pengawasan atas penerimaan negara dan penyelenggaraan pengawasan atas permintaan Presiden. Sedangkan untuk meningkatkan kapasitas auditor internal (APIP) dilakukan melalui sertifikasi jabatan fungsional auditor (JFA), diklat teknis substansi, dan diklat lainnya.

Pengelolaan keuangan negara yang transparan, terus didorong melalui pengembangan *e-procurement*. Sampai dengan Januari 2013, telah terbentuk 549 LPSE yang terdiri dari 53 instansi pemerintah pusat, 33 provinsi, 406 kabupaten/kota, serta 57 instansi lainnya (Perguruan Tinggi Negeri/ Rumah Sakit/ Badan Usaha Milik Negara), yang melayani 731 instansi dan 284.315 penyedia terdaftar. Kinerja LPSE telah memberikan dampak signifikan berupa efisiensi penggunaan anggaran belanja negara. Pada tahun 2012 terdapat 91.088 paket pengadaan dengan nilai Rp. 150,224 triliun yang ditenderkan melalui LPSE, sehingga penghematan anggarannya mencapai 11,62 persen atau sebesar Rp 15,56 Triliun.

Sejalan dengan pengembangan *E-Procurement*, dilakukan penyempurnaan kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah, antara lain diterbitkannya: (1) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (2) Perpres No. 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat; serta (3) Penyempurnaan Naskah Akademis RUU Pengadaan Barang dan Jasa. Kebijakan lainnya yang disusun, antara lain: *Whistle Blowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; *E-Purchasing*; dan *E-Tendering*.

Disamping pengembangan *e-procurement* dan penyempurnaan kebijakan, dilakukan upaya penataan kelembagaan dan pembinaan SDM pelaksana pengadaan. Penataan kelembagaan dilakukan melalui pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada instansi pemerintah sebagai organisasi yang permanen dan fokus menangani pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional. Sedangkan pembinaan SDM diperkuat melalui

penerbitan PermenPAN dan RB No. 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Langkah-langkah tersebut, diharapkan makin mengurangi secara signifikan praktek KKN dalam pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah.

Pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas merupakan tujuan utama dari berbagai upaya pembenahan birokrasi agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya untuk mewujudkannya, antara lain melalui penyempurnaan kebijakan; pengembangan manajemen pelayanan yang mencakup penataan kelembagaan pelayanan, SDM yang kompeten, profesional dan berintegritas, pemanfaatan TIK, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik. Meskipun telah terdapat kemajuan, namun masih perlu kerja keras untuk meningkatkan kualitasnya. Kemajuan dalam pelayanan publik, tercermin dari beberapa indikator sebagaimana dalam tabel berikut.

TABEL 8.3
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PELAYANAN PUBLIK

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | Target |
|----|--|-------------|---------|------|------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 |
| 1 | Integritas pelayanan publik (Pusat) | Skor (1-10) | 6,16 | 7,07 | 6,86 | 8,0 |
| 2 | Integritas Pelayanan Publik (Daerah) | Skor | 5,26 | 6,00 | 6,00 | 8,0 |
| 3 | Jumlah unit pelayanan terpadu satu pintu (OSS) di daerah (prov/kab/kota) | Unit | 394 | 420 | 444 | 100% (530) |
| 4 | Peringkat Kemudahan Berusaha (<i>Ease Doing Bussiness Index</i>) | Peringkat | 115 | 126 | 129 | 75 |

Sumber: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian PAN dan dan RB, dan *International Finance Corporatoin/ World Bank (IFC/WB)*

Guna memberikan kepastian masyarakat untuk mendapatkan manfaat pelayanan yang berkualitas, pemerintah telah menerbitkan, antara lain: (1) PP Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, (2) PermenPAN & RB No. 36/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; dan (3) PermenPAN & RB No. 38/2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik. Dengan telah ditetapkannya 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) terus didorong

implementasinya dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Pemerintah terus melakukan monitoring pelaksanaan 15 SPM tersebut di daerah untuk memastikan ruang lingkup dan kualitas implementasinya.

Dibidang pelayanan perizinan dan kemudahan berusaha dilakukan melalui pembentukan dan peningkatan kualitas pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Saat ini telah terbentuk 444 unit PTSP yang terdiri dari 18 PTSP provinsi, 330 PTSP kabupaten, dan 96 PTSP kota. Pembentukannya akan terus diperluas, sehingga seluruh instansi pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan, memiliki PTSP. Selain itu, terus dilakukan pematapan kelembagaan PTSP. Langkah lainnya, koordinasi antar K/L pembina PTSP terus dimantapkan, melalui pembagian tugas diantara Kemendagri, BKPM dan Kementerian PAN dan RB. Sedangkan peningkatan kapasitas SDM Pelayanan telah dilakukan melalui penyelenggaraan Diklat TOT Pelayanan Publik Berbasis Kinerja dengan peserta 100 orang yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Penilaian terhadap kinerja pelayanan publik pada instansi/unit penyelenggara pelayanan merupakan salah satu strategi untuk memacu peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk melihat dari aspek integritas, KPK melakukan survei terhadap penyelenggara pelayanan yang hasilnya diformulasikan dalam bentuk skor integritas pelayanan publik instansi pusat dan daerah. Sedangkan Kementerian PAN dan RB juga menyelenggarakan dalam bentuk kompetisi antar penyelenggara pelayanan berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 44 tahun 2011 tentang Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan Kabupaten/Kota. Selain itu, sebagai salah satu tolok ukur keberhasilan program reformasi birokrasi, telah diterbitkan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 4/M.PAN-RB/03/2012 tentang Pelaksanaan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada seluruh Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Diharapkan skor IKM atas penyelenggaraan pelayanan publik makin meningkat sesuai dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan berkualitas.

Dalam rangka mendorong pengawasan masyarakat atas pelayanan publik, sedang dikembangkan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional yang diharapkan dapat mengintegrasikan dan mengkonsolidasikan seluruh sistem pengaduan yang terdapat pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Keberadaan Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan

pelayanan publik diperkuat dari sisi manajemen SDM-nya melalui penerbitan PP Nomor 64 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia pada ORI, agar kompetensi dan kinerja dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan makin optimal.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi, serta Pemantapan Reformasi Birokrasi. Langkah-langkah yang ditempuh untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi meliputi penataan kelembagaan, pelaksanaan reformasi birokrasi instansi, pengembangan sistem ketatalaksanaan, pengembangan manajemen SDM aparatur, pemantapan manajemen kinerja dan peningkatan akuntabilitas. Beberapa capaian yang telah berhasil, antara lain ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagaimana dalam tabel berikut.

TABEL 8.4
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN PENINGKATAN KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS BIROKRASI, SERTA REFORMASI BIROKRASI PADA INSTANSI PEMERINTAH

| No | Indikator | Satuan | Capaian | | | Target 2014 |
|----|--------------------------------|--------------|---------|-------|-------|----------------------------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1. | K/L yg Telah Melaksanakan RB | Jumlah (K/L) | 14 | 16 | 59 | 100%K/L, 100% Prov, 50% Kab/Kota |
| 2. | Instansi Pusat yg Akuntabel | % | 63,29 | 82,93 | 95,06 | 100 |
| 3. | Instansi Provinsi yg Akuntabel | % | 31,03 | 63,33 | 75,76 | 90 |
| 4. | Instansi Kab/Kota yg Akuntabel | % | 8,77 | 12,78 | 24,37 | 50 |

Sumber: Kementerian PAN dan RB.

Pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) terus diperluas dan ditingkatkan kualitasnya di instansi pusat dan daerah. Sampai dengan akhir tahun 2012, sebanyak 59 K/L telah melaksanakan RB sesuai dengan kebijakan nasional. Saat ini, 36 K/L telah menerapkan tunjangan kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja dan 23 K/L masih dalam proses pertimbangan Tim Reformasi Birokrasi Nasional. Selanjutnya, pada awal tahun 2013 sebanyak 9 K/L telah memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan RB. Secara keseluruhan sebanyak 68 K/L yang telah melaksanakan RB. Selanjutnya, untuk instansi pemerintah

daerah, pelaksanaan RB mulai dilaksanakan di 33 pemerintah provinsi, 33 pemerintah kota, dan 33 pemerintah kabupaten. Pelaksanaan RB di instansi pemerintah pusat (K/L) dan pemerintah provinsi sudah dapat dituntaskan dan ditingkatkan kualitasnya tahun 2013. Sedangkan pada instansi pemerintah kabupaten/kota diharapkan tercapai 40% yang telah melaksanakan RB.

Sejalan itu pula, penataan kelembagaan organisasi pemerintah pusat dimantapkan koordinasinya melalui pembentukan Tim Penataan Organisasi K/L yang mempunyai tugas antara lain menyiapkan bahan pertimbangan kepada pemerintah untuk penataan organisasi K/L dan menyusun program restrukturisasi organisasi pemerintah pusat. Diharapkan pada tahun 2013, sebanyak 40 K/L dapat dilakukan penataan organisasi K/L agar tepat fungsi dan tepat ukuran. Penataan sistem ketatalaksanaan untuk mendukung birokrasi yang modern dilakukan antara lain pengembangan sistem kearsipan. Pada tahun 2012, telah diterbitkan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 43/2009 tentang Kearsipan. Selain itu, telah dibuat 30 Peraturan Kepala (Perka) ANRI sebagai operasionalisasi dari perundang-undangan bidang kearsipan. Peningkatan kapasitas manajemen kearsipan dilakukan melalui perluasan penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) oleh instansi pusat, dan Bimtek Pengelolaan Arsip Aset di 33 provinsi, dan selanjutnya tahun 2013 akan terus diperluas pada 315 kabupaten/kota.

Bidang SDM Aparatur, dalam rangka penyempurnaan manajemen kepegawaian negara, pemerintah bersama DPR sedang membahas RUU Aparatur Sipil Negara (ASN), yang diharapkan menjadi landasan pembenahan secara mendasar terhadap manajemen kepegawaian berbasis merit. Pada tahun 2013, diharapkan RUU ASN sudah dapat diterbitkan menjadi UU dan dapat ditindaklanjuti dengan penerbitan peraturan pelaksanaan serta implementasinya. Sedangkan kebijakan yang telah diterbitkan, antara lain: (1) PP Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorar Menjadi CPNS; (2) PP Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan PNS dan Janda/Dudanya; (3) Permenpan dan RB Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya; dan (4) Permenpan dan RB Nomor 41 Tahun 2012 tentang Jabatan Assesor SDM Aparatur dan Angka Kreditnya. Dengan diterbitkannya dua buah

Permenpan dan RB tersebut, diharapkan dapat mendorong pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme PNS yang menjalankan tugas pengawasan dan pengendalian pelaksanaan, serta penilaian kompetensi manajerial pada bidang manajemen kepegawaian.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung penataan PNS baik jumlah, komposisi dan kompetensinya, pada tahun 2012 pemerintah telah melakukan Diklat Analisis Kepegawaian dengan peserta lebih dari 4.125 peserta dari K/L dan pemda. Secara bertahap, telah dilakukan berbagai penyempurnaan seperti sistem rekrutmen CPNS, penataan distribusi, peningkatan kompetensi dan perbaikan sistem promosi dan mutasi. Kemajuan yang perlu digarisbawahi bahwa percontohan sistem promosi secara terbuka telah diterapkan di Kementerian PAN dan RB, BKN, LAN, dan ANRI serta beberapa instansi lainnya.

Perkembangan penataan PNS lainnya adalah penataan distribusi PNS, pengembangan database kepegawaian melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Online, penyiapan kebijakan pensiun dini, implementasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sejalan dengan PP Nomor 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS, pengembangan *assesment center* untuk mendukung database profil kompetensi PNS, pemantapan penerapan rekrutmen CPNS berbasis komputer melalui perluasan instalasi CAT sistem di pusat dan daerah. Saat ini CAT System telah terpasang pada 8 (delapan) Kantor Regional BKN di berbagai Provinsi dan 1 (satu) di Kantor Pusat BKN. Selanjutnya CAT System akan terus diperluas instalasinya pada seluruh ibukota provinsi. Terkait dengan Diklat Aparatur, sistem pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai terus disempurnakan dan ditingkatkan kualitas penyelenggaraannya, antara lain melalui akreditasi 16 lembaga diklat dan sertifikasi Widyaiswara sebanyak 400 orang. Sedangkan DIKLATPIM Tk.I pada tahun 2012 telah diselenggarakan dengan peserta 120 orang.

Pada aspek manajemen kinerja, berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat (K/L) tahun 2012, memperlihatkan adanya kemajuan yang cukup berarti. K/L yang akuntabilitas kerjanya baik, telah mencapai 95,06%. Sedangkan untuk instansi pemerintah provinsi yang akuntabilitas kerjanya baik, mencapai 75,76%. Kondisi ini masih di bawah target RPJMN pada tahun 2014, yakni 80% instansi pemerintah pusat dan daerah yang akuntabilitas kerjanya baik. Dengan demikian, masih perlu upaya

peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang lebih baik lagi di masa mendatang.

8.2 Permasalahan dan Sasaran Tahun 2014

8.2.1 Permasalahan

Meskipun upaya mewujudkan sasaran pembangunan hukum dan aparatur telah menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun, namun disadari bahwa masih terdapat permasalahan yang dihadapi dan harus diselesaikan.

Efektivitas Peraturan Perundang-undangan. Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014 yang ditetapkan bersama oleh Pemerintah dan DPR menetapkan 287 RUU. Sampai dengan bulan Maret 2013 baru menghasilkan 70 RUU, yang terdiri dari 37 UU sesuai dengan Prolegnas; 32 UU yang ditetapkan berdasarkan usulan Daftar Kumulatif Terbuka; dan 1 (satu) UU yang ditetapkan di luar Prolegnas.. Walaupun masih relatif rendah, diharapkan UU yang telah ditetapkan dapat mempercepat pelaksanaan kebijakan dalam prioritas nasional sejalan dengan pemenuhan 4 (empat) track, yaitu *pro poor*, *pro job*, *pro growth* dan *pro environment* sebagaimana ditetapkan dalam Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014. Pada tahun 2014, dengan sisa target 250 RUU yang harus dibahas sampai dengan berakhirnya masa kerja DPR 2010-2014, memperlihatkan sisi kuantitas akan lebih menonjol daripada kualitas. Mencermati permasalahan yang masih terus di hadapi terkait dengan efektivitas peraturan perundang-undangan, pada tahun 2014 diharapkan dapat lebih memprioritaskan pembahasan RUU dalam Prolegnas yang benar-benar dapat memberikan dampak *multiplier effect* kepada pemenuhan tahapan RPJMN II 2010-2014.

Kinerja Lembaga di Bidang Hukum. Proses penanganan perkara lembaga di lingkungan penegak hukum masih belum optimal terutama dalam pelaksanaan mekanisme keterbukaan dan akuntabilitas. Meskipun upaya keterbukaan sudah dilaksanakan di beberapa lembaga, namun kesinambungan data dan informasi serta kualitasnya perlu ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan sebagai data dasar untuk mengukur kinerja penegakan hukum di Indonesia. Perubahan pola pikir dan kinerja aparat dan lembaga perlu diarahkan untuk melaksanakan proses penanganan perkara dari kegiatan manual menjadi pengelolaan penanganan perkara yang mudah, cepat dan murah. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam penanganan perkara

membutuhkan kapasitas sumber daya manusia yang memadai sebagai pengelola dan memiliki visi yang jelas dalam memberikan pelayanan yang terbaik. Perubahan tata kelola dalam proses penanganan perkara yang fokus kepada transparansi dan akuntabilitas kinerja perlu ditingkatkan untuk menjamin akses masyarakat terhadap keadilan.

Di bidang penanganan perkara konstitusi, permasalahan yang dihadapi masih terkait dengan jangka waktu penanganan perkara Pengujian Undang Undang (PUU) yang bervariasi karena tidak ada pembatasan waktu penyelesaian. Selain itu, penanganan perkara PHPU Kepala Daerah yang mempunyai limitasi waktu penyelesaiannya dihadapkan kepada jumlah perkara yang masuk ke MK.

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh instansi penegak hukum adalah kurangnya dukungan alokasi anggaran penanganan perkara termasuk di dalamnya anggaran penanganan perkara pidana umum. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dikhawatirkan dapat mempengaruhi kelancaran kinerja penanganan perkara. Selain itu apabila biaya operasional untuk penanganan perkara tidak optimal akan memicu dan memaksa aparat penegak hukum melakukan tindakan yang tidak terpuji atau tindakan yang koruptif dalam melakukan proses penanganan perkara. Hal ini tentunya akan berakibat menurunkan citra dan wibawa dari lembaga khususnya upaya penegakan hukum yang sedang giat dilaksanakan.

Peningkatan Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Terkait dengan pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, tantangan yang dihadapi adalah memastikan pelaksanaan Bantuan Hukum pada tahun 2013 dengan anggaran yang tersedia secara tepat sasaran, yaitu kepada orang miskin yang benar-benar memerlukan. Pada tahun 2014, rencana sosialisasi UU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum kepada 13 provinsi dan peningkatan alokasi bantuan hukum diharapkan dapat lebih mempercepat pelayanan hukum kepada orang miskin khususnya.

Dari penyelenggaraan Sidang HAM ke-2, menunjukkan bahwa masih perlu dilaksanakan konsolidasi dan sinergitas antara berbagai aktor di bidang pembangunan HAM untuk memberikan jaminan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan HAM. Perlu disusun strategi bersama untuk menjamin sinergitas dalam

pelaksanaan kebijakan pembangunan HAM diantara pemangku kepentingan.

Berkaitan dengan penghormatan hak asasi manusia terhadap anak, permasalahan yang dihadapi terkait dengan penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah masih kurangnya sosialisasi dan pemahaman aparat penegak hukum mengenai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak dan peraturan perundang-undangan lainnya mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan tingkat pengadilan dan di tingkat lembaga pemasyarakatan dalam penanganan perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Selain itu komitmen dari kementerian lembaga terkait dalam penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam rangka mengimplementasikan ketentuan yang tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum optimal.

Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.

Masih terdapat beberapa permasalahan yang harus ditangani dari sisi pencegahan dan pemberantasan korupsi, antara lain: (a) perumusan pendekatan represif yang memiliki dampak mengurangi perilaku koruptif dan praktek koruptif yang sistematis dan masif; (b) inkonsistensi penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi; (c) tumpang tindih peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan Konvensi PBB Anti Korupsi; (d) masih belum optimalnya pengembalian aset hasil korupsi; dan (e) integritas aparat pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Strategi pencegahan korupsi, masih menjadi prioritas untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meskipun beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam upaya pencegahan, antara lain persepsi publik bahwa pemberantasan korupsi belum tepat sasaran; pendidikan dan kampanye publik anti korupsi belum mampu menumbuhkan kesadaran takut korupsi; implementasi sistem integritas nasional belum berjalan secara efektif dan menumbuhkan budaya birokrasi bersih; komitmen instansi pemerintah khususnya pemda untuk meningkatkan tatakelola keuangan yang baik relatif rendah; penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) belum efektif mendukung peningkatan kualitas pengelolaan kegiatan dan anggaran; kapasitas pengelola keuangan dan internal auditor belum menunjang tersusunnya

kualitas laporan keuangan yang baik, serta manajemen pengelolaan barang milik negara yang juga belum optimal; dan masih seringnya pelanggaran prosedur dan mekanisme pengadaan barang/jasa yang dilakukan para pejabat pengadaan (ULP).

Pelayanan Publik. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat. Hal ini karena masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain: komitmen penyelenggara untuk peningkatan kualitas layanan masih rendah; sistem manajemen pelayanan publik belum didukung penerapan TIK secara merata serta kapasitas SDM yang kompeten dan berintegritas; kelembagaan pelayanan belum terkonsolidasikan dalam struktur organisasi pemerintah daerah secara efektif dan efisien; sistem monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan publik belum mendukung upaya perbaikan pelayanan; dan belum tersedia sistem nasional penanganan pengaduan masyarakat yang efektif, terintegrasi dan tindak lanjut penanganannya tuntas. Permasalahan tersebut menjadi tantangan untuk dapat diselesaikan pada tahun 2014.

Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel, masih menghadapi permasalahan antara lain: penataan kelembagaan belum didasarkan atas audit organisasi sehingga penyelesaiannya bersifat parsial; implementasi RB belum mampu mendukung pemerintahan yang efektif dan efisien, serta kualitas pelayanan; sistem ketatalaksanaan (bisnis proses) belum mencerminkan birokrasi yang modern; SDM aparatur belum bekerja secara profesional, berintegritas dan bermental melayani; tekanan politik terhadap kinerja birokrasi masih kuat dan berpengaruh pada lemahnya independensi; kualitas kebijakan/regulasi dan implementasinya belum konsisten dan tumpang tindih; dan penerapan manajemen kinerja pada semua lini pemerintahan masih lemah.

8.2.2 Sasaran

Dalam RPJMN 2010-2014 Bidang Hukum dan Aparatur telah dirumuskan bahwa sasaran pembangunan bidang hukum dan aparatur adalah terwujudnya peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Pencapaian sasaran ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Pada RKP 2014 sasaran pembangunan Bidang Hukum dan Aparatur adalah:

1. Melanjutkan penguatan kelembagaan dan meningkatkan

kinerja di bidang hukum dengan sarana dan prasarana yang memadai serta mendukung kinerja lembaga sesuai dengan fungsi masing-masing.

2. Mewujudkan pemenuhan, perlindungan, penghormatan HAM melalui pelaksanaan transparansi proses penegakan hukum dan memberikan keterbukaan akses masyarakat terhadap keadilan di beberapa bidang (termasuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan UU Bantuan Hukum).
3. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, melalui: (i) pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah 2012-2014; (ii) penyusunan Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi di provinsi/kabupaten/kota; (iii) meningkatnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK); dan (iv) meningkatnya opini WTP hasil audit BPK atas LKKL dan LKPD TA 2013.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang ditandai dengan: (1) meningkatnya integritas dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dan (2) meningkatnya peringkat indeks kemudahan berusaha.
5. Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, yang ditandai dengan: (1) makin meningkatnya skor Indeks Efektivitas Pemerintahan, dan (2) meningkatnya prosentase instansi pemerintah yang dinilai akuntabel.

8.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014

Upaya mencapai sasaran Bidang Hukum dan Aparatur tahun 2014 akan diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, melalui arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

8.3.1 Peningkatan Efektivitas Peraturan Perundang-Undangan

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan efektivitas peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas substansi peraturan perundang-undangan

Peningkatan pembenahan terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada maupun peningkatan kualitas dari rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

Untuk tahun 2014 ini, akan diupayakan prasyarat adanya Naskah Akademis yang menyertai konsep peraturan perundang-undangan yang akan diajukan dalam daftar Prolegnas serta dilakukannya seleksi berdasarkan prioritas perencanaan pembangunan dan kebutuhan hukum masyarakat untuk menentukan RUU yang masuk dalam daftar Prolegnas untuk menyesuaikan dengan prioritas pembangunan nasional.

2. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan ketentuan di dalam peraturan perundangan turunan UU No, 12 Tahun 2011 dalam rangka sinergitas antara prioritas perencanaan pembangunan dan kebutuhan kerangka regulasi dalam proses penyusunan Prolegnas.

3. Pelaksanaan harmonisasi peraturan perundang-undangan

Melaksanakan pemetaan awal untuk menemukenali kerangka regulasi yang diperlukan oleh masing-masing lembaga dan merevisi dan/atau menghapus regulasi yang tumpang tindih antar lembaga dan sektor.

4. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap efektifitas peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan proses yang partisipatif dalam rangkaian penyusunan peraturan perundang-undangan (*pendekatan whole government approach*) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan memperluas ruang partisipasi untuk melakukan pengawasan dalam implementasi peraturan perundang-undangan.

8.3.2 Peningkatan Kinerja Lembaga Penegak Hukum

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan kinerja lembaga penegak hukum adalah sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan sistem manajemen penanganan perkara yang akuntabel dan transparan

Melanjutkan proses keterbukaan *business process* dan alur penanganan perkara yang di dukung oleh sistem manajemen perkara yang transparan dengan dukungan teknologi informasi dan didukung sumberdaya aparat yang mempunyai kapasitas tinggi. Proses ini diharapkan memudahkan masyarakat pencari keadilan memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mudah, murah dan terkini.

2. Melanjutkan pelaksanaan mekanisme seleksi, promosi, dan mutasi serta kapasitas aparat penegak hukum yang berbasis kompetensi.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu integritas aparat penegak hukum, akan dilaksanakan perbaikan proses rekrutmen aparatur penegak hukum yang berbasis kompetensi. Selanjutnya, pelaksanaan promosi dan mutasi aparat akan dilaksanakan berbasis *merit* yang didukung dengan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum secara berkala. Peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum perlu dilaksanakan sesuai dengan beban kerja sehingga profesionalisme penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dapat terjaga.

3. Meningkatkan upaya pengawasan terhadap kinerja lembaga dan aparat penegak hukum.

Penegakan kode etik profesi dan pengawasan yang menyeluruh baik secara internal maupun eksternal akan menjadi fokus pelaksanaan tahun 2014. Penguatan integritas aparat penegak hukum juga diperlukan untuk menjaga profesionalisme aparat. Pengembangan *whistle blowing system* melalui pelaksanaan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang dilaksanakan oleh K/L memberikan penguatan dalam proses pengawasan aparat penegak hukum di lembaga masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pemberian sanksi yang tegas terhadap aparatur penegak hukum dan proses tindak lanjut laporan pengaduan akan dilaksanakan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pelayanan aparat dalam proses penegakan hukum.

4. Peningkatan kualitas pelayanan hukum.

Upaya peningkatan pelayanan hukum terus dilakukan dengan mengedepankan berbagai inovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum akan terus ditingkatkan baik dari kualitas maupun waktu dengan proses yang mudah dan berbiaya terjangkau.

5. Perbaikan dukungan sarana dan prasarana lembaga penegak hukum.

Dukungan sarana dan prasarana akan terus ditingkatkan dari waktu ke waktu agar produktivitas kinerja aparatur penegak hukum semakin optimal dan menghindarkan aparat penegak

hukum dari praktek menyimpang dalam melaksanakan tugasnya.

8.3.3. Peningkatan Penghormatan terhadap HAM

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM adalah sebagai berikut:

1. Konsolidasi substansi hukum terkait implementasi HAM

Pengarusutamaan prinsip-prinsip internasional hak asasi manusia akan terus dilakukan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan nasional dalam rangka peningkatan dalam pemberian penghormatan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Perlu adanya pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap upaya pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang HAM dan implementasinya di berbagai bidang pembangunan.

2. Peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan.

Akses masyarakat terhadap keadilan perlu diberikan secara proporsional baik dalam rangka penguatan masyarakat maupun peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Di tahun 2013, akses masyarakat terhadap keadilan akan dilaksanakan antara lain melalui kegiatan bantuan hukum berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

8.3.4. Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Arah dan strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah sebagai berikut:

1. Proses Pencegahan dan Penegakan Hukum yang terkoordinasi dan terintegrasi.

Dalam melakukan upaya pencegahan dan penegakan hukum yang terintegrasi, diperlukan peningkatan koordinasi yang memadai antar aparat penegak hukum khususnya dalam berbagai upaya pencegahan yang integratif serta penanganan kasus-kasus yang mendapat perhatian masyarakat dan berpotensi menimbulkan kerugian yang besar kepada negara sehingga diharapkan upaya penegakan hukum dilakukan secara terpadu dan saling bersinergi. Upaya ini dilaksanakan berdasarkan penerbitan Inpres mengenai Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Menengah (2012-2014).

2. Pencegahan praktek KKN dan pengembangan sistem integritas aparatur negara.

Langkah-langkah yang akan ditempuh antara lain penegakan disiplin dan integritas PNS secara ketat; pemberlakuan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi pejabat struktural dan tugas-tugas strategis lainnya; penerapan pakta integritas dan perluasan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK) pada K/L/Pemda. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong birokrasi yang bersih dan memacu peningkatan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia.

Pengelolaan keuangan negara dan daerah akan terus ditingkatkan kualitasnya. Langkah yang ditempuh difokuskan pada peningkatan kapasitas auditor internal dan pengelola keuangan negara, penerapan SPIP secara efektif, peningkatan kualitas pengelolaan barang milik negara. Langkah ini, akan didukung dengan pengembangan dan peningkatan kualitas *e-procurement* (LPSE), pembentukan Unit Layanan Pengaduan (ULP) dan implementasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah, serta penyempurnaan kebijakan.

3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Masyarakat memiliki peran strategis untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan guna mencegah praktek KKN dan menciptakan iklim takut korupsi. Oleh karena itu, akan ditempuh langkah-langkah penyelesaian berbagai kebijakan yang mengakomodasikan pengawasan masyarakat; mendorong dan memanfaatkan pengaduan masyarakat serta tindak lanjut perbaikannya; dan meningkatkan kampanye publik untuk mendorong birokrasi yang bersih dan bebas KKN.

8.3.5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Arah dan strategi kebijakan yang ditempuh untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan manajemen dan sistem pelayanan publik nasional.

Pemerintah telah menerbitkan PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Diharapkan seluruh K/L dan Pemda melaksanakannya secara konsisten. Langkah lainnya yang ditempuh adalah peningkatan kompetensi SDM, peningkatan pemanfaatan TIK,

dan perbaikan standar pelayanan pada unit penyelenggara pelayanan publik. Pengembangan jabatan fungsional pengawasan pelayanan publik terus dimantapkan dan dikoordinasikan, agar dapat segera terwujud. Selain itu, sistem pengaduan pelayanan publik terus diperbaiki untuk menampung keluhan dan aspirasi masyarakat, serta tindak lanjut perbaikan yang diperlukan.

Dari aspek kelembagaan pelayanan perizinan, pada tahun 2014, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP)/*one stop services* (OSS) akan terus ditingkatkan kualitas dan kualifikasinya, terutama aspek SDM, standar pelayanan, dan pemanfaatan TIK-nya untuk memudahkan dan mempercepat proses pelayanan perizinan.

2. Penerapan standar pelayanan minimal pelayanan publik.

Pemerintah telah menerbitkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada beberapa sektor/jenis pelayanan publik, sebagai dasar dan untuk menjamin pemenuhan pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat. Disamping itu, pada setiap unit penyelenggara pelayanan harus memiliki standar pelayanan yang berlaku, menjadi pedoman dan dilaksanakan secara konsisten. Sejalan hal tersebut, telah diterbitkan Permenpan dan RB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan, sebagai dasar penyusunan standar pelayanan dan mengimplementasikannya.

3. Pengembangan sistem evaluasi kinerja pelayanan publik.

Untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, maka dilakukan monitoring dan evaluasi kinerjanya. Pada tahun 2014, akan dilanjutkan penilaian atau evaluasi kinerja terhadap penyelenggaraan pelayanan publik melalui kompetisi dan pemeringkatan kinerja antar instansi/unit penyelenggara pelayanan. Monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik telah diimplementasikan dengan baik. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan terwujud pelayanan berkualitas dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) makin meningkat pula.

8.3.6. Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Arah dan strategi kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Penataan kelembagaan instansi pemerintah.

Penataan kelembagaan tepat fungsi dan tepat ukuran, serta mengedepankan efektifitas dan efisiensi menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2014. Penataan tersebut, meliputi penataan atas kelembagaan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, dan pemerintah daerah. Sejalan dengan pembentukan Tim Penataan Organisasi K/L, maka akan ditempuh upaya penataan organisasi K/L dan program restrukturisasi organisasi pemerintah pusat secara bertahap. Penataan juga mencakup evaluasi atas kelembagaan unit pengelola teknis (UPT) pada kementerian/lembaga.

2. Pengembangan sistem ketatalaksanaan.

Sistem ketatalaksanaan (proses bisnis) yang sederhana, transparan dan akuntabel diyakini dapat mendukung manajemen pemerintahan yang efektif dan efisien. Pada tahun 2014, diharapkan RUU tentang Administrasi Pemerintahan telah diselesaikan pembahasannya dengan DPR dan segera diimplementasikan sebagai dasar hukum pengaturan tatalaksana pemerintahan. Selain itu, pengembangan *e-government* terus diperluas implementasinya pada instansi pemerintah pusat dan daerah untuk mendukung efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Disamping itu, pengembangan manajemen kearsipan berbasis TIK diharapkan turut memberikan kontribusi bagi pembentukan manajemen birokrasi yang modern. Langkah yang ditempuh, penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (SIKD-TIK) terus diperluas.

3. Peningkatan profesionalisme, netralitas dan kesejahteraan SDM Aparatur.

Pada tahun 2014 diharapkan RUU tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sedang dalam proses pembahasan dengan DPR, sudah dapat diimplementasikan dan menjadi landasan utama manajemen kepegawaian negara. Selanjutnya, untuk meningkatkan profesionalisme PNS langkah yang akan ditempuh antara lain; perencanaan dan pengadaan PNS secara transparan dan berbasis kompetensi meliputi

penyempurnaan data usulan formasi PNS secara tepat dan akurat, didasarkan atas hasil analisis jabatan dan beban kerja, dan diterapkannya *Computer Assisted Test (CAT) System* dalam proses seleksi CPNS. Langkah-langkah lain yang menjadi prioritas adalah pengembangan sistem karir dan peningkatan kompetensi PNS melalui penerapan sasaran kinerja pegawai (SKP) secara ketat; evaluasi kinerja individu; peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat meliputi sistem diklat, lembaga diklat yang terakreditasi dan widyaiswara yang bersertifikasi; pengembangan *assessment center* yang meliputi proses akreditasi dan peningkatan jumlah pegawai yang dinilai potensi dan kompetensinya; dan pembinaan jabatan fungsional auditor kepegawaian.

Dengan telah diterbitkannya Permenpan dan RB Nomor 37 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, diharapkan makin meningkatkan netralitas dan integritas PNS, khususnya pejabat yang memangku jabatan struktural, dari berbagai benturan kepentingan yang berpotensi penyalahgunaan kewenangan. Adapun untuk peningkatan kesejahteraan SDM Aparatur ditempuh melalui pengembangan sistem remunerasi berbasis kinerja, pengembangan sistem asuransi PNS dan peningkatan penerimaan manfaat asuransi kesehatan, dan penyempurnaan pengelolaan dana pensiun PNS. Beberapa K/L yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, juga telah menerapkan tunjangan kinerja sebagai upaya peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS secara layak.

4. Peningkatan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) diharapkan dapat turut menjamin setiap instansi pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya, serta makin meningkat kinerjanya sesuai dengan indikator kinerja utama (IKU) instansi tersebut. Seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SAKIP dan diharapkan meningkat kualitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, akan ditingkatkan fasilitasi dan pembinaan bagi instansi pemerintah dalam penerapan SAKIP. Landasan kebijakan akan diperkuat pula melalui penyusunan RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara Negara.

8.3.7. Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Arah dan strategi kebijakan yang ditempuh untuk memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi telah dilaksanakan secara bertahap pada instansi pemerintah pusat dan daerah. Tahun 2014, untuk instansi pusat (K/L) pelaksanaan koordinasi reformasi birokrasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelaksanaan dan evaluasi melalui Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Disamping itu, upaya peningkatan kapasitas, koordinasi dan sinergitas antara Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), Tim Independen dan Tim *Quality Assurance* merupakan kunci dalam pengelolaan, pengendalian dan memastikan kualitas pelaksanaan RB nasional. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi memberikan dampak pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dikembangkan pula sistem database kinerja pembangunan aparatur dan reformasi birokrasi dalam bentuk indeks, yang dapat mencerminkan capaian kinerja dari berbagai indikator kinerja yang relevan, dikelola secara kredibel dan selalu dapat di-update perkembangannya.

2. Pemberdayaan SDM aparatur untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi instansi.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada setiap instansi pemerintah, maka akan ditempuh langkah-langkah antara lain penyelenggaraan Forum *Knowledge Management*, Workshop *Change Management*, dan pendidikan dan pelatihan *Reform the Reformers (Reform Leaders Academy)*. Disamping itu, akan ditempuh penataan kepegawaian berdasarkan kompetensinya dan berbagai penyelenggaraan diklat untuk mendukung peningkatan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi.

3. Perluasan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah daerah.

Perluasan reformasi birokrasi di daerah terus dilanjutkan. Pada tahun 2014, diharapkan 100% provinsi dan 60% kabupaten/kota telah melaksanakan reformasi birokrasi. Langkah yang ditempuh antara lain bimbingan, asistensi dan fasilitasi pelaksanaan RB daerah, peningkatan kapasitas

assessor PMPRB Daerah, dan monitoring dan evaluasi kualitas penyelenggaraan RB daerah. Koordinasi dengan berbagai instansi baik pusat maupun daerah, sangat diperlukan bagi keberhasilan pencapaian target pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah.

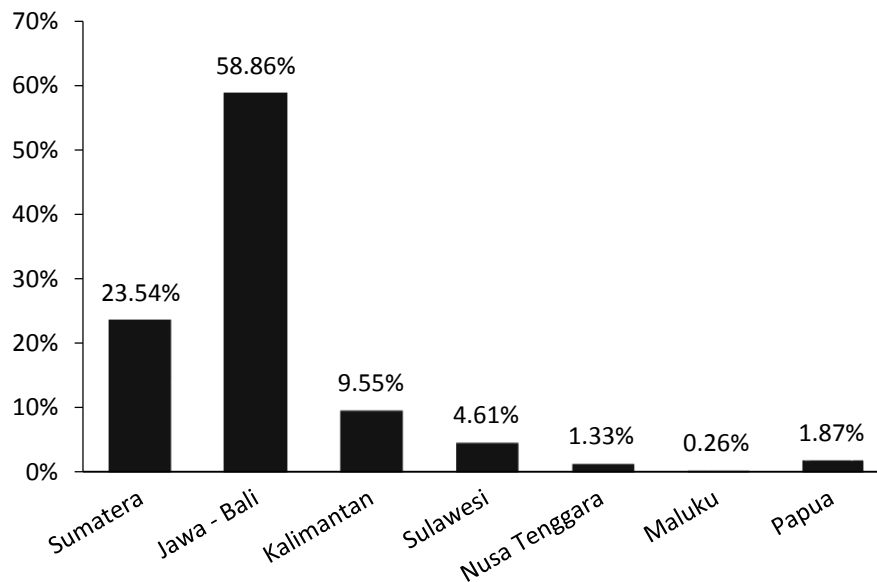
BAB 9

BIDANG WILAYAH DAN TATA RUANG

9.1 Kondisi Umum

Secara nasional, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 telah mencapai 6,5 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut belum diikuti oleh distribusi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Kesenjangan antar wilayah masih menjadi isu penting dalam pembangunan Indonesia. Kesenjangan yang terjadi meliputi aspek perkembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial, antara wilayah barat Indonesia (Sumatera, Jawa dan Bali) dan wilayah timur Indonesia (Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua), antara kota dan desa, serta antarwilayah kabupaten di Indonesia. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kontribusi PDRB tiap provinsi terhadap PDRB nasional, dimana total PDRB seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali berkontribusi lebih besar dibandingkan dengan total PDRB seluruh provinsi di pulau lain terhadap pembentukan PDRB nasional. Tabel 9.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2011, total PDRB provinsi di Pulau Jawa dan Bali berkontribusi sebesar 58,86 persen terhadap total PDRB nasional, sedangkan kontribusi PDRB dari seluruh provinsi di pulau-pulau lainnya hanya sebesar 41,14 persen. Besaran 41,14 persen kontribusi PDRB tersebut tersebar, pada 6 (enam) pulau besar lainnya, yaitu Sumatera sebesar 23,54 persen, Kalimantan sebesar 9,55 persen, Sulawesi sebesar 4,61 persen, Nusa Tenggara sebesar 1,33 persen, Maluku sebesar 0,26 persen, dan Papua sebesar 1,87 persen. Oleh karena itu, kondisi tersebut di atas menggambarkan pembangunan di wilayah timur Indonesia masih perlu ditingkatkan.

GAMBAR 9.1
KONTRIBUSI PDRB MENURUT PULAU TAHUN 2011



TABEL 9.1
DISTRIBUSI NILAI PDRB ADHB MENURUT PULAU TAHUN 2005-2011

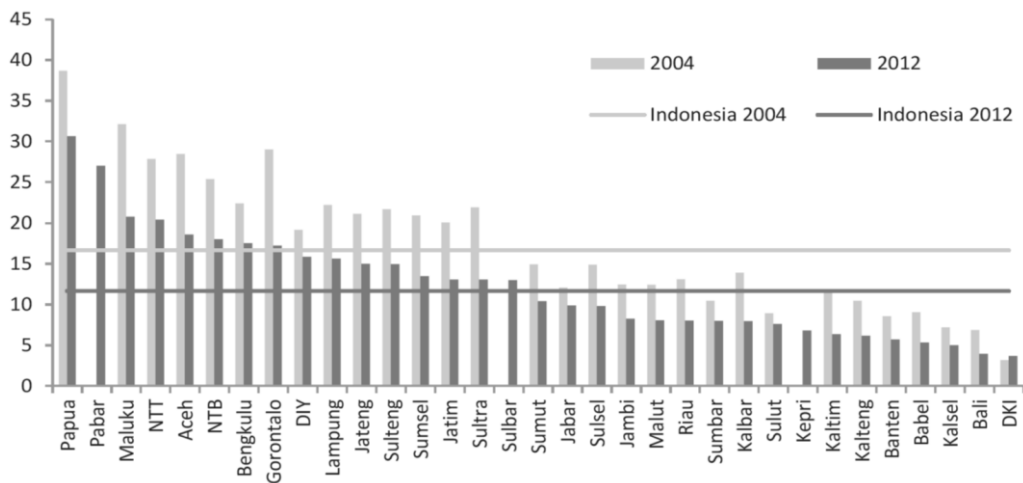
| Wilayah | Distribusi PDRB ADHB (%) | | | | | | |
|---------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009* | 2010** | 2011** |
| Sumatera | 22,11 | 22,15 | 22,74 | 22,91 | 22,69 | 23,10 | 23,54 |
| Jawa-Bali | 60,09 | 60,86 | 60,21 | 59,19 | 59,88 | 59,33 | 58,86 |
| Kalimantan | 9,99 | 9,49 | 9,38 | 10,37 | 9,21 | 9,16 | 9,55 |
| Sulawesi | 4,06 | 4,02 | 4,09 | 4,19 | 4,46 | 4,52 | 4,61 |
| Nusa Tenggara | 1,52 | 1,45 | 1,48 | 1,33 | 1,47 | 1,46 | 1,33 |
| Maluku | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,24 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
| Papua | 1,93 | 1,78 | 1,85 | 1,77 | 2,04 | 2,17 | 1,87 |
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Sumber: BPS tahun 2011

Keterangan: * : angka Sementara; **: angka sangat sementara

Selain itu, kondisi kesenjangan dapat dilihat juga dari aspek persentase penduduk miskin di masing-masing daerah. Walaupun secara keseluruhan tingkat kemiskinan di Indonesia menurun, akan tetapi kemiskinan ini masih terpusat di Kawasan Timur Indonesia Secara nasional, persentase penduduk miskin di Indonesia tahun 2012 sebanyak 11,66%. Jika dilihat dari persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduknya, Papua memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu sebesar 30,66%. Selain itu, 4 (empat) daerah yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi setelah Papua seluruhnya berada di kawasan timur Indonesia, yaitu Papua Barat dengan persentase penduduk miskin sebesar 27,04%, Maluku sebesar 20,76%, Nusa Tenggara Timur sebesar 20,41%, dan Nusa Tenggara Barat sebesar 18,02%. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pembangunan perekonomian untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah Indonesia bagian timur perlu ditingkatkan. Daerah lainnya yang memiliki persentase jumlah penduduk miskin lebih besar dari rata-rata nasional yaitu Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat, NAD, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Sementara itu, persentase penduduk miskin terendah berada di DKI Jakarta dengan persentase sebesar 3,70%.

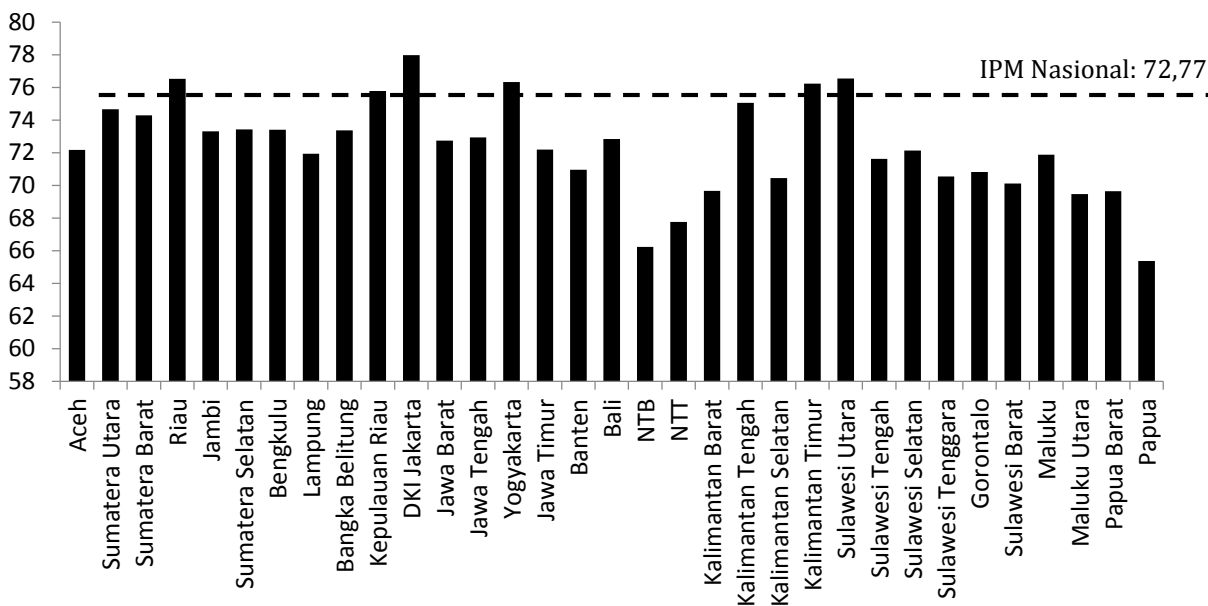
GAMBAR 9.2
PERSENTASE PENDUDUK MISKIN MENURUT WILAYAH TAHUN 2006-2012



Sumber: BPS, 2012

Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kesenjangan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada tahun 2011, rata-rata Indeks Pembangunan Manusia secara nasional adalah 72,77. Kemudian 5 (lima) daerah yang memiliki IPM tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Riau, Yogyakarta, dan Kalimantan Timur. Sementara itu, 5 (lima) Daerah yang memiliki IPM terendah adalah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku Utara, dan Papua Barat. Hal tersebut memperlihatkan pembangunan di wilayah barat lebih tinggi dibanding pembangunan di wilayah timur.

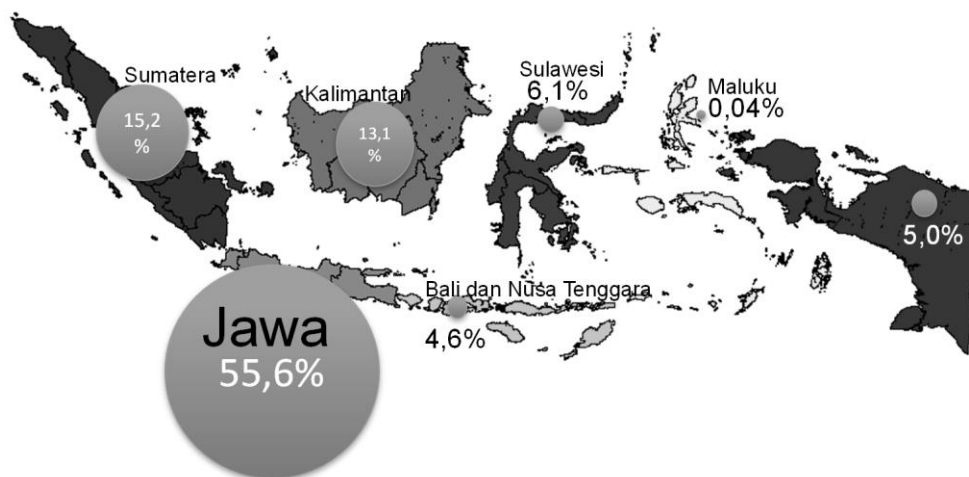
GAMBAR 9.3
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA TAHUN 2011



Aspek kesenjangan lainnya dapat dilihat dari besarnya investasi pada setiap daerah. Pada tahun 2012, investasi masih terpusat di wilayah barat Indonesia, khususnya di Jawa-Bali sebesar 55,6 persen dan Sumatera sebesar 15,2 persen, Investasi di wilayah timur Indonesia yang memiliki potensi sumber daya relatif besar, justru realisasi investasi masih relatif kecil, seperti di Maluku hanya sebesar 0,04 % dan papua 5,0 %. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan kawasan-kawasan strategis dari aspek ekonomi, infrastruktur, sosial, dan budaya di wilayah timur Indonesia masih sangat diharapkan. Strategi

pembangunan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan distribusi kesejahteraan yang lebih baik.

GAMBAR 9.4
REALISASI INVESTASI PMA MENURUT LOKASI TAHUN 2012



Dalam rangka mengatasi kesenjangan antarwilayah tersebut, perlu dilakukan upaya pengembangan wilayah yang dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan semua rencana pembangunan sektor atau bidang. Untuk itu, pembangunan terhadap 6 (enam) koridor ekonomi sebagaimana yang ditetapkan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) tahun 2011-2025 akan terus dilaksanakan pada tahun 2014, di koridor Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Kep.Maluku.

Pada tahun 2014, pembangunan di daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan perdesaan akan terus didorong agar kondisi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Pengembangan kawasan tertinggal dan perbatasan dilakukan dengan terus meningkatkan konektivitas daerah tertinggal dengan daerah pusat pertumbuhan dan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal. Sementara itu, untuk mengembangkan kawasan perbatasan ini, dilakukan pula peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sosial-ekonomi dasar, serta peningkatan pelayanan terpadu dan penguatan diplomasi dengan didukung oleh pertahanan dan keamanan yang kuat. Selain itu, di wilayah perdesaan, keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan terus ditingkatkan yang berbasis keunggulan daerah masing-masing.

Sementara itu, pengembangan kota difokuskan sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional. Berbeda dengan pengembangan daerah tertinggal, terluar, maupun perdesaan, pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil. Pengembangan setiap daerah ini harus dapat memiliki keterkaitan ekonomi dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, keterkaitan ekonomi antara desa-kota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat pertumbuhan harus terus ditingkatkan dengan memperkuat sistem tata kelola ekonomi yang baik dan sinergi antara pemerintah pusat - daerah.

Selain itu, untuk memperkuat daya saing perekonomian nasional, ketersediaan data dan informasi geospasial serta peta dasar yang akurat sangat diperlukan. Penyediaan data dan informasi spasial ini dilakukan dengan memusatkan perhatian pada penyediaan data spasial untuk wilayah-wilayah prioritas pembangunan nasional (koridor ekonomi Indonesia, KEK dan KAPET).

Seluruh upaya yang akan dilakukan perlu didukung dengan peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah. Pada tahun 2014, diharapkan pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan dengan lebih konsisten dan efektif melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur daerah serta peningkatan kapasitas keuangan daerah, khususnya dalam pelayanan publik di daerah.

9.1.2 Data dan Informasi Spasial

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi dimaksud mencakup data dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images), termasuk di dalamnya data dan informasi spasial. Amanat Undang-undang tersebut menunjukkan pentingnya data dan informasi spasial dalam proses perencanaan pembangunan nasional.

Saat ini pemerintah sedang memprioritaskan implementasi Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial yang mengatur mengenai penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional (JDSN). Beberapa langkah yang akan dilakukan antara lain : penyusunan peraturan presiden tentang Badan Informasi Geospasial, penyusunan 7 (tujuh) Peraturan Pemerintah dan 5 (lima) Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial terkait dengan pengumpulan data geospasial, pengolahan data dan informasi geospasial, penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial, penyebaran data dan informasi geospasial dan penggunaan informasi geospasial. Selain itu juga dilakukan sosialisasi terhadap seluruh *stakeholder*, termasuk masyarakat sehingga undang-undang tersebut dapat diimplementasikan secara efektif.

Terkait pelaksanaan kegiatan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (P3EI) dengan integrasi pendekatan regional dan sektoral ke dalam pembangunan 6 (enam) koridor ekonomi di seluruh Indonesia dengan mempertimbangkan penanggulangan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup. Saat ini ketersediaan data spasial yang rinci dengan skala data spasial yang memenuhi ketentuan peraturan perundangan, yaitu data geospasial dengan skala 1:10,000, masih sangat terbatas. Mengingat data spasial tersebut sangat dibutuhkan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan P3EI di wilayah koridor ekonomi, maka upaya-upaya percepatan pemenuhan kebutuhan data spasial tersebut harus terus dilakukan.

Sampai dengan tahun 2012, telah tersedia data dan informasi spasial yang dihasilkan oleh beberapa instansi pusat untuk memenuhi kebutuhan nasional dalam menyusun perencanaan pembangunan, antara lain sebagai berikut:

Terkait infrastruktur geospasial dasar, perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) perawatan 200 pilar jaring kontrol geodesi dan geodinamika; (ii) perawatan 90 pilar stasiun tetap *Global Positioning System* (GPS); (iii) perawatan 95 stasiun pasang surut laut; (iv) perawatan 1 pilar stasiun permanen gaya berat; (v) Peta Rupabumi Skala 1:10,000 (Sumatera dan Selatan Jawa) sebanyak 60 NLP; (vi) Peta Rupabumi Skala 1:50,000 Wilayah Gap sebanyak 28 NLP; (vii) Peta Rupabumi Skala 1:250,000 Wilayah Gap sebanyak 30 NLP; (viii) Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:250,000, 1:50,000, 1:25,000 dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala

1:500,000 sebanyak 56 NLP; (ix) Peta Lingkungan Bandara Indonesia (LBI) sebanyak 3 NLP; (x) Peta Navigasi Udara (*Aeronautical Chart*) sebanyak 15 NLP; (xi) peta resmi tingkat peringatan tsunami sebanyak 3 NLP; (xii) Peta Batas Wilayah Negara (*Joint Mapping*) Koridor Perbatasan Darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50,000 sebanyak 12 NLP; (xiii) pemetaan pulau-pulau terluar sebanyak 13 pulau; dan (xiv) pemeliharaan 50 *Border Sign Post* (BSP) batas RI-RDTL;

Terkait infrastruktur geospasial tematik, perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) peta tematik matra darat; (ii) peta tematik matra laut; (iii) atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah; dan (iv) Gasetir dan Model penataan ruang provinsi sebanyak 300 NLP;

Terkait infrastruktur informasi geospasial, perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) pembentukan simpul jaringan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 116 simpul; dan (ii) metadata simpul jaringan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 5.140 dataset.

Adapun perkiraan pencapaian pembangunan data dan informasi spasial tahun 2013 antara lain adalah:

Terkait infrastruktur geospasial dasar, perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) perawatan 200 pilar jaring kontrol geodesi dan geodinamika; (ii) perawatan 100 pilar stasiun tetap *Global Positioning System* (GPS); (iii) perawatan 95 stasiun pasang surut laut; (iv) perawatan 1 pilar stasiun permanen gaya berat; (v) Peta Rupabumi Skala 1:10,000 (Sumatera dan Selatan Jawa) sebanyak 62 NLP; (vi) Peta Rupabumi Skala 1:50,000 Wilayah Gap sebanyak 130 NLP; (vii) Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) Skala 1:250,000, 1:50,000, 1:25,000 dan Peta Lingkungan Laut Nasional (LLN) Skala 1:500,000 sebanyak 80 NLP; (viii) Peta Lingkungan Bandara Indonesia (LBI) sebanyak 4 NLP; (ix) Peta Navigasi Udara (*Aeronautical Chart*) sebanyak 15 NLP; (x) peta resmi tingkat peringatan tsunami sebanyak 4 NLP; (xi) Peta Batas Wilayah Negara (*Joint Mapping*) Koridor Perbatasan Darat RI-PNG, RI-Malaysia skala 1:50,000 sebanyak 15 NLP; dan (xii) pemeliharaan 70 *Border Sign Post* (BSP) batas RI-RDTL;

Terkait infrastruktur geospasial tematik, perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) peta tematik matra darat; (ii) peta tematik matra laut; (iii) atlas sumberdaya dan kajian pengembangan wilayah; dan (iv) Gasetir dan Model penataan

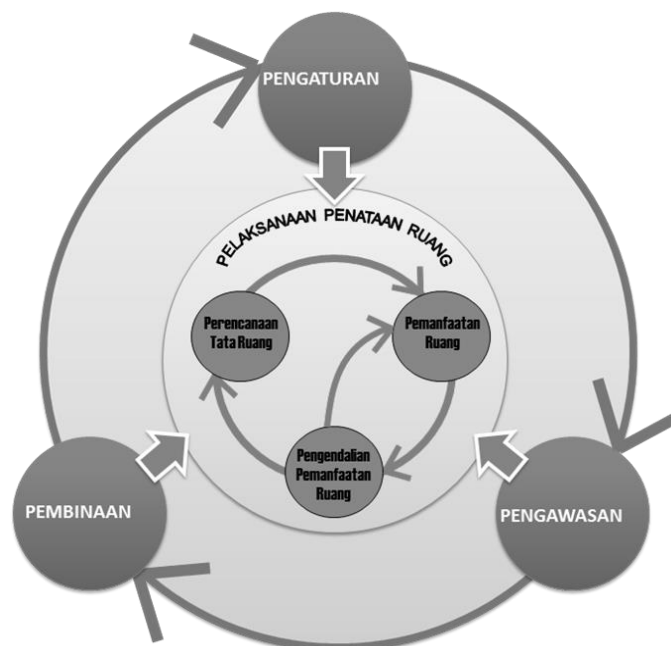
ruang provinsi sebanyak 500 NLP;

Terkait infrastruktur informasi geospasial, perkiraan hasil yang dicapai antara lain: (i) pembentukan simpul jaringan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebanyak 116 simpul; dan (ii) metadata simpul jaringan pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebanyak 11.520 dataset.

9.1.3 Penataan Ruang

Undang-Undang (UU) No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan an pengawasan (turbinlakwas) penataan ruang. Sedangkan pelaksanaan penataan ruang dilakukan melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

GAMBAR 9.5
FRAMEWORK PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG



UU 26/2007 juga memperkuat aspek pengelompokan penataan ruang, integrasi pengaturan ruang, kewenangan, hirarki fungsional rencana tata ruang, konsep peran masyarakat dan aspek sanksi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun demikian, fakta empirik dan yuridis menunjukkan masih adanya berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan penataan ruang yang terjadi, seperti semakin tingginya konversi penggunaan lahan; meningkatnya permasalahan bencana banjir dan longsor; urban sprawl; semakin meningkatnya kemacetan lalu lintas dan permukiman kumuh, serta semakin berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di perkotaan; kurang memadainya kapasitas kawasan metropolitan dalam menampung pertambahan jumlah penduduk; dan kurang seimbang nya pembangunan kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Dalam rangka mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut dan untuk mencapai tujuan penataan ruang, RPJMN 2010-2014 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang Penataan Ruang mengarahkan 4 (empat) fokus prioritas pembangunan. Adapun keempat Fokus Prioritas untuk Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang diamanatkan oleh RPJMN 2010-2014 tersebut adalah: (i) penyelesaian peraturan perundangan sesuai amanat Undang-undang Penataan Ruang; (ii) peningkatan kualitas produk rencana tata ruang; (iii) sinkronisasi program pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang; dan (iv) peningkatan kesesuaian pemanfaatan lahan dengan rencana tata ruang. Dampak pelaksanaan kegiatan di dalam Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang diharapkan dapat menurunkan konflik pemanfaatan ruang antar sektor dan daerah.

Kemajuan yang dicapai pada tahun 2012 dan awal tahun 2013 antara lain adalah ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) 8/2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, Peraturan Menteri (Permen) PU 20/2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota, dan Permen PU 15/2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN), Permen PU 19/2012 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Sektor TPA Sampah; dan beberapa Rencana Tata Ruang amanat UU 26/2007 dan PP 26/2008 berupa 3 (tiga) RTR Pulau yaitu Peraturan Presiden (Perpres) 3/2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Kalimantan, Perpres 13/2012 tentang RTR Pulau Sumatera, dan Perpres 28/2012 tentang

RTR Pulau Jawa-Bali, sehingga total telah ada 4 (empat) RTR Pulau yaitu RTR Pulau Sulawesi pada tahun 2011 serta RTR Pulau Kalimantan, RTR Pulau Sumatera, dan RTR Pulau Jawa-Bali; dan 5 (lima) RTR KSN yaitu Perpres 54/2008 tentang RTR Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur, Perpres 45/2011 tentang Kawasan Perkotaan Sarbagita, Perpres 55/2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Mamminasata, Perpres 62/2011 tentang RTR Kawasan Perkotaan Mebidangro, dan Perpres 87/2011 tentang RTR Kawasan Batam-Bintan-Karimun. Selain Perpres, UU 26/2007 juga mengamankan penyusunan dan revisi perda rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP) dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (RTRWK/K). Hingga tahun 2012 dan awal tahun 2013 telah ditetapkan 14 Perda RTRW Provinsi, 225 Perda RTRW Kabupaten dan 57 Perda RTRW Kota yang disusun dengan merujuk pada UU 26/2007 dan PP 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Lebih lanjut lagi, perkiraan pencapaian bidang tata ruang pada tahun 2013 antara lain adalah :

- ditetapkannya Rancangan PP (RPP) tentang Tata Ruang Wilayah Pertahanan;
- ditetapkannya 3 Rancangan Perpres (Raperpres) RTR Pulau/Kepulauan, yaitu RTR Kepulauan Maluku, RTR Kepulauan Nusa Tenggara, dan RTR Pulau Papua;
- proses legalisasi 17 (tujuh belas) Raperpres RTR KSN Non Perkotaan, yaitu RTR Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan (Kasaba), RTR Perbatasan NAD-Sumut, RTR Kawasan Perbatasan NTT, RTR Kawasan Perbatasan Papua, RTR Kawasan Perbatasan Sulut-Gorontalo-Sulteng, RTR Kawasan Perbatasan Riau-Kepri, RTR Kawasan Perbatasan Maluku, RTR Kawasan Perbatasan Maluku Utara-Papua Barat, RTR KAPET Sasamba, RTR KAPET Manado-Bitung, RTR KAPET Pare-Pare, RTR KSN Pacangsanak, RTR KSN Heart of Borneo (HOB), RTR KSN Danau Toba, RTR KSN Merapi, RTR KSN Borobudur, RTR KSN Selat Sunda;
- proses penyusunan 19 (sembilan belas) Raperpres RTR KSN yang terdiri dari 16 (enam belas) RTR KSN Non Perkotaan, yaitu RTR KSN Soroako, RTR KSN Timika, RTR Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat, RTR Kawasan Taman Nasional Lorentz, RTR Kawasan Candi Prambanan, RTR KSN KPBPB Sabang, RTR KAPET Batulicin, RTR KAPET Khatulistiwa, RTR KAPET Seram, RTR

KAPET Mbay, RTR KAPET Banda Aceh Darussalam, RTR KAPET Bima, RTR KAPET Biak, RTR KAPET DAS Kahayan Kapuas dan Barito, RTR KAPET Bank Sejahtera Sultra, RTR KAPET Palapas, dan 3 (tiga) RTR KSN Perkotaan yaitu RTR Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung, Kawasan Perkotaan Gresik - Bangil - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan (Gerbangkertosusila), dan Kawasan Perkotaan Kendal - Demak - Ungaran - Semarang - Salatiga - Purwodadi (Kedungsepur);

- peninjauan kembali RTRWN dengan hasil dapat berupa rekomendasi tidak perlu dilakukan revisi terhadap RTRWN atau rekomendasi perlunya dilakukan revisi terhadap RTRWN;
- pelaksanaan Rapat Kerja Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (Rakernas BKPRN) 2013 yang bertujuan untuk menghasilkan agenda kerja BKPRN tahun 2014-2015, dan

penyelesaian NSPK berupa Pedoman Pengawasan Penataan Ruang, Pedoman Pemanfaatan Ruang Dalam Bumi, Pedoman tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, dan Pedoman KLHS untuk Perubahan Kawasan Hutan.

9.1.4 Pertanahan

Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat Indonesia yang sangat mendasar. Untuk itu pengelolaan pertanahan perlu dilakukan secara adil, menyeluruh, dan terintegrasi serta memperhatikan kearifan lokal dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Prinsip tersebut kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam UU No. 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang didalamnya disebutkan bahwa negara menjamin hak-hak masyarakat atas tanahnya dan memberikan pengakuan atas hak-hak tanah yang ada, termasuk hak ulayat.

Pada Tahun 2012 marak terjadi kasus-kasus pertanahan terutama yang melibatkan masyarakat dengan badan hukum. Salah satu penyebab timbulnya kasus-kasus pertanahan tersebut antara lain adalah karena masih banyaknya tanah yang belum didaftarkan sehingga tidak jelas batas dan penguasaannya. Untuk mengatasi hal tersebut BPN telah

melakukan percepatan kegiatan Sertipikasi Tanah (RM) dan kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (PNBP) sebanyak 2.110.539 bidang. Dengan demikian sampai tahun 2012, telah tersertifikasi 42.754.257 bidang tanah atau sekitar 49,23% dari total 86.845.839 bidang tanah di Indonesia. Pada Tahun 2013 Sertipikasi Tanah (RM) dan kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali (PNBP) sebanyak 2.260.755 bidang tanah, sehingga diharapkan akhir tahun 2013 jumlah bidang yg telah disertipikatkan mencakup 45.015.012 bidang tanah atau sekitar 51,83 % dari total jumlah bidang tanah di Indonesia. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum hak atas tanah sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya kasus-kasus pertanahan. Selain itu diharapkan juga dapat memberi akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, untuk kalangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), petani, nelayan serta transmigran.

Dalam rangka mendukung kegiatan legalisasi aset (sertipikasi tanah) perlu dilakukan pembuatan peta dasar pertanahan yang dalam rencana kegiatan BPN merupakan bagian dari kegiatan pembuatan peta pertanahan. Ketersediaan peta tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian lokasi bidang tanah yang akan disertipikatkan untuk mengurangi resiko adanya sertipikat ganda. Pada Tahun 2012, BPN telah menyusun peta pertanahan seluas 3,9 juta hektar, sehingga total ketersediaan peta pertanahan tersebut mencapai 21,8 juta hektar, atau baru sebesar 11,35 persen dari 191,9 juta ha total luas daratan Indonesia. Pada tahun 2013 penyediaan peta pertanahan ditargetkan mencakup luasan 2,8 juta hektar, sehingga diharapkan akhir tahun 2013 peta pertanahan telah mencakup 24,6 juta hektar atau 12,82 persen dari total luas daratan Indonesia.

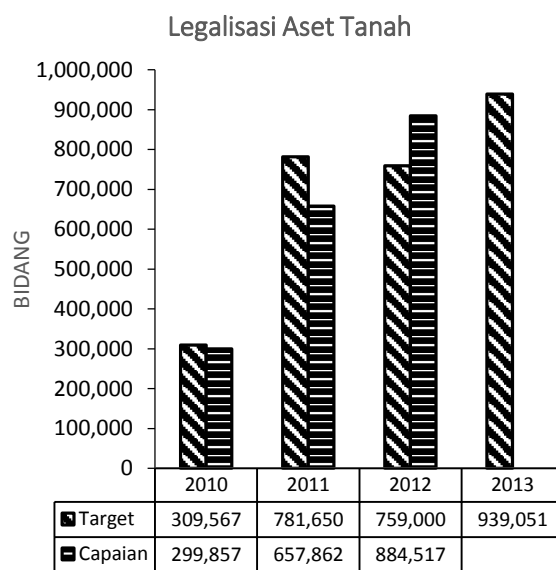
Pada Tahun 2012 lalu telah disahkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai amanat UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat mendukung iklim investasi melalui percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini terkendala oleh pengadaan tanah dan di sisi lain dapat menjamin kepastian hak masyarakat atas tanah. Kegiatan lain yang telah dilakukan BPN terkait dengan peraturan perundang-undangan adalah pengembangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan pertanahan dalam rangka

mendukung pelaksanaan UU Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

**GAMBAR 9.6
TARGET DAN CAPAIAN PEMBUATAN
PETA PERTANAHAN
TAHUN 2010-2013**



**GAMBAR 9.7
TARGET DAN CAPAIAN LEGALISASI ASET
TANAH TAHUN 2010-2013**



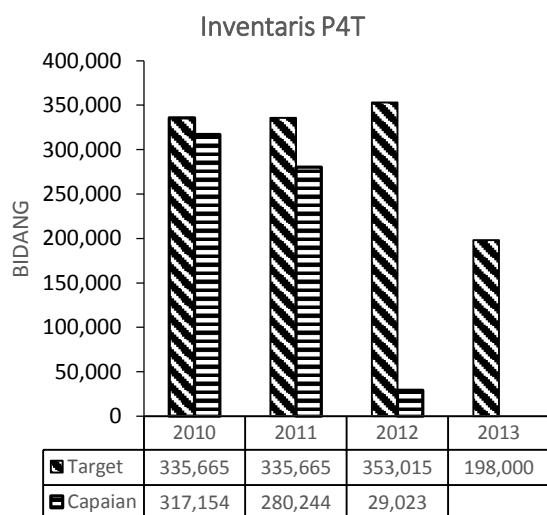
Sumber : BPN, 2011-2013

Permasalahan lain yang terkait dengan bidang pertanahan adalah adanya ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T). Hal ini tergambar dari sebagian besar tanah dikuasai oleh sebagian kecil orang, disisi lain sebagian besar masyarakat terutama petani memiliki tanah dengan luas yang relatif terbatas, yaitu kurang dari 0,5 hektar pe rumah tangga petani. Untuk mengatasi permasalahan ketimpangan tersebut, BPN telah melakukan beberapa upaya yaitu: (i) penataan P4T melalui kegiatan inventarisasi pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T); (ii) kegiatan redistribusi tanah; dan (iii) kegiatan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah (Neraca PGT). Pada tahun 2012 telah dilaksanakan kegiatan IP4T sebanyak 47.314 bidang dan pada Tahun 2013 ditargetkan sebesar 198.000 bidang. Sedangkan untuk kegiatan redistribusi tanah, pada Tahun 2012 telah dilakukan sebanyak 113.260 bidang, dan pada Tahun 2013

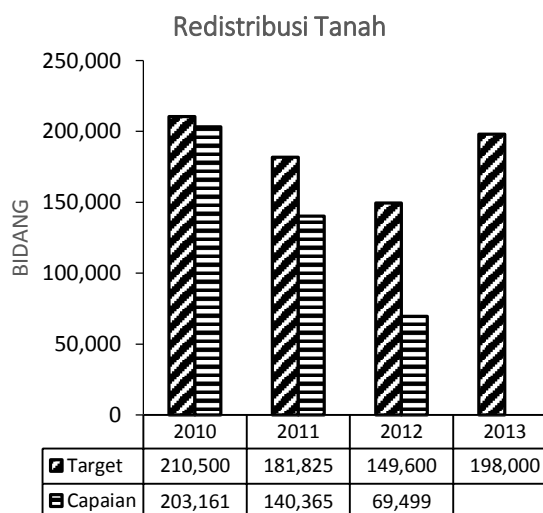
ditargetkan sebesar 175.500 bidang. Untuk kegiatan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah telah dilakukan di 92 kabupaten/kota dan di Tahun 2013 ditargetkan dilakukan di 100 kabupaten/kota.

Untuk mendukung kegiatan redistribusi tanah terutama dalam hal sumber tanah untuk redistribusi tanah, BPN sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, melakukan kegiatan pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat dan negara. Tanah terlantar tersebut nantinya akan menjadi salah satu sumber tanah obyek reforma agraria (TORA) bagi kegiatan redistribusi tanah. Pendayagunaan tanah terlantar ini juga ditujukan untuk mendukung pengembangan sektor pangan dan energi. Pada Tahun 2012 telah dilaksanakan identifikasi dan penertiban tanah terlantar seluas 76 SP (1 SP = 500 ha), dan pada Tahun 2013 ditargetkan sebesar 433 SP.

GAMBAR 9.8
TARGET DAN CAPAIAN INVENTARISASI
P4T TAHUN 2010-2013



GAMBAR 9.9
TARGET DAN CAPAIAN REDISTRIBUSI
TANAH TAHUN 2010-2013



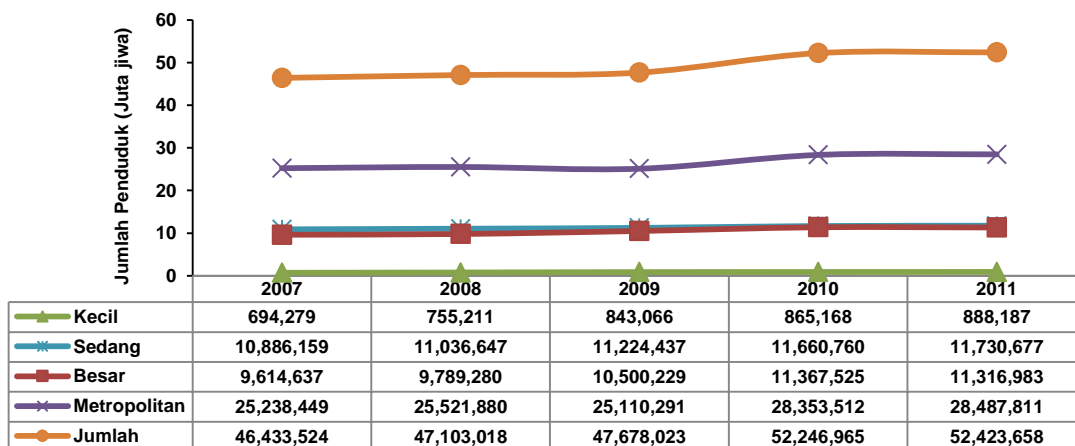
Sumber : BPN, 2011-2013

9.1.5 Perkotaan

Masalah pembangunan perkotaan masih dihadapkan pada jumlah penduduk perkotaan yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga memberikan implikasi terhadap meningkatnya kebutuhan terhadap

tempat tinggal, menurunnya kualitas lingkungan perkotaan, menurunnya kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat, penyediaan lapangan kerja, dan meningkatnya kebutuhan sarana-prasarana di perkotaan. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi di perkotaan juga ditunjukkan dengan ketimpangan pertumbuhan penduduk pada masing-masing tipologi kota dari tahun 2007-2011 yang terus mengalami peningkatan dengan jumlah tertinggi pada kota metropolitan. Masalah yang cukup besar yang masih dihadapi kota metropolitan diantaranya adalah kerjasama antar kota sehingga diperlukan payung hukum sebagai wadah kerjasama antar kota tersebut. Kemajuan yang dicapai pada tahun 2011 dan awal tahun 2012 antara lain adalah ditetapkannya 4 (empat) RTR Kawasan Strategis Nasional (KSN) yaitu Perpres 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita), Perpres 55/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa dan Takalar (Mamminasata), dan Perpres 62/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo (Mebidangro).

GAMBAR 9.10
PERKEMBANGAN JUMLAH PENDUDUK DI KOTA
MENURUT TIPOLOGI KOTA TAHUN 2007-2011 (JIWA)

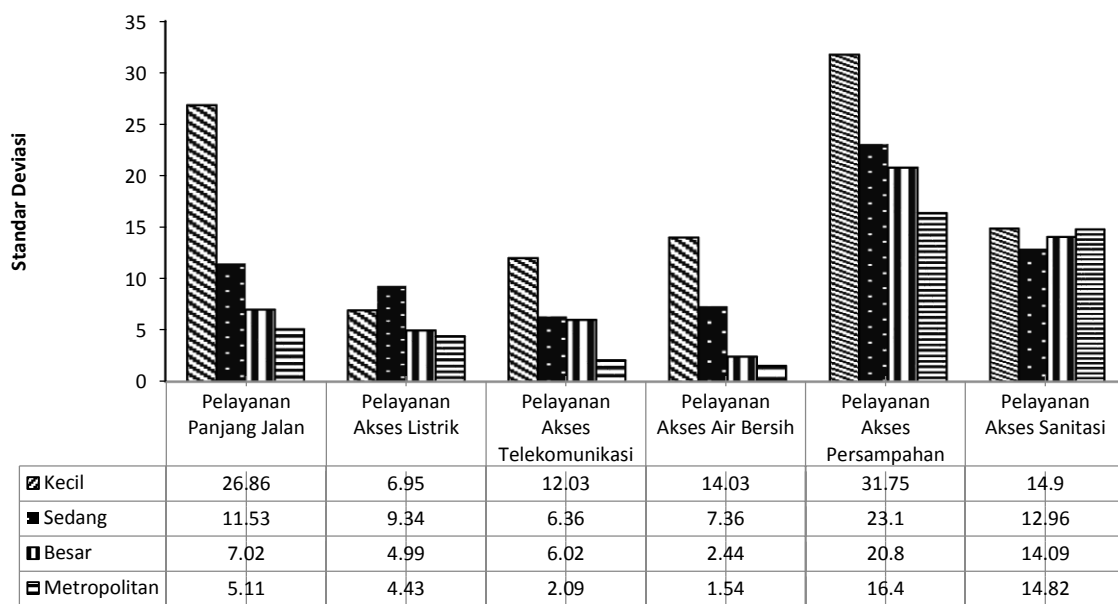


Sumber: BPS, Kota Dalam Angka 2007-2010 dan Podes 2011

Ketidakmerataan pembangunan perkotaan antar wilayah yang masih cukup besar juga dihadapkan pada pelayanan infrastruktur yang belum merata antar tipologi kota. Hingga tahun 2012 telah tersusun rancangan akhir Kebijakan dan

Strategi Perkotaan Nasional (KSPN), sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 bidang pembangunan perkotaan serta Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Di dalam rancangan KSPN tersebut diamanatkan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) bagi kota metropolitan, kota besar dan khususnya kota-kota menengah dan kecil. Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Perkotaan (SPP). Berdasarkan penghitungan evaluasi capaian penyediaan SPP di 98 kota otonom pada Tahun 2011, rata-rata presentase capaian penyediaan SPP nilainya sebesar 20,15% dan pada tahun 2012 sebesar 30,00%. Penyediaan sarana prasarana ke depan perlu lebih difokuskan pada kota kecil dan menengah mengingat ketimpangan yang cukup besar terjadi pada dua kota tersebut. Menurut penilaian kinerja hingga tahun 2012, program fasilitasi dan penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan sesuai SPP dan fasilitasi penyusunan Perda terkait PSU di daerah baru mencapai target 60% dari RPJMN 2014. Diharapkan pada tahun 2013 dan 2014 target ini dapat dipenuhi.

GAMBAR 9.11
KETIMPANGAN PELAYANAN INFRASTRUKTUR
MENURUT TIPOLOGI KOTA TAHUN 2010

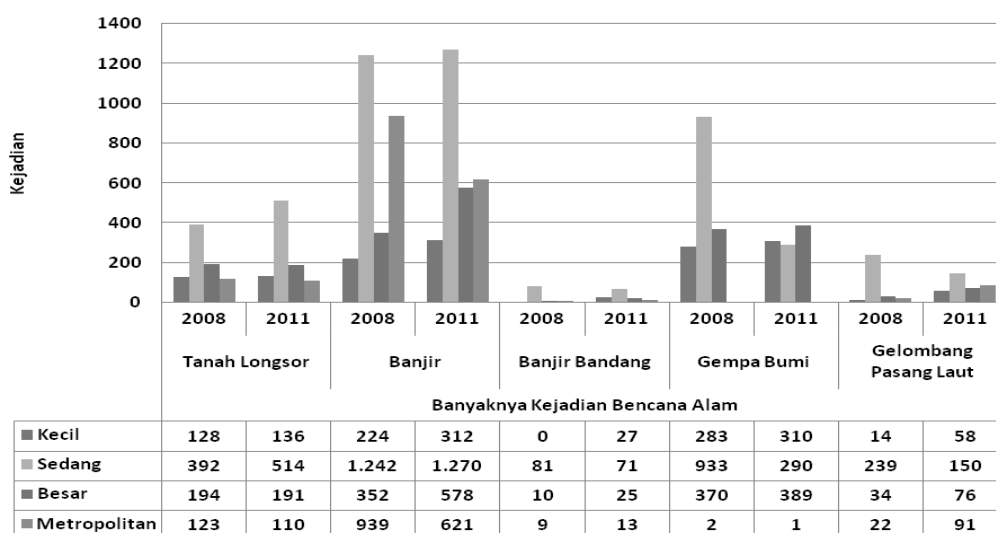


Sumber: BPS, Kota Dalam Angka 2007-2010

Ket : Satuan deviasi berbanding lurus dengan ketimpangan

Sementara itu dalam upaya penyediaan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan, hasil-hasil yang telah dicapai diantaranya adalah (i) terlaksananya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan air minum dan sanitasi yaitu penyusunan strategi sanitasi kota di 226 kab/kota, dan penyusunan rencana induk sistem penyediaan air minum di 373 kab/kota; (ii) fasilitasi penyiapan strategi pembangunan permukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP) di 180 kab/kota; (iii) fasilitasi penyediaan pelayanan publik melalui dukungan sarana dan prasarana pada pemukiman tradisional dan bersejarah di 170 kawasan; (iv) fasilitasi Kelompok Kerja Sanitasi Perkotaan di 17 provinsi dan 199 kabupaten/kota; (v) fasilitasi penyelenggaraan penyerahan aset prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dari pengembang ke pemerintah daerah di 1 provinsi dan 2 kabupaten/kota; (vi) fasilitasi penyusunan Perda terkait PSU di 3 provinsi dan 10 kabupaten/kota; (vii) penyiapan pedoman standar pengukuran besaran Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan; (viii) pembangunan Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah di 210 kabupaten/kota; (ix) pengembangan Infrastruktur Drainase Perkotaan di 100 kabupaten/kota; (x) (air limbah dan Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R) di 1.032 kawasan; (xi) serta pembangunan sistem pengolahan air limbah dengan sistem on-site di 779 kawasan. Hingga tahun 2012 program fasilitasi penyusunan Perda tentang pengelolaan sampah di kabupaten/kota sudah mencapai target RPJMN sehingga dibutuhkan kerja keras untuk mencapai target pada tahun 2013 dan 2014.

GAMBAR 9.12
BANYAKNYA KEJADIAN BENCANA ALAM YANG TERJADI
MENURUT TIPOLOGI KOTA TAHUN 2008-2011



Sumber: BPS, Kota Dalam Angka 2007-2010 dan Podes 2011

Di samping itu, pembangunan perkotaan di Indonesia juga dihadapkan pada masalah penurunan kualitas lingkungan serta meningkatnya kerentanan terhadap bencana dan dampak perubahan iklim diantaranya masalah banjir. Upaya penanganan polusi lingkungan serta mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di perkotaan, yang telah diinisiasi secara nasional melalui Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana (RAN-PRB) dan Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), yang masing-masing masih perlu dijabarkan kedalam Rencana Aksi Daerah, khususnya di wilayah perkotaan.

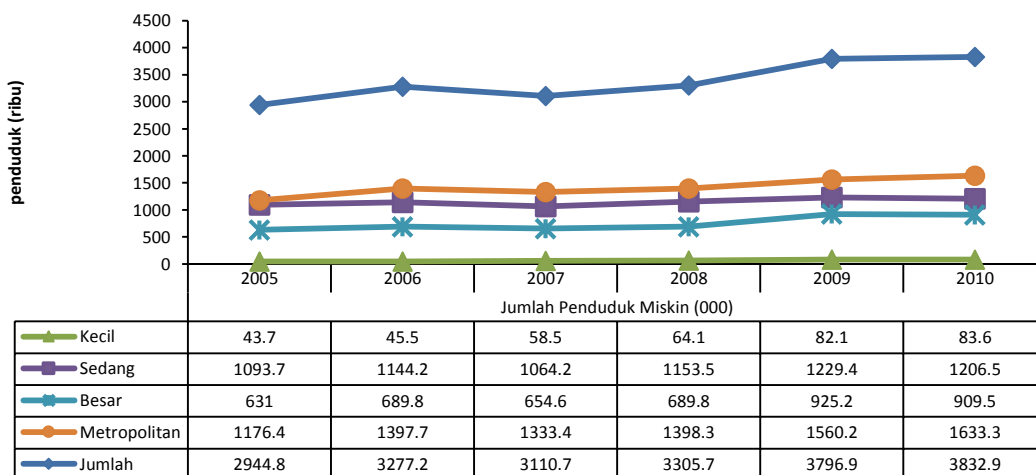
Upaya lain juga telah dilakukan antara lain terjaringnya komitmen kota hijau dan fasilitasi penyusunan rencana aksi kota hijau di 27 kota/kabupaten; pelaksanaan implementasi rencana aksi kota hijau di 85 kota/kabupaten. Selain itu juga dilakukan kajian tapak ekologis pada KSN perkotaan, fasilitasi Forum *Sustainable Urban Development* (SUD), fasilitasi program Kota Cerdas Perubahan Iklim (KCPI), serta peningkatan kelembagaan dan kualitas tata ruang kota untuk 3 kota pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) yaitu Banda Aceh, Yogyakarta, Ambon. Upaya-upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim juga telah banyak dilakukan oleh pemerintah kota di Indonesia, seperti

pengembangan sarana transportasi umum untuk mengurangi penggunaan energi seperti Trans Jogja di Kota Yogyakarta, Trans Musi di Kota Palembang, dan Trans Jakarta di Kota Jakarta, perluasan dan perbaikan Ruang Terbuka Hijau di Kota Surabaya, serta pengembangan koridor hijau dan hutan kota di Kota Balikpapan. Pengelolaan lingkungan perkotaan untuk adaptasi dampak perubahan iklim juga dilakukan antara lain melalui program pembersihan kanal di Kota Makassar, dan program Kampung Ramah Lingkungan di Kota Palembang. Perkiraan capaian tahun 2013: (i) pilot project pelaksanaan pemenuhan SPM penataan ruang perkotaan; (ii) pelaksanaan program pengembangan kota hijau di 112 kota/kabupaten; (iii) fasilitasi implementasi peningkatan kualitas dan kuantitas RTH di kawasan Kanal Banjir Timur; (iv) fasilitasi implementasi peningkatan kualitas dan kuantitas RTNH di Kota Bukittinggi; (v) terlaksananya bimbingan teknis penyusunan RDTR di kota-kota pemenang Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) yaitu Kota Pekalongan, Kota Bandung, dan Kota Salatiga; serta (v) *pilot project* rencana adaptasi perubahan iklim di Kota Semarang.

Pengendalian pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi kinerja serta pemenuhan SPM perkotaan juga belum optimal dilaksanakan. Hal ini diantaranya ditunjukkan dari konversi lahan yang terus terjadi dan tidak terkendali. Pulau Jawa mengalami pengurangan luas area bervegetasi antara tahun 2007-2010. Tren pengurangan area bervegetasi tersebut dari seluas 6,69 juta hektar pada tahun 2007 menjadi 6,48 juta hektar pada tahun 2010. Dengan kata lain Pulau Jawa kehilangan areal bervegetasi seluas \pm 203 ribu hektar. Dalam upaya meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang di perkotaan, telah dilaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Daerah berkaitan dengan pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di 26 kota besar/metropolitan, fasilitasi dalam penyelenggaraan perencanaan dikawasan perkotaan di 10 kab/kota, pembinaan teknis PMU Jabodetabekjur, pengembangan kapasitas penataan ruang kawasan metropolitan Sarbagita, Mebidangro, Maminasata, fasilitasi penyelesaian Perpres KSN Cekungan Bandung, Gerbangkertasusila, Kedungsepur, peningkatan kualitas tata ruang Kota Lestari (Bogor, Bandung, DKI Jakarta, Pekalongan, Palu, Kep. Seribu, DIY, Sukoharjo, Baubau), mulai disusunnya

kebijakan/pedoman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan lahan perkotaan, serta penataan kawasan Banjir Kanal Timur sebagai contoh pengembangan infrastruktur terpadu. Program fasilitasi penyusunan perda berkaitan dengan pemberian IMB hingga tahun 2012 sudah mencapai 71% sehingga menurut penilaian capaian tersebut akan dapat terealisasi bila dibarengi dengan strategi percepatan dalam mencapai target RPJMN 2014.

GAMBAR 9.13
JUMLAH PENDUDUK MISKIN MENURUT TIPOLOGI KOTA
TAHUN 2005-2010

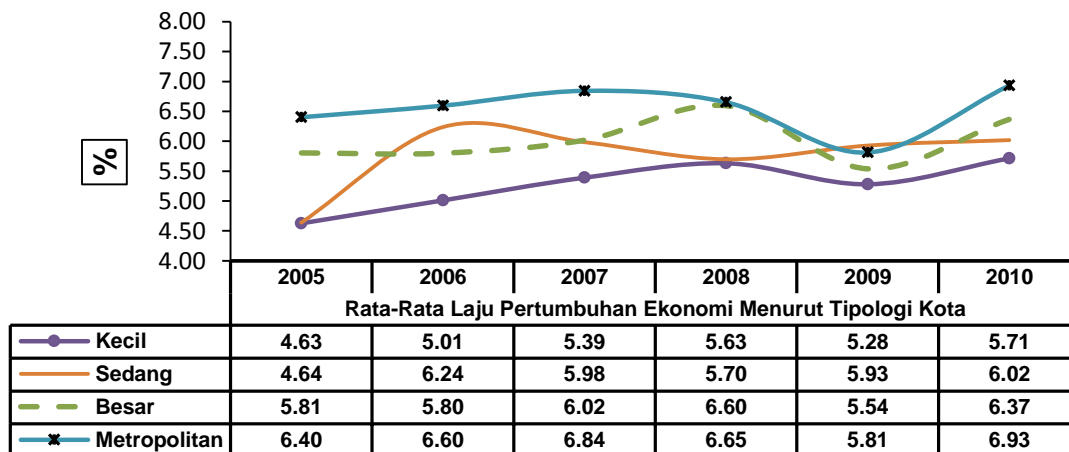


Sumber : BPS, Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Kota, 2010

Masalah perkotaan juga masih dihadapkan pada masalah perekonomian kota dan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat perkotaan terutama pada tipe kota metropolitan dan sedang. Dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan perkotaan, upaya-upaya yang sudah dilaksanakan antara lain: (i) pelaksanaan PNPM Mandiri inti di 6.835 kecamatan di seluruh Indonesia; (ii) terlaksananya pelatihan mengenai peningkatan peran PKL dan peremajaan kawasan kumuh perkotaan di 5 kota. Berkenaan dengan penurunan tingkat kerawanan sosial di perkotaan, hasil yang telah dicapai diantaranya adalah: (i) terlaksananya fasilitasi pengendalian masalah sosial dan penyakit menular di 4 kota; dan (ii) mulai disusunnya pedoman pengendalian masalah sosial dan wabah penyakit di kawasan perkotaan. Selanjutnya dalam upaya meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan modal sosial dan budaya di perkotaan, hasil-hasil yang telah dicapai di

antaranya adalah: (i) disusunnya Pedoman Penguatan Peran Lembaga Masyarakat Perkotaan dalam pembangunan kota; (ii) disusunnya Pedoman Pengelolaan dan Pelestarian Bangunan Warisan Budaya di Perkotaan; (ii) terlaksananya fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, serta pagelaran seni dan budaya; (iii) terlaksananya fasilitasi pagelaran, pameran, festival, lomba dan pawai kesenian; serta (iv) terlaksananya rehabilitasi dan penataan museum.

GAMBAR 9.14
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA
MENURUT TIPOLOGI KOTA TAHUN 2005-2010



Sumber: BPS, PDRB Kabupaten/Kota 2006-2011

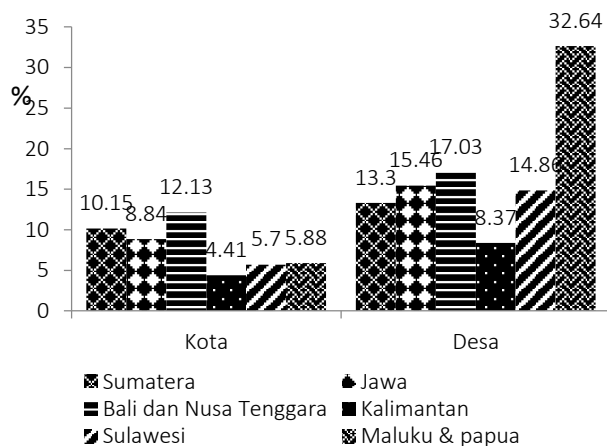
Dalam mewujudkan kota yang ideal tentunya tidak lepas dari peran kelembagaan dan kerjasama antar kota. Hasil-hasil yang telah dicapai dalam upaya menguatkan kelembagaan dan kerja sama antarkota diantaranya adalah (i) terlaksananya pemutakhiran Sistem Informasi Pengembangan Perkotaan; (ii) terlaksananya fasilitasi pengembangan database yang terintegrasi dalam satu sistem informasi kawasan perkotaan di 9 kab/kota; (iii) mulai dibangunnya Aplikasi Sistem Informasi Perkotaan; (iv) terlaksananya sosialisasi draft Permendagri tentang Forum Koordinasi Pembangunan Perkotaan di Kota Pekanbaru; (v) mulai disusunnya Model Pola Pengelolaan Kawasan Perkotaan; (vi) mulai disusunnya konsep kebijakan insentif dan disinsentif dalam kerjasama perkotaan; (vii) terlaksananya fasilitasi 28 kerjasama sister city; serta (viii) terlaksananya fasilitasi revitalisasi badan

kerjasama kawasan metropolitan yang sudah terbentuk. Sedangkan dalam konteks menguatkan kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan perkotaan serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik, hasil-hasil yang telah dicapai diantaranya adalah: (i) terlaksananya penyusunan Draft Permendagri tentang Pedoman Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perkotaan Berbasis Tata Ruang; (ii) mulai disusunnya Strategi Penguatan Perencanaan Kawasan Perkotaan; (iii) mulai disusunnya rancangan Pedoman Dana Alokasi Khusus (DAK) Perkotaan.

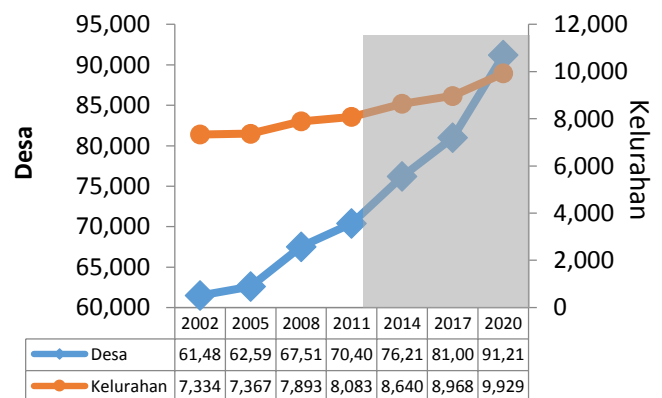
9.1.6 Perdesaan

Pembangunan perdesaan menjadi faktor penting bagi upaya pembangunan daerah, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Kantong-kantong kemiskinan mayoritas berada di perdesaan. Pada tahun 2012 terdapat 18,49 juta penduduk miskin berada di perdesaan atau 63,45 persen dari total penduduk miskin di Indonesia (29,13 juta jiwa) (Gambar 9.15). Sejak tahun 2005, perkembangan jumlah desa meningkat pesat dan diprediksi akan semakin meningkat pada tahun 2020 (Gambar 9.16), tetapi semakin meningkatnya jumlah desa belum diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

GAMBAR 9.15
PERSENTASE JUMLAH PENDUDUK MISKIN DESA-KOTA TAHUN 2012



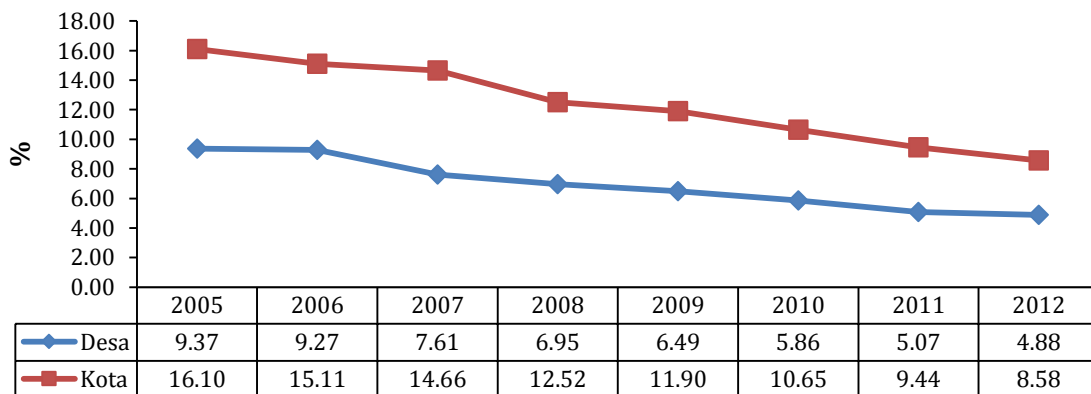
GAMBAR 9.16
PROYEKSI JUMLAH DESA DAN KELURAHAN INDONESIA



Sumber: Podes, BPS 2012 (diolah)

Kondisi sosial ekonomi masyarakat di perdesaan umumnya masih tertinggal. Keadaan tersebut juga merupakan dampak dari industrialisasi, investasi ekonomi, pembangunan infrastruktur dan kelembagaan yang cenderung terkonsentrasi di perkotaan. Dari aspek ketenagakerjaan, pekerjaan mayoritas penduduk desa masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 57 persen. Meskipun trend pengangguran di perdesaan semakin menurun namun upah rata-rata pekerja di perdesaan masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan di perkotaan. Berkurangnya lahan pertanian dari tahun 2003 hingga tahun 2008 sebesar 11,1 persen, perubahan iklim dan pola penggunaan lahan berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian sehingga turut memicu semakin meningkatnya peralihan lapangan pekerjaan di perdesaan menjadi ke arah non pertanian dan mendorong meningkatkan urbanisasi untuk mendapatkan penghidupan yang lebih layak. Hal ini juga menjadi ancaman turunnya produktivitas pertanian dan menurunnya ketahanan pangan nasional. Berdasarkan data tahun 2012 terdapat 100 dari 346 kabupaten di Indonesia yang mengalami kerawanan pangan. Diantaranya 30 kabupaten termasuk kategori mendesak, 30 kabupaten lainnya termasuk kategori sedang, dan 40 kabupaten termasuk kategori tidak mendesak atau belum mengkhawatirkan.

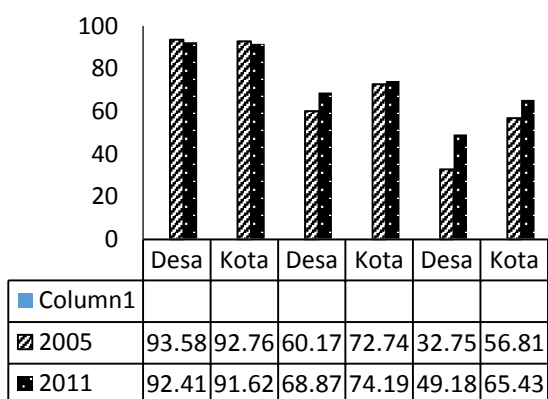
GAMBAR 9.17
PERSENTASE PENGANGGURAN DESA-KOTA TAHUN 2005-2012



Sumber : Sakernas, BPS, 2012 diolah pusdatinaker

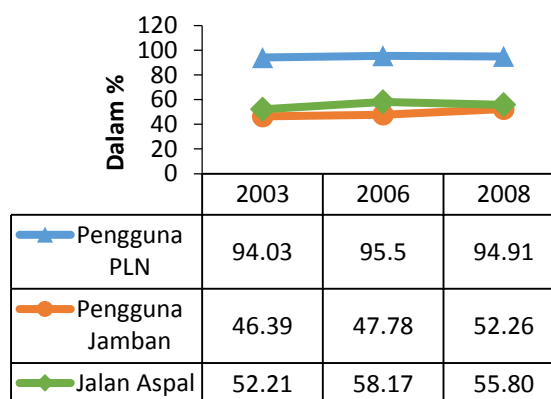
Kualitas sumber daya manusia di perdesaan baik kesehatan dan pendidikan mengalami peningkatan. Kualitas kesehatan penduduk di desa membaik, ditandai dengan penurunan persentase balita gizi buruk di perdesaan dari 4,2 persen di tahun 2007 menjadi 3,9 persen di tahun 2010 (Risikesdas), peningkatan persentase cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan di perdesaan dari 41,4 persen di tahun 2007 menjadi 48,3 persen di tahun 2010, angka kesakitan usia produktif menurun dari 7,90 persen (2008) menjadi 6,63 persen (2010). Kualitas pendidikan di perdesaan semakin membaik dilihat dari tingkat Angka Partisipasi Murni (APM) yang cenderung meningkat terutama untuk SMP dan SMA (Gambar 9.18). Pencapaian kualitas SDM perdesaan yang semakin membaik tersebut belum diimbangi dengan ketersediaan lapangan pekerjaan berkualitas di perdesaan. Hal tersebut memperhatikan mayoritas penduduk bekerja di perdesaan masih dengan tingkat pendidikan SD sebesar 63,43 persen (tahun 2011).

GAMBAR 9.18
PERSENTASE APM DESA-KOTA



Sumber: Podes 2011(diolah)

GAMBAR 9.19
PRESENTASE PENGGUNA LISTRIK PLN, JAMBAN, DAN JALAN BERASPAL DI DESA



Akses terhadap infrastruktur perdesaan menjadi salah satu fokus perhatian penting dalam pembangunan perdesaan, karena disamping sebagai upaya pemenuhan pelayanan dasar, juga merupakan pintu masuk bagi inovasi, mobilitas dan berbagai peluang untuk peningkatan kehidupan sosial

ekonomi masyarakat perdesaan. Pembangunan infrastruktur mengalami beberapa peningkatan diantaranya peningkatan rasio desa berlistrik, peningkatan rumah tangga pengguna listrik PLN dan penggunaan sanitasi /air bersih serta jamban milik sendiri, dan peningkatan jalan beraspal (Gambar 9.19). Selain itu, terdapat peningkatan persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak di perdesaan dari 31,40 persen (tahun 2008) menjadi 33,96 persen (tahun 2009), 38,50 persen (tahun 2010), dan 38,72 persen (tahun 2011). Kepemilikan aset masyarakat desa semakin meningkat dengan status penguasaan tempat tinggal milik sendiri yang meningkat dari 88,76 persen (tahun 2008) menjadi 90,85 persen (tahun 2010). Terkait infrastruktur pertanian, hingga 2012 terdapat 7,98 juta ha atau 84 persen sawah yang sudah dialiri saluran irigasi teknis dan 1,47 juta ha atau 16 persen sawah yang dialiri saluran irigasi non teknis dan dari sisi kelembagaan diperkirakan telah terbentuk 51 ribu Perkumpulan Petani pemakai Air (P3A) di desa.

Dalam upaya peningkatan kesejahteraan, produktivitas, dan lapangan kerja di perdesaan, beberapa upaya yang dilakukan hingga tahun 2012 diantaranya untuk mendukung prioritas nasional dalam percepatan pembangunan wilayah tertinggal dan perbatasan pada tahun 2012. Hingga tahun 2012 telah dilakukan fasilitasi perpindahan penduduk ke kawasan transmigrasi di daerah tertinggal/perbatasan sebanyak 15.730 KK atau 44,5 persen dari target RPJMN 2010-2014 dan akan dilanjutkan pada tahun 2013 sebanyak 4.045 KK sehingga masih membutuhkan kerja keras untuk mencapai target RPJMN tersebut. Rendahnya pencapaian tersebut karena pembangunan transmigrasi lebih difokuskan pada peningkatan kualitas masyarakat dan kawasan transmigrasi. Pada tahun 2012 telah dilakukan pembangunan kawasan transmigrasi melalui pembangunan sarana dan prasarana permukiman di daerah tertinggal/ perbatasan sebanyak 42 kawasan dan akan dilanjutkan di 32 kawasan pada tahun 2013. Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat perdesaan dilakukan Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) di 34 Kabupaten yang tersebar di 9 Provinsi, fasilitasi peningkatan pelaksanaan usaha ekonomi keluarga dan penguatan kelembagaan BUMKEL di 4 kab atau sekitar 73 persen dari target RPJMN 2010-2014 sehingga perlu kerja keras, selain itu telah dilakukan pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat

usaha perkreditan dan simpan pinjam serta lembaga keuangan mikro perdesaan di 86 desa, 45 kab di 20 provinsi, penyediaan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi masyarakat desa (pasar desa) sebanyak 101 pasar desa pada tahun 2012 dan ditingkatkan menjadi penyediaan pasar di 574 desa pada tahun 2013. Hingga tahun 2012, peningkatan ekonomi masyarakat di daerah tertinggal/perbatasan juga dilakukan melalui pengembangan sarana prasarana di 119 kimtrans dan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi di 324 kimtrans. Pada tahun 2013 akan dilanjutkan dengan pengembangan sarana prasarana di 38 kimtrans dan fasilitasi pengembangan usaha di 80 kimtrans.

Dalam rangka meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, telah dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Inti di 5.070 kecamatan, 392 kabupaten, di 32 Provinsi. Disamping itu, melalui PNPM Penguatan yang lokasinya merupakan lokasi PNPM Inti telah dilaksanakan PNPM Generasi di 35 kecamatan, 40 kabupaten 8 provinsi; PNPM Integrasi SPP-SPPN di 83 Kabupaten di 30 Provinsi; PNPM Perbatasan di 80 kecamatan 15 kabupaten di 4 provinsi, dan PNPM Respek Pertanian di 43 kecamatan, 9 kabupaten, di 2 provinsi. Prakiraan pencapaian pada tahun 2013 untuk PNPM-MP adalah di 5.146 kecamatan sebagai antisipasi terhadap penambahan kecamatan baru sebagai akibat pemekaran. PNPM Penguatan akan dilaksanakan melalui PNPM Generasi di 290 kecamatan, PNPM Integrasi SPP-SPPN di 80 kabupaten di 30 provinsi dan PNPM Perbatasan di 18 Kecamatan di 14 kab/kota. Pelaksanaan PNPM MP dan PNPM penguatan sudah jauh melampaui target RPJMN 2010-2014 dalam hal cakupan lokasi penerapan. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan, telah dilaksanakan pembinaan teknis Cadangan Pangan Pemerintah Desa (CPPD) dan koordinasi serta pemberian stimulan kepada kelompok masyarakat CPPD di 25 provinsi dan akan ditingkatkan menjadi 33 provinsi pada tahun 2013 serta terlaksananya pemberian bantuan pangan di permukiman transmigrasi sebanyak 40.728 kepala keluarga.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan ketersediaan sarana dan prasarana serta penataan ruang perdesaan, telah dilakukan pembangunan sarana di permukiman transmigrasi (kimtrans) sebanyak 5.424 unit dan akan ditingkatkan menjadi 6.392 unit pada tahun 2013. Dalam rangka

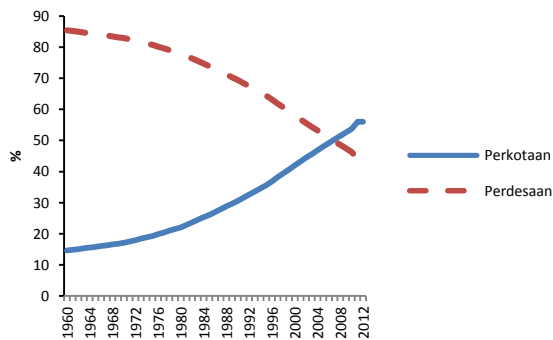
meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana, telah dilaksanakan peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dan penanganan lingkungan perdesaan dan mikro hidro di 29 kabupaten, 78 kecamatan 29 Kabupaten di 8 Provinsi melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP).

Dalam rangka mengawal pembangunan perdesaan agar lebih mandiri dan berdaya saing, selain pembangunan beberapa sektor di atas, telah dilaksanakan program-program penguatan terhadap pemberdayaan masyarakat dan penguatan terhadap Pemerintahan Desa. Untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan, telah disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa yang sedang dalam pembahasan bersama dengan DPR RI. Penyusunan UU tentang Desa hingga saat ini belum dapat dituntaskan sehingga perlu kerja keras untuk dapat mencapai target sesuai RPJMN 2010-2014. Untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan telah dilakukan fasilitasi untuk pengelolaan pemerintahan desa termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa di 64 Kabupaten di 24 Provinsi serta fasilitasi dalam penyusunan profil desa di 415 Kab/Kota di 33 Provinsi dan akan dilanjutkan di 425 Kab/Kota di tahun 2013. Penyusunan profil desa sangat penting untuk mendukung pemetaan tingkat pembangunan desa-desa di Indonesia.

9.1.7 Ekonomi Lokal dan Daerah

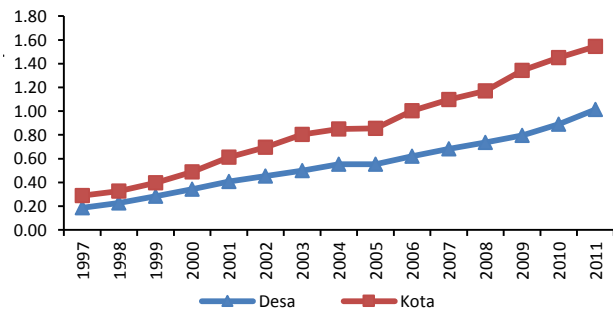
Kesenjangan antara desa dan kota masih menjadi isu pembangunan nasional. Persentase komposisi jumlah penduduk desa semakin lama semakin menurun, sedangkan kota semakin lama semakin meningkat. Selain itu, kesenjangan desa dan kota juga dicerminkan dengan nilai upah rata-rata pekerja yang semakin senjang.

GAMBAR 9.20
PERSENTASE KOMPOSISI JUMLAH
PENDUDUK KOTA-DESA
TAHUN 1960-2012



Sumber : Worldbank, 2012

GAMBAR 9.21
UPAH RATA-RATA PEKERJA
DI DESA DAN KOTA
TAHUN 1997-2011



Sumber BPS, 2012

Sementara itu, berdasarkan *The Global Competitiveness Report* tahun 2012-2013 dan *Doing Business* tahun 2013, daya saing Indonesia masih berada di bawah negara ASEAN lainnya. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah infrastruktur, efisiensi tenaga kerja, dan penggunaan teknologi tepat guna, serta pelayanan memulai usaha dan perijinan. Hal ini mendorong perlunya peningkatan keterkaitan kota-desa dalam rangka meningkatkan daya saing nasional sesuai dengan arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yang dilakukan melalui pengembangan ekonomi lokal dan daerah dengan 5 strategi yaitu peningkatan tata kelola ekonomi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan fasilitas, peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), serta peningkatan akses terhadap infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi.

TABEL 9.2
PERINGKAT DAYA SAING INDONESIA TAHUN 2011-2013

| NO | NEGARA | PERINGKAT Berdasarkan <i>The Global Competitiveness Report</i> | | PERINGKAT Berdasarkan <i>Doing Business Report</i> | |
|----|-------------------|--|-----------|--|------------|
| | | 2011-2012 | 2012-2013 | 2012 | 2013 |
| 1. | Singapura | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 2. | Malaysia | 21 | 25 | 18 | 12 |
| 3. | Brunei Darussalam | 28 | 28 | 83 | 79 |
| 4. | Thailand | 39 | 38 | 17 | 18 |
| 5. | Indonesia | 46 | 50 | 129 | 128 |
| 6. | Filipina | 65 | 75 | 136 | 138 |

Sumber : The World Economic Forum dan IFC, Worldbank

Berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing daerah telah dilakukan. Dalam rangka meningkatkan tata kelola ekonomi daerah, telah dilakukan percepatan perijinan di daerah untuk meningkatkan iklim investasi dan usaha. Percepatan perijinan tersebut dilaksanakan melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh 458 daerah dari 530 daerah (86 persen) pada tahun 2012 terdiri dari 20 provinsi, 341 kabupaten, dan 97 kota atau 123,4 persen sudah melewati target RPJMN 2010-2014. Selain itu, pada tahun 2012 percepatan perijinan di daerah juga dilakukan melalui penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) oleh 134 daerah dan pengurangan biaya untuk berusaha oleh 200 kabupaten/ kota. Selanjutnya, peningkatan tata kelola ekonomi daerah juga dilakukan melalui penggunaan hasil penelitian dan pengembangan. Sebagai upaya meningkatkan keterkaitan kota dan desa, maka hingga tahun 2012 jumlah hasil penelitian dan pengembangan untuk Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi yang dijadikan rekomendasi/ kebijakan sebanyak 24 penelitian dan pengembangan (litbang) dan 11 litbang pada tahun 2013.

Sedangkan, upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pembinaan aparat pemerintah, baik di tingkat pusat, maupun daerah. Peningkatan kapasitas juga dilakukan terhadap stakeholder

pengembangan ekonomi lokal dan daerah lainnya yaitu pengusaha dan masyarakat melalui pembentukan Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FPED) di 10 provinsi dan 45 kabupaten/kota. Selain itu, dalam rangka meningkatkan keterkaitan pusat pertumbuhan dengan wilayah produksinya, hingga tahun 2012 telah dilakukan pendampingan terhadap masyarakat transmigrasi sebanyak 33.524 Kepala Keluarga dan 7.865 Kepala Keluarga pada tahun 2013. Sementara itu, hingga tahun 2012 jumlah kawasan yang telah mendapat layanan sosial budaya/ pendidikan dan mental spiritual di daerah strategis sebanyak 101 kimtrans dan akan dilanjutkan sebanyak 60 kimtrans pada tahun 2013.

Peningkatan koordinasi dan kerjasama antarstakeholder secara lintas sektor dalam upaya meningkatkan fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah dilakukan melalui pembentukan Tim Koordinasi Pengembangan Ekonomi Daerah (TKPED). TKPED bekerjasama dengan Forum Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah Non Pemerintah (FPNP) di tingkat nasional. Adapun hasil yang dicapai hingga saat ini adalah telah dilakukannya review master plan, disusunnya studi rantai nilai, pembentukan dan penguatan forum stakeholder lokal, pendampingan oleh fasilitator, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, sinkronisasi pembiayaan dengan kementerian/ lembaga, dan kerjasama dengan lembaga donor internasional, seperti GIZ melalui Program *Regional Economic Development* (RED), UNDP, AusAID melalui Program *Australia Indonesia Partnership for Rural Economic Development* (AIPD-Rural), dan CIDA melalui Program *Enhanced Local and Regional Economic Development in Sulawesi* (ELREDS). Di samping itu, juga telah dilakukan pendampingan pengembangan Produk Unggulan Daerah (PUD) melalui pendekatan klaster dan *One Village One Product* (OVOP). Pendampingan antara lain berupa penyediaan fasilitator di tingkat provinsi untuk 9 provinsi.

Dorongan peningkatan daya saing dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota di daerah juga dilakukan dengan pengembangan Kerjasama Antar Daerah (KAD) melalui penyusunan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3576/SJ/2011 tahun 2011 tentang Kerjasama Pengembangan Ekonomi Daerah. Kemudian, dilanjutkan dengan penyusunan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri

tentang Instrumen Fasilitasi Kerjasama Ekonomi Daerah pada tahun 2012. Selain itu, pada tahun 2012 terdapat peningkatan 15 persen jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana, dan pelayanan publik.

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan akses infrastruktur untuk mengaitkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah produksinya dilakukan melalui pembangunan kawasan transmigrasi, serta pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan. Hingga tahun 2012, jumlah keluarga yang difasilitasi perpindahannya di kawasan transmigrasi pada daerah strategis sebanyak 6.426 Kepala Keluarga atau 73 persen sudah sesuai dengan target RPJMN 2010-2014 dan perkiraan 2.627 Kepala Keluarga pada tahun 2013. Sedangkan, jumlah permukiman transmigrasi yang mandiri mencapai 167 permukiman transmigrasi (kimtrans) hingga tahun 2012 atau 88 persen sudah sesuai dengan target RPJMN 2010-2014. Sementara itu, upaya peningkatan konektivitas antara desa dan kota, dilakukan dengan melanjutkan pembangunan Kawasan Perkotaan Baru (sebelumnya disebut Kota Terpadu Mandiri/KTM) di 44 kawasan. Di samping itu, pengintegrasian kawasan desa sebagai wilayah produksi dengan pusat-pusat pertumbuhannya juga dilakukan dengan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan berupa pembangunan jalan poros/usaha tani, talud/ saluran, jembatan, STA/ kios/ pasar, lantai jemur, sarana air baku, gudang/sarana produksi, dan tambatan perahu. Hingga tahun 2012 telah dibangun 83 kawasan baru terdiri dari 39 kawasan agropolitan dan 44 kawasan minapolitan di 32 provinsi atau 40,5 persen dari target RPJMN 2010-2014 sehingga masih membutuhkan kerja keras dalam mencapai target tersebut.

9.1.8 Kawasan Strategis

Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagai upaya memacu pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dalam rangka pengurangan ketimpangan pembangunan antar wilayah serta mendorong pertumbuhan ekonomi diselenggarakan melalui Pengembangan Kawasan Pembangunan Ekonomi Terpadu (KAPET), Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Selama ini, pengembangan dan pengusaha Kawasan lebih

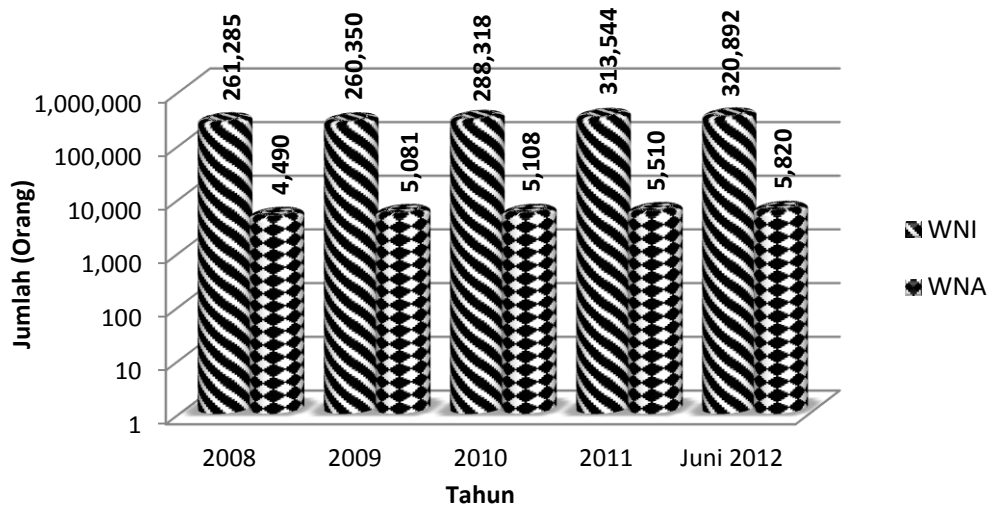
bersifat parsial dan kurang mendapat dukungan program serta penganggaran lintas sektor. Dalam tataran yang lebih luas, diperlukan kebijakan yang menjaga sinergi ketiga kawasan strategis tersebut ke dalam *mainstream* Koridor Ekonomi, sebagaimana yang ditetapkan dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), baik dalam konteks spasial dan konseptualitas kawasan maupun perumusan peran kawasan (KAPET, KPBPB, KEK) dalam pengembangan ekonomi wilayah dengan *back bone* konsep MP3EI.

Saat ini, kebijakan KAPET masih dalam proses revitalisasi, agar lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan dinamika pembangunan yang berkembang. Dengan lahirnya konsep KEK dan MP3EI, maka perlu didudukkan kembali peran dan fungsi KAPET dalam konteks interaksi spasial (lokasi) dan non spasial (konseptual) dengan berbagai konsep lainnya. Selain permasalahan penyelesaian revitalisasi konsep Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), diperlukan pula pembenahan kelembagaan baik dipusat maupun didaerah, serta perumusan strategi khusus dan peningkatan penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan promosi dan investasi. Sementara itu, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) pada tahun 2013 menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dengan ditetapkannya anggaran khusus, baik untuk Badan Pengusahaan Batam dan Badan Pengusahaan Sabang yang dimulai pada tahun anggaran 2012, maka tuntutan akan kinerja KPBPB ditahun 2014 semakin tinggi. Namun demikian KPBPB Sabang masih membutuhkan kontribusi lintas sektor, terutama untuk mengatasi hambatan struktural dimana keterbatasan dan minimnya kemajuan penyediaan infrastruktur menjadi hambatan utama. Sedangkan KPBPB Batam yang dinilai sudah lebih maju, pada awal pengembangannya telah didukung dengan pola otorita yang memberikan kewenangan dan pendanaan penuh untuk penyediaan infrastruktur penunjang kawasannya, oleh karenanya program dan kegiatannya lebih ditekankan pada pengembangan bisnis dan peningkatan promosi investasi. Dilain pihak, penetapan Sei Mangke dan Tanjung Lesung pada awal tahun 2012 sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) harus segera ditindaklanjuti dengan penyiapan berbagai dokumen pendukung, diantaranya: rencana aksi, rencana tata ruang

dan pemenuhan dokumen AMDAL. Sejalan dengan penetapan kedua KEK tersebut, penyelesaian penyusunan Rencana Induk Nasional KEK harus dapat segera tuntas dan dioperasionalisasikan.

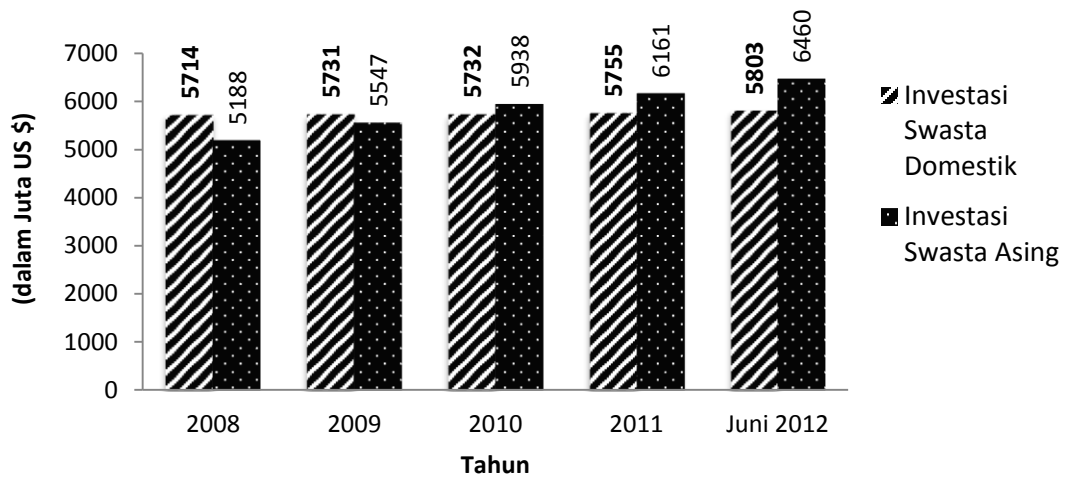
Capaian kegiatan pengembangan kawasan strategis pada Tahun 2013 yang diperkirakan berdasarkan kinerja triwulan pertama adalah 50%, diantaranya, dengan terselesaikannya kajian akademis dan basis legal (penyusunan Raperpres RTR, KLHS, dan peta lampiran Raperpres) untuk revitalisasi KAPET; tersusunnya Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2JM) untuk KAPET Pare-pare, KAPET Manado-Bitung; dan KAPET Sasamba; untuk KEK capaian diantaranya: penetapan lokasi KEK yang terpilih pada tahun 2012 (selain Sei Mangke dan Tanjung Lesung); tersusunnya Renaksi untuk semua lokasi KEK terpilih pada tahun 2013; tersusunnya kelembagaan Dewan Kawasan di KEK Sei Mangkei dan KEK Tanjung Lesung dan KEK terpilih lainnya; serta untuk KPBPB dilaksanakannya 100% target kinerja KPBPB Batam dan Sabang sesuai dengan baseline target indikator yang telah disepakati, diantaranya terbangunnya beberapa infrastruktur pendukung untuk mendukung KPBPB Sabang, dan meningkatnya laju investasi di KPBPB dengan target investasi untuk KPBPB Batam sebesar US\$ 300 juta dan KPBPB Sabang sebesar Rp 6,8 Milyar.

GAMBAR 9.22
PENYERAPAN TENAGA KERJA BERDASARKAN STATUS KEWARGANEGARAAN DI
KAWASAN BATAM TAHUN 2008-JUNI 2012



Sumber: Development Progress of Batam, 2012

GAMBAR 9.23
JENIS INVESTASI SWASTA DI KAWASAN BATAM TAHUN 2008- JUNI 2012



Sumber: Development Progress of Batam, 2012

Berdasarkan capaian Tahun 2013 tersebut, diketahui masih terdapat sejumlah kendala, terutama minimnya infrastruktur pendukung KAPET, KPBPB Sabang dan beberapa KEK terpilih, rendahnya koordinasi lintas sektor dan daerah dalam mengembangkan kawasan, terutama

terkait dalam kontribusi anggaran dalam penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi serta tersedianya moda transportasi dan jalan penghubung. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan stagnansi pengembangan kawasan yang sedianya berperan sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bagi daerah *hinterland*-nya. Serta masih lemahnya koordinasi untuk perumusan program dan pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan yang efektif baik antarsektor dan lintas daerah.

9.1.9 Kawasan Perbatasan

Kawasan perbatasan memiliki nilai strategis sebagai pintu gerbang untuk berinteraksi secara langsung dengan negara tetangga serta memiliki nilai strategis bagi kedaulatan negara, pertahanan, dan keamanan nasional. Sesuai dengan arahan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah nasional, upaya pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan telah dilakukan dengan mendesain agar program/kegiatan yang dilaksanakan menuju pada sasaran perubahan kondisi kawasan perbatasan yang selama ini cenderung difungsikan sebagai halaman belakang negara (orientasi ke dalam/*inward looking*) menjadi kawasan perbatasan yang diorientasikan sebagai halaman depan negara (orientasi ke luar/*outward looking*) yaitu berperan sebagai pintu gerbang aktivitas perdagangan dan sosial-ekonomi dengan negara tetangga. Untuk itu perpaduan program/kegiatan selain dengan pendekatan keamanan juga dilakukan dengan pendekatan kesejahteraan dan lingkungan.

Tahun 2012 terdapat 5 (lima) fokus prioritas sebagai penjawantahan arah kebijakan tersebut ke dalam tingkatan strategi meliputi : (i) Penyelesaian dan penetapan batas wilayah negara; (ii) Peningkatan upaya pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum; (iii) Peningkatan pertumbuhan ekonomi; (iv) Peningkatan pelayanan sosial dasar; dan (v) Penguatan kapasitas kelembagaan dalam rangka pengembangan kawasan perbatasan secara terintegrasi.

Terkait Pengelolaan Batas Wilayah Negara pada tahun 2012, BNPP telah membentuk Sekretariat Bersama Koordinasi Perundingan dengan aktivitas memberikan fasilitasi kepada K/L terkait untuk terlibat dalam perundingan. Telah dilakukan diplomasi perbatasan sebanyak 119 perundingan dari total 60 target perundingan

(12 perundingan setiap tahun) sebagaimana target dalam RPJMN 2010-2014. Hasil-hasil kegiatan yang telah dicapai antara lain: (i) tersusunnya peta batas wilayah negara di darat, yaitu Peta *Joint Mapping* RI-PNG skala 1 : 50.000 sebanyak 27 nomor lembar peta (NLP) atau 100% dari 27 NLP yang direncanakan; (ii) Peta *Joint Mapping* RI-Malaysia skala 1 : 50.000 sebanyak 18 NLP atau 40% dari 45 NLP yang direncanakan; (iii) tersusunnya peta batas wilayah negara di laut, yaitu Peta Zona Ekonomi Eksklusif skala 1 : 1.000.000 (telah selesai 100 %), Peta Garis Pangkal skala 1 : 200.000 (telah selesai 100%), Peta NKRI skala 1 : 5.000.000 sebanyak 1 NLP, Peta pulau-pulau sebanyak 94 pulau atau 82.5 % dari 114 pulau-pulau terluar yang direncanakan; (iv) tersusunnya kajian dan pemetaan wilayah batas negara RI-Malaysia, RI-Papua Nugini, dan RI-Republik Demokratik Timor Leste; serta tersusunnya kajian dan pemetaan batas maritim RI-Malaysia, RI-Filipina, RI-Palau, RI-Vietnam, RI-Singapura; (v) terlaksananya survei demarkasi dan pemetaan darat RI-PNG, RI-Malaysia dan RI-RDTL serta pemeliharaan tanda batas negara; dan (vi) terkelolanya basis data dan sistem informasi batas wilayah negara dan daerah. Capaian pembangunan lainnya adalah tersedianya data hasil inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu (WP3WT) sebanyak 85 SP.

Terkait Pengamanan Wilayah Perbatasan, pada tahun 2012 juga telah dilaksanakan: (i) penyediaan sarana dan prasarana perbatasan sebanyak 206 pos pertahanan dari total kebutuhan minimal sebanyak 396 pos pertahanan; (ii) melaksanakan penggelaran satuan TNI di pos-pos penjagaan di wilayah perbatasan RI - Malaysia, RI - Philipina, RI - Timor Leste, dan RI - Papua Nugini; operasi bakti TNI secara terpilih di wilayah perbatasan melalui TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD); (iii) pengamanan sumber daya kelautan melalui operasi mandiri, patroli terkoordinasi Ausindo dan Malindo (dengan Australia dan Malaysia), operasi bersama dengan Bakorkamla; penangkapan 104 unit kapal perikanan yang melakukan tindak pelanggaran bidang perikanan. Dalam rangka meningkatkan pengawasan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Bagian Barat dan Bagian Timur yang bebas IUU *Fishing*, capaian hingga Juni 2012 telah dilaksanakan pengawasan mencapai 6 WPP (seharusnya 10

WPP) di Bagian Barat dan 12 untuk WPP (seharusnya 18 WPP) di Bagian Timur.

Terkait Pengelolaan Ekonomi dan Pelayanan Sosial Perbatasan, (i) telah terbangun jalan sepanjang 365 km dan jembatan sepanjang 699,80 M di wilayah perbatasan, wilayah terluar dan terdepan; (ii) teridentifikasi dan terpetakannya potensi 39 pulau-pulau kecil, termasuk pulau kecil terluar; (iii) terfasilitasinya penyediaan infrastruktur di 20 pulau-pulau kecil terluar (iv) tersusunnya Profil Pengelolaan Potensi Perbatasan Darat mendukung pembangunan infrastruktur perbatasan; (v) terbangunnya pelayanan kesehatan di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) antara lain : 24 unit Rumah Sakit Bergerak, 86 unit Puskesmas Rawat Inap.

Terkait Penguatan Kelembagaan BNPP, capaian pengelolaan perbatasan selama tahun 2012, telah disusun dokumen Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah dan Kawasan Perbatasan Tahun 2012 sebagai acuan bagi seluruh kementerian/lembaga dalam pengelolaan perbatasan, agar tercapai keterpaduan dan hubungan kerjasama antar sektor terkait dalam pengelolaan perbatasan dibawah koordinasi BNPP; fasilitasi peningkatan kapasitas Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD); telah dilaksanakan koordinasi pelaksanaan program berdasarkan Rencana Induk dan Rencana Aksi, melalui forum pertemuan di tingkat nasional maupun di tingkat region. BNPP juga telah melakukan pembangunan kawasan perbatasan secara terpadu melalui program “Gerbang Dutas” yaitu Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Keerom. Program ini merupakan bentuk sinergi program dan kegiatan 20 (dua puluh) kementerian/lembaga dalam membangun kawasan perbatasan.

Perkiraan capaian pengelolaan perbatasan pada tahun 2013 yang dilakukan oleh BNPP adalah kajian potensi di beberapa lokpri; penyusunan Rencana Induk Berbasis Lokpri atau Cetak Biru (Blue Print) Lokpri untuk kurun waktu 2015-2019; dimulainya fasilitasi koordinasi secara intensif oleh Sekretariat Bersama Perundingan Batas Negara; dan dimulainya pembangunan 39 kecamatan lokpri, terdiri dari 28 lokpri darat dan 11 lokpri laut dalam rangka membuka keterisolasian wilayah dan masyarakat.

9.1.10 Daerah Tertinggal

Percepatan pembangunan daerah tertinggal adalah upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah yang merupakan tugas utama, sekaligus tantangan besar bagi pemerintah Indonesia. Adanya kesenjangan ini didukung fakta masih tingginya disparitas kualitas sumber daya manusia antarwilayah, perbedaan kemampuan perekonomian antardaerah, serta belum meratanya ketersediaan infrastruktur antarwilayah. Dalam periode RPJMN 2010-2014 telah ditetapkan 183 kabupaten yang termasuk kategori daerah tertinggal yang menjadi agenda dalam percepatan pembangunan.

Pembangunan di daerah tertinggal meliputi juga pembangunan kawasan perbatasan dan percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat, mengingat 79.4% dari total 34 kabupaten perbatasan merupakan daerah tertinggal, 80% dari total 10 kabupaten di Provinsi Papua Barat merupakan daerah tertinggal, dan 96% dari total 28 kabupaten di Provinsi Papua merupakan daerah tertinggal.

Pembangunan daerah tertinggal telah menunjukkan hasil yang lebih baik, hal ini dapat dilihat dari perkembangan 3 indikator utama dalam pembangunan daerah tertinggal, yang secara rinci disajikan dalam Tabel 9.3.

TABEL 9.3
CAPAIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

| INDIKATOR | SATUAN | Perkembangan Pencapaian | | | | TARGET RKP 2013 | TARGET RPJMN 2014 |
|---|------------|-------------------------|-------|-------|-------|--------------------|----------------------|
| | | 2010 | 2011* | 2012* | 2013* | | |
| Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal | Persen (%) | 6,00 | 6,08 | 6,16 | 6,24 | 6,9 | 7,10 |
| Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal | Persen (%) | 19,86 | 19,15 | 18,31 | 17,48 | 15,4 | 14,20 |
| Indeks pembangunan manusia (IPM) di daerah tertinggal | | 66,51 | 66,99 | 67,48 | 67,97 | 71,2 | 72,20 |

Sumber: BPS (2011) diolah

Keterangan: *) Hasil Perhitungan Ekstrapolasi

Capaian pertumbuhan ekonomi daerah tertinggal tahun 2012 adalah sebesar 6,16%, Sedangkan capaian tahun 2013 sebesar 6,24%. Pencapaian tersebut masih dibawah sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2013 sebesar 6,9%. Oleh

karena itu diperlukan kerja keras untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Pencapaian pembangunan dari sisi pengurangan persentase penduduk miskin di daerah tertinggal setiap tahunnya menunjukkan kecenderungan menurun. Pengurangan penduduk miskin di daerah tertinggal tahun 2012 sebesar 19,15%, sedangkan perkiraan capaian pengurangan penduduk miskin di daerah tertinggal tahun 2013 sebesar 17,48%. Namun demikian pencapaian tersebut masih dibawah sasaran pembangunan dalam RKP tahun 2013 sebesar 15,4%. Oleh karena itu, sangat diperlukan upaya terus menerus dan kerja keras untuk mencapai target pengurangan kemiskinan yang diharapkan. Terkait dengan kualitas SDM di daerah tertinggal telah menunjukkan adanya peningkatan, hal ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian peningkatan IPM di daerah tertinggal tahun 2012 adalah sebesar 67,48, sedangkan tahun 2013 diperkirakan mencapai 67,97, walaupun masih di bawah sasaran RKP tahun 2013 sebesar 71,2. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan kerja keras dan konsolidasi semua sumber daya untuk mencapai target peningkatan kualitas SDM yang diharapkan.

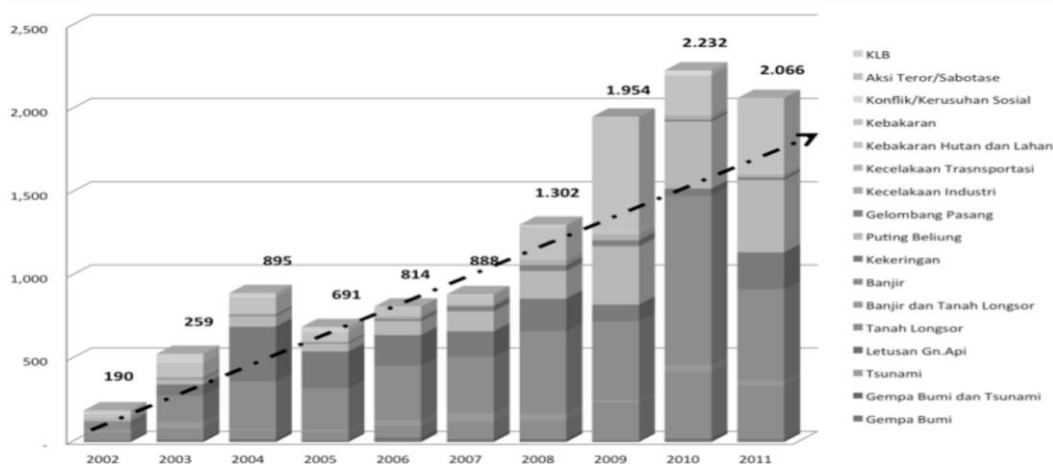
Berdasarkan hasil review tersebut, sasaran pembangunan daerah tertinggal yang menunjukkan kinerja paling baik adalah sasaran pengurangan kemiskinan. Hal tersebut ditunjukkan dengan rata-rata laju pengurangan kemiskinan yang menunjukkan nilai paling tinggi dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal.

9.1.11 Kawasan Rawan Bencana

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sekitar 378 kabupaten/kota di Indonesia merupakan daerah risiko tinggi terhadap bencana. Intensitas kejadian bencana di Indonesia dari tahun 2002-2011 mengalami peningkatan. Lima (5) kejadian yang mendominasi dari tujuh belas (17) kejadian bencana di Indonesia adalah banjir, puting beliung, kekeringan, tanah longsor, dan banjir dan tanah longsor. Pada tahun 2012 upaya penanggulangan bencana lebih ditekankan pada peningkatan kapasitas kelembagaan, aparatur dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Sampai dengan tahun 2012, telah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di 33 Provinsi dan 366 Kabupaten/Kota. Sesuai Direktif Presiden RI telah dilakukan penyusunan Master Plan Pengurangan Risiko Bencana

Tsunami sebagai upaya peningkatan kapasitas kesiapsiagaan menghadapi bahaya tsunami dimasa yang akan datang, dengan fokus kawasan meliputi kawasan Mentawai, Pantai Barat Sumatera, kawasan Selat Sunda, Pantai Selatan Jawa, Pantai Selatan Bali – Nusa Tenggara, dan kawasan utara Papua.

GAMBAR 9.24
INTENSITAS KEJADIAN BENCANA TAHUN 2002-2011



Sumber : dibi.bnpb.go.id, BNPB 201

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan prioritas penanggulangan bencana selama tahun 2012 antara lain: (i) pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan penanggulangan bencana di 33 Provinsi dan 160 Kabupaten/Kota; (ii) peningkatan kapasitas pengurangan risiko dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di 33 provinsi, penyusunan rencana kontingensi di 12 lokasi (mengenai bencana banjir, gempa bumi dan tsunami, kegagalan teknologi dan letusan gunung api), fasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana di 33 kabupaten/kota, peningkatan kapasitas Satuan Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (SRC-PB) melalui pemantapan teknis gladi penanggulangan bencana dan gelar kesiapsiagaan SRC-PB di 2 lokasi wilayah barat dan timur, sosialisasi pengurangan risiko bencana, pengembangan desa tangguh sebanyak 42 desa di 21 kabupaten/kota di 21 provinsi, dan sertifikasi relawan penanggulangan bencana sebanyak 10.000 relawan, pelaksanaan konferensi internasional tingkat Menteri se-Asia Pasifik 5th Asean

Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction (AMCDRR) yang diselenggarakan pada tanggal 22-25 Oktober 2012 di Yogyakarta; dan (iii) dukungan penanganan darurat pada 137 kejadian bencana, yang terdiri dari bencana banjirsebanyak 69 kejadian, angin puting beliung 26 kejadian, banjir dan longsor 21 kejadian, dan kekeringan 21 kejadian serta penyaluran Dana Siap Pakai (*on-call*) untuk 230 kegiatan penanganan darurat di dalam negeri dan bantuan bencana alam kepada negara Filipina dan Korea Utara.

Kegiatan yang dilakukan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana adalah melanjutkan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana Wasior, Mentawai dan Merapi, pendampingan ekonomi di wilayah pascabencana di NTT, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat, peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemulihan pascabencana melalui pertemuan teknis, pelatihan penilaian kerusakan dan kerugian, serta perencanaan pemulihan.

Perkiraan pencapaian tahun 2013 antara lain adalah: (i) peningkatan kapasitas penanggulangan bencana, melalui pemenuhan dan pendistribusian logistik dan peralatan penanggulangan bencana di 200 kab/kota di 33 Provinsi; (ii) dukungan dan fasilitasi penyusunan rencana kontinjensi di 10 lokasi; (iii) pelaksanaan tanggap darurat yang efektif dan efisien di 150 lokasi/kejadian pasca bencana; penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana Wasior, Mentawai dan Merapi yang akan berakhir pada tahun 2013.

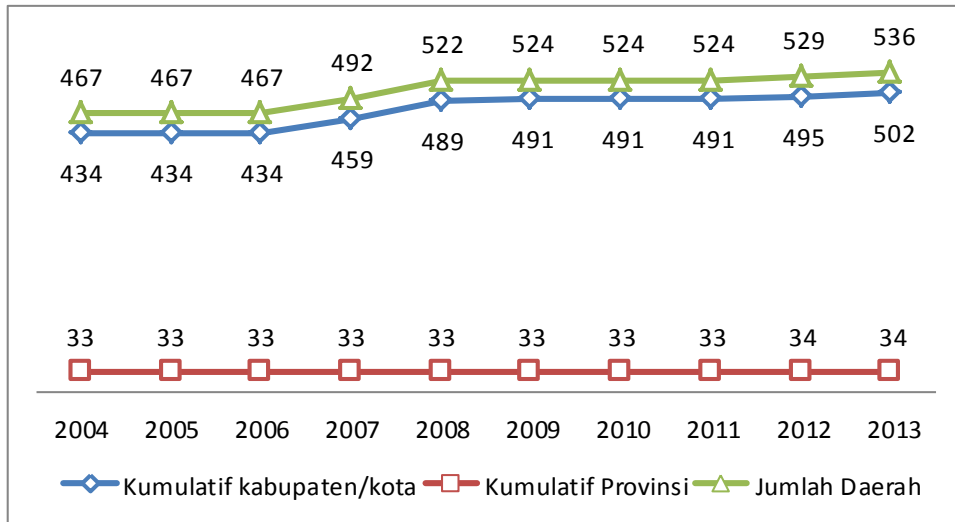
Pada tahun 2013 juga akan diselesaikan pembangunan *shelter* sebanyak 139 unit beserta sarana prasarana pendukungnya, pengembangan sirene sistem peringatan dini sebanyak 1.300 unit di 51 kab/kota serta pengembangan 1.080 desa tangguh yang tersebar di 51 kabupaten/kota di sepanjang pesisir pantai barat Pulau Sumatera dan pesisir pantai selatan Pulau Jawa.

9.1.12 Desentralisasi Hubungan Pusat Daerah dan Antardaerah

Dalam lingkup Desentralisasi, Hubungan Pusat Daerah, dan Antardaerah, terdapat beberapa isu terkait Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan, Penataan Daerah, serta Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.

GAMBAR 9.25

Pemekaran Daerah Pasca Desentralisasi (1999-2013)



Sumber: Kemendagri, 2013 (diolah)

Semenjak dilaksanakannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, permintaan atas pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) meningkat secara signifikan hingga terdapat 524 daerah (33 provinsi dan 491 kab/kota). Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang baik di sisi kelembagaan, aparatur serta keuangan daerah, Pemerintah menetapkan kebijakan moratorium pemekaran daerah hingga tahun 2014 yang dinyatakan pada RPJMN 2010-2014.

Walaupun Pemerintah menetapkan moratorium pemekaran daerah, masih banyak usulan pemekaran/pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) dari daerah, baik yang diusulkan oleh legislatif maupun masyarakat. Pada tahun 2012, telah terbentuk 12 DOB (1 Provinsi dan 11 Kabupaten) inisiatif DPR-RI.

Sejalan dengan target moratorium pembentukan DOB, pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap semua usulan pembentukan DOB. Pada tahun 2012 terdapat 33 165 usulan DOB yang disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri, selain 19 usulan DOB inisiatif DPR-RI.

Upaya lain dalam hal penataan daerah yang telah dilakukan yaitu evaluasi terhadap 57 DOB berusia kurang dari 3 tahun dan meliputi 11 aspek (lain kelembagaan,

personil, aset, dan hibah keuangan dari daerah induk). Hasil evaluasi menyatakan bahwa tidak ada daerah memiliki kategori baik, 46 daerah dengan kategori sedang, 10 daerah dengan kategori kurang baik, tidak ada daerah berkategori tidak baik, serta terdapat 1 daerah yang tidak memiliki data.

Terkait strategi penataan daerah dalam jangka panjang, telah disusun Desain Besar Penataan Daerah (Desartada). Desartada tersebut memuat latar belakang, konsep dasar, dan desain besar penataan daerah hingga tahun 2025, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah daerah dalam melakukan penataan daerah.

Sementara capaian pada tahun 2012 dan perkiraan capaian tahun 2013 terkait dengan fokus prioritas Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan adalah sebagai berikut:

- I. Terkait dengan penataan urusan pemerintahan daerah, telah dilakukan upaya penyempurnaan PP 38 Tahun 2007 mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sejalan dengan revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- II. Sementara itu, terdapat 80% provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan), dan telah dilakukan evaluasi terhadap 80% perda kewenangan/urusan pada pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota tersebut. Pada tahun 2013, diharapkan terdapat 90% provinsi dan kabupaten/kota yang sudah menyelesaikan perda mengenai kewenangan/urusan (wajib dan pilihan), dan 90% dari Perda tersebut terevaluasi.
- III. Terkait dengan penataan pembagian urusan, dilakukan penyusunan Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) oleh Kemeterian/Lembaga (K/L) serta fasilitasi implementasinya. Bidang urusan yang telah disusun NSPK nya sebanyak 22 bidang urusan, yaitu 11 NSPK pada lingkup Unit Pelaksana Daerah (UPD) I dan 11 NSPK pada UPD II. Pada tahun 2013, ditargetkan akan selesai tersusun 26 NSPK, yaitu 15 NSPK pada lingkup Unit Pelaksana Daerah (UPD) I, dan 11 NSPK pada

lingkup UPD II.

- IV. Dalam pelaksanaan pembagian urusan, sudah dilakukan inventarisasi perundang-undangan sektoral yang belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan otonomi daerah di pusat dan di daerah. Hingga tahun 2012 terdapat 10 bidang yang telah dilakukan inventarisasi yaitu Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Bidang Kehutanan; Bidang Koperasi UKM; Bidang Perindustrian; Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil; Bidang Perhubungan; Bidang Kesbangpol; Bidang Kepegawaian; Bidang Arsip dan Perpustakaan. Selain inventarisasi, dilakukan juga harmonisasi peraturan perundang-undangan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah.
- V. Langkah lain yang dilakukan dalam penataan pembagian urusan yaitu melakukan harmonisasi terkait dengan sinkronisasi regulasi otonomi daerah. Terdapat 11 bidang yang telah dilakukan harmonisasi, yaitu Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM); Bidang Pemilu; Bidang Pembagian Urusan Pertanahan; Bidang Sosial; Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah; Bidang Komunikasi dan Informatika; Bidang Pengendalian dan Operasional dan Keselamatan Jalan; Bidang Kehutanan; Bidang Pendidikan; Bidang Kesehatan; dan Bidang Perencanaan. Dari 11 bidang prioritas telah dikeluarkan 6 surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri kepada sektor terkait bidang yang diinventarisasi. Ditargetkan pada tahun 2013, harmonisasi perundang-undangan ini terus ditingkatkan hingga mencapai 50%.

TABEL 9.4
PENETAPAN NSPK 2010-2012

| No | Tahun Penetapan | Bidang NSPK |
|----|-----------------|---|
| 1 | 2010 | Bidang Penanaman Modal |
| 2 | | Bidang Pekerjaan Umum |
| 3 | | Bidang Lingkungan Hidup |
| 4 | | Bidang Kehutanan |
| 5 | | Bidang Kesehatan |
| 6 | 2011 | Bidang Pendidikan |
| 7 | | Bidang Komunikasi dan Informatika |
| 8 | | Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan |
| 9 | | Bidang Perdagangan |
| 10 | | Bidang Perumahan |
| 11 | | Bidang Perindustrian |
| 12 | | Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 13 | | Bidang Sosial |
| 14 | | Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi |
| 15 | | Bidang Kepemudaan dan Olahraga |
| 16 | | Bidang Kearsipan |
| 17 | | Bidang Kelautan dan Perikanan |
| 18 | 2012 | Bidang Pertanahan |
| 19 | | Bidang Pemberdayaan Perempuan |
| 20 | | Bidang Kebudayaan dan Pariwisata |
| 21 | | Bidang Perhubungan |
| 22 | | Bidang Permendagri |

Sumber: Kemendagri, 2013 (diolah)

Fokus prioritas lain adalah kerjasama antar daerah. Kerjasama antardaerah ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang potensial dikerjasamakan antar pemerintah daerah, pemda dengan swasta, dan pemda dengan kelompok masyarakat. Pada era desentralisasi dan otonomi daerah, kerjasama antar daerah menjadi semakin penting terutama yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan lingkungan dan tata ruang, dan kerjasama ekonomi yang bersifat lintas daerah. Hingga saat ini, kerjasama antar daerah masih perlu ditingkatkan, terutama kerjasama di bidang ekonomi, prasarana, dan pelayanan publik. Selain itu, dilakukan pula administrasi pelayanan terpadu dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan publik.

Berikut ini adalah capaian peningkatan kerjasama antar daerah pada tahun 2012:

I. Terdapat peningkatan kerjasama daerah dalam bidang

ekonomi, prasarana, dan pelayanan publik sebesar 15%. Manfaat atas kerjasama daerah tersebut diterima oleh 10 daerah yaitu Provinsi DI. Yogyakarta, Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Banten. Selain itu, telah disusun pemetaan pelaksanaan kerja sama daerah baik yang sukses maupun yang gagal. Pada tahun 2013, ditargetkan kerjasama daerah meningkat menjadi 20% dan penerima manfaat dari kerjasama tersebut meningkat menjadi 12 daerah.

- II. Terkait dengan pelaksanaan administrasi terpadu kecamatan, terdapat 24 kabupaten/kota pada 14 provinsi yang telah melaksanakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Daerah tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu, Siak, Kuantan Singingi, Bengkalis Provinsi Riau; Kota Bintan Provinsi Kepulauan Riau; Kabupaten Jepara, Sragen, Banyumas Provinsi Jawa Tengah; Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur; Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat; Kabupaten Pidie Jaya, Bireun, Aceh Besar, Tamiang, Aceh Timur Provinsi Aceh; Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur; Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan; Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat; Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan; Kabupaten Tanah Bumbu, Banjar Provinsi Kalimantan Selatan; Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat. Ditargetkan pada tahun 2013 terdapat 25 kabupaten/kota di 6 provinsi yang melaksanakan administrasi pelayanan terpadu kecamatan.

Dalam rangka membina penyelenggaraan pemerintahan daerah dan memacu pertumbuhan di daerah, pemerintah berkewajiban melakukan kegiatan peningkatan kapasitas daerah dan melakukan pemetaan atas kesenjangan kemampuan antardaerah (meliputi aspek sistem, kelembagaan, dan sumber daya manusia). Oleh karena itu, sesuai dengan PP No. 6 Tahun 2008 mengenai Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD), pemerintah (Kemendagri) harus mengetahui kinerja Pemerintah Daerah melalui suatu mekanisme terintegrasi.

Mekanisme tersebut mengharuskan setiap daerah mampu melakukan pengukuran evaluasi kinerja secara mandiri dengan suatu sistem dan format pelaporan, sesuai dengan aturan berlaku. Pada tahun 2012, terdapat, 33 Provinsi, 346 Kabupaten dan 86 Kota yang telah dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan LPPD 2010, termasuk 5 Provinsi Otsus/Istimewa, 74 Kab/Kota Otsus/Istimewa dan 155 DOB diatas 3 s/d 10 tahun. Pada tahun 2013, kinerja pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah diarahkan untuk terus meningkat.

9.1.13 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintah Daerah

Fokus prioritas tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah diarahkan pada Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD, Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, serta Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah.

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD ditujukan untuk mendorong pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan utama desentralisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, demokrasi, dan daya saing daerah. Kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah terkait fokus prioritas di atas terkait dengan penataan kelembagaan, penerapan indikator utama pelayanan publik, dan pembinaan administrasi pejabat daerah dan DPRD. Adapun capaian tahun 2012 dan perkiraan capaian 2013, sebagai berikut:

- I. Terkait dengan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis jabatan, dan pelaporan kinerja; sedang disusun Peraturan Pemerintah (PP) pengganti PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang saat ini juga sedang menunggu revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- II. Dalam kegiatan prioritas penerapan indikator utama pelayanan publik di daerah, pemerintah telah menetapkan 15 Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui peraturan menteri terkait. Untuk meningkatkan penerapannya di daerah, Kemendagri melakukan fasilitasi penerapan SPM di daerah. Pada tahun 2013, ditargetkan pemerintah dapat melakukan penerapan dan monitoring terdapat pelaksanaan 15 SPM tersebut di daerah.

TABEL 9.5
PENETAPAN SPM 2010-2012

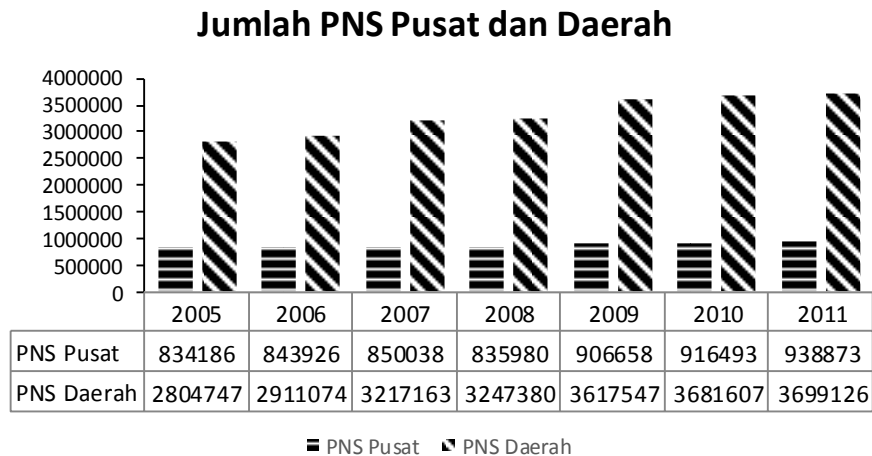
| No | Tahun Penetapan | Bidang SPM |
|----|-----------------|---|
| 1 | | Bidang Kesehatan |
| 2 | | Bidang Sosial |
| 3 | 2010 | Bidang Lingkungan Hidup |
| 4 | | Bidang BKKBN |
| 5 | | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 6 | | Bidang Ketahanan Pangan |
| 7 | | Bidang Pendidikan |
| 8 | 2011 | Bidang Ketenagakerjaan |
| 9 | | Bidang Perumahan Rakyat |
| 10 | | Bidang Pekerjaan Umum |
| 11 | | Bidang Permendagri |
| 12 | | Bidang Kominfo |
| 13 | | Bidang Kesehatan |
| 14 | 2012 | Bidang Perhubungan |
| 15 | | Bidang Penanaman Modal |
| 16 | | Bidang Kesenian |
| 17 | | Bidang Pemerintahan Dalam Negeri |

Sumber: Kemendagri, 2013 (diolah)

- III. Terkait dengan pembinaan administrasi pejabat negara di daerah dan DPRD, pada tahun 2012 dilakukan kegiatan orientasi bagi peningkatan kemampuan dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran, dan pengawasan, serta inovasi pemerintahan dan pembangunan. Kegiatan ini telah berjalan dengan peserta 41 kepala daerah kabupaten/kota.

Dimensi aparatur menjadi hal penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gambar 9.24 menunjukkan peningkatan jumlah PNS Pusat dan daerah. Namun, tantangan utama berkaitan dengan pengembangan kapasitas aparatur yang masih harus ditingkatkan sejalan dengan tantangan pembangunan yang bersifat dinamis, baik di Pusat maupun Daerah.

GAMBAR 9.26
JUMLAH PNS PUSAT DAN DAERAH 2005 - 2011



Sumber: BKN, 2012 (diolah)

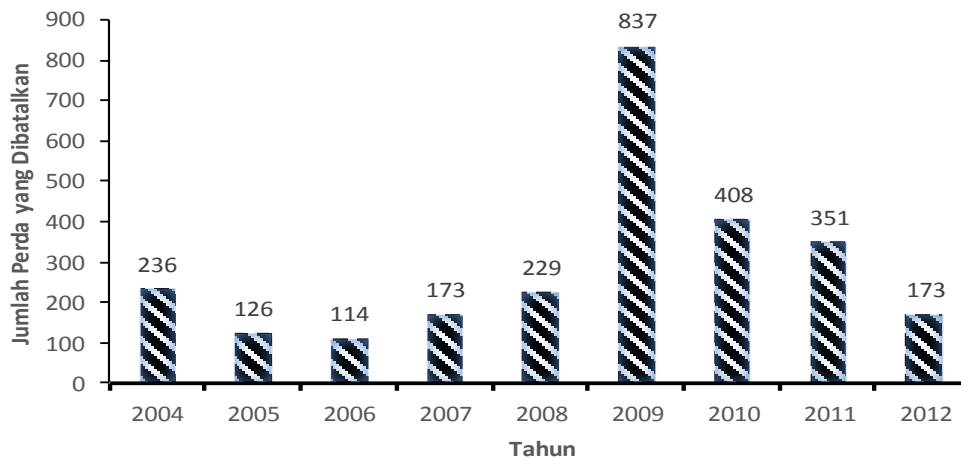
Adapun capaian pada tahun 2012 dan perkiraan capaian 2013 adalah:

- (i) Telah dilaksanakan Diklat Teknis Pemerintahan untuk camat sebesar 12 angkatan dan untuk calon camat sebesar 2 angkatan. Pada tahun 2013, ditargetkan diklat camat sebanyak 11 angkatan, dan diklat calon camat sebanyak 2 angkatan.
- (ii) Telah dilaksanakan Diklat Penguatan Pemerintahan dan Politik bagi anggota DPRD, pejabat pemerintahan Provinsi dan Kabupaten dan Kota, Kecamatan, Kelurahan/serta Desa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, politik dan SPM sebanyak 72 angkatan. Kemudian pada tahun 2013 ditargetkan 51 angkatan akan berpartisipasi dalam diklat tersebut.
- (iii) Telah dilaksanakan kegiatan Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bagi Bupati/Wakil Bupati dan DPRD dengan peserta sebanyak 2 angkatan. Kemudian pada tahun 2013 ditargetkan terlaksana dengan peserta sebanyak 6 angkatan.

Dalam pelaksanaan penataan produk hukum dan pelayanan bantuan hukum, Kemendagri sudah melakukan pengkajian terhadap perda yang ditunjukkan oleh Gambar

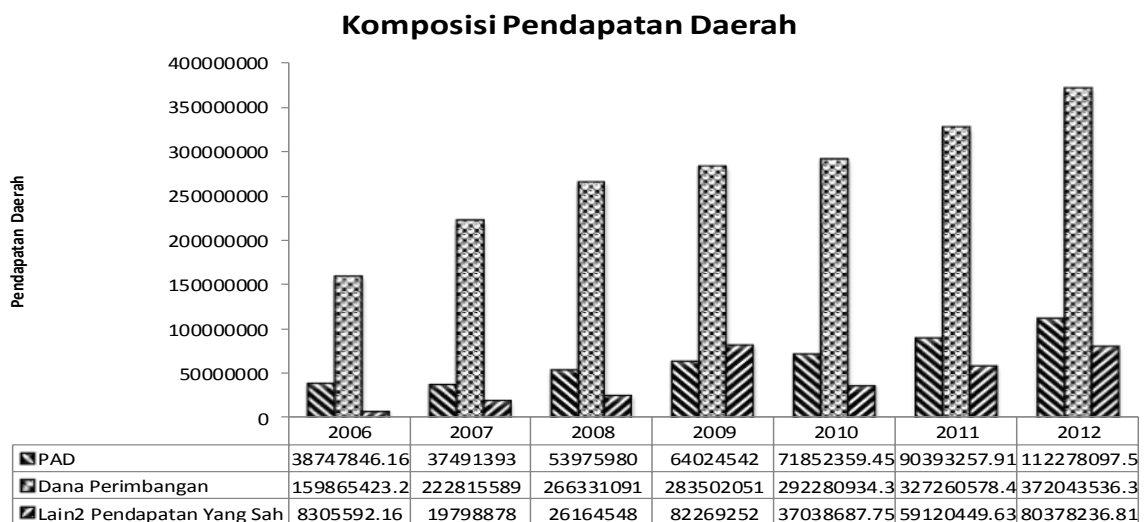
9.24. Capaian hingga tahun 2012 sudah terkaji 3.000 perda dan ditemukan 173 perda yang bermasalah. Ditargetkan untuk tahun 2013 dapat mengkaji sebanyak 2.500 perda.

GAMBAR 9.27
REKAPITULASI PEMBATALAN PERDA 2002-2012



Sumber: Kemendagri, 2012 (diolah)

GAMBAR 9.28
KOMPOSISI PENDAPATAN DAERAH 2006-2012



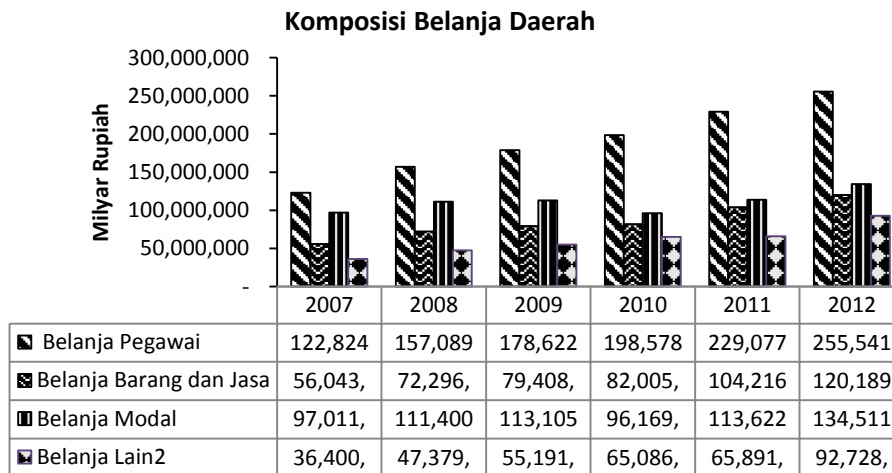
Sumber: Kementerian Keuangan, 2013 (diolah)

Di sisi keuangan daerah, peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah dilakukan melalui pengelolaan atas penerimaan daerah dan belanja daerah. Gambaran

proporsi pendapatan daerah dalam APBD secara garis besar yang ditunjukkan oleh Gambar 9.25 memperlihatkan bahwa daerah masih sangat tergantung dengan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum/DAU, Dana Bagi Hasil/DBH, dan Dana Alokasi Khusus/DAK,). Oleh sebab itu, telah dilakukan langkah-langkah meningkatkan efektivitas dan efisiensi atas pemanfaatan Dana Perimbangan guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Dukungan Pemerintah dalam pembangunan di daerah salah satunya ditunjukkan melalui peningkatan atas Dana Transfer ke Daerah, terutama untuk mengatasi kesenjangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antarpemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK), sebagai bagian dari Dana Transfer ke Daerah juga mengalami peningkatan, baik dari sisi besaran total maupun jumlah lokasi penerima. Karakteristik DAK yang diperuntukkan bagi kegiatan fisik diharapkan berkontribusi secara signifikan bagi pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, beberapa target terkait dengan pemanfaatan DAK menjadi prioritas Pemerintah. Pada tahun 2012, 95% daerah telah memanfaatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan 40,24% daerah telah optimal (100%) dalam melakukan penyerapan DAK. Pada tahun 2013, ditargetkan pemanfaatan DAK sesuai Juklak sebesar 85% daerah, dan terdapat 85% daerah yang melakukan penyerapan DAK secara optimal (100%).

GAMBAR 9.29
KOMPOSISI BELANJA DAERAH 2007-2012



Sumber: Kementerian Keuangan , 2013 (diolah)

Gambar 9.29 memperlihatkan bahwa komponen belanja pegawai masih mendominasi sisi belanja APBD. Dalam rangka menjamin ketersediaan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dilakukan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Upaya peningkatan kualitas belanja APBD ini antara lain dengan meningkatkan proporsi belanja langsung terhadap belanja tidak langsung dan belanja modal terhadap total belanja daerah (provinsi). Pada tahun 2012, terdapat 18 provinsi (54,55%) yang memiliki porsi belanja langsung lebih besar daripada belanja tidak langsung. Untuk tahun 2013, ditargetkan terdapat 55% dari jumlah seluruh provinsi yang memiliki proporsi belanja langsung lebih besar dari belanja tidak langsung.

Dalam hal pelaporan keuangan daerah, sebesar 30,30% daerah (10 provinsi) ber-LKPD sesuai dengan indikator kedisiplinan penggunaan anggaran dalam APBD sebagai upaya pencapaian status opini WTP, dan pada tahun 2013 ditargetkan sebanyak 75% daerah.

9.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

9.2.1 Permasalahan

9.2.1.1 Data dan Informasi Spasial

Dilihat dari pencapaian kinerja pembangunan prioritas bidang data dan informasi spasial di tahun 2012 dan perkiraan pencapaian tahun 2013 serta dengan memperhatikan tema RKP tahun 2014, yaitu Memantapkan Perekonomian Nasional Untuk Peningkatan Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan, tantangan yang dihadapi dalam penyiapan data dan informasi spasial pada tahun 2014 adalah penyediaan data spasial untuk wilayah-wilayah prioritas pembangunan nasional (koridor ekonomi Indonesia, KEK, dan KAPET). Berdasarkan tantangan tersebut, permasalahan yang paling mendesak untuk ditangani pada tahun 2014 adalah: (i) koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional; (ii) kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial, termasuk ketersediaan data spasial untuk mendukung pembangunan wilayah koridor ekonomi Indonesia dan wilayah prioritas pembangunan nasional lainnya (KEK dan KAPET); (iii) akses terhadap data dan informasi spasial; dan (iv) sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan.

9.2.1.2 Penataan Ruang

Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan penataan ruang pada Tahun 2014 adalah (i) belum ditetapkannya seluruh peraturan perundangan pelaksanaan UU 26/2007; (ii) belum serasinya peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan UU 26/2007 termasuk diantaranya adalah UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU 32/2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; (iv) belum disusunnya peraturan tentang pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sebagai acuan pelaksanaan RTRW; (v) belum memadainya perangkat pengendalian pemanfaatan ruang antara lain jumlah PPNS yang belum mencukupi; (vi) perlu ditingkatkannya kualitas sumberdaya manusia di bidang penataan ruang di pusat dan daerah; serta (vii) perlu pementapan kelembagaan penataan ruang yang diharapkan dapat menyerasikan rencana pembangunan

dengan RTR. Penetapan peraturan pelaksanaan UU 26/2007, keserasiannya UU 26/2007 dengan berbagai UU sektoral tersebut di atas, mantapnya kelembagaan dan tingginya kualitas aparat berperan penting untuk mengurangi konflik pemanfaatan ruang serta untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pengguna ruang yaitu masyarakat dan sektor swasta.

9.2.1.3 Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi dalam bidang pertanahan adalah :

1. Belum memadainya ketersediaan peta pertanahan
Pengelolaan dan administrasi pertanahan, termasuk di dalamnya pelayanan pertanahan, membutuhkan data dan informasi spasial untuk memberikan kepastian lokasi bidang tanah dalam rangka mendukung jaminan kepastian hukum atas obyek bidang tanah yang disertipikatkan. Peta dasar pertanahan yang baru mencakup sekitar 11,35 persen dari luas daratan Indonesia berimplikasi pada terhambatnya kegiatan pendaftaran tanah yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian jaminan hak atas tanah dan meningkatnya potensi kasus-kasus pertanahan. Dengan demikian penyediaan peta pertanahan sangat diperlukan untuk mendukung percepatan legalisasi aset tanah.
2. Belum kuatnya jaminan kepastian hukum hak atas tanah
Sampai dengan tahun 2012, jumlah bidang tanah yang telah disertipikatkan mencapai 42.754.257 bidang atau sekitar 49,23persen dari total 86.845.839 bidang tanah di Indonesia. Percepatan sertifikasi tanah merupakan langkah awal bagi masyarakat agar mempunyai akses terhadap sumber daya produktif (*access reform*) seperti permodalan, pendampingan dan pemberdayaan. Sertifikasi tanah yang dibiayai pemerintah tersebut dilakukan melalui beberapa bentuk program yaitu Prona, Sertifikasi Tanah Lintas Kementerian/Lembaga (UKM, petani, nelayan, transmigran, dan masyarakat berpenghasilan rendah). Tahapan pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah ada yang berada dalam kewenangan BPN dan juga yang berada diluar kewenangan BPN. Tahapan yang menjadi kewenangan BPN meliputi: penyuluhan, pengumpulan, data yuridis, pengukuran bidang pemeriksaan tanah, penertiban SK

Hak dan penerbitan sertipikat. Sedangkan yang diluar kewenangan BPN yang seringkali menghambat proses sertifikasi tanah adalah pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang membebani masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah.

3. Luas tanah terindikasi terlantar
Tanah terlantar seharusnya dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penelantaran tanah dapat menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan, sehingga perlu pengaturan kembali penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
4. Ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)
Salah satu penyebab terjadinya kasus-kasus pertanahan adalah adanya ketimpangan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penguasaan tanah pertanian oleh sebagian besar masyarakat khususnya petani yang rata-rata kurang dari 0,5 hektar dan disisi lain kepemilikan tanah yang luas oleh sebagian lainnya mengindikasikan adanya ketimpangan tersebut, sehingga perlu adanya penataan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

Tantangan pembangunan perkotaan yang akan dihadapi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Penerapan kebijakan pembangunan perkotaan berdasarkan tipologi/karakteristik masing-masing kota. Rancangan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Nasional (KSPN) yang telah dirumuskan perlu diadopsi oleh Pemerintah Daerah dengan penyusunan Kebijakan dan Strategi Perkotaan Daerah (KSPD) yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kota.
2. Peningkatan penyediaan pelayanan publik perkotaan, khususnya dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) secara merata terhadap kota besar, kecil, dan menengah.
3. Antisipasi terhadap perubahan iklim, mengingat karakteristik kota sebagai pusat kegiatan yang menyebabkan tingginya faktor resiko dampak

9.2.1.4 Perkotaan

perubahan iklim sehingga kota-kota perlu meningkatkan kemampuan dan kapasitas dalam mengarusutamakan mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim dalam pembangunan perkotaan.

4. Peningkatan kesejahteraan penduduk kota melalui penyediaan lapangan kerja yang memadai dan pemenuhan kebutuhan dasar yang menjangkau seluruh pelosok kota.
5. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah kota yang seimbang dengan peningkatan kompleksitas permasalahan dan perkembangan kota termasuk kerjasama antara pemerintah kota dengan pemerintah kota atau kabupaten lainnya.

Beberapa permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan perkotaan yang perlu ditangani pada tahun 2014 adalah:

1. Belum terumuskannya peraturan perundangan yang mengatur tentang pembangunan perkotaan dan menjadi payung bagi penyelenggaraan pembangunan perkotaan oleh pemerintah pusat, sektor maupun pemerintah daerah.
2. Terbatasnya basis data pendukung penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan.
3. Belum jelasnya mekanisme kelembagaan pengelolaan kawasan perkotaan dan masih terbatasnya kapasitas pemerintah kota dalam melaksanakan perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan.
4. Belum optimalnya pembangunan, pengembangan dan pembiayaan penyediaan pelayanan publik di perkotaan untuk memenuhi kebutuhan penduduk perkotaan yang terus meningkat.
5. Rendahnya implementasi rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di perkotaan, termasuk di dalamnya perizinan pemanfaatan ruang.
6. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan perkotaan, baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maupun antarpemangku kepentingan di daerah.

9.2.1.5 Pedesaan

Memperhatikan berbagai kondisi umum pedesaan yang masih membutuhkan keberpihakan kepada pembangunan desa dan membangun daya tarik pedesaan. Beberapa tantangan di dalam pembangunan pedesaan kedepan adalah:

1. Mengoptimalkan kebijakan dan program-program K/L yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat pedesaan;
2. Mengoptimalkan kebijakan dan program-program kementerian/ lembaga yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat pedesaan.
3. Koordinasi antar pemerintah desa dan kabupaten/kota serta berkembangnya mekanisme koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk kementerian/ lembaga dalam pembangunan pedesaan.
4. Keberpihakan dari berbagai kebijakan nasional terhadap pembangunan pedesaan dalam memberikan penegasan terhadap peran desa, termasuk masyarakat desa, kelembagaan desa, dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan desa.
5. Integrasi perencanaan dan penganggaran pembangunan pedesaan dengan mengoptimalkan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan kabupaten/kota dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat desa.

Dalam mewujudkan kemandirian dan daya saing desa sehingga menjadi daya tarik desa, masalah pembangunan pedesaan diantaranya :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam mengakomodasi pembangunan desa salah satunya belum disahkannya peraturan perundangan yang mengatur desa serta belum adanya data profil desa yang terpadu untuk menjadi acuan seluruh pelaku pembangunan di pedesaan.
2. Belum optimalnya keberdayaan masyarakat pedesaan dan kelembagaan yang ada diantaranya dalam perencanaan dan pembangunan desa, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kualitas pendidikan melalui pemberantasan buta aksara di pedesaan.
3. Belum optimalnya pengembangan ekonomi pedesaan dan lembaga keuangan mikro pedesaan yang dapat

9.2.1.6 Ekonomi Lokal dan Daerah

meningkatkan kesempatan dan kualitas kerja di perdesaan serta mengurangi laju urbanisasi/migrasi dan tenaga kerja perdesaan.

4. Keterbatasan akses masyarakat untuk memperoleh berbagai pelayanan dasar maupun akses penunjang kegiatan ekonomi perdesaan.
5. Belum optimalnya kesadaran pemerintah daerah maupun masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan dan peran desa sebagai pusat produksi yang perlu didorong.

Tantangan pengembangan ekonomi lokal dan daerah tahun 2014 adalah perlunya peningkatan koordinasi antarstakeholder, baik di pusat, daerah, maupun antara pusat dan daerah dan lebih didorongnya peningkatan daya saing daerah melalui upaya-upaya sinkronisasi dan integrasi seluruh kegiatan terkait ekonomi lokal.

Masalah utama yang perlu ditangani dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah tahun 2014 dalam meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah produksinya adalah :

1. Belum seluruh perijinan dilimpahkan kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan belum tersosialisasinya lembaga tersebut kepada masyarakat, serta adanya peraturan perundangan yang mengharuskan dinas terkait di daerah untuk memberikan rekomendasi teknis sehingga dapat memperpanjang proses perijinan berinvestasi.
2. Belum optimalnya pendanaan dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia pendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah karena bukan merupakan prioritas utama daerah dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerahnya.
3. Masih kurangnya pendampingan dalam fasilitasi pengembangan ekonomi lokal dan daerah, khususnya dalam pembentukan forum stakeholder sebagai wadah koordinasi antarstakeholder.
4. Belum optimalnya kerjasama antar daerah sehingga menyebabkan pengembangan kawasan menjadi terbatas.
5. Belum optimalnya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru karena status hukum lahan yang belum *clean and clear*, kurangnya keterkaitan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli sehingga meningkatkan potensi konflik, serta kurangnya akses

ke dan dari pasar sebagai akibat terbatasnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana transportasi, serta jaringan komunikasi.

Belum optimalnya pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru karena status hukum lahan yang belum clean and clear, kurangnya keterkaitan antara penduduk pendatang dengan penduduk asli sehingga meningkatkan potensi konflik, serta kurangnya akses ke dan dari pasar sebagai akibat terbatasnya kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana transportasi, serta jaringan komunikasi.

9.2.1.7 Kawasan Strategis

Tantangan pengembangan kawasan strategis dalam konteks KAPET, KPBPB dan KEK kedepannya adalah membangun kebijakan dan strategi yang komprehensif sehingga pengembangan kebijakan antar kawasan dapat sinergi dalam mengurangi kesenjangan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta bersinergi dengan konsep koridor ekonomi nasional yang telah ditetapkan. Tumpang tindih pemahaman atas peran dan fungsi berbagai tipe kawasan strategis menjadikan pembangunan kawasan menjadi stagnan. Untuk menjawab tantangan tersebut maka tahun 2014 kebijakan diarahkan untuk menjawab permasalahan pokok, diantaranya:

1. Struktur kelembagaan dan kewenangan pengelolaan kawasan baik ditingkat pusat maupun daerah yang belum mampu mengawal sinergisitas kontribusi penganggaran lintas sektor.
2. Belum memadai infrastruktur di kawasan strategis, terutama infrastruktur yang terkait dengan pasokan dan pemasaran produk, seperti: konsistensi pasokan energi dan ketersediaan air bersih, fasilitas kepelabuhan laut dan udara, jalan penghubung dan moda transportasi.
3. Sejumlah kebijakan peraturan ditingkat pusat yang menjadi acuan penyelenggaraan kawasan dan pelimpahan wewenang, terutama yang terkait kebijakan insentif (fiskal dan non fiskal) yang dapat mendorong perwujudan iklim usaha yang kondusif.
4. Pelayanan pengembangan investasi di daerah, terutama dikaitkan dengan banyaknya peraturan yang menghambat investasi dan kemudahan penyediaan (pembebasan) lahan.

Permasalahan tersebut dapat dijabarkan sesuai dengan spesifikasi tipe kawasan sebagai berikut: untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) tantangan pengembangan kawasan meliputi: (i) perlu penegasan dan kejelasan peran dan kewenangan lembaga pengelola di daerah terutama terkait dengan jaminan keamanan usaha, pemangkasan jalur perijinan, informasi terpadu mengenai peluang bisnis dan potensi kawasan; (ii) belum memadai dukungan infrastruktur; (iii) belum tuntasnya upaya penyesuaian substansial terhadap Kepres No.150/2000 yang dikaitkan dengan perkembangan kebijakan terkini (KEK dan MP3EI); (iv) lambatnya proses harmonisasi dan legalisasi peraturan perundang-undangan.

Untuk Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas tantangan pengembangan kawasan sebagai berikut: (i) lemahnya aspek kelembagaan dan pengelolaan kawasan terutama pengelolaan infrastruktur perhubungan; (ii) belum optimal pelayanan investasi secara terpadu (iii) terbatasnya kesediaan lahan yang ada di kawasan, karena masih banyak lahan yang masih dikuasai oleh masyarakat (KPBPB Bintan dan KPBPB Karimun).

Untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tantangan pengembangan kawasan sebagai berikut: (i) pelimpahan kewenangan yang ada di masing-masing KEK belum optimal; (ii) perlu adanya kesesuaian pengelolaan kawasan KEK dengan RTRW Kab/Kota/Provinsi di wilayah KEK berlokasi; (iii) kebutuhan infrastruktur yang belum memadai salah satunya disebabkan kurang siapnya lokasi KEK terpilih.

9.2.1.8 Kawasan Perbatasan

Pembangunan kawasan perbatasan terutama di wilayah kecamatan terluar perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar (PPKT) hingga tahun 2013 secara umum masih menghadapi beberapa isu utama meliputi: (i) keterisolasian wilayah sebagai penghambat aksesibilitas dan mobilitas barang/jasa dan orang serta pertumbuhan ekonomi lokal; (ii) pelayanan pendidikan yang belum terjangkau oleh masyarakat perbatasan; (iii) pelayanan kesehatan yang belum terjangkau oleh masyarakat perbatasan; (iv) ketersediaan energi yang belum memadai

dan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan kawasan perbatasan; dan (v) kualitas pengelolaan batas wilayah yang masih rendah.

Permasalahan dan tantangan yang diperkirakan dihadapi pada tahun 2014, terutama yaitu:

1. Masih rendahnya kapasitas kelembagaan koordinasi baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, sehingga upaya akselerasi percepatan pembangunan perbatasan masih belum optimal.
2. Hambatan dalam pengembangan infrastruktur dan perekonomian kawasan perbatasan yang disebabkan belum tuntasnya Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan, serta peraturan-peraturan yang masih menghambat investasi.
3. Keterbatasan infrastruktur wilayah dan fasilitas sosial ekonomi, terutama infrastruktur transportasi darat, dan laut, energi terutama listrik dan bahan bakar, air bersih, pendidikan, kesehatan, pasar, telekomunikasi, akibatnya aktivitas ekonomi masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam belum banyak nilai tambah yang diusahakan, serta aktivitas pelayanan pendidikan dan kesehatan masih sangat terbatas.
4. Banyak kondisi patok batas wilayah kondisinya kurang memadai dari segi kualitas maupun kuantitas, sehingga pergeseran patok batas, maupun pelanggaran lintas batas sering terjadi.
5. Lemahnya pengawasan di sepanjang garis perbatasan di darat maupun perairan di sekitar pulau-pulau terluar, yang mengakibatkan kegiatan illegal dalam pemanfaatan sumber daya maupun kegiatan kejahatan lainnya.
6. Masih belum solidnya kualitas tim perundingan batas negara dalam diplomasi segmen garis batas baik di darat maupun di laut yang belum disepakati, terutama kesiapan data dan materi perundingan.

9.2.1.9 Daerah Tertinggal

Permasalahan pembangunan daerah tertinggal yang mendesak untuk diselesaikan di tahun 2014 adalah : (i) masih lemahnya koordinasi lintas sektor dan koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah dalam pengarusutamaan percepatan pembangunan daerah tertinggal; (ii) belum optimalnya fasilitasi upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal oleh para

pelaku pembangunan, terutama menghadapi beragamnya bentuk dan intensitas permasalahan antar daerah tertinggal.

Permasalahan dan tantangan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2013 ini, terutama yaitu :

1. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya lokal di daerah tertinggal. Hal tersebut disebabkan oleh rendahnya kemampuan permodalan, penguasaan teknologi, informasi pasar dan investasi dalam pengembangan produk unggulan daerah;
2. Kurangnya dukungan infrastruktur jalan, transportasi, energi dan telekomunikasi di daerah tertinggal. Dukungan infrastruktur bertujuan untuk membuka keterisolasian daerah khususnya yang masih terisolir dan meningkatkan aksesibilitas sentra-sentra produksi terhadap pusat-pusat pertumbuhan dan pemasaran;
3. Program-program penanggulangan kemiskinan masih parsial dan belum menjawab permasalahan utama yang sesuai dengan karakteristik daerah tertinggal;
4. Rendahnya kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal. Hal tersebut tercermin dari terbatasnya jumlah tenaga pendidikan dan kesehatan dan umumnya belum terdistribusi secara merata di desa-desa terpencil dan terisolir. Masalah lainnya adalah masih terbatasnya sarana pendidikan dan kesehatan di daerah tertinggal, termasuk rumah dinas bagi tenaga pendidikan dan kesehatan, serta minimnya akses pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

9.2.1.10 Kawasan Rawan Bencana

Permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan pada tahun 2014, yaitu:

1. Masih kurangnya kesadaran beberapa/sebagian pemerintah daerah dalam pengintegrasian aspek pengurangan risiko bencana dalam kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah dan masih minimnya instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang memuat aspek mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

2. Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam pengurangan risiko bencana.
3. Ketersediaan infrastruktur kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini serta kapasitas antisipatif yang kurang memadai dalam menghadapi berbagai ancaman bencana, ditambah faktor kerentanandan ancaman yang semakin meningkat dan pemahaman masyarakat tentang pengurangan risiko bencana belum memadai.
4. Belum optimalnya koordinasi antar Pemerintah, pemerintah daerah maupun pihak-pihak terkait dalam penanganan korban bencana dan pengungsi, terutama pendistribusian bantuan yang berasal dari swasta dan masyarakat belum terkoordinir dengan baik.
5. Keberlanjutan pemulihan pasca berakhirnya rehabilitasi dan rekonstruksi di Mentawai dan erupsi Gunung Merapi di wilayah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah.
6. Peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana dengan seluruh pemangku kepentingan, terutama sinergitas antar program/kegiatan di kementerian/lembaga.
7. Masih rendahnya komitmen dan kesadaran pemerintah daerah dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan penanggulangan bencana, akibatnya ketergantungan pendanaan terhadap pemerintah pusat sangat besar.
8. Pengendalian banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

9.2.1.10 Desentralisasi, Hubungan Pusat Daerah, dan Antardaerah

Beberapa permasalahan terkait pelaksanaan desentralisasi dan peningkatan kualitas hubungan pusat daerah dan antardaerah, mencakup permasalahan penataan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan, penataan daerah, kerjasama daerah, dan pengawasan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Beberapa permasalahan dalam Penataan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan mencakup:
 - (i) Penyusunan revisi PP No. 38 Tahun 2007 yang terkendala karena masih menunggu penetapan atas revisi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

- (ii) Pemahaman Pemerintah daerah terhadap regulasi terkait dengan kewenangan daerah belum optimal;
 - (iii) Belum seluruh sektor menyusun NSPK; dan
 - (iv) Masih ada peraturan perundang-undangan sektor yang berpotensi belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otda sehingga membutuhkan harmonisasi.
2. Penataan daerah, mencakup:
 - (i) Masih banyaknya desakan untuk melaksanakan pemekaran daerah, hal ini ditandai dari masih terdapatnya usulan pemekaran wilayah walaupun telah adanya kebijakan moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) didalam RPJMN 2010-2014;
 - (ii) Perlu dilakukan evaluasi terhadap DOB yang telah terbentuk; dan
 - (iii) Perlu digunakannya Desartada sebagai salah satu acuan evaluasi usulan pembentukan DOB.
 3. Peningkatan kerjasama daerah, mencakup:
 - (i) Masih terdapat kesepakatan yang belum ditindaklanjuti dengan perjanjian;
 - (ii) Daerah belum dapat mengimplementasikan peraturan perundangan terkait kerjasama daerah secara komprehensif;
 - (iii) Perlu didukung kerjasama antar-Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya dalam penanganan kawasan perbatasan, pengurangan kesenjangan antarwilayah dan penyediaan pelayanan publik; dan
 - (iv) Belum semua kabupaten membuat peraturan bupati tentang pelimpahan kewenangan.
 4. Pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah terhambat disebabkan oleh pelaporan kinerja pemerintahan oleh pemerintah daerah yang tidak tepat waktu.

9.2.1.11 Tata Kelola dan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Dalam hal tata kelola dan kapasitas pemerintah daerah, beberapa pokok permasalahan yang perlu ditangani menyangkut Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD, Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, serta Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan dalam peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD,

mencakup:

- (i) Revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang saat ini masih menunggu revisi UU 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah.
 - (ii) Masih ada peraturan perundang-undangan sektor yang berpotensi belum sejalan dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah.
2. Permasalahan dalam peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD terutama berkaitan dengan penempatan yang tidak sesuai kompetensi dan mutasi pegawai yang relatif cepat.
 - (i) Kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keangan daerah yang belum optimal;
 - (ii) Belum semua daerah menyusun rencana target capaian SPM, menghitung kebutuhan biaya (costing), dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan serta penganggaran.

9.2.2 Sasaran

9.2.2.1 Data Dan Informasi Spasial

Sasaran prioritas bidang data dan informasi spasial yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah: (i) meningkatnya koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional; (ii) meningkatnya kuantitas dan kualitas data dan informasi spasial, dengan memprioritaskan pada tersedianya data spasial untuk mendukung pembangunan wilayah koridor ekonomi Indonesia dan wilayah prioritas pembangunan nasional lainnya (KEK dan KAPET); (iii) meningkatnya akses terhadap data dan informasi spasial; dan (iv) meningkatnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan.

9.2.2.2 Penataan Ruang

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai oleh Prioritas Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah: (i) penyelesaian dan terlengkapinya peraturan operasionalisasi UU 26/2007 tentang Penataan Ruang; (ii) pelaksanaan pembinaan penataan ruang, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan serta peningkatan kemampuan aparat perencana maupun pelaksana pengendalian pemanfaatan ruang, baik di tingkat pusat maupun di daerah, untuk menjamin pelaksanaan RTR yang semakin berkualitas serta dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif; (iii) perwujudan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang terutama melalui dukungan sistem informasi dan monitoring penataan ruang di daerah untuk mengurangi terjadinya konflik pemanfaatan ruang antar sektor, antar wilayah dan antar pemangku kepentingan; (iv) perwujudan peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penetapan peraturan zonasi, perijinan dan pemberian insentif serta penenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (v) pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan penataan ruang baik di tingkat pusat dan daerah dalam rangka menjamin kesesuaian antara rencana tata ruang dan implementasinya; dan (vi) sinkronisasi rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.

9.2.2.3 Pertanahan

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pertanahan agar lebih berkontribusi dalam pembangunan dan perbaikan kesejahteraan masyarakat banyak, sasaran yang perlu dicapai pada tahun 2014 adalah :

1. Peningkatan penyediaan peta pertanahan.

Oleh karena peta pertanahan baru mencapai sekitar 11,35 persen dari total luas daratan Indonesia, maka diperlukan penyediaan peta pertanahan sebesar 2,8 juta hektar di tahun 2014 untuk mencapai 14,27 persen dari 191,9 juta ha total luas daratan Indonesia.

2. Percepatan legalisasi aset tanah.

Selain memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah, sertipikat hak atas tanah juga diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengakses sumberdaya produktif seperti permodalan. Pada tahun 2014, legalisasi aset

tanah yang dibiayai pemerintah ditargetkan sekitar 865.316 bidang sehingga pada akhir Tahun 2014 diharapkan 52,82 persen dari total bidang tanah di Indonesia telah disertipikatkan.

3. Penertiban tanah terindikasi terlantar.
Tanah terindikasi terlantar masih cukup luas, pada tahun 2008 tercatat 7,2 juta hektar. Di sisi lain, kebutuhan tanah untuk pembangunan terus meningkat, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi. Pada Tahun 2014 ditargetkan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar seluas 466 SP atau 233.000 hektar.
4. Penataan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T).

Untuk menyeimbangkan kepemilikan dan penguasaan tanah sehingga adanya keseimbangan dalam penguasaan tanah maka perlu dilakukan kegiatan inventarisasi pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) dan redistribusi tanah. Pada Tahun 2014 kegiatan inventarisasi pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) ditargetkan sebesar 182.300 bidang dan untuk kegiatan redistribusi tanah ditargetkan sebesar 154.075 bidang.

9.2.2.4 Perkotaan

Sasaran pembangunan perkotaan yang akan dicapai pada tahun 2013-2014 adalah:

1. Disempurnakannya kebijakan dan regulasi pembangunan perkotaan yang dapat menjadi payung bagi penyelenggaraan pembangunan perkotaan dan basis kerjasama antar pemangku kepentingan.
2. Tersusunnya basis data yang dapat mendukung penyusunan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan.
3. Terlaksananya kerjasama antar kota, termasuk koordinasi pembangunan perkotaan di tingkat pusat, sektor, maupun daerah, serta lembaga pengelola kawasan perkotaan/ metropolitan.
4. Meningkatnya penyediaan pelayanan publik sesuai SPP

yang merata antar tipologi kota.

5. Terlaksananya peningkatan kapasitas pemerintah kota dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan pembangunan perkotaan.
6. Terlaksananya peningkatan implementasi rencana tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan, termasuk perizinan pemanfaatan ruang.
7. Terlaksananya peningkatan dan penataan sektor informal di perkotaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan.

9.2.2.5 Perdesaan

Sasaran pembangunan perdesaan yang akan dicapai tahun 2014 adalah :

1. Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan kepada pemerintah desa dan kelembagaan desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa dan pemerintahan desa yang didukung dengan peraturan perundangan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat desa.
2. Meningkatnya fasilitasi keberdayaan masyarakat perdesaan termasuk pemberdayaan perempuan, perlindungan masyarakat adat, meningkatnya taraf pendidikan, dan kesehatan.
3. Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan dalam pengembangan ekonomi perdesaan, melalui bantuan permodalan/kredit, fasilitasi pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan, peningkatan kesempatan berusaha, penyediaan sarpras produksi-pengolahan-pemasaran, dsb.
4. Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan dalam pembangunan sarana prasarana perdesaan melalui peningkatan akses dan ketersediaan sarana prasarana transportasi, perumahan, permukiman, listrik, energi, komunikasi, jalan, dsb.
5. Meningkatnya fasilitasi dan pembinaan dalam peningkatan kesadaran pemerintah dan masyarakat dalam peningkatan ketahanan pangan serta pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup yang berkelanjutan, berwawasan mitigasi bencana, dan penguatan lembaga pengelola cadangan pangan.

9.2.2.6 Ekonomi Lokal dan Daerah

Sasaran dari pengembangan ekonomi lokal dan daerah untuk 2014 adalah:

1. Meningkatnya komitmen Kepala Daerah untuk melimpahkan kewenangan perijinannya kepada lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
2. Mendorong terbentuknya dan berfungsinya forum stakeholder di daerah secara lebih optimal.
3. Meningkatnya jumlah pendamping/penyuluh di daerah dan akses terhadap fasilitasi dari pemerintah dan swasta dalam pengembangan ekonomi lokal.
4. Meningkatnya jumlah kerjasama antar daerah di bidang ekonomi dan kemitraan pemerintah-swasta dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
5. Meningkatnya komitmen Kepala Daerah dalam menyediakan lahan yang sudah *clean and clear*, serta pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan akses pasar.

9.2.2.7 Kawasan Strategis

Sasaran pengembangan kawasan strategis Tahun 2014, antara lain: (i) tersedianya infrastruktur dasar dan pendukung bagi pengembangan dan pengelolaan kawasan strategis pada 13 KAPET, 4 KPBPB, dan lokasi-lokasi KEK terpilih; (ii) terselesaikannya sejumlah peraturan lintas kementerian dan pemerintah daerah yang sinergi dalam mendukung pengelolaan dan kelembagaan di 13 KAPET, 4 KPBPB, dan KEK, diantaranya melalui kebijakan insentif fiskal dan insentif non fiskal, pelimpahan kewenangan, dan kemudahan penyediaan (pembebasan) lahan; dan (iii) pertumbuhan aktivitas ekonomi dan nilai investasi kawasan pada 13 KAPET, 4 KPBPB, dan KEK yang memberikan nilai tambah pada kesejahteraan dan penyerapan tenaga kerja.

Fokus sasaran tersebut dapat dijabarkan secara spesifik berdasarkan tipe kawasan sebagai berikut: untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), sasaran tahun

2014 meliputi: (i) dihasilkannya dokumen akademik dan basis legal (RTR dan Raperpres Pengelolaan KAPET) sebagai landasan hukum dan kerja revitalisasi KAPET kedepan; (ii) tersusunnya rancangan Road Map dan Rencana Induk pengelolaan KAPET di daerah sebagai panduan penghimpun komitmen program/kegiatan dan pendanaan lintas sektor dan kerjasama antara daerah (APBN&APBD) terkait pengembangan KAPET, dan (iii) Penyiapan BKPM sebagai partner lembaga pengusaha KAPET di daerah untuk berperan sebagai *front office promotion investment* dalam pengembangan KAPET setelah proses revitalisasi KAPET tuntas.

Untuk Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (KPBPB), sasaran tahun 2014 meliputi: (i) terselesaikannya sejumlah peraturan lintas kementerian dan daerah; (ii) Terwujudnya kerjasama perdagangan di tingkat regional dan sub-regional (ASEAN): Singapura, Malaysia, China, Thailand, dll); (iii) Tercapainya standar pelayanan internasional dalam pengelolaan kawasan.

Untuk Kawasan Ekonomi Khusus, sasaran di tahun 2014 meliputi: (i) terlaksananya koordinasi kawasan strategis dibidang pengembangan KEK melalui penyelesaian peraturan perundang-undangan, pengalihan kewenangan, dan kerjasama antar wilayah; (ii) penajaman kriteria dan proses seleksi kawasan calon KEK dengan fokus pada lokasi-lokasi champion regional; (iii) peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan KEK; (iv) terpromosikannya lokasi-lokasi KEK; (v) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Renaksi KEK.

9.2.2.8 Kawasan Perbatasan

Pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2014 difokuskan pada keberlanjutan pembangunan di 71 kecamatan lokpri, terdiri atas 39 kecamatan lokpri I (tahap lanjutan) dan 32 kecamatan lokpri II (tahap awal) serta penambahan 40 lokpri untuk mencapai target 2014 sebanyak 111 Lokasi prioritas kecamatan. Sasaran prioritas bidang pembangunan kawasan perbatasan pada tahun 2014 merupakan kelanjutan dari sasaran pembangunan tahun 2013 sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional 2010-2014, terutama, yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur transportasi di Lokpri perbatasan,
2. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana logistik di Lokpri perbatasan,
3. Terpenuhinya dokumen rencana detil tata ruang di kecamatan Lokpri perbatasan,
4. Terkelolanya potensi laut dan potensi darat di kecamatan lokpri perbatasan,
5. Terbangunnya infrastruktur ekonomi dan kesra di kecamatan lokpri perbatasan,
6. Terbangunnya infrastruktur pemerintahan di kecamatan lokpri perbatasan,
7. Terpenuhinya kebutuhan tenaga pengajar berkualitas beserta insentifnya (rumah dinas, tunjangan khusus) di kecamatan lokpri perbatasan,
8. Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana mendasar bidang pendidikan di kecamatan Lokpri,
9. Terpenuhinya peningkatan sarana prasarana dasar pendukung pelayanan kesehatan yang mudah menjangkau masyarakat di kecamatan lokpri perbatasan,
10. Terpenuhinya kebutuhan listrik secara murah dan berkesinambungan di kecamatan lokpri perbatasan,
11. Terbangunnya patok batas, tugu batas, prasasti batas, dan pos lintas batas tradisional serta pos pengamanan perbatasan di kecamatan lokpri perbatasan,
12. Meningkatnya kualitas tim perundingan Indonesia dan ditunjang oleh data dan materi perundingan yang memadai.

9.2.2.9 Daerah Tertinggal

Sasaran-sasaran pokok pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2014 adalah meningkatnya kinerja pembangunan daerah tertinggal yang tercermin dari:

1. Meningkatnya rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sebesar 7,1 persen pada tahun 2014.
2. Berkurangnya persentase penduduk miskin di daerah tertinggal hingga mencapai rata-rata

9.2.2.10 Kawasan Rawan Bencana

sebesar 14,2 persen pada tahun 2014.

3. Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia di daerah tertinggal yang diindikasikan oleh rata-rata Indeks pembangunan manusia (IPM) pada tahun 2014 menjadi 72,2.

Pada tahun 2014, sasaran pembangunan yang akan dicapai dalam upaya peningkatan kemampuan pengelolaan bencana, meliputi:

1. Terintegrasinya kebijakan pengurangan risiko bencana dalam sistem perencanaan pembangunan daerah dan pemanfaatan ruang.
2. Meningkatnya kapasitas dan pemahaman masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pelibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
3. Penyediaan infrastruktur kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara dan sarana prasarana pendukungnya), sistem peringatan dini dalam rangka meningkatkan antisipasi ancaman bencana alam, yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat.
4. Terlaksananya penanganan kedaruratan yang efektif dan efisien melalui peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan dan sumber daya penanggulangan bencana.
5. Terlaksananya pemulihan wilayah pasca bencana melalui peningkatan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
6. Sinkronisasi dan sinergitas perencanaan penanggulangan bencana pusat dan daerah.
7. Meningkatkan komitmen dan kesadaran pemerintah daerah provinsi/kabupaten dan kota terhadap alokasi anggaran program/kegiatan penanggulangan bencana.
8. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan normalisasi sungai-sungai di wilayah DKI Jakarta dalam rangka antisipasi dan penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

9.2.2.11 Desentralisasi, Hubungan Pusat Daerah Dan Antardaerah

Dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan desentralisasi, hubungan pusat daerah, dan antar daerah ini, terdapat beberapa hal yang menjadi sasaran fokus pada tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan, mencakup: (i) Terselesaikannya peraturan pelaksana atas Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (ii) meningkatnya pelaksanaan urusan yang sesuai dengan pembagian urusan pemerintah dan pemerintahan daerah; (iii) terlaksananya harmonisasi peraturan perundang-undangan sektor dengan peraturan perundang-undangan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah; (iv) tersusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) seluruh bidang (31 bidang) urusan oleh K/L dan fasilitasi implementasi NSPK; dan (v) tersusunnya kebijakan penyempurnaan pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan dalam revisi UU No. 32 Tahun 2004.
2. Penataan Daerah, yaitu terlaksananya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Daerah Otonom Baru dengan tetap memfokuskan pada program moratorium (DOB).
3. Peningkatan Kerja Sama Daerah, mencakup: (i) optimalnya pelaksanaan kerjasama daerah terfokus pada bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik; (ii) Pemuktahiran pemetaan tentang kesuksesan dan kegagalan pelaksanaan kerjasama daerah; (iii) Meningkatnya daerah yang menerima manfaat dari kerja sama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana, dan pelayanan publik.

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, mencakup: (i) peningkatan kinerja pemerintahan daerahnya dalam penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah; (ii) makin sempurnanya peraturan pelaksana dan perangkat evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; (iii) terlaksananya pengkajian perda; (iv) terlaksananya penyelesaian penyusunan

peraturan pelaksanaan UU hasil revisi UU No. 32 Tahun 2004.

9.2.2.12 Tata Kelola Dan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Dalam upaya peningkatan tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah, terdapat beberapa hal yang menjadi sasaran fokus pada tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD, mencakup: tersusun dan terlaksananya PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta peraturan-peraturan pelaksanaannya di seluruh daerah; (ii) terlaksananya penerapan SPM yang efektif dan efisien oleh daerah; (iii) terlaksananya monitoring dan evaluasi SPM; (iv) meningkatnya kemampuan SDM daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinan daerah, legislasi, penganggaran, pengawasan, inovasi pemerintahan dan pembangunan serta kemampuan mengharmonisasi peraturan perundangan.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, mencakup: Pelaksanaan *Grand Strategy* Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan (Diklat) di 33 provinsi.
3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, mencakup: (i) peningkatan persentase jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah memanfaatkan DAK sesuai petunjuk pelaksanaan dan meningkatkan persentase daerah yang telah optimal dalam penyerapan DAK; (ii) peningkatan pencapaian jumlah kabupaten/kota yang jumlah persentase rata-rata belanja langsung lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung; (iii) peningkatan jumlah APBD yang disahkan secara tepat waktu; (iv) peningkatan persentase rata-rata perolehan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD kabupaten/kota dan provinsi, serta hasil penerimaan investasi dan barang milik

daerah terhadap PAD; (v) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.

9.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014

9.3.1 Pembangunan Data Dan Informasi Spasial

Pada tahun 2014, kebijakan yang akan ditempuh adalah menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pemetaan seluruh wilayah nasional serta memperkuat daya saing perekonomian nasional melalui penyediaan data dan informasi spasial, dengan memusatkan perhatian pada penyediaan data spasial untuk wilayah-wilayah prioritas pembangunan nasional (koridor ekonomi Indonesia, KEK dan KAPET). Berdasarkan arah kebijakan tersebut, strategi prioritas bidang data dan informasi spasial yang akan dilaksanakan pada tahun 2014 adalah: (i) meningkatkan koordinasi kegiatan survei dan pemetaan nasional; (ii) meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi spasial, dengan memprioritaskan pada upaya menyediakan data spasial berupa peta dasar dan tematik untuk mendukung percepatan penyusunan RDTR sebagian Kabupaten/Kota di wilayah koridor ekonomi Indonesia dan wilayah prioritas pembangunan nasional lainnya (KEK dan KAPET); (iii) meningkatkan akses terhadap data dan informasi spasial; dan (iv) meningkatkan kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia di bidang survei dan pemetaan.

9.3.2 Penyelenggaraan Penataan Ruang

Berdasarkan permasalahan dan sasaran penyelenggaraan penataan ruang, arah kebijakan penyelenggaraan penataan ruang difokuskan pada:

1. Penetapan **32 (tiga puluh dua)** RTR KSN Non Perkotaan, yaitu RTR Kawasan Ekosistem Leuseur, RTR Kawasan Taman Nasional Komodo, RTR Kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, RTR Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Teluk Bintuni, RTR Kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, RTR Kawasan Hutan Lindung Bukit Batabuh, RTR Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat, RTR Kawasan Konservasi dan Wisata Daerah Aliran Sungai Tondano, RTR Kawasan Gunung Rinjani, RTR Kawasan Kritis Lingkungan

Balingara, RTR Kawasan Kritis Lingkungan Buol Lambunu, RTR Kawasan Taman Nasional Rawa Aopa-Watumohai dan Rawa Tinondo, RTR Poso dan Sekitarnya, RTR Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas, RTR Kawasan Toraja dan Sekitarnya, RTR Kawasan Laut Banda, RTR KSN Timika, RTR Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat, RTR KSN Pacangsanak, RTR KAPET Batulicin, RTR KAPET Khatulistiwa, RTR KAPET Seram, RTR KAPET Mbay, RTR KAPET Banda Aceh Darussalam, RTR KAPET Bima, RTR KAPET Biak, RTR KAPET DAS Kahayan Kapuas dan Barito, RTR KAPET Bank Sejahtera Sultra, RTR KAPET Palapas, RTR KAPET Sasamba, KAPET Pare-Pare, KAPET Manado Bitung;

2. Proses penyusunan 15 (lima belas) Raperpres RTR Kawasan Non Perkotaan, yaitu: RTR Kawasan Taman Nasional Lorentz, RTR Kawasan Candi Prambanan, dan 13 (tiga belas) KSN Teknologi Tinggi;
3. Proses penyusunan materi teknis 4 (empat) RTR KSN Non Perkotaan yaitu RTR KSN Kawasan Industri Lhokseumawe, RTR KSN Mahato, RTR KSN Bukit Duabelas, dan RTR KSN Berbak;
4. Fasilitasi dan bimbingan teknis Rencana Rinci Tata Ruang provinsi, kabupaten, kota;
5. Pendampingan penyusunan Peraturan Zonasi;
6. Penyerasian peraturan pelaksanaan UU 26/2007 dengan peraturan pelaksanaan UU sektoral terkait;
7. Peningkatan dan perluasan pelaksanaan program-program unggulan kota tematik antara lain Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH), Program Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka (P3KP), dan Program Pengembangan Kawasan Perdesaan Berkelanjutan (P2KPB);
8. Penguatan kelembagaan penataan ruang, salah satunya melalui pelatihan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).

9.3.3 Pengelolaan Pertanahan

Arah kebijakan prioritas bidang pertanahan adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan pertanahan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya melalui strategi:

1. Peningkatan penyediaan peta pertanahan

Ketersediaan peta pertanahan yang baru mencakup 10persen dari luas daratan Indonesia akan dapat berakibat pada ketidakpastian jaminan hak atas tanah dan meningkatnya resiko sengketa pertanahan. Secara tidak langsung juga akan berpengaruh terhadap iklim investasi dan iklim usaha. Untuk itu peningkatan penyediaan peta pertanahan agar mencapai 13,91 persen dari 191,9 juta ha total luas daratan Indonesia menjadi hal yang penting untuk mendukung kegiatan legalisasi (sertifikasi) aset tanah. Peningkatan penyediaan peta pertanahan dapat dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang ada serta dengan penggunaan dan penguasaan teknologi penginderaan jauh dan citra satelit. Lokasi penyelesaian peta pertanahan dapat diarahkan pada wilayah koridor percepatan pembangunan sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana MP3EI.

2. Percepatan legalisasi aset tanah

Kepastian legalitas aset tanah masyarakat dalam bentuk sertipikat hak atas tanah disamping dapat memberikan jaminan juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber-sumber ekonomi masyarakat terutama dalam rangka penguatan modal usaha, sehingga dapat mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu percepatan legalisasi aset tanah merupakan hal yang penting untuk mewujudkan fokus dari arah pembangunan nasional dibidang pertanahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mempercepat legalisasi aset tanah adalah dengan mensinergikan antar kegiatan sertifikasi seperti swadaya, PRONA, LARASITA, dan sertifikasi nelayan, petani, UMKM, dan MBR melalui kerjasama dengan K/L lain untuk tahap persiapan pra sertifikasi.

Disamping itu, dapat juga dilakukan melalui pengurangan biaya tambahan bagi masyarakat untuk memperoleh bukti-bukti pendukung alas hak atas tanahnya serta menyesuaikan besaran BPHTB yang harus dibayar masyarakat.

3. Penertiban tanah terindikasi terlantar

Berdasarkan data dari BPN, dari 7.218.401,3 Ha Tanah Hak yang telah di inventarisasi, terdapat indikasi terlantar seluas: 4.801.875,5 Ha. Angka ini menunjukkan besarnya luas lahan yang terindikasi terlantar yang dapat dimanfaatkan oleh negara untuk mendukung program-program yang telah ditetapkan seperti ketahanan pangan dan energi. Sesuai dengan amanat PP 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, maka penetapan tanah negara bekas tanah terlantar harus didayagunakan untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui reforma agraria, program strategis negara, serta untuk cadangan negara lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah terindikasi terlantar menjadi sangat penting karena secara umum tanah yang ditetapkan sebagai TORA adalah tanah negara bekas tanah terlantar, tanah negara yang berasal dari pelepasan kawasan hutan, kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, dan sumber lainnya. Tanah sumber lainnya dapat berasal dari: tanah negara bebas, tanah negara bekas hak barat, tanah negara berasal dari tanah timbul, tanah negara bekas swapraja, tanah negara bekas kawasan pertambangan, tanah yang berasal dari tukar menukar atau perbuatan hukum keperdataan lainnya dalam rangka reforma agraria, atau tanah yang secara sukarela diserahkan oleh pemegang haknya kepada negara. Dari berbagai jenis sumber TORA tersebut, karena faktor kelangkaan mengingat kegiatan redistribusi tanah telah dilakukan sejak Tahun 1961, relatif hanya tanah terlantar dan kawasan hutan yang telah dilepaskan yang masih cukup tersedia.

4. Penataan pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T)

Dalam rangka mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah dan menyeimbangkan kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut maka perlu dilakukan kegiatan inventarisasi pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (IP4T) dan redistribusi tanah. Inventarisasi P4T ini akan menghasilkan informasi mengenai status kepemilikan lahan dan pemanfaatan lahan di suatu bidang tanah sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan redistribusi tanah dan juga pembebasan lahan bagi pembangunan kepentingan umum yang sering terkendala pengadaan tanah.

9.3.4 Pembangunan Perkotaan

Pembangunan perkotaan Indonesia di masa depan diarahkan pada peningkatan peran perkotaan sebagai basis pembangunan yang mampu mewujudkan kota yang layak huni, berkeadilan, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan sesuai dengan karakter potensi dan budaya lokal. Perwujudan kota masa depan yang ideal perlu dibarengi dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dalam melaksanakan kebijakan dan strategi perkotaan sesuai target dan tahapan yang telah disusun.

Arah kebijakan pembangunan perkotaan hingga tahun 2014 tetap berfokus pada pengembangan kota sebagai suatu kesatuan kawasan/wilayah, yaitu kota sebagai pendorong pertumbuhan nasional dan regional serta kota sebagai tempat tinggal yang berorientasi pada kebutuhan penduduk kota. Walaupun demikian, pembangunan perkotaan ke depan akan lebih difokuskan pada pelaksanaan pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan serta percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil.

Pengendalian pembangunan kota-kota besar dan metropolitan difokuskan pada upaya-upaya penguatan kelembagaan dan kerjasama antarkota melalui revitalisasi badan kerjasama kawasan metropolitan, peningkatan fasilitasi pemerintah daerah dalam pengembangan Kota Hijau dan penyusunan peraturan daerah terkait pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana, peningkatan penyediaan pelayanan publik untuk peningkatan daya saing pada tingkat

internasional di kota-kota metropolitan dan besar, serta peningkatan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan. Sedangkan percepatan pembangunan kota-kota menengah dan kecil difokuskan pada upaya-upaya peningkatan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan melalui peningkatan pengelolaan pasar tradisional, fasilitasi pelaksanaan agenda reformasi dasar tata kelola pemerintahan, dan fasilitasi pengembangan ekonomi lokal, serta penyediaan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk kota menengah dan kecil.

Arah kebijakan pembangunan kawasan perkotaan untuk tahun 2014 berdasarkan evaluasi pencapaian kinerja empat tahun sebelumnya, diwujudkan dalam 8 (delapan) fokus prioritas sebagai berikut:

1. Menyiapkan kebijakan pembangunan perkotaan dan meningkatkan sinkronisasi peraturan perundangan terkait pembangunan perkotaan, dengan:
 - a. Menyiapkan rancangan peraturan perundangan tentang perkotaan;
 - b. Menyiapkan pembentukan forum koordinasi pembangunan perkotaan;
 - c. Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) terkait pembangunan perkotaan.
 - d. Menyiapkan kebijakan pembangunan perkotaan menuju kota masa depan.
2. Menurunkan tingkat kemiskinan perkotaan, yang dilakukan dengan:
 - a. Fasilitasi Pemerintah Daerah dalam pemanfaatan lahan untuk perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 - b. Menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan di perkotaan, termasuk peningkatan peran Pedagang Kaki Lima (PKL) dan peremajaan kawasan kumuh.
 - c. Pendampingan pemberdayaan sosial (P2KP/PNPM).
 - d. Menurunkan tingkat kerawanan sosial dan kriminalitas melalui fasilitasi pemerintah daerah terkait dengan pengendalian masalah sosial dan

penyakit menular di perkotaan.

3. Meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan modal sosial dan budaya di perkotaan, dilakukan dengan:
 - a. Fasilitasi kelembagaan masyarakat (LKM).
 - b. Fasilitasi kabupaten/kota dalam memelihara dan mengembangkan warisan budaya lokal.
4. Memperkuat kelembagaan dan kerjasama antarkota, dilakukan dengan:
 - a. Penyelenggaraan forum koordinasi dan kerjasama pembangunan perkotaan untuk mendukung peran kawasan metropolitan.
 - b. Meningkatkan kerjasama antarkota (*sister city* dan *city sharing*) dalam aspek infrastruktur dan pengembangan investasi.
 - c. Membangun infrastruktur terpadu dan industri di kota menengah untuk mendorong keterkaitan dengan ekonomikota-desa.
 - d. Memperkuat kapasitas pemerintah kota dalam perencanaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan pembangunan perkotaan, serta penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik, dilakukan dengan pelaksanaan Inovasi Pengelolaan Perkotaan (IMP).
5. Meningkatkan penanganan polusi lingkungan dan mitigasi bencana dalam pengelolaan perkotaan, dilakukan dengan:
 - a. Memberikan fasilitasi kepada pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas pengembangan perkotaan dan kapasitas kelembagaan yang memperhatikan pengelolaan lingkungan dan berwawasan mitigasi bencana.
 - b. Fasilitasi penyusunan kebijakan terkait pembangunan sanitasi dan pengelolaan sampah perkotaan.
6. Menyediakan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan, dilakukan dengan:
 - a. Meningkatkan pelayanan publik sesuai dengan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP), fasilitasi dan penyiapan kebutuhan perencanaan pembangunan perkotaan

- sesuai SPP.
- b. Meningkatkan penyelenggaraan penyerahan aset prasarana, sarana dan utilitas (PSU) dari pengembang ke pemerintah daerah.
 - c. Meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan pelayanan publik.
7. Meningkatkan implementasi rencana tata ruang perkotaan dan pengendalian pemanfaatan ruang perkotaan, dilakukan dengan:
 - a. Fasilitasi penyusunan perda terkait pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
 - b. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan rencana tata ruang dalam pembangunan perkotaan.
 - c. Menyiapkan mekanisme bank lahan untuk lahan terbangun perkotaan yang berpihak kepada kelompok masyarakat miskin perkotaan.
 8. Meningkatkan investasi dan pembangunan ekonomi di perkotaan, dilakukan dengan:
 - a. Mengembangkan potensi ekonomi lokal perkotaan melalui peningkatan pengelolaan pasar tradisional.
 - b. Menciptakan iklim usaha kondusif di kota-kota kecil dan menengah.

Meningkatkan kapasitas kelembagaan ekonomi perkotaan.

9.3.5 Pembangunan Perdesaan

Dalam rangka mewujudkan sasaran, kebijakan pembangunan perdesaan dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pembangunan perdesaan dalam rangka memenuhi pelayanan dasar melalui kecukupan penyediaan sarana prasarana dan pembangunan perdesaan dalam upaya membangun desa mandiri menuju daya saing desa.

Arah kebijakan pembangunan perdesaan tahun 2014 adalah meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memperkuat pembangunan dan memantapkan perekonomian nasional untuk peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan. Arah kebijakan tersebut diwujudkan dalam beberapa strategi yaitu:

1. Memperkuat kapasitas, peran, dan tata kelola pemerintahan desa dan kelurahan dalam meningkatkan

perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan terpadu serta meningkatkan pelayanan publik dan penggalan potensi lokal.

2. Meningkatkan kualitas dasar sumber daya manusia perdesaan, termasuk peningkatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan dasar dan kesehatan dasar serta ketahanan masyarakat di daerah tertinggal/perbatasan.
3. Meningkatkan keberdayaan masyarakat perdesaan melalui peningkatan partisipasi dan kapasitas masyarakat perdesaan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar masyarakat memiliki choice dan voice dalam proses pembangunan.
4. Meningkatkan ekonomi perdesaan termasuk meningkatkan kesempatan berusaha melalui peningkatan usaha ekonomi keluarga dan penguatan kelembagaan BUMDes/Kel, pengembangan sarana dan prasarana pemasaran dan informasi pasar, pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil menengah, serta peningkatan usaha pengolahan hasil.
5. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dasar perdesaan, termasuk peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi desa serta pembangunan permukiman, pembangunan kawasan transmigrasi dan penataan ruang perdesaan.
6. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perdesaan melalui pengembangan usaha ekonomi masyarakat pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan pengembangan lahan dikawasan transmigrasi.
7. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan mitigasi bencana melalui fasilitasi pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna serta penyerasian lingkungan di kawasan transmigrasi yang serasi dengan daya dukung sumberdaya alam.

9.3.6 Pengembangan Ekonomi Lokal Dan Daerah

Arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal pada tahun 2014 adalah meningkatkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota atau antara wilayah produksi dengan wilayah pusat pertumbuhan (hulu-hilir). Hal ini dapat dilakukan dengan memperkuat sistem tata kelola ekonomi yang baik dan dengan meningkatkan sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah sehingga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Arah kebijakan pengembangan ekonomi lokal dan daerah tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) fokus prioritas sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam perijinan usaha.
2. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola ekonomi daerah, terutama dalam perencanaan dan penganggaran program/ kegiatan pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
3. Meningkatkan fasilitasi/ pendampingan pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
4. Meningkatkan kerjasama antar daerah dalam pengembangan ekonomi lokal dan daerah.
5. Mengembangkan akses infrastruktur untuk peningkatan konektivitas dan pengembangan ekonomi lokal.

9.3.7 Pengembangan Kawasan Strategis

Berdasarkan identifikasi masalah dan sasaran capaian, maka arah kebijakan pengembangan kawasan strategis tahun 2014, difokuskan pada: (i) terciptanya efektifitas kelembagaan dan koordinasi dalam rangka pengembangan kawasan melalui sinergi penganggaran program/kegiatan lintas sektor, lintas pelaku usaha dan lintas wilayah terutama bagi penyediaan infastruktur; (ii) penyelesaian peraturan pendukung terkait dengan kebijakan insentif fiskal, non fiskal, pelimpahan kewenangan dan penyediaan (pembebasan) lahan; (iii) peningkatan laju investasi dan PDRB wilayah; (iv) peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal.

Fokus kebijakan tersebut selanjutnya dijabarkan secara spesifik berdasarkan tipe kawasan, sebagai berikut: untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), kebijakan tahun 2014 diarahkan pada bidang Pengembangan Kawasan meliputi:

1. Penyusunan Road Map dan Rencana Induk masing-masing KAPET yang selaras dengan kebijakan MP3EI dan RTRWN sebagai dasar pengembangan KAPET 25 tahun ke depan;
2. Penyusunan RTR KSN KAPET (13 KAPET) sebagai acuan pengembangan KAPET;
3. Menyiapkan rencana terpadu dan program investasi infrastruktur jangka menengah (RPJ12JM) untuk 13 KAPET.

Arah kebijakan KAPET pada bidang Kelembagaan difokuskan pada upaya finalisasi dan legalisasi Raperpres Pengelolaan KAPET yang berimplikasi pada:

1. Finalisasi bentuk kelembagaan Sekretariat Dewan Nasional KAPET sebagai pengganti Badan Pengembangan KAPET ditingkat pusat, yang bertanggung jawab terhadap perumusan arahan kebijakan dan sinkronisasi kebijakan nasional, wilayah, dan sektoral;
2. Badan Pengembang dan Badan Pengusahaan dilevel Kawasan akan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kesepakatan kerjasama korporasi antara Kabupaten/Kota di kawasan KAPET (mengacu pada PP No. 50 Tahun 2007);
3. Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) memfasilitasi hubungan kerja antara Badan Pengusahaan KAPET dan Pemerintahan Daerah melalui Badan Pengembang KAPET Daerah yang beranggotakan diantaranya para kepala daerah;
4. Pengembangan sumber daya manusia (SDM) terutama yang terkait dengan pengelolaan dan penerapan teknologi yang memberikan nilai tambah dan daya saing produk-produk unggulan.

Arah kebijakan KAPET pada bidang promosi investasi meliputi:

1. melaksanakan promosi dilevel pusat, kelancaran distribusi, dan pemasaran produk-produk unggulan lokal dengan membentuk *front office promotional investment*;
2. penyiapan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

Untuk Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), kebijakan tahun 2014 diarahkan pada:

1. Penyusunan peraturan pelimpahan wewenang yang mendorong penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), bagi fasilitas kepabeanan, cukai, dan kerjasama perpajakan khususnya bagi KPBPB Bintan dan KPBPB Karimun;
2. Pembenahan sistem BLU pada masa transisi dan transparansi pelaporan PNPB/BLU kepada Negara;
3. Penyusunan strategi dan kebijakan penganggaran lintas sektor dan wilayah terkait dengan penyediaan dan peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur dasar energi dan telekomunikasi, serta penyediaan fasilitas kepelabuhan laut dan udara yang memenuhi standar internasional;
4. Penyediaan jaringan jalan transportasi yang menghubungkan pelabuhan dengan kawasan industri sekitarnya, kawasan industri dengan kawasan industri lainnya, serta KPBPB dengan KPBPB lainnya (diantaranya Jembatan Batam-Bintan);
5. Penyelesaian masalah pembebasan dan status lahan;
6. Peningkatan sinergi kelembagaan antara Dewan Kawasan dan Badan Pengelola Kawasan dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Sementara itu, oleh karena Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) masih dalam tahap persiapan, maka kebijakan bidang pengembangan kawasan meliputi dan bidang investasi adalah:

1. Pemilihan lokasi KEK baru yang merupakan lokasi-lokasi champion yang relatif lebih siap minimal dari segi penyediaan infrastruktur dasar untuk memenuhi target 5 KEK sebagaimana target RPJMN 2010-2014;
2. Pematangan konsep dan rencana KEK yang telah terpilih;
3. Pelaksanaan promosi dan kerjasama dengan negara lain terutama terkait dengan lokasi KEK yang telah ditetapkan;

4. Percepatan penyelesaian dasar hukum dalam kemudahan perijinan, insentif fiskal dan fasilitas cukai lainnya sehingga dapat meningkatkan promosidan investasi di KEK;
5. Inisiasi penerapan *Electronic Government* dan *Electronic Monitoring*;
6. Inisiasi dan pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pada tahun 2014, Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK Bidang Transportasi Pedesaan diarahkan pada pengembangan sarana dan prasarana wilayah yang memiliki nilai strategis yang diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang potensial seperti Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) dan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, pariwisata, industri dan perdagangan. Hal ini ditujukan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penyediaan moda angkutan dari dan menuju kawasan strategis, serta keterkaitannya dengan wilayah sekitarnya (yaitu diantaranya: Kawasan Pesisir, Perbatasan dan Pulau-pulau terpencil). Dengan usulan total alokasi 750 Milyar, maka pada tahun 2014, diharapkan 125 Kabupaten dapat ditingkatkan konektivitas wilayahnya yang berimplikasi pada peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

Sejalan dengan hal tersebut, program/kegiatan kementerian/lembaga yang terkait dengan pengembangan kawasan strategis (KAPET, KPBPB, dan KEK) difokuskan diantaranya pada kegiatan pengembangan pelabuhan dan infrastruktur penunjang konektivitas antar kawasan serta kegiatan pengembangan komoditas unggulan terutama dibidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, serta destinasi pariwisata.

9.3.8 Pengembangan Kawasan Perbatasan

Dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000–2004 dinyatakan bahwa program pengembangan daerah perbatasan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kapasitas pengelolaan potensi kawasan perbatasan, dan memantapkan ketertiban dan keamanan daerah yang berbatasan dengan

negara lain. Sasarannya adalah terwujudnya peningkatan kehidupan sosial-ekonomi dan ketahanan sosial masyarakat, terkelolanya potensi wilayah, dan ketertiban serta keamanan kawasan perbatasan.

Berdasarkan isu strategis dan sasaran pembangunan kawasan perbatasan tahun 2014, kebijakan pembangunan kawasan perbatasan tahun 2014 akan diarahkan untuk “Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur wilayah, dan peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan sosial-ekonomi dasar, serta peningkatan pelayanan terpadu dan penguatan diplomasi yang didukung oleh pertahanan dan keamanan yang kuat”.

Sebagai penjabaran operasional dari strategi dan arah kebijakan tahun 2014 tersebut, Prioritas Bidang Pengembangan Kawasan Perbatasan tahun 2014 akan memuat 5 (lima) kegiatan prioritas yang merupakan lanjutan kegiatan tahun 2013 yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Kegiatan prioritas selengkapnya pada masing-masing fokus prioritas adalah sebagai berikut:

1. Fokus prioritas pembukaan keterisolasian wilayah sebagai penghambat aksesibilitas dan mobilitas barang/jasa dan orang serta pertumbuhan ekonomi lokal melalui 5 (lima) kegiatan prioritas: (i) penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas) dengan PKSN dan pusat pertumbuhan lainnya; (ii) percepatan penyusunan Rencana Detil Tata Ruang kecamatan lokasi prioritas dan Pulau-pulau Kecil Terluar; (iii) pengembangan potensi laut dan potensi darat di kecamatan lokpri dan PPKT; dan (iv) pengelolaan infrastruktur sosial ekonomi di kecamatan lokpri dan PPKT; (v) pengembangan infrastruktur pemerintahan di kecamatan lokpri dan PPKT.
2. Fokus prioritas peningkatan keterjangkauan pelayanan pendidikan berkualitas di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas) melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas: (i) penyediaan tenaga pengajar berkualitas beserta insentifnya (rumah dinas, tunjangan khusus) di

kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas); (ii) rehabilitasi sekolah dan penyediaan kelengkapan sarana belajar mengajar di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas); (iii) pembangunan sekolah satu atap berasrama di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas).

3. Fokus prioritas peningkatan keterjangkauan pelayanan kesehatan berkualitas di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas) melalui 2 (dua) kegiatan prioritas: (i) penyediaan tenaga kesehatan berkualitas beserta insentifnya (rumah dinas, tunjangan khusus) di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi prioritas) dan (ii) pembangunan puskesmas rawat inap di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas).
4. Fokus prioritas peningkatan keterjangkauan pelayanan energi (listrik dan bahan bakar), telekomunikasi dan informasi di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas) melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas: (i) penyediaan pembangkit energi listrik alternatif di kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas), (ii) distribusi BBM subsidi hingga kecamatan terluar perbatasan dan PPKT (lokasi Prioritas), dan (iii) penyediaan akses berupa prasarana telekomunikasi dan prasarana komunikasi untuk masyarakat di kawasan perbatasan.
5. Fokus prioritas peningkatan kualitas pengelolaan batas wilayah negara di kecamatan lokpri dan PPKT melalui 3 (tiga) kegiatan prioritas: (i) penegakan dan pembangunan batas wilayah negara di kecamatan lokpri dan PPKT; (ii) peningkatan kualitas pemeliharaan batas wilayah negara di kecamatan lokpri dan PPKT; dan (iii) penguatan data dukung dan koordinasi kebijakan dalam pelaksanaan diplomasi perbatasan.

9.3.9 Pembangunan Daerah Tertinggal

Memperhatikan permasalahan dan tantangan serta sasaran pembangunan daerah tertinggal pada tahun 2014, dan sejalan dengan tema RKP tahun 2014 yang menekankan pada "Pemantapan Perekonomian Nasional bagi Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat yang Berkeadilan”, maka arah kebijakan dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal difokuskan pada aspek “Pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan lokal di daerah tertinggal dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, antara daerah tertinggal dengan daerah tertinggal, dan antara daerah tertinggal dengan daerah maju”. Arah kebijakan ini selanjutnya ditempuh melalui strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik ketertinggalan suatu daerah.

Percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan melalui strategi sebagai berikut.

1. Strategi pengembangan ekonomi lokal di daerah tertinggal. Untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi lokal di daerah tertinggal, diperlukan:
 - a. Dukungan penguatan sentra produksi/klaster usaha skala mikro kecil dan menengah.
 - b. Pengembangan kawasan transmigrasi yang berada di daerah tertinggal, baik dari segi kualitas sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana kawasan transmigrasi.
 - c. Dukungan pengembangan dan pendayagunaan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan lokal.

Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan oleh sektor-sektor terkait dalam Bidang Ekonomi pada Bab III, Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Bab IV, dan Bidang Wilayah dan Tata Ruang dalam bab ini.

2. Strategi penguatan kelembagaan masyarakat dan pemerintah daerah untuk mendukung pengelolaan sumberdaya lokal di daerah tertinggal. Hal ini dilakukan melalui:
 - a. Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kelembagaan sosial masyarakat dan lembaga perekonomian lokal di daerah tertinggal.
 - b. Penguatan kelembagaan perlu didukung dengan kerjasama antarlembaga, sehingga terjadi sinergi peran yang baik dan terpadu dalam rangka mengoptimalkan pengembangan ekonomi lokal di

daerah tertinggal.

3. Strategi peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau di daerah tertinggal. Untuk itu diperlukan:
 - a. Perluasan pelayanan kesehatan khusus untuk daerah tertinggal.
 - b. Perluasan pelayanan kesehatan untuk pulau-pulau kecil terdepan (terluar) melalui pelayanan medik spesialis di RS bergerak.
 - c. Pemberian insentif khusus terhadap tenaga kesehatan yang didayagunakan di daerah tertinggal dan pulau kecil terdepan (terluar), serta pemberian Jamkesmas.

Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama pada Bab II dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

4. Strategi peningkatan pelayanan pendidikan yang berkualitas di daerah tertinggal. Untuk mengatasi rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan angkatan kerja di daerah tertinggal, diperlukan:
 - a. Penyediaan infrastruktur pendidikan dasar, menengah dan kejuruan yang berpola asrama untuk daerah tertinggal yang terpencil.
 - b. Penyediaan pendidikan dasar, menengah dan kejuruan, terutama pada pendidikan luar sekolah berupa pendidikan keterampilan hidup (life-skill) melalui lembaga kursus dan pelatihan lainnya yang berorientasi untuk meningkatkan kemampuan keterampilan ekonomi produktif.
 - c. Keberpihakan kepada daerah tertinggal untuk mendukung pemerataan tenaga pendidik melalui pemberian insentif khusus terhadap tenaga pendidik yang berada di daerah tertinggal, serta peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik di daerah tertinggal. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga pengajar pada berbagai daerah

khususnya di daerah tertinggal dan perbatasan dilakukan program sarjana mendidik di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (SM3T)

Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama pada Bab II, dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

3. Strategi peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur daerah tertinggal serta peningkatan aksesibilitas daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kondisi perekonomian masyarakat, diperlukan dukungan sarana dan prasarana yaitu pembangunan pasar tradisional, pembangunan jalan dan jembatan, transportasi keperintisan, permukiman, serta pembangunan sarana dan prasarana informatika di daerah tertinggal. Kegiatan tersebut merupakan koridor dalam rangka operasionalisasi arah kebijakan dan strategi pembangunan yang terdapat dalam Bidang Sarana dan Prasarana pada Bab V, dalam rangka percepatan pembangunan daerah tertinggal.

9.3.10 Penanggulangan Bencana Dan Pengurangan Resiko Bencana

Berdasarkan isu strategis dan sasaran penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana tahun 2014 serta memperhatikan Direktif Presiden terkait kebencanaan, kebijakan pembangunan bidang Penanggulangan Bencana dan Pengurangan risiko bencana, akan diarahkan untuk peningkatan kapasitas aparatur, kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana serta bahaya kebakaran di daerah, melalui:

1. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana sebagai prioritas pembangunan nasional dan daerah, melalui: (i) penyusunan rencana nasional penanggulangan bencana (Renas PB) 2015-2019 sebagai masukan dalam penyusunan RJPMN 2015-2019; (ii) penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB) dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana (RAD-PRB) di daerah dan (iii) penyusunan peta risiko (risk map) sebagai masukan bagi penyusunan perencanaan

pembangunan dan kebijakan penataan ruang yang memuat aspek pengurangan risiko bencana.

2. Penguatan kapasitas penanggulangan bencana di pusat dan daerah, melalui: (i) sosialisasi pengurangan risiko bencana; (ii) penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di daerah yang didukung dengan peralatan dan logistik yang memadai; (iii) penyusunan rencana kontinjensi dalam menghadapi bencana dan (iv) simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang dilengkapi dengan protap yang jelas dalam menghadapi bencana.
3. Peningkatan infrastruktur kesiapsiagaan (shelter/tempat evakuasi sementara dan sarana prasarana pendukungnya), sistem peringatan dini dalam rangka meningkatkan antisipasi ancaman bencana alam, yang didukung dengan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah dan masyarakat.
4. Mendorong keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana, melalui: (i) kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah rawan bencana tinggi dan pasca bencana; (ii) pengembangan dan peningkatan kapasitas relawan penanggulangan bencana; dan (iii) pembentukan dan penguatan forum-forum masyarakat pengurangan risiko bencana dengan memperhatikan kearifan lokal setempat.
5. Peningkatan koordinasi dan sumberdaya penanganan kedaruratan dan bantuan kemanusiaan, melalui: (i) koordinasi dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi; dan (ii) koordinasi dan pemulihan sarana vital dan layanan dasar di wilayah pascabencana.
6. Peningkatan koordinasi antar semua pihak terkait dalam pelaksanaan pemulihan wilayah pasca bencana, penguatan perekonomian masyarakat yang terkena dampak bencana melalui pendampingan pemulihan mata pencaharian (*livelihood*) masyarakat.
7. Pembangunan infrastruktur pengendali banjir dan normalisasi sungai-sungai di wilayah DKI Jakarta dan

wilayah pasca bencana lainnya dalam rangka antisipasi dan penanganan banjir di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Melalui arah kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dukungan bagi peningkatan kinerja penanggulangan bencana serta peningkatan kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

9.3.11 Pemantapan Desentralisasi, Peningkatan Kualitas Hubungan Pusat Daerah Dan Antardaerah

Untuk dapat mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2014 terkait pemantapan desentralisasi, hubungan pusat daerah, dan antar daerah tersebut, arah kebijakan dilakukan dengan :

1. Penataan Pembagian Urusan Pemerintahan antar Tingkat Pemerintahan, mencakup: (i) memfasilitasi seluruh implementasi NSPK; (ii) meningkatkan pelaksanaan, penyusunan, dan pengevaluasian perda mengenai kewenangan/urusan pemerintah daerah; (iii) mewujudkan harmonisasi yang optimal antara peraturan sektoral dengan peraturan perundang-undangan desentralisasi dan otonomi daerah.
2. Penataan Daerah, mencakup: (i) mewujudkan pelaksanaan moratorium Daerah Otonom Baru (DOB) oleh para pemangku kepentingan hingga tahun 2014; (ii) mengoptimalkan kapasitas daerah otonom baru agar dapat memberikan pelayanan publik dengan basis SDM berkualitas dan mendorong kompetisi daerah secara mandiri
3. Peningkatan Kerja Sama Daerah, mencakup: (i) mewujudkan optimalisasi jumlah daerah yang melaksanakan kerja sama daerah terfokus pada bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik; (ii) meningkatkan jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerja sama daerah dengan kegiatan kerjasama yang efektif dan efisien; (iii) memfasilitasi kerja sama daerah yang diusulkan dengan mendorong ke arah pengembangan koridor ekonomi sesuai dengan koridor ekonomi wilayah.

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah, mencakup: (i) Mengoptimalkan pelaksanaan sistem Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) termasuk peraturan pelaksana, metode, alat dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terintegrasi dengan sistem evaluasi dan

pengawasan pemerintahan dan pembangunan daerah lainnya; (ii) Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan daerah hingga tercapai keselarasan arah dalam implementasi pembangunan.

9.3.12 Tata Kelola Dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah

Untuk dapat mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2014, terkait tata kelola dan kapasitas pemerintahan daerah tersebut, arah kebijakan dilakukan dengan :

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah dan DPRD, mencakup: (i) menyusun dan merealisasikan pelaksanaan PP pengganti PP No. 41 Tahun 2007 di seluruh daerah; (ii) memonitor dan mengevaluasi penerapan seluruh SPM (15 SPM) yang ditargetkan oleh RPJM 2010-2014 oleh Kementerian/Lembaga terkait dan memfasilitasi serta memantau pelaksanaannya di daerah; (iii) meningkatkan kapasitas kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui orientasi kepemimpinan, legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
2. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Anggota DPRD, yaitu dengan mengoptimalkan pelaksanaan *Grand Strategy* Penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan (Diklat) di 33 provinsi.
3. Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah, mencakup: (i) meningkatkan kualitas pemanfaatan DAK sesuai petunjuk teknis dan mengoptimalkan penyerapan DAK; (ii) meningkatkan kualitas APBD terkait dengan ketepatan waktu penetapan dan proporsi belanja publik dalam pengalokasian belanja daerah; (iii) meningkatkan jumlah daerah dengan LKPD yang berstatus WTP; (iv) meningkatkan proporsi PAD dalam APBD untuk mengurangi ketergantungan terhadap Dana Transfer dengan mengoptimalkan sumber penerimaan daerah seperti pajak dan retribusi daerah.

BAB 10

BIDANG SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

10.1 Kondisi Umum

Sesuai amanat RPJMN 2010-2014, peranan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam pembangunan nasional adalah sebagai pendukung pembangunan ekonomi melalui penyediaan bahan baku bagi sektor produksi dan sebagai ruang penyangga keberlanjutan kehidupan. Oleh sebab itu, pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan LH harus dilakukan secara rasional, efisien, bijaksana, dan berkelanjutan agar pembangunan dan kehidupan manusia dapat terus berlanjut dari sisi kualitas dan kuantitas.

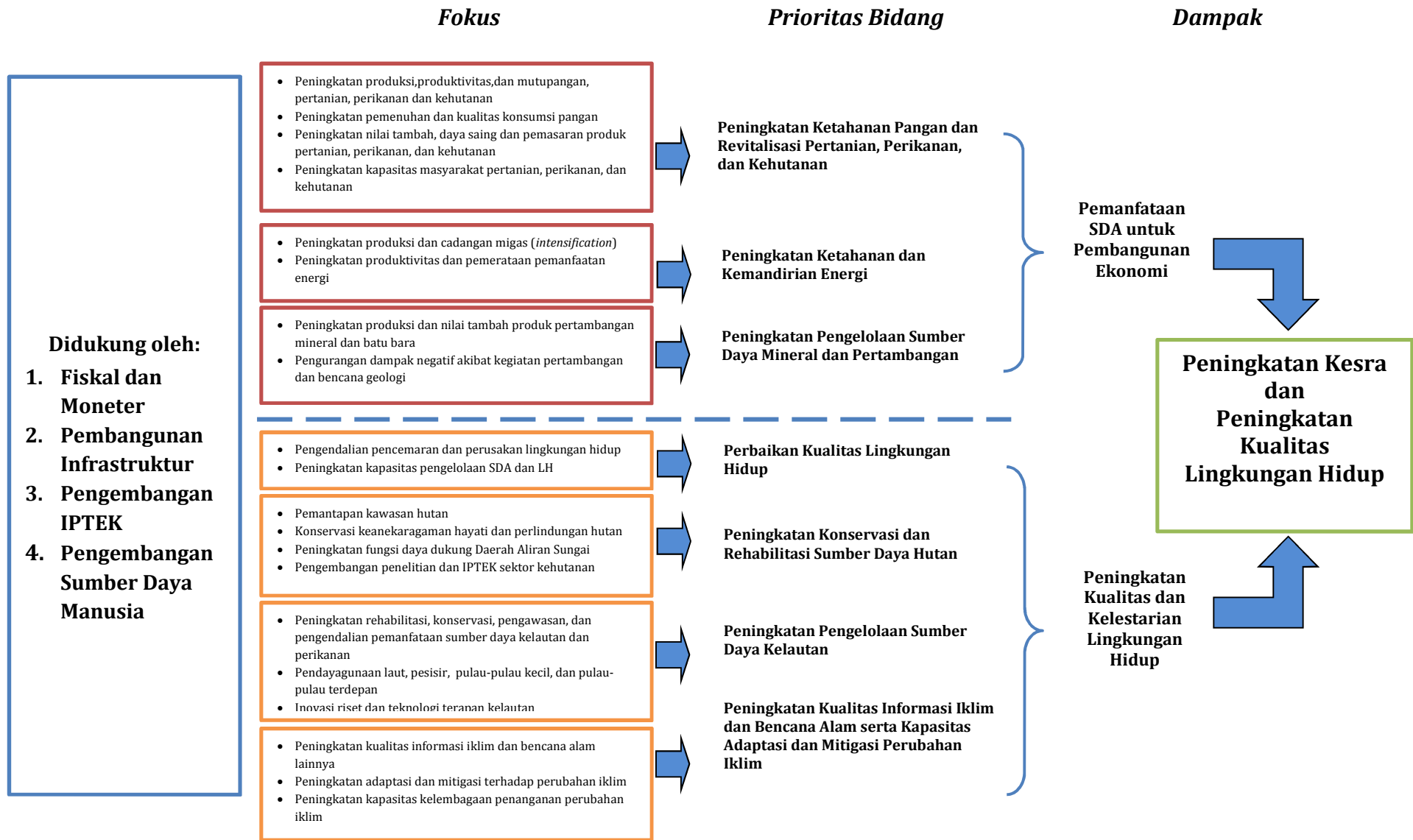
Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan dalam 3 (tiga) prioritas, yaitu: (i) Prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (ii) Prioritas Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan (iii) Prioritas Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. Sementara itu, pembangunan SDA LH untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian LH sebagai ruang penyangga keberlanjutan kehidupan dijabarkan pada 4 (empat) prioritas, yaitu: (i) Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup; (ii) Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan; (iii) Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; serta (iv) Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim. Kerangka pikir pembangunan bidang SDA dan LH dijelaskan dalam Gambar 10.1.

Beberapa sasaran pokok di dalam RPJMN 2010-2014 untuk arah kebijakan yang mendukung pelaksanaan pembangunan ekonomi antara lain adalah: (i) Meningkatnya rata-rata pertumbuhan produksi bahan pangan terutama padi (3,22 persen per tahun), jagung (10,02 persen per tahun), kedelai (20,05 persen per tahun), gula (12,55 persen per tahun), daging sapi (7,30 persen per tahun), dan ikan (20,16 persen per tahun); (ii) Tercapainya pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan rata-rata 3,6-3,7 persen per tahun; (iii) Meningkatnya indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dan indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN) masing-masing menjadi sebesar 115-120; (iv) Tercapainya produksi minyak

bumi 1,01 juta barel per hari, produksi gas bumi 1.633 ribu Setara Barel Minyak (SBM) per hari atau 9.000 *Million Standard Cubic Feet* (MMSCF) per hari, gas metana batubara 113 ribu SBM per hari serta meningkatnya cadangan minyak, gas bumi dan gas metana batubara; (v) Tercapainya penggunaan panas bumi (PLTP) 5.795 MW, mikrohidro (PLTMH) 1.897 MW, tenaga surya (PLTS) 6.120 MWp, tenaga angin (PLT Angin) 0,6 MW; (vi) Tercapai produksi batubara 309 juta ton, dengan penggunaan domestik (*Domestic Market Obligation*) sebanyak 110 juta ton; serta (vii) Tercapainya produksi tembaga sebesar 945 ribu ton, emas sebesar 118 ton, timah sebesar 110,25 ribu ton, bijih nikel sebesar 12,32 juta ton, bauksit sebesar 11,46 juta ton dan hasil tambang lainnya

Selanjutnya sasaran pokok untuk mendukung peningkatan kualitas dan kelestarian LH adalah: (i) Terjaganya kelestarian SDA dan LH dan kemampuan SDA dalam mendukung pembangunan berkelanjutan; (ii) Terkendalinya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; (iii) Meningkatnya penanganan *illegal logging* dan *illegal fishing*; (iv) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan konservasi hutan dan lahan serta dilakukannya pembatasan pembukaan lahan dikawasan hutan; (v) Meningkatnya pengelolaan konservasi dan pendayagunaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya; (vi) Terwujudnya upaya rehabilitasi, konservasi dan preservasi ekosistem pesisir dan laut; (vii) Terwujudnya pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang menjadi batas wilayah NKRI; (viii) Menurunnya emisi karbon; (ix) Meningkatnya kelayakan, keakuratan dan kecepatan sistem informasi iklim dan bencana alam; serta (x) Meningkatnya kesiapan sektor pembangunan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

**GAMBAR 10.1
KERANGKA PIKIR PEMBANGUNAN SDA DAN LH**



Berdasarkan peranannya dalam pembangunan nasional tersebut, beberapa hasil capaian pelaksanaan pembangunan bidang SDA dan LH adalah sebagai berikut:

A. Sebagai pendukung fungsi produksi dalam perekonomian nasional:

1. Pada tahun 2012 (triwulan III), pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan adalah sebesar 4,3 persen. Dengan peningkatan ini, rata-rata pertumbuhan PDB selama tiga tahun (2010-2012) adalah 3,3 persen yang berarti masih di bawah target RPJMN 2010-2014 sebesar 3,7-3,9 persen. Pertumbuhan masing-masing sub sektor hingga triwulan III tahun 2012, adalah tanaman bahan makanan sebesar 4,2 persen, tanaman perkebunan 5,01 persen, peternakan dan hasilnya sebesar 4,14 persen, perikanan sebesar 6,72persen, serta kehutanan menurun sebesar 4,83 persen.Sementara itu, sektor pertanian, perikanan dan kehutanan juga berkontribusi dalam pembentukan PDB nasional dengan kontribusi sekitar 15,42 persen.
2. Produksi padi yang merupakan bahan pangan utama di Indonesia, pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 5,0 persen, yaitu dari 65,76 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2011 menjadi 69,05 juta ton GKG pada tahun 2012 (BPS Angka Sementara, 2012). Tingginya angka produksi padi tersebut juga telah mendorong pencapaian surplus beras nasional di tahun 2012, yaitu sebesar 5,72 juta ton. Secara total, rata-rata pertumbuhan produksi padi per tahun selama periode 2010-2012 adalah sebesar 2,38 persen, masih di bawah target untuk mencapai surplus beras 10 juta ton sebesar 3,57 persen per tahun. Untuk itu, produksi padi tahun 2013 ditargetkan meningkat sebesar 6,25 persen dibandingkan tahun 2012. Sementara itu, produksi perikanan pada tahun 2012 meningkat sebesar 11,87 persen, yaitu menjadi 15,26 juta ton dan pada tahun 2013 target produksi adalah 18,49 juta ton;
3. Nilai perolehan investasi pemanfaatan hutan produksi, pengusaha pariwisata alam dan pemanfaatan hasil hutan lainnya mencapai Rp 62,05 triliun dan USD 28 juta pada tahun 2011, dan sebesar Rp 62,44 triliun dan USD 67 juta pada tahun 2012;
4. Jumlah produksi kayu dan kayu olahan dari sektor kehutanan mencapai 6,703 juta m³ pada tahun 2011 dan 24,735 juta m³ pada tahun 2012. Volume ekspor produk kehutanan mengalami penurunan dari sebesar 3,987 juta m³ (nilai ekspor USD 2,318 miliar) pada tahun 2011

menjadi 2,623 juta m³ (nilai ekspor USD 1,516 miliar) pada tahun 2012. Sementara itu pada tahun 2013, diperkirakan produksi hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan meningkat sebesar masing-masing 1 persen;

5. Penerimaan pendapatan negara dari sektor migas pada tahun 2012 mencapai angka Rp 289 triliun. Realisasi produksi minyak bumi tahun 2012 mencapai 860 ribu barel per hari atau 92 persen dari yang direncanakan 930 ribu barel per hari. Demikian juga produksi gas bumi yang hanya mencapai 8.196 MMSCF per hari atau 1.464 ribu SBM (Setara Barel Minyak) per hari atau 92 persen dari 1.594 SBM per hari yang direncanakan. Penggunaan panas bumi PLTP naik menjadi 1.341 MW;
6. Sektor pertambangan mineral dan batubara mengalami peningkatan penerimaan negara sebesar Rp 16,34 triliun dari Rp 107,25 triliun pada tahun 2011 menjadi Rp 123,59 triliun. Produksi batubara pada tahun 2012 mencapai 386 juta ton jauh melampaui yang direncanakan sebesar 332 juta ton. Sebanyak 82 juta ton telah dialokasikan untuk pemanfaatan dalam negeri yang berarti melampaui kewajiban alokasi dalam negeri sebesar 67,3 juta ton. Sementara itu, pada tahun 2013 produksi batubara ditargetkan mencapai 337 juta ton, dengan jumlah kewajiban alokasi dalam negeri sebesar 74,32 juta ton;
7. Pada tahun 2012 ini produksi pertambangan mineral utamamumnya mengalami penurunan, dengan rincian produksi emas sebesar 66,24 ton, bijih nikel sebesar 6,45 juta ton, bauksit sebesar 9 juta *metric ton* (mt). Hanya komoditas tembaga dan timah yang mengalami peningkatan masing-masing menjadi sebesar 673,56 ribu tondan 90,95 ribu ton. Pada tahun 2013, diperkirakan produksi timah dapat mencapai 105 ribu ton.

B. Sebagai pendukung peningkatan kualitas dan kelestarian LH:

1. Pemantauan tingkat pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup melalui program Adipura pada tahun 2012 dilakukan di 350 Kota dan sebanyak 125 kota meraih penghargaan tersebut;
2. Pada tahun 2012, upaya pengendalian *illegal fishing* telah berhasil menindak pelanggaran terhadap pidana perikanan sebanyak 68 kasus dan menangkap 112 unit kapal perikanan yang melakukan tindak pelanggaran. Sementara itu, tahun 2013 pengawasan dalam rangka

penanggulangan *illegal fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan ditargetkan mencakup 41 persen dari luas wilayah pengelolaan perikanan (WPP);

3. Pada tahun 2012, telah diselesaikan tata batas kawasan hutan (batas luar dan batas fungsi) sepanjang 16.336 km, sehingga capaian kumulatif sejak tahun 2010-2012 telah berhasil diselesaikan sepanjang 24.850,90 km. Untuk tahun 2013 ditargetkan terselesaikannya tata batas kawasan hutan (batas luar dan fungsi) sepanjang 19.000 km;
4. Untuk menurunkan luasan lahan kritis pada DAS prioritas telah dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 509.519 ha pada tahun 2012, sehingga capaian kumulatif rehabilitasi hutan dan lahan sejak tahun 2010 adalah seluas 1.148.289 ha. Selain itu, pada tahun 2012 juga telah tersusun dokumen Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu pada 37 DAS prioritas;
5. Pengendalian kebakaran hutan pada tahun 2012 telah berhasil menurunkan jumlah *hotspot* di pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi sebesar 45,11 persen menjadi sebanyak 32.323 titik dari rerata *hotspot* tahun 2005-2009 (58.890 titik);
6. Meningkatnya upaya pengendalian dampak perubahan iklim dan kesiapan sektor pembangunan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Secara rinci, capaian pada masing-masing prioritas diuraikan sebagai berikut.

10.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Pada tahun 2012, pencapaian sasaran produksi beberapa bahan pangan, mengalami peningkatan. Seperti halnya komoditas padi, pada tahun 2012 komoditas jagung juga mengalami peningkatan produksi sebesar 9,83 persen, dari 17,64 juta ton di tahun 2011 menjadi 19,38 juta ton di tahun 2012 (BPS Angka Sementara, 2012). Rata-rata pertumbuhan produksi jagung selama periode 2010-2012 adalah sebesar 3,35 persen per tahun, masih lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMN 2010-2014 sebesar 10,02 persen per tahun. Pertumbuhan produksi jagung di tahun 2013 ditargetkan mencapai 8,3 persen.

Peningkatan produksi gula pada tahun 2012 adalah sebesar 16,75 persen dibanding tahun 2011 (Kementan, 2013). Dengan peningkatan tersebut, selama periode 2010-2012 produksi gula mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 2,16 persen, masih di bawah target pertumbuhan produksi

dalam RPJMN 2010-2014 sebesar 12,55 persen. Pada tahun 2013, pertumbuhan produksi gula ditargetkan mencapai 9,2 persen.

Produksi kedelai pada tahun 2012 meningkat sebesar 0,04 persen yaitu dari 851,29 ribu ton di tahun 2011 menjadi 851,65 ribu ton di tahun 2012 (BPS Angka Sementara, 2012). Rata-rata pertumbuhan produksi kedelai selama periode 2010-2012 mengalami penurunan sebesar 4,34 persen per tahun. Padahal target pertumbuhan produksi kedelai pada RPJMN 2010-2014 sebesar 20,05 persen. Untuk tahun 2013, produksi kedelai ditargetkan dapat mengalami pertumbuhan sebesar 18,4 persen.

Sejalan dengan komoditas pangan lainnya, produksi daging juga menunjukkan peningkatan sebesar 10,98 persen, yaitu dari 470 ribu ton di tahun 2011 menjadi 520 ribu ton di tahun 2012 (Kementan, 2013). Pertumbuhan produksi daging selama periode 2010-2012 yaitu rata-rata sebesar 8,11 persen per tahun, lebih tinggi dibandingkan dengan target RPJMN 2010-2014 sebesar 7,30 persen. Untuk tahun 2013, pertumbuhan produksi daging ditargetkan naik sebesar 9,5 persen.

Produksi susu meningkat sebesar 4,4 persen dari 974,7 ribu ton pada tahun 2011 menjadi 1.017,9 ribu ton pada tahun 2012. Pertumbuhan produksi susu selama periode 2010 - 2012 rata-rata sebesar 12,35 persen per tahun. Sedangkan produksi telur juga mengalami peningkatan sebesar 5,8 persen dari 1.456,3 ribu ton pada tahun 2011 menjadi 1.540,8 ribu ton pada tahun 2012.

Produksi perikanan pada tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 11,87 persen dari tahun 2011, yaitu dari 13,64 juta ton menjadi 15,26 juta ton, yang terdiri dari 5,81 juta ton perikanan tangkap dan 9,45 juta ton perikanan budidaya. Peningkatan produksi perikanan budidaya, terutama terjadi pada komoditas utama seperti: rumput laut, nila, bandeng, udang, lele, mas, dan patin. Sementara itu, peningkatan produksi perikanan tangkap terutama pada: ikan tuna, udang, tongkol, kembung, dan cumi. Dengan peningkatan perikanan budidaya tersebut, diperkirakan produksi perikanan pada tahun 2013 akan mampu mencapai target 18,49 juta ton yang terdiri dari 5,47 juta ton perikanan tangkap dan 13,02 juta ton perikanan budidaya.

Peningkatan produksi perikanan juga diikuti dengan peningkatan konsumsi ikan oleh masyarakat sebesar 7,11 persen, yaitu dari 31,64 kg/kapita/tahun pada tahun 2011 menjadi 33,89 kg/kapita/tahun pada tahun 2012.

Peningkatan konsumsi ini merupakan hasil pengembangan informasi dan promosi melalui gerakan Gemar Makan Ikan. Pada tahun 2013, konsumsi ikan masyarakat Indonesia ditargetkan meningkat menjadi 35,14 kg/kapita/tahun.

Peningkatan produksi perkebunan dan hortikultura berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi. Pada tahun 2012, produksi minyak sawit mencapai 14,8 juta ton, karet sekitar 612 ribu ton, kopi sekitar 28,9 ribu ton, dan kakao sekitar 66,4 ribu ton. Capaian produksi komoditas hortikultura pada tahun 2012, yaitu: cabe meningkat sebesar 8,16 persen menjadi 0,96 juta ton, bawang merah meningkat sebesar 5,97 persen menjadi sekitar 0,95 juta ton, dan kentang meningkat sebesar 8,97 persen menjadi sekitar 1,1 juta ton.

Untuk menjaga aksesibilitas pangan pada tahun 2012 pemerintah cukup mampu menstabilkan harga pangan pokok di pasar dalam negeri. Fluktuasi harga beras selama tahun 2012 berada pada kisaran harga terendah Rp 10.286/kg dan tertinggi Rp 10.520/kg. Harga beras termurah berada pada kisaran terendah Rp 8.194/kg dan tertinggi Rp 8.390/kg.

Sementara itu, harga kedelai mengalami lonjakan menjelang akhir 2012 sehingga mengalami kenaikan harga sebesar 7,00 persen dibandingkan dengan awal tahun. Demikian juga halnya dengan harga gula dan daging sapi yang cenderung mengalami peningkatan hingga mencapai 16,3 persen untuk gula dan 25,62 persen untuk daging sapi (Tim Stabilisasi Pangan Pokok, 2013).

Kinerja ekspor pertanian pada tahun 2012 (November) mengalami peningkatan. Volume ekspor pada tahun 2012 meningkat 44,6 persen dibandingkan tahun 2011. Sementara itu, nilai ekspor pertanian mengalami peningkatan sebesar 25 persen, yaitu menjadi senilai USD 3,2 miliar. Ekspor komoditas perikanan meningkat sebesar 11,65 persen, dari USD 3,52 miliar pada tahun 2011 menjadi USD 3,93 miliar pada tahun 2012, ekspor utama adalah tuna, udang, mutiara dan rumput laut. Pada tahun 2013 diperkirakan nilai ekspor komoditas perikanan akan mencapai USD 4,2 miliar.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat yang dicerminkan pada skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) menunjukkan rata-rata konsumsi kalori penduduk pada tahun 2011 mencapai 1926 kkal per kapita dengan skor Pola Pangan Harapan (skor PPH) sebesar 77,3.

Sejalan dengan perkembangan tersebut di atas, kesejahteraan petani dan nelayan, yang dicerminkan pada peningkatan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga mengalami perbaikan. NTP pada bulan Desember 2012 adalah sebesar 105,87, sedikit lebih tinggi dibandingkan

tahun sebelumnya yang berada pada level 105,75. Sementara itu, Nilai Tukar Nelayan (NTN) mengalami penurunan dari 106,24 pada tahun 2011 menjadi 105,37 pada tahun 2012. Seiring dengan semakin kondusifnya sistem perekonomian nasional, diupayakan pada tahun 2013, NTN akan mencapai nilai 112. Peningkatan kesejahteraan nelayan tersebut juga didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Kehidupan Nelayan (PKN) di 400 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) pada tahun 2012. Program PKN merupakan program perbaikan kehidupan nelayan secara komprehensif yang menjadi bagian dari program Klaster IV Penanggulangan Kemiskinan. Program PKN tersebut meliputi pemberian bantuan pada: (i) individu nelayan, berupa sertifikasi hak atas tanah nelayan dan perlindungan; (ii) kelompok nelayan, berupa pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP), bantuan kapal penangkap ikan dan alat tangkap, sarana pengolahan perikanan, dan pendampingan kelompok; serta (iii) sarana dan prasarana perikanan di PPI. Selain itu terdapat pula peningkatan pelayanan kesehatan (Puskesmas), perbaikan rumah nelayan, serta akses terhadap listrik dan air bersih. Pada tahun 2013, program PKN ini akan dilanjutkan ke 200 PPI.

Untuk sektor kehutanan, produksi hasil hutan dikonsentrasikan pada kawasan hutan produksi yang dilaksanakan secara lestari. Berdasarkan data eksekutif strategis kehutanan tahun 2012, luas kawasan hutan produksi adalah sebesar 76,70 juta ha, yang seluas 34,63 juta ha telah dimanfaatkan dalam bentuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sementara seluas 42,07 juta ha masih berstatus “*open access*”, yang akan terus dilakukan penetapan dan pengukuhan kawasan dan izin usaha. Pemanfaatan hutan produksi tersebut berupa: (i) Hutan Alam seluas 23,9 juta ha; (ii) Hutan Tanaman Industri seluas 9,83 juta ha; (iii) Hutan Tanaman Rakyat seluas 168 ribu ha; (iv) Hasil Hutan Bukan Kayu seluas 513 ribu ha; dan (v) Restorasi ekosistem seluas 219 ribu ha.

Sejalan dengan penundaan pemberian izin baru pada hutan alam primer dan lahan gambut sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru pada Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut, pada tahun 2012 telah terjadi penurunan pemanfaatan hutan alam dari 24,04 juta ha (2011) menjadi 23,9 juta ha.

Pada tahun 2012, nilai perolehan investasi yang berasal dari pemanfaatan hutan produksi sebesar Rp 62,44 dan USD 67 juta. Nilai perolehan berasal dari perusahaan pariwisata

alam dan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar mencapai sebesar Rp598 miliar; produksi kayu sebagai bahan baku industri mencapai 49,112 juta m³. Jumlah ini meningkat dari tahun 2011 sebesar 47,140 juta m³.

Produksi kayu olahan juga mengalami peningkatan dengan total sebesar 24,735 juta m³ dengan dominasi dari jenis serpih kayu, *plywood* dan *laminated veneer lumber* (LVL). Walaupun produksi kayu dan kayu olahan meningkat, namun volume ekspor produk kehutanan tersebut pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,623 juta m³ dari sebelumnya 3,987 juta m³ dengan nilai ekspor sebesar USD 2,318 miliar. Kayu lapis tetap menjadi penyumbang ekspor terbesar dengan nilai USD 1,041 miliar, diikuti oleh moulding sebesar USD 0,266 juta dan kayu pertukangan sebesar USD 145,759 juta.

Peningkatan pengelolaan hutan lestari/berkelanjutan dilakukan melalui: (i) penerapan sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia dan Tebang Pilih Tanam Jalur pada hutan alam; (ii) penerapan produksi penebangan bersertifikat legal kayu di 13 unit manajemen IUPHHK; serta (iii) meningkatkan keragaman produk bukan kayu seperti sutera alam, rotan, bambu, lebah madu, gaharu, dan nyamplung.

Sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia dan Tebang Pilih Tanam Jalur pada hutan alam efektif untuk meningkatkan riap tumbuh dan produktivitas hasil hutan kayu dengan tetap mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi lingkungan.

Upaya untuk mengurangi perambahan dilakukan dengan peningkatan partisipasi dan akses masyarakat melalui hutan kemasyarakatan (HKm) dan hutan desa di kawasan hutan dengan pencapaian total tahun 2012 seluas 500.376,8 ha. Pembangunan HKm dan hutan desa akan ditingkatkan pada tahun 2013 seluas 500.000 ha. Selain itu, pemerintah juga membangun hutan rakyat kemitraan di luar kawasan hutan seluas 56.334 ha pada tahun 2012 dan akan ditingkatkan lagi seluas 50.000 ha di tahun 2013. Fasilitasi izin usaha pengelolaan HKm dilakukan pada 100 kelompok dan kemitraan usaha HKm pada 10 unit usaha di 13 provinsi.

Penyuluhan kehutanan dilakukan untuk meningkatkan partisipasi kelompok tani hutan dalam kemitraan antara industri dan rakyat yang dilakukan pada 30 perusahaan di 3 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sosialisasi kelembagaan penyuluhan kehutanan dilaksanakan di seluruh provinsi dengan lima provinsi model di Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat.

10.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Untuk meningkatkan kualitas penyuluhan, pada tahun 2012 sebanyak 565 orang telah dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat penyuluh. Selanjutnya untuk meningkatkan kualitas kerjasama, pada tahun 2012 telah dilakukan diklat pendampingan masyarakat sebanyak 2.886 orang dari seluruh Indonesia.

Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi dilakukan melalui peningkatan ketersediaan energi, diversifikasi dan peningkatan akses serta efisiensi energi.

Dalam hal ketersediaan energi, produksi minyak bumi pada tahun 2011 dan 2012 cenderung terus menurun masing-masing sebesar 902 ribu barel per hari dan 860 ribu barel per hari. Untuk tahun 2013 diupayakan meningkat menjadi 900 ribu barel per hari. Dari produksi minyak bumi tersebut, sebagian diolah menjadi BBM adalah sebesar 38,2 juta kilo liter pada tahun 2012 dan sebagian lainnya diekspor. Sementara produksi gas bumi untuk tahun 2011 dan 2012 masing-masing sebesar 1.508 ribu SBM per hari dan 1.464 ribu SBM per hari. Ketersediaan gas bumi tersebut melengkapi produksi minyak bumi dalam memenuhi kebutuhan energi dalam negeri.

Untuk meningkatkan ketahanan energi saat ini terus ditingkatkan cadangan minyak dan gas bumi. Pada tahun 2012 cadangan minyak bumi adalah sebesar 7,25 miliar *Stock Tank Barrels* (MMSTB), dan cadangan gas bumi sebesar 148 *Trillions Cubic Feet* (TCF). Untuk menjaga pasokan dan distribusi BBM dalam negeri, telah dibangun kapasitas penyimpanan dalam negeri sebesar 6,7 juta kilo liter yang didukung peningkatan kapasitas pengangkutan BBM sebesar 33,8 persen dan peningkatan jumlah niaga gas bumi melalui pipa menjadi 6 usaha niaga. Dalam rangka meningkatkan akses terhadap sumber energi dengan harga yang terjangkau, pemerintah masih menerapkan subsidi BBM dan listrik. Pada tahun 2012, subsidi BBM dan LPG mencapai Rp 216,80 triliun dan subsidi listrik sebesar Rp 92,98 triliun. Nilai subsidi ini terus meningkat seiring dengan peningkatan harga rata-rata minyak mentah di pasar internasional.

Dalam rangka diversifikasi energi, dilakukan optimalisasi pemanfaatan gas bumi dalam negeri melalui pembangunan jaringan gas kota dan konversi pembangunan SPBG dan peningkatan produksi Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan fokus. Peningkatan diversifikasi energi primer ini juga dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memperkuat ketahanan energi yang disertai penurunan emisi. Sampai tahun 2012, pemerintah telah mengembangkan jaringan gas

kota di 13 kota dengan total sambungan 57.000 kota (kumulatif) dan pembangunan SPBG sebanyak 8 (delapan) unit. Sementara untuk EBT, kontribusi EBT pada tahun 2012 terus meningkat. Tenaga air dengan potensi EBT terbesar di Indonesia, menyumbang kapasitas listrik sebesar 3.888 MW. Energi panas bumi sampai saat ini baru 1.341 MW yang sudah dimanfaatkan sebagai listrik (4,79 persen dari total potensi sebesar 28 GW). Untuk meningkatkan pemanfaatan potensi panas bumi, sampai saat ini telah ditetapkan sebanyak 58 Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) yang terdiri dari 19 WKP *existing* dan 39 WKP baru. Dari 19 WKP *existing* terdapat 9 (sembilan) lapangan panas bumi yang sudah berproduksi. Sejalan dengan Permen ESDM No. 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) sebagai Bahan Bakar Lain, untuk tahun 2012 telah tersalurkan BBN (*biodiesel*) dengan volume sebesar 2 juta kilo liter atau 142,86 persen terhadap target tahun 2012.

Upaya untuk meningkatkan efisiensi energi telah dilakukan melalui: (i) Penyusunan aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah No. 70 tentang Konservasi Energi melalui Permen ESDM No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Energi; (ii) Pelaksanaan pengendalian pembatasan BBM khusus untuk kendaraan dinas di seluruh Indonesia melalui Permen ESDM No. 12 tahun 2012 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak; (iii) Pelaksanaan penghematan listrik gedung pemerintah, BUMN, BUMD, BHMN melalui Permen ESDM No. 13 tahun 2012 tentang Penghematan Tenaga Listrik (iv) Penyusunan program pemanfaatan energi; (v) Pelaksanaan audit energi dan monitoring di sektor industri, komersial dan pemerintah; (vi) Penyusunan data harga energi dan konsep mekanisme insentif konservasi energi; (vii) Pelaksanaan penerapan teknologi energi bersih dan efisien; dan (viii) Pelaksanaan bimbingan teknis dan kerjasama konservasi energi.

10.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber daya Mineral dan Pertambangan

Pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan dilakukan dengan: (i) meningkatkan produksi batubara; (ii) meningkatkan produksi mineral logam dan non-logam; (iii) meningkatkan sumber daya dan cadangan batubara dan mineral baik logam dan non-logam; dan (iv) meningkatkan daya dukung pertambangan (v) meningkatkan nilai tambah mineral dan batubara melalui kegiatan hilirisasi industri produk pertambangan.

Pada tahun 2012 produksi batubara mencapai 386 juta ton, mengalami peningkatan sekitar 9,35 persen dari tahun sebelumnya. Sebesar 21,24 persen produksi batubara atau sebesar 82 juta ton digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Sebagian besar batubara tersebut digunakan

untuk pembangkit listrik (70,69 persen), industri (14,71 persen) sedangkan sisanya sebesar 14,60 persen digunakan untuk industri pengolahan. Sumber daya dan cadangan batubara adalah sebesar 161 miliar ton dan 28 miliar ton. Cadangan terutama tersebar di tiga wilayah potensi sumber daya batubara yakni: (i) Sumatera Bagian Timur, (ii) Kalimantan Bagian Timur, dan (iii) Kalimantan Bagian Selatan

Dibandingkan tahun sebelumnya, beberapa produksi mineral logam mengalami penurunan antara lain: (i) emas dari sebesar 78,15 ton menjadi 66,24 ton; (ii) bijih nikel dari sebesar 8,52 juta ton menjadi 6,45 juta ton; (iii) bauksit dari sebesar 10,89 juta mt menjadi 9 juta mt. Beberapa jenis mineral mengalami peningkatan antara lain (i) tembaga dari sebesar 618,30 ribu ton menjadi 673,56 ribu ton; (ii) perak dari sebesar 223,08 ton menjadi 250,48 ton; dan (iii) bijih besi dari sebesar 5,22 juta mt menjadi 5,49 juta mt.

Untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara dan sejalan dengan UU No. 4 Tahun 2009 telah dilakukan renegotiasi kontrak pertambangan mineral dan batubara yang ditandatangani sebelum diberlakukannya UU tersebut. Isu strategis yang menjadi pokok pembahasan renegotiasi adalah: (i) pengaturan luas wilayah kerja; (ii) perpanjangan kontrak; (iii) penerimaan negara; (iv) kewajiban pengolahan dan pemurnian; (v) kewajiban divestasi; dan (vi) kewajiban penggunaan barang/jasa pertambangan dalam negeri. Renegosiasi mulai dilakukan pada Triwulan ke empat tahun 2009 untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dan mulai awal tahun 2010 untuk Kontrak Karya (KK). Sampai 2012, proses renegotiasi sudah dilakukan terhadap 37 pemegang Kontrak Karya (KK) dan 76 pemegang PKP2B. Sebanyak 9 (sembilan) perusahaan pemegang KK telah menyetujui semua pasal/ketentuan yang diamandemen dan 2 (dua) di antaranya siap menandatangani amandemen. Sementara 23 perusahaan lainnya sudah menyetujui sebagian ketentuan, sedangkan 5 (lima) perusahaan lainnya masih belum menyetujui semua ketentuan untuk diamandemen. Untuk pemegang PKP2B, sebanyak 63 perusahaan sudah menyetujui pasal/ketentuan yang diamandemen. Sebagian besar perusahaan itu merupakan kontrak generasi II dan III. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 perusahaan pemegang PKP2B siap menandatangani, 13 perusahaan baru menyetujui sebagian ketentuan untuk diamandemen. Selain itu untuk meningkatkan penataan kegiatan pertambangan, sampai

saat ini telah dilakukan 8 (delapan) tahap rekonsiliasi Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Daerah dengan jumlah IUP yang terverifikasi *Clear and Clean* (CnC) sebanyak 5.152 dari total 10.689 IUP.

Dalam hal peningkatan nilai tambah, sudah dikeluarkan berbagai kebijakan insentif dan disinsentif di antaranya dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2011 tentang Insentif Pajak Bagi Smelter di Luar Pula Jawa yang kemudian disusul oleh Permen ESDM No. 7 tahun 2012 tentang pembatasan ekspor bijih mineral yang diperbaharui oleh Permen ESDM No. 11 tahun 2012 sebelum nantinya akan diberlakukan pelarangan ekspor bahan mentah produk pertambangan di tahun 2014. Dalam implementasinya, kebijakan ini didukung oleh terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan No. 29 tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan dan PMK No. 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

10.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Perbaikan kualitas lingkungan hidup terus diupayakan melalui: (i) pengendalian pencemaran air; (ii) penanganan limbah padat; (iii) pengendalian pencemaran udara

Terkait dengan dengan pengendalian pencemaran air, dilakukan upaya pembinaan teknis serta rekomendasi dan verifikasi teknis pembuangan air limbah ke laut. Pada tahun 2012, tercatat sebanyak 33 dokumen rekomendasi telah diterbitkan. Pembinaan teknis pengelolaan kualitas air dilakukan pada 13 provinsi/kabupaten yang masuk dalam DAS prioritas dan ekosistem gambut serta rawa non gambut. Hingga Juni 2012, telah dibuat perangkat kebijakan pengelolaan kualitas air berupa rekomendasi usulan kelas air untuk sembilan sungai (Kampar, Brantas, Citanduy, Batanghari, Musi, Bengawan Solo, Siak, Barito dan Mamasa). Selain itu, terdapat kesepakatan sembilan Menteri tentang Kebijakan Pengelolaan Danau Berkelanjutan, pada dua Danau (Rawapening dan Maninjau).

Untuk penanganan limbah padat (sampah) upaya penerapan metode *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R) masih terus dilakukan. Melalui program Adipura dan penerapan upaya pengurangan volume sampah skala kota. Pada tahun 2012, sebanyak 125 kota mendapatkan penghargaan Adipura, dari 350 kota yang dipantau, dan sebanyak 14 Kota mengikuti program upaya pengurangan volume sampah skala kota. Upaya penanganan penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3 pada tahun 2012 dilakukan antara lain melalui bimbingan teknis verifikasi pengelolaan B3 di 33 provinsi untuk perusahaan. Sebanyak 1.317 perusahaan telah mengikuti

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER). Selain itu, pengaturan izin pengelolaan limbah B3 semakin dipertegas dengan penerbitan 1.624 dokumen registrasi B3 dan 20 dokumen notifikasi B3.

Untuk pengendalian pencemaran udara, pada tahun 2012, telah dilakukan evaluasi kualitas udara di 45 kota, diharapkan cakupan jumlah kota yang dipantau terus ditingkatkan. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas dan kelestarian lahan/tanah, dilakukan pemantauan kerusakan tanah di beberapa kabupaten/kota. Secara komprehensif, pemantauan kualitas udara, air dan lahan dilakukan pula melalui Program Menuju Indonesia Hijau (MIH). Untuk tahun 2012, tercatat sebanyak 200 kabupaten yang mengikuti program tersebut, dan lima kabupaten (Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara; Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara; Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat; Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara; dan Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat) yang berhasil menerima Trophy Raksaniyata (kabupaten dengan kinerja sangat baik) dan sebanyak empat kabupaten (Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta; Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah; Kabupaten Ciamis, Jawa Barat; dan Kabupaten Jombang, Jawa Timur) yang berhasil menerima Piagam Raksaniyata (kabupaten dengan kinerja baik dan memiliki keunggulan di beberapa kegiatan tertentu).

Untuk mendukung pengelolaan lingkungan hidup, peningkatan kualitas AMDAL dan kapasitas infrastruktur pengendalian dampak lingkungan terus dilaksanakan peningkatan kualitas laboratorium uji lingkungan, metode kalibrasi dan pengujian. Pada tahun 2012, telah terbina sebanyak 173 laboratorium uji lingkungan. Pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan hidup di daerah dilakukan melalui pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup pada 33 provinsi, serta pemantauan dan evaluasi atas kapasitas kelembagaan lingkungan hidup di 262 kabupaten/kota.

Berkaitan dengan itu, untuk peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah, telah disusun Standar Pelayanan Minimum (SPM) bidang lingkungan yang harus dipenuhi oleh setiap daerah. Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan secara nasional (pusat dan daerah), penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup untuk membangun dan melengkapi sarana dan prasarana pemantauan air dan udara serta laboratorium dan peralatannya. Jumlah kabupaten/kota penerima DAK Bidang

Lingkungan Hidup pada tahun 2012 sebanyak 442 kabupaten/kota, dan pada tahun 2013 sebanyak 432 kabupaten/kota ditahun 2013.

Sementara itu, untuk peningkatan efektivitas pengendalian dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup, dilakukan mekanismedekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan lingkup: (i) pengendalian pencemaran lingkungan hidup; (ii) pengendalian kerusakan lingkungan hidup; dan (iii) peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup. Pada tahun 2013, sebanyak 33 provinsi yang telah menerima dana dekonsentrasi dan sebanyak 28 Kabupaten yang telah menerima dana tugas pembantuan.

Dalam rangka konservasi dan pengelolaan keanekaragaman hayati terus dilakukan: (i)Identifikasi kerusakan dan rehabilitasi daerah penyangga di beberapa Taman Nasional; (ii) Penyusunan Rancangan Undang-Undang untuk meratifikasi Protokol Nagoya; (iii) Penyusunan RUU Pelestarian Sumber Daya Genetik (PSDG) dan Kebijakan Pengelolaan Spesies Asing; (iv) Pengembangan *database* dan sistem informasi keanekaragaman hayati; serta (v) Pengelolaan 15 danau dan situ di Jabodetabek. Pada tahun 2012 dilakukan fasilitasi pengembangan Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) di 9 Kabupaten. Selanjutnya, dalam rangka peningkatan kualitas pengelolaan KEHATI, pada tahun 2013 akan dilakukan pemutakhiran *Indonesia Biodiversity Strategy Action Plan (IBSAP) 2003-2020*. Pemutakhiran dimaksudkan untuk menyesuaikan target IBSAP sesuai dengan kesepakatan global (*Aichi Target*) dan isu-isu lingkungan yang lebih kontekstual dengan situasi saat ini.

10.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan untuk pengelolaan hutan yang lestari dilakukan melalui program-program utama yaitu perencanaan makro dan pemantapan kawasan hutan, konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, serta peningkatan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat.

Dalam rangka pemantapan kawasan hutan, telah diselesaikan penataan batas luar dan batas fungsi kawasan hutan sepanjang 16.336,07 km pada tahun 2012 dari target sepanjang 16.000 km. Pada tahun 2013, target tata batas yang akan diselesaikan adalah sepanjang 19.000 km. Penyelesaian tata batas ini diharapkan dapat mengurangi konflik pemanfaatan kawasan hutan dan mempercepat penyelesaian RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/Kota. Sampai dengan tahun 2012 telah dicapai persetujuan substansi kehutanan pada 22 provinsi, sementara itu untuk

tahun 2013 diharapkan selesai persetujuan substansi untuk 9 (sembilan) provinsi, yaitu Maluku, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Riau dan Sulawesi Tengah.

Di samping penyelesaian tata batas, pemantapan kawasan juga dilakukan dengan pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) di seluruh kawasan hutan. Sampai dengan tahun 2012, telah dibentuk 170 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL), dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) di 24 Provinsi, serta 70 unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK). Pembangunan KPH ini terus dilanjutkan dengan operasionalisasi KPH, yang hingga akhir tahun 2012 telah beroperasi sebanyak 60 unit KPH, dan tahun 2013 akan ada tambahan 30 unit KPH.

Kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan juga sejalan dengan pelaksanaan Stranas REDD+ sebagai bagian dari pelaksanaan penurunan emisi (RAN-GRK) di bidang kehutanan, yang meliputi: (i) Penyempurnaan peraturan dan kebijakan, terutama untuk menyelesaikan penyebab terjadinya konflik kawasan hutan dan lahan dalam rangka mengefektifkan manajemen pengelolaan kawasan hutan konservasi dan hutan lindung; (ii) Evaluasi terhadap perizinan kehutanan, yang diprioritaskan untuk memberikan solusi atas keberadaan pihak ketiga di dalam kawasan hutan berizin; (iii) Penerapan prinsip pengelolaan hutan berkelanjutan, terutama penyelesaian tata batas kawasan hutan, operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan, pemetaan hutan adat; dan (iv) Pendampingan untuk pengintegrasian RAD-GRK dan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+ ke dalam dokumen perencanaan daerah.

Terkait dengan konservasi keanekaragaman hayati pada sumber daya hutan, dilakukan upaya penurunan konflik dan tekanan terhadap kawasan taman nasional dan kawasan hutan konservasi lainnya (cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, dan hutan lindung), pada area seluas 24,1 ribu ha dari total 25 ribu ha yang harus diselesaikan hingga tahun 2014. Upaya ini diperkuat dengan peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan hutan konservasi berbasis resort pada 29 taman nasional prioritas. Untuk meningkatkan populasi spesies terancam punah, pemerintah telah menetapkan 14 spesies prioritas yaitu Harimau Sumatera, Gajah Sumatera, Badak Jawa, Banteng, Orangutan Kalimantan, Komodo, Owa Jawa, Bekantan, Anoa, Babirusa, Jalak Bali, Elang Jawa, Maleo dan Kakatua Kecil Jambul Kuning. Dari basis data tahun 2008, pada tahun 2012 rata-rata persentase kenaikan 14 spesies

yaitu Harima Sumatera (28,15%), Gajah Sumatera (1,32%), Badak Jawa (6,25%), Banteng (8,02%), Orangutan Kalimantan (1,81%), Komodo (39,10%), Owa Jawa (1,75%), Bekantan (126,19%), Anoa (19,51%), Babirusa (20,24%), Jalak Bali (11,90%), Elang Jawa (39,29%), Maleo (72,02%) dan Kakatua Kecil Jambul Kuning (78,08%).

Perlindungan dan pengamanan sumber daya hutan dilakukan melalui penyelesaian 125 kasus baru dan 64 kasus tunggakan perkara illegal logging, perambahan liar kawasan hutan, peredaran tumbuhan dan satwa liar ilegal, penambangan ilegal dan kebakaran. Kerusakan hutan akibat kebakaran terus diturunkan dengan melakukan peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan bahaya kebakaran hutan di 33 DAOPS (Manggala Agni), dukungan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran hutan serta pembentukan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Pada tahun 2012 terdapat penambahan Ijin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) sebanyak 11 unit atau meningkat 44 persen dari 2011. Jenis ijin yang diberikan terdiri atas 3 Ijin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) dan 8 Ijin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam (IUPJWA). Adapun kumulatif IPPA sampai dengan tahun 2012 adalah sebanyak 35 unit. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang pengusahaan pariwisata alam mengalami penurunan menjadi sekitar Rp 20,584 miliar pada tahun 2012 dari sebesar Rp 22,2 miliar pada tahun 2011. Disamping IPPA, telah dilakukan kerjasama/izin usaha baru untuk pemanfaatan jasa lingkungan air sebanyak 40 unit.

Sementara itu, rehabilitasi hutan dan lahan kritis untuk meningkatkan fungsi dan daya dukung DAS dilakukan melalui rehabilitasi kawasan hutan konservasi/lindung seluas 100.986 ha dan rehabilitasi lahan kritis seluas 398.631 ha. Disamping itu, pada tahun 2012 kegiatan Kebun Bibit Rakyat berhasil direalisasikan sebanyak 10.270 unit dan persemaian permanen sebanyak 25 unit. Di area hutan mangrove, gambut, dan rawa telah dilakukan rehabilitasi seluas 8.869 ha. Pada tahun 2013, rehabilitasi hutan dan lahan kritis ini akan terus ditingkatkan pencapaian seluas 500.000 ha. Sementara itu, untuk mewujudkan pengelolaan DAS terpadu, pada tahun 2013 akan disusun Rencana Pengelolaan DAS Terpadu (RPDAST) pada 10 DAS prioritas.

10.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Pemanfaatan sumber daya kelautan untuk pembangunan dan juga meningkatkan fungsi laut sebagai sistem penyangga kehidupan, dilakukan melalui pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, rehabilitasi dan konservasi

ekosistem pesisir dan laut (terumbu karang dan mangrove), pengelolaan pulau-pulau kecil, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta pengembangan riset dan teknologi kelautan.

Dalam rangka menjaga keberlangsungan sumber daya laut langkah-langkah yang dilakukan adalah: (i) Pelaksanaan operasi/pengawasan rutin dan gelar operasi bersama; (ii) Pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat; serta (iii) Peningkatan kerjasama dengan negara tetangga. Pada tahun 2012, telah dilakukan pemeriksaan terhadap 3.700 kapal perikanan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 112 kapal yang terdiri dari 42 kapal perikanan Indonesia dan 70 kapal perikanan asing, diduga melakukan tindak pelanggaran bidang perikanan berupa: (a) beroperasi tanpa dokumen perijinan; (b) penggunaan alat tangkap terlarang; serta (c) pelanggaran wilayah operasi penangkapan. Dalam rangka menjaga keamanan di kawasan perairan RI, selain operasi mandiri secara rutin, juga dilakukan gelar operasi bersama dengan TNI-AL, POLRI, dan Bakorkamla dalam Operasi Gurita dan Operasi Sepanjang Tahun Bakorkamla. Kerjasama pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan pula dengan negara tetangga yaitu berupa Patroli Terkoordinasi (Patkor) Ausindo dengan Australia, dan Patkor Malindo dengan Malaysia. Dalam rangka pengembangan sistem pengawasan berbasis masyarakat, telah dilakukan pembinaan pada 1.119 kelompok masyarakat pengawas yang berperan aktif.

Upaya untuk memelihara fungsi lingkungan di wilayah perairan dilakukan melalui rehabilitasi dan konservasi ekosistem pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. Sebagai hasilnya, pada tahun 2012 dicapai: (i) pengelolaan kawasan konservasi perairan seluas 3,22 juta hektar dan penetapan kawasan konservasi perairan seluas 15,78 juta hektar, termasuk kawasan konservasi laut daerah (KKLD); (ii) pengelolaan dan rehabilitasi terumbu karang pada 16 kabupaten/kota di 8 provinsi; serta (iv) peningkatan kerjasama pengelolaan, rehabilitasi dan konservasi terumbu karang dengan Filipina, Malaysia, Solomon, Papua New Guinea, dan Timor Leste. Kerjasama lainnya yang melibatkan antardaerah dan negara tetangga antara lain adalah dalam pengelolaan ekosistem pesisir dan laut seperti *Sulu-Sulawesi Marine Ecoregion (SSME)*, *Arafura and Timor Seas Action (ATSEA)*, *Mangrove For the Future (MFF)*, Selat Karimata, Teluk Tomini, Teluk Bone.

Untuk meningkatkan manfaat dan hasil di kawasan konservasi ekosistem dan pesisir, dilakukan program pemberdayaan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, dan

masyarakat pesisir lainnya agar tercipta alternatif usaha dan pengurangan eksploitasi sumberdaya ikan yang berlebihan. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan antara lain adalah: (i) pengembangan usaha alternatif bagi nelayan; (ii) bantuan modal dan sarana usaha seperti bibit, alat tangkap, dan lain-lain; serta (iii) pemberdayaan usaha garam rakyat (PUGAR). Sebagai hasil, pada tahun 2012, pemberdayaan masyarakat petambak garam telah berhasil mencapai produksi garam rakyat sebesar 1,32 juta ton dari 40 kab/kota.

Selanjutnya, untuk menjaga eksistensi NKRI dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil dilakukan identifikasi potensi dan pemetaan di 66 pulau kecil dan penyediaan infrastruktur di 102 pulau kecil. Infrastruktur yang dibangun di pulau-pulau kecil tersebut meliputi pembangunan dermaga, jalan dan listrik tenaga surya. Pada tahun 2013 akan dilakukan identifikasi potensi fasilitas penyediaan infrastruktur pada 60 pulau kecil.

Peningkatan potensi laut yang belum dimanfaatkan secara optimal dilakukan dengan pengembangan riset dan iptek kelautan. Pada tahun 2011 telah dilakukan penelitian dan pemetaan kerentanan kawasan pesisir akibat kenaikan muka air laut sebagai dampak perubahan iklim di beberapa kawasan pesisir, pengkajian stok sumber daya perairan laut di 3 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) yaitu Laut Cina Selatan, Teluk Tomini dan Laut Arafura. Pada tahun 2012 kegiatan ini dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas.

10.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26 persen pada tahun 2020, sebagai kontribusi dalam mengendalikan laju perubahan iklim global. Terkait dengan itu, pada tahun 2011 telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres Nomor 71 Tahun 2011 tentang Inventarisasi Gas Rumah Kaca, sebagai pedoman penurunan emisi di 5 (lima) sektor utama dan pemantauan penurunan emisi. Pada tahun 2012 telah dilakukan sosialisasi kedua Perpres tersebut dan pendampingan penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK). Pedoman penyusunan RAD-GRK diterbitkan melalui Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Lingkungan Hidup. Sampai dengan akhir tahun 2012, pendampingan terhadap Pemda Provinsi telah diselesaikan 33 RAD-GRK dan 29 diantaranya diterbitkan dalam Peraturan Gubernur terkait RAD-GRK, dan sisanya akan diselesaikan

tahun 2013.

Khusus untuk pelaksanaan RAN-GRK dari sektor kehutanan dan lahan gambut telah disusun rancangan Strategi Nasional *Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus* (REDD+). Untuk tingkat daerah, telah disusun pula RAD GRK sektor kehutanan dan lahan gambut dan Strategi dan Rencana Aksi Provinsi (SRAP) REDD+. Dalam rangka mempersiapkan lembaga pengelola REDD+ telah dikeluarkan Perpres 25 Tahun 2011 tentang Satgas REDD yang diperpanjang sampai dengan Juni 2013.

Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) telah mengkoordinasikan dukungan mitra internasional untuk penanganan perubahan iklim. Pada tahun 2009 telah dibentuk ICCTF. Melalui ICCTF, masyarakat internasional dapat menyalurkan dana komitmen perubahan iklim untuk dimanfaatkan secara efisien dan efektif mendukung pelaksanaan RAN-GRK. Pada tahun 2012, ICCTF telah mendanai kegiatan di bidang energi, kegiatan berbasis lahan (kehutanan dan pertanian), dan adaptasi serta resiliensi terhadap perubahan iklim. Pada tahun 2013, ICCTF mendanai 3 (tiga) proyek baru di bidang lahan gambut terdegradasi berkelanjutan, kajian kerentanan perubahan iklim di sektor kesehatan, dan pengelolaan hutan rakyat.

Untuk mendukung penguatan kapasitas mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta penanganan bencana, maka sistem Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (MKG) harus diperkuat dan diperluas cakupannya. Untuk penyediaan peringatan dini cuaca, informasi penerbangan dan maritim, pengembangan sistem peringatan dini iklim dan tsunami, serta solusi info untuk pertanian. Pada saat ini, kecepatan waktu penyediaan informasi gempa bumi dan tsunami telah ditingkatkan menjadi kurang dari 5(lima) menit. Selain itu, telah dilakukan pula percepatan penyebaran informasi cuaca ekstrim dan gempa bumi kepada masyarakat melalui pesan singkat (sms), *e-mail*, serta kerjasama dengan media massa dan media elektronika. Sehubungan dengan pengalaman kejadian gempa bumi 8,5 SR di wilayah pantai barat daya Pulau Sumatera 11 April 2012 lalu, maka BNPB, BMKG, dan kementerian/lembaga terkait akan menyusun *master plan* kesiapsiagaan dan sistem peringatan dini dalam rangkaantisipasi gempa bumi dan tsunami.

Untuk pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2011 tentang pengamanan produksi beras nasional dalam menghadapi kondisi iklim ekstrim, pada tahun 2012 telah diselesaikan: (i) pembangunansistem monitoring agroklimatotomatis sebanyak 65 di lokasi di daerah sentra produksi pangan; (ii)

pelaksanaan kegiatan sekolah lapang iklim di 18 provinsi sentra pangan; dan (iii) pemberian informasi iklim bulanan kepada instansi terkait paling lambat tanggal 5 setiap bulannya.

10.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2014

10.2.1 Permasalahan

Secara umum, pelaksanaan pembangunan SDA dan LH mengalami kemajuan, namun beberapa pencapaian sasaran RPJMN 2010-2014 membutuhkan kerja keras secara rinci, permasalahan pada masing-masing prioritas diuraikan sebagai berikut:

10.2.1.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Sebagian besar produksi komoditas pertanian mengalami peningkatan, namun peningkatan tersebut masih di bawah target RPJMN 2010-2014. Peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu pangan, pertanian, perikanan dan kehutanan masih dihadapkan pada permasalahan seperti belum optimalnya pelaksanaan program-program pendukung peningkatan produktivitas pangan seperti SL-PTT, SRI, dan GP3K intensifikasi sampai di lapangan; rendahnya akses petani terhadap input produksi; belum optimalnya penyaluran subsidi pupuk dan benih unggul; minimnya petani yang dapat memanfaatkan hasil penelitian, khususnya benih unggul; serta banyaknya infrastruktur pertanian dan perdesaan yang kondisinya tidak optimal. Permasalahan ketersediaan lahan baru dan konversi lahan pertanian juga masih menjadi kendala peningkatan produksi. Terbatasnya dukungan APBD dalam persiapan cetak sawah baru dan kurang sinkronnya antarprogram di lapangan berakibat pada dukungan-dukungan tersebut belum optimal untuk pencapaian produksi.

Khusus untuk produksi kedelai, permasalahan utama yang dihadapi yaitu penurunan luas panen dan rendahnya tingkat produktivitas; sehingga pasokan kedelai tidak stabil. Harga kedelai di tingkat petani yang kurang memberikan insentif bagi petani diiringi dengan sistem tataniaga kedelai impor yang tidak kondusif. Kurangnya pendampingan dan penyuluhan mempersulit pengawalan capaian produksi di lapangan. Peningkatan produksi dan produktivitas gula, dihadapkan pada permasalahan belum optimalnya revitalisasi industri gula, baik di tingkat produksi tebu maupun pembaharuan mesin pabrik pengolah gula tebu.

Terkait dengan upaya guna meningkatkan pemenuhan dan kualitas konsumsi pangan masih dihadapkan pada permasalahan tingginya harga komoditas pangan utama, masih rendahnya tingkat keragaman (diversifikasi) pangan, dan tingginya ketergantungan terhadap beras. Selain itu,

kondisi rawan pangan dan gizi buruk juga disebabkan selain oleh akses juga pendidikan dan lembaga gizi keluarga dan masyarakat.

Selanjutnya peningkatan daya saing dan pemasaran produk pertanian dan perikanan masih menghadapi rendahnya mutu hasil pertanian dan belum efisiennya rantai pemasaran produk pertanian.

Kendala mendasar untuk permodalan adalah rendahnya akses petani terhadap modal dan sumber pembiayaan terutama keterbatasan penjaminan pinjaman, belum adanya ketentuan dukungan pemerintah untuk asuransi pertanian, serta kurang dikenalnya petani dan nelayan di mata mitra usaha dan lembaga keuangan.

Untuk perikanan, beberapa permasalahan khususnya adalah belum memadainya dukungan infrastruktur perikanan (balai benih ikan, pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, kebersihan dan sanitasi) serta masih tingginya biaya input produksi (pakan, benih, BBM).

Selanjutnya, permasalahan utama bidang kehutanan dalam meningkatkan produksi kayu, menjaga konservasi hutan dan kelestarian kehati adalah belum seluruh kawasan hutan produksi terkelola dalam lembaga pengelola kawasan hutan (KPHP), masih luasnya hutan produksi *open access* yang berakibat pada timbulnya masalah tenurial dan tumpang tindih peraturan (pusat dan daerah).

10.2.1.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Kendala utama dalam peningkatan penyediaan energi di Indonesia saat ini adalah masih bertumpunya bauran energi pada minyak bumi (47,9 persen). Sementara tingkat produksi minyak bumi dari tahun ke tahun terus menurun. Hal ini disebabkan mayoritas sumur produksi (62 persen dari total 5000 sumur) yang ada saat ini merupakan sumur tua yang secara alamiah mengalami penurunan tingkat produksi sebesar 12 persen. Kegiatan *Enhance Oil Recovery* (EOR) telah dilakukan di beberapa lapangan minyak sebagai upaya menahan laju penurunan produksi sampai 3 persen. Selain itu, penurunan produksi ini disebabkan minimnya penemuan lapangan minyak baru yang cukup besar seperti di lapangan Cepu. Keterlambatan pengembangan lapangan Cepu dalam skala penuh turut menyebabkan rendahnya tingkat produksi minyak di tahun 2012. Selain itu, kapasitas kilang pengolahan BBM dalam negeri saat ini (1,16 MBCD) masih belum memenuhi kebutuhan dalam negeri (1,3 MBCD) sehingga impor BBM masih tinggi. Dari sisi regulasi, dengan adanya beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi dan dinamika

perkembangan industri minyak dan gas bumi memerlukan revisi terhadap Undang Undang Migas yang ada.

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi, dilakukan kebijakan diversifikasi energi melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan gas, konversi minyak ke gas dan pengembangan energi terbarukan terutama panas bumi. Kendala utama dalam implementasi diversifikasi energi gas adalah infrastruktur yang masih terbatas dan belum terintegrasi, mekanisme harga dan jaminan alokasi pasokan gas yang belum mendukung. Sementara kendala utama dalam implementasi diversifikasi energi terbarukan adalah harga yang belum menarik, tingginya investasi awal dan lamanya proses perijinan baik di pusat maupun daerah. Khusus untuk panas bumi yang sebagian besar berada di kawasan hutan lindung dan konservasi, proses perijinan pinjam pakai kawasan hutan memerlukan waktu yang lama sehingga kegiatan eksplorasi penambahan kapasitas pembangkit listrik menjadi tertunda. Selain itu, harga listrik hasil lelang tidak secara otomatis menjadi harga listrik dalam *Power Purchase Agreement* (PPA) sehingga masih harus dinegosiasikan dengan pihak PLN yang seringkali prosesnya memakan waktu lama.

Selain dari sisi penyediaan, kebijakan pengelolaan energi mencakup sisi pemanfaatan melalui konservasi/efisiensi energi. Sampai saat ini efisiensi energi Indonesia masih tergolong rendah. Beberapa permasalahan utama dalam pelaksanaan kebijakan konservasi energi adalah harga energi BBM maupun listrik subsidi yang relatif murah, tingkat kepedulian masyarakat yang masih rendah, penerapan standar dan label konservasi energi yang masih terbatas, penerapan manajemen energi yang masih terbatas dan penerapan regulasi konservasi energi di kalangan umum yang masih bersifat sukarela.

10.2.1.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Pada sektor pertambangan, permasalahan utama adalah kurangnya kepastian hukum terutama akibat banyaknya tumpang tindih baik antar Wilayah Ijin Usaha Pertambangan maupun dengan kawasan hutan atau perkebunan. Hal ini disebabkan belum ditetapkannya Wilayah Pertambangan sebagai amanat dari UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Selain itu, sebagai persiapan penerapan mekanisme lelang dalam proses perijinan di daerah, kapasitas pengelolaan database dan informasi geologi sumber daya mineral di daerah masih terbatas. Permasalahan lainnya adalah kurangnya pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup pada proses penambangan akibat belum optimalnya

kapasitas pemerintah daerah, baik dari kelembagaan maupun sumber daya manusianya. Permasalahan pertambangan rakyat menjadi permasalahan tersendiri walaupun sudah diatur dalam UU No. 4 tahun 2009 dan PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara namun dalam implementasinya seringkali mengabaikan kelestarian lingkungan, keselamatan kerja. Penataan pertambangan rakyat secara lebih baik selain akan meningkatkan konservasi pertambangan mineral dan batubara dan perlindungan lingkungan juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar lokasi pertambangan.

Terkait dengan kebijakan peningkatan nilai tambah mineral yang rencananya akan diterapkan sepenuhnya di tahun 2014, permasalahan utama adalah: ketersediaan teknologi dan sumber daya manusia masih terbatas; investasi yang besar dengan tingkat keuntungan rendah sampai sedang tergantung harga komoditas mineral; keterbatasan infrastruktur, terutama energi dan transportasi, memerlukan industri skala besar dan umumnya perusahaan pertambangan sudah terikat kontrak dengan pembeli/smelter luar negeri.

10.2.1.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Masih terus berlangsungnya aktivitas yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup, karena masih parsialnya penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan dan tidak komprehensif, sehingga perlu dipadukan: pemahaman; ketersediaan indikator (data dan info) ukuran kualitas yang disepakati; dorongan dan insentif penerapan; konsep pengawasan dan bimbingan pengendalian pencemaran; kelengkapan instrumen pengawasan dan pengendalian fisik dan non fisik.

Bervariasinya pemahaman masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan merupakan permasalahan yang ditemui, kondisi ini menyebabkan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan memperbaiki kerusakan lingkungan belum memadai. Selain itu, terkait dengan ketersediaan data dan informasi, masih terkendala dengan tingginya variasi dari data dan informasi di berbagai institusi. Tinggi atau rendahnya ketepatan dalam monitoring dan evaluasi kualitas lingkungan hidup, serta penyusunan pengelolaan lingkungan pada periode berikutnya ditentukan oleh tingkat akurasi data dan informasi. Untuk itu, diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup, kapasitas sumber daya manusia, serta sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi dengan baik.

10.2.1.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Permasalahan utama dalam peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan yaitu: (i) belum terselesaikannya penetapan dan pengukuhan tata batas kawasan hutan (batas luar dan batas fungsi); (ii) belum operasionalnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), sehingga pelaksanaan pengamanan fungsi dan daya dukung DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan tidak optimal; (iii) kurang akuratnya data info geo hutan dan lahan dan penerapan di lapangan mempersulit pengelola hutan di tingkat tapak untuk penindakan pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan.

Tata batas yang belum selesai menyebabkan ketidakjelasan status kawasan hutan sertarentan terhadap terjadinya konflik kepentingan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat. Tata batas yang belum definitif juga menghambat persetujuan substantif untuk penyelesaian rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten. Kawasan hutan yang masih menjadi “*open access*” menyebabkan kawasan hutan berpotensi menjadi rentan terhadap penebangan liar dan perambahan liar terhadap kawasan hutan. Tanpa adanya pengelola hutan di tingkat tapak melalui KPH, maka pengelolaan kawasan hutan tidak dapat dilaksanakan dengan baik, kerusakan hutan sulit dipantau, pelanggaran pemanfaatan kawasan hutan sulit ditindak secara hukum, rehabilitasi hutan dan lahan juga tidak dapat dijaga akuntabilitasnya, serta rendahnya upaya penyelamatan tanah dan air guna mendukung ketahanan pangan dan ketahanan air.

10.2.1.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Permasalahan yang dihadapi adalah masih adanya peluang praktek pencurian ikan (*illegal fishing*) baik oleh kapal-kapal domestik maupun kapal-kapal asing dan kurangnya sarana prasarana pengawasan menyulitkan penegakan hukum dan penanganan *illegal fishing*.

Kerusakan terjadi karena kegiatan perikanan yang merusak (*destructive fishing*) dan pembuangan bahan berbahaya pada ekosistem pesisir dan laut. Selain itu, abrasi pantai yang disebabkan karena degradasi mangrove akibat alih fungsi lahan mangrove (reklamasi), penebangan dan perluasan tambak secara berlebihan telah menurunkan kualitas dan kuantitas habitat dan pertumbuhan stok ikan.

Belum optimalnya pengelolaan pulau-pulau kecil yang sebagian besar merupakan kawasan tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan karena sarana dan prasarana dasar di pulau-pulau kecil seperti listrik, air, alat komunikasi dan transportasi penghubung belum memadai. Dengan tidak terkelolanya pulau-pulau kecil terutama di pulau terdepan,

dapat membuat penduduknya berorientasi ke negara tetangga yang membuat rentan ketahanan bangsa.

10.2.1.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim harus secara kontinyu dan dalam jangka panjang untuk mencegah dampaknya sejak dini.

Permasalahan yang dihadapi antara lain: (i) Pemahaman dan kapasitas pemanfaatan info secara dini masih belum optimal. Diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas data dan penyediaan sistem informasi yang cepat, tepat dan akurat dalam rangka mendukung penanganan perubahan iklim dan bencana alam tersebut di atas;(ii) Ketersediaan teknologi instrumentasi untuk penyampaian informasi masih rendah. Diperlukan penambahan sebaran peralatan observasi dan kalibrasi, metoda diseminasi informasi peringatan dini gempa dan potensi tsunami, cuaca dan iklim ekstrim, serta produk informasi MKKuG lainnya kepada masyarakat yang lebih luas.

10.2.2 Sasaran

Secara umum, sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan SDA dan LH pada RKP 2014 adalah sebagai berikut: (i) meningkatnya produksi bahan pangan dalam negeri; (ii) Meningkatnya ketersediaan sumber daya energi dan pasokan energi; serta (iii) Tetap terjaga kualitas air, udara, lahan dan hutan.

10.2.2.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Sasaran utama prioritas Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan pada tahun 2014 adalah: (i) meningkatnya pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 3,9 persen, (ii) meningkatnya produksi padi menjadi 76,57 juta ton GKG, jagung 20,82 juta ton pipilan kering dan kedelai 20,05 persen untuk mendukung surplus beras 10 juta ton di 2014; tebu 3,1 juta ton, daging sapi/kerbau 0,53 juta ton, dan ikan menjadi 22,39 juta ton; (iii) Meningkatnya cadangan pangan pemerintah menjadi minimal 1 juta ton beras, serta berkembangnya cadangan pangan pemerintah daerah dan masyarakat; (iv) Membaiknya kualitas konsumsi pangan masyarakat dengan pencapaian skor PPH sebesar 93,3.

Sementara itu, sasaran utama di bidang perikanan adalah: (i) meningkatnya produksi perikanan menjadi 22,39 juta ton yang terdiri dari perikanan tangkap sebesar 5,50 juta ton dan perikanan budidaya sebesar 16,89 juta ton; (ii) meningkatnya konsumsi ikan menjadi 38 kg per kapita per tahun; (iii) meningkatnya nilai ekspor hasil perikanan hingga mencapai sebesar USD 5 miliar; (iv) meningkatnya kehidupan nelayan, terutama di 116 Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

Sasaran utama pembangunan di bidang kehutanan adalah: (i) pengembangan KPHP di 18 provinsi; (ii) meningkatnya produksi hasil hutan kayu sebesar 1 persen menjadi 5,70 juta m³, dan hasil hutan bukan kayu/jasa lingkungan sebesar 1 persen menjadi 421.853 ton; (iii) terbitnya IUPHHK-HA/RE pada areal bekas tebangan (*logged over area*) seluas 750.000 ha; (iv) meningkatnya luas areal pencadangan ijin usaha pemanfaatan hutan tanaman sebesar 750.000 ha dan areal tanaman sebesar 550.000 ha; (v) terpenuhinya bahan baku dari hutan tanaman dan limbah (kumulatif) sebesar 75 persen menjadi 50,44 juta m³; (vi) terbangunnya hutan kemasyarakatan dan hutan desa seluas 500.000 ha; (vii) terbangunnya hutan rakyat kemitraan untuk bahan baku kayu industri pertukangan seluas 50.000 ha; (viii) sertifikasi 500 orang penyuluh kehutanan; dan (ix) terselenggaranya pendidikan dan pelatihan aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM kehutanan lainnya sebanyak 3.000 orang.

10.2.2.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan ketahanan dan kemandirian energi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut: (i) tercapainya produksi minyak bumi antara 900 sampai 930 ribu BOPD, produksi gas bumi sebesar 1.360 sampai 1.390 ribu BOEPD dan produksi CBM sebesar 113,2 ribu BOEPD; (ii) tersedianya cadangan minyak bumi menjadi 7,06 miliar STB, gas bumi 145 TSCF; (iii) tercapainya penambahan jaringan gas kota di 4 (empat) kota dengan total 16 ribu sambungan; dan (iv) tercapainya pengalihan pemakaian minyak tanah ke LPG sebesar 77,7 persen; (v) tercapainya penggunaan panas bumi PLTP 1404 MW.

10.2.2.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Sasaran produksi pertambangan mineral dan batubara yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah: (i) produksi batubara 309 juta ton, dengan *Domestic Market Obligation* sebanyak 110 ton; (ii) produksi timah sebesar 110,25 ribu ton; (iii) produksi bijih nikel sebesar 12,32 juta ton, feronikel sebesar 20 ribu mt, dan nikel matte sebesar 91 ribu ton; (iv) produksi bauksit sebesar 11,46 juta mt; (v) produksi konsentrat tembaga sebesar 945 ribu ton; (vi) produksi emas sebesar 118 ton dan perak sebesar 274 ton; dan (vii) produksi bijih besi sebesar 4,6 juta mt.

10.2.2.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Sasaran utama perbaikan kualitas lingkungan hidup di tahun 2014 adalah meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional. Sasaran khusus yang hendak dicapai adalah: (i) terkendalinya pencemaran lingkungan; (ii) menurunnya kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembangunan; (iii) terselesaikannya peraturan perundang-undangan operasional di bawah undang-undang 32 tahun 2009, dan terlaksananya

kepastian hukum; (iv) meningkatnya pengelolaan keanekaragaman hayati berdasarkan IBSAP; dan (v) meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia pengelola lingkungan yang responsif gender (di pusat dan daerah).

10.2.2.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Sasaran utama peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan adalah: (i) terselesaikannya tata batas kawasan hutan (batas luar dan batas fungsi) sepanjang 13.000km, (ii) beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebanyak 30 unit, dan (iii) meningkatnya hasil rehabilitasi hutan dan lahan seluas 271.362 ha. Sasaran utama pembangunan lainnya adalah: (iv) menurunnya konflik dan tekanan terhadap kawasan Taman Nasional dan kawasan konservasi lainnya (cagar alam, suaka margasatwa, taman buru, hutan lindung) sebesar 1 persen, (v) meningkatnya populasi spesies prioritas utama yang terancam punah sebesar 1 persen dari target tahun 2013, dan (vi) menurunnya *hotspot* di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, dan Pulau Sulawesi sebesar 67,2 persen dan luas kebakaran hutan sebesar 50 persen dari rerata tahun 2005-2008.

10.2.2.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Sasaran yang akan dicapai dalam pengelolaan sumber daya kelautan adalah: (i) meningkatnya kebijakan pengelolaan kelautan secara terpadu; (ii) meningkatnya wilayah yang bebas dari *illegal fishing* dan dari kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan menjadi sebesar 39 persen; (iii) pengelolaan kawasan konservasi laut dan perairan seluas 4,5 juta hektar; (iv) terpeliharanya kerja sama internasional, regional, dan antardaerah dalam bidang pengelolaan sumber daya laut; (v) tersusunnya rencana pengelolaan laut, pesisir dan pulau-pulau kecil di 10 lokasi; (vi) terwujudnya penyediaan infrastruktur di 30 pulau-pulau kecil dan pemetaan potensi pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan/terluar di 30 pulau; (vii) peningkatan produksi garam rakyat menjadi 3,3 juta ton; dan (viii) meningkatnya riset pengembangan teknologi kelautan dan penerapannya untuk mendukung pembangunan kelautan.

10.2.2.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Sasaran untuk peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam pada tahun 2014 adalah meningkatnya keakuratan dan kemampuan jangkauan informasi dini iklim dan bencana ke seluruh wilayah Indonesia, untuk mendukung Inpres 5 tahun 2011 dan Inpres 4 tahun 2012. Sedangkan sasaran untuk peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tahun 2014 ini adalah meningkatnya pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim sesuai dengan RAN/RAD-GRK, tersedianya status dan tingkat emisi GRK

hasil inventarisasi, dan terlaksananya rencana aksi adaptasi di tingkat nasional yang meliputi beberapa sektor prioritas.

10.3 Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2013

Dengan memperhatikan permasalahan dan sasaran yang akan dicapai, maka kebijakan pembangunan SDA dan LH diarahkan untuk: (i) mendukung peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian, perikanan dan kehutanan sebesar 3,7-3,9 persen, mewujudkan daya saing ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; serta (ii) meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Secara rinci, arah kebijakan pada masing-masing prioritas diuraikan sebagai berikut.

10.3.1 Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Pada tahun 2014, arah kebijakan peningkatan ketahanan pangan dan revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan difokuskan pada:

1. Peningkatan produksi padi untuk menuju surplus beras 10 juta ton pada tahun 2014, serta peningkatan swasembada produk bahan pangan utama lainnya, yaitu: jagung, kedelai, gula, daging sapi, dan ikan. Dalam arah kebijakan ini, penekanan akan dilakukan dalam: (i) meningkatkan produktivitas melalui kegiatan Sekolah Lapang Pengembangan Tanaman Terpadu (SL-PTT), SRI, pencetakan sawah baru, dan GP3K (melalui intensifikasi); (ii) penanganan pasca panen; (iii) meningkatkan kualitas pelaksanaan penyediaan subsidi pupuk dan benih; (iv) merehabilitasi dan membangun jaringan irigasi pertanian dan perikanan; (v) melakukan perluasan areal tanam baru (melalui cetak sawah, penyiapan lahan pertanian beririgasi, dan perluasan areal tanam lahan kering); (vi) meningkatkan penelitian, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk penyediaan benih/bibit unggul dan tahan gangguan iklim, serta penyuluhan; (vii) meningkatkan pengendalian organisme pengganggu tanaman, kesehatan hewan/ikan; (viii) harmonisasi peraturan perundangan di sektor pertanian; (ix) meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim; (x) meningkatnya pemanfaatan kapal > 30 GT dalam meningkatkan produksi perikanan; dan (xi) meningkatkan operasional pelabuhan perikanan UPT Pusat dan pengembangan PPN Pelabuhan Ratu dan PPS Bitung serta pemanfaatan pelabuhan/pendaratan ikan UPTD Daerah dalam pelayanan usaha perikanan termasuk pengembangan PP Sorong.
2. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat akan dilakukan melalui: (i) peningkatan ketersediaan sumber pangan beragam; (ii) memasyarakatkan pola pangan yang

sehat, bergizi dan seimbang; serta (iii) melakukan langkah percepatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat (salah satunya dengan melanjutkan kegiatan Rumah Pangan Lestari).

3. Kebijakan dan strategi peningkatan nilai tambah, daya saing, dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan kehutanan diarahkan untuk: (i) meningkatkan investasi produksi dan mengembangkan industri pengolahan (agroindustri) hasil pertanian, perikanan, dan kehutanan, serta industri pangan olahan berbasis pangan lokal; (ii) mengembangkan kebijakan dan kerjasama internasional terutama dalam meningkatkan daya saing perdagangan produk pertanian di tingkat internasional; (iii) meningkatkan pengendalian, pengawasan dan advokasi tentang mutu, keamanan, dan kehalalan produk pertanian, serta meningkatkan sertifikasi mutu bahan pangan sesuai dengan standar nasional Indonesia dan standar negara importir; (iv) mendukung penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan efisiensi dan efektifitas rantai pasok dan rantai nilai.
4. Arah kebijakan dan strategi peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan adalah: (i) melanjutkan program dukungan kepada kelompok petani melalui Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan (PUAP) dan penguatan PUMP perikanan serta PUGAR; (ii) menyediakan sumber-sumber permodalan bagi petani/nelayan/pembudidaya ikan disertai peningkatan akses petani terhadap sumber permodalan melalui pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha pertanian, (iii) penerapan subsidi pupuk dan benih serta subsidi BBM untuk nelayan yang tepat sasaran; (iv) mendorong harga komoditas pertanian yang kondusif di tingkat petani; (v) mendorong realisasi penggunaan KKPE; serta (vi) perlindungan harga komoditas pertanian di tingkat petani.
5. Peningkatan pengelolaan produksi kehutanan berkelanjutan diarahkan pada : (i) perbaikan tata kelola hutan produksi melalui operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), (ii) penerapan sistem silvikultur, (iii) pemanfaatan hutan produksi berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB), (iv) prioritas penanaman pada lahan bekas tebangan (*logged over area*), serta (v) pengembangan hutan kemasyarakatan dan hutan desa. Untuk mendukung kebijakan pendukung akan difokuskan pula pada peningkatan dan pengembangan penyuluhan,

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk sumber daya manusia kehutanan serta peningkatan kualitas data dan informasi hutan dan pelengkapan peraturan yang mendukung pengelolaan hutan lestari/berkelanjutan.

10.3.2 Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi

Arah kebijakan untuk menjamin dan meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi difokuskan pada tiga hal pokok, yaitu: (i) intensifikasi kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan optimasi produk energi fosil serta meningkatkan cadangan energi fosil; (ii) diversifikasi jenis energi dengan memanfaatkan EBT serta energi bersih yang dimaksudkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil; dan (iii) efisiensi dan konservasi energi baik pada sisi penyediaan (*supply side management*) dan pemanfaatan (*demand side management*)

Intensifikasi ketersediaan energi akan dilakukan dengan menerapkan kebijakan pada pra kontrak kerjasama dan pelaksanaan kontrak kerjasama. Beberapa kebijakan dan strategi pada pra kontrak kerjasama yaitu: (i) mempercepat pengambilan dan pengolahan data potensi sumber daya minyak dan gas bumi melalui pengolahan data seismik 2D, terutama di daerah lepas pantai dan *remote*; (ii) meningkatkan pelayanan publik melalui pengelolaan, penyediaan serta penyebarluasan data dan informasi geologi sumber daya minyak dan gas bumi; (iii) meningkatkan daya tarik investasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi; (iv) menyiapkan dan mempromosikan penawaran wilayah kerja minyak dan gas bumi. Sementara dari sisi pelaksanaan kontrak kerja sama, kebijakan dan strategi yang akan digunakan adalah: (i) meminimalisasi jumlah *unplanned shutdown*; (ii) mendorong pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi tinggi seperti *Enhanced Oil Recovery* (EOR) terutama untuk peningkatan produksi di sumur-sumur yang sudah tua/marjinal; dan (iii) meningkatkan kualitas monitoring volume produksi minyak dan gas bumi.

Beberapa kebijakan diversifikasi energi yang akan dilakukan adalah: (i) meningkatkan persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri; (ii) meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi; dan (iii) menyempurnakan sistem subsidi BBM dan listrik. Strategi untuk meningkatkan persentase pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri antara lain: (i) meningkatkan pasokan alokasi gas bumi untuk kebutuhan pembangkit listrik, pupuk/non-pupuk, industri petrokimia, rumah tangga, dan transportasi; (ii) membangun *Small Scale LNG Receiving Terminal* guna menerima dan menyimpan pasokan/penyediaan gas pembangkit listrik, dan kilang mini LPG untuk memasok gas rumah tangga; (iii) membangun sistem jaringan distribusi gas

(SPBG) untuk angkutan umum dan jaringan distribusi pipa gas kota untuk melayani rumah tangga; dan (iv) mengembangkan penggunaan bahan bakar gas untuk transportasi. Sementara itu, strategi yang akan diterapkan untuk meningkatkan kapasitas terpasang panas bumi adalah: (i) pemanfaatan fasilitas *geothermal fund* untuk mengurangi resiko hulu pada tahap eksplorasi panas bumi; (ii) peningkatan kualitas data cadangan/*reserves*; (iii) peningkatan sosialisasi prosedur pelelangan Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi; (iv) percepatan pembahasan negosiasi PPA (*Power Purchase Agreement*), salah satunya melalui kebijakan *Feed in Tariff*; dan (v) penyelesaian konflik tumpang tindih lahan antara kawasan hutan dengan WKP panas bumi. Untuk kebijakan penyempurnaan sistem subsidi BBM dan listrik, strategi yang akan dilakukan adalah: (i) peningkatan penggunaan bahan bakar gas di sektor ketenagalistrikan, transportasi, industri, dan rumah tangga; (ii) peningkatan pembangkit listrik berbahan bakar gas, batubara, dan panas bumi; dan (iii) peningkatan bahan bakar nabati dan non nabati sebagai sumber energi.

Efisiensi dan konservasi energi dari sisi pemanfaatan dapat dilakukan melalui 2 (dua) kebijakan yaitu: (i) meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi; dan (ii) meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Strategi untuk meningkatkan perilaku hemat energi yang digunakan adalah: (i) meningkatkan kesadaran perilaku hemat energi bagi aparat pemerintah, badan usaha, dan masyarakat; (ii) memfasilitasi bantuan pinjaman finansial yang murah melalui bank lokal bagi pelaksanaan efisiensi energi untuk badan usaha dan masyarakat; (iii) menerapkan insentif dan disinsentif bagi sektor industri termasuk labelisasi hemat dan audit energi dalam rangka mendukung mandatori manajemen dan penghematan energi; dan (iv) memperkuat kerjasama bilateral dan multilateral dalam rangka mitigasi perubahan iklim guna mendukung *green energy* dan *green growth*. Sedangkan strategi untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan adalah: (i) mengembangkan regulasi untuk mendorong pemanfaatan energi baru dan terbarukan terutama pemberian insentif dan kebijakan harga agar dapat bersaing dengan energi konvensional; (ii) meningkatkan investasi untuk pengembangan dan pembangunan energi baru dan terbarukan; dan (iii) mengembangkan industri dan jasa pendukung.

10.3.3 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan

Arah kebijakan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya mineral dan pertambangan difokuskan pada dua hal pokok yaitu: (i) Peningkatan nilai tambah potensi keekonomian, pemanfaatan bahan galian dan mineral ikutan pada daerah dan bekas daerah pertambangan; dan (ii) Optimalisasi penerapan kaidah konservasi dalam perusahaan pertambangan baik pada tahap eksplorasi, eksploitasi dan pasca tambang.

Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah mineral dan batubara adalah : (i) Mendorong pembangunan sarana dan prasarana pengangkutan batubara untuk keperluan pasar dalam negeri; (ii) Menjamin keamanan pasokan batubara dalam negeri melalui *Domestic Market Obligation* (DMO) terutama sebagai bahan bakar pembangkit tenaga listrik sesuai dengan UU 30 Tahun 2007; (iii) Mengatur harga batubara di dalam negeri dengan mengacu kepada indeks harga batubara ekspor; (iv) Memberikan kepastian dan transparansi di dalam kegiatan usaha pertambangan sesuai Undang-undang No. 4 Tahun 2009 dengan sanksi pelanggaran ketentuan, dll; (v) Melaksanakan peningkatan pembinaan dan pengawasan; (vi) Mengusahakan penambahan nilai tambah hasil pertambangan dengan Mengembangkan industri pengolahan dan pemurnian (*smelter*) untuk mengubah bahan-bahan mentah mineral logam dan non logam menjadi bahan setengah jadi atau bahkan menjadi bahan final; (vii) Mendorong peningkatan penerimaan negara dan investasi; (viii) Mempercepat penetapan Wilayah Pertambangan melalui koordinasi dengan DPR dan pemerintah daerah.

Beberapa kebijakan dan strategi yang akan dilakukan untuk mengurangi dampak negatif usaha pertambangan yaitu: (i) mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan melalui pembinaan lindungan, keselamatan operasi, dan usaha penunjang bidang pertambangan; (ii) mencegah kerusakan cadangan mineral dan batubara serta mengembangkan wilayah pencadangan tambang nasional dengan melakukan *best mining practices* dan menerapkan mekanisme *depletion premium*; (iii) meningkatkan rehabilitasi kawasan bekas tambang; dan (iv) mitigasi, pengembangan teknologi, dan fasilitasi dalam rangka penetapan langkah-langkah penanggulangan krisis energi dan bencana geologi.

10.3.4 Perbaikan Kualitas Lingkungan Hidup

Kebijakan umum dalam upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup adalah meningkatkan kualitas daya dukung lingkungan hidup (air, udara dan lahan) agar kemampuannya dapat pulih kembali dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. Perbaikan kualitas lingkungan hidup tersebut

diharapkan dapat tercermin pada meningkatnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional. Pada tahun 2014, arah kebijakan tersebut terus dilanjutkan, yang terutama difokuskan pada: (i) penurunan beban pencemaran lingkungan dan penekanan laju kerusakan SDA dan lingkungan hidup, dengan perkuatan peran aktif daerah melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (ii) peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan rehabilitasi kawasan yang rusak; dan (iii) penegakan hukum, penguatan tata kelola lingkungan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dengan arahan ini diharapkan pola pembangunan yang dilakukan memenuhi kaidah keberlanjutan (*pro-environment*) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui strategi: (i) pengendalian dan pemantauan pencemaran air, tanah/lahan, udara, dan atmosfer; (ii) peningkatan upaya rehabilitasi serta pembangunan kawasan konservasi; (iii) penyelesaian review dokumen *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP); (iv) perbaikan kerangka regulasi dan penegakan hukum lingkungan secara konsisten, antara lain melalui penyelesaian peraturan operasional dari UU No. 32 Tahun 2009; (v) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan institusi pengelola lingkungan hidup; (vi) pengembangan penelitian lingkungan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan; (vii) peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup; dan (vi) kampanye penyadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup.

10.3.5 Peningkatan Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Hutan

Kebijakan dalam peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan pada tahun 2014 tetap diarahkan pada: (i) Percepatan penyelesaian persoalan dalam pengelolaan hutan konservasi, dan (ii) Peningkatan upaya konservasi dan penyelamatan hutan konservasi serta rehabilitasi sumber daya hutan.

Percepatan penyelesaian persoalan pengelolaan hutan konservasi difokuskan pada percepatan pengukuhan dan pemantapan kawasan hutan, percepatan beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan penyediaan sumber daya manusia pengelola KPH yang profesional, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai serta peningkatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi potensi sumber daya hutan.

Peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan difokuskan pada peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan, peningkatan fungsi dan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta pengembangan penelitian dan iptek sektor kehutanan. Peningkatan konservasi keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan akan dilakukan melalui pengembangan dan pengelolaan Taman Nasional dan kawasan konservasi sumber daya alam lainnya (suaka margasatwa, cagar alam, taman buru, dan hutan lindung). Peningkatan fungsi dan daya dukung DAS utamanya akan dilakukan melalui penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan serta pengelolaan DAS. Sementara itu, pengambilan kebijakan, pengelolaan teknis kehutanan dan pengayaan iptek akan didukung melalui hasil penelitian dan pengembangan iptek sektor kehutanan.

10.3.6 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

Arah kebijakan Peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan fungsi laut sebagai penyedia pangan meliputi: (i) peningkatan rehabilitasi, konservasi, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan; (ii) peningkatan pendayagunaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta tata kelola sumber daya kelautan; dan (iii) pengembangan iptek kelautan. Pada tahun 2014 masing-masing arah kebijakan akan difokuskan pada hal-hal sebagai berikut:

Arah kebijakan peningkatan rehabilitasi, konservasi, pengendalian, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dilakukan melalui upaya: (i) peningkatan aktivitas sistem pengendalian dan pengawasan terpadu dalam penanganan *illegal fishing* dan kegiatan-kegiatan yang merusak ekosistem; (ii) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; (iii) peningkatan konservasi, rehabilitasi ekosistem pesisir, khususnya penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi perairan; serta (iv) peningkatan kerja sama internasional, regional, dan antar daerah dalam bidang konservasi dan rehabilitasi kawasan pesisir, terutama di wilayah segitiga terumbu karang (*coral triangle*).

Arah kebijakan peningkatan pendayagunaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil serta tata kelola sumber daya kelautan akan difokuskan pada: (i) penetapan kebijakan pembangunan kelautan dan negara kepulauan melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan secara terpadu di wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; (ii) identifikasi potensi sumber daya dan kebutuhan masyarakat di pulau-

pulau kecil, serta pengembangan investasi di pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan bekerja sama dengan masyarakat/swasta; (iii) penyusunan Rencana Tata Ruang/Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; (iv) pengembangan produk kelautan, terutama garam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara bertahap menurunkan ketergantungan terhadap garam impor; (v) peningkatan kemampuan adaptasi masyarakat di wilayah pesisir terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam melalui pengembangan desa pesisir tangguh; serta (vi) peningkatan kerja sama pengelolaan sumber daya kelautan antar daerah, baik di kawasan ASEAN, maupun lingkup internasional.

Arah kebijakan pengembangan iptek kelautan dilakukan untuk meningkatkan sumbangan sumber daya kelautan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, arah kebijakannya difokuskan pada: (i) peningkatan kuantitas dan kualitas riset dan pengembangan teknologi kelautan; (ii) peningkatan penerapan dan diseminasi hasil-hasil riset teknologi kelautan terutama dikaitkan dengan perubahan iklim; serta (iii) meningkatkan sarana dan prasarana pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

10.3.7 Peningkatan Kualitas Informasi Iklim dan Bencana Alam serta Kapasitas Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim

Kebijakan umum diarahkan pada upaya peningkatan kualitas dan jangkauan sistem informasi dini cuaca dan iklim ekstrim, peningkatan upaya penurunan emisi GRK dan peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, penguatan tanggap darurat bencana, dan pembangunan *shelter* bencana alam.

Selanjutnya, kebijakan dan strategi pada upaya peningkatan kualitas dan jangkauan sistem informasi dini cuaca dan iklim ekstrim diarahkan untuk: (i) peningkatan akurasi, kecepatan, dan jangkauan penyampaian informasi ke seluruh wilayah Indonesia (sampai dengan tingkat kecamatan), dengan menambah dan membangun jaringan observasi, telekomunikasi dan sistem kalibrasi; (ii) pendirian Pusat Basis Data dan informasi yang terintegrasi; dan (iii) peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan kelembagaan dalam pengelolaan sistem informasi. Di samping itu, dalam upaya peningkatan upaya penurunan emisi GRK dan peningkatan kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, terutama diarahkan pada: penurunan emisi GRK melalui implementasi dari RAN/RAD-GRK beserta penguatan monitoring dan evaluasinya, peningkatan pemahaman dan kapasitas dalam penanganan perubahan iklim, dan

pengembangan penelitian dan inovasi teknologi untuk penurunan gas rumah kaca.

Dalam rangka penguatan tanggap darurat bencana, dan pembangunan *shelter* diarahkan pada pembangunan desa tangguh – termasuk pembentukan tim reaksi cepat di tingkat desa, serta pembangunan dan peningkatan shelter beserta sarana dan prasarana penunjang.

BAB 11

SISTEM PENDUKUNG MANAJEMEN PEMBANGUNAN NASIONAL

11.1 Kondisi Umum

Dalam pelaksanaan pembangunan, dibutuhkan manajemen pembangunan yang memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian (pengawasan dan pemantauan), serta evaluasi kinerja yang saling berkaitan dalam satu sistem. Pelaksanaan manajemen pembangunan nasional membutuhkan sistem pendukung yang baik, antara lain terkait dengan perencanaan pembangunan, ketersediaan data dan informasi statistik, serta pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Perencanaan pembangunan mempunyai posisi strategis dalam memberikan arahan yang jelas dan terukur bagi proses pembangunan melalui pilihan prioritas dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya. Oleh karena itu, upaya penguatan bidang perencanaan pembangunan nasional menjadi hal yang penting. Upaya penguatan tersebut dilakukan antara lain melalui penguatan proses dan penajaman perumusan rencana pembangunan dalam musyawarah perencanaan pembangunan, baik pada tingkat daerah (kabupaten/kota dan propinsi) maupun nasional, termasuk penguatan hubungan kelembagaan perencanaan dan keterlibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), serta peningkatan kapasitas para perencana pembangunan di daerah dan kementerian/lembaga. Penguatan ini sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional yang (i) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (ii) mendorong terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (iii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; (iv) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (v) menuju tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan

nasional ditujukan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), jangka menengah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Dalam penyusunan RKP, Kementerian PPN/Bappenas melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), melalui musyawarah perencanaan pembangunan nasional (musrenbangnas) yang sebelumnya telah melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, kabupaten bahkan sampai ke desa. Dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2012 difokuskan pada upaya penyempurnaan revitalisasi dengan langkah-langkah berikut:

1. Peningkatan Kualitas Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (UKPPD);
2. Peningkatan Kualitas Pembahasan dalam Pra Musrenbangnas dan Pasca Musrenbangnas;
3. Kemudahan Penyampaian Usulan Kegiatan melalui Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Usulan Kegiatan dan Pendanaan Pembangunan Daerah (SI-UKPPD) *online*;
4. Kemudahan Pelaksanaan Pra Musrenbangnas dan Pasca Musrenbangnas, yaitu kemudahan, percepatan dan keakuratan dalam pembahasan Trilateral Desk antara Pemerintah Daerah, K/L serta Bappenas;
5. Kemudahan Penyusunan Laporan Pelaksanaan dan Bahan Penyempurnaan Dokumen RKP dan Renja K/L.

Dalam rangka meletakkan landasan implementasi anggaran berbasis kinerja, *unified budget* dan kerangka pengeluaran jangka menengah, telah dilakukan penyusunan RKP Tahun 2013 (Perpres No. 54 Tahun 2012) dan Rencana Kerja K/L (Renja K/L) yang di dalamnya termasuk restrukturisasi program, kegiatan dan anggaran kementerian/lembaga yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip penganggaran berbasis kinerja, yaitu (i) alokasi anggaran berorientasi pada kinerja, (ii) fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan menjaga prinsip akuntabilitas, dan (iii) pengalokasian anggaran untuk mendanai kegiatan didasarkan pada tugas

dan fungsi unit kerja.

Untuk menjangkau aspirasi dan masukan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam rangka identifikasi masalah dan temuan hasil-hasil pembangunan. Pada tahun 2012, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam Penyusunan RKP Tahun 2013 dengan pembahasan pada 5 (lima) bidang pembangunan, yaitu: (1) Ekonomi; (2) Kesejahteraan Rakyat (pencapaian target-target MDGs); (3) Tata Pemerintahan (*Governance*); (4) Demokratisasi; dan, (5) Anti Korupsi. Hasil FKP dimanfaatkan untuk menjadi salah satu bahan bagi penyusunan RKP Tahun 2013. Sebagai FKP lanjutan, dilaksanakan FKP Monitoring dan Evaluasi dengan pembahasan pada dua bidang, yaitu pendidikan dan politik dan demokrasi. Tindak lanjut dari pertemuan FKP Monev di bidang pendidikan akan dilakukan diskusi kontinyu dan mendalam antara OMS dan Bappenas dalam kaitannya dengan penyusunan background study penyusunan RPJMN 2015-2019 yang akan dimulai pada awal tahun 2013.

Selain itu, dalam rangka pencapaian prioritas pembangunan nasional dan sinergitas antar daerah, antarruang dan antarwaktu, Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2012 berperan dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan nasional antara lain Rencana Aksi Nasional/Rencana Aksi Daerah (RAN/RAD) Gas Rumah Kaca (GRK), RAN/RAD MDGs, kordinasi *Millennium Challenge Corporation* (MCC), perencanaan MP3EI, isu-isu national connectivity, serta berbagai kebijakan pembangunan nasional lainnya. Pencapaian lain sampai akhir tahun 2012 adalah terlaksananya berbagai pemantauan dan evaluasi terhadap capaian RPJMN 2010-2014 dan RKP 2011, kinerja pembangunan daerah (33 provinsi) dan Evaluasi Dua Tahun Pelaksanaan RPJMN 2010-2014 yang disusun berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari K/L mitra kerja (*self evaluation*).

Untuk tahun 2013, langkah strategis yang dilakukan meliputi: (1) pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI); (2) pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Penurunan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) 2012-2025; (3) percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan (4) pengarusutamaan Pembangunan yang Berkelanjutan: RAN-GRK dan REDD+. Sejalan dengan penerapan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, langkah penguatan

pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja pemerintah masih akan dilakukan.

Salah satu indikator yang digunakan untuk mendukung proses perencanaan yang baik dan sekaligus menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan adalah ketersediaan data dan informasi statistik yang andal dan berkualitas. Ketersediaan data yang baik tidak hanya ditentukan oleh kualitas para pelaksana kegiatan statistik, tetapi juga sangat tergantung pada tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya data statistik. Masyarakat sebagai sumber data yang menyadari arti dan kegunaan statistik akan memberikan jawaban secara benar, jujur, dan objektif. Di sisi lain, kepedulian masyarakat terhadap data dan informasi statistik yang semakin meningkat juga membutuhkan kesiapan penyediaan dan pelayanan prima.

Untuk memenuhi kebutuhan data yang berkesinambungan, kegiatan-kegiatan rutin tetap dilaksanakan setiap tahunnya seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), Survei Upah, Survei Industri Besar dan Sedang, Survei Pertambangan, Energi dan Konstruksi, Survei Harga Konsumen, Survei Harga Perdagangan Besar, Survei Transportasi, Survei Bidang Jasa dan Pariwisata, Penyusunan Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan lain sebagainya. Demikian juga untuk kegiatan kompilasi statistik, seperti kegiatan kompilasi data statistik ekspor dan impor.

Pencapaian pembangunan di bidang statistik tahun 2010-2012 meliputi terlaksananya kegiatan statistik yang bersifat periodik dan rutin. Pencapaian bersifat periodik pada kurun waktu ini meliputi:

1. Terlaksananya Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) yang dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan seluruh Kedutaan Besar Indonesia di luar negeri, untuk mencatat penduduk Indonesia baik secara *de facto* maupun *de jure*. Aktivitas ini menyajikan data kependudukan sampai tingkat administrasi terkecil yang berguna sebagai evaluasi program pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional;
2. Pendataan Potensi Desa 2011 (Podes), menyajikan statistik wilayah kecil yang diharapkan dapat digunakan dalam perencanaan pembangunan wilayah yang

bertumpu pada kondisi lokasi;

3. Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011. PPLS menghasilkan *database* kemiskinan mikro/rumah tangga sasaran penerima program bantuan dan perlindungan social;
4. Survei Biaya Hidup (SBH) 2012, yang bertujuan memperoleh diagram timbang yang baru serta memperluas cakupan penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 66 kota menjadi 86 kota, sehingga diperoleh angka tingkat inflasi yang lebih akurat;
5. Penyempurnaan Diagram Timbang Nilai Tukar Petani (NTP) 2012, bertujuan memperbaharui diagram timbang NTP yang akan digunakan sebagai dasar penghitungan indeks harga (nilai tukar) yang diterima petani;
6. Dalam rangka mempersiapkan aktivitas periodik berskala besar yaitu ST 2013, telah dilaksanakan Persiapan ST 2013 yang terdiri dari enam aktivitas meliputi: Gladi bersih ST2013, *Updating* Direktori Perusahaan ST2013, Publisitas Persiapan ST2013, *Workshop* Wartawan, Persiapan ST2013, dan Kajian Batas Minimum Usaha ST2013.

Selanjutnya, guna menjaga kesinambungan data, sepanjang tahun 2010-2012 juga telah dilaksanakan berbagai aktivitas rutin tahunan seperti SUSENAS, SAKERNAS, Survei Industri Besar Sedang, Survei Pertanian Tanaman Pangan, Survei Statistik Harga Konsumen, dan berbagai kegiatan survei lainnya. Beberapa aktivitas rutin yang diselenggarakan pada tahun 2012 dalam rangka memenuhi kebutuhan indikator kinerja pemerintah dengan sampel yang cukup besar, meliputi antara lain:

1. SUSENAS dengan jumlah sampel 310.000 rumah tangga menyajikan statistik konsumsi dan pengeluaran penduduk Indonesia sampai tingkat kabupaten/kota;
2. SAKERNAS dengan jumlah sampel 350.000 rumah tangga menyajikan statistik keadaan penduduk dan angkatan kerja di Indonesia sampai tingkat kabupaten/kota;
3. Survei Upah dengan jumlah sampel sebesar 3.675 perusahaan menyajikan statistik upah buruh di Indonesia setiap 3 (tiga) bulan/triwulan;
4. Survei Industri Besar/Sedang Tahunan menyajikan

statistik industri besar dan sedang beserta indikatornya;

5. Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan yang menyajikan statistik ramalan produksi padi dan palawija ;
6. Survei Statistik Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran Beras dengan cakupan wilayah survei 66 kota di 33 provinsi menyajikan IHK setiap bulan (data inflasi), serta laporan harga beras dan bahan pokok;
7. Penyusunan data PDB dan PDRB digunakan sebagai dasar penghitungan pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah serta pendapatan per kapita yang dipublikasi setiap triwulan;
8. Penyusunan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia, sebagai dasar untuk mengetahui gambaran kinerja sosial ekonomi Indonesia secara makro, seperti kinerja perekonomian, distribusi pendapatan serta untuk mengetahui keterkaitan berbagai pelaku ekonomi dalam proses distribusi dan alokasi pendapatan pelaku-pelaku ekonomi Indonesia;
9. *Updating* Pemetaan ST 2013 bertujuan melakukan pemutakhiran *Master File* Desa dan *Master File* Blok Sensus;
10. *Advance Release Calender (ARC)* menyediakan informasi dan jadwal publikasi data BPS;
11. Pengembangan Layanan Jaringan Komunikasi Data dan Akses *Online* Jarak Jauh dimaksudkan untuk mengembangkan sistem jaringan data di provinsi agar kecepatan arus pengiriman data dari provinsi ke pusat semakin meningkat;
12. Beberapa aktivitas *ad hoc* yaitu: Survei Kehidupan Bernegara (SKB) 2011, Sensus Perusahaan Penggilingan Padi (2012), Survei Konversi Gabah ke Beras (2012), dan Survei Konsumsi Beras (2012).

Dalam rangka mendapatkan kerangka sampel yang dapat dijadikan landasan pengambilan sampel untuk survei-survei pertanian rutin, pada tahun 2013 akan diselenggarakan aktivitas Sensus Pertanian 2013 (ST2013) yang bertujuan untuk memperoleh data statistik pertanian yang lengkap dan akurat yang dapat memberi gambaran yang jelas tentang beragam usaha pertanian di Indonesia. Hasil ST2013 juga akan digunakan sebagai angka patokan untuk memperbaiki

perkiraan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan, termasuk didalamnya populasi pohon/ternak yang diperoleh dari survei-survei pertanian. Selanjutnya, kegiatan statistik rutin yang dikumpulkan setiap tahun yang akan dilaksanakan pada tahun 2013, mencakup antara lain: (1) SUSENAS (2) SAKERNAS (3) Survei Upah (4) Survei Industri Besar/Sedang Tahunan (5) Survei Industri Besar/Sedang Bulanan (6) Survei Pertanian Tanaman Pangan/Ubinan (7) Survei Statistik Harga Konsumen dan Volume Penjualan Eceran (8) Penyusunan PDRB Tahunan dan Triwulanan (9) Penghitungan PDB Triwulanan dan Tahunan (10) Pengembangan dan Pemutakhiran Peta Wilayah Kerja Statistik berdasarkan hasil Pemutakhiran Master File Desa (MFD) dan Master File Blok Sensus (MFBS) (11) Advance Release Calender (ARC) (12) Pengembangan Layanan Jaringan Komunikasi Data dan Akses Online Jarak Jauh.

Untuk mendukung pelaksanaan manajemen pembangunan nasional secara efektif dan mencapai sasaran pembangunan sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014, diperlukan sistem pengadaan barang/jasa yang memadai. Untuk itu, Pemerintah melakukan beberapa upaya perbaikan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, antara lain melalui: (1) Penyusunan/penyempurnaan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; (2) Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; (3) Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement); dan (4) Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Hingga tahun 2012, telah dilakukan upaya penyempurnaan kebijakan/peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah, melalui: (1) penerbitan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (2) penerbitan Perpres No. 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; serta (3) penyempurnaan Naskah Akademis RUU Pengadaan Barang dan Jasa.

Sebagai tindak lanjut terbitnya Perpres No. 70 Tahun 2012, telah diterbitkan: (1) Perka LKPP No. 13 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Pengadaan; (2) Perka LKPP No. 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Perpres No. 70 Tahun 2012; (3) Perka LKPP No. 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (4) Perka LKPP No. 17 Tahun 2012 tentang E-Purchasing; dan (5) Perka LKPP No. 18 Tahun 2012 tentang E-Tendering. Selain itu, LKPP juga telah menerbitkan Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak 32 dokumen, dan dokumen e-catalogue untuk kendaraan bermotor, internet service provider, serta alat dan mesin pertanian.

Dalam rangka membina tenaga profesional yang melaksanakan fungsi pengadaan barang/jasa pemerintah, telah ditetapkan PermenPAN dan RB No. 77 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan LKPP sebagai pembina jabatan fungsional tersebut. Dengan telah diterbitkannya peraturan tersebut, diharapkan profesionalisme SDM pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah akan meningkat, sejalan dengan telah adanya pengakuan profesi dan jenjang karir yang jelas.

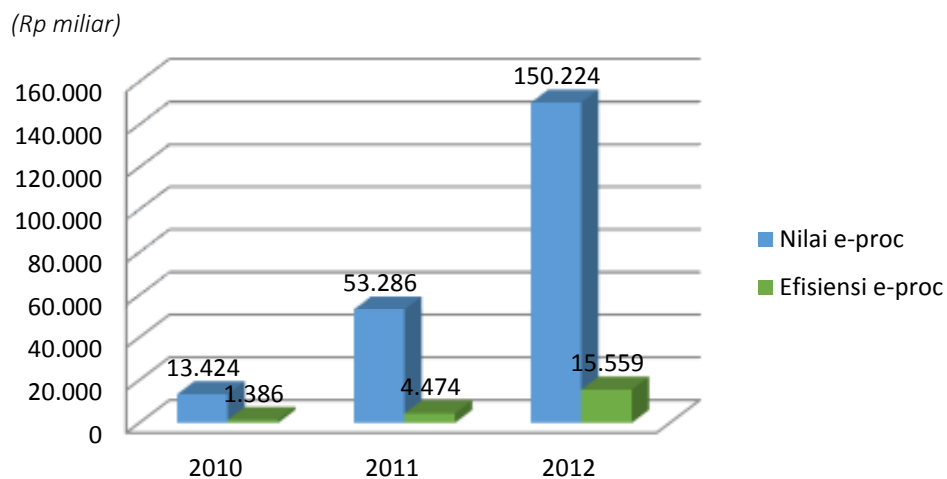
Upaya peningkatan efektivitas pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui penataan kelembagaan pelaksana pengadaan, dengan pembentukan organisasi yang permanen dan fokus menangani pengadaan barang/jasa pemerintah secara profesional yaitu Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi Lainnya. Pedoman pembentukan ULP telah ditetapkan melalui Perka LKPP No. 5 Tahun 2012 tentang ULP.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang lebih transparan, efisien, terbuka, bersaing, adil dan tidak diskriminatif serta perluasan penerapan *e-procurement*, LKPP memfasilitasi pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hingga Januari 2013, telah terbentuk 549 LPSE yang terdiri dari 53 instansi pemerintah pusat, 33 provinsi, 406 kabupaten/kota, serta 57 instansi lainnya (PTN/RS/BUMN).

Kinerja implementasi pengadaan secara elektronik telah memberikan dampak signifikan berupa efisiensi penggunaan anggaran belanja negara dalam beberapa tahun terakhir. Dengan *e-procurement*, rata-rata penghematan anggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah hingga akhir 2012

mencapai 11,62 persen atau sebesar Rp 15,56 Triliun. Perkembangan transaksi dan efisiensi pengadaan melalui LPSE pada tahun 2010-2012 disajikan pada Gambar 11.1 berikut.

GAMBAR 11.1
PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI LELANG ELEKTRONIK TAHUN 2010-2012



Sejalan dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana ditetapkan dalam Inpres No. 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013, upaya perbaikan sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan melalui implementasi *Whistle Blowing System* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, serta lelang 100% secara *e-procurement* (*e-tendering* dan *e-purchasing*) baik di pusat maupun di daerah. Adapun pedoman implementasi *Whistle Blowing System* telah ditetapkan melalui Perka LKPP No. 7 Tahun 2012 tentang *Whistle Blowing System* dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

11.2 Permasalahan dan Sasaran Pembangunan

Permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia semakin kompleks dari waktu ke waktu. Permasalahan tersebut antara lain masih terbatasnya sumberdaya yang kompeten dalam meningkatkan kualitas

rencana pembangunan, dinamika lingkungan yang cepat, belum memadainya kompetensi perencana di tingkat pusat dan daerah, dan belum optimalnya kerjasama dengan *stakeholder* lain dalam peningkatan kualitas sumber daya aparatur negara, misalnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.

Salah satu upaya untuk menjawab permasalahan tersebut, pada tahun 2013 dilakukan Forum Konsultasi Publik dengan Organisasi Masyarakat Sipil untuk menjangkau identifikasi permasalahan dan temuan-temuan hasil-hasil pembangunan. Pelaksanaan forum tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperkuat kerjasama dengan *stakeholder* dan juga untuk mengantisipasi dinamika lingkungan yang cepat. Forum tersebut juga akan dilakukan pada penyusunan RKP 2014 yang merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2010-2014. Diharapkan pelaksanaan forum tersebut dapat menjadi evaluasi dan penajaman perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mendukung arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun 2014.

Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut, sasaran pembangunan dalam bidang perencanaan pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2014 adalah terwujudnya rencana pembangunan nasional (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, yang akan dicapai melalui:

1. RKP 2014 memiliki tujuan, terget dan sasaran yang jelas dan terukur;
2. Terdapat kesesuaian antara rancangan RPJMN 2015-2019 dengan RPJPN 2004-2025;
3. Terdapat kesesuaian antara rancangan RPJMN 2015-2019 dengan visi, misi, dan program Presiden terpilih;
4. Keterlibatan *stakeholder* dalam proses penyusunan rancangan RPJMN 2015-2019;
5. Keterlibatan *stakeholder* dalam penyusunan rancangan RKP.

Penyediaan dan pelayanan statistik resmi (*official statistics*) di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan. Permasalahan internal yang menonjol adalah masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM) statistik yang profesional dan kompeten sesuai dengan bidang tugas, terutama di Wilayah Indonesia Bagian Timur. Hal ini sebagai dampak dari cepatnya pemekaran wilayah, yang juga membawa konsekuensi adanya beberapa

kabupaten/kota yang belum mempunyai perwakilan. Selain itu, sarana dan prasarana TIK yang dimiliki belum seluruhnya sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Permasalahan eksternal yang menonjol adalah masih rendahnya kesadaran responden, baik rumah tangga, perusahaan, maupun lembaga dalam memberikan informasi dengan benar. Hal ini menyebabkan kualitas data dan *response rate* yang rendah, khususnya survei dengan pendekatan perusahaan.

Selain permasalahan internal dan eksternal tersebut, penyelenggaraan kegiatan statistik menghadapi beberapa tantangan terhadap kredibilitas penyelenggaraan statistik. Tantangan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Data yang dihasilkan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum;
2. Data harus tersedia lebih cepat (*faster*), lebih murah (*cheaper*), lebih mudah diperoleh (*easier*), dan lebih berkualitas (*better*), seperti yang diinginkan oleh pengguna data;
3. Data yang dihasilkan harus memenuhi standar internasional (konsep, definisi, klasifikasi, dan metode pengukuran);
4. Data yang dihasilkan harus memiliki perbandingan antar waktu, antar daerah, dan antar Negara;
5. Data yang dihasilkan harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip statistik resmi (*official statistics*);
6. Perlunya peningkatan koordinasi sebagai konsekuensi munculnya lembaga-lembaga survei swasta.

Untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan tersebut serta mengatasinya, sasaran pembangunan bidang statistik yang akan dicapai pada tahun 2014 meliputi:

1. Tersedianya data dan informasi statistik ekonomi dan statistik sosial yang semakin lengkap, akurat, dan tepat waktu;
2. Peningkatan metodologi sensus dan survei;
3. Peningkatan dan pengembangan analisis statistik;
4. Peningkatan hubungan dengan pengguna data;
5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik;

6. Peningkatan kualitas pengolahan data dan informasi statistik;
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana TIK
8. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
9. Penataan kelembagaan dalam rangka reformasi birokrasi dan mewujudkan *good governance*;
10. Peningkatan akuntabilitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan; dan
11. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS.

Permasalahan yang masih dihadapi terkait pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah adalah masih adanya disharmoni peraturan pengadaan barang/jasa dengan peraturan perundangan sektoral lainnya, misalnya saja peraturan di bidang keuangan daerah, serta kepastian hukum yang lemah yang diakibatkan belum adanya pengaturan/regulasi yang dapat memberikan kekuatan memaksa maupun *legal standing* yang lebih kuat terhadap peraturan perundangan lainnya yang terkait.

Selain itu, permasalahan lain yang dihadapi adalah masih rendahnya profesionalitas SDM pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal itu ditandai dengan masih adanya *conflict of interest* para pihak pengadaan, jumlah dan distribusi SDM pengadaan yang belum memadai, kemampuan dan kompetensi pelaksana pengadaan yang beragam, serta pelaksanaan pengadaan yang tidak terfokus karena pelaksana masih merangkap jabatan/kegiatan lain dan seringkali ditunjuk secara *ad hoc* (dapat berganti setiap tahun).

Masalah lain yang juga menonjol adalah masih banyaknya kasus-kasus penyimpangan proses pengadaan barang/jasa pemerintah, baik yang ditangani oleh KPK maupun ditemukan oleh BPKP. Hasil penelitian KPK menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus korupsi yang ditangani KPK berasal dari pengadaan barang/jasa, serta 85% kasus korupsi yang melibatkan 17 Gubernur dan 150 Bupati/ Walikota adalah kasus pengadaan barang/jasa. Sebanyak 3423 kasus korupsi yang ditemukan oleh BPKP dari tahun 2003 adalah kasus pengadaan barang/jasa.

Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, sasaran yang

akan dicapai dalam bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah pada tahun 2014 adalah:

1. Peningkatan kelembagaan/regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Pengembangan sistem monitoring, evaluasi, dan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah;
4. Peningkatan pelayanan penanganan pengaduan dan permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.

11.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

11.3.1 Perkuatan Perencanaan dan Pembangunan

Arah kebijakan perencanaan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan proses perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, untuk jangka menengah maupun tahunan. Arah kebijakan tersebut dapat dicapai antara lain melalui:

1. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan nasional melalui penataan sistem perencanaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan; pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan; serta peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
2. Penerapan seutuhnya perencanaan pembangunan nasional dan penganggaran yang berbasis kinerja (*performance based budgeting*);
3. Peningkatan kualitas hasil evaluasi kebijakan/kajian sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan penyelesaian permasalahan pembangunan;
4. Peningkatan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan; dan
5. Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan diharapkan dapat menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, dalam artian lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun; terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang

lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tersebut harus terkait dengan fungsi sistem manajemen pembangunan lainnya yaitu: sistem penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan bahkan pengawasannya. Keterkaitan ini sangat penting agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel dan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMN 2010-2014 tahun 2014 perlu dilakukan koordinasi penyusunan RPJMN untuk menghasilkan peningkatan kualitas proses perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan yang lebih berkualitas, dalam artian lebih jelas dan terukur dari tahun ke tahun; terdapat keterpaduan dan sinkronisasi yang lebih baik antar bidang, dan antara rencana pusat dengan rencana daerah. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan tersebut harus terkait dengan fungsi sistem manajemen pembangunan lainnya yaitu: sistem penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan bahkan pengawasannya. Keterkaitan ini sangat penting agar pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, akuntabel dan berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

11.3.2 Perkuatan Data dan Informasi Statistik

Strategi dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan yang semakin berkualitas antara lain adalah dengan berkoordinasi dengan para pelaku pembangunan, termasuk dengan pihak swasta; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan melakukan berbagai upaya untuk (i) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; (ii) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan (iii) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Strategi perencanaan pembangunan diarahkan agar mampu menjawab berbagai permasalahan melalui (i) evaluasi secara terus-menerus terhadap peraturan perundangan dan kebijakan sistem manajemen pembangunan sebagai masukan bagi perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan pembangunan nasional; (ii) peningkatan kapasitas SDM

perencana juga akan dilakukan melalui pendidikan gelar tingkat pasca sarjana Strata 2 dan 3 untuk para perencana di berbagai instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, serta melalui pendidikan dan pelatihan non-gelar terkait perencanaan pembangunan dan kesempatan untuk mengikuti magang (*internship*) di instansi perencanaan lainnya; dan (iii) peningkatan koordinasi antara pusat dan daerah untuk menyusun dan menerapkan kebijakan dan program terkait permasalahan lingkungan hidup, pemanfaatan sumberdaya alam, pengurangan kemiskinan secara terpadu dan komprehensif.

Pencapaian sasaran pembangunan di tahun 2013 dilakukan dengan peningkatan kualitas belanja pemerintah melalui perbaikan pengalokasian anggaran pada prioritas pembangunan, peningkatan efisiensi belanja kementerian dan lembaga, perbaikan sinergi atas belanja pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah.

Beberapa langkah kebijakan strategis yang diperlukan pada tahun 2013 dan seterusnya, antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun dan menyempurnakan draft Manual Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran dengan perkuatan penerapan Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*) ataupun dokumen lain yang terkait;
2. Meningkatkan koordinasi dalam rangka integrasi, sinkronisasi, dan sinergi rencana pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah (Dalam rangka sinergi antara pusat dan daerah, pada tahun 2013 tetap dilanjutkan pemberian dana dekonsentrasi perencanaan pembangunan nasional yang memuat antara lain peningkatan kualitas musrenbangnas);
3. Menyusun evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan nasional dua tahun pelaksanaan RPJMN 2010-2014 sebagai bahan penyusunan RPJMN 2015-2019.
4. Melakukan kajian sebagai *background study* dalam penyusunan kerangka kebijakan RPJMN 2015-2019.

Arah kebijakan bidang statistik yang ditetapkan selama tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1. Mereview Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik berikut peraturan perundang-undangan pelaksanaannya dalam upaya meningkatkan *response rate* dan kesadaran masyarakat akan pentingnya data statistik;
2. Memelopori terselenggaranya kegiatan statistik yang efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang andal dan prima dengan berlandaskan kepada asas keterpaduan, keakurasian, dan kemutakhiran;
3. Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan arti penting dan kegunaan statistik;
4. Mengupayakan terwujudnya sistem informasi statistik yang andal dan efisien dengan memanfaatkan teknologi mutakhir yang tepat guna dan berhasil guna.

Untuk mewujudkan peningkatan kualitas data statistik yang dihasilkan, maka penyediaan dan pelayanan informasi statistik di berbagai tingkat perlu dilanjutkan. Fokus peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi statistik pada tahun 2013 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan keragaman data dan informasi statistik ekonomi, antara lain melalui kegiatan Survei Industri Besar/Sedang, Sensus Pertanian 2013 (ST 2013), penyajian diagram timbang hasil SBH 2012, Penyajian hasil penyempurnaan diagram timbang NTP 2012, Penyusunan PDB dan PDRB, dan Survei Sektor Informal dan Penyelenggaraan Sensus Pertanian;
2. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan rakyat, antara lain melalui kegiatan SUSENAS, SAKERNAS, Survei Upah dan Struktur Upah, Pilot Pendataan Podes, dan tahapan awal dari rangkaian kegiatan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS);
3. Meningkatkan manajemen survei, antara lain melalui kegiatan perbaikan *response rate*, dan perbaikan metoda pengumpulan data dan *monitoring/pemantauan*;
4. Meningkatkan metodologi sensus dan survei melalui kegiatan antara lain dengan perbaikan kerangka sampel bagi survei berbasis rumah tangga maupun perusahaan/usaha, perbaikan peta wilayah kerja statistik dan wilayah administrasi (desa/kelurahan) untuk keperluan pengumpulan serta penyajian data dan informasi statistik, penyempurnaan klasifikasi dan

standarisasi statistik untuk keperluan pengumpulan, penyajian, dan analisis statistik, menerapkan desain sensus dan survei yang optimal;

5. Meningkatkan dan mengembangkan analisis statistik, antara lain melalui kegiatan peningkatan kualitas analisis statistik lintas sektor, peningkatan konsistensi statistik lintas sektor, dan pembangunan sistem manajemen kualitas total;
6. Meningkatkan hubungan dengan pengguna data, antara lain melalui kegiatan peningkatan kepuasan pelanggan, kemitraan dengan penyedia data, serta komunikasi antara pengguna data dengan penyedia data;
7. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi diseminasi data dan informasi statistik, antara lain melalui kegiatan perbaikan kemudahan akses terhadap data, perbaikan kualitas layanan dan hasil-hasil (data dan informasi statistik) serta peningkatan penggunaan Sistem Rujukan Statistik dan kompilasi metadata.

11.3.3 Perkuatan Pengadaan Barang dan Jasa

Strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan guna mewujudkan sasaran pembangunan di bidang pengadaan barang dan jasa untuk tahun 2014 adalah:

1. Menyempurnakan aturan dan kebijakan pengadaan barang/jasa yang mengikuti perkembangan pengadaan barang/jasa sesuai kebutuhan *stakeholder*, serta melakukan kajian yang mendukung penyempurnaan aturan dan kebijakan pengadaan barang/jasa tersebut;
2. Harmonisasi peraturan pengadaan barang/jasa dengan peraturan perundang-undangan sektoral lainnya;
3. Implementasi jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya;
4. Operasionalisasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi lainnya;
5. Optimalisasi penerapan *e-procurement* melalui standardisasi LPSE serta pembinaan pengelolaan LPSE ;
6. Optimalisasi implementasi sistem monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara *online*;
7. Optimalisasi implementasi *Whistle Blowing System*

pengadaan barang/jasa pemerintah;

8. Optimalisasi portal konsultasi LKPP, sebagai sarana bagi pelaksanaan bimbingan teknis dan advokasi permasalahan hukum terkait pengadaan barang/jasa pemerintah kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Instansi lainnya.



RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014



BUKU III: RENCANA PEMBANGUNAN BERDIMENSI KEWILAYAHAN

Diperbanyak oleh:
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2014

BUKU III: Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS)

2013

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| BAB 1 ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2010-2014 | 1 |
| 1.1 PENDAHULUAN | 1 |
| 1.2 KINERJA DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH | 1 |
| 1.2.1 PEREKONOMIAN WILAYAH | 1 |
| 1.2.2 KESEJAHTERAAN SOSIAL DAN KEPENDUDUKAN | 5 |
| 1.2.3 SARANA DAN PRASARANA | 9 |
| 1.2.4 SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP | 13 |
| 1.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2014..... | 14 |
| BAB 2 PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2014 | 27 |
| 2.1 KONDISI WILAYAH SUMATERA SAAT INI..... | 27 |
| 2.2 TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA | 30 |
| 2.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA..... | 33 |
| 2.4 ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS WILAYAH SUMATERA | 33 |
| 2.5 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MP3EI DI WILAYAH SUMATERA..... | 39 |
| 2.6 IMPLEMENTASI MP3KI DI WILAYAH SUMATERA..... | 41 |
| BAB 3 PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2014 | 93 |
| 3.1 KONDISI WILAYAH JAWA-BALI SAAT INI | 93 |
| 3.2 TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI..... | 96 |
| 3.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI..... | 98 |
| 3.4 ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS WILAYAH JAWA-BALI..... | 99 |
| 3.5 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MP3EI DI WILAYAH JAWA-BALI..... | 103 |
| 3.6 IMPLEMENTASI MP3KI DI WILAYAH JAWA-BALI | 106 |
| BAB 4 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2014 | 141 |
| 4.1 KONDISI WILAYAH KALIMANTAN SAAT INI | 141 |
| 4.2 TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN | 143 |
| 4.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN | 146 |
| 4.4 ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS WILAYAH KALIMANTAN..... | 147 |
| 4.5 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MP3EI DI WILAYAH KALIMANTAN..... | 151 |
| 4.6 IMPLEMENTASI MP3KI DI WILAYAH KALIMANTAN | 153 |
| BAB 5 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2014 | 179 |
| 5.1 KONDISI WILAYAH SULAWESI SAAT INI..... | 179 |
| 5.2 TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI | 181 |
| 5.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI | 184 |
| 5.4 ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS WILAYAH SULAWESI..... | 184 |
| 5.5 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MP3EI DI WILAYAH SULAWESI | 189 |
| 5.6 IMPLEMENTASI MP3KI DI WILAYAH SULAWESI | 191 |

| | |
|---|------------|
| BAB 6 PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2014 | 227 |
| 6.1 KONDISI WILAYAH NUSA TENGGARA SAAT INI | 227 |
| 6.2 TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA..... | 229 |
| 6.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA | 232 |
| 6.4 ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS WILAYAH NUSA TENGGARA..... | 233 |
| 6.5 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MP3EI DI WILAYAH NUSA TENGGARA | 235 |
| 6.6 IMPLEMENTASI MP3KI DI WILAYAH NUSA TENGGARA | 237 |
| BAB 7 PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2014 | 249 |
| 7.1 KONDISI WILAYAH MALUKU SAAT INI | 249 |
| 7.2 TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU..... | 252 |
| 7.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU | 254 |
| 7.4 ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS WILAYAH MALUKU | 255 |
| 7.5 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MP3EI DI WILAYAH MALUKU..... | 257 |
| 7.6 IMPLEMENTASI MP3KI DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU | 259 |
| BAB 8 PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2014 | 277 |
| 8.1 KONDISI WILAYAH PAPUA SAAT INI | 277 |
| 8.2 TUJUAN DAN SASARAN PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA..... | 279 |
| 8.3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA..... | 281 |
| 8.4 ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS WILAYAH PAPUA..... | 283 |
| 8.5 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MP3EI DI WILAYAH PAPUA | 285 |
| 8.6 IMPLEMENTASI MP3KI DI WILAYAH PAPUA..... | 287 |
| 8.7 SINERGI ANTARA PUSAT-DAERAH DAN ANTAR DAERAH..... | 307 |
| 8.7.1 SINERGI DALAM KERANGKA PERENCANAAN KEBIJAKAN | 307 |
| 8.7.2 SINERGI DALAM KERANGKA REGULASI..... | 308 |
| 8.7.3 SINERGI DALAM KERANGKA ANGGARAN..... | 308 |
| 8.7.4 SINERGI DALAM KERANGKA KELEMBAGAAN DAN APARATUR DAERAH | 309 |
| 8.7.5 SINERGI DALAM KERANGKA PENGEMBANGAN WILAYAH..... | 309 |
| 8.8 PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT | 310 |
| 8.8.1 URGENSI PENGUATAN PERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT | 310 |
| 8.8.2 PELAKSANAAN..... | 311 |
| 8.9 KAIDAH SINERGI ANTARSEKTORAL, ANTARPUSAT-DAERAH DAN ANTARDAERAH | 318 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-------------|---|-----|
| GAMBAR 1.1 | DISTRIBUSI PDRB ADHB MENURUT WILAYAH..... | 2 |
| GAMBAR 1.2 | PDRB PERKAPITA ADHB TAHUN 2012 MENURUT PROVINSI | 3 |
| GAMBAR 1.3 | INDEKS WILLIAMSON PDRB PER KAPITA ADHB ANTAR PROVINSI | 4 |
| GAMBAR 1.4 | REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA MENURUT WILAYAH TAHUN 2012 | 5 |
| GAMBAR 1.5 | DISTRIBUSI PENDUDUK, ANGKATAN KERJA, DAN TINGKAT KEPADATAN MENURUT WILAYAH TAHUN 2012 | 5 |
| GAMBAR 1.6 | TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER WILAYAH TAHUN 2011-2012, (DALAM PERSEN). | 6 |
| GAMBAR 1.7 | JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA PER WILAYAH TAHUN 2012.... | 7 |
| GAMBAR 1.8 | UMUR HARAPAN HIDUP MENURUT PROVINSI | 8 |
| GAMBAR 1.8 | RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS) MENURUT PROVINSI | 9 |
| GAMBAR 1.9 | RASIO KERAPATAN JALAN (KM/KM ²)MENURUT PROVINSI TAHUN 2012...10 | |
| GAMBAR 1.10 | RASIO KAPASITAS JALAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011 | 10 |
| GAMBAR 1.11 | KONDISI JALAN NASIONAL PADA TAHUN 2005 DAN 2011 | 12 |
| GAMBAR 1.12 | KONDISI JALAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010..... | 12 |
| GAMBAR 1.13 | RASIO ELEKTRIFIKASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2012..... | 13 |
| GAMBAR 2.1 | PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI TAHUN 2014 DI WILAYAH SUMATERA..... | 40 |
| GAMBAR 2.2 | PETA LOKASI MP3KI USULAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2014 DI WILAYAH SUMATERA..... | 43 |
| GAMBAR 3.1 | PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI TAHUN 2014 DI WILAYAH JAWA-BALI | 104 |
| GAMBAR 3.2 | PROYEK MP3KI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI TAHUN 2014 DI WILAYAH JAWA-BALI | 107 |
| GAMBAR 4.1 | PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI MELALUI TA 2014 DI WILAYAH KALIMANTAN..... | 152 |
| GAMBAR 4.2 | USULAN LOKASI QUICK WINS MP3KI TA 2014 DI WILAYAH KALIMANTAN | 154 |
| GAMBAR 5.1 | PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI TAHUN 2014 DI WILAYAH SULAWESI..... | 190 |
| GAMBAR 5.2 | USULAN LOKASI QUICK WINS MP3KI TA 2014 DI WILAYAH KEPULAUAN SULAWESI..... | 192 |
| GAMBAR 6.1 | PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI MELALUI TA 2014 DI WILAYAH NUSA TENGGARA | 236 |
| GAMBAR 6.2 | USULAN LOKASI QUICK WINS MP3KI TA 2014 DI WILAYAH KEPULAUAN NUSA TENGGARA | 238 |
| GAMBAR 7.1 | PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI MELALUI TA 2014 DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU..... | 258 |

| | | |
|------------|--|-----|
| GAMBAR 7.2 | USULAN LOKASI QUICK WINS MP3KI TA 2014 DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU | 260 |
| GAMBAR 8.1 | PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI MELALUI TA 2014 DI WILAYAH PAPUA | 286 |
| GAMBAR 8.2 | USULAN LOKASI QUICK WINS MP3KI TA 2014 DI WILAYAH PAPUA | 288 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|-----------|---|------------|
| TABEL 1.1 | PANJANG DAN KONDISI JARINGAN JALAN NASIONAL MENURUT WILAYAH..... | 11 |
| TABEL 1.2 | LUAS KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PER PROVINSI (TAHUN 2012, (RIBU HEKTAR)). | 14 |
| TABEL 1.3 | ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH..... | 15 |
| TABEL 2.1 | PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA..... | 29 |
| TABEL 2.2 | SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2014..... | 32 |
| TABEL 2.3 | SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, UMUR HARAPAN HIDUP DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2014 | 32 |
| TABEL 3.1 | PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA BALI..... | 94 |
| TABEL 3.2 | SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH JAWA BALI TAHUN 2014..... | 97 |
| TABEL 3.3 | SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP DAN RATA- RATALAMA SEKOLAHDI WILAYAH JAWA BALI TAHUN 2014..... | 97 |
| TABEL 4.1 | PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN | 142 |
| TABEL 4.2 | SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2014 | 145 |
| TABEL 4.3 | SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP, DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2014..... | 146 |
| TABEL 5.1 | PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI..... | 180 |
| TABEL 5.2 | SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2014 | 183 |
| TABEL 5.3 | SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,..... | 183 |
| TABEL 6.1 | PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA..... | 227 |
| TABEL 6.2 | SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2014 | 231 |

| | | |
|-----------|---|------------|
| TABEL 6.3 | SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP, DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2014..... | 231 |
| TABEL 7.1 | PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU..... | 251 |
| TABEL 7.2 | SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2014..... | 253 |
| TABEL 7.3 | SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2014 ... | 254 |
| TABEL 8.1 | PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA | 278 |
| TABEL 8.2 | SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2014 | 281 |
| TABEL 8.3 | SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2014 | 281 |

BAB 1

ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH TAHUN 2010-2014

1.1 Pendahuluan

Arah pengembangan wilayah tahun 2014 didasarkan pada arahan RPJMN 2010 – 2014 yaitu berdasarkan 7 (tujuh) wilayah pembangunan, yaitu: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Penyusunan program dan kegiatan prioritas tahun 2014 mempertimbangkan berbagai hal, antara lain: (i) keterkaitan antar wilayah dari segi sosial, ekonomi, budaya dan politik sebagai perwujudan wawasan nusantara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; (ii) kinerja pembangunan dan isu strategis di setiap wilayah; (iii) tujuan dan sasaran pembangunan setiap wilayah sesuai dengan tujuan dan sasaran RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2010-2014; (iv) rencana tata ruang wilayah pulau dan pola pemanfaatan ruang yang optimal; (v) pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia MP3EI; dan (vi) pelaksanaan program percepatan pengurangan kemiskinan melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia (MP3KI), yaitu: Klaster 1 (pertama) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Klaster 2 (kedua) Program Pemberdayaan Masyarakat, Klaster 3 (ketiga) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro, dan Klaster 4 (keempat) Program Pro Rakyat.

Berbagai program dan prioritas tersebut sejalan dengan empat strategi utama, yaitu: percepatan pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), pengurangan kemiskinan (*pro-poor*), pengurangan pengangguran (*pro-job*) dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan (*pro-environment*).

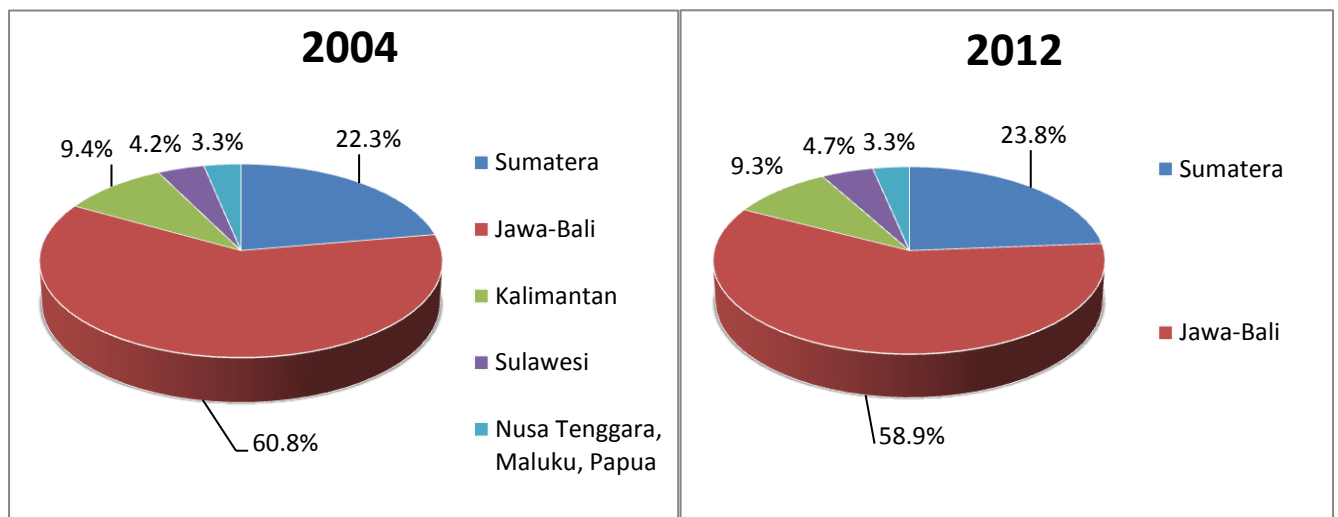
1.2 Kinerja dan Tantangan Pembangunan Wilayah

1.2.1 Perekonomian Wilayah

Kinerja perekonomian wilayah menunjukkan kemajuan yang ditunjukkan dengan peningkatan PDRB secara riil di semua wilayah. Kemajuan perekonomian tersebut terlihat di beberapa wilayah dan provinsi di luar wilayah Jawa-Bali yang tumbuh di atas rata-rata nasional. Namun demikian, kesenjangan pembangunan wilayah tetap relatif tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun 2012 yang didominasi oleh Provinsi di Jawa-Bali dengan sumbangan PDRB 58,9 persen, diikuti wilayah Sumatera dengan sumbangan sebesar 23,8 persen, dan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua secara bersama-

sama dengan sumbangan sekitar 17,3 persen. Tingginya PDRB Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera disebabkan oleh perkembangan kegiatan investasi dan produksi yang cukup pesat, dengan dukungan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi yang relatif memadai dibanding wilayah lain. Namun demikian, perkembangan ekonomi wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua secara bertahap mulai meningkat, meskipun masih mengandalkan ketersediaan sumberdaya alam (primer). Perkembangan industri pengolahan dan jasa-jasa di wilayah tersebut masih relatif lambat. Hambatan percepatan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut adalah terbatasnya prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi serta ketersediaan sumber daya manusia yang memadai.

GAMBAR 1.1
DISTRIBUSI PDRB ADHB MENURUT WILAYAH

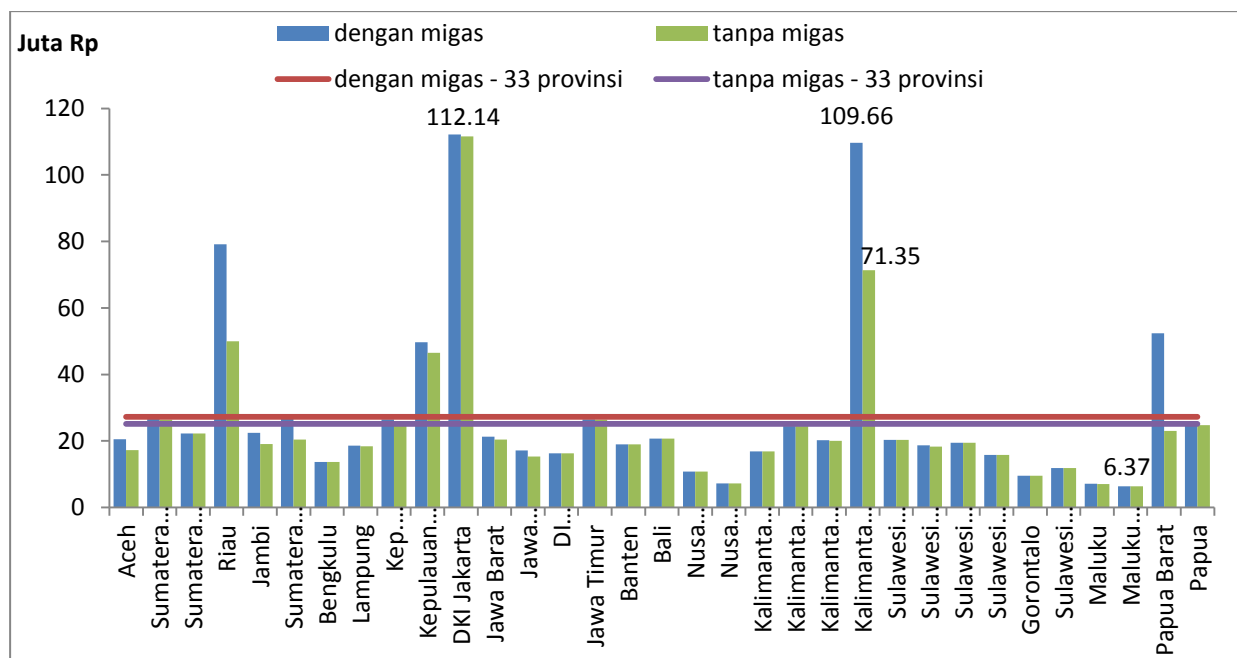


Sumber : BPS, 2012

Gambaran kesenjangan ekonomi antarwilayah juga tampak dari relatif tingginya perbedaan PDRB per kapita antar provinsi. Pada tahun 2012 DKI Jakarta merupakan provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi secara nasional dengan nilai sebesar Rp 112,14 juta. Jumlah tersebut sekitar 17 kali lipat PDRB per kapita Provinsi Maluku Utara, yang merupakan terkecil di antara 33 provinsi, sebesar Rp 6,37 juta.

Beberapa provinsi dengan pangsa sektor migas relatif besar akan memiliki perbedaan yang besar antara PDRB per kapita dengan migas dan PDRB per kapita tanpa migas. Contohnya adalah Provinsi Kalimantan Timur, Riau, dan Papua Barat. Untuk provinsi-provinsi ini besaran PDRB per kapita tanpa migas lebih mencerminkan kondisi perekonomian lokalnya.

GAMBAR 1.2
PDRB PERKAPITA ADHB TAHUN 2012 MENURUT PROVINSI

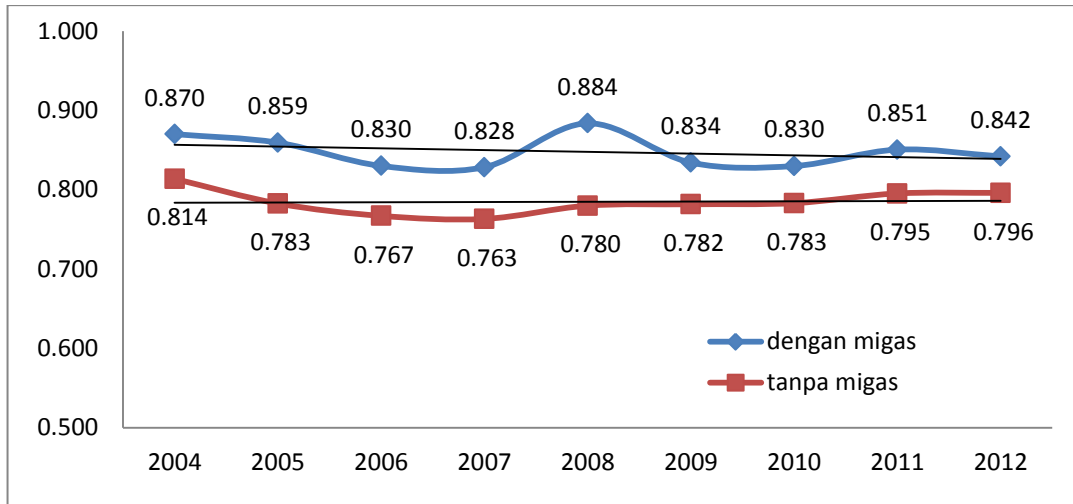


Sumber: BPS, 2012

Bila dilihat perkembangannya, kesenjangan PDRB per kapita antar provinsi ini relatif tidak banyak berubah dalam periode 2004-2012, bahkan terlihat kecenderungan sedikit penurunan. Namun demikian bila faktor migas dikeluarkan, tampak kecenderungan peningkatan kesenjangan khususnya dalam lima tahun terakhir. Hal ini terlihat dari perkembangan nilai Indeks Williamson (*Population Weighted Coefficient of Variation*) dari PDRB per kapita 33 provinsi antara tahun 2004 dan 2012.

Cenderung menurunnya nilai Indeks Williamson PDRB per kapita dengan migas terkait dengan menurunnya peran sektor migas, khususnya minyak bumi dalam perekonomian daerah-daerah penghasil utama. Sementara itu cenderung meningkatnya nilai Indeks Williamson PDRB per kapita tanpa migas sejalan dengan peningkatan nilai Rasio Gini pengeluaran masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan peningkatan kesenjangan terjadi baik antar individu maupun antarprovinsi.

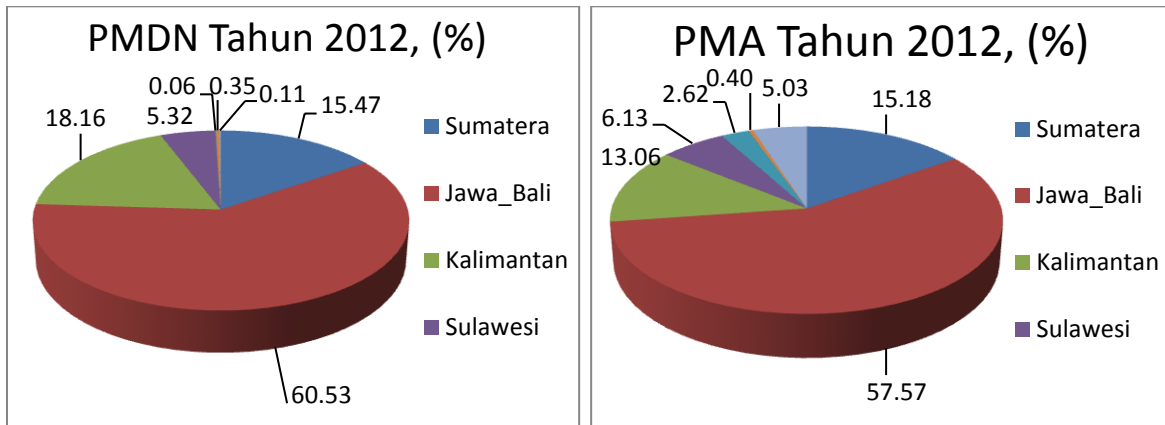
GAMBAR 1.3
INDEKS WILLIAMSON PDRB PER KAPITA ADHB ANTAR PROVINSI



Sumber: Perhitungan Bappenas dari data BPS, 2012

Salah satu penyebab kesenjangan PDRB antarwilayah adalah kurang meratanya persebaran investasi antardaerah. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada tahun 2012 terpusat di wilayah Jawa-Bali dan Kalimantan. Realisasi investasi PMDN di wilayah Jawa-Bali sebesar 60,53 persen dan wilayah Kalimantan sebesar 18,16 persen dari total realisasi PMDN. Wilayah Jawa-Bali juga menjadi pusat Penanaman Modal Asing (PMA). Persebaran investasi PMA tahun 2012 terpusat di wilayah Jawa-Bali sekitar 57,57 persen, di wilayah Sumatera sekitar 15,18 persen, dan Kalimantan sekitar 13,06 persen. Sementara, nilai realisasi PMA di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua secara keseluruhan sangat kecil, yaitu rata-rata kurang dari 5 persen dari total realisasi PMA (Gambar 1.4). Tantangan yang perlu diatasi adalah mendorong persebaran kegiatan investasi ke wilayah Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

GAMBAR 1.4
REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA MENURUT WILAYAH TAHUN 2012

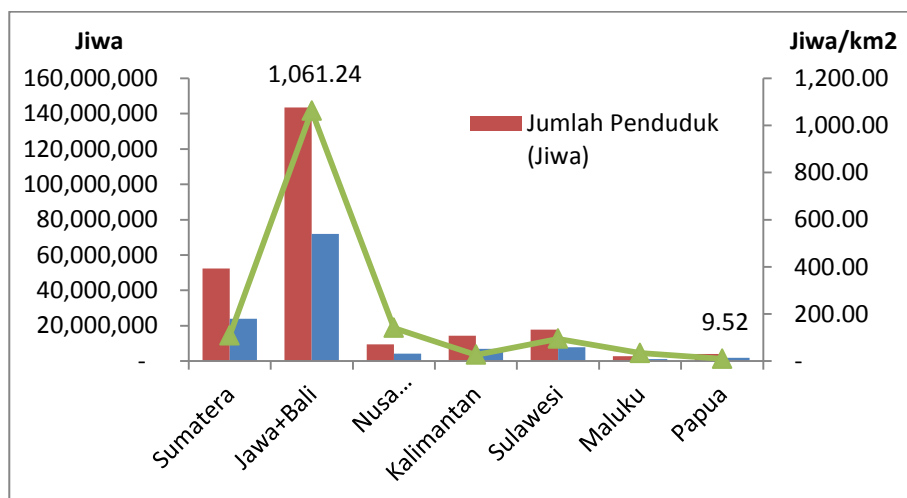


Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (diolah), 2012

1.2.2 Kesejahteraan Sosial dan Kependudukan

Perkembangan kegiatan ekonomi mempunyai pengaruh timbal balik terhadap persebaran penduduk dan kesejahteraan sosial. Dengan luas sekitar 7 persen dari total luas wilayah nasional, wilayah Jawa-Bali sebagai pusat kegiatan ekonomi utama harus menampung sekitar 59 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara, Papua dengan luas wilayah sekitar 22 persen dari total luas wilayah nasional hanya menampung kurang dari 2 persen dari seluruh penduduk. Sebaran penduduk ini mengindikasikan tingkat kepadatan penduduk yang tidak merata, di mana terjadi pemusatan di wilayah-wilayah dengan aktivitas ekonomi yang tinggi.

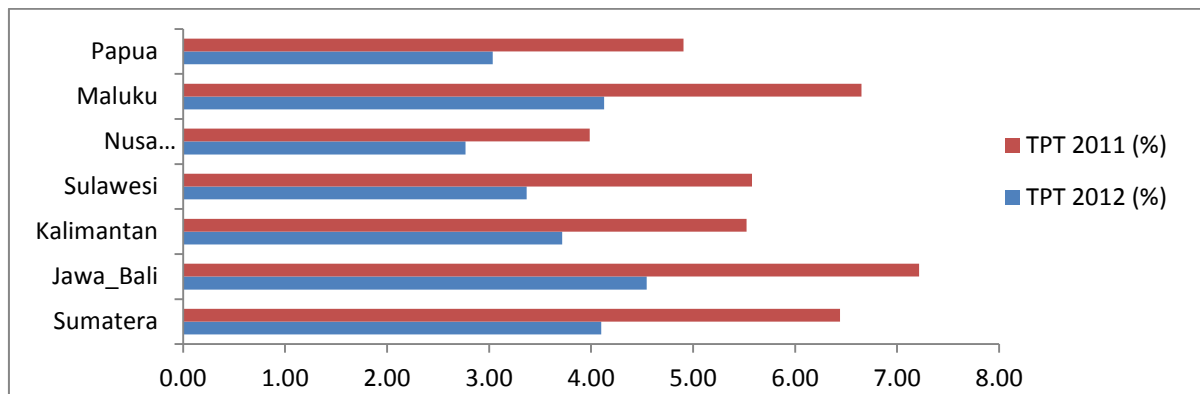
GAMBAR 1.5
DISTRIBUSI PENDUDUK, ANGKATAN KERJA, DAN TINGKAT KEPADATAN MENURUT WILAYAH TAHUN 2012



Sumber: BPS 2012, diolah

Dengan memusatnya penduduk di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, jumlah angkatan kerja tertinggi berada di wilayah Jawa-Bali diikuti Sumatera, sedangkan jumlah angkatan kerja terendah di wilayah Maluku dan Papua. Sementara, tingkat pengangguran terbuka tertinggi terdapat di wilayah Jawa-Bali sebesar 4,55 persen pada tahun 2012 berkurang dibanding tahun 2011 yang mencapai 7,22 persen. Tingkat pengangguran tahun 2012 di seluruh wilayah relatif menurun dibanding tahun 2011 (Gambar 1.5).

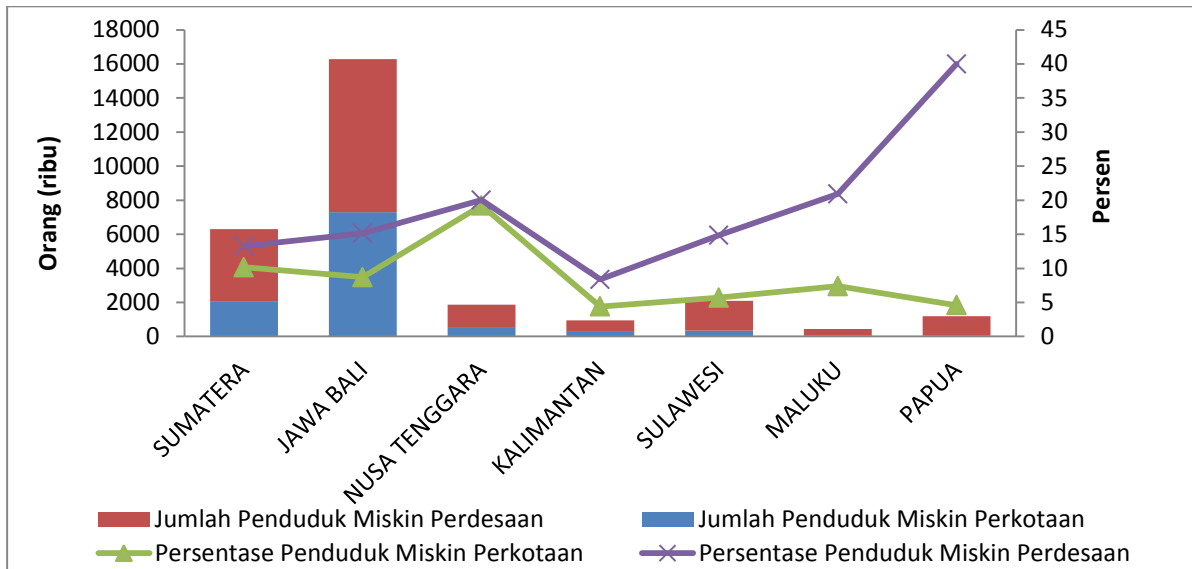
GAMBAR 1.6
TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT) PER WILAYAH TAHUN 2011-2012,
(DALAM PERSEN).



Sumber: Sakernas, Agustus 2012, BPS

Jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2012 adalah 28,59 juta jiwa atau 11,66 persen dari seluruh penduduk. Dari jumlah tersebut, 18,08 juta jiwa penduduk miskin tinggal di perdesaan dan sisanya 10,51 juta jiwa di perkotaan. Jika dilihat persebarannya menurut wilayah, maka jumlah penduduk miskin di wilayah Jawa-Bali tercatat paling besar, yakni sekitar 55,90 persen dari seluruh penduduk miskin nasional. Namun demikian jika dilihat dari persentase penduduk miskin terhadap total penduduk wilayah, maka tingkat kemiskinan tertinggi ditemui di wilayah Papua, di mana hampir sepertiga penduduknya tergolong miskin. Wilayah lainnya yang memiliki persentase penduduk miskin relatif tinggi adalah Nusa Tenggara Timur (20,41 persen) dan Maluku (20,76 persen). Kondisi ini menyiratkan perlunya penanganan kemiskinan secara tuntas dan nyata, diiringi dengan percepatan pembangunan wilayah Papua, Nusa Tenggara dan Maluku. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi adalah mempercepat pembangunan perdesaan terutama di wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara.

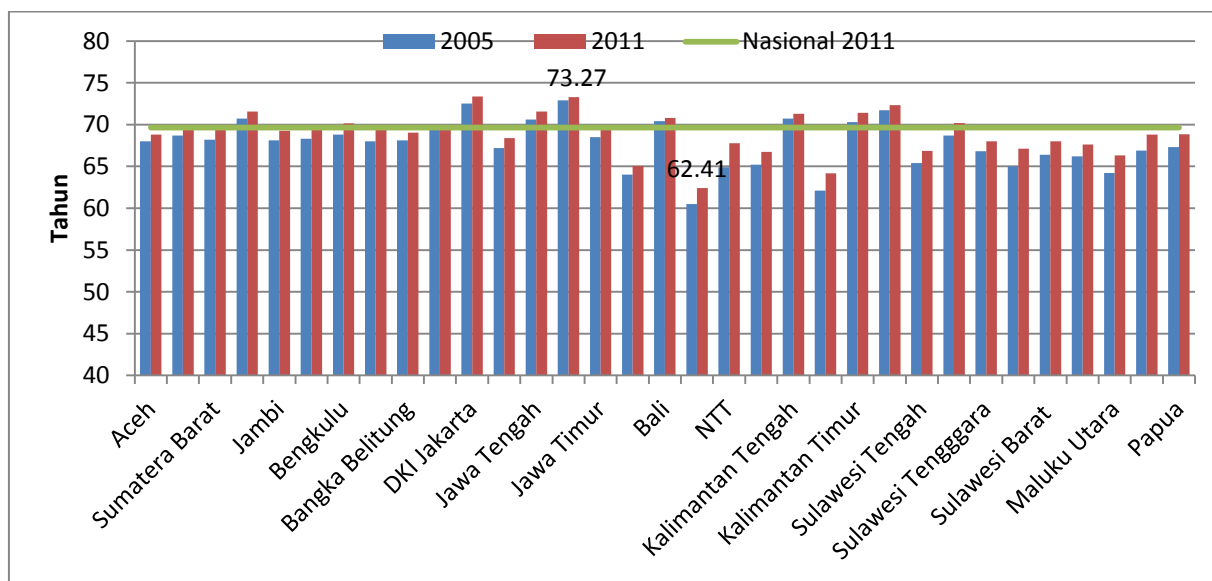
GAMBAR 1.7
JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI INDONESIA PER WILAYAH TAHUN 2012



Sumber : Badan Pusat Statistik, September 2012

Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk di wilayah Jawa-Bali secara umum lebih tinggi dari rata-rata nasional dengan UHH tertinggi di Provinsi D.I Yogyakarta sebesar 73,22 tahun dan DKI Jakarta sebesar 73,20 tahun. UHH penduduk di wilayah Sumatera setara dengan UHH nasional. Hampir setengah dari seluruh provinsi memiliki UHH lebih rendah dari UHH nasional terutama di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan. UHH terendah tercatat di Nusa Tenggara Barat sebesar 62,11 tahun. Perkembangan UHH selain dipengaruhi oleh asupan gizi dan pola hidup masyarakat juga dipengaruhi oleh mutu dan jangkauan layanan kesehatan. Oleh sebab itu, tantangan yang harus diatasi adalah mendorong peningkatan gizi dan perbaikan pola hidup sehat masyarakat, serta perluasan akses pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi penduduk di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Sulawesi dan Kalimantan (Gambar 1.7).

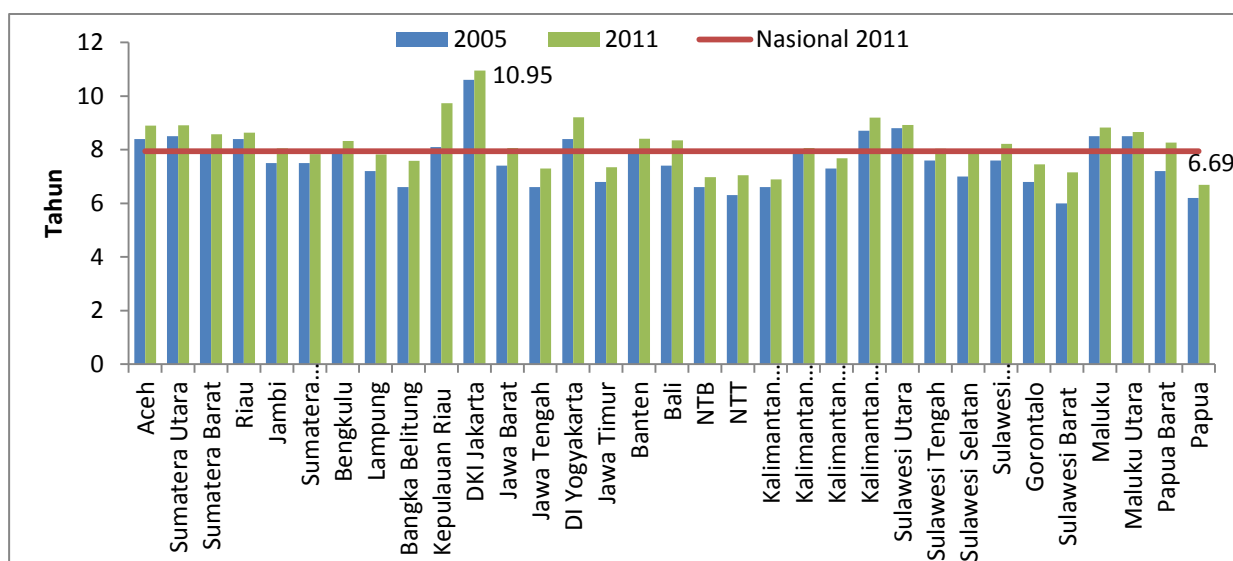
GAMBAR 1.8
UMUR HARAPAN HIDUP MENURUT PROVINSI



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

Tingkat kesejahteraan rakyat juga dipengaruhi oleh akses layanan pendidikan yang salah satunya diukur dari rata-rata lama sekolah (RLS). Angka RLS nasional meningkat dari 7,3 tahun pada tahun 2005 menjadi sebesar 7,9 tahun pada tahun 2011. RLS di Papua paling rendah di antara RLS di provinsi-provinsi lain. Kondisi ini menyiratkan bahwa rata-rata lama sekolah selain dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dalam menyediakan biaya pendidikan juga dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan baik gedung sekolah, peralatan, guru dan fasilitas pendidikan lainnya. Provinsi-provinsi lainnya yang memiliki angka RLS cukup rendah di antaranya Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Tantangan yang harus diatasi adalah perluasan akses pelayanan pendidikan di daerah-daerah tersebut (Gambar 1.8).

GAMBAR 1.8
RATA-RATA LAMA SEKOLAH (RLS) MENURUT PROVINSI



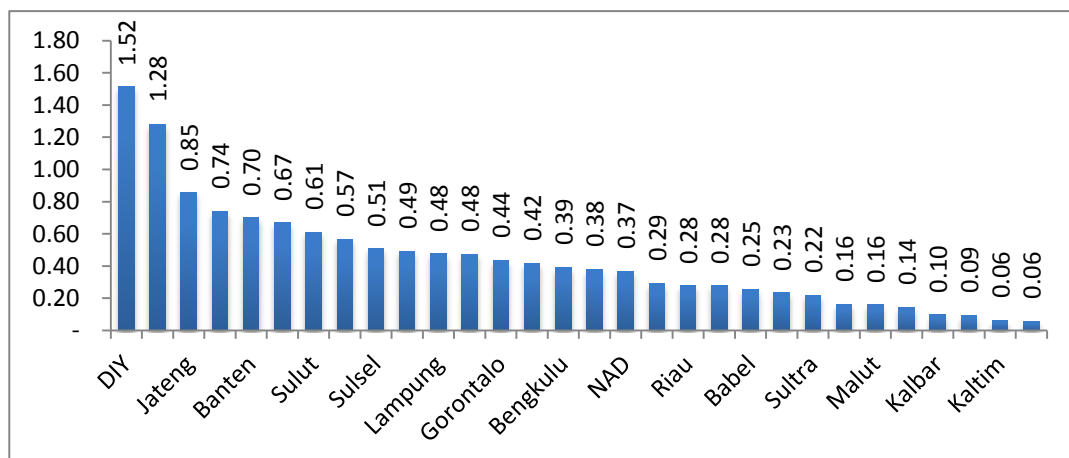
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2012

1.2.3 Sarana dan Prasarana

Ketersediaan jaringan jalan dalam kuantitas dan kualitas yang baik sangat penting dalam mendukung perekonomian wilayah. Wilayah-wilayah Papua, Kalimantan, Maluku, dan Sulawesi masih menghadapi keterbatasan prasarana jalan. Hingga tahun 2012 keseluruhan jaringan jalan di wilayah-wilayah tersebut masih sangat kurang relatif terhadap luas wilayahnya. Rendahnya rasio panjang jalan terhadap luas wilayah menjadi salah satu faktor yang menghambat investasi khususnya di sektor industri hilir. Padahal industri pengolahan berpotensi meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam yang dimiliki wilayah-wilayah tersebut.

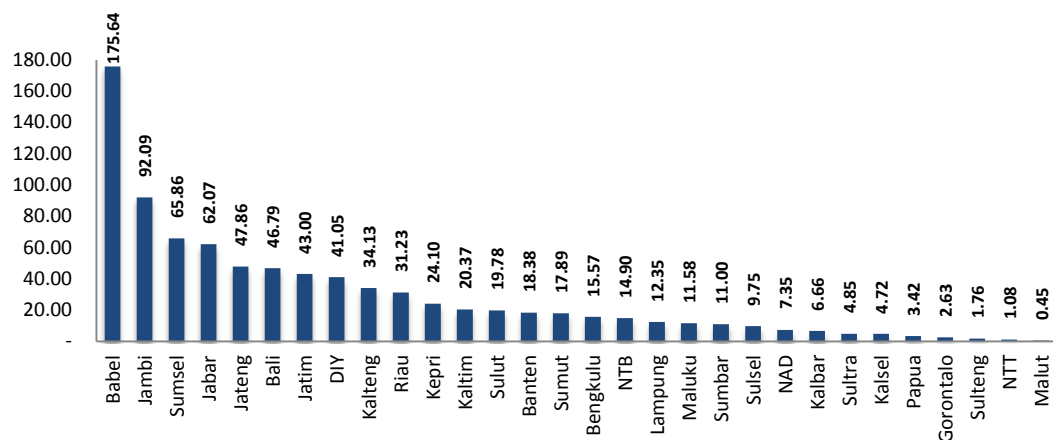
Di samping itu, indikator Rasio Kapasitas Jalan, yaitu rasio panjang jalan terhadap jumlah unit kendaraan roda 4 menegaskan perlunya pembangunan jalan di beberapa daerah di wilayah Maluku, Papua, Sulawesi, Kalimantan dan Nusa Tenggara. Sementara itu tidak terlalu tingginya angka Rasio Kapasitas Jalan di wilayah Jawa-Bali perlu dilihat dalam konteks perlunya pengembangan angkutan massal untuk mengatasi kemacetan di wilayah yang memiliki Rasio Kerapatan Jalan relatif tinggi ini.

GAMBAR 1.9
RASIO KERAPATAN JALAN (KM/KM²) MENURUT PROVINSI TAHUN 2012



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2012

GAMBAR 1.10
RASIO KAPASITAS JALAN MENURUT PROVINSI TAHUN 2011



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2011

Berdasarkan kondisinya, panjang dan porsi jaringan jalan tidak mantap (rusak ringan dan rusak berat) cenderung meningkat di setiap wilayah. Antara tahun 2005 dan 2011 panjang jaringan jalan nasional dalam kondisi tidak mantap meningkat di wilayah Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

TABEL 1.1
PANJANG DAN KONDISI JARINGAN JALAN NASIONAL MENURUT WILAYAH

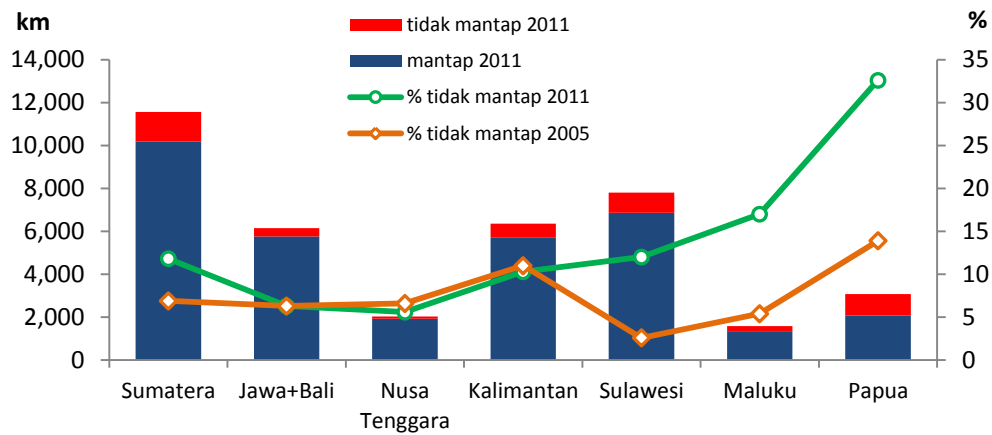
| Wilayah | Panjang Jalan (km) | | Jalan Tidak Mantap 2005 | | Jalan Tidak Mantap 2011 | |
|---------------|--------------------|----------|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| | 2005 | 2011 | km | persen | km | persen |
| Sumatera | 10,429.8 | 11,568.1 | 724.9 | 6.9 | 1,370.2 | 11.8 |
| Jawa+Bali | 5,389.5 | 6,146.2 | 341.9 | 6.3 | 386.5 | 6.3 |
| Nusa Tenggara | 1,795.8 | 2,038.9 | 118.5 | 6.6 | 114.9 | 5.6 |
| Kalimantan | 5,538.2 | 6,363.6 | 609.8 | 11.0 | 657.9 | 10.3 |
| Sulawesi | 6,844.8 | 7,799.8 | 175.8 | 2.6 | 936.5 | 12.0 |
| Maluku | 1,255.5 | 1,578.6 | 68.0 | 5.4 | 267.8 | 17.0 |
| Papua | 1,876.5 | 3,074.7 | 260.3 | 13.9 | 1,002.3 | 32.6 |
| Nasional | 33130.2 | 38,569.9 | 2,299.1 | 6.9 | 4,736.1 | 12.3 |

Sumber: Kementerian Pekerjaan Umum, 2011

Jika dilihat dari persentase jalan tidak mantap terhadap total panjang jalan wilayah, kondisi jaringan jalan nasional paling parah pada tahun 2011 terdapat di wilayah Papua, disusul berturut-turut wilayah Maluku, Sulawesi, Sumatera, dan Kalimantan. Sementara itu untuk jaringan jalan provinsi dan kabupaten/kota, wilayah Sumatera dan Sulawesi memiliki panjang jalan dalam kondisi tidak mantap paling tinggi. Namun demikian dari sisi persentase, tingkat kerusakan jalan provinsi paling tinggi di wilayah Maluku, sedangkan untuk jalan kabupaten/kota tingkat kerusakan paling tinggi di wilayah Papua.

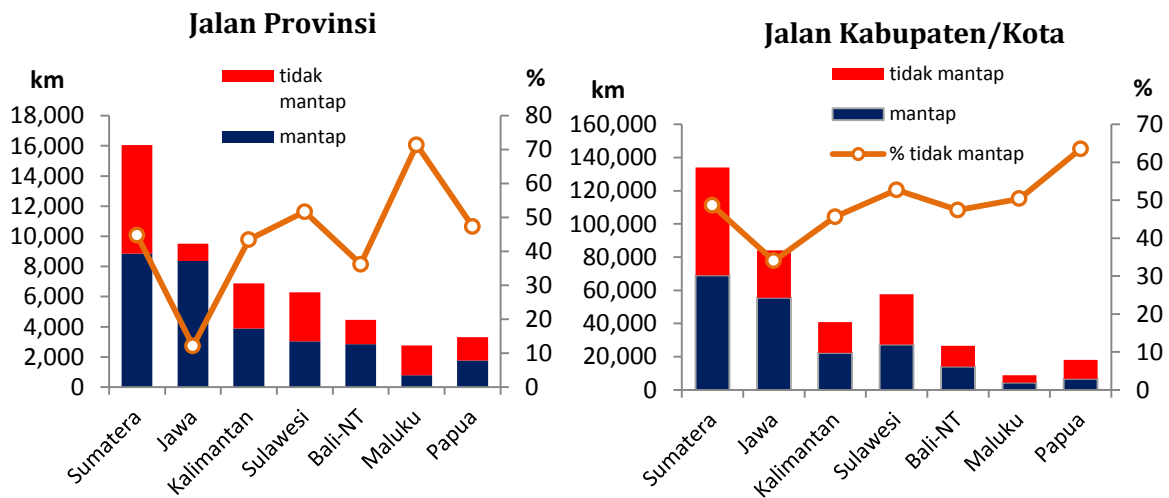
Kondisi ini menghambat mobilitas barang dan penumpang yang menyebabkan harga komoditas menjadi tinggi dan berdampak terhadap kinerja perekonomian daerah. Oleh sebab itu, pembangunan dan pemeliharaan pembangunan jalan di wilayah Papua, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara menjadi sangat penting dan mendesak.

GAMBAR 1.11
KONDISI JALAN NASIONAL PADA TAHUN 2005 DAN 2011



Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2011

GAMBAR 1.12
KONDISI JALAN PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2010

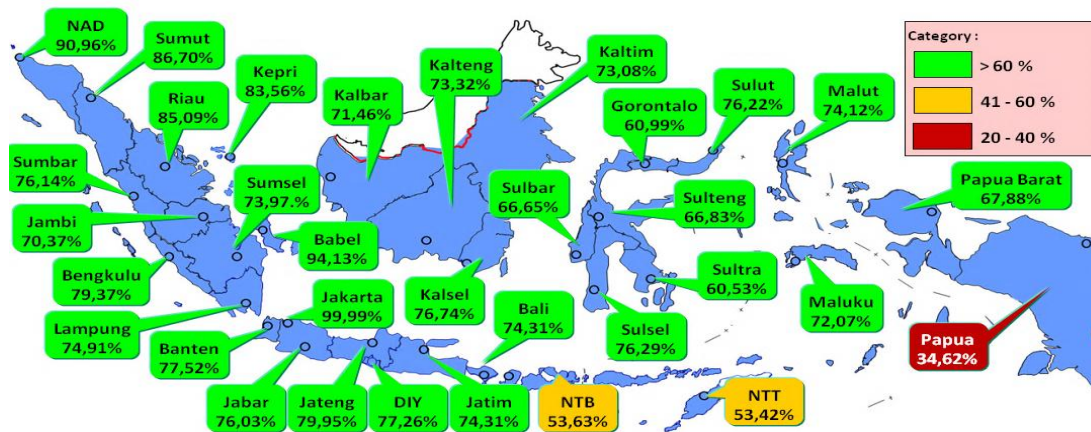


Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum, 2010

Infrastruktur lainnya yang sangat strategis bagi pembangunan wilayah adalah jaringan energi listrik. Meratanya pasokan dan akses listrik di semua wilayah sangat penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal. Pada tahun 2012, kesenjangan akses rumah tangga terhadap sumber energi listrik masih cukup tinggi khususnya di Wilayah Indonesia Timur. Hal ini tercermin dari senjangnya angka rasio elektrifikasi antarwilayah. Jika di DKI Jakarta hampir seluruh rumah tangga telah tersambung

dengan jaringan listrik, maka di Papua hanya sepertiga rumah tangga yang menikmati akses serupa. Daerah lain yang memiliki rasio elektrifikasi cukup rendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (53,63 persen) dan Nusa Tenggara Timur (53,42 persen).

GAMBAR 1.13
RASIO ELEKTRIFIKASI MENURUT PROVINSI TAHUN 2012



| | REALISASI (Tahun) | | | | | | | RENCANA (Tahun) | |
|---------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----------------|-------|
| | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Rasio Elektrifikasi | 63% | 64,3% | 65,1% | 65,8% | 67,2% | 72,95% | 76,56% | 79,3% | 81,4% |
| Target RPJM | | | | | 67,2% | 70,4% | 73,6% | 76,8% | 80,0% |

Sumber: Kementerian ESDM, 2012

1.2.4 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan data tahun 2012, luas hutan produksi adalah 76,566 juta ha, yang terdiri dari hutan produksi tetap, hutan produksi terbatas, dan hutan produksi yang dapat di konversi. Luas hutan produksi terbesar terdapat di Pulau Kalimantan sebesar 3,62 persen, Pulau Papua sebesar 27,17 persen dan pulau Sumatera sebesar 22,31 persen. Dari total luasan hutan produksi tersebut, terdapat seluas 42,07 juta ha yang masih berstatus “open acces”, yang akan terus dilakukan penetapan dan penguatan kawasan dan izin usaha. Tantangan utama yang harus dihadapi pada tahun 2014 adalah penyelesaian tata batas kawasan hutan (batas luar dan batas fungsi) serta pembentukan dan operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan terutama pada kawasan hutan produksi yang masih berstatus “open acces”.

TABEL 1.2
LUAS KAWASAN HUTAN DAN PERAIRAN BERDASARKAN KEPUTUSAN
MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DAN
KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN PER PROVINSI
(TAHUN 2012, (RIBU HEKTAR)).

| Wilayah | Penggunaan Lahan (ribu ha) | | | | | Total KH (daratan dan perairan) |
|---------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|
| | KSA | HL | HPT | HP | HPK | |
| Sumatera | 5.162,1 | 5.996,6 | 3.915,0 | 7.809,2 | 5.465,7 | 28.240,4 |
| Jawa-Bali | 792,3 | 830,7 | 430,2 | 1.391,0 | 0,0 | 3.444,2 |
| Nusa Tenggara | 529,5 | 1.161,7 | 484,0 | 579,0 | 101,8 | 2.855,9 |
| Kalimantan | 5.654,9 | 6.931,2 | 10.503,1 | 12.031,5 | 3.209,3 | 38.330,0 |
| Sulawesi | 4.059,8 | 4.641,9 | 3.243,2 | 1.259,9 | 492,8 | 13.697,6 |
| Maluku | 752,8 | 1.208,0 | 1577,7 | 1.166,5 | 2.212,8 | 6.917,9 |
| Papua | 10.431,2 | 9.467,1 | 7.810,5 | 6.583,4 | 6.407,9 | 40.700,0 |
| Total | 27.382,5 | 30.237,3 | 27.855,4 | 30.820,5 | 17.890,4 | 134.186,1 |

Sumber : Data Eksekutif Strategis Kehutanan Tahun 2012

Keterangan:

- SK Penunjukan masih berdasarkan TGHK
- Belum ada SK Penunjukan dan data masih bergabung dengan Provinsi Induk
- Perhitungan ulang secara digital setelah dikurangi Prov. Jawa Barat
- Perhitungan ulang secara digital setelah dikurangi Prov. Sulsel
- Perhitungan ulang secara digital setelah dikurangi Prov. Gorontalo

HK = Hutan Konservasi (daratan dan perairan) (ha)

HPK = Hutan Produksi yang dapat
dikonversi (ha)

HL = Hutan Lindung (ha)

KH = Kawasan Hutan (ha)

HPT = Hutan Produksi Terbatas (ha)

HP = Hutan Produksi (ha)

1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Tahun 2014

Strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah tahun 2014 mengacu pada RPJMN 2010-2014 :

1. Mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.
2. Meningkatkan keterkaitan antarwilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik;
3. Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah;
4. Pemihakan bagi percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana;
5. Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Pada pelaksanaannya, pada tahun 2014 secara nyata antara lain meliputi : (i) kegiatan-kegiatan tertuang pada Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) di masing-masing koridor; (ii) percepatan pengurangan kemiskinan melalui implementasi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia (MP3KI) khususnya di lokasi *Quick Wins*; (iii) percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat serta percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur.

Dengan memperhatikan strategi tersebut, maka arah dan prioritas pengembangan wilayah tahun 2014 adalah sebagai berikut:

TABEL 1.3
ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH

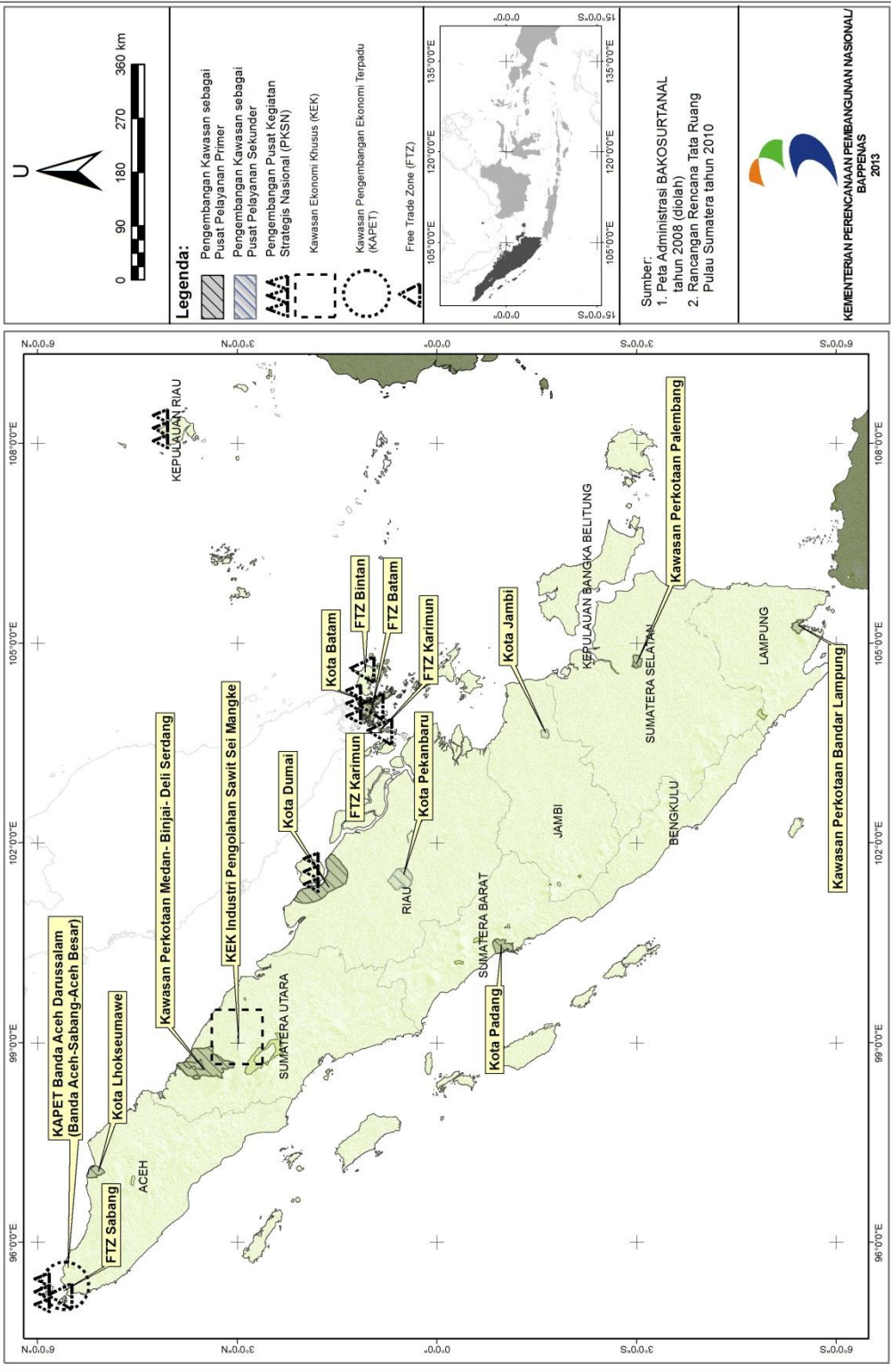
| Wilayah | Arah Pengembangan Wilayah | Prioritas Pengembangan |
|------------------|--|---|
| Sumatera | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pusat produksi dan industri pengolahan hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan; 2. Lumbung energi nasional; 3. Pusat perdagangan dan pariwisata | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pengolahan Sawit Sei Mangkei; 2. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Banda Aceh Darussalam; 3. Pengembangan mutu dan produksi pertanian di Aceh, Bengkulu, Riau, Lampung, dan Kepulauan Riau; 4. Pengembangan pusat industri dan pengolahan pertanian di Sumatera Utara dan Lampung ; 5. Pengembangan sarana irigasi di Aceh, Kepulauan Riau, Riau, dan Sumatera Selatan; 6. Pengembangan infrastruktur penghubung berupa jalan di Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara; 7. Pengembangan Jalan Tol di Riau dan Sumatera Utara; 8. Pengembangan infrastruktur kereta api di Aceh dan Sumatera Barat; 9. Pengembangan Bandara Sultan Thaha, Bandara Raja Haji Fisabilillah, Bandara Tanjung Pandan, Bandara Sultan Mahmud Badarudin, dan Bandara Sultan Syarif Kasim II, 10. Pengembangan Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Dumai, Pelabuhan Tanjung Api-Api, Pelabuhan Merak-Bakaheuni, dan Pelabuhan Panjang, 11. Pengembangan pariwisata di Bangka Belitung, |
| Jawa-Bali | <ol style="list-style-type: none"> 1. Lumbung pangan nasional, 2. Pengembangan industri pengolahan 3. Penguatan interaksi perdagangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata Tanjung Lesung. 2. Pengembangan Pertanian di Bali, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Timur 3. Pengembangan Pengairan dan Irigasi di Banten, |

| Wilayah | Arah Pengembangan Wilayah | Prioritas Pengembangan |
|----------------------|--|--|
| | 4. Peningkatan mutu pelayanan jasa dan pariwisata bertaraf internasional, dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan. | Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur 4. Pengembangan Infrastruktur jalan di Bali, Jalan Lintas Utara Jawa, dan Ruas Semarang- Bawen-Yogyakarta 5. Pengembangan jalan tol Tanjung Priok, Cisumdawu, dan Mantingan-Solo-Kertosono. 6. Pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok, Pamanukan, Taddan, Pasean, dan Branta. 7. Pengembangan infrastruktur perkeretaapian di jabodetabek (elektrifikasi) dan <i>double-track</i> lintas utara jawa |
| Kalimantan | 1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan; 2. Peningkatan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan | 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Khatulistiwa, DAS Kakab, Sasamba, dan Batulicin. 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai; 3. Pengembangan Infrastruktur jalan dan jembatan; 4. Pengembangan mutu dan produksi pertanian 5. Pengembangan jaringan pengairan dan irigas |
| Sulawesi | 1. Lumbung pangan nasional 2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan 3. Pengembangan bioenergi 4. Peningkatan dan perluasan perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf intenasional. | 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung, Palapas, Pare-pare, dan Bank Sejahtera Sultra; 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Melanguane dan Tahuna; 3. Pengembangan infrastruktur Jalan; 4. Pengembangan produktivitas dan mutu pertanian; 5. Pengembangan jaringan pengairan dan irigasi. |
| Nusa Tenggara | 1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan; 2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan; 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan dan pariwisata; dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau | 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima dan Mbay; 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Atambua, Kafamenanu, dan Kalabahi; 3. Pengembangan infrastruktur jalan dan pelabuhan penyeberangan; 4. Pengembangan kawasan pariwisata; 5. Pengembangan pengairan dan irigasi. |
| | | Dalam rangka percepatan pembangunan Nusa Tenggara Timur dilakukan dengan prioritas: 1. Pengembangan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai pusat produksi dan pengolahan komoditas unggulanjagung dan kakao, pusat pembibitan dan produksi sapi dan cendana, pusat produksi dan |

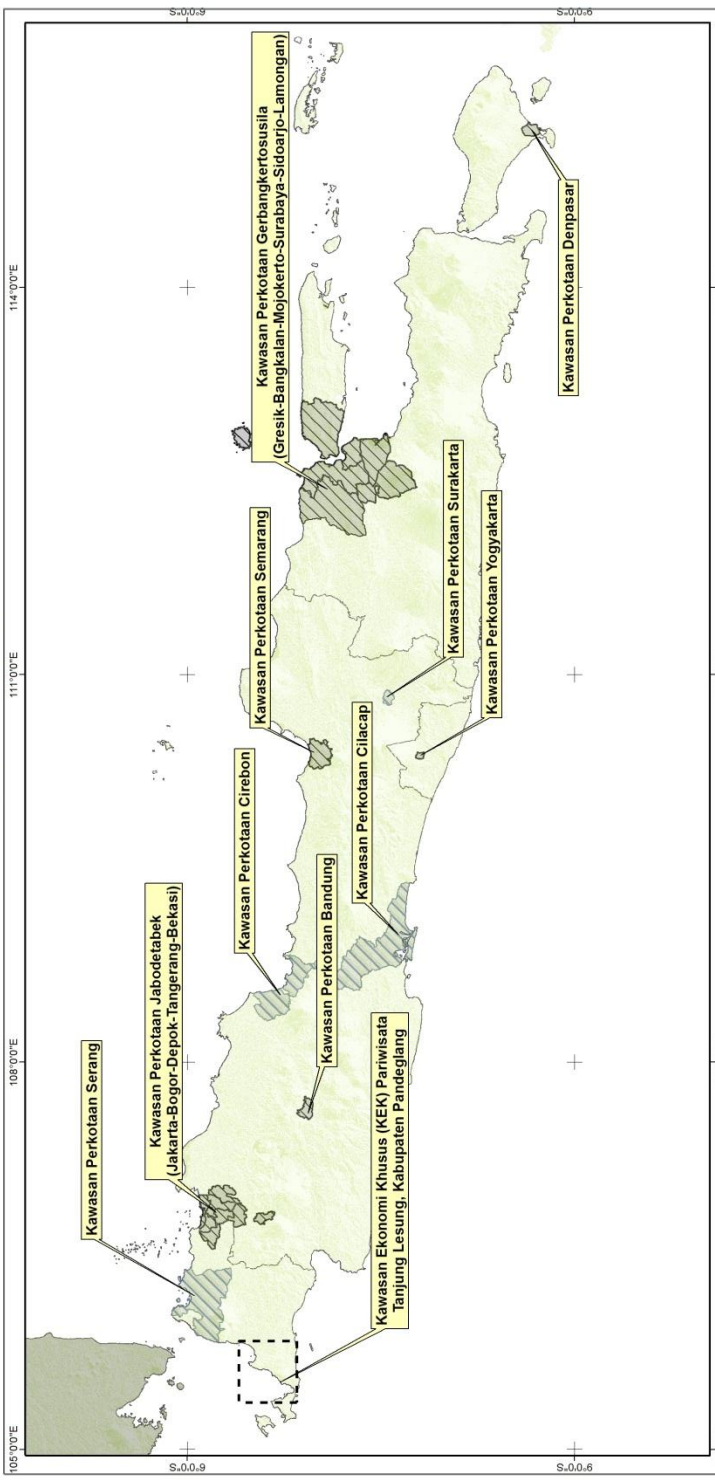
| Wilayah | Arah Pengembangan Wilayah | Prioritas Pengembangan |
|---------------|--|--|
| | | <p>pengolahan hasil-hasil perikanan, rumput laut; serta pusat produksi dan pengolahan garam.</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan pariwisata melalui pengembangan desa wisata terutama pengembangan Kawasan Wisata Alam Komodo dan seluruh lokasi potensial Kawasan Wisata Alam, Wisata Budaya dan Wisata minat khusus. Pengembangan infrastruktur yang menghubungkan antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil, dan pulau-pulau terpencil dan terdepan/terluar sebagai berikut: (1) jaringan jalan lintas Nusa Tenggara Timur; (2) jaringan prasarana dan transportasi penyeberangan antar-pulau; (3) jaringan listrik dan irigasi. Pemantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan kesejahteraan, dengan prioritas sebagai berikut: (1) pengembangan kegiatan ekonomi di kawasan perbatasan; dan (2) pengembangan kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional melalui pengembangan pemukiman eks Timor-Timur |
| Maluku | <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan; Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan; Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pariwisata; dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. | <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram; Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Daruba, Dobo, Saumlaki, dan Ilwaki; Pengembangan infrastruktur jalan Pengembangan Pelabuhan Ambon, Buli, dan Tobelo; Pengembangan produksi dan pengolahan produk pertanian, perkebunan, dan Perikanan; Pengembangan Pariwisata Bahari di Maluku. |
| Papua | <ol style="list-style-type: none"> Peningkatan mutu sumber daya manusia; Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan; Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan; Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan; dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau. | <ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Teluk Cenderawasih; Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Jayapura, Tanah Merah, Merauke; Pengembangan Infrastruktur Jalan; Pengembangan Pelabuhan Kaimana dan Agats; Pengembangan Bandara Sentani dan Fakfak; Pengembangan kualitas sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan; <p>Dalam rangka Percepatan Pembangunan Papua prioritas kebijakan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya, Lani Jaya, Paniai, Nabire, Tolikara, Pegunungan Bintang (Papua) dan Kabupaten Fak Fak dan Manokwari (Papua Barat). Pengembangan peternakan di Kawasan Pegunungan |

| Wilayah | Arah Pengembangan Wilayah | Prioritas Pengembangan |
|---------|---------------------------|---|
| | | <p>Tengah, Bomberai, dan Kebar;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Penanggulangan kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan menyediakan permodalan UMKM usaha pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan industri rakyat melalui PNPM Mandiri, KUR, dan Respek. 4. Pengembangan ekonomi rakyat di Kabupaten Jayapura, Waropen, Yapen, Nabire, Mappi, Keerom, Asmat, Merauke, dan Mimika (Papua) dan Kabupaten Sorong Selatan, Kaimana, Fak fak, dan Teluk Bintuni (Papua Barat); 5. Pengembangan industri pengolahan sagu rakyat; 6. Peningkatan pelayanan pendidikan gratis sampai SMU hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat; 7. Peningkatan pelayanan kesehatan gratis sampai SMU hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat; 8. Pengembangan infrastruktur dasar di seluruh Papua dan Papua Barat terutama pengembangan sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS) dan pabrik semen di Timika dan Manokwari; 9. Pemihakan terhadap masyarakat asli Papua di seluruh Papua dan Papua Barat melalui pemberian kuota khusus bagi putra-putri asli Papua berupa kuota kepada siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, kuota menjadi anggota TNI/Polri dan sekolah Akademi Militer dan Akademi Kepolisian, serta pendirian sekolah kebidanan/keperawatan, sekolah kepamongprajaan, dan sekolah pendidikan keguruan. |

PETA PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA



PETA PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA - BALI



Legenda :

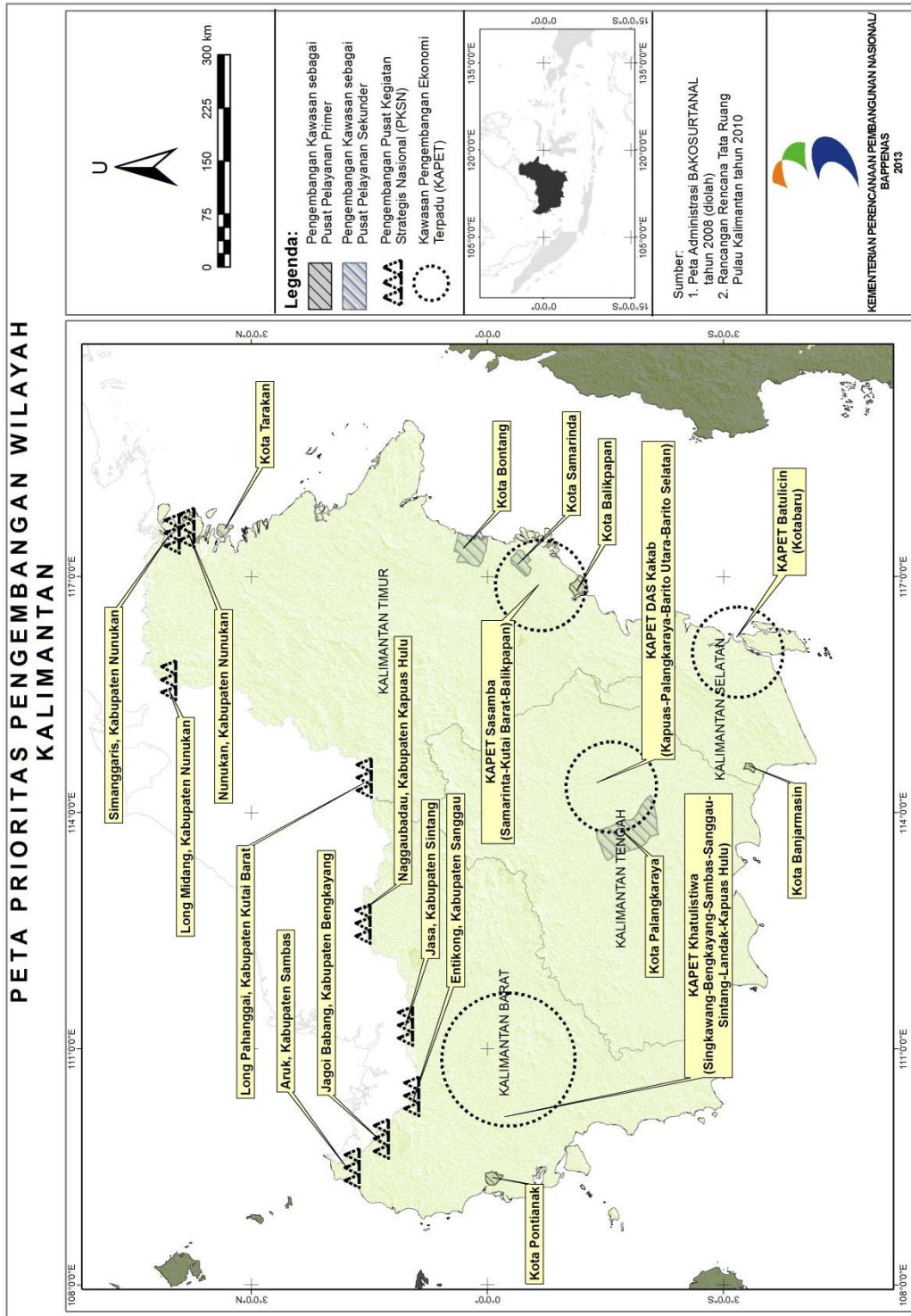
- Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Primer
- Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Sekunder
- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Sumber:

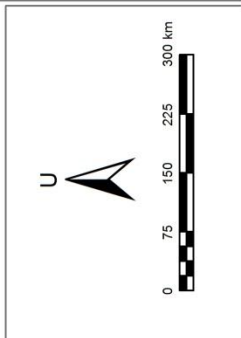
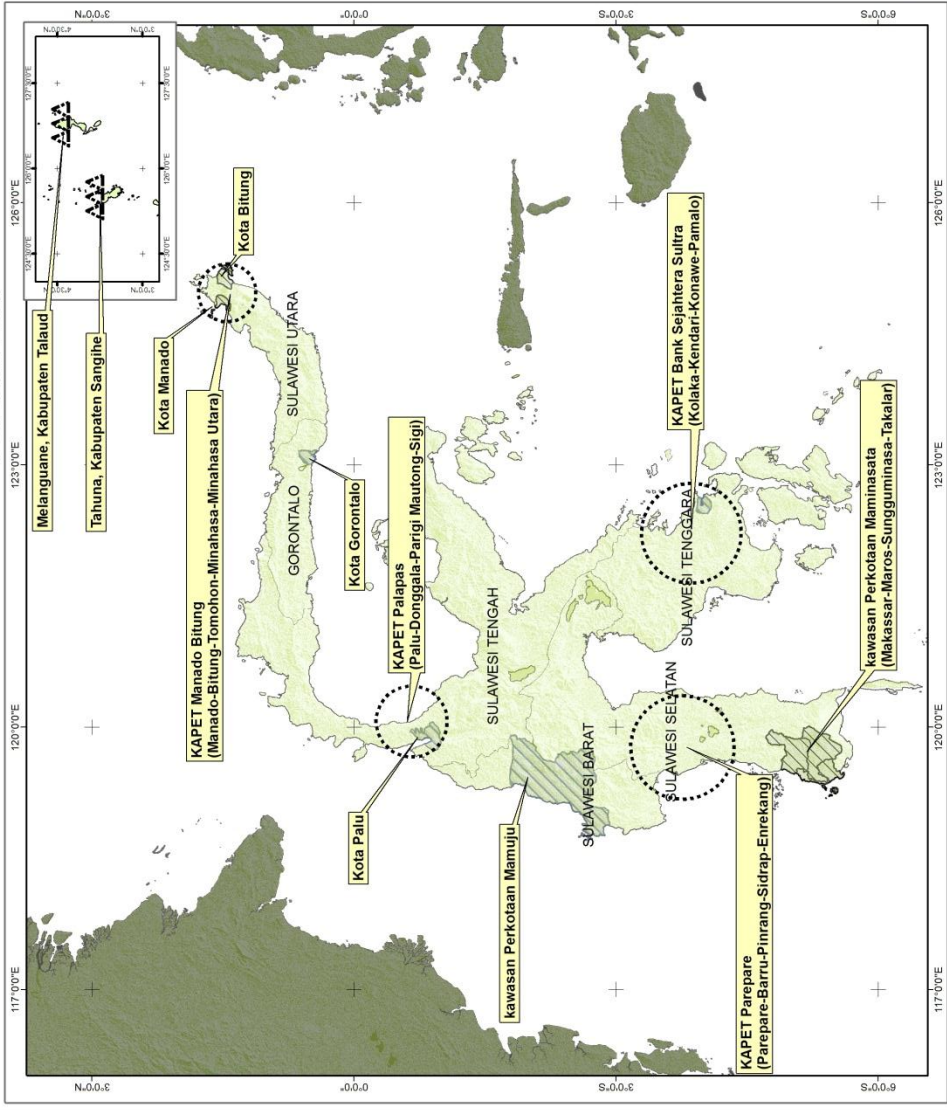
1. Peta Administrasi BAKOSURTANAL tahun 2007 (diolah)
2. Rancangan Rencana Tata Ruang Pulau Jawa - Bali tahun 2010

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS
2013

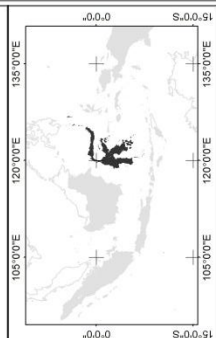
PETA PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN



PETA PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI



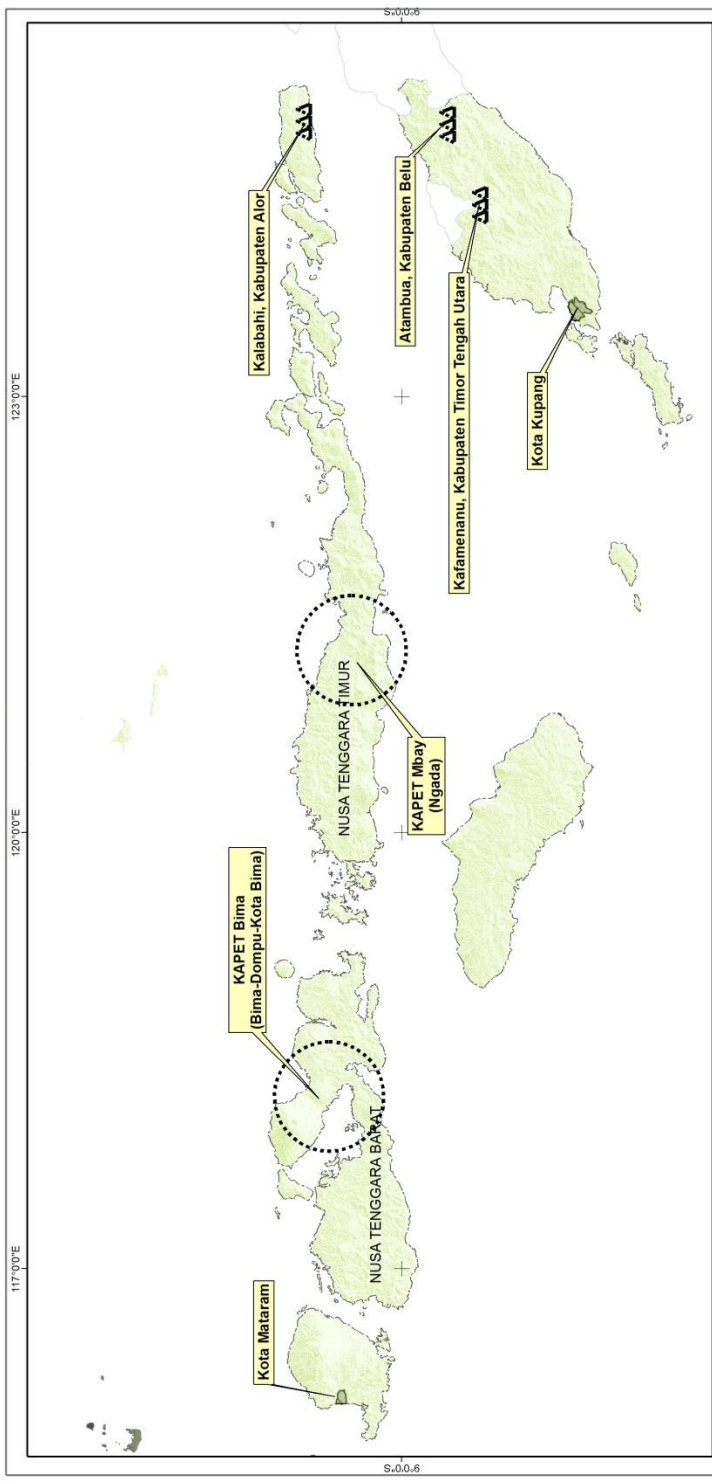
- Legenda:**
- Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Primer
 - Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Sekunder
 - Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
 - Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)



Sumber:
 1. Peta Administrasi BAKOSURTANAL tahun 2007 (diolah)
 2. Rancangan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi tahun 2010



PETA PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA



Legenda:

- Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Primer
- Pengembangan Kawasan sebagai Pusat Pelayanan Sekunder
- Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET)

Sumber:

1. Peta Administrasi BAKOSURTANAL tahun 2008 (diolah)
2. Rancangan Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara tahun 2010

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL BAPPENAS
2015

117°0'0"E 120°0'0"E 123°0'0"E

105°0'0"E 120°0'0"E 135°0'0"E

0.0.0 S.0.0.51

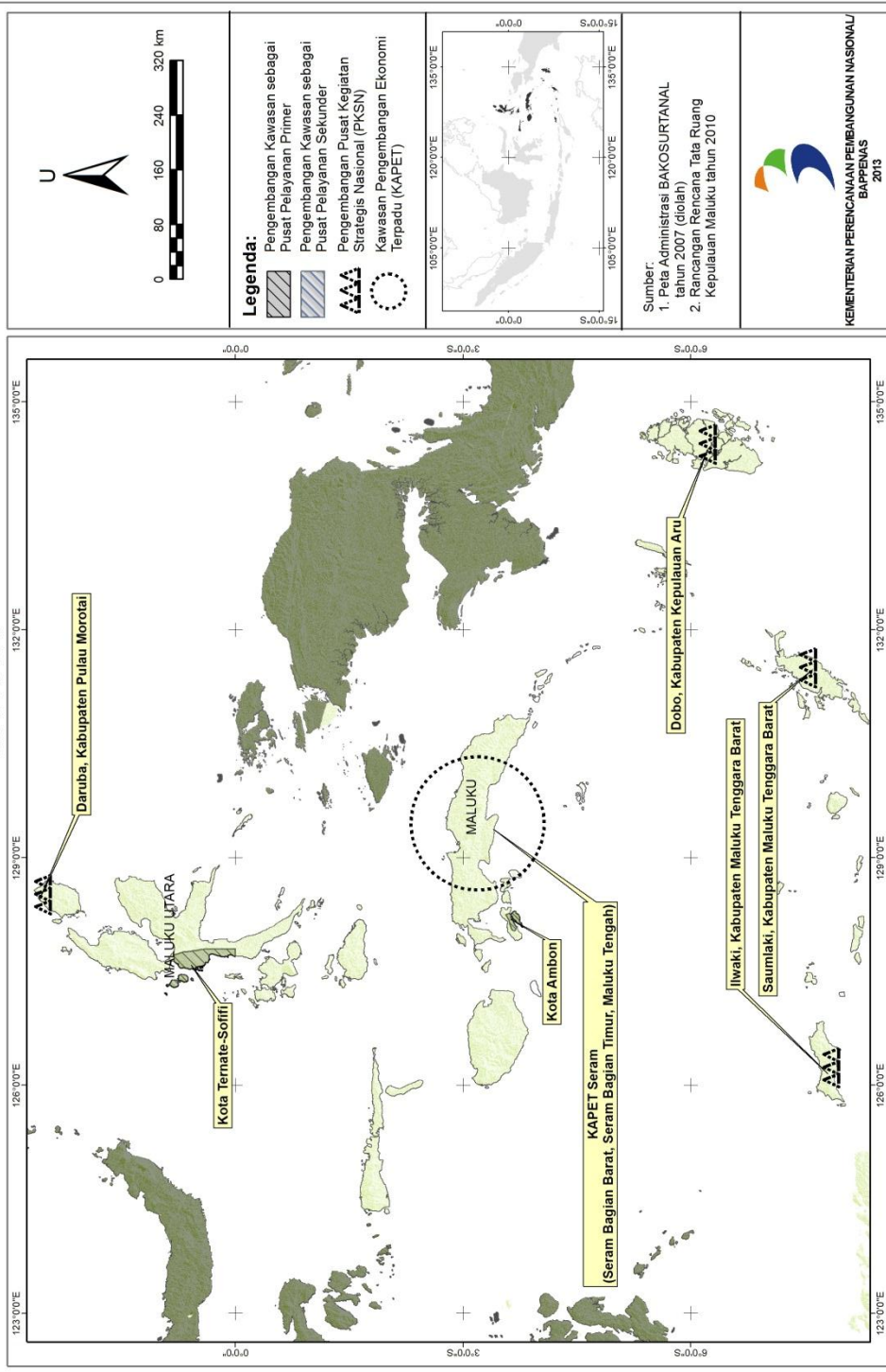
120°0'0"E 123°0'0"E

117°0'0"E 120°0'0"E 123°0'0"E

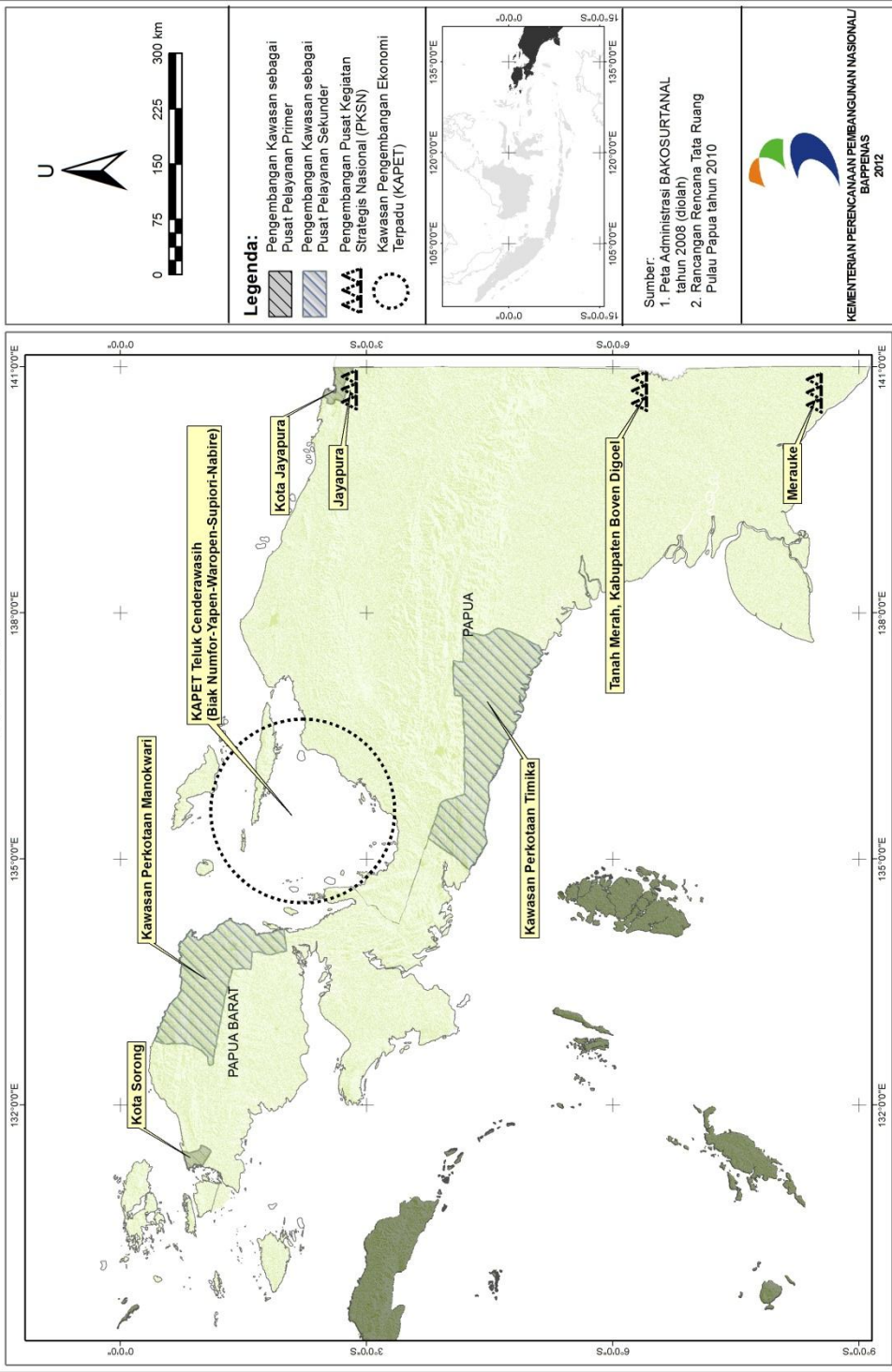
0 40 80 120 160 km

120°0'0"E 123°0'0"E

PETA PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU



PETA PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA



BAB 2

PENGEMBANGAN WILAYAH SUMATERA TAHUN 2014

2.1 Kondisi Wilayah Sumatera Saat Ini

Secara umum perekonomian wilayah Sumatera pada tahun 2012 menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibanding tahun sebelumnya. Semua provinsi mencatatkan pertumbuhan positif. Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta pertambangan dan penggalan. Provinsi Kepulauan Riau, Lampung, dan Sumatera Utara tumbuh paling pesat di antara provinsi lainnya, sementara Sumatera Selatan, Riau dan Sumatera Utara merupakan daerah yang paling banyak menarik investasi, baik PMA maupun PMDN.

Peningkatan kinerja perekonomian disertai dengan perbaikan indikator sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun di wilayah Sumatera. TPT per Agustus 2012 menurun di tujuh dari sepuluh provinsi dibandingkan kondisi pada tahun 2011. Tingkat pengangguran mengalami peningkatan di Provinsi Aceh, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Capaian TPT di Wilayah Sumatera pada tahun 2012 relatif rendah dibandingkan TPT nasional. Dari 10 provinsi hanya tiga yang capaian TPT-nya lebih tinggi dari angka nasional, yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Di samping itu, tingkat kemiskinan wilayah juga cenderung menurun. Persentase penduduk miskin menurun di enam provinsi pada tahun 2012 (September) dibandingkan dengan kondisi tahun 2011. Empat provinsi yang mengalami peningkatan persentase penduduk miskin adalah Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, enam provinsi memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional. Empat provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin relatif tinggi adalah Aceh, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung. Secara umum fenomena kemiskinan lebih menonjol di daerah perdesaan dibandingkan dengan daerah perkotaan.

Sementara itu, dalam hal pembangunan manusia, semua provinsi menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian IPM delapan provinsi di wilayah

Sumatera lebih tinggi dari capaian nasional. Provinsi yang memiliki IPM lebih rendah dari capaian nasional adalah Aceh dan Lampung.

Di bidang infrastruktur wilayah, total panjang jaringan jalan di Sumatera terus meningkat. Di samping itu kualitas jalan juga mengalami sedikit peningkatan, di mana persentase jalan dengan kondisi baik meningkat dari 33,8 persen pada tahun 2008 menjadi 49,91 persen pada tahun 2011. Secara total kondisi jalan mantap tahun 2011 di Sumatera mencapai 88,2 persen. Secara rata-rata, hampir 90 persen desa-desa di wilayah Sumatera dapat diakses melalui jalan darat, 2,3 persen bisa diakses melalui transportasi air, dan 8,3 persen lainnya bisa dilalui melalui transportasi air dan darat. Rasio elektrifikasi untuk NAD 87,72 persen, Sumut 83,98 persen, Riau 78,17 persen, Sumbar 77,72 persen, Jambi 76,54 persen, Kepri 91,52 persen, Bengkulu 71,15 persen, Sumsel 72,71 persen, Babel 82,26 persen dan Lampung 70,40 persen.

Dalam rangka penguatan konektivitas nasional sektor komunikasi dan informatika, capaian pembangunan di pulau Sumatera hingga tahun 2011 antara lain meliputi penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa Berdering) di 13.863 desa USO (100 persen dari target) dan internet (Pusat Layanan Internet Kecamatan) di 1.651 desa ibukota kecamatan USO (100 persen dari target). Adapun pembangunan jaringan *broadband* hingga tahun 2011 oleh PT Telkom telah menjangkau 105 kabupaten/kota (69,5 persen).

Luas daerah irigasi di Pulau Sumatera mencapai 1,99 juta hektar atau sekitar 27 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia. Dari total 1,99 juta hektar daerah irigasi hanya 117,75 ribu hektar (6 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, sedangkan sisanya masih mengandalkan dari aliran sungai. Kondisi tahun 2010 menunjukkan hanya 46,2% jaringan irigasi di Pulau Sumatera dalam kondisi baik, selebihnya dalam kondisi rusak, baik rusak berat, sedang maupun ringan. Dari sisi ketersediaan tampungan air, daya tampung air (*storage*) perkapita Pulau Sumatera adalah sebesar 50,88 m³/kapita, lebih kecil dari rata-rata daya tampung air perkapita nasional sebesar 52,31 m³/kapita. Sedangkan kondisi bendungan/waduk dalam kondisi baik sebesar 69% (9 buah) dan 23% rusak sedang. Dari 63 buah embung, sebanyak 11 buah (17%) dalam kondisi baik dan 16 buah (25%) dalam kondisi rusak berat.

TABEL 2.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH SUMATERA

| Perkembangan Pembangunan | Aceh | Sumatera Utara | Sumatera Barat | Riau | Jambi | Sumatera Selatan | Bengkulu | Lampung | Kep. Bangka Belitung | Kep. Riau |
|---|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi 2012 (persen) | 5,20 | 6,22 | 6,35 | 3,55 | 7,44 | 6,01 | 6,61 | 6,48 | 5,72 | 8,21 |
| PDRB Perkapita ADHB Tahun 2012 (Rp. Ribu) | 20.486,25 | 26.568,86 | 22.208,59 | 79.112,74 | 22.404,67 | 26.790,90 | 13.682,00 | 18.611,50 | 26.441,43 | 49.644,26 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2012 (persen) | 9,10 | 6,20 | 6,52 | 4,30 | 3,22 | 5,70 | 3,61 | 5,18 | 3,49 | 5,37 |
| Persentase Penduduk Miskin, September 2012 (persen) | 18,58 | 10,41 | 8,00 | 8,05 | 8,28 | 13,48 | 17,51 | 15,65 | 5,37 | 6,83 |
| Indeks Pembangunan Manusia, 2011 | 72.16 (Peringkat 18) | 74.65 (Peringkat 8) | 74.28 (Peringkat 9) | 76.53 (Peringkat 3) | 73.3 (Peringkat 13) | 73.42 (Peringkat 10) | 73.4 (Peringkat 11) | 71.94 (Peringkat 20) | 73.37 (Peringkat 12) | 75.78 (Peringkat 6) |
| Indeks Pembangunan Gender, 2010 | 65.30 | 69.63 | 68.50 | 65.71 | 63.32 | 66.00 | 67.79 | 63.00 | 60.36 | 63.49 |
| Indeks Pemberdayaan Gender, 2010 | 53.40 | 67.78 | 63.04 | 65.14 | 57.91 | 67.32 | 68.50 | 65.32 | 55.62 | 56.70 |
| Umur Harapan Hidup, 2011 (Tahun) | 68,80 | 69,65 | 69,76 | 71,55 | 69,25 | 69,80 | 70,16 | 69,75 | 69,05 | 69,85 |
| Rata-Rata Lama Sekolah, 2011 (Tahun) | 8.90 | 8.91 | 8.57 | 8.63 | 8.05 | 7.84 | 8.33 | 7.82 | 7.58 | 9.73 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Peranan wilayah Sumatera bagi perekonomian nasional sangat menonjol di bidang perkebunan dan energi. Pangsa produksi perkebunan wilayah Sumatera cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Untuk komoditi kelapa sawit, pangsa produksi wilayah Sumatera pada tahun 2010 mencapai 75,6 persen, meningkat dari 68,9 persen pada tahun 2008. Pada periode yang sama, pangsa produksi kakao Sumatera juga meningkat dari 20,17 persen menjadi 20,32 persen. Sementara itu pangsa produksi karet dan kopi wilayah Sumatera sedikit mengalami penurunan tetapi masih merupakan sentras produksi utama secara nasional. Pada tahun 2010, 72,6 persen produksi karet alam nasional berasal dari wilayah Sumatera. Demikian juga untuk komoditas kopi, sumbangan wilayah Sumatera mencapai 71,4 persen dari total produksi nasional.

Di bidang energi primer, 40 persen cadangan *Coal Bed Methane* (CBM) nasional berada di wilayah Sumatera. Sedangkan untuk batubara, besarnya cadangan di wilayah Sumatera mencapai 50 persen dari total cadangan batubara

nasional.

Secara geografis wilayah Sumatera berada pada pertemuan lempeng bumi serta lintasan gunung api aktif (*ring of fire*) sehingga memiliki kerawanan bencana alam yang relatif tinggi. Provinsi sebelah barat Sumatera merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang rawan terhadap bencana gempa bumi dan tsunami karena terletak di antara dua lempengan Samudra India dengan lempengan Eurasia. Jenis bencana lainnya yang kerap melanda adalah banjir, yaitu tercatat 11.928 kejadian banjir terjadi selama 2009 sampai dengan 2011.

Tantangan terbesar yang harus dikelola wilayah Sumatera adalah menjaga kelestarian dan daya dukung lingkungan untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan wilayah. Isu lain yang tidak kalah penting adalah kedaulatan wilayah nasional di sepanjang perbatasan dengan negara lain di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terdepan, termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa di antaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena masih menyimpan potensi permasalahan dengan negara tetangga

2.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sumatera

Tujuan pengembangan Wilayah Sumatera tahun 2014 adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat;
2. Meningkatkan jaringan transportasi wilayah;
3. Memantapkan peran Sumatera sebagai lumbung pangan dan lumbung energi;
4. Memantapkan peran Sumatera sebagai sentra perkebunan dan agribisnis khususnya di bagian tengah dan utara;
5. Mengembangkan wilayah pesisir timur sebagai koridor industri pengolahan berbasis sumber daya alam;
6. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara wilayah bagian utara dan selatan, serta antara pesisir timur dan barat sesuai dengan daya dukung lingkungan;
7. Meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Sumatera, serta meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional.
8. Mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
9. Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan REDD+ (*Reducing*

Emission from Deforestation and Degradation Plus).

Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Sumatera tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Membaiknya berbagai indikator utama pembangunan (lihat Tabel 2.1) dan indikator kesejahteraan (lihat Tabel 2.2);
2. Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi di wilayah Sumatera;
3. Berkembangnya Sumatera bagian selatan sebagai lumbung pangan dan lumbung energi;
4. Berkembangnya Sumatera bagian tengah dan bagian utara sebagai pusat perkebunan dan agribisnis;
5. Meningkatnya investasi dan industrialisasi, khususnya di koridor pesisir timur;
6. Terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Sumatera bagian utara, bagian selatan, dan pesisir pantai;
7. Terkendalinya pertumbuhan kawasan perkotaan di kawasan rawan bencana alam di Pantai Barat dan Pantai Timur;
8. Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
9. Meningkatnya Penyediaan Air Baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan dalam rangka mencapai target MDGs;
10. Menurunnya risiko banjir dan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman padat penduduk dan jalur transportasi utama;
11. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
12. Selesainya persiapan pelaksanaan kegiatan REDD+ di Aceh, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan yang ditandai dengan: selesainya tata batas kawasan hutan,

beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Penurunan *hotspot* (kumulatif dari rerata 2005-2009) dan penurunan konflik kawasan, serta rehabilitasi hutan dan lahan.

TABEL 2.2
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2014

| Provinsi | Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾ (%) | Kemiskinan ²⁾ (%) | Pengangguran ³⁾ (%) |
|------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Aceh | 5,50 – 6,10 | 14,27 | 6,30 – 5,70 |
| Sumatera Utara | 6,90 – 7,60 | 7,04 | 10,40 – 9,40 |
| Sumatera Barat | 6,00 – 6,50 | 4,51 | 8,30 – 7,50 |
| Riau | 6,50 – 7,20 | 5,47 | 6,20 – 5,60 |
| Jambi | 6,90 – 7,60 | 4,27 | 3,50 – 3,10 |
| Sumatera Selatan | 6,20 – 6,90 | 11,39 | 7,60 – 6,80 |
| Bengkulu | 6,20 – 6,90 | 11,99 | 1,60 – 1,90 |
| Lampung | 6,20 – 6,90 | 13,99 | 5,20 – 4,70 |
| Bangka Belitung | 6,10 – 6,70 | 3,68 | 2,70 – 2,40 |
| Kepulauan Riau | 7,50 – 8,20 | 4,46 | 2,40 – 1,50 |

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Ket: ¹⁾ Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

²⁾ Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

³⁾ Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja

TABEL 2.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, UMUR HARAPAN HIDUP
DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH SUMATERA TAHUN 2014

| Provinsi | Angka Kematian Bayi ¹⁾ | Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾ | Umur Harapan Hidup ³⁾ |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Aceh | 30 | 9,3 | 69,61 |
| Sumatera Utara | 20 | 9,16 | 72,46 |
| Sumatera Barat | 23 | 8,56 | 71,7 |
| Riau | 20 | 8,78 | 72,57 |
| Jambi | 24 | 8,08 | 71,26 |
| Sumatera Selatan | 23 | 8,08 | 71,79 |
| Bengkulu | 25 | 8,26 | 71,06 |
| Lampung | 21 | 8,42 | 72,21 |
| Bangka Belitung | 24 | 9,3 | 71,35 |
| Kepulauan Riau | 19 | 10,8 | 72,73 |

Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Ket: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

³⁾ Perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh penduduk.

2.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sumatera

Pengembangan wilayah Sumatera Tahun 2014 diarahkan sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Untuk mendukung arah pengembangan tersebut, strategi pengembangan wilayah yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan produktivitas sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan.
2. Mengembangkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Medan, Batam, Pekanbaru, dan Palembang sebagai pusat industri pengolahan yang melayani kawasan sentra produksi.
3. Mengoptimalkan produksi migas dan batubara serta mengembangkan sumber energi alternatif.
4. Meningkatkan integrasi jaringan dan kapasitas pembangkit listrik.
5. Meningkatkan integrasi jaringan transportasi intermoda wilayah.
6. Meningkatkan akses pendidikan, pelatihan dan pelayanan kesehatan.
7. Mengefektifkan program penanggulangan kemiskinan.
8. Meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban serta kegiatan ekonomi kawasan perbatasan.
9. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta mitigasi bencana alam.
10. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi.

2.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Wilayah Sumatera

Isu strategis dan kegiatan strategis provinsi di wilayah Sumatera adalah sebagai berikut:

Provinsi Aceh

1. Peningkatan Perbaikan Gizi dengan kegiatan strategis yaitu Manajemen distribusi suplementasi gizi dan alat penunjang
2. Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan strategis : (1) Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA dan SMK dan (2) Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD).
3. Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) dengan kegiatan strategis : (1) Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan;

- (2) Perlindungan dan jaminan sosial; (3) Rehabilitasi sosial.
4. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dengan kegiatan strategis yaitu : (1) Pengembangan Infrastruktur Jalan sebagai Penguatan Konektivitas Pusat-pusat Layanan; (2) Pengembangan Pelabuhan Laut; (3) Pembangunan Bandara Lasikin Pulau Simeulue; (4) Pengembangan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; (5) Pengembangan Sumber Daya Air; (6) Revitalisasi Kereta Api Pesisir Timur Aceh.
 5. Peningkatan produksi perikanan dengan kegiatan strategis : (1) Pembangunan PPI Lampulo dan PPI Idi; (2) Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya.

Provinsi Sumatera Utara

1. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, termasuk rintisan PMU dengan kegiatan strategis : (1) Pembangunan SMK untuk mendukung Kawasan Industri Sei Mangkei; (2) Peningkatan APK PAUD; (2) Peningkatan kualitas tenaga pendidik.
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan strategis : (1) Pembangunan Rumah Sakit Umum di daerah; (2) Pembinaan Pelayanan Kesehatan; (3) Peningkatan jaminan kesehatan ibu dan reproduksi.
3. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri dengan kegiatan strategis : (1) Pembangunan Jalan Akses Non Tol ke Bandara Kuala Namu; (2) Peningkatan Jalan Lingkar Nasional Yang Menghubungkan Antar Lintas di Kepulauan Nias; (3) Peningkatan Jalan Lintas Tengah dan Lintas Penghubung; (4) Peningkatan status jalan mendukung akses Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM).
4. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dengan kegiatan strategis Pengembangan sistem dan peningkatan sambungan rumah sistem perpipaan air limbah.
5. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula dengan kegiatan strategis: (1) Pengembangan Metode SRI; (2) Pengembangan optimasi lahan; (3) Rehabilitasi Jaringan irigasi; (3) Pembangunan Bendung DI Sei Wampu.

Provinsi Sumatera Barat

1. Peningkatan APK/APM Pendidikan Dasar Sumatera Barat dengan kegiatan strategis yaitu Pembangunan RKB dan Pembangunan RKB SMA/AMK.
2. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dengan kegiatan strategis : (1) Pembinaan Gizi Masyarakat; (2) Pembinaan Pelayanan Kesehatan; (3) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi; (3) Pengendalian Penyakit Menular; (4) Penyehatan Lingkungan.
3. Lemahnya Infrastruktur Daerah dan Konektivitas sektor Perkeretaapian, Perhubungan Laut dan Telekomunikasi dengan kegiatan strategis : (1) Pembangunan Jalan DUKU-Sicincin; (2) Pembangunan jalur kereta api DUKU - Bandara BIM; (3) Pembangunan Pelabuhan Tiram; (4) Peningkatan Jalan dan Jembatan Nasional (reguler dan winrip).
4. Belum tertanggulangnya masalah banjir, sedimen dan abrasi pantai dengan kegiatan strategis yaitu Pengembangan Infrastruktur Jalan sebagai Penguatan Konektivitas Pusat-pusat Layanan.
5. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula (lanjutan direktif Presiden) dengan kegiatan strategis Rehabilitasi jaringan irigasi DI Batahan (6246 Ha).
6. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran dengan kegiatan strategis yaitu Pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi.

Provinsi Riau

1. Pembangunan Daerah dan Kawasan Perbatasan dengan kegiatan strategis Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan.
2. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dengan kegiatan strategis : (1) Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R dan TPST; (2) Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Rehab Saluran Primer; dan (3) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan.
3. Millenium Development Goals (MDGs) dengan kegiatan strategis : (1) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkung; (2) Pembinaan Gizi Masyarakat; (3) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak; (4) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi.
4. Revitalisasi Pertanian dengan kegiatan strategis : (1)

Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga panen dan Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar; (2) Pengembangan sistem produksi pembudidayaan; (3) Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman tahunan; (4) Perluasan areal pengelolaan lahan pertanian; (5) Pembangunan bendung suplesi Pegadis, Rehabilitasi DI Uwai dan DI Ranah.

Provinsi Jambi

1. Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan kegiatan strategis yaitu Peningkatan jumlah tenaga pendidik SMK.
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan kegiatan strategis yaitu : (1) OP dan Pembangunan daerah irigasi, sungai dan rawa; (2) Pengembangan Agribisnis; (3) Peningkatan Produksi Benih unggul perikanan.
3. Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) dengan kegiatan : (1) Peningkatan Akses Permodalan bagi koperasi dan UKM; (2) Peningkatan Gizi ibu hamil; (3) Penyaluran dana KUBE.
4. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan kegiatan strategis : (1) Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung Provinsi Jambi; (2) Pengendalian Banjir; (3) Peningkatan struktur jalan lintas penghubung.
5. Mitigasi bencana dengan kegiatan strategis yaitu Pengendalian banjir Pintu Air Ma Bulian dan Sungai Batanghari.

Provinsi Sumatera Selatan

1. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri dengan kegiatan strategis : (1) Pembangunan Fasilitas Bandara Di Provinsi Sumatera Selatan; (2) Pembangunan Fasilitas laut Pelabuhan Laut Tanjung Api Api; (3) Pembangunan Jembatan Musi.
2. Kapasitas Mitigasi Bencana dengan kegiatan strategis yaitu Demonstrasi Activity di Kawasan Hutan Gambut dan Penanaman Pohon Mangrove di Wilayah Pesisir.
3. Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan dengan kegiatan strategis : (1) Pembangunan Unit Pengolahan Susu Sapi Perah; (2) Pengembangan Rumah Kemasan Industri; (3) Pengembangan Rumah Tekstil (4) Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi.
4. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dengan kegiatan strategis yaitu Pembangunan Puskesmas

- Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes).
5. Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk Kurikulum 2013 dengan kegiatan strategis : (1) Pembangunan Ruang Kelas Baru Gedung SMP di 7 Kab/Kota Tertinggal; (2) Rehab Berat Gedung SD di 15 Kab/Kota se Sumsel; (3) Rehabilitasi Berat Gedung SMP di 15 Kab/Kota se Sumsel.

Provinsi Bengkulu

1. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, Termasuk Rintisan PMU dengan kegiatan startegis : (1) Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK; (2) Beasiswa Siswa Miskin SMA; (3) Rintisan BOS SMA; (4) Siswa SMK Penerima Beasiswa Miskin.
2. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dengan kegiatan startegis : (1) Pemberlakuan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pada Tahun 2014; (2) Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu; (3) Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu.
3. Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) dengan kegiatan starategis yaitu PNPM Mandiri Perdesaan.
4. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula dengan kegiatan startegis yaitu : (1) Ketahanan Pangan; (2) Pembangunan baru D.I. Air Cawang Kidau (Kec. Kaur Utara, Kab. Kaur) untuk mengairi persawaha; (3) Pertanian.
5. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dengan kegitaan strategis yaitu : (1) Pelurusan alignment Jalan Bengkulu - Kepahiang - Curup - Lubuk Linggau sepanjang 124,16 KM dengan usulan dana Rp. 665.000 (dalam juta) dan Pelebaran Jalan Nasional Lintas Barat ruas Bengkulu - Kaur - Batas Lampung sepanjang 239,51 KM dengan usulan dana Rp. 731.505 (dalam juta), Total usulan dana sebesar Rp. 1.396.505 (dalam juta); (2) Pembangunan Jalan Bengkulu-Lubuk Linggau; (3) Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Enggano; (4) Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai : Pembangunan perpanjangan Break Water dengan usulan dana Rp. 500.000 (dalam juta), Pembangunan pengaman pantai Pelabuhan Pulau Baai dengan usulan dana Rp. 150.000 (dalam juta), Pembangunan dermaga Peti Kemas dan Fantry Crane

dengan usulan dana Rp. 543.312 (dalam juta), Total usulan dana Rp. 1.193.312 (dalam juta); (5) Peningkatan Bandar Udara Fatmawati Soekarno dengan usulan dana Rp. 748.278 (dalam juta); (6) Peningkatan Jalan Nasional Akses Utama ke Pelabuhan Pulau Baai sepanjang 22,17 KM dengan usulan dana Rp. 104.640 (dalam juta).

Provinsi Lampung

1. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dengan kegiatan strategis Peningkatan/Optimalisasi Bandara Raden Inten II menjadi Bandara Internasional dan Embarkasi/Debarkasi Haji Penuh.
2. Memperluas Kesempatan Kerja dan Akses Pelayanan Kesehatan dengan kegiatan strategis : (1) Dukungan Pembangunan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Lampung (Persampahan, Air Limbah, Drainase, Jalan Lingkungan); (2) Dukungan penyediaan air minum perdesaan; (3) Pengadaan Rumah Sakit Bergerak (Mobile Hospital) untuk Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan; (5) Peningkatan Pelayanan RSUD Abdul Moeloek sebagai RS rujukan Provinsi
3. Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan dengan kegiatan strategis yaitu : (1) Pengembangan Industri Pengolahan Produk Pertanian Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Tambah Hasil Pertanian; (2) Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan Tangkap serta Budidaya (ikan dan rumput laut); (3) Revitalisasi Perkebunan Rakyat dan Sertifikasi Kebun Rakyat.
4. Pemantapan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Penanggulangan Bencana dengan kegiatan strategis yaitu Perencanaan dan Penataan Kawasan Pesisir dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Lampung.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dengan kegiatan strategis : (1) Bimbingan Teknis dan Money Pengendalian Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut; (2) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Aktivitas Industri Pertambangan; (3) Rehabilitasi Hutan dan Lahan.
2. Pengembangan Infrastruktur Dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dengan kegiatan strategis: (1) Pengembangan akses layanan air bersih dan sanitasi; (2) Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu.
3. Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan kegiatan strategis Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir.

4. Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan kegiatan strategis : (1) Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular; (2) Pengembangan Lingkungan Sehat; (3) Peningkatan Kesehatan Masyarakat; (4) Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak; (5) Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Provinsi.

Provinsi Kepulauan Riau

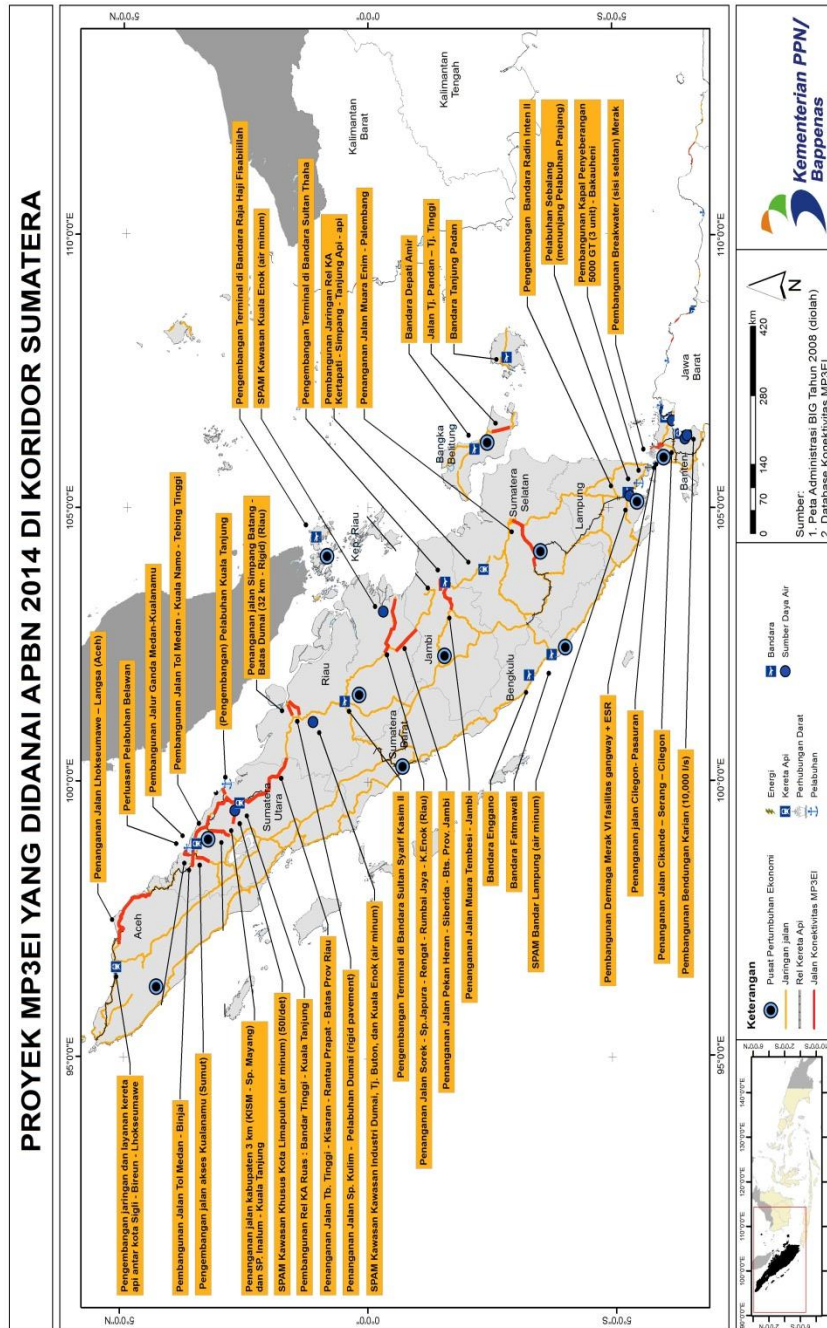
1. Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk Kurikulum 2013 dengan kegiatan strategis Pembangunan Sekolah SDLB di kabupaten/kota se provinsi Kepri.
2. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dengan kegiatan strategis : (1) Ketersediaan Obat; (2) Pelayanan Kesehatan Anak; (3) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi; (4) Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan; (5) Pembinaan Gizi Masyarakat.
3. Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan dengan kegiatan strategis : (1) Fasilitas Pupuk dan Pestisida; (2) Pengadaan Kapal Perikanan >30 GT; (3) Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan.
4. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan kegiatan strategis : (1) Pembangunan Bandara; (2) Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan se Provinsi Kepulauan Riau; (3) Pembangunan Dermaga; (4) Pembangunan Jaringan Irigasi.

Uraian isu strategis, program dan kegiatan prioritas, kementerian/lembaga pelaksana, sasaran, dan pagu indikatif di setiap provinsi dijabarkan dalam **Lampiran Bab 2**.

2.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Sumatera

Arah kebijakan pengembangan MP3EI untuk Koridor Ekonomi Sumatera memperkuat arah pengembangan wilayah Sumatera dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2014, yakni mengembangkan Koridor Ekonomi Sumatera sebagai sentra produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional.

GAMBAR 2.1 PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI TAHUN 2014 DI WILAYAH SUMATERA



2.6 Implementasi MP3KI di Wilayah Sumatera

Fokus pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI) akan dilaksanakan di empat kecamatan di setiap provinsi. Dari empat kecamatan tersebut, dua diantaranya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dua lainnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Khusus untuk provinsi Sumatera Utara, Bengkulu, dan Lampung ditambahkan masing-masing satu lokasi kecamatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan dilanjutkan untuk tahun 2014.

Lokasi kecamatan di masing-masing wilayah usulan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Provinsi Aceh:

1. Kabupaten Aceh Barat, Kecamatan Arongan Lambalek
2. Kabupaten Aceh Besar, Kecamatan Seulimeum
3. Kabupaten Pidie, Kecamatan Tangse
4. Kabupaten Pidie Jaya, Kecamatan Bandar Baru

Provinsi Sumatera Utara:

1. Kabupaten Langkat, Kecamatan Tanjung Pura
2. Kabupaten Langkat, Kecamatan Gebang
3. Kota Medan, Kecamatan Medan Belawan

Provinsi Sumatera Barat:

1. Kabupaten Padang Pariaman, Kecamatan Sungai Limau
2. Kabupaten Solok, Kecamatan Tigo Lurah

Provinsi Riau:

1. Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Rangsang
2. Kabupaten Kepulauan Meranti, Kecamatan Rangsang Barat

Provinsi Jambi:

1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kecamatan Pengabuan
2. Kabupaten Batang Hari, Kecamatan Maro Sebo Ulu
3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kecamatan Berbak
4. Kabupaten Sarolangun, Kecamatan Batang Asai

Provinsi Sumatera Selatan:

1. Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kecamatan Sirah Pulau Padang
2. Kota Palembang, Kecamatan Kertapati
3. Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Tanjung Agung

4. Kabupaten Ogan Ilir, Kecamatan Pemulutan

Provinsi Bengkulu:

1. Kota Bengkulu, Kecamatan Muara Bangka Hulu
2. Kabupaten Bengkulu Selatan, Kecamatan Pinoraya
3. Kota Bengkulu, Kecamatan Kampung Melayu

Provinsi Lampung:

1. Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Selatan
2. Kabupaten Lampung Selatan, Kecamatan Katibung
3. Kabupaten Lampung Timur, Kecamatan Labuhan Maringgai

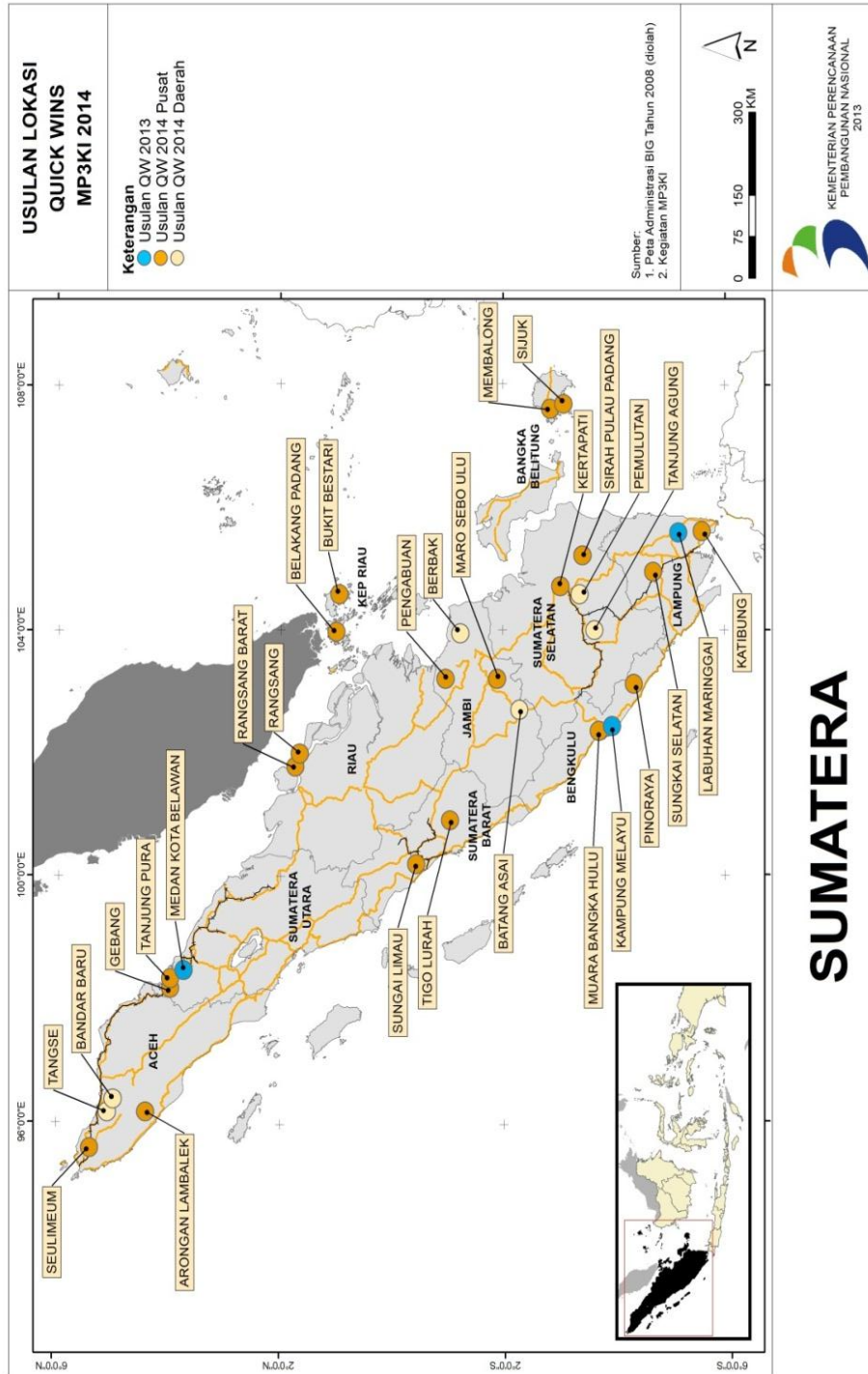
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung:

1. Kabupaten Belitung, Kecamatan Membalong
2. Kabupaten Belitung, Kecamatan Sijuk

Provinsi Kepulauan Riau:

1. Kota Batam, Kecamatan Belakang Padang
2. Kota Tanjung Pinang, Kecamatan Bukit Lestari

GAMBAR 2.2
PETA LOKASI MP3KI USULAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2014 DI WILAYAH SUMATERA



LAMPIRAN BAB 2. Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Pulau Sumatera tahun 2014

A. Provinsi Aceh

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|--|--|--|---------------|-----------------|-----------|
| 1 | Isu Strategis: Peningkatan Perbaikan Gizi | | | | | |
| | Kegiatan Strategis: Manajemen distribusi suplementasi gizi dan alat penunjang | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Gizi Masyarakat | Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Provinsi Aceh | 2 paket | 1.971,00 |
| 2 | Isu Strategis: Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA dan SMK | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | Jumlah peserta didik SMK penerima rintisan bantuan operasional sekolah (BOS) SMK | Provinsi Aceh | 45406 siswa SMK | 45.633,30 |
| | Kegiatan Strategis : Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal | Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | Persentase Pendidik PAUDNI Berkualitas S1/D4 | Provinsi Aceh | 139 orang | 486,10 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|---|---|--|---------------|--------------|-----------|
| 3 | Isu Strategis : Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) (lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan | | | | | |
| Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN SOSIAL | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan | Jumlah Sarana dan Prasarana Yang Diperbaiki | Provinsi Aceh | | 2.400,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Perlindungan dan jaminan sosial | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM | Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah | Terfasilitasinya dukungan pemberdayaan koperasi dan UKM di daerah | Provinsi Aceh | | 733,11 |
| <hr/> | | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Rehabilitasi sosial | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN SOSIAL | | | | | | |
| | Program Rehabilitasi Sosial | Rehabilitasi Sosial Orang Dengan Kecacatan | Jumlah Penyandang Cacat yang Berhasil Dilayani, Dilindungi dan Direhabilitasi Baik Di Dalam maupun Di Luar Panti | Provinsi Aceh | | 1.160,50 |
| 4 | Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan Infrastruktur Jalan sebagai Penguatan Konektivitas Pusat-pusat Layanan | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat preservasi | Provinsi Aceh | 1.627 Km | 72.643,70 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|---|---|---|-------------------------|---------------------|------------|
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/pelebaran | Provinsi Aceh | 134,4 Km | 621.388,40 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg direkonstruksi (Km) | Pameugenting Gerbang | 2,5 Km | 20.000,0 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg direkonstruksi (Km) | Laweaunan-Bts. Kotacane | 2,9 Km | 23.100,0 |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Pelabuhan Laut | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan | Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi (lokasi) | Provinsi Aceh | 2 kegiatan | 23.600,00 |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandara Lasikin Pulau Simeulue | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara baru yang dibangun | Provinsi Aceh | Pembangunan Bandara | 20.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum | Provinsi Aceh | 6 | 53.500,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|---|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Sumber Daya Air | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah buah waduk yang dibangun | Kab. Aceh Utara, Provinsi Aceh | 1 buah pembangu -nan Waduk Kreuto | 62.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Revitalisasi Kereta Api Pesisir Timur Aceh | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian | Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api | Panjang Km Jalur KA Baru yang Dibangun Termasuk Jalur Ganda | Provinsi Aceh | 1 kegiatan | 90.500,00 |
| 5 | Isu Strategis: Peningkatan produksi perikanan | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan PPI Lampulo dan PPI Idi | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan | Penyuluhan Kelautan dan Perikanan | Jml penyuluh perikanan yg melakukan pendampingan pada kawasan potensi perikanan (Org) | Provinsi Aceh | | 1.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Penyediaan sarana dan prasarana perikanan budidaya | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan | Jml Kawasan Perikanan Budidaya yg Memiliki Prasarana dan Sarana yg Memadai | Provinsi Aceh | | 2.307,00 |
| | | Pengembangan Sistem Usaha Pembudidayaan Ikan | Jumlah Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya Melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP | Provinsi Aceh | | 628,00 |

Provinsi : Sumatera Utara

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|--|--|--|--|--------------|-----------|
| 1 | Isu Strategis: Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, termasuk rintisan PMU | | | | | |
| | Kegiatan Strategis: Pembangunan SMK untuk mendukung Kawasan Industri Sei Mangkei | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Pendidikan | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | APK NASIONAL SMK | Kab. Asahan, Provinsi Sumatera Utara | 2 | 3.600,00 |
| 1 | Kegiatan Strategis: Peningkatan APK PAUD | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal | Penyediaan Layanan Paud | APK PAUD (TK, KB, TPA, SPS) | Provinsi Sumatera Utara | 3943 | 47.710,00 |
| 1 | Kegiatan Strategis: Peningkatan kualitas tenaga pendidik | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | SMK memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar sarana dan prasarana SMK | Provinsi Sumatera Utara | 14 | 3.150,00 |
| 2 | Isu Strategis: Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Kesehatan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Rumah Sakit Umum di daerah | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan | Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi standar sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar | Kab. Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara | 1 | 10.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|--|---|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Kegiatan Strategis : Pembinaan Pelayanan Kesehatan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Gizi Masyarakat | Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Provinsi Sumatera Utara | 1 paket | 2.070,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan jaminan kesehatan ibu dan reproduksi. | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4) | Provinsi Sumatera Utara | 1 paket | 411,00 |
| 3 | Isu Strategis : Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Akses Non Tol ke Bandara Kuala Namu | | | | | | |
| Prioritas Nasional: Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Program Penyelenggaraan Jalan | Program Penyelenggaraan Jalan | Program Penyelenggaraan Jalan | Program Penyelenggaraan Jalan | Program Penyelenggaraan Jalan |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Lingkar Nasional Yang Menghubungkan Antar Lintas di Kepulauan Nias | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pengaturan dan Pembinaan Teknik Preservasi, Peningkatan Kapasitas Jalan | Panjang jalan yang dipreservasi (Km) | Provinsi Sumatera Utara | 98,1 Km | 4.900,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|---|---|---|--|--------|--------------|-----------|
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Lintas Tengah dan Lintas Penghubung | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yang dipreservasi (Km) | Provinsi Sumatera Utara | | 2.150,7 Km | 140.235,9 |
| | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yang direkonstruksi(Km) | Jalan Sibolga-Tarutung | | 5 Km | 40.000,00 |
| | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yang direkonstruksi (Km) | Jalan Lawe Pakam - Kota Buluh | | 5 Km | 40.000,00 |
| | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yang dibangun baru(Km) | Jalan Simpang Kuala Tanjung-Kuala Tanjung | | 1,3 Km | 10.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan status jalan mendukung akses Kawasan Industri Sei Mangkei (KISM). | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yang dipreservasi (Km) | Provinsi Sumatera Utara | | | 7.100,00 |
| | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran (Km) | Jalan Sei Mangke-Perdagangan-Kota Limapuluh, Provinsi Sumatera Utara | | 5 km | 10.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|---|--|--|----------------------------------|--------------|-----------|
| Kegiatan Strategis : Pengendalian Banjir Sungai Deli Hilir | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun | Kota Medan | 2,40 km | 34.763,00 |
| 4 | Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| Kegiatan Strategis: Pengembangan sistem dan peningkatan sambungan rumah sistem perpipaan air limbah | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan | Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site dan Sistem On-Site | Kota Medan, Prov. Sumatera Utara | 1 Kawasan | 39,10 |
| 5 | Isu Strategis: Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| Kegiatan Strategis: Pengembangan Metode SRI | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian | Jumlah (Ha) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification) | Prov. Sumatera Utara | 7.700 ha | 16.170,00 |
| Kegiatan Strategis: Pengembangan optimasi lahan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian | Cetak sawah (Ha) | Prov. Sumatera Utara | 12.470 ha | 26,19 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|--|--|---|------------------------------------|------------------------|------------------|
| <i>Kegiatan Strategis: Rehabilitasi Jaringan irigasi</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian | Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan | Prov. Sumatera Utara | 40.700 Ha | 4.070,00 |
| <i>Kegiatan Strategis: Rehabilitasi Jaringan Reklamasi Rawa</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan reklamasi rawa (Ha) yang direhabilitasi | Kab. Labuhan Batu Utara | 4.335 ha di Sei Kualuh | 23.172,25 000 |
| <i>Kegiatan Strategis: Pembangunan Bendung DI Sei Wampu</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi (Ha) yang dibangun/ditingkatkan | Kab. Langkat, Prov. Sumatera Utara | 1 buah bendung | 15.000,00 |

B. Provinsi : Sumatera Barat

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|---|---|---|-------------------------|--------------|-----------|
| 1 | Isu Strategis: Peningkatan APK/APM Pendidikan Dasar Sumatera Barat | | | | | |
| | Kegiatan Strategis: Pembangunan RKB | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Dasar | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD | APM SD/SDLB/PAKET A | Provinsi Sumatera Barat | 83 paket | 11.842,00 |
| | Kegiatan Strategis: Pembangunan RKB SMA/AMK | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | APK NASIONAL SMK | Provinsi Sumatera Barat | 107 | 21.935,00 |
| 2 | Isu Strategis: Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembinaan Gizi Masyarakat | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Gizi Masyarakat | Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Provinsi Sumatera Barat | 2 paket | 2.237,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pembinaan Pelayanan Kesehatan | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk | Provinsi Sumatera Barat | 9 paket | 6.500,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|---|---|--|-------------------------|--------------|-----------|
| Kegiatan Strategis : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4) | Provinsi Sumatera Barat | 3 paket | 2.030,00 |
| Kegiatan Strategis : Pengendalian Penyakit Menular | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Jumlah kasus TB per 100.000 penduduk | Provinsi Sumatera Barat | 3 paket | 508,60 |
| Kegiatan Strategis : Penyehatan Lingkungan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penyehatan Lingkungan | Persentase (%) Kualitas Air Minum yang Memenuhi Syarat | Provinsi Sumatera Barat | 4 paket | 4.185,00 |
| 3 | Isu Strategis : Lemahnya Infrastruktur Daerah dan Konektivitas sektor Perkeretaapian, Perhubungan Laut dan Telekomunikasi | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan DUKU-Sicincin | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg dibangun baru | Provinsi Sumatera Barat | | 77.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|---|---|-------------------------|-------------------------|--------------|------|
| Kegiatan Strategis : Pembangunan jalur kereta api DUKU - Bandara BIM | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian | Pembangunan dan Pengelolaan Bidang Sarana Perkeretaapian | Jumlah Unit Pengadaan Lokomotif, KRDI, KRDE, KRL, Railbus, Tram | Provinsi Sumatera Barat | | 40.000,00 | |
| | Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api | Panjang Km jalur KA baru yang dibangun termasuk jalur ganda | Provinsi Sumatera Barat | Jalur KA Sepanjang 4 Km | 30.000,00 | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Tiram | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan | Jumlah lokasi Pelabuhan Strategis yang di bangun/ditingkatkan /direhabilitasi | Provinsi Sumatera Barat | 1 paket | 34.862,00 | |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan dan Jembatan Nasional (reguler dan winrip) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran (Km) | Provinsi Sumatera Barat | 56,9 KM | 97.734,00 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|--|--|---|---|--|-----------|
| 4 | Isu Strategis: Belum tertanggulangnya masalah banjir, sedimen dan abrasi pantai | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan Infrastruktur Jalan sebagai Penguatan Konektivitas Pusat-pusat Layanan | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun | Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat | 1,2 km pembangunan prasarana pengendalian banjir Bt. Kuranji | 30.300,00 |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Jumlah sarana/prasarana pengendalian lahar/sedimen yang dibangun | Kab. Tanah Datar dan Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat | 1 laporan studi komprehensif pengendalian banjir lahar sedimen kawasan Gunung Merapi | 1.500,00 |
| 5 | Isu Strategis: Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Rehabilitasi jaringan irigasi DI Batahan (6246 Ha) | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi | Kab. Pasaman, Provinsi Sumatera Barat | 1.429 Ha | 10.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|---|--|--|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan DI Batang Anai II (3.553 Ha)</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Program Pengelolaan Sumber Daya Air |
| 6 | Isu Strategis: Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengurangan Pengangguran | | | | | |
| <i>Kegiatan Strategis : Pemberdayaan masyarakat di kawasan transmigrasi</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | |
| | Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi | Jumlah kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarananya di daerah tertinggal/ perbatasan | KTM Lunang Silaut, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | 1 kawasan | 6.400,00 |
| | Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi | Jumlah kawasan yang difasilitasi pengembangan usaha ekonominya di daerah tertinggal/ perbatasan | KTM Lunang Silaut, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | 1 kawasan | 1.600,00 |
| | Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi | Jumlah kelembagaan/ Pengelola yang terbentuk dan berfungsi di Kimtrans/Kawasan di Daerah Tertinggal/ Perbatasan | KTM Lunang Silaut, Kab. Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat | 1 kawasan | 500,00 |

C. Provinsi : Riau

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|--|--|---|--------------------------------------|--------------|-----------|
| 1 | Isu Strategis: Pembangunan Daerah dan Kawasan Perbatasan | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis:</i> Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pemerintahan | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik | | | | | |
| | BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN (BNPP) | | | | | |
| | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP | Pelaksanaan dukungan Perencanaan, Kerja Sama dan Hukum | Terlaksananya Koordinasi dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Daerah dalam rangka Pengelolaan Perbatasan Antar Negara | Provinsi Riau | | 500,00 |
| 2 | Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis :</i> Pembangunan Pengelolaan Sampah Terpadu 3R dan TPST | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan | Jumlah Kawasan yang Telayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R | Provinsi Riau | 2 | 800,00 |
| | <i>Kegiatan Strategis :</i> Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Rehab Saluran Primer | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Jumlah luas jaringan irigasi yang direhabilitasi | Kab. Kuantan Singingi, Provinsi Riau | 1.350 ha | 14.500,00 |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Jumlah luas jaringan reklamasi rawa yang dibangun/ditingkatkan | Provinsi Riau | 4.135 ha | 18.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|--|--|---|---------------|-----------------|------------|
| Kegiatan Strategis : Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pekerjaan Umum | Pembangunan Infrastruktur | Perbaikan infrastruktur mendesak | Provinsi Riau | 1.105 Km | 131.289,00 |
| 3 | Isu Strategis : Millenium Development Goals (MDGs) | | | | | |
| <i>Kegiatan Strategis : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra | Persentase (%) Bayi Usia 0-11 Bulan yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap | Provinsi Riau | 90 persen | 1.268,00 |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV | Provinsi Riau | 95 persen | 175,00 |
| Kegiatan Strategis : Pembinaan Gizi Masyarakat | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Gizi Masyarakat | Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Provinsi Riau | 100 persen | 1.871,00 |
| Kegiatan Strategis : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak | Cakupan Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) | Provinsi Riau | 90 persen (KN1) | 1.445,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|---|---|---|--|---------------|-------------------|----------|
| Kegiatan Strategis : Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4) | Provinsi Riau | 90 persen linakes | 1.229,00 |
| 4 | Isu Strategis: Revitalisasi Pertanian | | | | | |
| <i>Kegiatan Strategis : Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga panen dan Pengembangan panganekekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengembangan Panganekekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar | Jumlah kelembagaan yang diberdayakan dalam P2KP (Percepatan Panganekekaragaman Konsumsi Pangan) dalam rangka mewujudkan Konsumsi Pangan Masyarakat Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (Desa) | Provinsi Riau | 143 Desa | 4.770,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Pengembangan sistem produksi pembudidayaan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan | Jumlah Unit Pembudidayaan Ikan yang Tersertifikat dan Memenuhi Standar | Provinsi Riau | | 1.810,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|---|--|--|--------------------------------|--------------|-----------|
| Kegiatan Strategis : Peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman tahunan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan | Luas Areal Revitalisasi Perkebunan Karet | Provinsi Riau | 1.700 ha | 12.075,00 |
| Kegiatan Strategis : Perluasan areal pengelolaan lahan pertanian | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian | Jumlah (Ha) Optimasi Lahan Pertanian (Konservasi dan Optimasi) | Provinsi Riau | 2.850 ha | 5.985,00 |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan bendung suplesi Pegadis, Rehabilitasi DI Uwai dan DI Ranah | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kab. Rokan Hulu, Provinsi Riau | 1 bendung | 36.600,00 |

D. Provinsi : Jambi

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|--|---|--|----------------|--------------|--------|
| 1 | Isu Strategis: Peningkatan Profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis: Peningkatan jumlah tenaga pendidik SMK | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Pendidikan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | Lulusan smk bekerja pada tahun kelulusan | Provinsi Jambi | 9669 | 580,14 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|---|---|--|---|--|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis: Peningkatan pendidik dan tenaga pendidikan sekolah menengah kejuruan | | | | | | |
| Prioritas Nasional: Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | SMK memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar sarana dan prasarana smk | Provinsi Jambi | 10 SMK | 1.700,00 |
| 2 | Isu Strategis: Rehabilitasi Jaringan Irigasi | | | | | |
| Kegiatan Strategis : OP dan Pembangunan daerah irigasi, sungai dan rawa | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kab. Sarolangun dan Kab. Kerinci, Provinsi Jambi | 1.100 ha | 65.487,88 |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi | Kab. Kerinci, Provinsi Jambi | 800 ha | 3.350,00 |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan reklamasi rawa yang direhabilitasi | Kab. Kerinci, Kab. Tanjung Jabung Barat, Kab. Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi | 6.523 ha | 24.700,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|--|---|--|----------------|--------------|----------|
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Agribisnis | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian | Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian | Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit) | Provinsi Jambi | 4 Unit | 1.600,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi Benih unggul perikanan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Pengembangan Sistem Perbenihan Ikan | Jumlah Produksi Induk Unggul | Provinsi Jambi | 350 ribu | 430,00 |
| 3 | Isu Strategis : Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) (lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Akses Permodalan bagi koperasi dan UKM | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM | Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Tersalurnya Bantuan Dana Bagi Koperasi Perdesaan dan Perkotaan | Provinsi Jambi | 12 koperasi | 600,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Gizi ibu hamil | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Gizi Masyarakat | Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) | Provinsi Jambi | 95 persen | 936,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|---|---|---|--|--|---|------------|
| Kegiatan Strategis : Penyaluran dana KUBE | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN SOSIAL | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan | Jumlah KUBE Yang Mendapat Akses Permodalan LKM-KUBE | Provinsi Jambi | 50 kelompok | 2.400,00 |
| 4 | Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung Provinsi Jambi | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut | Provinsi Jambi | 1 paket | 14.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Pengendalian Banjir | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun | Kota Jambi, Provinsi Jambi | 8,2 km pembangunan prasarana pengendali banjir Kota Jambi | 99.611,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan struktur jalan lintas penghubung | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat pemeliharaan berkala/rehabilitasi | Provinsi Jambi | 84,1 Km | 132.835,30 |
| | | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yang dibangun baru (Km) | Jalan akses Pelabuhan Ujung Jabung, Provinsi Jambi | 3,8 Km | 30.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|---|--|--|----------------------------------|---|-----------|
| 5 | Isu Strategis: Mitigasi Bencana | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pengendalian banjir Pintu Air Ma Bulian dan Sungai Batanghari | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun | Kab. Batanghari, Provinsi Jambi | 0,6 km di Pintu Air Ma Bulian | 8.000,00 |
| | Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun | Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi | 0,2 km di Sungai Batanghari Kec. Sakerman | 12.000,00 |

E. Provinsi : Sumatera Selatan

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|---|---|---|-----------------------------------|---|-----------|
| 1 | Isu Strategis: Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| | Kegiatan Strategis: Pembangunan Fasilitas Bandara Di Provinsi Sumatera Selatan | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Kab. Musi Rawas, Sumatera Selatan | 1 paket gedung terminal penumpang | 14.000,00 |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan | 1 paket gedung terminal dan fasilitas penunjang | 57.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|---|---|--|---|---|------------|
| Kegiatan Strategis: Pembangunan Fasilitas laut Pelabuhan Laut Tanjung Api Api | | | | | | |
| Prioritas Nasional: Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan | Jumlah lokasi Pelabuhan Strategis yang di bangun/ditingkatkan/direhabilitasi | Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan | 1 paket dermaga dan lapangan penumpukan kontainer | 140.000,00 |
| Kegiatan Strategis: Pembangunan Jembatan Musi | | | | | | |
| Prioritas Nasional: Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jembatan yang dibangun baru (m) | Kota Palembang, Sumatera Selatan | 200 m | 50.000,00 |
| 2 | Isu Strategis: Kapasitas Mitigasi Bencana (lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Demonstrasi Activity di Kawasan Hutan Gambut | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana | | | | | | |
| KEMENTERIAN KEHUTANAN | | | | | | |
| | Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan | Pengembangan Pemanfaatan Jasa Lingkungan | Pelaksanaan Demonstrasian Activity REDD di 2 Kawasan Konservasi (Hutan Gambut) | Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan | 20% | 850,00 |
| Kegiatan Strategis : Penanaman Pohon Mangrove di Wilayah Pesisir | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana | | | | | | |
| KEMENTERIAN KEHUTANAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat | Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas | Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis, mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS Prioritas seluas 1.994.000 ha | Kab. Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan | 10930 ha | 850,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|--|--|---|----------------------------------|--------------|-----------|
| 3 | Isu Strategis : Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Unit Pengolahan Susu Sapi Perah | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | |
| | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian | Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian | Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan (unit) | Kota Palembang, Sumatera Selatan | 8 paket | 1.250,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan DI Lintang Kiri (3,073 Ha) | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kab. Lahat dan Kab. Empat Lawang | 1.285 ha | 46.375,62 |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan Rumah Kemasan Industri | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | | | | | |
| | Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro | Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan | Terlaksananya Pengembangan Klaster dan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan lainnya | Kota Palembang, Sumatera Selatan | 1 paket | 1.000,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan Rumah Tekstil | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN | | | | | |
| | Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah | Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah I | Jumlah Unit Usaha IKM | Provinsi Sumatera Selatan | 1 paket | 1.200,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|---|--|--|--|--|--------------|-----------|
| Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | |
| | Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi | Jumlah kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarananya di daerah tertinggal/perbatasan | KTM Rambutan Parit, Kab. Ogan Ilir dan KTM Telang, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumsel | 2 kawasan | 15.500,00 |
| | | Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi | Jumlah kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarananya di daerah tertinggal/perbatasan | KTM Rambutan Parit, Kab. Ogan Ilir dan KTM Telang, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan | 2 kawasan | 6.500,00 |
| | | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi | Jumlah kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarananya di daerah tertinggal/perbatasan | KTM Rambutan Parit, Kab. Ogan Ilir dan KTM Telang, Kab. Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan | 2 kawasan | 1.500,00 |
| 4 | Isu Strategis: Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan | Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar | Provinsi Sumatera Selatan | 2 paket | 61.700,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|---|--|------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------|
| 5 | Isu Strategis: Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk Kurikulum 2013 | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Ruang Kelas Baru Gedung SMP di 7 Kab/Kota Tertinggal | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Dasar | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP | APK SMP/SMPLB/P AKET B | Provinsi Sumatera Selatan | Pembangunan RKB 165 ruang | 21.252,00 |
| | Kegiatan Strategis : Rehab Berat Gedung SD di 15 Kab/Kota se Sumsel | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Dasar | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD | APM SD/SDLB/PAKE T A | Provinsi Sumatera Selatan | Rehab gedung 212 ruang | 20.290,00 |
| | Kegiatan Strategis : Rehabilitasi Berat Gedung SMP di 15 Kab/Kota se Sumsel | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Dasar | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP | APM SMP/SMPLB/P AKET B | Provinsi Sumatera Selatan | Rehab gedung 17 ruang | 1.611,00 |

F. Provinsi Bengkulu

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|---|--|-------------------|--------|--------------|------|
| 1 | Isu Strategis: Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, Termasuk Rintisan PMU | | | | | |
| | Kegiatan Strategis: Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) SMK | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Pendidikan | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | Jumlah peserta didik smk penerima rintisan bantuan operasional sekolah (bos) SMK | Provinsi Bengkulu | 25838 | 25.967,10 | |
| Kegiatan Strategis: Beasiswa Siswa Miskin SMA | | | | | | |
| Prioritas Nasional: Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA | Jumlah Siswa SMA Penerima Beasiswa Prestasi | Provinsi Bengkulu | 11583 | 11.640,90 | |
| Kegiatan Strategis: Rintisan BOS SMA | | | | | | |
| Prioritas Nasional: Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA | Jumlah peserta didik sma mendapatkan BOMM/rintisan BOS SMA | Provinsi Bengkulu | 46505 | 46.737,50 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|---|---|---|-----------------------------|--------------|-----------|
| Kegiatan Strategis: Siswa SMK Penerima Beasiswa Miskin | | | | | | |
| Prioritas Nasional: Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | Jumlah Siswa SMK Penerima Beasiswa Miskin | Provinsi Bengkulu | 5627 | 5.655,10 |
| 2 | Isu Strategis : Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pemberlakuan Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Pada Tahun 2014 | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk | 3 kabupaten | 3 kabupaten | 2.250,00 |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | Persentase (%) RS Kab/Kota yang melaksanakan Ponek | 1 kabupaten | 1 kabupaten | 20.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) | Bengkulu: Provinsi Bengkulu | 3 paket | 1.590,40 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|---|--|--|------------------------------|--------------|---|
| Kegiatan Strategis : Peningkatan mutu dan pelayanan kesehatan masyarakat di Provinsi Bengkulu | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan | Jumlah dokumen, standar, prosedur dan kriteria PPSDM Kesehatan: UU, PP, Permenkes, Pedoman | Bengkulu: Provinsi Bengkulu | 1 paket | 200,00 |
| 3 | Isu Strategis: Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) (lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| Kegiatan Strategis : PNPM Mandiri Perdesaan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN DALAM NEGERI | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | Peningkatan Kemandirian Masyarakat Perdesaan (PNPM) | Laporan PNPM inti | Bengkulu : Provinsi Bengkulu | | Dana akan disesuaikan dengan hasil keputusan Kemendagri |
| 4 | Isu Strategis : Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | Jumlah Desa yang diberdayakan/D emapan | Bengkulu : Provinsi Bengkulu | 32 Desa | 1.310,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|--|---|--|-------------------|--------------|----------|
| | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar | Jumlah kelembagaan yang diberdayakan dalam P2KP (Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan) dalam rangka mewujudkan Konsumsi Pangan Masyarakat Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (Desa) | Provinsi Bengkulu | 113 Desa | 4.118,00 |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian | Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah | Provinsi Bengkulu | 200 | 2.000,00 |

Kegiatan Strategis : Pembangunan baru D.I. Air Cawang Kidau (Kec. Kaur Utara, Kab. Kaur) untuk mengairi persawahan

Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|--------|-----------|
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kab. Kaur, Provinsi Bengkulu | 450 ha | 18.750,00 |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------|--------|-----------|

5 Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan(lanjutan direktif Presiden)

Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-------------------------------|---|--|-------------------|---------|-----------|
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg direkonstruksi/dilebarkan | Provinsi Bengkulu | 63,8 Km | 150.712,0 |
|-------------------------------|---|--|-------------------|---------|-----------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|--|--|--|------------------------------|--|-----------|
| <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Bengkulu-Lubuk Linggau</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pel ebaran (Km) | Jalan Bengkulu-Lubuk Linggau | 7,5 Km | 60.000,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Lingkar Pulau Enggano</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pel ebaran (Km) | Pulau Enggono | 1,3 Km | 10.000,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Pengembangan Pelabuhan Pulau Baai</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut | Bertambahnya fasilitas pelayanan operasional pelabuhan | Bengkulu : Provinsi Bengkulu | Breakwater p. Baai | 6.000,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Bandar Udara Fatmawati Soekarno</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Bengkulu : Provinsi Bengkulu | Pengembangan bandara termasuk navigasi dan Pelebaran Air Strip (untuk Keselamatan Bandara) | 36.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|-------------------------------|---|-------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Nasional Akses Utama ke Pelabuhan Pulau Baai | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat pelebaran | Bengkulu : Provinsi Bengkulu | 1 Km | 11.600,00 |

G. Provinsi Lampung

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----------|---|--|---|------------------|---|-----------|
| 1 | Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| | Kegiatan Strategis: Peningkatan/Optimalisasi Bandara Raden Inten II menjadi Bandara Internasional dan Embarkasi/Debarkasi Haji Penuh | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Provinsi Lampung | Pengembangan bandara tidak termasuk perpanjangan runway | 70.000,00 |
| | Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perhubungan Darat | Pembangunan Dermaga Penyeberangan Merak VI - Bahauheni VI Tahap II | Jumlah dermaga yang dikembangkan | Provinsi Lampung | Terbangunnya dermaga Merak VI dan Bakauheni VI Tahap II di Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni berikut fasilitas gangway dan elevated side ramp | 50.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|--|---|--|------------------|--------------|-----------|
| 2 | Isu Strategis: Memperluas Kesempatan Kerja dan Akses Pelayanan Kesehatan | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Dukungan Pembangunan Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Lampung (Persampahan, Air Limbah, Drainase, Jalan Lingkungan)</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan | Jumlah NSPK Nasional Bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman | Provinsi Lampung | | 44.125,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| <i>Kegiatan Strategis : Dukungan penyediaan air minum perdesaan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Jumlah Desa yang Terlayani Infrastruktur Air Minum | Provinsi Lampung | | 14.300,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| <i>Kegiatan Strategis : Pengadaan Rumah Sakit Bergerak (Mobile Hospital) untuk Peningkatan Akses dan Pelayanan Kesehatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS Bergerak Di Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) | Provinsi Lampung | 1 paket | 16.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|--|---|--|------------------|--------------|-----------|
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Pelayanan RSUD Abdul Moeloek sebagai RS rujukan Provinsi | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan | Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar | Provinsi Lampung | 1 paket | 11.400,00 |
| 3 | Isu Strategis : Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Industri Pengolahan Produk Pertanian Dalam Rangka Meningkatkan Nilai Tambah Hasil Pertanian | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian | Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian | Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit) | Provinsi Lampung | | 12.026,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi Kelautan dan Perikanan Tangkap serta Budidaya (ikan dan rumput laut) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan | Jumlah Kawasan Minapolitas Berbasis Perikanan Budidaya | Provinsi Lampung | 2 | 852,00 |
| | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Pengembangan Sistem Pembenihan Ikan | Jumlah Produksi Bibit Rumput Laut | Provinsi Lampung | 2 | 4107,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|---|--|--|--|------------------|--------------|-----------|
| Kegiatan Strategis : Revitalisasi Perkebunan Rakyat dan Sertifikasi Kebun Rakyat | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | Dukungan Pengujian dan Pengawasan Mutu Benih serta Penerapan Teknologi Proteksi Tanaman Perkebunan | Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang) | Provinsi Lampung | 4.230 | 47.760,60 |
| 4 | Isu Strategis: Pemantapan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Penanggulangan Bencana | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Perencanaan dan Penataan Kawasan Pesisir | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana | | | | | | |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Pendayagunaan Pesisir dan Lautan | Jumlah kawasan di wilayah pesisir yang terfasilitasi peningkatan ketahanannya terhadap bencana dan perubahan iklim. | Provinsi Lampung | 1 | 1.077,00 |
| Kegiatan Strategis : Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis Provinsi Lampung | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana | | | | | | |
| KEMENTERIAN KEHUTANAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat | Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas | Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis, mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS Prioritas seluas 1.994.000 ha | Provinsi Lampung | 22120 h | 950,00 |

H. Provinsi Bangka Belitung

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|---|--|--|---------------------|--------------|--------|
| 1 | Isu Strategis: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup | | | | | |
| | Kegiatan Strategis: Bimbingan Teknis dan Money Pengendalian Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana | | | | | |
| | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. | Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan (Inventarisasi data dan pengawasan pencegahan kerusakan ekosistem pesisir dan laut). | Kab. Bangka Selatan | 1 | 250,00 |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. | Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian kerusakan lingkungan (Inventarisasi data dan pengawasan pencegahan kerusakan ekosistem pesisir dan laut). | Kab. Bangka Tengah | 1 | 250,00 |
| | Kegiatan Strategis: Pengendalian Pencemaran Lingk. Akibat Aktivitas Industri Pertambangan | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana | | | | | |
| | KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. | Jumlah Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan (Pemantauan PROPER). | Kab. Bangka | 1 | 150,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|---|--|---|--------------------------|--------------|--------|
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. | Jumlah Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan (Pemantauan PROPER). | Kota Pangkal Pinang | 1 | 150,00 |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. | Jumlah Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan (Pemantauan PROPER). | Kab. Bangka Barat | 1 | 150,00 |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. | Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup (pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kajian dampak lingkungan komisi penilai dan evaluasi mutu dokumen) | Provinsi Bangka Belitung | 1 | 250,00 |

Kegiatan Strategis: Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Prioritas Nasional: Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana

KEMENTERIAN KEHUTANAN

| | | | | | |
|---|--|---|--------------------------|---------|--------|
| Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat | Penyelenggaraa n Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas | Areal Tanaman Hasil Rehabilitasi Hutan Pada Das Prioritas | Provinsi Bangka Belitung | 1180 ha | 818,00 |
|---|--|---|--------------------------|---------|--------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|--|---|---|--|---|-----------|
| 2 | Isu Strategis : Pengembangan Infrastruktur Dan Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan akses layanan air bersih dan sanitasi | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Kapasitas air baku yang ditingkatkan | Kota Pangkalpinang, Kab. Bangka Tengah, Kab. Bangka, Kab. Bangka Selatan, Provinsi Bangka Belitung | 0,1 m ³ /dt (Pembangunan Intake dan Jar Pipa Transmisi Air Baku Kolong Bacang, Kolong Kerasak, Belinyu, Kolong Celuak) | 12.400,00 |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Jembatan Teluk Belinyu | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jembatanyang dibangun (M) | Provinsi Bangka Belitung | 100 m | 40.000,00 |
| 3 | Isu Strategis : Pengembangan Wilayah Strategis, Tertinggal, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir | | | | | |
| Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik | | | | | | |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan | Fasilitasi Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Perikanan | Ragam produk olahan hasil perikanan bernilai tambah | Provinsi Bangka Belitung | | 60,00 |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan ekonomi masyarakat pesisir | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | | | | | | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----------|---|--|--|---|--------------|-----------|
| | Program Percepatan Pembangunan Daerah Teertinggal | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pulau Terluar dan Pulau Terpencil di Daerah Tertinggal | Jumlah kapal perintis di kabupaten tertinggal yang memiliki pulau terpencil | Provinsi Bangka Belitung: Kab. Bangka selatan | 1 paket | 750,00 |
| 4 | Isu Strategis : Peningkatan Kualitas Kesehatan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Jumlah kasus Diare per 1.000 penduduk | Provinsi Bangka Belitung | | 427,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan Lingkungan Sehat | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penyehatan Lingkungan | Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas | Provinsi Bangka Belitung | 2 paket | 3.232,44 |
| | Kegiatan Strategis : Peningkatan Kesehatan Masyarakat | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan | Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar | Provinsi Bangka Belitung: 2 kabupaten | 2 kabupaten | 40.000,00 |
| | Kegiatan Strategis : Peningkatan Kesehatan ibu melahirkan dan anak | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|--|--|--|---------------------------------------|--------------|----------|
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) | Provinsi Bangka Belitung: 2 kabupaten | 3 paket | 1.820,00 |

Kegiatan Strategis : Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Sakit Provinsi

Prioritas Nasional : Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------------|---------|----------|
| Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin | Provinsi Bangka Belitung: | 1 paket | 1.242,30 |
|--|---|---|---------------------------|---------|----------|

J. Provinsi Kepulauan Riau

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----------|---|---|---|----------------|--------------|----------|
| 1 | Isu Strategis: Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk Kurikulum 2013 | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis: Pembangunan Sekolah SDLB di kabupaten/kota se provinsi Kepri</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional: Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Dasar | Peningkatan Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB | Persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal satu SDLB | Kepulauan Riau | 1 USB | |
| 2 | Isu Strategis: Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Ketersediaan Obat</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | |
| | Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin | Kepulauan Riau | 1 paket | 1.264,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|--|--|--|----------------|--------------|----------|
| <i>Kegiatan Strategis : Pelayanan Kesehatan Anak</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak | Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi | Kepulauan Riau | 90 persen | 2.334,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) | Kepulauan Riau | 95 persen | 1.865,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kem. Kesehatan | Pemberdayaan Masyarakat dan Promosi Kesehatan | Jumlah Pos Kesehatan Desa yang Beroperasi | Kepulauan Riau | 100 persen | 2.082,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Pembinaan Gizi Masyarakat</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Gizi Masyarakat | Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Kepulauan Riau | 90 persen | 1.933,00 |
| 3 | Isu Strategis : Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan | | | | | |
| <i>Kegiatan Strategis : Fasilitas Pupuk dan Pestisida</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Fasilitas Pupuk dan Pestisida | Bantuan Langsung Pupuk (juta ton) | Kepulauan Riau | | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|---|---|---|--|------------------------------|---|-----------|
| Kegiatan Strategis : Pengadaan Kapal Perikanan >30 GT | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan | Jumlah pengadaan kapal perikanan > 30 GT (unit) | Kepulauan Riau | 4 | 6.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan | Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya yang Memiliki Prasarana dan Sarana Memadai | Kabupaten Bintan | 1 | 812,00 |
| 4 | Isu Strategis: Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandara | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Kab. Karimun, Kep. Riau | Pekerjaan dinding penahan tanah | 7.000,00 |
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Kab. Lingga, Kep. Riau | Pengembangan bandara | 17.000,00 |
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara baru yang dibangun | Kab. Kep. Anambas, Kep. Riau | Pembangunan Landas Pacu Bandara Anambas | 20.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|----|---------|---|--|---------------------------------------|---|-----------|
| | | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara baru yang dibangun | Pulau Tambelan Kab. Bintan, Kep. Riau | Pembangunan Landas Pacu Bandara Tanmbelan | 20.000,00 |

Kegiatan Strategis : Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan se Provinsi Kepulauan Riau

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|-------------------------|------------|------------|
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dipreservasi dan ditingkatkan kapasitasnya (Km) | Provinsi Kepulauan Riau | 199,017 Km | 301.360,00 |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pel ebaran (Km) | 3,1 Km | Kota Batam | 20.000,00 |

Kegiatan Strategis : Pembangunan Dermaga

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

| | | | | | |
|--|---|--|-------------------------|---|------------|
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat | Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP | Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan (dermaga) | Provinsi Kepulauan Riau | Pemb. dan penyelesaian Pemb. Dermaga Penyeberangan dan Pem. Kapal | 132.824,00 |
|--|---|--|-------------------------|---|------------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana |
|--|-------------------------------------|--|--|--|--------------|-----------|
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Jaringan Irigasi | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kab. Natuna dan Kab. Bintan, Kep. Riau | 1.260 ha | 29.338,00 |

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2014

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROYEK | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|----------|-------------------------------|-------------------------|----------|---|---------------------------|-------|---------|-------------------------|---------------------|
| SUMATERA | PELABUHAN (PERHUBUNGAN DARAT) | APBN | Banten | Pembangunan Dermaga Merak VI fasilitas gangway + ESR (Pengembangan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan Merak-Bakauheni) | 300 | 2013 | 2015 | Kementerian Perhubungan | 224,74 |
| SUMATERA | PELABUHAN (PERHUBUNGAN DARAT) | APBN | Banten | Pembangunan Breakwater (sisi selatan) Merak (Pengembangan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan Merak-Bakauheni) | 204 | 2014 | 2017 | Kementerian Perhubungan | 200,00 |
| SUMATERA | JALAN | APBN | Banten | Penanganan Jalan Cikande – Serang – Cilegon (83.2 Km) | 952 | 2011 | 2025 | Kementerian PU | 53,00 |

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROYEK | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|----------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-------|---------|---|---------------------|
| SUMATERA | JALAN | CAMPURAN (KPS) | Banten | Penanganan jalan Cilegon-Pasauran, (44,34 km) telah mencakup jalan Cilegon - Anyer (JSS) | 347 | 2011 | 2025 | Kementerian PU, Pemda Banten, BUMN | 4,00 |
| SUMATERA | BANDARA | APBN | Bengkulu | Bandara Fatmawati | 169 | | | Kementerian Perhubungan | 49,57 |
| SUMATERA | BANDARA | APBN | Bengkulu | Bandara Enggano | 47 | | | Kementerian Perhubungan | 14,56 |
| SUMATERA | BANDARA | CAMPURAN (APBN - BUMN) | Jambi | Pengembangan Terminal di Bandara Sultan Thaha | 444 | 2012 | 2014 | PT. Angkasa Pura II & Kemenhub | 56,00 |
| SUMATERA | JALAN | APBN | Jambi | Penanganan Jalan Muara Tembesi - Jambi (79 km) | 739 | 2011 | 2025 | Kementerian PU | 15 |
| SUMATERA | JALAN | APBN | Jambi | Penanganan jalan lingkar Jambi - Talang Dukuh (Total Panjang 23 Km) | 420 | 2011 | 2025 | Kementerian PU | 1,00 |
| SUMATERA | AIR | CAMPURAN (KPS) | Jawa Barat | Pembangunan Bendungan Karian (10,000 l/s) | 1395 | 2011 | 2025 | Kementerian PU (Ditjen SDA) | 199,13 |
| SUMATERA | BANDARA | APBN | Kepulauan Bangka Belitung | Bandara Tanjung Padan (Hanan Judin) | 130 | | | Kementerian Perhubungan | 74,1 |
| SUMATERA | JALAN | APBN | Kepulauan Bangka Belitung | Jalan Tj. Pandan - Tj. Tinggi (pengembangan destinasi pulau bangka dsk.) - Bangka Belitung (38.3 Km) | 879 | 2011 | 2025 | Kementerian PU | 57,00 |
| SUMATERA | BANDARA | BUMN | Kepulauan Bangka Belitung | Bandara Depati Amir | 215 | | | PT. Angkasa Pura II | 9,629 |
| SUMATERA | BANDARA | BUMN | Kepulauan Riau | Pengembangan Terminal di Bandara Raja Haji Fisabilillah | 131 | 2011 | 2012 | PT. Angkasa Pura | 36,00 |
| SUMATERA | PELABUHAN (PERHUBUNGAN DARAT) | APBN | Lampung | Pembangunan Kapal Penyeberangan 5000 GT (3 unit) | 495 | 2012 | 2014 | Kementerian Perhubungan - Perhubungan Darat | 215,50 |

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROYEK | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|----------|-------------------------------|-------------------------|-----------|---|---------------------------|-------|---------|--|---------------------|
| SUMATERA | PELABUHAN | CAMPURAN (APBN-BUMN) | Lampung | Pengembangan Pelabuhan Panjang/Pengembangan Pelabuhan Sebalang (menunjang Pelabuhan Panjang) | 282 | | | Kementerian Perhubungan | 141,00 |
| SUMATERA | BANDARA | APBN | Lampung | Pengembangan Bandara Radin Inten II | 167 | | | Kementerian Perhubungan | 109,1 |
| SUMATERA | PELABUHAN (PERHUBUNGAN DARAT) | APBN | Lampung | Pembangunan Dermaga Merak Bakauheni VI (Pengembangan sarana dan prasarana angkutan penyeberangan Merak-Bakauheni) | 157 | 2012 | 2014 | Kementerian Perhubungan - Perhubungan Darat | 74,63 |
| SUMATERA | PELABUHAN (PERHUBUNGAN DARAT) | APBN | Lampung | Pembangunan Gangway & Elevated Sideramp Bakauheni VI | 76 | 2013 | 2015 | Kementerian Perhubungan | 60,00 |
| SUMATERA | AIR | CAMPURAN (KPS) | Lampung | SPAM Bandar Lampung (air minum) (500 l/det) | 380 | 2012 | 2025 | Kementerian PU & Swasta | 51,30 |
| SUMATERA | KERETA | APBN | NAD | Pengembangan jaringan dan layanan kereta api antar kota Sigli - Bireun - Lhokseumawe 172 km | 5175 | 2011 | 2020 | Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan | 232,045 |
| SUMATERA | JALAN | APBN | NAD | Penanganan Jalan Lhokseumawe - Langsa (Aceh) (174 km) | 1194 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 112,00 |
| SUMATERA | KERETA | CAMPURAN (APBN-BUMN) | Palembang | Pembangunan Jaringan Rel KA Kertapati - Simpang - Tanjung Api - api (90 km) | 25000 | 2012 | 2015 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub & Belum ditentukan | 59,32 |
| SUMATERA | BANDARA | CAMPURAN (APBN - BUMN) | Riau | Pengembangan Terminal di Bandara Sultan Syarif Kasim II | 386 | 2009 | 2011 | PT. Angkasa Pura II | 83,00 |
| SUMATERA | JALAN | APBN | Riau | Penanganan Jalan Sorek - Sp.Japura - Rengat - Rumbai Jaya - K.Enok (Riau) (224.5 km) | 1425 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 40,00 |

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROYEK | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|----------|-----------|-------------------------|------------------|--|---------------------------|-------|---------|---------------------------------------|---------------------|
| SUMATERA | AIR | APBN | Riau | SPAM Kawasan Kawasan Industri Dumai, Tj. Buton, dan Kuala Enok (air minum)(3 x 40 l/det) | 30 | 2013 | 2014 | Kementerian PU | 15,00 |
| SUMATERA | JALAN | APBN | Riau | Penanganan Jalan Pekan Heran - Siberida - Bts. Prov. Jambi (100,1 km) - (riau) | 721 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 13,00 |
| SUMATERA | JALAN | APBN | Riau | Penanganan jalan Simpang Batang - Batas Dumai (32 km - Rigid) (Riau) | 57 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 12,00 |
| SUMATERA | JALAN | APBN | Riau | Penanganan Jalan Sp. Kulim - Pelabuhan Dumai (rigid pavement) - 76 Km | 343 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 9,00 |
| SUMATERA | AIR | APBN | Sumatera Barat | SPAM Kawasan Khusus Kota Limapuluh (air minum) (50l/det) | 39,82 | 2013 | 2014 | Kementerian PU | 5 |
| SUMATERA | JALAN | APBN | Sumatera Selatan | Penanganan Jalan Muara Enim - Palembang (175 km) | 1131 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 82,00 |
| SUMATERA | JALAN | CAMPURAN (KPS) | Sumatera Utara | Pembangunan Jalan Tol Medan - Binjai (15,8 km) | 1185 | 2015 | 2017 | BPJT | 1759 |
| SUMATERA | PELABUHAN | APBN | Sumatera Utara | Perluasan Pelabuhan Belawan | 3656 | 2010 | 2016 | Kementerian Perhubungan & PT. Pelindo | 500,00 |
| SUMATERA | KERETA | APBN | Sumatera Utara | Pembangunan Rel KA Ruas : Bandar Tinggi - Kuala Tanjung (21,5 km) | 450 | 2011 | 2014 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 300 |
| SUMATERA | KERETA | APBN | Sumatera Utara | Pembangunan Jalur Ganda Medan-Kualanamu | 878 | 2013 | | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 280,00 |
| SUMATERA | JALAN | CAMPURAN (KPS) | Sumatera Utara | Pembangunan Jalan Tol Medan - Kuala Namo - Tebing Tinggi (60 km) | 4880 | 2011 | 2014 | BPJT | 270 |

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROYEK | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHA N APBN 2014 |
|----------|-----------|---------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|-------|---------|---|----------------------------|
| SUMATERA | JALAN | APBN | Sumatera Utara | Penanganan Jalan Tb. Tinggi - Kisaran - Rantau Prapat - Batas Prov Riau - (326,71 km) (Sumut) | 2471 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 66,00 |
| SUMATERA | JALAN | APBN | Sumatera Utara | Penanganan jalan kabupaten 3 km (KISM - Sp. Mayang) (Sumut) dan SP. Inalum - Kuala Tanjung | 110 | 2012 | 2015 | Kementerian PU | 35,07 |
| SUMATERA | PELABUHAN | CAMPURAN (APBN-KPS- BUMN) | Sumatera Utara | (Pengembang an) Pelabuhan Kuala Tanjung (Pelabuhan Hub Kuala Tanjung) | 27000 | 2013 | 2016 | Kementerian Perhubungan & PT. Pelindo I | 20,00 |

BAB 3

PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA-BALI TAHUN 2014

3.1 Kondisi Wilayah Jawa-Bali Saat Ini

Secara umum kinerja perekonomian wilayah Jawa-Bali tahun 2012 stabil dibanding tahun sebelumnya. Sektor utama yang menyumbang perekonomian wilayah Jawa-Bali adalah sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran, dan pertanian. Proporsi PMDN dan PMA di wilayah Jawa-Bali pada tahun 2012 tetap merupakan yang terbesar dibandingkan dengan wilayah lainnya. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita wilayah Jawa-Bali sebagian besar terus mengalami peningkatan. Walaupun perekonomian wilayah Jawa-Bali relatif maju dibandingkan wilayah lainnya, masih terdapat sembilan kabupaten tertinggal di wilayah Jawa-Bali.

Peningkatan kinerja perekonomian disertai dengan perbaikan indikator sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan tingkat kemiskinan wilayah cenderung menurun di wilayah Jawa-Bali. Fenomena pengangguran lebih menonjol di daerah perkotaan, sedangkan fenomena kemiskinan lebih menonjol di daerah perdesaan, kecuali di Provinsi DKI Jakarta yang seluruhnya berada di perkotaan. Sementara itu, dalam hal pembangunan manusia, secara umum semua provinsi menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Angka Harapan Hidup (AHH) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) pada tahun 2011 dibandingkan tahun sebelumnya.

TABEL 3.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA BALI

| Perkembangan Pembangunan | DKI Jakarta | Jawa Barat | Jawa Tengah | DIY | Jawa Timur | Banten | Bali |
|---|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi 2012 (persen) | 6,50 | 6,21 | 6,30 | 5,32 | 7,27 | 6,15 | 6,65 |
| PDRB Perkapita ADHB Tahun 2012 (Rp.Ribu) | 112,1417 | 21,25464 | 17,14021 | 16,2271 | 26,44479 | 19,00347 | 20,74287 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2012 (Persen) | 9,87 | 9,08 | 5,63 | 3,97 | 4,12 | 10,13 | 2,04 |
| Persentase Penduduk Miskin, September 2012 (Persen) | 3,70 | 9,89 | 14,98 | 15,88 | 13,4 | 5,71 | 3,95 |
| Indeks Pembangunan Manusia, 2011 | 77,97 (Peringkat 1) | 72,73 (Peringkat 16) | 72,94 (Peringkat 14) | 76,32 (Peringkat 4) | 72,17 (Peringkat 17) | 70,95 (Peringkat 23) | 72,84 (Peringkat 15) |
| Indeks Pembangunan Gender, 2010 | 73,35 | 62,38 | 65,79 | 72,51 | 65,11 | 62,88 | 67,81 |
| Indeks Pemberdayaan Gender, 2010 | 73,23 | 67,01 | 67,96 | 77,70 | 67,91 | 65,66 | 58,53 |
| Angka Harapan Hidup, 2011 (Tahun) | 73,35 | 68,40 | 71,55 | 73,27 | 69,86 | 65,05 | 70,78 |
| Rata-Rata Lama Sekolah, 2011 (Tahun) | 10,95 | 8,06 | 7,29 | 9,20 | 7,34 | 8,41 | 8,35 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), wilayah Jawa-Bali merupakan produsen utama komoditas tanaman pangan dan komoditas ternak. Produksi padi di Jawa-Bali tahun 2011 mencapai sekitar 53,64 persen dari total produksi padi nasional, yang sebagian besar berasal dari Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Untuk komoditas daging sapi, wilayah Jawa Bali menghasilkan 64,56 persen produksi nasional. Pada tahun 2010, wilayah Jawa-Bali merupakan wilayah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam produksi perikanan budidaya, yaitu 29,57 persen produksi nasional.

Kondisi infrastruktur wilayah Jawa-Bali relatif lebih memadai jika dibandingkan dengan wilayah lainnya. Total panjang jalan di Jawa-Bali adalah 6.146.24 Km, kondisi jalan mantap (baik dan sedang) mencapai 93,7 persen atau sepanjang 5.759,70 Km. Kerapatan jalan tertinggi secara nasional terdapat di Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, dan Jawa Tengah. Sementara itu, kapasitas jalan terendah secara nasional adalah Provinsi DKI Jakarta, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Pada tahun 2011, rasio elektrifikasi DKI Jakarta sebesar 100 persen, Banten 68,17 persen, Jawa Barat 70,72 persen, Jawa Tengah 77,31 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 75,19 persen, Jawa Timur 72,05 persen, Bali 69,77 persen dan rasio desa berlistrik DKI Jakarta sebesar 100 persen, Banten 100 persen, Jawa Barat 100 persen, Jawa Tengah 99,99 persen, Daerah Istimewa Yogyakarta 100 persen, Jawa Timur 99,99 persen, Bali 100 persen. Sedangkan untuk konversi energi, telah dibangun jaringan gas kota di rusun Jabotabek, Bekasi, Sidoarjo, Surabaya dan Depok.

Infrastruktur strategis lainnya adalah irigasi untuk mendukung peran wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Dari total 3,30 juta hektar daerah irigasi di wilayah Jawa-Bali, hanya sekitar 666,92 ribu hektar (20,20 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk. Selain itu, hanya 39,20% daerah irigasi tersebut dalam kondisi baik (2010). Dari sisi ketersediaan tampungan air, daya tampung air (storage) perkapita Pulau Jawa-Bali adalah sebesar 49,4 m³/kapita, lebih kecil dari daya storage perkapita nasional sebesar 52,31 m³/kapita. Sedangkan kondisi bendungan/waduk dalam kondisi baik sebesar 42% (30 buah) dan 4% (3 buah) rusak berat. Dari 186 buah embung, sebanyak 80 buah (47%) dalam kondisi baik dan 15 buah (9%) dalam kondisi rusak berat.

Hampir seluruh wilayah Jawa-Bali termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana alam. Pada tahun 2011, tercatat 11.514 kejadian bencana banjir. Frekuensi bencana banjir terbesar terjadi di Provinsi Jawa Timur, yaitu mencapai 4.114 kejadian banjir dalam rentan waktu 2008-2010.

3.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Tujuan pembangunan wilayah Jawa-Bali dalam tahun 2014 adalah untuk:

1. Mempertahankan wilayah Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional;
2. Meningkatkan kapasitas wilayah Jawa-Bali dalam lingkup kerja sama ekonomi internasional, termasuk pengembangan kawasan-kawasan industri, pelabuhan laut dan udara internasional;
3. Meningkatkan standar hidup masyarakat Jawa-Bali;
4. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi (jalan, jalan tol dan kereta api) dan energi;
5. Meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional;
6. Mempertahankan sumber-sumber air dan merehabilitasi daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan air sepanjang tahun;
7. Meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Jawa dan Bali.

Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Jawa-Bali pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat Jawa-Bali, yang ditunjukkan dengan membaiknya pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, serta angka harapan hidup (Tabel 3.2 dan Tabel 3.3);
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas infrastruktur transportasi;
3. Meningkatnya kapasitas pembangkit listrik;
4. Meningkatnya pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
5. Meningkatnya jumlah tampungan dan ketersediaan air melalui pembangunan dan rehabilitasi waduk;
6. Meningkatnya ketersediaan air baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan dalam rangka mencapai target MDGs.

TABEL 3.2
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DI
WILAYAH JAWA BALI TAHUN 2014

| Provinsi | Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾ (%) | Kemiskinan ²⁾ (%) | Pengangguran ³⁾ (%) |
|---------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| DKI Jakarta | 6,90 – 7,70 | 0,54 | 7,20 – 6,30 |
| Jawa Barat | 6,20 – 6,80 | 4,15 | 5,80 – 4,80 |
| Jawa Tengah | 7,10 – 7,70 | 11,58 | 4,00 – 3,40 |
| DI Yogyakarta | 6,20 – 6,90 | 11,87 | 2,70 – 1,30 |
| Jawa Timur | 7,10 – 7,80 | 11,23 | 2,70 – 1,70 |
| Banten | 6,50 – 7,20 | 3,13 | 6,50 – 5,00 |
| Bali | 6,80 – 7,30 | 1,12 | 1,70 – 1,20 |

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾ Pertumbuhan Ekonomi (*angka sementara*): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

²⁾ Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

³⁾ Pengangguran (*angka sementara*): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.

TABEL 3.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP
DAN RATA-RATALAMA SEKOLAHDI WILAYAH JAWA BALI TAHUN 2014

| Provinsi | Angka Kematian Bayi ¹⁾ | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) ²⁾ | Angka Harapan Hidup (Tahun) ³⁾ |
|---------------|-----------------------------------|--|---|
| DKI Jakarta | 7 | 12,4 | 76,51 |
| Jawa Barat | 24 | 8,7 | 71,41 |
| Jawa Tengah | 18 | 8,08 | 73,06 |
| DI Yogyakarta | 8 | 9,46 | 76,39 |
| Jawa Timur | 21 | 8,02 | 72,27 |
| Banten | 29 | 8,9 | 70,06 |
| Bali | 12 | 8,88 | 74,48 |

Sumber : Proyeksi Bappenas (*angka sementara*); BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Jawa-Bali

Pengembangan wilayah Jawa-Bali tahun 2014 diarahkan sebagai pendorong industri dan jasa nasional, serta sebagai lumbung pangan nasional untuk wilayah Jawa, serta sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional untuk Provinsi Bali. Arah kebijakan tersebut dilakukan dengan strategi pengembangan sebagai berikut:

1. Mengembangkan industri unggulan potensial daerah dan kawasan industri;
2. Mengembangkan pendidikan kejuruan dan keterampilan baik formal maupun non formal, serta mendorong pengembangan dan inovasi teknologi;
3. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, peternakan dan perikanan antara lain melalui penyuluhan dan introduksi teknologi;
4. Mengendalikan konversi lahan sawah dengan memperhatikan kebijakan tata ruang (RTRW) dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
5. Mengembangkan kegiatan *off-farm* untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian;
6. Membangun infrastruktur irigasi dan rehabilitasi daerah resapan air di kawasan-kawasan budidaya pertanian;
7. Pengembangan potensi wisata pantai (ekowisata) di wilayah selatan Jawa;
8. Mengembangkan aktivitas ekonomi padat karya yang mampu mendorong penyerapan tenaga kerja;
9. Menyediakan bantuan permodalan untuk pengembangan usaha tani dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
10. Meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi, air bersih, dan energi;
11. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memperluas jaringan perdagangan internasional;
12. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan kesehatan;
13. Meningkatkan kesiapan mitigasi bencana banjir.

3.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Wilayah Jawa-Bali

Isu strategis dan kegiatan strategis provinsi di wilayah Jawa-Bali adalah sebagai berikut:

Provinsi DKI Jakarta:

1. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri dengan kegiatan strategis Pembangunan Under Pass Kuningan-Mampang
2. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dengan kegiatan strategis Pembangunan Pengolahan Limbah Zona 1 dan Zona 6.
3. Penanggulangan Banjir dengan kegiatan strategis (1) Pengendalian Banjir Jakarta; (2) Pembebasan Lahan Waduk Cimanggis.

Provinsi Jawa Barat:

1. Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) dengan kegiatan strategis (1) Pemberdayaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE); (2) Pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) Wilayah Perdesaan; dan (3) Pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) Wilayah Perkotaan.
2. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula dengan kegiatan strategis (1) Cetak Sawah di Jawa Barat; (2) Perbaikan Jaringan Irigasi (Jitut Jides); dan (3) Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Jagung, kedelai, dan padi.
3. Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi Diversifikasi Sumber Energi serta Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan dengan kegiatan strategis (1) Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi Jawa Barat; (2) Mengembangkan Potensi Energi Baru Terbarukan di Jawa Barat; (3) Pembangunan Bandar Udara Kertajati ; (4) Pembangunan Daerah Irigasi; (5)Pembangunan Waduk Strategis di Jawa Barat; dan (6) Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara
4. Penyiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan dengan kegiatan strategis (1) pencegahan & pengendalian penyakit menular; (2) penguatan sistem rujukan melalui peningkatan pelayanan kesehatan dasar; (3) peningkatan akses sarana air minum, jamban keluarga (samijaga) dan perilaku hidup bersih dan sehat (phbs); (4) peningkatan pelayanan kesehatan ibu & keluarga berencana (kb) kesehatan; dan (5) peningkatan

upaya gizi keluarga & gerakan penyelamatan masa depan (gema mapan)

5. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, termasuk rintisan PMU dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Jenjang Pendidikan Menengah; (2) Pemberian Beasiswa Siswa Miskin pada Jenjang Pendidikan; dan (3) Pemberian BOS untuk Jenjang Pendidikan Menengah.

Provinsi Jawa Tengah:

1. Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis pada Potensi Unggulan Daerah & Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan Kapal INKAMINA; (2) Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Higienis Berstandar Nomor Kode Veteriner (NKV); (3) Penyediaan Peralatan Sistem Perkebunan; dan (5) Penyediaan Peralatan Sistem Pertanian.
2. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dengan isu strategis (1) Fasilitasi Pembangunan Pelengkap Jalur Ganda KA Lintas Utara Jawa (Pagar Pengaman & Relokasi Jalan Lingkungan); (2) Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS); (3) Pengembangan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Kendal; dan (4) Peningkatan cakupan layanan air minum perkotaan dan pedesaan.
3. Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin dengan kegiatan strategis (1) Bantuan Operasional Sekolah (BOS); dan (2) Pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui pemberian bantuan KUBE dan stimulan UEP di daerah pedesaan;
4. Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat dengan kegiatan strategis (1) Peningkatan kualifikasi akademik pendidik ke S1/D4 jenjang Dikmen; (2) Peningkatan kualifikasi akademik pendidik ke S1/D4 jenjang PAUD; dan (3) Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat.

Provinsi DI Yogyakarta:

1. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan kegiatan strategis Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalur PANSELA
2. Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) dengan kegiatan strategis (1) Bantuan Pemberdayaan Masyarakat bagi Fakir Miskin dalam Bentuk KUBE dan Stimulan UEP di daerah Pedesaan; dan (2) Pembinaan Gizi Masyarakat.

3. Low cost emission car dengan kegiatan strategis Pemasangan ATCS Simpang.
4. Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan dengan kegiatan strategis (1) Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal; (2) Optimalisasi Ketersediaan Pangan Dalam Rangka Penanganan Desa Rawan Pangan; (3) Peningkatan Produksi Padi dan Jagung dalam Mendukung Swasembada Pangan; (4) Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Melalui Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha; dan (5) Peningkatan Produksi Ternak dalam Mendukung Swasembada Daging.

Provinsi Jawa Timur:

1. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri dengan kegiatan strategis (1) Reaktivasi rel kereta api jalur ganda Prapat Kurung menuju dermaga Pelabuhan Tanjung Perak; (2) Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi; dan (3) Peningkatan Sarana - prasarana sumberdaya air dalam rangka peningkatan Indeks Pertanian (IP).
2. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan embung dengan teknologi geomembran; dan (2) Peningkatan Sarana - prasarana sumberdaya air dalam rangka peningkatan Indeks Pertanian (IP);
3. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula dengan kegiatan strategis (1) Pengembangan , Rehabilitasi dan Optimalisasi Sarana - prasarana Irigasi dalam rangka optimalisasi lahan pertanian; (2) Peningkatan Nilai Tambah Produk pertanian melalui peningkatan pengelolaan pasca panen; (3) Peningkatan populasi ternak dan peningkatan produksi hasil peternakan; (4) Peningkatan Produksi Gula melalui pengembangan tanaman tebu; dan (5) Percepatan Penganekaragaman Pangan dan penanganan Daerah Rawan Pangan menuju kemandirian pangan masyarakat.
4. Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan Rumah Sakit Menular; (2) Penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat; (3) Pembangunan Jaringan Perpipaan Penyediaan Air Baku Sumber Pitu (4) Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Kemitraan dengan Kader PKK; (5) Penguatan Manajemen Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan; (6) Penurunan Angka Kematian

Ibu dan Kematian Bayi.

5. Mitigasi Bencana dengan kegiatan strategis (1) Pengendalian Banjir dengan Peningkatan Kapasitas Sudetan palngwot-Sedayu Lawas Gresik dan (2) Pengendalian Banjir dengan Pembangunan Bendung Gerak Sembayat.

Provinsi Banten:

1. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan sarana/prasarana pengendali Banjir; dan (2) Peningkatan Jalan Simpang Labuan-Cibaliung
2. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dengan kegiatan strategis (1) Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan (2) Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK, Makanan Pendamping ASI.
3. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, termasuk rintisan PMU dengan kegiatan strategis (1) Bantuan Operasional Pendidikan Menengah untuk masyarakat Miskin; dan (2) Persiapan Penyelenggaraan Sekolah Mandiri; dan (3) Pembangunan Jalan Cikande-Rangkas Bitung.
4. Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) dengan kegiatan strategis (1) Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE); (2) Pemberdayaan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi; (3) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan (4) Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan.
5. Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru dengan kegiatan strategis Promosi Investasi KEK Tanjung Lesung.

Provinsi Bali:

1. Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan strategis (1) Lanjutan pembangunan Bendungan Titab di Kabupaten Buleleng; (2) Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan aneka kacang, umbi, dan padi; dan (3) Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil.
2. Pembangunan Infrastruktur Pendukung Antar Wilayah dan MP3EI dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan dan Peningkatan kapasitas Jalan; (2) Pengembangan Pelabuhan Kapal Cruise Tanahampo, Kabupaten Karangasem

(Penambahan prasarana/fasilitas kepelabuhan); (3) Pengembangan Pelabuhan/Dermaga Penyeberangan; dan (4) Pengembangan Pelabuhan Gunakse berikut Jalan Akses

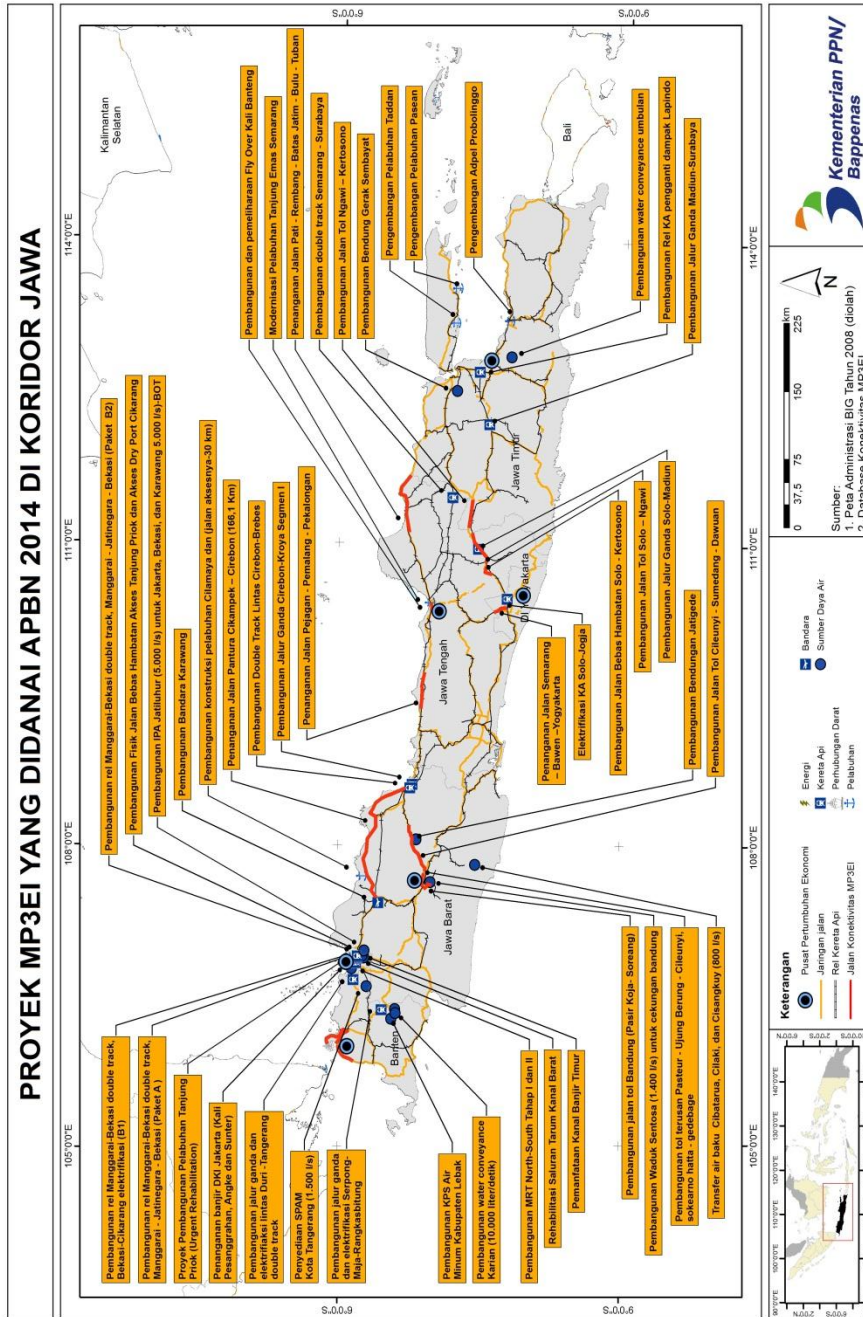
3. Peningkatan pelayanan kesehatan dan sanitasi masyarakat dengan kegiatan strategis (1) Lanjutan Pembangunan SPAM Penet; (2) Pembangunan RS Pratama Kelas III; (3) Lanjutan pembangunan SPAM Telaga Waja; dan (4) Peningkatan Puskesmas Penebel I menjadi Puskesmas Rawat Inap.

Uraian isu strategis, program dan kegiatan prioritas, kementerian/lembaga pelaksana, sasaran, dan pagu indikatif di setiap provinsi, dijabarkan dalam **Lampiran Bab 3**

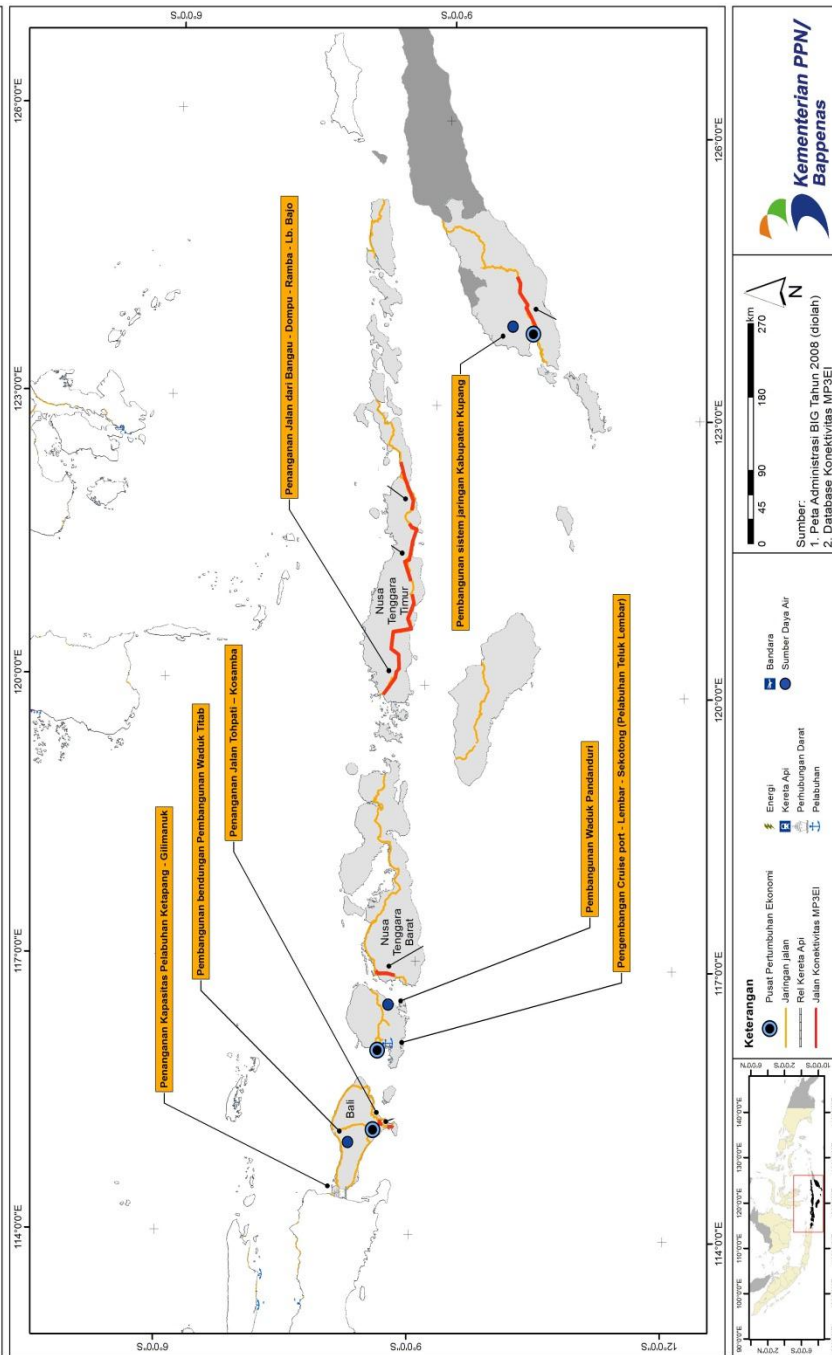
3.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Jawa-Bali

Arah kebijakan pengembangan MP3EI untuk Koridor Ekonomi Jawa dan Bali-Nusa Tenggara memperkuat arah pengembangan wilayah Jawa-Bali dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2014, yakni mengembangkan Koridor Ekonomi Jawa sebagai pendorong industri dan jasa nasional, serta mengembangkan Koridor Ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional.

GAMBAR 3.1 PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI TAHUN 2014 DI WILAYAH JAWA-BALI



PROYEK MP3EI YANG DIDANAI APBN 2014 DI KORIDOR BALI - NUSA TENGGARA



3.6 Implementasi MP3KI di Wilayah Jawa-Bali

Fokus pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI) akan dilaksanakan di empat kecamatan di setiap provinsi. Dari empat kecamatan tersebut, dua diantaranya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dua lainnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Khusus untuk Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ditambahkan masing-masing satu lokasi kecamatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan dilanjutkan untuk tahun 2014. Lokasi kecamatan di masing-masing wilayah usulan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Provinsi DKI Jakarta:

1. Kota Jakarta Utara, Kecamatan Cilincing
2. Kota Jakarta Utara, Kecamatan Penjaringan

Provinsi Jawa Barat:

1. Kabupaten Garut, Kecamatan Pakenjeng
2. Kabupaten Garut, Kecamatan Banjarwangi
3. Kabupaten Indramayu, Kecamatan Haurgeulis

Provinsi Jawa Tengah:

1. Kabupaten Brebes, Kecamatan Bantarkawung
2. Kabupaten Brebes, Kecamatan Paguyangan
3. Kabupaten Brebes, Kecamatan Bulakamba

Provinsi DI Yogyakarta:

1. Kabupaten Gunung Kidul, Kecamatan Supto Sari
2. Kabupaten Bantul, Kecamatan Pajangan

Provinsi Jawa Timur:

1. Kabupaten Sampang, Kecamatan Karang Penang
2. Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Konang
3. Kabupaten Sampang, Kecamatan Kedundung

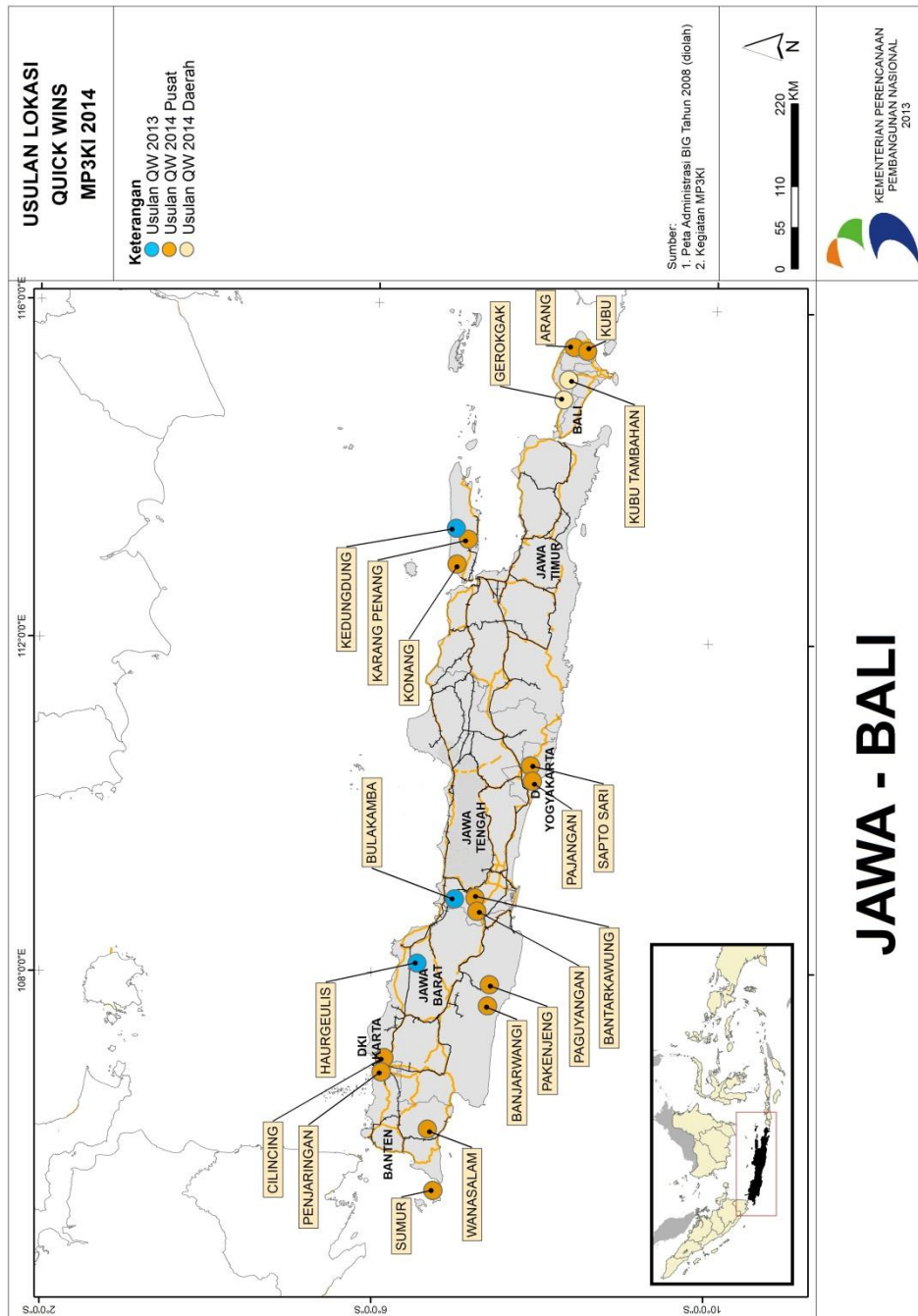
Provinsi Banten:

1. Kabupaten Pandeglang, Kecamatan Sumur
2. Kabupaten Lebak, Kecamatan Wanasalam

Provinsi Bali:

1. Kabupaten Karang Asem, Kecamatan Abang
2. Kabupaten Karang Asem, Kecamatan Kubu
3. Kabupaten Buleleng, Kecamatan Gerokgak
4. Kabupaten Buleleng, Kecamatan Kubutambahan.

GAMBAR 3.2
PROYEK MP3KI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI
TAHUN 2014 DI WILAYAH JAWA-BALI



LAMPIRAN BAB 3. Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Pulau Jawa-Bali tahun 2014

A. PROVINSI DKI JAKARTA

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----------|--|--|---|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Under Pass Kuningan-Mampang | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang Fly Over/Underpass/ Terowongan yg dibangun | Provinsi DKI Jakarta | 860 m | 660.000 |
| 2 | Isu Strategis Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Pengolahan Limbah Zona 1 dan Zona 6 | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan | Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Dengan Sistem Off-Site dan Sistem On-Site | Provinsi DKI Jakarta | 1 paket | 210.000,00 |
| 3 | Isu Strategis : Penanggulangan Banjir | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembebasan Lahan Waduk Cimanggis | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun | Provinsi DKI Jakarta | 0,2 km sudetan Sungai Ciliwung | 220.500,00 |
| | | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi | Provinsi DKI Jakarta | 1,75 km normalisasi Sungai Ciliwung | 150.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---------|--|---|----------------------|--|-----------------|
| | | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun | Provinsi DKI Jakarta | 25,76 km Normalisasi Kali Pesanggrahan, Kali Angke, dan Kali Sunter | 939.625,73 |
| | | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang direhabilitasi | Provinsi DKI Jakarta | 1 km Normalisasi Kali Ciliwung Lama & Penambahan Pintu Air Manggarai | 93.481,10 |

B. PROVINSI JAWA BARAT

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|---|--|---------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pemberdayaan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : SOSIAL | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat | Tersedianya Bantuan Bagi WRSE | Provinsi Jawa Barat | 50 | 20,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) Wilayah Perdesaan | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : SOSIAL | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan | Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE | Provinsi Jawa Barat | 120 | 2.400,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|---|---|---------------------|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pemberdayaan masyarakat miskin melalui kelompok usaha bersama (KUBE) | | | | | | |
| Wilayah Perkotaan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : SOSIAL | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan | Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan | Provinsi Jawa Barat | 60 | 1.218,00 |
| 2 | Isu Strategis: Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Cetak Sawah di Jawa Barat | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian | Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah | Kabupaten Ciamis | 200 | 555,00 |
| Kegiatan Strategis : Perbaikan Jaringan Irigasi (Jitut Jides) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian | Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan | Provinsi Jawa Barat | 24.730 | 24.730,00 |
| Kegiatan Strategis : Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Jagung | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman | Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia | Luas SLPTT jagung meningkat produktivitas 0,30 ku/ha (ha) | Provinsi Jawa Barat | 8.000 | 1.209,80 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|---|--|---------------------|-----------------|--------------------|
| | Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Kedelai | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi | Luas SLPTT Kedelai meningkat produktivitas 0,20 ku/ha (ha) | Provinsi Jawa Barat | 98.250 | 138.769,00 |
| | Kegiatan Strategis : Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia | Luas SLPTT Padi meningkat produktivitas 0.3-1 ku/ha (ha) | Provinsi Jawa Barat | 317.000 | 51.655,90 |
| 3 | Isu Strategis : Kualitas dan Cakupan Pelayanan Infrastruktur, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi Diversifikasi Sumber Energi serta Pemanfaatan Energi Baru dan Terbaharukan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Akselerasi Peningkatan Rasio Elektrifikasi Jawa Barat | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | |
| | Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan | Panjang Jaringan Distribusi | Provinsi Jawa Barat | 261 km | 53.199,75 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|--|---------------------|---|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Mengembangkan Potensi Energi Baru Terbarukan di Jawa Barat | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | |
| Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi | Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan | Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan | Provinsi Jawa Barat | 1250 Tungku; 50 Unit Biogas; Rehabilitasi 1 PLTMH di Sumedang | 1.400,00 | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandar Udara Kertajati | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara baru yang dibangun | Provinsi Jawa Barat | Bandara Kertajati | 180.000 | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Daerah Irigasi | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Garut | 1 bendung, 1800 ha | 91.060,00 | |
| | | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Indramayu | 1 bendung Sumur Watu, 670 ha | 24.794,11 | |
| | | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Cirebon | 1.243,5 ha | 76.809,48 | |
| | | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Indramayu | 1.486,7 ha | 91.700,00 | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Waduk Strategis di Jawa Barat | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta | Jumlah waduk yang dibangun | Kabupaten Kuningan | 1 waduk Kuningan | 184.500,00 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|--|---------------------------|---|--------------|-----------------|
| | | Bangunan Penampung Air Lainnya | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Waduk Strategis di Jawa Barat | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah waduk yang dibangun | Kabupaten Sumedang | waduk Jatigede | | 920.870,00 |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KELAUTAN PERIKANAN | | | | | | |
| Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan | Jumlah pengembangan, peningkatan operasional, dan kualitas layanan pelabuhan perikanan UPT Pusat, termasuk di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi) | Provinsi Jawa Barat | 1 Pelabuhan Perikanan (Pelabuhan Ratu) | | 40.000,00 |
| 4 | Isu Strategis : Penyiapan Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Kesehatan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | |
| Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Persentase ODHA yang mendapatkan ART | Provinsi Jawa Barat | 1 paket | | 4.900,00 |
| Kegiatan Strategis : Penguatan Sistem Rujukan Melalui Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|--|--|---|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk | Provinsi Jawa Barat | 27 kabupaten/kota | 216.020,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Akses Sarana Air Minum, Jamban Keluarga (Samijaga) Dan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Phbs) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penyehatan Lingkungan | Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas | Provinsi Jawa Barat | 9 kabupaten/kota | 8.330,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu & Keluarga Berencana (Kb) Kesehatan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) | Provinsi Jawa Barat | 1 paket | 7.900,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Upaya Gizi Keluarga & Gerakan Penyelamatan Masa Depan (Gema Mapan) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Gizi Masyarakat | Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Provinsi Jawa Barat | 1 paket | 14.421,00 |
| 5 | Isu Strategis : Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, termasuk rintisan PMU | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), Jenjang Pendidikan Menengah | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|-----------------------------|---|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------|
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | APK NASIONAL SMK (RKB SMK) | Provinsi Jawa Barat | 518 | 62.160,00 |

Kegiatan Strategis : Pemberian Beasiswa Siswa Miskin pada Jenjang Pendidikan

Prioritas Nasional : Pendidikan

KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------------|--------|------------|
| Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | Peserta Didik Smk Mendapatkan Beasiswa | Provinsi Jawa Barat | 260000 | 260.000,00 |
|-----------------------------|---|--|---------------------|--------|------------|

Kegiatan Strategis : Pemberian BOS untuk Jenjang Pendidikan Menengah

Prioritas Nasional : Pendidikan

KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|---------------------|---------|--------------|
| Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | Jumlah Peserta Didik Smk Penerima Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Smk | Provinsi Jawa Barat | 1396166 | 1.396.166,00 |
|-----------------------------|---|--|---------------------|---------|--------------|

C. PROVINSI JAWA TENGAH

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|---|---|----------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Peningkatan Daya Saing Ekonomi Berbasis pada Potensi Unggulan Daerah & Berorientasi pada Ekonomi Kerakyatan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Kapal INKAMINA | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| | Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan | Jumlah pengadaan kapal perikanan > 30 GT yang terbangun (unit) | Provinsi Jawa Tengah | 5 | 7.500,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Higienis Berstandar Nomor Kode Veteriner (NKV) | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | |
| | Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal | Penjaminan Pangan Hewan Aman Halal Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan | Unit Usaha produk pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet (paket) | Provinsi Jawa Tengah | 2 Lokasi | 6.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|--|---------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) Higienis Berstandar Nomor Kode Veteriner (NKV) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program | Penjaminan | Fasilitasi | Kabupaten | 2 unit RPH | 6.000,00 |
| | Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal | Pangan Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan | rumah potong hewan (unit) | Kudus dan Kabupaten Brebes | | |

Kegiatan Strategis : Penyediaan Peralatan Sistem Perkebunan

Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan

KEMENTERIAN : KEMENTERIAN PERTANIAN

| | | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------|------------------|----------|
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditas Perkebunan | Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pasca panen sesuai GHP (kelompok tani) | Provinsi Jawa Tengah | 17 kelompok tani | 1.245,00 |
|--|---|--|--|----------------------|------------------|----------|

Kegiatan Strategis : Penyediaan Peralatan Sistem Pertanian

Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan

KEMENTERIAN : KEMENTERIAN PERTANIAN

| | | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|--|--|
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian | Jumlah (unit) alat dan mesin pertanian yang efisien dan berkelanjutan di lokasi. | Provinsi Jawa Tengah | | |
|--|--|---|--|----------------------|--|--|

2 Isu Strategis: Peningkatan Pembangunan Infrastruktur

Kegiatan Strategis : Fasilitasi Pembangunan Pelengkap Jalur Ganda KA Lintas Utara Jawa (Pagar Pengaman & Relokasi Jalan Lingkungan)

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|---|--|---|--|-----------------|
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian | Pembangunan & Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api | Jumlah Paket Pengadaan Peralatan/Fasilitas Prasarana Perkeretaapian | Provinsi Jawa Tengah | 1 paket | 26.200,00 |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang pembangunan/ pelebaran Jalan di Kaw. Sragis, Perbatasan, Wil. Terluar & Terdepan | Kabupaten Kendal | 71,08 | 134.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Kolam Pelabuhan Penyeberangan Kendal | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat | Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP | Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan (dermaga) | Provinsi Jawa Tengah | 2 kegiatan | 29.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan cakupan layanan air minum perkotaan dan perdesaan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Kapasitas air baku yang ditingkatkan | Kab. Brebes- Kab. Tegal, Kab. Kebumen, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah | 0.7 m ³ /dt (Pembangunan Jaringan Air Baku Kawasan Bregas II dan III, Pembangunan Intake dan Jar Pipa Transmisi Air Baku SPAM Regional KEBUREJO, dan Air Baku Mojosongo | 139.800,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|--|--|----------------------|------------------|-----------------|
| 3 | Isu Strategis: Pengurangan Jumlah Penduduk Miskin | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | Jumlah Peserta Didik Smk Penerima Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) SMK | Provinsi Jawa Tengah | 675599 siswa SMK | 678.976,90 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pemberdayaan masyarakat fakir miskin melalui pemberian bantuan KUBE dan stumulan UEP di daerah pedesaan.</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : SOSIAL | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan | Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE | Provinsi Jawa Tengah | 120 | 2.400,00 |
| 4 | Isu Strategis: Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan kualifikasi akademik pendidik ke S1/D4 jenjang Dikmen</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Menengah | GURU SMA/SMK/SML B BERKUALIFIKA SI AKADEMIK S-1/D-4 | Provinsi Jawa Tengah | 608 orang | 8.386,20 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan kualifikasi akademik pendidik ke S1/D4 jenjang PAUD</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal | Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase Pendidik PAUDNI Berkualitas S1/D4 | Provinsi Jawa Tengah | 923 orang | 3.230,20 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|--|----------------------|--------|--------------|-----------------|
| 5 | | Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | | | | |
| Isu Strategis: Peningkatan kualitas SDM dan kesejahteraan rakyat | | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Penyelenggaraan pemagangan dalam dan luar negeri Binalattas | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Lainnya Bidang Perekonomian | | | | | | |
| KEMENTERIAN : TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | |
| Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas | Peningkatan Penyelenggaraan Pemagangan dalam dan Luar Negeri Binalattas | Jumlah Peserta yang Mengikuti Pemagangan Di Perusahaan | Provinsi Jawa Tengah | | 1040 orang | 3.874,00 |

D. PROVINSI DI YOGYAKARTA

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|--------|--------------|-----------------|
| 1 | | | | | | |
| Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah | | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Fasilitas Keselamatan Jalan di Jalur PANSELA | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat | Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan | Jumlah Fasilitas Keselamatan Laj | Provinsi DI Yogyakarta | | 1 | 7.350,00 |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dibangun (Km) | Lintas Pantai Selatan Jawa | | 5 | 40.000,0 |
| 2 | | | | | | |
| Isu Strategis : Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) | | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Bantuan Pemberdayaan Masyarakat bagi Fakir Miskin dalam Bentuk KUBE dan Stimulan UEP di daerah Perdesaan | | | | | | |
| Prioritas Nasional: Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : SOSIAL | | | | | | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|-------------------------------------|---|------------------------|--------------|-----------------|
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan | Jumlah KUBE Yang Mendapat Akses Permodalan LKM-KUBE | Provinsi DI Yogyakarta | 1200 KK | 2.400,00 |

Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat

Prioritas Nasional: Penanggulangan Kemiskinan

KEMENTERIAN : SOSIAL

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------|----|--------|
| Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Sosial Masyarakat | Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan | Provinsi DI Yogyakarta | 54 | 139,60 |
|---|---|--|------------------------|----|--------|

Kegiatan Strategis : Pembinaan Gizi Masyarakat

Prioritas Nasional: Penanggulangan Kemiskinan

KEMENTERIAN : KESEHATAN

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|------------------------|---------|----------|
| Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Gizi Masyarakat | Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Provinsi DI Yogyakarta | 2 Paket | 1.287,00 |
|--|---------------------------|--|------------------------|---------|----------|

3 Isu Strategis : Low cost emission car

Kegiatan Strategis : Pemasangan ATCS Simpang

Prioritas Nasional: Infrastruktur

KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN

| | | | | | |
|--|--|--|------------------------|---------|----------|
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat | Pembinaan dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan | Jumlah Paket Penyelenggaraan Transportasi Ramah Lingkungan | Provinsi DI Yogyakarta | 1 paket | 6.500,00 |
|--|--|--|------------------------|---------|----------|

4 Isu Strategis : Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan

Kegiatan Strategis : Diversifikasi Konsumsi Pangan Lokal

Prioritas Nasional: Ketahanan Pangan

KEMENTERIAN : PERTANIAN

| | | | | | |
|---|---|--|------------------------|---------|----------|
| Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan | Jumlah kelembagaan yang diberdayakan dalam P2KP (Percepatan Penganeka- | Provinsi DI Yogyakarta | 78 Desa | 2.863,00 |
|---|---|--|------------------------|---------|----------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|--|---|-------------|--------------|-----------------|
| | | Pangan Segar | ragaman Konsumsi Pangan) dalam rangka mewujudkan Konsumsi Pangan Masyarakat Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (Desa) | | | |
| Kegiatan Strategis : Optimalisasi Ketersediaan Pangan Dalam Rangka Penanganan Desa Rawan Pangan | | | | | | |
| Prioritas Nasional: Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | Jumlah Desa yang diberdayakan/De- mapan | Provinsi DI Yogyakarta | 10 Desa | 577,00 | |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi Padi dan Jagung dalam Mendukung Swasembada Pangan | | | | | | |
| Prioritas Nasional: Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia | Luas SLPTT Padi meningkat produktivitas 0.3-1 ku/ha (ha) | Provinsi DI Yogyakarta | 275 Ha | 940,00 | |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi Ternak dalam Mendukung Swasembada Daging | | | | | | |
| Prioritas Nasional: Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal | Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal | Peningkatan kelahiran ternak (juta ekor) | Provinsi DI Yogyakarta | 12 Kelompok | 4.080,00 | |

E. PROVINSI JAWA TIMUR

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|---|---|---|----------------------------------|--------------------|
| 1 | Isu Strategis : Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Re-aktivasi rel kereta api jalur ganda Prapat Kurung menuju dermaga Pelabuhan Tanjung Perak</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggara an Transportasi Perkeretaapian | Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api | Panjang Km Jalur KA Baru yang Dibangun Termasuk Jalur Ganda | Kota Surabaya | Peningkatan jalan KA | 29.412,00 |
| 2 | Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan embung dengan teknologi geomembran</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah buah embung/Situ/Ban gunan Penampung Air lainnya yang direhabilitasi | Kab. Trenggalek, Provinsi Jawa Timur | 1 buah Embung Joho | 3.500,00 |
| | | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah waduk yang dibangun | Kab. Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur | 1 buah Bendungan Bajulmati | 97.377,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|--|---|--|--------|---|--------------------|
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Sarana - prasarana sumberdaya air dalam rangka peningkatan Indeks Pertanaman (IP) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kab. Sampang, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur | | 53 ha | 381.600,00 |
| | | | | | (Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Nipah, Pengembangan DI. Bengawan Jero) | |
| | | | | | 1.995 ha | |
| | | | | | 310.548 ha | |
| | | | | | 110 ha | |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang direhabilitasi | Provinsi Jawa Timur | | 170 ha | |
| | | | | | (Rehabilitasi Rumah Pompa, JIAT Perpipaan dan Pencucian (7 Titik)) | |
| | | | | | 110 ha | |
| | | | | | 310.548 ha | |
| | | | | | 110 ha | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---------|--|--|---------------------|--------------|--------------------|
| | | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Jumlah sumur air tanah yang dioperasikan dan dipelihara | Provinsi Jawa Timur | 130.763 ha | |
| | | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan tata air tambak yang direhabilitasi | Provinsi Jawa Timur | 16.054 ha | |
| | | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan tata air tambak yang dioperasikan dan dipelihara | Provinsi Jawa Timur | 18.571 ha | |

- 3 **Isu Strategis : Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula**
Kegiatan Strategis : Pengembangan , Rehabilitasi dan Optimalisasi Sarana - prasarana Irigasi dalam rangka optimalisasi lahan pertanian
Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan

KEMENTERIAN : PERTANIAN

| | | | | | |
|--|---|--|---------------------|-----------|-------|
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian | Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/ rehabilitasi JIUT, JIDES, TAM) untuk mendukung tana-man pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan | Provinsi Jawa Timur | 69.400 Ha | 68,40 |
|--|---|--|---------------------|-----------|-------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|--|---|---------------------|--------------|--------------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Nilai Tambah Produk pertanian melalui peningkatan pengelolaan pasca panen</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan | Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen (unit) | Provinsi Jawa Timur | 104 unit | 18,50 |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan populasi ternak dan peningkatan produksi hasil peternakan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal | Peningkatan Produksi Perbenihan dan Perbibitan (Ribuan Dosis Semen) | Provinsi Jawa Timur | 25 kelompok | 162,66 |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi Gula melalui pengembangan tanaman tebu</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | Peningkatan Produksi dan Mutu Tanaman Semusim | Peningkatan Produksi Perbenihan dan Perbibitan (Ribuan Dosis Semen) | Provinsi Jawa Timur | 40.310 Ha | 440,27 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|---|---|---------------------|-------------------------|--------------------|
| Kegiatan Strategis : Percepatan Penganekaragaman Pangan dan penanganan Daerah Rawan Pangan menuju kemandirian pangan masyarakat | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | Jumlah desa yang diberdayakan dalam program aksi desa mapan (Desa) | Provinsi Jawa Timur | 118 desa | 14,74 |
| 4 | Isu Strategis : Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Rumah Sakit Menular | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV | Provinsi Jawa Timur | 8 Kabupaten/Kota | 75.305,00 |
| Kegiatan Strategis : Penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penyehatan Lingkungan | Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas | Provinsi Jawa Timur | 8 Kabupaten/Kota | 7.600,00 |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Jaringan Perpipaan Penyediaan Air Baku Sumber Pitu | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Kapasitas air baku yang ditingkatkan | Kab./Kota Malang | 0.15 m ³ /dt | 39.690,93 |
| Kegiatan Strategis : Penguatan Kelembagaan Posyandu dan Kemitraan dengan Kader PKK | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|------------------------------|--|---------------------|--|--------------------|
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Gizi Masyarakat 02 | Persentase (%) Balita Ditimbang Berat Badannya (D/S) | Provinsi Jawa Timur | 70 persen (PHBS, Promkes), 100 persen (Gizi) | 10.490,00 |

Kegiatan Strategis : Penguatan Manajemen Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Prioritas Nasional : Kesehatan

KEMENTERIAN : KESEHATAN

| | | | | | |
|---|-----------------------|---|---------------------|---------|----------|
| Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penyehatan Lingkungan | Jumlah Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Provinsi Jawa Timur | 1 paket | 2.100,00 |
|---|-----------------------|---|---------------------|---------|----------|

Kegiatan Strategis : Penurunan Angka Kematian Ibu dan Kematian Bayi

Prioritas Nasional : Kesehatan

KEMENTERIAN : KESEHATAN

| | | | | | |
|--|---|---|---------------------|---------|----------|
| Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin | Provinsi Jawa Timur | 1 paket | 2.750,00 |
|--|---|---|---------------------|---------|----------|

5 Isu Strategis : Mitigasi Bencana

Kegiatan Strategis : Pengendalian Banjir dengan Peningkatan Kapasitas Sudetan palngwot-Sedayu Lawas Gresik

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---------------|-------|------------|
| Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Jumlah Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun | Kab. Lamongan | 12 km | 100.000,00 |
|-----------------------------|--|---|---------------|-------|------------|

Kegiatan Strategis : Pengendalian Banjir dengan Pembangunan Bendung Gerak Sembayat

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------|--------|------------|
| Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Jumlah Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun | Kab. Gresik | 1 buah | 199.355,00 |
|-----------------------------|--|---|-------------|--------|------------|

F. PROVINSI BANTEN

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|---|--|------------------------------|--|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan sarana/prasaran pengendali Banjir | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Jumlah panjang sarana/prasarana pengendalian banjir yang dibangun | Kab. Serang, Provinsi Banten | 0,5 km (pengerukan sedimentasi hulu Bendung Gerak Pamarayan) | 29.700,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Simpang Labuan-Cibaliung | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Provinsi Banten | 22,3 Km | 57.600,0 |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Cikande-Rangkas Bitung | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg dilebarkan (Km) | Provinsi Banten | 3,8 Km | 30.000,0 |
| 2 | Isu Strategis : Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | Jumlah Kab/Kota yang dilayani oleh RS Bergerak di Daerah Tertinggal, | Provinsi Banten | 2 rumah sakit | 20.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|---|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) | | | |
| | Kegiatan Strategis : Penyediaan Makanan Tambahan Ibu Hamil KEK, Makanan Pendamping ASI | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Masyarakat | Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Provinsi Banten | 228 puskesmas | 32.128,00 |
| 3 | Isu Strategis : Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, termasuk rintisan PMU | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Bantuan Operasional Pendidikan Menengah untuk masyarakat Miskin | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA | Semua Kabupaten dan Kota | Provinsi Banten | 13266 siswa SMA | 13.332,3 |
| | Kegiatan Strategis : Persiapan Penyelenggaraan Sekolah Mandiri | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal | Penyediaan Layanan Kursus dan Pelatihan | Persentase Anak Putus Sekolah dan Lulus Sekolah Menengah Tdk Melanjutkan Mendapatkan Layanan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kecakapan Hidup, Bersertifikat dan Bekerja | Provinsi Banten | 1080 | 1.986,00 |
| 4 | Isu Strategis : Pengembangan Penghidupan Penduduk Miskin dan Rentan (Transformasi Program Pemberdayaan Masyarakat) | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : SOSIAL | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan | Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE | Provinsi Banten | 120 | 2.400,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Keluarga Rawan Sosial Ekonomi | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : SOSIAL | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan | Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan | Tersedianya Bantuan Bagi WRSE | Provinsi Banten | 50 | 20,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|--|--|-----------------|--------------|-----------------|
| | Penanggulangan Kemiskinan | Sosial Masyarakat | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : SOSIAL | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur | Provinsi Banten | 125 | 1.500,00 |
| Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Perkotaan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : SOSIAL | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan | Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan | Provinsi Banten | 40 | 812,00 |
| 5 | Isu Strategis: Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Promosi Investasi KEK Tanjung Lesung | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Iklim Investasi Dan Iklim Usaha | | | | | | |
| BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL | | | | | | |
| | Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal | Promosi Penanaman Modal Sektoral Terpadu dan Terintegrasi di dalam dan Luar Negeri | Penyelenggaraan kegiatan promosi terpadu berdasarkan sektor dan negara | Provinsi Banten | 0 | 0 |

G. PROVINSI BALI

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----------|--|---|---|-----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Peningkatan Ketahanan Pangan | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Lanjutan pembangunan Bendungan Titab di Kabupaten Buleleng</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah buah waduk yang dibangun | Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali | 1 buah Waduk | 96.866,00 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| | Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan dan Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil | Jumlah Kelompok Nelayan KUB dan Penerima Pengembangan Usaha Mina Pedesaan/PUMP di lokasi PKN | Provinsi Bali | 63 KUB | 6.300,00 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan aneka kacang, umbi, dan padi</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi | Luas Areal Penerapan Budidaya Tanaman Aneka Kacang dan Umbi yang Tepat dan Berkelanjutan Termasuk untuk Bahan Bakar Nabati (Ribu Ha) : Ptt Pangan Lokal (Ribu Ha) | Provinsi Bali | 27.500 Ha | 22.980,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|---|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| 2 | Isu Strategis : Pembangunan Infrastruktur Pendukung Antar Wilayah dan MP3EI | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan dan Peningkatan kapasitas Jalan | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dipreservasi dan ditingkatkan (Km) | Provinsi Bali | 688,3 Km | 499.485,10 |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan Pelabuhan Kapal Cruise Tanahampo, Kabupaten Karangasem (Penambahan prasarana/fasilitas kepelabuhan) | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut | Bertambahnya fasilitas pelayanan operasional pelabuhan | Kab. Karangasem | Lanjutan perpanjangan dermaga | 1.500,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan Pelabuhan/Dermaga Penyeberangan | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat | Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP | Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan (dermaga) | Kab. Jembrana | Perpanjangan dermaga | 1.950,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan Pelabuhan Gunakse berikut Jalan Akses | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat | Pembangunan jalan Akses pelabuhan penyeberangan | Jumlah akses jalan yang dibangun baru (Km) | Kab. Klungkung | 5 Km | 40.000 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|---|---|--------------------|--------------|-----------------|
| 3 | Isu Strategis : Peningkatan pelayanan kesehatan dan sanitasi masyarakat | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Lanjutan Pembangunan SPAM Penet</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Kesehatan Rujukan | Upaya Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan | Provinsi Bali | 1 Paket | 82.000,00 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan RS Pratama Seririt</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | |
| | Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Persentase (%) satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi keuangan dan pemerintahan sesuai ketentuan | Kabupaten Buleleng | 2 unit | 26.000,00 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan SPAM Telaga Waja</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan | Kab. Karangasem | 1 Paket | 24.000,00 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Puskesmas Penebel I menjadi Puskesmas Rawat Inap</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Kesehatan Dasar | Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk | Kab. Tabanan | 2 unit | 1.000,00 |

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2014

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|---------|-----------|--------------------------|------------------------|--|---------------------------|-------|---------|---|---------------------|
| JAWA | AIR | APBN | Banten | Pembangunan water conveyance Karian (10.000 liter/detik) | 2464 | 2014 | 2025 | Kementerian PU (Ditjen SDA) | 0 |
| JAWA | KERETA | APBN | Banten | Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi Serpong-Maja-Rangkasbitung; panjang 49 km | 1500 | 2011 | 2014 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 561,40 |
| JAWA | AIR | SWASTA | Banten | Penyediaan SPAM Kota Tangerang (1.500 l/s) | 1150 | 2012 | 2015 | Swasta | 345,00 |
| JAWA | KERETA | APBN | Banten | Pembangunan jalur ganda dan elektrifikasi lintas Duri - Tangerang 29 km double track | 728 | 2011 | 2014 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 119,256 |
| JAWA | AIR | CAMPURAN (APBN - SWASTA) | Banten | Pembangunan KPS Air Minum Kabupaten Lebak | 34 | 2011 | 2014 | PT. Ciria Jasa Rancang Bangun Mandiri (CRM) | 20,10 |
| JAWA | KERETA | APBD | DKI Jakarta | Pembangunan MRT North-South Tahap I dan II | 40000 | 2011 | 2018 | Pemda DKI | 4.000,00 |
| JAWA | AIR | APBN | DKI Jakarta | Penanganan banjir DKI Jakarta (Kali Pesanggrahan, Angke dan Sunter) | 2352 | 2011 | 2014 | Kementerian PU (Ditjen SDA) | 939,63 |
| JAWA | AIR | APBN | DKI Jakarta | Rehabilitasi Saluran Tarum Kanal Barat | 483 | 2011 | 2014 | Kementerian PU (Ditjen SDA) | 0 |
| JAWA | PELABUHAN | CAMPURAN (APBN-BUMN) | DKI Jakarta | Proyek Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok (Urgent Rehabilitation) | 1000 | 2012 | 2014 | Kementerian Perhubungan & PT. Pelindo II | 300,00 |
| JAWA | AIR | APBN | DKI Jakarta | Pemanfaatan Kanal Banjir Timur 23,5 km | 566 | 2011 | 2014 | Kementerian PU (Ditjen SDA) | 0 |
| JAWA | KERETA | APBN | DKI Jakarta-Jawa Barat | Pembangunan rel Manggarai-Bekasi double track, Bekasi-Cikarang | 8300 | 2011 | 2016 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 1.250,00 |

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|---------|-----------|-------------------------|------------------------|--|---------------------------|-------|---------|--|---------------------|
| JAWA | KERETA | APBN | DKI Jakarta-Jawa Barat | elektrifikasi (B1) Pembangunan rel Manggarai-Bekasi double double track, Manggarai - Jatinegara - Bekasi (Paket A) | 2700 | 2014 | 2016 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 626,00 |
| JAWA | JALAN | CAMPURAN (APBN - KPS) | DKI Jakarta-Jawa Barat | Pembangunan Fisik Jalan Bebas Hambatan Akses Tanjung Priok (E2, E2 A, dan NS) dan Akses Dry Port Cikarang | 3977 | 2011 | 2014 | BPJT | 400 |
| JAWA | KERETA | APBN | DKI Jakarta-Jawa Barat | Pembangunan rel Manggarai-Bekasi double double track, Manggarai - Jatinegara - Bekasi (Paket B2) | 260 | 2014 | 2014 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 260,00 |
| JAWA | JALAN | CAMPURAN (KPS) | Jawa Barat | Pembangunan Jalan Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan - Jawa Barat (60,10km) | 9853 | 2011 | 2014 | BPJT | 2000 |
| JAWA | AIR | APBN | Jawa Barat | Pembangunan Bendungan Jatigede (Air baku 3900 l/s; irigasi 90.000 ha) | 3252 | 2011 | 2014 | Kementerian PU (Ditjen SDA) | 920,87 |
| JAWA | JALAN | CAMPURAN (KPS) | Jawa Barat | Pembangunan tol terusan Pasteur - Ujung Berung - Cileunyi, sokearno hatta - gedebage 27,3 km) | 11523 | 2011 | 2016 | BPJT | 640,00 |
| JAWA | PELABUHAN | CAMPURAN (KPS) | Jawa Barat | Pembangunan konstruksi pelabuhan Cilamaya dan (jalan aksesnya-30 km) | 40345 | 2014 | 2020 | Kementerian Perhubungan & Kemen PU (akses jalan) | 300,00 |
| JAWA | JALAN | APBN | Jawa Barat | Penanganan Jalan Pantura Cikampek - Cirebon (166,1 Km) | 3199 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 259,00 |
| JAWA | BANDARA | CAMPURAN (APBD - KPS) | Jawa Barat | Pembangunan Bandara Kertajati | 8299 | 2013 | 2020 | Kementerian Perhubungan dan Dinas Perhubungan | 250 |

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|---------|-----------|--------------------------|------------------------|---|---------------------------|-------|---------|--|---------------------|
| | | | | | | | | Prov. Jawa Barat | |
| JAWA | JALAN | CAMPURAN (KPS) | Jawa Barat | Pembangunan jalan tol Bandung (Pasisr Koja-Soreang) 15 km | 1515 | 2011 | 2020 | BPJT | 135 |
| JAWA | AIR | APBN | Jawa Barat | Pembangunan Waduk Sentosa (1.400 l/s) untuk cekungan bandung | 457 | 2011 | 2015 | Kementerian PU (Ditjen SDA) | 0 |
| JAWA | AIR | CAMPURAN (KPS) | Jawa Barat | Pembangunan IPA Jatiluhur (5.000 l/s) untuk Jakarta, Bekasi, dan Karawang | 1893 | 2013 | 2015 | BPPSPAM | 85,18 |
| JAWA | AIR | APBN | Jawa Barat | Transfer air baku Cibatarua, Cilaki, dan Cisangkuy (800 l/s) | 154 | 2011 | 2015 | Kementerian PU (Ditjen SDA) | 0 |
| JAWA | BANDARA | CAMPURAN (APBN-KPS-BUMN) | Jawa Barat | Pembangunan Bandara Karawang | 36199 | 2014 | 2020 | Kemenhub & KPS | 15,00 |
| JAWA | KERETA | APBN | Jawa Barat-Jawa Tengah | Pembangunan Jalur Ganda Cirebon-Kroya Segmen I | 1600,00 | 2012 | 2014 | Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan | 755 |
| JAWA | KERETA | APBN | Jawa Barat-Jawa Tengah | Pembangunan Double Track Lintas Cirebon-Brebes 62 km. | 1400 | 2012 | 2013 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 432,48 |
| JAWA | JALAN | APBN | Jawa Tengah | Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Solo - Kertosono | 10321 | 2011 | 2014 | Kementerian PU | 595,00 |
| JAWA | AIR | APBN | Jawa Timur | Pembangunan Bendung Gerak Sembayat | 851 | 2014 | 2014 | Kementerian PU (Ditjen SDA) | 199,36 |
| JAWA | JALAN | APBN | Jawa Tengah | Penanganan Jalan Pejagan - Pemalang - Pekalongan (109,3 km) | 2254 | 2011 | 2011 | Kementerian PU | 156,00 |
| JAWA | JALAN | APBN | Jawa Tengah | Pembangunan Akses Jalan ke Pel Kendal | 34 | 2013 | 2013 | Kementerian PU | 28,00 |
| JAWA | PELABUHAN | CAMPURAN (APBN - BUMN) | Jawa Tengah | Modernisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang | 654 | 2011 | 2011 | PT. Pelindo III | 17,50 |

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|---------|-----------|-------------------------|---------------------------|--|---------------------------|-------|---------|---------------------------------|---------------------|
| JAWA | JALAN | APBN | Jawa Tengah | Pembangunan dan pemeliharaan Fly Over Kali Banteng (Menuju Pelabuhan Tanjung Emas) | 164 | 2011 | 2011 | Kementerian PU | 2,00 |
| JAWA | KERETA | APBN | Jawa Tengah-DI Yogyakarta | Elektrifikasi KA Solo-Jogja | 100 | 2013 | 2013 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 500 |
| JAWA | JALAN | APBN | Jawa Tengah-DI Yogyakarta | Penanganan Jalan Semarang – Bawen– Yogyakarta (106.3 Km) | 1327 | 2014 | 2020 | Kementerian PU | 86,00 |
| JAWA | KERETA | APBN | Jawa Tengah-Jawa Timur | Pembangunan Jalur Ganda Solo-Madiun | 2237 | 2011 | 2015 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 1032,00 |
| JAWA | KERETA | APBN | Jawa Tengah-Jawa Timur | Pembangunan double track Semarang - Bojonegoro - Surabaya 280 km | 12800 | 2013 | 2020 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 710,088 |
| JAWA | JALAN | CAMPURAN (KPS) | Jawa Tengah-Jawa Timur | Pembangunan Jalan Tol Solo – Ngawi (90,10 km) | 5140 | 2014 | 2020 | PT. Solo Ngawi Jaya, BPJT | 595 |
| JAWA | JALAN | APBN | Jawa Tengah-Jawa Timur | Penanganan Jalan Pati - Rembang - Batas Jatim - Bulu - Tuban (128,1 Km) | 1232 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 21,00 |
| JAWA | JALAN | CAMPURAN (KPS) | Jawa Timur | Pembangunan Jalan Tol Ngawi – Kertosono (87,02 km) | 6327 | 2011 | 2014 | PT. Ngawi Kertosono Jaya, BPJT | 589 |
| JAWA | AIR | CAMPURAN (KPS) | Jawa Timur | Pembangunan water conveyance umbulan 4000 l/s) | 1900 | 2012 | 2025 | BPPSPAM | 342,00 |
| JAWA | PELABUHAN | APBN | Jawa Timur | Pengembangan Adpel Probolinggo | 406 | 2012 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 135,00 |
| JAWA | PELABUHAN | APBN | Jawa Timur | Pengembangan Pelabuhan Pasean - Jawa Timur | 128 | 2012 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 87,50 |
| JAWA | PELABUHAN | APBN | Jawa timur | Pengembangan Pelabuhan Taddan - Jawa Timur | 123 | 2012 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 76,50 |
| JAWA | KERETA | APBN | Jawa Timur | Pembangunan Rel KA pengganti dampak Lapindo 26 km | 760 | 2011 | 2017 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 40 |

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|-----------|--------|-------------------------------|------------|---|---------------------------------|-------|---------|---------------------------------|------------------------|
| JAWA | KERETA | APBN | Jawa Timur | Pembangunan Jalur Ganda Madiun-Surabaya (165 Km) | 4150 | 2015 | 2019 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 7,00 |
| BALI - NT | AIR | APBN | Bali | pembangunan bendungan Pembangunan Waduk Titab, Kabupaten Buleleng (359 liter/detik) | 441 | 2011 | 2014 | Kementrian PU (Ditjen SDA) | 96,87 |
| BALI - NT | AIR | APBN | Bali | Pengembangan IPA Pened - 300 l/s | 60 | 2013 | 2014 | Kementerian PU | 94,25 |
| BALI - NT | AIR | APBN | Bali | Pembangunan IPA Ayung (500 l/s) | 100 | 2015 | 2025 | Kementerian PU | 15,00 |
| BALI - NT | JALAN | APBN | Bali | Penanganan Jalan Tohpati - Kosamba (11,8 km) | 609 | 2011 | 2025 | Kementerian PU | 2,00 |

BAB 4 PENGEMBANGAN WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2014

4.1 Kondisi Wilayah Kalimantan Saat Ini

Secara umum kinerja perekonomian wilayah Kalimantan pada tahun 2012 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor pertanian terutama perkebunan, industri pengolahan migas, dan pertambangan dan penggalan. Perkembangan PDRB per kapita wilayah Kalimantan terus mengalami peningkatan riil, walaupun ketimpangan antarpriovinsi masih cukup tinggi. Dalam mendorong perekonomian wilayah Kalimantan, Kalimantan Timur adalah provinsi yang paling banyak menarik investasi, baik PMA maupun PMDN.

Secara umum Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Kalimantan cenderung menurun dan berada di bawah TPT nasional kecuali untuk Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Fenomena pengangguran juga lebih menonjol di daerah perkotaan dibandingkan dengan perdesan.

Sebagian besar provinsi di Kalimantan memiliki tingkat kemiskinan jauh lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan nasional. Sementara itu, terkait dengan aspek pembangunan manusia, seluruh provinsi di Kalimantan menunjukkan perbaikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Umur Harapan Hidup (UHH), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Namun demikian ketidakmerataan pembangunan manusia antarprovinsi masih terlihat terutama disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dasar dan rendahnya mutu pelayanan di daerah perdesaan, pedalaman, dan perbatasan. Tercatat saat ini terdapat 16 Kabupaten tertinggal yang masih memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pelayanan dasar publik.

TABEL 4.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH KALIMANTAN

| Perkembangan Pembangunan | Kalimantan Barat | Kalimantan Tengah | Kalimantan Selatan | Kalimantan Timur |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 (%) | 5,80 | 6,69 | 5,73 | 3,90 |
| PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2012 (Rp.Ribu) | 16,83171 | 24,4676 | 20,19688 | 109,6644 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2012 (%) | 3,48 | 3,17 | 5,25 | 8,90 |
| Persentase Penduduk Miskin, September 2012 (%) | 7,96 | 6,19 | 5,01 | 6,38 |
| Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 | 69,66 (Peringkat 28) | 75,06 (Peringkat 7) | 70,44 (Peringkat 26) | 76,22 (Peringkat 5) |
| Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010 | 64,21 | 69,32 | 65,07 | 60,37 |
| Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010 | 55,26 | 68,62 | 62,53 | 60,05 |
| Umur Harapan Hidup Tahun 2011 (Tahun) | 66,75 | 71,30 | 64,17 | 71,40 |
| Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 (Tahun) | 6,89 | 8,06 | 7,68 | 9,19 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Di bidang infrastruktur, total panjang jaringan jalan di Kalimantan meningkat dari 2011 adalah 6,363.6 km. Seiring dengan itu, kualitas jalan mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 persentase jalan dengan kondisi mantap meningkat menjadi 89,7 persen.

Sementara itu, sektor komunikasi dan informatika, hingga tahun 2011 dalam penyediaan jasa akses telekomunikasi telah mencakup 3.937 desa USO dan internet di 619 desa ibukota kecamatan USO (100 persen dari target).

Luas jaringan irigasi Kalimantan mencapai 480,32 ribu hektar atau sekitar 6 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia. Dari total 480,32 ribu hektar daerah irigasi tersebut, hanya sekitar 7,33 ribu hektar (1,52 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk. Secara keseluruhan selama tahun 2009 - 2011 terjadi 5.864 kejadian banjir. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantapan infrastruktur melalui

pembangunan sarana prasarana pengendali banjir.

Wilayah Kalimantan pada tahun 2010 menjadi penyumbang 18,22 persen produksi komoditas kelapa sawit nasional. Wilayah Kalimantan memiliki kekayaan cadangan minyak bumi, gas dan batubara. Untuk Batubara, Kalimantan mempunyai cadangan 52,100 Juta ton dengan potensi untuk melakukan kegiatan gasifikasi batubara.

Dari sisi luas kawasan hutan, wilayah Kalimantan adalah yang tertinggi kedua setelah Papua dengan luas sebesar 40,9 juta hektardengan laju deforestasi yang sangat tinggi sekitar 246 ribu hektar/tahun (tahun 2000-2005).

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, masalah utama yang dihadapi oleh wilayah Kalimantan adalah pengamanan dan pengembangan daerah perbatasan dan konflik horizontal.

4.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Kalimantan

Tujuan pembangunan wilayah Kalimantan dalam tahun 2014 adalah untuk :

1. Meningkatkan standar dan kualitas hidup masyarakat serta akses terhadap pelayanan dasar publik di wilayah Kalimantan.
2. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat (jalan dan kereta api), laut maupun udara;
3. Memantapkan wilayah Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.
4. Memantapkan Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
5. Meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha;
6. Meningkatkan fungsi transportasi laut dan sungai untuk daerah terpencil dan pedalaman di wilayah Kalimantan;

7. Meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di Kalimantan dan daerah perbatasan;
8. Meningkatkan kondisi keamanan dan pengawasan kawasan perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia.
9. Mewujudkan dan mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai bagian dari paru-paru dunia dan konservasi keanekaragaman hayati antara lain melalui program REDD+ dan reklamasi bekas lahan tambang.
10. Memastikan keberlanjutan layanan telekomunikasi dan internet, percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, penyediaan Air Baku bagi PDAM, pembangunan jaringan transmisi air baku, dan pembangunan dan rehabilitasi waduk.

Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Kalimantan pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya standar dan kualitas hidup dan aksesibilitas masyarakat Kalimantan terhadap pelayanan dasar publik yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, serta usia harapan hidup (Tabel 4.2 dan 4.3).
2. Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara;
3. Berkembangnya wilayah Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.
4. Berkembangnya Kalimantan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.
5. Meningkatnya sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan dan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan dan hak ulayat, perlindungan masyarakat adat, dan pengembangan usaha.
6. Terpeliharanya kawasan hutan tropis basah yang

bervegetasi minimal 45,00 persen dari luasan Pulau Kalimantan serta terehabilitasinya dan terpeliharanya kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati flora dan fauna endemik.

7. Selesainya tata batas kawasan hutan; beroperasinya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); Penurunan hotspot (kumulatif dari rerata 2005-2009) dan penurunan konflik kawasan; serta rehabilitasi hutan dan lahan. (persiapan kegiatan pelaksanaan REDD+) di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur
8. Keberlanjutan layanan telekomunikasi dan internet di wilayah USO, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Sanggau Ledo dan Kakap Komplek, Karau , Batang Alai, Amandit, Pitap, Beriwit, dan Dumaring, pembangunan pipa transmisi air baku Mempawah-Sungai Pinyuh dan pembangunan jaringan transmisi air baku di Palangkaraya, pembangunan dan rehabilitasi waduk Marangkayu, Teritib, dan Muara Joloi.

TABEL 4.2
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2014

| Provinsi | Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾ (%) | Kemiskinan ²⁾ (%) | Pengangguran ³⁾ (%) |
|--------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Kalimantan Barat | 4,80 - 5,40 | 4,66 | 2,40 - 1,90 |
| Kalimantan Tengah | 6,10 - 6,70 | 3,61 | 2,20 - 1,90 |
| Kalimantan Selatan | 6,30 - 6,90 | 1,01 | 3,70 - 2,90 |
| Kalimantan Timur | 3,60 - 4,10 | 2,03 | 5,80 - 4,50 |

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

TABEL 4.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH KALIMANTAN TAHUN 2014

| Provinsi | Angka Kematian Bayi ¹⁾ | Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾ | Umur Harapan Hidup ³⁾ |
|--------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Kalimantan Barat | 25 | 7,42 | 71,04 |
| Kalimantan Tengah | 21 | 8,56 | 72,31 |
| Kalimantan Selatan | 30 | 7,96 | 69,79 |
| Kalimantan Timur | 14 | 9,68 | 73,74 |

Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

- Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.
- ²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas.
- ³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kalimantan

Pengembangan wilayah Kalimantan Tahun 2014 diarahkan sebagai sentra produksi pertanian, perkebunan, dan kehutanan, gugus (cluster) industri pengolahan berbasis sumber daya alam, produksi dan pengolahan hasil tambang, serta lumbung energi nasional.

Untuk mendukung arah pengembangan tersebut, strategi pengembangan yang dilakukan adalah:

1. Mengembangkan Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Balikpapan sebagai pusat industri pengolahan berbasis sumber daya alam yang melayani sentra-sentra produksi di sekitarnya, serta mengembangkan produk/industri unggulan wilayah dan kerja sama antardaerah.
2. Mengoptimalkan industri migas dan pertambangan serta mengembangkan industri energi alternatif terbarukan.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan kerja, dan jangkauan pelayanan kesehatan.
4. Meningkatkan jaringan jalan (Trans Kalimantan, dan jalan perbatasan), angkutan sungai dan laut, serta angkutan

udara dan mengintegrasikannya dalam suatu jaringan transportasi terpadu.

5. Meningkatkan jangkauan pelayanan telekomunikasi.
6. Meningkatkan konservasi dan rehabilitasi DAS, lahan kritis, hutan lindung, dan hutan produksi.
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban di kawasan perbatasan
8. Memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan pemberdayaan rumah tangga miskin.

4.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Wilayah Kalimantan

Isu strategis dan kegiatan strategis provinsi di wilayah Kalimantan adalah sebagai berikut:

Provinsi Kalimantan Barat:

1. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan Outer Ring Road & Outer Ring Canal Pontianak; (2) Pra FS Jembatan Kapuas III; (3) Pra FS Jembatan Landak II;
2. Peningkatan Rasio Elektrifikasi dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan PLTMH; (2) Pembangunan PLTS Komunal; (3) Pembangunan Sumur Bor pada Kawasan Sulit Air di WP3K;
3. Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk Kurikulum 2013 dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan Ruang Bengkel/Workshop/Studio SMK; dan (2) Pembangunan Sekolah Terpadu; Pendidikan Karakter Pelajar;
4. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dengan kegiatan strategis Pelatihan Bidan Kawasan Perbatasan; Pengadaan obat-obatan untuk cadangan Propinsi
5. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula dengan kegiatan strategis (1) Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian; (2) Pengembangan Swasembada Daging; Revitalisasi Sektor Perikanan.
6. Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi dengan kegiatan strategis Pengembangan Sarana dan

Prasarana Kawasan Transmigrasi dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi;

Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dengan kegiatan strategis (1) Optimalisasi SPAM IKK; Pembangunan Bandar Udara di Pangkalan Bun (Kab. Kotawaringin Barat), Kab. Lamandau dan Kab. Katingan; (2) Pembangunan fasilitas pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas dan Sigintong di Kabupaten Seruyan; (3) Peningkatan jalan akses MP3EI ruas: Pulang Pisau-Pangkuh-Bahaur (Pelabuhan Bahaur); Sampit-Samuda (Pelabuhan Bagendang); Basarang-Batanjung (Pelabuhan Batanjung); Lingkar luar Kota Palangka Raya; Buntok-Ampah; Palangka Raya-Buntok; Tumbang Samba-Batas Kalbar; (4) Pembangunan PLTS terpusat.
2. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produktivitas usaha mikro dengan kegiatan strategis (1) Penanggulangan Kemiskinan perdesaan dan (2) Penanggulangan kemiskinan perkotaan;
3. Penurunan tingkat kerusakan hutan dan lahan serta peningkatan kapasitas mitigasi bencana dengan kegiatan strategis (1) Pengendalian kebakaran hutan dan (2) Prubahan tutupan vegetasi dalam rangka program menuju Indonesia Hijau;
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian serta peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi pertanian; (2) Pengelolaan tanaman produksi serealia; Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya; dan (3) Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal; Penyediaan dan pengelolaan air baku
5. Percepatan pemenuhan energi melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan dan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan kegiatan strategis Pembinaan, pengawasan, dan pengusahaannya aneka energi

baru terbarukan

Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Peningkatan Infrastruktur sebagai Peningkatan Local Conectivity dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan bandara Syamsudin Noor sebagai Bandara Utama dan peningkatan bandara pendukungnya di Provinsi Kalimantan selatan; (2) Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan dan Dermaga sebagai penghubung alur laut dan sungai : Pelabuhan Laut Swarangan (Pelaihari); Pelabuhan Laut Banjarmasin; Pelabuhan Batu Licin; Pelabuhan di Matasiri, Sebuku, marabatan(Kotabaru); Dermaga Sungai (Banjarmasin, Barito Kuala, HSU, Banjar); Dermaga Penyeberangan (Kotabaru, Banjarmasin, Batola); (3) Pembangunan dan Pengembangan Pelistrikan di Kalimantan Selatan : Pembangunan PLTU Asam-Asam 5 dan 6 (2 x 100 MW); Pembangunan Jaringan Transmisi SUTT (150 KV) dan Pembangun TL serta Pembangunan Pembangkit Kotabaru (2x7 MW) dan Gardu Induk Baru; (4) Pembangunan PLTU Kota Baru; (5) Peningkatan Kapasitas Jalan & Jembatan Nasional : Peningkatan Ruas Jalan Nasional dari kelas III menjadi kelas II; Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Trisakti
2. Perkuatan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Pencapaian Target Nasional Surplus 10 Juta Ton dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan Infrastruktur Irigasi; (2) Pengelolaan dan Stabilitas Ketahanan pangan; (3) Pengembangan sektor ekonomi dan Ketahanan Pangan dengan peningkatan produksi pertanian, Perkebunan, peternakan disertai pengembangan sistem pembenihan unggul; (4) Pengembangan Sistem Produksi & Sistem Usaha Pembudidayaan Perikanan , Serta Penyediaan Kapal Utk Pengemb. Usaha Perikanan Tangkap; (5) Penyediaan air baku di 3 kawasan : Banjarmasin Metropolitan, Kawasan Regional Banua Enam, dan Kawasan Kapet Batu Licin
3. Peningkatan Angka IPM dan Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat yang Sejahtera dengan kegiatan strategis (1) Pembverdayaan Komunitas adat Terpencil; dan (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan

Peningkatan Kualitas Kesehatan menuju Kalimantan Selatan yang Sehat.

4. Perbaiki Kualitas lingkungan dalam usaha menjaga Keseimbangan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (*Economic Growth, Social Equity, Ecological Sustainability*) dengan kegiatan strategis (1) Pengembangan Konservasi SDA dan perlindungan Hutan serta daya dukung DAS serta Pengembangan Komoditas Tanaman Kehutanan & hasil Hutan Ikutan lainnya; dan (2) Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil.

Provinsi Kalimantan Timur:

1. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan Jembatan di Kabupaten Penajam Paser Utara; (2) Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan) di Kabupaten Berau; (3) Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan); (4) Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan); (5) Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan); (6) Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan); (7) Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan); (8) Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan); (9) Pemenuhan Energi.
2. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri (lanjutan direktif Presiden) dengan kegiatan strategis Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan;
3. Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru dengan kegiatan strategis infrastruktur pendukung kawasan industri di Kabupaten Kutai Timur;
4. Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang dapat terjangkau oleh masyarakat dengan kegiatan strategis (1) Biaya operasional kesehatan puskesmas; (2) Pelayanan

kesehatan ibu dan anak; Pengembangan Rumah Sakit Pratama

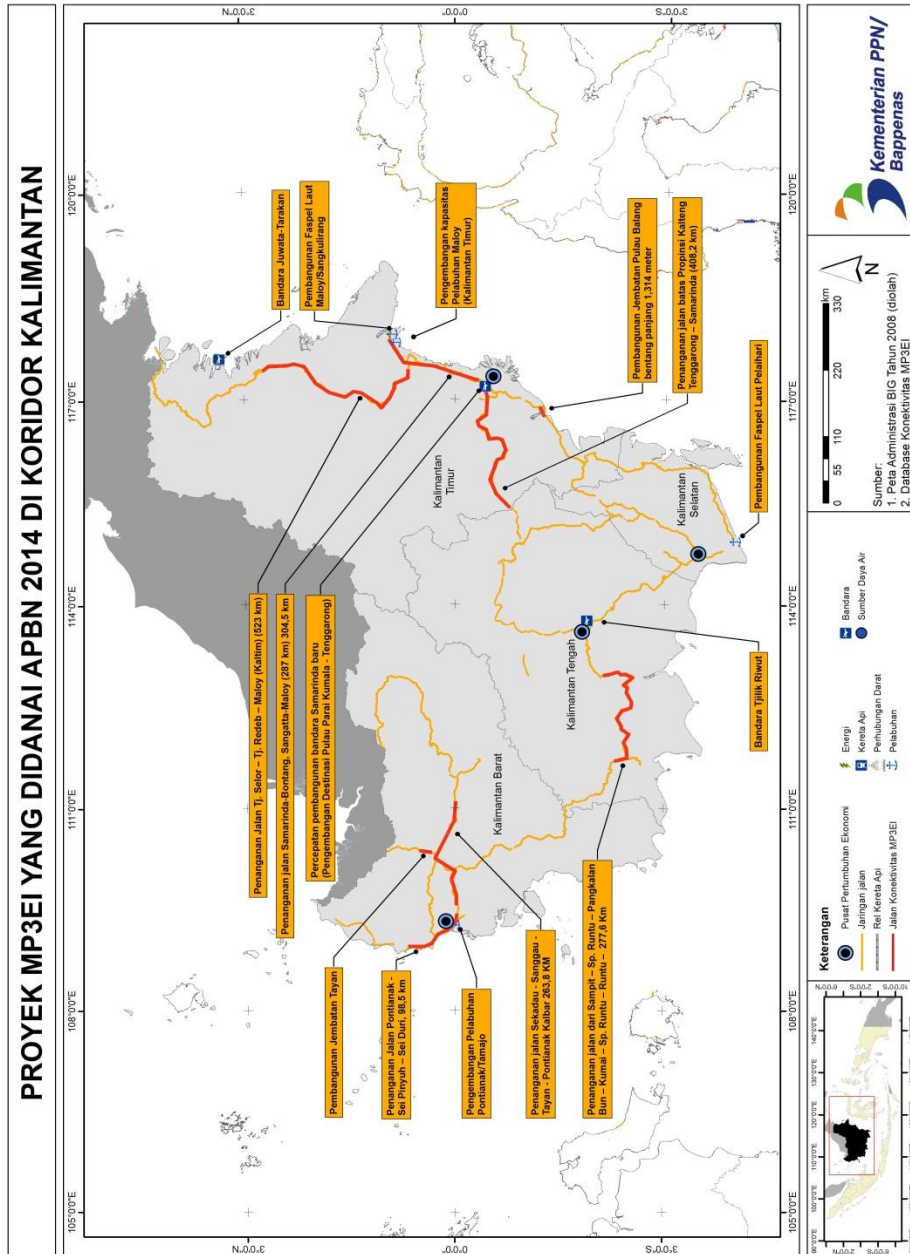
5. Pemenuhan Energi dengan kegiatan strategis Energi Baru dan Terbarukan di Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Malinau

Uraian isu strategis, program dan kegiatan strategis, Kementerian/Lembaga, sasaran, target, dan pagu indikatif di setiap provinsi di Kalimantan dapat dilihat dalam Lampiran Bab 4.

4.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Kalimantan

Arah kebijakan pengembangan MP3EI untuk Koridor Ekonomi Kalimantan memperkuat arah pengembangan wilayah Kalimantan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2014, yakni mengembangkan Koridor Ekonomi Kalimantan sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional.

GAMBAR 4.1
PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI
MELALUI TA 2014 DI WILAYAH KALIMANTAN



4.6 Implementasi MP3KI di Wilayah Kalimantan

Fokus pelaksanaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3KI) akan dilaksanakan di empat kecamatan di setiap provinsi. Dari empat kecamatan tersebut, dua diantaranya ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dua lainnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Khusus untuk Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur ditambahkan satu lokasi kecamatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan dilanjutkan tahun 2014.

Lokasi kecamatan di masing-masing wilayah usulan pemerintah pusat adalah sebagai berikut:

Provinsi Kalimantan Barat:

1. Kabupaten Ketapang, Kecamatan Matan Hilir Utara
2. Kabupaten Landak, Kecamatan Mempawah Hulu
3. Kabupaten Landak, Kecamatan Sengah Temila

Provinsi Kalimantan Tengah:

1. Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Teluk Sampit
2. Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Pulau Hanaut
3. Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Bukit Santuai
4. Kabupaten Kotawaringin Timur, Kecamatan Seranau

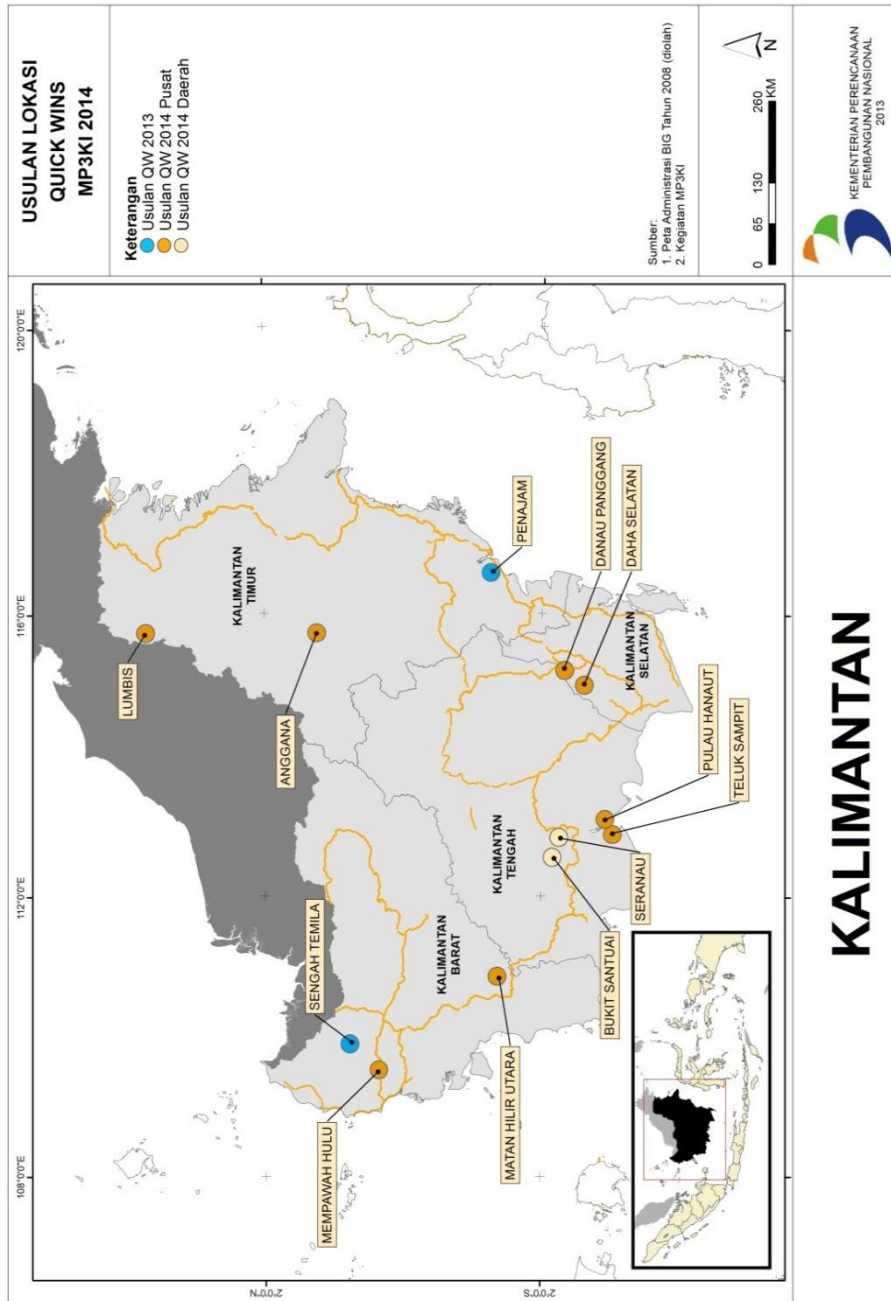
Provinsi Kalimantan Selatan:

1. Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Daha Selatan
2. Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kecamatan Danau Panggang

Provinsi Kalimantan Timur:

1. Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Anggana
2. Kabupaten Nunukan, Kecamatan Lumbis
3. Kabupaten Penajam Paser Utara, Kecamatan Penajam

GAMBAR 4.2
USULAN LOKASI QUICK WINS MP3KI TA 2014 DI WILAYAH KALIMANTAN



LAMPIRAN BAB 4. Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Pulau Kalimantan tahun 2014

A. PROVINSI KALIMANTAN BARAT

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|---|---|--|--------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Outer Ring Road & Outer Ring Canal Pontianak | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dibangun (Km) | Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat | 1 Paket | 1.000,00 |
| | Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Jumlah Panjang sarana/prasarana pengendali banjir yang dibangun | Kota Pontianak | 4 km | 57.600,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pra FS Jembatan Kapuas III | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah dokumen Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan | Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat | 1 Paket | 1.000,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pra FS Jembatan Landak II | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah dokumen Penyiapan Bahan Usulan Program Tahunan dan 5 Tahunan | Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat | 1 Paket | 1.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|--|---|--|--|-----------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Pra FS Pembangunan Pelabuhan Internasional</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan | Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut | Jumlah Studi Besar | Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat | 1 paket | 750,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Layanan Prasarana Air Baku</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Kapasitas air baku yang ditingkatkan | Kota Pontianak | 0,8 m ³ /dt (Replacement Pipa Transmisi Air Baku Penempatan Bonjol) | 12.400,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Kegiatan Strategis : Pembangunan Outer Ring Road Pontianak</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah panjang jalan yang dibangun baru (Km) | Kota Pontianak | Review Study Kelayakan | 10.000,00 |
| 2 | Isu Strategis : Peningkatan Rasio Elektrifikasi | | | | | |
| <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan PLTMH</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Energi | | | | | | |
| KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | |
| | Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi | Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan | Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru (Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan) | Kalimantan Barat | 1 Unit PLTMH | 2.370,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|--|---|--|-----------------------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pembangunan PLTS Komunal | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Energi | | | | | | |
| KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi | Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan | Pembangunan PLTS Terpusat Untuk Listrik Perdesaan | Kalimantan Barat : Kab. Sambas | 1 Unit PLTS 50 KW | 15.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Sumur Bor pada Kawasan Sulit Air di WP3K | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Energi | | | | | | |
| KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | |
| | Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi | Penelitian dan Pelayanan Geologi Lingkungan dan Air Tanah | Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Penelitian, Penyelidikan, dan Pemetaan Bidang Lingkungan Geologi dan Air Tanah | Kalimantan Barat | 1 titik pem-boran air tanah | 575,00 |
| 3 | Isu Strategis : Peningkatan Kualitas Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, termasuk Kurikulum 2013 | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Ruang Bengkel/Workshop/Studio SMK | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | APK NASIONAL SMK | Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat | 1 | 225,00 |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Sekolah Terpadu | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA | Apk SMA Nasional | Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan | 1 | 1.800,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|--|---|---------|--------------|------------------|
| | | | | Barat | | |
| Kegiatan Strategis : Pendidikan Karakter Pelajar | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA | SMA Menerapkan Pembelajaran Yang Membangun Karakter Siswa | Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat | 152 | 423,00 | |
| 4 | Isu Strategis : Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pelatihan Bidan Kawasan Perbatasan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) | Kalimantan Barat : Kab. Bengkayang, Kab. Kapuas Hulu, Kab. Sambas, Kab. Sanggau, Kab. Sintang | 1 paket | 1.462,00 | |
| Kegiatan Strategis : Pengadaan obat-obatan untuk cadangan Propinsi | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| Kementerian Kesehatan | | | | | | |
| Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan | Persentase (%) Ketersediaan Obat dan Vaksin | Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat | - | 0,00 | diusulkan ke DAK |
| 5 | Isu Strategis : Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian | Jumlah (Ha) Optimasi Lahan Pertanian (Konservasi dan Optimasi) | Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat | 7920 ha | 16.632,00 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|--|---|--|----------------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Swasembada Daging | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal | Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal | Peningkatan usaha budidaya ternak (klpk) | Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat | 9 klp | 3.060,00 |
| Kegiatan Strategis : Revitalisasi Sektor Perikanan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan | Jumlah Kawasan Perikanan Budidaya yang Memiliki Prasarana dan Sarana yang Memadai | Kalimantan Barat : Provinsi Kalimantan Barat | 13.224954 7322454 | 1.315,00 |
| 6 | Isu Strategis : Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha | | | | | | |
| KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | |
| | Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi | Jumlah kawasan yang dikembangkan sarana dan prasarananya di daerah tertinggal/ perbatasan | Kab. Kayong Utara | 1 kawasan | 7.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Iklim Investasi dan Iklim Usaha | | | | | | |
| KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | | | | | | |
| | Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | Pengembangan Usaha di Kawasan Transmigrasi | Jumlah kawasan yang difasilitasi pengembangan usaha ekonominya di daerah tertinggal/ perbatasan | Kab. Kayong Utara | 1 kawasan | 1.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|--|---|-------------------|--------------|-----------------|
| | Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi | Jumlah kelembagaan/ Pengelola yang terbentuk dan berfungsi di Kimtrans/Kawasan di Daerah Tertinggal/ Perbatasan | Kab. Kayong Utara | 1 kawasan | 500,00 |

B. PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|---|---|--|----------------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Percepatan pembangunan infrastruktur wilayah untuk menunjang peningkatan kesejahteraan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Optimalisasi SPAM IKK | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Jumlah IKK yang Terlayani Infrastruktur Air Minum | Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah | 2 | 15.000,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandar Udara di Pangkalan Bun (Kab. Kotawaringin Barat), Kab. Lamandau dan Kab. Katingan | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas nfrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun | Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah | Pengembangan Bandara | 54.000,00 |

Kegiatan Strategis : Pembangunan fasilitas pelabuhan Batanjung di Kabupaten Kapuas dan

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|---|--|---|--------------|-----------------|
| <i>Sigintong di Kabupaten Seruyan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat | Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP | Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan (dermaga) | Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah | Jalan akses lingkungan, dermaga, dan navigasi | 69.300,00 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan jalan akses MP3EI ruas: Pulang Pisau-Pangkuh-Bahaur (Pelabuhan Bahaur); Sampit-Samuda (Pelabuhan Bagendang); Basarang-Batanjung (Pelabuhan Batanjung); Lingkaran luar Kota Palangka Raya; Buntok-Ampah; Palangka Raya-Buntok; Tumbang Samba-Batas Kalbar</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peingkatan struktur | Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah | penanganan pemeliharaan jalan, peningkatan kapasitas dan pelebaran. | 901.466,00 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km) | Prov. Kalimantan Tengah | 8,8 | 35.000,00 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan PLTS terpusat</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | |
| Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi | Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi | Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan | Prov. Kalimantan Tengah | 3 unit PLTS terpusat | 7.082 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|--------------------------------------|---|--|--------------|-----------------|
| | Energi | Baru Terbarukan | Aneka Energi Baru (Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan) | | | |
| 2 | Isu Strategis: Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan produktivitas usaha mikro Kegiatan Strategis : Penanggulangan Kemiskinan perdesaan Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan KEMENTERIAN SOSIAL | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penang-gulangan Kemiskinan | Penang-gulangan Kemiskinan Perdesaan | Jumlah KK Yang Mendapatkan Akses Berusaha Melalui KUBE | Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah | 120 | 2.400,00 |
| | Kegiatan Strategis : Penanggulangan kemiskinan perkotaan Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan KEMENTERIAN SOSIAL | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan | Jumlah Keluarga Miskin yang mendapatkan bantuan pemberdayaan | Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah | 40 | 812,00 |
| 3 | Isu Strategis : Penurunan tingkat kerusakan hutan dan lahan serta peningkatan kapasitas mitigasi bencana Kegiatan Strategis : Pengendalian kebakaran hutan Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana KEMENTERIAN KEHUTANAN | | | | | |
| | Program Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan | Pengendalian Kebakaran Hutan | Terjaminnya Hotspot (Titik Api) Di Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera | Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah | 20% | 850,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---------|----------|--|--------|--------------|-----------------|
| | Hutan | | dan Pulau Sulawesi Berkurang 20Persentase (%) Setiap Tahun Dari Rerata 2005-2009 | | | |

Kegiatan Strategis : Perubahan tutupan vegetasi dalam rangka program menuju Indonesia Hijau

Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP

| | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------|
| Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. | Jumlah provinsi yang menyelenggarakan pengendalian pencemaran lingkungan (Pemantauan kualitas Udara Perkotaan) | Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah | Sosialisasi tutupan vegetasi (MIH) 2 Kab/Kota (Pulang Pisau dan Kotawaringin Barat) | 400,00 |
|---|--|--|--|---|--------|

4 Isu Strategis : Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian serta peningkatan peran usaha mikro, kecil dan menengah

Kegiatan Strategis : Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi pertanian

Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan

KEMENTERIAN PERTANIAN

| | | | | | |
|--|---|---|--|-------|-----------|
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian | Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan | Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah | 12310 | 12.310,00 |
|--|---|---|--|-------|-----------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|--|--|---|---|---|-----------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Pengelolaan tanaman produksi serealia</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia | Pengembangan, pembinaan dan pengawalan Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah (Paket) | Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah | 1 Kab/Kota | 728,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun/ Ditingkatkan | Kab. Barito Utara, Kab. Barito Timur, Kab. Gunung Mas, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Timur, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah | 2.200 ha (Pembangunan Bendung dan Jaringan Irigasi D.I. Jamut, Pembangunan Jaringan Irigasi D.I. Karau, D.I. Hurung Bunut, Tampa, D.I. Uwang) | 39.500,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan | Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumber Daya Lokal | Peningkatan usaha budidaya ternak (klpk) | Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah | 5 kelompok | 1.700,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-----------------|
| | Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Penyediaan dan pengelolaan air baku | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Kapasitas air baku yang ditingkatkan | Kab. Kapuas, KAb. Kotawaringin timur, Provinsi Kalimantan Tengah | 0.1 m ³ /dt (Pemb. Intake dan Jar. Pipa Transmisi Air baku IKK Mandumai dan IKK Samuda) | 22.250,00 |

5 **Isu Strategis : Percepatan pemenuhan energi melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan dan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM)**

Kegiatan Strategis : Pembinaan, pengawasan, dan pengusahaan aneka energi baru terbarukan

Prioritas Nasional : Prioritas Energi

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| | | | | | |
|--|--|---|--|----------------------|----------|
| Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi | Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan | Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan | Kalimantan Tengah : Provinsi Kalimantan Tengah | 3 unit PLTS terpusat | 7.082,00 |
|--|--|---|--|----------------------|----------|

C. PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|--|---|-------------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Peningkatan Infrastruktur sebagai Peningkatan Local Conectivity | | | | | |
| | Kegiatan Strategis :Pembangunan bandara Syamsudin Noor sebagai Bandara Utama dan peningkatan bandara pendukungnya di Provinsi Kalimantan selatan | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana bandara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Kalimantan Selatan : Kab. Kota Baru | 1 kegiatan | 25.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|--|--|------------|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan dan Dermaga sebagai penghubung alur laut dan sungai | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan | Jumlah lokasi pelabuhan perintis yang dibangun/ditingkatkan/direhabilitasi (lokasi) | Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan | 2 kegiatan | 60.000,00 | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan PLTU Kota Baru | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Energi | | | | | | |
| KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | |
| Program Pengelolaan Ketenagalistrikan | Penyusunan Kebijakan dan Program serta Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Ketenagalistrikan | Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Listrik dan Meningkatnya Ratio Elektrifikasi (Jumlah Kapasitas Pembangkit) | Prov. Kalimantan Selatan | 14 MW | 22.324 | |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas Jalan & Jembatan Nasional | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg dibangun baru | Provinsi Kalimantan Selatan | 1 paket | 577.000,00 | |
| Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah flyover/underpass yang dibangun (M) | Flyover Gatot Subroto, Kalsel | 200,0 | 50.000,00 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|--|--|--|--|-----------------|
| 2 | Isu Strategis : Perkuatan Ketahanan Pangan Dalam Upaya Pencapaian Target Nasional Surplus 10 Juta Ton | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Infrastruktur Irigasi | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/di tingkatkan | Kalimantan Selatan : Kab. Hulu Sungai Selatan | 2.200 ha (Pembangunan jaringan irigasi DI. Amandit Wilayah Kiri) | 11.759,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pengelolaan dan Stabilitas Ketahanan pangan | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan | Semakin Berkembang Model Pemantauan Distribusi Harga dan Cadangan Pangan Dalam Pemantapan Ketahanan Pangan (Laporan) | Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan | 19 gapoktan | 1.957,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan sektor ekonomi dan Ketahanan Pangan dengan peningkatan produksi pertanian, Perkebunan, peternakan disertai pengembangan sistem pembenihan unggul. | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan | Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman Pangan yang Tepat : | Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan | 12 paket | 1.090,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|---|--------------------------------------|--|---|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Sistem Produksi & Sistem Usaha Pembudidayaan Perikanan , Serta Penyediaan Kapal Utk Pengemb. Usaha Perikanan Tangkap. | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Pengembangan Sistem Produksi Pembudidayaan Ikan | Jumlah Benih dengan Mutu terjamin | Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan | 258.199947520 335 | 1.925,00 |
| Kegiatan Strategis : Penyediaan air baku di 3 kawasan : Banjarmasin Metropolitan, Kawasan Regional Banua Enam, dan Kawasan Kapet Batu Licin | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Kapasitas air baku yang ditingkatkan | Kalimantan Selatan : Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kab. Banjar, Kab. Barito Kuala | 0.1 m3/dt (Pemb. Intake, Bang Pelengkap dan Jar. Pipa Transmisi Air Baku SPAM Regional Banjarbakula) | 50.800,00 |
| 3 | Isu Strategis: Peningkatan Angka IPM dan Penanggulangan Kemiskinan Menuju Masyarakat yang Sejahtera | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN SOSIAL | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Pemberian Jaminan Hidup | Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan | 127 | 262,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|---|--|--|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pemantapan Infrastruktur Daerah Tertinggal | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik | | | | | | |
| KEMENTERIAN: PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | | | | | | |
| | Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Daerah Tertinggal | Jumlah kabupaten tertinggal yang memiliki kebijakan di bidang infrastruktur ekonomi | Kab. Hulu Sungai Utara | 1 paket | 590,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan Peningkatan Kualitas Kesehatan menuju Kalimantan Selatan yang Sehat. | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned | Kalimantan Selatan : Kota Banjarmasin | 2 kabupaten | 1.500,00 |
| 4 | Isu Strategis: Perbaikan Kualitas lingkungan dalam usaha menjaga Keseimbangan tiga pilar pembangunan berkelanjutan (Economic Growth, Social Equity, Ecological Sustainability) | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan Konservasi SDA dan perlindungan Hutan serta daya dukung DAS serta Pengembangan Komoditas Tanaman Kehutanan & hasil Hutan Ikutan lainnya | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana | | | | | |
| | KEMENTERIAN KEHUTANAN | | | | | |
| | Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat | Peningkatan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. | Terjaminnya tanaman rehabilitasi lahan kritis, mangrove, gambut, rawa dan sempadan pantai pada DAS Prioritas seluas 1.994.000 ha | Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan | 5604 ha | 794,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|---|---|--|------------------|-----------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana | | | | | | |
| KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Keanekaragaman Hayati dan Pengendalian Kerusakan Lahan | Jumlah provinsi yang menyelenggara kan pengendalian kerusakan lingkungan (Pemantauan tutupan vegetasi melalui Program Menuju Indonesia Hijau(MIH)). | Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan | 1 kegiatan utama | 300,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana | | | | | | |
| KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Pengelolaan dan Pengembangan Konservasi Kawasan dan Jenis | Bertambahnya luas kawasan konservasi perairan | Kalimantan Selatan : Provinsi Kalimantan Selatan | 1 paket | 250,00 |

D. PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|---|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Jembatan Pulau Balang | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jembatan yg dibangun baru (M) | Kota Balikpapan | 1 paket | 230.000,00 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah panjang jalan yang dipreservasi (Km) | Prov. Kalimantan Timur | 1.641 | 383.176,4 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jembatan yang dibangun baru (M) | Kab. Kutai Kartanegara | 400,0 | 40.000,00 |
| | Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan) | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/ peningkatan struktur | Kalimantan Timur : Kab. Berau | 35,7 | 53.600,00 |
| | Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan) | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/ peningkatan struktur | Kalimantan Timur : Kab. Bulungan | 50 % | 8.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|--|------------------------|--------|--------------|-----------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan)</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/ peningkatan struktur | Kab. Kutai Kartanegara | 16 Km | 66.000,00 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan)</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/ peningkatan struktur | Kab. Kutai Barat | 32.1 | 73.500,00 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan)</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/ peningkatan struktur | Kab. Malinau | 52 | 40.000,00 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan)</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/ peningkatan struktur | Kab. Nunukan | - | 42.000,00 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|--|--|---|------------------------------------|---|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/ peningkatan struktur | Kalimantan Timur : Kab. Pasir | 5 | 56.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Lintas Kalimantan Lintas Selatan, Tengah dan Utara (perbatasan) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/ peningkatan struktur | Kalimantan Timur : Kota Balikpapan | - | 15.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Pemenuhan Energi | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | |
| | Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi | Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan | Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru (Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan) | Prov. Kalimantan Timur | 5 unit PLTS terpusat | 32.474 |
| 2 | Isu Strategis : Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan rawa yang dibangun/di tingkatkan | Kalimantan Timur : Kab. Bulungan | 5.100 ha (peningkatan DR. Tanjung Buka) | 25.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|--|--|---|---------------------|-----------------------------|
| 3 | Isu Strategis : Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru Kegiatan Strategis : infrastruktur pendukung kawasan industri Prioritas Nasional : Prioritas Iklim Investasi Dan Iklim Usaha KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut | Bertambahnya fasilitas pelayanan operasional pelabuhan | Kalimantan Timur : Kab. Kutai Timur | Trestle dan dermaga | 90.000,00 |
| 4 | Isu Strategis : Pemerataan Pelayanan Kesehatan yang dapat terjangkau oleh masyarakat Kegiatan Strategis : Biaya operasional kesehatan puskesmas Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat | Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned | Kalimantan Timur : Kab. Berau, Kab. Bulungan, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. Kutai Timur, Kab. Malinau, Kab. Nunukan, Kab. Pasir, Kota Balikpapan, Kota Bontang | 14 kab/kota | 26.500,00 |
| Kegiatan Strategis : Pelayanan kesehatan ibu dan anak Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) | Kalimantan Timur : Kab. Berau, Kab. Bulungan, Kab. Kutai Kartanegara, Kab. Kutai Barat, Kab. | - | 0,00 melalui DAK Kesehatan. |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|--|---|---|--------------|-----------------|
| | | | | Kutai Timur, Kab. Malinau, Kab. Nunukan, Kab. Pasir, Kota Balikpapan, Kota Bontang | | |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Rumah Sakit Pratama | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas) | Jumlah Puskesmas yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin Di Puskesmas | Kalimantan Timur : Kab. Berau | 1 paket | 16.000,00 |
| 5 | Isu Strategis : Pemenuhan Energi | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Energi Baru dan Terbarukan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Energi | | | | | | |
| KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi | Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan | Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan | Kalimantan Timur : Kab. Kutai Barat | 3 Unit | 17.474,00 |
| Kegiatan Strategis : Energi Baru dan Terbarukan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Energi | | | | | | |
| KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi | Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan | Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan | Kalimantan Timur : Kab. Malinau | 2 Unit | 15.000,00 |

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2014

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|------------|-----------|-------------------------|--------------------|---|---------------------------|-------|---------|--|---------------------|
| KALIMANTAN | JALAN | APBN | Kalimantan Barat | Pembangunan Jembatan Tayan | 726 | 2011 | 2014 | Kementerian PU | 147,00 |
| KALIMANTAN | JALAN | APBN | Kalimantan Barat | Penanganan jalan Sekadau - Sanggau - Tayan - Pontianak Kalbar 263,8 KM | 2107 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 101,00 |
| KALIMANTAN | PELABUHAN | APBN | Kalimantan Barat | Pengembangan pelabuhan Pontianak (55 Km) | 116 | 2014 | 2015 | Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut | 53,13 |
| KALIMANTAN | JALAN | APBN | Kalimantan Barat | Penanganan Jalan Pontianak - Sei Pinyuh - Sei Duri, 98,5 km | 560 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 47,00 |
| KALIMANTAN | PELABUHAN | CAMPURAN (KPS) | Kalimantan Selatan | Pembangunan Faspel Laut Pelaihari | 460 | 2014 | 2015 | Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut | 231,00 |
| KALIMANTAN | BANDARA | APBN | Kalimantan Tengah | Bandara Tjilik Riwut | 153 | 2013 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 136,18 |
| KALIMANTAN | JALAN | APBN | Kalimantan Tengah | Penanganan jalan dari Sampit - Sp. Runtu - Pangkalan Bun - Kumai - Sp. Runtu - Runtu - 277,6 Km | 1138 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 74,00 |
| KALIMANTAN | JALAN | APBN | Kalimantan Timur | Pembangunan Jembatan Pulau Balang bentang panjang 1,314 meter | 3600 | 2013 | 2017 | Kementerian PU | 711,00 |
| KALIMANTAN | BANDARA | APBN | Kalimantan Timur | Bandara Juwata-Tarakan | 252 | | | Kementerian Perhubungan | 244,746 |
| KALIMANTAN | JALAN | APBN | Kalimantan Timur | Penanganan Jalan Tj. Selor - Tj. Redeb - Maloy (Kaltim) (523 km) | 3290 | 2011 | 2025 | Kementerian PU | 227,00 |
| KALIMANTAN | JALAN | APBN | Kalimantan Timur | Penanganan jalan batas Propinsi Kalteng Tenggara - Samarinda (408,2 km) | 1880 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 170,00 |

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|------------|-----------|-------------------------|------------------|--|---------------------------|-------|---------|--|---------------------|
| KALIMANTAN | PELABUHAN | CAMPURAN (KPS) | Kalimantan Timur | Pengembangan kapasitas Pelabuhan Maloy (Kalimantan Timur) | 4800 | 2013 | 2018 | Kementerian Perhubungan, Pemprov Kaltim, BUMN | 165,00 |
| KALIMANTAN | PELABUHAN | APBN | Kalimantan Timur | Pembangunan Faspel Laut Maloy/Sangkulirang | 357 | 2015 | | Kementerian Perhubungan, Dirjen Perhubungan Laut | 150,00 |
| KALIMANTAN | JALAN | APBN | Kalimantan Timur | Penanganan jalan Samarinda-Bontang, Sangatta-Maloy (287 km) 304,5 km | 2072 | 2011 | 2015 | Bina Marga | 125,00 |
| KALIMANTAN | BANDARA | CAMPURAN (APBD-SWASTA) | Kalimantan Timur | Percepatan pembangunan bandara Samarinda baru (Pengembangan Destinasi Pulau Parai Kumala - Tenggarong) | 1200 | 2011 | 2015 | Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim | 120 |

BAB 5 PENGEMBANGAN WILAYAH SULAWESI TAHUN 2014

5.1 Kondisi Wilayah Sulawesi Saat Ini

Secara umum kinerja pembangunan ekonomi wilayah Sulawesi tahun 2012 menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Sektor utama yang memiliki peran besar dalam pembentukan PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan pendorong pertumbuhan wilayah adalah sektor pertanian, perdagangan, hotel, dan restoran, serta sektor jasa-jasa. Dalam mendorong perekonomian Di wilayah Sulawesi, Provinsi Sulawesi Selatan paling banyak menarik investasi, baik PMA maupun PMDN. Sejalan dengan itu, perkembangan PDRB per kapita wilayah Sulawesi terus mengalami peningkatan riil, walaupun ketimpangan antarprovinsi masih cukup tinggi.

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT) di wilayah Sulawesi cenderung menurun dan berada jauh di bawah TPT nasional. Fenomena pengangguran lebih menonjol di daerah perkotaan dibandingkan dengan perdesan.

Sebagian besar provinsi di Sulawesi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, kecuali untuk provinsi Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan. Walaupun demikian, laju penurunan kemiskinan di Sulawesi adalah yang tercepat dibandingkan dengan provinsi lain. Sementara itu, terkait dengan aspek pembangunan manusia (2011), seluruh provinsi di Sulawesi menunjukkan perbaikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender(IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Umur Harapan Hidup (UHH), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Namun demikian ketidakmerataan pembangunan manusia antarprovinsi masih terlihat terutama disebabkan oleh belum meratanya jangkauan pelayanan dasar dan rendahnya mutu pelayanan di daerah perdesaan dan pedalaman. Tercatat sampai saat ini masih terdapat 34 Kabupaten Tertinggal di wilayah Sulawesi yang masih memiliki keterbatasan dalam akses terhadap pelayanan dasar publik.

TABEL 5.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH SULAWESI

| Perkembangan Pembangunan | Sulawesi Utara | Sulawesi Tengah | Sulawesi Selatan | Sulawesi Tenggara | Gorontalo | Sulawesi Barat |
|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011 (%) | 7,86 | 9,27 | 8,37 | 10,41 | 7,71 | 9,01 |
| PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2012 (Rp.Ribu) | 20,34483 | 18,70935 | 19,46554 | 15,78571 | 9,562965 | 11,82889 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka, Agustus 2012 (%) | 7,79 | 3,93 | 5,87 | 4,04 | 4,36 | 2,14 |
| Persentase Penduduk Miskin, September 2012 (%) | 7,64 | 14,94 | 9,82 | 13,06 | 17,22 | 13,01 |
| Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 | 76,54 (Peringkat 2) | 71,62 (Peringkat 22) | 72,14 (Peringkat 19) | 70,55 (Peringkat 25) | 70,82 (Peringkat 24) | 70,11 (Peringkat 27) |
| Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010 | 67,97 | 62,42 | 61,99 | 63,87 | 56,98 | 65,31 |
| Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010 | 71,05 | 65,37 | 62,46 | 64,26 | 55,67 | 63,15 |
| Umur Harapan Hidup Tahun 2011 (Tahun) | 72,33 | 66,86 | 70,20 | 68,00 | 67,11 | 68,00 |
| Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 (Tahun) | 8,92 | 8,03 | 7,92 | 8,21 | 7,45 | 7,15 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Di bidang infrastruktur, total panjang jaringan jalan di Sulawesi pada tahun 2011 adalah 7,799.8 km. Namun persentase jalan dengan kondisi mantap menurun dari 97,4, di tahun 2005 menjadi 88 persen di tahun 2011.

Sementara itu, sektor komunikasi dan informatika, hingga tahun 2011 dalam penyediaan jasa akses telekomunikasi telah mencakup 3.471 desa USO dan internet di 799 desa ibukota kecamatan USO.

Sedangkan luas jaringan irigasi Sulawesi (2011) mencapai 1,02 juta hektar atau sekitar 14 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia. Dari total 1,02 juta hektar daerah irigasi tersebut, hanya sekitar 33,56 ribu hektar (3,28 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk, antara lain Waduk Bili-Bili dan Waduk Ponre-Ponre di Sulawesi

Selatan. Dari sisi ketersediaan tampungan air, daya tampung air (storage) perkapita Pulau Sulawesi adalah sebesar 43,24 m³/kapita, lebih kecil dari daya storage perkapita nasional sebesar 52,31 m³/kapita.

Pada tahun 2010 Wilayah Sulawesi memiliki kontribusi terhadap produksi nasional sebesar 10,82 persen, 14,96 persen, 6,84 persen, 2,59 persen, dan 6,89 persen berturut-turut untuk komoditas padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, dan daging sapi. Dalam produksi perikanan nasional wilayah Sulawesi merupakan wilayah yang memberikan kontribusi cukup besar dalam produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap (Tuna). Sementara itu, wilayah Sulawesi memiliki kekayaan cadangan minyak bumi (49,79 MMSTB), gas bumi (4,23 TSCF) dan batubara (233,10 Juta ton). Dari sisi luas kawasan hutan, wilayah Sulawesi memiliki 12,4 juta hektar hutan dengan laju deforestasi rata-rata sekitar 173 ribu hektar/tahun (tahun 2002-2003).

Dalam hal pertahanan dan keamanan, wilayah Sulawesi bagian utara yang berdekatan dengan Filipina sangat rawan dengan tingginya konflik separatisme serta penyusupan jaringan sistemik teroris, penyelundupan senjata api dan barang-barang berbahaya lainnya.

5.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Sulawesi

Tujuan pembangunan wilayah Sulawesi dalam tahun 2014 adalah untuk:

1. Meningkatkan standar dan kualitas hidup masyarakat serta pelayanan publik dasar di Wilayah Sulawesi;
2. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara.
3. Memantapkan peran Wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional;
4. Memantapkan wilayah Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan.
5. Mempertahankan dan merehabilitasi kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40 persen dari luas Wilayah Sulawesi;

6. Memastikan keberlanjutan layanan telekomunikasi dan internet, percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan prasarana air baku bagi PDAM, pembangunan intake dan jaringan air baku, pembangunan dan rehabilitasi waduk, dan menurunkan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman pada penduduk dan jalur transportasi utama.

Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan Wilayah Sulawesi pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya standar dan kualitas hidup serta aksesibilitas masyarakat Sulawesi terhadap pelayanan dasar publik wilayah Sulawesi yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunannya yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, rata-rata lama sekolah, serta usia harapan hidup (Tabel 5.2 dan 5.3).
2. Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut, maupun udara.
3. Meningkatnya kontribusi wilayah Sulawesi sebagai lumbung pangan nasional.
4. Berkembangnya wilayah Sulawesi sebagai pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan.
5. Terjaganya dan terehabilitasinya kawasan lindung hingga mencapai luasan minimal 40 persen dari luas Wilayah Sulawesi;
6. Keberlanjutan dalam layanan telekomunikasi dan internet, pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi di Lalue, Torosik, Randangan, Lambandia Tommo, Kaluku, Paseloreng, dan Kerala kalaroe, pembangunan prasarana air baku di Pilolyanga, pembangunan *intake* dan jaringan air baku di Timboro Kopi, pembangunan dan rehabilitasi waduk, tertanganinya abrasi pantai di Pantai Kakorotan dan Pantai Sampolawa;

TABEL 5.2
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH SULAWESI TAHUN 2014

| Provinsi | Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾ (%) | Kemiskinan ²⁾ (%) | Pengangguran ³⁾ (%) |
|--------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Sulawesi Utara | 7,80 – 8,50 | 3,05 | 4,00– 3,20 |
| Sulawesi Tengah | 9,00 – 10,10 | 12,09 | 2,50 – 2,00 |
| Sulawesi Selatan | 8,50 – 9,30 | 6,29 | 3,60 – 2,50 |
| Sulawesi Tenggara | 8,00 – 9,00 | 14,14 | 2,50 – 2,00 |
| Gorontalo | 8,00 – 9,00 | 19,49 | 2,65 – 2,00 |
| Sulawesi Barat | 12,00 - 13,00 | 10,03 | 2,50 – 1,00 |

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾ Pertumbuhan Ekonomi (*angka sementara*): persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

²⁾ Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

³⁾ Pengangguran (*angka sementara*): persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja

TABEL 5.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,

| Provinsi | Angka Kematian Bayi ¹⁾ | Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾ | Umur Harapan Hidup ³⁾ |
|--------------------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|
| Sulawesi Utara | 9 | 9,12 | 75,42 |
| Sulawesi Tengah | 31 | 8,26 | 71,39 |
| Sulawesi Selatan | 24 | 8,8 | 70,8 |
| Sulawesi Tenggara | 25 | 8,2 | 71,39 |
| Gorontalo | 26 | 7,4 | 69,51 |
| Sulawesi Barat | 24 | 8,7 | 71,01 |

Sumber : Proyeksi Bappenas (*angka sementara*); BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: : rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk berusia 15 tahun ke atas.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

5.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Sulawesi

Pengembangan wilayah Sulawesi Tahun 2014 diarahkan sebagai Pusat Produksi dan pengolahan hasil pertanian (padi, jagung dan sebagainya), perkebunan (kakao, cengkeh, kelapa, kelapa sawit dan sebagainya), perikanan, lumbung pangan nasional, pengembangan gugus (*cluster*) industri makan dan minuman, jalur wisata alam, serta pertambangan nikel.

Untuk mendukung arah pengembangan tersebut, strategi pengembangan yang dilakukan adalah:

1. Mengembangkan Manado – Bitung, Maminasata, Gorontalo, Palu, dan Kendari yang berorientasi pada upaya pembangunan kawasan industri dan jasa skala nasional sebagai sebagai Pusat Produksi dan dan Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan Nasional, dan pengembangan gugus (*cluster*) industri makan dan minuman.
2. Meningkatkan produksi, efisiensi, dan produktifitas tanaman pangan dan perkebunan, serta perikanan tangkap.
3. meningkatkan intensitas perhubungan laut, integrasi jaringan perhubungan udara, dan kapasitas pelayanan pelabuhan Makassar dan Bitung.
4. meningkatkan kapasitas dan integrasi sistem jaringan listrik dan diversifikasi sumber energi primer.
5. Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan ketrampilan kerja, memperluas jangkauan pelayanan kesehatan, dan meningkatkan efektivitas dan sinergi program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

5.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Wilayah Sulawesi

Isu strategis dan kegiatan strategis provinsi di wilayah Sulawesi adalah sebagai berikut:

Provinsi Sulawesi Utara

1. Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan Bendungan Sawangan Kuwil Kab. Minahasa Utara; dan (2) Pembangunan Jaringan Irigasi Sangkub;
2. Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru dengan kegiatan strategis Pembangunan Infrastruktur dalam Kawasan KEK

Tanjung Merah Bitung;

3. Pembangunan Daerah Tertinggal dengan kegiatan strategis Pembangunan Bandara Miangas dan Siau;
4. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dengan kegiatan strategis (1) Kemitraan Bidan dan Dukun; (2) Pengembangan Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE); (3) Pengembangan Puskesmas yang Mampu PONEC (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Dasar) dan RS PONEK (Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergency Komprehensif); (4) Pengembangan Sistem Pencatatan Pelaporan Kesehatan Ibu dan Anak; dan (5) Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
5. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri dengan kegiatan strategis Pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung; Peningkatan Jalan Manado – Tomohon.

Provinsi Sulawesi Tengah

1. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan Bandar Udara Morowali dan Tojo Una-Una; (2) Pembangunan Jaringan Air Minum Regional (Palu, Sigi, Donggala); dan (3) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara di Kota Palu, Kabupaten Banggai, Kabupaten ToliToli, Kabupaten Poso, dan Kabupaten Buol; ;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan kegiatan strategis (1) pembangunan rumah sakit mata regional sulawesi; (2) pemberantasan penyakit schistosomiasis; dan (3) Peningkatan Gizi Anak dan Ibu; ;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan Sekolah Layanan Khusus; (2) Pembangunan Sekolah Layanan Khusus; dan (3) Peningkatan Kualifikasi Guru D3 ke S1; Pembangunan Sekolah Layanan Khusus;
4. Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan Industri Kakao; dan (2)

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung dalam kawasan industri Jalan, Gedung, Pengelolaan kawasan dan pusat inovasi;

5. Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian dengan kegiatan strategis (1) Pengembangan Alat Mesin Pertanian; (2) Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing; Penyediaan Benih Unggul Berkualitas; (3) Penyediaan jaringan Irigasi Desa; dan (4) Percepatan Peananganan Daerah Rawan Pangan.

Provinsi Sulawesi Selatan

1. Meningkatkan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Pertanian dengan kegiatan strategis (1) Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya; (2) Pengembangan budidaya padi, jagung & kedelai & fasilitasi paket kreatif penyuluh; (3) Peningkatan populasi sapi; dan (4) Peningkatan produksi/produktifitas perkebunan; ;
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan dan peningkatan RSUD. Labuang Baji dan RSUD. Sayang Rakyat; Pembangunan Gedung SMK Kejuruan Khusus; dan (2) Pengadaan peralatan untuk RS. Sayang Rakyat dan Labuang Baji;
3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan strategis (1) Pembinaan Sulsel Go Green; dan (2) Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas; ;
4. Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Permukiman untuk perkuatan Konektifitas Regional dan Nasional dengan kegiatan strategis (1) Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya; (2) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Jalan Daerah; dan (3) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Jalan Daerah; Penyediaan akses air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar;
5. Pembangunan Industri Pengolahan dan Peningkatan Pelayanan Publik dengan kegiatan strategis Pembangunan Indsutri Agro pada 24 Kab/Kota; Pembangunan KA Makassar - Parepare.

Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan dengan kegiatan strategis Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah ;
2. Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam dengan kegiatan strategis Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam; ;
3. Percepatan pencapaian Millenium Development Goals dengan kegiatan strategis Percepatan pencapaian Millenium Development Goals; ;
4. Peningkatan Nilai Tambah Industri Unggulan Pariwisata dengan kegiatan strategis Pengembangan Destinasi Wisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Pendukung Pariwisata;
5. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia dengan kegiatan strategis Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia;

Provinsi Gorontalo

1. Perluasan akses dan Peningkatan mutu pendidikan dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan Asrama Siswa dan Guru; (2) Revitalisasi Peralatan Laboratorium SMA; dan (3) Revitalisasi Peralatan Laboratorium SMK
2. Percepatan pembangunan Infrastruktur Strategis di Provinsi Gorontalo dengan kegiatan strategis (1) Pembangunan Waduk dan Pengembangan Jaringan Irigasi (2) Pembangunan Waduk dan pembangunan Ring Road Kota Manado;
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran dengan kegiatan strategis (1) Beasiswa Masyarakat Miskin; dan (2) Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi RTM (Perumahan); .
4. Perluasan akses dan peningkatan pelayanan kesehatan dengan kegiatan strategis (1) Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan yang merata; (2) Meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat; dan (3) Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit; Peningkatan akses pelayanan kesehatan penduduk miskin
5. Ketahanan Pangan dengan kegiatan strategis (1) Intergrasi

Ternak dan Tanaman Perkebunan/Pertanian; (2) Meningkatkan Produksi melalui restrukturisasi Armada; (3) Optimalisasi Industri Benih Jagung; (4) Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar (KAKAO); dan (5) Perluasan Areal Cetak Sawah;

Provinsi Sulawesi Barat

1. Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi dengan kegiatan strategis (1) Orientasi Dan Peningkatan Pelaksanaan Kemitraan Bidan Dan Dukun; (2) Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Mtbs/Mtbm; (3) Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Penanganan Komplikasi Neonatal; (4) Peningkatan Kemampuan Petugas Dalam Penanganan Komplikasi Neonatal; dan (5) Program Perencanaan Persalinan Dan Pencegahan Komplikasi (P4k)
2. Peningkatan prodiktivitas tanaman padi melalui peningkatan input teknologi, pembangunan dan jaringan irigasi serta peningkatan produktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara dan Mamasa dengan kegiatan strategis (1) Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan; (2) Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; (3) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian; dan (4) Pengembangan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya .
3. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, bandar udara dan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas wilayah-wilayah dengan potensi dan produktivitas sda yang tinggi baik dalam lingkup Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional dengan kegiatan strategis 1) Pembangunan Bandar udara dan Pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas; Pembangunan Jembatan; dan (2) Pengembangan dermaga khusus peti kemas pelabuhan internasional belang-belang, serta (3) Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Belang-Belang;
4. Peningkatan akses sanitasi layak dan air minum bagi masyarakat terutama di Kabupaten Mamuju, Mamasa dan Majene dengan kegiatan strategis (1) Pelatihan Survailans Kualitas air dan penyehatan lingkungan; (2) Pendampingan

pemicuan sanitasi total berbasis masyarakat; (3) Pengolahan Air Bersih untuk Layak Komsumsi di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Majene; (4) PIPANISASI/Penyaluran Air Bersih dari sumber Air ke Pemukiman Masyarakat di Kabupaten Majene dan Kabupaten Mamasa

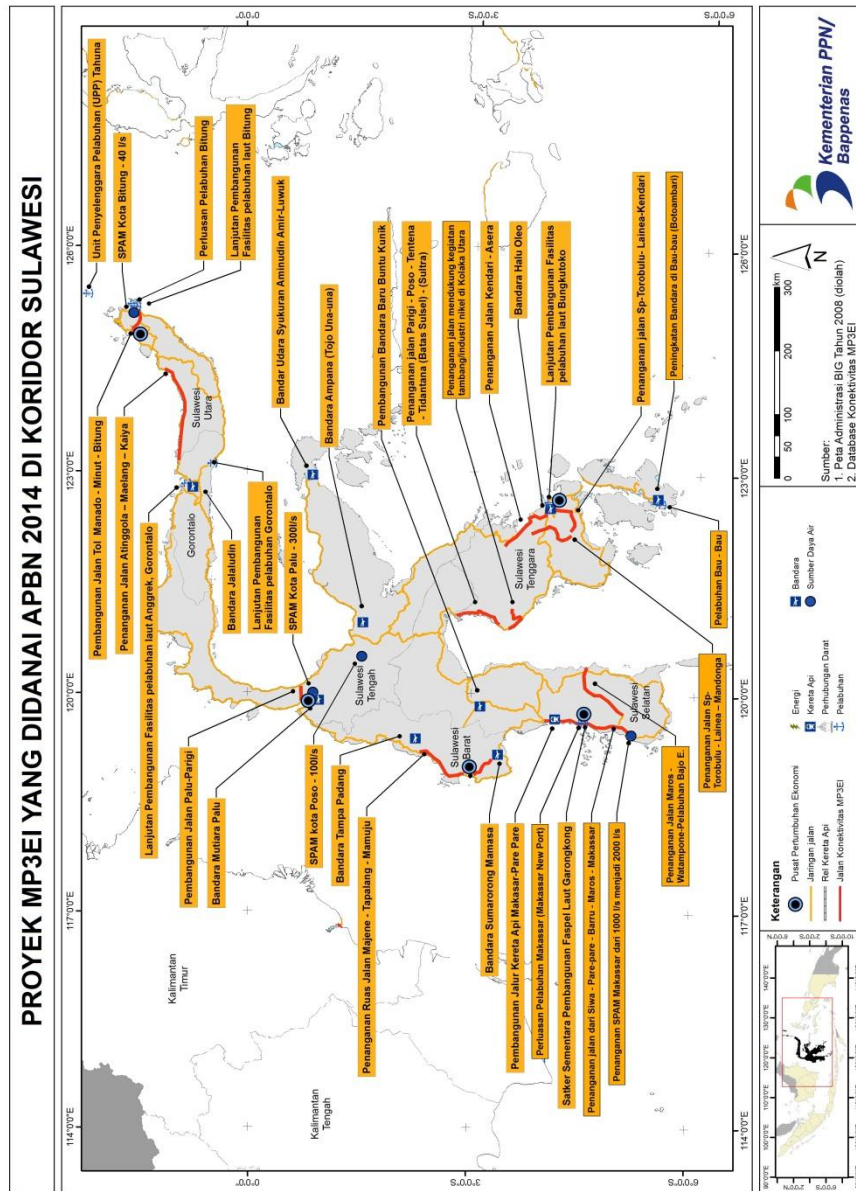
5. Peningkatan akses dan kualitas PAUD dan program Wajar 9 Tahun di seluruh Kabupaten dan akses pendidikan tinggi berkualitas dengan kegiatan strategis Peningkatan akses dan mutu Layanan Pendidikan Dasar;

Uraian isu strategis, program dan kegiatan prioritas, Kementerian/Lembaga, sasaran, target, dan pagu indikatif di setiap provinsi di Sulawesi dapat dilihat dalam **Lampiran Bab 5**

5.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Sulawesi

Arah kebijakan pengembangan MP3EI untuk Koridor Ekonomi Kalimantan memperkuat arah pengembangan wilayah Sulawesi dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2014, yakni mengembangkan Koridor Ekonomi Sulawesi sebagai pusat produksi dan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional.

GAMBAR 5.1 PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI TAHUN 2014 DI WILAYAH SULAWESI



5.6 Implementasi MP3KI di Wilayah Sulawesi

Untuk implementasi MP3KI di wilayah Sulawesi, sebagaimana di wilayah lain, empat (4) lokasi Quick Wins akan ditentukan masing-masing dua (2) lokasi oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

Khusus Untuk Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ditambahkan satu lokasi kecamatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan dilanjutkan tahun 2014.

Lokasi-lokasi yang telah ditentukan Pemerintah Pusat yaitu :

Provinsi Sulawesi Utara

1. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kecamatan Posigadan
2. Kabupaten Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kecamatan Bolang Uki.

Provinsi Sulawesi Tengah

1. Kabupaten Parigi Mautong, Kecamatan Palasa
2. Kabupaten Parigi Mautong, Kecamatan Tinombo
3. Kabupaten Tojo Una-una, Kecamatan Ulubongka
4. Kabupaten Donggala, Kecamatan Banawa Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan

1. Kabupaten Luwu Utara, Kecamatan Sabbang
2. Kabupaten Maros, Kecamatan Cenrana
3. Kabupaten Bulukumba, Kecamatan Kajang

Provinsi Sulawesi Tenggara

1. Kabupaten Kolaka Utara, Kecamatan Batu Putih
2. Kabupaten Buton, Kecamatan Batu Atas.

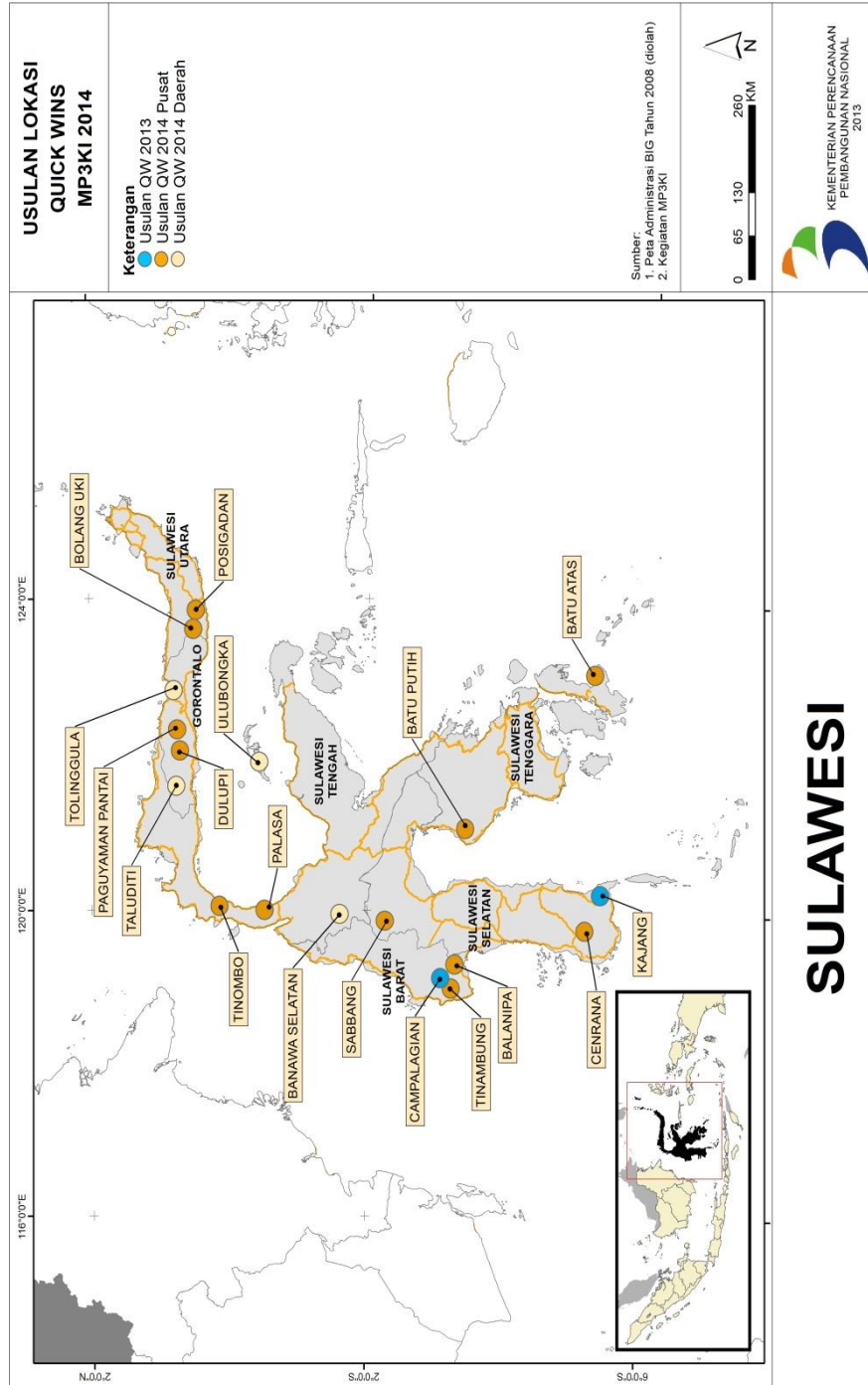
Provinsi Gorontalo

1. Kabupaten Boalemo, Kecamatan Dulupi
2. Kabupaten Boalemo, Kecamatan Paguyaman Pantai
3. Kabupaten Pohuwato, Kecamatan Taluditi
4. Kabupaten Gorontalo Utara, Kecamatan Tolinggula.

Provinsi Sulawesi Barat

1. Kabupaten Poliwari Mandar, Kecamatan Balanipa
2. Kabupaten Poliwari Mandar, Kecamatan Tinambung
3. Kabupaten Polewali Mandar, Kecamatan Campalagian.

GAMBAR 5.2
USULAN LOKASI QUICK WINS MP3KI TA 2014 DI WILAYAH KEPULAUAN SULAWESI



LAMPIRAN BAB 5. Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Pulau Sulawesi tahun 2014

A. PROVINSI SULAWESI UTARA

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|---|--|-------------------------|--------------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Bendungan Sawangan Kuwil Kab. Minahasa Utara</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah buah waduk yang dibangun | Provinsi Sulawesi Utara | 1 buah Waduk Lolak | 18.000,00 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Jaringan Irigasi Sangkub</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kab. Bolaang Mongondow | 2.590 ha | 60.474,00 |
| 2 | Isu Strategis : Pengembangan Fasilitas Pendukung KEK yang telah ditetapkan dan Penetapan KEK Baru | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Infrastruktur dalam Kawasan KEK Tanjung Merah Bitung</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Iklim Investasi Dan Iklim Usaha | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut | Bertambahnya fasilitas pelayanan operasional pelabuhan | Kota Bitung | 1 kegiatan | 77.870,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|---|--|----------------------------------|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Pelabuhan Samudera (FPS) Bitung | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan | Jumlah pengembangan, peningkatan operasional, dan kualitas layanan pelabuhan perikanan UPT Pusat, termasuk di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi) | Kota Bitung | 1 Paket | 40.000,00 |
| 3 Isu Strategis : Pembangunan Daerah Tertinggal | | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandara Miangas dan Siau | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun | Kab. Kepulauan Talaud | 1 kegiatan | 20.000,00 |
| KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun | Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro | 1 kegiatan | 20.000,00 |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kab. Sangihe | 1 Paket | 33.710,00 |
| 4 Isu Strategis : Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi | | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Kemitraan Bidan dan Dukun | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan | Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan | Provinsi Sulawesi | 1 paket | 1.489,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|---|--|-------------------------|--------------|-----------------|
| | dan Anak | Reproduksi | Pn) | Utara | | |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Puskesmas dengan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Antenatal (Cakupan K4) | Provinsi Sulawesi Utara | 1 paket | 235 |
| 5 | Isu Strategis : Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalur KA Manado-Bitung | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Perkeretaapian | Pembangunan jalur ganda Kereta Api | Jumlah Panjang Jalur Ganda KA yang dibangun (Km) | Kota Manado | Study | 10.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Jalan Manado - Tomohon | | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kab. Minahasa | 1 Paket | 12.900,00 |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kota Manado | 1 Paket | 12.900,00 |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kota Tomohon | 1 Paket | 12.900,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|--|-------------------------|--------|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Bebas Hambatan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan bebas hambatan yang dibangun (Km) | Jalan Tol Manado-Bitung | 7,7 Km | 150.000,00 | |

B. PROVINSI SULAWESI TENGAH

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|--|--------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandar Udara Morowali dan Tojo Una-Una | | | | | | |
| Prioritas Bidang : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun | Kab. Morowali | 1 Bandara | 30.000,00 | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara Baru yang Dibangun | Bandara Tojo unauna | 1 Bandara | 30.000,00 | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Jaringan Air Minum Regional (Palu, Sigi, Donggala) | | | | | | |
| Prioritas Bidang : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem | Jumlah Kawasan Regional Lintas Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Air | Provinsi Sulawesi Tengah | 1 kawasan | 52.000,00 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|---|---|--------------------------|--------------|-----------------|
| | | Penyediaan Air Minum Minum | | | | |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang direkonstruksi (Km) | Ruas Luwu-Batu-Mailang | 5 Km | 40.000,0 |
| 2 | Isu Strategis : peningkatan kualitas sumber daya manusia | | | | | |
| Kegiatan Strategis : pembangunan rumah sakit mata regional sulawesi | | | | | | |
| Prioritas Bidang : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | Jumlah Kota yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) | Provinsi Sulawesi Tengah | 5 paket | 100.000,00 |
| Kegiatan Strategis : pemberantasan penyakit schistosomiasis | | | | | | |
| Prioritas Bidang : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang | Prosentase kasus zoonosa yang ditemukan, ditangani sesuai standar | Provinsi Sulawesi Tengah | 3 paket | 524,39 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Gizi Anak dan Ibu | | | | | | |
| Prioritas Bidang : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Gizi Masyarakat | Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Provinsi Sulawesi Tengah | 2 paket | 2.440,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|--|--|--------------------------|--------------|-----------------|
| 3 | Isu Strategis : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Sekolah Layanan Khusus | | | | | |
| | Prioritas Bidang : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal | Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | Rasio Tutor dan Peserta Didik Paud Nonformal | Provinsi Sulawesi Tengah | 1 Paket | 1.860,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Sekolah Layanan Khusus | | | | | |
| | Prioritas Bidang : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SDKependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | APM SD/SDLB/PAKET A | Provinsi Sulawesi Tengah | 1324 | 35.748,00 |
| 4 | Isu Strategis : Peningkatan Produktifitas Sektor Pertanian | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing | | | | | |
| | Prioritas Bidang : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | |
| | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian | Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian | Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (unit) | Provinsi Sulawesi Tengah | 1 paket | 12.100,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|---|---|--------------------------|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Penyediaan Benih Unggul Berkualitas | | | | | | |
| Prioritas Bidang : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan | Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk kawasan SLPTT dan non SLPTT (BLBU Padi (ton) | Provinsi Sulawesi Tengah | 79.000 ha | 13.327,00 |
| Kegiatan Strategis : Penyediaan jaringan Irigasi Desa | | | | | | |
| Prioritas Bidang : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian | Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan | Provinsi Sulawesi Tengah | 12235 ha | 12.235,00 |
| Kegiatan Strategis : Percepatan Peananganan Daerah Rawan Pangan | | | | | | |
| Prioritas Bidang : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | Jumlah Penanganan daerah/lokasi Rawan Pangan | Provinsi Sulawesi Tengah | 31 desa | 1.809,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|-----------------|--------------------------|-------------------|--------|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Alat Mesin Pertanian | | | | | | |
| Prioritas Bidang : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| Program | Pengelolaan | Jumlah (unit) alat | Provinsi | | | |
| Penyediaan dan | Sistem | dan mesin | Sulawesi | | | |
| Pengembangan | Penyediaan dan | pertanian yang | Tengah | | | |
| Prasarana dan | Pengawasan Alat | efisien dan | | | | |
| Sarana Pertanian | Mesin Pertanian | berkelanjutan di lokasi. | | | | |

C. PROVINSI SULAWESI SELATAN

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|--|-------------------|-------------------|----------|--------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Meningkatkan Produksi dan Kualitas Hasil Produksi Pertanian | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program | Pengelolaan | Jumlah buah | Kab Tana | 4 buah | 16.000,00 | |
| Pengelolaan | dan Konservasi | embung/Situ/bang | Toraja, Kab. | | | |
| Sumber Daya Air | Waduk, | unan penampung | Luwu, Kab. | | | |
| | Embung, Situ | air lainnya yang | Jeneponto, | | | |
| | serta | dibangun | Kab. | | | |
| | Bangunan | | Enrekang | | | |
| | Penampung | | | | | |
| | Air Lainnya | | | | | |
| Program | Pengelolaan | Jumlah buah waduk | Kab. Gowa | 2 buah | 270.684,00 | |
| Pengelolaan | dan Konservasi | yang dibangun | dan Kota | (Waduk | | |
| Sumber Daya Air | Waduk, | | Makassar | Kelara | | |
| | Embung, Situ | | | Karalloe | | |
| | serta | | | dan | | |
| | Bangunan | | | Waduk | | |
| | Penampung | | | Tunggu | | |
| | Air Lainnya | | | Nipa- | | |
| | | | | Nipa) | | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|---|---------------------------|------------|--------------|-----------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Pengembangan budidaya padi, jagung & kedelai & fasilitasi paket kreatif penyuluh</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai | Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Luas Areal Penerapan Budidaya Serealia yang Tepat dan Berkelanjutan Termasuk untuk Bahan Bakar Nabati (Ribu Ha) : Sl - Ptt Padi Non Hibrida (Ribu Ha) | Provinsi Sulawesi Selatan | 384.500 Ha | 197.745,00 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan populasi sapi</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal | Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendaya-gunaan Sumber Daya Lokal | Peningkatan usaha budidaya ternak (klpk) | Provinsi Sulawesi Selatan | 15 Klp | 4.650,00 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan produksi/produktifitas perkebunan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim | Swasembada Tebu Nasional : Tebu | Provinsi Sulawesi Selatan | 2.300 ha | 32.468,17 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|--|---------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim | Swasembada Tebu Nasional : Tebu | Kab. Bone | 950 ha | 13.410,76 |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim | Swasembada Tebu Nasional : Tebu | Kab. Gowa | 700 ha | 9.881,62 |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim | Swasembada Tebu Nasional : Tebu | Kab. Takalar | 650 Ha | 9.175,79 |

2 Isu Strategis : Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan

Kegiatan Strategis : Pembangunan dan peningkatan RSUD. Labuang Baji dan RSUD. Sayang Rakyat

Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan

KEMENTERIAN : KESEHATAN

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------|------------|
| Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | Jumlah Kota yang Memiliki RS Standar Kelas Dunia (World Class) | Kota Makassar | 5 Kab/Kota | 112.000,00 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|------------|------------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|--|--|---------------------------|--------------|-----------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Gedung SMK Kejuruan Khusus</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | SMK menyediakan layanan pembinaan pengembangan kewirausahaan | Provinsi Sulawesi Selatan | 6 gedung | 10.800,00 |
| 3 | <i>Isu Strategis : Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup</i> | | | | | |
| <i>Kegiatan Strategis : Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan Bencana | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KEHUTANAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat | Berkurangnya Lahan Kritis Melalui Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan | Terjaminnya tanaman rehabilitasi hutan DAS prioritas seluas 500.000 ha | Provinsi Sulawesi Selatan | 10800 ha | 750 |
| 4 | <i>Isu Strategis : Pembangunan Infrastruktur Wilayah dan Permukiman untuk perkuatan Konektifitas Regional dan Nasional</i> | | | | | |
| <i>Kegiatan Strategis : Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERUMAHAN RAKYAT | | | | | | |
| | Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya | Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya | Provinsi Sulawesi Selatan | 5600 | 51.500,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|--------------------------------|---------------------------|---------|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Jalan Daerah | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg dibangun baru | Provinsi Sulawesi Selatan | 1 paket | 338.090,00 | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg dibangun baru | Kab. Takalar | 1 paket | 3.860,00 | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg dibangun baru | Kota Makassar | 1 paket | 32.000,00 | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg dibangun baru | Kab. Toraja Utara | 1 paket | 21.000,00 | |
| Kegiatan Strategis : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional dan Jalan Daerah | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg dibangun baru | Provinsi Sulawesi Selatan | 10 unit | 12.000,00 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|---|--|---------------------------------|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Penyediaan akses air bersih dan akses terhadap sanitasi dasar | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum | Jumlah Kawasan Regional Lintas Kabupaten/Kota yang Terlayani Infrastruktur Air Minum | Provinsi Sulawesi Selatan | 1 Kawasan | 30,00 |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Kapasitas air baku yang ditingkatkan | Kota Makassar, Kab. Tana Toraja | 0.6 m3/dt | 58.505,00 |

5 Isu Strategis : Pembangunan Industri Pengolahan dan Peningkatan Pelayanan Publik

Kegiatan Strategis : Pembangunan KA Makassar - Parepare

Prioritas Nasional : Iklim Investasi Dan Iklim Usaha

KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN

| | | | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------|------------|----------|
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian | Pembangunan dan Pengelolaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Kereta Api | Panjang Km Jalur KA Baru yang Dibangun Termasuk Jalur Ganda industri | Provinsi Sulawesi Selatan | 2 kegiatan | 3.700,00 |
|--|---|--|--|---------------------------|------------|----------|

D. PROVINSI SULAWESI TENGGARA

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|---|--|------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur dasar untuk menunjang peningkatan kesejahteraan(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana wilayah | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat pelebaran | Kab. Konawe Utara | 1 paket | 114.760,00 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jembatan yang dibangun (M) | Jembatan Wanggu | 100,0 | 40.000,0 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jembatan yang dibangun (M) | Jembatan Teluk Kendari | 200,0 | 50.000,0 |
| 2 | Isu Strategis : Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Peningkatan pengelolaan dan nilai tambah sumberdaya alam | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | |
| | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian | Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian | Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit) | Kab. Konawe | 1 paket | 7.345,00 |
| | KEMENTERIAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| | Program Peningkatan Daya | Fasilitasi Pengembangan | Lokasi sara dan prasarana | Provinsi Sulawesi | 2 unit | 3.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|--|---|----------------------------|------------------|-----------------|
| | Saing Produk Perikanan Menengah Hasil Pertanian | Industri Pengolahan Hasil Perikanan Menengah Wilayah III | pengolahan hasil perikanan yang dikembangkan dan dibina | Tenggara | | |
| KEMENTERIAN : LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Pengendalian Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut | Jumlah kebijakan, peraturan, pedoman, model implementasi dan rekomendasi kebijakan konservasi dan pengendalian kerusakan pesisir dan laut | Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 kegiatan utama | 400 |
| 3 | Isu Strategis : Percepatan pencapaian Millenium Development Goals | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Percepatan pencapaian Millenium Development Goals | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | |
| KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | Program Pendidikan Dasar | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD | JUMLAH SISWA SD/SDLB PENERIMA SUBSIDI SISWA MISKIN | Provinsi Sulawesi Tenggara | 85552 Siswa SD | 38.498,00 |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak | Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Provinsi Sulawesi Tenggara | 4 paket | 1.368,00 |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan | Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes | Provinsi Sulawesi Tenggara | 3 paket | 2.415,10 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|--|--|----------------------------|--------------|-----------------|
| | | Reproduksi | Terlatih (Cakupan Pn) | | | |
| KEMENTERIAN : PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | | | | | | |
| | Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal | Jml kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan pengembangan infrastruktur pendidikan | Kab. Buton | 1 paket | 750 |
| KEMENTERIAN : PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | | | | | | |
| | Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Pendidikan Daerah Tertinggal | Jumlah kabupaten daerah tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan pengembangan infrastruktur pendidikan | Kab. Kolaka | 1 paket | 1.050,00 |
| 4 | Isu Strategis : Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Peningkatan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola | | | | | |
| KEMENTERIAN : KEHUTANAN | | | | | | |
| | Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan | Peningkatan Pelayanan Penyuluhan Kehutanan | kelompok masyarakat produktif mandiri | Provinsi Sulawesi Tenggara | 4 kelompok | 810,95 |
| KEMENTERIAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Pengembangan SDM Kelautan dan | Penyuluhan Kelautan dan Perikanan | Jumlah kelompok pelaku utama/usaha | Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 paket | 965 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|---|--|----------------------------|--------------|-----------------|
| | Perikanan | | yang disuluh | | | |
| KEMENTERIAN : KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM | Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah | Terfasilitasinya dukungan pemberdayaan koperasi dan UKM di daerah | Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 paket | 3.506,00 |
| 5 | Isu Strategis : Peningkatan Nilai Tambah Industri Unggulan Pariwisata | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan Destinasi Wisata | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Perekonomian | | | | | |
| KEMENTERIAN : PARIWISATA DAN PEREKONOMIAN KREATIF | | | | | | |
| | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata | IKK : Jumlah fasilitasi pengembangan daya tarik wisata | Kab. Wakatobi | 1 paket | |
| | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata | IKK : Jumlah fasilitasi pengembangan daya tarik wisata | Kab. Buton | 1 paket | 10.500 |
| | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata | IKK : Jumlah industri yang difasilitasi untuk terciptanya kemudahan pelayanan wisata | Kota Kendari | 1 paket | |
| | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Kegiatan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata | IKK : Jml industri yang difasilitasi utk terciptanya kemudahan pelayanan wisata | Kab. Wakatobi | 1 paket | |
| | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Kegiatan Peningkatan Promosi Pariwisata Luar Negeri | IKK : Jumlah peserta bimbingan teknis promosi pariwisata luar negeri | Kab. Wakatobi | 1 paket | 2.000 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|--|---|----------------------------|--------------|-----------------|
| | Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif | IKK : Jumlah SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif | Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 paket | 1.000 |

Kegiatan Strategis : Pengembangan ekonomi kreatif pendukung pariwisata

Prioritas Nasional : Kebudayaan, kreativitas dan iptek

KEMENTERIAN : PARIWISATA DAN PEREKONOMIAN KREATIF

| | | | | | | |
|--|--|---|---|----------------------------|---------|-------|
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya | Kegiatan Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik | IKK : Jumlah pengembangan ruang kreatif | Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 paket | 2.000 |
| | Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain, dan Iptek | kegiatan : Pengembangan Desain dan Arsitektur | IKK : Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi untuk mengembangkan kemampuan kreasi dan produksi karya kreatif desain dan arsitektur (orang) | Provinsi Sulawesi Tenggara | 1 paket | 1.000 |

E. PROVINSI GORONTALO

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|---|---|--------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Perluasan akses dan Peningkatan mutu pendidikan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Asrama Siswa dan Guru | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA | Penyediaan Asrama Peserta Didik | Provinsi Gorontalo | 1 | 1.500,00 |
| | Kegiatan Strategis : Revitalisasi Peralatan Laboratorium SMA | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA | Sma Menerapkan Snp Dengan Akreditasi Minimal B | Provinsi Gorontalo | 0 | Melalui DAK |
| | Kegiatan Strategis : Revitalisasi Peralatan Laboratorium SMK | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | Smk Memiliki Sarana Dan Prasarana Pendidikan Yang Memenuhi Standar Sarana Dan Prasarana Smk | Provinsi Gorontalo | 0 | Melalui DAK |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----------|---|---|--|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| 2 | Isu Strategis : Percepatan pembangunan Infrastruktur Strategis di Provinsi Gorontalo | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Waduk dan Pengembangan Jaringan Irigasi</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kab. Pohuwato | 1 buah Bendung Randangan | 46.312,00 |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah buah waduk yang dibangun | Kab. Bone Bolango | 1 laporan DED Waduk Dumbaya Bulan | 1.500,00 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Ring Road Gorontalo</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan | Jumlah jalan yang dibangun (Km) | Kota Gorontalo | Ring Road | 70.000,0 |
| | KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Prog. Pengelolaan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pemb., Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Provinsi Gorontalo | 1 kegiatan | 129.757,0 0 |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pemb, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara baru yang dibangun | Bandara Djalaluddin | 1 kegiatan | 22.500,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----------|--|--|---|--------------------|--------------|-----------------|
| 3 | Isu Strategis : Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Beasiswa Masyarakat Miskin | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA | beasiswa untuk peserta didik berprestasi | Provinsi Gorontalo | 5311 | 5.337,50 |
| | Kegiatan Strategis : Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi RTM (Perumahan) | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Penanggulangan Kemiskinan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERUMAHAN RAKYAT | | | | | |
| | Program Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman | Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Swadaya | Jumlah Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Baru Perumahan Swadaya | Provinsi Gorontalo | 1000 | 15.000,00 |
| 4 | Isu Strategis : Perluasan akses dan peningkatan pelayanan kesehatan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Meningkatkan kualitas SDM Kesehatan yang merata | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) | Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM Kesehatan | Jumlah SDM Kesehatan di fasilitas kesehatan yang telah ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan | Provinsi Gorontalo | 2 paket | 1.833,00 |
| | Kegiatan Strategis : Menurunkan Angka Kesakitan Akibat Penyakit | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Pengendalian Penyakit Menular Langsung | Persentase penduduk 15 tahun keatas menurut pengetahuan tentang HIV dan AIDS | Provinsi Gorontalo | 1 paket | 84 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|---|---|--------------------|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Peningkatan akses pelayanan kesehatan penduduk miskin | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan | Persentase (%) satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi keuangan dan pemerintahan sesuai ketentuan | Provinsi Gorontalo | 1 paket | 1207,4 |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | Jumlah TT Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan (peningkatan sarana prasarana pelayanan RS) | Provinsi Gorontalo | 1 paket | 20.000,00 |
| 5 | Isu Strategis : Ketahanan Pangan | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Intergrasi Ternak dan Tanaman Perkebunan/Pertanian | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal | Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Lokal | Peningkatan produksi bibit (ekor) | Provinsi Gorontalo | 1 kelompok | 320 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|---|--|--------------------|--------------|-----------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Meningkatkan Produksi melalui restrukturisasi Armada</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan | Jumlah pengadaan kapal perikanan > 30 GT (unit) | Provinsi Gorontalo | 7 | 10.500,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Rempah dan Penyegar (KAKAO)</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Prog. Peningk Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar | Luas areal tanaman rempah dan penyegar (ribu hektar) | Provinsi Gorontalo | 100 Ha | 1.192,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Perluasan Areal Cetak Sawah</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian | Jumlah (Ha) Perluasan Areal Cetak Sawah | Provinsi Gorontalo | 450 | 4.500,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Optimalisasi Industri Benih Jagung</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan | Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan | Lembaga Perbenihan Tanaman Pangan yang Dibina di Lokasi Penerapan Budidaya Tanaman | Provinsi Gorontalo | 1 paket | 5.800 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|----------|---------------------------------|--------|--------------|-----------------|
| | Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | | Pangan yang Tepat : Bbi (Balai) | | | |

F. PROVINSI SULAWESI BARAT

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|---|--|-------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : ORIENTASI DAN PENINGKATAN PELAKSANAAN KEMITRAAN BIDAN DAN DUKUN | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN: Kesehatan | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Persetanse satuan kerja yang menyelenggarakan administrasi pemerintahan sesuai ketentuan | Provinsi Sulawesi Barat | 1 paket | 660 |
| | Kegiatan Strategis : PENINGKATAN KEMAMPUAN PETUGAS DALAM PENANGANAN KOMPLIKASI NEONATAL | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN: Kesehatan | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) | Provinsi Sulawesi Barat | 1 paket | 1.670,0 0 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|--|---|--|-------------------------|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : PROGRAM PERENCANAAN PERSALINAN DAN PENCEGAHAN KOMPLIKASI (P4K) | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN: Kesehatan | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Memberikan Pelayanan Kb Sesuai Standar | Kab. Mamuju | 1 paket | 385 |
| 2 | Isu Strategis : Peningkatan prodiktivitas tanaman padi melalui peningkatan input teknologi, pembangunan dan jaringan irigasi serta peningkatan peningkatan produktivitas budidaya perikanan di Kabupaten Mamuju, Mamuju Utara dan Mamasa. | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN: KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawakan Kapal Perikanan | Jumlah kapal 10 – 30 GT yang terbangun (unit) | Provinsi Sulawesi Barat | 1 | 750 |
| Kegiatan Strategis : Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN: KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Penataan Ruang dan Perencanaan Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil | Jumlah lokasi laut, pesisir dan pulau-pulau Kecil di Wilayah Provinsi/Kab/Kota yang memiliki dokumen | Provinsi Sulawesi Barat | 1 | 300 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|---|---|-----------|--------------|-----------------|
| | | | Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil | | | |
| Kegiatan Strategis : Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN: PERTANIAN | | | | | | |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian | Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JITUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan | Kab. Mamuju | 10.600 Ha | 10.600,00 | |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN: KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | |
| Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudidayaan Ikan | Jumlah pengembangan kawasan minapolitan berbasis perikanan budidaya (Kab/Kota) | Kab. Mamuju | 2 lokasi | 1.065,00 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|---|---|--|--|-----------------|
| 3 | Isu Strategis : Pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, jembatan, bandar udara dan pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas wilayah-wilayah dengan potensi dan produktivitas sda yang tinggi baik dalam lingkup Provinsi, Regional, Nasional dan Internasional. | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandar udara dan Pelabuhan untuk meningkatkan konektivitas | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN: PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Provinsi Sulawesi Barat | Kegiatan lanjutan fasilitas sisi udara | 21.200,00 |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara baru yang dibangun | Provinsi Sulawesi Barat : Bandara Sumarorong | 1 Bandara | 10.000,00 |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan | Pembangunan Pelabuhan Laut | Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan | Provinsi Sulawesi Barat : Pelabuhan Belang-Belang | 1 lokasi | 50.000,00 |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan | Pembangunan Pelabuhan Laut | Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan | Provinsi Sulawesi Barat : Pelabuhan Laut Palipi | 1 lokasi | 5.000,00 |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan | Pembangunan Pelabuhan Laut | Jumlah lokasi pembangunan pelabuhan | Provinsi Sulawesi Barat : Pelabuhan Laut Pompongan | 1 lokasi | 15.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---------|----------|----------------------|--------|-----------------|--------------------|
|----|---------|----------|----------------------|--------|-----------------|--------------------|

Pengerukan

Kegiatan Strategis : Pembangunan Jembatan

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN: PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-------------------------------|--|---|----------------------|---------|-----------|
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan | Jumlah Dokumen Pengaturan & Penyiapan Pembiayaan Jalan Daerah & Dana Masyarakat | Kab. Mamuju | 1 paket | 35.280,00 |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pengaturan, Pembinaan, Perencanaan, Pemrograman dan Pembiayaan Penyelenggaraan Jalan | Jumlah Dokumen Pengaturan & Penyiapan Pembiayaan Jalan Daerah & Dana Masyarakat | Kab. Polewali Mandar | 1 paket | 1.410,00 |

Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN: PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-----------------------|---|---|-------------------------------|--------|-----------|
| Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km) | Jalan Salubatu-Mamasa | 6,3 Km | 50.000,00 |
| Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/ pelebaran (Km) | Jalan Mamuju-Bts. Kab. Majene | 1,5 Km | 12.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|-------------------------------------|--|-------------------|--|-----------------|
| 4 | Isu Strategis : Peningkatan akses sanitasi layak dan air minum bagi masyarakat terutama di Kabupaten Mamuju, Mamasa dan Majene. | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pelatihan Surveilans Kualitas air dan penyehatan lingkungan | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN: KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penyehatan Lingkungan | Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas | Kab. Majene | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penyehatan Lingkungan | Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas | Kab. Mamuju | 1 paket | 2.990,00 |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penyehatan Lingkungan | Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas | Kab. Mamasa | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penyehatan Lingkungan | Persentase (%) Penduduk yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas | Kab. Mamuju Utara | | |
| | Kegiatan Strategis : Pengolahan Air Bersih untuk Layak Komsumsi di Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju Utara dan Kabupaten Majene | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN: PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Kapasitas air baku yang ditingkatkan | Kab. Mamuju Utara | 0.03 m ³ /detik (Pembangunan intake dan Jaringan Pipa | 8.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|---|--|-------------|---|--------------------|
| | | | | | Transmisi Air Baku Bambaloka) | |
| <i>Kegiatan Strategis : PIPANISASI/PENYALURAN AIR BERSIH DARI SUMBER AIR KE PEMUKIMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MAJENE DAN KABUPATEN MAMASA</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN: PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Kapasitas air baku yang ditingkatkan | Kab. Majene | 0.03 m ³ /detik (Pembangunan intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Tammeroddo) | 5.000,00 |

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2014

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | Provinsi | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | Kebutuhan APBN 2014 |
|----------|-----------|-------------------------|-------------------|--|---------------------------|-------|---------|-----------------------------------|---------------------|
| SULAWESI | JALAN | CAMPURAN (KPS) | Sulawesi Utara | Pembangunan Jalan Tol Manado - Minut - Bitung/Pembangunan Jalan Express Way Manado - Bitung - 46 km | 3152 | 2012 | 2025 | BPJT | 480,00 |
| SULAWESI | PELABUHAN | Campuran (APBN-BUMN) | Sulawesi Utara | perluasan Pelabuhan Bitung (Pelabuhan hub Bitung) | 1000 | 2013 | 2017 | Kementerian Perhubungan & Pelindo | 172,50 |
| SULAWESI | JALAN | APBN | Sulawesi Utara | Penanganan Jalan Atinggola - Maelang - Kaiya (Sulut) 121.5 km | 1444 | 2011 | 2020 | Kementerian PU | 154,00 |
| SULAWESI | PELABUHAN | APBN | Sulawesi Utara | Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Tahuna | 215 | 2011 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 87,00 |
| SULAWESI | AIR | CAMPURAN (KPS) | Sulawesi Utara | SPAM Kota Bitung - 40 l/s | 15 | 2013 | 2014 | Cipta Karya, Kementerian PU | 7,50 |
| SULAWESI | JALAN | APBN | Sulawesi Tenggara | Penanganan jalan mendukung kegiatan tambang / industri nikel di Kolaka Utara menuju ke Pelabuhan Lasusua - batas sulsel 279.8 km | 1785 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 208,00 |
| SULAWESI | PELABUHAN | APBN | Sulawesi Tenggara | Lanjutan Pembangunan Fasilitas pelabuhan laut Pantoloan, Sulawesi Tenggara | 260 | 2011 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 120,00 |
| SULAWESI | BANDARA | APBN | Sulawesi Tenggara | Bandara Halu Oleo | 156 | | | Kementerian Perhubungan | 109,85 |
| SULAWESI | PELABUHAN | APBN | Sulawesi Tenggara | Lanjutan Pembangunan Fasilitas pelabuhan laut Bungkutoko, Sulawesi Tenggara | 186 | 2011 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 102,00 |
| SULAWESI | PELABUHAN | APBN | Sulawesi Tenggara | Pelabuhan Bau - Bau | 244 | 2011 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 60,00 |
| SULAWESI | JALAN | APBN | Sulawesi Tenggara | Penanganan jalan Parigi - Poso - Tentena - Tidantana (Batas Sulsel) - (Sultra) 298 KM | 571 | 2011 | 2025 | Kementerian PU | 49,00 |

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | Provinsi | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | Kebutuhan APBN 2014 |
|----------|-----------|-------------------------|-------------------|--|---------------------------|-------|---------|----------------------------------|---------------------|
| SULAWESI | JALAN | APBN | Sulawesi Tenggara | Penanganan jalan Sp-Torobulu-Lainea-Kendari 127 km | 487 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 49 |
| SULAWESI | JALAN | APBN | Sulawesi Tenggara | Penanganan Jalan Sp-Torobulu - Lainea - Mandonga (sultra) 135.1 km | 485 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 49,00 |
| SULAWESI | JALAN | APBN | Sulawesi Tenggara | Penanganan Jalan Kendari - Asera 125.4 km | 595 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 48,00 |
| SULAWESI | BANDARA | APBN | Sulawesi Tenggara | Peningkatan Bandara di Bau-bau (Botoambari) | 145 | 2013 | 2015 | Kementerian Perhubungan | 37,0 |
| SULAWESI | BANDARA | APBN | Sulawesi Tengah | Bandara Mutiara Palu | 216 | 2013 | 2015 | Kementerian Perhubungan | 82,85 |
| SULAWESI | BANDARA | APBN | Sulawesi Tengah | Bandara Ampana (Tojo Una-una) | 170 | 2013 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 80,059 |
| SULAWESI | JALAN | CAMPURAN (APBN-APBD) | Sulawesi Tengah | Pembangunan Jalan Palu-Parigi (37,4km) | 1000 | 2011 | 2017 | Kementerian PU & Pemprov. Sulsel | 40 |
| SULAWESI | BANDARA | APBN | Sulawesi Tengah | Bandar Udara Syukuran Aminudin Amir-Luwuk | 102 | 2013 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 39,22 |
| SULAWESI | AIR | CAMPURAN (KPS) | Sulawesi Tengah | SPAM kota Poso - 100l/s | 40 | 2013 | 2014 | Cipta Karya, Kementerian PU | 20,00 |
| SULAWESI | AIR | CAMPURAN (KPS) | Sulawesi Tengah | SPAM Kota Palu - 300l/s | 38 | 2013 | 2014 | Cipta Karya, Kementerian PU | 20,00 |
| SULAWESI | AIR | SWASTA | Sulawesi Selatan | Penanganan SPAM Makassar dari 1000 l/s menjadi 2000 l/s Catatan: 1. BOT 2. Sumber Bendungan Bili-Bili tersedia 3000 l/s dengan pipa) | 240 | 2013 | 2014 | BPPSPAM | 136,50 |
| SULAWESI | JALAN | APBN | Sulawesi Selatan | Penanganan jalan dari Siwa - Pare-pare - Barru - Maros - Makassar. (Sulsel) (312.9 KM) | 2657 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 125,00 |
| SULAWESI | PELABUHAN | APBN | Sulawesi Selatan | Satker Sementara Pembangunan Faspel Laut Garongkong | 293 | 2011 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 123,00 |
| SULAWESI | JALAN | APBN | Sulawesi Selatan | Penanganan Jalan Maros - Watampone-Pelabuhan Bajo E. (Sulsel) (158.6 km) | 417 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 36,00 |

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | Provinsi | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | Kebutuhan APBN 2014 |
|----------|-----------|-------------------------|------------------|--|---------------------------|-------|---------|--------------------------------------|---------------------|
| SULAWESI | PELABUHAN | CAMPURAN (APBN-BUMN) | Sulawesi Selatan | Perluasan Pelabuhan Makassar (Makassar New Port) | 2220 | 2013 | 2015 | Kementerian Perhubungan & Pelindo IV | 30,00 |
| SULAWESI | BANDARA | APBN | Sulawesi Selatan | Pembangunan Bandara Baru Buntu Kunik Tana Toraja | 38 | 2011 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 10,0 |
| SULAWESI | KERETA | APBN | Sulawesi Selatan | Pembangunan Jalur Kereta Api Makasar-Pare Pare (151 Km) | 6400 | 2015 | 2019 | Dirjen Perkeretaapian, Kemenhub | 2,00 |
| SULAWESI | BANDARA | APBN | Sulawesi Barat | Bandara Sumarorong Mamasa (Sulbar) | 151 | 2011 | 2014 | Kementrian Perhubungan | 56,0 |
| SULAWESI | JALAN | APBN | Sulawesi Barat | Penanganan Ruas Jalan Majene - Tapalang - Mamuju (Sulbar) (143.1 Km) | 1211 | 2011 | 2025 | Kementerian PU | 55,00 |
| SULAWESI | BANDARA | APBN | Sulawesi Barat | Bandara Tamba Padang (Sulbar) | 139 | 2011 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 10,0 |
| SULAWESI | BANDARA | APBN | Gorontalo | Bandara Jalaludin | 221 | 2013 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 109,1 |
| SULAWESI | PELABUHAN | APBN | Gorontalo | Lanjutan Pembangunan Fasilitas pelabuhan Gorontalo | 179 | 2011 | 2013 | Kementerian Perhubungan | 71,00 |
| SULAWESI | PELABUHAN | APBN | Gorontalo | Lanjutan Pembangunan Fasilitas pelabuhan laut Anggrek, Gorontalo | 142 | 2011 | 2013 | Kementerian Perhubungan | 60,00 |

BAB 6 PENGEMBANGAN WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2014

6.1 Kondisi Wilayah Nusa Tenggara Saat Ini

Kinerja perekonomian wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2012 menurun dibandingkan dengan tahun 2011. Sektor utama yang berperan dalam pembentukan PDRB yaitu sektor pertanian, pertambangan dan penggalian, serta jasa-jasa. PDRB per kapita wilayah justru terus meningkat secara riil, meskipun apabila dibandingkan dengan rata-rata PDRB per kapita nasional, PDRB wilayah Nusa Tenggara termasuk rendah.

Secara umum, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, namun berada di atas TPT nasional. Tingkat kemiskinan di Wilayah Nusa Tenggara juga mengalami penurunan, meskipun masih jauh di atas rata-rata nasional.

Sementara itu, dalam hal pembangunan manusia, semua provinsi menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) pada tahun 2012 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih jauh di bawah rata-rata nasional.

**TABEL 6.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH NUSA TENGGARA**

| Perkembangan Pembangunan | NTB | NTT |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 (ADHK 2000) (%) | -1,12 | 5,45 |
| PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2010 (Rp.Ribu) | 4.190 | 2.874 |
| Persentase Pengangguran Tahun 2012 (Agustus) (%) | 5,26 | 2,89 |
| Persentase Kemiskinan Tahun 2012 (September) (%) | 18,02 | 20,41 |
| Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 | 66,23 (Peringkat 32) | 67,75 (Peringkat 31) |
| Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010 | 56,02 | 64,61 |
| Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010 | 54,49 | 57,98 |
| Umur Harapan Hidup Tahun 2011 (Tahun) | 62,41 | 67,76 |
| Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 (Tahun) | 6,97 | 7,05 |

Sumber : Badan Pusat Statistik

Keterangan : *) = Data Pertumbuhan c-to-c Triwulan IV 2010

Di bidang infrastruktur wilayah, total panjang jaringan jalan di Nusa Tenggara meningkat dari 1.795 km pada tahun 2005

menjadi 2.038 km pada tahun 2011. Namun sebaliknya, kualitas jalan justru mengalami peningkatan, di mana persentase jalan dengan kondisi rusak berat menurun dari 6,6 persen tahun 2005 menjadi 5,6 persen pada tahun 2011.

Dalam rangka penguatan konektivitas nasional sektor komunikasi dan informatika, capaian pembangunan di pulau Bali dan Nusa Tenggara hingga tahun 2011 antara lain meliputi penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa Berdering) di 2.593 desa USO (100% dari target) dan internet (Pusat Layanan Internet Kecamatan) di 428 desa ibukota kecamatan USO (100% dari target). Adapun pembangunan jaringan *broadband* hingga tahun 2011 oleh PT Telkom telah menjangkau 26 kabupaten/kota (65%). Kebutuhan konsumsi listrik dan rasio elektrifikasi di Nusa Tenggara juga masih tergolong rendah. Rasio Elektrifikasi tahun 2011 di Nusa Tenggara Timur baru sekitar 39,92 persen dan di Nusa Tenggara Barat 52,88 persen dan rasio desa berlistrik di Provinsi Nusa Tenggara Timur 96,16 persen dan di Nusa Tenggara Barat 99,82 persen .

Luas irigasi di Wilayah Nusa Tenggara sampai dengan tahun 2007 mencapai 486,31 ribu hektar atau sekitar 7persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, hanya 26,97 ribu hektar (6 persen) yang ketersediaan airnya dijamin oleh waduk yaitu Waduk Batu Bulan, Batujae, Mamak, Palaperado, Pengga di NTB, Waduk Haekrit dan Tilong di NTT serta beberapa waduk di wilayah Nusa Tenggara lainnya, sedangkan sisanya masih mengandalkan dari aliran sungai, baik melalui bendung maupun *free intake*. Dari sisi ketersediaan tampungan air, daya tampung air (*storage*) perkapita wilayah Nusa Tenggara adalah sebesar 39,99 m³/kapita, lebih kecil dari rata-rata daya *storage* perkapita nasional sebesar 52,31 m³/kapita.

Wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2009 menyumbang 13,56 persen hasil produksi kedelai nasional. Untuk komoditas jagung dan kedelai, wilayah Nusa Tenggara menyumbang 5,46 persendan 3,93 persen. Komoditas tanaman perkebunan yang menjadi unggulan di wilayah ini adalah tembakau yang menghasilkan 30,37 persen produksi nasional. Tanaman perkebunan lain yang dihasilkan adalah kopi sebesar 2,97 persen dan kakao 1,7 persen. Produksi perikanan di Nusa Tenggara lebih bergantung kepada hasil perikanan tangkap dibandingkan dengan perikanan budidaya serta hasil rumput laut yang merupakan komoditas utama dari wilayah Nusa Tenggara.

Wilayah Nusa Tenggara juga rawan terhadap bencana alam

banjir. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, dua masalah utama yang dihadapi oleh wilayah Nusa Tenggara adalah pengamanan dan pengembangan daerah perbatasan dan konflik horizontal meskipun kedua masalah ini tidak terjadi di semua provinsi di wilayah Nusa Tenggara. Selain itu, masih banyak daerah yang termasuk tertinggal di wilayah Nusa Tenggara. Di Provinsi NTB, 8 dari 10 kabupaten/kota termasuk daerah tertinggal, sedangkan di Provinsi NTT, 20 dari 21 kabupaten/kota termasuk daerah tertinggal.

6.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Tujuan pembangunan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2014 adalah untuk:

1. Meningkatkan standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara.
2. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Nusa Tenggara terhadap pelayanan publik dasar.
3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Nusa Tenggara bagian Barat dan Timur.
4. Meningkatkan kontribusi wilayah Nusa Tenggara dalam perdagangan internasional.
5. Mengoptimalkan sektor unggulan di wilayah Nusa Tenggara.
6. Meningkatkan jaringan transportasi antarwilayah.
7. Meningkatkan jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik, dan telepon).
8. Meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di wilayah Nusa Tenggara.
9. Mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Nusa Tenggara pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Nusa Tenggara, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita

(Tabel 6.2).

2. Meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di wilayah Nusa Tenggara.
3. Meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di wilayah Nusa Tenggara.
4. Berkurangnya ketimpangan kontribusi perdagangan internasional antara wilayah Nusa Tenggara bagian barat dengan Nusa Tenggara bagian timur.
5. Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan laut dengan terbentuknya industri pengolahan hasil laut di wilayah Nusa Tenggara.
6. Memastikan keberlanjutan layanan telekomunikasi dan internet di wilayah USO dan memperluas jangkauan layanan broadband hingga menjangkau 29 kabupaten/kota (72,5 persen)
7. Pembangunan sistem penyediaan air baku dalam rangka pencapaian target MDGs, diantaranya pembangunan tampungan air baku Tonda Utara, pembangunan sistem jaringan air baku Bima, rehabilitasi jaringan air baku Pulau Lombok di NTB, pembangunan intake dan pipa transmisi Kolhua, Raknamo, dan Pulau Flores di NTT;
8. Percepatan peningkatan/pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain di Daerah Irigasi (DI) Pandanduri, Rababaka Komplek, Tamutung di NTB dan DI Mbay, Nggorang, Wae Dingin, Wae Musur, Bena, Haekto di NTT.
9. Meningkatnya jumlah tampungan dan ketersediaan air melalui pembangunan waduk Pandanduri di Lombok Timur, Waduk Tanju dan Mila di Dompu, Waduk Bintangbano di Sumbawa Barat, Waduk Mujur di Lombok Tengah, Waduk Raknamo dan Waduk Kolhua di Kupang dan Waduk Linamnutu di NTT.
10. Menurunnya resiko banjir dan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman padat penduduk dan jalur transportasi utama, dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan pengendali banjir Kota Mataram, Senggigi,

dan Kota Kupang;

11. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

TABEL 6.2
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2014

| Provinsi | Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾ (%) | Kemiskinan ²⁾ (%) | Pengangguran ³⁾ (%) |
|----------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------------|
| Nusa Tenggara Barat | 3,60 – 4,00 | 15,94 | 2,40 – 2,20 |
| Nusa Tenggara Timur | 5,80 – 6,4 | 16,95 | 1,40 – 1,20 |

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾ Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

²⁾ Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

³⁾ Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja.

TABEL 6.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP,
DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH NUSA TENGGARA TAHUN 2014

| Provinsi | Angka Kematian Bayi ¹⁾ | Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾ | Umur Harapan Hidup ³⁾ |
|----------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|
| Nusa Tenggara Barat | 37 | 7,42 | 67,76 |
| Nusa Tenggara Timur | 27 | 6,96 | 70,58 |

Sumber : Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

6.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Nusa Tenggara

Pengembangan wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk (i) pengembangan sentra produksi komoditas unggulan dan industri; (ii) Pengembangan pariwisata bahari, serta (iii) Pengembangan PKN Kupang dan Mataram sebagai pusat industri pengolahan dan komoditas unggulan dan pariwisata.

Kebijakan tersebut didukung dengan konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang tengah dituangkan kedalam pengembangan koridor Bali dan Nusa Tenggara yang berperan sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi pengembangan wilayah Nusa Tenggara diantaranya:

1. Mengembangkan fokus spesialisasi komoditas unggulan termasuk pemasarannya dengan menitikberatkan pada produksi rumput laut, jagung, kakao, peternakan, dan perikanan tangkap.
2. Meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan mengembangkan ekonomi lokal.
3. Mengembangkan objek pariwisata dan kinerja pembangunan kepariwisataan, yang didukung dengan pengembangan sarana dan prasarana yang memadai khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air.
4. Meningkatkan aksesibilitas antara kota-kota pesisir serta daerah tertinggal dengan mengembangkan sarana dan prasarana transportasi penyebrangan dan pelabuhan laut sehingga membentuk keterkaitan sosial-ekonomi yang kuat.
5. Meningkatkan keterkaitan pengembangan antarkawasan (Kawasan Andalan dan Kawasan Andalan Laut) untuk mengoptimalkan potensi wisata budaya dan wisata alam, termasuk wisata bahari, dengan mengembangkan jalur wisata terpadu Bali-Lombok-Komodo-Tana Toraja;
6. Meningkatkan keberadaan Forum Kerjasama Daerah dan Forum Kerjasama Ekonomi Internasional, baik secara bilateral dengan Australian dan Timor Leste, maupun secara multilateral dalam konteks kerja sama ekonomi sub-regional;
7. Meningkatkan perlindungan kawasan konservasi nasional di Kepulauan Nusa Tenggara khususnya konservasi laut agar kelestariannya terpelihara; serta

8. Mengelola kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste dan kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia sebagai “beranda depan” Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Wilayah Nusa Tenggara

Isu Strategis masing-masing provinsi di Wilayah Nusa Tenggara adalah sebagai berikut:

NUSA TENGGARA BARAT

Isu strategis dan kegiatan strategis pembangunan wilayah Nusa Tenggara Barat 2014, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan akses dan layanan Kesehatan dengan kegiatan strategis yaitu : (1) Pengembangan Perencanaan dan Manajemen Program serta Sistem Infomasi Kesehatan; (2) Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar; (3) Peningkatan mutu dan penyebaran sumberdaya manusia kesehatan, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan dalam persiapan pelaksanaan SJSN; (4) Perbaikan Gizi Masyarakat; (5) Percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan kematian bayi.
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Kegiatan strategis: (1) Beasiswa bagi siswa Miskin SMA; (2) Rintisan bantuan operasional sekolah (RBOS) SMA; (3) Rintisan bantuan operasional sekolah (RBOS) SMK; (4) Siswa SMK penerima beasiswa miskin.
3. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan konektivitas antarwilayah untuk menunjang kesejahteraan dengan kegiatan strategis yaitu : (1) Pembangunan Bendungan Pandan duri Lombok Timur, Bendungan Rababaka Kompleks, Bendungan Bintang Bano; (2) Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Jembatan (Jalan Nasional dan Jalan Strategis Nasional); (3) Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Labuan Poh Sekotong, Pelabuhan Kilo, Dermaga Sape, Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bima; (4) Pembangunan TPA Pengingat, TPA Bara, TPA Bimadan TPA Sumbawa.
4. Percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan kegiatan strategis: (1) Monitoring dan evaluasi di 8 Kabupaten Daerah Tertinggal; (2) Pengembangan produk

unggulan daerah di Kab. Dompu, Kab. Lombok Timur, dan Provinsi NTB.

NUSA TENGGARA TIMUR

Isu strategis dan kegiatan prioritas pembangunan wilayah Nusa Tenggara Timur 2014, adalah sebagai berikut:

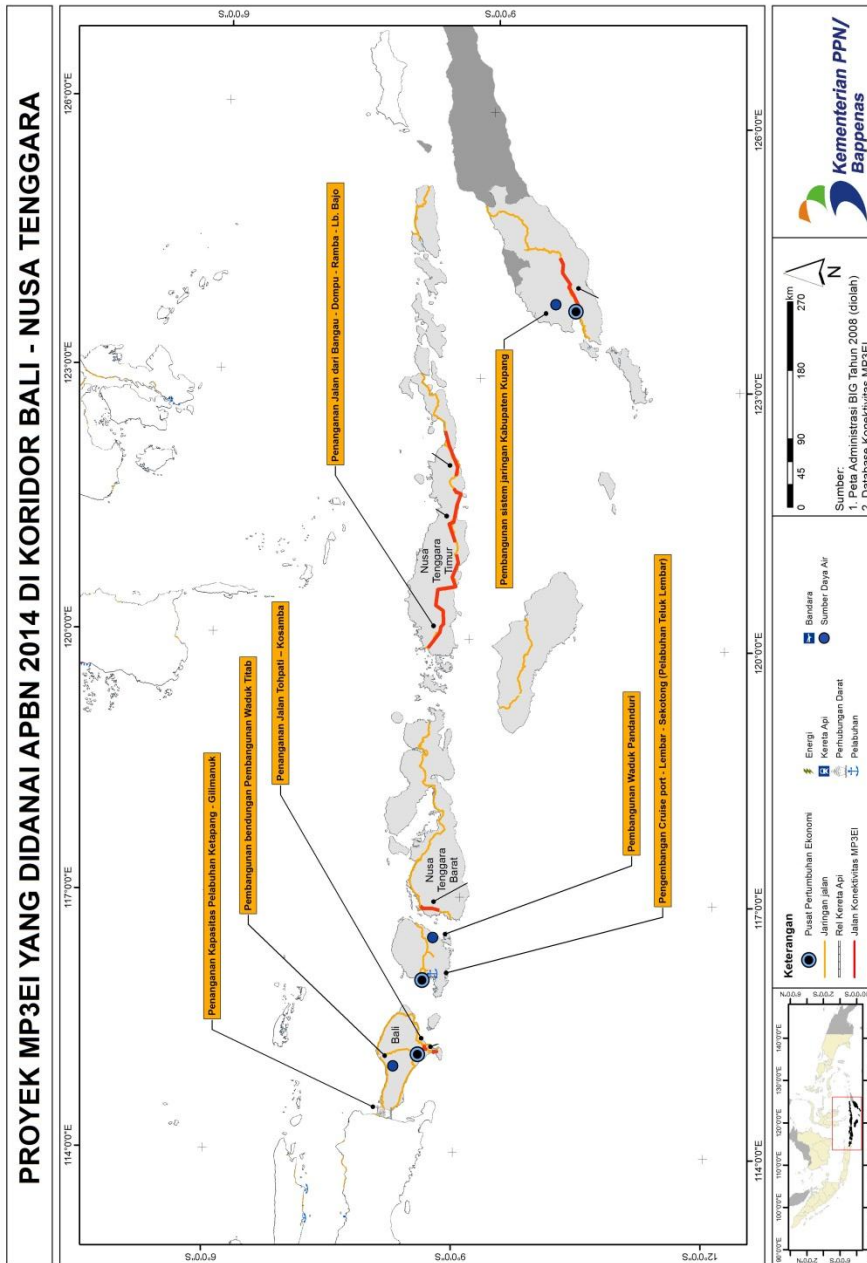
1. Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula (lanjutan direktif Presiden) Peningkatan jangkauan pelayanan dan kualitas kesehatan dengan kegiatan strategis : (1) Pengembangan Pusat Perbenihan jagung di 7 Lokasi Kab. Flores Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Timur; (2) Pengadaan Traktor Roda 4 Untuk Pengolahan Lahan Tidur sebanyak 432 unit; (3) : Pengembangan Industri Pengolahan hasil Jagung Sebanyak 20 Unit; (4) Pengembangan Sumber Daya Air melalui Pembangunan Sumur Bor.
2. Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri (lanjutan direktif Presiden) dengan kegiatan strategis Peningkatan Aksesibilitas Jalan Menuju Wilayah Perbatasan, Konektivitas Dalam Wilayah dan Keluar Wilayah, serta Peningkatan Dukungan Transportasi Darat untuk Mendukung Pengelolaan Potensi Sumber Daya Secara Optimal dan Pembangunan Jalan Poros NTT.
3. Penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat dengan kegiatan strategis: (1) Pembangunan 3 Bendungan/Waduk di Kabupaten Kupang (Waduk Raknamo), Kabupaten Ngada (Waduk Asesa), dan Kota Kupang (Waduk Kolhua); (2) Pembangunan Embung-Embung; (3) Pengembangan Sumber Daya Air melalui Pembangunan Sumur Bor; (4) Penyediaan Sistem Pengolahan Sampah Terpadu di Kawasan Permukiman Nelayan (TPST) Sebanyak 200 Unit

Uraian isu strategis, program dan kegiatan prioritas, Kementerian/Lembaga, sasaran, target, dan pagu indikatif di setiap provinsi di Nusa Tenggara dapat dilihat dalam Lampiran Bab 6.

6.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Nusa Tenggara

Arah Kebijakan Pengembangan MP3EI untuk wilayah Nusa Tenggara sebagai bagian dari koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara, memperkuat arah pengembangan wilayah Nusa Tenggara, dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2014, yakni mengembangkan koridor ekonomi Bali-Nusa Tenggara sebagai Pintu Gerbang Pariwisata Nasional dan Pendukung Pangan Nasional.

GAMBAR 6.1
PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI MELALUI
TA 2014 DI WILAYAH NUSA TENGGARA



6.6 Implementasi MP3KI di Wilayah Nusa Tenggara

Khusus untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur ditambahkan dua lokasi kecamatan dan Provinsi Nusa Tenggara Barat ditambahkan satu lokasi kecamatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan dilanjutkan tahun 2014.

Lokasi-lokasi yang telah ditentukan Pemerintah Pusat, yaitu :

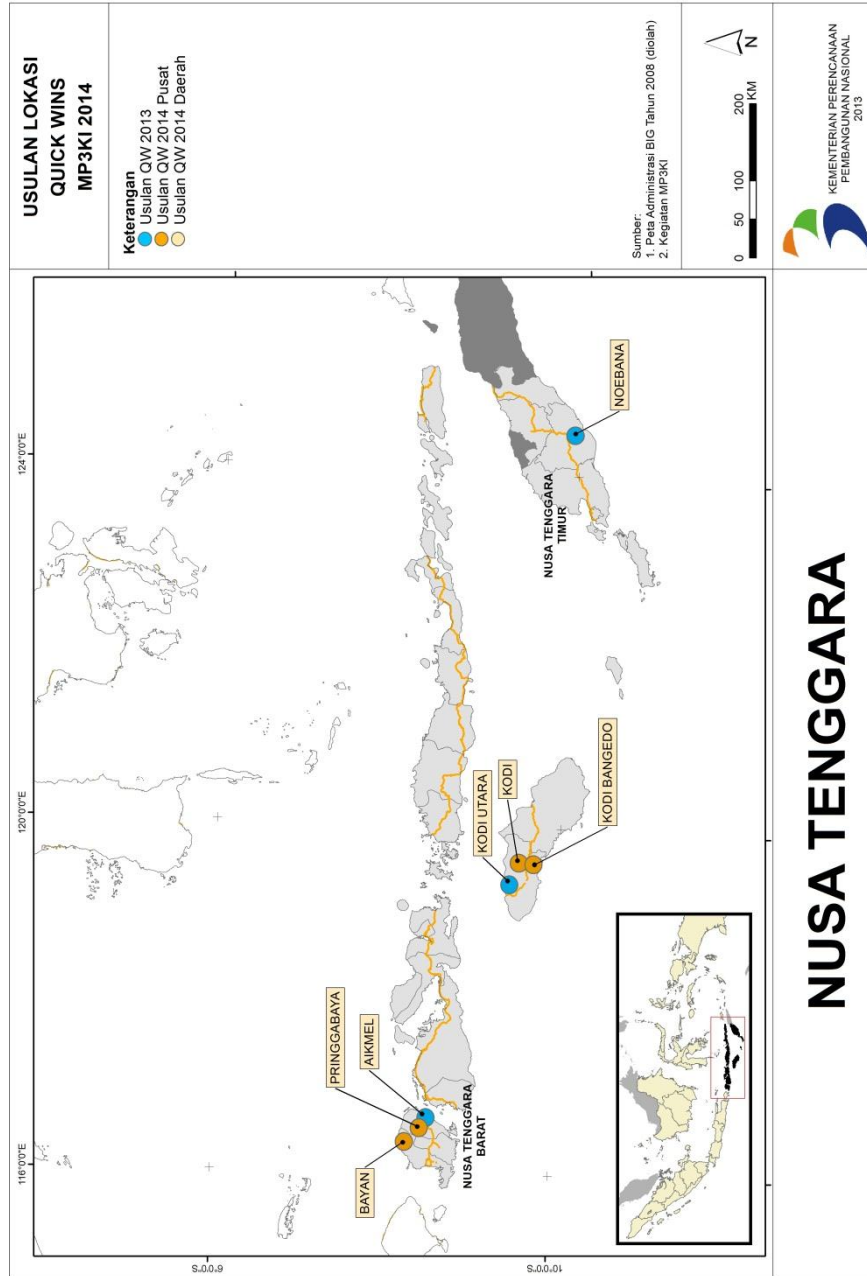
Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Aikmel.
2. Kabupaten Lombok Utara, Kecamatan Bayan.
3. Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Pringgabaya.

Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi Bangedo.
2. Kabupaten Sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi.
3. Kabupaten sumba Barat Daya, Kecamatan Kodi Utara.
4. Kabupaten Timur Tengah Selatan, Kecamatan Noebana.

GAMBAR 6.2
USULAN LOKASI QUICK WINS MP3KI TA 2014 DI WILAYAH
KEPULAUAN NUSA TENGGARA



LAMPIRAN BAB 6. Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Kepulauan Nusa Tenggara tahun 2014

A. PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----------|--|---|--|--|--------------|-----------------|
| 1 | <i>Isu Strategis : Peningkatan akses dan layanan kesehatan</i> | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pengembangan Perencanaan dan Manajemen Program serta Sistem Infomasi Kesehatan</i> | | | | | |
| | Prioritas KL : Prioritas Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN: KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | |
| | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan | Pengelolaan Data dan Informasi | Persentase Provinsi dan Kab/Kota yang memiliki bank data kesehatan | Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 paket | 280,90 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan akses masyarakat terhadap sarana sanitasi dasar</i> | | | | | |
| | Prioritas KL : Prioritas Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN: KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Penyehatan Lingkungan | Jumlah Desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) | Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat | 2 paket | 7.470,80 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan mutu dan penyebaran sumber daya manusia kesehatan, serta akses dan mutu pelayanan kesehatan dalam persiapan pelaksanaan SJS N</i> | | | | | |
| | Prioritas KL : Prioritas Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN: KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) | Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan | Jumlah Kab/Kota di 33 Propinsi yang telah mampu melaksanakan perencanaan kebutuhan SDM | Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat | 1 paket | 200,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|---|--|--|--------------|--------------------|
| Kegiatan Strategis : Perbaikan Gizi Masyarakat | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN: KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Gizi Masyarakat | Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat | 2 paket | 2.476,00 |
| Kegiatan Strategis : Percepatan penurunan jumlah kematian ibu dan kematian bayi | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (CakupanPn) | Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat | 3 paket | 2.448,00 |
| 2 | Isu Strategis : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dasar dan menengah | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Beasiswa bagi siswa Miskin SMA | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA | Beasiswa Untuk Peserta Didik Berprestasi | Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat | 26782 | 26.915,00 |
| KegiatanStrategis : Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) SMA | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA | Peserta Didik SMA Mendapatkan Bomm/Rintisan Bos SMA | Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat | 101806 | 102.315,00 |
| Kegiatan Strategis : Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) SMK | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | Jumlah Peserta Didik Smk Penerima Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (Bos) SMK | Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat | 57544 | 57.831,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|--|---|--|--|---|--------------------|
| Kegiatan Strategis : Siswa SMK Penerima Beasiswa Miskin | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | Peserta Didik SMK Mendapatkan Beasiswa | Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat | 12531 | 12.593,00 |
| 3 | Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur yang memadai dan konektivitas antarwilayah untuk menunjang kesejahteraan | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Bendungan Pandan duri Lombok Timur, Bendungan Rababaka Kompleks, Bendungan Bintang Bano | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah buah waduk yang dibangun | Nusa Tenggara Barat : Kab. Dompu | 1buah Waduk Pandanduri | 24.142,00 |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah buah waduk yang dibangun | Nusa Tenggara Barat : Kab. Lombok Timur | 1 buah Waduk Tanju dan Bendungan Mila | 115.716,00 |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah buah waduk yang dibangun | Kab. Sumbawa Barat | 1 laporan audit teknis dan finansial pembangunan Waduk Bintang Bano | 1.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan dan Pengelolaan Jalan Jembatan (Jalan Nasional dan Jalan Strategis Nasional) | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) | Kab. Bima | 1 Paket | 38.820,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|-------------------------------|---|--|---|--------------|-----------------|
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) | Nusa Tenggara Barat : Kab. Dompu | 1 Paket | 67.900,00 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) | Nusa Tenggara Barat : Kab. Lombok Barat | 1 Paket | 19.300,00 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) | Kab. Sumbawa | 52 Km | 164.200,00 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dipreservasi (Km) | Kab. Sumbawa Barat | 10.4 Km | 36.300,00 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran (Km) | Akses Kawasan Samota (Labu Sawo- Moyo-Sebewe) | 5 Km | 40000 |

Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Penyebrangan Labuan Poh Sekotong, Pelabuhan Kilo, Dermaga Sape, Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Laut Bima

Prioritas KL : Prioritas Infrastruktur
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|---|---|--|----------------------------------|------------|-----------|
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan | Jumlah lokasi Pelabuhan Strategis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi | Nusa Tenggara Barat : Kab. Bima | 1 kegiatan | 50.000,00 |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan | Jumlah lokasi Pelabuhan Strategis yang di bangun/ ditingkatkan/ direhabilitasi | Nusa Tenggara Barat : Kab. Dompu | 1 kegiatan | 5.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|--|--|---|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pembangunan TPA Pengangat, TPA Bara, TPA Bimadan TPA Sumbawa | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan | Jumlah Kab/Kota yang Telayan infrastruktur Stasiun Antara Dan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah | Nusa Tenggara Barat : Kab. Lombok Tengah | 1 | 8.300,00 |
| 4 | Isu Strategis : Percepatan pembangunan daerah tertinggal | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan produk unggulan daerah | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan PascaKonflik | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | | | | | | |
| | Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi Daerah Tertinggal | Jumlah kabupaten tertinggal yang mengembangkan kebijakan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi melalui Kelompok Kerja UMKM Daerah Tertinggal | Nusa Tenggara Barat : Kab. Bima, Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Tengah, Kab. Lombok Timur, Kab. Dompu, Kab. Sumbawa Barat, Kab. Sumbawa Utara, Kab. Sumbawa | 8 kabupaten | 3840 jt |
| | Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Pemerintah Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik | Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapatkan bantuan stimulan dalam pembangunan infrastruktur untuk percepatan pembangunan daerah tertinggal | Nusa Tenggara Barat : Kab. Bima, Kab. Lombok Tengah | 2 kabupaten | 1.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan produk unggulan daerah | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | | | | | | |
| | Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Komoditas Unggulan | Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengembangan Produk Unggulan | Nusa Tenggara Barat : Kab. Dompu, Kab. Lombok Timur | 2 Kabupaten | 2.800,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|--|--|--------|--------------|--------------------|
| Kegiatan Strategis : Pengembangan produk unggulan daerah | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | | | | | | |
| Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Wilayah Strategis | Jumlah kajian pengembangan wilayah strategis di daerah tertinggal; | Nusa Tenggara Barat : Provinsi Nusa Tenggara Barat | | 1 kegiatan | 600,00 |

B. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS PROVINSI TAHUN 2014

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|--|--|--------|--------------|-------------------------------------|
| 1 | Isu Strategis : Pencapaian surplus beras 10 juta ton dan peningkatan produksi jagung, kedelai dan gula(lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Pusat Perbenihan jagung di 7 Lokasi | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan | Pemberdayaan Penangkaran Benih (ha) | Nusa Tenggara Timur :Kab. Flores Timur | | 500 ha | 1.750,00 |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Pusat Perbenihan jagung di 7 Lokasi | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian | Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian | Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit) | Nusa Tenggara Timur : Provinsi Nusa Tenggara Timur | | 5 Kab | 0,00 Dana Masih di tingkat pusat |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|--|--|---|--|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pengadaan Traktor Roda 4 Untuk Pengolahan Lahan Tidur sebanyak 432 unit | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian | Jumlah (Unit) Bantuan Kepemilikan Alsintan (BAKAL) Traktor Roda Empat (75-90 HP Diesel) | Nusa Tenggara Timur : Provinsi Nusa Tenggara Timur | 203 unit | 4217,5 |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Industri Pengolahan hasil Jagung Sebanyak 20 Unit | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | | |
| | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian | Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian | Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit) | Nusa Tenggara Timur : Provinsi Nusa Tenggara Timur | | |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Sumber Daya Air melalui Pembangunan Sumur Bor | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ ditingkatkan | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 680 ha | 14.300,00 |
| 2 | Isu Strategis : Konektivitas yang menjamin tumbuhnya pusat-pusat perdagangan dan industri (lanjutan direktif Presiden) | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Peningkatan Aksesibilitas Jalan Menuju Wilayah Perbatasan, Konektivitas Dalam Wilayah dan Keluar Wilayah, serta Peningkatan Dukungan Transportasi Darat untuk Mendukung Pengelolaan Potensi Sumber Daya Secara Optimal | | | | | |
| | Prioritas KL : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yang dibangun/dilebarkan di Kaw. Strategis, Perbatasan, Wil. Terluar & Terdepan | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 33 Km | 100.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|---|--|--|-----------------------------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan Poros NTT | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yang dibangun/dilebarkan (Km) | Provinsi Nusa Tenggara Timur (Oilmasi-Sulamu) | 8,8 Km | 70.000,0 |
| 3 | Isu Strategis : Penambahan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan bagi masyarakat | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan 3 Bendungan/Waduk di Kabupaten Kupang (Waduk Raknamo), Kabupaten Ngada (Waduk Asesa), dan Kota Kupang (Waduk Kolhua) | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah buah waduk yang dibangun | Nusa Tenggara Timur: Kab. Kupang | 2 buah (Waduk Raknamo dan Kolhua) | 10.000,00 |
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Embung-Embung | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengelolaan dan Konservasi Waduk, Embung, Situ serta Bangunan Penampung Air Lainnya | Jumlah buah embung/ Situ/ bangunan penampung air lainnya yang dibangun | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 42 buah embung | 81.366,00 |
| Kegiatan Strategis : Pengembangan Sumber Daya Air melalui Pembangunan Sumur Bor | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Jumlah debit sarana/prasarana penyediaan air baku yang dibangun/ditingkatkan | Nusa Tenggara Timur : Provinsi Nusa Tenggara Timur | 34 titik (680 ha) | 14.300,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|--|--|-----------|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Penyediaan Sistem Pengolahan Sampah Terpadu di Kawasan Permukiman Nelayan (TPST) Sebanyak 200 Unit | | | | | | |
| Prioritas KL : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan | Jumlah Kawasan yang Telayani Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R | Nusa Tenggara Timur : Provinsi Nusa Tenggara Timur | 1 Kawasan | 520,00 | |

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2014

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | Provinsi | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | Kebutuhan APBN 2014 |
|-----------|-----------|-------------------------------|----------|---|---------------------------------|-------|---------|----------------------------|------------------------|
| BALI - NT | AIR | APBN | Bali | pembangunan bendungan Pembangunan Waduk Titab, Kabupaten Buleleng (359 liter/detik) | 441 | 2011 | 2014 | Kementrian PU (Ditjen SDA) | 66,87 |
| BALI - NT | AIR | APBN | Bali | Pengembangan IPA Pened - 300 l/s | 60 | 2013 | 2014 | Kementerian PU | 30,00 |
| BALI - NT | JALAN | APBN | Bali | Penanganan Jalan Tohpati - Kosamba (11,8 km) | 609 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 2,00 |
| BALI - NT | PELABUHAN | APBN | NTB | Pengembangan Cruise port - Lembar - Sekotong (Pelabuhan Teluk Lembar) | 390 | 2011 | 2011 | Kemenhub | 200,00 |
| BALI - NT | AIR | APBN | NTB | Pembangunan Waduk Pandanduri, NTB (27 juta m3) | 496 | 2011 | 2014 | Kementrian PU (Ditjen SDA) | 24,14 |
| BALI - NT | AIR | APBN | NTT | Pembangunan sistem jaringan Kabupaten Kupang - 100 l/s | 132 | 2011 | 2014 | Kementerian PU | 5 |
| BALI - NT | JALAN | APBN | NTT | Penanganan Jalan dari Bangau - Dompu - Ramba - Lb. Bajo mendukung industri rumput laut 159,2 km | 1376 | 2011 | 2025 | Kementerian PU | 10,00 |

BAB 7

PENGEMBANGAN WILAYAH MALUKU TAHUN 2014

7.1 Kondisi Wilayah Maluku Saat Ini

Kinerja perekonomian wilayah Maluku pada tahun 2011 menurun dibanding dengan tahun 2010. Sektor utama dalam perekonomian Maluku adalah pertanian, perdagangan-hotel dan restoran dan jasa-jasa. Perkembangan pola investasi PMA dan PMDN di wilayah Maluku masih sangat kecil. Kendala yang dihadapi terutama minimnya infrastruktur wilayah dan iklim investasi, serta belum berkembangnya industri bernilai tambah tinggi.

Sebagian besar wilayah Maluku masih tertinggal, dimana sebanyak 8 kabupaten di Provinsi Maluku dan 7 kabupaten di Provinsi Maluku Utara merupakan daerah tertinggal.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Wilayah Maluku cenderung menurun, namun TPT Provinsi Maluku masih lebih tinggi dari TPT nasional. Rendahnya pengangguran di satu sisi dan rendahnya tingkat pendapatan regional per kapita di sisi lain menunjukkan rendahnya kualitas pekerjaan dan produktivitas pekerja. Disamping itu, tingkat kemiskinan di wilayah Maluku cenderung menurun dalam empat tahun terakhir. Namun demikian, tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku masih sangat tinggi dibanding tingkat kemiskinan nasional.

Dalam hal pembangunan manusia, secara umum semua provinsi menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, perbaikan di bidang kesehatan dan pendidikan adanya perbaikan untuk indicator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Hidup (AHH) dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), wilayah Maluku memiliki potensi perikanan laut (tangkap dan budidaya) yang cukup besar, namun pemanfaatannya belum optimal. Hal ini disebabkan masih kecilnya skala rata-rata usaha perikanan tangkap, kontinuitas ketersediaan bahan bakar, dan terbatasnya fasilitas pendingin. Pada sisi lain, wilayah perairan Maluku sangat rawan terhadap pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh nelayan asing dengan kapasitas kapal yang lebih besar. Penetapan Provinsi Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional pada tahun 2010 diharapkan dapat merevitalisasi usaha perikanan, baik tangkap maupun budidaya, melalui pendekatan lintas sektor yang lebih terpadu.

Kondisi infrastruktur wilayah Maluku, permasalahan terkait dengan rendahnya kualitas dan kuantitas ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya untuk jalan dan jembatan, serta sarana transportasi. Selain itu, kurangnya keterpaduan transportasi antarmoda menjadi permasalahan utama, khususnya ketersediaan transportasi darat, laut, sungai, dan udara yang belum memadai. Minimnya infrastruktur yang dibangun juga mengakibatkan keterisolasian wilayah antarpulau dan dalam pulau. Total panjang jalan Provinsi Maluku mengalami peningkatan antara tahun 2005 dan 2011 walaupun tidak signifikan, secara berturut sebesar 1.255 Km menjadi 1.578 Km. Sedangkan untuk kualitas jalan mengalami penurunan, jalan yang memiliki kondisi buruk mengalami peningkatan sebesar 11,6 persen pada tahun 2011.

Di wilayah Maluku, jaringan jalan di pulau-pulau terpencil belum sepenuhnya berfungsi untuk mendukung transportasi lintas pulau. Selain itu, armada angkutan jalan raya sangat terbatas karena armada yang tersedia tidak sebanding dengan luas daratan pada setiap kabupaten. Jangkauan kapal PELNI, kapal ferry, perintis, dan kapal pelayaran rakyat (Pelra) masih sangat terbatas dan tidak memadai untuk kondisi geografis wilayah Maluku yang terdiri atas pulau-pulau kecil, sedang, dan besar.

Sementara itu, ketersediaan energi listrik menunjukkan perbaikan yang ditunjukkan dengan rasio elektrifikasi terus meningkat dari 55 persen di Maluku dan 48 persen di Maluku Utara pada tahun 2004 menjadi masing-masing 70,80 dan 70,34 persen pada tahun 2011 dan rasio desa berlistrik Provinsi Maluku 95,41 persen dan Maluku Utara 99,72 persen. Namun angka ini masih di bawah angka rasio elektrifikasi nasional (67 persen).

Dalam rangka penguatan konektivitas nasional sektor komunikasi dan informatika, capaian pembangunan di pulau Maluku hingga tahun 2011 antara lain meliputi penyediaan jasa akses telekomunikasi (Desa Berdering) di 1.286 desa USO (64,2 persen dari target) dan internet (Pusat Layanan Internet Kecamatan) di 158 desa ibukota kecamatan USO (100 persen dari target). Adapun pembangunan jaringan *broadband* dijadwalkan untuk dimulai tahun 2012 dengan target 8 kabupaten/kota.

Luas irigasi di Maluku sampai dengan tahun 2007 mencapai 152,49 ribu hektar atau sekitar 2 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesiayang tersebar di Maluku sekitar 62 persen dan Maluku Utara sekitar 38 persen. Daerah irigasi tersebut terdiri atas kewenangan Pemerintah Pusat seluas 41,54 ribu hektar, kewenangan pemerintah provinsi 82,31 ribu hektar, dan kewenangan kabupaten 28,64 ribu hektar.

Dari total 152,49 ribu hektar daerah irigasi di kepulauan Maluku, ketersediaan airnya masih mengandalkan aliran sungai, baik melalui bendung maupun *free intake*. Dari sisi ketersediaan tampungan air, daya tampung air (storage) perkapita wilayah Maluku adalah sebesar 0,30 m³/kapita, lebih kecil dari rata-rata daya storage perkapita nasional sebesar 52,31 m³/kapita.

Wilayah perairan Kepulauan Maluku di bagian selatan berbatasan dengan negara Timor Leste dan Australia. sedangkan di bagian utara Kepulauan Maluku berbatasan dengan Filipina. Kesepakatan garis batas maritim antara Pemerintah RI dengan Filipina serta dengan Timor Leste menjadi hal yang perlu segera dilakukan. Selain itu, terdapat mobilitas penduduk tradisional dari Timor Leste ke Pulau Wetar, Pulau Kisar (Kabupaten Maluku Barat Daya) dan Pulau Larat (Kabupaten Maluku Tenggara Barat).

TABEL 7.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH MALUKU

| Perkembangan Pembangunan | Maluku | Maluku Utara |
|--|----------------|---------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 (ADHK 2000) (%) | 7,81 | 6,67 |
| PDRB Perkapita dengan Migas ADHK 2000 Tahun 2012 (Rp.Ribu) | 3.008 | 3.170 |
| Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2012 (Agustus) (%) | 7,51 | 4,76 |
| Persentase Kemiskinan Tahun 2012 (September) (%) | 20,76 | 8,06 |
| Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 | 71,87 | 69,47 |
| | (Peringkat 21) | (Peringkat 30) |
| Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010 | 67,23 | 64,41 |
| Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010 | 75,94 | 58,17 |
| Angka Harapan Hidup Tahun 2011 (Tahun) | 67,60 | 66,31 |
| Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 (Tahun) | 8,82 | 8,66 |

Sumber :Badan Pusat Statistik

7.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Maluku

Tujuan pembangunan wilayah Maluku dalam tahun 2014 adalah untuk:

1. Meningkatkan standar hidup masyarakat Maluku dan Maluku Utara;
2. Meningkatkan produktivitas dan pemanfaatan sumber daya laut dan perkebunan di wilayah Maluku;
3. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara;
4. Mewujudkan keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan, wilayah darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
5. Meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di wilayah Maluku, serta meningkatkan keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional;
6. Mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sasaran yang dicapai dalam rangka pengembangan wilayah Maluku pada tahun 2014 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Maluku, yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan perkapita.
2. Meningkatnya produksi dan produktivitas sektor perikanan dan perkebunan di wilayah Maluku.
3. Berkembangnya jaringan dan meningkatnya transportasi.
4. Terwujudnya keseimbangan pembangunan wilayah Maluku bagian Utara dan bagian Selatan, wilayah darat, pesisir dan pulau-pulau kecil.
5. Meningkatnya keandalan layanan jaringan irigasi untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional melalui peningkatan/rehabilitasi jaringan irigasi, antara lain di jaringan irigasi D.I. Patlean, Tolabit dan Toliwang, Akelamo, Aha, Talaga, Kahohodan Kobe di Maluku Utara, serta jaringan irigasi DI Lofin, Samal Kiri, Bubi, Kairatu, Way Geren, Way Meten, Way Bini, dan Way Pure di

Maluku.

6. Tersedianya air baku bagi PDAM yang mengalami krisis air baku dan dalam rangka mencapai target MDGs, antara lain pembangunan prasarana air baku Kota Ambon, Kota Tual di Maluku dan pembangunan prasarana air baku Waijo-Soloat di Maluku Utara.
7. Menurunnya risiko banjir dan abrasi pantai di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman padat penduduk dan jalur transportasi utama, dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan pengendali banjir di Morotai dan Kota Ambon.
8. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

TABEL 7.2
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2014

| Provinsi | Pertumbuhan Ekonomi¹⁾ (%) | Kemiskinan²⁾ (%) | Pengangguran³⁾ (%) |
|-----------------|---|--|--|
| Maluku | 5,40 – 6,00 | 22,23 | 4,80 – 3,80 |
| Maluku Utara | 6,00 – 6,80 | 5,83 | 3,10 – 2,40 |

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

²⁾Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

³⁾Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja

TABEL 7.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP
DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH MALUKU TAHUN 2014

| Provinsi | Angka Kematian Bayi ¹⁾ | Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾ | Umur Harapan Hidup ³⁾ |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Maluku | 28 | 9,4 | 70,18 |
| Maluku Utara | 29 | 9,4 | 69,91 |

Sumber :Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

7.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Maluku

Pengembangan wilayah Maluku diarahkan untuk pengembangan sentra produksi komoditas unggulan dalam upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan di wilayah Maluku.

Kebijakan tersebut, didukung pula oleh konsep percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia yang tengah dituangkan kedalam pengembangan koridor Ekonomi Kepulauan Maluku-Papua yang berperan sebagai Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan nasional.

Untuk mendukung arah kebijakan tersebut, maka strategi pengembangan wilayah Maluku diantaranya:

1. Meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya; mengembangkan diversifikasi produk ke arah ikan siap saji untuk pasar dalam dan luar negeri; serta dengan mengembangkan Ambon sebagai pusat klaster industri pengolahan perikanan.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dengan melakukan diversifikasi pangan.
3. Memperkuat interaksi perdagangan antar wilayah.
4. Mengembangkan kota-kota pesisir sebagai pusat pelayanan kegiatan industri kemaritiman terpadu yang merupakan sektor basis dengan dukungan prasarana dan sarana yang memadai, khususnya transportasi, energi, dan sumber daya air;

5. Mengembangkan wilayah darat, laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil sebagai satu kesatuan wilayah Kepulauan Maluku melalui kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang terpadu yang didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai;
6. Mempertahankan kawasan konservasi untuk menjamin daya dukung lingkungan yang optimal bagi pengembangan wilayah;
7. Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Maluku melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antara pusat-pusat pertumbuhan di darat, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
8. Memanfaatkan sumber daya alam secara produktif dan efisien, agar terhindar dari pemborosan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip kelestarian; serta
9. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut dan udara yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha.

7.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Wilayah Maluku

Isu Strategis pembangunan wilayah Maluku 2014, adalah sebagai berikut:

A. PROVINSI MALUKU :

Isu strategis dan kegiatan strategis pembangunan wilayah Maluku 2014, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan dengan kegiatan strategis : (1) Peningkatan Akses Pendidikan Dasar; (2) Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah; (3) Peningkatan Layanan Pendidikan SMK;
2. Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan dengan kegiatan strategis : (1) Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan;
3. Perluasan Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau dengan kegiatan strategis : (1) Pembangunan Rumah Sakit Pratama di pusat Gugus di Kab. Seram Bagian Barat, Kab.

Seram Bagian Timur dan Kab. kepulauan Aru.

4. Peningkatan Kesejahteraan petani/ nelayan dengan kegiatan strategis : (1) Kawasan Perikanan Budidaya yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai; (2) Pengembangan Komuditas Unggulan Spesifik Lokal di Provinsi Maluku dan Kab. Maluku Tengah.
5. Percepatan Pembangunan Infrastruktur dengan kegiatan strategis : (1) Pekan Keselamatan di Provinsi Maluku; (2) Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi serta Embung; (3) Penyelesaian Jalan Trans Maluku; (4) Pradisain dan DED Pembangunan Dermaga; (5) Rekontruksi/Peningkatan Struktur Jembatan Wai Kiki dan wai Mboti; (6) Rekontruksi/Peningkatan Struktur Jalan Modamohe – Namrole.
6. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan kegiatan strategis yaitu : (1) Bantuan Long Boat dan peralatan tangkap ikan di Kab. Maluku tengah, Kab. Buru, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur; (2) Pembangunan Jalan di Pulau-Pulau terluar; (3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih; (4) : Penyelesaian Bandar Udara Kufar, Namniwel, Ibra, Saumlaki, Moa dan Perluasan Lapter Namrole dan Dobo

B. PROVINSI MALUKU UTARA

Isu strategis dan kegiatan strategis pengembangan wilayah Maluku Utara 2014, adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi aksesibilitas antar wilayah kab/kota, peningkatan jaringan irigasi mendukung ketahanan pangan dan Pengembangan kawasan perumahan layak huni dengan kegiatan strategis yaitu : (1) Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional; (2) Pengembangan Permukiman Layak Huni bagi masyarakat tidak mampu;n (3) Pengembangan Sanitasi dan Persampahan.
2. Penyediaan infrastruktur yang memadai dan konektivitas antarwilayah untuk menunjang kesejahteraan dengan kegiatan strategis : (1) Peningkatan Kapasitas / Pelebaran Jalan Akelamo – Payahe; (2) Peningkatan Kapasitas / Pelebaran Jalan Akelamo – Payahe; (3) Pembangunan Pelabuhan Laut Makariki.

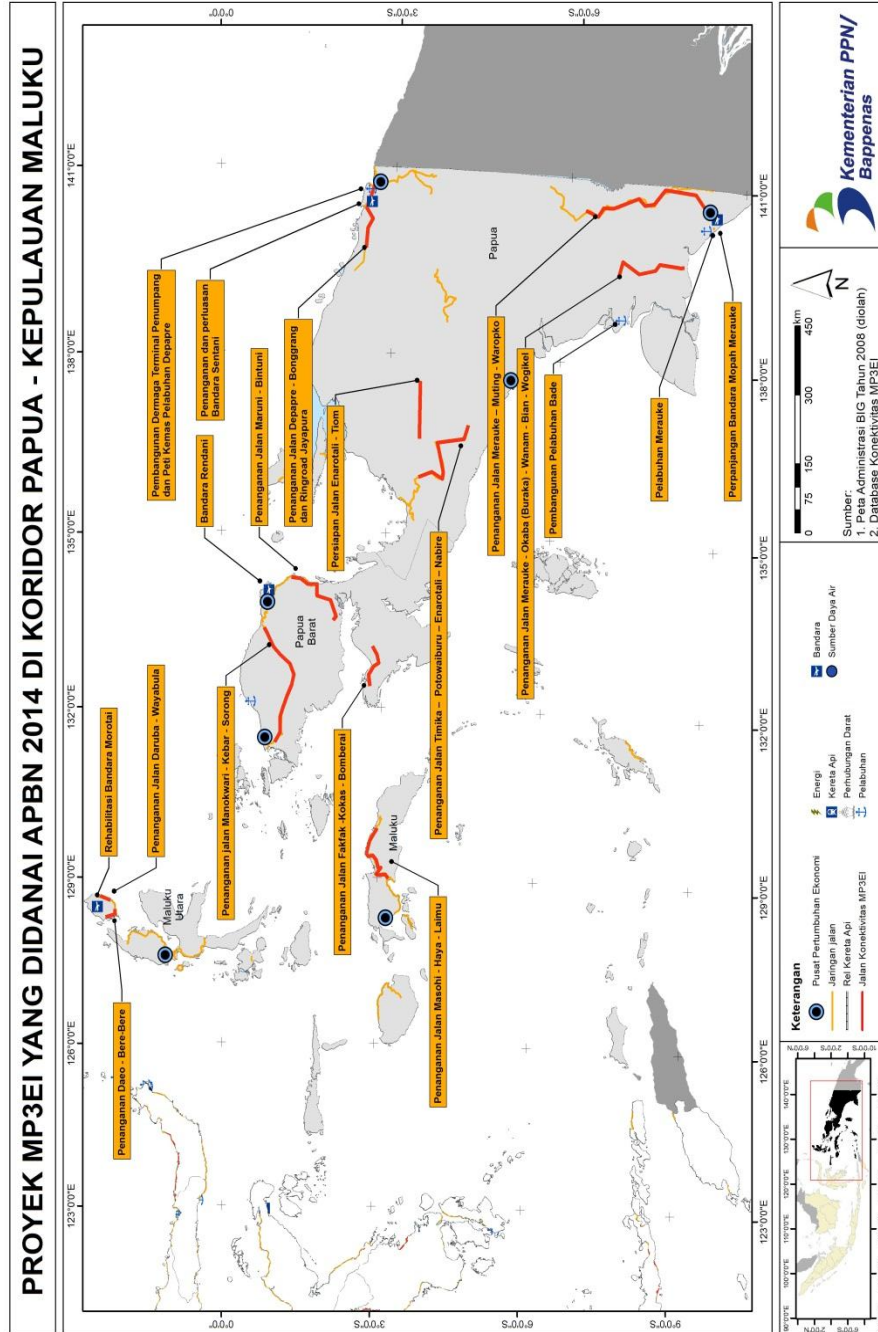
3. Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, termasuk rintisan PMU dengan kegiatan strategis: (1) Peningkatan Layanan Pendidikan SMA; (2) Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di Maluku Utara.
4. Peningkatan Perbaikan Gizi dengan kegiatan strategis : (1) Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat di Maluku Utara; (2) Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Maluku Utara; (3) Optimalisasi Pengendalian Penyakit Menular di Maluku Utara; (4) Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan di Maluku Utara; (5) Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat di Maluku Utara.
5. Optimalisasi Peningkatan infrastruktur bidang pertanian, aksesibilitas hasil pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani dengan kegiatan strategis : (1) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia; (2) Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan di Maluku Utara.
6. Optimalisasi Daerah Perbatasan, Terluar, Terpencil dan Tertinggal: Belum Optimalnya Pengelolaan Pulau Terluar, Terpencil, Perbatasan dan Tertinggal, dengan kegiatan strategis : (1) Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha di Maluku Utara; (2) Pengembangan Angkutan Laut Perintis di Maluku Utara; (3) Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal di Maluku Utara.

Uraian isu strategis, program dan kegiatan prioritas, Kementerian/Lembaga, sasaran, target, dan pagu indikatif di setiap provinsi di Maluku dapat dilihat dalam **Lampiran Bab 7**.

7.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Maluku

Arah Kebijakan Pengembangan MP3EI untuk wilayah Maluku sebagai bagian dari koridor ekonomi Kepulauan Maluku-Papua, memperkuat arah pengembangan wilayah Maluku, dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2014, yakni mengembangkan koridor ekonomi Kepulauan Maluku-Papua sebagai Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan nasional.

GAMBAR 7.1
PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI MELALUI
TA 2014 DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU



7.6 Implementasi MP3KI di Wilayah Kepulauan Maluku

Sebagai fokus implementasi MP3KI untuk wilayah Maluku sebagai bagian dari koridor Kepulauan Maluku-Papua, telah dipilih dua lokasi usulan *quick wins* 2014 di masing-masing provinsi.

Masing-masing Provinsi ditambahkan satu lokasi kecamatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan dilanjutkan tahun 2014.

Lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat, yaitu:

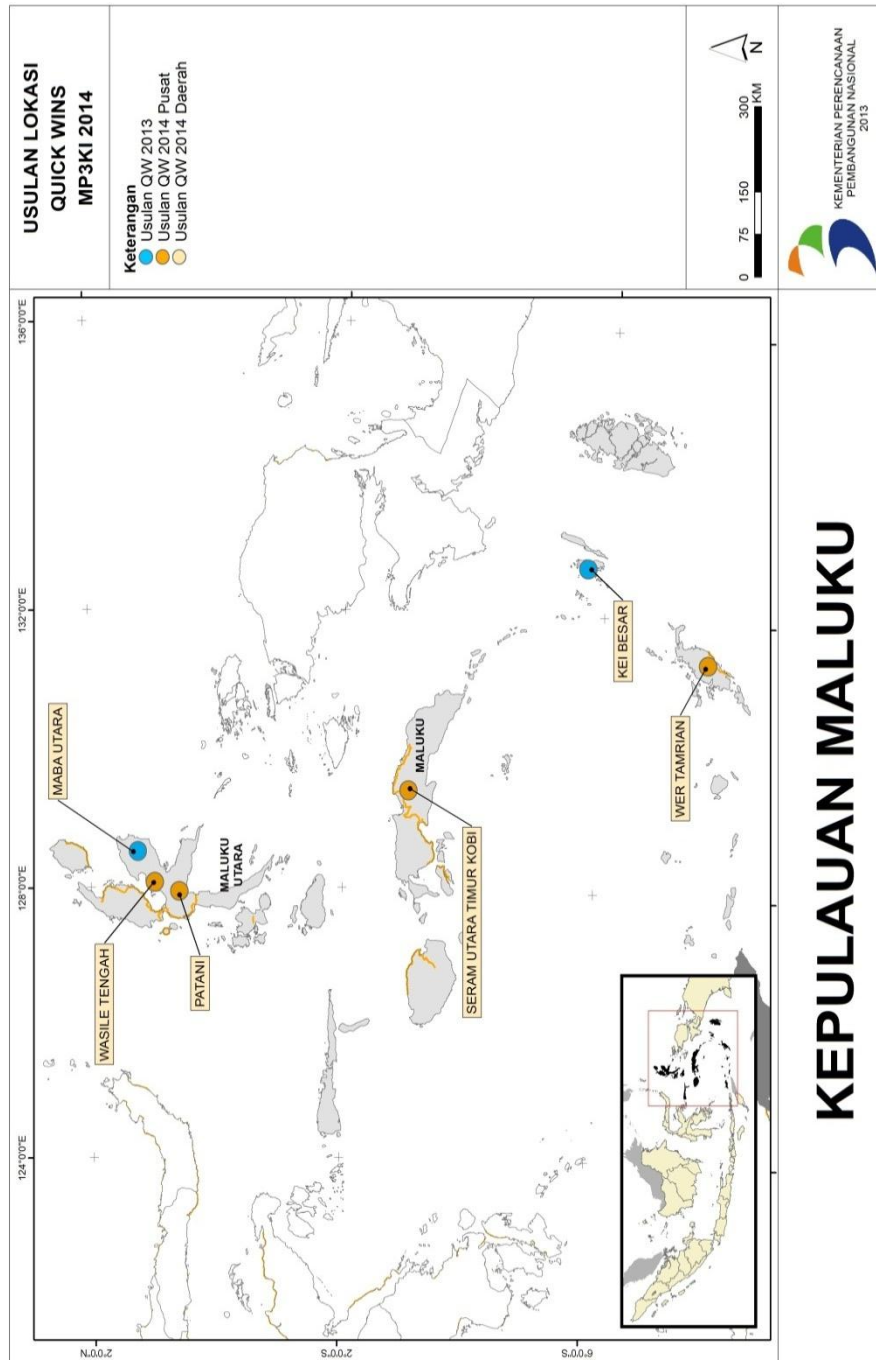
Provinsi Maluku

1. Kabupaten Maluku Tengah, Kecamatan Seram Utara Timur Kobi.
2. Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Kecamatan Wer Tamrian.
3. Kabupaten Maluku Tenggara, Kecamatan Kei Besar.

Provinsi Maluku Utara

1. Kabupaten Halmahera Tengah, Kecamatan Patani.
2. Kabupaten Halmahera Timur, Kecamatan Wasile Tengah.
3. Kabupaten Halmahera Timur, Kecamatan Maba Utara.

GAMBAR 7.2
USULAN LOKASI QUICK WINS MP3KI TA 2014 DI WILAYAH KEPULAUAN MALUKU



LAMPIRAN BAB 7. Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Kepulauan Maluku tahun 2014

A. PROVINSI MALUKU

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|--|--|---|--------------|--|
| 1 | Isu Strategis : Peningkatan Kualitas Pendidikan | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Akses Pendidikan Dasar</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pengembangan Profesi PTK Dan Penjamin Mutu Pendidikan | Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase PTK Lainnya yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme | Maluku : Provinsi Maluku, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Buru, Kota Ambon, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Kepulauan Aru, Kota Tual, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Buru Selatan | - | 0,00 Dana dibahas pada waktu rakortek |
| | <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tendik yang Kompeten Untuk Jenjang Pendidikan Menengah | GURU SMA/SMK/SMLB BERKUALIFIKAS I AKADEMIK S-1/D-4 | Maluku : Provinsi Maluku, Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Tengah, Kab. Maluku Tenggara, Kab. Buru, Kota Ambon, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. | - | 0,00 Dana dibahas pada waktu rakortek |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|---|--|--|--------------|-----------------|
| | | | | Kepulauan Aru, Kota Tual, Kab. Maluku Barat Daya, Kab. Buru Selatan | | |
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | SMK Memiliki Sarana Dan Prasarana Pendidikan Yang Memenuhi Standar Sarana Dan Prasarana SMK | Maluku : Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab. Maluku Tengah, kab. Maluku Tenggara, Kab. Buru, Kab. Ambon, Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Kepulauan Aru, Kota Tual, Kab. Maluku Barat Daya, KAB. Buru Selatan | 7 paket | 1.190 | |

2 Isu Strategis : Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan

Kegiatan Strategis : Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan

Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| | | | | | | |
|---|---|--|---|------|---|--|
| Program Pengembangan Profesi PTK Dan Penjamin Mutu Pendidikan | Pendidikan dan Pelatihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase PTK Lainnya yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme | Maluku : Kab. Buru, Kota Ambon, Kab. Seram Bagian Barat, Kab Seram Bagian Timur, KAB. Kepulauan Aru, Kota Tual, KAB. Maluku Barat Daya, Kab. Buru Selatan | 0,00 | melalui alokasi pusat dan di bawah BPSDMP | |
|---|---|--|---|------|---|--|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---------|----------|-------------------|--------|--------------|-----------------|
|----|---------|----------|-------------------|--------|--------------|-----------------|

3 **Isu Strategis : Perluasan Pelayanan Kesehatan Berbasis Gugus Pulau**

Kegiatan Strategis : Pembangunan Rumah Sakit Pratama di pusat Gugus

Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

| | | | | | |
|---|---------------------------------|--|----------------------------------|---------|-----------|
| Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned | Maluku : Kab. Seram Bagian Barat | 1 paket | 16.000,00 |
| Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned | Maluku : Kab. Seram Bagian Timur | 1 paket | 16.000,00 |
| Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned | Maluku : Kab. Kepulauan Aru | 1 paket | 16.000,00 |

Kegiatan Strategis : Pengadaan Puskesmas Terapung

Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

| | | | | | |
|---|---------------------------------|---|-----------------|-------------|----------|
| Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Jumlah Puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk (jumlah puskesmas keliling yang melayani gugus pulau) | Provinsi Maluku | 5 Kabupaten | 8.000,00 |
|---|---------------------------------|---|-----------------|-------------|----------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|--|--|--------------------------|--------------|-----------------|
| 4 | Isu Strategis : Peningkatan Kesejahteraan petani/nelayan | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Kawasan Perikanan Budidaya yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Pengembangan Sistem Prasarana dan Sarana Pembudi- dayaan Ikan | Jumlah kelompok yang menerapkan teknologi anjuran perikanan budidaya | Provinsi Maluku | 1 Paket | 348,00 |
| | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Pengembangan Sistem Prasarana dan Saran Pembudi- dayaan Ikan | Luas Lahan yang Difasilitasi Sesuai target Produksi Perikanan Budidaya | Provinsi Maluku | 1 | 344,00 |
| | Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya | Pengembangan Sistem Prasarana dan Saran Pembudi- dayaan Ikan | Jum kawasan perikanan budidaya yang memiliki prasarana dan sarana yang memadai | Provinsi Maluku | 1 | 329,00 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pengembangan Komoditas Unggulan Spesifik Lokal</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN PERTANIAN | | | | | |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar | Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri : Cengkeh | Maluku : Provinsi Maluku | 160 | 515,30 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---------|----------|-------------------|--------|--------------|-----------------|
|----|---------|----------|-------------------|--------|--------------|-----------------|

Kegiatan Strategis : Pengembangan Komoditas Unggulan Spesifik Lokal

Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan

KEMENTERIAN PERTANIAN

| | | | | | |
|---|--|--|-----------------------------|--------|----------|
| Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan | Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Tahunan | Pengembangan Komoditas Ekspor : Kelapa | Maluku : Kab. Maluku Tengah | 400 ha | 1.047,00 |
|---|--|--|-----------------------------|--------|----------|

5 Isu Strategis : Percepatan Pembangunan Infrastruktur

Kegiatan Strategis : Pekan Keselamatan di Provinsi Maluku

Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

| | | | | | |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------|----------|
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat | Manajemen dan Peningkatan Keselamatan Transportasi Darat | Jumlah Kegiatan Keselamatan Transportasi Darat (Sosialisasi; Penyusunan Pedoman Teknis Keselamatan Transportasi Darat; Monitoring & Evaluasi Keselamatan Transportasi Darat) | Maluku : Provinsi Maluku | Sosialisasi Keselamatan | 2.200,00 |
|--|--|--|--------------------------|-------------------------|----------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|--|---|--------|----------------|--|
| Kegiatan Strategis : Pembangunan Bendungan dan Jaringan Irigasi serta Embung | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/diting katkan | Kab. Maluku Tengah, Kab. Pulau Buru, Provinsi Maluku | | 2.632 ha | 50.500,00 |
| Kegiatan Strategis : Penyelesaian Jalan Trans Maluku | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/pe ningkatan struktur | Maluku : Provinsi Maluku | | 1.316,9 | 389.430,0 0 |
| Kegiatan Strategis : Pradisain dan DED Pembangunan Dermaga | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Dara | Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi ASDP dan Pengelolaan Prasarana Lalulintas SDP | Jumlah Prasarana Dermaga Penyeberangan (dermaga) | Maluku : Provinsi Maluku | | Dokumen DED | 0,00 Sudah diakomoda si di pusat. |
| Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur Jembatan Wai Kiki dan wai Mboti | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jembatan yang dibangun (M) | Prov. Maluku | | 100 M | 30.000 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---------|----------|----------------------|--------|--------------|--------------------|
|----|---------|----------|----------------------|--------|--------------|--------------------|

Kegiatan Strategis : Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan Modaumohe - Namrole

Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|--------------------------|---|---|--------------|--------|--------|
| Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pel ebaran (Km) | Prov. Maluku | 3,1 Km | 25.000 |
|--------------------------|---|---|--------------|--------|--------|

6 Isu Strategis : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Kegiatan Strategis : Bantuan Long Boat dan peralatan tangkap ikan

Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik

KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

| | | | | | |
|--|---|--|--|---------|----------|
| Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Ekonomi Daerah Tertinggal | Jumlah kabupaten tertinggal yang mendapat bantuan stimulan pengembangan infrastruktur ekonomi | Maluku : Kab. Kab. Seram Bagian Barat, Kab. Seram Bagian Timur, Kab. Maluku Tengah, Kab Buru | 4 paket | 1296,00 |
| Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Energi Daerah Tertinggal | Meningkatnya Pemanfaatan Energi Matahari Untuk Pengembangan Infrastruktur Energi di wilayah perdesaan, tertinggal, terpencil | Kab. Maluku Tenggara Barat, Kab Maluku Barat Daya | 2 paket | 6.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------|--------------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan di Pulau-Pulau terluar</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg dibangun baru | Maluku : Provinsi Maluku | - | | 88.150,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Bersih</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Kapasitas air baku yang ditingkatkan | Provinsi Maluku | 0,14 m ³ /detik | | 21.350,00 |
| <i>Kegiatan Strategis : Penyelesaian Bandar Udara Kufar, Namniwel, Ibra, Saumlaki, Moa dan Perluasan Lapter Namrole dan Dobo</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik | | | | | | |
| KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Maluku : Provinsi Maluku | Target selesai & operasi dan kegiatan lanjutan sisi udara | | 155.300,0 0 |

B. PROVINSI MALUKU UTARA

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|---|--|------------------------|--------------|-----------------|
| 1 | Isu Strategis : Optimalisasi aksesibilitas antar wilayah kab/kota, peningkatan jaringan irigasi mendukung ketahanan pangan dan Pengembangan kawasan perumahan layak huni | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin | Provinsi Maluku Utara | - | 359.180,00 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin | Kota Ternate | | 2.720,00 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin | Kota Tidore Kepulauan | | 102.220,00 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin | Kab. Halmahera Selatan | | 12.490,00 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin | Kab. Halmahera Utara | | 61.880,00 |
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang Jalan yg mendapat pemeliharaan rutin | Kab. Morotai | | 99.500,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---------|----------|-------------------|--------|--------------|-----------------|
|----|---------|----------|-------------------|--------|--------------|-----------------|

Kegiatan Strategis : Pengembangan Permukiman Layak Huni bagi masyarakat tidak mampu

Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Program Pendidikan Menengah | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan dan Pelaksanaan Pengembangan Permukiman | Jumlah Kawasan Permukiman Perkotaan yang Ditangani | Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara | 7 kawasan | 13.300,00 |
|-----------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------|-----------|

Kegiatan Strategis : Pengembangan Sanitasi dan Persampahan

Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------|----------|
| Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman | Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pelaksanaan Pengembangan Sanitasi dan Persampahan | Jumlah Kawasan yang Terlayani Infrastruktur Air Limbah Dengan Sistem Off-Site dan Sistem On-Site | Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara | 1 Kawasan | 5.400,00 |
|---|--|--|--------------------------------------|-----------|----------|

Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------|
| Pengelolaan Sumber Daya Air | Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Kapasitas air baku yang ditingkatkan | Kab. Halmahera Selatan dan Kab. Halmahera Timur | 0.09 m3/dt (Pembangunan Unit Air Baku di Pulau Manggayoang & Mandawong, Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku IKK Maba) | 22.800,00 |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------|

2 Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur yang memadai dan konektivitas antarwilayah untuk menunjang kesejahteraan

Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas / Pelebaran Jalan Akelamo - Payahe

Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|-------------------------------|---|--|----------------------|--------------|-----------------|
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran (Km) | Kab. Halmahera Utara | 3,8 Km | 30.000 |

Kegiatan Strategis : Peningkatan Kapasitas / Pelebaran Jalan Akelamo - Payahe

Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|--|----------------------|-----|--------|
| | Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran (Km) | Kab. Halmahera Utara | 7.5 | 30.000 |
|--|-------------------------------|---|--|----------------------|-----|--------|

Kegiatan Strategis : Pembangunan Pelabuhan Laut Makariki

Prioritas Nasional : Prioritas Infrastruktur

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

| | | | | | | |
|--|---|----------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|--------|
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan | Pembangunan Pelabuhan Laut | Jumlah lokasi pelabuhan | Maluku | Pembangunan Dermaga dan Pengerukan | 20.000 |
|--|---|----------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------|--------|

3 *Isu Strategis : Peningkatan Akses Pendidikan Menengah Berkualitas dan Selaras dengan Kebutuhan Pembangunan, termasuk rintisan PMU*

Kegiatan Strategis : Peningkatan Layanan Pendidikan SMA

Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|
| | Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMA | PESERTA DIDIK SMA Penerima BOP Paket C. | Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara | - | 0,00 melalui alokasi pusat |
|--|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|---|----------------------------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|--|---|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| Kegiatan Strategis : Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di Maluku Utara | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| | Program Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal | Penyediaan dan Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal | Persentase Pendidik PAUDNI Berkualitas S1/D4 | Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara | 29 orang | 101,90 |
| 4 | Isu Strategis : Peningkatan Perbaikan Gizi | | | | | |
| Kegiatan Strategis : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Dasar Kepada Masyarakat di Maluku Utara | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Jumlah Puskesmas yang Menjadi Puskesmas Perawatan Di Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Berpenduduk | Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara | 3 kabupaten | 29.250,00 |
| Kegiatan Strategis : Optimalisasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak di Maluku Utara | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Reproduksi | Persentase (%) Ibu Bersalin yang Ditolong Oleh Nakes Terlatih (Cakupan Pn) | Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara | 3 paket | 1.599,00 |
| Kegiatan Strategis : Optimalisasi Pengendalian Penyakit Menular di Maluku Utara | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Pengendalian Penyakit | Pengendalian Penyakit Menular | Persentase ODHA yang | Maluku Utara : | 3 paket | 399,40 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|------------------------------------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | Langsung | mendapatkan ART | Provinsi Maluku Utara | | |

Kegiatan Strategis : Peningkatan Bantuan Operasional Kesehatan di Maluku Utara

Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

| | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------|-----------|
| Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal | Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara | 2 paket | 27.593,00 |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---------|-----------|

Kegiatan Strategis : Peningkatan Pelayanan Gizi Masyarakat di Maluku Utara

Prioritas Nasional : Prioritas Kesehatan

KEMENTERIAN KESEHATAN

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|---------|----------|
| Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Gizi Masyarakat | Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara | 1 paket | 1.971,00 |
|--|---------------------------|--|--------------------------------------|---------|----------|

5 *Isu Strategis : Optimalisasi Peningkatan infrastruktur bidang pertanian, aksesibilitas hasil pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani*

Kegiatan Strategis : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia

Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan

KEMENTERIAN PERTANIAN

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------------|
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia | Pengembangan, pembinaan dan pengawalan (Paket) | Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara | 1Paket | 709,00 |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia | Pengembangan, pembinaan dan pengawalan (Paket) | Maluku Utara : Kab. Halmahera Barat | 1Paket | 137,70 |
| | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia | Pengembangan, pembinaan dan pengawalan (Paket) | Maluku Utara : Kab. Halmahera Timur | 1Paket | 132,60 |

Kegiatan Strategis : Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan di Maluku Utara

Prioritas Nasional : Prioritas Ketahanan Pangan

KEMENTERIAN PERTANIAN

| | | | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|--------|----------|
| program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | Jumlah desa yang diberdayakan dalam program aksi desa mapan (Desa) | Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara | 9 Desa | 1.366,00 |
|---|---|--|--------------------------------------|--------|----------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|--|---|--|---|--------------------|
| 6 | Isu Strategis : Optimalisasi Daerah Perbatasan, Terluar, Terpencil dan Tertinggal: Belum Optimalnya Pengelolaan Pulau Terluar, Terpencil, Perbatasan dan Tertinggal | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha di Maluku Utara | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik | | | | | |
| | KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil | Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil | Jml pulau kecil yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur termasuk pulau- pulau kecil terluar | Provinsi Maluku Utara | 1 Pulau | 1.600,00 |
| | Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan tangkap | Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan & Pemberdayaan Nelayan Skala Kecil | Jml kelompok nelayan KUB penerima Pengembangan Usaha Mina Perdesaan | Provinsi Maluku Utara | 37 KUB | 3.700,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan Angkutan Laut Perintis di Maluku Utara | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik | | | | | |
| | KEMENTERIAN PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Laut | Bertambahnya jumlah armada yang dibangun | Maluku Utara : Provinsi Maluku Utara | Lanjutan Pembangunan Fasilitas Pelabuhan | 328.000,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Tertinggal di Maluku Utara | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik | | | | | |
| | KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | | | | | |
| | Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | Pengembangan Kebijakan, Koordinasi dan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi | Jumlah kabupaten yang mendapatkan bantuan stimulan pembangunan infrastruktur | Maluku Utara : Kab. Halmahera Utara dan Kab. Halmahera Selatan | 2 Kabupaten | 3.200,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|--|-------------------------------------|---------|--------------|--------------------|
| | | Daerah Tertinggal | telekomunikasi daerah tertinggal | | | |
| <i>Kegiatan Strategis : Pengembangan Komoditas Unggulan Daerah Tertinggal</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar Dan Pasca Konflik | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | | | | | | |
| Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal | Pengembangan Kebijakan Pengelolaan Komoditas Unggulan | Jumlah daerah tertinggal yang mendapat bantuan stimulan dalam pengembangan produk unggulan | Kab. Halmahera Selatan | 1 paket | 1.400,00 | |

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2014

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|-------------------|---------|-------------------------------|---------------------|--|---------------------------------|-------|---------|----------------------------|------------------------|
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Kepulauan Maluku | Penangan an Jalan Masohi - Haya - Laimu (136.313 km) | 94 | 2011 | 2014 | Kementerian PU | 7,00 |
| MALUKU - PAPUA | BANDARA | APBN | Maluku Utara | Rehabilitasi Bandara termasuk Perpanjang an Runway Bandara Udara Morotai. | 78 | 2011 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 47,8 |
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Maluku Utara | Penangan an jalan Daeo - Bere-Bere (55.7 km) | 396 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 21,00 |
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Maluku Utara | Penangan an Jalan Daruba - Wayabula 52 km | 158 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 2,50 |

BAB 8

PENGEMBANGAN WILAYAH PAPUA TAHUN 2014

8.1 Kondisi Wilayah Papua Saat Ini

Secara umum kinerja perekonomian wilayah Papua tidak sebesar sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain masih tingginya ketergantungan ekspor-impor produk pertambangan dalam kinerja perekonomian daerah. Adapun Sektor utama yang menyumbang perekonomian wilayah Papua adalah sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, serta perdagangan. Sejalan dengan perbaikan kinerja ekonomi wilayah, PDRB per kapita wilayah juga mengalami peningkatan secara riil.

Dalam bidang sosial, indikator sosial di Wilayah Papua mengalami perbaikan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun di Wilayah Papua dan capaian TPT di tingkat wilayah tersebut lebih baik dari TPT nasional. Tingkat kemiskinan di Provinsi Papua masih jauh di atas rata-rata nasional. Sementara itu, dalam hal pembangunan manusia, semua provinsi menunjukkan perbaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) pada tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun masih jauh di bawah rata-rata nasional.

Di bidang infrastruktur wilayah, total panjang jaringan jalan di Papua terjadi penambahan jalan sepanjang 3.074 km pada tahun 2011 dari 1.876 km pada tahun 2005. Namun, kualitas jalan justru mengalami penurunan, di mana persentase jalan dengan kondisi buruk meniongkta tajam dari 13,9 persen menjadi 32,6 persen antara tahun 2005 dan 2011. Kebutuhan total listrik untuk wilayah Papua adalah sebesar 1,95 PJ dengan asumsi pertumbuhan penduduk sebesar 9,6 persen. Pada tahun 2011, rasio elektrifikasi sebesar 32,6 persen dengan komposisi rasio elektrifikasi untuk daerah Papua Barat adalah 58,24 persen dan Papua 29,25 persen dan rasio desa berlistrik Provinsi Papua sebesar 39,07 persen dan Papua Barat 83,11 persen. Pembangunan jaringan broadband dijadwalkan dimulai tahun 2012, dengan target 9 kabupaten/kota, dan penyelesaiannya diperkirakan tahun 2014. Sementara itu, terkait dengan daerah irigasi, luas daerah irigasi di Papua sampai dengan tahun 2007 mencapai 39,52 ribu hektar atau sekitar 1 persen dari total daerah irigasi di seluruh Indonesia. Seluruh jaringan irigasi tersebut ketersediaan airnya masih mengandalkan aliran sungai, baik

melalui bendung maupun *free intake*. Sedangkan luas daerah rawa mencapai 23,71 ribu hektar (rawa lebak).

TABEL 8.1
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PAPUA

| Perkembangan Pembangunan | Papua | Papua Barat |
|--|------------------------|-------------------------|
| Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2012 (ADHK 2000) * (%) | 1,08 | 15,84 |
| PDRB Perkapita Dengan Migas Tahun 2012 ADHK 2000 (Rp.Ribu) | 6.816 | 16.882 |
| Persentase Pengangguran Tahun 2012 (Agustus) (%) | 4,85 | 9,30 |
| Persentase Kemiskinan Tahun 2012 (September) (%) | 30,66 | 27,04 |
| Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2011 | 65,36 (Peringkat33) | 69,65 (Peringkat 29) |
| Indeks Pembangunan Gender Tahun 2010 | 62,00 | 58,90 |
| Indeks Pemberdayaan Gender Tahun 2010 | 55,40 | 58,00 |
| Umur Harapan Hidup Tahun 2011 (Tahun) | 68,85 | 68,81 |
| Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2011 (Tahun) | 6,69 | 8,26 |

Sumber :BadanPusatStatistik

Keterangan : *) = Data Pertumbuhan c-to-c Triwulan IV 2010

Dari sisi ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA), berdasar data sebaran produksi pangan utama tahun 2010, untuk komoditas padi, jagung, kedelai, kelapa sawit, dan daging sapi, memiliki kontribusi terhadap produksi nasional. Selain itu wilayah Papua mempunyai cadangan minyak dan gas cukup besar untuk minyak sebesar 94,93 MMSTB sedang untuk gas sebesar 24,32 TSCF. Luas kawasan hutan di Papua merupakan yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya yaitu sebesar 42,2 juta hektar.

Wilayah Papua memiliki kawasan perbatasan, baik berupa perbatasan laut maupun perbatasan darat. Gangguan keamanan yang masih terjadi di wilayah perbatasan ini terutama dalam bentuk aktivitas ilegal berupa pencurian sumber daya alam, aktivitas penebangan tidak berijin, dan pergeseran patok-patok perbatasan yang kesemuanya itu berpotensi merugikan kewibawaan dan kedaulatan NKRI. Masih banyak daerah yang termasuk tertinggal di wilayah Papua. Di Provinsi Papua Barat, 8 dari 11 kabupaten/kota termasuk daerah tertinggal, sedangkan di Provinsi Papua, 27 dari 29 kabupaten/kota termasuk daerah tertinggal.

8.2 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Wilayah Papua

Tujuan pembangunan wilayah Papua dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat pada tahun 2014 adalah untuk:

1. Meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah Papua;
2. Meningkatkan standar layanan jasa pendidikan di Papua;
3. Meningkatkan standar layanan jasa kesehatan di Papua;
4. Meningkatkan produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan di wilayah Papua;
5. Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi;
6. Meningkatkan jumlah, mutu dan jangkauan sistem jaringan prasarana;
7. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat wilayah Papua terhadap pelayanan publik dasar;
8. Meningkatkan sinergi dalam pengelolaan sumber daya alam dan tambang;
9. Meningkatkan fungsi transportasi udara perintis untuk daerah terpencil dan pedalaman di wilayah Papua;
10. Meningkatkan aksesibilitas antarwilayah di Papua dan daerah perbatasan;
11. Meningkatkan kondisi keamanan dan pengawasan kawasan perbatasan antara Papua dan Papua Nugini.
12. Mewujudkan dan mempertahankan fungsi Papua sebagai bagian dari paru-paru dunia dan konservasi keanekaragaman hayati.
13. Mewujudkan kemandirian;
14. Meningkatkan mutu pengelolaan otonomi khusus dan koordinasi percepatan pembangunan wilayah Papua.
15. Meningkatkan kapasitas penyediaan air baku untuk mengurangi tekanan krisis air di Pulau Papua.
16. Mendorong terlaksananya pemenuhan, perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Sasaran untuk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2014 yang bersifat cepat terwujud dan dirasakan dampaknya bagi masyarakat, terutama adalah:

1. Meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Papua yang ditunjukkan dengan membaiknya berbagai indikator pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi,

kemiskinan, pengangguran, angka kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta pendapatan per kapita (tabel 8.2);

2. Tersedianya pendidikan gratis sampai SMU hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat;
3. Tersedianya pelayanan kesehatan gratis hingga menjangkau seluruh distrik dan kampung di Provinsi Papua dan Papua Barat;
4. Terlaksananya pengembangan peternakan di Kawasan Pegunungan Tengah, Bomberai, dan Kebar;
5. Meningkatnya ketersediaan, kualitas, dan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana transportasi, baik darat, laut maupun udara;
6. Meningkatnya jumlah, mutu, dan jangkauan sistem jaringan prasarana dasar (jalan, pelabuhan, lapangan udara, telekomunikasi, listrik dan telepon);
7. Tersedianya sumber energi alternatif terbarukan (PLTMH, PLTS) dan terbangunnya pabrik semen di Timika dan Manokwari;
8. Pemberian kuota khusus bagi putra-putri asli Papua berupa kuota kepada siswa berprestasi untuk menempuh pendidikan tinggi, kuota menjadi anggota TNI/Polri dan sekolah Akademi Militer dan Akademi Kepolisian, serta pendirian sekolah kebidanan/keperawatan, sekolah keparamedial, dan sekolah pendidikan keguruan.
9. Memastikan keberlanjutan layanan telekomunikasi dan internet di wilayah USO dan memulai pengoperasian jaringan broadband
10. Pembangunan sistem penyediaan air baku di Wasior, Sorong, Manokwari, Raja Ampat, Kota Jayapura, Nabire, Yalimo, dan Lanny;
11. Percepatan peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi DI Klasegun, Malaos, Mariyat dan Klasafet di Sorong, DI Waibu di Raja Ampat, DI Oransbari di Manokwari, DI Wanggar, Yaho, dan Mayde di Nabire, DI Koya di Jayapura, dan DI Yahukimo;
12. Menurunnya resiko banjir di daerah-daerah pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan permukiman pada penduduk dan jalur transportasi utama;

13. Meningkatnya pelaksanaan kegiatan RANHAM berdasarkan amanat Perpres No.23 Tahun 2011 yaitu melalui pembentukan dan penguatan institusi pelaksana RANHAM, harmonisasi rancangan dan evaluasi Perda, pendidikan HAM, penerapan norma dan standar HAM, pelayanan komunikasi masyarakat dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

TABEL 8.2
SASARAN PERTUMBUHAN EKONOMI, KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2014

| Provinsi | Pertumbuhan Ekonomi ¹⁾ (%) | Kemiskinan ²⁾ (%) | Pengangguran ³⁾ (%) |
|-------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Papua Barat | 7,00 – 7,60 | 19,94 | 2,80 – 1,63 |
| Papua | 6,20 – 6,70 | 22,95 | 3,60 – 2,50 |

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾ Pertumbuhan Ekonomi: persentase laju perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

²⁾ Kemiskinan: persentase jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk.

³⁾ Pengangguran: persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap total angkatan kerja

TABEL 8.3
SASARAN ANGKA KEMATIAN BAYI, ANGKA HARAPAN HIDUP
DAN RATA-RATA LAMA SEKOLAH DI WILAYAH PAPUA TAHUN 2014

| Provinsi | Angka Kematian Bayi ¹⁾ | Rata-Rata Lama Sekolah ²⁾ | Umur Harapan Hidup ³⁾ |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| Papua Barat | 27 | 8,37 | 70,47 |
| Papua | 27 | 6,86 | 70,63 |

Sumber: Proyeksi Bappenas; BPS; Susenas

Keterangan: ¹⁾ Angka Kematian Bayi: jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup.

²⁾ Rata-rata Lama Sekolah: rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.

³⁾ Angka Harapan Hidup: perkiraan lama hidup rata-rata penduduk.

8.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Papua

Pengembangan wilayah Papua diarahkan untuk pengembangan sektor dan komoditas unggulan, pengembangan wilayah perbatasan dengan memadukan peningkatan kesejahteraan dan keamanan, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya

manusia, dan juga peningkatan ketahanan pangan di tingkat wilayah, disamping itu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi ke depan di Koridor Maluku-Papua, pengembangan wilayahnya diarahkan sebagai Pengolahan Sumber Daya Alam yang Melimpah dan SDM yang Sejahtera.

Pada tahun 2014, sebagai upaya mewujudkan percepatan Papua dan Papua Barat dilakukan dengan strategi :

1. Pembangunan kawasan terisolir;
2. Pembangunan kawasan perdesaan;
3. Pembangunan kawasan perkotaan; dan
4. Pembangunan kawasan strategis;

Kebijakan percepatan sebelumnya, disempurnakan dengan memperluas bidang kebijakan pokok percepatan dengan prinsip pengembangan kawasan yang diarahkan untuk keterpaduan dan sinergi lintas bidang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat asli Papua dan Papua Barat yang terdiri dari:

1. Penguatan ketahanan pangan.
2. Penanggulangan kemiskinan.
3. Pengembangan ekonomi rakyat.
4. Peningkatan pelayanan pendidikan.
5. Peningkatan pelayanan kesehatan.
6. Pengembangan infrastruktur dasar.
7. Pemihakan terhadap masyarakat asli Papua dan Papua Barat.

Dalam pelaksanaan Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diperlukan dukungan dari kebijakan yang bersifat regulasi dan kelembagaan sebagai berikut:

1. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan pengelolaan pertanahan.
2. Keamanan dan ketertiban.
3. Pengembangan kapasitas kelembagaan.

Pengembangan wilayah Papua Tahun 2014 terutama diarahkan untuk :

1. Menempatkan hak ulayat di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan nilai-nilai sosial budaya setempat;
2. Memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara produktif dan efisien agar terhindar dari

pemborosan dan penurunan daya dukung lingkungan sehingga dapat memberi manfaat sebesar-besarnya berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan;

3. Mempertahankan kawasan lindung sekurang-kurangnya 50 persen dari luas wilayah Pulau Papua;
4. Memacu pertumbuhan ekonomi wilayah Pulau Papua melalui pengembangan sektor-sektor unggulan yang berbasis sumber daya setempat dan meningkatkan keterkaitan antar pusat pertumbuhan wilayah;
5. Menampung berbagai kegiatan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan usaha melalui pengembangan kawasan dan pusat pertumbuhan;
6. Meningkatkan keterkaitan yang saling menguntungkan antara kawasan andalan dan tertinggal dalam rangka peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah di sekitar kawasan andalan;
7. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas, serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya transportasi laut yang didukung oleh transportasi antarmoda secara terpadu dan optimal dengan mengikutsertakan dunia usaha; serta
8. Meningkatkan pengembangan wilayah pedalaman dan perbatasan yang tertinggal dan terisolasi dengan menyeraskan laju pertumbuhan antarwilayah.

8.4 Isu Strategis dan Kegiatan Strategis Wilayah Papua

Isu Strategis masing-masing provinsi di Wilayah Papua adalah sebagai berikut:

Provinsi Papua

Isu strategis pembangunan wilayah Papua 2014, adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah dengan kegiatan Strategis: (1) pembangunan Bandar Udara di Kab. Jayapura, Kab. Nabire, Kab. Yahukimo, (2) Pembangunan jalan dan jembatan di Kab. Jayapura, Kab. Jayawijaya, Kab. Merauke, Kab. Mimika, Kota Jayapura, Kab. Deiyai, (3) Pengadaan Pesawat Udara di Provinsi Papua; (3) Rekonstruksi/Peningkatan Struktur Jalan dan Jembatan di Kab. Jayapura, Kab. Jayawijaya, Kab. Merauke, Kab.

- Mimika, Kab. Nabire, Kab. Paniai, Kab. Kepulauan Yapen, Kota Jayapura, Kab. Sarmi, Kab. Keerom, Kab. Boven Digoel, Kab. Lanny Jaya, Kab. Deiyai; (4) Rounding up jaringan irigasi Kalibumi Kiri (2000 ha) di Kab. Nabire; (5) Pembangunan pengaman Pantai Dok II.
2. Peningkatan Ketahanan Pangan berbasis Potensi Lokal dengan kegiatan strategis: (1) Diversifikasi Pangan dan Gizi di Kab. Jayapura; (2) Pembangunan jaringan irigasi untuk Kab. Nabire, dan Kab. Yahukimo; (3) Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal yang berada di Kab. Biak Numfor; (4) Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah.
 3. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan strategis yaitu (1) Pembangunan Puskesmas; dan (2) Pembangunan rumah sakit Pratama.
 4. Peningkatan angka Melek Huruf dan Rata-rata lama Sekolah dengan kegiatan strategisnya : (1) Pembangunan SD-SMP Satu Atap Berasrama (Asrama siswa, rumah guru, rumah kepala sekolah dan penjaga sekolah); (2) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal dalam rangka pelaksanaan keaksaraan Fungsional di Kab. Paniai.
 5. Penyediaan Infrastruktur untuk Mendukung ketahanan pangan dan energi dengan kegiatan strategis yaitu (1) Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH); (2) Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar.

Provinsi Papua Barat

Isu strategis pembangunan wilayah Papua Barat 2014, adalah sebagai berikut:

1. Belum adanya pemerataan terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkesinambungan sehingga perlu diatasi dengan kegiatan strategis (1) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK); (2) Bantuan Sarana Prasarana Kesehatan (Pembangunan Puskesmas, Pustu, Gudang farmasi, Puskesmas keliling, ambulans, mobil jenazah); (3) Pemberian tambahan makanan pendamping dan vitamin bagi ibu hamil, bayi dan balita); (4) Pengadaan

peralatan dan obat-obatan rumah sakit.

2. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan sehingga perlu diatasi dengan kegiatan strategis berikut : (1) Pemberdayaan Komunitas adat Terpencil; (2) Pemberian Bantuan bagi Koperasi perdesaan dan perkotaan Provinsi Papua Barat, Kab. Sorong, Kab. Manokwari, Kab. Fakfak, Kota Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Teluk Bintuni, Kab. Teluk Wondama, Kab. Maybrat, Kab. Tambrauw; (3) Pembangunan PMTLH.
3. Rendahnya kualitas sumber daya manusia diatasi dengan Kegiatan Strategis : (1) Peningkatan Saran dan Prasarana Pendidikan Dasar; (2) Peningkatan Saran dan Prasarana Pendidikan Menengah; (3) Rehabilitasi Gedung sekolah Pendidikan dasar.
4. Terbatasnya infrastruktur dasar pembangunan terutama akses transportasi di kawasan terisolir Papua Barat dengan kegiatan Strategis yaitu: (1) Peningkatan Bandara Deo Sorong; (2) Peningkatan Bandara Udara Rendani Manokwari; (3) Peningkatan Bandara Udara Torea; (4) Pembangunan dan Pengerukan Pelabuhan laut Roswar; (5) Pembangunan Jembatan Arar 2.
5. Rendahnya kegiatan perekonomian wilayah dan pengembangan ekonomim kerakyatan dengan kegiatan strategis ; (1) Pengembangan Infrastruktur kelautan dan perikanan (sarana dan prasarana); dan (2) Pengembangan Pelabuhan Perikanan PP Pantai Sorong.

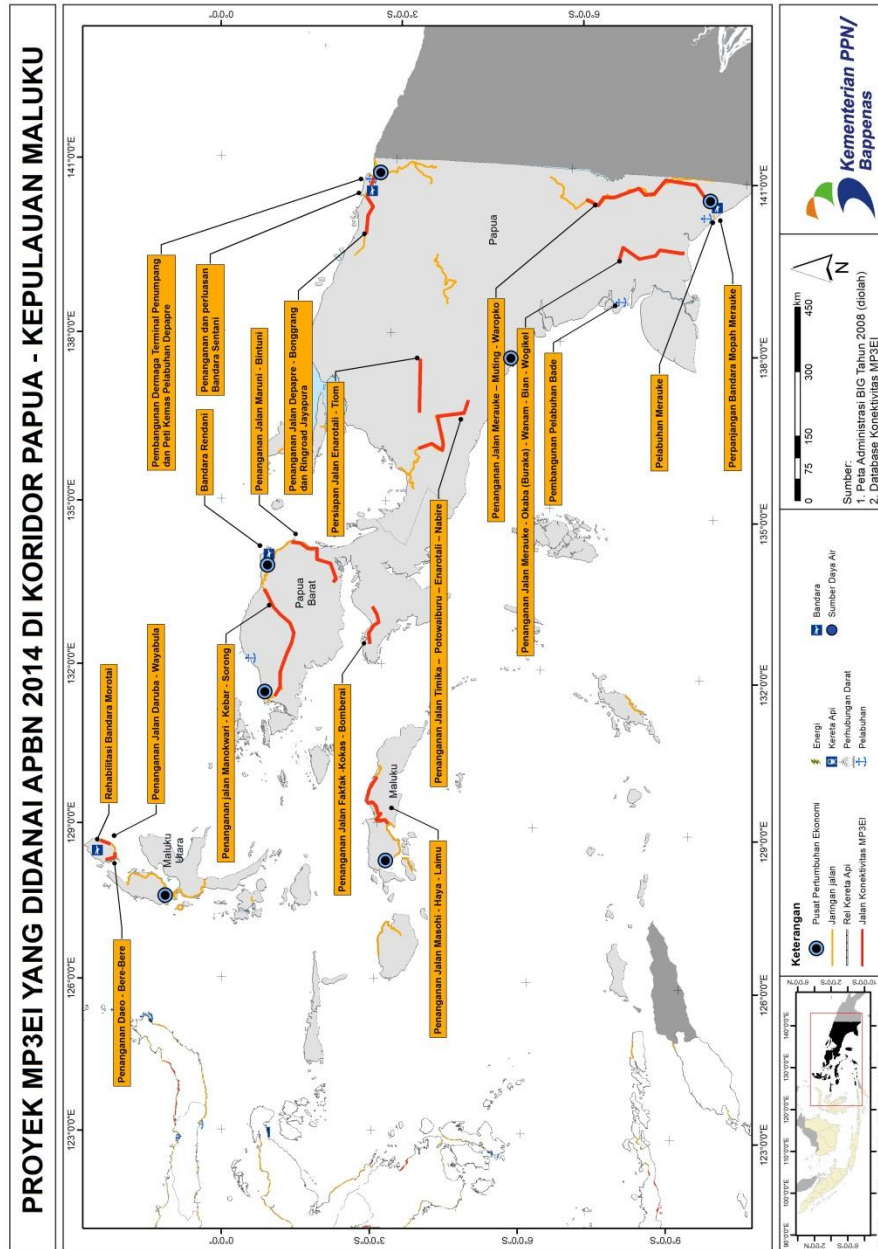
Uraian isu strategis, program dan kegiatan prioritas, Kementerian/Lembaga, sasaran, target, dan pagu indikatif di setiap provinsi di Papua dapat dilihat dalam Lampiran Bab 8.

8.5 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur MP3EI di Wilayah Papua

Arah Kebijakan Pengembangan MP3EI untuk wilayah Papua sebagai bagian dari koridor ekonomi Kepulauan Maluku-Papua, memperkuat arah pengembangan wilayah Papua, dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2014, yakni mengembangkan koridor ekonomi Kepulauan Maluku-Papua sebagai Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi dan Pertambangan nasional.

GAMBAR 8.1

PROYEK MP3EI DAN INFRASTRUKTUR STRATEGIS YANG AKAN DIBIYAI MELALUI TA 2014 DI WILAYAH PAPUA



8.6 Implementasi MP3KI di Wilayah Papua

Sebagai fokus implementasi MP3KI untuk wilayah Papua sebagai bagian dari koridor Kepulauan Maluku-Papua, telah dipilih dua lokasi usulan *quick wins* 2014 ditambah satu lokasi kecamatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan dilanjutkan tahun 2014.

Lokasi-lokasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat tersebut adalah:

Provinsi Papua

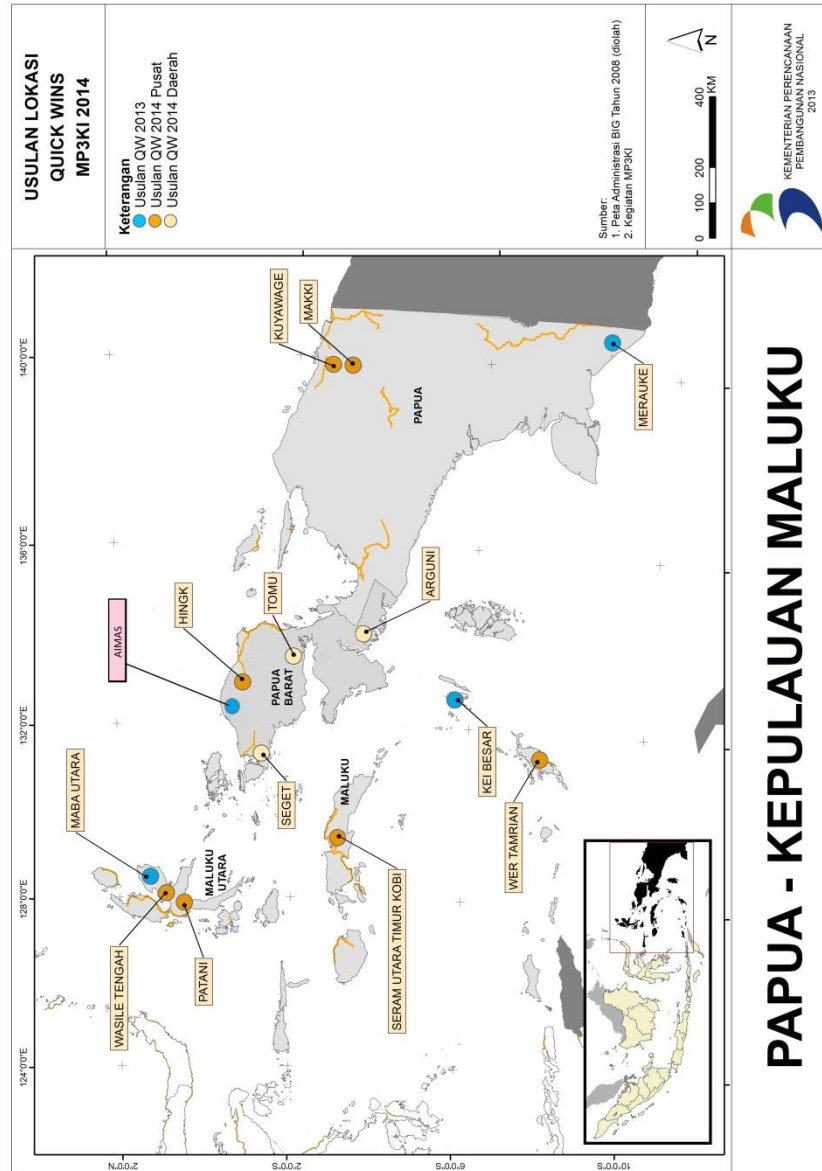
1. Kabupaten Lanni Jaya, Kecamatan Kuyawage
2. Kabupaten Lanni Jaya, Kecamatan Makki
3. Kabupaten Merauke, Kecamatan Merauke.

Wilayah Papua Barat sebagai bagian dari koridor Kepulauan Maluku-Papua, telah dipilih 4 lokasi kecamatan dan 1 lokasi kecamatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 2013 dan dilanjutkan tahun 2014, yaitu:

Provinsi Papua Barat

1. Kabupaten Sorong, Kecamatan Aimas
2. Kabupaten Sorong, Kecamatan Seget
3. Kabupaten Manokwari, Kecamatan Hingk
4. Kabupaten Teluk Bintuni, Kecamatan Tomu
5. Kabupaten Kaimana, Kecamatan Arguni

GAMBAR 8.2
USULAN LOKASI QUICK WINS MP3KI TA 2014 DI WILAYAH PAPUA



LAMPIRAN BAB 8. Isu Strategis, Kegiatan Strategis, dan Kegiatan MP3EI Bidang Infrastruktur di Pulau Papua tahun 2014

A. PROVINSI PAPUA

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS*

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|---|--|-----------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur yang mengurangi kesenjangan antarwilayah | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandar Udara</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Kabupaten Jayapura | 1 paket | 21000 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandar Udara</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Kabupaten Nabire | 1 paket | 21500 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Bandar Udara</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | |
| | Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Kabupaten Yahukimo | 1 paket | 42000 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---------|----------|-------------------|--------|--------------|--------------------|
|----|---------|----------|-------------------|--------|--------------|--------------------|

Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan dan Jembatan

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|-------|---------|
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dibangun (Km) | Kabupaten Jayapura | 15 Km | 127.690 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------|-------|---------|

Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan dan Jembatan

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|--|--------|
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dibangun (Km) | Kabupaten Jayawijaya | | 148250 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|--|--------|

Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan dan Jembatan

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|--|--------|
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dibangun (Km) | Kabupaten Merauke | | 102950 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------|--|--------|

Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan dan Jembatan

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|-------|
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dibangun (Km) | Kabupaten Mimika | | 38300 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|-------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---------|----------|-------------------|--------|--------------|--------------------|
|----|---------|----------|-------------------|--------|--------------|--------------------|

Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan dan Jembatan

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------|--|--------|
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dibangun (Km) | Kota Jayapura | | 167640 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---------------|--|--------|

Kegiatan Strategis : Pembangunan Jalan dan Jembatan

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|-------|
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang dibangun (Km) | Kabupaten Deiyai | | 53750 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|------------------|--|-------|

Kegiatan Strategis : Pengadaan Pesawat Udara

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|-------|
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pelayanan Angkutan Udara Perintis | Jumlah Rute Perintis yang Terlayani | Provinsi Papua | 1 unit | 40000 |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------|--------|-------|

Kegiatan Strategis : Rekonstruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--------------------|------|--------|
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kabupaten Jayapura | 14.9 | 127690 |
|-------------------------------|---|---|--------------------|------|--------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|---|----------------------|--------|--------------|--------------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kabupaten Jayawijaya | 19.9 | | 148250 |
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kabupaten Merauke | 5 | | 102950 |
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kabupaten Mimika | 4.2 | | 23300 |
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kabupaten Nabire | 26 | | 119110 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|---|---------------------------|--------|--------------|--------------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kabupaten Paniai | 5 | | 17000 |
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kabupaten Kepulauan Yapen | 5,4 | | 22540 |
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kota Jayapura | 5 | | 102950 |
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kabupaten Sarmi | 9.3 | | 94030 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|----------|---|------------------------|--------------|--------------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kabupaten Keerom | 14,4 | 108860 |
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kabupaten Boven Digoel | 37,7 | 250340 |
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kabupaten Dogiyai | 9 | 86960 |
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kabupaten Lanny Jaya | 11,2 | 77780 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|--|---|---|----------|--------------|--------------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Panjang jalan yg mendapat rekonstruksi/peningkatan struktur | Kabupaten Deiyai | 60 m | 53750 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran (Km) | Prov. Papua Peningkatan Struktur Jalan Timika-Waghete | 8,8 Km | 7000 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Rekontruksi/Peningkatan Struktur jalan dan Jembatan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jalan yang ditingkatkan kapasitasnya/pelebaran (Km) | Jalan Jayapura – Wamena | 12,5 Km | 100.000,0 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Rounding up jaringan irigasi Kalibumi Kiri (2000 ha)</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Luas layanan jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kab Nabire | 2.000 ha | 55.000 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---------|----------|-------------------|--------|--------------|--------------------|
|----|---------|----------|-------------------|--------|--------------|--------------------|

Kegiatan Strategis : Pembangunan pengaman Pantai Dok II

Prioritas Nasional : Infrastruktur

KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM

| | | | | | |
|-----------------------------|--|--|---------------|--------|-------|
| Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengendalian Banjir, Lahar Gunung Berapi dan Pengamanan Pantai | Panjang sarana/prasarana pengaman pantai yang dibangun | Kota Jayapura | 0.4 km | 22000 |
|-----------------------------|--|--|---------------|--------|-------|

Kegiatan Strategis : Pembangunan PMTLH

Prioritas Nasional : Prioritas Energi

KEMENTERIAN : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

| | | | | | |
|--|--|---|-------------|--|---------|
| Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi | Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru Terbarukan | Terwujudnya Pembinaan, Pengawasan dan Pengusahaan Aneka Energi Baru (Jumlah pembangkit listrik energi terbarukan) | Prov. Papua | 1 Unit PLTMH dan 18 unit PLTS terpusat | 129.824 |
|--|--|---|-------------|--|---------|

2 Isu Strategis : Peningkatan Ketahanan Pangan Berbasis Potensi Lokal

Kegiatan Strategis : Diversifikasi Pangan dan Gizi

Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan

KEMENTERIAN : PERTANIAN

| | | | | | |
|---|---|--|--------------------|---------|------|
| Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | Jumlah Hasil Analisis Ketersediaan, Rawan Pangan dan Akses Pangan dalamantisipasi rawan pangan (Laporan) | Kabupaten Jayapura | 73 desa | 9746 |
|---|---|--|--------------------|---------|------|

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|--|-----------------------|--|----------------|--------------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan jaringan irigasi</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Nabire | bendung Nuhoa dan 525 ha (DI Nuhoa dan DI. MAidey) | 24.000 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan jaringan irigasi</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air | Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya | Jumlah luas jaringan irigasi yang dibangun/ditingkatkan | Kabupaten Yahukimo | 250 ha (Pembangunan jaringan primer dan sekunder DI. Yahukimo) | 10.700 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERTANIAN | | | | | | |
| Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan | Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia | Luas SLPTT Padi meningkat produktivitas 0.3-1 ku/ha (ha) | Kabupaten Biak Numfor | 21600 ha | 24390 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERINDUSTRIAN | | | | | | |
| Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Kecil Menengah | Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wil. III | Jumlah Dokumen Perencanaan | Provinsi Papua | | Kegiatan Pusat | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|--------------------------------------|--|-------------------|-----------------|--------------------|
| 3 | Isu Strategis : Meningkatnya Akses Pelayanan Kesehatan | | | | | |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Puskesmas | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Persentase (%) Puskesmas Rawat Inap yang Mampu Poned | Provinsi Papua | 16 kabupaten | 47250,00 |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | Jumlah Puskesmas yang menjadi Puskesmas Perawatan di Perbatasan dan Pulau-pulau Kecil Terluar Bersududuk (jumlah puskesmas yang dibangun di daerah terisolir) | Provinsi Papua | 3 kabupaten | 8.000,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pembangunan Rumah Sakit Pratama | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | Persentase (%) RS Kab/Kota yang melaksanakan Ponek | Provinsi Papua | 10 kabupaten | 10.000,00 |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan | Jumlah TT Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan (peningkatan sarana prasarana pelayanan RS) | Provinsi Papua | 1 Kabupaten | 15.000,00 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|---|-----------------------------------|-------------|---------------|--------------------|
| 4 | Isu Strategis : Peningkatan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan SD-SMP Satu Atap Berasrama (Asrama siswa, rumah guru, rumah kepala sekolah dan penjaga sekolah)</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program | Penjaminan | PERSENTASE | Kabupaten | 9 | 28800 |
| | Pendidikan Dasar | Kepastian Layanan Pendidikan SD | SD/SDLB YANG SESUAI DENGAN SPM | Yakuhimo | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal Dalam Rangka Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Pendidikan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | |
| | Program | Penyediaan | Persentase | Kabupaten | 38500 | 14385 |
| | Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal | Layanan Pendidikan Masyarakat | Kecamatan yang Memiliki PKBM | Paniai | | |
| 5 | Isu Strategis : Penyediaan infrastruktur untuk mendukung ketahanan pangan dan energi | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | |
| | Program | Dukungan | Jumlah Unit | Kabupaten | 1 Unit | 17461 |
| | Pengelolaan Ketenagalistrikan | Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Listrik | Peralatan Elektrik dan Elektronik | Jayawijaya | PLTMH | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pengadaan dan Pemasangan PLTS Tersebar</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional : Infrastruktur | | | | | |
| | KEMENTERIAN : ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | |
| | Program | Dukungan | Jumlah Unit | Kabupaten | 18 unit | 112363,4 |
| | Pengelolaan Ketenagalistrikan | Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Listrik | Peralatan Elektrik dan Elektronik | Biak Numfor | PLTS terpusat | |

B. PROVINSI PAPUA BARAT

MATRIKS ISU STRATEGIS DAN KEGIATAN STRATEGIS*

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|---|--|--|----------------------|--------------|--------------------|
| 1 | Isu Strategis : Belum adanya pemerataan terhadap akses layanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau dan berkesinambungan | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional:Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) | Jumlah Puskesmas yang mendapatkan bantuanoperasio nal kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal | Provinsi Papua Barat | 2 paket | 36575 |
| | <i>Kegiatan Strategis : Bantuan Sarana Prasarana Kesehatan (Pembangunan Puskesmas, Pustu, gudang farmasi, Puskesmas keliling, ambulans, mobil jenazah)</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional:Kesehatan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | |
| | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan | Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar | Provinsi Papua Barat | 2 paket | 7750 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|--|--|--|----------------------|--------------|--------------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Pemberian tambahan makanan pendamping dan vitamin bagi ibu hamil, bayi dan balita</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional:Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Gizi Masyarakat | Persentase Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan | Provinsi Papua Barat | 2 paket | 3210 |
| <i>Kegiatan Strategis : Pengadaan peralatan dan obat-obatan rumah sakit</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional:Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan | Jumlah sarana fasilitas kesehatan yang memenuhi sarana prasarana peralatan yang memenuhi standar | Provinsi Papua Barat | 1 kabupaten | 10000 |
| <i>Kegiatan Strategis : Pengadaan peralatan dan obat-obatan rumah sakit</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional:Kesehatan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KESEHATAN | | | | | | |
| | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak | Cakupan Pelayanan Kesehatan Anak Balita | Provinsi Papua Barat | 4 paket | 1008 |
| 2 | Isu Strategis : Belum optimalnya upaya pengurangan kemiskinan | | | | | |
| <i>Kegiatan Strategis : Pembudayaan Komunitas adat Terpencil</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional:Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : SOSIAL | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur | Provinsi Papua Barat | 39 KK | 2475 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|--|--|-------------------------------|--------------|--------------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Pembverdayaan Komunitas adat Terpencil</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional:Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : SOSIAL | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur | Kabupaten Teluk Bintuni | 60 | 3309 |
| <i>Kegiatan Strategis : Pembverdayaan Komunitas adat Terpencil</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional:Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : SOSIAL | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur | Kabupaten Teluk Wondana | 60 | 3000 |
| <i>Kegiatan Strategis : Pembverdayaan Komunitas adat Terpencil</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional:Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : SOSIAL | | | | | | |
| | Prog.Pember- dayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan | Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) | Tersedianya Permukiman dan Infrastruktur | Kabupaten Maybrat | 64 | 3438 |
| <i>Kegiatan Strategis : Pemberian bantuan bagi koperasi perdesaan dan perkotaan</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional:Penanggulangan Kemiskinan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | |
| | Program Pemberdayaan Koperasi dan UMKM | Peningkatan dan Perluasan Akses Permodalan Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah | Tersalurnya Bantuan Dana Bagi Koperasi Perdesaan dan Perkotaan | Provinsi Papua Barat | 15 Koperasi | 750 |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|---|---|---|----------------------|----------------------|--------------|-------------------------|
| 3 | Isu Strategis : Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional:Pendidikan | | | | | |
| KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| Program Pendidikan Dasar | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP | Persentase SMP yang memiliki lab. IPA | Kab. Sorong | | | Ditentukan Rakor Teknis |
| 4 | Isu Strategis : Terbatasnya Infrastruktur Dasar Pembangunan, Terutama Akses Transportasi di Kawasan Terisolir di Papua Barat | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Bandara Deo Sorong</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional:Infrastruktur | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Kota Sorong | Pembangunan terminal | 20000 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Rehabilitasi gedung sekolah pendidikan dasar</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional:Pendidikan | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | | | | | | |
| Program Pendidikan Menengah | Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan SMK | SMK memiliki sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi standar sarana dan prasarana SMK | Provinsi Papua Barat | 2 paket | 340 | |
| Program Pendidikan Dasar | Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SMP | APM SMP/SMPLB/PA KET B | Provinsi Papua Barat | 19 ruang | 1175 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|--|---|--|------------------------|--|--------------|--------------------|
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Bandara Udara Rendani Manokwari</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional:Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Kabupaten Manokwari | Pelapisan/ perkerasan R/W | 23500 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Peningkatan Bandara Udara Torea</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional:Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Bandar Udara | Jumlah Bandar Udara yang Dikembangkan, Direhabilitasi | Papua Barat | Perpanjangan landas Pacu | 40000,00 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan dan Pengerukan Pelabuhan laut Roswar</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional:Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN : PERHUBUNGAN | | | | | | |
| Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pelabuhan dan Pengerukan | Pembangunan Pelabuhan Laut | Jumlah lokasi pelabuhan | Papua Barat | Pembangunan Dermaga dan Pengerukan | 40000,00 | |
| <i>Kegiatan Strategis : Pembangunan Jembatan Arar 2</i> | | | | | | |
| Prioritas Nasional:Infrastruktur | | | | | | |
| KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM | | | | | | |
| Penyelenggaraan Jalan | Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional | Jumlah jembatan yang dibangun (M) | Kab. Sorong | 400 | 40000,00 | |

| No | Program | Kegiatan | Indikator Sasaran | Lokasi | Target Fisik | Dana (Rp. Juta) |
|----|--|---|--|----------------------|--------------|--------------------|
| 5 | Isu Strategis : Rendahnya Kegiatan Perekonomian Wilayah dan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan | | | | | |
| | <i>Kegiatan Strategis : Pengembangan Infrastruktur kelautan dan perikanan (sarana dan prasarana)</i> | | | | | |
| | Prioritas Nasional:Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| | Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pembinaan dan Pengembangan Kapal Perikanan, Alat Penangkap Ikan, dan Pengawasan Kapal Perikanan | Jumlah alat penangkap ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang memenuhi standar (unit) | Provinsi Papua Barat | 10 | 6000,00 |
| | Kegiatan Strategis : Pengembangan Pelabuhan Perikanan PP Pantai Sorong | | | | | |
| | Prioritas Nasional:Ketahanan Pangan | | | | | |
| | KEMENTERIAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | |
| | Program Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap | Pengembangan Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan | Jumlah lanjutan pembangunan pelabuhan perikanan UPT daerah untuk mendukung minapolitan, termasuk di lingkaran luar dan daerah perbatasan yang potensial (lokasi) | Papua Barat | 1 | 45.000,0 0 |

MATRIKS PROYEK MP3EI TAHUN 2014

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|-------------------|-----------|-------------------------------|---------------------|---|------------------------------------|-------|---------|----------------------------|------------------------|
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Kepulauan Maluku | Penanganan Jalan Masohi - Haya - Laimu (136.313 km) | 94 | 2011 | 2014 | Kementerian PU | 265,00 |
| MALUKU - PAPUA | BANDARA | APBN | Maluku Utara | Rehabilitasi Bandara termasuk Perpanjangan Runway Bandara Udara Morotai. | 78 | 2011 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 250,00 |
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Maluku Utara | Penanganan Daeo - Bere- Bere (55.7 km) | 396 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 238,2 |
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Maluku Utara | Penanganan Jalan Daruba - Wayabula 52 km | 158 | 2011 | 2025 | Kementerian PU | 222,8 |
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Papua | Penanganan Jalan Merauke - Okaba (Buraka) - Wanam - Bian - Wogikel (152 Km) | 1971 | 2011 | 2020 | Kementerian PU | 194,00 |
| MALUKU - PAPUA | PELABUHAN | APBN | Papua | Pelabuhan Merauke | 9000 | 2012 | 2015 | Kementerian Perhubungan | 172,50 |
| MALUKU - PAPUA | BANDARA | APBN | Papua | Penanganan dan perluasan Bandara Sentani | 565 | 2011 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 134,00 |
| MALUKU - PAPUA | BANDARA | APBN | Papua | Perpanjangan Bandara Mopah Merauke | 128 | 2011 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 78,00 |
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Papua | Penanganan Jalan Timika - Potowaiburu - Enarotali - Nabire (427,7 Km) | 3171 | 2011 | 2020 | Kementerian PU | 72,50 |
| MALUKU - PAPUA | PELABUHAN | APBN | Papua | Pembangunan Dermaga Terminal Penumpang dan Peti Kemas Pelabuhan Depapre | 245 | 2011 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 4,50 |
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Papua | Penanganan Jalan Merauke - Muting - Waropko (511,4 km) | 2198 | 2011 | 2020 | Kementerian PU | 271,00 |
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Papua | Penanganan Jalan Depapre - Bonggrang dan Ringroad Jayapura (137,1 Km) | 1278 | 2011 | 2015 | Kementerian PU | 92,26 |

| KORIDOR | SEKTOR | PELAKSANA (SUMBER DANA) | PROVINSI | PROJECT | NILAI INVESTASI TOTAL (M) | MULAI | SELESAI | PELAKSANA UTAMA | KEBUTUHAN APBN 2014 |
|----------------|-----------|-------------------------|-------------|--|---------------------------|-------|---------|-------------------------|---------------------|
| MALUKU - PAPUA | PELABUHAN | APBN | Papua | Pembangunan Pelabuhan Bade | 237 | 2011 | 2014 | Kementerian Perhubungan | 74,00 |
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Papua | Persiapan Jalan Enarotali - Tiom (240km) | 1680 | 2014 | 2017 | Kementerian PU | 42,00 |
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Papua Barat | Penanganan jalan Manokwari - Kebar - Sorong (606,2 km) | 4575 | 2011 | 2020 | Kementerian PU | 265,00 |
| MALUKU - PAPUA | BANDARA | APBN | Papua Barat | Bandara Rendani | 189 | 2013 | 2015 | Kementerian Perhubungan | 250,00 |
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Papua Barat | Penanganan Jalan Maruni - Bintuni (217.149 Km) | 1498 | 2011 | 2017 | Kementerian PU | 238,2 |
| MALUKU - PAPUA | JALAN | APBN | Papua Barat | Penanganan Jalan Fakfak - Kokas - Bomberai (139,9 km) | 732 | 2011 | 2020 | Kementerian PU | 222,8 |

8.7 Sinergi antara Pusat-Daerah dan Antar Daerah

Untuk melaksanakan kebijakan, rencana, program dan kegiatan-kegiatan prioritas dalam Buku III RKP ini diperlukan beberapa kaidah pelaksanaan yang didasarkan pada hal-hal sebagai berikut :

Sinergi pusat-daerah dan antardaerah dilakukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan, dan pengembangan wilayah.

8.7.1 Sinergi dalam Kerangka Perencanaan Kebijakan

Dalam tahap perencanaan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat bersinergi dalam: (i) penyusunan dokumen perencanaan pembangunan (RPJP dan RPJPD, RPJM dan RPJMD, RKP dan RKPd); (ii) penetapan target pembangunan; (iii) standarisasi indikator pembangunan yang digunakan oleh kementerian/lembaga dan satuan perangkat kerja daerah; (iv) pengembangan basis data dan sistem informasi pembangunan yang lengkap dan akurat; (v) penyusunan kebijakan perijinan investasi di daerah; dan (vi) penentuan kebijakan pengendalian tingkat inflasi.

Sinergi dalam perencanaan kebijakan pembangunan pusat dan daerah baik lima tahunan maupun tahunan akan dilaksanakan dengan mengoptimalkan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan pemerintahan (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,

8.7.2 Sinergi dalam Kerangka Regulasi

provinsi dan nasional) sehingga terwujud sinkronisasi antara kebijakan, program dan kegiatan antarsektor, antarwaktu, antarwilayah, dan antara pusat dan daerah. Selain itu, Musrenbang juga diharapkan dapat lebih mendorong terciptanya proses partisipatif semua pelaku pembangunan dan berkembangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Sinergi dalam kerangka regulasi diarahkan untuk mendorong harmonisasi peraturan perundang-undangan baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri sehingga dapat mendukung pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun berjalan dalam koridor RPJMN 2010-2014. Selain itu, sinergi juga diarahkan untuk meningkatkan kesepahaman, kesepakatan dan ketaatan dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Setiap kebijakan dan peraturan perundang-undangan di daerah baik Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati dan Peraturan Walikota harus harmonis dan sinkron dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan nasional baik Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Peraturan Menteri. Sinergi pusat dan daerah antara lain dilakukan dengan: (i) konsultasi dan koordinasi secara lebih efektif dalam penyusunan peraturan perundangan; (ii) pembentukan forum koordinasi lintas instansi dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan: baik penyusunan peraturan baru maupun review atas peraturan yang sudah ada; dan (iii) fasilitasi proses legislasi guna mengurangi jumlah Peraturan Daerah yang bermasalah.

8.7.3 Sinergi dalam Kerangka Anggaran

Sinergi Pusat-Daerah dilaksanakan selaras dengan upaya penataan dan penguatan kerangka perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sesuai kebijakan RPJMN 2010-2014.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pemanfaatan DAU langkah yang akan dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah antara lain adalah untuk: (i) mewujudkan seutuhnya fungsi DAU sebagai block grant belanja publik pemda menurut kewenangan; (ii) menyusun formulasi DAU secara komprehensif yang mampu menggambarkan seluruh fungsi daerah dalam menunjang keutuhan nasional, serta memberikan perhatian khusus kepada daerah-daerah dengan beban nasional seperti pusat prasarana vital dan strategis, pusat investasi, kawasan hutan lindung dan wilayah perbatasan yang belum diakomodasi dalam aspek legal.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan DAK, langkah yang akan ditempuh Pusat-Daerah antara lain adalah: (i) sinergi perencanaan DAK antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah agar pengelolaan dan pemanfaatan DAK benar-benar mendorong peningkatan pelayanan publik di daerah dan mendukung pencapaian prioritas nasional; (ii) memberi kewenangan kepada Gubernur dalam pelaksanaan DAK sehingga masuk dalam APBD, serta menjamin efektivitas program dan kelancaran pelaporan; dan (iii) sinkronisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang dikeluarkan kementerian/lembaga agar sesuai dengan kebutuhan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan DBH dan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemda, langkah yang akan ditempuh Pemerintah Pusat bersama pemerintah daerah adalah: (i) menjamin keterbukaan informasi dan data dari pusat kepada daerah; dan (ii) mempercepat penyaluran DBH sumber daya alam.

8.7.4 Sinergi dalam Kerangka Kelembagaan dan Aparatur Daerah

Sinergi Pusat-Daerah dalam bidang pemerintahan akan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kelembagaan pemerintahan daerah dan meningkatkan kapasitas aparatur daerah. Sinergi Pemerintah Pusat-Daerah yang akan dilakukan dalam tahun mendatang adalah: (i) menata dan menyempurnakan pengaturan kewenangan antartingkat pemerintahan sebagai dasar penetapan kinerja dan alokasi anggaran dengan penerapan anggaran berbasis kinerja secara bertanggung jawab; (ii) mengendalikan pemekaran daerah dan memantapkan pengelolaan daerah otonom dengan tetap mengutamakan harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah dan rentang kendali manajemen yang ideal; serta (iii) meningkatkan kapasitas aparatur yang mampu menjembatani kepentingan nasional dan daerah serta kerjasama antardaerah.

8.7.5 Sinergi dalam Kerangka Pengembangan Wilayah

Dalam mempercepat pengembangan wilayah akan dilakukan upaya untuk mendorong penataan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang dengan prinsip harmonisasi kepentingan nasional dan kebutuhan daerah serta keserasian antardaerah. Langkah yang akan ditempuh oleh Pemerintah dan pemerintah daerah adalah: (i) sinkronisasi kebijakan dalam penggunaan lahan dan tata ruang untuk menghindari tumpang tindih kebijakan; (ii) memperkuat struktur ruang serta pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk mitigasi bencana alam; (iii) meningkatkan perhatian pemda pada tata

ruang; (iv) mencegah ego kedaerahan untuk menghindari pembangunan prasarana dan sarana tanpa perhitungan harmonisasi wilayah pelayanan bersama-sama dengan kabupaten/kota tetangga; (v) meningkatkan pengaturan bersama alih fungsi lahan melalui padu serasi dan penyelesaian segera aspek pemanfaatan ruang khususnya dengan sektor kehutanan; (vi) mempercepat penyusunan peraturan pendukung pelaksanaan rencana tata ruang wilayah yang mencakup sistem tataguna lahan dan sistem transportasi; (vii) mempercepat penyusunan rencana tataruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; (viii) membangun kesepakatan dalam penentuan lokasi wilayah-wilayah cepat tumbuh terutama Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

8.8 Penguatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Berdasarkan Pasal 37 dan 38 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diamanatkan bahwa selain sebagai kepala daerah otonom, Gubernur juga menjadi wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Dalam perkembangannya, implementasi berbagai peraturan perundangan tersebut di atas masih belum berjalan efektif dan belum konsisten dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait. Koordinasi antara Kementerian/ Lembaga dengan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat pun tidak berjalan optimal. Sinergitas antara pusat dan daerah dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah juga belum berjalan dengan semestinya. Koordinasi perencanaan pembangunan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah belum terwujud dengan baik sehingga memerlukan upaya khusus untuk menjawab isu-isu penting ini. Langkah yang diambil antara lain melakukan revisi peraturan pemerintah terkait dan menerbitkan surat edaran bersama antara Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.

8.8.1 Urgensi Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat

Dalam era desentralisasi dan otonomi daerah, urusan pemerintah pusat telah banyak dilimpahkan ke pemerintahan daerah. Hal ini dan format lengkap pembagian urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan telah diatur melalui penetapan Peraturan Pemerintah (PP) 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta besarnya alokasi APBN sebesar 35% untuk dana transfer ke daerah. Pemerintah Pusat melalui Rencana Kerja Pemerintah tahun 2014 mengamanatkan

prioritas-prioritas nasional yang harus dicapai dan Gubernur diharapkan dapat memastikan pelaksanaan dan pencapaian prioritas nasional tersebut di daerah. Dengan demikian, peran Gubernur adalah menjadi sangat penting untuk mencapai keberhasilan bagi pembangunan nasional di daerah mengingat besarnya porsi kewenangan dan anggaran yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang merupakan salah satu instrumen pembangunan untuk mencapai sasaran prioritas nasional di daerah yang dilaksanakan beberapa Kementerian/Lembaga pada tataran pelaksanaannya belum seluruhnya berjalan optimal dan belum sesuai dengan yang dibutuhkan daerah.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang menitikberatkan pada tingkat kabupaten/kota, telah memberikan kewenangan kepada pemerintahan kabupaten/kota untuk mengatur dan mengelola daerahnya masing-masing. Berdasarkan kewenangan tersebut, pemerintah kabupaten/kota seperti berlomba membangun dan memberikan pelayanan publik didaerahnya masing-masing. Terkadang semangat tersebut berlebihan dan justru menimbulkan masih kontraproduktif bagi perkembangan wilayah kabupaten/kota tetangganya, sehingga muncul permasalahan kesenjangan pembangunan antar daerah didalam satu wilayah dan antar wilayah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah menjadi diperlukan terutama dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan sekaligus monitoring serta evaluasi pada kegiatan-kegiatan yang berasal dari kementerian/lembaga dan kegiatan kabupaten/kota namun bersifat lintas kabupaten/kota. Peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah sangat diperlukan saat ini terutama untuk dapat meningkatkan sinergi Pusat dan Daerah.

8.8.2 Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) komponen utama, yaitu regulasi, instrumen pengendali, serta peran, tugas dan fungsi.

A. Regulasi

Selain berbagai kebijakan dan regulasi yang telah disinggung sebelumnya, untuk lebih menguatkan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, dan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri No 0442/M.PPN/11/2010; SE-696/MK 2010; 120/4693/SJ tentang Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga di Daerah serta Peningkatan Peran Aktif Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Tugas Gubernur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi meliputi:

1. Melakukan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota serta antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi;
2. Menyelenggarakan kegiatan pemerintahan secara umum seperti menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah, menjaga dan mengamalkan ideologi pancasila serta kehidupan demokrasi dan stabilitas politik,
3. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Penekanan pada koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi RPJPD, RPJMD, RKPD kabupaten dan kota agar mengacu kepada RPJPD, RPJMD dan RKPD provinsi serta RPJPN, RPJMN dan RKP dan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
5. Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis serta kepada bupati/walikota yang tidak hadir tanpa

alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan koordinasi dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis serta hak gubernur untuk tidak mengalokasikan dana tugas pembantuan kepada kabupaten/kota bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.

Regulasi penting lainnya yang terkait dengan penguatan peran Gubernur adalah Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan dan Menteri Dalam. SEB tiga menteri ini menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan Kementerian/Lembaga yang dilakukan melalui mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, atau Urusan Bersama maka Gubernur mempunyai peran dan wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara rencana penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama dari Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan;
2. Memberitahukan kepada DPRD Provinsi pada saat pembahasan RAPBD tentang rencana penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama dari Kementerian/Lembaga di wilayah Provinsi;
3. Melaksanakan program dan kegiatan dekonstrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga terkait;
4. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama di wilayahnya; dan
5. Melaporkan hasil penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama di wilayahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

B. Instrumen Pengendali

Sebagai wakil Pemerintah Pusat, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya Gubernur dapat menggunakan sejumlah instrumen sebagai berikut:

1. Dalam proses koordinasi, pembinaan, dan pengawasan yang dilaksanakan Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi, Gubernur menjalankan fungsi koordinasi dan sinkronisasi dalam forum koordinasi

perencanaan baik bersama kementerian/ lembaga maupun pemerintah. Forum-forum yang dimaksud meliputi:

- a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov);
 - b. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) bersama Kementerian/Lembaga;
 - c. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas);
 - d. Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Pra Musrenbangnas) dalam pembahasan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - e. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Musyawarah Pimpinan Daerah).
2. Gubernur melakukan koordinasi dalam mewadahi kebutuhan daerah dengan prioritas sektoral (Kementerian/Lembaga) melalui mekanisme dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 3. Gubernur juga mendorong sinergi pusat dan daerah melalui sinkronisasi pendanaan APBN dan APBD.

C. Peran, Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provins, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provins, dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi perencanaan dan penganggaran:

- a. Melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan beberapa kementerian/lembaga terkait dengan proses pra musrenbangnas dan musrenbangnas, khususnya terkait dengan dukungan terhadap prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2010-2014;
 - b. Melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan provinsi, dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dan instansi vertikal di wilayah provinsi;
 - c. Melakukan sinkronisasi dan harmonisasi antara rencana penyelenggaraan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama dari kementerian/lembaga dengan program dan kegiatan yang didanai APBD.
 - d. Penekanan pada koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkronisasi RPJPD, RPJMD, RKPD kabupaten dan kota agar mengacu kepada RPJPD, RPJMD, dan RKPD provinsi serta RPJPN, RPJMN, dan RKP dan kebijakan pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - e. Pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis serta kepada bupati/walikota yang tidak hadir tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan koordinasi dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis serta hak gubernur untuk mengusulkan kepada Kementerian/Lembaga agar tidak mengalokasikan dana tugas pembantuan kepada kabupaten/kota bersangkutan pada tahun anggaran berikutnya.
2. Tahap pelaksanaan/implementasi:
- a. Melaksanakan program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan urusan bersama sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Lembaga terkait;
 - b. Menyelenggarakan forum koordinasi pimpinan daerah (Musyawarah Pimpinan Daerah) dalam rangka koordinasi pelaksanaan pembangunan daerah termasuk:

- I. memberi dukungan terhadap kerja sama antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - II. menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan;
 - III. menetapkan kriteria, penetapan situasi serta melakukan koordinasi terhadap ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan daerah, serta stabilitas politik;
 - IV. menjaga pengamalan ideologi Pancasila, membangun kehidupan demokrasi dan menjaga kerukunan hidup beragama.
- c. Menangani isu-isu lintas kabupaten/kota melalui koordinasi, mediasi atau fasilitasi oleh Gubernur dalam bidang:(i) penegakan peraturan perundang-undangan; (ii) batas wilayah dan isu kawasan; (iii) penanggulangan bencana; (iv) daerah otonom dan khusus; (v) kerjasama daerah; (vi) tata ruang; (vii) ketentraman dan ketertiban masyarakat; serta (viii) tugas-tugas yang diamanatkan perundang-undangan lainnya;
- d. Melakukan fasilitasi dan konsultasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, termasuk:
- I. Memberikan informasi tentang kebijakan Pemerintah dan instansi vertikal di provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi;
 - II. Melakukan penyetaraan kualitas pelayanan publik antarkabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
 - III. Melakukan fasilitasi dan konsultasi pengelolaan kepegawaian kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;
 - IV. Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang ditugaskan di wilayah provinsi;
 - V. Membangun etos kerja penyelenggaraan pemerintahan;
 - VI. Memfasilitasi Kesekretariatan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

3. Tahap pelaporan, pembinaan dan pengawasan:
 - a. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program/kegiatan dekonsentrasi yang ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
 - b. Melakukan pengendalian, pengawasan, monitoring, dan evaluasi kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan sesuai dengan PP 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. Melakukan pengawasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.
2. Dalam merencanakan program dan kegiatan yang didanai melalui anggaran kementerian/lembaga (K/L), setiap Kementerian/Lembaga wajib:
 - a. Memperhatikan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. Tidak mengalokasikan program dan kegiatan yang bukan merupakan kewenangannya.
3. Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan melalui mekanisme dekonsentrasi, tugas pembantuan atau urusan bersama, Kementerian/Lembaga wajib :
 - a. Melakukan koordinasi dengan Gubernur sebelum penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dalam rangka sinergi kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi;
 - b. Mencantumkan program dan kegiatan yang didanai melalui dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama di dalam Renja K/L dan membahasnya di dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan dalam mencapai prioritas pembangunan nasional;

- c. Mengalokasikan anggaran dengan kinerja yang jelas dan terukur dengan mempertimbangkan pencapaian prioritas pembangunan;
- d. Mencantumkan kegiatan, daerah/lokasi, dan kebutuhan anggaran dalam kerangka perhitungan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM);
- e. Memberitahukan indikasi program dan kegiatan dekonsentrasi, tugas pembantuan, atau urusan bersama kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni (setelah ditetapkan pagu sementara);
- f. Menerbitkan Peraturan Menteri/Kepala Lembaga tentang penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya minggu pertama bulan Desember (setelah ditetapkan pagu definitif); dan
- g. Mengevaluasi laporan Gubernur dan memperhatikan usulan Gubernur atas pengenaan sanksi terhadap penyelenggaraan Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama di wilayahnya.

8.9 Kaidah Sinergi Antarsektoral, AntarPusat-Daerah dan AntarDaerah

Buku III Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014 Pembangunan Berdimensi Kewilayahan merupakan penjabaran sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam Buku I RKP 2014 dalam dimensi wilayah yang telah dibagi pada 7 (tujuh) wilayah, yaitu : Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Berbagai sasaran pembangunan di tiap wilayah ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan secara nasional. Arah kebijakan dan strategi pengembangan di tiap wilayah menjadi acuan lokus bagi sektoral (Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk menetapkan kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah yang tertuang dalam Buku III RKP 2014.

Buku III RKP Tahun 2014 juga disusun dengan berpedoman pada kebijakan pemanfaatan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Pulau serta disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah. Buku III RKP Tahun 2014 menjadi pedoman bagi Kementerian/Lembaga (K/L) dalam menyusun Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun 2014

dengan memperhatikan potensi dan permasalahan wilayah serta menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 terkait aspek kewilayahan. Dengan mempertimbangkan berbagai hal tersebut, disusun kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Setiap Kementerian/Lembaga wajib melaksanakan program dan kegiatan prioritas dalam Buku III RKP tahun 2014;
2. Dalam menyusun Renja K/L dan RKA-K/L Tahun 2014, setiap Kementerian/Lembaga wajib mempertimbangkan arah kebijakan, strategi pengembangan wilayah dan lokasi kegiatan sebagaimana tertuang didalam Buku III RKP Tahun 2014;
3. Dalam menyusun RKPD Tahun 2014 wajib mempertimbangkan arah kebijakan dan strategi pengembangan wilayah sebagaimana tertuang didalam Buku III RKP Tahun 2014;
4. Arah kebijakan dan strategi pengembangan yang bersifat lintas sektor dilakukan melalui sinergi kegiatan antar/kementerian lembaga dan antar satuan kerja perangkat daerah;
5. Setiap kementerian/lembaga beserta pemerintah daerah wajib menjaga konsistensi antara Buku III RKP Tahun 2014, Renja K/L dan RKA-K/L Tahun 2014, serta RKPD Tahun 2014;
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Buku III RKP Tahun 2014, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional wajib melakukan koordinasi dan konsultasi untuk menjamin sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan prioritas oleh Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah;
7. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam Buku III RKP Tahun 2014 dilakukan melalui sinkronisasi pengelolaan dana dekonsentrasi dan tugas perbantuan, dana perimbangan dan dana otonomi khusus; serta investasi swasta yang dihasilkan melalui kesepakatan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) dan Usulan Pendanaan Pemerintah Daerah (UPPD) dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional;

8. Pelaksanaan program dan kegiatan prioritas dalam Buku III RKP Tahun 2014 dilakukan melalui sinergi kegiatan antarkementerian/lembaga, dan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai peraturan perundangan.